LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.219, 2015 KEUANGAN NEGARA. Pertanggungjawaban. Pelaksanaan. APBN. 2014. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5741).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 yang diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013, pelaksanaannya perlu dilakukan pemeriksaan dan dipertanggungjawabkan sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

www.peraturan.go.id

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 30, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 harus ditetapkan dengan UndangUndang;

d. bahwa pembahasan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah dan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 36/DPD RI/IV/2014-2015 tanggal 9 Juli 2015;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

www.peraturan.go.id

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5547);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

www.peraturan.go.id

1. Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2014;
2. Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2014;
3. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2014; dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 3

(1) Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp1.550.490.813.616.979 (satu kuadriliun lima ratus lima puluh triliun empat ratus sembilan puluh miliar delapan ratus tiga belas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang berarti 94,81 (sembilan puluh empat koma delapan satu) persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.635.378.485.045.000 (satu kuadriliun enam ratus tiga puluh lima triliun tiga ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat puluh lima ribu rupiah).

(2) Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp1.777.182.855.786.411 (satu kuadriliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh triliun seratus delapan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sebelas rupiah) yang berarti 94,69 (sembilan puluh empat koma enam sembilan) persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.876.872.758.707.000 (satu kuadriliun delapan ratus tujuh puluh enam triliun delapan ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).

(3) Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terjadi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp226.692.042.169.432 (dua ratus dua puluh enam triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar empat

www.peraturan.go.id

puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) yang berarti 93,87 (sembilan puluh tiga koma delapan tujuh) persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp241.494.273.662.000 (dua ratus empat puluh satu triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).

(4) Pembiayaan untuk menutup Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar Rp248.892.825.676.520 (dua ratus empat puluh delapan triliun delapan ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang berarti 103,06 (seratus tiga koma nol enam) persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 241.494.273.662.000 (dua ratus empat puluh satu triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).

(5) Berdasarkan Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp22.200.783.507.088 (dua puluh dua triliun dua ratus miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu delapan puluh delapan rupiah).

(6) Saldo Anggaran Lebih (SAL) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp86.136.993.583.586 (delapan puluh enam triliun seratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang berasal dari:

a. SAL sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013, yakni sebesar Rp66.594.149.777.346 (enam puluh enam triliun lima ratus sembilan

www.peraturan.go.id

puluh empat miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);

b. ditambah dengan SiLPA Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp22.200.783.507.088 (dua puluh dua triliun dua ratus miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu delapan puluh delapan rupiah);

c. ditambah selisih kas lebih Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp2.258.130.896 (dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah); dan

d. ditambah dengan koreksi dan penyesuaian atas SAL dan SiLPA sebesar minus Rp2.660.197.831.744 (dua triliun enam ratus enam puluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).

(7) Koreksi dan penyesuaian atas SAL dan SiLPA sebesar minus Rp2.660.197.831.744 (dua triliun enam ratus enam puluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d terdiri atas:

a. Koreksi saldo awal Kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebesar minus Rp6.175.091.483 (enam miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);

b. Koreksi saldo awal Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) sebesar minus Rp10.266.475.988 (sepuluh miliar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

www.peraturan.go.id

c. Penyesuaian catatan SAL sebesar Rp17.684.542.811 (tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sebelas rupiah);

d. Penyesuaian pengembalian pendapatan tahun lalu sebesar minus Rp61.260.251.519 (enam puluh satu miliar dua ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah);

e. Penyesuaian Kas Hibah Langsung sebesar minus Rp974.989.900 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

f. Penyesuaian saldo Kas KPPN sebesar Rp2.000.001 (dua juta satu rupiah);

g. Selisih kurs unrealized sebesar minus Rp2.599.207.565.511 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus sebelas rupiah);

h. Koreksi pembulatan sebesar minus Rp155 (seratus lima puluh lima rupiah).

(8) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam yang dilaporkan berdasarkan asas neto.

Pasal 4

(1) Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2014 memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a. jumlah Aset sebesar Rp3.910.922.331.111.792 (tiga kuadriliun sembilan ratus sepuluh triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);

www.peraturan.go.id

b. jumlah Kewajiban sebesar Rp2.898.383.597.986.114 (dua kuadriliun delapan ratus sembilan puluh delapan triliun tiga ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus empat belas rupiah); dan

c. jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp1.012.538.733.125.678 (satu kuadriliun dua belas triliun lima ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).

(2) Aset pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2014 telah mencakup pelaporan rekening-rekening Kementerian Negara/ Lembaga.

(3) Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan keandalan penyajian aset, Pemerintah melakukan penertiban aset yang meliputi inventarisasi, penilaian, pemanfaatan, dan legalitas aset tetap pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 5

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2014 memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a. jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar minus Rp80.075.491.013.141 (delapan puluh triliun tujuh puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga belas ribu seratus empat puluh satu rupiah);

b. jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar minus Rp146.616.551.156.291 (seratus empat puluh enam triliun enam ratus enam belas miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

www.peraturan.go.id

c. jumlah arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp248.892.825.676.520 (dua ratus empat puluh delapan triliun delapan ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah); dan

d. jumlah arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar Rp3.353.789.742.647 (tiga triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Pasal 7

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilampiri juga Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Badan Layanan Umum, dan Badan Lainnya, dan dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja secara akrual.

Pasal 8

SAL dapat digunakan dalam hal realisasi anggaran pengeluaran melebihi realisasi anggaran penerimaan tahun anggaran berjalan, dan/atau terdapat pengembalian pendapatan tahun-tahun yang lalu.

Pasal 9

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, telah diperiksa oleh BPK dengan opini Wajar Dengan Pengecualian.

www.peraturan.go.id

Pasal 10

(1) Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan secara efektif dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

(2) Pemerintah melakukan perbaikan atas kelemahan dalam sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan negara untuk tujuan meningkatkan akurasi, keandalan dan akuntabilitas pelaporan keuangan.

(3) Pemerintah menerapkan sistem pemberian penghargaan dan sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan penilaian kinerja atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.

(4) Pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk penambahan atau pengurangan alokasi anggaran pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

(5) DPR dapat meminta BPK untuk menyampaikan laporan monitoring tindak lanjut Pemerintah dalam rangka pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN
UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR..12...TAHUN 2015
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
APBN TA 2014

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014

(Audited)

www.peraturan.go.id

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2014, Pemerintah menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2014 dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Lainnya.

LKPP Tahun 2014 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II (PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual).

LKPP Tahun 2014 ini disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

1. LAPORAN REALISASI APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN-P TA 2014 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2014 - 31 Desember 2014.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2014 adalah sebesar Rp1.550,49 triliun atau 94,81 persen dari APBN-P. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2014 adalah sebesar Rp1.777,18 triliun atau 94,69 persen dari APBN-P. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1,203,58 triliun atau 94,00 persen dari APBN-P, dan realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp573,70 triliun atau 96,18 persen dari APBN-P. Selain itu, pada TA 2014 terdapat Suspen Belanja sebesar minus Rp97,39 Miliar.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terjadi Defisit Anggaran TA 2014 sebesar Rp226,69 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto TA 2014 adalah sebesar Rp248,89 triliun atau 103,06 persen dari APBN-P, sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp22,20 triliun.

Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian	TA 2014 (*Audited*)			TA 2013 (*Audited*)
	Anggaran (UU No. 12/2014)	Realisasi	% Realisasi thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	1.635,38	1.550,49	94,81	1.438,89
Belanja Negara	1.876,87	1.777,18	94,69	1.650,56
Belanja Pemerintah Pusat	1.280,37	1.203,58	94,00	1.137,16
Transfer ke Daerah	596,50	573,70	96,18	513,26

www.peraturan.go.id

Suspen Belanja Negara		(0,097)		0,140
Surplus (Defisit) Anggaran	(241,49)	(226,69)	93,87	(211,67)
Pembiayaan Neto	241,49	248,89	103,06	237,39
SiLPA (SiKPA)		22,20		25,72

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2014.

Jumlah Aset per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp3.910,92 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp262,98 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp1.309,92 triliun, Aset Tetap sebesar Rp1.714,59 triliun, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp2,83 triliun, dan Aset Lainnya sebesar Rp620,61 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp2.898,38 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp352,31 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp2.546,07 triliun.

Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana Neto per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.012,54 triliun yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar minus Rp85,02 triliun dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp1.097,56 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian	31 Desember 2014 (*Audited*)	31 Desember 2013 (*Audited*)
Aset	**3.910,92**	**3.567,59**
Aset Lancar	262,98	252,74
Investasi Jangka Panjang	1.309,92	1.183,17
Aset Tetap	1.714,59	1.709,86
Piutang Jangka Panjang	2,83	2,90
Aset Lainnya	620,61	418,92
Kewajiban	**2.898,38**	**2.652,10**
Kewajiban Jangka Pendek	352,31	368,09
Kewajiban Jangka Panjang	2.546,07	2.284,01
Ekuitas Dana Neto	**1.012,54**	**915,49**
Ekuitas Dana Lancar	(85,02)	(113,36)
Ekuitas Dana Investasi	1.097,56	1.028,85

www.peraturan.go.id

3. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2014 serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2014.

Saldo Kas Bendahara Umum Negara (BUN), Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kas Badan Layanan Umum (BLU), dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan per 31 Desember 2013 adalah sebesar RP67,70 riliun, sedangkan pada awal tahun 2014 terjadi koreksi sebesar minus Rp16,44 miliar, sehingga saldo awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan tahun 2014 menjadi Rp67,69 triliun.

Selama TA 2014 terjadi penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp80,07 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp146,62 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp248,89 triliun, kenaikan kas dari aktivitas non anggaran sebesar Rp3,35 triliun dan penurunan karena penyesuaian pembukuan sebesar Rp3,72 triliun sehingga mengakibatkan kenaikan kas sebesar Rp21,83 triliun. Dengan demikian, saldo Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan per 31 Desember 2014 menjadi Rp89,52 triliun.

Selain kas di atas, terdapat Rekening Pemerintah Lainnya sebesar Rp4,65 triliun, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,32 triliun, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,15 triliun, Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp5,40 triliun, dan Kas pada BLU yang Belum Disahkan sebesar Rp0,07 triliun. Selama tahun 2014 terdapat deposito (Investasi Jangka Pendek) yang berasal dari Kas pada BLU yang telah disahkan sebesar Rp4,38 triliun, sehingga saldo akhir Kas dan Bank Pemerintah Pusat sebesar Rp95,73 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas TA 2014 dan TA 2013 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian	TA 2014 (*Audited*)	TA 2013 (*Audited*)
Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung	**67,70**	**71,58**
Koreksi Saldo Awal	(0,01)	(0,31)
Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung setelah Koreksi	**67,69**	**71,27**
Kenaikan (Penurunan) Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(80,07)	(31,32)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(146,62)	(180,36)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	248,89	237,39
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	3,35	0,11
Pengunaan SAL	-	(30)
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas	**25,55**	**(4,18)**
Penyesuaian Pembukuan	(3,72)	0,61
Kenaikan (Penurunan) Kas	**21,83**	**(3,57)**
Saldo Akhir Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung	**89,52**	**67,70**

www.peraturan.go.id

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dalam penyajian Laporan Realisasi APBN, pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.

www.peraturan.go.id

HALAMAN OPINI

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014

01 Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Laporan Arus Kas (LAK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

02 Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf 05 s.d. 08 berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, penilaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penilaian atas system pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan opini.

03 Dalam Laporan BPK Nomor 69a/LHP/XV/05/2014 tanggal 28 Mei 2014, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2013 karena: (1) piutang *over lifting* sebesar Rp3,81 triliun tidak sepenuhnya menggambarkan hak negara yang akan diterima pada periode berikutnya; (2) piutang penjualan minyak dan gas bumi (migas) bagian negara sebesar Rp2,46 triliun mengandung ketidakpastian; (3) Pemerintah belum selesai menelusuri Aset Kredit Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp3,06 triliun; (4) Pemerintah belum mengakui piutang atas saldo Dana Belanja Pensiun sebesar Rp302,06 miliar yang belum disetorkan kembali karena lebih dari 6 bulan berturut-turut tidak diambil oleh penerima pensiun; (5) Pemerintah belum menyelesaikan permasalahan Suspen Belanja Negara yaitu selisih lebih pengakuan belanja oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dengan Kementerian/Lembaga (KL) sebesar Rp140,40 miliar; (6) Pemerintah tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai atas pencatatan fisik kas yang merupakan bagian fisik Saldo Anggaran Lebih (SAL) antara lain terkait dengan permasalahan selisih dan ketidakkonsistenan pencatatan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Hibah Langsung KL serta selisih kiriman uang.

04 Pemerintah telah menindaklanjuti masalah tersebut dengan melakukan upaya perbaikan yaitu: (1) mengungkapkan secara memadai terkait piutang *over lifting* yang tidak sepenuhnya menggambarkan hak negara dalam LKPP Tahun 2014; (2) melakukan upaya penagihan, verifikasi dan koreksi untuk menghapus pencatatan piutang yang masih mengandung ketidakpastian; (3) melakukan pemetaan dan penelusuran keberadaan Aset Kredit Eks BPPN; (4) melakukan

www.peraturan.go.id

verifikasi kepada pensiunan atas saldo uang pensiun yang masih menjadi hak pensiunan sebagai dasar pengakuan piutang; (5) melakukan beberapa langkah mitigasi untuk memperkecil selisih pengakuan belanja antara BUN dengan KL dalam rekonsiliasi pencatatan dengan melakukan koreksi di tingkat pusat, membuat aplikasi koreksi dan membuat reklasifikasi pengembalian belanja yang tidak diakui KL menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BUN; dan (6) menyusun mekanisme yang dapat menjamin validitas dan menjelaskan perbedaan catatan dan fisik SAL. Tindak lanjut pemerintah tersebut belum sepenuhnya efektif untuk menyelesaikan permasalahan terkait suspen serta selisih catatan dan fisik SAL sehingga permasalahan tersebut masih terjadi pada Pemeriksaan LKPP Tahun 2014.

05 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.30 atas laporan keuangan, Pemerintah mengungkapkan saldo Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp286,08 triliun dan Rp221,74 triliun. Pada Tahun 2014 terdapat pencatatan mutasi Aset KKKS senilai Rp2,78 triliun yang tidak dapat dijelaskan. Kondisi tersebut terjadi karena pencatatan dan pelaporan Aset KKKS belum didukung oleh sistem pengendalian yang memadai yang dapat menjamin keakuratan dan kelengkapa transaksi. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk menilai kemungkinan dampak salah saji atas pencatatan mutasi Aset KKKS yang tidak dapat dijelaskan tersebut.

06 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.34 atas laporan keuangan Pemerintah mengungkapkan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp37,98 triliun dan Rp55,38 triliun. Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 tersebut di antaranya merupakan Utang kepada Pihak Ketiga yang berada di KL sebesar Rp17,49 triliun. Terdapat permasalahan Utang kepada Pihak Ketiga di tiga KL sebesar Rp1,21 triliun yang tidak dapat ditelusuri dan tidak didukung dokumen yang memadai, yaitu: (1) Utang kepada Pihak Ketiga terkait pekerjaan jasa penyediaan layanan Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* pada Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1,12 triliun tidak dapat direkonsiliasi dengan nilai prestasi kerjanya dan tidak didukung dengan parameter perhitungan yang jelas atas nilai prestasi kerja penyedia jasa; (2) Utang kepada Pihak Ketiga pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebesar Rp59,12 miliar tanpa dokumen pendukung yang lengkap; dan (3) Utang kepada Pihak Ketiga berupa jaminan pelaksanaan pembangunan sebesar Rp23,33 miliar pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), yang dananya tersimpan pada rekening bank atas nama BP Batam, tidak dapat dipastikan nilai yang seharusnya masih tercatat sebagai utang. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan mengenai nilai yang mencerminkan kewajiban Pemerintah kepada pihak ketiga tersebut.

07 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.48 atas laporan keuangan, Pemerintah mengungkapkan SAL setelah penyesuaian per 31 Desember 2014 sebesar Rp86,13 triliun. SAL per 31 Desember 2014 tersebut terdiri dari SAL Awal Setelah Penyesuaian sebesar Rp66,59 triliun dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) setelah penyesuaian sebesar Rp19,53

www.peraturan.go.id

triliun. Nilai Catatan SAL per 31 Desember 2014 tersebut sama dengan nilai fisik SAL, namun terdapat permasalahan pada transaksi dan/atau saldo yang membentuk SAL sehingga penyajian catatan dan fisik SAL tersebut tidak akurat, yaitu: (1) Pemerintah belum memiliki metode perhitungan SAL yang menjamin saling uji antara catatan dan fisik SAL dilaksanakan secara menyeluruh dan konsisten; (2) proses rekonsiliasi antara BUN dan KL atas saldo akun yang berpengaruh terhadap catatan dan fisik SAL tidak efektif sehingga masih ada suspen belanja karena KL mencatat belanja lebih besar senilai Rp654,75 miliar dan suspen belanja karena BUN mencatat belanja lebih besar senilai Rp557,36 miliar, serta masih ada perbedaan saldo Kas Hibah Langsung KL sebesar Rp110,20 miliar, Kas pada BLU sebesar Rp69,17 miliar, dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2,72 miliar antara LKPP yang disusun berdasarkan konsolidasi data KL dengan LKBUN yang disusun berdasarkan konsolidasi data Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).; (3) usulan koreksi dari Pemerintah sebesar Rp2,40 triliun atas LKPP Tahun 2014 *Unaudited* yang membentuk catatan dan fisik SAL pada LKPP Tahun 2014 *Audited* tidak didukung dengan dokumen dan penjelasan tertulis yang mendasari perubahan; (4) saldo Kas Dalam Transito yang menjadi bagian dari fisik SAL belum dapat diyakini kewajarannya karena adanya transaksi kiriman uang senilai Rp3,32 triliun yang tidak dapat ditelusuri; (5) terdapat penyesuaian catatan SAL sebesar Rp7,38 miliar yang tidak didukung dengan dokumen sumber; (6) catatan Kas di beberapa KPPN menunjukkan selisih lebih senilai Rp4,77 miliar dan selisih kurang Rp3,35 miliar dibandingkan dengan saldo rekening koran yang tidak dapat dijelaskan; dan (7) retur belanja yang diterima kembali di Kas Negara dan dicatat sebagai Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp404,62 miliar tidak memiliki daftar rincian. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk menilai kemungkinan dampak permasalahan-permasalahan tersebut terhadap salah saji SAL.

08 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.34 atas laporan keuangan, Pemerintah mengungkapkan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp37,98 triliun dan Rp55,38 triliun. Selain itu, pada Catatan C.3 angka 12 Pemerintah mengungkapkan adanya Kewajiban Kontinjensi terkait tuntutan hukum kepada Pemerintah berupa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada dua KL sebesar Rp171,75 miliar. Untuk menyelesaikan kewajiban yang timbul sehubungan dengan putusan pengadilan yang *inkracht,* UU APBN-P Tahun 2014 memperbolehkan pergeseran anggaran belanja KL. Berdasarkan data Nota Keuangan APBN-P Tahun 2015, terdapat putusan pengadilan yang *inkracht* berupa pembayaran ganti rugi minimal senilai Rp1,66 triliun dan USD216.76 juta, serta penyerahan aset tanah seluas 4,84 juta m2 dan bangunan. Hasil pengumpulan data dari KL menunjukkan adanya putusan pengadilan yang *inkracht* atas 45 perkara pada delapan KL berupa pembayaran ganti rugi sebesar Rp499,79 miliar dan penyerahan aset tanah seluas 113,60 ribu m2. Namun, putusan pengadilan yang *inkracht* tersebut belum seluruhnya dicatat sebagai kewajiban atau diungkapkan sebagai Kewajiban Kontinjensi dalam LKPP Tahun 2014. Hal tersebut terjadi karena Pemerintah belum memiliki mekanisme pengelolaan dan pelaporan tuntutan hukum sehingga belum jelas unit kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan administrasi dan validasi atas tuntutan hukum yang telah *inkracht* untuk dicatat/diungkap sebagai kewajiban. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan mengenai nilai yang mencerminkan kewajiban Pemerintah.

www.peraturan.go.id

09 Menurut opini BPK, kecuali dampak penyesuaian, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika Pemerintah menyelesaikan permasalahan mengenai pencatatan Aset KKKS, Utang kepada Pihak Ketiga, permasalahan catatan dan fisik SAL, serta kewajiban Pemerintah yang timbul dari tuntutan hukum, laporan keuangan yang disebut dalam paragraf pertama di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Pusat per 31 Desember 2014 dan 2013, realisasi APBN, arus kas, dan CaLK untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

10 Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. LHP atas SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 74b/LHP/XV/05/2015 tanggal 25 Mei 2015 dan Nomor 74c/LHP/XV/05/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

INDEKS ISI

RINGKASAN v
HALAMAN OPINI x
INDEKS ISI xv
INDEKS TABEL xvi
INDEKS GRAFIK xviii
INDEKS LAMPIRAN xx
INDEKS SINGKATAN xxii
INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN xxvii
I. LAPORAN REALISASI APBN 1
II. NERACA 5
III. LAPORAN ARUS KAS 9
IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 12
A. PENJELASAN UMUM 13
A.1. DASAR HUKUM 14
A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO 15
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 36
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI 41
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN 60
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN 60
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN 61
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA 89
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 101
C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM 101
C.2. PENJELASAN PER POS NERACA 102
C.3. CATATAN PENTING LAINNYA 189
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS 211
D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS 211
D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS 215
DAFTAR LAMPIRAN

www.peraturan.go.id

INDEKS TABEL

1.	Perbandingan Klasifikasi PDB seri 2000 dan seri 2010	18
2.	Perbandingan Perkembangan PDB Seri 2000 dan Seri 2010	19
3.	Perkembangan CAR, LDR, dan NPL Bulanan 2014	24
4.	Ringkasan Indikator Makro Tahun 2014	26
5.	Ringkasan Realisasi Anggaran 2013, APBN dan APBNP 2014	28
6.	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi	68
7.	Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Pajak	109
8.	Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Bea dan Cukai	111
9.	Posisi Utang Luar Negeri, SBN, dan *Promissory Notes*	180
10.	Posisi Utang Luar Negeri Menurut Valuta Asing	181
11.	Saldo Anggaran Lebih TA 2014 dan TA 2013	182
12.	Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2014 dan 2013	189

TABEL LAMPIRAN

1.	SBN Neto Tahun 2014	688
2.	Seri SPN yang Diterbitkan Tahun 2014	690
3.	Daftar Pelunasan SPN Tahun 2014	691
4.	Realisasi Penerbitan SUN Valas s.d 31 Desember 2014	692
5.	Realisasi Pelaksanaan Debt Switching Tahun 2014	693
6.	Rincian Realisasi Pelaksanaan Debt Switching Tahun 2014	693
7.	Transaksi BuybackTahun 2014	696
8.	Daftar Penerbitan SBSN Tahun 2014	698
9.	Outstanding SBN seri Fixed Rated (FR) per 31 Desember 2014	699
10.	Data Outstanding ORI per 31 Desember 2014	701
11.	Data Outstanding SBN Seri Variable Rate (VR) per 31 Desember 2014	702
12.	Data Outstanding SPN per 31 Desember 2014	703
13.	Data Outstanding Surat Utang Pemerintah per 31 Desember 2014	704
14.	Data Outstanding SBSN seri IFR per 31 Desember 2014	706
15.	Data Outstanding SBSN Seri PBS per 31 Desember 2014	706
16.	Data Outstanding SBSN Seri SR per 31 Desember 2014	708
17.	Data Outstanding SBSN Seri SPN-S per 31 Desember 2014	709
18.	Data Outstanding SBSN Seri SDHI per 31 Desember 2014	710
19.	Struktur Outstanding SBN Valas Per 31 Desember 2014	711
20.	Mutasi SBN Tahun 2014	714

www.peraturan.go.id

INDEKS GRAFIK

1. Tren PDB Harga Berlaku Seri 2000 Tahun 2010-2014 16
2. Struktur PDB Seri 2000 Menurut Pengeluaran tahun 2010 s.d 2014 17
3. Struktur PDB Seri 2000 Menurut Lapangan Usaha atas Dasar harga Berlaku 2013-2014 17
4. Tren Laju Inflasi Bulanan dan TahunanTahun 2014 20
5. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulanan 2013-2014 21
6. Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Semesteran 2012-2014 22
7. Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Bulanan 2014 22
8. Cadangan Devisa 2014 23
9. Tren Laju IHSG Bulanan Tahun 2013-2014 24
10. Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2010-2014 29
11. Penerimaan Perpajakan Tahun 2013 dan 2014 30
12. *Tax Ratio* Indonesia Tahun 2010-2014 30
13. Pagu dan Realisasi PNBP Tahun 2013 dan 2014 31
14. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat 2013 dan Tahun 2014 Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi 33
15. Realisasi Transfer ke Daerah 2013-2014 34
16. Perkembangan Rasio Realisasi Defisit Anggaran terhadap PDB Tahun 2010-2014 35
17. Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP TA 2010 - 2014 60
18. Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2010- 2014 61
19. Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2014 62
20. Komposisi 5 Terbesar Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2014 68
21. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2014 68
22. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2014 69
23. Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah TA 2014 76
24. Komposisi Pendapatan BLU TA 2014 91
25. Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU TA 2014 92
26. Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto pada Neraca Tahun 2010 – 2014 101
27. Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Badan Layanan Umum 2010 – 2014 197
28. Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas 213

LAMPIRAN

www.peraturan.go.id

1. Struktur Jatuh Tempo ON Rupiah seri FR 700
2. Struktur jatuh tempo ORI 702
3. Struktur jatuh tempo ON seri VR 703
4. Struktur Jatuh Tempo SPN per 31 Desember 2014 704
5. Struktur Jatuh Tempo Surat Utang Pemerintah 705
6. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri IFR per 31 Desember 2014 706
7. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri PBS per 31 Desember 2014 707
8. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SR per 31 Desember 2014 708
9. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2014 709
10. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SDHI per 31 Desember 2014 710
11. Struktur Jatuh Tempo SBN Valas per 31 Desember 2014 712
12. Data Outstanding SBN per 31 Desember 2014 712

www.peraturan.go.id

INDEKS LAMPIRAN

1.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Pusat TA 2014	236
2.	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut BA dan Eselon I TA 2014	263
3.	Laporan Realisasi Dana Perimbangan TA 2014	292
4.	Suspen Belanja Pemerintah Pusat TA 2014	365
5.	Persetujuan Multiyears Contract (Kontrak Tahun Jamak)	370
6.	Perbandingan Pagu APBN-P dan Pagu DIPA	372
7.	Realisasi Penerbitan SABA BA 999.08 – Pengelola lain-lain, TA 2014	376
8.	Rekening Khusus per 31 Desember 2014	380
9.	Saldo Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Umum per 31 Desember 2014	382
10.	Saldo Kas di KPPN per 31 Desember 2014 dan 2013	384
11.	Kas pada K/L dan BUN per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013	391
12.	Uang Muka Belanja dan Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013	411
13.	Piutang Pajak per 31 Desember 2014	417
14.	Piutang PNBP per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013	431
15.	Rincian Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi 31 Desember 2014	434
16.	Aset Kredit Eks BPPN	437
17.	Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013	444
18.	Persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013	447
19.	Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara BUMN Tahun 2014	452
20.	Daftar BPYBDS pada BUMN per 31 Desember 2014	462
21.	Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara/Lembaga Di Bawah Pembinaan Kementerian Keuangan per 31 Desember 2014	464
22.	Penyertaan Modal Negara pada Non BUMN per 31 Desember 2014	467
23.	Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Regional per 31 Desember 2014	471
24.	Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2014	473
25.	Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga per 31 Desember 2014	476
26.	Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2014	500
27.	Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2014	502
28.	Aset KKKS per 31 Desember 2014	505
29.	Aset Eks BPPN per 31 Desember 2014	524
30.	Aset Lain-lain per 31 Desember 2014	531
31.	Aset PT PPA per 31 Desember 2014	534
32.	Utang Kepada Pihak Ketiga dan Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2014	541
33.	Utang Bunga – Surat Berharga Negara per 31 Desember 2014	544
34.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Surat Berharga Negara per 31 Desember 2014	549
35.	Surat Berharga Negara Jangka Pendek per 31 Desember 2014	552
36.	Surat Berharga Negara Jangka Panjang per 31 Desember 2014	554
37.	Ikhtisar Laporan Keuangan BLU per 31 Desember 2014	560
38.	Kebijakan Koreksi Atas Akumulasi Penyusutan	563
39.	Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Non Struktural dan Yayasan per 31 Desember 2014	575
40.	Rekapitulasi Hasil Penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina s.d. 31 Desember 2013	580
41.	Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2013	585
42.	Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara Tahun Anggaran 2014	682

www.peraturan.go.id

INDEKS SINGKATAN

APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
BAPPENAS	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BDL	:	Bank Dalam Likuidasi
BEJ	:	Bursa Efek Jakarta
BHMN	:	Badan Hukum Milik Negara
BI	:	Bank Indonesia
BKKBN	:	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLBI	:	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	:	Badan Layanan Umum
BMN	:	Barang Milik Negara
BNP2TKI	:	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BPMIGAS	:	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPIH	:	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPJT	:	Badan Pengatur Jalan Tol
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	:	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPOM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPN	:	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPPT	:	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPYBDS	:	Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BRR	:	Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi
BUJT	:	Badan Usaha Jalan Tol
BULOG	:	Badan Urusan Logistik
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUN	:	Bendahara Umum Negara
CBN	:	Cadangan Benih Nasional
CAR	:	*Capital Adequate Ratio*
CBP	:	Cadangan Beras Pemerintah
CFO	:	*Chief Financial Officer*
CGI	:	*Consultative Group on Indonesia*
CICR	:	*Consolidated Interest Coverage Ratio*
COO	:	*Chief Operating Officer*
CPI	:	*Consumer Price Index*
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DAU	:	Dana Abadi Umat
DBH	:	Dana Bagi Hasil
DEP	:	Dana Ekonomi Produktif
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	:	Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak

www.peraturan.go.id

DJPBN	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DMO	:	*Domestic Market Obligation*
DNS	:	*Debt for Nature Swap*
DPM	:	Dana Penguatan Modal
DPPN		Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DSCR	:	*Debt Service Coverage Ratio*
DTP	:	Ditanggung Pemerintah
EDI	:	*Electronic Data Interchange*
GBHN	:	Garis-Garis Besar Haluan Negara
GIZ-ProFI	:	*Gesellschaft fur Internationale Zussammenarbeit –Promotion of Small Financial Institutions*
GIZ-GGPAS	:	*Gesellschaft fur Internationale Zussammenarbeit –Good Governance in Population Administration Systems*
HTI	:	Hutan Tanaman Industri
INDRA	:	*Indonesian Debt Restructuring Agency*
ITPT	:	Industri Tekstil dan Produksi Tekstil
JPY	:	*Japanese Yen*
KITE	:	Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
K/L	:	Kementerian Negara/Lembaga
KMK	:	Keputusan Menteri Keuangan
KONI	:	Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPRSH	:	Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana Sehat
KPS	:	Kontraktor *Production Sharing*
KSM	:	Kelompok Swadaya Masyarakat
KU	:	Kiriman Uang
KUHR	:	Kredit Usaha Hutan Rakyat
KUMK	:	Kredit Usaha Mikro dan Kecil
KUN	:	Kas Umum Negara
KUT	:	Kredit Usaha Tani
LAK	:	Laporan Arus Kas
LBMN	:	Laporan Barang Milik Negara
LDKP	:	Lembaga Dana Kredit Pedesaan
LDR	:	*Loan to Deposit Ratio*
LKBUN	:	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKP	:	Lembaga Keuangan Pelaksana
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNSI	:	Lembaga Non Struktural/Independen
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
MPN	:	Modul Penerimaan Negara
MP3	:	Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak
NAD	:	Nanggroe Aceh Darussalam
NPL	:	*Non-Performing Loan*
ORI	:	Obligasi Ritel Indonesia
PBS	:	*Project Based Sukuk*
PDB	:	Pendapatan Domestik Bruto
PFK	:	Perhitungan Fihak Ketiga

www.peraturan.go.id

PIP	:	Pusat Investasi Pemerintah
PIR	:	Perusahaan Inti Rakyat
PJPK	:	Penanggung Jawab Proyek Kerja sama
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PMN	:	Penyertaan Modal Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPAP	:	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	:	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSL	:	*Past Service Liability*
PSO	:	*Public Service Obligation*
PT PPA	:	PT Perusahaan Pengelolaan Aset
RANTF	:	*Recovery of Aceh Nias Trust Fund*
RDI	:	Rekening Dana Investasi
RPD	:	Rekening Pembangunan Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPL	:	Rekening Pemerintah Lainnya
RTGS	:	*Real Time Gross Settlement*
SAA	:	*Separate Arrangement Agreement*
SA-BUN	:	Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAKUN	:	Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
SAL	:	Saldo Anggaran Lebih
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAU	:	Sistem Akuntansi Umum
SBN	:	Surat Berharga Negara
SBSN	:	Surat Berharga Syariah Negara
SDA	:	Sumber Daya Alam
SDHI	:	Sukuk Dana Haji Indonesia
SiAP	:	Sistem Akuntansi Pusat
SIBOR	:	*Singapore Interbank Offered Rate*
SiKPA	:	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SiLPA	:	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Manajeman dan Akuntansi Barang Milik Negara
SKPA	:	Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SKPKB	:	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB	:	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SPKPBM	:	Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
SLA	:	*Subsidiary Loan Agreement*
SNI	:	Standar Nasional Indonesia
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SPN	:	Surat Perbendaharaan Negara
SP3	:	Surat Perintah Pengesahan Pembukuan
SPU	:	Sarana Pengembangan Usaha
SUN	:	Surat Utang Negara
SWIFT	:	*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*

www.peraturan.go.id

TA	:	Tahun Anggaran
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
THT	:	Tabungan Hari Tua
TP	:	Tim Pemberesan Aset
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
TSA	:	*Treasury Single Account*
TSP	:	Tempat Simpan Pinjam
USAID	:	*United State Agency for International Development*
USD	:	*United State Dolar*
UPP	:	Unit Pelaksana Proyek
UP3	:	Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah
USP	:	Usaha Simpan Pinjam
UP/TUP	:	Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan

www.peraturan.go.id

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI APBN

			Halaman
Pendapatan Negara dan Hibah			
Catatan	B.2.1	**Pendapatan Negara dan Hibah**	61
Catatan	B.2.1.1	**Penerimaan Perpajakan**	62
Catatan	B.2.1.1.1	Pajak Dalam Negeri	62
Catatan	B.2.1.1.2	Pajak Perdagangan Internasional	63
Catatan	B.2.1.2	**Penerimaan Negara Bukan Pajak**	63
Catatan	B.2.1.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam	63
Catatan	B.2.1.2.2	Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	64
Catatan	B.2.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	65
Catatan	B.2.1.2.4	Pendapatan BLU	66
Catatan	B.2.1.3	**Penerimaan Hibah**	66
Belanja Negara			
Catatan	B.2.2	**Belanja Negara**	67
Catatan	B.2.2.1	**Belanja Pemerintah Pusat**	67
Catatan	B.2.2.1.1	Belanja Pegawai	70
Catatan	B.2.2.1.2	Belanja Barang	70
Catatan	B.2.2.1.3	Belanja Modal	72
Catatan	B.2.2.1.4	Pembayaran Bunga Utang	72
Catatan	B.2.2.1.5	Subsidi	73
Catatan	B.2.2.1.6	Belanja Hibah	74
Catatan	B.2.2.1.7	Belanja Bantuan Sosial	74
Catatan	B.2.2.1.8	Belanja Lain-lain	75
Catatan	B.2.2.2	**Transfer ke Daerah**	76
Catatan	B.2.2.2.1	Dana Perimbangan	77
Catatan	B.2.2.2.1.1	Dana Bagi Hasil	77
Catatan	B.2.2.2.1.2	Dana Alokasi Umum	77
Catatan	B.2.2.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	78
Catatan	B.2.2.2.2	Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	78
Catatan	B.2.2.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	78
Catatan	B.2.2.2.2.2	Dana Penyesuaian	79
Catatan	B.2.2.2.3	Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	79
Catatan	B.2.2.3	Suspen	79
Surplus (Defisit) Anggaran			
Catatan	B.2.3	**Defisit Anggaran**	80
Pembiayaan			
Catatan	B.2.4	**Pembiayaan**	80
Catatan	B.2.4.1	**Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)**	81
Catatan	B.2.4.1.1	Penggunaan SAL	81

www.peraturan.go.id

Catatan	B.2.4.1.2	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	81
Catatan	B.2.4.1.3	Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	81
Catatan	B.2.4.1.4	Surat Berharga Negara (Neto)	82
Catatan	B.2.4.1.5	Pinjaman Dalam Negeri	83
Catatan	B.2.4.1.6	Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah	83
Catatan	B.2.4.1.7	Kewajiban Penjaminan	84
Catatan	B.2.4.1.8	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	84
Catatan	B.2.4.2	**Pembiayaan Luar Negeri (Neto)**	85
Catatan	B.2.4.2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	85
Catatan	B.2.4.2.1.1	Penarikan Pinjaman Program	85
Catatan	B.2.4.2.1.2	Penarikan Pinjaman Proyek	86
Catatan	B.2.4.2.2	Penerusan Pinjaman	87
Catatan	B.2.4.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	87

SiLPA (SiKPA)

Catatan	B.2.5	**Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)**	88

CATATAN PENTING LAINNYA

Catatan	B.3	Catatan Penting Lainnya	89

NERACA

ASET

		Aset Lancar	
Catatan	C.2.1	Rekening Kas BUN di BI	102
Catatan	C.2.2	Rekening Pemerintah Lainnya	103
Catatan	C.2.3	Rekening Kas di KPPN	104
Catatan	C.2.4	Kas di Bendahara Pengeluaran	104
Catatan	C.2.5	Kas di Bendahara Penerimaan	104
Catatan	C.2.6	Kas Lainnya dan Setara Kas	105
Catatan	C.2.7	Kas Pada BLU	106
Catatan	C.2.8	Uang Muka dari Rekening BUN	107
Catatan	C.2.9	Investasi Jangka Pendek	108
Catatan	C.2.10	Belanja Dibayar Di Muka dan Uang Muka Belanja	108
Catatan	C.2.11	Piutang Pajak	108
Catatan	C.2.12	Piutang Bukan Pajak	112
Catatan	C.2.13	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	122
Catatan	C.2.14	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	122
Catatan	C.2.15	Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	122
Catatan	C.2.16	Piutang dari Kegiatan BLU	124
Catatan	C.2.17	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang	125
Catatan	C.2.18	Persediaan	126
		Investasi Jangka Panjang	
Catatan	C.2.19	Dana Bergulir	128
Catatan	C.2.20	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	129
Catatan	C.2.21	Investasi Non Permanen Lainnya	130

www.peraturan.go.id

Catatan	C.2.22	Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya	132
Catatan	C.2.23	Investasi Permanen PMN	132
Catatan	C.2.24	Investasi Permanen BLU	136
Catatan	C.2.25	Investasi Permanen Lainnya	136
Catatan	C.2.26	Aset Tetap	139
Catatan	C.2.27	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	140
Catatan	C.2.28	Piutang Jangka Panjang	141
Catatan	C.2.29	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	144
Catatan	C.2.30	Aset Lainnya	144
Catatan	C.2.31	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Aset Lainnya	163
Catatan	C.2.32	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	164

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

Catatan	C.2.33	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	164
Catatan	C.2.34	Utang Kepada Pihak Ketiga	165
Catatan	C.2.35	Utang Biaya Pinjaman	169
Catatan	C.2.36	Utang Subsidi	169
Catatan	C.2.37	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	171
Catatan	C.2.38	Utang SBN Jangka Pendek	172
Catatan	C.2.39	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	173
Catatan	C.2.40	Pendapatan Diterima di Muka	173
Catatan	C.2.41	Utang Jangka Pendek Lainnya	173

Kewajiban Jangka Panjang

Catatan	C.2.42	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	174
Catatan	C.2.43	Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri	175
Catatan	C.2.44	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	176
Catatan	C.2.45	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	177
Catatan	C.2.46	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	180
Catatan	C.2.47	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	180

EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar

Catatan	C.2.48	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Setelah Penyesuaian	181
Catatan	C.2.49	SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian	183
Catatan	C.2.50	Cadangan Piutang	184
Catatan	C.2.51	Cadangan Persediaan	184
Catatan	C.2.52	Pendapatan yang Ditangguhkan	184
Catatan	C.2.53	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	185
Catatan	C.2.54	Selisih Kurs Bagian Lancar	185
Catatan	C.2.55	Dana Lancar Lainnya	186
Catatan	C.2.56	Barang/Jasa yang Harus Diterima	186
Catatan	C.2.57	Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	186

Ekuitas Dana Investasi

www.peraturan.go.id

Catatan	C.2.58	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	187
Catatan	C.2.59	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	187
Catatan	C.2.60	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	187
Catatan	C.2.61	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	187
Catatan	C.2.62	Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang	188

CATATAN PENTING LAINNYA

Catatan	C.3	Catatan Penting Lainnya	189

LAPORAN ARUS KAS

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Catatan	D.2.1	Penerimaan Perpajakan	215
Catatan	D.2.1.1	Pajak Penghasilan	216
Catatan	D.2.1.2	Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	217
Catatan	D.2.1.3	Pajak Bumi dan Bangunan	217
Catatan	D.2.1.4	Cukai	217
Catatan	D.2.1.5	Pajak Lainnya	217
Catatan	D.2.1.6	Pajak Perdagangan Internasional	218
Catatan	D.2.2	PNBP	218
Catatan	D.2.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam	218
Catatan	D.2.2.2	Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	219
Catatan	D.2.2.3	Penerimaan PNBP Lainnya	219
Catatan	D.2.2.4	Penerimaan BLU	220
Catatan	D.2.3	Penerimaan Hibah	220
Catatan	D.2.4	Belanja Pegawai	221
Catatan	D.2.5	Belanja Barang	221
Catatan	D.2.6	Belanja Pembayaran Bunga Utang	222
Catatan	D.2.7	Subsidi	222
Catatan	D.2.8	Belanja Hibah	223
Catatan	D.2.9	Bantuan Sosial	223
Catatan	D.2.10	Belanja Lain-Lain	224
Catatan	D.2.11	Dana Bagi Hasil Pajak	224
Catatan	D.2.12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	224
Catatan	D.2.13	Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau	225
Catatan	D.2.14	Dana Alokasi Umum	225
Catatan	D.2.15	Dana Alokasi Khusus	225
Catatan	D.2.16	Dana Otonomi Khusus	226
Catatan	D.2.17	Dana Penyesuaian	226
Catatan	D.2.18	Dana Keistimewaan DIY	226

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Catatan	D.2.19	Pendapatan dari Pemindahtanganan dan Penjualan Aset	226
Catatan	D.2.20	Belanja Modal	226

www.peraturan.go.id

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Catatan	D.2.21	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	227
Catatan	D.2.22	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	229
Catatan	D.2.23	Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman	229
Catatan	D.2.24	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	230
Catatan	D.2.25	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	230
Catatan	D.2.26	Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah	230
Catatan	D.2.27	Penerusan Pinjaman (RDI/RPD)	231

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

Catatan	D.2.28	Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	231
Catatan	D.2.29	Kiriman Uang	232
Catatan	D.2.30	Transito	232
Catatan	D.2.31	Penerimaan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Rekening	233

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. LAPORAN REALISASI APBN (*AUDITED*)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI APBN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2014 (*Audited*)			TA 2013 (*Audited*)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah	**B.2.1**				
I. Penerimaan Perpajakan	**B.2.1.1**	**1.246.106.955.600.000**	**1.146.865.769.098.252**	**92,04%**	**1.077.306.679.558.272**
1. Pajak Dalam Negeri	B.2.1.1.1	1.189.826.575.600.000	1.103.217.635.957.204	92,72%	1.029.850.063.303.271
2. Pajak Perdagangan Internasional	B.2.1.1.2	56.280.380.000.000	43.648.133.141.048	77,55%	47.456.616.255.001
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	**B.2.1.2**	**386.946.415.445.000**	**398.590.523.613.990**	**103,01%**	**354.751.889.117.468**
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	B.2.1.2.1	241.114.622.223.000	240.848.282.407.860	99,89%	226.406.189.261.540
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	B.2.1.2.2	40.000.000.000.000	40.314.429.901.560	100,79%	34.025.604.050.274
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.2.3	84.968.409.424.000	87.746.767.296.051	103,27%	69.671.855.890.502
4. Pendapatan BLU	B.2.1.2.4	20.863.383.798.000	29.681.044.008.519	142,26%	24.648.239.915.152
III. Penerimaan Hibah	**B.2.1.3**	**2.325.114.000.000**	**5.034.520.904.737**	**216,53%**	**6.832.500.887.004**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)		**1.635.378.485.045.000**	**1.550.490.813.616.979**	**94,81%**	**1.438.891.069.562.744**
B. Belanja Negara	**B.2.2**				
I. Belanja Pemerintah Pusat	**B.2.2.1**	**1.280.368.574.301.000**	**1.203.577.167.222.861**	**94,00%**	**1.137.162.887.298.240**
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	258.435.598.595.000	243.719.884.098.338	94,31%	221.688.819.162.644
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	195.206.755.356.000	176.622.265.435.276	90,48%	169.722.685.080.370

www.peraturan.go.id

Uraian	Catatan	TA 2014 (*Audited*)			TA 2013 (*Audited*)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
3. Belanja Modal	B.2.2.1.3	160.790.466.559.000	147.347.928.326.528	91.64%	180.864.203.133.334
4. Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.4	135.453.200.000.000	133.441.292.679.083	98.51%	113.035.490.483.582
5. Subsidi	B.2.2.1.5	403.035.574.566.000	391.962.514.288.102	97.25%	355.045.179.958.292
6. Belanja Hibah	B.2.2.1.6	2.853.254.017.000	907.509.554.215	31.81%	1.302.956.172.580
7. Belanja Bantuan Sosial	B.2.2.1.7	96.655.378.881.000	97.924.676.539.384	101.31%	92.136.072.115.501
8. Belanja Lain-lain	B.2.2.1.8	27.938.346.347.000	11.651.086.301.935	41.70%	3.367.481.191.937
II. Transfer ke Daerah	**B.2.2.2**	**596.504.184.406.000**	**573.703.081.723.721**	**96.18%**	**513.260.443.170.637**
1. Dana Perimbangan	**B.2.2.2.1**	**491.882.888.478.000**	**477.052.754.641.271**	**96.99%**	**430.354.730.161.983**
a. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1.1	117.663.562.827.000	103.938.958.255.771	88.34%	88.463.060.120.183
b. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.1.2	341.219.325.651.000	341.219.325.651.000	100.00%	311.139.289.165.000
c. Dana Alokasi Khusus	B.2.2.2.1.3	33.000.000.000.000	31.894.470.734.500	96.65%	30.752.380.876.800
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	**B.2.2.2.2**	**104.097.420.928.000**	**96.231.227.308.000**	**92.44%**	**82.905.713.008.654**
a. Dana Otonomi Khusus	B.2.2.2.2.1	16.148.773.028.000	16.148.773.028.000	100.00%	13.445.571.566.000
b. Dana Penyesuaian	B.2.2.2.2.2	87.948.647.900.000	80.082.454.280.000	91.06%	69.460.141.442.654
3. Dana Keistimewaan DIY	**B.2.2.3**	**523.875.000.000**	**419.099.774.450**	80.00%	
III. Suspen Belanja Negara	**B.2.2.3**		**(97.393.160.171)**		**140.396.948.208**
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II + B.III)		**1.876.872.758.707.000**	**1.777.182.855.786.411**	**94.69%**	**1.650.563.727.418.085**
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	**B.2.3**	**(241.494.273.662.000)**	**(226.692.042.169.432)**	**93.87%**	**(211.672.657.855.341)**
D. Pembiayaan	**B.2.4**				
I. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)	**B.2.4.1**	**254.931.959.172.000**	**261.244.985.683.200**	**102.48%**	**243.199.747.083.370**
1. Penggunaan SAL	B.2.4.1.1	1.000.000.000.000		0%	30.000.000.000.000
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	B.2.4.1.2	4.398.460.306.000	4.999.122.569.597	113.66%	4.174.085.472.290

Uraian	Catatan	TA 2014 (*Audited*)			TA 2013 (*Audited*)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.3	1.000.000.000.000	543.558.387.876	54.36%	1.500.151.167.201
4. Surat Berharga Negara (Neto)	B.2.4.1.4	264.983.707.000.000	264.628.918.472.574	99.87%	224.672.521.479.583
Penerimaan Surat Berharga Negara			439.096.524.981.366		327.747.662.419.035
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(174.467.606.508.792)		(103.075.140.939.452)
5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1.5	2.177.977.297.000	949.967.958.159	43.62%	474.470.730.046
6. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	B.2.4.1.6	(9.305.042.400.000)	(8.912.513.705.006)	95.78%	(11.915.446.765.750)
7. Kewajiban Penjaminan	B.2.4.1.7	(964.068.000.000)	(964.068.000.000)	100%	(706.035.000.000)
8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	B.2.4.1.8	(8.359.075.031.000)			(5.000.000.000.000)
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	**B.2.4.2**	**(13.437.685.510.000)**	**(12.352.160.006.680)**	**91.92%**	**(5.805.169.762.176)**
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	B.2.4.2.1	54.129.575.787.000	52.574.662.239.483	97.13%	55.279.821.617.227
a. Penarikan Pinjaman Program	B.2.4.2.1.1	16.899.600.000.000	17.776.956.719.493	105.19%	18.426.396.220.606
b. Penarikan Pinjaman Proyek	B.2.4.2.1.2	37.229.975.787.000	34.797.705.519.970	93.47%	36.853.425.396.621
2. Penerusan Pinjaman	B.2.4.2.2	(3.407.371.699.000)	(2.505.637.602.270)	73.54%	(3.880.566.936.399)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	B.2.4.2.3	(64.159.889.598.000)	(62.421.184.643.873)	97.29%	(57.204.424.443.004)
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)		**241.494.273.662.000**	**248.892.825.676.520**	**103.06%**	**237.394.577.321.194**
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA (SiKPA)	**B.2.5**		**22.200.783.507.088**		**25.721.919.465.853**

www.peraturan.go.id

NERACA

II. NERACA (*AUDITED*)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Des 2014 (*audited*)	31 Des 2013 (*audited*)
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas			
Rekening Kas BUN di BI	C.2.1	58.238.862.209.607	43.737.911.964.052
Rekening Pemerintah Lainnya	C.2.2	4.648.771.715.828	9.999.484.261.911
Rekening Kas di KPPN	C.2.3	2.843.557.011.256	2.666.720.204.356
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.4	316.874.974.276	342.891.820.960
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2.5	147.819.027.491	225.839.936.566
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.6	6.193.971.845.835	7.363.221.503.338
Kas pada BLU	C.2.7	23.336.819.639.008	19.072.940.458.860
Jumlah Kas dan Setara Kas		95.726.676.423.301	83.409.010.150.043
Uang Muka dari Rekening BUN	C.2.8	426.084.589.111	141.923.861.996
Investasi Jangka Pendek	C.2.9	4.382.620.665.030	1.182.306.983.395
Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	C.2.10	2.196.690.366.554	4.658.189.616.621
Piutang			
Piutang Pajak	C.2.11	91.774.168.360.216	103.240.249.433.833
Piutang Bukan Pajak	C.2.12	141.315.978.840.022	147.710.233.612.351
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.2.13	2.575.581.126	1.977.442.150
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.2.14	182.565.935.471	142.483.141.891
Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	C.2.15	5.219.058.275.189	6.011.228.743.194
Piutang dari Kegiatan BLU	C.2.16	3.553.717.607.485	2.728.415.892.912
Jumlah Piutang (Bruto)		242.048.064.599.509	259.834.588.266.331
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.2.17	(149.399.872.043.211)	(159.689.806.285.608)
Jumlah Piutang (Bersih)		92.648.192.556.298	100.144.781.980.723
Persediaan	C.2.18	67.600.353.672.687	63.205.251.965.209
Jumlah Aset Lancar		**262.980.618.272.981**	**252.741.464.557.987**
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Non Permanen			
Dana Bergulir	C.2.19	22.618.233.561.719	17.872.890.837.875
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	C.2.20	(325.440.113.463)	(39.997.900.137)
Jumlah Dana Bergulir (Bersih)		22.292.793.448.256	17.832.892.937.738
Investasi Non Permanen Lainnya	C.2.21	8.625.184.946.842	8.340.448.484.300
Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya	C.2.22	(11.282.810.445)	(5.531.213.937)
Jumlah Investasi Non Permanan Lainnya (Bersih)		8.613.902.136.397	8.334.917.270.363
Jumlah Investasi Non Permanen		30.906.695.584.653	26.167.810.208.101
Investasi Permanen			
Investasi Permanen PMN	C.2.23	940.189.434.094.290	844.094.126.993.709
Investasi Permanen BLU	C.2.24	200.435.044.832	177.778.694.559
Investasi Permanen Lainnya	C.2.25	338.624.829.163.846	312.730.704.421.451

www.peraturan.go.id

Uraian	Catatan	31 Des 2014 (*audited*)	31 Des 2013 (*audited*)
Jumlah Investasi Permanen		1.279.014.698.302.968	1.157.002.610.109.719
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**1.309.921.393.887.621**	**1.183.170.420.317.820**
Aset Tetap	C.2.26		
Tanah		945.677.266.992.956	1.041.019.298.252.419
Peralatan dan Mesin		331.484.412.353.590	282.940.410.570.636
Gedung dan Bangunan		210.934.630.857.630	191.278.171.370.296
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		476.253.657.666.187	423.232.566.227.236
Aset Tetap Lainnya		49.856.505.381.076	38.607.829.866.402
Konstruksi Dalam Pengerjaan		113.946.714.499.490	119.419.040.145.511
Jumlah Aset Tetap (Bruto)		2.128.153.187.750.929	2.096.497.316.432.500
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.27	(413.564.858.797.715)	(386.642.243.569.313)
Jumlah Aset Tetap		**1.714.588.328.953.214**	**1.709.855.072.863.187**
Piutang Jangka Panjang	C.2.28		
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		174.219.622.769	239.948.430.983
Piutang Jangka Panjang Lainnya		4.820.160.307.846	4.856.087.111.476
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto)		4.994.379.930.615	5.096.035.542.459
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	C.2.29	(2.168.545.700.880)	(2.197.535.902.919)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)		**2.825.834.229.735**	**2.898.499.639.540**
Aset Lainnya	C.2.30		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		132.392.631.678.964	279.936.137.500
Aset Tak Berwujud		19.418.359.628.145	17.448.733.461.982
Dana yang Dibatasi Penggunaannya		107.883.037.541.388	95.453.796.857.223
Dana Penjaminan		74.594.663.462	71.638.992.611
Dana Kelolaan BLU		15.491.986.109.389	17.684.403.155.418
Aset KKKS		286.089.093.484.847	221.745.303.742.534
Aset Eks BPPN		2.558.616.559.690	3.181.247.163.249
Aset Lain-lain		132.760.986.324.644	98.608.345.001.685
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		9.970.179.251.456	7.968.396.497.466
Aset Lainnya Penerusan Pinjaman		41.470.978.243.696	46.871.682.852.501
Jumlah Aset Lainnya (Bruto)		748.110.463.485.681	509.313.483.862.169
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Aset Lainnya	C.2.31	(23.550.469.430.844)	(21.904.143.176.106)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.2.32	(103.953.838.286.596)	(68.489.052.477.854)
Jumlah Aset Lainnya (Bersih)		**620.606.155.768.241**	**418.920.288.208.209**
JUMLAH ASET		**3.910.922.331.111.792**	**3.567.585.745.586.743**
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	C.2.33	2.679.231.919.973	348.097.673.274
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.2.34	37.980.198.606.742	55.380.161.243.832
Utang Biaya Pinjaman	C.2.35	33.885.294.867.579	27.668.104.388.520
Utang Subsidi	C.2.36	64.433.845.108.042	71.683.090.732.971
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	C.2.37	149.134.908.708.957	162.251.340.131.620
Utang SBN Jangka Pendek	C.2.38	49.583.393.774.000	41.722.185.956.000
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.2.39	1.358.873.118.978	161.408.703.427
Pendapatan Diterima di Muka	C.2.40	9.782.484.473.823	8.454.347.000.882
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.41	3.470.723.597.386	418.095.877.428
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**352.308.954.175.480**	**368.086.831.707.954**

www.peraturan.go.id

Uraian	Catatan	31 Des 2014 (*audited*)	31 Des 2013 (*audited*)
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	C.2.42	2.876.377.932.292	1.939.381.089.664
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	C.2.43	1.794.044.591.049.158	1.523.750.834.782.215
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	C.2.44	20.431.212.930.000	17.161.745.000.000
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	C.2.45	84.196.327.243.997	68.366.428.707.899
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		1.901.548.509.155.447	1.611.218.389.579.778
Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	C.2.46	610.949.515.129.568	646.221.116.658.252
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	C.2.47	33.576.619.525.619	26.573.441.869.951
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri		644.526.134.655.187	672.794.558.528.203
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		**2.546.074.643.810.634**	**2.284.012.948.107.981**
JUMLAH KEWAJIBAN		**2.898.383.597.986.114**	**2.652.099.779.815.935**
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar			
SAL Awal Setelah Penyesuaian	C.2.48	66.597.650.883.582	40.262.010.866.885
SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian	C.2.49	19.539.342.700.004	26.332.138.910.461
Cadangan Piutang	C.2.50	92.913.908.152.555	99.643.556.941.069
Cadangan Persediaan	C.2.51	67.600.353.672.687	63.205.251.965.209
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.2.52	2.136.196.629.944	4.817.382.158.336
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	C.2.53	(314.037.171.275.183)	(325.224.143.092.266)
Selisih Kurs Bagian Lancar	C.2.54	(12.212.231.622.370)	(18.688.113.653.035)
Dana Lancar Lainnya	C.2.55	226.078.511.078	90.082.709.951
Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	C.2.56	2.001.558.961.581	4.653.616.446.673
Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	C.2.57	(9.782.484.473.823)	(8.454.347.000.882)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		**(85.016.797.859.945)**	**(113.362.563.747.599)**
Ekuitas Dana Investasi			
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	C.2.58	1.309.921.393.887.621	1.183.170.420.317.820
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.2.59	**1.714.588.328.953.214**	1.709.855.072.863.187
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.2.60	539.045.219.249.774	352.579.883.574.149
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	C.2.61	(2.308.449.937.718.660)	(2.031.798.722.297.177)
Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang	C.2.62	(157.549.473.386.326)	(184.958.124.939.572)
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		**1.097.555.530.985.623**	**1.028.848.529.518.407**
EKUITAS DANA NETO		**1.012.538.733.125.678**	**915.485.965.770.808**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		**3.910.922.331.111.792**	**3.567.585.745.586.743**

www.peraturan.go.id

LAPORAN ARUS KAS

III. LAPORAN ARUS KAS (*AUDITED*)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2014 (*Audited*)	TA 2013 (*Audited*)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Perpajakan	D.2.1		
a. Pajak Penghasilan	D.2.1.1	546.180.870.340.008	506.442.796.872.651
b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	D.2.1.2	409.181.627.426.617	384.713.518.912.993
c. Pajak Bumi dan Bangunan	D.2.1.3	23.476.231.891.365	25.304.582.771.965
d. Cukai	D.2.1.4	118.085.549.812.883	108.452.081.324.579
e. Pajak Lainnya	D.2.1.5	6.293.356.486.331	4.937.083.421.083
f. Pajak Perdagangan Internasional	D.2.1.6	43.648.133.141.048	47.456.616.255.001
Total Penerimaan Perpajakan		1.146.865.769.098.252	1.077.306.679.558.272
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	D.2.2		
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.2.1	240.848.282.407.860	226.406.189.261.540
b. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	D.2.2.2	40.314.429.901.560	34.025.604.050.274
c. PNBP Lainnya	D.2.2.3	87.610.305.116.971	69.482.471.662.383
d. Penerimaan BLU	D.2.2.4	29.681.044.008.519	24.648.239.915.152
Total PNBP		398.454.061.434.910	354.562.504.889.349
3. Penerimaan Hibah	D.2.3	2.956.901.630.280	4.533.878.206.066
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		**1.548.276.732.163.442**	**1.436.403.062.653.687**
II. Arus Kas Keluar			
1. Belanja Pegawai	D.2.4	243.719.624.006.422	221.687.976.872.374
2. Belanja Barang	D.2.5	175.144.475.400.158	167.911.005.354.943
3. Belanja Bunga Utang	D.2.6	133.441.688.595.776	113.033.446.250.400
4. Belanja Subsidi	D.2.7	391.962.514.288.102	355.045.179.958.292
5. Belanja Hibah	D.2.8	907.509.554.215	1.305.414.705.780
6. Bantuan Sosial	D.2.9	97.820.890.718.247	92.108.033.527.871
7. Belanja Lain-Lain	D.2.10	11.652.519.680.692	3.367.142.169.363
8. Bagi Hasil Pajak	D.2.11	39.715.942.185.337	43.855.009.346.533
9. Bagi Hasil Sumber Daya Alam	D.2.12	62.001.317.675.508	42.456.559.513.479
10. Bagi Hasil Cukai	D.2.13	2.221.698.394.926	2.151.491.260.171
11. Dana Alokasi Umum	D.2.14	341.219.325.651.000	311.139.289.165.000
12. Dana Alokasi Khusus	D.2.15	31.894.470.734.500	30.752.380.876.800
13. Dana Otonomi Khusus	D.2.16	16.148.773.028.000	13.445.571.566.000
14. Dana Penyesuaian	D.2.17	80.082.373.489.250	69.344.444.403.654
15. Dana Keistimewaan DIY	D.2.18	419.099.774.450	115.696.326.500
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		**1.628.352.223.176.583**	**1.467.718.641.297.160**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)		**(80.075.491.013.141)**	**(31.315.578.643.473)**
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN			
I. Arus Kas Masuk			
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan Aset	D.2.19	136.462.179.080	189.384.228.119

www.peraturan.go.id

Uraian	Catatan	TA 2014 (*Audited*)	TA 2013 (*Audited*)
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		**136.462.179.080**	**189.384.228.119**
II. Arus Kas Keluar			
Belanja Modal	D.2.20	146.753.013.335.371	180.546.463.439.987
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		**146.753.013.335.371**	**180.546.463.439.987**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (B.I - B.II)		**(146.616.551.156.291)**	**(180.357.079.211.868)**
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.21	440.731.307.381.543	359.863.540.370.424
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	D.2.22	52.574.662.239.463	55.279.821.617.227
3. Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.23	4.999.122.569.597	4.174.085.472.290
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		**498.305.092.190.603**	**419.317.447.459.941**
II. Arus Kas Keluar			
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.24	174.608.862.562.934	108.216.396.993.594
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	D.2.25	62.421.184.643.873	57.204.424.443.004
3. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	D.2.26	9.876.581.705.006	12.621.481.765.750
4. Penerusan Pinjaman	D.2.27	2.505.637.602.270	3.880.566.936.399
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		**249.412.266.514.083**	**181.922.870.138.747**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (C.I – C.II)		**248.892.825.676.520**	**237.394.577.321.194**
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN			
1. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	D.2.28	2.340.146.494.865	(104.009.136.761)
2. Kiriman Uang (Neto)	D.2.29	9.423.289.100	304.283.894.052
3. Transito (Neto)	D.2.30	1.087.646.750.357	(93.019.790.696)
4. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Rekening, retur SP2D, Sistem Perbankan dan Koreksi Pemindahbukuan (Neto)	D.2.31	(83.426.791.675)	(1.315.856.649)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		**3.353.789.742.647**	**105.939.109.946**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS		**25.554.573.249.735**	**25.827.858.575.799**
Penggunaan SAL		**-**	**(30.000.000.000.000)**
Penyesuaian Pembukuan	D.1.2	**(3.720.440.807.080)**	**607.785.913.678**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH PENYESUAIAN		**21.834.132.442.655**	**(3.564.355.510.523)**
SALDO AWAL KAS BUN, KPPN DAN BLU		**67.704.682.716.689**	**71.578.340.493.780**
Penyesuaian Saldo Awal		**(16.441.567.471)**	**(309.302.266.568)**
SALDO AWAL KAS BUN, KPPN DAN BLU setelah Penyesuaian	D.1.1	**67.688.241.149.218**	**71.269.038.227.212**
SALDO AKHIR KAS BUN, KPPN, DAN BLU		**89.522.373.591.873**	**67.704.682.716.689**
Rekening Pemerintah Lainnya	C.2.2	**4.648.771.715.828**	**9.999.484.261.911**
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.4	**316.874.974.276**	**342.891.820.960**
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2.5	**147.819.027.491**	**225.839.936.566**
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.6	**5.404.286.309.734**	**6.248.372.302.671**
Kas pada BLU yang Belum Disahkan	D.1.3	**69.171.469.129**	**70.046.094.641**
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)		**(4.382.620.665.030)**	**(1.182.306.983.395)**
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	D.1.3	**95.726.676.423.301**	**83.409.010.150.043**

www.peraturan.go.id

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

www.peraturan.go.id

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*AUDITED*)

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
9. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011.

A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO

Kondisi Perekonomian Global Tahun 2014

Perekonomian global sepanjang tahun 2014 diwarnai beberapa permasalahan krusial di antaranya adalah masih terdapat risiko pelemahan ekonomi di berbagai negara, khususnya negara-negara berkembang. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan lemahnya permintaan global mendorong pelemahan kinerja perdagangan dunia. Sinyal ini dipertegas oleh lembaga keuangan Dana Moneter Internasional (IMF) yang untuk kesekian kalinya memangkas prediksi pertumbuhan ekonomi global.

Lemahnya permintaan global dan penurunan aktivitas perdagangan dunia pada gilirannya menyebabkan penurunan berbagai harga komoditas dunia, termasuk harga minyak mentah dunia. Terkait dengan harga minyak dunia, masih terdapat faktor lain yang mendorong pelemahan harga minyak dunia secara signifikan diantaranya adalah dampak eskalasi krisis Crimea antara Rusia dan Ukraina, krisis geopolitik di Timur Tengah dimana negara-negara terkait berupaya meningkatkan pangsa pasar mereka melalui strategi perang harga minyak. Selain itu, melimpahnya pasokan minyak mentah dunia dengan hadirnya energi substitusi, yaitu *shale oil and gas*, serta ketidaksepakatan *Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)* untuk mengurangi kuota produksi minyaknya telah mendorong peningkatan pasokan minyak dan penurunan harga minyak mentah di pasar global.

Penurunan harga minyak dunia memberikan dampak berbeda pada negara-negara pengekspor minyak dan negara-negara pengimpor minyak. Pada negara pengekspor minyak, turunnya harga minyak akan memberikan tekanan fiskal yang signifikan mengingat sumber pendapatan

www.peraturan.go.id

utama mereka adalah dari penjualan minyak bumi. Sedangkan bagi negara-negara pengimpor, rendahnya harga minyak bumi akan mendorong aktifitas perekonomian, menurunkan inflasi, serta mengurangi tekanan fiskal. Disamping itu harga minyak dunia yang rendah menghadirkan kesempatan untuk melakukan reformasi kebijakan pengelolaan subsidi energi.

Bagi Indonesia yang harus mengimpor sebagian kebutuhan bahan bakar minyaknya, penurunan harga minyak dunia ini membawa dampak mengendurnya tekanan terhadap fiskal, neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan. Tekanan pada APBN yang berasal dari: (1) kemungkinan *shortfall* penerimaan akibat perlambatan kinerja ekonomi; (2) kemungkinan membengkaknya belanja pemerintah pusat, terutama subsidi BBM akibat depresiasi nilai tukar rupiah yang cukup signifikan; dan (3) harga minyak yang cukup tinggi sampai dengan tiga triwulan pertama 2014, telah mendorong pemerintah melakukan kebijakan pemotongan anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L) pada APBN-P tahun 2014.

Kinerja Perekonomian Indonesia Tahun 2014

Permasalahan lain dalam perekonomian global di tahun 2014 adalah gejolak arus modal dan likuiditas global akibat normalisasi kebijakan moneter yang diambil *The Fed.* Arah kebijakan *The Fed* untuk mengurangi dan menghentikan stimulus moneter yang telah dilakukan selama ini telah menimbulkan pembalikan arus modal dari *emerging markets* termasuk Indonesia ke perekonomian Amerika Serikat. Fenomena tersebut telah menyebabkan penguatan dolar Amerika Serikat terhadap semua mata uang dunia

Di tengah kondisi perekonomian global yang melambat, kinerja perekonomian nasional tumbuh relatif cukup baik sejalan dengan fundamental ekonomi yang kuat dan stabilitas makroekonomi yang terjaga serta proses penyesuaian ke arah yang lebih sehat.

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan makro ekonomi, kebijakan Bank Indonesia tetap diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi dan mengelola defisit transaksi berjalan yang sehat. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui strategi pengelolaan likuiditas dan tingkat suku bunga serta didukung penguatan koordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia. Pelaksanaan kebijakan stabilitas ekonomi tersebut ditempuh dengan tetap memperhatikan upaya menjaga pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi

Realisasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2014 masih cukup baik walaupun sedikit melambat. Perlambatan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor tekanan pada kinerja neraca perdagangan yang disebabkan oleh lemahnya permintaan global serta defisit pada neraca perdagangan migas. Defisit neraca perdagangan migas didorong oleh tingginya permintaan domestik. Pada saat yang sama, kinerja investasi (PMTB) terus menunjukkan perlambatan yang didorong oleh dampak depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sehingga meningkatkan biaya impor bahan baku dan barang modal. Di samping itu, tingginya tingkat suku bunga dalam negeri turut meningkatkan biaya kredit dan pembiayaan investasi. Namun di sisi lain, tingkat konsumsi masyarakat masih cukup tinggi sehingga mampu menjaga pertumbuhan ekonomi pada tingkat 5,06 persen.

Boks 1. Pengertian *The FED, Quantitative Easing (QE) dan Tapering Off*

The FED (*The Federal Reserve System)* merupakan gabungan dari 12 bank swasta nasional di Amerika Serikat yang dipimpin oleh Dewan Gubernur yang beranggotakan tujuh orang. Meskipun secara teknis *The FED* merupakan lembaga swasta, tetapi *The FED* lebih berperan

www.peraturan.go.id

sebagai badan pemerintah daripada sebuah entitas bisnis. Dibawah seorang *Chairman*, *The FED* dapat berperan sebagai bank sentral Amerika Swasta.

Layaknya bank sentral lainnya, *The FED* mengelola perekonomian Amerika Serikat dengan cara menaikkan ataupun menurunkan suku bunga acuan. Tetapi *The FED* tidak dapat menurunkan suku bunga di bawah nol, dimana hal ini telah dipertahankan selama lebih dari 6 tahun.

Salah satu cara yang digunakan *The FED* untuk merangsang ekonomi Amerika Serikat adalah dengan memompa uang secara langsung ke dalam sistem keuangan dengan cara membeli obligasi jangka panjang dengan harapan uang tersebut dapat digunakan kembali untuk keperluan lainnya, atau yang biasa dikenal dengan kebijakan *Quantitative Easing.*

Kebijakan ini cukup membantu Amerika Serikat ketika dilanda resesi di tahun 2009. Sampai dengan akhir tahun 2013, *The FED* telah membeli obligasi USD 85 miliar per bulan. Totalnya, di akhir tahun 2013, *The FED* telah mengantongi hampir USD 4 triliun dalam bentuk obligasi. Jika dibandingkan dengan aset yang dimiliki *The FED* sebelum krisis keuangan hanya sebesar USD 80 miliar.

Tapering off adalah proses pengurangan obligasi yang dibeli melalui *Quantitative Easing* secara bertahap. Tujuan dari *The FED* melakukan *Tapering Off* adalah karena *The FED* ingin kembali ke keadaan normal, artinya tidak ada lagi pembelian obligasi atau memasukkan dolar kembali ke sistem keuangan ekonomi Amerika Serikat.

Usulan rencana kebijakan *Tapering Off* mulai bergaung di bulan Mei tahun 2013, ketika Ketua *The FED*, Ben S. Bernanke, mengusulkan agar *The FED* segera mengurangi pembelian obligasi di tahun 2013, dan dampaknya langsung terasa ke seluruh pasar keuangan *emerging market* walaupun pada akhirnya kebijakan ini baru dilaksanakan di sepanjang tahun 2014.

Pengumuman kebijakan ini memunculkan kekhawatiran secara global. Perubahan yang dilakukan *The FED*, bisa mengundang respons pasar secara global. Dampak dari pengumuman kebijakan *Tapering Off* juga mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Di awal pengumuman kebijakan *Tapering Off* ditahun 2013 juga menjadi salah satu penyebab Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jatuh hingga 20%. Keinginan *The FED* mengurangi stimulus tersebut membuat dana asing yang parkir di Indonesia banyak yang keluar dari Indonesia. Jumlah nilai dana asing yang keluar sangat signifikan. Banyak investor menunggu kepastian dari kebijakan *Tapering Off* sehingga menyebabkan ketidakstabilan pasar.

PEREKONOMIAN INDONESIA

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2014

Sepanjang tahun 2014, ekonomi Indonesia mampu tumbuh relatif cukup baik sebesar 5,06 persen meskipun lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2013 yang mencapai 5,73 persen. Melambatnya pertumbuhan ini terutama dikarenakan terjadinya penurunan ekspor Indonesia sebagai dampak lemahnya permintaan global dan konsekuensi jangka pendek kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah serta sebagai dampak atas kebijakan Pemerintah dan BI dalam rangka memperbaiki neraca perdagangan. Di sisi lain, impor juga tumbuh negatif karena mahalnya biaya impor sebagai dampak depresiasi nilai tukar Rupiah.
Pertumbuhan tertinggi menurut lapangan usaha sepanjang tahun 2014 terjadi pada sektor

www.peraturan.go.id

Pengangkutan dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 9,31 persen, diikuti oleh sektor Konstruksi sebesar 6,58 persen dan sektor Keuangan, *Real Estate* dan Jasa Perusahaan sebesar 5,96 persen.

Struktur perekonomian Indonesia menurut lapangan usaha didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Industri Pengolahan (23,71 persen); Perdagangan, Hotel dan Restoran (14,60 persen) dan Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan (14,33 persen).
Ditinjau dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2014 terjadi pada beberapa komponen. Komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 5,46 persen adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,25 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 2,07 persen.
Struktur perekonomian Indonesia menurut pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (56,12 persen), diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (31,70 persen) dan Ekspor Barang dan Jasa (23,08 persen).

PDB seri 2000 atas dasar harga berlaku selama tahun 2014 mencapai Rp10.094,93 triliun atau naik sebesar Rp1.007,65 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 sebesar Rp9.087,28 triliun. Sedangkan PDB seri 2000 atas dasar harga konstan pada tahun 2014 mencapai Rp2.909,18 triliun atau naik sebesar Rp140,13 triliun dibandingkan periode yang sama tahun 2013 sebesar Rp2.769,05 triliun.

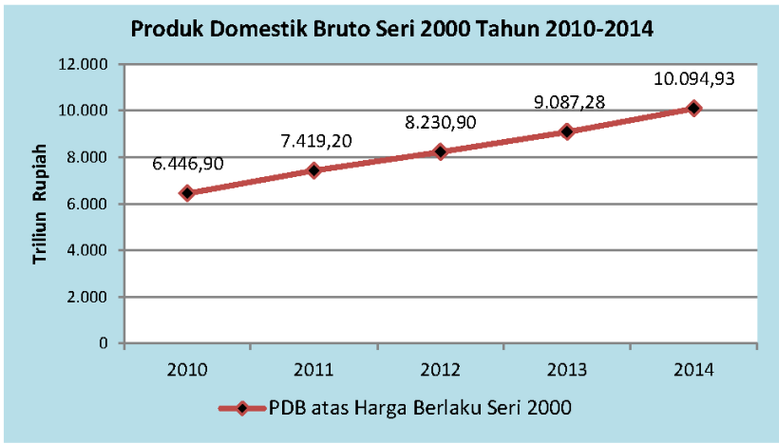

Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 1. Tren PDB Harga Berlaku Seri 2000 Tahun 2010-2014 (Triliun Rupiah)

www.peraturan.go.id

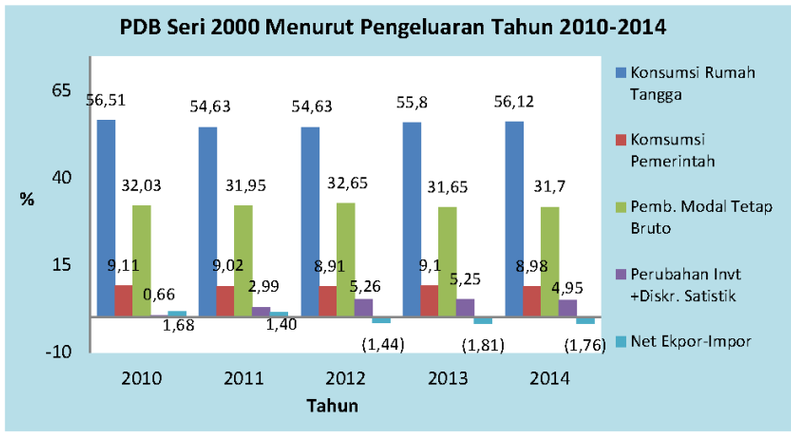

Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2. Struktur PDB Seri 2000 Menurut Pengeluaran tahun 2010 s.d 2014

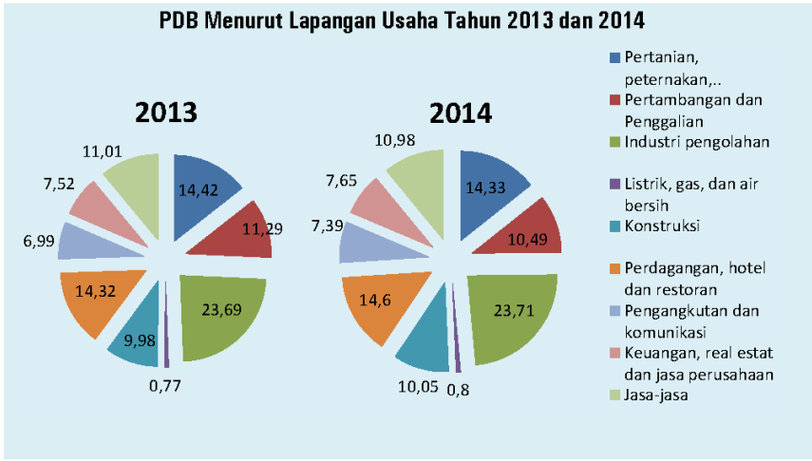

Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 3. Struktur PDB Seri 2000 Menurut Lapangan Usaha atas Dasar harga Berlaku Tahun 2013 dan Tahun 2014 (persen)

www.peraturan.go.id

Boks 2. Perubahan Tahun Dasar PDB Indonesia Berbasis SNA 2008

Pada penyusunan dokumen APBN-P tahun 2014, data PDB baik menurut pengeluaran maupun lapangan usaha menggunakan tahun dasar 2000 atau disebut dengan seri 2000. Pada seri ini PDB menurut pengeluaran terdiri dari 6 komponen sedangkan PDB menurut lapangan usaha terdiri dari 9 sektor. Namun pada akhir tahun pelaporan 2014, PDB disesuaikan dengan perhitungan tahun dasar 2010 (seri 2010) dimana PDB menurut lapangan usaha menggunakan 17 kategori dan menurut pengeluaran menjadi 7 komponen.

Tabel 1. Perbandingan Klasifikasi PDB seri 2000 dan seri 2010

Seri 2000	Seri 2010
Pengeluran	Pengeluaran
1. Konsumsi RT	1. Konsumsi Rumah Tangga
2. Konsumsi Pemerintah	2. Konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga
3. PMTB	3. Konsumsi pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. PMTB
5. Ekspor Barang dan Jasa	5. Perubahan Inventori
6. Impor barang dan jasa	6. Ekspor Barang dan Jasa
Sektoral	7. Impor barang dan jasa
1. Pertanian, peternakan,kehutanan, dan perikanan	Sektoral
2. Pertambangan dan penggalian	1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan
3. Industri Pengolahan	2. Pertambangan dan penggalian
4. Listrik, gas, dan air bersih	3. Industri pengolahan
5. Konstruksi	4. Pengadaan listrik dan gas
6. Perdagangan, hotel dan restoran	5. Pengadaan air
7. Pengangkutan dan komunikasi	6. Konstruksi
8. Keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan	7. Perdagangan besar dan eceran, reparasi perawatan mobil dan sepeda motor
9. Jasa-jasa	8. Transportasi dan pergudangan
	9. Penyediaan akomodasi dan makan minum
	10. Informasi dan komunikasi
	11. Jasa keuangan
	12. *Real Estate*
	13. Jasa perusahaan
	14. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib
	15. Jasa pendidikan
Sumber: Badan Pusat Statistik	16. Jasa keseatan dan kegiatan sosial
	17. Jasa lainnya

PDB tahun dasar 2010 tersebut telah mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* 2008 yang merupakan rekomendasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Salah satu rekomendasi PBB dalam buku panduan SNA 2008 bahwa pergantian tahun dasar dilakukan pada tahun yang berakhir 0 dan 5 dengan maksud untuk menjamin keterbandingan PDB secara internasional dan penyusunannya melalui kerangka *Supply and Use Tables (SUT)* 2010. Penyusunan SUT berguna untuk menjaga konsistensi penghitungan PDB dengan 3 pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan. Selain itu, perubahan tahun dasar PDB memberikan gambaran perekonominan nasional terkini, menunjukkan penghitungan yang lebih akurat terkait level dan struktur ekonomi dengan memasukkan kegiatan ekonomi baru yang belum dicatat dalam penghitungan sebelumnya.

Selain perubahan komponen menurut pengeluaran maupun lapangan usaha menurut produksi, PDB Seri 2010 juga dimaksudkan untuk mencakup perubahan struktur ekonomi selama 10 tahun terakhir, khususnya akibat perubahan teknologi dan informasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya kegiatan ekonomi yang baru serta produk baru yang

www.peraturan.go.id

terjadi selama 10 tahun terakhir. Sebagai konsekuensinya, terdapat perbedaan hasil perhitungan PDB, baik secara nilai maupun pertumbuhan, misalnya PDB nominal, PDB konstan dan pertumbuhan PDB.

Tabel 2. Perbandingan Perkembangan PDB Seri 2000 dan Seri 2010

	2010	2011	2012	2013	2014
PDB Nominal Tahun Dasar 2000 (Rp T)	6.446,9	7.419,2	8.229,4	9.084,0	10.094,9
PDB Nominal Tahun Dasar 2010 (Rp T)	6.864,1	7.843,7	8.662,6	9.578,4	10.542,7
PDB Riil Tahun Dasar 2000 (Rp T)	2.314,5	2.464,6	2.618,9	2.770,3	2.909,2
PDB Riil Tahun Dasar 2010 (Rp T)	6.864,1	7.287,3	7.726,5	8.152,9	8.568,10
Pertumbuhan PDB Tahun Dasar 2000 (%)	6,2	6,5	6,3	5,7	5,06
Pertumbuhan PDB Tahun Dasar 2010 (%)	6,4	6,2	6,0	5,5	5,02

Sumber: Badan Pusat Statistik

Inflasi

Sepanjang tahun 2014, harga berbagai komoditas secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Pada bulan Desember 2014, dari hasil pemantauan BPS di 82 kota tercatat seluruh kota mengalami inflasi dengan inflasi tertinggi terjadi di Merauke sebesar 4.53 % dengan IHK 123,90 dan terendah terjadi di Meulaboh sebesar 1,17 % dengan IHK 120,56. Tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2014 terhadap Desember 2013) sebesar 8,36 persen.

Kelompok *volatile food* mengalami tekanan inflasi sepanjang tahun 2014 hal ini terjadi akibat ketidakstabilan harga dan keterbatasan stok beberapa *volatile food* seperti beras dan aneka cabai yang terjadi hingga penghujung tahun 2014 .

Sementara, tekanan inflasi dari kelompok *administered prices* meningkat. Peningkatan inflasi pada kelompok ini terjadi antara lain karena pengalihan subsidi BBM di penghujung tahun yang menyebabkan harga BBM di masyarakat menggunakan harga non subsidi untuk jenis premium dan subsidi tetap untuk jenis solar, penyesuaian tarif listrik kelompok Rumah Tangga dan Industri, penyesuaian harga LPG 12 kg, serta penyesuaian kenaikan tarif angkutan secara umum seiring musim liburan.

Di sisi lain, penurunan harga komoditas global yang dapat mengkompensasi tekanan inflasi yang berasal dari depresiasi rupiah dinilai sebagai penyebab cukup terkendalinya inflasi inti.

Dalam rangka menjaga kestabilan harga domestik, Pemerintah terus melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia melalui forum TPI dan TPID terutama pada upaya penentuan mekanisme *fixed subsidy* BBM dan reformasi subsidi energi lainnya, kemampuan fiskal pemerintah dalam mengalokasikan penghematan subsidi serta pengawasan, distribusi dan stabilitasi harga pangan strategis. Laju inflasi bulanan (*m-to-m*) dan Tahunan *(y-o-y)* selama tahun 2014 tergambar di Grafik 4.

www.peraturan.go.id

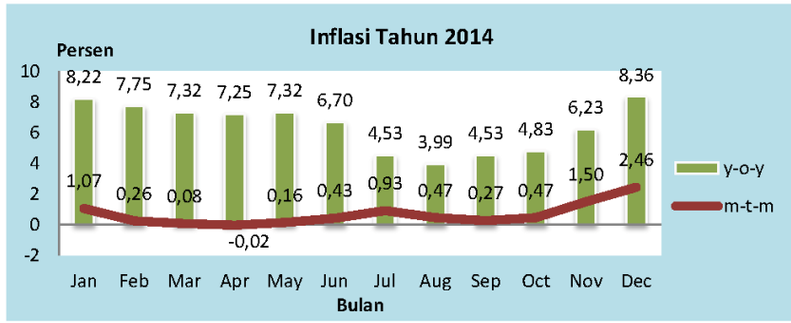

Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 4. Tren Laju Inflasi Bulanan dan Tahunan Tahun 2014

Nilai Tukar Rupiah

Selama tahun 2014 nilai tukar rupiah mengalami tekanan depresiasi. Secara rata-rata rupiah tercatat melemah sebesar 12,67 persen pada level Rp11.878/USD dari sebelumnya sebesar Rp10.452/USD di tahun 2013. Secara *point to point* (ptp) pada 31 Desember 2014, rupiah terdepresiasi sebesar 2,06 persen (yoy) dari Rp12.189/USD di 31 Desember 2013 ke level Rp12.440/USD.

Tekanan terhadap nilai tukar rupiah atas dolar AS khususnya terjadi pada triwulan IV tahun 2014. Kejadian ini dipengaruhi oleh beberapa hal di antaranya menguatnya dolar Amerika Serikat terhadap hampir seluruh mata uang berbagai negara sejalan dengan perbaikan ekonomi Amerika Serikat dan rencana kenaikan suku bunga *Fed Fund Rate,* melambatnya perekonomian global, serta perilaku investor yang menunggu proses peralihan pemerintahan. Bank Indonesia terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya sehingga dapat mendukung penyesuaian ekonomi secara terkendali. Di samping itu, koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus ditingkatkan dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dan persepsi positif pasar terhadap perekonomian Indonesia.

Neraca Pembayaran Indonesia

Kinerja NPI tahun 2014 secara keseluruhan menunjukkan peningkatan yang signifikan. NPI 2014 mencatatkan surplus USD 15,2 miliar setelah sebelumnya mengalami defisit USD 7,3 miliar pada tahun 2013. Peningkatan ini didukung juga dengan menyusutnya defisit transaksi berjalan menjadi USD 26,2 miliar (2,95 persen PDB) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar USD 29,1 miliar (3,18 persen PDB). Perbaikan ini bersumber dari kenaikan surplus neraca transaksi modal dan finansial serta neraca perdagangan non migas, seiring penurunan impor mengikuti pelemahan permintaan domestik. Meningkatnya surplus transaksi modal dan finansial sebesar USD 43,6 miliar dari sebelumnya sebesar USD 22,00 miliar di tahun 2013 yang berasal dari aliran masuk investasi asing langsung (FDI) dan surplus investasi lain dari penarikan simpanan penduduk di luar negeri serta penarikan pinjaman LN korporasi. Hal ini diakibatkan oleh meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek pertumbuhan ekonomi indonesia. Kinerja perdagangan non migas mengalami perbaikan terutama karena tingginya permintaan minyak nabati dan ekspor manufaktur, sedangkan di sisi migas, defisit neraca perdagangan migas menyusut walaupun volume impor minyak meningkat, hal ini dikarenakan melemahnya harga minyak mentah dunia.

www.peraturan.go.id

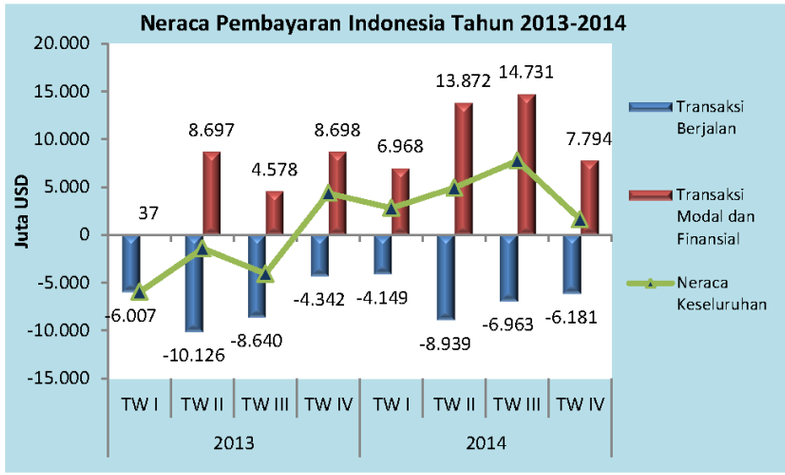

Sumber :Bank Indonesia

Grafik 5. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulanan 2013-2014

Ekspor dan Impor Tahun 2014

Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia periode Januari – Desember 2014 sebesar USD 176,29 miliar atau menurun 3,43 persen dibanding periode yang sama tahun 2013. Capaian ekspor ini terdiri dari ekspor non migas senilai USD 145,96 miliar atau turun 2,64 persen dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya dan ekspor migas sebesar USD 30,33 miliar atau turun 7,05 persen dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Perlambatan kinerja ekspor ditahun 2014 dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya pelemahan permintaan global khususnya dari negara mitra dagang utama Indonesia yaitu Tiongkok dan Jepang serta strategi kebijakan pemerintah untuk mendorong peningkatan nilai tambah ekspor minerba.

Selama periode Januari – Desember 2014 total impor mencapai 178,18 miliar atau turun 4,53 persen dibanding dengan periode yang sama tahun 2013. Capaian impor ini terdiri dari impor non migas senilai USD134,72 miliar atau turun 4,70 persen dan impor migas sebesar USD43,46 miliar atau turun 3,99 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai impor golongan barang konsumsi, bahan baku/penolong dan barang modal mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing sebesar 3,59 persen, 4,05 persen dan 7,07 persen. Perlambatan impor berasal dari penurunan impor barang konsumsi dan kontraksi impor barang modal serta bahan baku. Penurunan impor juga terkait dengan respons kebijakan dalam mengendalikan permintaan domestik dan kebijakan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap barang impor. Tren perkembangan ekspor, impor dan neraca perdagangan selama tahun 2012-2014 dapat dilihat pada grafik 6.

www.peraturan.go.id

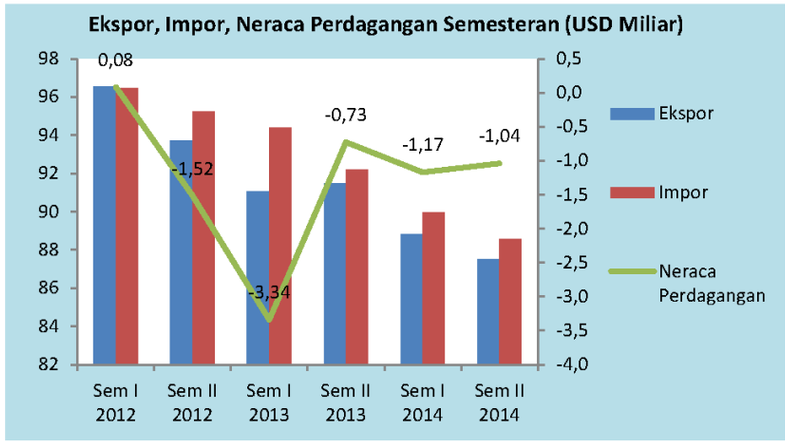

Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 6. Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Semesteran 2012-2014 (Miliar USD)

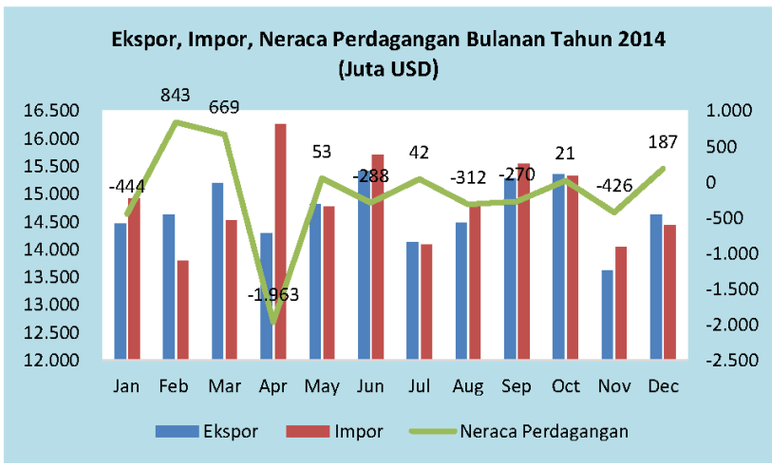

Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 7. Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Bulanan 2014 (Juta USD)

Cadangan Devisa

Sepanjang Triwulan IV tahun 2014, kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dipengaruhi oleh perbaikan transaksi berjalan serta surplus transaksi modal dan finansial berhasil mendorong kenaikan cadangan devisa dari USD111,2 miliar pada triwulan III tahun 2014 menjadi USD111,86 miliar pada triwulan IV atau setara dengan 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Peningkatan cadangan devisa merupakan refleksi daya tahan perekonomian nasional terhadap tekanan sektor eksternal.

www.peraturan.go.id

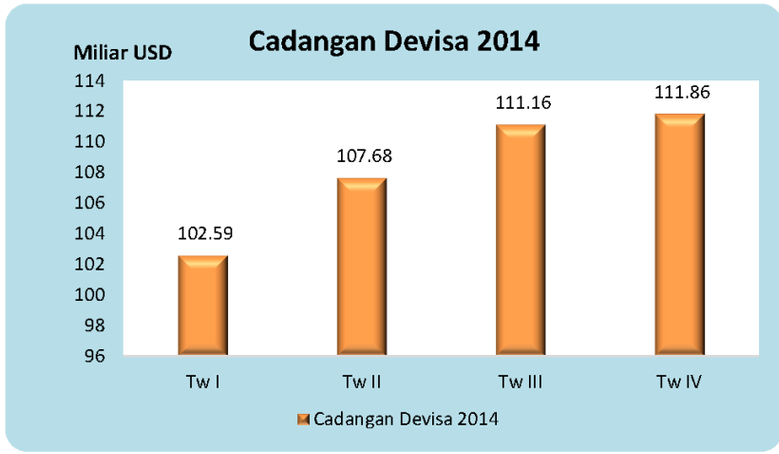

Sumber : Bank Indonesia

Grafik 8. Cadangan Devisa 2014 (Miliar USD)

BI Rate

Pada bulan November dan Desember 2014, BI *rate* diputuskan berada di level 7,75 persen dimana dari Januari – Oktober 2014 BI *rate* sebesar 7,50 persen. Kebijakan tersebut konsisten dengan upaya untuk mengarahkan inflasi menuju sasaran 4 ± 1 persen pada 2015 dan 2016 serta menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat. Berdasarkan UU mengenai Bank Indonesia, penetapan sasaran inflasi dilakukan oleh Pemerintah. Dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Bank Indonesia, ditetapkan sasaran Inflasi untuk periode 2013 – 2015, masing-masing sebesar 4,5%, 4,5%, dan 4% masing-masing dengan deviasi ± 1%.

Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN)

Ketertarikan investor terhadap obligasi pemerintah masih tetap tinggi. Hal tersebut terlihat dari kepemilikan asing yang terus meningkat pada surat berharga negara (SBN) yang dapat diperdagangkan (*tradable)*. Porsi kepemilikan asing pada SBN *tradable* pada 12 Desember 2014 tercatat mencapai 38,6 persen dengan nilai nominal sebesar Rp 470,0 triliun atau lebih tinggi dibanding posisinya pada akhir tahun 2013 yang mencapai 32,5 persen dengan nominal Rp323,9 triliun.

Suku Bunga SPN 3 Bulan

Berakhirnya stimulus moneter oleh *The Fed* pada *Quantitative Easing (QE 3)* pada akhir Oktober 2014 menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan tingkat suku bunga obligasi Pemerintah Indonesia. Tingkat obligasi pemerintah dengan tenor 5, 10, dan 30 tahun terlihat mengalami tekanan sejak pertengahan tahun 2013 dan terus berlanjut hingga tahun 2014. Selain faktor global, tingkat suku bunga obligasi pemerintah mengalami peningkatan yang disebabkan oleh tekanan yang bersumber dari faktor domestik seperti kenaikan laju inflasi. Tekanan terhadap tingkat suku bunga obligasi juga tercermin pada obligasi negara dengan tenor pendek, seperti Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan juga mengalami hal serupa. Meskipun demikian, rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan pada Tahun 2014 masih dapat dikendalikan di tingkat 5,8 persen atau lebih rendah dibandingkan asumsi APBN-P 2014 sebesar 6,0 persen.

IHSG

Perkembangan pasar saham domestik selama 2014 menunjukkan kinerja positif seiring dengan sentimen positif global dan perbaikan data ekonomi domestik. IHSG pada triwulan I

www.peraturan.go.id

2014 mencapai level 4.768,28 (28 Maret 2014) atau naik 11,6% (qtq) dibandingkan level triwulan IV 2013 yang sebesar 4.274,18. Sedangkan pada triwulan II 2014 mencapai level 4.878,58 (30 Juni 2014) atau naik 2,3% (qtq) dibandingkan triwulan I 2014. Pada Triwulan III 2014 mencapai level 5.137,58 (30 September 2014) atau naik 5,3% (qtq) dibandingkan triwulan II 2014. Pada Triwulan IV 2014 mencapai level 5.226,95 (31 Desember 2014) atau naik sebesar 1,7% (qtq) dibandingkan dengan triwulan III 2014. Dibandingkan dengan penutupan tahun lalu indeks pasar saham IHSG naik 22.3%. Penguatan IHSG dipicu oleh inflasi yang terkendali serta optimisme terhadap perbaikan *corporate earnings*. Sementara itu, sentiment positif eksternal yang mendorong kinerja IHSG adalah spekulasi kebijakan pemerintah Tiongkok yang akan mendorong pasar saham dan rilis data *trade balance* Tiongkok yang mengalami surplus lebih tinggi dari perkiraan.

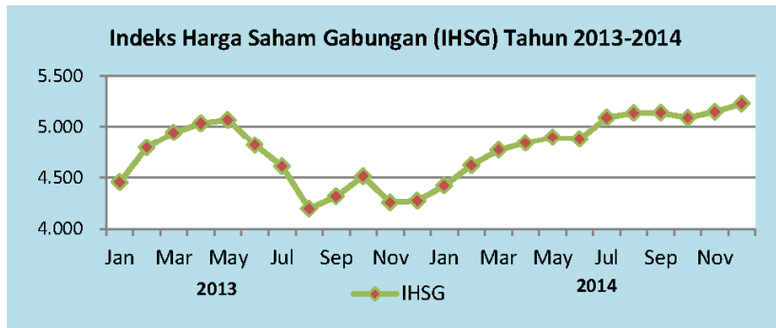

Sumber : Bursa Efek Indonesia

Grafik 9. Tren Laju IHSG Bulanan Tahun 2013-2014

Fungsi Intermediasi Perbankan

Di tengah proses penyesuaian dalam perekonomian domestik, ketahanan industri perbankan masih terpelihara ditopang oleh modal yang kuat dan risiko kredit yang terkendali. Hingga akhir 2014, fungsi intermediasi perbankan berlangsung baik seperti tercermin dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang berada pada level 89,42 persen. Pada Desember 2014, rasio kecukupan modal bank (CAR/*Capital Adequacy Ratio*) tercatat sebesar 19,4 persen, jauh di atas ketentuan minimum 8 persen. Rasio kredit bermasalah (NPL/*Non Performing Loan*) *gross* juga masih terjaga pada level rendah dan stabil di kisaran 2,00 persen, Desember 2014 NPL berada pada posisi 2,2 persen.

Tabel 3. Perkembangan CAR, LDR, dan NPL Bulanan 2014

Indikator	2014											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
LDR (%)*	90,47	90,47	91,79	90,79	90,30	90,25	92,19	90,63	88,93	88,45	88,65	89,42
NPL Gross (%)	1,9	2	2	2	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	2,4	2,2
CAR	19,6	19,8	19,8	19,4	19,5	19,3	19,3	19,3	19,4	19,5	19,6	19,4

Sumber : Bank Indonesia

www.peraturan.go.id

Lifting Minyak dan Gas

Lifting minyak mentah Indonesia selama tahun 2014 (Desember 2013 – November 2014) rata-rata mencapai kisaran 794 ribu barel per hari yang berarti lebih rendah bila dibandingkan dengan target APBN-P tahun 2014 sebesar 818 ribu per barel per hari. Rata-rata *lifting* gas dalam Tahun 2014 (Desember 2013 – November 2014) mencapai 1.224 ribu barel setara minyak per hari sama dengan target APBN-P 2014. Rendahnya realisasi *lifting* minyak bumi antara lain disebabkan karena menurunnya kapasitas produksi sumur-sumur migas, beberapa permasalahan teknis meliputi cuaca buruk, dan adanya pemunduran jadwal produksi dari rencana semula oleh beberapa kontraktor.

Harga Minyak Mentah Indonesia

Harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP)* di tahun 2014 cenderung meningkat pada Semester I, kemudian mengalami penurunan pada Semester II. Pada bulan Januari 2014, ICP berada di kisaran USD105,80 per barel, selanjutnya pada bulan-bulan berikutnya, ICP mengalami kenaikan harga dan berada di level tertinggi pada bulan Juni 2014 di kisaran USD108,95 per barel. Harga rata-rata ICP sampai dengan semester I tahun 2014 sebesar USD106,73 per barel. Namun pada Semester II 2014 rata-rata ICP mengalami penurunan. ICP mulai turun pada bulan Juli, penurunan tersebut terus terjadi hingga akhir tahun. Hal tersebut diantaranya dipengaruhi oleh faktor penurunan permintaan minyak mentah jenis *direct burning* di Jepang akibat substitusi dari *direct fuel* dengan *natural gas* dan batubara. Penurunan harga tersebut sejalan dengan perkembangan minyak mentah utama dunia dan juga di pengaruhi oleh pertemuan negara-negara OPEC yang sepakat tidak memotong produksi serta dampak meningkatnya pasokan substitusi minyak khususnya *shale oil and gas*. Pada bulan desember 2014 harga rata-rata ICP menurun ke kisaran USD 59,56 per barel yaitu turun 20,46% dari rata-rata ICP November 2014 sebesar USD 75.39 per barel. Angka tersebut adalah harga minyak mentah Indonesia terendah selama tahun 2014. Rata-rata ICP tahun 2014 adalah USD 97 per barel.

POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL 2014

Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro pada APBN-P TA 2014

Realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yang lebih rendah dibanding target APBN-P-nya terus berlanjut hingga triwulan I tahun 2014, sehingga diperkirakan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2014 akan lebih rendah dibanding target APBN-nya. Selain itu, realisasi *lifting* minyak bumi pada akhir tahun 2013 jauh lebih rendah dibanding targetnya dan kondisi ini berlanjut hingga semester I tahun 2014. Perbedaan antara target dan realisasi tersebut memberikan tekanan yang berat terhadap pelaksanaan APBN tahun 2014.

Perkembangan kondisi perekonomian nasional yang berbeda dengan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam APBN tahun 2014 mengharuskan Pemerintah melakukan perubahan. Perubahan APBN tahun 2014 di samping menampung perubahan asumsi dasar ekonomi makro juga dimaksudkan untuk menampung perubahan kebijakan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2014.

Adapun perubahan asumsi dasar ekonomi makro APBN 2014 adalah sebagai berikut:

1) Pertumbuhan ekonomi dari 6,0 persen menjadi 5,5 persen.
   Koreksi ke bawah pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dipengaruhi oleh faktor masih lemahnya perekonomian global dan penurunan kinerja perdagangan internasional.

2) Inflasi dari 5,5 persen menjadi 5,3 persen.
   Laju inflasi diperkirakan cenderung lebih rendah didukung oleh membaiknya pasokan

www.peraturan.go.id

barang kebutuhan masyarakat dan harga komoditas internasional yang cenderung turun. Selain itu, koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil diharapkan dapat menjaga laju inflasi sepanjang tahun 2014.

3) Tingkat suku bunga SPN tiga bulan dari 5,5 persen menjadi 6,0 persen.
Kondisi likuiditas global yang semakin ketat dan masih tingginya ketidakpastian di sektor keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat bunga obligasi pemerintah. Namun, masih tingginya permintaan obligasi pemerintah menjadi faktor positif bagi pencapaian tingkat suku bunga sesuai target yang ditetapkan.

4) Nilai tukar Rupiah dari Rp10.500 per USD menjadi Rp11.600 per USD.
Isu kebijakan *tapering off* oleh *The Fed* telah menimbulkan tekanan yang sangat signifikan pada nilai tukar di berbagai kawasan termasuk Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan akan mencapai keseimbangan baru yang mencerminkan kondisi fundamental perekonomian Indonesia. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

5) *Lifting* minyak dari 870 ribu barel per hari menjadi 818 ribu barel per hari dan *lifting* gas dari 1.240 ribu barel setara minyak per hari menjadi 1.224 ribu barel setara minyak per hari.

Dengan mempertimbangkan realisasi *lifting* minyak dan gas bumi pada triwulan I tahun 2014, sampai dengan akhir tahun 2014 *lifting* minyak dan gas bumi diperkirakan lebih rendah dari asumsi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2014.

Tabel 4. Ringkasan Indikator Makro Tahun 2014

INDIKATOR	APBN 2014	APBN-P 2014	REALISASI
Pertumbuhan Ekonomi (%) y-o-y	6,0	5,5	5,06
Tingkat Inflasi (%) y-o-y	5,5	5,3	8.36
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	10.500	11.600	11.878
Tingkat Suku Bunga SPN 3 bulan (%)	5,5	6,0	5,80
Harga Minyak (USD/Barel)	105	105	97
Lifting Minyak (Ribu Barel/Hari)	870	818	794
Lifting Gas (Ribu Barel Setara Minyak/Hari)	1.240	1.224	1.224

Sumber: Kementerian Keuangan

Tema Pembangunan RKP 2014

Arah kebijakan dan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2014 dirumuskan dalam satu tema, yaitu **"Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan"**. Untuk mendukung pencapaian tema tersebut, ditetapkan 11 prioritas pembangunan nasional dan 3 prioritas nasional lainnya, yaitu (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan iklim usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik; dan (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Sedangkan tiga prioritas lainnya adalah (1) bidang politik, hukum, dan keamanan; (2) bidang perekonomian; dan (3) bidang kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan kebijakan ekonomi makro didasarkan pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana dijabarkan

www.peraturan.go.id

pada Rencana kerja Pemerintah Tahun 2014.

Sejalan dengan 11 prioritas pembangunan nasional dan 3 prioritas nasional lainnya tersebut, RKP dibagi dalam tiga bagian, yaitu pertama, kebijakan yang diarahkan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional; kedua, kebijakan untuk memperkuat pembangunan di berbagai bidang; serta ketiga kebijakan untuk memperkokoh kesatuan wilayah pembangunan seluruh Indonesia.

Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan Postur APBN-P 2014

APBN 2014 didesain sesuai dengan penetapan tiga fungsi yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas. Fungsi alokasi berkaitan dengan alokasi anggaran pemerintah untuk tujuan pembangunan nasional, terutama dalam melayani kebutuhan masyarakat dan mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Fungsi distribusi berkaitan dengan distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, sedangkan fungsi stabilitas berkaitan dengan upaya untuk menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi sehingga perekonomian tetap pada kondisi yang produktif, efisien, dan stabil. Dengan demikian, APBN sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal memiliki peran strategis untuk melaksanakan fungsi ekonomi pemerintah.

Kebijakan fiskal sebagai salah satu pilar penting dalam pengelolaan ekonomi makro, mempunyai peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, strategi yang ditempuh dalam perumusan kebijakan fiskal diarahkan untuk tetap memberikan ruang bagi ditempuhnya kebijakan stimulus fiskal secara terukur guna mendorong upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus perbaikan pemerataan hasil pembangunan nasional dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.

Secara umum, kebijakan fiskal tahun 2014 masih bersifat ekspansif dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap mengendalikan defisit dalam batas aman. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui (1) kebijakan pendapatan negara; (2) kebijakan belanja negara; dan (3) kebijakan defisit dan pembiayaan anggaran.

APBN Perubahan tahun 2014 disusun dalam rangka mengendalikan dan mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2014 dan menjaga defisit APBN dalam batas aman akibat tekanan yang sangat berat terhadap pelaksanaan APBN 2014, baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara.

Sejalan dengan realisasi APBN 2013 dan perkembangan asumsi dasar ekonomi makro sebagai dasar perhitungan dalam APBN-P maka pokok-pokok perubahan postur APBN-P 2014 adalah sebagai berikut:

- Pendapatan negara dari Rp1.667.140,8 miliar menjadi Rp1.635.378,5 miliar;
- Belanja negara dari Rp1.842.495,3 miliar menjadi Rp1.876.872,8 miliar;
- Defisit anggaran dari Rp175.354,5 miliar menjadi Rp241.494,3 miliar;
- Pembiayaan defisit dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri dari Rp196.258,0 miliar menjadi Rp254.932,0 miliar dan pembiayaan luar negeri (neto) dari negatif Rp20.903,5 miliar menjadi negatif Rp13.437,7 miliar.

www.peraturan.go.id

Tabel 5. Ringkasan Realisasi Anggaran 2013, APBN dan APBN-P 2014
(triliun Rupiah)

URAIAN	TA 2013 (Realisasi LKPP Audited)	TA 2014	
		APBN	APBN-P
Penerimaan Perpajakan	1.077,31	1.280,39	1.246,11
PNBP	354,75	385,39	386,95
Penerimaan Hibah	6,83	1,36	2,33
Pendapatan Negara & Hibah	1.438,89	1.667,14	1.635,38
Belanja Pemerintah Pusat	1.137,16	1.249,94	1.280,37
Transfer ke Daerah	513,26	592,55	596,50
Total Belanja Negara	1.650,56	1.842,49	1.876,87
Surplus (Defisit)	(211,67)	(175,35)	(241,49)
Pembiayaan	237,39	175,35	241,49

Sumber: Kementerian Keuangan

Kebijakan Umum Perpajakan

Terkait upaya mencapai target penerimaan perpajakan, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan di bidang perpajakan, yaitu (1) penyempurnaan peraturan perpajakan untuk lebih memberi kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan wajar, khususnya untuk bidang usaha pertambangan, panas bumi, bidang usaha berbasis syariah, dan jasa keuangan; (2) penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak; (3) perluasan basis pajak dan penyesuaian tarif; (4) penyempurnaan kebijakan insentif perpajakan untuk mendukung iklim usaha dan investasi; (5) penguatan penegakan hukum bagi penyelundupan pajak.

Kebijakan umum untuk penerimaan perpajakan dalam APBN-P 2014 antara lain:

a. Penyempurnaan peraturan perpajakan;
b. Peningkatan kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap penerimaan negara;
c. Kebijakan perpajakan untuk meningkatkan *capital inflow* dan mengurangi *capital outflow*;
d. Evaluasi kebijakan tarif bea masuk, antara lain untuk sektor industri alat transportasi darat untuk mendukung moda transportasi dalam negeri;
e. Penerapan kebijakan bea keluar untuk mendukung hilirisasi, antara lain bea keluar atas ekspor produk mineral;
f. Penyesuaian tarif cukai minuman mengandung etil alkohol.

REALISASI PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2014

Selama tahun 2014, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp1.550,49 triliun atau 94,81 persen dari target yang ditetapkan APBN 2014 sebesar Rp1.635,38 triliun. Capaian realisasi pendapatan negara dan hibah ini didukung oleh realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.146,87 triliun atau 92,04 persen dari target APBN 2014 sebesar Rp1.246,11 triliun. Realisasi penerimaan PNBP sebesar Rp398,59 triliun atau 103,01 persen dari target APBN 2014 sebesar Rp386,95 triliun, dan realisasi penerimaan hibah sebesar Rp5,03 triliun atau 216,53 persen dari target APBN 2014 sebesar Rp2,33 triliun. Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pendapatan negara tahun 2014 antara lain perkembangan kondisi ekonomi dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah serta realisasi APBN-P 2013. Faktor ekonomi yang memengaruhi perubahan pendapatan negara antara lain (1) pertumbuhan ekonomi, (2)

www.peraturan.go.id

inflasi, (3) nilai tukar, (4) harga minyak mentah Indonesia (ICP), (5) serta lifting minyak dan gas bumi.

Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah 5 Tahun Terakhir

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2010-2014) pendapatan negara dan hibah mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 12,94 persen. Pertumbuhan ini sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan kemandirian APBN. Realisasi pendapatan negara dan hibah mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011, yaitu sebesar 21,63 persen, dan mengalami pertumbuhan terendah pada tahun 2013 yaitu sebesar 7,53 persen.

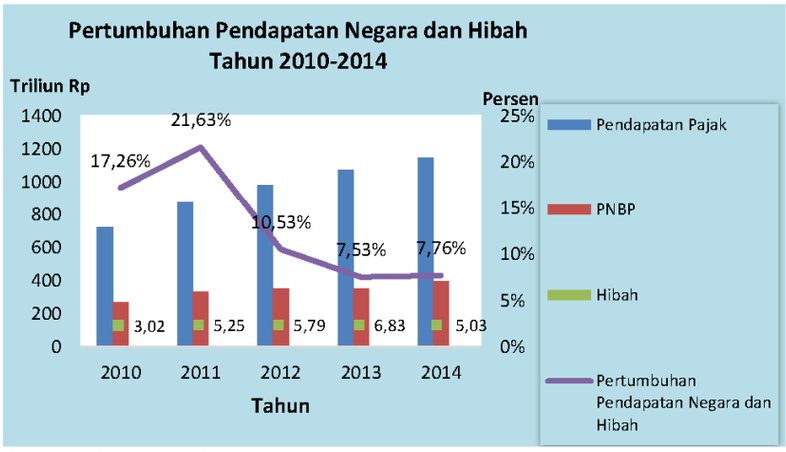

Sumber : Kementerian Keuangan

Grafik 10. Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2010-2014

Realisasi Penerimaan PerpajakanTahun 2014

Perpajakan tetap menjadi tumpuan utama dalam capaian pendapatan negara dan hibah sepanjang tahun 2014. Penerimaan perpajakan mencapai Rp1.146,87 triliun atau meningkat 6,46 persen dibanding periode yang sama tahun 2013 sebesar Rp1.077,31 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan tersebut dipengaruhi oleh implikasi kebijakan penerimaan perpajakan, baik kebijakan di bidang penerimaan pajak maupun kebijakan di bidang penerimaan kepabeanan dan cukai.

Komposisi Penerimaan Perpajakan

Komposisi penerimaan perpajakan tahun 2014 meliputi penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp1.103,22 triliun dan penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar Rp43,65 triliun. Penerimaan pajak dalam negeri meliputi penerimaan PPh sebesar Rp546,18 triliun, penerimaan PPN dan PPn BM sebesar Rp409,18 triliun, penerimaan PBB sebesar Rp23,48 triliun, penerimaan cukai sebesar Rp118,09 tiliun, dan penerimaan pajak lainnya sebesar Rp6,29 triliun. Sedangkan penerimaan pajak perdagangan internasional terdiri dari bea masuk sebesar Rp32,32 triliun dan bea keluar sebesar Rp11,33 triliun.

www.peraturan.go.id

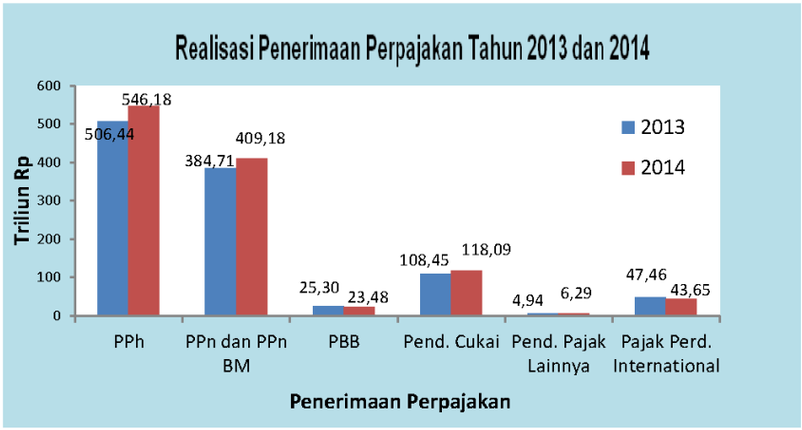

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 11. Penerimaan Perpajakan Tahun 2013 dan 2014 (Triliun Rupiah)

Tax Ratio

Tax ratio merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan perpajakan dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Rasio itu dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara dan menjadi salah satu indikator ketahanan fiskal suatu negara. *Tax ratio* Indonesia berangsur-angsur meningkat pada periode 2010-2012, namun mengalami penurunan di tahun 2013 dan 2014. Realisasi rasio penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio*) tahun 2014 mencapai 11,36 persen. Persentase ini menurun sebesar 0,50 persen bila dibandingkan dengan tax ratio tahun 2013 sebesar 11,86 persen.

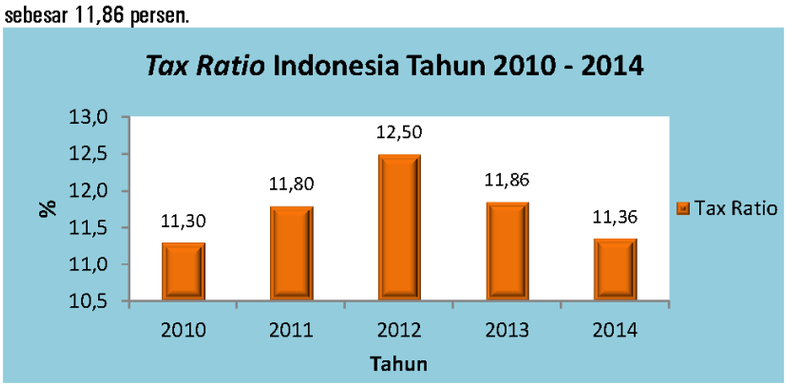

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 12. *Tax Ratio* Indonesia Tahun 2010-2014

Realisasi PNBP Tahun 2014

Capaian PNBP tahun 2014 mencapai Rp398,59 triliun atau sebesar 103,01 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp386,95 triliun. Capaian realisasi PNBP ini naik sebesar Rp43,84 triliun dari realisasi PNBP tahun 2013 sebesar Rp354,75 triliun. Komposisi PNBP meliputi penerimaan SDA sebesar Rp240,85 triliun, pendapatan bagian laba BUMN sebesar Rp40,31 triliun, PNBP lainnya sebesar Rp87,75 triliun, dan pendapatan BLU sebesar Rp29,68 triliun. Meningkatnya pencapaian PNBP tersebut dipengaruhi oleh perkembangan beberapa

www.peraturan.go.id

asumsi dasar ekonomi makro, khususnya harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah, dan *lifting* minyak dan gas bumi (migas).

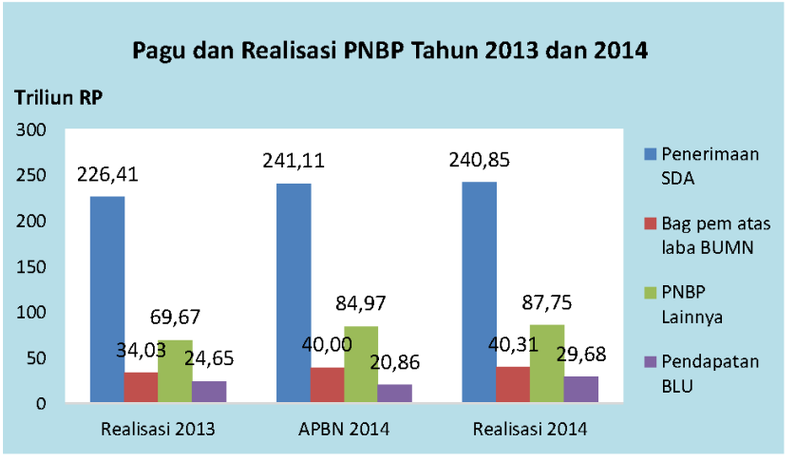

Sumber : Kementerian Keuangan

Grafik 13. Pagu dan Realisasi PNBP Tahun 2013 dan 2014 (Triliun Rupiah)

Penerimaan Hibah Tahun 2014

Penerimaan hibah tahun 2014 terealisasi sebesar Rp5,03 triliun atau 216,53 persen dari target APBN tahun 2014 sebesar Rp2,33 triliun. Realisasi tersebut menurun sebesar 26,32 persen bila dibandingkan dengan realisasi hibah tahun 2013 yang mencapai Rp6,83 triliun. Penerimaan hibah sangat tergantung atas komitmen negara donor untuk memberikan bantuannya dan komitmen Kementerian Negara/Lembaga penerima hibah dalam melaporkan dan melakukan pengesahan hibah yang telah diterimanya. Dalam rangka tertib administrasi, kebijakan penerimaan hibah diarahkan pada upaya untuk menyempurnakan sistem penerimaan dan pelaporan hibah yang diterima langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga.

REALISASI BELANJA NEGARA

Kebijakan Belanja Negara Tahun 2014

Dalam APBN-P tahun 2014 terdapat penyesuaian atas besaran belanja negara melalui perubahan kebijakan fiskal di bidang belanja negara. Pokok-pokok perubahan kebijakan tersebut antara lain: (1) upaya pengendalian subsidi energi; (2) pengalokasian anggaran cadangan belanja untuk kebutuhan yang bersifat kontraktual dan tunggakan tagihan atas beberapa kegiatan tahun-tahun sebelumnya; serta (3) pemotongan belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Kebijakan pemotongan belanja K/L tersebut dilakukan untuk anggaran yang bersumber dari rupiah murni dengan tidak mengurangi anggaran kebutuhan belanja pegawai dan barang untuk operasional kantor, anggaran pendidikan, tetap menjaga upaya pencapaian program prioritas nasional, serta dengan mengecualikan pemotongan-pemotongan pada kegiatan-kegiatan terkait dengan pelaksanaan BPJS bidang kesehatan dan Pemilu 2014

Arah dan Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2014

Kebijakan dan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2014 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014, pokok-pokok kebijakan fiskal, dan kerangka ekonomi makro tahun 2014.

www.peraturan.go.id

Perkembangan beberapa indikator ekonomi makro yang diiringi respon kebijakan yang akan diambil pemerintah, menyebabkan postur perubahan APBN tahun 2014 berbeda dengan APBN-nya secara struktural, tidak terkecuali pada komponen belanja pemerintah pusat sebagai salah satu komponen dari belanja negara. Perbedaan tersebut utamanya diakibatkan oleh perkiraan peningkatan secara signifikan beban subsidi BBM dan subsidi listrik yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan rasio defisit anggaran terhadap PDB tahun 2014 menjadi lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2014. Perkiraan peningkatan defisit tersebut selain dapat mengganggu pelaksanaan APBN tahun 2014 juga berpotensi menyebabkan terganggunya pencapaian keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah. Untuk meminimalkan potensi terganggunya pencapaian keberlanjutan fiskal tersebut sekaligus mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2014, kombinasi kbijakan yang diambil pemerintah di bidang belanja pemerintah pusat antara lain: (1) kebijakan pengendalian subsidi energi; dan (2) pemotongan anggaran belanja K/L secara terstruktur

Penilaian Kinerja Penyerapan Anggaran Belanja K/L

Kinerja penyerapan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) tahun 2014 dinilai oleh Pemerintah dengan mengacu kepada (1) perbandingan penyerapan antara tahun 2013 dengan tahun 2014; dan (2) perbandingan dengan daya serap nasional. Hal ini dimaksudkan agar anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin, sehingga *multiplier effect* dapat dicapai secara maksimal. Terkait dengan hal itu, Pemerintah melakukan perubahan regulasi di bidang pengadaan barang dan jasa serta memberikan penghargaan kepada K/L yang berkinerja baik untuk menjamin bahwa anggaran telah dilaksanakan dengan efisien dan tepat sasaran dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat.

Realisasi Belanja Negara Tahun 2014

Realisasi belanja negara sepanjang tahun 2014 mencapai Rp1.777,18 triliun atau 94,69 persen dari pagu APBN 2014 sebesar Rp1.876,87triliun. Secara nominal realisasi belanja negara tahun 2014 tersebut naik sebesar Rp126,62 triliun atau 7,67 persen dari realisasi tahun 2013 sebesar Rp1.650,56 triliun. Realisasi belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.203,58 triliun atau 94,00 persen dari pagu APBN 2014 sebesar Rp1.280,37 triliun dan belanja transfer ke daerah sebesar Rp573,70 triliun atau 96,18 persen dari pagu APBN sebesar Rp596,50 triliun. Melalui kebijakan dan alokasi anggaran belanja negara yang diterapkan Pemerintah di tahun 2014, Pemerintah dapat secara langsung berperan aktif dalam mencapai berbagai tujuan dan sasaran program pembangunan di segala bidang kehidupan, termasuk dalam mempengaruhi alokasi sumber daya ekonomi antar kegiatan, antarprogram, antar sektor dan antar fungsi pemerintahan, mendukung stabilitas ekonomi, serta menunjang distribusi pendapatan yang lebih merata.

Realisasi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi

Realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2014 apabila dilihat dari klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp243,72 triliun (94,31 persen dari pagu), belanja barang yang terealisasi sebesar Rp176,62 triliun (90,48 persen dari pagu), belanja modal yang terealisasi sebesar Rp147,35 triliun (91,64 persen dari pagu), belanja pembayaran bunga utang yang terealisasi sebesar Rp133,44 triliun (98,51 persen dari pagu), belanja subsidi yang terealisasi sebesar Rp391,96 triliun (97,25 persen dari pagu), belanja hibah yang terealisasi sebesar Rp0,91 triliun (31,81 persen dari pagu), belanja bantuan sosial yang terealisasi sebesar Rp97,92 triliun (101,31 persen dari pagu), dan belanja lainnya yang terealisasi sebesar Rp11,65 triliun (41,70 persen dari pagu).

www.peraturan.go.id

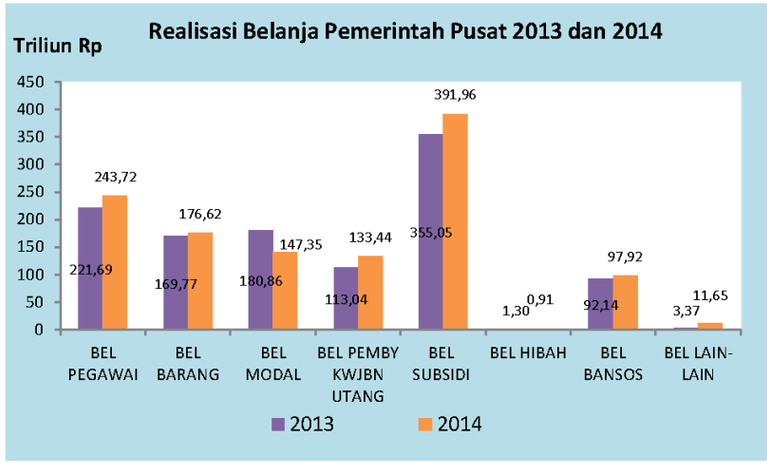

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 14. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat 2013 dan Tahun 2014 Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (triliun Rupiah)

Komponen Terbesar Belanja Pemerintah Pusat

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2014 sebagian besar merupakan belanja yang bersifat wajib dipenuhi (belanja pegawai, belanja barang operasional, dan alokasi penerima bantuan iuran dalam rangka SJSN bidang kesehatan), subsidi, pembayaran bunga utang serta bantuan sosial. Sedangkan sisanya dialokasikan untuk belanja yang merupakan diskresi pemerintah (belanja barang non opersional, sebagian bantuan sosial, belanja modal, belanja hibah dan belanja lain-lain). Komponen terbesar belanja pemerintah pusat apabila dilihat dari klasifikasi ekonomi adalah belanja subsidi yang diikuti oleh belanja pegawai dan belanja barang. Belanja subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual barang atau jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau di masyarakat, meliputi subsidi energi dan subsidi non energi. Sedangkan belanja pegawai sebagian besar digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan serta honorarium, dan juga digunakan untuk pembayaran kontribusi sosial, yakni asuransi kesehatan, dan pembayaran manfaat pensiun.

Arah Kebijakan Transfer ke Daerah Tahun 2014

Arah kebijakan transfer ke daerah tahun 2014 meliputi (1) meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antar daerah; dan (2) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.

Realisasi Transfer ke Daerah

Prinsip dan tujuan desentralisasi fiskal yang dianut Pemerintah antara lain untuk mengurangi *vertical* dan *horizontal fiscal imbalance*, meningkatkan kualitas layanan publik dan mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, meningkatkan efisiensi sumber daya nasional, membangun tata kelola pelaksanaan transfer ke daerah yang tepat sasaran dan tepat waktu, serta mendukung *fiscal sustainability* dalam kebijakan ekonomi makro. Transfer ke daerah yang salah satu sumber pendanaan daerah semakin meningkat seiring dengan naiknya pendapatan negara. Selain anggaran transfer ke daerah yang dialokasikan dan disalurkan ke daerah sebagai penerimaan APBD, juga terdapat beberapa jenis dana APBN yang dialokasikan melalui anggaran kementerian negara/lembaga untuk mendanai beberapa kegiatan di daerah. Dana dari kementerian/lembaga tersebut antara lain berupa dana dekonsentrasi dan tugas

www.peraturan.go.id

pembantuan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga terkait dan tidak menjadi bagian dari penerimaan APBD.

Realisasi transfer ke daerah tahun 2014 mencapai Rp573,70 triliun (96,18 persen dari pagu APBN 2014 sebesar Rp596,50 triliun), atau naik Rp60,44 triliun (11,78 persen) dari realisasi tahun 2013 sebesar Rp513,26 triliun. Realisasi transfer ke daerah tersebut terdiri dari dana perimbangan, dana otsus dan penyesuaian serta dana keistimewaan DIY. Realisasi dana perimbangan tahun 2014 sebesar Rp477,05 triliun atau sebesar 96,99 persen dari pagu APBN 2014 sebesar Rp491,88 triliun. Untuk dana otsus dan penyesuaian terealisasi sebesar Rp96,23 triliun atau 92,44 persen dari pagu APBN 2014 sebesar Rp104,09 triliun. Sedangkan Dana Keistimewaan DIY terealisasi sebesar Rp0,42 triliun (80 persen dari pagu).

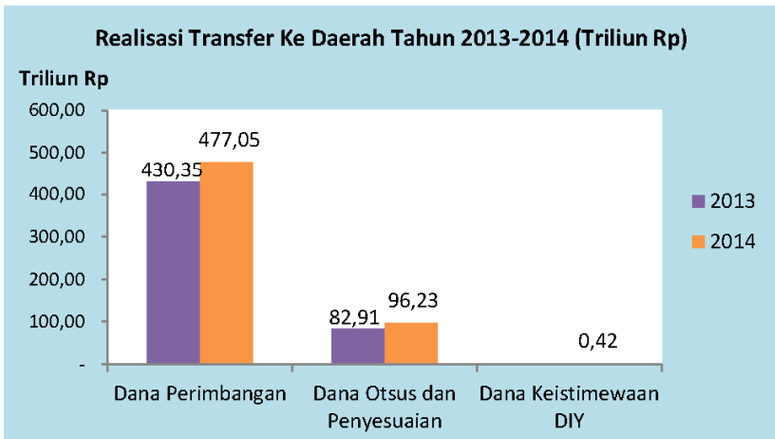

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 15. Realisasi Transfer ke Daerah 2013-2014 (Triliun Rp)

Makna Transfer ke Daerah

Transfer ke daerah adalah instrumen pelaksanaan desentralisasi fiskal selain pemberian kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk memungut pajak (*taxing power*). Oleh karena *local taxing power* melalui pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah masih sangat terbatas, Pemerintah melakukan transfer ke daerah terutama untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan fungsi-fungsi yang telah diserahkan ke daerah (*money follow function*). Namun demikian, di samping transfer ke daerah, Pemerintah juga mengalokasikan dana ke daerah dalam bentuk Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang penyalurannya dilakukan melalui Kementerian Negara/Lembaga teknis.

PEMBIAYAAN

Surplus/Defisit Anggaran

Realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2014 mencapai Rp1.550,49 triliun, sementara realisasi belanja negara mencapai Rp1.777,18 triliun, sehingga defisit tahun anggaran berjalan tahun 2014 sebesar Rp226,69 triliun.

Kebijakan Pembiayaan Tahun 2014

Guna mendukung perekonomian negara dan memberikan stimulus fiskal bagi perekonomian nasional, kebijakan fiskal Pemerintah pada tahun 2014 diarahkan pada kebijakan fiskal ekspansif. Dalam mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah memanfaatkan sumber-sumber

www.peraturan.go.id

pembiayaan yang berasal dari non utang dan utang. Mengingat minimnya kapasitas sumber-sumber pembiayaan non utang, sumber-sumber pembiayaan utang masih menjadi bagian utama sumber pembiayaan dalam menutup defisit APBN 2014. Pembiayaan melalui utang dalam APBN 2014 dilakukan secara terukur dengan memanfaatkan sumber-sumber yang berasal dari utang dalam negeri maupun luar negeri, memperhatikan kapasitas pembiayaan Pemerintah, dan mempertimbangkan beban serta risiko yang harus ditanggung. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah tetap akan memprioritaskan dan mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan utang dari dalam negeri. Hal ini mengingat risiko utang dalam negeri relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan utang luar negeri. Kebijakan pembiayaan dalam APBN tahun 2014 di antaranya adalah (1) mengupayakan rasio utang terhadap PDB berkisar 23-24 persen pada akhir tahun 2014; (2) memanfaatkan SAL sebagai sumber pembiayaan anggaran dan *fiscal buffer;* (3) mempertahankan kebijakan *negative net flow* serta membatasi komitmen baru pinjaman luar negeri; (4) mengupayakan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif; (5) mengalokasikan dana investasi Pemerintah dalam bentuk pemberian PMN kepada BUMN/lembaga untuk percepatan pembangunan infrastruktur.

Realisasi Pembiayaan APBN-P

Realisasi pembiayaan anggaran pada tahun 2014 mencapai Rp248,89 triliun atau 103,06 persen dari target APBN-P 2014 sebesar Rp241,49 triliun. Untuk realisasi pembiayaan dalam negeri mencapai Rp261,24 triliun, atau 102,48 persen dari target APBN-P 2014 sebesar Rp254,93 triliun. Realisasi pembiayaan luar negeri mencapai negatif Rp12,35 triliun, lebih tinggi sebesar Rp1,09 triliun dari target APBN-P 2014 sebesar negatif Rp13,44 triliun.

Rasio Defisit terhadap PDB

Untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah, pemerintah menjaga defisit kumulatif APBN dan APBD dibawah ambang batas 3,0 % terhadap PDB. Hal ini sesuai dengan amanah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selama tahun 2010-2014 rasio tersebut berfluktuatif dan berada di bawah level 3 persen dengan rata-rata sebesar 1,66 persen.

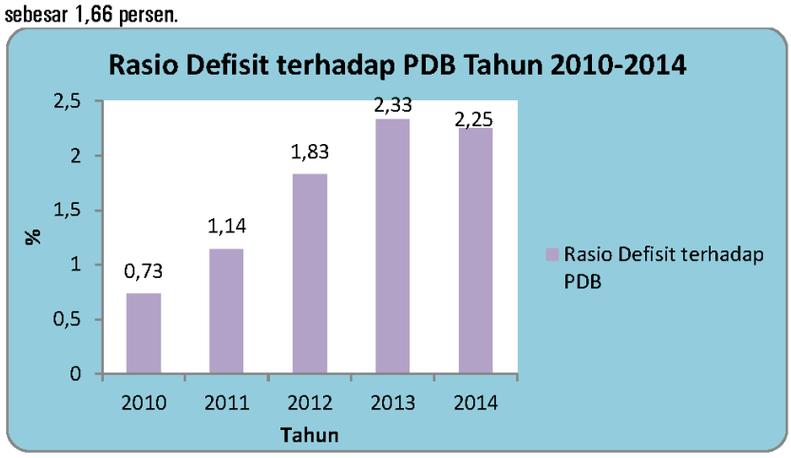

Sumber : Budget in Brief APBN-P 2015

Grafik 16. Perkembangan Rasio Realisasi Defisit Anggaran terhadap PDB Tahun 2010-2014

www.peraturan.go.id

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014 disusun untuk tujuan umum (*general purposes financial statement*) dalam memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan dan dengan pendekatan kegunaan dalam pembuatan keputusan (*decision usefulness approach*). LKPP Tahun 2014 mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga (KL), beserta unit organisasi di bawahnya yang meliputi eselon I, kantor wilayah, dan satuan kerja (satker) yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan satuan kerja perangkat daerah pengguna Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama. LKPP disusun oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

LKPP Tahun 2014 merupakan konsolidasian atas laporan keuangan entitas pelaporan BUN dan entitas pelaporan K/L. LKKL merupakan gabungan dari entitas akuntansi satuan kerja di bawahnya. Berikut ini adalah Daftar Entitas Pelaporan Tingkat Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran BUN selaku Pengguna Anggaran dan jumlah Satker yang berada di bawahnya.

Daftar entitas pelaporan tingkat Kementerian Negara/Lembaga

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Satker	
			2014	2013
1	BA 001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2	2
2	BA 002	Dewan Perwakilan Rakyat	2	2
3	BA 004	Badan Pemeriksa Keuangan	70	70
4	BA 005	Mahkamah Agung	1.655	1.640
5	BA 006	Kejaksaan Agung	517	517
6	BA 007	Sekretariat Negara	16	16
7	BA 010	Kementerian Dalam Negeri	1285	873
8	BA 011	Kementerian Luar Negeri	144	144
9	BA 012	Kementerian Pertahanan	820	1.070
10	BA 013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	803	797
11	BA 015	Kementerian Keuangan	1.073	1.073
12	BA 018	Kementerian Pertanian	1.440	1.622
13	BA 019	Kementerian Perindustrian	127	107
14	BA 020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	98	98
15	BA 022	Kementerian Perhubungan	643	663
16	BA 023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	453	420
17	BA 024	Kementerian Kesehatan	1.427	1.577
18	BA 025	Kementerian Agama	7.016	6.931
19	BA 026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	841	882
20	BA 027	Kementerian Sosial	242	216
21	BA 029	Kementerian Kehutanan	408	407
22	BA 032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	918	890
23	BA 033	Kementerian Pekerjaan Umum	1.328	1.083
24	BA 034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	2	2
25	BA 035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2	2
26	BA 036	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	2	2
27	BA 040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	266	150
28	BA 041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1	1
29	BA 042	Kementerian Riset dan Teknologi	5	5
30	BA 043	Kementerian Lingkungan Hidup	42	74
31	BA 044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	59	45
32	BA 047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19	17

www.peraturan.go.id

33	BA 048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2	2
34	BA 050	Badan Intelijen Negara	1	1
35	BA 051	Lembaga Sandi Negara	1	1
36	BA 052	Dewan Ketahanan Nasional	1	1
37	BA 054	Badan Pusat Statistik	513	507
38	BA 055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	35	35
39	BA 056	Badan Pertanahan Nasional	461	468
40	BA 057	Perpustakaan Nasional	36	36
41	BA 059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	60	62
42	BA 060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.230	1.206
43	BA 063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	40	40
44	BA 064	Lembaga Ketahanan Nasional	1	1
45	BA 065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	39	39
46	BA 066	Badan Narkotika Nasional	146	119
47	BA 067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	43	15
48	BA 068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	42	42
49	BA 074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	1
50	BA 075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	183	183
51	BA 076	Komisi Pemilihan Umum	531	531
52	BA 077	Mahkamah Konstitusi	1	1
53	BA 078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1	1
54	BA 079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	50	50
55	BA 080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	20	21
56	BA 081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	19	19
57	BA 082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	20	20
58	BA 083	Badan Informasi Geospasial	1	1
59	BA 084	Badan Standardisasi Nasional	1	1
60	BA 085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	3	3
61	BA 086	Lembaga Administrasi Negara	8	13
62	BA 087	Arsip Nasional Republik Indonesia	19	35
63	BA 088	Badan Kepegawaian Negara	13	13
64	BA 089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	39	39
65	BA 090	Kementerian Perdagangan	171	255
66	BA 091	Kementerian Perumahan Rakyat	9	9
67	BA 092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	34	34
68	BA 093	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	1
69	BA 095	Dewan Perwakilan Daerah	2	2
70	BA 100	Komisi Yudisial	1	1
71	BA 103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	1
72	BA 104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	28	27
73	BA 105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	1	1
74	BA 106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	1
75	BA 107	Badan SAR Nasional	35	34
76	BA 108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1	1
77	BA 109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	1	1
78	BA 110	Ombudsman RI	1	1
79	BA 111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	25	35
80	BA 112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1	1
81	BA 113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1	1
82	BA 114	Sekretariat Kabinet	1	1
83	BA 115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	34	28
84	BA 116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	71	70
85	BA 117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	29	29
86	BA 118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan	1	1

www.peraturan.go.id

		Bebas Sabang		
87	BA 999	Bendahara Umum Negara, yang terdiri dari:		
	BA 999.01	Pengelolaan Utang *)	1	1
	BA 999.02	Hibah *)	2	2
	BA 999.03	Investasi Pemerintah *)	11	11
	BA 999.04	Penerusan Pinjaman *)	1	1
	BA 999.05	Transfer ke Daerah *)	3	3
	BA 999.07	Belanja Subsidi *)	13	13
	BA 999.08	Belanja Lain-lain*)	13	13
	BA 999.99	Transaksi Khusus *)		
	BA 999.--	Badan Lainnya*)		
		Jumlah Satker	**25.741**	**25.384**

*) *BA tersebut merupakan entitas akuntansi, dan laporan keuangan BA tersebut dikonsolidasikan menjadi LKBUN.*

LKPP Tahun 2014 mencakup transaksi-transaksi sebagai berikut:

- transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada pemerintah daerah, yaitu dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan;
- transaksi keuangan terbatas dari unit-unit fiskal register yang tidak menggunakan dana APBN, namun mengelola aset Pemerintah, yaitu Unit Badan Lainnya nonsatuan kerja.

LKPP Tahun 2014 ini tidak mencakup entitas:

- Pemerintahan Daerah;
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Badan Hukum Milik Negara (BHMN); dan
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Namun demikian, penyertaan modal (investasi) Pemerintah pada Perusahaan Negara (BUMN dan Non BUMN),dan BHMN, nilainya disajikan sebagai Investasi Pemerintah dan dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara/Badan Lainnya.

Sesuai dengan PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh K/L secara berjenjang mulai dari tingkat satker (Kuasa Pengguna Anggaran) sampai tingkat K/L (Pengguna Anggaran), untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca. SAI terdiri dari dua subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK diselenggarakan untuk membukukan transaksi anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pendapatan, belanja, serta data neraca, sedangkan SIMAK-BMN diselenggarakan untuk membukukan data barang milik negara dalam rangka menghasilkan neraca.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H), Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah

www.peraturan.go.id

(SA-IP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman (SA-PPP), Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD), Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (SA-BSBL), Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK), dan Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL). SiAP terdiri dari dua subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU). SAKUN diselenggarakan untuk menghasilkan Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat, sedangkan SAU diselenggarakan untuk membukukan data yang akan direkonsiliasi dengan data yang dibukukan SAI.

Kerangka Umum SAPP dan alur penyusunan LKPP adalah sebagaimana disajikan pada diagram di bawah ini.

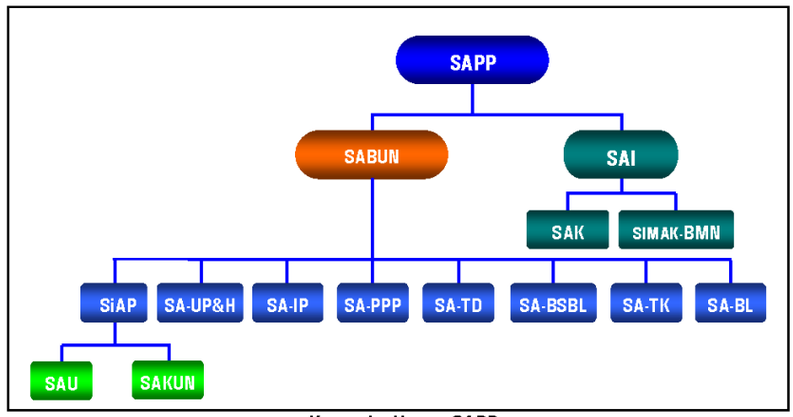

Kerangka Umum SAPP

www.peraturan.go.id

SAPP dijalankan untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari:

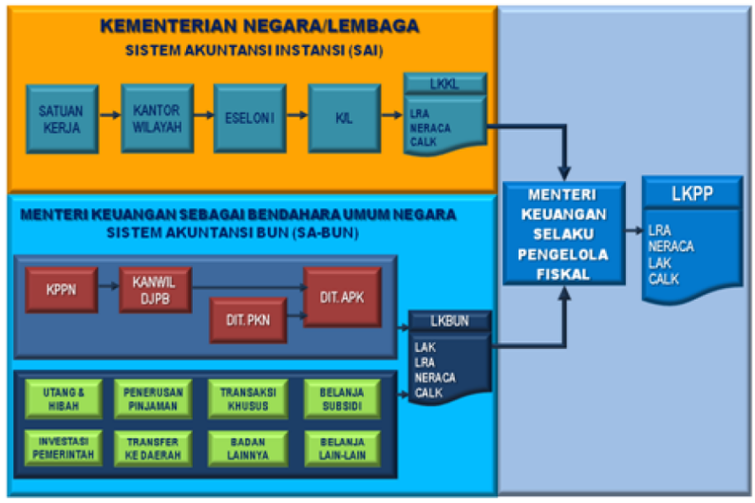

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

   Laporan Realisasi APBN disusun berdasarkan kompilasi Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas pelaporan K/L dan entitas pelaporan BUN. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah, Belanja Negara, dan Pembiayaan.

   - Angka realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Laporan Realisasi APBN TA 2014 disajikan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomtabel atas seluruh penerimaan uang yang riil masuk ke Kas Negara dan/atau melalui pengesahan pendapatan. Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dari K/L berfungsi sebagai penguji (kontrol) data BUN.
   - Angka realisasi Belanja Negara pada Laporan Realisasi APBN TA 2014 disajikan berdasarkan kompilasi realisasi belanja negara seluruh entitas K/L, di mana pengguna anggaran bertanggung jawab penuh atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakannya. Sedangkan data realisasi pengeluaran yang dikelola oleh BUN (data SAU) berfungsi sebagai penguji (kontrol) atas data belanja K/L. Apabila terjadi perbedaan antara realisasi belanja berdasarkan data K/L dengan data BUN, perbedaan tersebut disajikan pada Laporan Realisasi APBN sebagai data "Suspen."
   - Angka realisasi Pembiayaan pada Laporan Realisasi APBN TA 2014 disajikan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomtabel atas seluruh penerimaan dan pengeluaran uang yang riil masuk ke atau keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan transaksi pembiayaan.

2. Neraca

   Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan konsolidasi Neraca seluruh LKKL danNeraca LKBUN. Neraca LKBUN disusun berdasarkan konsolidasi Neraca Kas Umum Negara (KUN) dan Neraca Bagian Anggaran – Bagian Anggaran BUN termasuk Laporan

www.peraturan.go.id

Keuangan Badan Lainnya. Untuk mengantisipasi keterbatasan waktu penyusunan laporan keuangan, LKPP dapat disusun melalui konsolidasi LKKL dan Laporan Keuangan Bagian – Bagian Anggaran BUN, sebelum menjadi angka konsolidasian LKBUN. Khusus data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Laporan Arus Kas TA 2014mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening KPPN dan rekening BUN (rekening 502.000000980, rekening 600.502411980, rekening 600.502111980, rekening 519.000122980, rekening 608.001411980, rekening 608.000111980, rekening SAL, rekening khusus dan rekening Penempatan Uang Negara), termasuk transaksi pengesahan pendapatan hibah langsung dan belanja yang dananya berasal dari pendapatan hibah langung, serta pendapatan dan belanja pada BLU. Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan SAKUN yang merupakan subsistem dari SiAP.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang analisis makro ekonomi, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca Pemerintah Pusat, dan Laporan Arus Kas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca adalah berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan/atau timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LKPP Tahun 2014mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 atau SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Dengan demikian, penyusunan dan penyajian LKPP Tahun 2014 diharapkan telah sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan.

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN atau terjadinya pengesahan oleh KPPN

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP tersebut mengatur SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Sesuai dengan PP tersebut, Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dengan ketentuan penerapan sepenuhnya paling lambat

www.peraturan.go.id

pada tahun anggaran 2015.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP adalah:

(1) **Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas pendapatan melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN sesuai dengan PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintah No.02 tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pendapatan yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Pendapatan Hibah Langsung K/L dan Pendapatan BLU. Untuk Kas di Bendahara Penerimaan tidak diakui sebagai pendapatan karena rekening Bendahara Penerimaan bukan bagian dari BUN

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan LKPP Tahun 2014adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi (600.000411980) dan Rekening Panas Bumi (508.000084980), serta Rekening Pertambangan dan Perikanan 508.000071980. Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai. Hal ini juga dikarenakan penerimaan migas pada rekening 600.000411980 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000084980, serta penerimaan pertambangan pada rekening 508.000071980,masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *under/over lifting*, *Domestic Market Obligation* (DMO) *fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan kewajiban lainnya. Penerimaan migas pada rekening 600.000411980, penerimaan panas bumi pada rekening 508.000084980, dan penerimaan pertambangan pada rekening 508.000071980, setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang dapat diestimasi diakui sebagai "Pendapatan yang Ditangguhkan." Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Belanja diakui pada saat kas keluar dari KUN atau terjadinya pengesahan oleh KPPN

(2) **Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas belanja berdasarkan dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh KPPN. Belanja yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Belanja yang berasal dari Pendapatan Hibah Langsung K/L dan Belanja BLU. Belanja

Pembiayaan diakui pada saat kas diterima/dikeluarkan dari KUN atau terjadinya pengesahan oleh BUN

www.peraturan.go.id

disajikan pada lembar muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), ditambahkan penjelasan mengenai belanja yang disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

(3) Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan juga mencakup transaksi penyertaan modal negara, penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok hutang. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada KUN ataupada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUN atau terjadinya pengesahan penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan oleh BUN. Penerimaan Pembiayaan yang diakui pada saat pengesahan antara lain penerimaan pinjaman luar negeri melalui mekanisme *direct payment*. Pengeluaran Pembiayaan yang diakui pada saat pengesahan antara lain pencatatan investasi permanen yang berasal dari hibah saham. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Nilai pembiayaan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan pokok atas pinjaman luar negeri yang disajikan baik pada Laporan Realisasi APBN maupun Laporan Arus Kas adalah berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN (atau data Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN). Sementara itu, saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca LKPP berdasarkan saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca Bagian Anggaran 999.01 (Pengelolaan Utang) yang disampaikan oleh Ditjen Pengelolaan Utang. Perbedaan data penarikan pinjaman luar negeri antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dan Ditjen Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran dijelaskan pada CaLK.

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

(4) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Aset diukur dalam satuan mata uang rupiah. Namun demikian, termasuk juga dalam jenis aset adalah sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pengertian aset dalam hal ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset Lancar terdiri dari kas, piutang, investasi jangka pendek dan persediaan

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

www.peraturan.go.id

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika aset tesebut diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang, investasi jangka pendek, dan persediaan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal pelaporan.
- Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang persediaan (UP) yang belum disetorkan ke kas negara atau belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal pelaporan.
- Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetor ke kas negara sampai dengan tanggal pelaporan. Bunga dan jasa giro atas rekening Bendahara Penerimaan disajikan sebagai bagian dari Kas di Bendahara Penerimaan.
- Kas Lainnya dan Setara Kas terdiri dari bunga dan jasa giro atas rekening Bendahara Pengeluaran, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal pelaporan, serta kas dari hibah langsung dan dana yang berasal dari SPM-LS Bendahara berupa pengeluaran yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga.
- Kas pada BLU merupakan Kas BLU yang telah disahkan oleh KPPN maupun yang belum disahkan. Dana kelolaan yang belum digulirkan/diinvestasikan tidak disajikan sebagai kas dan setara kas melainkan disajikan sebagai Aset Lainnya.
- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.
- Termasuk dalam klasifikasi Kas adalah Kas Dalam Transito. Kas Dalam Transito merupakan kas yang telah dipindahbukukan dari satu rekening Pemerintah (rekening asal) ke rekening Pemerintah yang lain (rekening tujuan), namun sampai dengan tanggal pelaporan, kas tersebut belum masuk ke dalam rekening tujuan.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai nominal hak pemerintah yang timbul berdasarkan surat keputusan atau dokumen sumber lainnya sebagai dasar penagihannya. Termasuk dalam pos Piutang adalah Piutang Pajak, Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Uang Muka Belanja, Piutang dari Kegiatan BLU, Piutang Lain-lain, dan Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman.LKPP Tahun 2014menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) atas piutang dengan memperhitungkan penyisihan atas piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada CaLK. Penyisihan piutang tidak tertagih tidak diterapkan pada Uang Muka Belanja/Belanja Dibayar di Muka.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang lainnya yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam

www.peraturan.go.id

rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan didasarkan pada perhitungan fisik pada tanggal pelaporan.

Investasi terdiri dari investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang

Persediaan dicatat pada neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2014meliputi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen

Investasi jangka pendek yang disajikan pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2014 adalah investasi berupa deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang ada di BLU.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pada LKPP Tahun 2014, Investasi Non Permanen bukan merupakan penyertaan modal saham, melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR, kelompok petani, nelayan, dan kelompok usaha lainnya.
- Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan pada pos Aset Investasi Non Permanen Lainnya berupa dana pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang telah diinvestasikan dalam bentuk pinjaman atau surat berharga.

Investasi non Permanen disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Dana kelolaan BLU yang masih berupa kas dan belum digulirkan/diinvestasikan disajikan sebagai Aset Lainnya.

www.peraturan.go.id

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen dan/atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, badan usaha, atau badan hukum lainnya.

- Investasi Permanen PMN terdiri dari investasi pada perusahaan negara, lembaga keuangan internasional, Eks Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), Bank Indonesia, Lembaga Penjaminan Simpanan, dan badan usaha lainnya. PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah adalah sama dengan atau lebih besar dari 51persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN;
- PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga (kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan terbatas);
- Aset-aset yang berstatus Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. BPYBDS merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari belanja K/L yang diserahkelolakan kepada BUMN di masing-masing sektor. Pengalihan BMN dari K/L menjadi aset BUMN berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima Operasi (BASTO). Metode pencatatan BPYBDS masih variatif, sebagian berdasarkan BASTO dan yang lain menggunakan nilai hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan
- PMN pada lembaga keuangan internasional dicatat sebagai investasi permanen sebesar kontribusi Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan *Promissory Notes.* Di sisi lain, *Promissory Notes* tersebut disajikan sebagai kewajiban.

Nilai PMN pada BUMN/BHMN dengan persentase kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen serta investasi pada BI disajikan dengan menggunakan metode ekuitas. Nilai PMN pada perusahaan minoritas (Non BUMN) dengan kepemilikan 20 (dua puluh) persen atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, sedangkan kepemilikan kurang dari 20 (dua puluh) persen menggunakan metode biaya.

Penilaian investasi permanen diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi dalam bentuk pemberian pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Khusus untuk penyertaan pada lembaga keuangan internasional disajikan dengan menggunakan metode biaya berdasarkan hasil

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan

www.peraturan.go.id

Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan KDP

konfirmasi dan disesuaikan dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

c. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dibangun dan siap digunakan.

Pada prinsipnya, Aset Tetap dikonsolidasikan dari nilai Aset Tetap pada neraca K/Lper 31 Desember 2014 berdasarkan harga perolehan. Sejak tahun 2007, Pemerintah telah melakukan penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi inventarisasi dan penilaian kembali BMN. Penilaian kembali dilakukan untuk BMN yang diperoleh sebelum tahun 2004. Hasil inventarisasi dan penilaian kembali BMN tersebut menjadi dasar penyajian Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2014.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana Lampiran VII PMK No.120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, yaitu:

(a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih besar dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan

(b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih besar dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

SAP telah mengatur mengenai depresiasi dan Pemerintah telah menerapkan penyusutan Aset Tetap untuk seluruh entitas akuntansi mulai pelaporan keuangan Tahun 2013

Pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Nilai satuan minimum kapitalisasi juga dikecualikan terhadap aset tetap yang diperoleh dari transfer/pengalihan/pertukaran. Pengeluaran yang memenuhi batasan minimum kapitalisasi diperlakukan sebagai penambah nilai Aset Tetap.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Pemerintah telah menerapkan penyusutan Aset Tetap untuk seluruh entitas akuntansi mulai pelaporan keuangan tahun 2014 sebagaimana PMK No.1/PMK.06/2014 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK No.90/PMK.06/2014. Penyusutan Aset Tetap menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan Aset Tetap ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam pos Akumulasi Penyusutan sebagai pengurang nilai

www.peraturan.go.id

Aset Tetap di Neraca.

Terhadap Aset Tetap yang penyelesaian pengerjaannya melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap untuk digunakan. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap untuk digunakan harus segera direklasifikasikan ke salah satu pos yang sesuai dengan jenisaset tetap tersebut.

d. Piutang Jangka Panjang

Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Penerusan Pinjaman, Piutang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- Piutang Penerusan Pinjaman adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya penerusan pinjaman yang berasal pinjaman/hibah baik yang bersumber dari dalam dan/atau dari luar negeri, yang diberikan kepada pemda, BUMN, BUMD/atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah, termasuk di dalamnya piutang sehubungan dengan pemberian pinjaman kepada BUMN, BUMD, pemda/atau penerima lainnya.
- Piutang Kredit Pemerintah adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya pemberian kredit oleh Pemerintah kepada pemda, BUMN, BUMD, atau penerima lainnya.
- TPA, Tagihan TGR, Penerusan Pinjaman, dan Piutang Kredit Pemerintah yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar (Lihat Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar).

TP, TGR, TPA, dan Penerusan Pinjaman yang disajikan pada LKPP Tahun 2014 ini telah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Aset lainnya terdiri dari TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, Dana Penjaminan, Aset KKKS, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Kemitraan dengan

www.peraturan.go.id

Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya,Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

- Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Apabila kemitraan berakhir, maka aset yang menjadi hak Pemerintah akan direklasifikasi menjadi aset definitif sesuai jenisnya.
- Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti yang disimpan pada rekening cadangan subsidi/PSO, rekening cadangan Dana Bagi Hasil, rekening dana reboisasi, dana Biaya Penyelenggaraan Iuran Haji, dan Kas Besi Perwakilan RI di Luar Negeri, Dana Abadi Pendidikan, serta jenis dana lain yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tidak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud meliputi *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, dan Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.
- Aset KKKS yang disajikan pada LKPP Tahun 2014 adalah:
  - Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan akhir tahun 2004, yang disajikan pada LKPP Tahun 2014 sebesar nilai wajar berdasarkan hasil penilaian.
  - Aset KKKS yang diperoleh tahun 2005 – 2010, yang disajikan berdasarkan harga perolehan. Apabila tidak diketahui harga perolehannya maka digunakan nilai wajar berdasarkan hasil penilaian.
  - Aset KKKS yang diperoleh sejak tahun 2011, yang dicatat berdasarkan harga perolehan. Aset KKKS yang diperoleh serta digunakan sejak tahun 2011, apabila berupa Harta Barang Modal Aset disajikan pada LKPP Tahun 2014 setelah *Placed Into Services* (PIS), dan apabila berupa tanah disajikan setelah digunakan oleh KKKS. PIS adalah kondisi sebuah barang yang diadakan oleh KKKS telah siap/sudah digunakan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

  Aset KKKS yang belum diserahkan dan belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, serta aset KKKS yang sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian namun belum dapat diyakini nilainya, tidak dicatat dalam neraca, namun diungkapkan dalam CaLK.

  Aset KKKS yang telah diserahkan kepada Pemerintah c.q Kementerian ESDM dan sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian, dicatat dalam neraca sebagai aset tetap atau persediaan.

  Untuk Aset KKKS yang masih dikuasai oleh KKKS, ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset mengikuti kebijakan akuntansi pada industri hulu

www.peraturan.go.id

minyak dan gas bumi.

- Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan kekayaan bersih (ekuitas) yang dimiliki Unit Badan Lainnya non satuan kerja seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, Yayasan Gedung Veteran, SKK Migas, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat. Nilai Aset Lainnya tersebut disajikan sebesar nilai kekayaan bersih (aset dikurangi kewajiban). Dalam hal badan-badan lain tersebut mendapatkan alokasi APBN dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),maka aset dan kewajiban atas KPA dikeluarkan dari penghitungan nilai kekayaan bersih.
- Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam jenis aset lainnya sebagaimana dijelaskan di atas. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang belum ditetapkan status penggunaannya seperti aset eks Pertamina, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA). Aset eks BPPN berupa kredit atau tagihan pada LKPP Tahun 2014 disajikan sebagai Piutang Lain-lain sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Kewajiban terdiri dari kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Termasuk juga dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLU yang masih berupa kas yang belum digulirkan/diinvestasikan.

(5) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai atau pihak lain yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga/Biaya Pinjaman (*accrued interest*), Utang Subsidi, Surat Perbendaharaan Negara (SPN), dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.
- Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah

www.peraturan.go.id

yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

- Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- SPN adalah instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan.
- Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah terkait dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening 600.000411.980 dan 508.000084.980, seperti *under lifting*, *DMO fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB, yang akan dibayarkan kepada KKKS berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah bersama BPMIGAS.
- Kewajiban akibat Tuntutan Hukum kepada Pemerintah yang telah *Inkracht*

  Tuntutan hukum kepada Pemerintah yang dimaksud dalam laporan keuangan ini merupakan gugatan perdata ataupun gugatan Tata Usaha Negara (TUN) yang ditujukan kepada Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga yang dapat menimbulkan pengeluaran negara dari APBN, hilangnya aset tanah dan bangunan karena kepemilikan yang dipersengketakan, maupun hilangnya potensi penerimaan negara.

  Pemerintah perlu melakukan upaya hukum yang maksimal termasuk upaya hukum luar biasa dalam menghadapi tuntutan hukum seperti pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dan/atau meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Terkait tuntutan hukum atas Barang Milik Negara yang keputusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka Kementerian Negara/ Lembaga bersangkutan harus melaporkan tuntutan hukum tersebut kepada Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang. Apabila diperlukan, DJKN dapat melakukan gugatan intervensi atas perkara yang dipersengketakan.

  Dalam hal putusan atas tuntutan hukum kepada pemerintah telah inkracht dan upaya hukum luar biasa telah dilaksanakan, maka Kementerian Negara/Lembaga terkait harus segera menindaklanjuti putusan *inkracht* tersebut untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar bagi keuangan negara. Pendanaan atas pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah *inkracht* dianggarkan pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.

  Kebijakan akuntansi atas putusan yang telah *inkracht* dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

  1) Dalam hal pembayaran atas putusan tuntutan hukum yang telah *inkracht* tidak terdapat lagi upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan Pemerintah dan sudah dianggarkan dalam DIPA Kementerian Negara/Lembaga tahun anggaran berikutnya, maka nilai pembayaran atas putusan tuntutan hukum yang telah inkracht tersebut disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL/LKPP;

www.peraturan.go.id

2) Apabila putusan tuntutan hukum yang telah *inkracht*, namun pembayarannya belum dianggarkan dalam DIPA Kementerian Negara/Lembaga tahun anggaran berikutnya, maka nilai yang ditetapkan dalam amar putusan atas tuntutan hukum yang telah *inkracht* tersebut hanya diungkapkan dalam CaLK atas LKKL/LKPP secara agregat, yaitu sebesar nilai total yang terdapat di dalam amar putusan tersebut.

3) Dalam hal tuntutan hukum belum *inkracht* atau masih terdapat upaya hukum lanjutan/ upaya hukum luar biasa, yang dapat dilakukan Pemerintah, maka tidak dilakukan penyajian dalam Neraca maupun diungkapkan dalam CaLK atas LKKL/LKPP.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang Luar Negeri Pemerintah antara lain adalah pinjaman bilateral, multilateral, kredit ekspor, *leasing*, dan kredit komersial yang dikelola Kementerian Keuangan. Utang Dalam Negeri Pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk sekuritas (*government debt securities*), yang terdiri dari *fixed rates bonds*, *variable rates bonds, zero coupon bonds, international bonds,* Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikelola Kementerian Keuangan.

Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 31 Desember 2014 disajikan sebagai bagian lancar.

- ***Fixed Rate (FR) Bonds*** adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Obligasi jenis ini dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- ***Obligasi Negara Ritel (ORI)*** adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- ***Variable Rate (VR) Bonds*** adalah obligasi berbunga mengambang yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu. Dalam hal ini referensi yang digunakan adalah tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka tiga bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. Obligasi VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- ***Zero Coupon (ZC) Bonds*** adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. *Zero Coupon* dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan

www.peraturan.go.id

kepemilikannya di pasar sekunder.

- ***Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia (SUP kepada BI)*** merupakan jenis surat utang yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). SUP kepada BI terdiri dari SU-002, SU-004, SU-007, dan SRBI-01
- ***SU-002*** dan ***SU-004*** adalah jenis utang Pemerintah kepada Bank Indonesia berkaitan dengan program penjaminan dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 1 persen per tahun (dari sebelumnya 3 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018). SU-004 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 3 persen per tahun (tidak berubah), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018).
- ***SU-007*** adalah surat utang hasil konversi indeksasi dan tungggakan bunga SU-002 dan SU-004. SU-007 memiliki tingkat bunga 0,1 persen per tahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. Angsuran pokok SU-007 diamortisasi secara *semi-annually* dan telah mulai dibayar sejak 1 Februari 2007 sebesar Rp509.352.721.728. Pembayaran angsuran pokok SU-007 dapat dilakukan dengan cara tunai (*cash*) atau dibayar dengan menggunakan Surat Utang Negara (SUN) yang dapat diperdagangkan (*tradable*).
- ***SRBI-01*** adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka BLBI. Jatuh tempo SRBI-01 adalah tahun 2033 dengan tingkat kupon 0,1 persen per tahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik dua kali setahun.
- ***International Bonds*** adalah jenis obligasi negara yang berdenominasi mata uang asing yang dapat diperdagangkan/diperjualbelikan. Obligasi ini disajikan di neraca dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.
- **Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)** adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah sukuk. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya akad atau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk

www.peraturan.go.id

sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk *hedge bonds* menggunakan kurs rupiah terhadap USD yang terakhir.

Kewajiban kontinjensi diungkapkan dalam catatan penting lainnya

Termasuk dalam kelompok kewajiban adalah *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar kurang dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar lebih dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. *Promissory notes* pada IMF disajikan berdasarkan revaluasi yang dilakukan IMF pada bulan April tahun berjalan, bukan pada tanggal pelaporan.

(6) Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar Pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi

Utang kontinjensi Pemerintah yang bersifat eksplisit seperti jaminan pembangunan Proyek Monorail Jakarta, tanggungan kelebihan biaya pengadaan tanah sebagai akibat adanya kenaikan harga pada saat pembebasan lahan pada proyek pembangunan jalan tol, dan jaminan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada kreditur yang menyediakan pendanaan kredit ekspor untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya. Sedangkan utang kontinjensi Pemerintah yang bersifat implisit seperti intervensi Pemerintah apabila perbankan mengalami kebangkrutan tidak diungkapkan dalam LKPP.

Kewajiban Kontinjensi terkait dengan *risk sharing* atas Program Kredit Usaha Tani Tahun Penyediaan 1998/1999 disajikan dalam Neraca.

(7) Ekuitas Dana

Kurs Mata Uang Asing

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset non lancar dan kewajiban jangka panjang. Khusus untuk posDana yang Dibatasi Penggunaannya (kelompok Aset Lainnya-Aset non lancar) berupa dana pihak ketiga yang dikelola Pemerintah mempunyai akun lawan kewajiban jangka pendek.

(8) Kurs Mata Uang Asing

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 62, transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.Lebih

www.peraturan.go.id

lanjut, Interpretasi Pernyataan SAP (IPSAP) Nomor 01 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing, menyatakan bahwa:

- Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan Rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
  a. transaksi mata uang asing yang dibeli denganmata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan
  b. transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
  c. Total transaksi adalah hasil perkalian kurs transaksi dan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi sebagaimana poin a dan poin b di atas.

Perlakuan yang sama juga diterapkan pada transaksi penerimaan/penarikan.

Transaksi dalam mata uang asing, dimana Pemerintah memiliki rekening dalam mata uang tersebut di BI, seperti USD dan Yen, dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Hal tersebut dilakukan karena dalam melakukan transaksi Pemerintah tidak harus membeli mata uang asing yang bersangkutan. Namun, transaksi dalam mata uang asing, dimana Pemerintah tidak memiliki rekening dalam mata uang tersebut di BI, dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tunai (*spot rate*) pada tanggal transaksi. Hal ini dilakukan karena dalam melakukan transaksi, Pemerintah harus membeli mata uang asing yang bersangkutan.

Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Berikut adalah kurs tengah BI (Rupiah terhadap Mata Uang Asing) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013.

Mata Uang Asing	Satuan	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Dolar Amerika Serikat [USD]	1	12.440,00	12.189,00
Dolar Australia [AUD]	1	10.205,23	10.875,66
Dolar Canada [CAD]	1	10.734,33	11.442,94
Franc Swiss [CHF]	1	12.582,83	13.731,78
Yuan China [CNY]	1	2.033,01	1.999,22
Kroner Denmark [DKK]	1	2.031,90	2.254,99
EURO [EUR]	1	15.133,27	1.6821,44
Poundsterling Inggris [GBP]	1	19.370,34	20.096,63

www.peraturan.go.id

Yen Jepang [JPY]	100	10.424,88	11.616,88
Korean Won [KRW]	1	11,40	11,55

Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan. LKPP Tahun 2014 ini menyajikan selisih kurs atas kewajiban dalam mata uang asing sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan dalam Neraca.

Selisih kurs terkait dengan kas dalam mata uang asing, bagian lancar penerusan pinjaman, investasi jangka pendek dalam mata uang asing, dan utang luar negeri disajikan pada ekuitas dana lancar. Sedangkan selisih kurs yang terkait dengan penerusan pinjaman, utang jangka panjang luar negeri, PMN/investasi jangka panjang, dan SBN Valas disajikan pada ekuitas dana investasi.

Pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di BI dalam mata uang asing (valas):

a. Selisih kurs yang terealisasi dihitung dari:
   - Jumlah mata uang asing yang keluar dari rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan dibagi dengan saldo awal rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan sebelum terjadi transaksi pengeluaran mata uang asing dari rekening milik BUN dalam mata uang asing;
   - Hasil pembagian angka 1 dikalikan dengan saldo akhir selisih kurs belum terealisasi.

   Selisih kurs untung diakui sebagai PNBP Lainnya, sedangkan selisih kurs rugi diakui sebagai Belanja Lain-lain, dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

b. Selisih kurs belum terealisasi dihitung dengan cara sebagai berikut:
   - Penghitungan saat pelaporan setiap hari kerja:

     Mengurangi kurs hari pelaporan dengan kurs awal berupa kurs hari kerja sebelumnya, kemudian dikalikan dengan saldo akhir hari pelaporan, kemudian dikurangi dengan jumlah selisih kurs belum terealisasi atas transaksi konversi;
   - Penghitungan penyesuaian pada saat terjadi pemindahbukuan dari rekening BUN dalam mata uang asing ke rekening BUN dalam mata uang asing lainnya dan pada saat konversi:
     - Membandingkan antara besaran mata uang asing yangdipindahbukukan dengan saldo mata uang asing sebelum dipindahbukukan kemudian dikali saldo selisih kurs belum terealisasi saat pemindahbukuan;
     - Kemudian diakui sebagai untung/rugi selisih kurs belum terealisasi dan dicatat pada Akun Ekuitas Dana Lancar-Selisih Kurs kemudian ditutup ke akun SILPA.

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam valas:

Formulasi penghitungan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing.

a. *Outstanding* valas dikali kurs tengah pada tanggal neraca dikurangi *outstanding* valas dikali kurs penarikan pada tanggal terakhir penarikan.

www.peraturan.go.id

b. Kurs penarikan pada tanggal terakhir penarikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- *Loan* yang penarikan terakhirnya sebelum tahun 2004 menggunakan kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2004
- *Loan* yang penarikan terakhirnya tahun 2004 dan sesudahnya menggunakan kurs dengan membagi nilai rupiah dengan valas pada tanggal penarikan terakhir.
- Dalam hal mata uang penarikan terakhir berbeda dengan mata uang *outstanding* (2014) maka kurs dihitung dengan nilai rupiah penarikan terakhir dibagi dengan hasil konversi mata uang terakhir.

Aset/Kewajiban Eks BRR NAD-Nias

(9) Aset/Kewajiban Eks BRR NAD-Nias

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR NAD-Nias) sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU dengan UU Nomor 10 Tahun 2005, masa tugas BRR NAD-Nias adalah empat tahun. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009, masa tugas BRR NAD-Nias berakhir tanggal 16 April 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, BRR-NAD Nias sebagai suatu organisasi berakhir per tanggal 16 April 2009. Namun demikian, sebagai Entitas Pelaporan, BRR-NAD Nias telah berakhir per 31 Desember 2008, sehingga Neraca Penutup BRR NAD-Nias adalah per 31 Desember 2008.

Neraca Likuidasi BRR NAD-Nias belum selesai disusun, sehingga Aset/kewajiban eks BRR NAD-Nias tidak dikonsolidasikan pada LKPP Tahun 2014 dan diungkapkan secara memadai di Catatan Penting Lainnya. Pada Catatan Penting Lainnya LKPP Tahun 2014 yang diungkapkan adalah aset/kewajiban BRR NAD-Nias per 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh BPK.

www.peraturan.go.id

Catatan Penting Lainnya

Perubahan Nomenklatur Kementerian/Lembaga terkait Pembentukan Kabinet Kerja.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja dan Peraturan Presiden No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka beberapa nomenklatur Kementerian/Lembaga mengalami penyesuaian sebagai berikut:

No	Nomenklatur Lama	Nomenklatur Baru
1	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, berdasarkan Perpres No. 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
2	Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Kementerian Ketenagakerjaan, berdasarkan Perpres No. 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
3	Kementerian Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4	Kementerian Lingkungan Hidup	
5	Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Kementerian Ketenagakerjaan, berdasarkan Perpres No. 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
6	Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, berdasarkan Perpres No. 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
7	Kementerian Perumahan Rakyat	
8	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, berdasarkan Perpres No. 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
9	Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata	Kementerian Pariwisata, berdasarkan Perpres No. 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata
10	Kementerian Riset Dan Teknologi	Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi, berdasarkan Perpres No. 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
11	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
12	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	Dalam Perpres No.165 Tahun 2014, nomenklatur BPN berubah menjadi Kementerian Agraria dan tata Ruang/BPN. Namun demikian, berdasarkan Perpres No. 7 Tahun 2015 dan Perpres No. 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, organisasi BPN diatur secara terpisah dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
13	-	Kementerian Agraria Dan Tata Ruang berdasarkan Perpres No. 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang
14	-	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berdasarkan Perpres No. 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Atas perubahan-perubahan tersebut, sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 7 Tahun 2015, pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut menggunakan sumber daya dan anggaran yang tersedia sesuai tugas dan fungsinya. Di samping itu, seluruh peraturan pelaksanaan atas tugas dan fungsi kementerian dan lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur, tetap berlaku sepanjang belum ditetapkannya peraturan yang baru.

www.peraturan.go.id

Dari sisi akuntansi, akan muncul beberapa kondisi penggabungan atau likuidasi entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagai konsekuensi perubahan nomenklatur di atas, antara lain penyatuan kementerian/lembaga (*merger*), pembentukan kementerian/lembaga baru, dan likuidasi atas kementerian/lembaga. Berkaitan dengan hal tersebut, maka prosedur pelaksanaan pencatatan akuntansi, baik pembentukan neraca awal, neraca hasil penyatuan (*merger*) maupun likuidasi, serta segala hal yang berkaitan dengan kondisi yang muncul atas konsekuensi perubahan entitas pelaporan pada kementerian/lembaga, mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya di bidang akuntansi dan pelaporan pengelolaan keuangan negara.

Sebagaimana diatur dalam PMK No. 272/PMK.05/2015, entitas akuntansi/entitas pelaporan dari kementerian/lembaga yang memenuhi kriteria-kriteria entitas yang dilikuidasi, setelah ditetapkannya ketentuan terkait likuidasi entitas tersebut, akan melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Penetapkan penanggung jawab proses likuidasi
2. Penyelesaian hak dan kewajiban sebelum laporan keuangan penutup
3. Penyusunan laporan keuangan penutup
4. Penyelesaian hak dan kewajiban setelah laporan keuangan penutup
5. Penyusunan laporan keuangan likuidasi.

Penyusunan laporan keuangan penutup dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penyelesaian transaksi terakhir yang meliputi: 1) penyelesaian pertanggungjawaban Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, 2) penyelesaian pertanggungjawaban Kas di Bendahara Penerimaan, dan 3) penerbitan SP2D pembayaran gaji induk bulan berikutnya. Setelah diterbitkannya Laporan Keuangan Penutup, entitas akuntansi/entitas pelaporan pada kementerian/lembaga yang dilikuidasi harus menyerahterimakan hak dan kewajiban termasuk sisa pagu DIPA/anggaran kepada entitas penanggung jawab likuidasi atau entitas lainnya yang ditunjuk. Penyelesaian serah terima hak dan kewajiban termasuk sisa pagu DIPA/anggaran dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Laporan Keuangan Penutup. Setelah seluruh hak dan kewajiban termasuk sisa pagu DIPA/anggaran diserahterimakan, dilakukan penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi yang disampaikan kepada: 1) entitas pelaporan yang ditunjuk, 2) Kementerian Keuangan, dan 3) Badan Pemeriksa Keuangan.

Terhadap entitas akuntansi/entitas pelaporan yang tidak dilikuidasi, maka serah terima aset, jika ada, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Batas waktu dimulainya proses likuidasi maupun penyelesaian penyesuaian organisasi pada masing-masing kementerian/lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur sebagaimana di atas, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang mengatur tentang kementerian/lembaga masing-masing. Pemerintah berharap penyelesaian transaksi dan penetapan laporan keuangan likuidasi dapat dilakukan sebelum akhir tahun anggaran 2015, sehingga kewenangan dan tanggung jawab masing–masing kementerian/lembaga dapat dipastikan sebelum batas akhir transaksi tahun anggaran 2015 dan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban APBN tahun anggaran 2015.

Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)

Pada Tahun 2014, Kementerian Keuangan telah menerapkan SPAN dalam pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi dan berbasis IT. Pengembangan SPAN dilakukan oleh tim terpadu Kementerian Keuangan yang terdiri dari Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Anggaran, dan Pusintek (Setjen Kementerian Keuangan). SPAN secara umum bertujuan untuk menyatukan seluruh operasional penganggaran dan perbendaharaan negara ke dalam satu sistem yang terintegrasi. *Piloting* SPAN yang pada tahun 2013 dan *Roll Out* penerapan SPAN pada KPPN secara bertahap yang dimulai pada tahun 2014 dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi dan analisis secara mendalam atas SPAN tersebut.

Analisis dimaksud mencakup proses bisnis, aplikasi, kemampuan SDM dan kesiapan *hardware* termasuk jaringan. Disamping itu juga dilakukan antisipasi atas kemungkinan timbulnya permasalahan sehingga jika timbul permasalahan dimaksud dapat diselesaikan dengan cepat, tepat dan akurat. Dengan demikian SPAN diharapkan dapat beroperasi sesuai yang diharapkan.

www.peraturan.go.id

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran (TA) 2014 adalah sebesar Rp1.550.490.813.616.979 atau mencapai 94,81 persen dari target APBN-P TA 2014 sebesar Rp1.635.378.485.045.000. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.146.865.769.098.252, PNBP sebesar Rp398.590.523.613.990, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp5.034.520.904.737. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan DTP sebesar Rp5.655.296.592.171 dan Bea Masuk DTP sebesar Rp131.312.505.000 serta dalam Pendapatan Hibah termasuk Pendapatan Hibah non kas (barang dan jasa) sebesar Rp2.077.619.274.457.

Pendapatan Negara dan Hibah TA 2014 mengalami kenaikan Rp111.599.744.054.235 atau 7,76 persen jika dibandingkan dengan TA 2013. Perkembangan realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP sejak TA 2010 dapat dilihat pada Grafik 17.

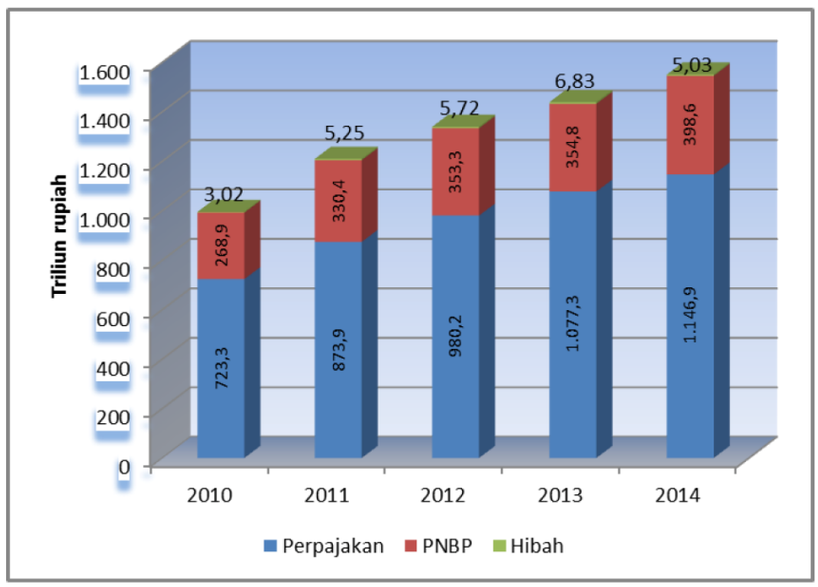

Grafik 17 Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP TA 2010 – 2014

Realisasi Belanja Negara pada TA 2014 adalah sebesar Rp1.777.182.855.786.411 atau 94,69 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2014 sebesar Rp1.876.872.758.707.000. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2013 adalah sebesar Rp1.650.563.727.418.085. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.203.577.167.222.861, Transfer ke Daerah sebesar Rp573.703.081.723.721, dan terdapat Suspen sebesar minus Rp97.393.160.171. Suspen tersebut merupakan selisih Belanja Negara menurut catatan Kas Negara dengan Kementerian Negara/Lembaga.

Perkembangan realisasi Belanja Negara sejak TA 2010 dapat dilihat pada Grafik 18.

www.peraturan.go.id

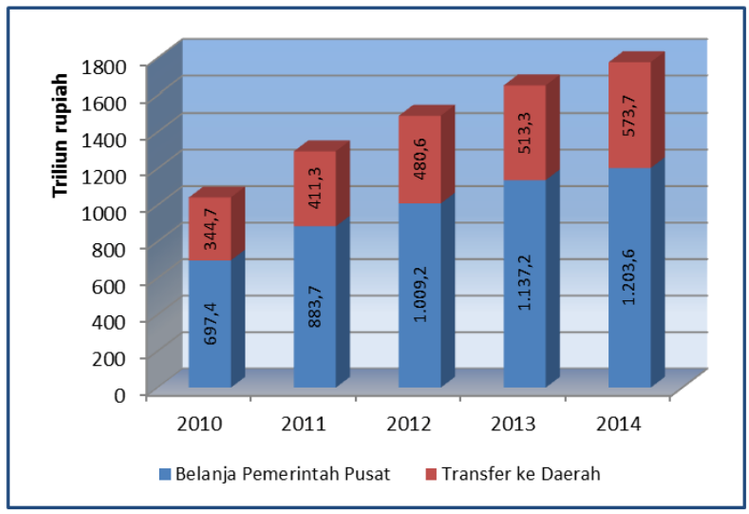

Grafik 18 Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2010- 2014

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.550.490.813.616.979 dan realisasi Belanja Negara sebesar Rp1.777.182.855.786.411, maka Defisit Anggaran pada TA 2014 sebesar Rp226.692.042.169.432.

Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Neto) pada TA 2014 adalah sebesar Rp248.892.825.676.520, yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp261.244.985.683.200 dan Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar minus Rp12.352.160.006.680.

Terjadinya Defisit Anggaran dan adanya Realisasi Pembiayaan Neto mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2014 sebesar Rp 22.200.783.507.088.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Negara dan Hibah Rp1.550,49 triliun

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2014 adalah sebesar Rp1.550.490.813.616.979 berarti mencapai 94,81 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp1.635.378.485.045.000. Pendapatan Negara dan Hibah terdiri dari Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Penerimaan Hibah.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) TA 2014 dapat dilihat pada Grafik 19.

www.peraturan.go.id

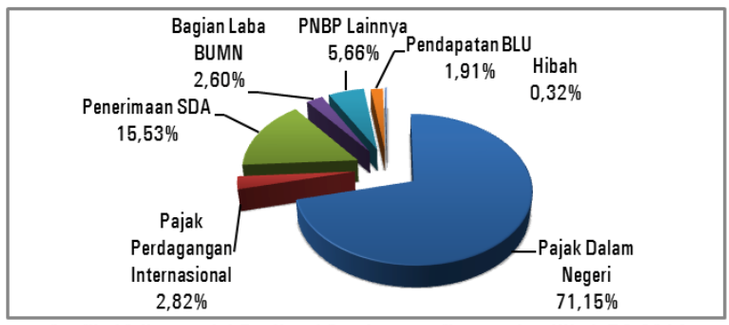

Grafik 19 Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2014

Rincian pendapatan negara dan hibah per akun dapat dilihat pada Lampiran 1.

B.2.1.1.Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan Rp1.146,87 triliun

Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2014 adalah sebesar Rp1.146.865.769.098.252 atau mencapai 92,04 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp1.246.106.955.600.000. Hal ini berarti Penerimaan Perpajakan TA 2014 lebih besar Rp69.559.089.539.980 atau naik 6,46 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2013. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari (i) Pajak Dalam Negeri, dan (ii) Pajak Perdagangan Internasional. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan DTP sebesar Rp5.655.296.592.171 dan Bea Masuk DTP sebesar Rp131.312.505.000.

B.2.1.1.1.Pajak Dalam Negeri

Penerimaan Pajak Dalam Negeri Rp1.103,22 triliun

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2014 adalah sebesar Rp1.103.217.635.957.204 atau mencapai 92,72 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp1.189.826.575.600.000. Hal ini berarti realisasi Pajak Dalam Negeri TA 2014 lebih besar Rp73.367.572.653.933 atau naik 7,12 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2013. Besarnya realisasi Pajak Dalam Negeri ini adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 (*Audited*)	TA 2013 (*Audited*)
PPh Migas	87.445.663.200.967	88.747.448.408.293
PPh Non migas	453.078.754.802.823	413.808.305.275.411
PPh Fiskal	1.169.109.225	849.766.010
PPh Ditanggung Pemerintah	5.655.283.226.993	3.886.193.422.937
PPN dan PPnBM	409.181.627.426.617	384.713.518.912.993
PBB	23.476.231.891.365	25.304.582.771.965
BPHTB	-	-
Cukai	118.085.549.812.883	108.452.081.324.579
Pajak Lainnya	6.293.356.486.331	4.937.083.421.083
Jumlah	**1.103.217.635.957.204**	**1.029.850.063.303.271**

Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri tersebut termasuk penerimaan atas Pajak Penghasilan DTP sebesar Rp5.655.296.592.171.

www.peraturan.go.id

Total pendapatan pajak dalam negeri yang mencapai 92,72 persen dari target APBN-P 2014. Penerimaan Pajak Dalam Negeri yang tidak mencapai target adalah PPh Non Migas, PPN dan PPnBM. Hal ini dikarenakan antara lain: (1) Kondisi perekonomian di Indonesia yang mengalami tekanan akibat menguatnya kondisi perekomomian di AS sepanjang 2014 yang mendorong arus modal keluar (*Capital Outflow*) yang cukup besar; (2) Kelesuan perekonomian global yang membuat aliran permintaan dari negara-negara tujuan ekspor Indonesia cenderung menurun; (3) Melemahnya kinerja perusahaan yang berada di sektor Pertambangan; dan (4) turunnya harga komoditas *tradable sector* yang menjadi andalan ekspor Indonesia.

B.2.1.1.2.Pajak Perdagangan Internasional

Pajak Perdagangan Internasional Rp43,65 triliun

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2014 adalah sebesar Rp43.648.133.141.048 atau mencapai 77,55 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp56.280.380.000.000. Hal ini berarti Pajak Perdagangan Internasional TA 2014 lebih kecil Rp3.808.483.113.953 atau turun 8,03 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2013. Rincian realisasi Pajak Perdagangan Internasional adalah (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 (*Audited*)	TA 2013 (*Audited*)
Bea Masuk	32.319.129.733.990	31.621.250.024.724
Bea Keluar	11.329.003.407.058	15.835.366.230.277
Jumlah	**43.648.133.141.048**	**47.456.616.255.001**

Dalam realisasi Penerimaan Bea Masuk TA 2014, termasuk Penerimaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) sebesar Rp131.312.505.000.

Penurunan penerimaan Bea Keluar TA 2014 disebabkan antara lain rendahnya harga CPO di pasar Internasional yang masih berada di bawah ambang batas pengenaan bea keluar dan pergeseran komoditas ekspor dari CPO ke produk turunan yang tarif bea keluarnya lebih rendah.

B.2.1.2.Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP Rp398,59 triliun

Realisasi PNBP TA 2014 adalah sebesar Rp398.590.523.613.990 mencapai 103,01 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp386.946.415.445.000. Hal ini berarti realisasi PNBP TA 2014 lebih besar Rp43.838.634.496.522 atau naik 12,36 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2013 sebesar Rp354.751.889.117.468. Realisasi PNBP berasal dari (i) Penerimaan Sumber Daya Alam; (ii) Bagian Pemerintah atas Laba BUMN; (iii) PNBP Lainnya, dan (iv) Pendapatan BLU.

B.2.1.2.1.Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan SDA Rp240,85 triliun

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2014 adalah sebesar Rp240.848.282.407.860, atau mencapai 99,89 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp241.114.622.223.000. Hal ini berarti Penerimaan SDA TA 2014 lebih besar Rp14.442.093.146.320 atau naik 6,38 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2013. Rincian realisasi Penerimaan SDA adalah sebagai berikut (dalam Rp):

www.peraturan.go.id

Uraian	TA 2014 (*Audited*)	TA 2013 (*Audited*)
Pendapatan Minyak Bumi	139.174.307.803.380	135.329.234.847.290
Pendapatan Gas Bumi	77.701.803.216.997	68.300.185.200.293
Pendapatan Pertambangan Umum	19.300.421.200.975	18.620.492.963.389
Pendapatan Kehutanan	3.699.872.441.655	3.060.373.940.552
Pendapatan Perikanan	216.367.232.525	229.350.562.720
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	755.510.512.328	866.551.747.296
Jumlah	**240.848.282.407.860**	**226.406.189.261.540**

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2013, pendapatan minyak bumi mengalami kenaikan. Kenaikan capaian realisasi pendapatan SDA Minyak Bumi tahun 2014 dibandingkan dengan realisasi pendapatan SDA Minyak Bumi pada tahun 2013 tersebut antara lain disebabkan lebih tingginya realisasi nilai tukar rupiah terhadap USD tahun 2014 yaitu sebesar Rp11.868,67 per USD dibandingkan realisasi nilai tukar 2013 yang hanya sebesar Rp10.460,22 per USD. Selain itu, juga disebabkan adanya penyelesaian *outstanding* piutang SDA minyak bumi tahun 2013 yang diterima pada tahun 2014.

B.2.1.2.2.Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Rp40,31 triliun

Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2014 adalah sebesar Rp40.314.429.901.560 atau mencapai 100,79 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp40.000.000.000.000. Hal ini berarti Bagian Laba Pemerintah atas Laba BUMN TA 2014 lebih besar Rp6.288.825.851.286 atau naik 18,48 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2013. Target Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN tahun 2014 sebesar Rp40.000.000.000.000 diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

Realisasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 (*Audited*)	TA 2013 (*Audited*)
Pendapatan Laba BUMN Perbankan	8.823.422.770.320	7.490.907.289.021
Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan	31.491.007.131.240	26.534.696.761.253
Jumlah	**40.314.429.901.560**	**34.025.604.050.274**

Dari realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2014 tersebut, sebesar 80,53 persen berasal dari 10 BUMN terbesar, yaitu:

	Nama BUMN	Jumlah (Rp)
1	PT Pertamina	10.259.054.000.000
2	PT Telkom	5.284.132.606.898
3	PT Bank Rakyat Indonesia	3.602.579.400.000
4	PT Bank Mandiri	3.276.675.500.000
5	PT Perusahaan Gas Negara	2.905.421.754.262
6	PT Pupuk Indonesia	1.869.016.000.000
7	PT Bank Negara Indonesia	1.630.429.340.629
8	PT Inalum	1.627.822.333.500

www.peraturan.go.id

9	PT Semen Indonesia	1.150.184.622.000
10	PT Pegadaian	858.286.000.000
Total 10 BUMN		**32.463.601.557.289**

Pada Tahun 2014, dalam rangka pencapaian target PNBP dari bagian pemerintah atas Laba BUMN, Menteri BUMN selaku RUPS meminta penambahan setoran dividen dari 22 BUMN sebesar Rp2,69 triliun.

PNBP Lainnya Rp87,75triliun

B.2.1.2.3.Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi PNBP Lainnya TA 2014 adalah sebesar Rp87.746.767.296.051 atau 103,27 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P yaitu sebesar Rp84.968.409.424.000. Hal ini berarti realisasi PNBP Lainnya TA 2014 lebih besar Rp18.074.911.405.549 atau naik 25,94 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2013. Realisasi PNBP Lainnya ini terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	**TA 2014(*Audited*)**	**TA 2013 (*Audited*)**
Pendapatan Penjualan dan sewa		
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	17.002.808.332.786	10.348.855.443.833
Pendapatan Penjualan aset	136.462.179.080	189.384.228.119
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	16.332.224.156.049	13.461.844.460.369
Pendapatan Sewa	293.342.385.777	291.228.758.879
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	2.477.501.155.958	33.556.178.476
Total Pendapatan Penjualan Dan Sewa	**36.242.338.209.650**	**24.324.869.069.676**
Pendapatan Jasa		
Pendapatan Jasa I	22.755.458.452.713	19.036.310.373.473
Pendapatan Jasa II	1.266.227.876.481	1.369.732.058.143
Pendapatan Jasa Luar Negeri	593.851.252.292	564.917.113.293
Pendapatan Jasa Perbankan	540.827.508	567.548.510
Pendapatan atas Pengelolaan TSA dan/atau atas Penempatan Uang Negara	3.683.705.584.425	2.751.039.444.796
Pendapatan Jasa Kepolisian	3.612.922.162.495	3.509.309.765.336
Pendapatan Jasa Pelayanan Tol	226.868.919.930	213.053.134.699
Pendapatan Jasa Kepolisian II	117.803.552.951	131.425.870.986
Pendapatan Jasa Lainnya	206.896.858.780	150.766.900.520
Total Pendapatan Jasa	**32.464.275.487.575**	**27.727.122.209.756**
Pendapatan Bunga		
Pendapatan Bunga	1.998.227.378.007	2.157.055.147.430
Pendapatan *Gain On Bond Redemption*	60.188.000.000	260.000.000
Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	2.426.200.377.000	2.712.015.999.000
Total Pendapatan Bunga	**4.484.615.755.007**	**4.869.331.146.430**
Uraian		
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	2.870.177.786.886	278.486.542.196
Pendapatan Pendidikan	3.006.395.763.012	2.287.742.131.383
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	648.825.726.560	278.930.683.217
Pendapatan Iuran dan Denda	1.689.358.941.406	1.398.128.607.728
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL	4.323.104.102.951	5.201.515.618.841
Pendapatan Pelunasan Piutang	92.372.189.161	315.675.651.865

www.peraturan.go.id

Pendapatan dari Penutupan Rekening	16.912.434.135	93.362.764.134
Pendapatan Selisih Kurs	897.567.700.155	1.770.265.769.281
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II	1.613.680.820	-
Pendapatan dalam Rangka Refund Dana PHLN	967.600.942	-
Pendapatan Lain-lain	1.008.241.917.791	1.126.425.695.995
Total Pendapatan Lain-lain	**6.340.779.625.955**	**8.507.245.500.116**
Jumlah PNBP Lainnya	**87.746.767.296.051**	**69.671.855.890.502**

Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya melampaui target APBN-P terutama karena kenaikan di beberapa jenis PNBP Lainnya seperti Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan, Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas, Pendapatan dari Pengelolaan BMN, dan Pendapatan atas Pengelolaan Kas (*Treasury Single Account*) dan/atau atas Penempatan Uang Negara.

Untuk Pendapatan dari Pengelolaan BMN yang naik signifikan dibanding tahun 2013 terutama disebabkan oleh penyelesaian kewajiban sewa BMN eks KKS Pertamina oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP sebesar Rp2.227.577.829.637, dan penyetoran/pelunasan uang sewa oleh Jakarta Internasional School sebesar Rp143.979.621.203.

Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan juga naik signifikan dibandingkan tahun 2013 terutama karena kenaikan penjualan hasil tambang sebesar Rp4.842.580.799.280. Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas sebesar Rp16.332.224.156.049 antara lain terdiri atas Pendapatan Minyak Mentah (DMO) sebesar Rp15.458.636.996.011, dan Pendapatan lainnya dari Kegiatan Hulu Migas sebesar Rp873.069.534.459.

B.2.1.2.4. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Pendapatan BLU Rp29,68 triliun

Realisasi Pendapatan BLU TA 2014 adalah sebesar Rp29.681.044.008.519 atau 142,26 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P yaitu sebesar Rp20.863.383.798.000. Hal ini berarti realisasi Pendapatan BLU TA 2014 lebih besar Rp5.032.804.093.367 atau naik 20,42 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2013. Realisasi Pendapatan BLU terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 (*Audited*)	TA 2013 (*Audited*)
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat	22.119.394.273.875	18.359.471.141.552
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/ Kawasan Tertentu	1.139.330.350.352	1.072.243.436.645
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	3.236.983.066.986	2.272.677.026.676
Total Pendapatan Jasa Layanan Umum	**26.495.707.691.213**	**21.704.391.604.873**
Pendapatan Hibah BLU	91.265.971.812	108.230.165.667
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	1.233.373.294.610	1.339.038.388.726
Pendapatan BLU Lainnya	1.860.697.050.884	1.496.579.755.886
Jumlah	**29.681.044.008.519**	**24.648.239.915.152**

B.2.1.3. Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah Rp5,03 triliun

Realisasi Penerimaan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2014 adalah sebesar Rp5.034.520.904.737 atau 216,53 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp2.325.114.000.000. Hal ini berarti Penerimaan Hibah TA 2014 lebih kecil Rp1.797.979.982.267 atau turun 26,32

www.peraturan.go.id

persen dibandingkan dengan realisasi TA 2013.

Uraian	TA 2014 (*Audited*)	TA 2013 (*Audited*)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Terencana		-
Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga	522.123.290.666	426.022.593.757
Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Uang	640.673.244.369	1.188.936.452.156
Total Pendapatan Hibah Dalam Negeri	**1.162.796.535.035**	**1.614.959.045.913**
Pendapatan Hibah Luar Negeri		
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana	1.496.106.704.979	1.987.042.923.829
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga	1.555.495.983.791	1.872.600.087.181
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang	820.121.680.932	1.357.898.830.081
Total Pendapatan Hibah Luar Negeri	**3.871.724.369.702**	**5.217.541.841.091**
Jumlah Penerimaan Hibah	**5.034.520.904.737**	**6.832.500.887.004**

Realisasi Pendapatan Hibah mencapai 216,53% dikarenakan hibah langsung tidak diproyeksikan dalam APBN-P. Di samping itu, realisasi mencapai 216,53% dikarenakan meningkatnya hibah langsung yang diterima K/L dan kesadaran K/L untuk melaporkannya kepada BUN.

Realisasi Penerimaan Hibah TA 2014 adalah termasuk realisasi Pendapatan Hibah Non Kas (barang dan jasa) sebesar Rp2.077.619.274.457. Pendapatan Hibah Non Kas tersebut dicatat dengan jumlah yang sama pada sisi belanja. Pendapatan Hibah Non Kas tidak dicatat pada Laporan Arus Kas. Pada tahun 2013 dan 2014, Pemerintah tidak mencatat penerimaan dana dari Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Untuk tahun 2015, dana yang diterima dari Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah akan dicatat sebagai pendapatan hibah.

Terdapat hibah dari *Department of Foreign Affairs and Trade* Pemerintah Australia untuk kegiatan penanggulangan AIDS di daerah sebesar AUD100.000.000 selama 2007-2014 yang tidak dicatat sebagai pendapatan hibah pada LKPP. Hibah tersebut dikelola oleh Komisi Penangggulangan AIDS Nasional (KPAN) dan telah dicatat sebagai penerimaan dalam laporan keuangan KPAN sebagai Unit Badan Lainnya.

B.2.2.Belanja Negara

Belanja Negara Rp1.777,18 triliun

Realisasi Belanja Negara TA 2014 adalah sebesar Rp1.777.182.815.375.411 atau 94,69 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp1.876.872.758.707.000. Belanja Negara TA 2014 lebih besar Rp126.619.087.957.326 atau naik 7,67 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2013. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.

B.2.2.1.Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat Rp1.203,58 triliun

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2014 adalah sebesar Rp1.203.577.167.222.861 atau 94,00 persen dari APBN-P sebesar Rp1.280.368.574.301.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2014 lebih besar Rp66.414.279.924.621 atau 5,84 persen dari Realisasi TA 2013 sebesar Rp1.137.162.887.298.240.

www.peraturan.go.id

Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu (i) Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran; (ii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi; dan (iii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja (Ekonomi).

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran

Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/BA

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2014 menurut Bagian Anggaran (BA) terbesar adalah pada BA 999 (Bendahara Umum Negara) sebesar Rp626.429.481.797.730 atau 52,05 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat.
Sementara itu, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2014 pada K/L (selain BA BUN) adalah sebesar Rp577.164.824.476.978. Dari total realisasi belanja tersebut, realisasi belanja pada K/L terbesar adalah Kementerian Pertahanan sebesar Rp86.185.628.390.534 atau 14,93 persen dari total realisasi Belanja Pemerintah Pusat untuk K/L.
Komposisi 5 (lima) terbesar K/L pengguna anggaran Belanja Pemerintah Pusat (dalam persentase) selain BA 999 (Bendahara Umum Negara) pada TA 2014 dapat dilihat pada Grafik 20.

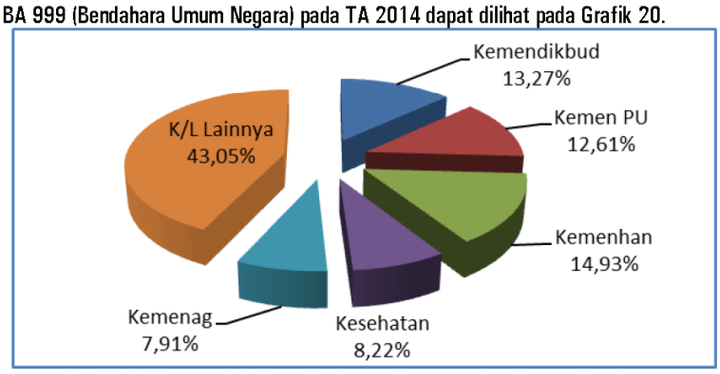

Grafik 20 Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2014

Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran dapat dilihat dalam Lampiran 2.A.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi terbagi dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per fungsi pada TA 2014 dan 2013 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 6.

Tabel 6 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2014 dan TA 2013 (dalam rupiah)

Kode	Uraian Fungsi	Anggaran	TA 2014 (*Audited*)	TA 2013 (*Audited*)
01	Pelayanan Umum	855.870.050.511.000	797.791.468.999.562	705.647.194.456.203
02	Pertahanan	83.221.189.227.000	86.113.332.395.952	87.510.069.209.435
03	Ketertiban dan Keamanan	35.920.471.958.000	34.856.554.090.424	36.120.377.751.587

www.peraturan.go.id

04	Ekonomi	114.235.137.264.000	97.140.826.976.360	108.082.622.165.969
05	Lingkungan Hidup	10.338.336.216.000	9.326.369.142.311	10.590.449.510.737
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	27.086.146.508.000	26.244.334.265.079	33.790.021.564.664
07	Kesehatan	12.112.197.612.000	10.893.430.932.502	17.576.987.815.265
08	Pariwisata dan Budaya	1.724.419.245.000	1.468.998.974.975	1.818.809.622.380
09	Agama	3.679.820.420.000	4.001.912.911.492	3.872.784.643.682
10	Pendidikan*	129.224.906.014.000	122.696.967.105.593	114.969.073.445.582
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	6.955.899.326.000	13.070.838.786.426	17.107.462.370.448
00	Tidak ada fungsi**	-	(27.867.357.815)	77.034.742.288
	Total	**1.280.368.574.301.000**	**1.203.577.167.222.861**	**1.137.162.887.298.240**

* Anggaran pada fungsi Pendidikan tersebut di atas adalah anggaran pendidikan yang dialokasikan pada Belanja Pemerintah Pusat. Anggaran Pendidikan juga dialokasikan melalui Transfer Daerah sebesar Rp238.838.962.133.000 dan Pengeluaran Pembiayaan (Dana Pengembangan Pendidikan Nasional) sebesar Rp8.359.075.031.000.
**Tidak ada fungsi artinya kode fungsi tidak ada dalam tabel referensi fungsi

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2014 terlihat pada Grafik 21.

(dalam triliun rupiah)

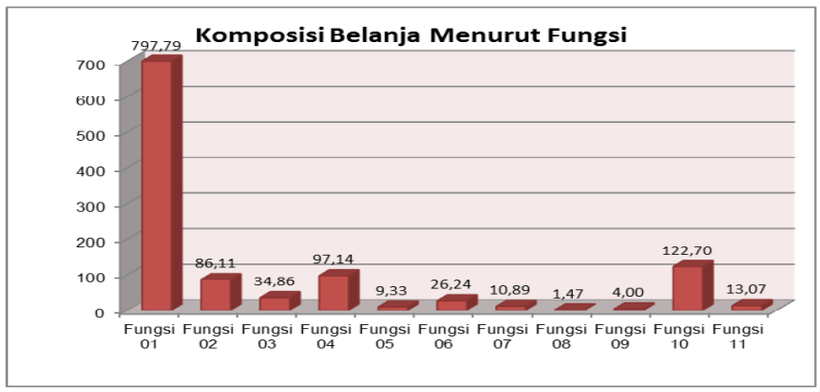

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah menurut Fungsi dapat dilihat dalam Lampiran 2.C

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii) Belanja Modal; (iv) Pembayaran Bunga Utang; (v) Subsidi; (vi) Belanja Hibah; (vii) Bantuan Sosial; dan (viii) Belanja Lain-lain. Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 22.

www.peraturan.go.id

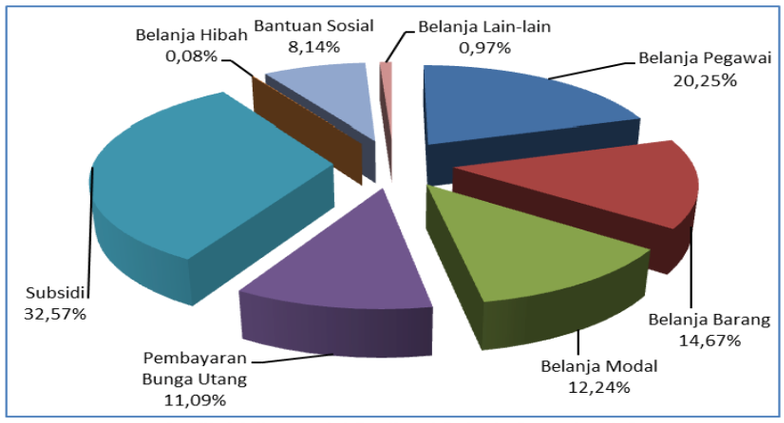

Grafik 22 Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2014

B.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp243,72 triliun

Realisasi Belanja Pegawai TA 2014 adalah sebesar Rp243.719.884.098.338 yang berarti 94,31 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp258.435.598.595.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai TA 2014 lebih besar Rp22.031.064.935.694 atau naik 9,94 persen dari realisasi TA 2013. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 (*Audited*)	TA 2013 (*Audited*)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	69.065.135.113.346	75.184.442.606.967
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	49.066.923.935.671	33.855.445.476.023
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	530.749.615.764	696.199.360.592
Belanja Gaji Dokter PTT	968.258.381.656	1.041.867.532.888
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	388.438.133.809	290.029.438.526
Belanja Honorarium	1.535.437.075.999	1.861.438.792.076
Belanja Lembur	590.207.671.033	659.533.750.843
Belanja Vakasi	283.706.978.601	274.929.984.523
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	32.922.920.009.403	26.353.376.624.682
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	83.879.924.628.743	78.462.009.589.533
Belanja Asuransi Kesehatan	4.488.182.554.313	2.780.143.068.089
Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran	-	229.402.937.902
Jumlah	**243.719.884.098.338**	**221.688.819.162.644**

B.2.2.1.2. Belanja Barang

Belanja Barang Rp176,62 triliun

Realisasi Belanja Barang TA 2014 adalah sebesar Rp176.622.265.435.276 yang berarti 90,48 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp195.206.755.356.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang TA 2014 lebih besar Rp6.899.580.354.906 atau naik 4,07 persen dari Realisasi TA 2013. Rinciannya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

www.peraturan.go.id

Uraian	TA 2014 (*Audited*)	TA 2013 (*Audited*)
Belanja Barang Operasional	30.048.659.900.645	27.405.891.254.659
Belanja Barang Non Operasional	44.720.977.180.905	50.456.678.134.073
Belanja Barang Pengganti Pajak dalam rangka Hibah *Millennium Challenge Corporation* (MCC)	721.624.249	132.633.509
Belanja Barang Pencatatan Persediaan Hibah	427.399.467.702	338.877.631.430
Belanja Kontribusi	81.822.739.492	
Belanja Jasa	21.775.090.923.399	21.114.250.880.768
Belanja Pemeliharaan	18.194.434.963.043	13.180.727.198.049
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	29.004.746.608.396	24.373.891.355.500
Belanja Perjalanan Luar Negeri	2.123.896.943.444	2.165.212.320.557
Belanja Barang BLU	18.940.169.399.442	16.673.590.501.933
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat atau Pemda	7.977.453.805.385	9.890.303.126.341
Belanja Jasa Untuk Pencatatan Jasa dari Hibah	1.026.912.503.210	1.441.182.360.013
Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	97.824.775.302	318.646.498.970
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Pada Masyarakat atau Pemda	1.866.495.265.847	2.363.301.184.568
Belanja Tanah untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden	335.659.334.815	-
Jumlah	**176.622.265.435.276**	**169.722.685.080.370**

Belanja Barang BLU sebesar Rp18.940.169.399.442 terdiri dari:

Uraian	TA 2014 (*Audited*)	TA 2013 (*Audited*)
Belanja Gaji dan Tunjangan	6.971.207.040.744	5.767.252.827.611
Belanja Barang	6.701.148.377.382	6.085.303.026.645
Belanja Jasa	1.215.260.075.088	1.787.797.254.569
Belanja Pemeliharaan	694.991.576.586	591.928.270.034
Belanja Perjalanan	650.545.625.749	487.575.659.099
Belanja atas Pengelolaan *Endowment Fund*	669.393.803.658	101.181.795.904
Belanja Penyedia Barang dan Jasa BLU Lainnya	2.037.622.900.235	1.852.551.668.071
Jumlah	**18.940.169.399.442**	**16.673.590.501.933**

Belanja gaji dan tunjangan yang didanai dari pendapatan BLU, sesuai ketentuan belanja tersebut dimasukkan sebagai Belanja Barang.

Realisasi Belanja Barang pada tahun 2014 yang mencapai 90,48 persen dari pagu APBN-P disebabkan antara lain karena kebijakan penghematan Pemerintahan pada triwulan IV seperti pembatasan rapat di luar kantor dan perjalanan dinas pada K/L.

Pada TA 2014, terdapat Belanja Barang yang dianggarkan dalam Belanja Modal dan sebaliknya, Belanja Modal yang dianggarkan dalam Belanja Barang. Kondisi ini dikarenakan K/L tidak cermat dalam penyusunan RKA K/L dan dokumen pelaksanaan anggaran. Dalam hal Belanja Barang menghasilkan Aset Tetap, Aset Tetap tersebut dilaporkan pada Neraca dan Laporan BMN.

www.peraturan.go.id

B.2.2.1.3. Belanja Modal

Belanja Modal Rp147,35triliun

Realisasi Belanja Modal TA 2014 adalah sebesar Rp147.347.928.326.528 berarti 91,64 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp160.790.466.559.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal TA 2014 lebih kecil Rp33.516.274.806.806 atau turun 18,53 persen dari Realisasi TA 2013. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:

(dalam Rp)

Uraian	TA 2014 (*Audited*)	TA 2013 (*Audited*)
Belanja Modal Tanah	3.493.925.154.181	4.634.554.545.099
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.383.384.313.966	68.330.717.773.271
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.234.955.281.773	23.143.230.323.439
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	65.637.287.728.141	78.790.109.327.027
Belanja Modal Lainnya	3.423.050.348.682	3.820.637.997.486
Belanja Modal BLU	2.175.325.499.785	2.144.953.167.012
Jumlah	**147.347.928.326.528**	**180.864.203.133.334**

Belanja Modal BLU terdiri dari (Rp):

Uraian	TA 2014 (*Audited*)	TA 2013 (*Audited*)
Belanja Modal Tanah	78.371.316.715	59.443.432.140
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.161.735.746.577	995.542.369.127
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	740.709.983.200	850.896.456.991
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	74.477.398.395	50.033.924.547
Belanja Modal Lainnya	120.031.054.898	189.036.984.207
Jumlah	**2.175.325.499.785**	**2.144.953.167.012**

Pencapaian realisasi belanja modal yang mencapai 91,64 persen dari APBN-P diantaranya disebabkan antara lain karena kendala lelang dalam pengadaan barang dan jasa seperti proses pengadaan yang memakan waktu lama dan lambat, pengadaan yang terlambat, revisi/perubahan terkait pengadaan barang dan jasa, dan adanya gagal lelang.

B.2.2.1.4. Pembayaran Bunga Utang

Pembayaran Bunga Utang Rp133,44 triliun

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2014 adalah sebesar Rp133.441.292.679.083 yang berarti 98,51 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp135.453.200.000.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2014 lebih besar Rp20.405.802.195.501 atau naik 18,05 persen dari Realisasi TA 2013 sebesar Rp113.035.490.483.582. Rincian Pembayaran Bunga Utang TA 2014 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 (*Audited*)	TA 2013 (*Audited*)
Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Panjang	99.196.289.575.670	81.771.062.528.089
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN DN	11.288.468.678.076	8.861.197.134.070
Belanja Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang	14.602.258.857.337	14.324.371.329.405
Belanja Pembayaran Discount SUN DN	6.071.895.166.500	5.737.047.038.080
Belanja Pembayaran *Loss on Bond Redemption* atas Pembelian Kembali Obligasi Negara DN	309.420.460.000	722.579.964.500
Belanja PembayaranImbalan SBSN DN	1.972.959.941.500	1.221.688.009.000
Belanja Pembayaran Denda (Imbalan Bunga Pajak)	-	397.544.480.438
Jumlah	**133.441.292.679.083**	**113.035.490.483.582**

www.peraturan.go.id

B.2.2.1.5. Subsidi

Subsidi Rp391,96 triliun

Realisasi Subsidi TA 2014 adalah sebesar Rp391.962.514.288.102 yang berarti 97,25 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp403.035.574.566.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Subsidi TA 2014 ini lebih besar Rp36.917.334.329.810 atau naik 10,40 persen dari Realisasi TA 2013 sebesar Rp355.045.179.958.292. Rincian realisasi Subsidi adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 (*Audited*)	TA 2013 (*Audited*)
Belanja Subsidi Premium	108.957.688.337.065	99.564.301.233.567
Belanja Subsidi Minyak Solar	74.860.539.330.156	73.200.555.361.351
Belanja Subsidi Minyak Tanah	7.200.493.002.495	6.253.111.231.399
Belanja Subsidi Elpiji	48.975.336.557.932	30.982.032.174.145
Belanja Subsidi Pangan	18.164.691.743.000	20.310.112.418.700
Belanja Subsidi Listrik	101.816.317.661.995	99.979.714.091.867
Belanja Subsidi Benih	308.567.499.490	414.368.821.123
Belanja Subsidi Pupuk	21.047.254.085.999	17.617.848.604.000
Belanja Subsidi PPh - DTP	5.655.236.443.811	3.885.500.000.000
Belanja Subsidi BM - DTP	131.312.505.000	191.572.181.000
Belanja Subsidi PT KAI	1.112.332.942.554	704.776.617.194
Belanja Subsidi PT PELNI	872.789.200.000	726.522.639.000
Belanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya	99.990.981.680	87.039.547.789
Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan	247.944.000.000	173.491.014.278
Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Eks KLBI	3.587.307.738	4.177.033.785
Belanja Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	121.049.000.000	96.680.000.000
Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	6.283.865.993	2.617.167.265
Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjamin Kredit Usaha Rakyat	2.348.432.441.791	824.540.999.688
Belanja Subsidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias	101.538.702	240.968.804
Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan	31.721.525.498	25.413.241.943
Belanja Subsidi Kredit Resi Gudang	844.317.203	564.611.394
Jumlah	**391.962.514.288.102**	**355.045.179.958.292**

Jenis dan Volume Penyaluran subsidi PSO adalah sebagai berikut:

No	Jenis Subsidi /PSO	Volume Penyaluran (Audited)
1.	JBT	45.950.763.030,20 L
2.	LPG	4.993.896.993,00 Kg
3.	Listrik	193.807.441.718 kWh
4.	Pupuk	8.886.811 Ton
5.	Benih	33.381 .141,51 kg
6.	Raskin	2.774.869.305 Kg
7.	PT PELNI	474 Voyage
8.	PT KAI	KRL: 206.179.419 Penumpang
		KA/KRD: 35.656.074 Tempat Duduk

Dalam realisasi subsidi Tahun Anggaran 2014 terdapat pembayaran beberapa jenis subsidi yang

www.peraturan.go.id

dananya belum tersalurkan sampai dengan akhir TA 2014, dan ditempatkan pada rekening dana cadangan subsidi/PSO pada Rekening Menteri Keuangan sebesar Rp2.926.132.794.013. Penempatan dana cadangan tersebut dilakukan karena dokumen penagihan dari pihak penerima subsidi belum selesai diverifikasi. Setelah verifikasi selesai, maka dana cadangan subsidi tersebut akan dibayarkan kepada penerima. Sampai dengan akhir Februari 2015, dana cadangan tersebut telah digunakan untuk membayar tagihan berdasarkan hasil verifikasi sebesar Rp2.634.500.726.044, dan sisa dana cadangan sebesar Rp291.632.067.969 telah dikembalikan ke Rekening Kas Negara sebagai PNBP.

Dalam realisasi pembayaran subsidi listrik tahun 2014 sebesar Rp101.816.317.661.995 telah termasuk pembayaran kekurangan subsidi listrik tahun 2013 hasil audit BPK sebesar Rp21.793.928.830.995.

B.2.2.1.6. Belanja Hibah

Belanja Hibah Rp907,51 miliar

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2014 adalah sebesar Rp907.509.554.215 yang berarti 31,81 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp2.853.254.017.000. Belanja hibah tersebut terdiri atas belanja hibah melalui mekanisme *on granting* (hibah kepada Pemerintah Daerah) sebesar Rp835.816.648.146 dan hibah ke luar negeri sebesar Rp71.692.906.069.

Rincian realisasi belanja Hibah adalah sebagai berikut:

Proyek/Kegiatan	Jumlah (Rp)
Mass Rapid Transit (MRT)	379.481.556.674
Water Resource and Irrigation Sector Management Projects phase 2 (WISMP-2)	126.142.306.472
InfrastuctureEnhancement Grant(IEG)	3.871.035.000
Air Minum	306.706.750.000
Air Limbah	10.565.000.000
Provincial RoadImprovement andMaintenance (RIM)	5.600.000.000
Air Minum Tahap I untuk Pemerintah Daerah Kapuas dan Kabupaten Muara Enim	3.450.000.000
Asrama mahasiswa diUniversitas Al AzharKairo Mesir	33.416.506.069
Pembelian danrenovasi Masjid untuk*Indonesian MuslimAssociation in America*(IMAAM) Maryland	34.545.000.000
Pemerintah Suriah,Serbia, BosniaHerzegovina danPalestina	3.731.400.000
Jumlah	**907.509.554.215**

Realisasi sebesar 31,81 persen dari pagu APBN-P antara lain dikarenakan terdapat Pemda yang tidak mengajukan pencairan hibah pada tahun 2014. Dari 10 jenis kegiatan/proyek yang dibiayai dari hibah kepada Pemda terdapat 3 kegiatan/proyek yang belum direalisasikan. Selain itu proyek MRT dengan anggaran terbesar, realisasinya hanya 31,71 persen, dan *Provincial Road Improvement and Maintenance* realisasinya baru mencapai 4,59 persen untuk tahun 2014. Disamping itu untuk realisasi belanja hibah ke luar negeri hanya sebesar 79% dari pagu karena belum adanya realisasi belanja hibah kepada Pemerintah Suriah dan Palestina yang disebabkan pihak penerima belum bisa memberikan copy rekening koran.

B.2.2.1.7. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Rp97,92triliun

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2014 adalah sebesar Rp97.924.676.539.384 yang berarti 101,31 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp96.655.378.861.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2014 lebih besar Rp5.788.604.423.883 atau naik 6,28 persen dari Realisasi TA 2013. Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai

www.peraturan.go.id

berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2014 (*Audited*)	TA 2013 (*Audited*)
Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	378.710.343.470	578.447.093.673
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	38.384.516.365.241	33.450.874.872.829
Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	35.317.170.986.699	41.650.296.591.168
Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial	10.575.772.781.500	3.405.734.443.337
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan	11.917.775.453.559	11.162.255.120.813
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencara	1.350.730.608.915	1.888.463.993.681
Jumlah	**97.924.676.539.384**	**92.136.072.115.501**

Pagu dan realisasi Bansos tersebut sesuai pagu DIPA K/L yang berbeda dengan pagu yang direncanakan semula pada APBN-P, karena terdapat tambahan pagu pada Kementerian Sosial dari pergeseran pagu Belanja Lain-Lain untuk program simpanan keluarga sejahtera, dan program pemberian bantuan bagi keluarga kurang mampu, serta terdapat penyesuaian akun dari Belanja Barang ke Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan BNPB.

B.2.2.1.8. Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain Rp11,65 triliun

Realisasi Belanja Lain-lain TA 2014 adalah sebesar Rp11.651.096.301.935 atau 41,70 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp27.938.346.347.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Lain-lain TA 2014 lebih besar Rp8.283.615.109.998 atau naik 245,99 persen dari Realisasi TA 2013. Rincian Belanja Lain-lain adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 (*Audited*)	TA 2013 (*Audited*)
Belanja Selisih Harga Beras Bulog	-	51.034.500.000
Belanja Iuran ke Lembaga Internasional	-	41.129.077.440
Belanja Penugasan PT SMI	-	26.640.876.289
Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	-	302.986.425.396
Belanja Cadangan Kenaikan Harga Tanah (*Land Capping*)	1.599.620.000.000	947.804.000.000
Belanja Lain-lain BUN	1.079.953.723.226	4.637.232.209
Belanja Lain-lain	8.971.522.578.709	1.993.249.080.603
Jumlah	**11.651.096.301.935**	**3.367.481.191.937**

Kecilnya realisasi Belanja Lain-lain pada TA 2014 dibandingkan dengan APBN-P dikarenakan adanya realokasi anggaran belanja lain-lain ke anggaran K/L sesuai dengan *nature of transaction*-nya melalui mekanisme Surat Alokasi Bagian Anggaran (SABA).

Belanja lain-lain BUN sebesar Rp1.079.953.723.226 merupakan Belanja Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua Rp70.229.212.398 terdiri dari biaya angkut beras PNS Distrik Pedalaman Papua sebesar Rp61.317.052.400 dan Papua Barat sebesar Rp8.912.159.998 dan Belanja Karena Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN sebesar Rp1.009.724.510.828. Belanja Lain-lain sebesar Rp8.971.522.578.709 merupakan pengeluaran belanja untuk kegiatan Sekretariat Negara sebesar Rp346.273.642.030, kegiatan Kementerian Pertahanan sebesar Rp6.120.994.317.929 yang digunakan untuk pembayaran tunggakan bahan

www.peraturan.go.id

bakar dan pelumas tahun 2006 s.d 2012, pengeluaran belanja untuk Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun sebesar Rp38.007.709.719, kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp322.689.000.000, kegiatan Kementerian Keuangan Rp15.350.683.031, serta pengeluaran belanja untuk keperluan Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp2.128.207.226.000.

B.2.2.2. Transfer ke Daerah

Transfer ke Daerah Rp573,70 triliun

Realisasi Transfer ke Daerah TA 2014 adalah sebesar Rp573.703.081.723.721 yang berarti 96,18 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp596.504.184.406.000. Hal ini berarti Realisasi Transfer ke Daerah TA 2014 ini lebih besar Rp 60.023.538.778.634 atau naik 11,69 persen dari Realisasi TA 2013. Transfer ke Daerah terdiri dari *(i)* Dana Perimbangan, dan *(ii)* Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.
Komposisi realisasi Transfer ke Daerah TA 2014 disajikan pada Grafik 23

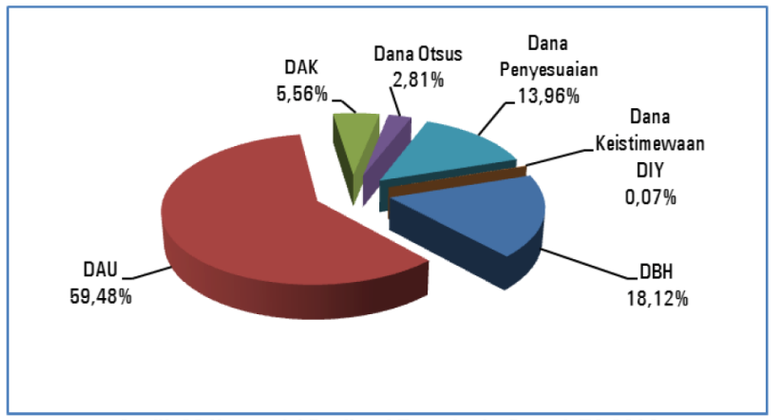

Grafik 23 Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah TA 2014

Dalam realisasi transfer ke daerah TA 2014 terdapat pemotongan dana transfer dikarenakan lebih salur (LS) DBH TA sebelumnya sehingga terdapat perbedaan nilai dana transfer yang disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Perbedaan tersebut terdapat pada penyaluran dana transfer sebagai berikut:

No	Jenis Dana Transfer	Penyaluran Dana Transfer (bruto) 2014	Dana Transfer Disalurkan ke RKUD (netto)	Perbedaan Dana Transfer	Keterangan
A	b	C	d	e = c-d	f
1	DBH Pajak	39.715.942.185.337	39.148.203.677.069	567.738.508.268	Pot. lebih salur (LS) DBH TA sbelumnya (TAYL)
2	DBH SDA	62.001.317.675.508	61.957.921.459.995	43.396.215.513	Pot. LS DBH TAYL
3	DAU	341.219.325.651.000	340.998.495.533.310	220.830.117.690	Pot. LS DBH TAYL
4	Dana Penyesuaian	80.082.454.280.000	79.960.553.858.683	121.900.421.317	Pot. LS Dana BOS TAYL (hasil Rekon Kemendikbud dg Pemda)

www.peraturan.go.id

	Total	523.019.039.791.845	522.065.174.529.057	953.865.262.788	Perbedaan Pengakuan nilai transfer Antara LKPP & LKPD

Rincian penyaluran netto DBH, DAU dan Dana Penyesuaian ke masing-masing RKUD dapat dilihat pada Lampiran 3.

B.2.2.2.1. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan Rp477,05 triliun

Realisasi Dana Perimbangan TA 2014 adalah sebesar Rp477.052.754.641.271 atau 96,99 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp491.882.888.478.000. Hal ini berarti realisasi Dana Perimbangan TA 2014 ini lebih besar Rp46.698.024.479.288 atau naik 10,85 persen dari realisasi TA 2013. Dana Perimbangan terdiri dari (i) Dana Bagi Hasil (DBH), (ii) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (iii) Dana Alokasi Khusus (DAK).

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Lampiran 3.

B.2.2.2.1.1. Dana Bagi Hasil

DBH Rp103,94 triliun

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2014 adalah sebesar Rp103.938.958.255.771 atau 88,34 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp117.663.562.827.000. Hal ini berarti realisasi Dana Bagi Hasil TA 2014 ini lebih besar Rp15.475.898.135.588 atau naik 17,49 persen dari realisasi TA 2013.

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Uraian	TA 2014 (*Audited*)	TA 2013 (*Audited*)
DBH Pajak		
DBH Pajak Penghasilan Perorangan	21.021.725.193.942	19.091.529.508.064
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	18.694.216.991.395	24.763.479.838.469
Jumlah DBH Pajak	**39.715.942.185.337**	**43.855.009.346.533**
DBH Cukai	**2.221.698.394.926**	**2.151.491.260.171**
DBH SDA		
DBH SDA Minyak Bumi	24.114.357.778.087	15.530.937.334.820
DBH SDA Gas Bumi	18.795.120.439.100	13.799.051.780.835
DBH SDA Pertambangan Umum	16.425.919.576.995	11.636.718.665.675
DBH SDA Pertambangan Panas Bumi	467.100.051.471	451.021.274.903
DBH SDA Kehutanan	2.008.378.171.979	889.055.732.766
DBH SDA Perikanan	190.441.657.876	149.774.724.480
Jumlah DBH SDA	**62.001.317.675.508**	**42.456.559.513.479**
Total DBH	**103.938.958.255.771**	**88.463.060.120.183**

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Lampiran 3.

B.2.2.2.1.2. Dana Alokasi Umum

DAU Rp341,22 triliun

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2014 adalah sebesar Rp341.219.325.651.000 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp341.219.325.651.000. Hal ini berarti realisasi DAU TA 2014 ini lebih besar Rp30.080.036.486.000 atau naik 9,67 persen dari realisasi TA 2013.

www.peraturan.go.id

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Lampiran 3.

B.2.2.2.1.3. Dana Alokasi Khusus

DAK Rp31,89 triliun

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2014 adalah sebesar Rp31.894.470.734.500, atau 96,65 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp33.000.000.000.000. Hal ini berarti realisasi DAK TA 2014 ini lebih besar Rp 1.142.089.857.700 atau naik 3,71 persen dari realisasi TA 2013. DAK tidak terserap seluruhnya karena terdapat daerah yang tidak menyampaikan laporan realisasi penyerapan DAK tahap sebelumnya sehingga tidak mendapat penyaluran DAK tahap II dan/atau III.
DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
Pada tahun anggaran 2014, DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional pada 19 bidang. Selain itu, DAK tambahan untuk bidang infrastruktur pendidikan dan infrastruktur jalan dialokasikan kepada daerah yang termasuk kategori tertinggal. DAK ditetapkan melalui PMK nomor 180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi DAK TA 2014.

B.2.2.2.2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Rp96,23 triliun

Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian TA 2014 adalah sebesar Rp96.231.227.308.000 atau 92,44 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp104.097.420.928.000. Hal ini berarti realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian TA 2014 ini lebih besar Rp13.325.514.299.346 atau naik 16,07persen dari realisasi TA 2013. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian terdiri dari *(i)* Dana Otonomi Khusus, dan *(ii)* Dana Penyesuaian.

B.2.2.2.2.1. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus Rp16,15 triliun

Realisasi Dana Otonomi KhususTA 2014 adalah sebesar Rp16.148.773.028.000 , yang berarti 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp16.148.773.028.000. Hal ini berarti realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2014 ini lebih besar Rp2.703.201.462.000 atau naik 20,10 persen dari realisasi TA 2013.

Uraian	TA 2014 (*Audited*)	TA 2013 (*Audited*)
Transfer Dana Otsus untuk Propinsi Aceh	6.824.386.514.000	6.222.785.783.000
Transfer Dana Otonomi Khusus untuk Papua	4.777.070.560.000	4.355.950.048.000
Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua	2.000.000.000.000	571.428.572.000
Transfer Dana Otonomi Khusus untuk Papua Barat	2.047.315.954.000	1.866.835.735.000
Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	500.000.000.000	428.571.428.000
Jumlah	**16.148.773.028.000**	**13.445.571.566.000**

Dana Otonomi Khusus diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh didasarkan pada UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

www.peraturan.go.id

B.2.2.2.2.2. Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian Rp80,08 triliun

Realisasi Dana Penyesuaian TA 2014 adalah sebesar Rp80.082.454.280.000, yang berarti 91,06 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp87.948.647.900.000. Hal ini berarti realisasi Dana Penyesuaian TA 2014 ini lebih besar Rp10.622.312.837.346 atau naik 15,29 persen dari realisasi TA 2013. Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah. Dana Penyesuaian TA 2014 terdiri dari:

Uraian	TA 2014 (*Audited*)	TA 2013 (*Audited*)
Dana Tambahan Penghasilan untuk Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	896.453.422.000	2.394.228.188.000
Dana Insentif Daerah (DID)	1.387.800.000.000	1.387.800.000.000
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	54.442.398.172.000	43.049.824.362.000
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	23.291.942.515.000	22.452.953.387.154
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)	63.860.171.000	59.639.179.000
Dana Keistimewaan DIY*	-	115.696.326.500
Jumlah	**80.082.454.280.000**	**69.460.141.442.654**

*Dalam Realisasi Dana Penyesuaian TA 2013 sebesar Rp69.460.141.442.654 terdapat realisasi Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp115.696.326.500 yang pertama kali dialokasikan pada TA 2013 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana Keistimewaan DIY pada APBN-P 2014 tidak lagi menjadi bagian dari Dana Penyesuaian dan disajikan terpisah.

B.2.2.2.3. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dana Keistimewaan DIY Rp0,42 triliun

Realisasi Dana TA 2014 adalah sebesar Rp419.099.774.450 yang berarti 80 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp523.875.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Penyesuaian TA 2014 ini lebih besar Rp303.403.447.950 dibanding realisasi TA 2013 sebesar Rp115.696.326.500 (tahun 2013 disajikan sebagai bagian dari Dana Penyesuaian).

Dana Keistimewaan DIY tidak seluruhnya terealisasi dikarenakan Pemprov DIY tidak mengajukan pencairan Dana Tahap III sebesar 20% dari pagu.

Untuk mekanisme pengalokasian, penyaluran dan pedoman umum Dana Keistimewaan DIY tahun 2014 ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan No.103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan PMK No.36/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Keistimewaan DIY TA 2014.

B.2.2.3. Suspen

Suspen minus Rp97,39 miliar

Suspen merupakan perkiraan (akun) yang menampung perbedaan pencatatan realisasi Belanja Negara menurut kementerian negara/lembaga dengan pencatatan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Jumlah suspen belanja TA 2014 adalah sebesar minus Rp97.393.160.171, dengan rincian (dalam Rp):

www.peraturan.go.id

Uraian	BUN	Kementerian Negara/Lembaga *)	Selisih (BUN – K/L)
Belanja Pemerintah Pusat			
Belanja Pegawai	243.719.624.006.422	243.719.884.098.338	(260.091.916)
Belanja Barang	175.144.475.400.158	175.167.953.464.364	(23.478.064.206)
Belanja Modal	146.753.013.335.371	146.724.621.022.983	28.392.312.388
Pembayaran Bunga Utang	133.441.688.595.776	133.441.292.679.083	395.916.693
Subsidi	391.962.514.288.102	391.962.514.288.102	-
Belanja Hibah	907.509.554.215	907.509.554.215	-
Belanja Bantuan Sosial	97.820.890.718.247	97.924.676.539.384	(103.785.821.137)
Belanja Lain-lain	11.652.519.680.692	11.651.096.301.935	1.423.378.757
Transfer keDaerah			
Dana Bagi Hasil	103.938.958.255.771	103.938.958.255.771	-
Dana Alokasi Umum	341.219.325.651.000	341.219.325.651.000	-
Dana Alokasi Khusus	31.894.470.734.500	31.894.470.734.500	-
Dana Otonomi Khusus	16.148.773.028.000	16.148.773.028.000	-
Dana Penyesuaian	80.082.373.489.250	80.082.454.280.000	(80.790.750)
Dana Keistimewaan DIY	419.099.774.450	419.099.774.450	-
Suspen	**1.775.105.236.511.954**	**1.775.202.629.672.125**	**(97.393.160.171)**

**) Data K/L tidak termasuk Pendapatan dan Belanja terkait dengan Pendapatan Hibah Non Kas (Barang/Jasa)*

Daftar suspen lengkap dapat dilihat di Lampiran 4A.

Penyebab terjadinya suspen antara lain adalah sebagai berikut:

a. Adanya laporan tingkat satker yang tidak terkonsolidasi di tingkat kementerian lembaga
b. Ketidaktersediaan dokumen sumber pada Kementerian/Lembaga sebagai dasar pencatatan pengembalian belanja pada pada LKKL.
c. Kesalahan input kode satker maupun kode Bagian Anggaran
d. Kesalahan input transaksi misalnya pencatatan Hibah barang yang seharusnya dicatat menggunakan dokumen MPHL namun dicatat menggunakan SPHL.

B.2.3. Defisit Anggaran

Defisit Anggaran Rp226,69 triliun

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dan Realisasi Belanja Negara TA 2014, maka Defisit Anggaran TA 2014 adalah sebesar Rp226.692.042.169.432, yang berarti 93,87 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp241.494.273.662.000.

Perhitungan Defisit Anggaran sebagai berikut:

Uraian	TA 2014 (*Audited*)	TA 2013 (*Audited*)
Pendapatan Negara dan Hibah	1.550.490.813.616.979	1.438.891.069.562.744
Belanja Negara	1.777.182.855.786.411	1.650.563.727.418.085
Defisit Anggaran	**(226.692.042.169.432)**	**(211.672.657.855.341)**

B.2.4.Pembiayaan

Pembiayaan (Neto) Rp248,89 triliun

Realisasi Pembiayaan (Neto) TA 2014 adalah sebesar Rp248.892.825.676.520 yang berarti 103,06 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp241.494.273.662.000. Pembiayaan terdiri dari (i) Pembiayaan Dalam Negeri, dan (ii) Pembiayaan Luar Negeri.

www.peraturan.go.id

B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)

Pembiayaan Dalam Negeri Rp261,24 triliun

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri TA 2014 adalah sebesar Rp261.244.985.683.200, yang berarti 102,48 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp254.931.959.172.000. Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari (i) Rekening Pemerintah, (ii) Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman, (iii) Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi, (iv) Surat Berharga Negara (Neto), (v) Pinjaman Dalam Negeri (Neto), (vi) Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah, (vii) Kewajiban Penjaminan, dan (viii) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional.

B.2.4.1.1. Penggunaan SAL

Penggunaan SAL Rp0 triliun

Pembiayaan dari Penggunaan SAL adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan rekening SAL. Tidak terdapat Penggunaan SAL TA 2014 yang berarti 0 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp1.000.000.000.000. Rincian Penggunaan SAL adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 (*Audited*)	TA 2013 (*Audited*)
Penggunaan SAL	-	30.000.000.000.000
Jumlah	**-**	**30.000.000.000.000**

B.2.4.1.2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Rp5 triliun

Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman TA 2014 adalah sebesar Rp4.999.122.569.597 yang berarti 113,66 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp4.398.460.306.000. Rincian Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 (*Audited*)	TA 2013 (*Audited*)
Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN kepada Daerah	16.240.842.237	36.618.425.203
Penerusan Pinjaman DN kepada BUMD	46.268.415.162	29.741.504.648
Penerusan Pinjaman DN kepada BUMN	431.025.435.241	472.664.221.510
Penerusan Pinjaman DN kepada Non Pemerintah	32.600.023.484	137.176.960.778
Penerusan Pinjaman LN Tahun Anggaran Berjalan (TAB) kepada Daerah	51.581.497.491	61.639.309.344
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMD	313.343.927.733	259.089.528.395
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMN	4.094.192.988.049	3.154.920.573.932
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Non Pemerintah	13.869.440.200	22.234.948.480
Total	**4.999.122.569.597**	**4.174.085.472.290**

B.2.4.1.3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Pembiayaan Privatisasi dan Penjualan Aset Program

Realisasi Pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2014 sebesar Rp543.558.387.876 atau 54,36 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp1.000.000.000.000.

Program privatisasi dilakukan Pemerintah dengan tujuan utama yaitu untuk peningkatan kinerja

www.peraturan.go.id

Restrukturisasi Rp543,56 miliar

BUMN. Peningkatan kinerja tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas modal BUMN dan pelepasan kepemilikan pemerintah kepada swasta agar BUMN lebih mampu bersaing. Sementara itu, Penjualan Aset Program Restrukturisasi dilakukan oleh PT PPA melalui penjualan aset pasca dibubarkannya BPPN. Rincian realisasi pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi adalah:

Uraian	TA 2014 (*Audited*)	TA 2013 (*Audited*)
Penerimaan Hasil Privatisasi	3.567.668.844	56.700.000.000
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BPPN	401.935.495.548	1.362.055.382.471
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	138.055.223.484	81.395.784.730
Jumlah	**543.558.387.876**	**1.500.151.167.201**

Penerimaan dari hasil privatisasi berasal dari:

1. Penjualan saham milik negara pada PT Kertas Padalarang dengan nilai sebesar Rp352.447.193;
2. Hasil penjualan saham milik negara pada PT Sarana Karya sebesar Rp3.215.221.651.

B.2.4.1.4. Surat Berharga Negara (Neto)

Surat Berharga Negara (Neto) Rp264,63 triliun

Realisasi Pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto TA 2014 adalah sebesar Rp264.628.918.472.574 atau 99,87 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp264.983.707.000.000. Pemerintah dapat menerbitkan SBN untuk membiayai kebutuhan pengelolaan kas bagi pelaksanaan APBN, apabila dan tunai kas tidak cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran di awal tahun anggaran dan untuk kepentingan stabilisasi pasar dan pengelolaan kas dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

Perhitungan Surat Berharga Neto adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2014 (*Audited*)	TA 2013 (*Audited*)
Penerimaan		
Penerbitan/Penjualan SPN	60.900.000.000.000	42.400.000.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara DN	229.420.795.000.000	187.631.255.000.000
Utang Bunga Obligasi Negara DN	4.804.417.699.000	2.936.148.166.000
Penerbitan/Penjualan SBSN – Jangka Panjang	41.181.713.565.568	23.507.074.053.640
Imbalan Dibayar di Muka SBSN – Jangka Panjang	173.506.611.000	107.679.673.000
Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	16.170.000.000.000	11.653.000.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara – Valas	68.211.583.706.866	41.493.925.823.035
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara – Valas	45.473.984.500	2.856.042.000
Penerimaan Penerbitan SBSN – Valas	17.746.402.980.000	17.237.922.715.000
Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dlm Rangka Pembiayaan Proyek melalui SBSN PBS	442.631.434.432	777.800.946.360
Total Penerimaan	**439.096.524.981.366**	**327.747.662.419.035**
Pengeluaran		
Pelunasan SPN	(55.000.000.000.000)	(31.170.000.000.000)
Pelunasan Obligasi DN	(40.271.434.883.492)	(49.761.974.878.452)
Pembelian Kembali Obligasi DN	(7.294.968.000.000)	(3.527.385.000.000)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara DN	(5.151.535.004.000)	(2.444.191.774.000)
Pelunasan SBSN-Jangka Pendek		-
Pelunasan SBSN-Jangka Panjang	(18.532.410.000.000)	(12.833.860.000.000)

www.peraturan.go.id

Pembayaran Imbalan Dibayar di Muka SBSN- Jk Panjang	(172.435.299.000)	(122.729.287.000)
Pelunasan SPN Syariah	(14.068.000.000.000)	(3.215.000.000.000)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Valas	(48.623.322.300)	-
Pelunasan obligasi negara Valas	(26.394.700.000.000)	-
Pelunasan SBSN Valas Jangka Panjang	(7.533.500.000.000)	-
Total Pengeluaran	**(174.467.606.508.792)**	**(103.075.140.939.452)**
Jumlah SBN (Neto)	**264.628.918.472.574**	**224.672.521.479.583**

B.2.4.1.5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

Pinjaman Dalam Negeri (Neto) Rp949,97 miliar

Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri TA 2014 adalah sebesar Rp 949.967.958.159, yang berarti 43,62 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN-P sebesar Rp2.177.977.297.000. Pinjaman ini merupakan pinjaman dari BUMN dan Perusahaan Daerah. Rincian Pinjaman Dalam Negeri TA 2014 adalah:

Uraian	TA 2014 (*Audited*)	TA 2013 (*Audited*)
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	285.680.274.280	241.537.090.518
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari Persahaan Daerah	805.543.738.021	374.189.693.670
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(141.256.054.142)	(141.256.054.142)
Jumlah	**949.967.958.159**	**474.470.730.046**

B.2.4.1.6. Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah

PMN/ Investasi Pemerintah Rp8,91triliun

Realisasi pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah TA 2014 adalah sebesar Rp8.912.513.705.006, yang berarti 95,78 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN-P sebesar Rp9.305.042.400.000. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2014 adalah:

Uraian	TA 2014 (*Audited*)	TA 2013 (*Audited*)
PMN untuk BUMN dan Badan Lainnya	3.000.000.000.000	2.000.000.000.000
PMN untuk Badan Internasional dan Penyertaan Modal Lainnya	2.412.513.705.006	1.997.051.462.553
Investasi Pemerintah	-	4.582.642.303.197
Investasi Pemerintah untuk Dana Geothermal	-	1.126.500.000.000
Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	3.500.000.000.000	2.209.253.000.000
Jumlah	**8.912.513.705.006**	**11.915.446.765.750**

PMN untuk BUMN dan Badan Lainnya sebesar Rp3.000.000.000.000 terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) sebesar	700.000.000.000
Perum jaminan Kredit Indonesia sebesar	1.300.000.000.000
PT Sarana Multigriya Finansial sebesar	1.000.000.000.000
Jumlah	**3.000.000.000.000**

www.peraturan.go.id

PMN untuk Badan Internasional dan Penyertaan Modal Lainnya sebesar Rp2.412.513.705.006 terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector	2.219.482.849
Asian Development Bank	508.073.844.015
International Bank For Reconstruction and Development	216.685.936.730
International Finance Corporation	18.761.223.782
International Fund for Agricultural Development	44.294.033.433
ASEAN Infratructure Fund	591.379.184.197
International Rubber Consortium Limited (IRCo)	31.100.000.000
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	1.000.000.000.000
Jumlah	**2.412.513.705.006**

Dana Bergulir sebesar Rp3.500.000.000.000 dikelola oleh beberapa BLU, yaitu:

Uraian	Jumlah (Rp)
BLU Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat	3.000.000.000.000
BLU LPDB KUMKM	500.000.000.000
Jumlah	**3.500.000.000.000**

B.2.4.1.7. Kewajiban Penjaminan

Kewajiban Penjaminan Rp964,07 milyar

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Dana Kewajiban adalah Rp964.068.000.000 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan pada APBN-P sebesar Rp964.068.000.000.

Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebesar Rp964.068.000.000 terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara	913.654.000.000
Proyek percepatan penyediaan air minum	2.233.000.000
Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	48.181.000.000
Jumlah	**964.068.000.000**

B.2.4.1.8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Rp0 triliun

Tidak ada realisasi pengeluaran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional pada TA 2014 dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp8.359.075.031.000. Alokasi dana pengembangan pendidikan nasional adalah untuk pembentukan *endowment fund* yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak. Dana tersebut dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada Kementerian Keuangan.

www.peraturan.go.id

B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)

Pembiayaan LN (Neto) minus Rp12,35 triliun

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) TA 2014 adalah sebesar minus Rp12.352.160.006.680 yang berarti 91,92 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2014 sebesar minus Rp13.437.685.510.000. Pembiayaan Luar Negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman luar negeri, (ii) penerusan pinjaman dan (iii) pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri

Penarikan Pinjaman LN Rp52,57 triliun

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri TA 2014 adalah sebesar Rp52.574.662.239.463 yang berarti 97,13 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp54.129.575.787.000. Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman program, dan (ii) penarikan pinjaman proyek.

Penarikan Pinjaman Program Rp17,78 triliun

B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Program

Realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2014 adalah sebesar Rp17.776.956.719.493, yang berarti 105,19 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp16.899.600.000.000.

Realisasi Penarikan Pinjaman Program melebihi nilai yang dianggarkan pada UU APBN-P TA 2014, disebabkan kurs pada saat penarikan lebih tinggi dibanding asumsi kurs yang ditetapkan pada APBN-P TA 2014. Adapun secara valas, realisasi pinjaman program tidak melebihi APBN-P TA 2014

Pinjaman Program adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk tunai (*cash financing*) yang memerlukan *policy matrix* untuk pencairannya. *Policy matrix* adalah suatu *set of policy* yang menjadi *collateral* pinjaman program yang harus dipenuhi agar pinjaman dapat dicairkan. Pinjaman program digunakan untuk mendukung pembiayaan defisit tunai APBN. Besarnya pinjaman program dilakukan dengan mempertimbangkan defisit pada suatu tahun anggaran.

Berikut di bawah ini adalah rincian realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2014 dan TA 2013 (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 (*Audited*)	TA 2013 (*Audited*)
Penarikan Pinjaman Program dari OECF	-	3.888.653.458.800
Penarikan Pinjaman Program dari IBRD	9.219.474.559.493	9.639.342.761.806
Penarikan Pinjaman Program dari ADB	4.865.200.000.000	4.898.400.000.000
Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya	3.692.282.160.000	-
Jumlah	**17.776.956.719.493**	**18.426.396.220.606**

Realisasi Penarikan Pinjaman Program ini sama dengan realisasi yang dilaporkan oleh BA 999.01 (Utang Pemerintah) sehingga tidak terdapat lagi selisih pencatatan antara Ditjen Perbendaharaan selaku kuasa BUN dengan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Kuasa Pengguna Anggaran 999.01 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

www.peraturan.go.id

Uraian	Data BUN	Data BA 999	Selisih
Penarikan Pinjaman Program dari OECF	-	-	-
Penarikan Pinjaman Program dari IBRD	9.219.474.559.493	9.219.474.559.493	-
Penarikan Pinjaman Program dari ADB	4.865.200.000.000	4.865.200.000.000	-
Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya	3.692.282.160.000	3.692.282.160.000	-
Jumlah	**17.776.956.719.493**	**17.776.956.719.493**	-

B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Proyek

Penarikan Pinjaman Proyek Rp34,80 triliun

Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2014 adalah sebesar Rp34.797.705.519.970, yang berarti 93,47 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp37.229.975.787.000.

Pinjaman Proyek merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan tertentu. Kegiatan pembangunan ini adalah kegiatan yang telah menjadi kegiatan prioritas pembangunan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Berikut di bawah ini adalah rincian realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2014 dan TA 2013 (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 (*Audited*)	TA 2013 (*Audited*)
Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral	7.825.365.221.903	10.395.098.419.601
Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral	7.436.950.218.356	7.651.179.843.930
Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor	4.909.557.800.278	6.606.850.582.989
Penarikan Pinjaman Proyek Komersial	14.653.542.921.278	12.155.674.537.140
Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya	(27.710.641.845)	44.622.012.961
Jumlah	**34.797.705.519.970**	**36.853.425.396.621**

Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek ini berbeda dengan realisasi yang dilaporkan oleh BA 999.01 (Utang Pemerintah), dengan selisih sebesar minus Rp1.037.050.233.025 (BA 999.01) mencatat lebih kecil dibandingkan BUN) dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Data BUN (SAU)	Data BA 999 (SAI)	Selisih (SAI-SAU)
Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral	7.825.365.221.903	8.902.346.620.950	1.076.981.399.047
Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral	7.436.950.218.356	6.597.514.693.926	(839.435.524.430)
Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor	4.909.557.800.278	4.978.737.675.539	69.179.875.261
Penarikan Pinjaman Proyek Komersial	14.653.542.921.278	13.282.056.299.844	(1.371.486.621.434)
Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya	(27.710.641.845)		(27.710.641.845)
Jumlah	**34.797.705.519.970**	**33.760.655.290.259**	**(1.037.050.233.025)**

Penjelasan selisih pencatatan antara BUN (Sistem Akuntansi Umum) dengan BA 999.01 (Sistem Akuntasi Instansi) adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
NoD Valuta 2013, Diterima di Reksus 2014	(88.398.265.206)
NoD Valuta 2012, SP3 2014 (telah dicatat SAI pada tahun 2012)	(7.246.782.438)
NoD Valuta 2013, SP3 2014 (telah dicatat SAI pada tahun 2013)	(2.300.260.927.914)
Koreksi SP4HLN namun SP3 belum koreksi	(8.558.240.794)

www.peraturan.go.id

SP3 belum terbit/terbit sebagian	116.763.112.348
Refund Direct Payment	(896.342.358)
NoD 2014 namun Pagu DIPA tidak tersedia	680.424.562.986
NoD 2014 namun Pagu DIPA tidak cukup	36.349.120.595
NoD 2014 akan diterbitkan/dieksekusi tahun 2015	396.002.209.441
SWAP	138.768.969.958
Pembulatan	(3.492)
Bank Charge	2.353.849
Total	**(1.037.050.233.025)**

B.2.4.2.2. Penerusan Pinjaman

Penerusan Pinjaman Rp2,51 triliun

Realisasi pengeluaran pembiayaan Penerusan Pinjaman TA 2014 adalah sebesar Rp2.505.637.602.270 yang berarti 73,54 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp3.407.371.699.000. Rincian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 (*Audited*)	TA 2013 (*Audited*)
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Daerah	187.866.570.901	117.600.418.723
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMN	2.317.771.031.369	3.762.966.517.676
Total	**2.505.637.602.270**	**3.880.566.936.399**

Realisasi Penerusan Pinjaman sebesar 73,54 persen disebabkan masih rendahnya penyerapan dana penerusan pinjaman oleh BUMN karena beberapa hal yaitu (1) terhambatnya pembebasan lahan untuk proyek, kendala proses perijinan dengan Pemda setempat dan sebagian proyek masih dalam proses pengadaan barang dan jasa terkait proyek kelistrikan, (2) proses pengadaan barang jasa dan kendala teknis dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan pada proyek Pembangkit Listrik Panas Bumi, (3) perubahan cara penarikan pinjaman sehingga perlu dilakukan revisi DIPA pada proyek infrastruktur, dan (4) keterlambatan proses verifikasi internal pada pemerintah daerah dalam proyek Pengerukan Sungai Bebas Banjir.

Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN Rp62,42 triliun

B.2.4.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada TA 2014. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri dalam TA 2014 adalah sebesar Rp62.421.184.643.873 yang berarti 97,29 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp64.159.889.598.000.

Berikut di bawah ini adalah rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri TA 2014 dan TA 2013(dalam Rp):

Uraian	TA 2014 (*Audited*)	TA 2013 (*Audited*)
Pembiayaan Cicilan Pokok Utang LN – Pinjaman Program	3.132.403.585.000	3.429.128.608.848
Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Program	11.190.683.832.426	12.296.871.113.188
Pembiayaan Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Proyek	2.450.264.998.290	2.453.973.347.539
Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Proyek	45.647.832.228.157	39.024.451.373.429
Jumlah	**62.421.184.643.873**	**57.204.424.443.004**

www.peraturan.go.id

B.2.5. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)

Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp226.692.042.169.432dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp248.892.825.676.520 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp22.200.783.507.088 dengan perhitungan sebagai berikut (dalam Rp):

SIlLPA
Rp22,20 triliun

Uraian	TA 2014 (*Audited*)	TA 2013 (*Audited*)
Pendapatan Negara dan Hibah	1.550.490.813.616.979	1.438.891.069.562.744
Belanja Negara	1.777.182.855.786.411	1.650.563.727.418.085
Surplus (Defisit)	(226.692.042.169.432)	(211.672.657.855.341)
Pembiayaan Neto	248.892.825.676.520	237.394.577.321.194
SiLPA (SiKPA)	**22.200.783.507.088**	**25.721.919.465.853**

www.peraturan.go.id

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. **Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual**

Sesuai dengan Pasal 36 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2014, Laporan Realisasi Anggaran pada LKPP dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual. Informasi tentang pendapatan dan belanja secara akrual dimaksudkan sebagai tahap menuju pada penerapan akuntansi berbasis akrual. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual disajikan secara tersendiri dalam Suplemen LKPP Tahun 2014.

2. **Data Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan**

Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdapat realisasi belanja terkait dengan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan TA 2014, dengan rincian sebagai berikut:

Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Realisasi TA 2014 (dalam Rp)		
		Dekonsentrasi	Tugas Pembantuan	Urusan Bersama
010	Kementerian Dalam Negeri	1.308.670.832.317	322.965.338.962	8.525.439.957.623
018	Kementerian Pertanian	1.537.905.617.592	5.791.608.093.215	-
019	Kementerian Perindustrian	120.081.724.610	-	-
020	Kementerian ESDM	42.144.090.804	-	-
023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2.241.479.662.064	82.326.501.141	-
024	Kementerian Kesehatan	730.916.627.532	2.824.870.054.001	-
026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	211.735.960.320	1.238.876.808.252	-
027	Kementerian Sosial	561.149.975.178	92.731.830.075	-
029	Kementerian Kehutanan	135.245.799.770	13.506.244.653	-
032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	279.313.019.453	793.678.767.104	-
033	Kementerian Pekerjaan Umum	219.301.008.226	1.692.331.781.313	1.232.482.499.000
040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	33.091.499.472	61.129.001.881	-
043	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	94.158.146.272	-	-
044	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	141.990.498.571	67.990.454.738	-
047	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	2.394.190.920	-	-
055	Kementerian Negara PPN/Bappenas	25.454.595.831	-	-
057	Perpustakaan Nasional	12.462.004.608	-	-
065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	14.872.802.267	-	-
067	Kementerian PDT	8.376.735.223	35.117.783.274	-
068	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	-	-	-
087	Arsip Nasional Republik Indonesia	3.335.613.925	-	-
090	Kementerian Perdagangan	93.432.124.200	230.710.802.776	-
092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	238.767.833.705	-	-

www.peraturan.go.id

111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	6.807.122.800	16.738.436.686	-
	Total	**8.063.081.185.660**	**13.264.581.898.071**	**9.757.922.456.623**

3. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU)

Sebagai bagian reformasi manajemen keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamanatkan berbagai perubahan fundamental, antara lain pada Pasal 68 dan pasal 69 mengenai PK BLU untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Amanat UU 1/2004 tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan 5 (lima) Peraturan Menteri Keuangan berkaitan dengan Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pemerintah untuk Menerapkan PPK BLU, Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU, Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU, Pedoman Penetapan Remunerasi pada BLU, Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU.

BLU merupakan implementasi konsep "*enterprising the government*" dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung produktivitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik tetapi tidak bertujuan mencari laba. Fleksibilitas BLU antara lain mengelola langsung pendapatan operasionalnya, tidak harus menyetor surplus akhir tahun ke Rekening Kas Negara, pegawai bisa PNS dan non-PNS, remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Sumber pembiayaan instansi yang menerapkan PK BLU berasal dari APBN, pendapatan dari pelayanan, kerja sama operasional, hibah dan pendapatan lainnya.

Bidang layanan umum yang diselenggarakan instansi PK BLU adalah kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa (*quasi public goods*), meliputi penyediaan barang/jasa, pengelola wilayah, dan pengelola dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BLU diharuskan menyusun Rencana Bisnis Anggaran yang akan digabungkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian negara/lembaga induknya. Transparansi dan akuntabilitas diinformasikan dalam laporan keuangan instansi PK BLU, minimal terdiri dari laporan operasional/laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan instansi PK BLU tersebut harus dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga, yang selanjutnya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disampaikan Presiden kepada DPR sebagai RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Sampai dengan 31 Desember 2014, terdapat 141 Satuan Kerja di lingkungan pemerintah yang telah menerapkan PK BLU, yang berasal dari 20 Kementerian Negara/Lembaga, yaitu:

No	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah BLU
1	Sekretariat Negara	2
2	Kementerian Keuangan	3
3	kementerian Pertanian	2
4	Kementerian Perindustrian	5

www.peraturan.go.id

5	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1
6	Kementerian Perhubungan	7
7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	33
8	Kementerian Kesehatan	52
9	Kementerian Agama	15
10	Kementerian Kehutanan	1
11	Kementerian Pekerjaan Umum	1
12	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	1
13	Kementerian Koperasi dan UKM	2
14	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1
15	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1
16	Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional	1
17	Kementerian Perumahan Rakyat	1
18	POLRI	10
19	BP Batam	1
20	BP Sabang	1
	Jumlah BLU	**141**

Ditinjau dari bidang layanan, dari 141 BLU tersebut dapat dibagi menjadi:

a. 131 BLU bidang Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
b. 4 BLU bidang Pengelolaan Wilayah Kawasan;
c. 6 BLU bidang Pengelolaan Dana Khusus.

Berdasarkan laporan keuangan 141 BLU (*Audited*) berbasis Standar Akuntansi Keuangan (SAK), total pendapatan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp46.831.513.224.542 . Komposisi pendapatan BLU pada TA 2014 dapat dilihat pada Grafik 24.

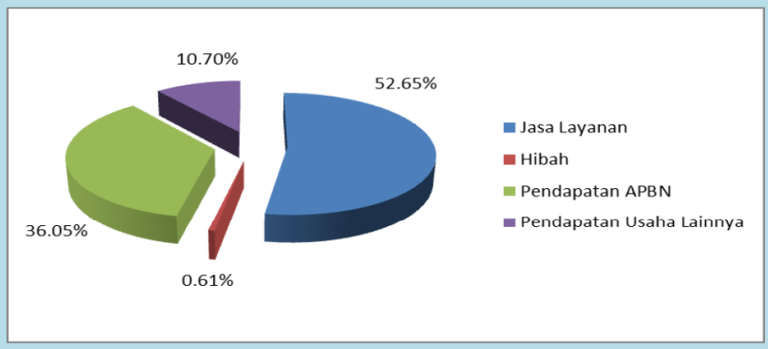

Grafik 24 Komposisi Pendapatan BLU TA 2014

Sementara itu, Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU Tahun 2014 dapat dilihat pada Grafik 25.

www.peraturan.go.id

(dalam miliar rupiah)

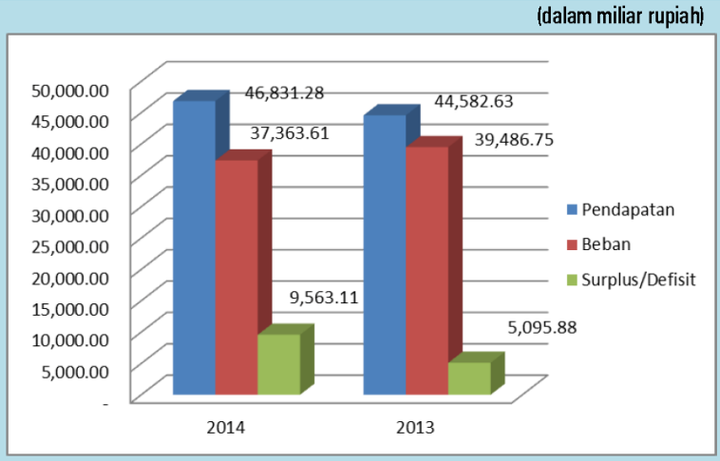

Grafik 25 Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU TA 2014

Ikhtisar Laporan Keuangan BLU disajikan secara lengkap pada **Lampiran 37**.

4. Pergeseran Pagu Anggaran pada BA 999.08 ke BA Kementerian Negara/Lembaga

Pagu anggaran pengelolaan belanja lain-lain (BA 999.08) TA 2014 ditetapkan dalam UU APBN/P Tahun 2014 meliputi jenis belanja sebagai berikut:

(dalam rupiah)

	Belanja Pegawai	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Lain-Lain	Jumlah
PAGU APBN	21.980.005.452.000	3.000.000.000.000	36.903.975.655.000	61.883.981.107.000
PAGU APBN-P	12.510.009.041.000	3.300.000.000.000	27.938.346.347.000	43.748.355.388.000

Perubahan dalam APBN-P disebabkan antara lain adanya pergeseran pagu anggaran BA 999.08 ke BA K/L ataupun ke BA BUN lainnya. Pergeseran dari BA 999.08 ke BA K/L diatur dalam PMK Nomor 7/PMK.02/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2014. Pergeseran tersebut menggunakan mekanisme penerbitan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SABA) sebesar Rp19.344.178.044.000 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. SABA sebesar Rp4.144.111.186.000 yang telah digeser ke K/L (menambah pagu di K/L) dalam APBN-PTA 2014
b. SABA sebesar Rp15.200.066.858.000 adalah SABA yang pergeserannya dilakukan setelah APBN-P TA 2014 ditetapkan.

Terdapat juga Pergeseran dari BA 999.08 ke BA BUN 999.02 dan 999.99 sebesar Rp2.135.962.432.000 dengan rincian sebagai berikut:

a. Realokasi ke BA 999.02 (Hibah) sebesar Rp91.298.537.000.
b. Realokasi ke BA 999.99 (Pengelolaan Transaksi Khusus) sebesar Rp2.044.663.895.000.

5. Kontrak Tahun Jamak

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 52 ayat 2 disebutkan bahwa kontrak tahun jamak merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000 dan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya

www.peraturan.go.id

sampai dengan Rp10.000.000.000. Data kontrak tahun jamakTahun 2015 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Nilai Kontrak Tahun Jamak
1	2015	8.774.617.209.000
2	2016	5.532.125.857.000
3	2017	2.119.102.413.000
4	2018	916.395.067.000
5	2019	389.210.606.000
	Jumlah	17.731.451.152.000

Rincian Nilai Kontrak tahun Jamak Per KL dapat dilihat pada Lampiran 5.

6. Pagu Minus

Pagu APBN-P Tahun 2014 sebesar Rp1.876.872.758.707.000 terdiri dari pagu belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.280.368.574.301.000 dan pagu Transfer ke Daerah sebesar Rp 596.504.184.406.000. Sampai dengan akhir tahun 2014 masih terdapat pagu minus pada DIPA dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Satker	Nilai
1.	Belanja Pegawai	2.226	1.243.998.122.759
2.	Non Belanja Pegawai	254	67.055.761.375
3.	Belanja yang berasal dari Hibah Langsung Barang/Jasa	289	2.077.619.274.457

1. Belanja pegawai melebihi pagu anggaran DIPA terjadi khususnya pada belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji yang dapat dibayarkan meskipun pagu anggaran dalam DIPA tidak cukup tersedia. Kekurangan pagu anggaran pembayaran gaji disebabkan tidak meratanya distribusi alokasi anggaran untuk pembayaran gaji sehingga terdapat satker yang kelebihan maupun kekurangan alokasi pembayaran gaji di akhir tahun. Selain itu, adanya pengangkatan pegawai baru maupun perpindahan/mutasi pegawai tidak disertai dengan penyesuaian/revisi DIPA sehingga jumlah alokasi anggaran pembayaran gaji pada setiap satker tidak sesuai dengan jumlah pegawai pada satker yang bersangkutan.
2. Belanja non pegawai melebihi pagu anggaran DIPA khususnya terjadi pada belanja barang/jasa, dimana data realisasi anggaran yang telah diterbitkan SP2D di KPPN maupun pengadaan barang/jasa yang telah dikontrakkan oleh satker tidak terinformasi dengan tepat pada saat revisi anggaran. Revisi anggaran tersebut terjadi karena antara lain adanya kebijakan penghematan/pemotongan anggaran yang menimbulkan alokasi pagu anggaran lebih kecil daripada anggaran yang telah dibayarkan/direalisasikan/dikontrakkan. Hal ini menimbulkan pagu minus pada kegiatan tersebut. Selain itu pagu minus juga terjadi khususnya pada KPPN Non SPAN yang diakibatkan terdapat revisi DIPA yang tidak dapat diupload ke SPAN sedangkan realisasinya berhasil dikonversi melalui *Daily Transaction Conversion*.
3. Pagu minus belanja yang berasal dari hibah langsung berupa barang/jasa terjadi karena pengesahan pendapatan dan belanja yang berasal dari hibah langsung berupa barang/jasa, menurut ketentuan tidak perlu direvisi DIPA-nya.

Pagu minus terjadi pada tingkat satker, namun secara total pagu anggaran pada tingkat Kementerian/Lembaga tidak terjadi minus.

www.peraturan.go.id

7. Informasi Keuangan Kontrak Kerja Sama dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan Hulu Migas KKKS tahun 2014 dan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

a. Pengiriman Minyak Bumi Tujuan Ekspor

Pengiriman minyak bumi untuk tujuan ekspor dari hasil operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terdiri dari pengiriman minyak bumi tujuan domestik non Kilang Pertamina dan ekspor. Data ekspor minyak bumi periode per 31 Desember 2014 dan periode per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan		Periode 31 Des 2014	Periode 31 Des 2013
Total Ekspor	BBL	109.933.259	117.380.467
	US$	10,384,153,481	12,187,878,389
Lifting Kontraktor	BBL	95.794.440	96.313.091
	US$	9,090,999,294	10,079,246,573
Lifting Pemerintah	BBL	14.138.819	21.067.376
	US$	1,293,154,187	2,108,631,816

b. Pengiriman Minyak Bumi ke Kilang Domestik

Pengiriman minyak bumi ke kilang domestik adalah pengiriman atau penjualan minyak bumi ke kilang domestik milik PT Pertamina (Persero) dimana harga jual minyak bumi menggunakan ICP. Data pengiriman minyak bumi ke kilang domestik periode 31 Desember 2014 dan periode 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan		Periode 31 Des 2014	Periode 31 Des 2013
Total Pengiriman	BBL	177.402.706	181.051.565
	US$	17,081,079,924	19,158,959,018
Lifting Kontraktor	BBL	40.324.311	40.658.355
	US$	3,805,874,414	4,266,710,266
Lifting Pemerintah	BBL	137.078.395	140.393.210
	US$	13,275,205,510	14,892,248,752
	Ekiv Rp	156.230.980.326.380	155.476.970.362.368

c. Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Minyak Bumi Dalam Negeri/*Domestic Market Obligation*

DMO merupakan kewajiban KKKS berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS) untuk menjual dan menyerahkan kepada pemerintah sebagian minyak bumi yang menjadi bagian KKKS dalam rangka pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri. Data DMO periode 31 Desember 2014 dan periode 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Periode 31 Des 2014	Periode 31 Des 2013
DMO BBL	23.809.569	23.320.940
DMO FEE (US$)	1,101,201,003	1,168,028,468
DMO AT ICP (US$)	2,317,948,818	2,442,413,165

d. Pengiriman Ekspor Natural Gas

Pengiriman ekspor natural gas merupakan penjualan gas alam untuk tujuan ekspor. Data pengiriman ekspor untuk periode 31 Desember 2014 dan periode 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan		Periode 31 Des 2014	Periode 31 Des 2013
Total Pengiriman	MMBTU	347.344.141	353.435.664
	US$	4,648,243,970	5,120,660,835
Bagian Kontraktor	US$	3,784,458,909	3,744,860,809
Bagian Pemerintah	US$	863,785,062	1,375,800,026

www.peraturan.go.id

e. Pengiriman Ekspor *Liquefied Petroleum Gas* (LPG)
Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG, maka ekspor LPG tidak diperbolehkan apabila kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi. Pengiriman ekspor LPG terakhir dilakukan pada Bulan Agustus tahun 2009.

f. Pengiriman Ekspor *Liquefied Natural Gas* (LNG)
Pengiriman eskpor LNG merupakan penjualan LNG untuk tujuan ekspor. Data pengiriman ekspor LNG sampai dengan periode 31 Desember 2014 dan periode 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan		Periode 31 Des 2014	Periode 31 Des 2013
Total Pengiriman	MMBTU	834.242.926	888.403.742
	BBL	11,533,387,245	12,020,371,757
Biaya Operasi LNG	US$	1,239,673,090	1,451,913,807
Net Back	US$	10,293,714,154	10,568,457,950
Bagian Kontraktor	US$	7,216,848,061	7,121,973,644
Bagian Pemerintah	US$	3,076,866,093	3,446,484,306

g. Pengiriman Natural Gas Domestik
Pengiriman Natural Gas Domestik merupakan penjualan gas alam untuk tujuan domestik. Data pengiriman untuk periode 31 Desember 2014 dan periode 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan		Periode 31 Des 2014	Periode 31 Des 2013
Total Pengiriman	MMBTU	1.201.267.698	1.193.143.354
	US$	7,597,841,743	7,326,629,400
Bagian Kontraktor	US$	5,565,879,055	5,405,585,303
Bagian Pemerintah	US$	2,031,962,689	1,921,044,098

h. Pengiriman LPG Domestik
Pengiriman LPG Domestik merupakan penjualan LPG untuk tujuan domestik. Data pengiriman untuk periode 31 Desember 2014 dan periode 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan		Periode 31 Des 2014	Periode 31 Des 2013
Total Pengiriman	MMBTU	1.488.326	1.448.793
	US$	1,194,472,597	1,241,829,004
Bagian Kontraktor	US$	870,077,601	873,867,216
Bagian Pemerintah	US$	324,394,996	367,961,788

i. Pengiriman LNG Domestik
Pengiriman LNG Domestik merupakan penjualan LNG untuk tujuan domestik. Data pengiriman untuk periode 31 Desember 2014 dan periode 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan		Periode 31 Des 2014	Periode 31 Des 2013
Total Pengiriman	MMBTU	86.749.337	67.525.409
	US$	1,012,064,711	788,614,005
Biaya Operasi LNG	US$	133,351,261	44,895,561
Net Back	US$	878,713,450	743,718,444
Bagian Kontraktor	US$	538,107,107	432,022,912
Bagian Pemerintah	US$	340,606,343	311,695,532

j. Pengiriman *Coal Bed Methane* (CBM) Domestik
Pengiriman CBM domestik merupakan penjualan CBM untuk tujuan domestik. Data pengiriman untuk periode 31 Desember 2014 dan periode 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

www.peraturan.go.id

Keterangan		Periode 31 Des 2014	Periode 31 Des 2013
Total Pengiriman	MMBTU	121.601	63.135
	US$	912,071	473,512
Bagian Kontraktor	US$	670,800	369,931
Bagian Pemerintah	US$	241,270	103,581

8. Perbandingan Pagu DIPA dan Pagu APBN-P

Pada LKPP, Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja disajikan berdasarkan pagu anggaran pada APBN-P. Sedangkan pada LKKL, pagu anggaran disajikan berdasarkan pagu DIPA.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, termasuk juga diatur dalam UU APBN, Pagu DIPA per K/L dapat dilakukan revisi dari pagu semula di APBN-P. Perubahan dalam pelaksanaan APBN-P dan DIPA dimungkinkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU APBN Nomor 23 Th 2013 tentang APBN TA 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran yaitu PMK Nomor 07/PMK.02/2013 dan PMK Nomor 36/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendaharawan Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Di antara kondisi yang menjadi penyebab diperbolehkannya DIPA per K/L direvisi sehingga menjadi berbeda dengan pagu anggaran pada APBN-P adalah sebagai berikut:

a. Adanya perubahan/revisi pagu DIPA atas pagu belanja yang bersumber dari PNBP setelah ditetapkannya UU APBN-P.
b. Percepatan penarikan Pinjaman LN/DN setelah ditetapkannya UU APBN-P.
c. Adanya revisi DIPA terkait Pengesahan Penerimaan Hibah LN/DN setelah UU APBN-P ditetapkan.
d. Revisi Pagu DIPA satker BLU akibat adanya realisasi Pendapatan BLU yang melebihi target yang sudah ditetapkan dalam UU APBN-P.
e. Adanya beberapa jenis belanja yang realisasinya diperbolehkan melampaui pagu APBN-P seperti subsidi energi. Oleh karena itu, dimungkinkan adanya revisi pagu DIPA yang melebihi pagu APBN-P.

Daftar pagu DIPA K/L dan pagu anggaran berdasarkan APBN-P dapat dilihat pada Lampiran 6.

9. Kebijakan Penyajian Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran

Kebijakan yang diambil dalam penyusunan LKPP untuk penyajian Pendapatan di LRA adalah menggunakan data yang ada di Bendahara Umum Negara (Sistem Kas Umum Negara). Data tersebut menggambarkan uang yang nyata telah masuk ke kas negara dan pendapatan yang telah disahkan oleh Bendahara Umum Negara sesuai dengan PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 (IPSAP 02) Tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Sesuai dengan IPSAP 02 Kas di Bendahara Penerimaan tidak dimasukkan sebagai pendapatan karena rekening Bendahara Penerimaan bukan bagian dari Bendahara Umum Negara.

Terdapat selisih pencatatan pendapatan antara SAKUN dengan K/L dikarenakan terdapat pendapatan yang uangnya sudah masuk ke kas negara namun K/L tidak mencatat karena tidak memiliki dokumen sumber. K/L tidak memiliki dokumen sumber dikarenakan wajib setor/pihak ketiga tidak menginformasikan/memberikan dokumen sumber penyetoran kepada Satker K/L. Untuk itu Pemerintah terus berupaya sehingga pencatatan yang dilakukan oleh K/L

www.peraturan.go.id

sama dengan BUN antara lain dengan menerapkan sistem MPN G-2 dan rekonsiliasi yang lebih intensif antara BUN dengan K/L. Pada tahun 2015 dengan penerapan MPN G-2 dan juga didukung dengan SPAN, diharapkan rekonsiliasi antara K/L dengan BUN dapat dilakukan dengan lebih efektif sehingga selisih pencatatan pendapatan antara K/L dengan BUN dapat menjadi sama/diminimalisir selisihnya.

Rincian selisih pencatatan Pendapatan antara K/L dengan BUN dapat dilihat di Lampiran 4B.

10. Biaya Operasional SKK Migas

Pengelolaan keuangan SKK Migas tahun 2014 pada prinsipnya masih sama dengan pengelolaan keuangan eks BPMIGAS yang dilaksanakan sejak tahun 2002 sampai dengan 2012 berdasarkan amanat UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Mengingat BPMIGAS dibubarkan pada 13 November 2012, maka dalam masa transisi sebelum ditetapkannya UU Migas yang baru, payung hukum penyediaan dan mekanisme biaya operasional SKK Migas tahun 2014 berlandaskan pada Perpres 9 Tahun 2013, yaitu :

Pasal 18 ayat (1)

Biaya operasional dalam rangka pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, berasal dari jumlah tertentu dari bagian negara dari setiap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 18 ayat (2)

Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Menteri, untuk ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan ketentuan di atas, SKK Migas melalui Menteri ESDM menyampaikan usulan RKT-RAB SKK Migas kepada Menteri Keuangan untuk memperoleh persetujuan dalam bentuk surat persetujuan Menteri Keuangan.

Pada tahun 2014 Pemerintah telah menetapkan pengaturan mengenai pengelolaan anggaran SKK Migas dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pendanaan Dan Pelaporan Rencana Kerja Tahunan Dan Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.

Realisasi penerimaan migas tahun 2014 yang dilaporkan dengan menggunakan asas neto, antara lain karena memperhitungkan faktor pengurang berupa biaya operasional SKK Migas tahun 2014. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-145/MK.02/2014 tanggal 3 Maret 2014, biaya operasional yang disetujui adalah sebesar Rp1.638.165.210.770 dan US$17.189.007 atau ekuivalen Rp1.818.649.787.840. Biaya operasional SKK Migas yang telah dipindahbukukan sampai dengan 31 Desember 2014 adalah ekuivalen sebesar Rp1.837.704.117.193 atau sebesar 101,05% dari persetujuan biaya operasional. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kurs yang digunakan pada saat penetapan persetujuan biaya operasional (asumsi kurs APBN 2014) dengan kurs transaksi pada saat pemindahbukuan biaya operasional.

Dalam pembahasan APBN 2014, Pemerintah telah berupaya agar biaya operasional SKK Migas masuk dalam mekanisme APBN dan dibahas bersama dengan DPR-RI. Namun demikian, dalam pembahasan APBN 2014 tersebut biaya operasional SKK Migas masih diperhitungkan dari penerimaan kegiatan usaha hulu migas yang dikelola dalam Rekening Migas.

Pada tahun 2015 Pemerintah memasukkan anggaran biaya operasional SKK Migas melalui mekanisme APBN. Oleh karena itu, dalam postur APBN 2015, Pemerintah telah mengalokasikan biaya operasional SKK Migas dalam BA Belanja Lain-Lain.

www.peraturan.go.id

11. <u>Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) yang Sudah *Closing Date* dan Belum Dilaporkan Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat</u>

Penerbitan dokumen pembukuan/pengesahan atas penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan) atas pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang sudah *closing date* tidak dapat dilakukan mengingat pagu anggaran atas PHLN dimaksud tidak dialokasikan kembali pada dokumen penganggaran tahun berikutnya. Dalam rangka menindaklanjuti temuan pemeriksaan terkait dengan penarikan pinjaman yang belum diterbitkan dokumen SP3 sebagai dasar realisasi APBN untuk PHL yang sudah *closing date*, diselesaikan dengan pendekatan akuntansi yang dituangkan dalam keputusan Menteri Keuangan sebagai dasar alokasi anggaran secara administratif dan sebagai rujukan penerbitan SP3 oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

Untuk itu, Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 534/KMK.05/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Penetapan Nilai Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) atas Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) yang Sudah *Closing Date* dan Belum Dilaporkan Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Penerbitan KMK dimaksud secara substansi tidak mempengaruhi posisi LKPP.

Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan dokumen pendukung telah diakuinya penerimaan pembiayaan pada BA 999.01 tahun sebelumnya. Terhadap perbedaan pengakuan pencatatan antara BA 999.01 DJPU dengan BUN, telah diungkapkan pada LKPP secara memadai.

12. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi Ketiga

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) merupakan perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan swasta. Perjanjian karya merupakan salah satu instrument hukum dalam bidang batubara. Dalam perkembangannya, PKP2B ditandatangani dari generasi I sampai dengan generasi VII. Namun dalam perjalanannya PKP2B mengalami perubahan dari generasi I sampai dengan generasi VII. Terdapat perbedaan interpretasi bunyi ketentuan PPN atas penyerahan batubara dalam Kontrak PKP2B Generasi III. Setiap interpretasi/pendapat didukung dengan dasar hukum positif yang ada. Terhadap perbedaan interpretasi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berpendapat bahwa perlu dilakukan perubahan ketentuan PPN dalam Kontrak PKP2B agar sesuai dengan ketentuan UU PPN yang berlaku dari waktu ke waktu (*prevailing*). Untuk perubahan tersebut perlu dilakukan renegosiasi PKP2B Generasi III maupun Generasi I dan Generasi II agar perlakuan PPN untuk batubara menjadi sama/*equal* untuk semua kontraktor, IUP, maupun konsumen. Saat ini sedang dilaksanakan proses renegosiasi kontrak pertambangan antara Pemerintah (Kementerian ESDM) dengan para kontraktor. Menteri Keuangan telah menyampaikan usulan kepada Menteri ESDM mengenai posisi Pemerintah terkait dengan klausul mengenai ketentuan perpajakan yang diatur dalam kontrak pertambangan.

13. Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Belanja Subsidi atas PPh DTP

Dasar hukum Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP)

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 237/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.011/2013 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 149/PMK.011/2014 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Dan/Atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2014;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 209/KMK.04/1998 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri

www.peraturan.go.id

Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 tentang Tatacara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik.

Realisasi Belanja Subsidi PPh-DTP Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp5.655.236.443.811 dari pagu anggaran sebesar Rp5.995.070.000.000.

Belanja Subsidi yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah pada tahun 2014 terdiri dari:

1. Subsidi PPh DTP atas penghasilan bunga/ imbalan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di pasar internasional dan atas penghasilan jasa pihak ketiga atas penerbitan dan/atau pembelian kembali Surat Berharga Negara di pasar internasional.

   PPh DTP SBN Valas merupakan salah satu fasilitas perpajakan yang diberikan dengan tujuan meningkatkan daya saing instrumen utang negara di pasar internasional. Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas penghasilan berupa bunga atau imbalan atas penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan/pembelian kembali surat berharga negara di pasar internasional terutang Pajak Penghasilan. Praktek yang umum dilakukan di pasar internasional, negara- negara penerbit SBN Valas tidak mengenakan pajak atas SBN yang diterbitkan dikarenakan:

   1) Praktik *Cross Boarder Issuance* tidak memungkinkan pemungutan pajak karena adanya *Tax Treaty* yang menyebabkan *tax rate* yang berbeda-beda (menyulitkan agen pembayar untuk memungut pajak dari berbagai investor).
   2) Kekhawatiran SBN valas yang diterbitkan tidak laku.

   Realisasi belanja subsidi tersebut selama tahun 2014 adalah sebesar Rp4.717.266.445.000 dari pagu anggaran sebesar Rp5.057.100.000.000.
2. Subsidi PPh DTP atas penghasilan sehubungan dengan pengusahaan sumber daya panas.

   PPh DTP panas bumi adalah salah satu fasilitas perpajakan yang diberikan kepada pengusaha panas bumi yang ijin/kontraknya ditandatangani sebelum Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi ditetapkan. Pemberian fasilitas ini dilakukan dengan tujuan menciptakan iklim investasi yang baik/kondusif dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik dan memberikan manfaat dan keadilan kepada daerah.

   Realisasi belanja subsidi tersebut selama tahun 2014 adalah sebesar Rp937.969.998.811 dari pagu anggaran sebesar Rp937.970.000.000

14. Potensi Penerimaan PBB Sektor Mineral dan Batubara

Dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Mineral dan Batubara (PBB Minerba) Pemerintah telah mengatur pengenaan PBB tersebut sesuai ketentuan khusus yang diatur dalam Kontrak (*lex specialis*) dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang umum berlaku (UU PBB dan peraturan pelaksanaanya).

Terdapat potensi penerimaan PBB Pertambangan Sektor Mineral dan Batubara kurang ditetapkan, oleh sebab itu Pemerintah telah melakukan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

a. Atas ketetapan pajak yang kurang ditetapkan, Pemerintah telah menerbitkan SPPT 2014 atas tiga Wajib Pajak Sektor Mineral dan Batubara;
b. melakukan koordinasi internal dalam rangka meneliti pengenaan PBB Minerba atas Wajib Pajak sektor Mineral dan Batubara;
c. akan membangun sistem informasi yang memadai sehingga administrasi penatausahaan PBB di sektor Minerba menjadi lebih baik di masa datang.

15. Penggunaan Tarif Pajak dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) dan Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun Anggaran 2014

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan satu-satunya jenis pajak yang menjadi kewajiban Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tertuang dalam *Production Sharing Contract* (PSC). PSC merupakan dokumen perjanjian kontrak kerja sama dalam bidang Migas antara Pemerintah dengan KKKS. Wajib Pajak KKKS Migas menerapkan tarif pajak

www.peraturan.go.id

Branch Profit Tax berdasarkan *Tax Treaty*, sedangkan Pemerintah berpendapat bahwa sesuai dengan prinsip bagi hasil dalam *Production Sharing Contract* (PSC), kontraktor harus menerapkan tarif *Branch Profit Tax* sebesar 20% sesuai dengan tarif yang disepakati pada saat kontrak ditandatangani. Apabila Wajib Pajak KKKS Migas menerapkan tarif pajak berdasarkan *Tax Treaty*, maka penerimaan Pemerintah akan berkurang dari yang seharusnya.

Terhadap kekurangan PPh tersebut, DJP telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Wajib Pajak KKKS Migas keberatan atas SKPKB tersebut dan mengajukan proses keberatan dan banding di Pengadilan Pajak. Beberapa persidangan telah dilaksanakan dan tinggal menunggu keputusan dari Pengadilan Pajak. Atas permasalahan tersebut Menteri Keuangan telah berkoordinasi dengan Menteri ESDM mengenai penerapan *Tax Treaty* oleh Wajib Pajak KKKS Migas dan mengusulkan agar segera dilakukan amandemen PSC oleh Kementerian ESDM dan SKK Migas.

www.peraturan.go.id

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Posisi Neraca secara umum

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Aset Lancar	262.980.618.272.981	252.741.464.557.987
Investasi Jangka Panjang	1.309.921.393.887.621	1.183.170.420.317.820
Aset Tetap	1.714.588.328.953.214	1.709.855.072.863.187
Piutang Jangka Panjang	2.825.834.229.735	2.898.499.639.540
Aset Lainnya	620.606.155.768.241	418.920.288.208.209
Jumlah Aset	**3.910.922.331.111.792**	**3.567.585.745.586.743**
Kewajiban Jangka Pendek	352.308.954.175.480	368.086.831.707.954
Kewajiban Jangka Panjang	2.546.074.643.810.634	2.284.012.948.107.981
Jumlah Kewajiban	**2.898.383.597.986.114**	**2.652.099.779.815.935**
Ekuitas Dana Lancar	(85.016.797.859.945)	(113.362.563.747.599)
Ekuitas Dana Investasi	1.097.555.530.985.623	1.028.848.529.518.407
Jumlah Ekuitas Dana Neto	**1.012.538.733.125.678**	**915.485.965.770.808**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**3.910.922.331.111.792**	**3.567.585.745.586.743**

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto selama lima tahun terakhir disajikan pada **Grafik 26**.

Perbandingan Neraca selama 5 tahun terakhir

Dalam triliun Rupiah

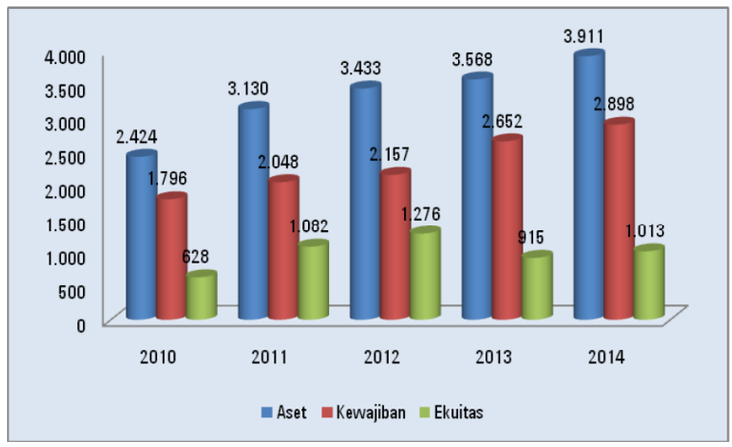

Grafik 26 Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto pada Neraca Tahun 2010 – 2014

Grafik di atas menunjukkan bahwa nilai Ekuitas Dana per 31 Desember 2013 mengalami penurunan sebesar 28,26 persen dari posisi 31 Desember 2012 dikarenakan Pemerintah

www.peraturan.go.id

menerapkan penyusutan aset tetap dan aset lainnya mulai tahun anggaran 2013. Sedangkan Ekuitas Dana per 31 Desember 2014 mengalami kenaikan sebesar 10,60 persen dari posisi 31 Desember 2013. Hal ini terutama disebabkan oleh antara lain (i) SiLPA Tahun Anggaran 2014, (ii) Kenaikan Aset Tetap/Aset Lainnya dari belanja modal, dan (iii) Kenaikan investasi jangka panjang.

C.2 PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. Rekening Kas BUN di Bank Indonesia

Rekening Kas BUN di BI Rp58,24 triliun

Saldo Rekening Kas BUN di Bank Indonesia (BI) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp58.238.862.209.607 dan Rp43.737.911.964.052 merupakan saldo Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) yang ada di BI, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Rekening	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Rekening BUN Nomor 502.000000980	2.168.613.501.096	2.154.699.513.919
Rekening KUN dalam Valuta USD Nomor 600.502411980	2.121.111.185	4.710.389.197
Rekening KUN dalam Valuta YEN Nomor 600.502111980	206.456.219.900	2.316.773.947.848
Rekening Kas Penempatan dalam Rupiah Nomor 518.000122980	2.676.596.567.697	9.639.143.719.777
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta USD Nomor 608.001411980	8.816.668.583.872	4.711.413.249.853
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta EURO Nomor 608.000991980	444.411.196.760	99.188.970.376
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta YEN Nomor 608.000111980	-	-
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam Rupiah Nomor 519.000124980	8.492.000.735	8.492.000.735
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam USD Nomor 609.022411980	-	-
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam EURO Nomor 609.000991980	-	-
Rekening SAL Nomor 500.000002980	41.818.274.229.874	21.674.873.255.508
Rekening Khusus	2.097.228.798.555	3.128.616.916.907
Rekening RDI/RPD	-	-
Rekening Penerimaan pada Bank Mandiri	-	-
Kas dalam Transito	-	-
Jumlah[*)]	**58.238.862.209.674**	**43.737.911.964.120**

[*)] *selisih antara data neraca dengan rincian rekening sebesar Rp67 dan Rp68 karena pembulatan*

Rekening Kas BUN di BI dalam valuta asing (valas) sesuai rincian berikut.

Jenis Rekening	Saldo Valas	Saldo Rupiah
Rekening KUN dalam Valuta USD Nomor 600.502411980	USD170,507.33	2.121.111.185

www.peraturan.go.id

Rekening KUN dalam Valuta YEN Nomor 600.502111980	JPY1,980,418,190.10	206.456.219.900
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta USD Nomor 608.001411980	USD708,735,416.71	8.816.668.583.872
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta EURO Nomor 608.000991980	EUR29,366,501.54	444.411.196.760

Rekening SAL sebesar Rp41.818.274.229.874 merupakan rekening Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk menampung dana SAL pada Bank Indonesia. Pengelolaan rekening ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.05/2010 Tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2013. Dana SAL yang disimpan dalam Rekening Kas SAL digunakan dalam rangka:

1. menutup kekurangan pembiayaan APBN; dan/atau
2. memenuhi kebutuhan sementara pengeluaran Negara pada saat tertentu dalam hal realisasi penerimaan Negara tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran tersebut (*mismatch*).

Dana SAL yang dipindahbukukan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran Negara pada kondisi *mismatch* sebagaimana dimaksud di atas dikembalikan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dalam Rupiah ke Rekening Kas SAL paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Seluruh saldo Rekening Kas BUN di BI merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL). Rincian Rekening Khusus dapat dilihat pada **Lampiran 8.**

C.2.2. Rekening Pemerintah Lainnya

RPL Rp4,65 triliun

Saldo Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp4.648.771.715.828 dan Rp9.999.484.261.911 merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang ada di BI dan Bank Umum dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Bank	**31 Desember 2014 (*audited*)**	**31 Desember 2013 (*audited*)**
1. Bank Indonesia	4.648.611.018.834	9.998.997.554.352
2. Bank Umum	160.696.994	486.707.559
Jumlah	**4.648.771.715.828**	**9.999.484.261.911**

Seluruh saldo RPL bukan merupakan bagian dari SAL.

1. Rekening Pemerintah Lainnya di BI, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Rekening	**31 Desember 2014 (*audited*)**	**31 Desember 2013 (*audited*)**
Rekening Panas Bumi (Nomor 508.000084980)	696.587.013.633	343.349.686.194
Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (Nomor 600.000411980)	3.832.193.507.447	9.513.579.917.997
Rekening Pemerintah Lain	119.830.497.754	142.067.950.161
Jumlah	**4.648.611.018.834**	**9.998.997.554.352**

www.peraturan.go.id

Rekening Panas Bumi sebesar Rp696.587.013.633 merupakan kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan panas bumi di Indonesia termasuk kewajiban Pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN dan pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi.

Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS sebesar Rp3.832.193.507.447 merupakan Kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada Pemerintah.

Transaksi (mutasi) arus masuk dan keluar kas dari Hasil Minyak Perjanjian KPS dan Rekening Panas Bumi disajikan pada **Catatan Penting Lainnya**.

Rekening Pemerintah Lain sebesar Rp119.830.497.754 terdiri dari rekening untuk menampung penerimaan pertambangan dan perikanan.

2. Rekening Pemerintah Lainnya pada Bank Umum sebesar Rp160.696.994 merupakan Kas pada BA 999.04 (Penerusan Pinjaman) yang tersimpan di berbagai Bank Umum berupa rekening kredit program yang digunakan untuk mengelola proyek Perusahaan Inti Rakyat (PIR)/Unit Pelaksana Proyek (UPP) Perkebunan.

   Rincian saldo RPL pada Bank Umum dapat dilihat pada **Lampiran 9.**

Rekening Kas di KPPN Rp2,84 triliun

C.2.3. Rekening Kas di KPPN

Saldo Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp2.843.557.011.256 dan Rp2.666.720.204.356 merupakan saldo Rekening Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia. Seluruh saldo Rekening Kas di KPPN merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Daftar Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada **Lampiran 10.**

C.2.4. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp316,87 miliar

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp316.874.974.276 dan Rp342.891.820.960 merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), namun sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 11.**

C.2.5. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Rp147,82 miliar

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp147.819.027.491 dan Rp225.839.936.566 mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, termasuk bunga dan jasa giro, maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 11.**

www.peraturan.go.id

C.2.6. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp6,19 triliun

Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp6.193.971.845.835 dan Rp7.363.221.503.338 merupakan kas yang berada di bendahara pengeluaran selain uang persediaan. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L. Kas Lainnya dan Setara Kas terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Bunga dan Jasa Giro, dan Pengembalian Belanja yang belum disetor ke kas negara	1.100.682.852.819	1.025.268.555.493
Pungutan pajak yang belum disetor oleh bendahara ke kas negara	28.201.708.134	-
Kas yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga	4.247.898.470.692	5.347.879.920.484
Dana Lancar Lainnya (hibah langsung K/L)	679.477.745.599	911.325.943.881
Selisih kurs Hibah Langsung yang telah disahkan pada Kementerian Kehutanan	10.719.992	-
Dana Lancar Lainnya (Jasa Siaran dan Non Siaran pada LPP RRI)	26.612.494.419	16.885.866.841
Dana Lancar Lainnya (Reklas Saldo Kas Besi pada Kementerian Luar Negeri)	111.087.854.180	61.861.216.639
Jumlah	**6.193.971.845.835**	**7.363.221.503.338**

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas menurut organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan BUN adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
1. K/L	5.717.733.671.662	6.944.460.747.533
2. BUN	476.238.174.173	418.760.755.805
Jumlah	**6.193.971.845.835**	**7.363.221.503.338**

Kas Lainnya dan Setara Kas pada K/L dengan nilai cukup signifikan, antara lain:

1. Kementerian Luar Negeri sebesar Rp126.273.723.177 sebagian besar merupakan kas lainnya reklasifikasi dari Kas Besi, saldo Rekening Palestina yang belum diserahkan, dan hak pegawai yang belum diserahkan.
2. Kementerian Keuangan sebesar Rp354.587.995.165 terdiri dari bunga dan jasa giro rekening Bendahara Pengeluaran yang belum menerapkan *Treasury Notional Pooling* (TNP) dan uang pihak ketiga yang belum dibayarkan kepada yang bersangkutan, baik saldo rekening di bank maupun saldo kas tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran.
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.966.622.707.061 sebagian besar merupakan saldo retur rekening bank penyalur Beasiswa Miskin (BSM), dana *blockgrant* yang belum disalurkan, hak pegawai/pihak ketiga, hibah, pajak/jasa giro/pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara.
4. Kementerian Kesehatan sebesar Rp377.506.513.375 sebagian besar merupakan hibah,

www.peraturan.go.id

titipan/hak pihak ketiga, dan pajak yang belum disetor ke kas negara.

5. Kementerian Sosial sebesar Rp142.649.719.443 sebagian besar merupakan hibah, hak pegawai/pihak ketiga, pajak/jasa giro/pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara.
6. POLRI sebesar Rp140.794.632.058 sebagian besar merupakan hibah, hak pegawai/pihak ketiga, hasil rampasan kejahatan psikotropika, uang muka pasien Rumah Sakit BLU, pajak/jasa giro/pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 11.**

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berada di BUN sebesar Rp476.238.174.173 terdiri dari:

1. Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.07 sebesar Rp291.632.067.969 merupakan kas yang terdapat pada rekening dana cadangan sebagai sisa atas dana cadangan subsidi yang tidak disalurkan kepada pihak ketiga, dan disetorkan ke Kas Negara pada TA berikutnya;
2. Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.08 sebesar Rp184.606.106.204 terdiri dari:
   a. Kas Lainnya dan Setara Kas pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar Rp143.631.685.040 terdiri dari pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp109.235.882.590, pembayaran kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan sebesar Rp17.934.322.933, pajak yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp9.211.274.747, jasa giro yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp6.913.694.314, dan pendapatan denda Wanprestasi yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp336.510.456.
   b. Kas Lainnya dan Setara Kas pada Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp40.920.090.800 merupakan dana bantuan kemasyarakatan dari Wakil Presiden yang belum disalurkan per 31 Desember 2014.
   c. Kas Lainnya dan Setara Kas pada Kementerian Pertanian sebesar Rp54.117.215, Kementerian Keuangan sebesar Rp207.987, dan pada BNP2TKI sebesar Rp5.162 merupakan jasa giro yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan.

C.2.7. Kas pada BLU

Kas pada BLU Rp23,34 triliun

Jumlah Kas pada BLU per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp23.336.819.639.008 dan Rp19.072.940.458.860 merupakan saldo kas yang ada di satuan kerja BLU pada beberapa K/L, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
1. BLU di Sekretariat Negara	736.666.983.706	671.254.901.128
2. BLU di Kementerian Keuangan	3.226.706.173.434	2.845.277.111.289
3. BLU di Kementerian Pertanian	21.833.755.458	9.795.621.801
4. BLU di Kementerian Perindustrian	49.498.888.438	46.944.070.443
5. BLU di Kementerian ESDM	73.997.469.621	36.775.862.947
6. BLU di Kementerian Perhubungan	247.960.743.934	193.152.487.378
7. BLU di Kementerian Dikbud	6.333.975.201.957	5.708.918.293.456

www.peraturan.go.id

8. BLU di Kementerian Kesehatan	2.286.298.734.083	1.318.153.443.734
9. BLU di Kementerian Agama	422.188.881.629	348.804.831.308
10. BLU di Kementerian Kehutanan	416.422.254.165	175.661.002.418
11. BLU di Kementerian Pekerjaan Umum	523.735.355.135	1.058.978.856.111
12. BLU di Kementerian Ristek	1.616.006.152	1.285.610.397
13. BLU di Kementerian Negara KUKM	481.747.365.884	408.380.605.182
14. BLU di Kementerian Kominfo	6.818.200.201.308	4.987.040.096.627
15. BLU di Kepolisian RI	216.278.089.612	52.137.058.434
16. BLU di BPPT	23.702.095.491	21.942.397.712
17. BLU di LAPAN	2.908.011.995	2.898.769.801
18. BLU di Kementerian Perumahan Rakyat	591.513.720.889	489.932.294.594
19. BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam (BPKPBPB Batam)	861.569.706.117	695.607.144.100
Jumlah	**23.336.819.639.008**	**19.072.940.458.860**

Berdasarkan data BUN, Kas pada BLU yang telah disahkan oleh KPPN adalah sebesar Rp27.650.268.834.909 (lihat ***Catatan D.1.3.2***). Selain Kas pada BLU sebesar Rp23.336.819.639.008 tersebut, terdapat kas yang telah didepositokan sebesar Rp4.382.620.665.030 dengan jangka waktu lebih dari tiga bulan (disajikan pada Investasi Jangka Pendek - lihat ***Catatan C.2.9).*** Dengan demikian, terdapat Kas pada BLU yang belum disahkan sebesar Rp69.171.469.129 (Rp23.336.819.639.008 + Rp4.382.620.665.030 - Rp27.650.268.834.909).

Uang Muka dari Rekening BUN Rp426,08 miliar

C.2.8. Uang Muka dari Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)

Jumlah Uang Muka dari Rekening BUN per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp426.084.589.111 dan Rp141.923.861.996 merupakan pembayaran pembiayaan pendahuluan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dari BUN yang belum ada penggantian dari *lender*.

Uang Muka dari Rekening BUN sebesar Rp426.084.589.111 adalah Uang Muka dari Rekening BUN yang *eligible*, yaitu uang muka yang masih dapat ditagihkan kepada *lender* yang terjadi sejak tahun 2009. Dibandingkan dengan saldo Uang Muka dari Rekening BUN tahun 2013, terdapat kenaikan sebesar Rp284.160.727.115 atau 200,22%. Rincian Uang Muka dari Rekening BUN menurut *lender* adalah sebagai berikut.

Lender	**31 Desember 2014 *(audited)***	**31 Desember 2013 *(audited)***
1. IBRD	253.583.882.633	(1.972.707.300)
2. ADB	9.897.618.340	30.646.456.028
3. OECF/JBIC	80.732.774.831	22.173.013.165
4. IFAD	13.445.295.730	91.077.100.103
5. Uni Eropa	651.760.305	-
6. IDB	8.557.090.900	-
7. Australia	59.216.166.372	-
Jumlah	**426.084.589.111**	**141.923.861.996**

www.peraturan.go.id

C.2.9. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek Rp4,38 triliun

Jumlah Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp4.382.620.665.030 dan Rp1.182.306.983.395 merupakan nilai investasi yang dilakukan dan diharapkan akan diperoleh kembali dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan. Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2014 merupakan deposito yang berada di BLU pada Kementerian Keuangan sebesar Rp2.208.866.250.000, BLU pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.881.063.415.030, BLU pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp201.805.000.000, BLU pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp60.000.000.000, dan BLU pada Kementerian Agama sebesar Rp30.886.000.000.

C.2.10. Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja

Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja Rp2,20 triliun

Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp2.196.690.366.554 dan Rp4.658.189.616.621 merupakan uang muka dan/atau pembayaran termin yang telah diterima oleh kontraktor atau pihak ketiga atas pekerjaannya dalam rangka penyediaan barang/jasa yang berada di beberapa K/L. Belanja Dibayar di Muka yang nilainya paling signifikan terdapat pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp774.449.507.895 merupakan pembayaran uang muka terhadap beberapa paket pekerjaan. Tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih atas Uang Muka Belanja. Rincian Uang Muka Belanja pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 12.**

C.2.11. Piutang Pajak

Piutang Pajak Rp91,77 triliun

Jumlah Piutang Pajak per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp91.774.168.360.216 dan Rp103.240.249.433.833. Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2014 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp44.520.591.164.294 berasal dari nilai bruto sebesar Rp91.774.168.360.216 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp47.253.577.195.922.

Rincian Piutang Pajak menurut organisasi adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	**31 Desember 2014 (*audited*)**	**31 Desember 2013 (*audited*)**
Direktorat Jenderal Pajak:		
Nilai Bruto	67.750.716.880.930	77.366.561.749.071
Penyisihan	(45.161.401.732.445)	(48.785.110.550.899)
Nilai Bersih	22.589.315.148.485	28.581.451.198.172
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:		
Nilai Bruto	24.023.451.479.286	25.873.687.684.762
Penyisihan	(2.092.175.463.477)	(1.695.166.517.256)
Nilai Bersih	21.931.276.015.809	24.178.521.167.506
Piutang Pajak (Bruto)	**91.774.168.360.216**	**103.240.249.433.833**
Total Penyisihan	(47.253.577.195.922)	(50.480.277.068.155)
Piutang Pajak (Bersih)	**44.520.591.164.294**	**52.759.972.365.678**

www.peraturan.go.id

Piutang Pajak pada Ditjen Pajak

1. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp67.750.716.880.930 dan Rp77.366.561.749.071 merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2014. Rincian Piutang Pajak (nilai bruto sebelum penyisihan) per jenis pajak dapat dilihat pada **Tabel 7.**

Tabel 7 Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Pajak

(dalam rupiah)

No.	Jenis Piutang Pajak	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
1.	Piutang PPh Pasal 21	1.262.751.459.769	1.196.082.304.338
2.	Piutang PPh Pasal 22	484.054.200.127	474.859.038.112
3.	Piutang PPh Pasal 23	1.853.477.515.538	2.073.653.402.146
4.	Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	1.801.582.088.599	1.464.443.087.320
5.	Piutang PPh Pasal 25 Badan	23.120.464.180.370	26.484.631.354.502
6.	Piutang PPh Pasal 26	2.694.578.193.984	2.654.047.893.334
7.	Piutang PPh Final dan Fiskal LN	1.240.386.830.335	847.587.668.063
8.	Piutang PPN Dalam Negeri	21.445.463.144.668	19.086.728.575.262
9.	Piutang PPnBM Dalam Negeri	654.153.825.309	385.509.016.104
10.	Piutang PBB Pedesaan	-	1.992.878.656.086
11.	Piutang PBB Perkotaan	-	3.894.949.763.751
12.	Piutang PBB Perkebunan	639.432.586.408	607.271.063.282
13.	Piutang PBB Kehutanan	497.966.425.046	442.641.257.932
14.	Piutang PBB Pertambangan	9.004.253.586.793	12.217.284.060.116
15.	Piutang Pajak Tidak Langsung Lain	4.148.450	4.148.450
16.	Piutang Bunga Penagihan PPh	3.052.148.695.534	3.543.990.460.273
	Jumlah	**67.750.716.880.930**	**77.366.561.749.071**

Berdasarkan umurnya, Piutang Pajak di DJP dapat dirinci sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Umur Piutang	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Kurang dari 1 Tahun	14.698.871.774.576	27.232.821.682.563
1 Tahun dan Kurang dari 3 Tahun	19.562.411.697.480	15.023.526.070.272
3 Tahun dan Kurang dari 5 Tahun	6.650.007.089.389	11.708.327.205.897
5 Tahun atau Lebih	26.839.426.319.489	23.401.886.790.342
Jumlah[*)]	**67.750.716.880.934**	**77.366.561.749.074**

[*)] *selisih antara data neraca dengan data piutang per umur sebesar Rp4 dan Rp3 karena pembulatan*

a. Dari nilai piutang pajak sebesar Rp67.750.716.880.930 terdapat piutang pajak kualitas macet sebesar Rp38.400.017.978.200 dengan nilai agunan sebesar Rp20.076.119.348. Nilai piutang pajak kualitas macet tersebut termasuk piutang yang telah daluwarsa penagihannya sebesar Rp8.560.247.491.102. Selama tahun 2014, telah diusulkan penghapusan sebesar Rp316.069.756.866. Selama tahun 2014, tidak terdapat nilai piutang yang mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dihapusbukukan.

   Nilai piutang pajak yang telah daluwarsa penagihannya per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp15.331.353.474.096. Nilai piutang pajak yang daluwarsa

www.peraturan.go.id

tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.771.105.982.994 menjadi Rp8.560.247.491.102 pada 31 Desember 2014. Penurunan nilai piutang pajak daluwarsa dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Ikhtisar Perubahan Daluwarsa Piutang Pajak	Nilai (Rp)
1. Saldo awal Piutang Daluwarsa Per 1 Januari 2014	15.331.353.474.096
2. Pengurangan (B2 + C2)	(7.918.748.544.434)
3. Penambahan (B3 + C3)	1.147.642.561.440
Saldo Piutang Daluwarsa Per 31 Desember 2014	**8.560.247.491.102**
B. Perubahan Daluwarsa Piutang PPh dan PPN	
1. Saldo awal Piutang Daluwarsa Per 1 Januari 2014	14.393.306.890.003
2. Dikurangi:	
a. Pembayaran lunas	(722.693.649.443)
b. Pemutakhiran Data yang Menangguhkan Daluwarsa	(6.322.043.094.342)
c. Pembayaran sebagian dan selisih kurs	(19.643.713.614)
	(7.064.380.457.399)
3. Ditambah:	
Piutang Daluwarsa tahun berjalan	633.395.420.222
Saldo Piutang Daluwarsa Per 31 Desember 2014	**7.962.321.852.826**
C. Perubahan Daluwarsa Piutang PBB	
1. Saldo awal Piutang Daluwarsa Per 1 Januari 2014	938.046.584.094
2. Dikurangi:	
Pengalihan PBB-P2 ke Pemda	(854.368.087.035)
3. Ditambah:	
Piutang PBB P3 Daluwarsa Tahun Berjalan	514.247.141.218
Saldo Piutang Daluwarsa Per 31 Desember 2014	**597.925.638.277**

Rincian Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 13.**

b. Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Nominal ketetapan pajak kurang bayar yang menjadi sengketa pajak tersebut diatas yang belum diterbitkan keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 adalah Rp78.202.327.775.498.

   Karena ketetapan pajak di atas masih menjadi sengketa, maka ketetapan pajak sebesar Rp78.202.327.775.498 belum diakui sebagai Piutang Pajak per 31 Desember 2014.

c. Berdasarkan data potensi pengenaan sanksi administrasi yang timbul akibat keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak di tahun 2014 Pemerintah telah menerbitkan STP atas sanksi tersebut, baik di tahun 2014 maupun tahun 2015. Pemerintah telah melakukan inventarisasi dan validasi data STP atas sanksi administrasi sesuai pasal 9 ayat (2a), ayat (2b) dan pasal 19 ayat (1) UU KUP yang terbit di tahun 2014.

   Sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 06 Tentang Akuntansi Piutang dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 08/PJ/2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak. Dijelaskan bahwa Piutang

www.peraturan.go.id

Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Mengingat bahwa piutang pajak merupakan piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan, maka pengakuannya harus memenuhi kriteria:

1) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan

Pada Tahun 2014 terdapat Sanksi Administrasi Berupa Bunga atas Keterlambatan Pembayaran Pajak sebesar Rp3.117.240.129.893. Berdasarkan penelitian, sebagian dari keterlambatan tersebut telah diterbitkan STP dalam Tahun Anggaran 2014 dan termasuk dalam perhitungan piutang dalam LKPP Tahun 2014. Sedangkan, atas keterlambatan yang STP-nya diterbitkan dalam Tahun Anggaran 2015, akan dicatat sebagai piutang dalam Tahun Anggaran 2015.

2. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp24.023.451.479.286 dan Rp25.873.687.684.762 merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Rincian Piutang Pajak (nilai awal sebelum penyisihan) per jenis pajak dapat dilihat pada **Tabel 8**.

Piutang Pajak pada Ditjen Bea dan Cukai

Berdasarkan umurnya, Piutang Pajak di DJBC dapat dirinci sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Umur Piutang	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Kurang dari 1 Tahun	21.997.753.426.023	24.105.767.731.264
1 Tahun s.d 2 Tahun	261.702.369.928	44.189.653.179
2 Tahun s.d 3 Tahun	39.025.104.808	422.647.218.182
Di atas 3 Tahun	1.724.970.578.526	1.301.083.082.135
Jumlah[*)]	**24.023.451.479.285**	**25.873.687.684.760**

[*)] *selisih antara data neraca dengan data piutang per umur sebesar Rp1 dan Rp2 karena pembulatan*

Tabel 8 Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Bea dan Cukai

(dalam rupiah)

No	Jenis Piutang Pajak	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
1	Piutang PPh Pasal 22	444.027.000	10.756.000
2	Piutang PPh Pasal 22 Impor	75.993.186.928	49.284.114.651
3	Piutang PPN Dalam Negeri	3.265.661.451.905	3.702.269.055.842
4	Piutang PPN Impor	344.100.213.319	211.812.715.177
5	Piutang PPN Lainnya	33.598.435.800	-
6	Piutang PPnBM Impor	31.889.729.138	28.514.228.911
7	Piutang Cukai Hasil Tembakau	16.385.985.073.670	19.816.801.760.259
8	Piutang Cukai Ethyl Alkohol	889.000.000	889.000.000
9	Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	3.389.321.600	3.108.825.600
10	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai	31.452.235.148	29.453.271.760
11	Piutang Pendapatan Cukai Lainnya	9.635.407.455	9.205.833.909
12	Piutang Bunga Penagihan PPN	4.344.686.351	736.577.629
13	Piutang Bea Masuk	1.294.966.356.434	865.348.447.579

www.peraturan.go.id

14	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	2.107.387.175.335	779.818.787.420
15	Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	236.023.272.446	181.537.096.668
16	Piutang Pajak/Pungutan Ekspor	181.540.429.071	185.431.335.397
17	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	15.606.721.543	9.089.814.480
18	Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar	544.756.143	376.063.480
Jumlah		**24.023.451.479.286**	**25.873.687.684.762**

C.2.12. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp141,32 triliun

Jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp141.315.978.840.022 dan Rp147.710.233.612.351. Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2014 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp40.606.517.863.465, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp141.315.978.840.022 dikurangi penyisihan sebesar Rp100.709.460.976.557). Piutang tersebut terdiri dari:

(dalam rupiah)

Jenis Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Piutang pada K/L:		
Nilai Bruto	45.344.001.937.762	32.128.373.428.125
Penyisihan	(15.771.897.646.574)	(25.363.191.717.989)
Nilai Bersih	29.572.104.291.188	6.765.181.710.136
Piutang pada BUN:		
Nilai Bruto	95.971.976.902.260	115.581.860.184.226
Penyisihan	(84.937.563.329.983)	(82.577.096.951.095)
Nilai Bersih	11.034.413.572.277	33.004.763.233.131
Piutang Bukan Pajak (Bruto)	**141.315.978.840.022**	**147.710.233.612.351**
Total Penyisihan	(100.709.460.976.557)	(107.940.288.669.084)
Piutang Bukan Pajak (Bersih)	**40.606.517.863.465**	**39.769.944.943.267**

Piutang Bukan Pajak di K/L Rp45,34 triliun

Beberapa Piutang PNBP pada K/L yang mempunyai nilai cukup signifikan, antara lain Piutang PNBP pada:

a. Kejaksaan Agung sebesar Rp14.634.625.373.508 merupakan piutang dari uang pengganti, denda tilang, dan sewa rumah dinas.

b. Kementerian ESDM sebesar Rp23.123.374.540.718 sebagian besar merupakan piutang yang berasal dari Iuran Royalty dan Iuran Tetap Kontrak Karya (KK)/Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Dari jumlah tersebut di atas, terdapat penyelesaian piutang negara bukan pajak dari Kontraktor PKP2B Generasi I untuk tahun buku 2001-2007 yang dilakukan dengan kompensasi/perjumpaan (*set-off*) hak dan kewajiban antara pemerintah pusat dan Kontraktor PKP2B Generasi I sebesar Rp9.070.518.077.167 (Rp1.649.151.709.341 dan USD596,572,859), di antara dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan *set-off* tersebut adalah:

1) Surat BPKP Nomor S-801/D1/01/2014 tanggal 18 Desember 2014 hal Penghitungan Kembali Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Kontraktor PKP2B Generasi I, yang berisikan penghitungan hak dan kewajiban sebagai berikut.
   - Perhitungan Dana Hasil Penjualan Batubara (DHPB) atas 6 Kontraktor PKP2B dari tahun 2001-2007;

www.peraturan.go.id

- Perjumpaan Hak dan Kewajiban dihitung dari selisih antara DHPB dengan Reimbursement PPN;
- Seluruh kontraktor dikenakan denda berupa bunga dan pajak penjualan.

2) Surat Ketua Panitia Urusan Piutang Negara cabang DKI Jakarta No. SPPNL-77/PUPNC.10.05/2014, No. SPPNL-78/PUPNC.10.05/2014, No.SPPNL-79/PUPNC.10.05/2014, No. SPPNL-80/PUPNC.10.05/2014, seluruhnya tanggal 31 Desember 2014 hal Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Lunas masing-masing kepada PT Berau Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal dan PT Adaro Indonesia serta Surat No. SKPPN-5174/PUPNC.10.05/2014 tanggal 30 Desember 2014 hal Pengembalian Pengurusan Piutang Negara.

c. Kementerian Kehutanan sebesar Rp2.524.851.229.057 berasal dari tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi, dan tunggakan ganti rugi tegakan.

d. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp2.975.196.772.066 berasal dari Biaya Hak Penyelenggaran Telekomunikasi dan Pengenaan Denda.

Rincian Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2014 dapat dilihat pada **Lampiran 14.**

Piutang Bukan Pajak di BUN Rp95,97 triliun

Piutang Bukan Pajak pada BUN per 31 Desember 2014 sebesar Rp95.971.976.902.260 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Piutang PNBP	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
1. Piutang Deviden dan Denda pada BA 999.03:		
Nilai Bruto	144.649.068.259	145.678.487.897
Penyisihan	(98.991.101.552)	(98.536.398.650)
Nilai Bersih	45.657.966.707	47.142.089.247
2. Piutang pada BA 999.05		
Nilai Bruto	4.726.020.273.817	7.723.988.955.720
Penyisihan	-	-
Nilai Bersih	4.726.020.273.817	7.723.988.955.720
3. Piutang pada BA 999.07:		
Nilai Bruto	1.292.143.202.492	1.144.616.528.092
Penyisihan	(6.460.716.012)	(5.723.082.640)
Nilai Bersih	1.285.682.486.480	1.138.893.445.452
4. Piutang pada BA 999.08:		
Nilai Bruto	136.519.526.122	99.210.000
Penyisihan	(682.597.631)	-
Nilai Bersih	135.836.928.491	99.210.000
5. Piutang PT PPA pada BA 999.99:		
Nilai Bruto I	51.798.368.304	49.852.367.635
Penyisihan	(258.991.841,52)	(249.261.838)
Nilai Bersih	51.539.376.462	49.603.105.797
6. Piutang Migas pada BA 999.99:		
Nilai Awal	2.120.697.877.932	17.631.803.189.816
Penyisihan	(183.930.058.123)	(2.928.196.170.826)
Nilai Bersih	1.936.767.819.809	14.703.607.018.990
7. Piutang Bukan Pajak pemanfaatan aset Eks Pertamina pada BA 999.99:		
Nilai Awal	1.102.706.212.304	3.068.262.937.868
Penyisihan	(5.513.531.062)	(15.341.314.690)
Nilai Bersih	1.097.192.681.242	3.052.921.623.178

www.peraturan.go.id

8. Piutang pada BA 999.99 – Denda atas Pelaksanaan *Treasury Notional Pooling*		
Nilai Bruto	16.257.158.850	63.325
Penyisihan	-	-
Nilai Bersih	16.257.158.850	63.325
9. Piutang pada BA 999.99 - Bank Dalam Likuidasi		
Nilai Bruto	10.472.940.716.099	10.610.995.939.584
Penyisihan	(10.334.109.038.294)	(10.472.680.079.679)
Nilai Bersih	138.831.677.805	138.315.859.905
10. Piutang pada BA 999.99 – Belanja Pensiun		
Nilai Bruto	224.966.310.133	145.290.066.492
Penyisihan	-	-
Nilai Bersih	224.966.310.133	145.290.066.492
11. Piutang pada BA 999.99 – Aset Kredit Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA		
Nilai Bruto	74.649.688.902.638	72.558.618.980.797
Penyisihan	(73.282.991.129.630)	(66.753.929.462.333)
Nilai Bersih	1.366.697.773.008	5.804.689.518.464
12. Piutang pada BA 999.99 – Aset Kredit yang diserahkelolakan kepada PT PPA		
Nilai Bruto	1.033.589.285.310	2.502.653.456.999
Penyisihan	(1.024.626.165.838)	(2.302.441.180.439)
Nilai Bersih	8.963.119.472	200.212.276.560
Piutang PNBP (Bruto)[*)]	**95.971.976.902.260**	**115.581.860.184.225**
Total Penyisihan	(84.937.563.329.983)	(82.577.096.951.095)
Piutang PNBP (Bersih)	**11.034.413.572.277**	**33.004.763.223.130**

[*)] *selisih antara data neraca dengan data piutang sebesar Rp1 karena pembulatan*

1. Piutang Dividen dan Denda (BA 999.03) sebesar Rp144.649.068.259 terdiri dari:

Uraian	**31 Desember 2014 (*audited*)**	**31 Desember 2013 (*audited*)**
Piutang Lancar	2.970.000.000	3.029.419.638
Piutang Diragukan	85.405.633.414	88.255.633.414
Piutang Macet	56.273.434.845	54.393.434.844
Piutang Dividen (Bruto)[*)]	**144.649.068.259**	**145.678.487.896**
Penyisihan	(98.991.101.552)	(98.536.398.650)
Piutang Dividen (Netto)	**45.657.966.707**	**47.142.089.246**

[*)] *selisih antara data neraca dengan data piutang sebesar Rp1 karena pembulatan*

Dalam piutang dividen tersebut di atas, belum termasuk dividen tahun 2011 dari PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. sebesar Rp956.493.260.000, yang pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan telah ditetapkan sebagai dividen dalam bentuk saham kepada para pemegang saham. Keputusan pemberian dividen dalam bentuk saham ini, mengakibatkan perubahan nilai modal saham yang dimiliki oleh Pemerintah pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Perubahan nilai modal disetor dari dividen saham tersebut, telah dituangkan dalam perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dividen saham yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. akan dicatat dan diakui sebagai penerimaan dividen, setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara kepada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. yang berasal dari penerimaan dividen tahun 2011 tersebut.

www.peraturan.go.id

2. Piutang pada BA 999.05 sebesar Rp4.726.020.273.817 merupakan piutang yang berasal dari kelebihan pembayaran (lebih salur) Dana Perimbangan. Lebih salur tersebut akan dikompensasikan dengan pembayaran Dana Perimbangan TA 2015.

3. Piutang pada Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) sebesar Rp1.292.143.202.492 merupakan piutang yang berasal dari kelebihan pembayaran atas subsidi Pangan berdasarkan hasil audit BPK tahun 2011 sebesar Rp435.113.206.842, tahun 2012 sebesar Rp707.662.577.405, piutang terkait Iuran Jasa Tirta II dan Subsidi Benih pada PT Sang Hyang Seri berdasarkan LHP BPK TA 2012 sebesar Rp1.840.743.845, kelebihan pembayaran atas Subsidi Benih berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2014 sebesar Rp16.612.271.289, dan Kelebihan pembayaran atas PSO PT KAI berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2014 sebesar Rp130.914.403.111.

4. Piutang pada Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA 999.08) sebesar Rp136.519.526.122 terdapat pada Perum Bulog sebesar Rp131.537.825.200, Kementerian Pertanian sebesar Rp4.811.607.957, dan pada satker Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp170.092.965 yang merupakan hak atau pengakuan Pemerintah terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

5. Piutang PT PPA sebesar Rp51.798.368.304 merupakan kewajiban PT PPA atas Hasil Pengelolaan Aset (HPA) yang masih harus disetorkan kepada Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam juta rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Saldo Awal (1)	**49.852.367.635**	**2.816.000.000**
Koreksi Saldo Awal (2)	-	(6.279.056)
Penerimaan:		
Hasil Pengelolaan Aset (HPA):	-	
Divestasi saham yang dikelola	-	-
Dividen atas saham yang dikelola	-	-
Pokok dan bunga atas tagihan yang dikelola	-	-
Pokok dan Bunga Bunga atas obligasi yang dikelola	117.665.000.000	-
Redemption Obligasi		
Penjualan dari right saham	-	-
HPA aset lainnya	-	-
Hasil Pengelolaan Saham		
Hasil Pengelolaan Saham Bank	-	31.814.189.995
Hasil Pengelolaan Saham Non Bank	-	54.801.093.725
Hasil Pengelolaan Saham dan Kredit	-	115.607.323.342
Jumlah HPA		**202.222.607.062**
Dana Cadangan Biaya Pengelolaan	-	-
Bunga dari dana HPA yg masih harus disetor	-	-
Realisasi Hasil Pengelolaan Dana-HPA	3.261.102.715	2.872.657.484
Jumlah Penerimaan (3)	**120.926.102.715**	**205.095.264.546**
Pengurangan:		
Biaya pengelolaan yang dapat diperoleh kembali tahun berjalan dan telah dibayar tunai	-	-
Imbalan Pengelolaan Aset	15.287.769.386	48.244.596.727
PPN atas Imbalan Pengelolaan Aset	1.528.776.939	4.824.459.673
PPN atas Penggantian Biaya Pengelolaan	10.012.455	12.066.621

www.peraturan.go.id

Biaya aset periode sebelumnya	100.124.546	120.666.213
Imbalan Kinerja	-	2.417.354.711
PPN Imbalan Kinerja	-	241.735.471
Tunggakan biaya/biaya aset dengan penugasan khusus	-	-
Jumlah Pengurangan (4)	**16.926.683.326**	**55.860.879.416**
HPA yang harus disetor ke Pemerintah ((5)=(1)+(2)+(3)–(4))	153.851.787.024	152.044.106.074
HPA yang telah disetor ke Pemerintah (6)	102.053.418.721	102.191.738.439
Jumlah HPA yang masih harus disetor (7) = (5) – (6)*	**51.798.368.303**	**49.852.367.635**

*) *selisih antara data neraca dengan data piutang sebesar Rp1 karena pembulatan*

Nilai Piutang PT PPA sebesar Rp51.798.368.304 merupakan piutang lancar yang akan dibayar oleh PT PPA setelah Laporan Keuangan PT PPA selesai diaudit.

6. Piutang Migas pada BA 999.99 sebesar Rp2.120.697.877.932 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Piutang pada PT Pertamina	465.665.404.257	6.520.338.365.418
Piutang Migas Lainnya	1.655.032.473.675	11.111.464.824.398
Piutang Migas (Bruto)	**2.120.697.877.932**	**17.631.803.189.816**
Penyisihan	(183.930.058.123)	(2.928.196.170.826)
Piutang Migas (Netto)	**1.936.767.819.809**	**14.703.607.018.990**

Rincian Piutang PT Pertamina sebesar Rp465.665.404.257 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)		31 Desember 2013 (*audited*)	
	USD	Rp	USD	Rp
1. Nilai Lawan	-	-	-	5.125.028.192.803
2. Ekspor Minyak Mentah	-	-	106,896,795	-
3. Natural Gas	37,432,910.31	-	3,441,661	-
4. LPG	-	-	3,712,708	-
5. Overlifting	-	-	421,736	-
a. Minyak Bumi	-	-	79,208	-
b. Gas Alam	-	-	342,528	-
Jumlah	37,432,910.31	-	**114,472,900**	**5.125.028.192.803**
Total (setelah konversi ke rupiah)	**465.665.404.257**		**6.520.338.365.418**	

Rincian Piutang Non PT Pertamina sebesar USD133,041,195.633 ekuivalen dengan Rp1.655.032.473.675 terdiri dari:

(dalam USD)

No	Piutang	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
1	**Penjualan Minyak Bumi**	**1,797,299.930**	**25,751,934.547**
2	**Penjualan Gas Alam**	**69,320,651.413**	**290,925,698.808**
	a. Melalui *Trustee*	**60,214,399.347**	**268,833,499.988**
	1) Ekspor LNG	7.020	(22,018.080)
	2) Ekspor Gas Alam	48,669,448.835	219,217,890.978

www.peraturan.go.id

	3) Domestik Gas Alam	11,544,943.462	11,952,858.770
	4) Domestik LPG	0.030	37,684,768.320
	5) Domestik LNG	-	-
	b. Melalui *NonTrustee* (Kewajiban KKKS)	**9,106,252.066**	**22,092,198.820**
	1) Ekspor LPG	248.670	248.670
	2) Domestik Gas Alam	9,105,991.956	22,016,156.210
	3) Domestik CBM	11.440	75,793.940
3	***Overlifting* KKKS**	**59,764,381.290**	**588,995,238.470**
	a. Minyak Bumi	24,256,693.083	247,190,937.870
	b. Gas Alam	35,507,688.207	341,804,300.600
4	**Lainnya**	**2,158,863.000**	**5,924,865.840**
	a. Bonus Produksi	50.000	50.000
	b. Transfer Material	35.000	35.000
	c. Denda/ Pinalty	2,158,778.000	2,158,777.590
	d. Pembayaran kelebihan DMO *Fee*	-	3,766,003.250
	Total Piutang	**133,041,195.633**	**911,597,737.65**

7. Piutang Bukan Pajak pemanfaatan aset eks Pertamina pada BA 999.99 sebesar Rp1.102.706.212.304 merupakan piutang sewa aset oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP yang terdiri dari:

(dalam Rp)

Piutang Pemanfaatan Aset Eks Pertamina c.q. PT Pertamina EP	Nilai
Jumlah Piutang Sewa BMN Periode 17 September 2003 s.d. 30 Juni 2014	3.182.271.417.855
Pengurangan : Pembayaran tagihan sewa pada tanggal 31 Desember 2014	(2.227.577.829.637)
Penambahan : Piutang Sewa BMN Periode 1 Juli 2014 s.d. 31 Desember 2014	148.012.624.086
Jumlah	**1.102.706.212.304**

Total saldo nilai piutang sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP sejak tahun 2003 per 30 Juni 2014 adalah sebesar USD265.876.131, ekuivalen dengan nilai Rp3.182.271.417.855 (Kurs USD1 = Rp11.969), sebagaimana hasil konfirmasi PT Pertamina (Persero) dengan surat *Vice President Financial Accounting & Reporting* PT Pertamina (Persero) No. 177/H10200/2014-S4 tanggal 16 Juli 2014. Dari total nilai Piutang dimaksud, pada tanggal 31 Desember 2014 PT Pertamina (Persero) telah melakukan pembayaran uang sewa BMN dimaksud sebesar Rp2.227.577.829.637.

Guna pemuktahiran saldo Piutang Sewa BMN per 31 Desember 2014, dengan berdasarkan pada Kesepakatan Beban Sewa BMN antara PT Pertamina (Persero) dan DJKN tanggal 28 Januari 2009, bahwa pemanfaatan sewa BMN senilai Rp9.472.807.941.523 dilakukan dengan perhitungan tarif sewa dialokasikan secara prorata untuk jangka waktu 32 tahun, maka alokasi tarif sewa untuk jangka waktu sewa selama 6 bulan, yaitu dari tanggal 1 Juli 2014 s.d. 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp148.012.624.086.

8. Piutang pada BA 999.99 berupa Denda atas Pelaksanaan *Treasury Notional Pooling* sebesar Rp16.257.158.850 terdiri dari:

www.peraturan.go.id

(dalam Rp)

Uraian	Nilai
Kekurangan pembayaran jasa giro oleh Bank Banten pada bulan Oktober 2014	271.488
Pendapatan jasa giro bulan Desember 2014 yang akan dibayarkan pada hari kerja keempat bulan Januari 2015	16.253.307.498
Kekurangan pembayaran jasa giro oleh Bank Bengkulu pada bulan Oktober 2014	1.827.464
Kekurangan pembayaran jasa giro Bank Bengkulu bulan Oktober 2014	97.268
Kekurangan pembayaran jasa giro oleh Bank Bengkulu pada bulan November 2014	1.611.618
Kekurangan pembayaran jasa giro Bank Bengkulu bulan Oktober 2014	43.514
Nilai Bersih	16.257.158.850

9. Piutang pada BA 999.99 berupa Piutang pada 20 Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebesar Rp10.472.940.716.099 terdiri dari:

(dalam Rp)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
15 BDL eks Dana Talangan Pemerintah	7.913.268.915.311	7.964.168.186.187
5 BDL eks Dana Penjaminan Pemerintah	2.559.671.800.788	2.646.827.753.397
Nilai Bruto	**10.472.940.716.099**	**10.610.995.939.584**
Penyisihan	(10.334.109.038.294)	(10.472.680.079.679
Nilai Bersih	**138.831.677.805**	**138.315.859.905**

a. Piutang pada 15 BDL eks Dana Talangan Pemerintah berasal dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Dana BLBI BDL yang di-*cessie*-kan	11.888.938.781.558	11.888.938.781.558
Dikurangi:		
- Pengembalian s.d. Desember 2006	(2.730.645.774.151)	(2.730.645.774.151)
- Pengembalian tahun 2007	(228.053.353.977)	(228.053.353.977)
- Pengembalian tahun 2008	(323.144.463.070)	(323.144.463.070)
- Pengembalian tahun 2009	(140.764.168.751)	(140.764.168.751)
- Pengembalian tahun 2010	(84.175.667.811)	(84.175.667.811)
- Pengembalian tahun 2011	(83.718.041.051)	(83.718.041.051)
- Pengembalian tahun 2012	(252.873.341.830)	(252.873.341.830)
- Pengembalian tahun 2013	(81.395.784.730)	(81.395.784.730)
- Pengembalian tahun 2014	(50.899.270.876)	-
Jumlah	**7.913.268.915.311**	**7.964.168.186.187**

Dari 15 BDL, 13 BDL telah melaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset dari Tim Likuidasi kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan, satu BDL yaitu Bank Umum Majapahit Jaya telah melaksanakan RUPS pembubaran Tim Likuidasi, dan satu BDL belum melakukan penandatanganan BAST Aset, yaitu PT Bank Jakarta. Namun PT Bank Jakarta pada tahun 2012 telah melunasi kewajibannya. Rincian Piutang 15 BDL lebih lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 15.**

b. Piutang pada lima BDL eks Dana Penjaminan merupakan saldo penjaminan pemerintah terhadap lima BDL yang diberikan melalui UP3 (Unit Pelaksana Penjaminan

www.peraturan.go.id

Pemerintah) dengan bank pembayar PT BNI (Persero), dengan perhitungan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Total dana BLBI BDL yang di-*cessie*-kan	3.321.282.950.812	3.321.282.950.812
Dikurangi:		
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2006	(9.000.000.000)	(9.000.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2007	(28.500.000.000)	(28.500.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2008	(15.000.000.000)	(15.000.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2009	(366.663.664.470)	(366.663.664.470)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2010	(146.889.652.865)	(146.889.652.865)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2011	(100.000.000.000)	(100.000.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2012	(8.401.880.081)	(8.401.880.081)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2013	-	-
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2014	(87.155.952.609)	
Jumlah[*)]	**2.559.671.800.787**	**2.646.827.753.396**

[*)] *selisih antara data neraca dengan data piutang sebesar Rp1 karena pembulatan*

Dari lima BDL, satu BDL yaitu Bank Prasidha telah melaksanakan penandatanganan BAST Aset dari Tim Likuidasi kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan, empat BDL yaitu PT Bank Asiatic, PT Bank Dagang Bali, PT Bank Global Internasional dan PT Bank Ratu belum melakukan penandatanganan BAST Aset.

Pada tahun 2014 penyisihan atas piutang BDL dilakukan berdasarkan PMK No. 69/PMK.06/2014, sedangkan pada tahun 2013 penyisihan berdasarkan PMK No. 201/PMK.06/2010.

10. Piutang pada BA 999.99 berupa Piutang Belanja Pensiun sebesar Rp224.966.310.133 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)
1. Piutang atas Saldo Uang Pensiun (SUP) PT Asabri (Persero) Bulan Desember 2014	10.061.990.600
2. Piutang atas kelebihan pencairan kepada PT Jasindo untuk Jamkesmen dan Jamkestama Bulan Oktober s.d Desember 2014	552.730.000
3. Piutang atas kelebihan pencairan kepada BPJS dari bulan Januari s.d Desember 2014	180.161.767.631
4. Piutang atas kelebihan pencairan bulan November 2014 kepada PT Taspen (Persero)	9.220.446.461
5. Piutang atas Kelebihan Pencairan bulan Desember 2014	334.532.846
6. Saldo Uang Pensiun (SUP) PT Taspen (Persero) bulan Desember 2014	24.634.842.595
Jumlah	**224.966.310.133**

11. Piutang pada BA 999.99 sebesar Rp74.649.688.902.638, terdiri dari Piutang Aset Kredit eks BPPN sebesar Rp66.648.121.943.677 dan eks Kelolaan PT PPA sebesar Rp8.001.566.958.961. Piutang Aset Kredit eks BPPN dan eks Kelolaan PT PPA yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp1.366.697.773.008, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp74.649.688.902.638 dikurangi penyisihan sebesar Rp73.282.991.129.630. Piutang tersebut terdiri dari:

www.peraturan.go.id

(dalam rupiah)

Piutang Aset Kredit Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Aset kredit eks BPPN	66.648.121.943.677	66.009.120.450.552
Eks Kelolaan PT PPA	8.001.566.958.961	6.549.498.530.245
Piutang (Bruto)	**74.649.688.902.638**	**72.558.618.980.797**
Penyisihan	(73.282.991.129.630)	(66.753.929.462.333)
Piutang (Bersih)	**1.366.697.773.008**	**5.804.689.518.464**

Aset kredit eks BPPN sebesar Rp66.648.121.943.677 merupakan aset Pemerintah hasil penyitaan oleh pemerintah karena para debitor tidak mampu melunasi hutangnya kepada Pemerintah atas fasilitas likuiditas yang dikucurkan Pemerintah pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 1997-1998. Aset-aset tersebut pada awalnya dikelola oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemberian dana talangan kepada perbankan yang CAR (*Capital Adequate Ratio*) di bawah batas minimal yang ditetapkan BI. Setelah BPPN dibubarkan kemudian sebagian pengelolaannya beralih pada Tim Pemberesan BPPN yang diketuai langsung oleh Menteri Keuangan. Aset-aset yang dikelola oleh Tim Pemberesan BPPN adalah aset-aset yang masih berperkara.

Aset kredit eks BPPN per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp66.648.121.943.677 dan Rp66.009.120.450.552. Perubahan jumlah ini disebabkan oleh adanya pembayaran dan/atau pelunasan oleh debitur, koreksi jumlah utang, pengembalian pengurusan piutang negara oleh PUPN kepada Penyerah Piutang (dhi. Kantor Pusat DJKN), pengkategorian piutang menjadi PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) serta penyesuaian kenaikan dan/atau penurunan kurs mata uang asing. Rincian Aset kredit eks BPPN terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Aset Kredit Yang Telah Diserahkan Pengurusan Piutang Negaranya Kepada PUPN (telah tahap PB/PJPN)	13.879.953.816.627	12.931.188.400.441
Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)	23.762.400.137.355	23.846.733.283.505
Aset Kredit ATK Yang Masih dikelola DJKN c.q. Dit PKNSI	29.005.767.989.695	29.057.038.925.936
Aset Kredit di PUPN (belum PB/PJPN) namun termasuk debitur ATK	-	174.159.840.670
Jumlah[*1*]	**66.648.121.943.677**	**66.009.120.450.552**

Tagihan PKPS yang telah memenuhi syarat pengakuan sebagai Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2014 adalah sebanyak 16 *obligor* dengan nilai sebesar Rp23.762.400.137.355, sedangkan tagihan PKPS per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp23.846.733.283.505.

Aset kredit eks kelolaan PT PPA sebesar Rp8.001.566.958.961 merupakan hak tagih atau piutang eks BPPN yang semula diserahkan pengelolaannya kepada PT PPA kemudian dikembalikan ke Menteri Keuangan sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 27 Februari 2009. Pengelolaan atas aset eks kelolaan PT PPA ini oleh Kementerian Keuangan dilakukan melalui mekanisme penyerahan kepada PUPN, namun sebagian aset kredit ini masih dalam pengelolaan Kantor Pusat DJKN yaitu sebesar Rp4.196.644.145.017. Jumlah aset kredit eks kelolaan PT PPA yang diurus oleh PUPN

www.peraturan.go.id

per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp3.804.922.813.944.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.05/2012 tentang SATK, aset kredit ATK diakui sebagai piutang lain-lain sebesar nilai yang tercatat dalam SAPB, sedangkan aset kredit Non ATK dan PKPS diakui sebagai piutang lain-lain setelah ditandatanganinya Pernyataan Bersama (PB)/diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Untuk aset kredit Non ATK dan PKPS yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset kredit Non ATK yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN per 31 Desember 2014 disajikan dalam tabel berikut.

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Aset Kredit Non ATK di PUPN yang belum PB/PJPN	18.894.923.572	35.091.264.847
Aset Kredit Non ATK yang dikelola kantor Pusat	26.201.505.214.295	25.853.538.030.353
PKPS yang belum PB/PJPN	7.742.948.669.872	5.795.674.781.296
Jumlah	**33.963.348.807.739**	**31.684.304.076.496**

(dalam rupiah)

Nilai penyisihan piutang tak tertagih Aset Kredit Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA per 31 Desember 2014 sebesar Rp73.282.991.129.630, sedangkan per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp66.753.929.462.333. Kenaikan nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp6.529.061.667.297 dikarenakan kenaikan nilai piutang sebesar Rp2.091.069.921.841 dan adanya perubahan metode perhitungan besaran penyisihan piutang serta pengurangan nilai pengembalian (*recovery*) pada tahun anggaran 2014. Penyisihan atas piutang Aset Kredit Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 151/KMK.6/2014.

Rincian Piutang Aset Kredit Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA dapat dilihat pada **Lampiran 16.**

12. Piutang Lain-lain pada BA 999.99 berupa Piutang Aset Kredit yang diserahkelolakan kepada PT PPA sebesar Rp1.033.589.285.310 merupakan aset kredit yang sebelumnya berasal dari BPPN yang tidak terkait dengan perkara, yang dikelola oleh PT PPA berdasarkan perjanjian serah-kelola aset antara Menteri Keuangan dan PT PPA tanggal 29 Mei 2013. Nilai Piutang Aset Kredit yang diserahkelolakan kepada PT PPA per 31 Desember 2014 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp8.963.119.472, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp1.033.589.285.310 dikurangi penyisihan sebesar Rp1.024.626.165.838.

Penyisihan atas piutang Aset Kredit yang diserahkelolakan kepada PT PPA dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 151/KMK.6/2014.

Rincian Piutang Aset Kredit yang diserahkelolakan kepada PT PPA adalah sebagai berikut.

Debitur	31 Desember 2014 (*audited*)		31 Desember 2013 (*audited*)	
	Nilai Aset (dalam Rp)	Nilai Aset (dalam USD)	Nilai Aset (dalam Rp)	Nilai Aset (dalam USD)
PT Jaya Perkasa Engineering	-	-	151.367.074.750	38,822,432

www.peraturan.go.id

PT Polysindo Eka Perkasa	-	-	459.555.536	960,092
PT Texmaco Jaya	-	-	365.572.613	2,435
PT Wastra Indah	-	-	10.493.948	-
PT Bina Prima Perdana	-	-	470.399.713.486	25,540,008
PT Tuban Petrochemical Industries	1.033.589.285.310	-	1.083.805.023.903	-
Total	**1.033.589.285.310**	-	**1.706.407.434.236**	**65,324,967**
Total (setelah konversi ke Rp)	**1.033.589.285.310**		**2.502.653.456.999**	

C.2.13. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar TPA Rp2,58 miliar

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp2.575.581.126 dan Rp1.977.442.150 merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2014 berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan sebesar Rp0 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.575.581.126 dikurangi penyisihan sebesar Rp2.575.581.126. Saldo Bagian Lancar TPA tersebut berada di Kementerian KUKM.

C.2.14. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tagihan TGR Rp182,57 miliar

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp182.565.935.471 dan Rp142.483.141.891 merupakan saldo Tagihan TGR pada K/L dan BUN yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2014 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp35.210.834.527 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp182.565.935.471 dikurangi penyisihan sebesar Rp147.355.100.944.

Rincian Bagian Lancar TGR pada masing-masing K/L dan BUN dapat dilihat pada **Lampiran 17.**

C.2.15. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman

Bagian Lancar Penerusan Pinjaman Rp5,22 triliun

Bagian Lancar Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp5.219.058.275.189 dan Rp6.011.228.743.194. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman terdiri dari:

1. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman sebesar Rp4.438.757.974.457 merupakan potensi kewajiban pokok Penerusan Pinjaman yang jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2014. Nilai Bagian Lancar Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2014 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp4.416.564.184.570 berasal dari nilai bruto Rp4.438.757.974.457 dikurangi penyisihan sebesar Rp22.193.789.887, dengan rincian:

(dalam rupiah)

Uraian	**31 Desember 2014 (*audited*)**	**31 Desember 2013 (*audited*)**
BUMN	4.013.382.656.676	4.641.607.703.528
BUMD	291.632.372.605	355.277.027.869
Pemda	45.899.629.507	64.431.439.913
Lainnya	80.617.569.475	85.394.628.593
RIDL	-	5.822.786.428
Kredit Program	7.225.746.194	-
Nilai Bruto[*)]	**4.438.757.974.457**	**5.152.533.586.331**

www.peraturan.go.id

Penyisihan	(22.193.789.887)	(25.762.667.932)
Nilai Bersih	**4.416.564.184.570**	**5.126.770.918.399**

2. Piutang Lainnya Penerusan Pinjaman sebesar Rp780.300.300.732 merupakan piutang yang terkait dengan Penerusan Pinjaman, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Potensi Tunggakan dapat ditagih	209.578.174.085	212.899.226.855
Piutang Bunga	311.375.489.335	364.520.361.826
Piutang Denda	259.346.637.312	281.275.568.180
Nilai Bruto	**780.300.300.732**	**858.695.156.861**
Penyisihan	(23.811.428.042)	(24.335.196.342)
Nilai Bersih	**756.488.872.690**	**834.359.960.519**

a. Potensi Tunggakan dapat ditagih sebesar Rp209.578.174.085 merupakan bagian hak tagih Pemerintah yang telah jatuh tempo dan menunggak serta memiliki potensi untuk dapat ditagih sampai dengan 31 Desember 2014. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 12/PB/2011 mengenai Kualitas dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Penerusan Pinjaman, piutang disajikan berdasarkan umur piutang. Piutang yang tertunggak dengan kolektibilitas di bawah 12 bulan per tanggal neraca dikategorikan sebagai potensi tunggakan yang dapat ditagih. Sedangkan piutang yang tertunggak dengan kolektibilitas di atas 12 bulan per tanggal neraca diklasifikasikan pada aset lainnya RDI. Jumlah potensi tunggakan yang dapat ditagih terdiri dari piutang pada:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
BUMN	47.588.062.086	80.040.951.737
BUMD	79.829.192.354	100.778.887.954
Pemda	5.962.603.803	17.803.369.699
Lainnya	76.081.037.534	14.244.850.111
Kredit Program	117.278.307	31.167.354
Nilai Bruto[*)]	**209.578.174.084**	**212.899.226.855**
Penyisihan	(20.957.817.409)	(21.106.216.692)
Nilai Bersih	**188.620.365.675**	**191.793.010.163**

*) *selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp1 karena pembulatan*

b. Piutang Bunga sebesar Rp311.375.489.335 berdasarkan debitur, yaitu:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
BUMN	283.778.558.688	330.409.908.109
BUMD	6.286.458.859	9.980.950.041
Pemda	5.304.597.960	7.194.194.947
Lainnya (*Channeling* dan KUMK SUP 005)	4.196.288.268	5.187.618.044
Kredit Program	11.617.920.377	11.747.690.685
Nilai Bruto[*)]	**311.375.489.336**	**364.520.361.826**
Penyisihan	(1.556.877.447)	(1.822.601.809)
Nilai Bersih	**309.818.611.889**	**362.697.760.017**

*) *selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp1 karena pembulatan*

www.peraturan.go.id

c. Piutang Denda yang telah diterbitkan Surat Tagihannya sebesar Rp259.346.637.312 berdasarkan debitur, yaitu:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
BUMN	872.068.251	100.725.130.121
BUMD	209.301.567.385	155.846.385.098
Pemda	5.388.297.751	4.265.306.002
Lainnya	42.943.958.494	18.063.050.239
Kredit Program	840.745.430	2.375.696.720
Nilai Bruto[*)]	**259.346.637.311**	**281.275.568.180**
Penyisihan	(1.296.733.187)	(1.406.377.841)
Nilai Bersih	**258.049.904.124**	**279.869.190.339**

[*)] *selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp1 karena pembulatan*

C.2.16. Piutang dari Kegiatan BLU

Piutang dari Kegiatan BLU Rp3,55 triliun

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp3.553.717.607.485 dan Rp2.728.415.892.912. Saldo Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2014 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp2.312.819.636.751 berasal dari nilai bruto sebesar Rp3.553.352.129.485 dikurangi penyisihan sebesar Rp1.240.897.970.734. Piutang dari Kegiatan BLU terdiri dari Piutang Kegiatan Operasional BLU sebesar Rp3.406.216.977.970, dan Non Operasional BLU sebesar Rp147.500.629.515. Piutang Kegiatan Operasional BLU terdiri dari:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
1. BLU di Sekretariat Negara	684.635.112.881	706.442.769.071
2. BLU di Kementerian Keuangan	57.696.475.772	34.772.216.529
3. BLU di Kementerian Perindustrian	1.437.920.250	1.772.813.835
4. BLU di Kementerian ESDM	24.219.995.710	14.351.023.198
5. BLU di Kementerian Perhubungan	1.454.917.500	2.656.899.000
6. BLU di Kementerian Dikbud	482.380.634.770	337.746.267.412
7. BLU di Kementerian Kesehatan	1.311.677.078.974	879.978.571.229
8. BLU di Kementerian Agama	19.789.499.395	3.190.560.922
9. BLU di Kementerian PU	315.455.351.611	167.946.636.403
10. BLU di Kementerian KUKM	1.520.810.158	626.923.778
11. BLU di Kepolisian RI	56.747.494.401	17.228.423.203
12. BLU di BPPT	4.877.261.750	4.855.687.848
13. BLU di LAPAN	267.184.074	149.500.000
14. BLU di Kemen Perumahan Rakyat	749.640.167	1.290.844.601
15. BLU di BPKPBPB Batam	443.307.600.557	469.044.381.729
Jumlah Nilai Bruto	**3.406.216.977.970**	**2.642.053.518.758**
Penyisihan	(1.226.377.005.747)	(1.132.232.682.038)
Jumlah Nilai Bersih	**2.179.839.972.223**	**1.509.820.836.720**

Piutang Kegiatan Non Operasional BLU terdiri dari:

www.peraturan.go.id

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
1. BLU di Sekretariat Negara	769.345.153	836.328.608
2. BLU di Kementerian Keuangan	57.573.860.609	37.689.339.104
3. BLU di Kementerian Perhubungan	6.334.000	-
4. BLU di Kementerian Dikbud	78.356.846.904	40.635.614.293
5. BLU di Kementerian Kesehatan	4.149.970.427	5.172.117.979
6. BLU di Kementerian Agama	6.619.778.199	2.026.219.768
7. BLU di Kepolisian RI	21.466.914	-
8. BLU di LAPAN	3.027.309	2.754.402
Jumlah Nilai Bruto	**147.500.629.515**	**86.362.374.154**
Penyisihan	(14.520.964.987)	(11.681.685.555)
Jumlah Nilai Bersih	**132.979.664.528**	**74.680.688.599**

C.2.17. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Rp149,40 triliun

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp149.399.872.043.211 dan Rp159.689.806.285.608 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
1. Piutang Pajak	47.253.577.195.922	50.480.277.068.155
2. Piutang Bukan Pajak	100.709.460.976.556	107.940.288.669.084
3. Bagian Lancar TPA	2.575.581.126	1.977.442.150
4. Bagian Lancar TP/TGR	147.355.100.944	73.250.874.352
5. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	46.005.217.929	50.097.864.274
6. Piutang dari Kegiatan BLU	1.240.897.970.734	1.143.914.367.593
Penyisihan Piutang	**149.399.872.043.211**	**159.689.806.285.608**

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Aset Lancar.

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Pajak sebesar Rp47.253.577.195.922 merupakan penyisihan Piutang Pajak pada Kementerian Keuangan.
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Bukan Pajak sebesar Rp100.709.460.976.556 dapat dilihat pada **Lampiran 16.**
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TPA sebesar Rp2.575.581.126 merupakan penyisihan TPA pada Kementerian Koperasi dan UKM.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TP/TGR sebesar Rp147.355.100.944 dapat dilihat pada **Lampiran 17.**
5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Penerusan Pinjaman sebesar Rp46.005.217.929 merupakan penyisihan Bagian Lancar Penerusan Pinjaman pada BA 999.04.
6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU sebesar Rp1.240.897.970.734 terdiri dari:

www.peraturan.go.id

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
1. BLU di Sekretariat Negara	576.380.199.335	556.600.515.132
2. BLU di Kementerian Keuangan	1.041.350.120	934.080.191
3. BLU di Kementerian Perindustrian	312.621.943	324.893.249
4. BLU di Kementerian ESDM	9.246.465.773	6.146.638.918
5. BLU di Kementerian Perhubungan	47.168.445	53.146.683
6. BLU di Kementerian Dikbud	83.790.399.752	100.404.808.445
7. BLU di Kementerian Kesehatan	270.118.933.548	242.943.924.292
8. BLU di Kementerian Agama	605.360.366	375.057.144
9. BLU di Kementerian PU	251.494.170.516	133.785.213.770
10. BLU di Kementerian KUKM	899.051.060	67.711.235
11. BLU di Kepolisian RI	339.393.789	149.530.391
12. BLU di BPPT	24.386.309	24.278.440
13. BLU di LAPAN	144.631.057	144.041.272
14. BLU di Kementerian Perumahan Rakyat	3.748.201	6.454.223
15. BLU di BPKPBPB Batam	46.450.090.520	101.954.074.208
Jumlah	**1.240.897.970.734**	**1.143.914.367.593**

C.2.18. Persediaan

Persediaan Rp67,60 triliun

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp67.600.353.672.687 dan Rp63.205.251.965.209 merupakan nilai persediaan yang berdasarkan neraca K/L dan unit terkait lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Persediaan	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Persediaan di K/L	64.997.443.226.590	58.950.408.397.849
Persediaan di BLU	993.640.886.770	745.639.256.227
Persediaan di BUN	1.609.269.559.327	3.509.204.311.133
Jumlah	**67.600.353.672.687**	**63.205.251.965.209**

Persediaan di K/L per 31 Desember 2014 terbesar berada di Kementerian Pertahanan sebesar Rp46.389.306.258.957, POLRI sebesar Rp2.919.334.738.880, Kementerian Perumahan Rakyat sebesar Rp2.904.366.696.255, Kementerian Pertanian sebesar Rp1.358.149.475.874, dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp1.021.654.569.937. Rincian Persediaan di K/L dan BLU dapat dilihat pada **Lampiran 18.**

Persediaan di BUN per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.609.269.559.327 adalah Persediaan pada BA 999.08 yang merupakan nilai persediaan berdasarkan neraca K/L dan Satker Khusus Pengguna Dana BA BUN – Belanja Lainnya (BA BUN - 999.08), yang terdiri dari:

a. Persediaan Cadangan Benih Nasional (CBN) pada Kementerian Pertanian sebesar Rp26.814.242.487 setara dengan 2.264.390kg merupakan persediaan berupa benih di gudang BUMN yang dicadangkan sebagai pemulihan pertanaman yang rusak/fuso akibat bencana alam atau serangan OPT. Komoditas benih yang dicadangkan berupa Padi Hibrida, Padi Non Hibrida, Kedelai, Jagung Hibrida dan

www.peraturan.go.id

Jagung Komposit, hasil *stock opname* fisik yang telah dilakukan tim untuk benih di gudang posisi 31 Desember 2014 sebagai berikut.

No.	Tahun	31 Desember 2014 (*audited*)		31 Desember 2013 (*audited*)	
		kg	Nilai (Rp)	kg	Nilai (Rp)
1	Padi Non Hibrida	1.821.267	12.393.721.935	2.071.860	14.099.007.300
2	Padi Hibrida	32.485	1.543.037.500	-	-
3	Jagung Komposit	23.490	189.102.252	-	-
4	Jagung Hibrida	387.148	12.688.388.552	790.489	25.858.330.079
5	Kedelai	-	-	-	-
Jumlah*)		**2.264.390**	**26.814.250.239**	**2.862.349**	**39.957.337.379**

*) *selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp7.752 karena pembulatan*

b. Persediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Neraca 999.08 (BA BUN - Belanja Lain-lain) per 31 Desember 2014 pada Perum BULOG sebesar Rp1.299.225.225.000 setara dengan kuantum 173.230.030,23kg dikalikan dengan biaya perolehan persediaan yang terakhir yaitu Rp7.500/kg. Sedangkan nilai stok CBP berdasarkan harga perolehan per tahun dapat dirinci sebagai berikut.

No	Tahun	31 Desember 2014 (*audited*)			31 Desember 2013 (*audited*)		
		Kuantum (kg)	Harga Perolehan per kg (Rp)	Jumlah (Rp)	Kuantum (kg)	Harga Perolehan per kg (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2011	-	6.450	-	102.310.234,47	6.450	659.901.012.343
2	2012	173.230.030,23	7.500	1.299.225.225.000	266.666.666,67	7.500	2.000.000.000.000
Jumlah*)		**173.230.030,23**		**1.299.225.225.000**	**368.976.901,14**		**2.659.901.012.343**

*) *selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp1.725 karena pembulatan*

Realisasi penyaluran CBP pada Tahun 2014 sebesar 195.768.022,56kg berdasarkan Delivery Order (DO) terdiri dari penyaluran Bencana Alam sebanyak 11.838.676,8kg, penyaluran Operasi Pasar Murni Tahun 2014 sebanyak 92.288.797,76kg, dan penyaluran Operasi Pasar Khusus (OPK) tahun 2014 sebanyak 91.616.895kg.

Penggunaan CBP selama Tahun 2014 dan saldo per 31 Desember 2013 disajikan sebagai berikut.

www.peraturan.go.id

URAIAN	Kwantum (Kg)	Nilai Neraca	Nominal (Rp)	KETERANGAN
STOK AWAL	368.974.399,79	7500	2.767.307.998.414	Nilai Persediaan (kwantum x nilai neraca)
PENAMBAHAN STOK	-	-	-	Pembelian Pemerintah
STOK AWAL 2014 (I)	368.974.399,79	7.500	2.767.307.998.413,50	
PENGGUNAAN :				
1. PENGGUNAAN OP (PENDAPATAN NEGARA) :				
- DO TA 2014	92.288.797,76			
Jumlah (1)	92.288.797,76		617.162.868.568	Penerimaan pada Tahun 2014
			12.435.861.700	Outstanding OPM TA 2014
2. PENGGUNAAN BENCANA ALAM :				
- DO TA 2014	11.838.676,80			
Jumlah (2)	11.838.676,80			
3. PENGGUNAAN OPK (OPERASI PASAR KHUSUS) :				
- DO TA 2014	91.616.895,00			
Jumlah (3)	91.616.895,00		119.101.963.500	Outstanding OPK TA 2014
TOTAL PENGGUNAAN (II)	195.744.369,56			
STOK AKHIR (III = I - II)	173.230.030,23	7.500	1.299.225.226.713,50	Nilai Persediaan (kwantum x nilai neraca)
	173.206.377,00	7.500	1.299.225.225.000,00	Pembulatan

c. Persediaan pada BNPB sebesar Rp275.051.939.298 merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang dibiayai dana RR DIPA BNPB BA 999.08 TA 2011 dan disalurkan TA 2012 namun belum diserahterimakan kepada penerima bantuan.

d. Persediaan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar Rp8.178.152.542.

C.2.19. Dana Bergulir

Jumlah Dana Bergulir per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp22.618.233.561.719 dan Rp17.872.890.837.875 merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat, pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat, dan lain-lain yang dikelola oleh K/L maupun BLU K/L dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
1. Kementerian Kehutanan	59.336.913.265	21.996.497.873
2. Kementerian Lingkungan Hidup	34.994.865.954	36.585.636.598
3. Kementerian Koperasi dan UKM	2.789.735.187.473	3.098.169.096.937
4. Kementerian Negara Perumahan Rakyat	15.129.251.360.785	11.176.290.973.648
5. Kementerian Pekerjaan Umum	4.604.915.234.242	3.539.848.632.819
Jumlah	**22.618.233.561.719**	**17.872.890.837.875**

Dana Bergulir sebesar Rp22.618.233.561.719 pembiayaannya bersumber dari BA 999.03 dan disalurkan melalui BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Negara Koperasi dan KUKM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan.

www.peraturan.go.id

Penjelasan masing-masing dana bergulir adalah sebagai berikut.

Dana Bergulir Rp22,62 triliun

1. Dana Bergulir di Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp59.336.913.265 dan Rp21.996.497.873 adalah dana bergulir yang dikelola oleh BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan yang berasal dari BA 999.03.
2. Dana Bergulir di Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp34.994.865.954 dan Rp36.585.636.598 merupakan Dana Bergulir kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang merupakan realisasi *Separate Arrangement Agreement* (SAA) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman untuk program *Debt for Nature Swap* (DNS) yang ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 2006. Program yang disetujui dalam rangka DNS ini adalah *Financial Assistance for Environmental Investment for Micro and Small Enterprises.* Program ini dijalankan oleh KLH selama 5 tahun, yaitu tahun 2006 sampai dengan 2010.
3. Dana Bergulir di Kementerian Negara Koperasi dan UKM per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp2.789.735.187.473 dan Rp3.098.169.096.937 berasal dari BA 999.03 yang disalurkan kepada BLU Lembaga Pengelolaan Dana bergulir (LPDB) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
4. Dana Bergulir di Kementerian Negara Perumahan Rakyat per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp15.129.251.360.785 dan Rp11.176.290.973.648 merupakan dana bergulir untuk pembiayaan perumahan yang berasal dari BA 999.03 yang disalurkan kepada BLU Pusat Pembiayaan Perumahan. Pembiayaan perumahan ini merupakan dana yang digulirkan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Berpenghasilan Menengah (MBM) dengan tujuan untuk meningkatkan akses kepada sumber pembiayaan perumahan.
5. Dana Bergulir di Kementerian Pekerjaan Umum per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp4.604.915.234.242 dan Rp3.539.848.632.819 merupakan hak tagihan BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT kepada pihak ketiga khususnya Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang telah diberikan pinjaman untuk dana uang ganti rugi pengadaan tanah proyek pembangunan jalan tol. Dana bergulir pada Kementerian Pekerjaan Umum berasal dari BA 999.03.

C.2.20. Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Dana Bergulir Diragukan Tertagih Rp325,44 miliar

Jumlah Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp325.440.113.463 dan Rp39.997.900.137 merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih dana bergulir yang dikelola oleh K/L maupun BLU K/L dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
1. Kementerian Kehutanan	-	-
2. Kementerian Lingkungan Hidup	18.256.649.734	16.782.036.260
3. Kementerian Koperasi dan UKM	307.183.463.729	23.215.863.877
4. Kementerian Negara Perumahan Rakyat	-	-
5. Kementerian Pekerjaan Umum	-	-
Jumlah	325.440.113.463	**39.997.900.137**

Secara rinci kebijakan pembentukan nilai realisasi bersih dana bergulir pada masing-masing

www.peraturan.go.id

entitas adalah sebagai berikut.

1. Tidak ada Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan karena semua penyaluran masih dalam masa tenggang *(grace period).*
2. Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada Kementerian Lingkungan Hidup sebesar Rp18.256.649.734 merupakan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang telah dilakukan Bank Syariah Mandiri dengan golongan diragukan dan macet. Akumulasi nilai PPAP dengan golongan diragukan dan macet dicatat dan dilaporkan pada akun Dana Bergulir yang Diragukan Tertagih.
3. Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU LPDB KUKM sebesar Rp307.183.463.729 merupakan dana bergulir yang diragukan tertagih, dan dana bergulir yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
4. Tidak ada Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU Pusat Pembiayaan Perumahan karena semua risiko penyaluran menjadi beban perbankan.
5. Tidak ada Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT, dengan pertimbangan: (1) BUJT wajib melakukan pelunasan dana talangan pengadaan tanah dimaksud sebelum pelaksanaan konstruksi pembangunan Jalan Tol, (2) sampai dengan saat ini semua dana talangan selalu dibayar oleh BUJT, serta (3) tanah yang ditalangi oleh Dana Bergulir menjadi BMN pada Kementerian Pekerjaan Umum.

C.2.21. Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Non Permanen Lainnya Rp8,63 triliun

Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp8.625.184.946.842 dan Rp8.340.448.484.300 merupakan investasi yang dikelola oleh beberapa K/L atau BUN, yaitu:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Kementerian Perindustrian	11.282.810.445	14.481.582.162
BLU Pusat Investasi Pemerintah-Kemenkeu	8.608.674.011.397	8.319.488.777.138
BLU Perguruan Tinggi Eks BHMN	5.228.125.000	6.478.125.000
Jumlah	**8.625.184.946.842**	**8.340.448.484.300**

Penjelasan masing-masing Investasi Non Permanen Lainnya adalah sebagai berikut.

1. Investasi non permanen pada Kementerian Perindustrian sebesar Rp11.282.810.445 merupakan investasi yang terbentuk dari pinjaman kepada perusahaan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) dalam program SKIM 2 dengan jangka waktu pengembalian sampai dengan lima tahun. Nilai realisasi bersih investasi jangka panjang yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian adalah sebesar Rp0, yang merupakan nilai hasil pengurangan investasi pokok sebesar Rp11.282.810.445 dengan nilai Investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya sebesar Rp11.282.810.445.
2. Investasi yang dikelola oleh BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp8.608.674.011.397 dan Rp8.319.488.777.138, atau meningkat sebesar 3,48%. Nilai Investasi Non Permanen pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (Kementerian Keuangan) merupakan nilai investasi atau pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga sebagai bagian dari kegiatan operasi BLU PIP. Rincian Investasi Non Permanen Lainnya pada BLU PIP adalah sebagai berikut.

www.peraturan.go.id

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Investasi atau Penyaluran Kepada Pemerintah Daerah		
1. Pembangunan RSUD Type B di Prov. Sulawesi Tenggara	135.600.000.000	162.800.000.000
2. Pembangunan RSUD Type C di Kab. Muko Muko	-	32.201.999.999
3. Pembangunan Pasar Umum di Kab. Karangasem	35.775.321.000	-
4. Pembangunan Pasar Tradisional Masbagik di Kab. Lombok Timur	26.790.000.000	34.350.000.000
5. Pembangunan Dua Jembatan layang serta peningkatan dan pelebaran tujuh ruas jalan di Kota Bandar Lampung	66.364.218.418	91.964.218.418
6. Pembangunan Pasar Umum Amlapura Timur serta Pusat Seni dan Kerajinan	-	46.992.821.000
7. Pembangunan RSUD Tipe C di Kab. Karangasem	30.499.876.601	42.899.876.601
8. Pembangunan Pasar Tradisional Marelan Kecamatan Medan Marelan, Pasar Tradisional Jawa Kecamatan Medan Belawan dan Pasar Tradisional Lelang Kecamatan Medan Sunggal	2.221.380.000	11.334.000.000
9. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Prov. Sulawesi Tenggara	101.773.421.999	125.221.265.174
10. Pembiayaan Pembangunan 15 Ruas Jalan di Kabupaten Lombok Tengah	66.676.982.000	80.499.021.350
11. Pembiayaan Pembangunan RSUD Anutapura di Kota Palu	99.844.571.000	77.986.550.849
12. Pembiayaan Pembangunan Terminal Dungingi di Kota Gorontalo	21.716.499.613	6.534.700.000
13. Pembiayaan Pembagunan 10 Ruas Jalan Provinsi dan 1 Jembatan di Sulawesi Selatan	354.337.299.642	106.704.323.746
14. Pembangunan Pasar Umum di Kab. Temanggung	37.579.771.350	-
15. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kab. Halmahera Selatan	27.735.130.073	-
16. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kab. Mukomuko	31.866.590.600	-
17. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kab. Boalemo	33.700.057.000	-
18. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Prov. Sulawesi Tenggara	10.373.804.100	-
19. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Prov. Bangkalan	25.819.088.000	-
Total Penyaluran Kepada Pemda	**1.108.674.011.396**	**819.488.777.137**
Investasi atau Penyaluran Kepada BUMN atau Badan Usaha		
20. Pinjaman dengan Persyaratan Lunak dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 22A UU Nomor 2 Tahun 2010 - PLN	7.500.000.000.000	7.500.000.000.000
Total Penyaluran Kepada BUMN/Badan Usaha	**7.500.000.000.000**	**7.500.000.000.000**
Total Investasi/Penyaluran PIP*)	**8.608.674.011.396**	**8.319.488.777.137**

*) *selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp1 karena pembulatan*

3. Investasi jangka panjang non permanen pada Perguruan Tinggi Eks Badan Hukum Milik Negara sebesar Rp5.228.125.000 merupakan investasi dalam bentuk obligasi pada Institut Teknologi Bandung.

www.peraturan.go.id

C.2.22. Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya

Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya Rp11,28 miliar

Cadangan Penurunan Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp11.282.810.445 dan Rp5.531.213.937 merupakan pencadangan penurunan nilai investasi non permanen lainnya pada investasi non permanen SKIM 2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian. Kebijakan pencadangan penurunan nilai investasi non permanen lainnya mulai diterapkan pada LKPP Tahun 2012 dengan kebijakan bahwa nilai yang dicadangkan adalah sebesar:

1. investasi yang diragukan pengembaliannya dengan bobot pengurang sebesar 50%, dalam hal debitur hanya melakukan pembayaran paling banyak sebanyak tiga kali pembayaran dalam 1 (satu) tahun; dan
2. investasi macet dengan bobot pengurang sebesar 100%, dalam hal debitur sama sekali tidak melakukan pembayaran dalam satu tahun.

Pembentukan cadangan penurunan nilai Investasi Non Permanen Lainnya dilakukan dalam rangka pembentukan nilai realisasi bersih investasi non permanen. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Akuntansi Investasi, investasi non permanen disajikan pada laporan keuangan sesuai dengan nilai realisasi bersihnya.

C.2.23. Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara

Investasi Permanen PMN Rp940,19 triliun

Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp940.189.434.094.290 dan Rp844.094.126.993.709 merupakan nilai penyertaan modal negara pada BUMN, Non BUMN, Lembaga Keuangan Internasional, Badan Usaha Lainnya, dengan jumlah:

(dalam rupiah)

PMN	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
1. BUMN/Perusahaan Negara	888.206.868.069.152	793.035.186.146.735
2. Non BUMN	3.507.656.853.250	1.678.121.327.192
3. Lembaga Internasional	48.474.441.139.524	49.380.371.357.652
4. Badan Usaha Lainnya	468.032.364	448.162.130
Jumlah	**940.189.434.094.290**	**844.094.126.993.709**

Penyertaan modal negara pada eks BHMN, BI, dan LPS pada LKPP Tahun 2014 disajikan sebagai Investasi Permanen Lainnya. Reklasifikasi tersebut menyesuaikan perubahan pada Bagan Akun Standar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.

PMN pada BUMN

1. Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp888.206.868.069.152 dan Rp793.035.186.146.735 disajikan berdasarkan metode ekuitas (*equity method*), yaitu dihitung dari penjumlahan total ekuitas masing-masing BUMN setelah dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah pada BUMN yang bersangkutan. Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2014 tersebut merupakan nilai PMN pada 121 BUMN sebesar Rp861.720.045.856.942 dan lima BUMN/Lembaga di bawah pembinaan Kementerian Keuangan sebesar Rp26.486.822.212.210. Status laporan keuangan pada 121 BUMN adalah sebagai berikut.

www.peraturan.go.id

(dalam rupiah)

Status Laporan Jumlah	Jumlah BUMN	Nilai	Nilai
Audited 2014	106	851.764.029.897.083	98,8%
Unaudited 2014	12	15.115.405.100.898	1,79%
Audited 2013	1	(5.159.389.141.039)	(0,59%)
Dalam Proses Likuidasi	2	-	-
Jumlah	**121**	**861.720.045.856.942**	100%

Rincian PMN pada BUMN dapat dilihat pada **Lampiran 19.**

Nilai PMN pada BUMN 31 Desember 2014 tersebut termasuk Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada 14 BUMN dengan nilai sebesar Rp58.021.901.990.333. **(Lampiran 20)**

Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2014 termasuk PMN pada 5 (lima) BUMN sebesar Rp26.486.822.212.210 yang berada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

BUMN	Nilai PMN	
	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	10.447.745.000.000	8.299.338.000.000
PT Geo Dipa Energi	1.837.655.780.968	1.849.351.387.876
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	5.451.564.614.000	5.147.990.174.000
PT Sarana Multi Infrastruktur	4.785.615.319.004	4.545.889.775.754
PT Sarana Multigriya Financial	3.964.241.498.238	2.790.942.276.094
Jumlah	**26.486.822.212.210**	**22.633.511.613.724**

Neraca untuk kelima BUMN tersebut dapat dilihat secara rinci pada **Lampiran 21**.

Perubahan nilai PMN pada Perusahaan Negara antara lain disebabkan oleh:

a. Perubahan nilai ekuitas beberapa Perusahaan Negara
   Nilai ekuitas beberapa perusahaan berubah akibat aktivitas perusahaan yang menyebabkan laba/rugi.

b. Reklasifikasi pada beberapa Perusahaan Negara menjadi perusahaan minoritas
   Selama periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dilakukan reklasifikasi atas PT Perkebunan Nusantara I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, dan XIV menjadi perusahaan minoritas.

c. Diakuisisinya beberapa Perusahaan Negara
   Akuisisi PT Inhutani I, II, III, IV, dan V oleh Perum Perhutani.

d. Reklasifikasi Nilai Ekuitas PT Asuransi Kesehatan (ASKES) dan PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) kepada BPJS
   1) Nilai ekuitas PT Asuransi Kesehatan (ASKES) sebesar Rp9.143.613.000.000 kepada BPJS Kesehatan; dan
   2) Nilai ekuitas PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) sebesar Rp6.349.879.000.000 kepada BPJS Ketenagakerjaan.

www.peraturan.go.id

e. Telah diterbitkannya PP penetapan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) sebagai Penyertaan Modal Pemerintah atas:
   1) PT ASDP senilai Rp308.571.680.909 (PP Nomor 6 Tahun 2014);
   2) Perum Damri senilai Rp31.844.050.000 (PP Nomor 7 Tahun 2014); dan
   3) PT Angkasa Pura I senilai Rp2.926.166.059.177 (PP Nomor 8 Tahun 2014).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU Nomor17 Tahun 2003 dan Pasal 22 ayat (1) PP Nomor 8 Tahun 2006, LKPP dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara yang memuat informasi lebih rinci tentang aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih yang disajikan dalam **Lampiran 22.**

PMN pada perusahaan minoritas (non BUMN)

2. PMN pada perusahaan minoritas (non BUMN) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp3.507.656.853.250 dan Rp1.678.121.327.192, merupakan penyertaan pemerintah pada perusahaan dengan persentase kepemilikan kurang dari 51%. Nilai penyertaan pada perusahaan minoritas dengan kepemilikan 20% sampai dengan 50% disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*), sedangkan kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya (*cost method*).

   Non-BUMN yang dimiliki oleh Pemerintah per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut.

   a. Kepemilikan 20%-50%

      PT Surabaya Indah Estate Rungkut, PT Jayakarta Indah Estate Pulogadung, dan Asean Infrastructure Fund. Sehubungan dengan telah dibubarkan Asean Copper Product Inc, maka mulai dari pelaporan keuangan tahun 2014 Asean Copper Product Inc tidak dicatat lagi dalam daftar investasi pemerintah.

   b. Kepemilikan di bawah 20%

      PT Bank Bukopin Tbk, PT Rekayasa Industri, PT Freeport Indonesia, PT Indosat, Tbk, PT Nindya Karya, PT Socfindo, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI), PT Asean Bintulu Fertilizer, PT PANN Pembiayaan Maritim, PT Perkebunan Nusantara I, PT Perkebunan Nusantara II, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI, PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara X, PT Perkebunan Nusantara XI, PT Perkebunan Nusantara XII, PT Perkebunan Nusantara XIII, dan PT Perkebunan Nusantara XIV.

   Perubahan nilai kepemilikan negara pada Non-BUMN per 31 Desember 2014 disebabkan oleh:

   a. Pengalihan kepemilikan Negara pada 13 (tiga belas) BUMN Perkebunan, yaitu PT PerkebunanNusantara (PTPN) I, PTPN II, PTPN IV – PTPN XIV sebesar 90% kepada PTPN III (Persero) sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 72 Tahun 2014 sehingga menjadi tambahan pada Non-BUMN;

   b. Perubahan kurs tengah BI untuk nilai tukar Dollar Amerika dari 1USD = Rp12.189 (kurs tengah BI Per tanggal 31 Desember 2013) menjadi 1USD = Rp12.440 (kurs tengah BI Per tanggal 31 Desember 2014). Perubahan kurs tengah BI berpengaruh pada kepemilikan Pemerintah pada PT Freeport, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, dan Asean Infrastructure Fund. Pada ketiga perusahaan tersebut, laporan

www.peraturan.go.id

keuangan disajikan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat sehingga harus dikonversi ke dalam mata uang Rupiah untuk menghitung kepemilikan Pemerintah;

c. Perubahan kurs tengah BI untuk nilai tukar Ringgit Malaysia dari 1MYR = Rp3.707,609 (kurs tengah BI Per tanggal 31 Desember 2013) menjadi 1MYR = Rp3.561,930 (kurs tengah BI Per tanggal 31 Desember 2014). Perubahan kurs tengah BI untuk Ringgit Malaysia berpengaruh pada kepemilikan di Asean Bintulu Fertilizer mengingat Laporan Keuangan Asean Bintulu Fertilizer menggunakan mata uang Ringgit Malaysia;

Pada non-BUMN dengan kepemilikan negara di bawah 20%, nilai penyertaan negara pada Non-BUMN tersebut tetap, sepanjang tidak ada penambahan penyertaan yang dilakukan Pemerintah, mengingat perhitungan kepemilikan negara menggunakan metode biaya. Berdasarkan hal tersebut, nilai kepemilikan negara pada Non-BUMN tersebut tidak tergantung pada status laporan keuangan non-BUMN tersebut, atau perubahan ekuitas.

Rincian kepemilikan negara pada Non-BUMN dapat dilihat pada **Lampiran 22.**

Penyertaan pada Lembaga Internasional

3. Penyertaan pada Lembaga Internasional per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp48.474.441.139.524 (kurs tengah BI 31 Desember 2014, 1.00 USD=Rp12.440) dan Rp49.380.371.357.652 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Indonesia dalam rangka keanggotaan pada beberapa organisasi/lembaga keuangan internasional/regional baik yang telah disetor maupun yang masih dalam bentuk *promissory notes*. PMN ini dikonversikan ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2014.

   Pada tahun 2014 terdapat kelebihan pembayaran PMN pada ADB sebesar USD2.605.302,84 dikarenakan kesalahan administratif dan ADB telah mengembalikan seluruhnya pada 17 Maret 2015.

   Rincian PMN pada Lembaga Internasional dapat dilihat pada **Lampiran 23.**

   Dari total penyertaan pada Lembaga Internasional sebesar Rp48.474.441.139.524, termasuk penyertaan dalam bentuk *promissory notes* sebesar Rp33.576.619.525.619 di antaranya sebesar Rp33.553.945.227.099 kepada *International Monetary Fund* (IMF). Rincian *promissory notes* per Lembaga International adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Nama Lembaga	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
1	International Monetary Fund	33.553.945.227.099	26.550.675.238.720
2	International Development Association	5.173.139.668	5.173.139.668
3	Multilateral Investment Guarantee Agency	14.119.623.920	13.834.734.402
4	Common Fund for Commodities	3.381.534.932	3.758.757.160
Jumlah Total		**33.576.619.525.619**	**26.573.441.869.950**

Nilai penyertaan yang masih merupakan *promissory notes* dapat berkurang, yang disebabkan:

a. pembayaran atas *promissory notes*; dan
b. pengurangan/penghapusan *promissory notes*, yang dapat disebabkan antara lain

www.peraturan.go.id

adanya apresiasi nilai tukar Rupiah.

Penyertaan dalam bentuk *Promissory Notes* disajikan dalam kelompok Kewajiban Jangka Panjang. Lihat Catatan **C.2.47.**

4. Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp468.032.364 dan Rp448.162.130 merupakan Investasi Permanen Pemerintah pada perusahaan penerbit SBSN.

PMN pada Badan Usaha Lainnya

Rincian Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya per Perusahaan Penerbit SBSN adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Perusahaan	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
1	Perusahaan Penerbit SBSN	10.000.000	10.000.000
2	Perusahaan Penerbit SBSN I	10.000.000	10.000.000
3	Perusahaan Penerbit SBSN II	119.304.708	113.710.493
4	Perusahaan Penerbit SBSN III	110.906.854	106.732.777
5	Perusahaan Penerbit SBSN IV	108.910.401	103.859.430
6	Perusahaan Penerbit SBSN V	108.910.401	103.859.430
Jumlah		**468.032.364**	**448.162.130**

C.2.24. Investasi Permanen BLU

Investasi Permanen BLU Rp200,44 miliar

Saldo Investasi Permanen BLU per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp200.435.044.832 dan Rp177.778.694.559 merupakan penyertaan modal oleh BLU dan Perguruan Tinggi eks BHMN yang telah ditetapkan menjadi Satuan Kerja BLU pada perusahaan. Saldo per 31 Desember 2014 terdiri dari:

1. penyertaan modal BLU PPK Gelora Bung Karno (Sekretariat Negara) sebesar Rp6.637.194.500 pada PT Senayan Trikarya Sempana (PT STS) dengan porsi kepemilikan sebesar 10%; dan
2. penyertaan modal Institut Teknologi Bandung sebesar Rp57.301.133.146, Universitas Indonesia sebesar Rp9.992.057.916, Universitas Gajah Mada sebesar Rp66.810.850.000, Universitas Pendidikan Indonesia sebesar Rp7.411.854.062, Universitas Airlangga sebesar Rp10.820.999.218, Institut Pertanian Bogor sebesar Rp39.937.834.016, dan investasi permanen yang dilakukan IAIN Sumatera Utara pada PT BPRS Puduarta Insani sebesar Rp1.523.121.974.

C.2.25. Investasi Permanen Lainnya

Investasi Permanen Lainnya Rp338,62 triliun

Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp338.624.829.163.846 dan Rp312.730.704.421.451 merupakan nilai penyertaan modal negara pada eks BHMN, BI, dan LPS dengan jumlah:

(dalam rupiah)

PMN	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
1. Eks BHMN	21.416.182.295.846	1.651.156.056.451
2. Bank Indonesia	275.987.690.000.000	279.366.841.000.000

www.peraturan.go.id

3. Lembaga Penjamin Simpanan	41.220.956.868.000	31.712.707.365.000
Jumlah	**338.624.829.163.846**	**312.730.704.421.451**

1. PMN pada Badan Hukum Milik Negara (BHMN) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp21.416.182.295.846 dan Rp1.651.156.056.451 merupakan nilai ekuitas pada BHMN dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

BHMN	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
a. Institut Pertanian Bogor (IPB)	874.896.460.513	874.896.460.513
b. Universitas Airlangga	423.853.838.854	423.853.838.854
c. BP MIGAS	352.405.757.084	352.405.757.084
d. BPJS Kesehatan	11.144.289.555.210	-
e. BPJS Ketenagakerjaan	8.620.736.684.185	-
Jumlah	**21.416.182.295.846**	**1.651.156.056.451**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP), seluruh penyelenggara pendidikan harus berbentuk BHP, untuk itu seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) BHMN harus mengubah bentuk dan menyesuaikan tata kelolanya sebagai BHP sesuai ketentuan UU tersebut. Namun, sebelum dilakukannya penyesuaian perubahan bentuk dan tata kelola menjadi BHP, telah ditetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010 dalam sidang putusan uji materi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang memutuskan antara lain bahwa Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 yang memberikan landasan hukum penyelenggara pendidikan dalam bentuk BHMN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan juga menyatakan UU BHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang menetapkan antara lain PTN BHMN ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, semua Perguruan Tinggi eks Badan Hukum Milik Negara (BHMN) berubah status hukumnya menjadi Satuan Kerja Badan Layanan Umum, dengan klausul masa transisi untuk pengalihan aset Perguruan Tinggi eks BHMN dilakukan paling lambat pada tanggal 28 September 2013.

Mengingat pengalihan aset dilakukan paling lambat pada tanggal 28 September 2013, telah diambil kebijakan bahwa aset Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang telah ditetapkan menjadi kekayaan negara dipisahkan, yaitu pada Universitas Airlangga dan Institut Pertanian Bogor, per 31 Desember 2012 tetap dicatat sebagai investasi permanen pada Laporan Keuangan BA 999.03 Tahun 2012, dengan *cut off* pencatatan

www.peraturan.go.id

per 31 Desember 2010, dengan dilakukan beberapa penyesuaian. Kebijakan ini diambil dalam masa transisi, sambil menunggu selesainya proses pengalihan kekayaan negara dipisahkan menjadi kekayaan negara tidak dipisahkan/barang milik negara pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Nilai penyertaan modal negara/kekayaan negara dipisahkan pada Universitas Airlangga menggunakan data Laporan Keuangan Universitas Airlangga Tahun 2012 *audited* yang disesuaikan.

Nilai penyertaan modal negara/kekayaan negara dipisahkan pada Institut Pertanian Bogor per 31 Desember 2013 masih menggunakan data Laporan Keuangan BA 999.03 Tahun 2012 *audited*.

Untuk BP Migas, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pembubaran BP MIGAS, Mahkamah Konstitusi telah mencabut dasar hukum yang mengatur dan menetapkan BP MIGAS, sehingga per 13 November 2012 BP MIGAS telah dibubarkan.

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3135 K/08/MEM/2012 dan Nomor 3136 K/73/MEM/2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi dan Organisasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 telah diatur hal-hal antara lain:

a. penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (SKK Migas);
b. dalam rangka Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, SKK Migas memanfaatkan aset eks BP MIGAS dengan prinsip optimalisasi dan efisiensi;
c. biaya operasional dalam rangka pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berasal dari jumlah tertentu dari bagian negara dari setiap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; dan
d. biaya operasional yang diperlukan dalam pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi untuk tahun 2012 menggunakan sisa anggaran BP MIGAS tahun 2012.

Sesuai dengan surat Menteri Keuangan kepada Menteri ESDM Nomor S-33/MK.05/2013 tanggal 16 Januari 2013 hal Penyajian Laporan Keuangan BP MIGAS pada LKPP Tahun 2012, telah diambil kebijakan sebagai berikut.

a. BP MIGAS menyusun Laporan Keuangan per 13 November 2012;
b. Pendanaan BP MIGAS tanggal 13 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) BA 999.03;
c. LKPP Tahun 2012 menyajikan BP MIGAS sebagai investasi permanen PMN sebesar *netequity* per 13 November 2012; dan

www.peraturan.go.id

d. Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2012 mengungkapkan BP MIGAS dan Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Atas kebijakan yang telah diambil terkait BP MIGAS tersebut, nilai investasi permanen pada BP MIGAS yang dicatat pada Laporan Keuangan BA 999.03 Tahun 2012 adalah nilai aset bersih yang dimiliki oleh BP MIGAS per 13 November 2012, berdasarkan Laporan Keuangan BP MIGAS (*unaudited*) per 13 November 2012 yang telah disusun oleh BP MIGAS.

Ekuitas BP MIGAS per 13 November 2012 naik sebesar Rp715.012.340.753 dari posisi per 31 Desember 2011. Kenaikan tersebut akibat dari peningkatan Surplus Kinerja Bersih sebesar Rp437.907.203.984 dan kenaikan Ekuitas Lainnya sebesar Rp277.105.136.769.

Transaksi setelah tanggal 13 November 2012 dilaporkan di Badan Lainnya sebagai Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya.

2. Penyertaan pada Bank Indonesia per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp275.987.690.000 dan Rp279.366.841.000.000. Modal Bank Indonesia dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia merupakan kekayaan negara dipisahkan.

3. Penyertaan pada Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp41.220.956.868.000 dan Rp31.712.707.365.000. Modal Lembaga Penjamin Simpanan dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, modal Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kekayaan negara dipisahkan. Ikhtisar laporan keuangan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilihat pada **Lampiran 24.**

C.2.26. Aset Tetap

Aset Tetap Rp2.128,15 triliun

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp2.128.153.187.750.929 dan Rp2.096.497.316.432.500 merupakan nilai Aset Tetap berdasarkan neraca K/L dan Neraca BUN. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*), serta telah memperhitungkan depresiasi (penyusutan). Nilai bersih Aset Tetap per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.714.588.328.953.214, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.128.153.187.750.929 dikurangi penyusutan sebesar Rp413.564.858.797.715.

Rincian Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Tanah*)	945.677.266.992.956	1.041.019.298.252.419
Peralatan dan Mesin	331.484.412.353.590	282.940.410.570.636
Gedung dan Bangunan**)	210.934.630.857.630	191.278.171.370.296
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	476.253.657.666.187	423.232.566.227.236
Aset Tetap Lainnya	49.856.505.381.076	38.607.829.866.402
Konstruksi Dalam Pengerjaan	113.946.714.499.490	119.419.040.145.511

www.peraturan.go.id

Aset Tetap sebelum Penyusutan	**2.128.153.187.750.929**	**2.096.497.316.432.500**
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(413.564.858.797.715)	(386.642.243.569.313)
Jumlah Aset Tetap	**1.714.588.328.953.214**	**1.709.855.072.863.187**

**) Jumlah Tanah pada tahun 2013 termasuk eliminasi sebesar Rp63.590.100.000 karena terjadi duplikasi pencatatan pada Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Dalam Negeri.*

***) Jumlah Gedung dan Bangunan pada tahun 2013 termasuk eliminasi sebesar Rp5.311.446.117 karena terjadi duplikasi pencatatan pada Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Dalam Negeri.*

Dalam nilai Aset Tetap per 31 Desember 2014 tersebut termasuk Aset Tetap yang dikelola oleh BLU sebesar Rp195.560.906.210.834, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Tanah	131.420.096.401.623	131.283.481.154.544
Peralatan dan Mesin	24.320.051.081.440	21.943.894.181.328
Gedung dan Bangunan	30.383.951.673.812	27.624.046.542.060
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.042.035.439.411	1.855.332.216.886
Aset Tetap Lainnya	965.560.438.852	855.301.424.711
Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.429.211.175.696	6.415.988.041.618
Aset Tetap sebelum Penyusutan	**195.560.906.210.834**	**189.978.043.561.147**
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(20.534.998.695.801)	(12.732.647.221.617)
Jumlah Aset Tetap	**175.025.907.515.033**	**177.245.396.339.530**

Nilai Aset Tetap sebelum penyusutan per 31 Desember 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp31.655.871.318.429 atau 1,51 persen dari nilai per 31 Desember 2013, sedangkan nilai buku Aset Tetap mengalami kenaikan sebesar Rp4.733.256.090.027 atau 0,28 persen. Kenaikan nilai Aset Tetap ini terutama karena perolehan dari realisasi Belanja Modal sebesar Rp147,35 triliun, koreksi akumulasi penyusutan akibat penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014, penambahan aset Tetap yang diperoleh dari hibah. Kenaikan Aset Tetap yang hanya senilai Rp31.655.871.318.429 tersebut tidak sebesar realisasi belanja modal dikarenakan pada tahun 2014 terdapat reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Kemitraan Dengan Pihak Ketiga), diantaranya pada Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp131.941.959.113.010, yang terdiri dari akun Tanah sebesar Rp126.991.348.322.817 dan akun Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp4.950.610.790.193. Akun Tanah yang direklasifikasi tersebut merupakan tanah atas 28 ruas jalan tol yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Sedangkan akun Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang direklasifikasi tersebut merupakan aset jembatan untuk ruas tol Jembatan Suramadu.

Rincian daftar Aset Tetap per K/L dan BUN disajikan pada **Lampiran 25.**

C.2.27.Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp413,56 triliun

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp413.564.858.797.715 dan Rp386.642.243.569.313 merupakan nilai Penyusutan Aset Tetap berdasarkan neraca K/L dan Neraca BUN. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)

www.peraturan.go.id

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	192.311.485.253.519	157.611.985.219.129
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	40.633.664.150.064	52.463.855.914.974
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	179.845.220.627.735	176.081.093.005.564
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	774.488.766.397	485.309.429.646
Jumlah	**413.564.858.797.715**	**386.642.243.569.313**

K/L melaksanakan penyusutan mulai Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014, penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan dilaksanakan dengan menggunakan metode garis lurus. Penentuan masa manfaat Aset Tetap berpedoman pada Tabel Masa Manfaat Aset Tetap yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

C.2.28.Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Rp4,99 triliun

Jumlah Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp4.994.379.930.615 dan Rp5.096.035.542.459. Nilai bersih Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp2.825.834.229.735, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp4.994.379.930.615 dikurangi penyisihan sebesar Rp2.168.545.700.880.

Piutang Jangka Panjang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
1. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	174.219.622.769	239.948.430.983
2. Piutang Jangka Panjang Lainnya	4.820.160.307.846	4.856.087.111.476
Jumlah	**4.994.379.930.615**	**5.096.035.542.459**
Penyisihan	(2.168.545.700.880)	(2.197.535.902.919)
Nilai Bersih	**2.825.834.229.735**	**2.898.499.639.540**

1. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tagihan TGR Rp174,22 miliar

Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp174.219.622.769 dan Rp239.948.430.983. Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2014 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp19.961.115.971 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp174.219.622.769 dikurangi penyisihan sebesar Rp154.258.506.798. Rincian Tagihan TGR pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 26.**

2. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya Rp4,82 triliun

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp4.820.160.307.846 dan Rp4.856.087.111.476. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2014 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp2.805.873.113.764, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp4.820.160.307.846 dikurangi penyisihan sebesar Rp2.014.287.194.082. Berikut rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya.

(dalam rupiah)

Instansi/Unit Terkait	31 Desember 2014	31 Desember 2013

www.peraturan.go.id

	(*audited*)	(*audited*)
1. Kementerian Hukum dan HAM	15.886.800.000	17.340.500.000
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	4.422.567.553	10.799.403.300
3. Kementerian Kesehatan	-	15.245.500
4. Kementerian Kehutanan	158.276.776.998	227.423.226.077
5. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	31.745.710	319.411.750
6. BKKBN	8.499.808.374	8.499.808.374
7. Badan Tenaga Nuklir Nasional	2.250.890	-
8. BPKPBPB Batam	1.506.532.334	-
9. BA BUN 999.04	2.656.780.000.000	2.656.780.000.000
10. BA BUN 999.99	1.974.753.825.987	1.934.909.516.475
Nilai Bruto	**4.820.160.307.846**	**4.856.087.111.476**
Penyisihan	(2.014.287.194.082)	(1.996.846.887.032)
Nilai Bersih	**2.805.873.113.764**	**2.859.240.224.444**

Penjelasan Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah sebagai berikut.

1. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebesar Rp15.886.800.000 merupakan piutang atas sewa tanah oleh PT Paramita Bangun yang belum dibayar, masa sewa terhitung mulai tahun 2013-2015.
2. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp4.422.567.553 pada satker Institut Pertanian Bogor merupakan piutang afiliasi kepada PT BLST yang merupakan anak perusahaan IPB, termasuk diantaranya untuk pinjaman dari kompensasi PT Indah Pesona Bogor, Pinjaman untuk unit usaha Agrifresh, pinjaman untuk jaminan deposito, pinjaman untuk *shareholder* PT Grahawita Cendikia, Pinjaman untuk *pool* bus, dan pinjaman jangka panjang kepada PT Prima Kelola. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp4.400.454.715 berasal dari nilai bruto sebesar Rp4.422.567.553 dikurangi penyisihan sebesar Rp22.112.838.
3. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kehutanan sebesar Rp158.276.776.998. Penurunan Piutang Jangka Panjang Lainnya dibandingkan dengan tahun 2014 disebabkan oleh adanya bunga/denda Piutang HTI *Rescheduling*, pembayaran Piutang HTI *Rescheduling*, dan reklasifikasi Piutang HTI *Non Rescheduling* menjadi Piutang Bukan Pajak. Nilai Piutang Jangka Panjang pada Kementerian Kehutanan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp140.628.834.098, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp158.276.776.998 dikurangi penyisihan sebesar Rp17.647.942.900.
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp31.745.710 merupakan piutang atas pemotongan penghasilan yang akan jatuh tempo setelah TA 2015. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp31.586.981, berasal dari nilai bruto sebesar Rp31.745.710 dikurangi penyisihan sebesar Rp158.729.
5. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BKKBN merupakan piutang atas dana bantuan modal yang diberikan dengan sistem bergulir pada kelompok UPPKS mulai tahun 2008. Berdasarkan hasil pemetaan terhadap UPPKS didapatkan sisa piutang sebesar

www.peraturan.go.id

Rp8.499.808.374 yang berpotensi menjadi piutang tak tertagih dan sedang proses pengusulan untuk penghapusan piutang. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BKKBN berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp0, berasal dari nilai bruto sebesar Rp8.499.808.374 dikurangi penyisihansebesar Rp8.499.808.374.

6. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Badan Tenaga Nuklir Nasional sebesar Rp2.250.890 merupakan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kepada seorang pegawai BATAN. Nilai Piutang Jangka Panjang pada Badan Tenaga Nuklir Nasional berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp2.239.636, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.250.890 dikurangi penyisihan sebesar Rp11.254.
7. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp1.506.532.334 merupakan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) pada Kantor Perwakilan Jakarta. Nilai Piutang Jangka Panjang pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp1.506.532.334, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp1.506.532.334 dikurangi penyisihan sebesar Rp0.
8. Piutang Jangka Panjang pada BA 999.04 sebesar Rp2.656.780.000.000 merupakan piutang jangka panjang yang keseluruhan berasal dari kewajiban pokok belum jatuh tempo skema KUMK kredit program. Nilai Piutang Jangka Panjang pada BA 999.04 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp2.643.496.100.000, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.656.780.000.000 dikurangi penyisihan sebesar Rp13.283.900.000.
9. Piutang Jangka Panjang pada BA 999.99 sebesar Rp1.974.753.825.987 atau senilai USD158,742,269 merupakan piutang migas yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan. Piutang Jangka Panjang tersebut berasal dari PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) sebesar USD139,233,366 dan PT PIM sebesar USD19,508,903.

www.peraturan.go.id

C.2.29. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Rp2,17 triliun

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp2.168.545.700.880 dan Rp2.197.535.902.919 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
1. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	154.258.506.798	217.942.813.387
2. Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.014.287.194.082	1.979.593.089.532
Jumlah	**2.168.545.700.880**	**2.197.535.902.919**

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Piutang Jangka Panjang.

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan TP/TGR sebesar Rp154.258.506.798 dapat dilihat pada **Lampiran 26.**
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp2.014.287.194.082 merupakan Penyisihan pada Piutang Jangka Panjang Lainnya Kementerian Hukum Dan HAM sebesar Rp79.434.000, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp22.112.838, Kementerian Kehutanan sebesar Rp17.647.942.900, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp158.729, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebesar Rp8.499.808.374, Badan Tenaga Nuklir Nasional sebesar Rp11.254, BA 999.04 sebesar Rp13.283.900.000, dan BA 999.99 sebesar Rp1.974.753.825.987.

C.2.30. Aset Lainnya

Aset Lainnya Rp748,11 triliun

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp748.110.463.485.681 dan Rp509.313.483.862.169. Nilai bersih Aset Lainnya per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp620.606.155.768.241, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp748.110.463.485.681 dikurangi penyisihan sebesar Rp23.550.469.430.844 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp103.953.838.286.596. Aset Lainnya terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	132.392.631.678.964	279.936.137.500
2. Aset Tak Berwujud	19.418.359.628.145	17.448.733.461.982
3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya	107.883.037.541.388	95.453.796.857.223
4. Dana Penjaminan	74.594.663.462	71.638.992.611
5. Dana Kelolaan BLU	15.491.986.109.389	17.684.403.155.418
6. Aset KKKS	286.089.093.484.847	221.745.303.742.534
7. Aset Eks BPPN (Tim Koordinasi)	2.558.616.559.690	3.181.247.163.249
8. Aset Lain-lain	132.760.986.324.644	98.608.345.001.685
9. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	9.970.179.251.456	7.968.396.497.466
10. Aset Lainnya Penerusan Pinjaman	41.470.978.243.696	46.871.682.852.501
Jumlah	**748.110.463.485.681**	**509.313.483.862.169**
Penyisihan	(23.550.469.430.844)	(21.904.143.176.106)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(103.953.838.286.596)	(68.489.052.477.854)
Nilai Bersih	**620.606.155.768.241**	**418.920.288.208.209**

www.peraturan.go.id

Penjelasan masing-masing Aset Lainnya adalah sebagai berikut.

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp132,39 triliun

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp132.392.631.678.964 dan Rp279.936.137.500 merupakan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang berada di:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2.968.027.721	13.308.637.500
2. Kementerian Pekerjaan Umum	131.941.959.113.010	-
3. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	182.980.000.000	182.980.000.000
4. Kementerian Negara PPN/BAPPENAS	83.647.500.000	83.647.500.000
5. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	181.077.038.233	-
Jumlah	**132.392.631.678.964**	**279.936.137.500**

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pekerjaan Umum merupakan aset pada Ditjen Bina Marga yang telah dimanfaatkan oleh BUJT terdiri dari Tanah sebesar Rp126.991.348.322.817 dan Jalan, Irigasi, dan jaringan sebesar Rp4.950.610.790.193. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pekerjaan Umum tersebut merupakan reklasifikasi dari akun Tanah dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang pada LKPP Tahun 2013 disajikan sebagai Aset Tetap (lihat **Catatan C.2.26**).

2. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp19,42 triliun

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp19.418.359.628.145 dan Rp17.448.733.461.982 merupakan aset yang berupa *software*, dan hak paten yang berada di K/L dan BUN. Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 27.**

3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya Rp107,88 triliun

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp107.883.037.541.388 dan Rp95.453.796.857.223, terdiri atas:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
1. Kementerian Luar Negeri	380.152.014.135	437.835.441.620
2. Kementerian Pertahanan	6.645.194.319.836	8.322.662.245.672
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	303.387.013.176	304.187.466.401
4. Kementerian Kesehatan	53.156.104.930	691.186.932.002
5. Kementerian Agama	1.657.177.288.743	1.965.546.621.619
6. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	279.527.254.000	-
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia	477.674.604.919	411.780.509.995
8. Lembaga Ketahanan Nasional	35.920.399.352	3.650.217.740
9. BUN	98.050.848.542.297	83.316.947.422.174
Jumlah	**107.883.037.541.388**	**95.453.796.857.223**

Masing-masing Dana yang Dibatasi Penggunaannya dapat dijelaskan sebagai berikut.

www.peraturan.go.id

1) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp380.152.014.135 merupakan saldo kas besi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dibentuk berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-2.18/424/0182 tanggal 13 Januari 1992 untuk keperluan berjaga-jaga terhadap keadaan/kejadian yang mungkin timbul, terutama untuk membiayai perwakilan apabila *remise* (*cash supply*) terlambat dan keperluan lainnya yang penggunaannya harus mendapat persetujuan/ instruksi dari Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri. Penggunaannya terutama pada belanja yang bersifat mengikat.
2) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp6.645.194.319.836 merupakan dana kegiatan lintas tahun yang belum selesai sampai dengan akhir tahun 2014, dana *reimbursement*, dana *pending matters*, dana siaga ops, dan *Outstanding L/C* devisa.
3) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp303.387.013.176 adalah Dana Abadi pada Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Indonesia.
4) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp53.156.104.930 merupakan dana Bantuan Sosial berupa jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang belum digunakan sampai dengan akhir tahun 2014. Termasuk di dalamnya saldo dana Program Jamkesmas Rujukan, Jamkesmas Dasar, dan Jampersal.
5) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Agama sebesar Rp1.657.177.288.743 merupakan aset bersih Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). BPIH mengelola setoran awal hingga adanya pelunasan BPIH sebagai akibat adanya keputusan keberangkatan jemaah atau adanya keputusan dari jemaah itu sendiri untuk menunda atau membatalkan kepesertaan dalam program BPIH atau adanya keputusan dari pejabat yang berwenang. Dana Abadi Umat (DAU) yang dikelola BP-DAU tidak lagi disajikan sebagai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya sesuai PMK Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 200/PMK.05/2012.
6) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp279.527.254.000 merupakan rekening deposito dana penjaminan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang memperoleh Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) pada Ditjen Binapenta.
7) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebesar Rp477.674.604.919 merupakan dana yang digunakan untuk kegiatan operasional POLRI yang tidak dibiayai dari DIPA.
8) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Lembaga Ketahanan Nasional sebesar Rp35.920.399.352 merupakan nilai jaminan sisa pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun 2014.
9) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN sebesar Rp98.050.848.542.297, terdiri dari:

www.peraturan.go.id

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Rekening Cadangan	7.181.378.836.639	7.076.413.245.972
Escrow Bank Mutiara	214.962.903.928	210.625.629.902
Rekening Lainnya di BUN	162.227.302.567	169.570.714.516
BA 999.03	17.327.350.561.156	17.361.728.097.294
PT Taspen	73.164.928.938.007	58.498.609.734.490
Jumlah	**98.050.848.542.297**	**83.316.947.422.174**

Rincian masing-masing dana yang dibatasi penggunaannya pada BUN adalah:

a. Rekening Cadangan sebesar Rp7.181.378.836.639 merupakan rekening yang digunakan untuk menampung sisa anggaran belanja yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Rekening Cadangan Reboisasi	4.546.878.110.595	4.546.878.110.595
Rekening Cadangan Subsidi/PSO	2.634.500.726.044	2.529.535.135.377
Jumlah	**7.181.378.836.639**	**7.076.413.245.972**

- Rekening Cadangan Reboisasi sebesar Rp4.546.878.110.595 adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang digunakan untuk menampung sisa dana reboisasi setiap tahun dari bagian pemerintah pusat setelah dikurangi alokasi ke Kementerian Kehutanan. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan reboisasi seperti Program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/2007 dan Nomor 02/Menhut-II/2007 tanggal 5 Februari 2007 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan.
- Rekening Cadangan Subsidi/PSO adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang digunakan untuk menampung sisa subsidi/PSO yang belum disalurkan karena belum didukung oleh bukti-bukti yang sah. Rekening Dana Cadangan Subsidi/PSO dilaporkan pada BA 999.07.

  Rincian Rekening Cadangan Subsidi yang disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Subsidi Premium	-	6.948.201.957
Subsidi Minyak Solar	-	466.624.425.458
Subsidi LPG	-	-
Subsidi Benih	164.844.001.875	375.003.022.428
Subsidi Pupuk	1.032.297.753.405	1.315.446.867.744
Subsidi PELNI	214.273.420.945	126.522.639.000
Subsidi PT KAI	380.417.691.852	238.989.978.790
Subsidi PSO LKBN ANTARA	5.297.290.002	-
Subsidi Pangan	837.370.567.965	-
Jumlah	**2.634.500.726.044**	**2.529.535.135.377**

www.peraturan.go.id

b. Rekening *escrow* Bank Mutiara sebesar Rp214.962.903.928 adalah Rekening *escrow* pada rekening Nomor 1022-000320250-001 atas nama Dirjen Anggaran yang berada di Bank Mutiara (dulu Bank Century) yang setara dengan USD17,279,976.20 (kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2014 USD1=Rp12.440). Rekening tersebut digunakan untuk menampung hibah dari Pemerintah Amerika Serikat.

c. Rekening Lainnya yang digunakan untuk tujuan tertentu adalah sebesar Rp162.227.302.567 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian Rekening	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
1. Menteri Keuangan C.Q Direktur Jenderal Perbendaharaan Untuk Menampung Pengembalian Dana Talangan Dan Pencairan Aset BPR Nomor 500.000004980	75.168.865.798	69.985.677.235
2. Menteri Keuangan Pengelolaan untuk Surat Berharga Negara nomor 502.000001980 (Nama rekening berubah dari Menteri Keuangan Pengeluaran untuk Surat Berharga Negara menjadi Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga Negara dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-9268/PB/2013 tanggal 20 Desember 2013)	-	12.625.000.000
3. BUN Untuk Obligasi Dalam Rangka Penjaminan nomor 502.000002980	82.107.368.549	82.107.368.549
4. Rekening Khusus Menteri Keuangan Karena Penjualan Saham PT Telkom Di Pasar Domestik nomor 510.000239980	1.422.296.768	1.395.096.768
5. Rekening Depkeu untuk Penampungan Hibah Dari luar Negeri dalam Rangka Bencana Alam Nasional Dalam Valuta USD nomor 602.074411980	3.528.771.452	3.457.571.964
Total	**162.227.302.567**	**169.570.714.516**

d. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.03 sebesar Rp17.327.350.561.156 terdiri dari:

1) Dana pada rekening Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan dana bergulir atas *Debt Nature Swap* sebesar Rp39.547.561.156 merupakan dana pada rekening penampungan dana pokok dan bagi hasil.

2) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp15.617.700.000.000 merupakan *endowment fund* yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak.

Endowment Fund berupa Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) bersumber dari realisasi atas anggaran yang telah ditetapkan pada BA 999.03 dan dikelola oleh BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah Kementerian Keuangan.

3) Dana Kewajiban Penjaminan sebesar Rp1.670.103.000.000 terdiri dari:

- Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara sebesar Rp1.524.869.000.000.

www.peraturan.go.id

- Penjaminan percepatan penyediaan air minum sebesar Rp37.233.000.000.
- Penjaminan Proyek KPS melalui BUPI sebesar Rp108.001.000.000.

e. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada PT Taspen sebesar Rp73.164.928.938.007 merupakan kewajiban PT Taspen kepada peserta program pensiun Pegawai Negeri Sipil.

Program Pensiun PNS diselenggarakan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Dana Pensiun dibentuk berdasarkan kontribusi Pemerintah, sebagai pemberi kerja, dan PNS, sebagai peserta. Namun demikian, selama ini untuk penyelenggaraan program pensiun dan program THT, iuran hanya disetor oleh peserta masing-masing sebesar 4,75% dan 3,25% dari gaji pokok.

Pemerintah menganut sistem pembayaran secara *pay as you go*, yaitu pembayaran pensiun dipenuhi secara langsung oleh Pemerintah melalui APBN pada saat pegawai memasuki masa pensiun dengan sistem *sharing* dengan Dana Pensiun.

Sesuai dengan data dalam Laporan Keuangan PT Taspen (Persero) Tahun 2014 diketahui bahwa jumlah dana titipan atas iuran program pensiun sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp73.164.928.938.007.

4. Dana Penjaminan

Dana Penjaminan Rp74,59 miliar

Dana Penjaminan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp74.594.663.462 dan Rp71.638.992.611 merupakan dana penjaminan yang berada pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang digunakan sebagai jaminan dari setiap kredit dan pembiayaan yang disalurkan penerima jaminan kepada KUKM terjamin berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 14/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi dan UKM. Dana Penjaminan terdiri dari rekening dana penampungan, dana penjaminan, dana pembinaan, dana penampungan subrogasi dikurangi jasa pengelolaan hak perum Jamkrindo.

5. Dana Kelolaan BLU

Dana Kelolaan BLU Rp15,49 triliun

Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp15.491.986.109.389 dan Rp17.684.403.155.418 merupakan dana yang masih berupa kas yang belum disalurkan/diinvestasikan oleh BLU kepada pihak ketiga, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

BADAN LAYANAN UMUM	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
BLU Pusat Investasi Pemerintah	9.748.646.803.029	10.037.781.780.501
BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT	2.445.084.765.758	3.510.151.367.181
BLU Pusat Pembiayaan Perumahan	43.903.639.215	996.864.026.352
BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	1.955.245.785.735	1.992.586.201.127
BLU LPDB KUKM	1.299.105.115.652	1.147.019.780.257
JUMLAH DANA KELOLAAN	**15.491.986.109.389**	**17.684.403.155.418**

a. Dana Kelolaan pada BLU Pusat Investasi Pemerintah sebesar Rp9.748.646.803.029 merupakan dana investasi yang telah diterima PIP dari Bagian Anggaran 999.03, dan

www.peraturan.go.id

per 31 Desember 2014 berada pada rekening Pusat Investasi Pemerintah. Rincian penempatan dana kelolaan pada BLU Pusat Investasi Pemerintah per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Penempatan Dana	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Rekening Induk Dana Investasi (RIDI) Reguler		
1. Giro di Bank BRI (RIDI)	24.055.988.603	4.241.222.862
2. Giro dollar AS di Bank BRI	2.490.814.426	2.440.557.639
3. Deposito BRI (7 bilyet)	2.769.600.000.000	3.569.600.000.000
4. Deposito Bank Mandiri (5 bilyet)	1.586.000.000.000	1.171.000.000.000
5. Deposito Bank BTN (5 bilyet)	-	890.000.000.000
6. Deposito Bank Bukopin (8 bilyet)	1.425.000.000.000	900.000.000.000
7. Deposito Bank BNI (3 bilyet)	750.000.000.000	-
8. Deposito Bank Sumut (1 bilyet)	-	100.000.000.000
9. Deposito Bank Muamalat (2 bilyet)	-	200.000.000.000
10. Deposito Bank Syariah Bukopin (2 bilyet)	32.000.000.000	32.000.000.000
11. Deposito Bank BRI Syariah (1 bilyet)	-	9.000.000.000
12. Deposito Bank BJB Syariah (1 bilyet)	30.000.000.000	30.000.000.000
Jumlah RIDI Reguler	**6.619.146.803.029**	**6.908.281.780.501**
RIDI GEOTHERMAL		
1. Giro di Bank BRI (RIDI Geothermal)	500.000.000	500.000.000
2. Deposito BRI (2 bilyet)	3.129.000.000.000	3.129.000.000.000
Jumlah RIDI Geothermal	**3.129.500.000.000**	**3.129.500.000.000**
Jumlah Dana Kelolaan PIP	**9.748.646.803.029**	**10.037.781.780.501**

b. Dana Kelolaan pada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT sebesar Rp2.445.084.765.758. Rincian penempatan dana kelolaan pada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT adalah:

(dalam rupiah)

Nama Bank	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
1. Giro Bank Mandiri Acc. Nomor 126-00-0 481 9396	23.159.232.132	46.267.672.548
2. Giro BRI Acc. Nomor 00000193-01-000751-30-3	41.933.998.494	19.847.211.403
3. Giro BNI Acc. Nomor 5522522235	15.991.535.132	43.036.483.230
4. Deposito Berjangka	2.364.000.000.000	3.401.000.000.000
Jumlah	**2.445.084.765.758**	**3.510.151.367.181**

c. Dana Kelolaan pada BLU Pusat Pembiayaan Perumahan sebesar Rp43.903.639.215 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Nama Bank	Nomor Rekening	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
1. BTN	00001-01-30-000777-8	40.774.150.833	53.519.584
2. MANDIRI	119-00-2000150-7	1.548.164	1.359.304
3. BTN SYARIAH	7011001975	1.190.041	1.310.136
4. BUKOPIN	1022716014	1.662.869	1.791.092
5. BANK RIAU KEPRI	101-00-00103	1.595.144	1.447.130
6. BANK RIAU KEPRI SYARIAH	82-00-30000-0	1.000.000	1.000.000
7. BANK SUMUT	350.01.06.000004-0	1.217.650	1.173.708
8. BANK SUMUT Syariah	610.01.06.000002-0	1.146.649	1.000.555
9. BANK Kaltim	0011100244	1.514.981	4.758.969.999

www.peraturan.go.id

10. BANK Sumsel Babel	170-30-20010	8.015.741	10.613.898
11. BANK NTT	016.01.01.000001-0	59.027.309	2.088.168
12. BANK DIY	001.111.001168	1.041.272	1.038.688
13. BRI	0193-01-001528-30-5	2.662.606.497	102.177.487
14. BNI	1122223319	1.528.030	1.986.847
15. BRI SYARIAH	1007195784	27.438.585	2.019.538
16. BPD Jatim	11251030	14.940.669	3.178.698
17. BPD Jatim Syariah	6101002502	8.464.664	
18. BPD Jateng	1-034-01721-9	1.932.308	1.350.746
19. BPD Papua	150.21.10.05.00004-5	470.600.106	1.986.357
20. BPD Kalteng	100.002.000002933.2	1.420.972	2.322.564
21. Bank Syariah Mandiri	7271220124	92.689.818	14.122.400
22. BTN	00014-01-40-019735-5	-	976.301.000.000
23. BTN SYARIAH	SY44668	-	118.000.000
24. BRI Syariah	MM1336500177	-	14.986.000.000
25. BUKOPIN	2410300020	-	549.000.000
26. BPD Kalsel	003.00.12.00016.5	1.000.000	-
Total Saldo Menurut Rekening Koran		**44.135.732.302**	**996.918.456.899**
Pendapatan dari pengelolaan kas rekening Dana Kelolaan		**(232.112.089)**	**(54.941.552)**
Cadangan Piutang		-	**511.000**
Total Saldo Dana Bergulir Pada Bank Pelaksana[*)]		**43.903.620.213**	**996.864.026.347**

[*)] *selisih antara data neraca dengan rincian Dana Kelolaan BLU sebesar Rp2 karena pembulatan*

d. Dana Kelolaan pada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan sebesar Rp1.955.245.785.735 terdiri dari:

Uraian	Nomor Rekening	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
1. Rekening Pengelolaan Pokok Dana Bergulir pada rekening BRI Cabang Kebayoran Baru	0193-01-000830-30-1	10.245.785.735	12.586.201.127
2. Deposito	0193-01-010440-40-5	-	1.900.000.000.000
3. Deposito	00241-01-40-001855-4	-	80.000.000.000
4. Deposito	0193-01-011010-40-7	1.800.000.000.000	-
5. Deposito	0193-01-010925-40-5	30.000.000.000	-
6. Deposito	0193-01-011049-40-6	65.000.000.000	-
7. Deposito	122-02-0494351-1	50.000.000.000	-
Jumlah		**1.955.245.785.735**	**1.992.586.201.127**

e. Dana Kelolaan pada BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp1.299.105.115.652 dan Rp1.147.019.780.257.

6. Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

Aset KKKS Rp286,09 triliun

Aset KKKS per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp286.089.093.484.847 dan Rp221.745.303.742.534 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Jenis Aset KKKS	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)	% Kenaikan
1. Aset Tanah	**15.273.400.409.353**	**15.197.315.580.044**	**0,53%**
2. Aset Non Tanah	**270.815.693.075.494**	**206.547.988.162.490**	**35,09%**
a. Harta Benda Modal (HBM)	245.309.669.485.962	184.933.656.960.416	**37,09%**
b. Harta Benda Inventaris (HBI)	30.053.848.399	12.013.456.609	**150,17%**

www.peraturan.go.id

c. Material Persediaan	25.475.969.741.133	21.602.317.745.465	17,93%
Nilai Aset KKKS	**286.089.093.484.847**	**221.745.303.742.534**	**32,72%**
Akumulasi Penyusutan	(80.699.329.575.389)	(53.903.062.985.532)	50,27%
Nilai Buku Aset KKKS	**205.389.763.909.458**	**167.842.240.757.002**	**27,09%**

Rincian Nilai Aset KKKS Migas per 31 Desember 2014 disajikan pada **Lampiran 28.**

Selain aset KKKS yang disajikan pada Neraca LKPP Tahun 2014 tersebut di atas, terdapat aset KKKS yang tidak disajikan dalam Neraca LKPP Tahun 2014, karena tidak memenuhi kriteria-kriteria penyajian di neraca, dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Aset Tanah
- Terdapat aset tanah pada 52 KKKS dengan perolehan tahun 2010 ke bawah senilai Rp1.949.211.321.458,47 dan USD29,988,031 yang tidak dilaporkan ke dalam Neraca tahun 2014.

Jumlah KKKS	Luas Aset	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Perolehan (USD)
52 KKKS	4.156.762.112,24 m^2	1.949.211.321.458,47	29,988,031

- Nilai tersebut mengalami perubahan dengan aset tanah yang telah diungkapkan dalam CaLK LKPP tahun 2013 (*audited*).
- Dari nilai tersebut, terdapat aset yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian dan aset yang telah dilakukan inventarisasi dan penilaian namun perlu identifikasi dan verifikasi lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi, aset tanah akan disajikan dalam Neraca LKPP setelah dilakukan inventarisasi dan penilaian.

b. Aset Harta Benda Modal
- Aset sumur yang tidak digunakan
  Terdapat 2 kategori aset sumur, yaitu sumur yang masih digunakan dalam operasi, dan sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi *(plug and abandoned)*.
  Sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi, nilai asetnya dikeluarkan dari nilai aset non tanah yang disajikan pada Neraca LKPP Tahun 2013. Total aset sumur yang tidak digunakan per 31 Desember 2013 adalah sebanyak 623 sumur dengan nilai perolehan sebesar USD196,828,310 dan nilai wajar sebesar Rp1.184.222.605.157. Nilai aset sumur yang tidak digunakan adalah sebagai berikut.

Jumlah KKKS	Jumlah Aset	Nilai Perolehan (USD)	Nilai Wajar (Rp)
19 KKKS	623 item	196,828,310	1.184.222.605.157

- Aset perolehan sampai dengan Tahun 2010 yang dilaporkan di Tahun 2014
  Terdapat aset yang baru dilaporkan oleh SKK Migas namun merupakan aset dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 sebagai berikut.

Jumlah KKKS	Nilai Perolehan (USD)
21 KKKS	3.272.079.418,28

www.peraturan.go.id

Aset tersebut akan dicatat ke dalam neraca setelah dilakukan inventarisasi dan penilaian.

Adapun untuk aset perolehan sampai dengan tahun 2010 yang dilaporkan sebelum tahun 2014 namun setelah periode IP akan dilaporkan setelah dilakukan verifikasi dan rekonsiliasi menyeluruh antara data aset HBM perolehan sampai dengan 2010 dengan data HBM yang telah di IP, yaitu baik HBM yang telah mendapat nilai wajar, kondisi rusak berat maupun dalam proses penghapusan. Verifikasi dan rekonsiliasi tersebut juga bertujuan untuk mendata aset-aset hasil IP yang kemungkinan tidak tercatat di SKK Migas. Mengingat proses verifikasi dan rekonsiliasi dimaksud membutuhkan proses cukup ektensif, pengungkapan besaran nilai HBM dan penyusutannya secara akurat di Catatan atas Laporan Keuangan baru dimungkinkan pada periode pelaporan berikutnya.

- Aset *Subsequent Expenditure*
  1) Aset KKKS yang merupakan *subsequent expenditure* yang dilaporkan dalam CaLK LKPP 2014 senilai USD9,238,668,288.

Jumlah KKKS	Nilai Perolehan (USD)
48 KKKS	9,238,668,288

  2) Nilai sebesar tersebut mengalami perubahan dari nilai yang dilaporkan dalam CaLK LKPP Tahun 2013.
  3) Aset KKKS yang merupakan *subsequent expenditure* yang dilaporkan dalam CaLK LKPP Tahun 2013 senilai USD8,562,935,549 adalah:

Jumlah KKKS	Nilai Perolehan (USD)	Nilai Wajar (Rp)
36 KKKS	8,562,935,549	44.012.072.750.516

  4) Perubahan berasal dari aset KKKS yang merupakan *subsequent expenditure* yang diperoleh setelah tahun 2010, dengan sebesar USD44,051,236.66.
     Selain itu terdapat SE yang berasal dari saldo awal dan dikeluarkan dari neraca sebesar Rp63.171.755.841,33 atau ekuivalen dengan USD25,616,902. Terdapat juga SE yang merupakan koreksi sebesar USD606,064,600.30.
  5) Dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas, pada LKPP tahun 2013 maupun LKPP tahun-tahun berikutnya, aset KKKS yang merupakan *subsequent expenditure* akan disajikan ke dalam CaLK sebesar nilai perolehannya.
- Aset yang telah diserahkan ke Pemerintah
  1) Aset Kondisi Rusak Berat
     Aset dengan kondisi rusak berat yang sudah tidak digunakan masih memiliki nilai yang sama dengan CaLK tahun 2013 dengan nilai sebesar Rp356.816.206.196.

Jumlah KKKS	Jumlah Aset	Nilai Perolehan (USD)	Nilai Wajar (Rp)
48 KKKS	11,820 item	150,168,868	356.816.206.196

  2) Aset yang Dalam Proses Penghapusan
     Terdapat aset pada 3 KKKS senilai total USD 47,343,823.23 dalam proses

www.peraturan.go.id

penghapusan. Penghapusan tersebut terbagi atas penghapusan dari aset yang dilaporkan dalam Neraca LKPP Tahun 2014 sebesar:

Jumlah KKKS	Jumlah Aset	Nilai Perolehan (USD)	Nilai Wajar (Rp)
3 KKKS	30 item	1,233,627.99	5.644.492.571,71

Nilai ini merupakan nilai yang seluruhnya baru dilaporkan tahun ini. Sedangkan nilai sebesar Rp267.670.481 yang dilaporkan dalam CaLK LKPP Tahun 2013 sudah tidak dilaporkan kembali karena proses penghapusannya telah selesai.
Terhadap HBM yang masih tercatat dalam CaLK LKPP tahun 2013 (antara lain aset sumur yang tidak digunakan, aset *subsequent expenditure*, dan aset dalam kondisi rusak berat) akan ditindaklanjuti dengan RKMK tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut hasil Penertiban BMN yang berasal dari KKKS Hulu Minyak dan Gas Bumi.

c. Aset HBI

- Aset HBI dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 sebesar USD4,675,230.86 pada 53 KKKS untuk sementara belum disajikan dalam Neraca LKPP Tahun 2014. Aset HBI tersebut diungkapkan dalam CaLK dengan nilai perolehan keseluruhan dalam mata uang USD.

Jumlah KKKS	Aset dengan Nilai Perolehan (USD)
53 KKKS	4,688,798.62

Adapun aset HBI yang tidak tercatat tanggal perolehannya sebesar USD13,567.76 pada 3 KKKS juga belum disajikan dalam Neraca LKPP Tahun 2014, sehingga total aset HBI yang belum disajikan ke dalam Neraca sebesar USD4,688,798.62.
Apabila dibandingkan dengan aset HBI yang tercatat pada CaLK LKPP Tahun 2013 untuk aset HBI dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 sebesar USD303,265 dan Rp24.062.557.076, yang seluruhnya kembali diungkapkan ke dalam mata uang USD menjadi sebesar USD2,789,769.95, dan untuk aset HBI yang tidak tercatat tanggal perolehannya sebesar USD265,162 dan Rp956.292.488 yang seluruhnya kembali diungkapkan ke dalam mata uang USD menjadi sebesar USD333,473.39, sehingga total aset HBI yang tercatat pada CaLK LKPP Tahun 2013 adalah sebesar USD 3,158,746.55, terjadi peningkatan dengan tahun ini sebesar USD1,530,052.08, yang berasal dari mutasi tambah sebesar USD2,221,959.78 dan mutasi kurang sebesar USD691,907.71. Termasuk dalam mutasi kurang sebesar USD691,907.71 tersebut adalah transfer aset ke neraca karena hasil inventarisasi dan penilaian yang dilakukan pada 4 KKKS sebesar USD314,948.99.

- Aset HBI tersebut akan disajikan dalam Neraca LKBUN setelah dilakukan inventarisasi dan penilaian.

d. KKKS Terminasi

Selama tahun 2014, terdapat 38 KKKS yang telah terminasi dengan total nilai aset sebesar USD1,343,694.81.

Jumlah KKKS	Nilai Buku 31 Desember 2014 (USD)
38 KKKS	1,343,694.81

www.peraturan.go.id

7. Aset Eks BPPN

Aset Eks BPPN Rp2,56 triliun

Aset Eks BPPN (Aset Tim Koordinasi) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp2.558.616.559.690 dan Rp3.181.247.163.249 merupakan aset Pemerintah eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah, sehingga belum dapat diserahkan kepada PT PPA (Persero). Aset ini berada dalam pengelolaan Kementerian Keuangan yang terdiri dari aset inventaris, properti, nostro, surat berharga, dan saham.

Nilai Aset Eks BPPN yang disajikan per 31 Desember 2014 merupakan hasil inventarisasi dan penilaian dengan rincian sebagai berikut.

Jenis Aset	31 Desember 2014 (*audited*)		31 Desember 2013 (*audited*)	
	Jumlah Aset	Nilai (Rp)	Jumlah Aset	Nilai (Rp)
Aset Properti	851	1.753.334.802.445	851	1.753.334.802.445
Aset Inventaris	36.811	11.903.097.376	36.342	13.760.890.622
Penempatan Antar Bank dan Nostro		9.056.771.355		478.622.000.000
Surat Berharga Eks BPPN		417.767.615.047		412.347.466.749
Saham Eks BPPN		366.554.273.467		523.182.003.433
Jumlah[*)]		**2.558.616.559.690**		**3.181.247.163.249**

Sejak LKPP Tahun 2012, aset kredit eks BPPN dan tagihan PKPS dicatat sebagai piutang bukan pajak.

Rincian jumlah aset dan nilai pengalihan disajikan pada **Lampiran 29.**

1. Aset Properti Eks BPPN

Aset Properti eks BPPN yang disajikan di Neraca adalah aset properti yang berada dalam pengelolaan oleh Pemerintah serta didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*). Nilai Aset Properti eks BPPN per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.753.334.802.445 dan per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.753.334.802.445. Tidak ada perubahan nilai aset properti dikarenakan hingga saat ini belum terdapat aset properti yang terjual melalui lelang maupun untuk digunakan oleh Kementerian/Lembaga negara melalui penetapan status penggunaan.

Dari Aset Properti sebanyak 851 Aset Properti senilai Rp1.753.334.802.445, sebanyak 98 aset senilai Rp157.799.804.037 adalah Aset Properti dengan dokumen kepemilikan berupa *covernote* dan masih menggunakan nilai buku. Selain Aset Properti tersebut, terdapat Aset Properti eks BPPN yang tidak dilaporkan dalam neraca karena dokumen kepemilikan asli tidak dikuasai DJKN dengan rincian sebagai berikut.

Dokumen Kepemilikan	Jumlah Unit
Copy	395
Dokumen selain dokumen kepemilikan	881
Tidak ada keterangan	81
Jumlah	**1.357**

Terdapat potensi penambahan jumlah aset properti eks BPPN yang berasal dari *asset settlement* obligor PKPS dengan rincian sebagai berikut.

- 27 (dua puluh tujuh) bidang tanah seluas 575.315 m^2 yang terletak di Desa Sukadalem Kecamatan Kramat Watu (sekarang Kecamatan Waringin Kurung)

www.peraturan.go.id

Kabupaten Serang.

- 2 (dua) bidang tanah seluas 145.030 m^2 yang terletak di Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah.
- 41 (empat puluh satu) bidang tanah seluas 51.609 m^2 yang terletak di Billy dan Moon Park Kampung Tipar Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur.

Aset tersebut belum dapat disajikan dalam laporan keuangan per 31 Desember 2014 dikarenakan dokumen aset dimaksud masih dilakukan pengkajian lebih lanjut dan akan dilaporkan dalam neraca tahun 2015 setelah dilakukan penilaian.

2. Aset Inventaris Eks BPPN

Aset inventaris adalah aset eks BPPN dan Aset Eks Bank asal (Bank Beku Operasi (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) berupa aset Properti dan Non Properti. Nilai wajar Aset inventaris per 31 Desember 2014 sebesar Rp11.903.097.376 sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp13.760.890.622. Penurunan jumlah dan nilai aset ini disebabkan adanya koreksi pencatatan nilai aset inventaris pada tahun 2013.

3. Aset Nostro

Aset Nostro per 31 Desember 2014 sebesar Rp9.056.771.355 sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp478.622.000.000. Penurunan nilai Aset Nostro tersebut disebabkan karena berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi, sebagian besar Aset Nostro yang telah dilaporkan pada Neraca per 31 Desember 2013 belum memenuhi kriteria pengakuan aset di Neraca karena tidak didukung dengan dokumen kepemilikan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kriteria pengakuan aset diatur sebagai berikut.

- Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah;
- Mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- Diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Nilai aset Nostro yang tidak didukung dengan dokumen kepemilikan Per 31 Desember 2014 sebesar Rp475.348.708.774. Dokumen kepemilikan tersebut masih dalam penelusuran oleh DJKN dan dalam hal aset nostro tersebut telah memenuhi syarat pengakuan aset, aset nostro tersebut akan disajikan di Neraca.

4. Surat Berharga Eks BPPN

Surat berharga eks BPPN merupakan surat berharga yang belum *free and clear* pada saat pembubaran BPPN. Surat Berharga Eks BPPN disimpan di Kustodi Citibank berdasarkan *Custodial Agreement* tanggal 20 Juli 1999 antara BPPN dan Citibank. Setelah tugas-tugas BPPN diteruskan oleh Kementerian Keuangan, belum dilakukan pembaharuan Perjanjian Kustodi.

Nilai surat berharga eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Citibank per 31 Desember 2014 sebesar Rp417.767.615.047 sedangkan per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp412.347.466.749. Pencatatan nilai surat berharga eks BPPN berdasarkan nilai pasar surat berharga yang disajikan pada *Monthly Report* Citibank.

www.peraturan.go.id

5. Aset Saham Eks BPPN

Aset saham adalah aset berupa kepemilikan saham pada Perseroan yang sebagian besar aset saham berasal dari *asset settlement* BTO dan BBKU. Aset saham eks BPPN terbagi atas aset saham pada kustodi Citibank dan aset saham yang dikelola langung oleh DJKN. Aset Nilai aset saham eks BPPN per 31 Desember 2014 sebesar Rp366.554.273.467 sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp523.182.003.433. Penurunan nilai aset saham eks BPPN dikarenakan adanya penurunan nilai pasar saham pada tahun 2014.

Kementerian Keuangan telah meminta konfirmasi kepada para emiten penerbit saham. Namun hingga akhir periode penyusunan laporan keuangan per 31 Desember 2014, terdapat sembilan emiten yang memberikan tanggapan.

Terhadap aset saham eks BPPN yang status emitennya belum diketahui, Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara telah meminta informasi kepada Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kemenkum HAM atas status emiten tersebut, namun hingga akhir periode penyusunan laporan keuangan per 31 Desember 2014 belum ada tanggapan karena masih dalam proses penelitian dan verifikasi.

Nilai aset saham eks BPPN yang dikelola oleh Kustodi Citibank disajikan berdasarkan *Monthly Report* Citibank. Sedangkan nilai aset saham eks BPPN yang dikelola langsung oleh DJKN disajikan berdasarkan nilai saham terakhir yang telah disampaikan oleh para *emiten*.

8. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain Rp132,76 triliun

Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp132.760.986.324.644 dan Rp98.608.345.001.685 merupakan jenis aset selain yang telah dikelompokkan sebagai jenis Aset Lainnya di atas. Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp8.256.648.640.371 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp132.760.986.324.644 dikurangi penyisihan sebesar Rp23.550.469.430.844 dan penyusutan sebesar Rp100.953.868.258.429. Rincian Aset Lain-lain adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Instansi/Unit Terkait	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
1. K/L	31.660.041.596.556	29.188.116.027.267
2. BA BUN 999.03	13.234.602.981	13.234.602.981
3. BA BUN 999.04	23.451.899.643.724	21.720.308.915.133
4. BA BUN 999.99	77.635.810.481.383	47.686.685.456.304
Nilai Bruto	**132.760.986.324.644**	**98.608.345.001.685**
Penyisihan	(23.343.114.539.625)	(21.669.784.761.843)
Akumulasi Penyusutan	(23.056.226.819.196)	(14.585.989.492.322)
Nilai Bersih	**86.361.644.965.823**	**62.352.570.747.520**

Penjelasan Aset Lain-lain adalah sebagai berikut.

1. Aset Lain-lain yang berada di K/L sebesar Rp31.660.041.596.556 termasuk di dalamnya Aset lain-lain pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebesar Rp14.119.191.080.101. Aset lain-lain pada Kemdikbud tersebut merupakan Barang Milik

www.peraturan.go.id

Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kemdikbud serta dalam proses penghapusan dari BMN termasuk di dalamnya aset dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan hasil inventarisasi BPKP tahun 2001-2005 serta bantuan sosial yang menghasilkan aset senilai Rp13.193.650.190.283.

Rincian Aset Lain-lain di masing-masing K/L disajikan pada **Lampiran 30;**

2. Aset Lain-lain pada BA 999.03 sebesar Rp13.234.602.981 terdiri dari Aset eks Dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaporkan pada neraca Laporan Keuangan BA 999.03 per 31 Desember 2014. Dana bergulir pada Kementerian Kelautan merupakan bagian dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2004.
3. Aset Lain-lain pada BA BUN 999.04 sebesar Rp23.451.899.643.724. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp108.785.104.099 berasal dari nilai bruto sebesar Rp23.451.899.643.724 dikurangi dengan penyisihan sebesar Rp23.343.114.539.625. Rincian Aset Lain-lain pada BA 999.04 adalah sebagai berikut.
   - Aset Lainnya RDI sebesar Rp22.767.789.388.135 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	Pokok	Non Pokok	Jumlah
1. BUMN	9.172.958.107.542	6.082.830.178.359	15.255.788.285.901
2. BUMD	756.358.425.479	3.312.309.579.545	4.068.668.005.024
3. PEMDA	34.368.203.552	601.118.329.764	635.486.533.316
4. Lainnya			
- Nonperbankan (koperasi/proyek)	62.637.023.874	48.147.269.367	110.784.293.241
- Perbankan (Channeling BBO/BBKU)	10.946.955.097	24.217.344.649	35.164.299.746
- Perbankan (TSL BBO/BBKU)	652.761.400.570	1.893.550.233.915	2.546.311.634.485
- Perbankan (TSL)	63.564.351.164	52.021.985.258	115.586.336.422
Nilai Bruto	**10.753.594.467.278**	**12.014.194.920.857**	**22.767.789.388.135**
Penyisihan			(22.659.004.284.036)
Nilai Bersih			**108.785.104.099**

   - Aset Lainnya Kredit Program Non Subsidi sebesar Rp684.110.255.589, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
1. PIR Perkebunan	273.587.885.106	294.910.077.508
2. UPP Perkebunan	305.937.534.918	309.206.402.557
3. Peternakan	96.598.602.000	96.598.602.000
4. Kredit Listrik Pedesaan	2.066.512.000	2.066.512.000
5. Pengembangan Pendidikan Akuntansi	5.270.305.000	5.270.305.000
6. P3 Bali	649.416.565	664.010.814
Nilai Bruto	**684.110.255.589**	**708.715.909.879**
Penyisihan	(684.110.255.589)	(708.715.909.879)
Nilai Bersih	-	-

4. Aset Lain-lain pada BA 999.99 (Transaksi Khusus) sebesar Rp77.635.810.481.383 terdiri dari:

www.peraturan.go.id

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
1. PT PPA (Persero)	24.120.423.000	24.120.423.000
2. Aset eks PT PPA yang sudah dikembalikan ke Menteri Keuangan	5.038.259.262.655	5.098.915.229.333
3. Aset eks Pertamina	41.806.783.498.357	41.837.635.550.563
4. Aset Bekas Milik Asing/Cina	2.522.588.000	21.326.818.000
5. Aset BMN *Idle*	30.147.664.105	16.004.511.220
6. Aset PKP2B	30.733.062.020.898	688.260.190.000
7. Aset Lain-Lain DJKN selaku Pengelola Barang	915.024.368	422.734.188
Jumlah	**77.635.810.481.383**	**47.686.685.456.304**

1). Aset Lain-lain yang berasal dari PT PPA (Persero) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp24.120.423.000 dan Rp24.120.423.000 merupakan aset saham yang diserahkelolakan kepada PT PPA yang terdiri dari saham bank dan saham non bank.

2). Aset Lain-lain eks PT PPA sebesar Rp5.038.259.262.655 merupakan aset eks PT PPA yang masih berada di Kementerian Keuangan setelah perjanjian PT PPA tahap pertama diselesaikan. Mutasi aset tersebut selama tahun 2013 sebagai berikut.

No	Jenis Aset	Saldo Awal		Mutasi Tambah (Kurang)		Saldo Akhir	
		Unit	Jumlah (Rp)	Unit	Jumlah (Rp)	Unit	Jumlah (Rp)
1	Aset Properti	2.146	5.037.754.485.742	(50)	(72.651.546.000)	2.096	4.965.102.939.742
2	Surat Berharga	9	16.657.242.209	-	-	9	16.657.242.209
3	Aset Saham Non Bank	20	44.503.501.382	2	11.995.579.322	22	56.499.080.704
Jumlah		**2.175**	**5.098.915.229.333**	**(48)**	**(60.655.966.678)**	**2.127**	**5.038.259.262.655**

Penurunan jumlah dan penambahan nilai aset tersebut disebabkan oleh penjualan melalui lelang, penggunaan untuk keperluan pemerintahan melalui penetapan status penggunaan aset, koreksi penambahan jumlah, pelepasan hak atas aset dengan kompensasi, dan hasil penilaian aset.

Dari 2.096 aset properti senilai Rp4.965.102.939.742, 37 aset senilai Rp123.953.401.452 merupakan Aset Properti dengan dokumen kepemilikan *Covernote*.

Pemerintah berkomitmen dan terus melakukan upaya-upaya penelusuran sisa aset properti eks BPPN. Rincian Aset Lain-lain yang berasal dari PT PPA (Persero) disajikan pada **Lampiran 31.**

3). Aset eks Pertamina sebesar Rp41.806.783.498.357 merupakan nilai aset sebagai akibat penetapan Neraca Pembukaan PT Pertamina (Persero) Per 17 September 2003. Aset eks Pertamina per 31 Desember 2014 tersebut terdiri atas:

a. Aktiva Tetap LNG Badak-Bontang Rp16.301.977.513.835 dan LNG Arun-Lhokseumawe Rp11.029.729.944.488.

Perolehan aset LNG Arun dan LNG Badak berasal dari pinjaman sindikasi bank yang tertuang dalam *PSC Agreement* antara Pertamina (saat itu bertindak selaku

www.peraturan.go.id

Pemerintah) dengan PSC untuk pembangunan LNG Arun dan LNG Badak.

Aset kilang LNG Arun dan LNG Badak dioperasikan oleh PT Arun NGL dan PT Badak NGL di bawah pengawasan PT Pertamina (Persero) yang ditunjuk sebagai penanggung jawab sementara atas kedua aset LNG dimaksud sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008.

Nilai aset kilang LNG Badak per 31 Desember 2013 sebesar Rp16.301.977.513.835 berasal dari hasil penilaian DJKN per 12 November 2010 sebesar Rp16.302.447.401.562, ditambah hasil penilaian DJKN per 20 April 2012 sebesar Rp3.725.430.479, dikurangi penghapusan terhadap penilaian aset per 12 November 2010 pada 21 September 2012 (KMK Nomor 255/KM.6/2012) sebesar Rp3.212.808.000 dan penghapusan terhadap 50 item aktiva kilang LNG Badak yang telah laku terjual pada 24 Desember 2014 (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 478/KM.6/2014).

Terhadap aset eks Pertamina berupa aktiva kilang LNG Arun telah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh Tim Penilai dari Kantor Wilayah I DJKN Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe bersama dengan PT Arun NGL, dengan nilai wajar BMN sebesar Rp11.029.729.944.488 sebagaimana Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Negara Nomor: 01/TIMIP/KWL.01.DJKN/2011 tanggal 17 Maret 2011.

b. Aset eks PT Pertamina yang digunakan oleh Pertamina EP sebesar Rp12.824.018.245.034.

Terhadap BMN berupa aset eks Kontrak Kerja Sama yang dipergunakan oleh PT Pertamina EP dengan nilai perolehan per 17 September 2003 sebesar Rp16.242.092.564.001 telah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh Tim Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bersama dengan PT Pertamina EP, dengan hasil pelaksanaan inventarisasi dan penilaian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian DJKN	Nilai
Target IP (Nilai Perolehan aset per 17 Sept 2003)	16.242.092.564.001
Hasil Inventarisasi	13.692.173.347.220
Aset Tidak Ditemukan, Aset di Luar WKP, Aset FUPP, dan Lainnya	2.549.919.216.781
Nilai Wajar Hasil Penilaian DJKN	**12.824.018.245.034**

c. Aset eks PT Pertamina berupa delapan Aset Tetap sebesar Rp1.651.057.795.000.

Tim Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah melakukan penilaian wajar atas aset tetap eks PT Pertamina pada tahun 2012, dengan nilai wajar BMN sebagai berikut.

No	Lokasi Aset	Tanah (m^2)	Bangunan (m^2)	Nilai Perolehan (KMK 92/2008)	Penilaian DJKN (dalam ribuan Rp)	Tanggal Penilaian
1	Jl.Agus Salim 108 & 108A	1.057	837	9.293.188.000	35.037.558	17-9-2012
2	Jl.Surabaya 60 & 60Pav	1.468	357	9.410.537.000	36.505.456	17-9-2012
3	Jl.Terogong 33	105.557	N/A	207.375.000.000	1.233.433.545	10-8-2012
4	Jl.Dipati Ukur 31	751	N/A	2.131.297.000	2.991.056	31-10-2012
5	Jl.Abdul Muis 68	22.305	N/A	121.275.536.000	265.899.043	12-12-2012
6	Jl.Kapten Tendean	46.280	N/A	15.505.583.177	77.191.137	26-9-2012
Jumlah				364.991.141.177	1.651.057.795	

www.peraturan.go.id

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina Sebagai Barang Milik Negara, aset di Jalan Tanjung 34, Jakarta Pusat telah diperuntukkan menjadi BMN pada Kementerian Keuangan. Untuk itu, telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 95 Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng tanggal 10 September 2012 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, pemrosesan Penetapan Status Penggunaan BMN di Jalan Tanjung 34 Jakarta Pusat masih dalam pemrosesan oleh DJKN.

Aset di Jalan Brawijaya VIII No.30, Jakarta Selatan telah ditetapkan status penggunaannya sebagai BMN pada Kementerian ESDM dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KM.6/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

4) Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) sebesar Rp2.522.588.000 merupakan nilai ABMA/C yang akan dilepaskan kepada pihak ketiga setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan atas pelepasan ABMA/C kepada pihak ketiga dengan pembayaran kompensasi sebesar 50% dari nilai aset tersebut.

5) Aset Lain-Lain BMN *idle* sebesar Rp30.147.664.105 merupakan bagian dari BMN sehingga seluruh BMN *idle* dapat diakui sebagai BMN, sedangkan BMN *idle* yang dilaporkan dan disajikan dalam LKPP adalah BMN *idle* yang sudah diserahkan kepada Pengelola Barang. Pengguna Barang yang telah menyerahkan BMN *idle* kepada Pengelola Barang antara lain Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Mahkamah Agung RI, Badan Pusat Statistik, dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN).

6) Aset Perjanjian Kerja sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebesar Rp30.733.062.020.898 diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak. Dalam kontrak (Negara diwakili Perusahaan Negara Batubara) diatur bahwa seluruh barang dan peralatan yang diperoleh kontraktor dalam rangka kegiatan pengusahaan pertambangan batubara menjadi milik negara (Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok PKP2B). Rincian aset PKP2B pada tahun 2013-2014 adalah sebagai berikut.

No	PKP2B	Nilai Wajar (Rp)
1	PT Adaro Indonesia	5.132.267.475.424
2	PT Arutmin Indonesia	2.564.175.032.772
3	PT Berau Coal	1.683.270.043.875
4	PT Kaltim Prima Coal	16.695.075.707.472
5	PT Kideco Jaya Agung	4.473.466.774.168
6	PT Multi Harapan Utama	171.442.906.188
7	PT Tanito Harum	13.364.081.000
Jumlah[*)]		**30.733.062.020.899**

[*)] *selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp1 karena pembulatan*

Di samping aset sebesar Rp30.733.062.020.898 di atas, masih terdapat aset dari ketujuh kontraktor PKP2B di atas sebesar lebih kurang USD633,560,466 dan Rp432.845.875 yang belum disajikan dalam Neraca LKPP Tahun 2014 karena:

www.peraturan.go.id

a. Pedoman akuntansi dan pelaporan aset BMN yang berasal dari PKP2B masih dalam tahap penyusunan.

b. BMN dimaksud belum dilakukan inventarisasi dan penilaian.

7) Aset Lain-lain yang dikelola oleh DJKN selaku Pengelola Barang sebesar Rp915.024.368 terdiri dari aset Eks USAID, aset eks *Indonesian Debt Restructuring Agency* (INDRA), aset eks PROFI, aset eks GIZ-GGPAS, aset eks GIZ-DED dan Gratifikasi KPK.

9. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya Rp9,97 triliun

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp9.970.179.251.456 dan Rp7.968.396.497.466. Rincian Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
1. Yayasan Taman Mini Indonesia Indah	81.834.675.708	78.154.522.689
2. Otorita Asahan	379.194.760.119	1.194.758.813.300
3. Yayasan Gedung Veteran	11.091.032.127	11.786.424.283
4. Badan Amil Zakat	38.059.695.644	28.210.614.691
5. Badan Wakaf Indonesia	1.362.878.074	1.273.337.448
6. BP Dana Abadi Umat	2.609.392.585.779	2.454.141.693.320
7. SKK MIGAS	(200.106.602.515)	(639.765.931.972)
8. BAPERTARUM PNS	5.685.437.414.922	4.839.837.023.707
9. Otoritas Jasa Keuangan	1.363.912.811.598	-
Jumlah	**9.970.179.251.456**	**7.968.396.497.466**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2012 mulai Laporan Keuangan tahun 2012 Ekuitas Bersih dari UBL tersebut disajikan pada pos Aset Lainnya dari Ekuitas pada Unit Badan Lainnya.

Penjelasan Aset Lainnya dari Ekuitas pada Unit Badan Lainnyaadalah sebagai berikut.

1. Aset Lainnya yang berasal dari Yayasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sebesar Rp81.834.675.708 merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2014 sebesar Rp82.606.175.708 dikurangi nilai Tanah sebesar Rp771.500.000 karena telah disajikan pada Laporan Keuangan Sekretariat Negara.
2. Aset Lainnya yang berasal dari Otorita Asahan sebesar Rp379.194.760.119 merupakan total ekuitas bersih yang ada pada Otorita Asahan per tanggal 31 Desember 2014.
3. Aset Lainnya yang berasal dari Yayasan Gedung Veteran sebesar Rp11.091.032.127 merupakan total ekuitas bersih yang ada pada Yayasan Gedung Veteran per tanggal 31 Desember 2014.
4. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Amil Zakat Nasional sebesar Rp38.059.695.644 merupakan total ekuitas bersih yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional per tanggal 31 Desember 2014.
5. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia sebesar Rp1.362.878.074 merupakan total ekuitas bersih yang ada pada Badan Wakaf Indonesia per tanggal 31 Desember 2014.
6. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) sebesar

www.peraturan.go.id

Rp2.609.392.585.779 merupakan total ekuitas bersih yang ada pada BP DAU per tanggal 31 Desember 2014.

7. Nilai Aset Lainnya sebesar minus Rp200.106.602.515 yang berasal dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) merupakan total ekuitas bersih yang ada pada SKK MIGAS per 31 Desember 2014 sebesar minus Rp459.059.213.884 dikurangi ekuitas bersih BPMIGAS per tanggal 13 November 2012 sebesar Rp352.405.757.084 berdasarkan Laporan Keuangan BPMIGAS per 13 November 2012 *audited* dan penyesuaian atas pos Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja per 31 Desember 2014 sebesar Rp611.358.368.453 karena Laporan Keuangan SKK MIGAS mencantumkan kewajiban tersebut pada neraca.
8. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM PNS) per 31 Desember 2014 sebesar Rp5.685.437.414.922 merupakan total ekuitas bersih yang ada pada BAPERTARUM PNS per tanggal 31 Desember 2014. Dalam penyusunan Laporan Keuangan, BAPERTARUM PNS berpedoman kepada PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.
9. Nilai Aset Lainnya sebesar Rp1.*363.912*.811.598 yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan nilai ekuitas bersih OJK sebagai Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.822.989.979.548 dikurangi nilai ekuitas OJK sebagai UBL satker (BA BUN 999.08) per 31 Desember 2014 sebesar Rp459.077.167.950.

10. Aset Lainnya Penerusan Pinjaman

Aset Lainnya Penerusan Pinjaman Rp41,47 triliun

Saldo Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp41.470.978.243.696 dan Rp46.871.682.852.501 merupakan total pokok pinjaman Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca. Saldo Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2014 tersebut terdiri atas:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Penerusan Pinjaman kepada BUMN	40.119.946.846.326	45.264.521.113.738
Penerusan Pinjaman kepada BUMD	258.144.705.662	551.668.312.526
Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah	657.765.377.769	517.664.067.960
Penerusan Pinjaman Lainnya	417.243.909.188	511.018.890.082
Kredit Program	17.877.404.751	26.810.468.195
Nilai Bruto	**41.470.978.243.696**	**46.871.682.852.501**
Penyisihan	(207.354.891.219)	(234.358.414.263)
Nilai Bersih	**41.263.623.352.477**	**46.637.324.438.238**

C.2.31. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Aset Lainnya

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Aset Lainnya Rp23,55 triliun

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp23.550.469.430.844 dan Rp21.904.143.176.106 terdiri dari:

www.peraturan.go.id

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
1. Penerusan Pinjaman	207.354.891.219	234.358.414.263
2. Aset Lain-lain	23.343.114.539.625	21.669.784.761.843
Jumlah	**23.550.469.430.844**	**21.904.143.176.106**

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Aset Lainnya tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Aset Lainnya.

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Penerusan Pinjaman sebesar Rp207.354.891.219 merupakan Penyisihan Penerusan Pinjaman pada BA 999.04.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Aset Lain-lain sebesar Rp23.343.114.539.625 pada BA 999.04 yaitu Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Aset Lain Kredit Program sebesar Rp684.110.255.589 dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Aset Lain RDI sebesar Rp22.659.004.284.036.

C.2.32.Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Rp103,95 triliun

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp103.953.838.286.596 dan Rp68.489.052.477.854 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
1. K/L	(9.465.479.728.480)	(7.930.551.486.227)
2. BUN	(94.488.358.558.116)	(60.558.500.991.627)
Jumlah	**(103.953.838.286.596)**	**(68.489.052.477.854)**

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L sebesar Rp9.465.479.728.480 terdiri dari Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp198.281.892.011 dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp9.267.197.836.469.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN sebesar Rp94.488.358.558.116 terdiri dari:

- Akumulasi Penyusutan Aset KKKS sebesar Rp80.699.329.575.389 yang merupakan akumulasi penyusutan aset KKKS non tanah yang terdiri dari akumulasi penyusutan Harta Benda Modal (HBM) sebesar Rp80.690.242.712.076 dan akumulasi penyusutan Harta Benda Inventaris (HBI) sebesar Rp9.086.863.313. Nilai Rp80.699.329.575.389 tersebut terdiri dari akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp53.903.062.985.532 dan penyusutan tahun 2014 sebesar Rp26.796.266.589.857. Adapun HBI disajikan dan disusutkan sejak tahun 2013.
- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp13.789.028.982.727 merupakan Akumulasi Penyusutan Aset BMN *Idle* sebesar Rp1.748.535.420, Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina sebesar Rp8.446.481.497.887, dan Akumulasi Penyusutan Aset PKP2B sebesar Rp5.340.798.949.420.

C.2.33. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK Rp2,68 triliun

Utang PFK per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp2.679.231.919.973 dan Rp348.097.673.274 merupakan selisih antara Penerimaan Potongan PFK dan

www.peraturan.go.id

Pengeluaran Pembayaran kepada pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2013	Penyesuaian	TransaksiTahun 2014		31 Desember 2014
			Penerimaan	Pengeluaran	
PFK 10% Gaji PNS	168.104.141.103		20.247.519.598.732	23.985.131.202.295	(3.569.507.462.454)
PFK 2% Gaji Terusan	(9.176.628.740)		4.279.525.594		(4.897.103.146)
PFK 2% Iuran Kes. Pemda	182.151.327.492		4.033.648.993.870		4.215.800.321.362
PFK 2% As. Bidan/Dokter PTT	(212.272.489)		14.363.626.692		14.151.354.203
PFK 2% Askes TNI/Polri	1.080.347.216		214.220.643		1.294.567.859
Sub Total PFK *)	**341.946.914.588**		**24.300.025.965.531**	**23.985.131.202.295**	**656.841.677.824**
PFK DTP Migas	-		45.600.000		45.600.000
PFK Lain-Lain	3.270.994.977	(107.751.834)	375.919.890.760	378.556.308.985	742.328.586
PFK Bulog	2.879.763.709		278.134.215.648	255.700.458.570	25.313.520.787
PFK Pajak Rokok	-		9.904.366.379.135	7.908.077.586.359	1.996.288.792.776
JUMLAH	**348.097.673.274**	**(107.751.834)**	**34.858.492.051.074**	**32.527.465.556.209**	**2.679.231.919.973**

*) Nilai pengeluaran PFK sebesar Rp23.985.131.202.295 merupakan pengembalian PFK sebagai pengurang kewajiban untuk jenis PFK sebagai berikut : PFK 10% Gaji PNS PFK 2% Gaji Terusan, PFK 2% Iuran Kesehatan Pemda, PFK 2% Asuransi Bidan/Dokter PTT, dan PFK 2% Askes TNI/Polri.

Terhadap saldo awal tahun 2014 PFK lain-Lain sebesar Rp3.270.994.977 terdapat koreksi sebesar minus Rp107.751.834 disebabkan kesalahan pencatatan pada penerimaan PFK lain-lain tahun 2013.

C.2.34. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp37,98 triliun

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp37.980.198.606.742 dan Rp55.380.161.243.832. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban Pemerintah atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah lainnya kepada pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
K/L	17.498.669.889.631	23.299.768.926.917
BUN	20.481.528.717.111	32.080.392.316.915
Jumlah	**37.980.198.606.742**	**55.380.161.243.832**

1. Utang kepada Pihak Ketiga yang berada di K/L sebesar Rp17.498.669.889.631 antara lain berupa dana pihak ketiga yang dikelola/dikuasai oleh K/L, dana yang masih harus dibayarkan atas penyelesaian pekerjaan gedung dan pembelian peralatan dan mesin, honor/hak pihak ketiga yang belum dibayarkan, dan tertundanya pembayaran tagihan dari pihak ketiga.

   Utang kepada Pihak Ketiga yang berada pada K/L dengan nilai cukup signifikan, antara lain:

   a. Kementerian Pertahanan sebesar Rp7.280.060.285.542 sebagian besar merupakan kewajiban kepada pihak ketiga atas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP).

   b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.961.036.693.875 sebagian besar merupakan Beasiswa Miskin (BSM), dana *blockgrant* yang belum disalurkan, hak pegawai/pihak ketiga.

   c. Kementerian Agama sebesar Rp2.243.984.194.207 sebagian besar merupakan aset

www.peraturan.go.id

bersih Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan hak pihak ketiga.

d. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.286.582.903.529 sebagian besar merupakan utang Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) kepada penyedia jasa, tagihan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio TV Digital.

Rincian utang kepada pihak ketiga dapat dilihat pada **Lampiran 32.**

2. Utang kepada pihak ketiga yang berada di BUN sebesar Rp20.481.528.717.111, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
BA 999.05	15.756.430.496.044	24.619.657.177.709
BA 999.08	18.854.413.733	49.746.677.557
BA 999.99	3.672.784.006.081	6.290.662.724.766
Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)	1.033.459.801.253	1.120.325.736.883
Jumlah	**20.481.528.717.111**	**32.080.392.316.915**

a. Utang pada BA 999.05 (Utang Transfer ke Daerah) merupakan utang kekurangan Transfer ke Daerah Dana Bagi Hasil yang belum dibayarkan kepada pemda penerima. Rincian Utang Transfer ke Daerah dan kekurangan dana bagi hasil yang belum dibayarkan sebesar Rp15.756.430.496.044, adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Jenis Kewajiban	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
1	Kewajiban Diestimasi DBH Pajak dan SDA TA 2013	656.189.024.989	3.428.144.204.605
2	Kurang Bayar Tunjangan Profesi Guru	-	4.310.747.365.410
3	Kurang Bayar DBH PPh Perorangan	1.232.460.519.710	1.254.285.753.184
4	Kurang Bayar DBH BP PBB	56.590.468.961	9.809.769.544
5	Kurang Bayar DBH PBB	1.866.156.795.238	222.619.306.573
6	Kurang Bayar Cukai Hasil Tembakau TA 2012	-	124.074.406.742
7	Kurang Bayar DBH Minyak Bumi TA 2012	-	357.460.669.187
8	Kurang Bayar DBH Minyak Bumi TA 2013	4.367.227.054.896	6.481.707.551.896
9	Kurang Bayar DBH Gas Bumi TA 2013	4.604.434.018.215	6.484.175.551.215
10	Kurang Bayar DBH Pertambangan Umum TA 2008-2012	-	924.546.388.182
11	Kurang Bayar DBH Pertambangan Umum TA 2013	2.353.489.946.297	364.803.270.711
12	Kurang Bayar DBH Panas Bumi	251.514.582.221	254.898.057.709
13	Kurang Bayar DBH Kehutanan TA 2006-2012	5.130.763.165	48.740.398.893
14	Kurang Bayar DBH Kehutanan TA 2013	332.075.952.352	322.483.113.858
15	Kurang Bayar DBH Perikanan TA 2013	31.161.370.000	31.161.370.000
	Total	**15.756.430.496.044**	**24.619.657.177.709**

b. Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.08 (Belanja Lain-lain) sebesar Rp18.854.413.733 terdiri dari:

(1) Utang kepada Pihak Ketiga pada Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp920.090.800 merupakan utang pembayaran *Completion Center* rangkaian pengadaan pesawat kepresidenan BBJ-2.

(2) Utang kepada Pihak Ketiga dengan akun penyeimbang Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2014 sebesar Rp17.934.322.933 terdapat pada satuan

www.peraturan.go.id

kerja Otoritas Jasa Keuangan merupakan LS yang masuk ke bendahara namun belum diselesaikan pembayarannya oleh OJK.

c. Utang kepada Pihak Ketiga pada BA 999.99 sebesar Rp3.672.784.006.081 terdiri dari:

(1) Kewajiban yang terkait dengan kegiatan usaha panas bumi dari rekening panas bumi sebesar Rp659.697.761.303, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
PT Pertamina (Persero)	58.418.593.666	9.658.905.211
Chevron Geothermal Salak, Ltd	184.154.408.367	63.675.288.738
Chevron Geothermal Indonesia, Ltd	135.732.998.573	77.397.048.537
Star Energy Geothermal (Wayang Windu), Ltd	281.391.760.696	192.618.443.708
Jumlah[*)]	**659.697.761.302**	**343.349.686.194**

[*)] *selisih antara data neraca dengan rincian kewajiban sebesar Rp1 karena pembulatan*

(2) Kewajiban terkait Rekening Migas (Nomor 600.000411.980) per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.981.388.010.143 merupakan estimasi kewajiban kontraktual Pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja sama dengan KKKS berupa *DMO fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB. Total rekening 600.000411.980 per 31 Desember 2014 sebesar Rp3.832.193.507.447. Berdasarkan hasil verifikasi, jumlah yang diestimasi akan dibayarkan kepada KKKS adalah sebesar Rp2.981.388.010.143 dan sisanya sebesar Rp850.805.497.304 yang sudah dapat diperhitungkan menjadi hak Negara disajikan sebagai Pendapatan yang Ditangguhkan. Rincian kewajiban Pemerintah kepada KKKS adalah:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Fee Penjualan PT Pertamina (Persero)	-	1.577.748.774.268
DMO Fee dan *Fee* lainnya	593.243.646.116	2.843.333.323.317
Reimbursment PPN	2.361.722.988.183	1.246.510.102.763
PDRD	26.421.375.844	12.930.161.673
Anggaran SKK MIGAS	-	266.783.889.699
Jumlah	**2.981.388.010.143**	**5.947.306.251.720**

(3) Utang kepada Pihak Ketiga yang berasal dari kelebihan penerimaan dari pembayaran jasa giro atas pelaksanaan *Treasury Notional Pooling* sebesar Rp214.722.778 dari empat bank, yaitu Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BPD Aceh, dan Bank BPD NTB.

(4) Utang kepada Pihak Ketiga berupa kekurangan pembayaran kontribusi *trustfund* pada organisasi internasional sebesar USD6.759,34 ekuivalen Rp84.086.190. Utang ini terdiri dari kekurangan pembayaran akibat biaya transaksi bank dan kekurangan pembayaran akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD dengan rincian sebagai berikut.

www.peraturan.go.id

No	Organisasi Internasional	Tagihan	Pembayaran	Selisih	Selisih (Rp) per 31/12/2014
1	ISFD	3.115.517,94	3.115.500,44	17,50	217.700,00
2	OFID	232.258,50	232.231,00	27,50	342.100,00
3	AAHTF	48.832,00	48.814,50	17,50	217.700,00
4	AMRO	480.339,00	480.321,50	17,50	217.700,00
5	APTERR	107.500,00	107.449,16	50,84	632.449,60
6	Fasilitas KSS	1.500.000,00	1.499.980,50	19,50	242.580,00
7	GCF	250.000,00	244.419,50	5.580,50	69.421.420,00
8	AMTF	45.000,00	43.971,50	1.028,50	12.794.540,00
Jumlah		**5.779.447,44**	**5.772.688,10**	**6.759,34**	**84.086.189,60**

(5) Utang kepada Pihak Ketiga berupa tagihan dari PT SMI (Persero) terkait penugasan PT SMI dalam rangka fasilitasi penyiapan proyek KPS SPAM Umbulan dan Kereta Bandara Soekarno-Hatta senilai Rp31.399.425.667.

d. Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) sebesar Rp1.033.459.801.253 merupakan utang yang timbul kepada pihak ketiga karena terjadinya Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga yang antara lain karena kesalahan rekening yaitu retur SP2D, penerimaan non anggaran pihak ketiga karena kesalahan sistem perbankan serta dari koreksi pemindahbukuan. Perhitungan Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) per 31 Desember 2014 berasal saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.120.325.736.883, disesuaikan dengan mutasi transaksi akun non anggaran sebagai berikut.

(1) Perhitungan retur sebesar minus Rp84.441.632.473.

(2) Kesalahan sistem perbankan sebesar minus Rp470.480.773.

(3) Koreksi pemindahbukuan sebesar Rp 763.921.355.

(4) Jurnal koreksi Utang Pihak Ketiga oleh KPPN sebesar minus Rp2.717.743.739.

www.peraturan.go.id

C.2.35. Utang Biaya Pinjaman

Utang Biaya Pinjaman Rp33,88 triliun

Jumlah Utang Biaya Pinjaman per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp33.885.294.867.579 dan Rp27.668.104.388.520 merupakan utang bunga yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Utang Bunga Obligasi dan Bunga Pinjaman DN	31.306.166.218.521	24.977.578.068.784
Utang Bunga Pinjaman LN	2.579.128.649.058	2.690.526.319.736
Jumlah	**33.885.294.867.579**	**27.668.104.388.520**

Penjelasan masing-masing Utang Bunga adalah sebagai berikut.

Utang Bunga Obligasi dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp31,31 triliun

1. Utang Bunga Obligasi dan Bunga Pinjaman Dalam Negeri (DN) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp31.306.166.218.521 dan Rp24.977.578.068.784 dapat dirinci sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Fixed Rate Bonds	19.945.309.628.657	15.418.502.075.720
ORI	197.084.588.580	151.377.994.140
SBSN	1.610.124.698.685	1.304.713.380.110
Variable Rate Bonds	800.743.183.012	765.632.174.544
Surat Utang BI	78.686.980.949	79.692.411.446
SUN Valas	8.629.572.699.862	7.235.193.242.237
Pinjaman Dalam Negeri	37.703.699.621	22.466.790.587
SBR	6.940.739.155	-
Jumlah	**31.306.166.218.521**	**24.977.578.068.784**

Rincian lebih lanjut Utang Bunga Obligasi dapat dilihat pada **Lampiran 33.**

Utang Bunga Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp2,58 triliun

2. Utang Bunga Pinjaman Luar Negeri per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp2.579.128.649.058 dan Rp2.690.526.319.736 dapat dirinci sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Utang Bilateral	1.042.531.957.194	1.141.845.218.799
Kredit Komersial	152.643.414.246	80.223.260.005
Kredit Ekspor	266.276.556.907	319.447.616.924
Multilateral	1.117.676.720.710	1.149.010.224.007
Jumlah[*)]	**2.579.128.649.058**	**2.690.526.319.735**

*) *selisih antara data neraca dengan rincian utang bunga pinjaman luar negeri sebesar Rp1 karena pembulatan*

C.2.36. Utang Subsidi

Utang Subsidi Rp64,43 triliun

Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp64.433.845.108.042 dan Rp71.683.090.732.971, sehingga Utang Subsidi tahun 2014 mengalami penurunan sebesar Rp7.249.245.624.929 atau 10,11% persen dari TA 2013. Utang subsidi TA 2013 terdiri dari:

www.peraturan.go.id

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Utang Subsidi PSO yang Belum Disalurkan (Kemkominfo, Kemenhub, dan Kemensos)	1.981.172.244.004	909.325.891.030
Utang Subsidi Listrik	9.000.001.169.000	21.793.928.830.995
Utang Subsidi JBT dan LPG	40.886.072.470.039	46.915.727.232.666
Utang Subsidi Bunga	3.764.211.559	60.676.232.108
Utang Subsidi pada Kementan (Pupuk dan Benih)	12.106.877.455.280	2.003.432.546.172
Utang Subsidi IJP KUR	455.957.558.160	-
Jumlah	**64.433.845.108.042**	**71.683.090.732.971**

Penjelasan masing-masing Utang Subsidi adalah sebagai berikut.

1. Utang Subsidi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp5.297.290.002 merupakan utang pencairan Dana Cadangan subsidi/PSO LKBN ANTARA TA 2014.
2. Utang Subsidi pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp594.691.112.797 terdiri dari utang subsidi/PSO kepada PT PELNI sebesar Rp214.273.420.945 dan utang Subsidi/PSO kepada PT KAI sebesar Rp380.417.691.852. Utang Subsidi sebesar Rp594.691.112.797 tersebut akan diselesaikan dengan menggunakan dana yang telah ditempatkan di rekening Dana Cadangan subsidi/PSO atas nama Menteri Keuangan.
3. Utang Subsidi pada Kementerian Sosial sebesar Rp1.381.183.841.205 merupakan utang subsidi pangan berupa kurang bayar Pemerintah atas penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah TA 2013 berdasarkan hasil audit BPK RI sebesar Rp543.813.273.240 dan pencairan Dana Cadangan Subsidi/PSO Pangan TA 2014 sebesar Rp837.370.567.965.
4. Utang Subsidi pada Kementerian Keuangan sebesar Rp49.889.837.850.598, terdiri dari:
   a. Utang Subsidi Listrik kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp9.000.001.169.000 terdiri atas pengakuan utang subsidi listrik atas kurang bayar hasil audit BPK TA 2014 sebesar Rp2.000.001.169.000 yang merupakan sisa pagu anggaran subsidi listrik tahun 2014 dan pengakuan utang subsidi listrik atas kurang bayar hasil audit BPK TA 2014 karena telah dianggarkan pada APBN-P TA 2015 sebesar Rp7.000.000.000.000.

   b. Utang Subsidi JBT dan LPG kepada pihak ketiga sebesar Rp40.886.072.470.039. Adapun rincian utang tersebut adalah:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Saldo utang kekurangan pembayaran subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg TA 2014 kepada PT Pertamina (Persero)	40.880.833.772.299	-
Saldo utang kurang bayar Subsidi BBM dan LPG 3 Kg TA 2012 berdasarkan hasil audit BPK RI	547.141	46.910.488.534.926
Saldo utang atas kekurangan bayar PPN Tahun 2011 kepada PT Petronas Niaga Indonesia.	5.238.150.599	5.238.697.740
Jumlah	**40.886.072.470.039**	**46.915.727.232.666**

   c. Utang Subsidi Bunga sebesar Rp3.764.211.559.

www.peraturan.go.id

5. Utang Subsidi pada Kementerian Pertanian sebesar Rp12.106.877.455.280 terdiri dari:
   a. Dana *escrow account* TA 2014 senilai Rp1.197.141.755.280 terdiri dari subsidi pupuk sebesar Rp1.032.297.753.405 dan subsidi benih sebesar Rp164.844.001.875; dan
   b. Pengakuan utang subsidi pupuk atas kurang bayar hasil audit BPK TA 2012 dan TA 2013 karena telah dianggarkan pada APBN-P TA 2015 sebesar Rp10.909.735.700.000.
6. Utang Subsidi pada Kementerian KUKM sebesar Rp455.957.558.160 merupakan sisa pagu anggaran IJP KUR TA 2014.

Utang subsidi sebesar Rp64.433.845.108.042 belum termasuk kekurangan pembayaran atas penyaluran barang/jasa bersubsidi yang nilainya melampaui pagu APBN TA 2014, walaupun secara volume realisasi penyaluran barang/jasa bersubsidi tidak melampaui kuota penugasan yang ditetapkan dalam APBN. Adapun kekurangan pembayaran tersebut terdiri dari:

Uraian	Nilai (Rp)
Subsidi Listrik	10.280.860.092.654
Subsidi Pupuk	7.445.858.983.729
Subsidi Pangan Program Raskin	1.510.250.368.941
Subsidi Bunga Kredit Program	198.101.226.723
Subsidi IJP KUR	714.598.034.707
Jumlah	**20,149,668,706,754.00**

C.2.37. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp149,13 triliun

Jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp149.134.908.708.957 dan Rp162.251.340.131.620 merupakan utang Pemerintah yang akan dibayar atau jatuh tempo satu tahun setelah tanggal neraca, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Bagian Lancar Utang Luar Negeri:		
BA 999.01	63.383.702.005.703	65.945.678.362.356
Utang pada Kemenlu	16.973.950.900	-
Subtotal	**63.400.675.956.603**	**65.945.678.362.356**
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri:		
BA 999.01 - Surat Berharga Negara (SBN)	85.385.951.190.052	95.970.590.002.492
BA 999.01 - Pinjaman Dalam Negeri	347.681.562.302	334.710.446.772
Utang pada Kemendikbud	600.000.000	361.320.000
Subtotal	**85.734.232.752.354**	**96.305.661.769.264**
Jumlah	**149.134.908.708.957**	**162.251.340.131.620**

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri (BA 999.01) menurut *lender* dirinci sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Bilateral	27.345.562.949.158	28.761.588.568.679
Multilateral	16.836.698.102.471	20.294.613.241.640
Export Credit	15.319.599.283.630	14.294.039.624.597
Commercial Credit	3.881.841.670.443	2.595.436.927.440
Jumlah[*)]	**63.383.702.005.702**	**65.945.678.362.356**

[*)] *selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp1 karena pembulatan*

www.peraturan.go.id

Bagian Lancar SBN yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis SBN	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
I. Fixed Rate Bonds		
Nominal	17.278.032.000.000	15.308.602.000.000
Unamortized Premium (Discount)	12.775.407.000	(49.526.863.000)
Nilai bersih (nilai buku)	17.290.807.407.000	15.259.075.137.000
II. Variable Rate		
Nominal	16.600.335.000.000	9.411.226.000.000
Unamortized Premium (Discount)	-	-
Nilai bersih (nilai buku)	16.600.335.000.000	9.411.226.000.000
III. Surat Utang Pemerintah kepada BI		
Nominal yg harus diamortisasi	6.411.706.589.052	5.815.606.883.492
Accrued Indexation	-	-
Nilai bersih (nilai buku)	6.411.706.589.052	5.815.606.883.492
IV. ORI		
Nominal	12.676.745.000.000	11.000.000.000.000
Unamortized Premium (Discount)	-	-
Nilai bersih (nilai buku)	12.676.745.000.000	11.000.000.000.000
V. ZERO COUPON		
Nominal	-	-
Unamortized Premium (Discount)	-	-
Nilai bersih (nilai buku)	-	-
VI. SBSN		
Nominal	19.960.505.000.000	18.532.410.000.000
Unamortized Premium (Discount)	8.201.908.000	-
Nilai bersih (nilai buku)	19.968.706.908.000	18.532.410.000.000
Subtotal SBN Denominasi Rupiah	**72.948.300.904.052**	**60.018.318.020.492**
VIII. SUN dalam Valas (USD)		
Nominal	12.440.000.000.000	28.034.700.000.000
Unamortized Premium (Discount)	(2.349.714.000)	(5.278.018.000)
Nilai bersih (nilai buku)	12.437.650.286.000	28.029.421.982.000
IX. SBSN dalam Valas (USD)		
Nominal	-	7.922.850.000.000
Unamortized Premium (Discount)	-	-
Nilai bersih (nilai buku)	-	7.922.850.000.000
Subtotal SBN Denominasi Valas	**12.437.650.286.000**	**35.952.271.982.000**
Total Bagian Lancar SBN (Rupiah dan Valas)	**85.385.951.190.052**	**95.970.590.002.492**

Catatan:

- *Fixed Rate Bond terdiri dari 1 seri, yaitu FR0027;*
- *ORI terdiri dari 1 seri, yaitu ORI009;*
- *Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada BI terdiri dari 4 seri, yaitu SU-002, SU-004, SU-007, dan SRBI-01;*
- *Variable Rate Bond terdiri dari 2 seri VR0020 dan VR0021; dan*
- *SUN Valas (USD) terdiri dari 2 seri, yaitu RI0015;*

Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dapat dilihat dalam **Lampiran 34.**

C.2.38. Utang SBN Jangka Pendek

Utang SBN Jangka Pendek Rp49,58 triliun

Jumlah SBN Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp49.583.393.774.000 dan Rp41.722.185.956.000, merupakan instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan dengan diskonto yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun. SBN Jangka Pendek ini terdiri dari utang Surat Perbendaharaan Negara (SPN) sebesar Rp38.972.079.186.000 dan SPN Syariah Rupiah sebesar Rp10.611.314.588.000. Rincian

www.peraturan.go.id

SBN Jangka Pendek dapat dilihat dalam **Lampiran 35.**

C.2.39. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp1,36 triliun

Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp1.358.873.118.978 dan Rp161.408.703.427 merupakan kewajiban Pemerintah atas kelebihan pembayaran pendapatan yang dilakukan oleh penyetor namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar oleh Pemerintah dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
SPM-KP yang belum diterbitkan SP2D-nya dan pengembalian pungutan ekspor yang belum direalisasikan oleh eksportir pada Kementerian Keuangan	1.354.558.135.214	134.250.995.588
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Kementerian ESDM	4.314.983.764	22.113.614.119
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-	5.044.093.720
Jumlah	**1.358.873.118.978**	**161.408.703.427**

C.2.40. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima Dimuka Rp9,78 triliun

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp9.782.484.473.823 dan Rp8.454.347.000.882 merupakan pendapatan yang sudah masuk ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Sebagian besar saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2013 berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp8.409.946.313.230 yang merupakan pendapatan terkait izin spektrum/frekuensi. Rincian Pendapatan Diterima di Muka adalah sebagaimana pada **Lampiran 32**.

C.2.41. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp3,47 triliun

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp3.470.723.597.386 dan Rp418.095.877.428, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
K/L	63.258.861.001	172.508.528.868
BUN	3.407.464.736.385	245.587.348.560
Jumlah	**3.470.723.597.386**	**418.095.877.428**

1. Utang Jangka Pendek Lainnya yang berada di K/L sebesar Rp63.258.861.001 antara lain berupa pungutan pajak yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran ke kas negara, utang pajak yang bersumber dari non APBN, utang satker BLU dan Perguruan Tinggi yang masih harus dibayar, dan lain-lain. Utang Jangka Pendek Lainnya di K/L yang nilainya signifikan antara lain pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp22.806.909.345 merupakan utang rumah sakit yang masih harus dibayar dan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp26.362.170.728 merupakan utang

www.peraturan.go.id

pajak dan belanja barang/jasa yang belum dibayar.

Rincian utang jangka pendek lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 32.**

2. Utang Jangka Pendek Lainnya yang berada di BUN sebesar Rp3.407.464.736.385 merupakan Utang Jangka Pendek Lainnya pada BA 999.08 dan BA 999.99 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)
a. Pajak yang Belum Disetor ke Kas Negara pada OJK	9.211.274.747
b. Kewajiban kepada PT Taspen bulan Desember 2014	13.711.576.588
c. Kewajiban kepada PT Taspen atas *Unfunded Past Service Liability* untuk skema tahap II tahun 2015	3.000.000.000.000
d. Utang Kepada PT Taspen atas kekurangan pembayaran	28.223.556
e. Kewajiban Kepada Bulog (selisih harga beras TNI/POLRI/PNS vertikal tahun 2012 s.d. 2013)	8.008.261.284
f. Utang PPN BI RTGS	1.505.400.210
g. Utang kepada PT Asabri	375.000.000.000
Jumlah	**3.407.464.736.385**

a. Pajak yang Belum Disetor ke Kas Negara pada OJK sebesar Rp9.211.274.747 telah disetor ke kas Negara melalui Surat Setoran Pajak.

b. Kewajiban kepada PT Taspen bulan Desember 2014 sebesar Rp13.711.576.588 merupakan kekurangan pencairan belanja pensiun bulan Desember 2014 yang dikelola PT Taspen (Persero). Utang ini telah dibayarkan pada tanggal 28 Januari 2015.

c. Kewajiban kepada PT Taspen atas *Unfunded Past Service Liability* untuk skema tahap II tahun 2015 sebesar Rp30.000.000.000.000 telah dibayarkan pada tanggal 2 Februari 2015.

d. Utang Kepada PT Taspen atas kekurangan pembayaran untuk kontribusi APBN atas belanja pegawai eks Kementerian Perhubungan pada PT KAI yang dibayarkan kembali tahun 2013 sebesar Rp 28.223.556 akan dibayarkan pada tahun 2015.

e. Kewajiban Kepada Bulog yang merupakan selisih harga beras TNI/POLRI/PNS vertikal tahun 2012 s.d. 2013 sebesar Rp8.008.261.284 belum dapat dibayarkan karena belum teralokasi APBN TA 2014.

f. Utang PPN BI RTGS RTGS sebesar Rp1.505.400.210 belum dibayarkan dan menunggu alokasi anggaran.

g. Utang kepada PT Asabri atas UPSL Program Manfaat Santunan Asuransi / THT PT Asabri (Persero) Tahun 2001-2002 sebesar Rp375.000.000.000 akan dibayarkan tahun 2015.

C.2.42. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan

Utang Jangka Panjang DN Perbankan Rp2,88 triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp2.876.377.932.292 dan Rp1.939.381.089.664. Utang tersebut merupakan utang dalam negeri perbankan yang terdiri dari BUMN dan pinjaman dari

www.peraturan.go.id

perusahaan daerah yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca. Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan adalah sebagai berikut.

Jenis Utang	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
BJB	690.108.526.295	493.593.122.359
Bank Mandiri	1 .179.937.852.661	880.763.750.932
PT. BNI (Persero)	256.844.954.304	342.459.939.138
PT. BRI (Persero)	166.923.207.927	222.564.277.235
Bank Jateng	97.177.180.834	-
Bank DKI	485.386.210.270	-
Jumlah[*)]	**2.876.377.932.291**	**1.939.381.089.664**

*) *selisih antara data neraca dengan rincian utang sebesar Rp1 karena pembulatan*

C.2.43. Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri Rp1.794,04 triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp1.794.044.591.049.158 dan Rp1.523.750.834.782.215 merupakan posisi utang dalam bentuk SBN yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN per 31 Desember 2014 ini terdiri dari SBN Berdenominasi dalam rupiah sebesar Rp1.351.159.342.468.159 dan SBN Internasional (valas) sebesar Rp442.885.248.581.000

Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis SBN	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
I. Fixed Rate Bonds		
Principle Outstanding	874.587.601.000.000	692.082.601.000.000
Unamortized Premium (Discount)	2.736.764.734.000	3.624.803.547.000
Nilai Bersih (Nilai Buku)	877.324.365.734.000	695.707.404.547.000
II. ORI		
Principle Outstanding	41.421.165.000.000	32.882.000.000.000
Unamortized Premium (Discount)	-	-
Nilai Bersih (Nilai Buku)	41.421.165.000.000	32.882.000.000.000
III. Zero Coupon Bonds		
Principle Outstanding	-	-
Unamortized Premium (Discount)	-	-
Nilai Bersih (Nilai Buku)	-	-
IV. Variable Rate Bonds		
Principle Outstanding	96.743.372.000.000	113.343.707.000.000
Unamortized Premium (Discount)	-	-
Nilai Bersih (Nilai Buku)	96.743.372.000.000	113.343.707.000.000
V. Surat Utang Pemerintah kepada BI		
Principle Outstanding	222.642.224.733.159	229.053.931.322.211
Unamortized Premium (Discount)	-	-
Nilai Bersih (Nilai Buku)	222.642.224.733.159	229.053.931.322.211
VI. SBSN		
Principle Outstanding	113.205.220.000.000	91.541.380.000.000
Unamortized Premium (Discount)	(2.567.889.999.000)	(1.217.940.133.000)
Nilai Bersih (Nilai Buku))	110.637.330.001.000	90.323.439.867.000
VI. SBR		
Principle Outstanding	2.390.885.000.000	-
Unamortized Premium (Discount)	-	-

www.peraturan.go.id

Nilai Bersih (Nilai Buku))	2.390.885.000.000	-
Subtotal SBN Denominasi Rupiah	**1.351.159.342.468.159**	**1.161.310.482.736.211**
VII. Obligasi Negara dalam Valas		
Principles Outstanding	367.625.398.715.612	291.280.412.028.745
Accrued Indexation	76.550.221.284.388	72.162.197.971.255
Net Unamortized Premium (Discount)	(1.290.371.419.000)	(1.002.257.954.000)
Subtotal Obligasi Negara dalam (Valas)	**442.885.248.581.000**	**362.440.352.046.000**
Total SBN Jangka Panjang*)	**1.794.044.591.049.159**	**1.523.750.834.782.211**

*) *selisih antara data neraca dengan rincian utang sebesar Rp1 dan Rp4 karena pembulatan*

Catatan:

- *Fixed Rate Bonds* terdiri dari 39 seri dengan masa jatuh tempo tahun 2016 – 2044.
- ORI terdiri dari 2 seri dengan masa jatuh tempo tahun 2016 – 2017.
- *Variable Rate Bonds* terdiri dari 10 seri, dengan masa jatuh tempo tahun 2016 – 2020.
- *Fixed Rate Bonds*, ORI, dan *Variable Rate Bonds* diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- SBR terdiri dari 1 seri, yaitu SBR001 dengan masa jatuh tempo tahun 2016.
- Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada Bank Indonesia (BI) terdiri dari SU002, SU004, SU007, dan SRBI01, dengan masa jatuh tempo tahun 2025 – 2043. SUP tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*).
- SBSN terdiri dari 30 seri *fixed rate* dengan masa jatuh tempo tahun 2016 – 2043, 15 seri SDHI dengan masa jatuh tempo 2016 – 2029, 2 seri Sukuk Ritel (SR-005 dan SR-006) dengan masa jatuh tempo tahun 2016, 7 seri PBS dengan masa jatuh tempo tahun 2018 – 2043, dan 6 seri IFR dengan masa jatuh tempo tahun 2017 – 2036.
- Obligasi Negara dalam Valas terdiri dari 16 seri berdenominasi USD dengan masa jatuh tempo tahun 2016 – 2044, 4 seri SBSN berdenominasi USD dengan masa jatuh tempo tahun 2018 – 2024, 3 seri berdenominasi JPY dengan masa jatuh tempo tahun 2019 – 2022, dan 1 seri RIEUR berdenominasi Euro dengan masa jatuh tempo tahun 2021.

Rincian Utang Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang dapat dilihat pada **Lampiran 36.**

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT Rp20,43 triliun

C.2.44. Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

Utang Kepada Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp20.431.212.930.000 dan Rp17.161.745.000.000 merupakan kewajiban Pemerintah terhadap Program Dana Pensiun dan THT akibat kenaikan gaji PNS tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	**31 Desember 2014** (*audited*)	**31 Desember 2013** (*audited*)
Penetapan *Unfunded* PSL tahun 2007 s.d 2011	**19.161.745.000.000**	**19.161.745.000.000**
Pembayaran Tahun 2012	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
Pembayaran Tahun 2013	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
Pembayaran Tahun 2014	2.000.000.000.000	-
Pembayaran Tahun 2015/Tahap 2	3.000.000.000.000	-
Jumlah	**12.161.745.000.000**	**17.161.745.000.000**
Penetapan *Unfunded* PSL tahun 2012	7.557.126.930.000	-

www.peraturan.go.id

s.d 2013		
Unfunded Liability PT Asabri (persero)	712.341.000.000	-
Jumlah	**20.431.212.930.000**	**17.161.745.000.000**

Nilai *unfunded liability* atas Program THT berdasarkan perhitungan PT. Taspen per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp11.822.231.724.875. Berdasarkan surat Menteri Keuangan kepada PT Taspen Nomor S-160/MK.02/2013 tanggal 4 Maret 2013, Pemerintah menetapkan nilai *unfunded liability* atas program THT adalah sebesar Rp19.161.745.000.000, berdasarkan hasil *due diligence* yang dilakukan BPKP terhadap *unfunded* PSL PT Taspen Tahun 2007 s.d 2011. Jumlah nilai Rp19.161.745.000.000 termasuk jumlah PSL sebesar Rp11.822.231.724.875 yang telah dicatat sampai dengan tahun 2011. Atas penetapan tersebut, PT Taspen diminta untuk melakukan penyesuaian penggunaan asumsi perhitungan sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan.

Sesuai Surat Menteri Keuangan, Nomor S-888/MK.02/2013 tanggal 4 Desember 2013, hal Persetujuan Skema Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* Program THT PNS, untuk pembayaran atas saldo UPSL Program THT PNS tahun 2007 – 2011 (Rp17.161.745.000.000) akan dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan skema pembayaran sebagai berikut.

Tahap	Tahun	Jumlah (Rp)
I	2014	2.000.000.000.000
II	2015	3.000.000.000.000
III	2016	4.000.000.000.000
IV	2017	4.000.000.000.000
V	2018	4.161.745.000.000
Jumlah		**17.161.745.000.000**

Dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014, kewajiban pemerintah atas UPSL mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan telah terbitnya surat Menteri Keuangan S-912/MK.02/2014 tanggal 31 Desember 2014 hal Penetapan *Unfunded Past Service Liability* tahun 2012 s.d 2013 sebesar Rp7.557.126.930.000 akibat terbitnya PP Nomor 15 Tahun 2012 serta *Unfunded Past Service Liability* PT Asabri (Persero) sebesar Rp712.341.000.000.

C.2.45. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang DN Lainnya Rp84,20 triliun

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp84.196.327.243.997 dan Rp68.366.428.707.899, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Jenis Utang	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Utang Pemerintah Indonesia kepada BI dalam rangka Penyertaan pada Lembaga Keuangan Internasional	2.826.956.396.636	2.826.956.396.636
Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program Kredit Usaha Tani (KUT) Tahun Penyediaan (TP) 1998/1999	1.911.927.727.159	1.911.927.727.159
Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Taspen	73.164.928.938.007	58.498.609.734.490
Dana titipan atas Tabungan Perumahan pada BAPERTARUM PNS	5.685.437.414.922	4.839.837.023.707

www.peraturan.go.id

Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya pada K/L	607.076.767.273	289.097.825.907
Jumlah	**84.196.327.243.997**	**68.366.428.707.899**

- Utang Pemerintah Indonesia kepada BI dalam rangka Penyertaan pada Lembaga Keuangan Internasional

  Dalam rangka penyertaan Pemerintah pada lembaga keuangan internasional, sejak tahun 1972 s.d. 1999, Bank Indonesia (BI) atas nama Pemerintah juga telah melakukan pembayaran secara tunai atas penyertaan Pemerintah pada lembaga keuangan internasional. Jumlah yang telah dibayarkan oleh BI adalah sebesar Rp2.826.956.396.636, termasuk di antaranya Rp2.764.860.843.170 kepada IMF. Pembayaran oleh BI dilakukan sebelum terbit UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI. BI mencatat pembayaran tersebut sebagai dana talangan/piutang kepada Pemerintah. Pemerintah belum menyepakati nilai dan status dana talangan/piutang tersebut. Pemerintah mengusulkan kepada BI, agar dana talangan/piutang tersebut dihapuskan dan tidak ditagihkan kepada Pemerintah. Terkait dengan itu, Menteri Keuangan telah mengirim surat kepada BI beberapa kali, terakhir dengan surat Nomor S-08/MK.11/2010 tanggal 9 Maret 2010 untuk meminta jawaban mengenai penyelesaian status dana talangan sesuai dengan usulan Pemerintah agar dapat dihapuskan. Kementerian Keuangan telah melakukan pertemuan dengan BI pada tanggal 7 Mei 2010, dan sesuai kesepakatan dilakukan beberapa langkah berikut: (1) Pemerintah dan BI melakukan verifikasi atas seluruh data dan transaksi dana talangan tersebut untuk memastikan jumlah dan status klaim BI; (2) Bila status dan jumlah dana talangan tersebut telah disepakati bersama, maka Pemerintah dan BI akan segera melakukan langkah penyelesaian status dana talangan.

  Pemerintah dan BI telah melakukan verifikasi atas dana talangan tersebut, dan disepakati bahwa jumlah sebesar Rp2.780.599.599.504 telah didukung dengan data dan dokumen yang memadai yaitu rekening koran, warkat transaksi, surat dari BI ke Kementerian Keuangan dan sebaliknya, faksimili, SWIFT, dan teleks. Sementara untuk jumlah Rp46.356.797.132 hanya didukung rekening koran. Pemerintah dan Bank Indonesia hingga saat ini terus melakukan pembahasan terkait nilai dana talangan tersebut dan opsi penyelesaian yang akan diambil atas permasalahan dana talangan tersebut.

- Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999

  Kredit Usaha Tani (KUT) adalah salah satu skim Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) berupa pemberian kredit modal kerja yang diberikan BI kepada bank pelaksana untuk disalurkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani melalui koperasi primer/LSM guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan holtikultura. Terdapat 2 (dua) pola dalam penyaluran KUT, yaitu pola *executing* dan pola *channeling*. Penyaluran KUT TP 1998/1999 dilakukan dengan pola *channeling* yakni bank pelaksana terbatas hanya sebagai penyalur (agen *channeling*) ke Koperasi/LSM. Sedangkan Koperasi/LSM bertindak sebagai *executing* yang bertanggung jawab atas penyaluran dan pelunasan KUT kepada dan dari kelompok tani.

  Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.017/1998 tanggal 7 Desember 1998, pembagian *risk sharing* atas tunggakan KUT tersebut yaitu sebesar 52,25% ditanggung Pemerintah, sebesar 42,75% ditanggung Bank Indonesia, dan sebesar 5% ditanggung Perum Jamkrindo.

www.peraturan.go.id

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 091/LHP/XV/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 diketahui bahwa realisasi penyaluran KUT TP 1998/1999 adalah sebesar Rp7.677.429.744.360, terdapat pelunasan (BI mendebet rekening giro bank pelaksana di BI) sebesar Rp1.968.960.319.700, sehingga masih terdapat tunggakan sebesar Rp5.708.469.424.660. Dari tunggakan tersebut terdapat nilai yang belum disepakati berupa penyaluran tidak didukung dokumen lengkap sebesar Rp1.539.052.034.110 dan tunggakan yang tidak didukung Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar Rp510.225.568.235. Dengan demikian, estimasi tunggakan yang dapat diperhitungkan untuk *risk sharing* adalah sebesar Rp3.659.191.822.315. *Risk sharing* yang ditanggung Pemerintah adalah sebesar 52,25%, sehingga Pemerintah mengakui adanya Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999 sebesar Rp1.911.927.727.159 (52,25%xRp3.659.191.822.315).

Pemerintah dapat menyesuaikan nilai kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program. Dalam rangka penyelesaian kewajiban *risk sharing* program KUT, dan sesuai dengan hasil rapat konsultasi Pemerintah dengan DPR pada tahun 2004, besaran kewajiban *risk sharing* KUT tersebut perlu mendapat persetujuan DPR.

- Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Taspen

  Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp73.164.928.938.007 merupakan kewajiban PT Taspen kepada peserta program pensiun PNS sampai dengan 31 Desember 2014.

- Dana titipan atas Tabungan Perumahan pada BAPERTARUM PNS

  Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp5.685.437.414.922 merupakan Utang yang berasal dari ekuitas bersih BAPERTARUM PNS berdasarkan Laporan Keuangan tahun 2014.

- Utang Jangka Panjang dalam Negeri lainnya pada K/L

  Utang Jangka Panjang dalam Negeri lainnya pada K/L sebesar Rp607.076.767.273, adalah utang pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp45.009.731.681, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp20.061.468.140, Kementerian Kehutanan sebesar Rp118.153.090.986, BPKPBPB Batam sebesar Rp389.168.422.324, dan Lembaga Penyiaran Publik TVRI sebesar Rp34.684.054.142.

www.peraturan.go.id

C.2.46. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan

Utang Jangka Panjang LN Perbankan Rp610,95 triliun

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp610.949.515.129.568 dan Rp646.221.116.658.252 merupakan posisi utang luar negeri perbankan yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca. Rincian Utang Jangka Panjang LN Perbankan adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Utang	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Bilateral	262.394.669.561.951	303.006.978.080.151
Multilateral	275.493.865.750.861	268.472.113.803.829
Kredit Ekspor	46.904.662.152.744	59.309.149.100.930
Kredit Komersial	26.156.317.664.012	15.432.875.673.342
Jumlah	**610.949.515.129.568**	**646.221.116.658.252**

C.2.47. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya Rp33,58 triliun

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp33.576.619.525.619 dan Rp26.573.441.869.951, dengan rincian:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
International Monetary Fund	33.553.945.227.099	26.550.675.238.721
International Development Association	5.173.139.668	5.173.139.668
Multilateral Investment Guarantee Agency	14.119.623.920	13.834.734.402
Common Fund for Commodities	3.381.534.932	3.758.757.160
Total Utang Jangka Panjang Lainnya	**33.576.619.525.619**	**26.573.441.869.951**

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya adalah dalam bentuk *Promissory Notes* terkait dengan Penyertaan Pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional yang jatuh tempo/dibayar lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan, sedangkan yang akan jatuh tempo satu tahun setelah tanggal neraca disajikan sebagai Utang Jangka Pendek Lainnya.

Rekapitulasi Utang Luar Negeri, SBN, dan *Promissory Notes*

Posisi Utang Luar negeri, SBN, dan PN

Kenaikan dan penurunan saldo Utang Luar Negeri, SBN, dan *promissory notes* dalam mata uang Rupiah, serta kenaikan dan penurunan saldo Utang Luar Negeri (tidak termasuk utang bunga) dalam valuta asing secara keseluruhan disajikan pada **Tabel 9** dan **Tabel 10.**

Tabel 9 Posisi Utang Luar Negeri, SBN, dan *Promissory Notes*

(dalam juta rupiah)

Jenis Utang	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)	Kenaikan (Penurunan)
Utang Luar Negeri (LN):			
Utang LN – Bagian Lancar	63.383.702,01	65.945.678,36	(2.561.976,36)
Utang LN – Jangka Panjang	610.949.515,13	646.221.116,66	(35.271.601,53)

www.peraturan.go.id

Utang Bunga LN	2.579.128,65	2.690.526,32	(111.397,67)
Total Utang LN	**676.912.345,78**	**714.857.321,34**	**(37.944.975,56)**
Surat Berharga Negara (SBN):			
Bagian Lancar SBN-Rupiah	52.979.594,00	41.485.908,02	11.493.685,98
Bagian Lancar SBN-Valas	12.437.650,29	28.029.421,98	(15.591.771,70)
SPN	49.583.393,77	41.722.185,96	7.861.207,82
SBSN Jangka Pendek-Rupiah	19.968.706,91	18.532.410,00	1.436.296,91
SBSN Jangka Pendek-Valas	-	7.922.850,00	(7.922.850,00)
SBN Jangka Panjang-Rupiah	1.240.522.012,47	1.070.987.042,87	169.534.969,60
SBN Jangka Panjang-Valas	380.685.248,58	319.778.852,05	60.906.396,54
SBSN Jangka Panjang-Rupiah	110.637.330,00	90.323.439,87	20.313.890,13
SBSN Jangka Panjang-Valas	62.200.000,00	42.661.500,00	19.538.500,00
Utang Bunga SBN	31.268.462,52	24.955.111,28	6.313.351,24
Total SBN dan Bunga	**1.960.282.398,53**	**1.686.398.722,02**	**273.883.676,51**
***Promissory Notes* (PN):**			
PN Jangka Pendek	-	-	-
PN Jangka Panjang	33.576.619,53	26.573.441,87	7.003.177,66
Total PN	**33.576.619,53**	**26.573.441,87**	**7.003.177,66**

Tabel 10 Posisi Utang Luar Negeri Menurut Valuta Asing

Posisi Utang Luar negeri Menurut Valuta Asing

Valuta	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)	Kenaikan (Penurunan)
ACU	372,648,705	350,515,061	22,133,644
ADB	60,124,620	67,036,119	(6,911,499)
AUD	471,230,928	446,120,928	25,110,000
CAD	108,355,154	118,665,472	(10,310,318)
CHF	124,993,520	170,687,742	(45,694,222)
CNY	1,395,075,132	1,395,075,132	-
DKK	26,602,050	31,079,999	(4,477,949)
EUR	3,500,235,398	3,615,546,709	(115,311,311)
GBP	177,499,703	246,048,411	(68,548,708)
JPY	1,840,877,950,745	2,019,108,387,137	(178,230,436,392)
KRW	209,189,636,800	210,963,667,670	(1,774,030,870)
KWD	5,507,614	5,639,300	(131,686)
SAR	95,031,441	78,305,752	16,725,689
SDR	1,786,481,070	1,932,600,413	(146,119,343)
USD	24,882,574,200	23,591,640,440	1,290,933,760
WBD	5,358,529	26,215,677	(20,857,148)

C.2.48. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Setelah Penyesuaian

SAL Setelah Penyesuaian Rp66,60 triliun

Saldo Anggaran Lebih (SAL) setelah penyesuaian TA 2014 dan TA 2013 sebesar Rp66.597.650.883.582 dan Rp40.262.010.866.885. SAL TA 2014 setelah penyesuaian tersebut berasal dari saldo awal SAL TA 2014 sebesar Rp66.594.149.777.346, ditambah selisih lebih kas tahun lalu Rp2.258.130.896, ditambah penyesuaian lainnya sebesar minus Rp16.441.567.471, dan ditambah penyesuaian catatan SAL sebesar Rp17.684.542.811. Pada TA 2014 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) setelah penyesuaian sebesar Rp19.539.342.700.004, sehingga SAL per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp86.136.993.583.586. Sementara itu, SAL menurut fisik setelah penyesuaian adalah sebesar Rp86.136.993.583.586, sehingga tidak terdapat selisih fisik SAL dibandingkan catatannya. Rincian penghitungan SAL sebagaimana disajikan pada **Tabel 11.**

www.peraturan.go.id

Tabel 11 Saldo Anggaran Lebih TA 2014 dan TA 2013

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2014 (*audited*)	TA 2013 (*audited*)
Saldo Awal SAL	**66.594.149.777.346**	**70.262.825.244.473**
Penambahan dari Selisih Lebih Kas Tahun Lalu	2.258.130.896	8.149.767.980
Penggunaan SAL	-	(30.000.000.000.000)
Koreksi Saldo Awal Kas KPPN	(6.175.091.483)	641.122.867
Koreksi Saldo Awal Kas pada BLU	(10.266.475.988)	24.491.001.778
Koreksi Saldo Awal Kas Hibah di K/L	-	(601.517.310)
Kas dalam Transito	-	(33.494.752.903)
Koreksi Saldo Awal Kas Hibah dari Hibah Langsung	-	-
SAL setelah Penyesuaian	**66.579.966.340.771**	**40.262.010.866.885**
Penyesuaian Catatan SAL:		
Selisih Utang PFK [1)]	9.012.248.166	-
Selisih Utang Kepada Pihak ketiga [2)]	3.439.143.955	-
Selisih Transito [3)]	5.233.150.690	-
Total Penyesuaian Catatan SAL	**17.684.542.811**	-
SAL setelah Penyesuaian Catatan SAL	**66.597.650.883.582**	**40.262.010.866.885**
SiLPA (SiKPA) Sebelum Penyesuaian	**22.200.783.507.088**	**25.721.919.465.853**
Penyesuaian SiLPA (SiKPA):		
Penyesuaian Pengembalian Pendapatan Tahun Lalu	(61.260.251.519)	(644.751.888.573)
Penyesuaian Pendapatan/Belanja dari Transaksi Uang Persediaan	-	-
Penyesuaian Rekening Retur	-	-
Penyesuaian Pendapatan Anggaran lain-lain	-	-
Penyesuaian Kas Hibah Langsung	(974.989.900)	(518.471.983)
Penyesuaian Kas KPPN	2.000.001	-
Penyesuaian Transfer	-	-
Penyesuaian Kas pada BLU	-	-
Penyesuaian Kas di BUN (selisih kurs di BUN)	-	1.198.523.336.037
Selisih Kurs (*unrealized*) [4)]	(2.599.207.565.511)	56.966.469.127
Penyesuaian akibat selisih droping dana dan belanja	-	-
Koreksi Pembulatan	(155)	-
Total Penyesuaian SiLPA	**(2.661.440.807.084)**	**610.219.444.608**
SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian	**19.539.342.700.004**	**26.332.138.910.461**
Saldo Akhir Catatan SAL (A)	**86.136.993.583.586**	**66.594.149.777.346**
Fisik Kas SAL:		
Rekening SAL di BI	41.818.274.229.874	21.674.873.255.508
Rekening BUN di BI	14.323.359.181.178	18.934.421.791.637
Rekening KPPN	2.843.557.011.256	2.666.720.204.356
Rekening Khusus	2.097.228.798.555	3.128.616.916.907
Kas di Bendahara Pengeluaran	316.874.974.276	342.891.820.960
Kas pada BLU yang telah Disahkan [5)]	27.650.268.834.909	20.185.201.347.614
Kas Hibah Langsung K/L yang telah Disahkan [6)]	789.685.536.101	1.114.849.200.667
Total Fisik Kas	**89.839.248.566.149**	**68.047.574.537.649**
Penyesuaian Fisik Kas:		
Uang Persediaan di Kementerian LN sebagai Aset Lainnya	19.860.027.767	17.256.780.750
Utang PFK	(2.679.231.919.973)	(348.097.673.274)
Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)	(1.033.459.801.253)	(1.120.325.736.883)
Penyesuaian Selisih Kiriman Uang[7)]	(9.423.289.104)	-
Total Penyesuaian Fisik Kas	**(3.702.254.982.563)**	**(1.451.166.629.407)**
Fisik Kas setelah Penyesuaian (B)	**86.136.993.583.586**	**66.596.407.908.242**
Selisih Kas (Lebih) Kurang (A-B)	-	**(2.258.130.896)**

Catatan:

1). Penjelasan selisih Utang PFK:

Uraian	*TA 2014*
Utang PFK 1 Jan 2014	*348.097.673.274*
Utang PFK 31 Desember 2014	*2.679.231.919.973*
Selisih Utang PFK 2014	*(2.331.134.246.699)*
Mutasi Perhitungan PFK 2014	*2.340.146.494.865*

www.peraturan.go.id

Selisih Perhitungan PFK dengan Neraca	***9.012.248.166***

2). Penjelasan selisih Utang Kepada Pihak ketiga:

Uraian	***TA 2014***
Utang Pihak Ketiga 1 Jan 2014	*1.120.325.736.883*
Utang Pihak Ketiga 31 Desember 2014	*1.033.459.801.253*
Selisih Utang Pihak Ketiga 2014	*86.865.935.630*
Mutasi Utang Pihak Ketiga 2014	*(83.426.791.675)*
Selisih Utang Pihak Ketiga dengan Neraca	***3.439.143.955***

3). Penjelasan selisih Transito:

Uraian	***TA 2014***
Kas di bendahara Pengeluaran 1 Jan 2014	*360.148.601.710*
Kas di bendahara Pengeluaran 31 Des 2014	*336.735.002.043*
Selisih Kas di Bendahara Pengeluaran 2014	*(23.413.599.667)*
Mutasi Transito 2014	*28.646.750.357*
Selisih Kas di Bendahara Pengeluaran dengan Neraca	***5.233.150.690***

4). Sejak tahun 2012 selisih kurs (unrealized) atas kas BUN yang merupakan bagian dari SAL dan merupakan penambah (pengurang) SiLPA. Selisih kurs tahun anggaran sebesar minus Rp2.599.207.565.511 terdiri dari selisih kurs kas di BUN sebesar minus Rp2.632.428.701.114 dan selisih kurs RPH sebesar Rp33.221.135.603.

5). Kas BLU sebesar Rp27.650.268.834.909 merupakan Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN melalui SP2D Pengesahan dan koreksi saldo awal.

6). Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan sebesar Rp789.685.536.101 berdasarkan laporan KPPN yang melakukan pengesahan pendapatan hibah langsung K/L dan belanja yang dilakukan atas pendapatan hibah tersebut.

7). Penyesuaian Selisih Kiriman Uang sebesar Rp9.423.289.104 merupakan selisih pengeluaran kiriman uang dan penerimaan kiriman uang pada Laporan Arus Kas. Lihat Catatan D.2.29.

C.2.49. SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian

SiLPA setelah Penyesuaian Rp19,54 triliun

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Setelah Penyesuaian per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp19.539.342.700.004 dan Rp26.332.138.910.461 merupakan selisih antara realisasi seluruh penerimaan dan pengeluaran anggaran selama TA 2013 setelah dilakukan penyesuaian-penyesuaian, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	**TA 2014** (*audited*)	**TA 2013** (*audited*)
Pendapatan Negara dan Hibah	1.550.490.773.205.979	1.438.891.069.562.744
Belanja Negara	1.777.182.815.375.411	1.650.563.727.418.085
Surplus (Defisit)	**(226.692.042.169.432)**	**(211.672.657.855.341)**
Pembiayaan Neto	248.892.825.676.520	237.394.577.321.194
SiLPA (SiKPA) Sebelum Penyesuaian	**22.200.783.507.088**	**25.721.919.465.853**
Penyesuaian SiLPA:		
Penyesuaian Pengembalian Pendapatan Tahun Lalu	(61.260.251.519)	(644.751.888.573)
Penyesuaian Pendapatan/Belanja dari Transaksi Uang Persediaan	-	-
Penyesuaian Rekening Retur	-	-
Penyesuaian Pendapatan Anggaran lain-lain	-	-
Penyesuaian Kas Hibah Langsung	(974.989.900)	(518.471.983)
Penyesuaian Kas KPPN	2.000.001	-

www.peraturan.go.id

Penyesuaian Transfer	-	-
Penyesuaian Kas pada BLU	-	-
Penyesuaian Kas di BUN (selisih kurs di BUN)	-	1.198.523.336.037
Selisih Kurs (*unrealized*) 1)	(2.599.207.565.511)	56.966.469.127
Penyesuaian SiLPA	-	
Koreksi Pembulatan	(155)	
Total Penyesuaian SiLPA	**(2.661.440.807.084)**	**610.219.444.608**
SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian	**19.539.342.700.004**	**26.332.138.910.461**

C.2.50. Cadangan Piutang

Cadangan Piutang Rp92,91 triliun

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp92.913.908.152.555 dan Rp99.643.556.941.069. Jumlah Cadangan Piutang merupakan akun lawan (pasangan) atas:

(dalam rupiah)

Akun Lawan	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Piutang Lancar (Bersih)	92.648.192.556.298	100.144.781.980.723
Belanja Dibayar di Muka berupa Persekot Gaji dan Beasiswa Dibayar Dimuka pada LPDP	195.131.404.973	4.573.169.948
Uang Muka dari Rekening BUN	426.084.589.111	141.923.861.996
Selisih kurs atas Bagian Lancar Penerusan Pinjaman dalam valas	(355.500.397.827)	(647.722.071.597)
Jumlah[*)]	**92.913.908.152.555**	**99.643.556.941.070**

*) *selisih antara data neraca dengan rincian utang sebesar Rp1 karena pembulatan*

C.2.51. Cadangan Persediaan

Cadangan Persediaan Rp67,60 triliun

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp67.600.353.672.687 dan Rp63.205.251.965.209 merupakan pasangan perkiraan persediaan yang dilaporkan K/L dan instansi terkait lainnya, termasuk persediaan pada BLU.

C.2.52. Pendapatan yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan Rp2,14 triliun

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp2.136.196.629.944 dan Rp4.817.382.158.336 merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) K/L yang belum disetorkan ke Kas Negara, serta pendapatan dan piutang terkait penerimaan migas dan panas bumi yang belum dapat diakui sebagai PNBP karena *earning process*-nya belum selesai. Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan akun lawan (pasangan) atas:

(dalam rupiah)

Akun Lawan	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Kas di Bendahara Penerimaan	147.819.027.491	225.839.936.566
Kas Lainnya dan Setara Kas[1)]	1.100.682.852.819	1.025.268.555.493
Rek. Penerimaan Panas Bumi	36.889.252.330	-
Rek. Hasil Minyak Perjanjian KPS - PNBP	850.805.497.304	3.566.273.666.277
Jumlah	**2.136.196.629.944**	**4.817.382.158.336**

Catatan:

1). Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan dana yang berasal dari penerimaan hibah yang belum disahkan,

www.peraturan.go.id

*pengembalian belanja, dan bunga jasa giro yang belum disetor yang berada pada Bendahara Pengeluaran. **(lihat Catatan C.2.6)***

C.2.53. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek minus Rp314,04 triliun

Jumlah Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar minus Rp314.037.171.275.183 dan minus Rp325.224.143.092.266. Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Rincian penghitungan Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Total Utang Jangka Pendek	352.308.954.175.480	368.086.831.707.954
Dikurangi:		
Utang PFK	(2.679.231.919.973)	(348.097.673.274)
Utang karena terjadinya Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	(1.033.459.801.253)	(1.120.325.736.883)
Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan Kas Lainnya dan Setara Kas	(4.247.898.470.692)	(5.347.879.920.484)
Utang Jangka Pendek Lainnya yang merupakan akun lawan Kas Lainnya dan Setara Kas	(28.201.708.134)	-
Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan RPL (Rek. Migas dan Panas Bumi)	(3.641.085.771.446)	(6.290.655.937.914)
Pendapatan Diterima di Muka yang merupakan akun lawan Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	(9.782.484.473.823)	(8.454.347.000.882)
Selisih Kurs Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	(12.567.742.740.189)	(19.335.835.724.632)
Utang Kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BPIH	(1.657.177.288.743)	(1.965.546.621.619)
Utang Subsidi yang merupakan akun lawan Dana yang Dibatasi Penggunaannya	(2.634.500.726.044)	
Jumlah	**314.037.171.275.183**	**325.224.143.092.266**

C.2.54. Selisih Kurs Bagian Lancar

Selisih Kurs Bagian Lancar minus Rp12,21 triliun

Selisih Kurs Bagian Lancar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar minus Rp12.212.231.622.370 dan minus Rp18.688.113.653.034 merupakan selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda antara kurs saat transaksi dengan kurs pada tanggal pelaporan (kurs tengah BI). Selisih kurs terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Selisih kurs atas Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang terkait dengan utang luar negeri dan dalam negeri	(12.567.742.740.189)	(19.335.835.724.632)
Selisih kurs pada aset Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	355.500.397.827	647.722.071.598
Selisih kurs pada Kementerian Kehutanan Hibah Langsung yang telah disahkan	10.719.992	-
Jumlah	**(12.212.231.622.370)**	**(18.688.113.653.034)**

www.peraturan.go.id

Dana Lancar Lainnya Rp226,08 miliar

C.2.55. Dana Lancar Lainnya

Jumlah Dana Lancar Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp226.078.511.078 dan Rp90.082.709.951, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Rekening Pemerintah Lainnya (Rek. Penerimaan Pertambangan dan perikanan, dan RPL pada BA 999.04)	119.991.194.748	142.554.657.720
Kas BLU yang Belum Disahkan sebagai SiLPA	69.171.469.129	70.046.094.641
Selisih Pencatatan Kas Hibah Langsung K/L dengan Pencatatan di KPPN	(110.207.790.502)	(203.523.256.786)
Selisih Kas Lebih (Kurang) Tahun ini	-	2.258.130.896
Kas Lainnya dan Setara Kas pada Kemlu	111.087.854.180	61.861.216.639
Kas Lainnya dan Setara Kas pada LPP RRI	26.612.494.419	16.885.866.841
Penyesuaian Selisih Kiriman Uang	9.423.289.104	-
Jumlah	**226.078.511.078**	**90.082.709.951**

C.2.56. Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima

Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima Rp2,00 triliun

Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp2.001.558.961.581 dan Rp4.653.616.446.673. Rincian penghitungan Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja	2.196.690.366.554	4.658.189.616.621
Dikurangi:		
Persekot Gaji pada Mahkamah Agung	(3.187.927.140)	(2.084.666.486)
Persekot Gaji pada Kejaksaan Agung	-	(1.011.480)
Persekot Gaji dan Beasiswa Dibayar Dimuka pada LPDP - Kementerian Keuangan	(191.762.198.282)	(1.853.770.656)
Persekot Gaji pada Kementerian Pertanian	(30.667.100)	(66.100.020)
Persekot Gaji pada Kementerian Kesehatan	(112.341.000)	(563.949.706)
Persekot Gaji pada Kementerian Agama	-	(3.486.600)
Persekot Gaji pada Badan Pertanahan Nasional	-	(185.000)
Persekot Gaji pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	(38.271.451)	-
Jumlah	**2.001.558.961.581**	**4.653.616.446.673**

C.2.57. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan minus Rp9,78 triliun

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar minus Rp9.782.484.473.823 dan minus Rp8.454.347.000.882. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2014 merupakan akun lawan dari total Pendapatan Diterima di Muka sebesar Rp9.782.484.473.823.

www.peraturan.go.id

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Rp1.309,92 triliun

C.2.58. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

Jumlah Perkiraan Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp1.309.921.393.887.621 dan Rp1.183.170.420.317.820 merupakan dana Pemerintah Pusat yang diinvestasikan dalam bentuk investasi permanen dan investasi non permanen yang merupakan lawan dari perkiraan Investasi Jangka Panjang.

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp1.714,59 triliun

C.2.59. Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp1.714.588.328.953.214 dan sebesar Rp1.709.855.072.863.187 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Tetap.

C.2.60. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp539,05 triliun

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp539.045.219.249.774 dan Rp352.579.883.574.149 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Lainnya.

Rincian penghitungan Diinvestasikan dalam Aset Lainnya adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Piutang Jangka Panjang (bersih)	2.825.834.229.735	2.898.499.639.540
Aset Lainnya (bersih)	620.606.155.768.241	418.920.288.208.209
Jumlah Piutang Jangka Panjang dan Aset lainnya	**623.431.989.997.976**	**421.818.787.847.749**
Dikurangi:		
Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BPIH yang merupakan akun lawan Utang Kepada Pihak Ketiga	(1.657.177.288.743)	(1.965.546.621.619)
Aset Lainnya dari Reklasifikasi UP/TUP	(19.860.027.767)	(17.256.780.750)
Selisih kurs atas Penerusan Pinjaman dalam valas	(1.224.866.352.719)	(3.917.654.113.035)
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya pada BAPERTARUM PNS yang merupakan akun lawan Utang Kepada Pihak Ketiga	(5.685.437.414.922)	(4.839.837.023.707)
Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada PT Taspen	(73.164.928.938.007)	(58.498.609.734.490)
Dana yang Dibatasi Penggunaannya berupa Utang Subsidi	(2.634.500.726.044)	-
Jumlah *)	**539.045.219.249.774**	**352.579.883.574.148**

*) *selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp1 karena pembulatan*

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang minus Rp2.308,45 triliun

C.2.61. Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar minus Rp2.308.449.937.718.660 dan minus Rp2.031.798.722.297.177 merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Jumlah ini merupakan akumulasi utang jangka panjang yang terdiri dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Luar Negeri dikurangi selisih kurs utang jangka panjang, dengan rincian sebagai berikut.

www.peraturan.go.id

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	1.901.548.509.155.447	1.611.218.389.579.778
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	644.526.134.655.187	672.794.558.528.202
Selisih Kurs Utang Jangka Panjang	(158.774.339.739.045)	(188.875.779.052.607)
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya pada BAPERTARUM PNS	(5.685.437.414.922)	(4.839.837.023.707)
Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada PT Taspen	(73.164.928.938.007)	(58.498.609.734.490)
Jumlah[*)]	**2.308.449.937.718.660**	**2.031.798.722.297.176**

[*)] *selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp1 karena pembulatan*

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp5.685.437.414.922 adalah utang yang berasal dari ekuitas bersih BAPERTARUM PNS yang merupakan akun lawan (pasangan) Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, bukan akun lawan (pasangan) Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang.

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp73.164.928.938.007 adalah kewajiban PT Taspen kepada peserta program pensiun PNS yang merupakan akun lawan (pasangan) Dana yang Dibatasi Penggunaannya, bukan akun lawan (pasangan) Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang.

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	(1.746.147.921.518.130)	(1.475.717.744.850.326)
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Luar Negeri	(562.302.016.200.530)	(556.080.977.446.850)
Jumlah	**(2.308.449.937.718.660)**	**(2.031.798.722.297.176)**

C.2.62. Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang

Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang minus Rp157,55 triliun

Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar minus Rp157.549.473.386.326 dan minus Rp184.958.124.939.572 merupakan selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda antara kurs saat transaksi dengan kurs pada tanggal pelaporan (kurs tengah BI). Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2014 (*audited*)	31 Desember 2013 (*audited*)
Selisih kurs atas Utang Jangka Panjang dalam valas[*)]	(158.774.339.739.045)	(188.875.779.052.607)
Selisih kurs atas Aset lainnya RDI dan Aset Lainnya dalam Penerusan Pinjaman	1.224.866.352.719	3.917.654.113.035
Jumlah	**(157.549.473.386.326)**	**(184.958.124.939.572)**

www.peraturan.go.id

*) *Selisih kurs atas Utang Jangka Panjang dalam valas terdiri dari selisih kurs Utang Jangka Panjang Luar Negeri sebesar minus Rp82.224.118.454.657 dan selisih kurs Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Valas sebesar minus Rp76.550.221.284.388.*

C.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Rekening Pemerintah Lainnya

Dalam LKPP Tahun 2014, Rekening Pemerintah Lainnya terdiri dari tiga jenis rekening pada Bank Indonesia (Rekening Migas, Rekening Penerimaan Panas Bumi, dan Rekening Pertambangan dan Perikanan) dan 17 rekening pada Bank Umum (Rekening Kredit Program). Adapun tujuan dari pembukaan Rekening Pemerintah Lainnya tersebut adalah sebagai berikut.

a. Rekening SDA Migas: nomor 600.000411.980 Rekening Hasil Minyak Perjanjian *Karya Production Sharing*

Sesuai PMK Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 138/PMK.02/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 Tentang Rekening Minyak Dan Gas Bumi, dijelaskan bahwa rekening minyak dan gas bumi adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar pengeluaran terkait kegiatan hulu migas. Penerimaan yang ditampung pada rekening tersebut masih mengandung hak pihak ketiga yang harus diperhitungkan dari rekening tersebut. Bagian pemerintah dari penerimaan Minyak dan Gas Bumi adalah sebesar 85%, yang terdiri dari 71,15% hak pihak lain dan 13,85% merupakan Pendapatan Pajak.

b. Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000084.980 Rekening Penerimaan Panas Bumi

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2009 tentang Rekening Panas Bumi dijelaskan bahwa Rekening Penerimaan Panas Bumi pada BI digunakan untuk menampung penerimaan setoran bagian Pemerintah dan untuk membayar pengeluaran kewajiban pemerintah terkait usaha panas bumi. Pada rekening panas bumi terdapat pengeluaran berupa *reimbursement* PPN, PBB dan lainnya.

c. Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000071.980 Rekening Pertambangan dan Perikanan

Rekening Pertambangan dan Perikanan digunakan untuk menampung penerimaan pertambangan dan perikanan yang antara lain berasal dari PT Inalum dan perusahaan KKKS.

Pemindahbukuan dari rekening 508.000071.980 ke Pemda/Persepsi/RKUN didasarkan pada surat permintaan DJA. Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, sesuai peraturan, DJA terlebih dahulu melakukan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

d. Rekening Kredit Program

Rekening Kredit Program dipergunakan untuk menampung pengembalian pinjaman dari debitur.

2. Rekening Migas (Rekening Nomor 600.000.411980)

Saldo Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (rekening migas) per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp3.832.193.507.447. Dana tersebut merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening Nomor 600.000.411980, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada Pemerintah. Berikut adalah mutasi Rekening Migas selama Tahun 2014.

Tabel 12 Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2014 dan 2013

URAIAN	31 Desember 2014 (*audited*)		31 Desember 2013 (*audited*)	
	USD	Rp Juta	USD	Rp Juta
I. Saldo Awal	**780,505,366.97**	**9.513.579,92**	**1,344,928,728.80**	**13.005.460,82**
II. Penerimaan:				
1. Penerimaan PPh Migas, PNBP SDA Migas dan PNBP lainnya a)	16,054,543,590.58	190.282.129,09	17,956,713,722.55	187.816.222,13
2. Koreksi Pembukuan	-	-	-	-
3. Penerimaan lain-lain b)	35,377,849.54	418.635,82	141,804,600.22	1.391.823,79

www.peraturan.go.id

4. Selisih Kurs Pembukuan Kredit	-	12.478.799,22	-	13.789.282.61
5. Penerimaan belum jelas peruntukannya c)	-	-	10,091,953.18	111.004,17
6. Pengembalian Dana Talangan d)	300,000,000.00	3.730.980,00	600,000,000.00	7.362.000,00
Total Penerimaan	**16,389,921,440.12**	**206.910.544,13**	**18,708,610,275.95**	**210.470.332,69**
III. Pengeluaran:				
1. Pengeluaran berkaitan dengan APBN/ APBD:				
a. Bagi Hasil PBB Migas ke Pemda via BO III	1,562,018,530.51	18.668.960,20	1,802,624,546.55	20.745.751,75
b. Pajak Penerangan Jalan non PLN & ABT ke Pemda	5,056,983.49	60.631,05	9,121,599.65	98.330,85
c. Pemindahbukuan ke Rek. Valas KUN Nomor 600.502411980 e)				
• PPh Migas	7,326,178,572.89	87.431.065,65	8,380,393,964.93	88.673.813,40
• PendapatanPNBP SDA Migas	4,848,164,234.19	58.012.131,27	5,775,934,021.86	63.008.139,89
• Pendapatan Migas lainnya (423139)	7,190,298.59	84.028,27	29,063,981.18	325.524,55
Sub Total Pengeluaran berkaitan dengan APBN/APBD	13,748,608,619.67	164.256.816.44	15,997,138,114.17	172.851.560,44
2. Pengeluaran non APBN/APBD:				
a. *Reimbursement* PPN ke Kontraktor	1,162,463,352.34	13.792.900,12	1,092,795,043.65	11.112.063,92
b. Pembayaran DMO *Fee* KKKS f)	1,344,218,646.80	16.002.995,84	1,183,789,547.10	12.731.608,94
c. Pembayaran *Fee* / Anggaran SKK Migas	156,738,341.72	1.837.704.12	182,479,765.68	1.839.289,61
d. Pembayaran *Underlifting* KKKS g)	135,950,985.26	1.620.737,06	46,472,678.89	495.100,20
e. Pembayaran *Fee* penjualan PT Pertamina (Persero)	-	-	-	-
Sub Total Pengeluaran non APBN/APBD	2,799,371,326.12	33.254.337,14	2,505,537,035.32	26.178.062,67
3. Koreksi Pembukuan Debit oleh BI h)	2,696,039.07	32.045,41	140,971,739.07	1.384.014,36
4. Selisih Koreksi Kurs Pembukuan Debit i)	-	11.162.119,46	-	5.944.064,34
5. Pengeluaran lainnya j)	11,449,979.03	143.610,16	29,372,417.83	341.350,43
6. Administrasi Bank k)	67.00	0,79	30.00	0,36
7. Retur/Pengembalian karena salah rekening	246,635.73	2.901,14	14,302.26	161,01
8. Dana Talangan d)	300,000,000.00	3.740.100.00	600,000,000.00	7.263.000,00
Total Pengeluaran	**16,862,372,666.62**	**212.591.930,54**	**19,273,033,638.65**	**213.962.213,59**
IV. Kenaikan/Penurunan (II - III)	**(472,451,226.50)**	**(5.681.386,41)**	**(564,423,362.70)**	**(3.491.880,90)**
V. Saldo Akhir (I + IV) I)	**308,054,140.47**	**3.832.193,51**	**780,505,366.97**	**9.513.579,92**

Penjelasan:

Rekening Migas Nomor 600.000411980, merupakan rekening yang digunakan sebagai perantara untuk menampung seluruh Penerimaan Negara dalam valuta asing yang berasal dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan untuk membayar kewajiban kontraktual migas Pemerintah serta membayar kewajiban-kewajiban Pemerintah lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas.

Penerimaan

a) Penerimaan di Rekening Migas yang meliputi Penerimaan PPh Migas, PNBP SDA Migas dan PNBP lainnya.
- Penerimaan PPh Migas
  Penerimaan PPh Migas sebesar USD7,319,412,021.64 atau setara Rp86.697.920.661.847 merupakan penerimaan atas pembayaran kewajiban PPh migas kontraktor yang disetor ke rekening migas Nomor 600.000411980 sesuai dengan kontrak kerja sama dan berdasarkan ketentuan perpajakan.
- PNBP SDA Migas
  Merupakan penerimaan Negara dari hasil penjualan *lifting* minyak bumi dan gas alam bagian Negara, penyelesaian/penyetoran dari KKKS atau pihak ketiga terkait penjualan *lifting* bagian Negara sebesar USD8,727,983,054 atau setara Rp10.350.257.010.650.
- PNBP Lainnya dari kegiatan usaha hulu migas
  Meliputi Bonus dan Transfer Material
  Bonus sebesar USD6,750,000.00 atau setara Rp78.135.000.000 merupakan setoran KKKS diluar skema bagi hasil yang menjadi kewajiban KKKS setelah mencapai akumulasi dan tingkat produksi tertentu.
  Transfer Material sebesar USD398,514.27 atau setara Rp4.816.415.663 merupakan setoran KKKS diluar skema bagi hasil dalam rangka pemanfaatan aset KKKS berdasarkan persetujuan SKK MIGAS dan dapat diperhitungkan sebagai *cost recovery*.

b) Penerimaan Lain-Lain
Pada penerimaan lain-lain sebesar USD35,377,849.54 atau setara Rp418.635.822.158 terdiri dari koreksi Pembukuan Kredit

www.peraturan.go.id

oleh Bank Indonesia, retur pengembalian karena salah rekening, dan penerimaan lainnya, diuraikan sebagai berikut.

- Koreksi pembukuan kredit sebesar USD2,696,039.07 atau setara Rp32.045.412.097 merupakan koreksi-koreksi kredit yang diakibatkan adanya koreksi pembukuan ganda, atau pembukuan dobel yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- Retur/pengembalian karena salah rekening sebesar USD246,635.73 atau setara Rp2.884.665.486 merupakan koreksi kredit yang diakibatkan adanya retur pembayaran kewajiban-kewajiban sektor migas karena pergantian rekening atau kesalahan rekening tujuan pihak ketiga.
- Penerimaan Lainnya sebesar USD 32,435,174.74 atau setara dengan Rp383.705.744.575 merupakan penerimaan karena salah setor yang peruntukannya bukan sebagai penerimaan migas, dan dari setoran KKKS atas kelebihan pembayaran DMO.

c) Penerimaan yang belum teridentifikasi peruntukannya adalah penerimaan yang belum dapat diklasifikasikan baik penyetor maupun peruntukannya sampai dengan saat penyusunan laporan keuangan.

d) Dana Talangan Kredit/Debit sebesar sebesar USD300,000,000.00 merupakan pemindahbukuan dari rekening migas ke rekening Kas Umum Negara oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 24 Desember 2014 untuk memenuhi kebutuhan dana pada Rekening Kas Umum Negara. Atas pemindahbukuan dana talangan tersebut, telah pula dikembalikan ke rekening migas atas dua tahap yaitu pada tanggal 29 Desember 2014 sebesar USD170,000,000.00 dan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar USD130,000,000.00.

e) Pemindahbukuan ke Rekening KUN

Terdiri atas pemindahbukuan sebagai berikut.

- Pemindahbukuan PNBP SDA Migas, merupakan proses pemindahbukuan penerimaan SDA migas dari rekening migas Nomor 600.000411980 ke Rekening Kas Umum Negara Nomor 600.502411980 yang dilakukan setiap akhir bulan setelah diperhitungkan/dicadangkan dengan kewajiban-kewajiban kontraktual pemerintah dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja sama migas. Proses pemindahbukuan ini merupakan tahapan akhir agar penerimaan SDA migas dapat diakui sebagai realisasi pendapatan negara.
- Pemindahbukuan PPh Migas, merupakan proses pemindahbukuan atas PPh migas kontraktor yang diterima di rekening migas Nomor 600.000411980 setelah dokumen pelaporan kontraktor diterima.
- Pemindahbukuan PNBP Lainnya, merupakan pemindahbukuan atas penerimaan bonus dan transfer material yang disetor KKKS ke rekening migas Nomor 600.000411980.

f) Pembayaran DMO *Fee* KKKS

Dalam pembayaran DMO *Fee* KKKS sebesar USD1,344,218,646.80 atau setara dengan Rp16.002.995.836.349 termasuk didalamnya pembayaran DMO *Fee* kepada PT Pertamina (Persero) yang diperhitungkan kembali dengan kewajiban valas PT Pertamina (Persero) sebesar USD51,036,455.60 atau setara dengan Rp634.603.736.799, dengan rincian sebagai berikut.

- Pembayaran DMO *Fee* kepada PT Pertamina EP untuk periode bulan November 2014 sebesar USD42,812,521.08 yang diperhitungkan dengan penyelesaian kewajiban valas PT Pertamina (Persero) sebesar USD42,812,521.08, sehingga pada saat yang sama disetorkan kembali ke Rekening KUN No.600.502411980 sebagai:
  - Pendapatan SDA Gas Alam (Kode Akun 421211) sebesar USD42,812,521.08 atau setara Rp532.330.887.108.
- Pembayaran DMO *Fee* kepada PT Pertamina EP untuk periode bulan November 2014 sebesar USD8,223,934.52 yang diperhitungkan dengan penyelesaian kewajiban valas PT Pertamina (Persero) sebesar USD8,223,934.52, sehingga pada saat yang sama disetorkan kembali ke Rekening KUN Valas No.600.502411980 sebagai:
  - Pendapatan SDA Gas Alam (Kode Akun 421211) sebesar USD8,223,934.52 atau setara Rp102.272.849.690.

g) Pembayaran *Underlifting* KKKS

Dalam pembayaran *Underlifting* KKKS sebesar USD135,950,985.26 atau setara dengan Rp1.620.737.060.000 termasuk didalamnya pembayaran *Underlifting* kepada PT Pertamina EP dan PT PHE yang diperhitungkan kembali dengan kewajiban valas PT Pertamina (Persero).

h) Koreksi Pembukuan Kredit/Debit oleh Bank Indonesia

Koreksi pembukuan kredit oleh Bank Indonesia sebesar USD2,696,039.07 atau setara dengan Rp32.045.412.097 merupakan koreksi-koreksi debit yang diakibatkan adanya koreksi pembukuan ganda, atau pembukuan ganda yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

i) Selisih Kurs Pembukuan Kredit/ Debit

www.peraturan.go.id

Selisih kurs pembukuan kredit/debit sebesar Rp11.162.119.460.000 merupakan selisih kurs pada pembukuan Bank Indonesia akibat dari perubahan kurs transaksi harian dengan kurs neraca yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selisih kurs ini terjadi karena transaksi di rekening migas Nomor 600.000411980 dalam satuan mata uang US Dollar sedangkan pembukuan harian Bank Indonesia dalam Rupiah. Koreksi selisih kurs ini tidak berpengaruh pada saldo penerimaan migas.

j) Pengeluaran Lainnya

Pengeluaran Lainnya sebesar USD11,449,979.03 atau setara dengan Rp143.610.160.335 merupakan pengeluaran atau pemindahbukuan yang peruntukannya dapat dirinci sebagai berikut.

- Pemindahbukuan ke rekening Giro Kas Negara Dalam Valuta Asing Nomor 600.500411980 sebesar USD630,404.00 atas PPh Final Pasal 4 ayat (2).
- Pemindahbukuan ke rekening Giro Kas Negara Dalam Valuta Asing Nomor 600.500411980 sebesar USD168,373.00 atas PPh Badan atas STP.
- Pemindahbukuan ke rekening Giro Kas Negara Dalam Valuta Asing Nomor 600.500411980 sebesar USD10,640,323.84 atas PPh Badan atas SKPKB.
- Pemindahbukuan ke rekening Giro Kas Negara Dalam Valuta Asing Nomor 600.500411980 sebesar USD10,878.19 atas PPh Final Pasal 26 ayat (4).

k) Biaya Adminstrasi Bank (*Bank Charges*)

Merupakan potongan yang dilakukan oleh Bank koresponden KKKS karena adanya retur atau pengembalian akibat salah rekening ketika pemerintah melakukan pembayaran atas kewajiban kontraktual. Potongan tersebut dapat diketahui dengan berkurangnya jumlah nominal antara pembayaran aktual dengan jumlah nominal yang diretur.

l) Saldo Akhir

Dari total saldo akhir sebesar USD308,054,140.47 atau setara dengan Rp3.832.193.507.447 (ekuivalen menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp12.440,00/USD), termasuk cadangan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban kontraktual dan kewajiban-kewajiban lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas tahun 2014 yang belum diselesaikan sampai akhir Desember 2014 sebesar USD239,661,415.61 atau setara dengan Rp2.981.388.010.143, dan pendapatan yang ditunda sebesar USD68,392,724.86 atau setara dengan Rp850.805.497.303.

3. *Fee* Penjualan Migas

Pemerintah tidak mencadangkan *fee* penjualan migas untuk tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 pada saldo akhir Rekening Migas per 31 Desember 2014 serta belum mengakui kewajiban atas *fee* penjualan migas untuk periode *lifting* tersebut dalam penyusunan LK BUN / LKPP Tahun 2014 dikarenakan pertimbangan:

a. Tidak dicadangkan dan belum diakuinya *fee* penjualan migas tahun 2012, 2013, dan 2014 didasarkan pada pertimbangan bahwa Direktorat Jenderal Anggaran belum menerima tagihan atas *fee* penjualan migas untuk periode tersebut dari SKK Migas;

b. Sementara itu, untuk *fee* penjualan migas tahun 2011 yang telah ditagihkan oleh SKK Migas melalui surat No. 0223/SKKC0000/2013/S4 tanggal 17 April 2013 dengan jumlah sebesar USD129,440,378.55 tidak dilakukan pencadangan dan pengakuan atas kewajiban tersebut karena dalam tagihan tersebut masih termasuk volume LNG bagian KKKS;

c. Selain itu, dengan telah terbitnya Seller Appointment Agreement (SAA) antara SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) pada tanggal 30 dan 31 Desember 2014, SKK Migas seharusnya melakukan penagihan kembali atas *fee* penjualan migas tahun 2011 dengan telah mengakomodir klausul ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme perhitungan, volume, serta hak dan kewajiban sesuai SAA tersebut.

Pemerintah berpendapat bahwa pembebanan *fee* penjualan LNG harus ditanggung secara proporsional antara Pemerintah dan Kontraktor dengan pertimbangan sebagai berikut.

a. Pasal 100 ayat (7) dan (8) PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu migas pada intinya mengatur bahwa *fee* penjualan yang ditanggung oleh negara sesuai dengan porsi volume migas bagian negara.

b. Konsistensi dengan pembebanan *fee* penjualan minyak dan *fee* penjualan gas pipa yang ditanggung negara hanya sebesar

www.peraturan.go.id

volume migas bagian negara.

c. Terdapat hasil kajian BPKP terhadap formula *fee* penjualan migas tahun 2006, yang merekomendasikan bahwa khusus untuk LNG, mengupayakan agar *fee* penjualan LNG yang dibayar oleh Pemerintah diperhitungkan sebagai *cost of sales* LNG, sehingga terjadi pembebanan yang proporsional antara Pemerintah dan KKKS (surat BPKP kepada Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan No. SP-1790/D504/2008 tanggal 15 Desember 2008).

Apabila volume LNG yang digunakan dalam perhitungan *fee* penjualan migas tahun 2011 menggunakan estimasi angka pembebanan hanya untuk volume LNG bagian negara saja (tidak termasuk volume bagian Kontraktor), maka total nilai *fee* penjualan migas tahun 2011 yang dapat disepakati untuk ditanggung oleh Pemerintah sebesar USD79,423,815.28.

Data volume LNG bagian Negara yang digunakan dalam perhitungan tersebutt berdasarkan Laporan Pengiriman LNG yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) sebagaimana dilaporkan oleh SKK Migas dalam Laporan A03 LNG periode Januari s.d. Desember 2011.

4. Rekening Panas Bumi (Rek. 508.000.084980)

Pada Catatan C.2.2 (Rekening Pemerintah Lainnya) disajikan bahwa saldo Rekening Panas Bumi per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp696.587.013.633 dan Rp343.349.686.194. Rekening Panas Bumi (Nomor 508.000084980) adalah Rekening Penerimaan Panas Bumi Kementerian Keuangan di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung penerimaan negara yang berasal dari kegiatan panas bumi di Indonesia serta menyelesaikan kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN, Pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi. Berikut adalah mutasi Rekening Panas Bumi:

(dalam rupiah)

	URAIAN	31 Desember 2014	31 Desember 2013
I.	**Saldo Awal**	**343.349.686.194**	**347.992.721.305**
II.	**Penerimaan:**		
	1. Setoran Bagian Pemerintah dari Kegiatan Usaha Panas Bumi	1.381.578.271.020	1.071.795.758.446
	2. Koreksi Pembukuan Kredit	-	-
	Total Penerimaan	**1.381.578.271.020**	**1.071.795.758.446**
III.	**Pengeluaran:**		
	1. Pembayaran PBB Pertambangan Panas Bumi	170.269.258.028	140.057.446.839
	2. Pembayaran Kembali PPN kepada Pengusaha Panas Bumi	121.690.108.423	79.288.896.199
	3. Pemindahbukuan PNBP Pertambangan Panas Bumi ke Rek. KUN	736.381.577.130	857.092.450.519
	4. Pinjaman untuk Dana Talangan	-	-
	5. Koreksi Pembukuan debit	-	-
	Total Pengeluaran	**1.028.340.943.581**	**1.076.438.793.557**
IV.	**Kenaikan/Penurunan (II - III)**	**353.237.327.439**	**(4.643.035.111)**
V.	**Saldo Akhir (I + IV)**	**696.587.013.633**	**343.349.686.194**

Penjelasan:

a. Pemindahbukuan PBB Pertambangan Panas Bumi Tahun 2014 sebesar Rp170.269.258.028 dibayarkan seluruhnya dalam satu kali pembayaran.

b. Pembayaran kembali (*reimbursement*) PPN kepada Pengusaha panas bumi sebesar Rp121.690.108.423 adalah pembayaran kembali (*reimbursement*) PPN yang pengajuannya pada Tahun 2013 dan 2014 dengan perincian sebagai berikut.
   1) Pembayaran kembali PPN yang pengajuannya Tahun 2013 adalah Rp36.900.263.978
   2) Pembayaran kembali PPN yang pengajuannya Tahun 2014 adalah Rp84.789.844.445

c. Pemindahbukuan PNBP Pertambangan Panas Bumi ke Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp736.381.577.130 terdiri dari :
   1) PNBP Pertambangan Panas Bumi Triwulan I Tahun 2014 Rp190.937.354.630
   2) PNBP Pertambangan Panas Bumi Triwulan II Tahun 2014 Rp110.006.652.896
   3) PNBP Pertambangan Panas Bumi Triwulan III Tahun 2014 Rp167.213.476.150
   4) PNBP Pertambangan Panas Bumi Triwulan IV Tahun 2014 Rp268.224.093.454

d. Saldo rekening 508.000084980 per 31 Desember 2014 sebesar Rp696.587.013.633 terdiri dari:

www.peraturan.go.id

1) Cadangan untuk pembayaran kewajiban pengembalian (*reimbursement*) PPN yang terkait dengan kegiatan usaha panas bumi sebesar Rp659.697.761.303 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

PT Pertamina Geothermal Energi (Persero)	58.418.593.666
Chevron Geothermal Salak, Ltd	184.154.408.367
Chevron Geothermal Indonesia, Ltd	135.732.998.573
Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd	281.391.760.696

2) Dana yang tersedia di rekening panas bumi yang diakui sebagai pendapatan yang ditunda yang belum dapat dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Negara pada tahun 2014 sebesar Rp36.889.252.330.

4. Laporan Barang Milik Negara

Berdasarkan hasil rekonsiliasi aset tetap per 31 Desember 2014, antara data Neraca LKKL dan data Laporan BMN, terdapat selisih aset tetap bruto sebesar Rp2.546.764.706.188, dengan rincian:

(dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap	Data Neraca LKKL*)	Data LBMN*)	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) – (3)
Tanah	944.073.630.217.177	944.073.538.847.177	91.370.000
Peralatan dan Mesin	331.124.404.219.404	331.124.215.626.404	188.593.000
Gedung dan Bangunan	210.934.630.857.630	210.856.678.936.592	77.951.921.038
Jalan, Irigasi dan Jaringan	476.191.203.084.293	476.194.458.092.017	(3.255.007.724)
Aset Tetap Lainnya	49.803.187.324.454	49.880.178.396.699	(76.991.072.245)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	113.911.321.037.403	116.456.071.547.660	(2.544.750.510.257)
Jumlah	**2.126.038.376.740.361**	**2.128.585.141.446.549**	**(2.546.764.706.188)**

*) *Tidak termasuk aset tetap yang ada di BA BUN*

Penjelasan selisih aset tetap:

1. Selisih pada Tanah sebesar Rp91.370.000 terdapat pada Kementerian Agama.
2. Selisih pada Peralatan dan Mesin, antara lain:
   a. Selisih Peralatan dan Mesin pada Kementerian Agama sebesar Rp241.562.000.
   b. Selisih Peralatan dan Mesin pada Kementerian Keuangan sebesar Rp57.870.000 disebabkan *write-off* nilai Peralatan dan Mesin yang hilang pada aplikasi SAK, sementara pada aplikasi SIMAK BMN masih tercatat.
3. Selisih Gedung dan Bangunan, antara lain pada Kementerian Keuangan sebesar Rp76.907.536.838 disebabkan perbedaan pengakuan Aset Tetap Renovasi, dimana pada aplikasi SAK direklasifikasi menjadi Gedung dan Bangunan sementara pada aplikasi SIMAK BMN tetap pada akun Aset Tetap Renovasi.
4. Selisih pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan, antara lain:
   a. Selisih Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.728.366.333 pada Kementerian ESDM disebabkan karena data aplikasi SIMAK BMN belum ter-*update*.
   b. Selisih Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.526.641.391 terdapat pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPBPBS).
5. Selisih Aset Tetap Lainnya, antara lain pada Kementerian Keuangan sebesar Rp76.907.536.838 disebabkan perbedaan pengakuan Aset Tetap Renovasi, dimana pada aplikasi SAK direklasifikasi menjadi Gedung dan Bangunan sementara pada aplikasi SIMAK BMN tetap pada akun Aset Tetap Renovasi.
6. Selisih Konstruksi Dalam Pengerjaan, antara lain:
   a. Selisih KDP pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp2.498.582.512.483 karena perbedaan pencatatan dimana pada aplikasi SIMAK BMN masih dicatat sebagai KDP sementara pada aplikasi SAK telah dilakukan reklasifikasi menjadi persediaan.
   b. Selisih KDP pada Lembaga Ketahanan Nasional sebesar Rp38.453.031.651 karena pembangunan yang belum selesai

www.peraturan.go.id

pada akhir tahun pada aplikasi SIMAK BMN masih tercatat sebagai KDP sementara pada aplikasi SAK dicatat sebagai piutang.

c. Selisih KDP pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sebesar Rp5.011.650.910 karena pembangunan yang belum selesai pada akhir tahun pada aplikasi SIMAK BMN masih tercatat sebagai KDP sementara pada aplikasi SAK dicatat sebagai piutang.

Adapun hasil rekonsiliasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2014 antara data Neraca LKKL dan data Laporan BMN terdapat selisih sebesar Rp629.696.211 , dengan rincian:

(dalam rupiah)

Akumulasi Penyusutan per Jenis Aset Tetap	Data Neraca LKKL*)	Data LBMN*)	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) – (3)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(192.238.197.002.032)	(192.399.887.181.305)	161.690.179.273
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(40.633.664.150.064)	(40.471.176.183.821)	(162.487.966.243)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(179.837.796.082.502)	(179.839.120.349.424)	1.324.266.922
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(774.488.766.397)	(774.591.982.656)	103.216.259
Jumlah	**(413.484.146.000.995)**	**(413.484.775.697.206)**	**629.696.211**

*) *tidak termasuk Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang ada di BA BUN*

5. Pelaksanaan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah pada Tahun 2014

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan atau hasil penilaian kembali dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2013, Pemerintah Pusat mulai melaksanakan penyusutan Aset Tetap. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan untuk mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN.

Dalam rangka penerapan penyusutan aset tetap pada Pemerintah Pusat, telah diterbitkan beberapa peraturan/ketentuan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 4/KMK.06/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, KMK Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, dan KMK Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Pusat melaksanakan penyusutan aset tetap mulai pelaporan keuangan tahun 2013.

Terhadap aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2013, maka dilakukan penyusutan pertama kali pada awal tahun 2013. Penyusutan pertama kali dilakukan dengan menghitung penyusutan selama periode sejak aset tetap diperoleh sampai dengan akhir tahun 2012. Sesuai dengan PMK Nomor 1/PMK.06/2013, seluruh aset tetap disusutkan sejak tanggal perolehan, termasuk aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 yang telah dilaksanakan inventarisasi dan penilaian (IP). Kebijakan penyusutan atas aset tetap yang telah di-IP tersebut telah dilaksanakan oleh K/L pada pelaporan keuangan tahun 2013.

Sebelum dilakukan penyusutan pertama kali, terlebih dahulu perlu dilakukan proses normalisasi terhadap aset tetap yang memiliki data kuantitas dan nilai yang tidak wajar, tanggal perolehan kosong, atau kondisi-kondisi data aset tetap yang tidak sesuai untuk proses penyusutan. Kondisi ini dapat terjadi diantaranya disebabkan proses penginputan koreksi hasil inventarisasi dan penilaian yang tidak sempurna, proses perbaikan data SIMAK BMN yang tidak sempurna, maupun hal-hal lain yang apabila tidak dilakukan proses normalisasi maka data aset tetap tersebut tidak mencerminkan penghitungan penyusutan aset tetap secara memadai dan akurat. Apabila dalam proses normalisasi tersebut ditemukan data yang tidak wajar, maka K/L yang bersangkutan harus menindaklanjuti untuk kemudian dilakukan koreksi sehingga dihasilkan data aset tetap yang andal dan akurat.

Penyempurnaan Kebijakan Penyusutan Aset Tetap

Pada tahun 2014, Pemerintah telah menyempurnakan kebijakan penyusutan atas aset tetap yang telah di-IP dengan menerbitkan PMK Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013, dan KMK Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013. Dalam PMK Nomor 90/PMK.06/2014

www.peraturan.go.id

dan KMK Nomor 145/KM.6/2014 dinyatakan bahwa aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 yang telah di-IP, disusutkan sejak Semester II Tahun 2010. Sebagai tindak lanjut atas perubahan kebijakan penyusutan atas aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 yang telah di-IP tersebut, maka satuan kerja pada K/L telah melakukan koreksi nilai penyusutan pada pelaporan keuangan tahun 2014.

Koreksi akumulasi penyusutan sebagai akibat dari penyempurnaan kebijakan penyusutan disajikan pada **Lampiran 37.**

6. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

Aset Bersejarah pada K/L antara lain:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat, berupa Gedung Merdeka berlokasi di Jl. Asia Afrika No. 65, Kelurahan Braga, Bandung, Jawa Barat.

b. Badan Pemeriksa Keuangan, aset tersebut berlokasi di Gedung Museum BPK, Magelang. Barang bersejarah tersebut saat ini masih tercatat di kantor BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta.

c. Kementerian Perhubungan berupa 2 Tugu Peringatan dan Bangunan Bersejarah.

d. Kementerian Luar Negeri, berupa aset dari Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung sebanyak 67 unit dan aset yang berada pada Gedung Pancasila yang pengelolaannya berada pada Sekretariat Jenderal sebanyak 524 buah.

e. Arsip Nasional Republik Indonesia, berupa arsip/dokumen negara yang terdiri atas:
   - Arsip Tekstual/Kertas sebanyak 29.857 meter linier.
   - Arsip Kartografi/Peta sebanyak 100.370 lembar.
   - Arsip Film sebanyak 59.109 reel.
   - Arsip Mikrofilm sebanyak 9.932 roll (negatif) dan 4.732 roll (positif), Arsip *Microfische* sebanyak 7200 *fische*.
   - Arsip Video sebanyak 27.350 kaset.
   - Arsip Rekaman Suara sebanyak 43.276 kaset dan arsip *reel to reelsound* sebanyak 871 *reel*.
   - Arsip *Optical Disc* sebanyak 8.707 keping.
   - Arsip foto sebanyak 1.663.000 lembar (negatif dan cetak).
   - Arsip foto belum terdata sebanyak 221 boks dan 282 album.

f. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mempunyai 4 unit aset bersejarah yang terdiri dari Tugu Peringatan, Tugu Raffless, Makam Belanda (Santiong), dan Patung Kepala Sapi.

g. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Survei Geologi berupa Gedung Museum yang terletak di Jalan Diponegoro 57 Bandung beserta berbagai koleksi yang ada di dalamnya.

h. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 764.988 unit aset bersejarah yang dikelompokkan menjadi:
   - Benda cagar budaya seperti: bangunan cagar budaya (candi, situs, tugu, gedung, dsb); dan
   - Benda sejarah lainnya seperti: benda sejarah dalam klasifikasi peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya, seperti: benda kuno, benda antik, benda seni, pusaka, fosil, dsb.

i. Perpustakaan Nasional RI, berupa koleksi manuskrip/naskah kuno berjumlah 10.338 eksemplar naskah kuno. Terdapat penambahan naskah kuno sejumlah 169 eksemplar pada tahun 2014.

j. Kementerian Hukum dan HAM menguasai aset bersejarah sebanyak 13 unit.

k. Kementerian Sosial RI menguasai aset bersejarah berupa Tugu Peringatan Lainnya sebanyak 3 unit, 2 unit Tugu Pembangunan, serta 1 Unit Makam Bersejarah.

l. Kementerian Kehutanan, berupa Tugu Peringatan sebanyak 1 unit dan Eksakta sebanyak 96 Buah.

m. Kementerian Pekerjaan Umum menguasai aset sejarah yang terdiri dari:
   - tugu peringatan sebanyak 14 unit;
   - bangunan bersejarah (Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, Rumah Adat, Makam Bersejarah) sebanyak 4 unit;
   - monografi sebanyak 2 buah; dan
   - laporan sebanyak 7 buah.

www.peraturan.go.id

7. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan BLU telah dijelaskan sebelumnya pada Catatan Penting Lainnya dalam Laporan Realisasi APBN. Perbandingan aset, kewajiban, dan ekuitas Satker BLU sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) diilustrasikan sebagaimana grafik di bawah ini.

Dalam triliun Rupiah

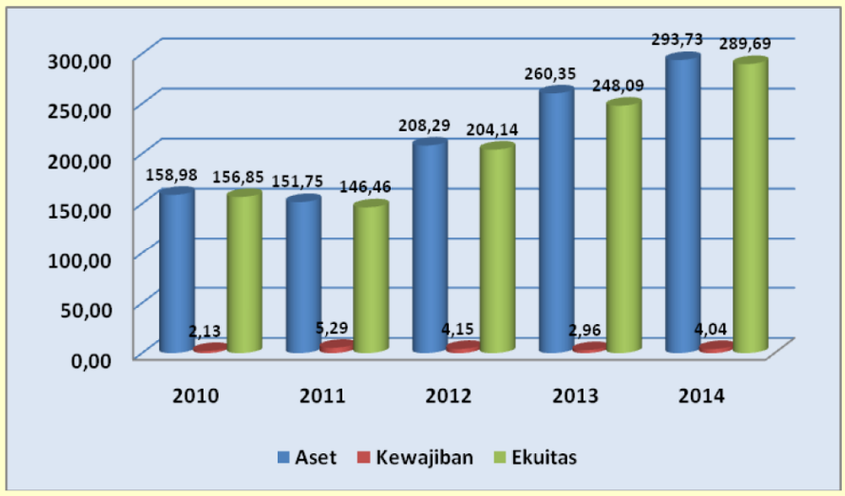

Grafik 27 Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Badan Layanan Umum Tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan Tahun 2014

Ikhtisar Laporan Keuangan BLU disajikan pada **Lampiran 38.**

8. Neraca Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR-NAD-Nias)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR NAD-Nias) sebagaimana telah ditetapkan dengan UU Nomor 10 Tahun 2005, masa tugas BRR NAD-Nias adalah empat tahun. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009, masa tugas BRR NAD-Nias berakhir tanggal 16 April 2009. Namun demikian, sebagai Entitas Pelaporan, BRR-NAD Nias telah berakhir per 31 Desember 2008, sehingga Neraca Penutup BRR NAD-Nias adalah per 31 Desember 2008.

Neraca Likuidasi BRR NAD-Nias belum selesai disusun, sehingga Aset / kewajiban eks BRR NAD-Nias tidak dikonsolidasikan pada LKPP Tahun 2014 dan diungkapkan secara memadai di Catatan Penting Lainnya. Pada Catatan Penting Lainnya LKPP Tahun 2014 yang diungkapkan adalah aset / kewajiban BRR NAD-Nias per 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh BPK.

Dalam rangka penyelesaian aset-aset BRR NAD-Nias yang berakhir tanggal 16 April 2009, Pemerintah membentuk Tim Likuidasi BRR NAD-Nias. Tugas Tim Likuidasi antara lain menyusun Laporan Keuangan Likuidasi Bagian Anggaran 094 (BRR NAD-Nias). Sampai dengan penyusunan LKPP Tahun 2014, LK Likuidasi belum diterbitkan mengingat LK Penutup per 16 April 2009 belum diaudit oleh BPK. Menteri Keuangan pada bulan Februari 2014 telah menunjuk BPKP untuk mereviu LK Penutup BRR NAD-Nias per 16 April 2009 sebelum diaudit oleh BPK.

Deputi Kepala BPKP melalui surat nomor S-438/D.1.01/2014 tanggal 4 Agustus 2014 menyampaikan Laporan Hasil Reviu (LHR)

www.peraturan.go.id

atas Laporan Keuangan Penutup BRR NAD-Nias. Pokok-pokok LHR dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Persediaan tanah untuk relokasi (biaya pengadaan tanah untuk bantuan kepada masyarakat) yang belum ada statusnya sejumlah Rp57.038.869.905.
2. Hasil reviu atas koreksi penambahan aset neto sebesar Rp839.307.413.926, menunjukan adanya *double counting* sebesar Rp92.720.691.679, pengurangan nilai aset yang tidak *double counting* sebesar Rp19.121.544.150 dan koreksi yang tidak didukung SP2D yaitu koreksi tambah sebesar Rp51.748.365.293 dan koreksi kurang sebesar Rp117.839.224.242.
3. Koreksi BPK RI yang terkait dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp423.621.903.000 yang tidak dicatat sebagai aset tetap dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2.494.902.679.522 yang belum dicatat sebagai aset, belum dapat ditelusuri karena tidak ada rincian SP2D-nya.
4. Koreksi BPK RI yang terkait dengan aset *Japan International Cooperation System* (JICS) sebesar Rp276.216.129.314 yang dikeluarkan dari pembukuan, seharusnya dicatat dan diinventarisasi karena SP2D-nya telah disahkan oleh KPPN Banda Aceh.
5. Pengklasifikasian/penggolongan aset tetap lainnya dan aset lainnya yang tidak tepat yaitu:
   a. Dalam Akun Aset Tetap Lainnya, terdapat komputer sejumlah Rp4.049.282.425 dan alat kantor lainnya sejumlah Rp7.476.340.424. Komputer dan alat kantor lainnya, seharusnya termasuk dalam kelompok peralatan dan mesin; dan
   b. Dalam Akun Aset Lainnya, terdapat pengeluaran yang terkait dengan pengadaan aset tetap, yaitu biaya perencanaan sebesar Rp136.775.410.684 dan biaya pengawasan sebesar Rp43.484.458.956. Seharusnya biaya tersebut direklasifikasi menambah aset tetap yang terkait.
6. Pencatatan yang tidak konsisten atas aset tetap hibah yang berasal dari NGO dan Negara Donor, yaitu di dalam penjelasan pos-pos neraca di Catatan atas Laporan Keuangan Penutup terdapat penjelasan bahwa:
   a. Peralatan dan Mesin termasuk aset tetap hibah yang berasal dari NGO dan Negara Donor seperti JICS, Pemerintah Belanda, UNHCR, sebesar Rp44.948.462.361; dan
   b. Jalan, Irigasi dan Jaringan termasuk aset tetap hibah yang berasal dari Pemerintah Belanda sebesar Rp61.645.802.641.

   Namun aset tetap yang berasal dari JICS senilai Rp276.216.129.314, dikeluarkan dari pembukuan.
7. Di dalam klasifikasi Aset Lainnya pada penjelasan Catatan atas Laporan Keuangan Penutup terdapat aset lain-lain sejumlah Rp193.308.578.706 yang tidak ada rinciannya lebih lanjut.
8. Rincian aset tetap yang terdapat pada Lampiran Neraca Penutup tidak sesuai dengan klasifikasi aset yang terdapat pada penjelasan Catatan atas Laporan Keuangan Penutup.
9. Aset tetap yang belum dilakukan inventarisasi minimal sebesar Rp204.986.931.913, mengakibatkan belum dapat diserahkan kepada penerima manfaat.

Berdasarkan hasil reviu BPKP tersebut, saat ini Pemerintah sedang melakukan koreksi atas LK Penutup BRR NAD-Nias per 16 April 2009. LK Penutup yang telah dikoreksi tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada BPK untuk dilakukan audit.

Berikut ini adalah Neraca per 31 Desember 2008 (*audited*).

NERACA
BRR NAD-NIAS

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2008 (*audited*)
Aset	
Aset Lancar	
Piutang Kepada Pihak Ketiga	516.968.200
Uang Muka Belanja	24.546.204.400
Belanja Dibayar di Muka	2.149.584.510
Persediaan	78.951.123.713
Jumlah Aset Lancar	106.163.880.823
Aset Tetap	
Tanah	572.821.719.812
Peralatan dan Mesin	1.538.503.845.802

www.peraturan.go.id

Gedung dan Bangunan	3.351.099.589.510
Jalan Irigasi dan Jaringan	4.771.805.420.047
Aset Tetap Lainnya	27.483.007.111
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.049.831.238.560
Jumlah Aset Tetap	11.311.544.820.842
Aset Lainnya	
Aset Lain-Lain	661.364.926.291
Jumlah Aset Lainnya	661.364.926.291
Jumlah Aset	**12.079.073.627.956**
Kewajiban	-
Ekuitas Dana	
Ekuitas Dana Lancar	
Cadangan Piutang	27.212.757.110
Cadangan Persediaan	78.951.123.713
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	106.163.880.823
Ekuitas Dana Investasi	
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	11.311.544.820.842
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	661.364.926.291
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	11.972.909.747.133
Jumlah Ekuitas Dana	**12.079.073.627.956**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	**12.079.073.627.956**

9. Badan Lainnya

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 butir g dan I, Keuangan Negara juga meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

Badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah tersebut pada LKPP Tahun 2014 dilaporkan sebagai Unit Badan Lainnya. Unit Badan Lainnya yang selanjutnya disingkat UBL adalah unit organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan dan/atau mendukung fungsi Kementerian Negara/Lembaga dimana secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga tertentu.

UBL dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden. UBL antara lain berbentuk akademi, badan, dewan, komisi, komite, konsil, korps, lembaga, majelis, otorita, dan unit kerja.

Untuk dapat dikategorikan sebagai UBL, terdapat beberapa kriteria yaitu:

a. Didirikan dengan peraturan perundang-undangan;
b. Bukan merupakan Pengguna Anggaran;
c. Bukan merupakan Perusahaan Negara;
d. Menggunakan fasilitas dari Negara berupa Barang Milik Negara, dan/atau Pemberian kewenangan untuk menerima dan mengelola dana publik;
e. Tidak terdapat penyertaan modal pemerintah; dan
f. Terdapat pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan UBL, maka sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Bendahara Umum telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2013 sebagai pedoman teknis pelaporan keuangan bagi UBL. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, untuk Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, maka mekanisme pelaporan UBL adalah sebagai berikut.

www.peraturan.go.id

a. UBL Satker/ Bagian Satker

UBL Satker/Bagian Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan belanja, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. UBL Satker/Bagian Satker merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) atau bagian dari UAKPA pada Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi UBL dimaksud. Dalam hal UBL Satker/Bagian Satker mendapatkan dana di luar APBN yang tidak menjadi PNBP, dana dimaksud diperlakukan sebagai pendapatan hibah, sepanjang memenuhi kriteria pendapatan hibah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme pengelolaan hibah dan sistem akuntansi hibah.

b. UBL Bukan Satker

UBL Bukan Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan belanja, termasuk dana pihak ketiga sesuai mekanisme yang diatur oleh masing-masing UBL. Dalam menyusun laporan keuangan, UBL Bukan Satker diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). UBL Bukan Satker dilaporkan di LKPP sebesar *net equity* (selisih aset dikurangi dengan kewajiban) sebagai aset lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya terdapat 90 Unit Badan Lainnya. Selanjutnya terhadap daftar UBL ini terdapat penambahan untuk SKK MIGAS dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-322/PB/2014 tentang Penambahan Unit Badan Lainnya dalam Daftar Unit Badan Lainnya Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.

Dalam Laporan Keuangan Badan Lainnya tahun 2014, terhadap 92 UBL tersebut secara garis besar dikelompokkan sebagai berikut.

1. UBL Satker sebanyak 26 UBL.
2. UBL Bagian Satker sebanyak 53 UBL.
3. UBL Bukan Satker sebanyak 9 UBL.
4. UBL yang belum aktif/ belum mengelola APBN sebanyak 4 UBL.

Ikhtisar Laporan Keuangan UBL Satker/Bagian Satker dan UBL Bukan Satker tersebut diatas disajikan dalam **Lampiran 39**.

Unit Badan Lainnya yang berstatus tidak aktif/belum aktif/belum mengelola APBN terdiri dari:

1. Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N)
   Untuk BP2N telah dibekukan oleh pemerintah pada tahun 2014. Pembekuan badan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman. Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2009 ini menyatakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 sebagai dasar pembentukan BP2N dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk selanjutnya, tugas BP2N diambil alih oleh Badan Perfilman Indonesia (BPI). BPI ini merupakan lembaga swasta yang dibentuk oleh masyarakat perfilman.

2. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)
   Sesuai surat Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan Nomor OT.01.01/I/041/2013 tanggal 7 Januari 2013 hal Hasil Inventarisasi Eksistensi UBL di lingkungan Kementerian Kesehatan, dinyatakan bahwa Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) belum aktif.

3. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Buruk untuk Anak (KAN- PBPTA)
   Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor B.102/SJ-PR/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 hal Penyampaian Unit Badan Lainnya di Lingkungan Kemenakertrans terdapat empat UBL, dan tidak termasuk Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Buruk untuk Anak (KAN-PBPTA).

4. Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda
   Sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Nomor KU.05.08-SK/128 tanggal 28 Februari 2014, sampai saat ini Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda tersebut belum

www.peraturan.go.id

aktif dan tidak mendapatkan alokasi dana APBN TA 2014.

Pada tahun 2014 terdapat pembubaran beberapa UBL, yaitu:

1. Komite Ekonomi Nasional dibubarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014.
2. Komite Inovasi Nasional dibubarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014.
3. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia dan Dewan Gula Nasional.
   Peraturan Presiden nomor 176 Tahun 2014 membubarkan beberapa UBL dan menegaskan status beberapa UBL yang berstatus tidak aktif/belum aktif.

10. Aset Bekas Milik Asing/Cina

Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) merupakan Aset yang dikuasai Negara adalah aset bekas yang bersumber dari:

a. Milik perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan peraturan Penguasa Perang Pusat melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/ 0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;

b. Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan sesuai Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;

c. Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan Republik Rakyat Tjina (RRT) dalam pemberontakan G.30.S/PKI yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikuasai Negara melalui Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66; dan

d. Organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang Tionghoa perantauan (Hoa Kiauw) yang bukan Warga Negara Asing yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan/atau memperoleh pengakuan dari Negara Republik Indonesia, beserta cabang-cabang dan bagian-bagiannya.

Penyelesaian ABMA/C diatur dalam PMK Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, yang sebelumnya diatur dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 perihal Tanah dan Bangunan Gedung Bekas Sekolah Asing/Cina. Sesuai dengan PMK Nomor 188/PMK.06/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK 154/PMK.06/2011, penyelesaian ABMA/C dapat dilaksanakan dengan beberapa cara sebagai berikut.

a. Dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Negara;

b. Dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Daerah;

c. Dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara;

d. Dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah; atau

e. Dikeluarkan dari daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina.

Capaian Kinerja Penyelesaian ABMA/C Sampai Dengan Tahun 2014

Atas peran Tim Penyelesaian ABMA/C Tingkat Pusat dan Tim Asistensi Daerah, pada Tahun 2014 sebanyak 51 aset telah dimantapkan status hukumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Tim Asistensi Daerah (TAD)	BMN	BMD	BMN Sebagian*	BMD Sebagian**	BMN dan BMD Sebagian***	BMD Sebagian dan BMN Sebagian****	Dilepaskan Kepada Pihak Ketiga	Jumlah
I	-	3	-	-	-	-	-	3
II	-	-	-	-	-	-	-	-

www.peraturan.go.id

III	-	2	-	-	-	-	-	2
IV	-	6	-	-	-	-	-	6
V	-	-	-	-	-	1	-	1
VI	-	-	-	2	-	-	-	2
VII	-	1	-	-	-	-	-	1
VIII	1	5	-	1	-	-	-	7
IX	-	4	1	-	-	-	-	5
X	-	5	-	-	-	-	1	6
XI	-	4	-	2	-	-	-	6
XII	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV	1	-	-	-	-	-	-	1
XV	-	1	-	-	-	-	-	1
XVI	-	1	2	2	-	-	-	5
XVII	1	4	-	-	-	-	-	5
∑	**3**	**36**	**3**	**7**	-	**1**	**1**	**51**

Keterangan:

- * dan **: Barang Milik Negara Sebagian dan/atau Barang Milik Daerah Sebagian adalah pemantapan status hukum ABMA/C menjadi BMN dan/atau BMD secara sebagian, dimana penyelesaiannya hanya sebagian dari luas tanah yang tercantum pada Lampiran PMK 188/PMK.06/2008 dan untuk sisanya akan diselesaikan kemudian setelah diusulkan penyelesaiannya kembali oleh Tim Asistensi Daerah. Sehingga pada akhirnya untuk 1 ABMA/C dapat diterbitkan 2 atau lebih Keputusan Menteri Keuangan.
- ***: BMN dan BMD Sebagian adalah pemantapan status hukum ABMA/C dengan cara dimantapkan status hukumnya menjadi BMN Sebagian dan BMD dan/atau BMN dan BMD Sebagian. Sehingga pada akhirnya untuk 1 ABMA/C dapat diterbitkan 2 Keputusan Menteri Keuangan.
- ****: BMD Sebagian dan BMN Sebagian adalah pemantapan status hukum ABMA/C dengan cara dimantapkan status hukumnya menjadi BMD Sebagian dan BMN Sebagian. Sehingga pada akhirnya untuk 1 ABMA/C dapat diterbitkan 2 atau lebih Keputusan Menteri Keuangan.

Pada Tahun 2014, terdapat pelunasan pembayaran kompensasi ke kas negara berdasarkan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas 1 (satu) ABMA/C yang dilepaskan kepada pihak ketiga sejumlah Rp1.261.294.000.

Sampai dengan Tahun 2014, dari total ABMA/C sebanyak 1.010 dalam Lampiran PMK Nomor 188/PMK.06/2008 dan 5 aset Temuan Baru, 291 aset telah dimantapkan status hukumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Tim Asistensi Daerah (TAD)	menjadi BMN	menjadi BMD	BMN Sebagian	BMD Sebagian	BMN dan BMD Sebagian	BMD Sebagian dan BMN Sebagian	Dilepaskan kepada Pihak Ketiga	Dikeluarkan dari Lampiran PMK 188	Jumlah	Temuan Baru ABMA/C
I	-	6	-	-	1	-	-	-	7	-
II	9	20	1	-	-	-	-	-	30	-
III	4	9	-	2	-	-	-	-	15	-
IV	1	13	-	-	-	-	2	-	16	-
V	4	3	-	-	-	1	-	-	8	-
VI	-	1	-	3	-	-	-	-	4	-
VII	3	5	-	1	-	-	-	-	9	3
VIII	6	29	-	1	-	-	-	-	36	-
IX	3	21	1	-	2	-	1	-	28	1
X	10	33	-	2	1	-	2	-	48	1
XI	-	25	-	7	-	-	-	-	32	-
XII	5	2	-	-	-	-	-	-	7	-
XIII	-	3	-	-	-	-	-	2	5	-
XIV	7	4	-	-	-	-	-	-	11	-
XV	-	14	-	1	-	-	-	-	15	-

www.peraturan.go.id

XVI	1	6	2	2	-	-	-	-	11	-
XVII	3	6	-	-	-	-	-	-	9	-
∑	**56**	**200**	**4**	**19**	**4**	**1**	**5**	**2**	**291**	**5**

Rincian Capaian Kinerja Penyelesaian ABMA/C s.d Tahun 2014 dapat dilihat pada **Lampiran 40.**

11. Aset Eks BPPN

Pada tahun 2014 sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dikelola Pemerintah dan merupakan sumber pembiayaan dalam negeri non-utang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hasil pengelolaan aset pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp539.990.719.032,40 (aset eks BPPN sebesar Rp401.935.496.548 dan BDL sebesar Rp138.055.223.484) atau sebesar 54% terhadap target APBN-P 2014 sebesar Rp1.000.000.000.000. Kebijakan pengelolaan terhadap aset yang dikuasai oleh Kementerian Keuangan pada dasarnya ditempuh melalui penjualan di muka umum atau lelang, pengurusan piutang Negara melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan penyerah kelolaan aset kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 mengungkapkan permasalahan antara lain Pemerintah belum menyelesaikan penelusuran keberadaan aset kredit eks BPPN sebanyak 7.591 aset kredit senilai Rp3.065.098.455.943 dan sebanyak 626 aset properti senilai Rp400.289.684.384. Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dengan melakukan penelusuran terhadap selisih data dimaksud dan menyampaikan hasil penelusuran kepada BPK RI.

Pemerintah terus melakukan penelusuran atas Aset Kredit Eks BPPN dan Aset Properti. Kerja keras pemerintah dalam menelusuri dokumen tersebut telah membawa hasil, sehingga sampai dengan saat ini selisih aset kredit sebesar Rp3,065 triliun yang meliputi aset kredit sebanyak 7.591 *account* telah dapat ditelusuri seluruhnya. Rincian hasil penelusuran dan verifikasi hingga tahun 2014 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2012 adalah sebagai berikut.

Penelusuran Aset Kredit eks BPPN

Uraian	Nilai (Rp)
Selisih awal (Berdasarkan LHP BPK Tahun 2012)	7.726.261.668.803,40
Mengurangi : Hasil penelusuran Tahun 2013	(1.916.396.142.922,53)
Menambah : 5 (lima) debitur aset kredit yang tidak ditemukan dalam laporan pertanggungjawaban PT Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2009	24.569.339.057,80
Sisa selisih penelusuran tahun 2012	**5.834.434.864.938,67**
Mengurangi : Hasil Penelusuran Tahun 2013	2.769.336.408.997,18
Sisa selisih penelusuran tahun 2013	**3.065.098.455.941,49**
Mengurangi : Hasil Penelusuran Tahun 2014	3.065.098.455.941,49
Sisa selisih penelusuran tahun 2014	-

Dari upaya yang telah dilakukan terhadap aset properti, diperoleh hasil dari semula senilai Rp400.339.684.385 menjadi tersisa Rp122.069.231.521 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2013)	**627**	**400.339.684.385**
Hasil Penelusuran TA 2014:		
▪ Terjual di BPPN dan PPA	122	50.135.490.148
▪ Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	8	59.069.114.858
▪ Aset Sewa yang digunakan Bank (tercatat dengan keterangan sewa)	20	5.090.723.763
▪ Aset jaminan BDL dan PKPS	84	94.040.671.431
▪ Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	35	69.934.452.664
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2014)	**358**	**122.069.231.521**

www.peraturan.go.id

Penelusuran sisa aset properti temuan BPK yang disajikan masih menyisakan 358 aset dengan nilai buku Rp122.069.231.521 dikarenakan dokumen kepemilikan tidak dikuasai oleh Pemerintah dan data alamat aset kurang memadai untuk dilakukan pengecekan fisik, misalnya alamat aset hanya tercantum kota saja atau hanya nama jalan tanpa adanya nomor.

Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan amanat UU No 24 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2013 yang mengamanatkan agar Pemerintah menyelesaikan permasalahan Aset Eks BPPN secara signifikan setiap tahun dan diselesaikan dalam waktu paling lama lima tahun yaitu sampai dengan TA 2018.

12. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah. Terealisasinya kewajiban kontinjensi merupakan risiko fiskal bagi Pemerintah karena mengakibatkan terjadinya tambahan pengeluaran. Kewajiban kontinjensi bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur, program jaminan sosial nasional, tuntutan hukum kepada Pemerintah yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht),* dan kewajiban Pemerintah untuk menambahkan modal pada lembaga keuangan tertentu.

1) Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur

Risiko fiskal yang terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur berasal dari dukungan dan/atau jaminan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap beberapa proyek, yaitu proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap I dan Tahap II, percepatan penyediaan air minum, dan proyek dengan skema Kerja sama Pemerintah-Swasta (KPS). Pemberian jaminan ini membawa konsekuensi fiskal bagi Pemerintah, dalam bentuk peningkatan kewajiban kontinjensi Pemerintah yang kemudian dapat menjadi tambahan beban bagi APBN.

Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I)

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat, Pemerintah antara lain telah menetapkan kebijakan untuk memberikan penugasan kepada PT PLN (Persero) dalam melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW/Fast Track Program/FTP Tahap I). Pemerintah memberikan jaminan penuh terhadap pembayaran kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur atau perbankan yang memberikan pinjaman untuk proyek-proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik dimaksud sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. Penjaminan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelayakan kredit PT PLN (Persero) dalam mencari pinjaman (*credit worthiness*) sekaligus menurunkan biaya modal atas pendanaan proyek. Proyek dalam program FTP I tersebut dibiayai dari anggaran PT PLN (Persero) dan pembiayaan perbankan. Porsi pembiayaan perbankan mencakup sekitar 85 persen dari total kebutuhan dana pembangunan pembangkit dan transmisi. Hingga 30 Mei 2014, pada proyek FTP I Pemerintah telah mengeluarkan 35 surat jaminan pemerintah (*letter of guarantee*) dengan total nilai kredit yang dijamin mencapai Rp71,8 triliun.

Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas (Proyek 10.000 MW Tahap II)

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan dukungan dalam bentuk penjaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero). Jaminan kelayakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 dilaksanakan dalam bentuk garansi (bukan penanggungan/*borgtocht*) dan hanya diberikan kepada proyek pembangkit tenaga listrik yang dibangun melalui kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan pengembang listrik

www.peraturan.go.id

swasta dengan skema jual beli tenaga listrik (Independent Power Producer/IPP). Sampai dengan bulan Juni 2014, Pemerintah telah mengeluarkan lima Surat Jaminan Kelayakan Usaha untuk proyek IPP dalam FTP II.

Program Percepatan Penyediaan Air Minum

Dalam rangka percepatan penyediaan air minum bagi masyarakat dan untuk mencapai *Millenium Development Goals* (MDG's), Pemerintah memandang perlu untuk mendorong peningkatan investasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Upaya tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan akses PDAM untuk memperoleh kredit investasi dari perbankan nasional melalui kebijakan pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan dimaksud dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Dalam pelaksanaannya, pemberian jaminan dan subsidi bunga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, dan perubahannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.011/2011. Risiko fiskal yang mungkin terjadi dari penjaminan ini yaitu apabila PDAM gagal memenuhi kewajiban finansial atas kredit investasinya yang jatuh tempo kepada perbankan. Beberapa faktor risiko yang dapat mempengaruhi kemampuan PDAM dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur secara tepat waktu, antara lain adalah tingginya tingkat kehilangan air (*non revenue water*/NRW), tingginya biaya operasional, manajemen internal PDAM yang kurang handal, serta penetapan tarif air minum (oleh pemerintah daerah/kepala daerah) yang berada di bawah harga keekonomian. Sampai dengan bulan Juni 2014, Pemerintah telah mengeluarkan sebanyak lima Surat Jaminan Pemerintah Pusat terkait proyek PDAM.

Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, dan peraturan perubahannya, yakni Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011. Proses lelang proyek IPP PLTU Jawa Tengah telah dilakukan dan ditetapkan pemenangnya oleh PT PLN (Persero). Pada tanggal 6 Oktober 2011 telah dilakukan penandatangan dokumen pelaksanaan dan penjaminan proyek. Proyek tersebut mendapatkan penjaminan dengan skema penjaminan bersama antara Pemerintah dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Proyek ini ditargetkan beroperasi komersial (*commercial operation date*/COD) pada tahun 2017.

2) Jaminan Sosial

Program Jaminan Sosial Nasional

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), mulai 1 Januari 2014 yang lalu Indonesia menjalankan sistem jaminan sosial yang baru. Hal ini ditandai dengan transformasi PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan serta PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Pada 1 Januari 2014 tersebut, BPJS Kesehatan mulai menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional (JKN). Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan program ketenagakerjaan paling lambat tanggal 1 Juli 2015. Program ketenagakerjaan terdiri atas program jaminan kecelakaan kerja (JKK), program jaminan kematian (JKm), program jaminan hari tua (JHT), dan program jaminan pensiun (JP).

Dalam pelaksanaan program JKN, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan disikapi dengan baik, agar tidak menimbulkan risiko fiskal di masa yang akan datang. Salah satu potensi risiko fiskal di tahun 2014 adalah ketidaksesuaian antara besaran iuran yang telah ditetapkan dan diterima oleh BPJS Kesehatan dengan besaran klaim yang harus dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada penyedia jasa kesehatan. Besaran iuran JKN disajikan sebagai berikut.

TABEL BESARAN IURAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

No.	Kelompok	Besaran Iuran (Per Orang Per Bulan)	Manfaat	
			Akomodasi	Medis
1	PBI	Rp19.225	Kelas 3	Sama
2	Pegawai Negeri	5% dari gaji/upah	Kelas 2 bagi golongan I dan II	

www.peraturan.go.id

			Kelas I bagi golongan III dan IV	
3	Pegawai Swasta*	4,5% dari gaji/upah*	Kelas 2 bagi pegawai dengan gaji s.d. 1,5 PTKP K1	
		5% dari gaji/upah**	Kelas 1 bagi pegawai dengan gaji s.d. 1,5-2 PTKP K1	
4	Pekerja bukan penerima upah & bukan pekerja	Rp25.500	Kelas 3	
		Rp42.500	Kelas 2	
		Rp59.500	Kelas 1	

Pemerintah mendesain program jaminan ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan dan menyeimbangkan 3 (tiga) hal penting yaitu kecukupan manfaat (*adequacy*), kemampuan membayar (*affordability*), dan kesinambungan program (*sustainability*). Potensi risiko fiskal yang berasal dari implementasi program ketenagakerjaan SJSN di tahun 2014 relatif kecil, karena jumlah akumulasi iuran program diperkirakan masih mencukupi untuk mendanai klaim. Hal ini mengingat saat ini program JKK dan program JKm memiliki aset bersih yang relatif besar, yang berasal dari alokasi pengalihan aset PT Jamsostek. Demikian juga untuk program JHT mempunyai potensi risiko fiskal yang relatif kecil, karena penyelenggaraan programnya dilaksanakan berdasarkan skema iuran pasti. Selanjutnya, program JP juga diyakini mempunyai potensi risiko fiskal yang relatif kecil, mengingat masa iuran wajib minimal selama 15 tahun.

3) Kewajiban Menjaga Modal Minimum Lembaga Keuangan Tertentu

Kewajiban kontinjensi Pemerintah pada sektor keuangan terutama berasal dari kewajiban Pemerintah untuk menambah modal lembaga keuangan, yaitu Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), jika modal lembaga keuangan tersebut di bawah modal sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangundangan.

Bank Indonesia (BI)

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009, modal BI ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2,0 triliun. Dalam hal terjadi risiko atas pelaksanaan tugas dan wewenang BI yang mengakibatkan modalnya berkurang dari Rp2,0 triliun, sebagian atau seluruh surplus tahun berjalan dialokasikan untuk cadangan umum guna menutup risiko dimaksud. Dalam hal setelah dilakukan upaya pengalokasian surplus tahun berjalan untuk cadangan umum, jumlah modal BI masih kurang dari Rp2,0 triliun, Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun sebaliknya, apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia mencapai di atas 10 persen, BI akan memberikan bagian kepada Pemerintah atas surplus BI sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan tentang BI.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS diatur bahwa dalam hal modal LPS menjadi kurang dari modal awal, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut. Dalam Pasal 85 ayat (2) juga diatur bahwa dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas, LPS dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah. Untuk menjalankan fungsinya, LPS pada awal berdirinya tahun 2005 telah diberikan modal awal oleh Pemerintah sebesar modal minimal LPS yaitu Rp4,0 triliun. Sampai dengan akhir tahun 2013, ekuitas (modal) LPS telah berkembang menjadi sebesar Rp31,7 triliun. LPS setiap tahun juga membentuk cadangan klaim penjaminan sebagai estimasi risiko pembayaran klaim untuk satu tahun berikutnya.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2009 tentang LPEI, modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4,0 triliun. Dalam hal modal LPEI menjadi berkurang dari Rp4,0 triliun, Pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku. Pada tahun 2014, ekuitas LPEI diperkirakan akan mencapai Rp10,0 triliun. Ekuitas tersebut diperkirakan cukup untuk mendukung target pembiayaan sebesar Rp44,7 triliun, penjaminan sebesar Rp3,5 triliun dan asuransi sebesar Rp0,5 triliun.

4) Tuntutan Hukum kepada Pemerintah

Tuntutan hukum yang dapat menimbulkan risiko fiskal kepada Pemerintah berupa gugatan perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) ditujukan kepada Pemerintah. Risiko fiskal yang kemungkinan akan timbul adalah berupa potensi pengeluaran negara dari APBN, potensi hilangnya kepemilikan aset tanah dan bangunan karena kepemilikannya dipersengketakan, maupun yang

www.peraturan.go.id

berupa hilangnya potensi penerimaan negara.

Nilai tuntutan yang akan menjadi beban Pemerintah adalah hanya perkara yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), Pemerintah tidak mempunyai upaya hukum lainnya termasuk upaya hukum luar biasa, dan telah dianggarkan. Pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah *inkracht* diupayakan melalui anggaran masing-masing K/L. Upaya mitigasi dalam rangka mengurangi risiko fiskal Pemerintah dalam menghadapi tuntutan hukum kepada Pemerintah, diupayakan melalui upaya hukum semaksimal mungkin oleh masing-masing K/L.

Keputusan atas Tuntutan Hukum kepada Pemerintah yang Telah *Inkracht*

Sesuai kebijakan akuntansi yang telah diambil pemerintah untuk Tuntutan Hukum kepada Pemerintah yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*), pemerintah mengungkapkan pada CPL yang merupakan bagian dari Catatan atas Laporan Keuangan Neraca. Pada tahun 2014, keputusan pengadilan yang telah *inkracht* terdapat pada 2 Kementerian dengan nilai sebesar Rp171.759.014.981.

13. BMN *Idle* (*Idle Asset*)

Terdapat BMN yang telah ditetapkan sebagai BMN *idle* berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, akan tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 belum diserahkan kepada Pengelola Barang sebesar Rp9.304.454.001 yang terdiri dari tanah dengan nilai perolehan sebesar Rp7.048.556.000 dan Gedung dan Bangunan dengan nilai perolehan Rp2.255.898.001, dikarenakan proses serah terima belum selesai dilaksanakan di masing-masing KPKNL terkait. Adapun BMN *idle* yang belum diserahkan tersebut berada di Lampung, Bengkulu, dan Jawa Timur.

Guna menindaklanjuti amanat Pasal 4 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menunjang Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KM.6/2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan dan ketentuan teknis tentang Prosedur Kerja dan Bentuk Surat Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga.

Dua peraturan di atas menjadi pedoman Kementerian Keuangan dalam melakukan prosedur penetapan dan pengelolaan BMN *idle* yang sejak tahun 2013 telah diimplementasikan.

14. Pencadangan Dana Kegiatan Pasca Operasi dan Pemulihan Lingkungan atau Abandonment & Site Restoration (ASR) KKKS

Dana *Abandonment and Site Restoration* (ASR) KKKS merupakan dana yang diminta untuk disisihkan oleh KKKS setiap tahun dalam Anggaran Biaya Operasi Tahunan untuk dicadangkan dalam rangka pemulihan wilayah operasi pertambangan pasca masa eksIpoitasi, yaitu untuk membongkar fasilitas operasi migas yang akan ditinggalkan, yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama dan diberlakukan sebagai biaya operasi yang dapat dikembalikan *(cost recovery)*.

Pencadangan dana ASR juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagai berikut.

1) Kontraktor wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan pasca operasi Kegiatan Usaha Hulu;
2) Kewajiban tersebut dilakukan sejak dimulainya masa eksplorasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja dan anggaran;
3) Penempatan alokasi dana tersebut disepakati Kontraktor dan Badan Pelaksana dan berfungsi sebagai dana cadangan khusus kegiatan pasca operasi Kegiatan Usaha Hulu di Wilayah Kerja yang bersangkutan.

Pencadangan dana ASR dilakukan oleh KKKS setiap semester dengan melakukan penyetoran dana dalam satuan mata uang USD ke rekening bersama (joint account) antara KKKS dengan SKK Migas selama jangka waktu pengumpulan, dan atas dana tersebut tidak dapat digunakan tanpa adanya otorisasi dari kedua belah pihak.

Pengelolaan dan pengawasan dana ASR selama ini berada dibawah pengendalian SKK Migas sebagai institusi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan usaha hulu migas. Dana ASR tersebut selanjutnya

www.peraturan.go.id

dipertanggungjawabkan oleh SKK Migas melalui Laporan Keuangan SKK Migas (Buku I) dan Laporan Informasi Keuangan Kontrak Kerja Sama Dari Kegiatan Usaha Hulu Migas (Buku II).

Sampai dengan posisi per 31 Desember 2014, total saldo dana ASR yang ditempatkan di rekening bersama adalah USD634,655,752.86 termasuk di dalamnya jasa giro sebesar USD12,030,266.65. Selain itu, SKK Migas dalam Laporan Keuangannya juga masih mencatat piutang atas ASR yang seharusnya disetorkan setiap per semester oleh KKKS sebesar USD14,200,875.38, sehingga total kewajiban ASR yang seharusnya dipenuhi oleh KKKS sampai dengan posisi per 31 Desember 2014 adalah sebesar USD636,826,361.59.

15. Pemanfaatan BMN eks KKKS Pertamina

Melalui surat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor 1105/C00000/2008-S0 tanggal 15 Agustus 2008 perihal Usulan Penyelesaian Isu-Isu Neraca Pembuka PT Pertamina (Persero) Tindak Lanjut Rapat Bali 28 dan 29 Juli 2008, dalam rangka koreksi laporan keuangan PT Pertamina (Persero) untuk membebankan biaya atas penggunaan BMN eks KKS Pertamina senilai Rp16,2 triliun oleh PT Pertamina EP, telah disampaikan usulan sewa dengan pola "*fixed payment and fixed term*", dengan klausul antara lain bahwa beban sewa dan pemeliharaan (*operating and maintenance*) menjadi unsur *cost recovery*. Selanjutnya dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-23/MK.6/2009 tanggal 21 Januari 2009, disampaikan persetujuan atas usulan sewa pemanfaatan aset eks KKS Pertamina Rp16,2 triliun.

Dalam perkembangannya, mengacu kesepakatan antara Kementerian Keuangan dan PT Pertamina (Persero) pada tanggal 23 Januari 2009 bahwa objek sewa adalah atas aset berupa Bangunan, Fasilitas Produksi, Harta Benda Modal Bergerak, dan Aset Lainnya dengan nilai total Rp9,472 triliun, PT Pertamina (Persero) melakukan pembebanan Sewa Aset dalam Laporan Keuangan Tahun 2003 s.d. 2013 dengan nilai total terhutang per 31 Desember 2013 sebesar Rp3.034.258.793.769.

Dari total tagihan Piutang Sewa BMN per tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp3.182.271.417.855, PT Pertamina (Persero) telah melakukan penyetoran Piutang Sewa ke Rekening Kas Umum Negara pada tanggal 31 Desember 2014 dengan nilai setoran sebesar Rp2.227.577.829.637.

Pemanfaatan Kilang LNG Arun

Berdasarkan *Agreements for Use and Operation of Plant 2nd Amendment* antara Pertamina dan PT Arun NGL, pengoperasian kilang LNG Arun oleh PT Arun NGL berakhir pada saat berakhirnya Kontrak Penjualan LNG, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2014 saat pengapalan cargo LNG yang terakhir.

Terkait masa depan operasi kilang, sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-249/MK.6/2014 tanggal 15 Oktober 2014 dan S-250/MK.6/2014 tanggal 15 Oktober 2014, biaya sewa aktiva kilang LNG Arun dibebankan kepada PT Pertamina (Persero) dan Exxon Mobil Oil Indonesia Inc. dan besaran tarifnya akan ditetapkan kemudian.

Pemanfaatan Aktiva Kilang LNG Badak

Terkait pemanfaatan aktiva kilang LNG Badak, dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-651/MK.6/2011 tanggal 20 Oktober 2011 hal Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset Kilang LNG Badak, diputuskan bahwa pemanfaatan aktiva kilang LNG Badak, baik oleh Kontraktor KKS dan/atau PT Pertamina dalam rangka perpanjangan kontrak ataupun penyediaan sumber gas baru secara komersial, diwajibkan menyetorkan biaya pemanfaatan BMN kepada Negara.

Selanjutnya, dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-221/MK.06/2014 tanggal 18 September 2014 hal Persetujuan Pemanfaatan BMN Berupa Aktiva Kilang LNG Badak Untuk Proyek *Indonesia Deepwater Development* (IDD) Chevron, diputuskan bahwa aktiva kilang LNG Badak dapat dimanfaatkan untuk Proyek IDD Chevron selama 10 tahun (tahun 2018-2027) dengan tarif pemanfaatan sebesar USD 0,22/mmbtu, di luar biaya *operating and maintenance* serta *capital expenditure*.

16. Penjelasan terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

www.peraturan.go.id

Tujuan dibentuknya OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

a) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

b) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan

c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, sejak tanggal 31 Desember 2012, beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Demikian juga fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Sejak tanggal 31 Desember 2013, beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pembiayaan yang bersumber dari APBN tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan OJK pada saat pungutan dari pihak industri jasa keuangan belum dapat mendanai seluruh kegiatan operasional secara mandiri antara lain pada masa awal pembentukan OJK. Selain yang telah dialokasikan Pada TA 2012 dan TA 2013 untuk persiapan pendirian OJK dialokasikan pada APBN masing-masing sebesar Rp212.031.418.000 dan sebesar Rp1.645.293.987.000, pada TA 2014 dialokasikan sebesar Rp2.408.282.840.000 di Bagian Anggaran 999.08.

17. Dana Jaminan Sosial

Dalam upaya memberikan jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia, Pemerintah pada tahun 2004 menetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). SJSN ini dibangun untuk mengemban amanat UUD 1945 pasal 28 H ayat (3) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat" (Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019 Republik Indonesia).

SJSN bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarga, sehingga mendapat perlindungan atas hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan karena sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

Dalam upaya mewujudkan tujuan SJSN untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejaheraan sosial bagi seluruh rakyat, pemerintah pada tahun 2011 membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan menetapkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. BPJS merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepersertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

BPJS sebagai badan penyelenggara jaminan sosial nasional yang bertanggungjawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi seluruh penduduk Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, memiliki peran yang sangat sentral dalam mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 60, BPJS mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan sosial sejak 1 Januari 2014. Kemudian dengan berjalannya jaminan sosial BPJS, maka Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan sosial yang dikelolanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sumber aset Dana Jaminan Sosial terdiri atas:

1. Iuran jaminan termasuk bantuan iuran;
2. Hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial;

www.peraturan.go.id

3. Aset program jaminan yang menjadi hak peserta dari BUMN yang menjalankan jaminan program;
4. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi defisit, maka Dana Jaminan Sosial dapat mengajukan pinjaman kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan/atau Pemerintah dapat mencairkan Dana Cadangan Jaminan Sosial untuk menjaga program jaminan sosial terus berjalan.

18. Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKPP Tahun 2013

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2013, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah telah menyusun rencana tindak lanjut terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2013 dan menyampaikannya kepada BPK. Perkembangan pelaksanaan rencana tindak lanjut dimaksud sebagaimana dapat dilihat pada **Lampiran 41.**

www.peraturan.go.id

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

D.1.1. SALDO AWAL KAS

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2014 sebesar Rp67,69 triliun

Saldo Awal Kas BUN, KPPN, dan BLU per 1 Januari 2014 adalah sebesar Rp67.688.241.149.218, yang merupakan saldo akhir Kas BUN, KPPN, dan BLU per 31 Desember 2013 setelah disesuaikan dengan koreksi saldo awal kas pada TA 2014. Apabila dibandingkan dengan Saldo Awal Kas BUN, KPPN dan BLU Setelah Koreksi TA 2013 sebesar Rp71.269.038.227.212, Saldo Awal Kas BUN, KPPN dan BLU Setelah Koreksi TA 2014 mengalami penurunan sebesar Rp3.580.797.077.994 yang disebabkan antara lain oleh penurunan Kas dari Aktivitas Operasi selama Tahun 2014.

Rincian saldo awal Kas BUN, KPPN, dan BLU adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Saldo Awal Kas BUN, KPPN dan BLU:		
Kas BUN di BI	43.737.911.964.052	37.382.696.367.039
Kas di KPPN	2.666.720.204.356	16.207.882.323.813
Kas pada BLU yang telah disahkan	20.185.201.347.614	17.331.515.069.465
Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan	1.114.849.200.667	656.246.733.463
Saldo Awal Kas BUN, KPPN dan BLU Sebelum Penyesuaian	**67.704.682.716.689**	**71.578.340.493.780**
Penyesuaian Saldo Awal		
Penyesuaian Saldo Awal Kas pada BLU*)	(10.266.475.988)	24.491.001.778
Penyesuaian Saldo Awal KPPN**)	(6.175.091.483)	(333.191.751.036)
Penyesuaian Saldo Awal Kas Hibah	-	(601.517.310)
Total Penyesuaian Saldo Awal	**(16.441.567.471)**	**(309.302.266.568)**
Saldo Awal Kas BUN, KPPN & BLU Setelah Penyesuaian	**67.688.241.149.218**	**71.269.038.227.212**

Keterangan:

*) Penyesuaian saldo awal BLU adalah perubahan saldo awal kas BLU Tahun 2014 dibandingkan saldo akhir Tahun 2013 melalui Memo Penyesuaian koreksi terhadap pendapatan dan belanja yang telah disahkan pada tahun anggaran sebelumnya. Penyesuaian ini terjadi pada KPPN Bandung I, KPPN Mataram, dan KPPN Tangerang.

Penyesuaian kas BLU di KPPN Malang dilakukan karena kesalahan pencatatan saldo awal kas BLU tahun 2013.

KPPN	Jumlah (Rp)
KPPN Bandung I	(15.079.740.693)
KPPN Malang	(3.788.281.465)
KPPN Mataram	(370.234.000)
KPPN Tangerang	8.971.780.170
Total	**(10.266.475.988)**

Selain itu terdapat perpindahan satker BLU mitra kerja antar KPPN yang terjadi pada KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta II, KPPN Jakarta III, KPPN Jakarta V, KPPN Jakarta VI, KPPN Jakarta VII, dan KPPN Batam, yaitu:

KPPN Batam	695.607.144.100
KPPN Jakarta V	(389.186.978.644)
KPPN Jakarta VI	409.666.215.579
KPPN Jakarta I	(695.607.144.100)
KPPN Jakarta II	(409.666.215.579)
KPPN Jakarta III	(215.661.002.418)
KPPN Jakarta VII	604.847.981.062

www.peraturan.go.id

**) Penyesuaian Saldo Awal Kas KPPN sebesar minus Rp6.175.091.483 merupakan penyesuaian atas Kas di KPPN yaitu:

KPPN	Jumlah (Rp)
KPPN Dumai	449.818
KPPN Jakarta V	(6.118.941.475)
KPPN Waingapu	(56.600.000)
KPPN Penerimaan	24
Dit PKN	150
Total	**(6.175.091.483)**

Penyesuaian kas di KPPN pada KPPN Dumai sebesar Rp449.818 dikarenakan adanya penyesuaian terhadap kesalahan pencatatan kiriman uang.
Penyesuaian kas di KPPN pada KPPN Jakarta V sebesar Rp6.118.941.475 disebabkan perpindahan wilayah kerja KPPN.
Penyesuaian saldo pada KPPN Waingapu disebabkan karena permasalahan gagal *load* yang mengakibatkan data induk SPM/SP2D rusak/hilang, untuk SP2D nomor 409701Z senilai Rp3.000.000 dan nomor 409699Z senilai Rp53.600.000. SP2D tersebut muncul pada rekening koran namun tidak muncul pada aplikasi SP2D dan bendum.
Penyesuaian saldo awal untuk KPPN Penerimaan dan Direktorat PKN disebabkan karena pembulatan.

Terdapat perpindahan satker penerima hibah langsung mitra kerja antar KPPN yang terjadi pada KPPN Jakarta II dan Jakarta VII, yaitu:

KPPN	Jumlah (Rp)
KPPN Jakarta II	(170.775.941.353)
KPPN Jakarta VII	170.775.941.353

D.1.2. PERUBAHAN KAS

Kenaikan Kas pada TA 2014 sebesar Rp21,83 triliun

Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang TA 2014 dan TA 2013 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi	(80.075.491.013.141)	(31.315.578.643.473)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(146.616.551.156.291)	(180.357.079.211.868)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Pembiayaan	248.892.825.676.520	237.394.577.321.194
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Non Anggaran	3.353.789.742.647	105.939.109.944
Koreksi Pembukuan:		
Penggunaan SAL	-	(30.000.000.000.000)
Penyesuaian Pembukuan *)	(3.720.440.807.080)	607.785.913.678
Kenaikan (Penurunan) Kas	**21.834.132.442.655**	**(3.564.355.510.525)**

*) Penyesuaian Pembukuan TA 2014 sebesar minus Rp3.720.440.806.530, terdiri dari:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penyesuaian Kas KPPN	2.000.001
2.	Penyesuaian Kas Hibah	(974.989.900)
3.	Selisih kurs *Unrealized*	33.221.135.603
4.	Penyesuaian pendapatan TA yang lalu	(61.260.251.519)
5.	Penyesuaian SILPA	(2.632.428.701.113)
6.	Penyesuaian Kas BLU	(1.059.000.000.000)
7.	Penyesuaian Pembulatan	(152)
	Jumlah Penyesuaian Pembukuan	**(3.720.440.807.080)**

Rincian penyesuaian pembukuan sebesar minus Rp3.720.440.807.080 terdiri dari:
1. Penyesuaian pembukuan kas di KPPN terjadi pada 2 (dua) KPPN sebesar Rp2.000.001 yaitu KPPN

www.peraturan.go.id

Rengat dan KPPN Biak.

a. Penyesuaian kas di KPPN pada KPPN Rengat sebesar Rp1 merupakan penyesuaian terhadap pembulatan angka di aplikasi.
b. Penyesuaian kas di KPPN pada KPPN Biak sebesar Rp2.000.000 dikarenakan adanya kesalahan pencatatan pelimpahan pada Pos Persepsi Tahun 2013 yang dikoreksi pada Januari 2014.

2. Penyesuaian pembukuan kas hibah sebesar minus Rp974.989.900 untuk mencatat pengurangan kas hibah langsung terkait transaksi penyetoran kas hibah ke donor atau kas negara.

3. Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar Rp33.221.135.603 terdiri dari :
   a. Selisih Kurs Belum Terealisasi pada Rekening KUN sebesar minus Rp26.994.723.951
   b. Selisih Kurs Belum Terealisasi pada Rekening Pinjaman dan Hibah sebesar Rp30.674.843.567
   c. Selisih Kurs Belum Terealisasi pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah sebesar Rp29.541.015.987

4. Penyesuaian Pendapatan Tahun Anggaran Yang lalu sebesar minus Rp61.260.251.519 terdiri dari :
   a. Penyesuaian pendapatan hibah tahun anggaran yang lalu sebesar minus Rp7.043.965.243
   b. Penyesuaian pendapatan hibah Tahun Anggaran Yang Lalu pada atas Rekening Pinjaman dan Hibah sebesar minus Rp34.557.853.165.
   c. Penyesuaian Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar minus Rp19.658.433.111.

5. Penyesuaian SiLPA kode akun 311211 sebesar minus Rp2.632.428.701.113 merupakan penyesuaian atas selisih kurs, yaitu :
   a. Penyesuaian Selisih kurs pada RKUN sebesar minus Rp2.652.908.438.346
   b. Penyesuaian Selisih Kurs pada Rekening Pinjaman dan Hibah sebesar Rp20.479.737.233

6. Penyesuaian Kas BLU sebesar minus Rp1.059.000.000.000 sebagai pencatatan pengurangan kas BLU BPJT terkait penyetoran surplus kas BLU ke Rekening Kas Negara.

7. Penyesuaian pembulatan sebesar minus Rp151 merupakan pembulatan angka terhadap perhitungan seluruh transaksi yang disebabkan mekanisme aplikasi.

Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas disajikan dalam Grafik 28.

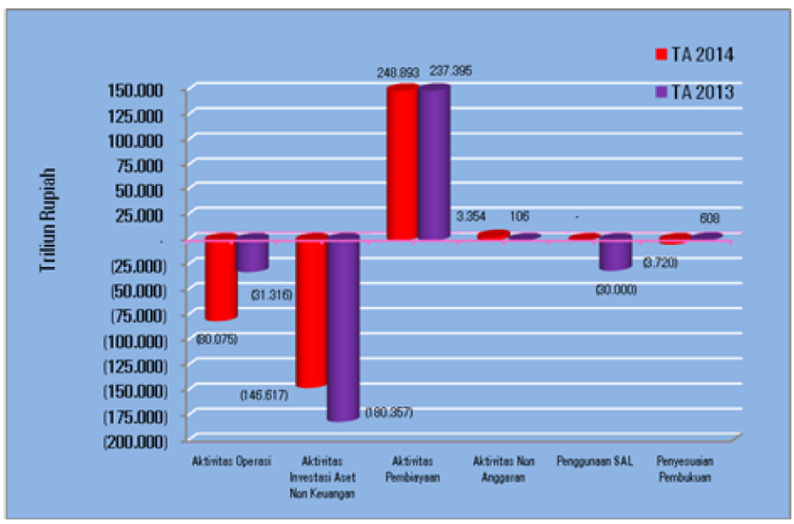

Grafik 28: Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas

www.peraturan.go.id

D.1.3. SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2014 sebesar Rp95,73 triliun

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2014 sebesar Rp95.726.676.423.301 merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun berikutnya. Dibandingkan dengan TA 2013, terdapat kenaikan Saldo Akhir Kas dan Bank TA 2014 sebesar Rp12.317.666.273.258. Rincian Saldo Akhir Kas dan Bank per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Kas BUN, KPPN, BLU & Hibah Langsung*)	89.522.373.591.873	67.704.682.716.689
Rekening Pemerintah Lainnya	4.648.771.715.828	9.999.484.261.911
Kas di Bendahara Pengeluaran	316.874.974.276	342.891.820.960
Kas di Bendahara Penerimaan	147.819.027.491	225.839.936.566
Kas Lainnya dan Setara Kas**)	5.404.286.309.734	6.248.372.302.671
Kas pada BLU yang Belum Disahkan ***)	69.171.469.129	70.046.094.641
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	(4.382.620.665.030)	(1.182.306.983.395)
Jumlah Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	**95.726.676.423.301**	**83.409.010.150.043**

*) Saldo Akhir Kas BUN, KPPN, BLU, dan Hibah Langsung yang berasal dari catatan BUN terdiri dari:

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Rekening Kas BUN di BI	58.238.862.209.607	43.737.911.964.052
Rekening Kas di KPPN	2.843.557.011.256	2.666.720.204.356
Kas di BLU yang Sudah Disahkan	27.650.268.834.909	20.185.201.347.614
Hibah Kas Langsung K/L yang Sudah Disahkan	789.685.536.101	1.114.849.200.667
Jumlah	**89.522.373.591.873**	**67.704.682.716.689**

Kas di BLU yang sudah disahkan TA 2014 sebesar Rp27.650.268.834.909 termasuk Kas yang didepositokan (investasi jangka pendek) sebesar Rp4.382.620.665.030 oleh Satker BLU.

**) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp5.404.286.309.734 berasal dari saldo kas yang berada di Bendahara Pengeluaran selain Uang Persediaan menurut neraca sebesar Rp6.193.971.845.835 dikurangi dengan Kas dari hibah langsung K/L yang sudah disahkan sebesar Rp789.685.536.101.

***) Kas pada BLU sebesar Rp69.171.469.129 merupakan Kas pada BLU yang belum disahkan oleh KPPN, dengan perhitungan sebagai berikut (Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Total Kas pada BLU menurut K/L	23.336.819.639.008	19.072.940.458.860
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	4.382.620.665.030	1.182.306.983.395
	27.719.440.304.038	20.255.247.442.255
Dikurangi:		
Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN	27.650.268.834.909	20.185.201.347.614
Total Kas pada BLU yang belum disahkan	**69.171.469.129**	**70.046.094.641**

Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN sebesar Rp27.650.268.834.909 berasal dari perhitungan sebagai berikut (Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Saldo awal BLU	20.185.201.347.614	17.331.515.069.465
Koreksi Saldo Awal Kas pada BLU	(10.266.475.988)	24.491.001.778
Pendapatan BLU	29.681.044.008.519	24.648.239.915.152
Belanja Barang BLU	(18.971.427.659.265)	(16.673.608.901.933)
Belanja Modal BLU	(2.175.282.385.971)	(2.144.953.167.012)

www.peraturan.go.id

Pemindahbukuan Rek Kas BLU ke Bank Persepsi	-	(3.000.000.000.000)
Koreksi kas BLU	(1.059.000.000.000)	(482.569.836)
Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN	**27.650.268.834.909**	**20.185.201.347.614**

Perbedaan Saldo Kas Hibah Langsung antara LK K/L dan LK BUN

Dalam TA 2014 terdapat perbedaan sebesar Rp110.202.666.962 antara saldo Kas Hibah Langsung dalam LK K/L yang terdapat dalam Neraca sebesar Rp679.477.745.529 dengan saldo Kas Hibah Langsung menurut BUN sebesar Rp789.685.536.101. Perbedaan secara rinci per satuan kerja dapat dilihat pada Lampiran 11.

Perbedaan Saldo Kas BLU antara LK K/L dan LK BUN

Dalam TA 2014 terdapat perbedaan sebesar Rp69.171.469.129 antara saldo Kas BLU dalam LK K/L yang terdapat dalam Neraca sebesar Rp27.719.440.304.038 dengan saldo Kas BLU yang disahkan oleh KPPN menurut BUN sebesar Rp27.650.268.834.909. Perbedaan secara rinci per satuan kerja dapat dilihat pada Lampiran 11.

D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat Tahun 2014 diuraikan sebagai berikut:

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp80,08 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2014. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar minus Rp80.075.491.013.141, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Arus Kas Masuk	1.548.276.732.163.442	1.436.403.062.653.687
Dikurangi Arus Kas Keluar	1.628.352.223.176.583	1.467.718.641.297.160
Arus Kas Bersih	**(80.075.491.013.141)**	**(31.315.578.643.473)**

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasional pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Dari arus kas bersih aktivitas operasi TA 2014 sebesar minus Rp80.075.491.013.141 menunjukkan bahwa pendapatan operasional Pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan operasional Pemerintah.

Jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2013, terdapat penurunan arus kas bersih sebesar Rp48.759.912.369.668.

D.2.1.Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan Rp1.146,87 triliun

Penerimaan Perpajakan pada TA 2014 sebesar Rp1.146.865.769.098.252 terdiri dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp1.103.217.635.957.204 dan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp43.648.133.141.048. Penerimaan Perpajakan ini merupakan penerimaan Pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan sepanjang TA 2014 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Rincian Penerimaan Perpajakan TA 2014 dan 2013 adalah

www.peraturan.go.id

sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Pajak Dalam Negeri		
Pajak Penghasilan (PPh)	546.180.870.340.008	506.442.796.872.651
Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM)	409.181.627.426.617	384.713.518.912.993
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	23.476.231.891.365	25.304.582.771.965
Cukai	118.085.549.812.883	108.452.081.324.579
Pajak Lainnya	6.293.356.486.331	4.937.083.421.083
Jumlah Penerimaan Pajak DN	**1.103.217.635.957.204**	**1.029.850.063.303.271**
Pajak Perdagangan Internasional		
Bea Masuk	32.319.129.733.990	31.621.250.024.724
Bea Keluar	11.329.003.407.058	15.835.366.230.277
Jumlah Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional	**43.648.133.141.048**	**47.456.616.255.001**
Penerimaan Perpajakan	**1.146.865.769.098.252**	**1.077.306.679.558.272**

Dengan demikian, Penerimaan Perpajakan dalam TA 2014 lebih besar Rp69.559.089.539.980 atau 6,46 persen dibandingkan Penerimaan Perpajakan dalam TA 2013.

D.2.1.1. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan sebesar Rp546,18 triliun

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pada TA 2014 adalah sebesar Rp546.180.870.340.008 yang berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Non Migas. Rincian penerimaan kas dari PPh pada TA 2014 dan TA 2013 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
PPh Migas		
PPh Minyak Bumi	30.327.511.076.496	32.363.301.224.444
PPh Gas Alam	57.118.137.210.691	56.384.134.954.761
PPh Migas Lainnya	14.913.780	12.229.088
Jumlah PPh Migas	**87.445.663.200.967**	**88.747.448.408.293**
PPh Non Migas		
PPh Pasal 21	105.650.628.028.716	90.162.275.144.909
PPh Pasal 22	7.256.207.053.418	6.837.153.122.927
PPh Pasal 22 Impor	39.453.958.770.804	36.332.464.974.534
PPh Pasal 23	25.517.229.950.252	22.207.243.817.727
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	4.704.497.307.307	4.383.412.280.039
PPh Pasal 25/29 Badan	148.361.812.336.141	154.294.874.300.998
PPh Pasal 26	34.729.211.219.726	27.983.972.009.476
PPh Final dan Fiskal LN	87.318.711.619.075	71.570.842.143.275
PPh Ditanggung Pemerintah	5.655.283.226.993	3.886.193.422.937
PPh Non Migas Lainnya	87.667.626.609	36.917.247.536
Jumlah PPh Non Migas	**458.735.207.139.041**	**417.695.348.464.358**
Jumlah Pajak Penghasilan	**546.180.870.340.008**	**506.442.796.872.651**

Dengan demikian, penerimaan Pajak Penghasilan pada TA 2014 lebih besar Rp39.738.073.467.357 atau 7,85 persen dibandingkan penerimaan Pajak Penghasilan TA 2013.

www.peraturan.go.id

D.2.1.2. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

PPN dan PPnBM sebesar Rp409,18 triliun

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN &PPnBM) untuk TA 2014 adalah sebesar Rp409.181.627.426.617. Rincian Penerimaan PPN & PPnBM adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
PPN dan PPnBM Dalam Negeri	251.387.204.511.035	238.309.752.684.913
PPN dan PPnBM Impor	157.639.549.819.942	146.270.495.713.343
PPN dan PPnBM lainnya	154.873.095.640	133.270.514.737
Jumlah PPN dan PPnBM	**409.181.627.426.617**	**384.713.518.912.993**

Dengan demikian, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah pada TA 2014 lebih besar Rp24.468.108.513.624 atau 6,36 persen dari TA 2013.

D.2.1.3. Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan PBB sebesar Rp23,48 triliun

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada TA 2014 adalah sebesar Rp23.476.231.891.365. Rincian dari Penerimaan PBB tersebut adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
PBB Pedesaan	1.734.007.582	750.059.903.382
PBB Perkotaan	1.170.228.956	1.366.288.386.715
PBB Perkebunan	1.479.401.376.338	1.323.543.592.844
PBB Kehutanan	365.532.221.254	293.834.940.779
PBB Pertambangan	1.021.593.867.517	630.195.395.934
PBB Migas	20.604.215.952.849	20.940.660.552.311
PBB Pertambangan Panas Bumi	2.584.236.869	-
Jumlah Penerimaan PBB	**23.476.231.891.365**	**25.304.582.771.965**

Dengan demikian, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada TA 2014 lebih kecil Rp1.828.350.880.600 atau 7,23 persen dari TA 2013.

D.2.1.4. Cukai

Penerimaan cukai sebesar Rp118,09 triliun

Penerimaan Cukai pada TA 2014 adalah sebesar Rp118.085.549.812.883, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Cukai Hasil Tembakau	112.544.199.625.328	103.560.193.054.883
Cukai Ethyl Alkohol	166.469.693.536	159.091.509.515
Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	5.342.173.432.720	4.688.176.497.000
Denda Administrasi Cukai	21.805.848.618	32.495.144.662
Cukai Lainnya	10.901.212.681	12.125.118.519
Jumlah Penerimaan Cukai	**118.085.549.812.883**	**108.452.081.324.579**

Dengan demikian, Penerimaan Cukai pada TA 2014 lebih besar Rp9.633.468.488.304 atau 8,88 persen dari Penerimaan Cukai TA 2013.

D.2.1.5. Pajak Lainnya

Penerimaan

Penerimaan Pajak Lainnya pada TA 2014 adalah sebesar Rp6.293.356.486.331. Rincian

www.peraturan.go.id

Pajak Lainnya sebesar Rp6,29 triliun

Penerimaan Pajak Lainnya adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Penjualan Benda dan Bea Materai	4.935.281.813.129	4.269.589.801.257
Pendapatan PPn Batubara	388.251.982.792	345.029.515.313
Pajak Tidak Langsung	1.081.764.558	1.346.272.042
Bunga Penagihan Pajak:		
· Bunga Penagihan PPh	780.847.107.105	119.031.157.245
· Bunga Penagihan PPN	185.172.632.577	198.018.393.454
· Bunga Penagihan PPnBM	2.561.855.293	3.988.555.918
· Bunga Penagihan PTLL	159.330.877	79.725.854
Jumlah Pajak Lainnya	**6.293.356.486.331**	**4.937.083.421.083**

Dengan demikian, Penerimaan Pajak Lainnya pada TA 2014 lebih besar Rp1.356.273.065.248 atau 27,47 persen dari TA 2013.

D.2.1.6. Pajak Perdagangan Internasional

Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp43,65 triliun

Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional pada TA 2014 adalah sebesar Rp43.648.133.141.048, yang terdiri dari Penerimaan Bea Masuk sebesar Rp32.319.129.733.990 dan Penerimaan Bea Keluar sebesar Rp11.329.003.407.058. Rincian Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Bea Masuk		
Bea Masuk	30.542.300.036.455	29.560.105.914.820
Bea Masuk DTP atas Hibah (SPM Nihil)	2.371.562.000	289.294.159
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	614.024.738.088	685.359.813.314
Bea Masuk dalam rangka KITE	1.002.512.056.324	1.148.308.923.167
Denda atas sanksi administrasi	75.000.000	25.000.000
Bea Masuk – Ditanggung Pemerintah	131.312.505.000	191.572.181.000
Pabean Lainnya	26.533.836.123	35.588.898.264
Jumlah Bea Masuk	**32.319.129.733.990**	**31.621.250.024.724**
Bea Keluar	**11.329.003.407.058**	**15.835.366.230.277**
Jumlah Pajak Perdagangan Internasional	**43.648.133.141.048**	**47.456.616.255.001**

Dengan demikian, penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2014 lebih kecil Rp3.808.483.113.953 atau 8,03 persen dari TA 2013.

D.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan PNBP sebesar Rp398,45 triliun

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada TA 2014 adalah sebesar Rp398.454.061.434.910, yang berarti lebih besar Rp43.891.556.545.561 atau 12,38 persen dari TA 2013 sebesar Rp354.562.504.889.349.

PNBP tersebut berasal dari penerimaan Sumber Daya Alam, Bagian Pemerintah atas Laba BUMN, PNBP Lainnya, dan Pendapatan BLU.

Rincian atas Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Penerimaan SDA sebesar Rp240,85 triliun

D.2.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2014 adalah sebesar Rp240.848.282.407.860.

www.peraturan.go.id

Penerimaan ini merupakan penerimaan negara yang berhubungan dengan kegiatan eksploitasi SDA, yang terdiri dari:

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Pendapatan Minyak Bumi	139.174.307.803.380	135.329.234.847.290
Pendapatan Gas Alam	77.701.803.216.997	68.300.185.200.293
Pendapatan Pertambangan Umum	19.300.421.200.975	18.620.492.963.389
Pendapatan Kehutanan	3.699.872.441.655	3.060.373.940.552
Pendapatan Perikanan	216.367.232.525	229.350.562.720
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	755.510.512.328	866.551.747.296
Jumlah Penerimaan SDA	**240.848.282.407.860**	**226.406.189.261.540**

Dengan demikian, Penerimaan Sumber Daya Alam pada TA 2014 lebih besar Rp14.442.093.146.320 atau 6,38 persen dari TA 2013.

Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sebesar Rp40,31 triliun

D.2.2.2. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN pada TA 2014 adalah sebesar Rp40.314.429.901.560, yang berarti lebih besar Rp6.288.825.851.286 atau 18,48 persen dari TA 2013 sebesar Rp34.025.604.050.274.

Penerimaan tersebut merupakan penerimaan yang diperoleh Pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Perusahaan Negara.

Penerimaan PNBP Lainnya sebesar Rp87,61 triliun

D.2.2.3. Penerimaan PNBP Lainnya

Penerimaan PNBP Lainnya pada TA 2014 adalah sebesar Rp87.610.305.116.971. Penerimaan ini terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	17.002.808.332.786	10.348.855.443.833
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	16.332.224.156.049	13.461.844.460.369
Pendapatan Sewa	293.342.385.777	291.228.758.879
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	2.477.501.155.958	33.556.178.476
Pendapatan Jasa I	22.755.458.452.713	19.036.310.373.473
Pendapatan Jasa II	1.266.227.876.481	1.369.732.058.143
Pendapatan Jasa Luar Negeri	593.851.252.292	564.917.113.293
Pendapatan Jasa Perbankan	540.827.508	567.548.510
Pendapatan atas Pengelolaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	3.683.705.584.425	2.751.039.444.796
Pendapatan Jasa Kepolisian	3.612.922.162.495	3.509.309.765.336
Pendapatan Jasa Pelayanan Tol	226.868.919.930	213.053.134.699
Pendapatan Jasa Kepolisian II	117.803.552.951	131.425.870.986
Pendapatan Jasa Lainnya	206.896.858.780	150.766.900.520
Pendapatan Bunga	1.998.227.378.007	2.157.055.147.430
Pendapatan *Gain On Bond Redemption*	60.188.000.000	260.000.000
Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	2.426.200.377.000	2.712.015.999.000
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	2.870.177.786.886	278.486.542.196
Pendapatan Pendidikan	3.006.395.763.012	2.287.742.131.383
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	648.825.726.560	278.930.683.217
Pendapatan Iuran dan Denda	1.689.358.941.406	1.398.128.607.728
Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL	4.323.104.102.951	5.201.515.618.841
Pendapatan Pelunasan Piutang	92.372.189.161	315.675.651.865

www.peraturan.go.id

Pendapatan dari Penutupan Rekening	16.912.434.135	93.362.764.134
Pendapatan Selisih Kurs	897.567.700.155	1.770.265.769.281
Penerimaan Kembali Belanja TAYL II	1.613.680.820	-
Pendapatan dalam Rangka Refund Dana PHLN	967.600.942	
Pendapatan Lain-lain	1.008.241.917.791	1.126.425.695.995
Jumlah PNBP Lainnya	**87.610.305.116.971**	**69.482.471.662.383**

Dengan demikian, Penerimaan PNBP Lainnya pada TA 2014 lebih besar Rp18.127.833.454.588 atau 26,09 persen dari TA 2013.

Penerimaan BLU sebesar Rp29,68 triliun

D.2.2.4. Penerimaan Badan Layanan Umum

Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) pada TA 2014 adalah sebesar Rp29.681.044.008.519, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Pendapatan Jasa Layanan Umum	26.495.707.691.213	21.704.391.604.873
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	91.265.971.812	108.230.165.667
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	1.233.373.294.610	1.339.038.388.726
Pendapatan BLU Lainnya	1.860.697.050.884	1.496.579.755.886
Jumlah Penerimaan BLU	**29.681.044.008.519**	**24.648.239.915.152**

Dengan demikian, penerimaan BLU pada TA 2014 lebih besar Rp5.032.804.093.367 atau 20,42 persen dari TA 2013.

Penerimaan Hibah sebesar Rp2,96 triliun

D.2.3. Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah pada TA 2014 adalah sebesar Rp2.956.901.630.280. Pendapatan ini merupakan penerimaan negara dalam bentuk uang baik terencana maupun langsung yang berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga/badan usaha dan hibah dalam negeri lainnya. Selain itu, penerimaan hibah juga berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral dan hibah luar negeri lainnya.
Rincian Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut (dalam Rp):Rincian Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Hibah Dalam Negeri		
Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang	684.000.000	1.694.593.930
Hibah Dalam Negeri Langsung - Lembaga/Badan Usaha	25.995.124.749	125.229.823.031
Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Pemda	613.994.119.620	1.056.935.885.195
Hibah Dalam Negeri Langsung - Pemda	-	5.076.150.000
Jumlah Hibah Dalam Negeri	**640.673.244.369**	**1.188.936.452.156**
Hibah Luar Negeri		
Hibah Luar Negeri – Bilateral	663.199.145.545	834.963.018.773
Hibah Luar Negeri – Multilateral	832.907.559.434	1.151.978.658.565
Hibah Luar Negeri Lainnya	-	101.246.491
Hibah Luar Negeri Langsung - Perorangan	1.105.195.518	177.934.000
Hibah Luar Negeri Langsung - Bilateral	200.999.504.252	313.994.295.486
Hibah Luar Negeri Langsung - Multilateral	571.002.636.538	989.733.078.584
Hibah Luar Negeri Langsung Lainnya	47.014.344.624	53.993.522.011
Jumlah Hibah Luar Negeri	**2.316.228.385.911**	**3.344.941.753.910**

www.peraturan.go.id

Jumlah Hibah	**2.956.901.630.280**	**4.533.878.206.066**

Dengan demikian, penerimaan Hibah pada TA 2014 lebih kecil Rp1.576.976.575.786 atau 34,78 persen dari TA 2013.

Belanja Pegawai sebesar Rp243,72 triliun

D.2.4. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Belanja Pegawai pada TA 2014 adalah sebesar Rp243.719.624.006.422, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	69.062.605.714.465	62.559.867.616.768
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	49.077.210.855.866	46.479.411.957.065
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	533.365.765.764	696.117.985.588
Belanja Gaji Dokter PTT	968.223.254.156	1.041.867.532.888
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	388.555.991.109	290.025.917.126
Belanja Honorarium	1.535.233.652.099	1.849.645.392.876
Belanja Lembur	592.869.788.020	671.454.854.543
Belanja Vakasi	283.677.067.712	274.929.984.523
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	32.909.571.661.443	26.353.168.742.159
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	83.880.127.701.475	78.461.940.882.847
Belanja Asuransi Kesehatan	4.488.182.554.313	2.780.143.068.089
Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran	-	229.402.937.902
Total Belanja Pegawai	**243.719.624.006.422**	**221.687.976.872.374**

Dengan demikian, Belanja Pegawai pada TA 2014 mengalami kenaikan Rp22.031.647.134.048 atau 9,94 persen dibandingkanTA 2013.

Belanja Barang sebesar Rp175,14 triliun

D.2.5. Belanja Barang

Belanja Barang pada TA 2014 adalah sebesar Rp175.144.475.400.158 yang merupakan pengeluaran Pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa guna mendukung kegiatan operasional kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas dan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat. Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Belanja Barang	74.827.998.231.027	77.832.230.968.636
Belanja Jasa	21.772.290.205.459	21.112.795.448.644
Belanja Pemeliharaan	18.197.182.298.416	13.181.035.547.365
Belanja Perjalanan	31.097.100.473.841	26.539.140.306.676
Belanja Barang BLU	18.971.427.659.265	16.673.608.901.933
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kpd Masyarakat/Pemda	9.942.817.197.335	12.572.194.181.689
Belanja Barang untuk diserahkan kepada mantan presiden dan/atau wakil presiden	335.659.334.815	-
Jumlah Belanja Barang	**175.144.475.400.158**	**167.911.005.354.943**

Dengan demikian, Belanja Barang TA 2014 ini lebih besar Rp7.233.470.045.215 atau 4,31 persen dibandingkan TA 2013.

www.peraturan.go.id

Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp133,44 triliun

D.2.6. Belanja Pembayaran Bunga Utang

Belanja Pembayaran Bunga Utang pada TA 2014 sebesar Rp133.441.688.595.776 merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang *(outstanding principal),* baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman, dan pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga Utang mengalami kenaikan Rp20.408.242.345.376 atau 18,06 persen dari Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2013 sebesar Rp113.033.446.250.400.

Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang tersebut terdiri dari Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) masing-masing sebesar Rp118.839.348.587.455 dan Rp14.602.340.008.321 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri sebesar Rp118.839.348.587.455 merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas Surat Berharga Negara baik mata uang rupiah maupun valas, serta pembayaran denda berupa imbalan bunga, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	99.196.289.575.671	81.771.062.528.088
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN Dalam Negeri	11.288.468.678.076	8.861.197.134.070
Belanja Pembayaran *Discount* Surat Utang Negara DN	6.071.895.166.500	5.737.047.038.080
Belanja Pembayaran *Loss On Bond Redemption*	309.420.460.000	722.579.964.500
Belanja Pembayaran *Discount* SBSN Dalam Negeri	1.972.959.941.500	1.221.688.009.000
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara Valas	40.831.883	145.935.666
Belanja Pembayaran Denda	273.933.825	397.544.480.438
Jumlah Pembayaran Bunga Utang DN	**118.839.348.587.455**	**98.711.265.089.842**

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri mengalami kenaikan Rp20.128.083.497.613 atau 20,39 persen dari Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri TA 2013 sebesar Rp98.711.265.089.842.

b. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri sebesar Rp14.602.340.008.321 merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas pinjaman program dan pinjaman proyek, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Belanja Bunga Pinjaman Program	3.969.972.019.672	3.999.626.884.969
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	10.632.367.988.649	10.322.554.275.589
Jumlah Pembayaran Bunga Utang LN	**14.602.340.008.321**	**14.322.181.160.558**

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri mengalami kenaikan Rp280.158.847.763 atau 1,96 persen dari Belanja Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri TA 2013 sebesar Rp14.322.181.160.558.

Belanja Subsidi sebesar Rp391,96 triliun

D.2.7. Subsidi

www.peraturan.go.id

Belanja Subsidi pada TA 2014 sebesar Rp391.962.514.288.102 merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Rincian Subsidi adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Subsidi Perusahaan Negara		
Subsidi Lembaga Non Keuangan BBM	**239.994.057.227.648**	**210.000.000.000.462**
Subsidi Non Lembaga Keuangan - Non BBM:		
Subsidi Non BBM - Harga/biaya	141.336.830.990.484	138.322.043.935.690
Subsidi Non BBM – Pajak	5.786.548.948.811	4.077.072.181.000
Subtotal	**147.123.379.939.295**	**142.399.116.116.690**
Subsidi dalam Rangka PSO	**2.085.113.124.234**	**1.518.338.803.983**
Jumlah Subsidi Perusahaan Negara	**389.202.550.291.177**	**353.917.454.921.135**
Subsidi Perusahaan Swasta		
Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	2.759.963.996.925	1.127.725.037.157
Jumlah Subsidi Perusahaan Swasta	**2.759.963.996.925**	**1.127.725.037.157**
Jumlah Belanja Subsidi	**391.962.514.288.102**	**355.045.179.958.292**

Dengan demikian, Subsidi TA 2014 ini lebih besar Rp36.917.334.329.810 atau 10,40 persen dari Subsidi TA 2013.

Belanja Hibah sebesar Rp907,51 miliar

D.2.8. Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan transfer uang atau barang oleh Pemerintah Pusat kepada negara lain, organisasi internasional, dan pemerintah daerah yang sifatnya tidak wajib. Pada TA 2014 terdapat belanja hibah sebesar Rp907.509.554.215 sehingga Belanja hibah TA 2014 lebih kecil Rp397.905.151.565 atau 30,48 persen dari TA 2013 sebesar Rp1.305.414.705.780.

Bantuan Sosial sebesar Rp97,82 triliun

D.2.9. Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp97.820.890.718.247 merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM	370.671.751.643	549.544.741.283
Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dlm bentuk barang/jasa	7.182.772.070	29.136.156.000
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	38.386.185.668.050	33.434.604.708.177
Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	35.216.790.302.736	41.647.139.522.837
Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	10.575.767.781.500	3.397.607.668.050
Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	11.917.428.877.559	11.161.959.929.813
Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	1.346.863.564.689	1.888.040.801.711
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	**97.820.890.718.247**	**92.108.033.527.871**

Dengan demikian, Belanja Bantuan Sosial TA 2014 ini lebih besar Rp5.712.857.190.376 atau 6,20 persen dari TA 2013.

Belanja Lain-lain

www.peraturan.go.id

sebesar Rp11,65 triliun

D.2.10. Belanja Lain-lain

Belanja lain-lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah. Belanja Lain-lain pada TA 2014 adalah sebesar Rp11.652.519.680.692, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Belanja Cadangan Kenaikan Harga Tanah *(Land Capping)*	1.599.620.000.000	947.804.000.000
Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	-	51.034.500.000
Belanja Iuran ke Lembaga Internasional	-	41.129.077.440
Belanja Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua	70.229.212.398	-
Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	1.009.724.510.828	302.647.402.822
Belanja Penugasan PT SMI	-	26.640.876.289
Belanja Lain-lain BUN Lainnya	-	4.637.232.209
Belanja Lain-Lain selisih kurs terealisasi	1.423.378.757	-
Belanja lain-lain	8.971.522.578.709	1.993.249.080.603
Jumlah Belanja Lain-lain	**11.652.519.680.692**	**3.367.142.169.363**

Dengan demikian, Belanja Lain-lain TA 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp8.285.377.511.329 atau 246,07 persen dari TA 2013.

DBH Pajak sebesar Rp39,72 triliun

D.2.11. Dana Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan pajak yang merupakan bagian pendapatan pemerintah daerah. Transfer Bagi Hasil Pajak pada TA 2014 adalah sebesar Rp39.715.942.185.337, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Bagi Hasil Pajak Penghasilan	21.021.725.193.942	19.091.529.508.064
Bagi Hasil PBB	18.694.216.991.395	24.763.479.838.469
Jumlah Bagi Hasil Pajak	**39.715.942.185.337**	**43.855.009.346.533**

Dengan demikian, Bagi Hasil Pajak TA 2014 lebih kecil Rp4.139.067.161.196 atau 9,44 persen dari TA 2013.

DBH SDA sebesar Rp62 triliun

D.2.12. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah atas bagi hasil penerimaan sumber daya alam yang merupakan bagian pendapatan pemerintah daerah. Transfer Bagi Hasil SDA dalam TA 2014 adalah sebesar Rp62.001.317.675.508, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Bagi Hasil Minyak Bumi	24.114.357.778.087	15.530.937.334.820
Bagi Hasil Gas Alam	18.795.120.439.100	13.799.051.780.835
Bagi Hasil Pertambangan Umum	16.425.919.576.995	11.636.718.665.675
Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	467.100.051.471	451.021.274.903
Bagi Hasil Kehutanan	2.008.378.171.979	889.055.732.766
Bagi Hasil Perikanan	190.441.657.876	149.774.724.480
Jumlah Bagi Hasil SDA	**62.001.317.675.508**	**42.456.559.513.479**

www.peraturan.go.id

Dengan demikian, Dana Bagi Hasil SDA TA 2014 lebih besar Rp19.544.758.162.029 atau 46,03 persen dari TA 2013.

D.2.13. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

DBH Cukai Tembakau sebesar Rp2,22 triliun

Bagi Hasil Cukai Tembakau merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan cukai yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Transfer Bagi Hasil Cukai Tembakau pada TA 2014 adalah sebesar Rp2.221.698.394.926, sedangkan pada TA 2013 sebesar Rp2.151.491.260.171.

Dengan demikian, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau TA 2014 lebih besar Rp70.207.134.755 atau 3,26 persen dibandingkan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau TA 2013.

D.2.14. Dana Alokasi Umum

DAU sebesar Rp341,22 triliun

Dana Alokasi Umum merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Transfer Dana Alokasi Umum pada TA 2014 sebesar Rp341.219.325.651.000, jumlah tersebut lebih besar Rp30.080.036.486.000 atau 9,67 persen dari TA 2013 sebesar Rp311.139.289.165.000.

D.2.15. Dana Alokasi Khusus

DAK sebesar Rp31,89 triliun

Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Transfer Dana Alokasi Khusus pada TA 2014 sebesar Rp31.894.470.734.500, jumlah tersebut lebih besar Rp1.142.089.857.700 atau 3,71 persen dari TA 2013 sebesar Rp30.752.380.876.800.

D.2.16. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus sebesar Rp16,15 triliun

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Transfer Dana Otonomi Khusus pada TA 2014 sebesar Rp16.148.773.028.000, jumlah tersebut lebih besar Rp2.703.201.462.000 atau 20,10 persen dari TA 2013 sebesar Rp13.445.571.566.000.

D.2.17. Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian sebesar Rp80,08 triliun

Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Transfer Dana Penyesuaian pada TA 2014 adalah sebesar Rp80.082.373.489.250, lebih besar Rp10.737.929.085.596 atau 15,48 persen dari TA 2013 sebesar Rp69.344.444.403.654.

www.peraturan.go.id

D.2.18. Dana Keistimewaan DIY

Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp419,10 miliar

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah dana yang berasal dari bagian anggaran BUN yang dialokasikan mendanai kewenangan DIY dan merupakan belanja transfer pada belanja transfer lainnya. Transfer Dana Keistimewaan DIY pada TA 2014 adalah sebesar Rp419.099.774.450, lebih besar Rp303.403.447.950 atau 262,24 persen dari TA 2013 sebesar Rp115.696.326.500.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar Rp146,62 triliun

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada TA 2014 menunjukkan arus kas keluar bersih sebesar Rp146.616.551.156.291, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Arus Kas Masuk	136.462.179.080	189.384.228.119
Dikurangi Arus Kas Keluar	146.753.013.335.371	180.546.463.439.987
Arus Kas Bersih	**(146.616.551.156.291)**	**(180.357.079.211.868)**

Dengan demikian, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada TA 2014 lebih kecil Rp33.740.528.055.577 atau 18,71 persen dari TA 2013.

Pendapatan dari Pengelolaan BMN sebesar Rp136,46 miliar

D.2.19. Pendapatan dari Pemindahtanganan dan Penjualan Aset

Pendapatan dari Pemindahtanganan dan Penjualan Aset merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan Aset Tetap baik berupa tanah, gedung, bangunan, peralatan dan mesin, dan aset yang rusak atau berlebihan. Pendapatan yang berasal dari Penjualan Aset Tetap pada TA 2014 adalah sebesar Rp136.462.179.080, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.927.657.639	1.744.182.436
Penjualan Peralatan dan Mesin	10.474.050.900	5.809.031.144
Penjualan Sewa Beli	27.254.994.051	33.119.588.068
Penjualan Aset Bekas Milik Asing/Cina	1.264.688.100	31.151.126.200
Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	2.187.050	1.212.313.000
Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	5.930.000	1.055.000
Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Pemindahtanganan BMN Lainnya	95.532.671.340	116.346.932.271
Jumlah Penjualan Aset	**136.462.179.080**	**189.384.228.119**

Dengan demikian, Pendapatan ini pada TA 2014 lebih kecil Rp52.922.049.039 atau 27,94 persen dari TA 2013.

D.2.20. Belanja Modal

Belanja Modal sebesar Rp146,75 triliun

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal pada TA 2014 adalah sebesar Rp146.753.013.335.371, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

www.peraturan.go.id

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Belanja Modal Tanah	3.380.867.507.740	4.569.417.200.263
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.123.577.315.767	68.088.782.230.453
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.020.151.597.422	22.952.346.992.078
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	65.634.094.163.423	78.789.552.851.317
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.419.040.365.048	4.001.410.998.864
Belanja Modal BLU	2.175.282.385.971	2.144.953.167.012
Jumlah Belanja Modal	**146.753.013.335.371**	**180.546.463.439.987**

Belanja Modal ini pada TA 2014 lebih kecil Rp33.793.450.104.616 atau 18,72 persen dari TA 2013.

Dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp80.075.491.013.141 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar minus Rp146.616.551.156.291 mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp226.692.042.169.432. Defisit anggaran tersebut ditutup dari sumber-sumber pembiayaan sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut ini.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp248,89 triliun

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas Pemerintah dan klaim Pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Jumlah Pembiayaan Neto dalam TA 2014 adalah sebesar Rp248.892.825.676.520, yang berasal dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Arus Kas Masuk	498.305.092.190.603	419.317.447.459.941
Dikurangi Arus Kas Keluar	249.412.266.514.083	181.922.870.138.747
Arus Kas Bersih	**248.892.825.676.520**	**237.394.577.321.194**

Dengan demikian, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan TA 2014 lebih besar Rp11.498.248.355.326 atau 4,84 persen dari TA 2013.

Penerimaan Pembiayaan DN sebesar Rp440,73 triliun

D.2.21. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2014 adalah sebesar Rp440.731.307.381.543, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Pembiayaan Perbankan	-	30.000.000.000.000
Pembiayaan Non Perbankan	1.091.224.012.301	615.726.784.188
Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN)	439.096.524.981.366	327.747.662.419.035
Privatisasi dan Penjualan Aset Restrukturisasi	543.558.387.876	1.500.151.167.202
Jumlah Penerimaan Pembiayaan DN	**440.731.307.381.543**	**359.863.540.370.424**

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2014 lebih besar Rp80.857.426.607.490 atau 22,47 persen dibandingkan dengan TA 2013.

www.peraturan.go.id

a. **Pembiayaan Perbankan**

Tidak terdapat penerimaan pembiayaan perbankan pada TA 2014, sedang pada TA 2013 terdapat penerimaan pembiayaan perbankan sebesar Rp30.000.000.000.000 yang merupakan penerimaan pembiayaan karena penggunaan SAL, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Penerimaan dari Sisa Anggaran Lebih (SAL)	-	30.000.000.000.000
Total Penerimaan dari Pembiayaan Perbankan	-	**30.000.000.000.000**

b. **Pembiayaan Non Perbankan**

Penerimaan Pembiayaan Non Perbankan pada TA 2014 adalah sebesar Rp1.091.224.012.301, berarti lebih besar Rp475.497.228.113 atau 77,23 persen dari penerimaan pada TA 2013 sebesar Rp615.726.784.188. Penerimaan ini berasal dari penerimaan pinjaman dalam negeri.

c. **Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN)**

Penerimaan pembiayaan SBN merupakan penerimaan pembiayaan dari penjualan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam mata uang rupiah maupun valas.

Penerimaan pembiayaan SBN pada TA 2014 sebesar Rp439.096.524.981.366, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Penerimaan/Penjualan SPN	60.900.000.000.000	42.400.000.000.000
Penerimaan/Penjualan Obligasi Negara DN	229.420.795.000.000	187.631.255.000.000
Utang Bunga Obligasi Negara DN	4.804.417.699.000	2.936.148.166.000
Penerbitan/Penjualan SBSN	41.181.713.565.568	23.507.074.053.640
Imbalan dibayar di muka SBSN	173.506.611.000	107.679.673.000
Penerbitan/Penjualan Surat Utang Perbendaharaan DN	16.170.000.000.000	11.653.000.000.000
Penerimaan Penerbitan SBSN dalam rangka Pembiayaan Proyek	442.631.434.432	777.800.946.360
Penerbitan/Penjualan Obligasi LN - Valas	68.211.583.706.866	41.493.925.823.035
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara – Valas	45.473.984.500	2.856.042.000
Penerbitan/Penjualan SBSN Valas - Jangka Panjang	17.746.402.980.000	17.237.922.715.000
Total Penerimaan SBN	**439.096.524.981.366**	**327.747.662.419.035**

Dengan demikian, penerimaan pembiayaan SBN pada TA 2014 lebih besar Rp111.348.862.562.331 atau 33,97 persen dibanding TA 2013.

d. **Penerimaan Hasil Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi**

Penerimaan Hasil Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi pada TA 2014 sebesar Rp543.558.387.876, lebih kecil Rp956.592.779.325 atau 63,77persen dari TA 2013 sebesar Rp1.500.151.167.201.

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Penerimaan Hasil Privatisasi	3.567.668.844	56.700.000.000
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian aset eks BPPN	401.935.495.548	1.362.055.382.471
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)	138.055.223.484	81.395.784.730
Total Penerimaan Hasil Privatisasi dan Aset Program Restrukturisasi	**543.558.387.876**	**1.500.151.167.201**

www.peraturan.go.id

D.2.22. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

Penerimaan Pembiayaan LN sebesar Rp52,57 triliun

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2014 sebesar Rp52.574.662.239.463 merupakan seluruh penerimaan Pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek. Rincian Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Penerimaan Pinjaman Program	17.776.956.719.493	18.426.396.220.606
Penerimaan Pinjaman Proyek	34.797.705.519.970	36.853.425.396.621
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN	**52.574.662.239.463**	**55.279.821.617.227**

Dengan demikian, Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2014 lebih kecil Rp2.705.159.377.764 atau 4,89 persen dari TA 2013.

a. Penerimaan Pinjaman Program

Pinjaman Program yang diterima dalam TA 2014 adalah sebesar Rp17.776.956.719.493, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Program Bilateral	3.692.282.160.000	3.888.653.458.800
Program Mutilateral	14.084.674.559.493	14.537.742.761.806
Jumlah Pinjaman Program	**17.776.956.719.493**	**18.426.396.220.606**

Dengan demikian, Penerimaan Pinjaman Program TA 2014 lebih kecil Rp649.439.501.113 atau 3,52 persen dari TA 2013.

b. Penerimaan Pinjaman Proyek

Pinjaman Proyek yang diterima dalam TA 2014 adalah sebesar Rp34.797.705.519.970, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Penerimaan Pinjaman Proyek dari Bilateral	7.825.365.221.903	10.395.098.419.601
Penerimaan Pinjaman Proyek dari Multilateral	7.436.950.218.356	7.651.179.843.930
Penerimaan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor	4.909.557.800.278	6.606.850.582.989
Penerimaan Pinjaman Proyek Komersial	14.653.542.921.278	12.155.674.537.140
Penerimaan Pinjaman Proyek Lainnya	(27.710.641.845)	44.622.012.961
Jumlah Penerimaan Pinjaman Proyek	**34.797.705.519.970**	**36.853.425.396.621**

Dengan demikian, Penerimaan Pinjaman Proyek TA 2014 lebih kecil Rp2.055.719.876.651 atau 5,58 persen dibandingkan TA 2013.

D.2.23. Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman sebesar Rp4,99 triliun

Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman pada TA 2014 sebesar Rp4.999.122.569.597 merupakan penerimaan Pemerintah atas cicilan pengembalian Pinjaman *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dalam dan luar negeri kepada Pemda, BUMD dan BUMN. Rincian Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN	526.134.716.124	676.201.112.139
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman LN	4.472.987.853.473	3.497.884.360.151
Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman	**4.999.122.569.597**	**4.174.085.472.290**

www.peraturan.go.id

Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam TA 2014 lebih besar Rp825.037.097.307 atau 19,77 persen dari TA 2013.

D.2.24. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Pengeluaran Pembiayaan DN sebesar Rp174,61 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2014 adalah sebesar Rp174.608.862.562.934 yang digunakan untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri, pelunasan SPN, Obligasi Negara, Obligasi Internasional, dan SBSN, serta Pengeluaran Untuk Pelunasan Surat Berharga Negara Valuta Asing dengan rincian sebagai berikut (Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Pembiayaan Pengembangan Pendidikan Nasional	-	5.000.000.000.000
Pembiayaan Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	141.256.054.142	141.256.054.142
Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara	55.000.000.000.000	31.170.000.000.000
Pelunasan Obligasi Negara Rupiah	52.717.937.887.492	55.733.551.652.452
Pelunasan SBSN	18.704.845.299.000	12.956.589.287.000
Pelunasan Obligasi Internasional	14.068.000.000.000	3.215.000.000.000
Pengeluaran Untuk Pelunasan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	33.976.823.322.300	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	**174.608.862.562.934**	**108.216.396.993.594**

Dengan demikian, Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri TA 2014 lebih besar Rp66.392.465.569.340 atau 61,35 persen dibandingkan TA 2013.

D.2.25. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Pengeluaran Pembiayaan LN sebesar Rp62,42 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2014 sebesar Rp62.421.184.643.873 merupakan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Pengeluaran Pinjaman Program	14.323.087.417.426	15.480.047.043.061
Pengeluaran Pinjaman Proyek	48.098.097.226.447	41.724.377.399.943
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	**62.421.184.643.873**	**57.204.424.443.004**

Dengan demikian, Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri TA 2014 lebih besar Rp5.216.760.200.869 atau 9,12 persen dibandingkan dengan TA 2013.

D.2.26. Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah

PMN/Investasi Pemerintah sebesar Rp9,88 triliun

Pengeluaran Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah merupakan penyertaan modal Pemerintah Pusat dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara, serta investasi dalam bentuk dana bergulir. PMN/Investasi Pemerintah dalam TA 2014 adalah sebesar Rp9.876.581.705.006, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Penyertaan Modal Negara pada BUMN	3.000.000.000.000	2.000.000.000.000
Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional	1.412.513.705.006	883.189.211.087
Penyertaan Modal Negara Lainnya	1.000.000.000.000	1.113.862.251.466
Investasi Pemerintah	-	5.709.142.303.197
Investasi Pemerintah Dalam Rangka Kewajiban Penjaminan	964.068.000.000	706.035.000.000
Dana Bergulir	3.500.000.000.000	2.209.253.000.000
Jumlah PMN/Investasi Pemerintah	**9.876.581.705.006**	**12.621.481.765.750**

www.peraturan.go.id

Dengan demikian, PMN/Investasi Pemerintah TA 2014 lebih kecil Rp2.744.900.060.744 atau 21,75 persen dari TA 2013.

D.2.27. Penerusan Pinjaman (RDI/RPD)

Penerusan Pinjaman sebesar Rp2,51triliun

Penerusan Pinjaman RDI/RPD merupakan pengeluaran Pemerintah atas pemberian pinjaman dan penerusan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD. Penerusan pinjaman luar negeri pada TA 2014 adalah sebesar Rp2.505.637.602.270. Jumlah tersebut lebih kecil Rp1.374.929.334.129 atau 35,43 persen dibandingkan dengan TA 2013 sebesar Rp3.880.566.936.399.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp22,20 triliun

Berdasarkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp248.892.825.676.520 dan defisit anggaran sebesar Rp226.692.042.169.432, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2014 sebesar Rp22.200.783.507.088.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran sebesar Rp3,35 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBN. Dalam TA 2014, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran adalah sebesar Rp3.353.789.742.647, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	2.340.146.494.865	(104.009.136.761)
Kiriman Uang (Neto)	9.423.289.100	304.283.894.052
Transito (Neto)	1.087.646.750.357	(93.019.790.696)
Penerimaan/Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Rekening (Neto)	(83.426.791.675)	(1.315.856.649)
Arus Kas Bersih	**3.353.789.742.647**	**105.939.109.946**

Dengan demikian, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran TA 2014 lebih besar Rp3.247.850.632.701 dari TA 2013.

D.2.28. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)

PFK (Neto) sebesar Rp2,34 triliun

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dalam TA 2014 sebesar Rp2.340.146.494.865 berasal dari penerimaan pemerintah yang berasal dari sejumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun, beras BULOG, dan PFK lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada pihak ketiga yang berhak menerimanya. Adapun rincian penerimaan dan pengeluaran PFK pada TA 2014 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Penerimaan Non Anggaran PFK		
Penerimaan PFK 10% Gaji	20.247.519.598.732	19.074.458.153.667
Penerimaan PFK 2% Gaji Terusan	4.279.525.594	3.554.963.758
Penerimaan PFK Beras BULOG	278.134.215.648	250.285.370.995
Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda	4.033.648.993.870	2.617.507.833.678
Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT	14.363.626.692	15.847.512.035
Penerimaan PFK 2 % Asuransi Kesehatan PensiunTNI/Polri	214.220.643	
Penerimaan PFK Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi (PFK DTP Migas)	45.600.000	-
Penerimaan PFK Lain-lain	375.919.890.760	373.259.275.346

www.peraturan.go.id

Jumlah Penerimaan PFK	**24.954.125.671.939**	**22.334.913.109.479**
Penerimaan Dana Talangan	**3.740.100.000.000**	**7.263.000.000.000**
Penerimaan Non Anggaran Fihak Ketiga		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	9.904.366.379.135	
Dikurangi		
Pengeluaran Non Anggaran PFK		
Pengembalian Penerimaan PFK 10% Gaji	(23.985.131.202.295)	(19.114.438.225.769)
Pengembalian Penerimaan PFK 2% Gaji Terusan	-	(6.908.264.557)
Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog	(255.700.458.570)	(270.996.248.363)
Pengembalian Penerimaan PFK 2% Pemda	-	(2.671.738.431.643)
Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain	(378.556.308.985)	(374.841.075.908)
Jumlah Pengeluaran PFK	**(24.619.387.969.850)**	**(22.438.922.246.240)**
Pengembalian Penerimaan Dana Talangan	**(3.730.980.000.000)**	**(7.263.000.000.000)**
Pengeluaran Non Anggaran Fihak Ketiga		
Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	(7.908.077.586.359)	
Jumlah PFK	**2.340.146.494.865**	**(104.009.136.761)**

Apabila dibandingkan dengan TA 2013, Perhitungan Fihak Ketiga dalam TA 2014 lebih besar Rp2.444.155.631.626.

D.2.29. Kiriman Uang

Kiriman Uang sebesar Rp9,42 miliar

Dalam transaksi KU TA 2014 dan TA 2013 masih terdapat selisih antara penerimaan dengan pengeluaran KU yang disebabkan belum sepenuhnya seluruh transaksi atas rekening yang saling terkait dengan transaksi kas dibukukan dalam Sistem Akuntansi Pusat, adanya time lag antara saat pengiriman dan saat penerimaan kiriman uang serta ketidaktepatan dalam penggunaan akun. Kiriman Uang untuk TA 2014 dan TA 2013 adalah sebesar Rp9.423.289.100.
Rincian KU TA 2014 dan TA 2013 adalah sebagai berikut (dalam Rp):Rincian KU TA 2014 dan TA 2013 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Penerimaan Kiriman Uang dan Pemindahbukuan		
Penerimaan Kiriman Uang	2.259.684.151.978.041	2.117.057.860.802.173
Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka TSA	3.058.407.032.298.580	3.573.413.869.790.803
Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus	25.968.280.863.358	11.796.707.966.953
Penerimaan Pemindahbukuan	1.605.953.294.037.043	1.392.852.569.038.352
Penerimaan Pemindahbukuan Penutupan Rekening	-	1.951.024.663
Penerimaan Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan	4.838.214.263.479.766	4.145.665.873.799.628
Jumlah Penerimaan KU	**11.788.227.022.656.788**	**11.240.788.832.422.572**
Pengeluaran Kiriman Uang dan Pemindahbukuan		
Pengeluaran Kiriman Uang	(2.259.688.693.893.560)	(2.117.060.925.875.409)
Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka TSA	(3.058.404.579.182.245)	(3.573.106.403.160.146)
Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus	(25.968.280.863.357)	(11.796.707.966.953)
Pengeluaran Pemindahbukuan	(1.605.941.781.948.760)	(1.392.852.686.701.722)
Pengeluaran Pemindahbukuan Penutupan Rekening	-	(1.951.024.663)
Pengeluaran Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan	(4.838.214.263.479.766)	(4.145.665.873.799.628)
Jumlah Pengeluaran KU	**(11.788.217.599.367.688)**	**(11.240.484.548.528.520)**
Jumlah KU (Neto)	**9.423.289.100**	**304.283.894.052**

Dengan demikian, KU neto dalam TA 2014 lebih kecil Rp294.860.604.952 dari TA 2013.

D.2.30. Transito

Transito Rp1,09 triliun

Transito (Neto) TA 2014 sebesar Rp1.087.646.750.357 merupakan transaksi BUN yang terkait dengan Pengeluaran Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) tahun berjalan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penerimaan atas Pengembalian UP tersebut. Pengembalian

www.peraturan.go.id

UP dari Kuasa Pengguna Anggaran dapat berupa UP yang diterima tahun berjalan maupun tahun yang lalu dan adanya penerimaan surplus pada rekening kas BLU ke rekening penerimaan (persepsi) KPPN, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
Penerimaan Transito		
Penerimaan Pengembalian UP Dana Rupiah	14.877.292.585.224	34.347.888.988.646
Penerimaan Pengembalian UP Dana PHLN	60.000.000	5.554.597.299
Penerimaan Pengembalian UP Pengguna PNBP (Swadana)	267.328.323.989	1.383.610.704.467
Penerimaan Pengembalian UP TAYL	356.221.626.916	250.846.457.087
Penerimaan Pengembalian UP Pengembalian (Restitusi) Pajak	315.002.061	324.514.862
Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana Rupiah	20.230.890.709.630	-
Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pengguna PNBP (Swadana)	1.046.132.525.704	-
Penerimaan Pengembalian Tambahan Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa TUP Tahun Anggaran Yang Lalu	1.475.204.205	-
Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pengembalian (Restitusi) Pajak	3.255.527.140	-
Penerimaan surplus pada rekening kas BLU ke rekening penerimaan (persepsi) KPPN	1.059.000.000.000	-
Jumlah Penerimaan Transito	**37.841.971.504.869**	**35.988.225.262.361**
Pengeluaran Transito		
Pengeluaran UP Dana Rupiah	(16.634.994.294.275)	(34.665.599.968.792)
Pengeluaran UP Dana PHLN	(385.190.000)	(1.173.400.000)
Pengeluaran UP Pengguna PNBP (Swadana)	(277.314.632.489)	(1.421.275.555.866)
Pengeluaran Pengemb Kelebihan Setoran Sisa UP/TUP TAYL	(552.396.515)	7.322.371.601
Pengeluaran Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) Pajak	(425.000.000)	(518.500.000)
Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana Rupiah	(18.740.803.810.825)	-
Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pengguna PNBP (Swadana)	(1.099.649.430.408)	-
Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pengembalian (Restitusi) Pajak	(200.000.000)	-
Jumlah Pengeluaran Transito	**(36.754.324.754.512)**	**(36.081.245.053.057)**
Jumlah Transito (Neto)	**1.087.646.750.357**	**(93.019.790.696)**

Dengan demikian, Transito (Neto) dalam TA 2014 lebih besar Rp1.180.666.541.053 dari TA 2013.

D.2.31. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Rekening, retur SP2D, Sistem Perbankan dan Koreksi Pemindahbukuan (Neto)

Penerimaan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga minus Rp83,43 miliar

Dalam TA 2014 dan TA 2013 Penerimaan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga timbul karena kesalahan rekening, utang kepada pihak ketiga karena retur SP2D, Kesalahan Sistem Perbankan dan Koreksi Pemindahbukuan, dengan perincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2014 *(Audited)*	TA 2013 *(Audited)*
PFK terkait Kesalahan Rekening dan Retur SP2D		
Penerimaan Non Anggaran PFK Karena Kesalahan Rekening	4.193.149.636.250	4.175.779.140.004
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dari rr ke Bank/Pos Persepsi	-	715.174.393
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga di RKUN yang ditangguhkan	721.400.216	-
Pengeluaran Non Angaran Fihak Ketiga karena kesalahan rekening	(4.276.972.215.807)	(4.125.960.183.714)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dg Penerbitan SPM/SP2D dalam rangka Pembayaran kembali dana retur SP2D yang telah disetor ke Kas Negara	(619.052.916)	(49.622.803.147)
	(83.720.232.257)	**911.327.536**
PFK terkait Kesalahan Sistem Perbankan		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan	28.099.679.159.776	-

www.peraturan.go.id

Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena Kesalahan Sistem Perbankan	(28.100.149.640.549)	-
	(470.480.773)	-
Koreksi Pemindahbukuan		
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	372.282.286.820	76.639.480.949
Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	(371.518.365.465)	(78.866.665.134)
	763.921.355	**(2.227.184.185)**
Transaksi NA Pihak Ketiga karena kesalahan Rekening, retur SP2D, sistem perbankan dan koreksi kesalahan Pemindahbukuan	**(83.426.791.675)**	**(1.315.856.649)**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Pusat TA 2014

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN 2013
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2014	%	TAHUN ANGGARAN 2013	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
4	**PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH**	**1.635.378.485.045.000**	**1.550.490.813.616.970**	**94,81%**	**1.438.891.069.562.740**	**111.599.744.054.234**	7,76%
41	**Penerimaan Perpajakan**	**1.246.106.955.600.000**	**1.146.865.769.098.252**	**92,04%**	**1.077.306.679.558.270**	**69.559.089.539.980**	6,46%
411	**Pendapatan Pajak Dalam Negeri**	**1.189.826.575.600.000**	**1.103.217.635.957.200**	**92,72%**	**1.029.850.063.303.270**	**73.367.572.653.933**	7,12%
4111	**Pendapatan Pajak Penghasilan**	**569.866.658.000.000**	**546.180.870.340.008**	**95,84%**	**506.442.796.872.651**	**39.738.073.467.357**	7,85%
41111	**Pendapatan Pajak PPh Migas**	**83.889.790.000.000**	**87.445.663.200.967**	**104,24%**	**88.747.448.408.293**	**(1.301.785.207.326)**	-1,47%
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	31.834.070.000.000	30.327.511.076.496	**95,27%**	32.363.301.224.444	(2.035.790.147.948)	-6,29%
411112	Pendapatan PPh Gas Alam	52.055.720.000.000	57.118.137.210.690	**109,72%**	56.384.134.954.761	734.002.255.929	1,30%
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	-	14.913.780	-	12.229.088	2.684.692	21,95%
41112	**Pendapatan PPh Non-Migas**	**485.976.868.000.000**	**453.078.754.802.823**	**93,23%**	**413.808.305.275.411**	**39.270.449.527.412**	9,49%
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	105.675.729.000.000	105.650.628.028.716	**99,98%**	90.162.275.144.909	15.488.352.883.807	17,18%
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	7.954.038.000.000	7.256.207.053.418	**91,23%**	6.837.153.122.927	419.053.930.491	6,13%
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	42.706.286.000.000	39.453.958.770.804	**92,38%**	36.332.464.974.534	3.121.493.796.270	8,59%
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	26.027.036.000.000	25.517.229.950.252	**98,04%**	22.207.243.817.727	3.309.986.132.525	14,90%
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	5.147.365.000.000	4.704.497.307.307	**91,40%**	4.383.412.280.039	321.085.027.268	7,33%
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	181.663.713.000.000	148.361.812.336.141	**81,67%**	154.294.874.300.998	(5.933.061.964.857)	-3,85%
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	32.877.075.000.000	34.729.211.219.726	**105,63%**	27.983.972.009.476	6.745.239.210.250	24,10%
411128	Pendapatan PPh Final	83.882.211.000.000	87.317.542.509.850	**104,10%**	71.569.992.377.265	15.747.550.132.585	22,00%
411129	Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya	43.415.000.000	87.667.626.609	**201,93%**	36.917.247.536	50.750.379.073	137,47%

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN 2013
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2014	%	TAHUN ANGGARAN 2013	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
41113	**Pendapatan PPh Fiskal**	**-**	**1.169.109.225**	**-**	**849.766.010**	**319.343.215**	37,58%
411131	Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri		1.169.109.225	-	849.766.010	319.343.215	37,58%
41114	**Pendapatan PPh ditanggung Pemerintah**	**-**	**5.655.283.226.993**	**-**	**3.886.193.422.937**	**1.769.089.804.056**	45,52%
411141	Pendapatan PPh psl 21 ditanggung Pemerintah		46.783.182	-	699.355.937	(652.572.755)	-93,31%
411142	Pendapatan PPh psl 22 ditanggung Pemerintah		-	-	-	-	
411143	Pendapatan PPh psl 22 Import ditanggung Pemerintah		-	-	(5.933.000)	5.933.000	
411144	Pendapatan PPh psl 23 ditanggung Pemerintah		-	-	-	-	
411146	Pendapatan PPh psl 25/29 ditanggung Pemerintah		937.969.998.811	-	770.600.000.000	167.369.998.811	21,72%
411147	Pendapatan PPh psl 26 ditanggung Pemerintah		4.717.266.445.000	-	3.114.900.000.000	1.602.366.445.000	51,44%
411148	Pendapatan PPh Final ditanggung Pemerintah		-	-	-	-	
4112	**Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah**	**475.587.180.700.000**	**409.181.627.426.617**	**86,04%**	**384.713.518.912.993**	**24.468.108.513.624**	6,36%
41121	**Pendapatan PPN**	**-**	**393.601.356.682.197**	**-**	**365.882.383.372.753**	**27.718.973.309.444**	7,58%
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	-	241.145.824.571.520	-	226.761.763.410.216	14.384.061.161.304	6,34%
411212	Pendapatan PPN Impor	-	152.303.944.794.048	-	138.989.159.819.891	13.314.784.974.157	9,58%
411219	Pendapatan PPN Lainnya	-	151.587.316.629	-	131.460.142.646	20.127.173.983	15,31%
41122	**Pendapatan PPnBM**	**-**	**15.580.270.744.420**	**-**	**18.831.135.540.240**	**(3.250.864.795.820)**	-17,26%
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	-	10.241.379.939.515	-	11.547.989.274.697	(1.306.609.335.182)	-11,31%
411222	Pendapatan PPnBM Impor	-	5.335.605.025.894	-	7.281.335.893.452	(1.945.730.867.558)	-26,72%
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	-	3.285.779.011	-	1.810.372.091	1.475.406.920	81,50%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN 2013
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2014	%	TAHUN ANGGARAN 2013	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
4113	**Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan**	**21.742.909.000.000**	**23.476.231.891.365**	**107,97%**	**25.304.582.771.965**	**(1.828.350.880.600)**	-7,23%
41131	**Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan**	**-**	**23.476.231.891.365**	**0,00%**	**25.304.582.771.965**	**(1.828.350.880.600)**	-7,23%
411311	Pendapatan PBB Pedesaan	-	1.734.007.582	-	750.059.903.382	(748.325.895.800)	-99,77%
411312	Pendapatan PBB Perkotaan	-	1.170.228.956	-	1.366.288.386.715	(1.365.118.157.759)	-99,91%
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	-	1.479.401.376.338	-	1.323.543.592.844	155.857.783.494	11,78%
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	-	365.532.221.254	-	293.834.940.779	71.697.280.475	24,40%
411315	Pendapatan PBB Pertambangan	-	1.021.593.867.517	-	630.195.395.934	391.398.471.583	62,11%
411316	Pendapatan PBB Migas	-	20.604.215.952.849	-	20.940.660.552.311	(336.444.599.462)	-1,61%
411317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	-	2.584.236.869	-	-	2.584.236.869	
4114	**Pendapatan BPHTB**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
41141	**Pendapatan BPHTB**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
411411	Pendapatan BPHTB	-	-	-	-	-	
4115	**Pendapatan Cukai**	**117.450.217.900.000**	**118.085.549.812.883**	**100,54%**	**108.452.081.324.579**	**9.633.468.488.304**	8,88%
41151	**Pendapatan Cukai**	**117.450.217.900.000**	**118.085.549.812.883**	**100,54%**	**108.452.081.324.579**	**9.633.468.488.304**	8,88%
411511	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	111.363.824.100.000	112.544.199.625.328	**101,06%**	103.560.193.054.883	8.984.006.570.445	8,68%
411512	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	165.482.800.000	166.469.693.536	**100,60%**	159.091.509.515	7.378.184.021	4,64%
411513	Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	5.920.911.000.000	5.342.173.432.720	**90,23%**	4.688.176.497.000	653.996.935.720	13,95%
411514	Pendapatan Denda Administrasi Cukai	-	21.805.848.618	-	32.495.144.662	(10.689.296.044)	-32,90%
411519	Pendapatan Cukai Lainnya	-	10.901.212.681	-	12.125.118.519	(1.223.905.838)	-10,09%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN 2013
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2014	%	TAHUN ANGGARAN 2013	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
4116	**Pendapatan Pajak Lainnya**	**5.179.610.000.000**	**6.293.356.486.331**	**121,50%**	**4.937.083.421.083**	**1.356.273.065.248**	27,47%
41161	**Pendapatan Pajak Lainnya**	**-**	**5.324.615.560.479**	**-**	**4.615.965.588.612**	**708.649.971.867**	15,35%
411611	Pendapatan Bea Meterai	-	1.276.448.507.799	-	1.204.894.943.137	71.553.564.662	5,94%
411612	Pendapatan Dari Penjualan Benda Meterai	-	3.658.833.305.330	-	3.064.694.858.120	594.138.447.210	19,39%
411613	Pendapatan PPn Batubara	-	388.251.982.792	-	345.029.515.313	43.222.467.479	12,53%
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	-	1.081.764.558	-	1.346.272.042	(264.507.484)	-19,65%
41162	**Pendapatan Bunga Penagihan Pajak**	**-**	**968.740.925.852**	**-**	**321.117.832.471**	**647.623.093.381**	201,68%
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	-	780.847.107.105	-	119.031.157.245	661.815.949.860	556,00%
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	-	185.172.632.577	-	198.018.393.454	(12.845.760.877)	-6,49%
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	-	2.561.855.293	-	3.988.555.918	(1.426.700.625)	-35,77%
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	-	159.330.877	-	79.725.854	79.605.023	99,85%
41163	**Pendapatan Bunga Penagihan Pajak Ditanggung Pemerintah**	**-**	**-**	**-**		**-**	
411631	Pendapatan Bunga Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah	-	-	-	-	-	
				-			
412	**Pajak Perdagangan Internasional**	**56.280.380.000.000**	**43.648.133.141.048**	**77,55%**	**47.456.616.255.001**	**(3.808.483.113.953)**	-8,03%
4121	**Pendapatan Bea Masuk**	**35.676.020.000.000**	**32.319.129.733.990**	**90,59%**	**31.621.250.024.724**	**697.879.709.266**	2,21%
41211	**Pendapatan Bea Masuk**		**32.319.129.733.990**	**-**	**31.621.250.024.724**	**697.879.709.266**	2,21%
412111	Pendapatan Bea Masuk		30.542.300.036.455	-	29.560.105.914.820	982.194.121.635	3,32%
412112	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)		2.371.562.000	-	289.294.159	2.082.267.841	719,78%

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN 2013
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2014	%	TAHUN ANGGARAN 2013	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean		614.024.738.088	-	685.359.813.314	(71.335.075.226)	-10,41%
412114	Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)		1.002.512.056.324	-	1.148.308.923.167	(145.796.866.843)	-12,70%
412115	Denda atas sanksi administrasi dari pelaksanaan pengawasan terhadap barang tertentu yang pengangkutannya Di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)		75.000.000	-	25.000.000	50.000.000	200,00%
412116	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DPT)		131.312.505.000	-	191.572.181.000	(60.259.676.000)	-31,46%
412119	Pendapatan Pabean Lainnya		26.533.836.123	-	35.588.898.264	(9.055.062.141)	-25,44%
4122	**Pendapatan Bea Keluar**	**20.604.360.000.000**	**11.329.003.407.058**	**54,98%**	**15.835.366.230.277**	**(4.506.362.823.219)**	-28,46%
41221	**Pendapatan Bea Keluar**		**11.329.003.407.058**	-	**15.835.366.230.277**	**(4.506.362.823.219)**	-28,46%
412211	Pendapatan Bea Keluar		11.324.251.736.885	-	15.816.250.853.064	(4.491.999.116.179)	-28,40%
412212	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar		3.656.043.148	-	11.526.294.176	(7.870.251.028)	-68,28%
412213	Pendapatan Bunga Bea Keluar		1.095.627.025	-	7.589.083.037	(6.493.456.012)	-85,56%
				-			
42	**Penerimaan Negara Bukan Pajak**	**386.946.415.445.000**	**398.590.523.613.990**	**103,01%**	**354.751.889.117.468**	**43.838.634.496.522**	12,36%
421	**Penerimaan Sumber Daya Alam**	**241.114.622.223.000**	**240.848.282.407.860**	**99,89%**	**226.406.189.261.540**	**14.442.093.146.320**	6,38%
4211	**Pendapatan Minyak Bumi**	**154.750.360.000.000**	**139.174.307.803.380**	**89,93%**	**135.329.234.847.290**	**3.845.072.956.090**	2,84%
421111	Pendapatan Minyak Bumi	154.750.360.000.000	139.174.307.803.380	**89,93%**	135.329.234.847.290	3.845.072.956.090	2,84%
4212	**Pendapatan Gas Bumi**	**56.917.840.000.000**	**77.701.803.216.997**	**136,52%**	**68.300.185.200.293**	**9.401.618.016.704**	13,77%
421211	Pendapatan Gas Bumi	56.917.840.000.000	77.701.803.216.997	**136,52%**	68.300.185.200.293	9.401.618.016.704	13,77%
4213	**Pendapatan Pertambangan Umum**	**23.599.745.000.000**	**19.300.421.200.974**	**81,78%**	**18.620.492.963.389**	**679.928.237.585**	3,65%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN 2013
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2014	%	TAHUN ANGGARAN 2013	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
421311	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	1.071.826.000.000	807.238.621.214	**75,31%**	593.500.481.758	213.738.139.456	36,01%
421312	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara	22.527.919.000.000	18.492.675.028.288	**82,09%**	18.026.992.481.631	465.682.546.657	2,58%
421313	Pendapatan Keuntungan bersih ijin Usaha Pertambangan Khusus IUPK		507.551.472	-	-	507.551.472	
4214	**Pendapatan Kehutanan**	**5.017.016.000.000**	**3.699.872.441.655**	**73,75%**	**3.060.373.940.552**	**639.498.501.103**	20,90%
42141	**Pendapatan Dana Reboisasi**	**2.440.000.000.000**	**1.793.938.945.500**	**73,52%**	**1.669.506.623.151**	**124.432.322.349**	7,45%
421411	Pendapatan Dana Reboisasi	2.440.000.000.000	1.793.938.945.500	**73,52%**	1.669.506.623.151	124.432.322.349	7,45%
42142	**Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan**	**1.790.444.000.000**	**827.472.111.344**	**46,22%**	**697.793.735.114**	**129.678.376.230**	18,58%
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.790.444.000.000	827.472.111.344	**46,22%**	697.793.735.114	129.678.376.230	18,58%
42143	**Pendapatan IIUPH (IHPH)**	**146.250.000.000**	**196.012.832.598**	**134,03%**	**105.479.383.439**	**90.533.449.159**	85,83%
421431	Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Industri	11.250.000.000	11.807.978.232	**104,96%**	1.493.329.129	10.314.649.103	690,72%
421432	Pendapatan IIUPH (IHPH) Bambu	-	-	-	-	-	
421433	Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Rotan	-	-	-	-	-	
421434	Pendapatan IIUPH (IHPH) Hutan Alam	135.000.000.000	184.204.854.366	**136,45%**	103.986.054.310	80.218.800.056	77,14%
42144	**Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan**	**640.322.000.000**	**882.415.421.163**	**137,81%**	**587.594.198.848**	**294.821.222.315**	50,17%
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan	640.322.000.000	882.415.421.163	**137,81%**	587.594.198.848	294.821.222.315	50,17%
42145	**Pendapatan Jasa Perbenihan dan Kehutanan**	**-**	**33.131.050**	-	-	**33.131.050**	
421451	Pendapatan dari Kegiatan Perijinan di Bidang Perbenihan		3.883.250	-	-	3.883.250	
421452	Pendapatan dari Sertifikasi Benih		11.142.500	-	-	11.142.500	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN 2013
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2014	%	TAHUN ANGGARAN 2013	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
421453	Pendapatan dari Pengumpulan Benih dan Anakan		18.105.300	-	-	18.105.300	
4215	**Pendapatan Perikanan**	**250.000.001.000**	**216.367.232.525**	**86,55%**	**229.350.562.720**	**(12.983.330.195)**	-5,66%
42151	**Pendapatan Perikanan**	**250.000.001.000**	**216.367.232.525**	**86,55%**	**229.350.562.720**	**(12.983.330.195)**	-5,66%
421511	Pendapatan Perikanan	250.000.001.000	216.367.232.525	**86,55%**	229.350.562.720	(12.983.330.195)	-5,66%
4216	**Pendapatan Pertambangan Panas Bumi**	**579.661.222.000**	**755.510.512.328**	**130,34%**	**866.551.747.296**	**(111.041.234.968)**	-12,81%
42161	**Pendapatan Pertambangan Panas Bumi**	**579.661.222.000**	**755.510.512.328**	**130,34%**	**866.551.747.296**	**(111.041.234.968)**	-12,81%
421611	Pendapatan Setoran Bagian Pertambangan Panas Bumi	564.850.000.000	736.381.577.130	**130,37%**	857.112.163.019	(120.730.585.889)	-14,09%
421612	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Panas Bumi	14.811.222.000	19.128.935.198	**129,15%**	9.439.584.277	9.689.350.921	102,65%
421613	Pendapatan Iuran Produksi/Royalty Pertambangan Panas Bumi		-	-	-	-	
				-			
422	**Pendapatan Bagian Laba BUMN**	**40.000.000.000.000**	**40.314.429.901.560**	**100,79%**	**34.025.604.050.274**	**6.288.825.851.286**	18,48%
4221	**Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN**	**40.000.000.000.000**	**40.314.429.901.560**	**100,79%**	**34.025.604.050.274**	**6.288.825.851.286**	18,48%
42211	**Pendapatan Laba BUMN Perbankan**	**8.791.531.732.000**	**8.823.422.770.320**	**100,36%**	**7.490.907.289.021**	**1.332.515.481.299**	17,79%
422111	Pendapatan Laba BUMN Perbankan	8.791.531.732.000	8.823.422.770.320	**100,36%**	7.490.907.289.021	1.332.515.481.299	17,79%
42212	**Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan**	**31.208.468.268.000**	**31.491.007.131.240**	**100,91%**	**26.534.696.761.253**	**4.956.310.369.987**	18,68%
422121	Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan	31.208.468.268.000	31.491.007.131.240	**100,91%**	26.534.696.761.253	4.956.310.369.987	18,68%
				-			
423	**Pendapatan PNBP Lainnya**	**84.968.409.424.000**	**87.746.767.296.051**	**103,27%**	**69.671.855.890.502**	**18.074.911.405.549**	25,94%
4231	**Pendapatan Penjualan dan Sewa**	**32.538.045.491.000**	**36.242.338.209.650**	**111,38%**	**24.324.869.069.676**	**11.917.469.139.974**	48,99%

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN 2013
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2014	%	TAHUN ANGGARAN 2013	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
42311	**Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan**	**17.367.147.273.000**	**17.002.808.332.786**	**97,90%**	**10.348.855.443.833**	**6.653.952.888.953**	64,30%
423111	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	6.848.075.000	17.733.327.042	**258,95%**	15.559.857.761	2.173.469.281	13,97%
423112	Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan	22.102.468.000	41.568.882.481	**188,07%**	30.322.352.973	11.246.529.508	37,09%
423113	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	16.066.526.027.000	16.166.463.907.583	**100,62%**	9.789.587.514.203	6.376.876.393.380	65,14%
423114	Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan	50.000.000.000	136.358.379.379	**272,72%**	147.403.136.563	(11.044.757.184)	-7,49%
423115	Pendapatan Penjualan Obat-Obatan dan Hasil Farmasi Lainnya	195.000.000	47.002.572	**24,10%**	33.524.372	13.478.200	40,20%
423116	Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya	16.231.482.000	18.718.755.273	**115,32%**	42.501.644.852	(23.782.889.579)	-55,96%
423117	Pendapatan Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan	65.792.000	654.339.675	**994,56%**	176.766.430	477.573.245	270,17%
423118	Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni	1.200.000.000.000	609.354.897.968	**50,78%**	312.329.077.480	297.025.820.488	95,10%
423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	5.178.429.000	11.908.840.813	**229,97%**	10.941.569.199	967.271.614	8,84%
42312	**Pendapatan Penjualan Aset**	**197.424.450.000**	**136.462.179.080**	**69,12%**	**189.384.228.119**	**(52.922.049.039)**	-27,94%
423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	50.549.430.000	1.927.657.639	**3,81%**	1.744.182.436	183.475.203	10,52%
423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	33.848.578.000	10.474.050.900	**30,94%**	5.809.031.144	4.665.019.756	80,31%
423123	Pendapatan Penjualan Sewa Beli	20.000.000.000	27.254.994.051	**136,27%**	33.119.588.068	(5.864.594.017)	-17,71%
423124	Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing/ Cina		1.264.688.100	-	31.151.126.200	(29.886.438.100)	-95,94%
423125	Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan		2.187.050	-	1.212.313.000	(1.210.125.950)	-99,82%
423126	Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin		5.930.000	-	1.055.000	4.875.000	462,09%
423127	Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	-	-	
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	93.026.442.000	95.532.671.340	**102,69%**	116.346.932.271	(20.814.260.931)	-17,89%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN 2013
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2014	%	TAHUN ANGGARAN 2013	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
42313	**Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas**	**14.662.012.500.000**	**16.332.224.156.049**	**111,39%**	**13.461.844.460.369**	**2.870.379.695.680**	21,32%
423131	Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak	20.000.000	8.360.657	**41,80%**	15.216.005	(6.855.348)	-45,05%
423132	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	14.375.330.000.000	15.458.586.234.011	**107,54%**	12.941.088.975.472	2.517.497.258.539	19,45%
423133	Pendapatan Denda, Bunga, Penalti Terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas		561.026.922	-	-	561.026.922	
423139	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	286.662.500.000	873.068.534.459	**304,56%**	520.740.268.892	352.328.265.567	67,66%
42314	**Pendapatan Sewa**	**311.461.268.000**	**293.342.385.777**	**94,18%**	**291.228.758.879**	**2.113.626.898**	0,73%
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	216.007.283.000	236.064.564.613	**109,29%**	211.622.555.598	24.442.009.015	11,55%
423142	Pendapatan Sewa Peralatan, dan Mesin	69.780.617.000	16.610.124.790	**23,80%**	29.039.633.746	(12.429.508.956)	-42,80%
423143	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi, danJaringan	235.820.000	2.518.765.505	**1068,09%**	771.226.420	1.747.539.085	226,59%
423144	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	500.000.000	2.103.278.555	**420,66%**	2.763.478.526	(660.199.971)	-23,89%
423145	Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin		347.500	-	1.200.000	(852.500)	-71,04%
423146	Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan Jaringan		50.000	-	35.653.377	(35.603.377)	-99,86%
423147	Pendapatan dari Bangun, Guna, Serah (BGS)		25.333.000	-	930.000	24.403.000	2623,98%
423148	Pendapatan dari Bangun, Serah, Guna (BSG)		-	-	-	-	
423149	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN lainnya	24.937.548.000	36.019.921.814	**144,44%**	46.994.081.212	(10.974.159.398)	-23,35%
42315	**Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan**		**2.477.501.155.958**	-	**33.556.178.476**	**2.443.944.977.482**	7283,14%
423151	Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang		2.379.141.877.061	-	3.455.907.436	2.375.685.969.625	68742,75%
423152	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS		98.359.278.897	-	30.100.271.040	68.259.007.857	226,77%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN 2013
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2014	%	TAHUN ANGGARAN 2013	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
4232	**Pendapatan Jasa**	**31.194.911.095.000**	**32.464.275.487.576**	**104,07%**	**27.727.122.209.756**	**4.736.959.810.623**	17,08%
42321	**Pendapatan Jasa I**	**16.909.228.739.000**	**22.755.458.452.713**	**134,57%**	**19.036.310.373.473**	**3.719.148.079.240**	19,54%
423211	Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya	44.372.778.000	22.184.238.214	**50,00%**	132.557.175.139	(110.372.936.925)	-83,26%
423212	Pendapatan Tempat Hiburan/ Taman/ Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA)	23.109.033.000	29.091.144.745	**125,89%**	24.267.814.067	4.823.330.678	19,88%
423213	Pendapatan Surat Keterangan, Visa/Paspor	2.203.341.600.000	3.069.344.251.980	**139,30%**	2.197.239.167.421	872.105.084.559	39,69%
423214	Pendapatan Hak dan Perijinan	10.928.806.714.000	14.815.951.235.159	**135,57%**	12.672.564.660.373	2.143.386.574.786	16,91%
423215	Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan	218.028.367.000	363.076.168.935	**166,53%**	249.160.532.759	113.915.636.176	45,72%
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, danTeknologi sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-masing Kementerian dan Pendapatan DJBC	656.731.300.000	822.649.364.414	**125,26%**	702.329.265.155	120.320.099.259	17,13%
423217	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	82.250.670.000	361.075.414.811	**438,99%**	66.274.154.703	294.801.260.108	444,82%
423218	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian	993.151.358.000	1.282.014.210.323	**129,09%**	1.165.241.015.323	116.773.195.000	10,02%
423219	Pendapatan pelayanan pertanahan	1.759.436.919.000	1.990.072.424.132	**113,11%**	1.826.676.588.533	163.395.835.599	8,94%
42322	**Pendapatan Jasa II**	**987.059.230.000**	**1.266.227.876.481**	**128,28%**	**1.369.732.058.143**	**(103.504.181.662)**	-7,56%
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	61.577.176.000	232.530.314.160	**377,62%**	335.120.999.719	(102.590.685.559)	-30,61%
423222	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	745.032.938.000	798.735.708.257	**107,21%**	756.908.885.956	41.826.822.301	5,53%
423223	Pendapatan Iuran Lelang Untuk Fakir Miskin		18.421.453	-	7.086.262	11.335.191	159,96%
423224	Pendapatan Jasa Catatan Sipil		14.819.745	-	100.308	14.719.437	14674,24%
423225	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa	4.026.275.000	1.060.619.838	**26,34%**	1.204.607.865	(143.988.027)	-11,95%
423226	Pendapatan Uang Pewarganegaraan	624.000.000	69.340.000	**11,11%**	3.550.000	65.790.000	1853,24%

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN 2013
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2014	%	TAHUN ANGGARAN 2013	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
423227	Pendapatan Bea Lelang	129.438.841.000	176.642.096.687	**136,47%**	212.466.116.406	(35.824.019.719)	-16,86%
423228	Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara	40.290.000.000	49.481.820.530	**122,81%**	58.190.524.008	(8.708.703.478)	-14,97%
423229	Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi	6.070.000.000	7.674.735.811	**126,44%**	5.830.187.619	1.844.548.192	31,64%
42323	**Pendapatan Jasa Luar Negeri**	**517.382.070.000**	**593.851.252.292**	**114,78%**	**564.917.113.293**	**28.934.138.999**	5,12%
423231	Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI	404.123.083.000	399.603.562.477	**98,88%**	372.649.789.681	26.953.772.796	7,23%
423232	Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler	103.158.086.000	87.640.732.539	**84,96%**	84.746.992.557	2.893.739.982	3,41%
423239	Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri	10.100.901.000	106.606.957.276	**1055,42%**	107.520.331.055	(913.373.779)	-0,85%
42324	**Pendapatan Layanan Jasa Perbankan**	**450.000.000**	**540.827.508**	**0,00%**	**567.548.510**	**(26.721.002)**	-4,71%
423241	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	450.000.000	-	**0,00%**	567.548.510	(567.548.510)	-100,00%
423242	Pendapatan Jasa Bank dari Penerusan Pinjaman		540.827.508	-	-	540.827.508	
42325	**Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara**	**6.200.000.000.000**	**3.683.705.584.425**	**59,41%**	**2.751.039.444.796**	**932.666.139.629**	33,90%
423251	Pendapatan Atas Penerbitan SP2D Dalam Rangka TSA		-	-	13.640.764.801	(13.640.764.801)	-100,00%
423252	Pendapatan Atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum		8.109.815.151	-	-	8.109.815.151	
423253	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling	195.000.000.000	162.525.454.234	**83,35%**	126.903.791.564	35.621.662.670	28,07%
423254	Pendapatan Atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia	6.005.000.000.000	3.513.070.315.041	**58,50%**	2.610.494.888.431	902.575.426.610	34,57%
42326	**Pendapatan Jasa Kepolisian I**	**4.329.332.750.000**	**3.612.922.162.495**	**83,45%**	**3.509.309.765.336**	**103.612.397.159**	2,95%
423261	Pendapatan Surat Ijin Mengemudi (SIM)	1.007.057.710.000	1.048.501.039.595	**104,12%**	989.758.723.336	58.742.316.259	5,94%
423262	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	1.202.885.925.000	1.000.165.465.000	**83,15%**	975.219.427.000	24.946.038.000	2,56%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN 2013
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2014	%	TAHUN ANGGARAN 2013	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
423263	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	64.701.800.000	35.025.790.000	**54,13%**	31.845.465.000	3.180.325.000	9,99%
423264	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP)	1.171.452.260.000	912.880.754.900	**77,93%**	894.039.060.000	18.841.694.900	2,11%
423265	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	848.808.480.000	586.389.823.000	**69,08%**	587.275.560.000	(885.737.000)	-0,15%
423266	Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi Melalui Simulator	32.172.700.000	27.431.650.000	**85,26%**	28.547.205.000	(1.115.555.000)	-3,91%
423267	Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak	2.253.875.000	2.527.640.000	**112,15%**	2.624.325.000	(96.685.000)	-3,68%
42327	**Pendapatan Jasa Pelayanan Tol**	**213.050.000.000**	**226.868.919.930**	**106,49%**	**213.053.134.699**	**13.815.785.231**	6,48%
423271	Pendapatan Jasa Pelayanan Tol Suramadu	-	226.868.919.930	-	213.053.134.699	13.815.785.231	6,48%
42328	**Pendapatan Jasa Kepolisian II**	**403.262.253.000**	**117.803.552.951**	**29,21%**	**131.425.870.986**	(13.622.318.035)	-10,37%
423281	Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah	63.907.725.000	51.076.295.000	**79,92%**	53.671.179.785	(2.594.884.785)	-4,83%
423282	Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	59.241.510.000	64.117.335.001	**108,23%**	64.544.694.125	(427.359.124)	-0,66%
423283	Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Lapor Diri	11.831.200.000	37.100.000	**0,31%**	11.693.460.000	(11.656.360.000)	-99,68%
423284	Pendapatan Penerbitan Karti Sidik Jari (Inafis Card)		14.995.000	-	6.485.000	8.510.000	131,23%
423285	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	268.281.818.000	2.557.827.950	**0,95%**	1.510.052.076	1.047.775.874	69,39%
42329	**Pendapatan Jasa Lainnya**	**1.635.146.053.000**	**206.896.858.780**	**12,65%**	**150.766.900.520**	**56.129.958.260**	37,23%
423291	Pendapatan Jasa Lainnya	1.615.783.469.000	105.844.655.770	**6,55%**	101.791.418.879	4.053.236.891	3,98%
423292	Pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II	2.593.266.000	27.798.085.088	**1071,93%**	8.566.932.885	19.231.152.203	224,48%
423293	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	16.769.318.000	73.254.117.922	**436,83%**	40.408.548.756	32.845.569.166	81,28%
4233	**Pendapatan Bunga**	**6.113.228.464.000**	**4.484.615.755.007**	**73,36%**	**4.869.331.146.430**	**(384.715.391.423)**	-7,90%
42331	**Pendapatan Bunga**	**1.404.038.464.000**	**1.998.227.378.007**	**142,32%**	**2.157.055.147.430**	**(158.827.769.423)**	-7,36%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN 2013
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2014	%	TAHUN ANGGARAN 2013	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
423311	Pendapatan Bunga atas Investasi Dalam Obligasi	267.595.808.000	50.000	**0,00%**	-	50.000	
423312	Pendapatan PPA (eks BPPN) atas Bunga Obligasi		-	-	-	-	
423313	Pendapatan Bunga Dari Piutang dan Penerusan Pinjaman	1.136.259.539.000	1.656.426.839.489	**145,78%**	1.890.250.985.894	**(233.824.146.405)**	-12,37%
423314	Pendapatan Bunga dari Pemberian Kredit Pemerintah		-	-	-	-	
423315	Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan		340.953.572.393	-	265.836.654.462	**75.116.917.931**	28,26%
423319	Pendapatan Bunga Lainnya	183.117.000	846.916.125	**462,50%**	967.507.074	(120.590.949)	-12,46%
42332	**Pendapatan Gain On Bond Redemption**	**-**	**60.188.000.000**	-	**260.000.000**	**59.928.000.000**	23049,23%
423321	Pendapatan Gain On Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang		60.188.000.000	-	260.000.000	59.928.000.000	23049,23%
42333	**Pendapatan Premium atas Obligasi Negara**	**4.709.190.000.000**	**2.426.200.377.000**	**51,52%**	**2.712.015.999.000**	**(285.815.622.000)**	-10,54%
423331	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	4.709.190.000.000	2.331.110.867.000	**49,50%**	2.711.157.959.000	(380.047.092.000)	-14,02%
423332	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing		87.577.417.000	-	-	87.577.417.000	
423333	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam negeri/rupiah		7.512.093.000	-	858.040.000	6.654.053.000	775,49%
42334	**Pendapatan Fee Lainnya atas Surat Berharga Negara**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	
423341	Pendapatan atas Transaksi Security Lending SUN		-	-	-	-	
42336	**Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah**					**-**	**0,00%**
423361	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur		-	-	-	-	
4234	**Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi**	**151.609.452.000**	**2.870.177.786.886**	**1893,14%**	**278.486.542.196**	**2.591.691.244.690**	930,63%
42341	**Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi**	**151.609.452.000**	**2.870.077.786.886**	**1893,07%**	**278.486.542.196**	**2.591.591.244.690**	930,60%

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN 2013
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2014	%	TAHUN ANGGARAN 2013	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	3.723.305.000	3.300.496.073	**88,64%**	3.906.973.266	(606.477.193)	-15,52%
423412	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	661.335.000	346.388.322	**52,38%**	463.958.646	(117.570.324)	-25,34%
423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	2.306.551.000	1.545.736.032	**67,02%**	2.616.130.543	(1.070.394.511)	-40,92%
423414	Pendapatan Hasil Denda dan Sebagainya	104.310.770.000	2.804.016.657.519	**2688,14%**	211.515.197.966	2.592.501.459.553	1225,68%
423415	Pendapatan Ongkos Perkara	18.266.950.000	21.530.934.196	**117,87%**	23.106.316.591	(1.575.382.395)	-6,82%
423416	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	2.000.000.000	13.236.410	**0,66%**	344.951.156	(331.714.746)	-96,16%
423417	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi		123.484.764	-	-	123.484.764	
423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	20.340.541.000	39.200.853.570	**192,72%**	36.533.014.028	2.667.839.542	7,30%
42342	**Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi**	**-**	**100.000.000**	-	-	**100.000.000**	
423421	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Ditetapkan Pengadilan		100.000.000	-	-	100.000.000	
4235	**Pendapatan Pendidikan**	**2.776.175.981.000**	**3.006.395.763.012**	**108,29%**	**2.287.742.131.383**	**718.653.631.629**	31,41%
42351	**Pendapatan Pendidikan**	**2.776.175.981.000**	**3.006.395.763.012**	**108,29%**	**2.287.742.131.383**	**718.653.631.629**	31,41%
423511	Pendapatan Uang Pendidikan	1.762.088.665.000	2.454.544.071.372	**139,30%**	1.765.060.869.392	689.483.201.980	39,06%
423512	Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan	126.719.701.000	79.714.516.932	**62,91%**	65.177.498.785	14.537.018.147	22,30%
423513	Pendapatan Uang Ujian Untuk Menjalankan Praktek	80.443.041.000	53.818.550.271	**66,90%**	66.815.802.357	(12.997.252.086)	-19,45%
423519	Pendapatan Pendidikan Lainnya	806.924.574.000	418.318.624.437	**51,84%**	390.687.960.849	27.630.663.588	7,07%
4236	**Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi**	**71.358.500.000**	**648.825.726.560**	**909,25%**	**278.930.683.217**	**369.895.043.343**	132,61%
42361	**Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi**	**71.358.500.000**	**648.825.726.560**	**909,25%**	**278.930.683.217**	**369.895.043.343**	132,61%
423611	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan Pengadilan	38.961.500.000	532.630.766.821	**1367,07%**	129.233.798.204	403.396.968.617	312,15%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN 2013
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2014	%	TAHUN ANGGARAN 2013	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
423612	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara	3.100.000.000	2.509.843.023	**80,96%**	1.548.619.812	961.223.211	62,07%
423613	Pendapatan dari Pengembalian Penyalahgunaan Penyelenggaraan Keuangan		779.939.466	-	534.443.534	245.495.932	45,93%
423614	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Ditetapkan di Pengadilan	29.282.000.000	112.423.397.238	**383,93%**	147.133.594.226	(34.710.196.988)	-23,59%
423615	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	15.000.000	481.780.012	**3211,87%**	480.227.441	1.552.571	0,32%
4237	**Pendapatan luran dan Denda**	**863.131.055.000**	**1.689.358.941.406**	**195,72%**	**1.398.128.607.728**	**291.230.333.678**	20,83%
42371	**Pendapatan luran Badan Usaha**	**600.000.000.000**	**1.012.471.268.237**	**168,75%**	**922.393.422.616**	**90.077.845.621**	9,77%
423711	Pendapatan luran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM	480.000.000.000	827.709.438.197	**172,44%**	722.697.770.022	105.011.668.175	14,53%
423712	Pendapatan luran Badan Usaha dari kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	120.000.000.000	184.760.380.040	**153,97%**	180.121.846.965	4.638.533.075	2,58%
423713	Pendapatan luran Badan Usaha di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan		1.450.000	-	19.573.805.629	(19.572.355.629)	-99,99%
42372	**Pendapatan Dana Pengamanan Hutan**	**-**	**919.408.406**	-	**813.980.288**	**105.428.118**	12,95%
423721	Pendapatan Dana Pengamanan Hutan		919.408.406	-	813.980.288	105.428.118	12,95%
42373	**Pendapatan dari Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam**	**57.964.210.000**	**370.411.767.779**	**639,04%**	**130.633.281.432**	**239.778.486.347**	183,55%
423731	Pendapatan luran Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Liar/Mengambil/Mengangkut Tumbuhan Alam Hidup	9.533.537.000	12.798.951.487	**134,25%**	6.883.773.334	5.915.178.153	85,93%
423732	Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA)	1.761.734.000	6.547.248.300	**371,64%**	55.788.000	6.491.460.300	11635,94%
423733	Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru (PIPTB)		-	-	-	-	
423734	Pungutan Izin Berburu di Taman Buru dan Areal Buru (PIB)		-	-	-	-	
423735	Pungutan masuk Obyek Wisata Alam	46.395.582.000	60.490.088.912	**130,38%**	36.052.492.293	24.437.596.619	67,78%
423736	luran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA)	273.357.000	296.212.092	**108,36%**	294.244.624	1.967.468	0,67%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN 2013
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2014	%	TAHUN ANGGARAN 2013	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
423737	luran Hasil Usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPTB)		-	-	-	-	
423738	Pendapatan Penggantian Nilai Tegakan		290.278.316.988	-	87.346.983.181	202.931.333.807	232,33%
423739	Pendapatan Pungutan Hasil Usaha Jasa Wisata Alam		950.000	-	-	950.000	
42374	**Pendapatan Penerimaan dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	
423741	Pendapatan Penerimaan dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan		-	-	-	-	
42375	**Pendapatan Denda I**	**205.145.295.000**	**305.555.134.884**	**148,95%**	**344.279.267.089**	**(38.724.132.205)**	-11,25%
423751	Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan		19.002.943.540	-	5.785.629.911	13.217.313.629	228,45%
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	201.700.295.000	274.041.053.011	**135,87%**	312.752.135.597	(38.711.082.586)	-12,38%
423753	Pendapatan Denda Administrasi BPHTB		72.098.367	-	15.000.000	57.098.367	380,66%
423754	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal		504.494.545	-	4.857.442.706	(4.352.948.161)	-89,61%
423755	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha	105.000.000	9.265.326.170	**8824,12%**	15.658.247.840	(6.392.921.670)	-40,83%
423756	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA	460.000.000	183.974.556	**39,99%**	296.348.619	(112.374.063)	-37,92%
423757	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan Uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia		27.386.502	-	-	27.386.502	
423758	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling		179.184	-	948.339	(769.155)	-81,11%
423759	Pendapatan Denda Atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi	2.880.000.000	2.457.679.009	**85,34%**	4.913.514.077	(2.455.835.068)	-49,98%
42376	**Pendapatan Denda II**	**21.550.000**	**1.362.100**	**6,32%**	**8.656.303**	**(7.294.203)**	-84,26%
423761	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Saldo BO II ke BO I	550.000	-	**0,00%**	5.604.539	(5.604.539)	-100,00%
423762	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pembagian PBB oleh BO III PBB	21.000.000	1.362.100	**6,49%**	3.051.764	(1.689.664)	-55,37%

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN 2013
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2014	%	TAHUN ANGGARAN 2013	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
4239	**Pendapatan Lain-Lain**	**11.259.949.386.000**	**6.340.779.625.955**	**56,31%**	**8.507.245.500.116**	**(2.166.465.874.161)**	**-25,47%**
42391	**Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu**	**8.032.360.306.000**	**4.323.104.102.951**	**53,82%**	**5.201.515.618.841**	**(878.411.515.890)**	-16,89%
423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	2.270.506.334.000	256.220.750.073	**11,28%**	185.276.253.160	70.944.496.913	38,29%
423912	Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL	20.487.000	91.063.155.377	**444492,39%**	150.190.599.911	(59.127.444.534)	-39,37%
423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	5.761.830.185.000	2.924.280.885.118	**50,75%**	3.423.044.648.756	(498.763.763.638)	-14,57%
423914	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinjaman LN TAYL		17.779.246.362	-	14.961.725.496	2.817.520.866	18,83%
423915	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL	3.300.000	6.154.922.967	**186512,82%**	13.726.464.999	(7.571.542.032)	-55,16%
423916	Penerimaan Kembali Belanja Swadana TAYL		1.966.160.536	-	1.547.403.986	418.756.550	27,06%
423917	Penerimaan Kembali Belanja Transfer ke Daerah TAYL		1.025.638.982.518	-	1.412.768.522.533	(387.129.540.015)	-27,40%
42392	**Pendapatan Pelunasan Piutang**	**11.180.497.000**	**92.372.189.161**	**826,19%**	**315.675.651.865**	**(223.303.462.704)**	-70,74%
423921	Pendapatan Pelunasan Piutang Non-Bendahara	269.434.000	6.078.610.965	**2256,07%**	2.830.114.173	3.248.496.792	114,78%
423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara(Masuk TP/TGR) Bendahara	10.911.063.000	86.293.578.196	**790,88%**	312.845.537.692	(226.551.959.496)	-72,42%
42393	**Pendapatan dari Penutupan Rekening**	**-**	**16.912.434.135**	**-**	**93.362.764.134**	**(76.450.329.999)**	-81,89%
423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening		16.912.434.135	-	93.362.764.134	(76.450.329.999)	-81,89%
42394	**Pendapatan dari Selisih Kurs**	**2.090.547.029.000**	**897.567.700.155**	**42,93%**	**1.770.265.769.281**	**(872.698.069.126)**	-49,30%
423941	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUN		895.279.095.904	-	1.769.395.899.246	(874.116.803.342)	-49,40%
423942	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI		1.560.110.667	-	869.870.035	690.240.632	79,35%
423943	Pendapatan dari Selisih Kurs yang Terealisasi		728.493.584	-	-	728.493.584	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN 2013
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2014	%	TAHUN ANGGARAN 2013	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
42395	**Penerimaan Kembali Belanja TAYL II**		**1.613.680.820**	**0,00%**	**-**	**1.613.680.820**	
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		167.708.006	-	-	167.708.006	
423952	Penerimaan kembali belanja barang TAYL		487.928.297	-	-	487.928.297	
423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu		-	-	-	-	
423954	Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Yang Lalu		-	-	-	-	
423955	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu		-	-	-	-	
423956	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu		-	-	-	-	
423957	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu		23.167.325	-	-	23.167.325	
423958	Penerimaan Kembali Belanja Lain--lain Tahun Anggaran Yang Lalu		934.877.192	-	-	934.877.192	
423959	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu		-	-	-	-	
42396	**Pendapatan dalam Rangka Refund Dana PHLN**		**967.600.942**	**-**	**-**	**967.600.942**	
423961	Pendapatan dalam Rangka Refund Dana PHLN		967.600.942	-	-	967.600.942	
42399	**Pendapatan Lain-Lain**	**1.125.861.554.000**	**1.008.241.917.791**	**89,55%**	**1.126.425.695.995**	**(118.183.778.204)**	-10,49%
423991	Penerimaan Kembali Persekot/ Uang Muka Gaji	30.220.000.000	12.143.620.159	**40,18%**	11.710.632.497	432.987.662	3,70%
423992	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional	18.597.000	11.181.675.800	**60126,23%**	9.632.725.551	1.548.950.249	16,08%
423993	Pendapatan dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL)		112.002.330	-	25.000	**111.977.330**	447909,32%
423994	Pendapatan dari Biaya Pengawasan HET Minyak Tanah		-	-	-	-	
423995	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia		7.665.000	-	111.998.379	**(104.333.379)**	-93,16%
423996	Pendapatan Jasa Perbendaharaan		-	-	-	-	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN 2013
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2014	%	TAHUN ANGGARAN 2013	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
423997	Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari bank/pos Persepsi		552.318.740	-	2.539.828	**549.778.912**	21646,30%
423998	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih lelang yang tidak diambil oleh yang berhak	107.500.000	558.680.600	**519,70%**	2.205.703.688	**(1.647.023.088)**	-74,67%
423999	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	1.095.515.457.000	983.685.955.162	**89,79%**	1.102.762.071.052	**(119.076.115.890)**	-10,80%
				-			
424	**Pendapatan Badan Layanan Umum**	**20.863.383.798.000**	**29.681.044.008.519**	**142,26%**	**24.648.239.915.152**	**5.032.804.093.367**	20,42%
4241	**Pendapatan Jasa Layanan Umum**	**18.930.724.885.000**	**26.495.707.691.213**	**139,96%**	**21.704.391.604.873**	**4.791.316.086.340**	22,08%
42411	**Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat**	**15.618.176.715.000**	**22.119.394.273.875**	**141,63%**	**18.359.471.141.552**	**3.759.923.132.323**	20,48%
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	6.686.892.322.000	9.143.792.014.679	**136,74%**	6.509.988.422.078	2.633.803.592.601	40,46%
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	5.814.491.817.000	10.221.214.300.581	**175,79%**	9.286.900.203.251	934.314.097.330	10,06%
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	223.191.345.000	157.568.242.716	**70,60%**	186.701.874.799	(29.133.632.083)	-15,60%
424114	Pendapatan Jasa Pencetakan	2.389.175.000	9.476.286.520	**396,63%**	900.893.875	8.575.392.645	951,88%
424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian		-	-	-	-	
424116	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	2.189.409.337.000	1.926.838.450.138	**88,01%**	1.702.062.258.286	224.776.191.852	13,21%
424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran	1.410.000.000	868.488.258	**61,59%**	887.702.776	(19.214.518)	-2,16%
424118	Pendapatan Penyediaan Barang		426.131.950	-	7.355.722.280	(6.929.590.330)	-94,21%
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	700.392.719.000	659.210.359.033	**94,12%**	664.674.064.207	(5.463.705.174)	-0,82%
42412	**Pendapatan dari Pengelolaan WilayahKawasan Tertentu**	**846.538.123.000**	**1.139.330.350.352**	**134,59%**	**1.072.243.436.645**	**67.086.913.707**	6,26%
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	697.807.496.000	981.842.642.395	**140,70%**	932.200.572.897	49.642.069.498	5,33%
424122	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu		-	-	6.393.496.572	(6.393.496.572)	-100,00%

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN 2013
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2014	%	TAHUN ANGGARAN 2013	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah		1.250.338.316	-	1.993.747.200	(743.408.884)	-37,29%
424129	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya	148.730.627.000	156.237.369.641	105,05%	131.655.619.976	24.581.749.665	18,67%
42413	**Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat**	**2.466.010.047.000**	**3.236.983.066.986**	**131,26%**	**2.272.677.026.676**	**964.306.040.310**	42,43%
424131	Pendapatan Program Dana Penjaminan		-	-	-	-	
424132	Pendapatan Program Dana Penjaminan Syariah		-	-	-	-	
424133	Pendapatan Program Modal Ventura	2.137.813.000	11.141.872.352	521,18%	3.883.423.283	7.258.449.069	186,91%
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	587.568.130.000	670.689.728.163	114,15%	559.547.596.187	111.142.131.976	19,86%
424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	21.801.775.000	27.923.992.403	128,08%	27.032.263.771	891.728.632	3,30%
424136	Pendapatan Investasi	692.502.329.000	854.926.859.631	123,45%	688.344.353.174	166.582.506.457	24,20%
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	1.162.000.000.000	1.672.300.614.437	143,92%	993.869.390.261	678.431.224.176	68,26%
4242	**Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum**	**102.524.440.000**	**91.265.971.812**	**89,02%**	**108.230.165.667**	**(16.964.193.855)**	-15,67%
42421	**Pendapatan Hibah Terkait**	**100.428.132.000**	**45.261.477.748**	**45,07%**	**57.244.726.688**	**(11.983.248.940)**	-20,93%
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Perorangan		13.849.813.191	-	2.820.043.500	11.029.769.691	391,12%
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha	69.313.320.000	18.299.284.821	26,40%	36.419.857.426	(18.120.572.605)	-49,75%
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Pemda	31.114.812.000	12.277.222.000	39,46%	16.288.422.000	(4.011.200.000)	-24,63%
424214	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Perorangan		-	-	-	-	
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Lembaga/Badan Usaha		835.157.736	-	1.716.403.762	(881.246.026)	-51,34%
424216	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Negara		-	-	-	-	
424219	Pendapatan Hibah Terikat Lainnya		-	-	-	-	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN 2013
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2014	%	TAHUN ANGGARAN 2013	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
42422	**Pendapatan Hibah Tidak Terikat**	**2.096.308.000**	**46.004.494.064**	**2194,55%**	**50.985.438.979**	**(4.980.944.915)**	-9,77%
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Perorangan		3.098.923.371	-	5.673.249.000	(2.574.325.629)	-45,38%
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha	2.096.308.000	19.874.177.638	948,06%	11.290.040.900	8.584.136.738	76,03%
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Pemda		5.655.275.000	-	17.203.570.000	(11.548.295.000)	-67,13%
424224	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Perorangan		-	-	-	-	
424225	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Lembaga/Badan Usaha		-	-	824.223.287	(824.223.287)	-100,00%
424226	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Negara		-	-	-	-	
424229	Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Lainnya		17.376.118.055	-	15.994.355.792	1.381.762.263	8,64%
4243	**Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU**	**678.850.560.000**	**1.233.373.294.610**	**181,69%**	**1.339.038.388.726**	**(105.665.094.116)**	-7,89%
42431	**Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU**	**678.850.560.000**	**1.233.373.294.610**	**181,69%**	**1.339.038.388.726**	**(105.665.094.116)**	-7,89%
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	5.676.598.000	79.838.574.401	1406,45%	70.891.881.105	8.946.693.296	12,62%
424312	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	628.318.962.000	1.034.166.560.765	164,59%	1.171.070.729.365	(136.904.168.600)	-11,69%
424313	Pendapatan Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah	44.855.000.000	119.368.159.444	266,12%	97.075.778.256	22.292.381.188	22,96%
4249	**Pendapatan BLU Lainnya**	**1.151.283.913.000**	**1.860.697.050.884**	**161,62%**	**1.496.579.755.886**	**364.117.294.998**	24,33%
42491	**Pendapatan BLU Lainnya**	**1.151.283.913.000**	**1.860.697.050.884**	**161,62%**	**1.496.579.755.886**	**364.117.294.998**	24,33%
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1.151.283.913.000	1.860.697.050.884	161,62%	1.496.579.755.886	364.117.294.998	24,33%
				-			
43	**Penerimaan Hibah**	**2.325.114.000.000**	**5.034.520.904.737**	**216,53%**	**6.832.500.887.004**	**(1.797.979.982.267)**	-26,32%
431	**Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri**	**-**	**5.034.520.904.737**	**-**	**6.832.500.887.004**	**(1.797.979.982.267)**	-26,32%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN 2013
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2014	%	TAHUN ANGGARAN 2013	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
4311	**Pendapatan Hibah Dalam Negeri**	**-**	**1.162.796.535.035**	**-**	**1.614.959.045.913**	**(452.162.510.878)**	-28,00%
43111	**Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Terencana**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
431111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Terencana Perorangan		-	-	-	-	
431112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Terencana Lembaga/Badan Usaha		-	-	-	-	
431119	Pendapatan Hibah Dalam Negeri-Terencana Lainnya		-	-	-	-	
43112	**Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga**		**522.123.290.666**	**-**	**426.022.593.757**	**96.100.696.909**	22,56%
431121	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung - Bentuk Barang		504.820.303.441	-	412.748.969.114	92.071.334.327	22,31%
431122	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung - Bentuk Jasa		17.302.987.225	-	13.273.624.643	4.029.362.582	30,36%
431123	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung - Bentuk Surat Berharga		-	-	-	-	
43113	**Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Uang**		**640.673.244.369**	**-**	**1.188.936.452.156**	**(548.263.207.787)**	-46,11%
431131	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang- Perorangan		684.000.000	-	1.694.593.930	(1.010.593.930)	-59,64%
431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang- Lembaga/Badan Usaha		25.995.124.749	-	125.229.823.031	(99.234.698.282)	-79,24%
431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang- Pemerintah Daerah		613.994.119.620	-	1.056.935.885.195	(442.941.765.575)	-41,91%
431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang-Lainnya		-	-	5.076.150.000	(5.076.150.000)	-100,00%
4312	**Pendapatan Hibah Luar Negeri**		**3.871.724.369.702**	**-**	**5.217.541.841.091**	**(1.345.817.471.389)**	-25,79%
43121	**Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana**	**-**	**1.496.106.704.979**	**-**	**1.987.042.923.829**	**(490.936.218.850)**	-24,71%
431211	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Perorangan		-	-	-	-	
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Bilateral		663.199.145.545	-	834.963.018.773	(171.763.873.228)	-20,57%
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Multilateral		832.907.559.434	-	1.151.978.658.565	(319.071.099.131)	-27,70%

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN 2013
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2014	%	TAHUN ANGGARAN 2013	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
431219	Pendapatan Hibah Luar Negeri-Terencana Lainnya		-	-	101.246.491	(101.246.491)	-100,00%
43122	**Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga**		**1.555.495.983.791**	**0,00%**	**1.872.600.087.181**	**(317.104.103.390)**	-16,93%
431221	Pendapatan Hibah Luar Negeri-Langsung Bentuk Barang		629.016.466.662	-	280.793.151.871	348.223.314.791	124,01%
431222	Pendapatan Hibah Luar Negeri-Langsung Bentuk Jasa		926.479.517.129	-	1.591.806.935.310	(665.327.418.181)	-41,80%
431223	Pendapatan Hibah Luar Negeri-Langsung Bentuk Surat Berharga		-	-	-	-	
43123	**Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang**		**820.121.680.932**	**0,00%**	**1.357.898.830.081**	**(537.777.149.149)**	-39,60%
431231	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung --Langsung Bentuk Uang Perorangan		1.105.195.518	-	177.934.000	927.261.518	521,13%
431232	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung -Langsung Bentuk Uang Bilateral		200.999.504.252	-	313.994.295.486	(112.994.791.234)	-35,99%
431233	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung -Langsung Bentuk Uang Multilateral		571.002.636.538	-	989.733.078.584	(418.730.442.046)	-42,31%
431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri -Langsung Bentuk Uang Lainnya		47.014.344.624	-	53.993.522.011	(6.979.177.387)	-12,93%
Jumlah Penerimaan		**1.635.378.485.045.000**	**1,550,490,813,616,979**	**94,81%**	**1,438,891,069,562,744**	**111.599.744.054.235**	**7,76%**

www.peraturan.go.id

REALISASI PENERIMAAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN UNTUK PERIODE 1 JANUARI 2014 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

No	Nama BUMN	Jumlah
(1)	(2)	(4)
1	PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk	3.602.579.400.000,00
2	PT Bank Mandiri Tbk	3.276.675.500.000,00
3	PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI)	1.630.429.340.629,00
4	PT Bank BTN	281.847.491.460,00
5	PT Bank Bukopin	31.891.038.231,00
Perbankan		**8.823.422.770.320,00**
1	PT Pertamina	10.259.054.000.000,00
2	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)	5.284.132.606.898,00
3	PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk	2.905.421.754.262,00
4	PT Pupuk Indonesia	1.869.016.000.000,00
5	PT Inalum	1.627.822.333.500,00
6	PT Semen Indonesia	1.232.606.487.404,00
7	PT Jasa Raharja	1.150.184.622.000,00
8	PT Pegadaian	858.286.000.000,00
9	PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II	796.314.089.813,00
10	PT Bukit Asam Tbk	692.067.889.909,00
11	PT Taspen	661.995.000.000,00
12	PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III	475.839.000.000,00
13	PT Jasa Marga Tbk	374.168.844.000,00
14	PT Angkasa Pura II	361.461.555.421,00
15	PT Angkasa Pura I	257.915.821.000,00
16	PT Bio farma	228.987.286.878,00
17	PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I	195.697.995.000,00
18	PT TIMAH	184.151.046.300,00
19	PERUM JAMKRINDO	157.563.000.000,00
20	PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV	152.864.000.000,00
21	PT Kereta Api Indonesia	140.100.003.061,00
22	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV	134.336.885.407,00

www.peraturan.go.id

REALISASI PENERIMAAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN UNTUK PERIODE 1 JANUARI 2014 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

No	Nama BUMN	Jumlah
(1)	(2)	(4)
23	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III	129.382.600.000,00
24	PT Wijaya Karya	111.498.800.000,00
25	PT Asuransi Kredit Indonesia	105.215.372.000,00
26	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	96.061.959.081,00
27	PT Socfin Indonesia	92.004.917.355,00
28	PT Waskita Karya	75.084.241.908,00
29	PT ASDP Indonesia Ferry	68.002.000.000,00
30	PT Pembangunan Perumahan Persero	64.368.297.297,00
31	PT Adhi Karya	62.114.450.560,00
32	PT POS Indonesia	61.447.013.080,00
33	PT ANTAM	59.978.677.606,00
34	PT Semen Baturaja	59.500.286.794,00
35	PT Kimia Farma	48.286.826.134,00
36	PT Jasindo	45.507.186.000,00
37	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	40.142.282.196,00
38	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V	35.855.900.000,00
39	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X	32.224.000.000,00
40	PT Kawasan Berikat Nusantara	28.487.895.128,00
41	PT Perkebunan Nusantara VIII	26.316.452.000,00
42	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII	26.040.770.871,00
43	PT Sucofindo	22.119.310.308,00
44	Perum Jasa Tirta II	19.457.000.000,00
45	PT Asabri	16.850.000.000,00
46	PT Perkebunan Nusantara VI	16.671.793.121,00
47	PT Biro Klasifikasi Indonesia	15.952.307.600,00
48	PT SIER	13.779.683.402,00
49	Perum Jasa Tirta I	13.291.000.000,00
50	PT ASEI REI	10.733.604.923,00
51	PERUM PERUMNAS	10.567.226.891,00
52	PT Perusahaan Pengelola Aset	10.309.965.483,00
53	PT Perkebunan Nusantara VII	9.827.000.000,00
54	PT Pindad	9.760.396.339,00

www.peraturan.go.id

REALISASI PENERIMAAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
UNTUK PERIODE 1 JANUARI 2014 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

No	Nama BUMN	Jumlah
(1)	(2)	(4)
55	PT Jakarta Indust Estat Pulogadung	8.276.033.441,00
56	PT Hutama Karya	6.642.086.633,00
57	PT Surveyor Indonesia	6.264.627.813,00
58	PT Pengembangan Pariwisata Bali	5.226.000.000,00
59	PT Kliring Berjangka Indonesia	5.134.505.000,00
60	PT Brantas Abipraya	3.645.926.000,00
61	PT Kawasan Industri Medan	3.559.926.008,00
62	PT Perkebunan Nusantara XI	2.234.000.000,00
63	PT Perkebunan Nusantara IX	2.059.857.010,00
64	PT TWC Pbr	1.736.405.000,00
65	PT Sarinah	1.669.000.000,00
66	PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II	1.500.000.000,00
67	PT Rajawali Nusantara Indonesia	1.226.000.000,00
68	PT Kawasan Industri Wijayakusuma	1.041.869.738,00
69	PT Kawasan Industri Makassar	905.520.000,00
70	PT Inhutani I	600.000.000,00
71	PT Amarta Karya	563.439.363,00
72	PT PDIP Batam	484.344.121,28
73	PT Yodya Karya	429.981.588,00
74	PT Virama Karya	421.654.966,00
75	PT Indra Karya	222.017.629,00
76	PT Rekayasa Industri	218.500.000,00
77	PT Inhutani V	120.000.000,00
Non Perbankan		**31.491.007.131.240,30**
Jumlah Total		**40.314.429.901.560,30**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN 2

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2014

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
001	**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**	**713.067.253.000**	**645.360.432.326**	**5.971.532.172**	**639.388.900.154**	**(73.678.352.846)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	77.286.980.000	66.962.224.029	10.475.104	66.951.748.925	(10.335.231.075)
02	MAJELIS	635.780.273.000	578.398.208.297	5.961.057.068	572.437.151.229	(63.343.121.771)
002	**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**	**2.888.150.184.000**	**2.346.173.036.937**	**39.793.726.489**	**2.306.379.310.448**	**(581.770.873.552)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	819.388.509.000	583.776.650.650	1.803.829.681	581.972.820.969	(237.415.688.031)
02	DEWAN	2.068.761.675.000	1.762.396.386.287	37.989.896.808	1.724.406.489.479	(344.355.185.521)
004	**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**	**2.594.951.954.000**	**2.340.821.112.389**	**34.289.459.443**	**2.306.531.652.946**	**(288.420.301.054)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.814.129.824.000	1.632.616.061.837	12.485.970.319	1.620.130.091.518	(193.999.732.482)
02	B.P.K. PUSAT	780.822.130.000	708.205.050.552	21.803.489.124	686.401.561.428	(94.420.568.572)
005	**MAHKAMAH AGUNG**	**7.159.890.584.000**	**6.987.680.136.087**	**7.994.418.251**	**6.979.685.717.836**	**(180.204.866.164)**
01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	6.736.830.789.000	6.572.123.343.877	6.384.899.447	6.565.738.444.430	(171.092.344.570)
02	KEPANITERAAN	111.585.000.000	120.472.955.274	4.162.587	120.468.792.687	8.883.792.687
03	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	115.060.000.000	108.518.195.430	118.445.951	108.399.749.479	(6.660.250.521)
04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	66.850.000.000	65.760.930.993	146.417.899	65.614.513.094	(1.235.486.906)
05	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	22.080.000.000	20.419.847.315	51.357.760	20.368.489.555	(1.711.510.445)
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN P	79.380.000.000	72.958.208.233	1.280.320.106	71.677.888.127	(7.702.111.873)
07	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG	28.104.795.000	27.426.654.965	8.814.501	27.417.840.464	(686.954.536)
006	**KEJAKSAAN AGUNG**	**3.570.196.463.000**	**3.324.671.665.861**	**3.859.281.259**	**3.320.812.384.602**	**(249.384.078.398)**
01	KEJAKSAAN AGUNG	3.570.196.463.000	3.324.671.665.861	3.859.281.259	3.320.812.384.602	(249.384.078.398)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
007	**SEKRETARIAT NEGARA**	**2.005.516.170.000**	**2.139.550.319.720**	**3.631.631.080**	**2.135.918.688.639**	**130.402.518.639**
01	SEKRETARIAT NEGARA	1.140.369.615.000	1.379.034.802.696	606.762.553	1.378.428.040.143	238.058.425.143
03	SEKRETARIAT PRESIDEN	413.599.687.000	371.896.064.741	594.677.802	371.301.386.939	(42.298.300.061)
04	SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN	239.523.366.000	194.864.642.740	1.071.636.341	193.793.006.399	(45.730.359.601)
05	SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN	28.385.076.000	26.206.813.689	67.936.000	26.138.877.689	(2.246.198.311)
06	PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN	28.969.559.000	30.599.052.063	-	30.599.052.063	1.629.493.063
07	DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN	36.137.418.000	29.518.648.377	83.148.230	29.435.500.147	(6.701.917.853)
08	UNIT KERJA PRESIDEN BD.PENGAWASAN & PENGENDALIAN PEMBANGUNAN (UKP-PPP)	55.947.508.000	50.548.964.742	446.655.357	50.102.309.385	(5.845.198.615)
09	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)	62.583.949.000	56.881.330.880	760.814.806	56.120.515.874	(6.463.433.126)
010	**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**	**13.797.035.451.000**	**12.885.968.395.946**	**14.227.859.602**	**12.871.740.536.344**	**(925.294.914.656)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	949.313.857.000	955.393.583.902	1.215.052.578	954.178.531.324	4.864.674.324
02	INSPEKTORAT JENDERAL	45.641.023.000	37.657.007.467	35.146.158	37.621.861.309	(8.019.161.691)
03	DITJEN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	176.210.000.000	151.542.567.268	84.598.850	151.457.968.418	(24.752.031.582)
04	DITJEN PEMERINTAHAN UMUM	261.083.288.000	221.992.907.387	551.386.868	221.441.520.521	(39.641.765.479)
05	DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.591.598.065.000	10.190.587.993.683	7.296.039.739	10.183.291.953.944	(408.306.111.056)
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	368.802.335.000	321.382.229.880	1.985.601.867	319.396.628.013	(49.405.706.987)
07	DITJEN OTONOMI DAERAH	79.426.123.000	68.481.711.091	186.840.865	68.294.870.226	(11.131.252.774)
08	DITJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.040.053.279.000	652.623.758.614	2.654.836.055	649.968.922.559	(390.084.356.441)
09	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH	58.532.517.000	50.980.705.503	151.838.082	50.828.867.421	(7.703.649.579)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	44.178.762.000	41.624.736.183	52.907.035	41.571.829.148	(2.606.932.852)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
12	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	182.190.204.000	193.701.194.908	13.011.507	193.087.583.401	11.491.379.401
011	**KEMENTERIAN LUAR NEGERI**	**4.885.814.964.000**	**5.350.380.769.447**	**10.555.319.557**	**5.339.825.449.890**	**454.010.485.890**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	4.232.920.264.000	4.414.224.128.810	4.633.156.958	4.409.590.971.852	176.670.707.852
02	DITJEN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA	42.824.453.000	53.260.653.929	367.050.546	52.893.603.383	10.069.150.383
03	DITJEN AMERIKA DAN EROPA	30.050.070.000	35.019.984.017	785.796.051	34.254.187.966	4.204.117.966
04	DITJEN KERJASAMA ASEAN	47.712.875.000	49.559.453.030	204.072.289	49.355.380.741	1.642.505.741
05	DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL	296.177.226.000	539.946.653.963	2.551.136.111	537.395.517.852	241.218.291.852
06	DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK	60.318.779.000	81.135.962.944	776.408.363	80.359.554.581	20.040.775.581
07	DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL	29.176.741.000	34.387.905.763	142.083.554	34.245.822.209	5.069.081.209
08	DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER	104.681.503.000	92.619.733.996	712.443.855	91.907.290.141	(12.774.212.859)
09	INSPEKTORAT JENDERAL	19.630.884.000	24.378.132.617	165.075.548	24.213.057.069	4.582.173.069
11	BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN	22.322.169.000	25.848.160.378	238.096.282	25.610.064.096	3.287.895.096
012	**KEMENTERIAN PERTAHANAN**	**83.300.296.840.000**	**86.384.423.050.474**	**198.794.659.940**	**86.185.628.390.534**	**2.885.331.550.534**
01	KEMENTERIAN PERTAHANAN	20.404.148.321.000	24.558.143.462.919	119.744.213.199	24.438.399.249.720	4.034.250.928.720
21	MARKAS BESAR TNI	6.917.821.479.000	6.487.204.691.821	13.489.540.904	6.473.715.150.917	(444.106.328.083)
22	MARKAS BESAR TNI AD	35.184.226.541.000	34.549.814.219.452	25.594.203.573	34.524.220.015.879	(660.006.525.121)
23	MARKAS BESAR TNI AL	11.081.087.713.000	11.043.864.488.608	14.295.337.664	11.029.569.150.944	(51.518.562.056)
24	MARKAS BESAR TNI AU	9.713.012.786.000	9.745.396.187.674	25.671.364.600	9.719.724.823.074	6.712.037.074
013	**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**	**7.607.497.385.000**	**7.204.085.723.071**	**13.365.260.980**	**7.190.720.462.091**	**(416.776.922.909)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	6.307.709.078.000	5.981.020.312.085	3.163.404.488	5.977.856.907.617	(329.852.170.383)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
02	INSPEKTORAT JENDERAL	20.450.983.000	19.774.804.799	90.300.585	19.684.504.214	(766.478.786)
03	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	245.233.381.000	255.123.754.872	5.152.902.329	249.970.852.543	4.737.471.543
05	DITJEN PEMASYARAKATAN	43.307.517.000	43.170.997.241	332.235.733	42.838.761.508	(468.755.492)
06	DITJEN IMIGRASI	708.333.841.000	678.597.286.409	3.999.597.462	674.597.688.947	(33.736.152.053)
07	DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	94.131.334.000	82.332.331.202	256.213.273	82.076.117.929	(12.055.216.071)
08	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	28.075.424.000	23.519.833.297	11.551.438	23.508.281.859	(4.567.142.141)
09	DITJEN HAK ASASI MANUSIA	20.197.392.000	19.207.292.272	201.111	19.207.091.161	(990.300.839)
10	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	80.349.543.000	46.817.111.355	71.472.694	46.745.638.661	(33.603.904.339)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANAN HAM	14.887.398.000	14.336.053.490	21.486.367	14.314.567.123	(572.830.877)
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	44.821.494.000	40.185.946.049	265.895.520	39.920.050.529	(4.901.443.471)
015	**KEMENTERIAN KEUANGAN**	**18.204.775.833.000**	**18.138.916.078.298**	**29.668.595.408**	**18.109.247.482.890**	**(95.528.350.110)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	6.998.891.061.000	7.322.873.722.864	24.132.471.539	7.298.741.251.325	299.850.190.325
02	INSPEKTORAT JENDERAL	87.818.987.000	87.193.976.083	351.329.963	86.842.646.120	(976.340.880)
03	DITJEN ANGGARAN	130.618.343.000	114.666.989.987	456.635.067	114.210.354.920	(16.407.988.080)
04	DITJEN PAJAK	5.235.586.424.000	4.931.291.664.472	1.993.939.306	4.929.297.725.166	(306.288.698.834)
05	DITJEN BEA DAN CUKAI	2.706.249.054.000	2.707.368.207.614	704.517.808	2.706.663.689.806	414.635.806
06	DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN	78.443.531.000	125.093.770.004	436.288.792	124.657.481.212	46.213.950.212
07	DITJEN PENGELOLAAN UTANG	57.681.933.000	55.133.018.159	35.018.672	55.097.999.487	(2.583.933.513)
08	DITJEN PERBENDAHARAAN	1.756.646.395.000	1.620.083.311.055	712.281.088	1.619.371.029.967	(137.275.365.033)
09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA	550.515.392.000	524.244.427.075	443.185.361	523.801.241.714	(26.714.150.286)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
11	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN	502.190.777.000	555.597.580.042	375.410.800	555.222.185.776	53.031.408.776
12	BADAN KEBIJAKAN FISKAL	100.133.936.000	95.369.394.343	27.516.946	95.341.877.397	(4.792.058.603)
018	**KEMENTERIAN PERTANIAN**	**13.613.045.916.000**	**13.253.631.031.969**	**51.126.879.125**	**13.202.504.152.844**	**(410.541.763.156)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.103.082.672.000	1.015.619.444.078	18.322.123.961	997.297.320.117	(105.785.351.883)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	65.528.157.000	60.347.785.271	177.609.821	60.170.175.450	(5.357.981.550)
03	DITJEN TANAMAN PANGAN	2.273.831.705.000	2.056.144.986.974	17.911.074.736	2.038.233.922.238	(235.597.782.762)
04	DITJEN HOLTIKULTURA	524.669.821.000	504.589.972.722	110.976.968	504.478.995.754	(20.190.825.246)
05	DITJEN PERKEBUNAN	1.316.320.121.000	1.162.816.886.222	466.593.584	1.162.350.292.638	(153.969.828.362)
06	DITJEN PETERNAKAN	1.391.463.833.000	1.660.528.577.897	547.780.181	1.659.980.797.716	268.516.964.716
07	DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN	502.959.082.000	457.878.778.007	178.330.720	457.700.447.287	(45.258.634.713)
08	DITJEN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR	2.715.885.667.000	2.913.460.586.156	8.377.176.910	2.905.083.409.246	189.197.742.246
09	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	1.558.098.627.000	1.355.132.964.080	2.894.929.497	1.352.238.034.583	(205.860.592.417)
10	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	1.098.836.025.000	1.061.692.583.263	1.540.033.565	1.060.152.549.698	(38.683.475.302)
11	BADAN KETAHANAN PANGAN	458.545.471.000	419.547.522.910	324.549.296	419.222.973.614	(39.322.497.386)
12	BADAN KARANTINA PERTANIAN	603.844.735.000	585.870.934.389	275.699.886	585.595.234.503	(18.249.500.497)
019	**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**	**2.629.287.422.000**	**2.434.351.177.696**	**2.355.390.671**	**2.431.995.787.025**	**(197.291.634.975)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	725.697.113.000	661.868.362.100	535.156.345	661.333.205.755	(64.363.907.245)
02	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO	216.775.906.000	186.889.195.823	348.896.423	186.540.299.400	(30.235.606.600)
03	DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR	262.032.800.000	370.066.632.371	6.861.903	370.059.770.468	108.026.970.468
04	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI	249.342.213.000	134.683.007.118	51.794.522	134.631.212.596	(114.711.000.404)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
05	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	428.138.288.000	389.447.557.704	408.104.778	389.039.392.980	(39.098.905.014)
06	INSPEKTORAT JENDERAL	45.138.229.000	41.948.658.271	211.782.356	41.736.875.915	(3.401.353.085)
07	BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI	572.719.025.000	533.297.912.415	342.498.192	532.955.414.223	(39.763.610.777)
08	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI	85.684.948.000	76.647.439.754	406.027.048	76.241.412.706	(9.443.533.294)
09	DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA INDUSTRI INTERNATIONAL	43.758.892.000	39.502.412.080	44.209.104	39.458.202.976	(4.300.689.024)
020	**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**14.341.466.972.000**	**7.366.063.857.662**	**11.388.445.744**	**7.354.675.411.918**	**(6.986.791.560.082)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.313.032.400.000	514.254.751.711	1.724.970.321	512.529.781.390	(800.502.618.610)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	90.318.603.000	54.814.933.187	2.129.942.031	52.684.991.156	(37.633.611.844)
04	DITJEN MINYAK DAN GAS BUMI	3.591.089.749.000	1.371.160.141.361	4.771.833	1.371.155.369.528	(2.219.934.379.472)
05	DITJEN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI	4.565.031.319.000	2.419.863.309.998	744.747.075	2.419.218.562.923	(2.145.812.756.077)
06	DITJEN MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI	372.517.294.000	201.193.047.432	484.273.458	200.708.773.974	(171.808.520.026)
07	DEWAN ENERGI NASIONAL	76.682.668.000	56.965.988.597	471.753.679	56.494.232.918	(20.188.435.082)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	702.023.115.000	481.409.075.142	1.448.903.484	479.960.171.658	(222.062.943.342)
12	BADAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	657.292.282.000	558.638.708.230	537.636.124	558.101.072.106	(99.191.209.894)
13	BADAN GEOLOGI	1.315.002.754.000	917.365.459.017	2.314.881.321	915.050.577.696	(399.952.176.304)
14	BPH MIGAS	366.820.000.000	142.028.065.158	1.046.351.281	140.981.713.877	(225.838.286.123)
15	DITJEN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI	1.291.656.788.000	648.270.379.829	480.215.137	647.790.164.692	(643.866.623.308)
022	**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**	**36.003.165.332.000**	**28.788.716.010.124**	**65.946.260.904**	**28.722.769.749.220**	**(7.280.395.582.780)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	556.380.105.000	1.304.938.739.444	150.726.272	1.304.788.013.172	748.407.908.172
02	INSPEKTORAT JENDERAL	79.618.815.000	65.556.209.548	50.423.833	65.505.785.715	(14.113.029.285)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
03	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	3.019.419.908.000	3.230.041.374.831	2.370.286.707	3.228.271.086.124	(391.148.881.876)
04	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	9.420.947.845.000	7.854.297.887.774	3.781.081.048	7.850.516.806.726	(1.570.431.038.274)
05	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	7.492.985.310.000	6.850.819.114.550	2.980.460.953	6.847.838.653.597	(645.146.656.403)
08	DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	11.847.171.670.000	6.872.861.260.116	56.002.226.030	6.816.859.034.086	(5.030.312.635.914)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	205.717.711.000	162.825.592.179	152.037.944	162.673.554.235	(43.044.156.765)
12	BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERHUBUNGAN	2.780.923.908.000	2.446.775.831.682	459.016.117	2.446.316.815.565	(334.607.092.435)
023	**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	**76.557.904.902.000**	**76.926.541.016.381**	**329.774.485.247**	**76.596.766.531.134**	**38.861.629.134**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.441.562.300.000	3.058.814.944.010	86.292.386.621	2.972.522.557.389	1.530.960.257.389
02	INSPEKTORAT JENDERAL	205.000.000.000	170.428.445.609	11.626.211.797	158.802.233.812	(46.197.766.188)
03	DITJEN PENDIDIKAN DASAR	16.613.504.100.000	16.321.271.155.611	50.847.325.370	16.270.423.830.241	(343.080.269.759)
04	DITJEN PENDIDIKAN TINGGI	35.418.817.072.000	35.121.106.721.395	50.556.264.461	35.070.550.456.934	(348.266.615.066)
05	DITJEN PAUDNI	2.338.034.530.000	2.276.668.672.403	24.028.403.817	2.252.640.268.586	(85.394.261.414)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DIKBUD	1.186.700.000.000	1.101.754.329.909	3.984.218.460	1.097.770.111.449	(88.929.888.551)
12	DITJEN PENDIDIKAN MENENGAH	14.881.980.000.000	14.547.828.641.273	72.587.380.470	14.475.241.260.803	(406.718.739.197)
13	BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	359.531.800.000	298.445.528.405	606.036.940	297.839.491.465	(61.692.308.535)
14	BADAN PSDMPK DAN PMP	2.930.045.100.000	2.945.521.145.439	26.455.213.980	2.919.065.931.459	(10.979.168.541)
15	DITJEN KEBUDAYAAN	1.182.750.000.000	1.084.701.432.327	2.791.043.331	1.081.910.388.996	(100.839.611.004)
024	**KEMENTERIAN KESEHATAN**	**47.476.473.683.000**	**47.583.671.296.413**	**111.935.382.521**	**47.471.735.913.892**	**(4.737.769.108)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	26.767.777.948.000	26.732.282.090.916	68.264.275.859	26.664.017.815.057	(103.760.132.943)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	92.926.900.000	72.233.409.205	615.558.268	71.617.850.937	(21.309.049.063)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
03	DITJEN BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	1.920.320.073.000	1.725.910.589.257	12.407.840.570	1.713.442.758.687	(212.877.914.313)
04	DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN	12.252.787.900.000	12.591.958.931.627	3.389.131.349	12.588.569.800.278	335.781.900.278
05	DITJEN PENGENDALIAAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	1.812.234.812.000	2.454.353.059.185	3.178.757.399	2.451.174.301.786	638.939.489.786
07	DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	1.764.681.263.000	1.478.647.845.174	7.862.261.575	1.470.785.583.599	(293.895.679.401)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN	509.592.602.000	438.756.408.304	3.756.984.248	434.999.424.056	(74.593.177.944)
12	BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN	2.350.151.585.000	2.089.528.952.745	12.400.573.253	2.077.128.379.492	(273.023.205.508)
025	**KEMENTERIAN AGAMA**	**51.568.452.512.000**	**45.733.950.784.074**	**74.751.661.272**	**45.659.199.122.802**	**(5.909.253.389.198)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	2.876.118.610.000	1.716.429.624.699	7.336.037.689	1.709.093.587.010	(1.167.025.022.990)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	129.915.085.000	123.746.869.392	6.051.594.072	117.695.275.320	(12.219.809.680)
03	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	2.585.739.278.000	2.967.486.088.928	13.025.453.272	2.954.460.633.656	368.721.355.656
04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM	42.551.801.568.000	37.481.745.796.866	31.199.623.638	37.450.546.173.228	(5.101.255.394.772)
05	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN	1.030.903.265.000	1.142.355.335.129	608.637.113	1.141.746.698.016	110.843.433.016
06	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KHATOLIK	615.653.658.000	665.158.699.724	934.000.687	664.324.699.037	48.671.041.037
07	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU	572.863.673.000	510.199.294.732	6.299.713.695	503.899.581.037	(68.964.091.963)
08	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA	270.826.478.000	168.281.140.895	1.430.959.782	166.850.181.113	(103.976.296.887)
09	DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH	654.550.641.000	672.215.668.195	5.649.889.414	666.565.778.781	12.015.137.781
11	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN	280.080.256.000	286.332.267.514	2.315.751.910	284.016.515.604	3.936.259.604
026	**KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	**3.961.928.611.000**	**3.691.663.935.432**	**10.955.997.656**	**3.680.707.937.776**	**(281.220.673.224)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	326.150.099.000	452.639.890.019	1.404.731.107	451.235.158.912	125.085.059.912
02	INSPEKTORAT JENDERAL	42.922.400.000	41.169.442.075	14.360.120	41.155.081.955	(1.767.318.045)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
04	DITJEN PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	589.884.351.000	520.107.765.330	3.344.099.010	516.823.665.714	(73.060.685.286)
05	DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	287.389.651.000	247.594.886.762	2.675.704.435	244.918.982.327	(42.470.668.673)
06	DITJEN PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	720.623.240.000	681.714.915.661	336.146.729	681.378.769.132	(39.244.470.868)
07	DITJEN PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	791.578.589.000	736.001.568.913	530.490.925	735.471.077.988	(56.107.511.012)
08	DITJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	359.464.058.000	256.551.757.430	553.422.763	255.998.334.667	(103.465.723.333)
11	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INFORMASI	76.613.847.000	71.170.784.337	15.913.154	71.154.871.183	(5.458.975.817)
13	DITJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS	767.302.376.000	684.653.124.705	2.081.128.807	682.571.995.898	(84.730.380.102)
027	**KEMENTERIAN SOSIAL**	**6.684.272.663.000**	**13.254.840.797.840**	**39.769.806.502**	**13.215.070.991.338**	**6.530.798.328.338**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	166.715.701.000	175.493.693.012	694.977.167	174.798.715.845	8.083.014.845
02	INSPEKTORAT JENDERAL	23.891.755.000	25.835.887.047	26.758.593	25.809.128.454	1.917.373.454
03	DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL	727.856.388.000	737.829.524.575	4.483.498.347	733.346.026.228	5.489.638.228
04	DITJEN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	761.898.486.000	803.663.453.871	2.976.434.582	800.687.019.289	38.788.533.289
05	DITJEN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL	4.776.726.361.000	11.272.040.599.738	30.221.071.891	11.241.819.528.047	6.465.093.167.047
11	BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	227.183.972.000	238.977.639.597	1.367.066.122	238.610.573.475	11.426.601.475
029	**KEMENTERIAN KEHUTANAN**	**4.507.301.508.000**	**4.725.518.240.306**	**39.184.869.858**	**4.686.333.370.448**	**179.031.862.448**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	294.897.336.000	836.263.319.006	32.916.140.952	803.347.178.054	508.449.842.054
02	INSPEKTORAT JENDERAL	44.911.300.000	44.035.634.846	491.208.404	43.544.426.442	(1.366.873.558)
03	DITJEN BINA USAHA KEHUTANAN	186.537.415.000	200.786.893.808	158.869.324	200.608.224.484	14.070.809.484
04	DITJEN BINA PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL	1.797.997.462.000	1.602.094.430.235	1.179.142.254	1.600.915.287.981	(197.082.174.019)
05	DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM	1.220.034.125.000	1.143.321.849.459	2.362.848.604	1.140.958.800.855	(79.075.324.145)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
06	DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN	526.997.851.000	479.347.805.462	1.502.504.008	477.785.301.474	(49.212.489.526)
07	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN	210.888.173.000	207.266.249.329	377.976.060	206.888.273.269	(3.999.899.731)
08	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN	225.037.846.000	212.422.198.141	136.380.252	212.285.817.889	(12.752.028.111)
032	**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**5.748.673.798.000**	**5.869.716.446.021**	**4.016.001.294**	**5.865.700.444.727**	**117.026.646.727**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	346.731.141.000	313.110.029.985	119.302.910	312.990.727.075	(33.740.413.925)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	50.532.570.000	57.770.267.013	30.766.921	57.739.500.092	7.206.930.092
03	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	1.594.231.229.000	1.509.772.027.985	951.731.737	1.508.820.296.248	(85.410.932.752)
04	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	875.292.741.000	883.535.186.105	607.518.065	882.927.668.040	7.634.927.040
05	DITJEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN & PERIKANAN	576.269.549.000	650.039.954.730	72.336.043	649.967.618.687	73.698.069.687
06	DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (P2HP)	487.983.903.000	480.251.240.917	232.486.515	480.018.754.402	(7.965.148.598)
07	DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)	613.114.106.000	597.220.124.849	303.577.560	596.916.547.289	(16.197.558.711)
11	BADAN RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN (BRKP)	467.891.773.000	559.876.745.272	456.153.230	559.422.592.042	91.530.819.042
12	BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN	476.864.189.000	510.991.651.800	1.079.498.063	509.912.153.737	33.047.964.737
13	BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	259.762.597.000	307.147.217.365	162.630.250	306.984.587.115	47.221.990.115
033	**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**	**74.522.244.881.000**	**72.851.334.686.250**	**57.244.929.711**	**72.794.089.756.539**	**(1.728.155.124.461)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	814.215.698.000	1.513.169.217.809	1.425.844.187	1.511.743.373.622	697.527.677.622
02	INSPEKTORAT JENDERAL	85.604.248.000	70.738.462.073	1.139.522.781	69.598.939.292	(16.005.308.708)
03	DITJEN PENATAAN RUANG	975.089.011.000	890.529.078.935	1.232.889.728	889.296.189.207	(85.772.821.793)
04	DITJEN BINA MARGA	39.293.944.863.000	38.646.790.248.702	38.455.941.546	38.608.334.307.156	(685.610.355.844)
05	DITJEN CIPTA KARYA	14.118.911.243.000	14.032.476.876.938	5.755.279.929	14.026.721.597.009	(92.189.645.991)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
00	DITJEN SUMBER DAYA AIR	18.405.213.552.000	16.927.494.771.581	6.702.811.208	16.920.791.960.373	(1.484.421.591.627)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	483.763.714.000	462.911.009.005	961.113.123	461.949.895.882	(21.813.818.118)
13	BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI	345.522.754.000	307.225.021.207	1.571.527.209	305.653.493.998	(39.869.260.002)
034	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN**	**448.348.622.000**	**343.274.976.059**	**90.615.734**	**343.184.360.325**	**(105.164.261.675)**
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	448.348.622.000	343.274.976.059	90.615.734	343.184.360.325	(105.164.261.675)
035	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**	**291.265.583.000**	**206.202.093.388**	**1.625.766.493**	**204.576.326.895**	**(86.689.256.105)**
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	291.265.583.000	206.202.093.388	1.625.766.493	204.576.326.895	(86.689.256.105)
036	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**194.329.457.000**	**172.744.231.915**	**531.209.754**	**172.213.022.161**	**(22.116.434.839)**
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	194.329.457.000	172.744.231.915	531.209.754	172.213.022.161	(22.116.434.839)
040	**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**1.507.692.753.000**	**1.278.456.425.890**	**2.614.371.415**	**1.275.842.054.475**	**(231.850.698.525)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	151.158.121.000	138.576.803.545	373.587.126	138.203.216.419	(12.954.904.581)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	25.730.656.000	20.185.269.970	249.634.328	19.935.635.642	(5.795.020.358)
05	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	319.168.299.000	247.051.617.288	876.169.695	246.175.447.593	(72.992.851.407)
06	DIREKTORAT JENDERAL PEMASARAN	373.025.298.000	337.029.755.587	36.088.383	336.993.667.204	(36.031.630.796)
10	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	333.925.231.000	265.626.593.332	675.776.698	264.950.816.634	(68.974.414.366)
11	DITJEN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA	210.288.827.000	189.978.202.391	231.505.879	189.746.696.512	(20.542.130.488)
12	DITJEN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS MEDIA, DESAIN DAN IPTEK	94.396.321.000	80.008.183.777	171.609.306	79.836.574.471	(14.559.746.529)
041	**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**	**123.456.840.000**	**97.998.804.049**	**572.438.835**	**97.426.365.214**	**(26.030.474.786)**
01	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	123.456.840.000	97.998.804.049	572.438.835	97.426.365.214	(26.030.474.786)
042	**KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI**	**555.028.797.000**	**458.297.373.019**	**3.081.888.437**	**455.215.484.582**	**(99.813.312.418)**

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
01	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	555.028.787.000	458.297.373.019	3.081.888.437	455.215.484.582	(99.813.312.418)
043	**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP**	**945.756.945.000**	**858.961.863.264**	**6.621.978.455**	**852.339.884.809**	**(93.417.060.191)**
01	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	945.756.945.000	858.961.863.264	6.621.978.455	852.339.884.809	(93.417.060.191)
044	**KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM**	**1.420.448.122.000**	**1.249.195.282.028**	**297.959.235**	**1.248.897.322.793**	**(171.550.799.207)**
01	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	1.420.448.122.000	1.249.195.282.028	297.959.235	1.248.897.322.793	(171.550.799.207)
047	**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**191.629.656.000**	**185.029.971.685**	**332.172.990**	**184.697.798.695**	**(6.931.857.305)**
01	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	191.629.656.000	185.029.971.685	332.172.990	184.697.798.695	(6.931.857.305)
048	**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**	**146.153.116.000**	**136.928.411.037**	**2.109.682.219**	**134.818.728.818**	**(11.334.387.182)**
01	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	146.153.116.000	136.928.411.037	2.109.682.219	134.818.728.818	(11.334.387.182)
050	**BADAN INTELIJEN NEGARA**	**1.830.146.365.000**	**1.845.873.797.511**	**375.902.084**	**1.845.497.895.427**	**15.351.530.427**
01	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.830.146.365.000	1.845.873.797.511	375.902.084	1.845.497.895.427	15.351.530.427
051	**LEMBAGA SANDI NEGARA**	**1.521.421.505.000**	**1.185.032.589.916**	**8.293.766.251**	**1.176.738.823.665**	**(344.682.681.335)**
01	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.521.421.505.000	1.185.032.589.916	8.293.766.251	1.176.738.823.665	(344.682.681.335)
052	**DEWAN KETAHANAN NASIONAL**	**27.456.304.000**	**38.277.534.744**	**147.610.052**	**38.129.924.692**	**10.673.620.692**
01	SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL	27.456.304.000	38.277.534.744	147.610.052	38.129.924.692	10.673.620.692
054	**BADAN PUSAT STATISTIK**	**3.251.034.005.000**	**3.009.177.661.651**	**3.479.376.370**	**3.005.698.285.281**	**(245.335.719.719)**
01	BADAN PUSAT STATISTIK	3.251.034.005.000	3.009.177.661.651	3.479.376.370	3.005.698.285.281	(245.335.719.719)
055	**KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**	**1.143.501.617.000**	**1.020.508.933.957**	**2.049.518.755**	**1.018.459.415.202**	**(125.042.201.798)**
01	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	1.143.501.617.000	1.020.508.933.957	2.049.518.755	1.018.459.415.202	(125.042.201.798)
056	**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**	**4.418.398.040.000**	**3.822.196.065.230**	**15.676.039.076**	**3.806.520.026.154**	**(611.878.013.846)**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
01	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	4.418.398.040.000	3.822.196.065.230	15.676.039.076	3.806.520.026.154	(611.878.013.846)
057	**PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**	**422.439.149.000**	**333.172.232.360**	**794.385.299**	**332.377.847.061**	**(90.061.301.939)**
01	PERPUSTAKAAN NASIONAL	422.439.149.000	333.172.232.360	794.385.299	332.377.847.061	(90.061.301.939)
059	**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**3.558.018.452.000**	**2.132.043.360.069**	**7.351.288.492**	**2.124.692.071.577**	**(1.433.326.380.423)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	278.194.000.000	320.591.828.485	3.377.167.864	317.214.660.621	39.020.660.621
02	INSPEKTORAT JENDERAL	26.227.477.000	22.953.534.882	29.434.872	22.924.100.010	(3.303.376.990)
03	DITJEN POS DAN TELEKOMUNIKASI	703.744.609.000	640.060.779.014	2.130.413.917	637.930.365.097	(65.814.243.903)
04	DITJEN APLIKASI TELEMATIKA	151.243.859.000	132.031.409.399	417.901.440	131.613.507.959	(19.630.351.041)
05	DITJEN SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI	2.052.482.318.000	696.417.048.391	796.020.724	695.621.027.667	(1.356.861.288.333)
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	184.475.571.000	166.235.198.126	562.660.953	165.672.537.173	(18.803.033.827)
07	BADAN INFORMASI PUBLIK	161.650.620.000	153.753.561.772	37.688.722	153.715.873.050	(7.934.746.950)
060	**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**	**43.603.877.580.000**	**44.035.861.044.354**	**83.398.079.134**	**43.952.462.965.220**	**348.585.385.220**
01	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	43.603.877.580.000	44.035.861.044.354	83.398.079.134	43.952.462.965.220	348.585.385.220
063	**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**	**1.008.841.514.000**	**888.415.432.309**	**8.598.100.283**	**879.817.332.026**	**(129.024.181.974)**
01	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.008.841.514.000	888.415.432.309	8.598.100.283	879.817.332.026	(129.024.181.974)
064	**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL**	**290.329.102.000**	**277.500.355.751**	**957.721.505**	**276.542.634.246**	**(13.786.467.754)**
01	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI	290.329.102.000	277.500.355.751	957.721.505	276.542.634.246	(13.786.467.754)
065	**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**	**574.236.381.000**	**528.292.195.009**	**1.163.820.262**	**527.128.374.747**	**(47.108.006.253)**
01	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	574.236.381.000	528.292.195.009	1.163.820.262	527.128.374.747	(47.108.006.253)
066	**BADAN NARKOTIKA NASIONAL**	**703.121.464.000**	**709.189.981.800**	**4.467.881.045**	**704.722.100.755**	**1.600.636.755**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
01	PELAKSANA HARIAN BNN	703.121.464.000	709.189.981.800	4.467.881.045	704.722.100.755	1.600.636.755
067	**KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**	**2.445.935.657.000**	**2.060.870.858.627**	**1.192.001.396**	**2.059.678.857.231**	**(386.256.799.769)**
01	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	2.445.935.657.000	2.060.870.858.627	1.192.001.396	2.059.678.857.231	(386.256.799.769)
068	**BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**	**2.522.866.646.000**	**2.121.561.629.244**	**3.444.436.730**	**2.118.117.192.514**	**(404.749.453.486)**
01	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.522.866.646.000	2.121.561.629.244	3.444.436.730	2.118.117.192.514	(404.749.453.486)
074	**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**	**66.656.303.000**	**77.088.005.512**	**1.546.797.777**	**75.541.207.735**	**8.884.904.735**
01	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	66.656.303.000	77.088.005.512	1.546.797.777	75.541.207.735	8.884.904.735
075	**BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA**	**1.432.871.062.000**	**1.499.204.313.097**	**530.863.237**	**1.498.673.449.860**	**65.802.387.860**
01	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.432.871.062.000	1.499.204.313.097	530.863.237	1.498.673.449.860	65.802.387.860
076	**KOMISI PEMILIHAN UMUM**	**13.880.947.578.000**	**11.071.058.648.625**	**11.218.890.463**	**11.059.838.758.162**	**(2.821.108.819.838)**
01	KOMISI PEMILIHAN UMUM	13.880.947.578.000	11.071.058.648.625	11.218.890.463	11.059.838.758.162	(2.821.108.819.838)
077	**MAHKAMAH KONSTITUSI RI**	**208.183.647.000**	**207.522.979.272**	**100.725.600**	**207.422.253.672**	**(761.393.328)**
01	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	208.183.647.000	207.522.979.272	100.725.600	207.422.253.672	(761.393.328)
078	**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**	**59.115.283.000**	**71.562.960.345**	**909.536.731**	**70.653.423.614**	**11.538.140.614**
01	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	59.115.283.000	71.562.960.345	909.536.731	70.653.423.614	11.538.140.614
079	**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**	**993.005.089.000**	**982.061.726.947**	**1.830.697.580**	**980.231.029.367**	**(12.774.059.633)**
01	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	993.005.089.000	982.061.726.947	1.830.697.580	980.231.029.367	(12.774.059.633)
080	**BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL**	**667.285.816.000**	**621.550.123.434**	**4.989.222.299**	**616.560.901.135**	**(50.724.914.865)**
01	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	667.285.816.000	621.550.123.434	4.989.222.299	616.560.901.135	(50.724.914.865)
081	**BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**	**768.191.792.000**	**730.175.338.736**	**891.469.778**	**729.283.868.958**	**(38.907.923.042)**

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
01	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	708.191.792.000	730.175.338.736	891.409.778	729.283.808.958	(38.907.823.042)
082	**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL**	**690.157.599.000**	**690.604.441.930**	**510.314.659**	**690.094.127.271**	**(63.471.729)**
01	L A P A N	690.157.599.000	690.604.441.930	510.314.659	690.094.127.271	(63.471.729)
083	**BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**	**729.651.464.000**	**689.682.089.822**	**1.246.078.442**	**688.436.011.380**	**(41.215.452.620)**
01	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	729.651.464.000	689.682.089.822	1.246.078.442	688.436.011.380	(41.215.452.620)
084	**BADAN STANDARISASI NASIONAL**	**84.560.083.000**	**93.465.926.086**	**263.098.975**	**93.202.827.111**	**8.642.744.111**
01	BADAN STANDARISASI NASIONAL	84.560.083.000	93.465.926.086	263.098.975	93.202.827.111	8.642.744.111
085	**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**	**90.511.416.000**	**100.463.881.281**	**1.280.870.523**	**99.183.010.758**	**8.671.594.758**
01	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	90.511.416.000	100.463.881.281	1.280.870.523	99.183.010.758	8.671.594.758
086	**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**	**221.700.397.000**	**210.732.579.646**	**259.758.002**	**210.472.821.644**	**(11.227.575.356)**
01	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	221.700.397.000	210.732.579.646	259.758.002	210.472.821.644	(11.227.575.356)
087	**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**	**117.043.549.000**	**103.936.449.037**	**1.327.440.100**	**102.609.008.937**	**(14.434.540.063)**
01	ARSIP NASIONAL	117.043.549.000	103.936.449.037	1.327.440.100	102.609.008.937	(14.434.540.063)
088	**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**	**502.261.594.000**	**461.695.135.312**	**2.178.954.724**	**459.516.180.588**	**(42.745.413.412)**
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	502.261.594.000	461.695.135.312	2.178.954.724	459.516.180.588	(42.745.413.412)
089	**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**	**1.264.272.374.000**	**1.212.012.129.072**	**2.847.929.763**	**1.209.164.199.309**	**(55.108.174.691)**
01	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.264.272.374.000	1.212.012.129.072	2.847.929.763	1.209.164.199.309	(55.108.174.691)
090	**KEMENTERIAN PERDAGANGAN**	**2.355.162.864.000**	**1.783.147.744.122**	**4.220.361.498**	**1.778.927.382.624**	**(576.235.481.376)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	605.538.975.000	462.226.017.555	844.675.987	461.381.341.568	(144.157.633.432)
02	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI	893.364.382.000	544.410.236.817	1.810.881.555	542.599.355.262	(350.765.026.738)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
03	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI	189.029.032.000	172.480.204.703	167.870.300	172.312.334.337	(17.317.297.663)
04	DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL	96.534.552.000	91.483.331.792	48.709.308	91.434.622.484	(5.099.929.516)
05	INSPEKTORAT JENDERAL	30.720.088.000	28.646.764.602	180.651.373	28.466.113.229	(2.253.974.771)
06	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL	239.421.861.000	217.709.180.291	107.261.116	217.601.919.175	(21.819.941.825)
07	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	66.606.684.000	54.990.453.002	28.963.290	54.961.489.712	(11.645.194.288)
08	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	53.482.948.000	50.294.768.699	40.334.238	50.254.432.461	(3.228.513.539)
09	DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	179.863.744.000	160.906.788.661	991.014.265	159.915.774.396	(19.947.969.604)
091	**KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT**	**4.001.327.698.000**	**3.521.550.483.887**	**27.578.819.882**	**3.493.971.664.005**	**(507.356.033.995)**
01	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	4.001.327.698.000	3.521.550.483.887	27.578.819.882	3.493.971.664.005	(507.356.033.995)
092	**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**	**1.761.855.098.000**	**1.551.374.871.666**	**3.642.469.775**	**1.547.732.401.891**	**(214.122.696.109)**
01	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.761.855.098.000	1.551.374.871.666	3.642.469.775	1.547.732.401.891	(214.122.696.109)
093	**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**	**559.466.618.000**	**561.442.837.514**	**2.930.377.406**	**558.512.460.108**	**(954.157.892)**
01	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	559.466.618.000	561.442.837.514	2.930.377.406	558.512.460.108	(954.157.892)
095	**DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)**	**670.709.523.000**	**605.963.555.385**	**6.751.164.231**	**599.212.391.154**	**(71.497.131.846)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI	411.119.523.000	374.422.891.205	445.634.970	373.977.256.235	(37.142.266.765)
02	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	259.590.000.000	231.540.664.180	6.305.529.261	225.235.134.919	(34.354.865.081)
100	**KOMISI YUDISIAL RI**	**77.720.059.000**	**76.373.211.681**	**126.104.590**	**76.247.107.091**	**(1.472.951.909)**
01	KOMISI YUDISIAL RI	77.720.059.000	76.373.211.681	126.104.590	76.247.107.091	(1.472.951.909)
103	**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**	**2.304.367.639.000**	**2.682.719.283.528**	**16.726.617.656**	**2.665.992.665.872**	**361.625.026.872**
01	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	2.304.367.639.000	2.682.719.283.528	16.726.617.656	2.665.992.665.872	361.625.026.872

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
104	**BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI**	**375.047.635.000**	**351.750.531.042**	**991.363.548**	**350.759.167.494**	**(24.288.467.506)**
01	SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI	375.047.635.000	351.750.531.042	991.363.548	350.759.167.494	(24.288.467.506)
105	**BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO**	**735.646.022.000**	**288.084.268.898**	**975.000**	**288.083.293.898**	**(447.562.728.102)**
01	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	735.646.022.000	288.084.268.898	975.000	288.083.293.898	(447.562.728.102)
106	**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**	**145.745.938.000**	**137.987.436.305**	**583.596.865**	**137.403.839.440**	**(8.342.098.560)**
01	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	145.745.938.000	137.987.436.305	583.596.865	137.403.839.440	(8.342.098.560)
107	**BADAN SAR NASIONAL**	**1.902.680.618.000**	**1.920.712.772.698**	**1.707.302.576**	**1.919.005.470.122**	**16.324.852.122**
01	BADAN SAR NASIONAL	1.902.680.618.000	1.920.712.772.698	1.707.302.576	1.919.005.470.122	16.324.852.122
108	**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**	**84.035.163.000**	**81.253.587.573**	**640.443.344**	**80.613.144.229**	**(3.422.018.771)**
01	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	84.035.163.000	81.253.587.573	640.443.344	80.613.144.229	(3.422.018.771)
109	**BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU**	**331.992.446.000**	**251.894.265.632**	**120.792.124**	**251.773.473.508**	**(80.218.972.492)**
01	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	331.992.446.000	251.894.265.632	120.792.124	251.773.473.508	(80.218.972.492)
110	**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**	**62.005.395.000**	**58.447.922.913**	**57.598.991**	**58.390.323.922**	**(3.615.071.078)**
01	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	62.005.395.000	58.447.922.913	57.598.991	58.390.323.922	(3.615.071.078)
111	**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN**	**168.918.882.000**	**128.367.924.204**	**597.611.164**	**127.770.313.040**	**(41.148.568.960)**
01	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	168.918.882.000	128.367.924.204	597.611.164	127.770.313.040	(41.148.568.960)
112	**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**	**1.066.911.135.000**	**1.059.222.158.052**	-	**1.059.222.158.052**	**(7.688.976.948)**
01	BPKPB BATAM	1.066.911.135.000	1.059.222.158.052		1.059.222.158.052	(7.688.976.948)
113	**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME**	**263.563.629.000**	**246.353.487.754**	**98.892.088**	**246.254.595.666**	**(17.309.033.334)**
01	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	263.563.629.000	246.353.487.754	98.892.088	246.254.595.666	(17.309.033.334)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
114	**SEKRETARIAT KABINET**	**170.999.229.000**	**150.426.612.299**	**1.260.143.921**	**149.166.468.378**	**(21.832.760.622)**
01	SEKRETARIAT KABINET	170.999.229.000	150.426.612.299	1.260.143.921	149.166.468.378	(21.832.760.622)
115	**BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM**	**3.759.496.500.000**	**3.260.418.956.778**	**10.462.016.766**	**3.249.956.940.012**	**(509.539.559.988)**
01	SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	3.759.496.500.000	3.260.418.956.778	10.462.016.766	3.249.956.940.012	(509.539.559.988)
116	**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**	**921.764.046.000**	**809.460.941.967**	**272.353.231**	**809.188.588.736**	**(112.575.457.264)**
01	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	921.764.046.000	809.460.941.967	272.353.231	809.188.588.736	(112.575.457.264)
117	**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**	**967.630.629.000**	**725.014.496.868**	**130.367.988**	**724.884.128.880**	**(242.746.500.120)**
01	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	967.630.629.000	725.014.496.868	130.367.988	724.884.128.880	(242.746.500.120)
118	**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**	**341.349.526.000**	**297.714.921.594**	**64.742.841**	**297.650.178.753**	**(43.699.347.247)**
01	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	341.349.526.000	297.714.921.594	64.742.841	297.650.178.753	(43.699.347.247)
999	**BENDAHARA UMUM NEGARA**	**678.076.618.002.000**	**626.968.334.424.266**	**555.991.678.383**	**626.412.342.745.883**	**(51.664.275.256.117)**
01	PENGELOLA UTANG PEMERINTAH	135.453.200.000.000	133.441.292.679.083		133.441.292.679.083	(2.011.907.320.917)
02	PENGELOLA HIBAH	2.853.254.017.000	907.509.554.215		907.509.554.215	(1.945.744.462.785)
07	PENGELOLA BELANJA SUBSIDI	403.035.574.566.000	391.962.514.288.102		391.962.514.288.102	(11.073.060.277.898)
08	PENGELOLA BELANJA LAINNYA	43.748.355.388.000	10.643.391.070.308	2.019.279.201	10.641.371.791.107	(33.106.983.596.893)
99	TRANSAKSI KHUSUS	92.986.234.031.000	90.013.626.832.558	553.972.399.182	89.459.654.433.376	(3.526.579.597.624)
		1.280.368.574.301.000	**1,205,563,926,530,378**	**1.986.759.307.517**	**1,203,577,167,222,861**	**(76.791.407.078.139)**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai 51	Belanja Barang 52	Belanja Modal 53	Bunga Utang 54	Belanja Subsidi 55	Belanja Hibah 56	Belanja Bansos 57	Lain-lain 58	Total Belanja
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	23.488.466.137	601.216.251.691	14.684.182.326	-	-	-	-	-	639.388.900.154
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	597.544.012.420	1.662.786.991.339	46.048.306.689	-	-	-	-	-	2.306.379.310.448
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	817.812.034.866	1.180.569.700.096	308.149.918.184	-	-	-	-	-	2.306.531.653.146
005	MAHKAMAH AGUNG	5.238.468.541.611	933.634.081.052	809.583.095.173	-	-	-	-	-	6.979.685.717.836
006	KEJAKSAAN AGUNG	1.882.331.984.254	1.304.504.697.143	133.975.703.205	-	-	-	-	-	3.320.812.384.602
007	SEKRETARIAT NEGARA	349.057.643.833	1.651.460.477.420	135.400.567.286	-	-	-	-	-	2.135.918.688.539
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	532.841.855.461	3.841.370.226.291	330.466.941.463	-	-	-	8.367.061.713.139	-	12.871.740.536.344
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	2.510.726.428.548	2.485.677.216.075	343.421.605.267	-	-	-	-	-	5.339.825.449.890
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	35.182.035.866.678	15.958.699.175.476	35.944.793.348.380	-	-	-	100.000.000	-	86.185.628.390.534
013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	3.744.161.605.061	2.030.056.660.020	1.416.502.197.010	-	-	-	-	-	7.190.720.462.091
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	9.088.225.893.905	7.296.818.708.955	1.724.202.880.030	-	-	-	-	-	18.109.247.482.890
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	1.851.013.771.013	6.803.579.127.011	472.977.246.386	-	-	-	4.074.934.008.434	-	13.202.504.152.844
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	541.055.982.822	1.518.832.612.376	372.107.191.827	-	-	-	-	-	2.431.995.787.025
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	586.833.813.605	3.012.726.841.381	3.755.114.756.932	-	-	-	-	-	7.354.675.411.918
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	2.360.706.602.572	7.397.401.880.927	18.974.661.265.721	-	-	-	-	-	28.732.769.749.220
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	12.132.887.484.990	25.286.061.495.328	6.324.087.858.836	-	-	-	32.873.729.691.980	-	76.596.766.531.134
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	5.223.897.244.261	15.676.704.731.974	3.279.031.958.997	-	-	-	23.292.101.978.660	-	47.471.735.913.892
025	KEMENTERIAN AGAMA	25.814.876.037.765	6.868.581.538.515	2.111.242.050.273	-	-	-	10.864.500.496.249	-	46.659.199.122.802
026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	431.486.396.093	2.410.480.852.144	838.741.899.539	-	-	-	-	-	3.680.707.937.776
027	KEMENTERIAN SOSIAL	387.979.120.064	1.687.943.570.024	92.265.059.736	-	-	-	11.046.883.241.514	-	13.215.070.991.338
029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	1.451.294.235.923	2.933.381.849.961	267.387.284.564	-	-	-	34.270.000.000	-	4.686.333.370.448
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	913.172.569.693	3.310.869.833.047	1.279.259.177.073	-	-	-	362.398.864.914	-	5.865.700.444.727

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai 51	Belanja Barang 52	Belanja Modal 53	Bunga Utang 54	Belanja Subsidi 55	Belanja Hibah 56	Belanja Bansos 57	Lain-lain 58	Total Belanja
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	2.050.857.186.508	11.184.590.982.066	55.930.994.230.576	-	-	-	3.627.647.357.389	-	72.794.089.756.539
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	56.995.078.184	247.755.283.622	38.433.998.519	-	-	-	-	-	343.184.360.325
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	44.838.468.677	158.090.954.618	1.647.003.600	-	-	-	-	-	204.576.326.895
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	37.837.834.730	126.482.297.411	7.892.890.020	-	-	-	-	-	172.213.022.161
040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	194.370.720.127	1.029.057.171.090	47.914.163.258	-	-	-	4.500.000.000	-	1.275.842.054.475
041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	23.767.887.106	53.497.176.808	20.161.301.300	-	-	-	-	-	97.426.365.214
042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	70.766.424.325	311.947.455.239	72.501.605.018	-	-	-	-	-	455.215.484.582
043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	102.812.374.942	712.307.298.210	37.220.211.757	-	-	-	-	-	852.339.884.909
044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	68.897.306.483	853.167.961.672	99.096.404.638	-	-	-	227.745.650.000	-	1.248.897.322.793
047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	31.576.202.566	73.482.612.396	79.638.983.733	-	-	-	-	-	184.697.798.695
048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	43.257.675.938	85.507.191.049	6.053.861.831	-	-	-	-	-	134.818.728.818
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	161.152.192.895	1.180.910.011.832	503.435.690.700	-	-	-	-	-	1.845.497.895.427
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	77.006.684.909	162.306.012.499	937.426.146.257	-	-	-	-	-	1.176.738.823.665
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	17.486.214.637	20.414.055.055	219.655.000	-	-	-	-	-	38.129.924.692
054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.286.266.035.861	1.216.559.179.030	482.873.070.370	-	-	-	-	-	3.005.698.285.261
055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	109.912.428.111	876.009.939.047	32.537.148.044	-	-	-	-	-	1.018.459.415.202
056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.460.500.704.962	1.831.797.755.189	524.221.566.103	-	-	-	-	-	3.816.520.026.154
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	71.965.513.368	169.228.050.357	91.184.283.336	-	-	-	-	-	332.377.847.061
059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	327.438.496.312	1.632.676.709.531	164.576.866.734	-	-	-	-	-	2.124.692.071.577

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai 51	Belanja Barang 52	Belanja Modal 53	Bunga Utang 54	Belanja Subsidi 55	Belanja Hibah 56	Belanja Bansos 57	Lain-lain 58	Total Belanja
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	31.032.055.671.220	8.725.583.343.723	3.194.823.950.277	-	-	-	-	-	43.952.462.965.220
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	322.625.398.173	472.801.075.359	84.390.858.494	-	-	-	-	-	879.817.332.026
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	57.230.494.816	144.139.153.646	75.172.985.784	-	-	-	-	-	276.542.634.246
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	72.396.383.607	446.347.291.760	8.384.719.380	-	-	-	-	-	527.128.374.747
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	217.255.647.413	450.571.256.588	36.895.196.754	-	-	-	-	-	704.722.100.755
067	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	39.746.684.056	1.318.685.938.545	5.874.983.252	-	-	-	696.371.251.378	-	2.059.678.857.231
068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	311.616.767.569	1.789.561.401.806	16.939.023.139	-	-	-	-	-	2.118.117.192.514
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	24.664.507.666	48.685.981.807	2.190.718.262	-	-	-	-	-	75.541.207.735
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	389.428.047.717	609.695.078.674	500.550.323.469	-	-	-	-	-	1.498.673.449.860
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	474.182.115.413	10.546.874.324.238	39.782.318.511	-	-	-	-	-	11.059.838.758.162
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	19.683.465.926	174.420.679.205	13.318.116.541	-	-	-	-	-	207.422.253.672
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	32.696.907.617	29.312.479.240	8.644.036.757	-	-	-	-	-	70.653.423.614
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	472.166.669.958	341.084.318.678	166.980.040.831	-	-	-	-	-	980.231.029.367
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	329.457.999.211	197.952.754.525	89.150.157.399	-	-	-	-	-	616.560.901.135
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	316.582.609.070	325.442.918.193	87.258.341.695	-	-	-	-	-	729.283.868.958
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	121.136.986.974	169.816.855.452	399.140.284.845	-	-	-	-	-	690.094.127.271
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	50.355.679.531	157.245.739.505	480.834.592.344	-	-	-	-	-	688.436.011.380
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	28.939.554.652	60.637.020.409	3.626.252.050	-	-	-	-	-	93.202.827.111
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	43.855.693.140	52.414.950.098	2.912.367.520	-	-	-	-	-	99.183.010.758
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	80.228.076.902	106.978.814.549	23.265.930.193	-	-	-	-	-	210.472.821.644
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	53.590.618.357	45.360.126.430	3.659.264.150	-	-	-	-	-	102.609.008.937

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai 51	Belanja Barang 52	Belanja Modal 53	Bunga Utang 54	Belanja Subsidi 55	Belanja Hibah 56	Belanja Bansos 57	Lain-lain 58	Total Belanja
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	261.950.494.277	142.700.475.899	54.865.210.412	-	-	-	-	-	459.516.180.588
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	707.828.461.053	435.020.020.467	66.315.717.789	-	-	-	-	-	1.209.164.199.309
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	330.062.327.789	1.174.311.420.516	274.563.634.319	-	-	-	-	-	1.778.927.382.624
091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	50.806.019.650	917.591.023.449	1.328.893.545.144	-	-	-	1.196.681.075.762	-	3.493.971.664.005
092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	49.224.894.093	1.466.405.762.929	41.285.744.969	-	-	-	816.000.000	-	1.547.732.401.991
093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	290.835.686.185	126.535.267.615	141.141.504.308	-	-	-	-	-	558.512.460.108
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	182.618.081.482	384.414.374.718	32.178.934.956	-	-	-	-	-	599.212.391.154
100	KOMISI YUDISIAL RI	14.313.904.560	59.655.027.056	2.278.175.475	-	-	-	-	-	76.247.107.091
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	24.942.376.408	806.538.722.542	579.656.799.257	-	-	-	1.254.854.767.665	-	2.665.992.665.872
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	79.508.874.980	251.690.345.315	19.559.947.199	-	-	-	-	-	350.759.167.494
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	13.094.058.340	103.661.936.993	171.246.856.265	-	-	-	80.442.300	-	288.083.293.898
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	17.307.400.087	45.536.341.606	74.560.097.747	-	-	-	-	-	137.403.839.440
107	BADAN SAR NASIONAL	242.869.899.348	513.307.987.499	1.162.827.583.275	-	-	-	-	-	1.919.005.470.122
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	22.903.988.096	56.265.701.816	1.443.454.317	-	-	-	-	-	80.613.144.229
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	7.626.591.326	126.561.965.967	117.584.916.215	-	-	-	-	-	251.773.473.508
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	20.907.032.712	35.963.735.018	1.529.556.192	-	-	-	-	-	58.390.323.922
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	6.723.353.680	103.934.381.973	17.112.577.387	-	-	-	-	-	127.770.313.040
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	-	712.350.938.436	346.871.219.617	-	-	-	-	-	1.059.222.158.052

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai 51	Belanja Barang 52	Belanja Modal 53	Bunga Utang 54	Belanja Subsidi 55	Belanja Hibah 56	Belanja Bansos 57	Lain-lain 58	Total Belanja
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	7.748.924.622	224.358.494.444	14.147.176.600	-	-	-	-	-	246.254.595.666
114	SEKRETARIAT KABINET	87.209.884.588	60.963.336.690	1.003.247.100	-	-	-	-	-	149.166.468.378
115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	20.524.589.314	3.188.800.892.518	40.631.468.180	-	-	-	-	-	3.249.956.940.012
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	301.679.014.779	441.229.430.488	66.280.143.469	-	-	-	-	-	809.188.588.736
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	224.604.325.089	377.805.129.822	122.474.673.969	-	-	-	-	-	724.884.128.880
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	34.102.265.614	263.547.913.139	-	-	-	-	-	297.650.178.753
999	BENDAHARA UMUM NEGARA	88.368.107.183.056	81.822.739.492	-	133.441.292.679.083	391.962.514.288.102	907.509.554.215	-	11.651.096.301.935	626.412.342.745.883
	JUMLAH	**243.719.884.098.338**	**176.622.265.435.276**	**147.347.928.326.528**	**133.441.292.679.083**	**391.962.514.288.102**	**907.509.554.215**	**97.924.676.539.384**	**11.651.096.301.935**	**1,203,577,167,222,861**

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI SUBFUNGSI
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI	FUNGSI/SUBFUNGSI	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
01	**PELAYANAN UMUM**	**865.870.050.611.000**	**788.794.243.366.320**	**1.002.774.366.768**	**787.791.468.999.552**	**(58.078.581.611.438)**
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN	152.236.562.318.000	150.052.933.211.925	382.606.201.433	149.670.327.010.492	(2.566.235.307.508)
01.03	PELAYANAN UMUM	12.231.274.507.000	10.826.580.173.048	21.715.322.116	10.804.864.850.932	(1.426.409.656.068)
01.04	PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK	2.358.166.848.000	2.215.783.621.535	10.391.035.105	2.205.392.586.430	(152.774.261.570)
01.05	PINJAMAN PEMERINTAH	135.538.876.008.000	133.504.200.468.285	222.579.306	133.503.977.888.979	(2.034.898.119.021)
01.06	PEMBANGUNAN DAERAH	2.902.906.214.000	2.516.295.283.254	1.991.865.512	2.514.303.417.742	(388.602.796.258)
01.07	LITBANG PELAYANANAN UMUM	411.200.237.000	245.764.146.605	929.713.148	244.834.433.457	(166.365.803.543)
01.90	PELAYANAN UMUM LAINNYA	550.191.064.379.000	499.432.686.461.668	584.917.650.138	498.847.768.811.530	(51.343.295.567.470)
02	**PERTAHANAN**	**83.221.189.227.000**	**86.312.750.506.208**	**199.418.110.256**	**86.113.332.395.952**	**2.892.143.168.952**
02.01	PERTAHANAN NEGARA	60.679.565.399.000	59.721.424.392.697	77.118.990.583	59.644.305.402.114	(1.035.259.996.886)
02.02	DUKUNGAN PERTAHANAN	22.192.282.059.000	26.243.855.012.959	28.116.182.286	26.215.738.830.673	4.023.456.771.673
02.04	LITBANG PERTAHANAN	349.341.769.000	347.471.100.552	94.182.937.387	253.288.163.165	(96.053.605.835)
03	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**35.920.471.958.000**	**34.927.414.342.259**	**70.860.251.835**	**34.856.554.090.424**	**(1.063.917.867.576)**
03.01	KEPOLISIAN	19.948.392.187.000	19.236.120.867.698	29.142.682.699	19.206.978.184.999	(741.414.002.001)
03.02	PENANGGULANGAN BENCANA	2.304.367.639.000	2.682.719.283.528	16.726.617.656	2.665.992.665.872	361.625.026.872
03.03	PEMBINAAN HUKUM	2.668.735.916.000	2.581.298.170.491	10.095.350.886	2.571.202.819.605	(97.533.096.395)
03.04	PERADILAN	7.246.669.227.000	7.064.727.687.743	7.975.751.531	7.056.751.936.212	(189.917.290.788)
03.06	LITBANG KETERTIBAN DAN KEAMANAN	17.755.039.000	15.436.172.356	668.981.269	14.767.191.087	(2.987.847.913)
03.90	KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA	3.734.551.950.000	3.347.112.160.443	6.250.867.794	3.340.861.292.649	(393.690.657.351)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI SUBFUNGSI
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI	FUNGSI/SUBFUNGSI	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
04	**EKONOMI**	**114.236.137.264.000**	**97.310.668.401.385**	**169.841.425.025**	**97.140.826.976.360**	**(17.094.310.287.640)**
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM	2.627.319.656.000	2.042.925.918.274	3.706.764.388	2.039.219.153.886	(588.100.502.114)
04.02	TENAGA KERJA	1.685.104.400.000	1.428.487.005.824	7.596.307.857	1.420.890.697.967	(264.213.702.033)
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	14.070.112.125.000	14.139.045.754.674	32.900.403.663	14.106.145.351.011	36.033.226.011
04.04	PENGAIRAN	964.165.493.000	516.466.270.911	402.948.554	516.063.322.357	(448.102.170.643)
04.05	BAHAN BAKAR DAN ENERGI	7.709.959.281.000	3.879.822.982.399	2.526.548.315	3.877.296.434.084	(3.832.662.846.916)
04.06	PERTAMBANGAN	3.378.086.086.000	1.555.739.031.910	2.587.732.234	1.553.151.299.676	(1.824.934.786.324)
04.07	INDUSTRI DAN KONSTRUKSI	2.289.508.448.000	2.095.750.931.208	3.380.508.835	2.092.380.422.373	(197.148.025.627)
04.08	TRANSPORTASI	70.401.613.217.000	62.492.972.221.168	102.494.730.973	62.390.477.490.195	(8.011.135.726.805)
04.09	TELEKOMUNIKASI	2.400.000.000	1.758.209.829	8.443.900	1.749.765.929	(650.234.071)
04.10	LITBANG EKONOMI	3.750.002.951.000	3.417.074.269.857	6.804.296.958	3.410.469.972.899	(339.532.978.101)
04.90	EKONOMI LAINNYA	7.356.865.607.000	5.740.625.805.331	7.622.739.348	5.733.003.065.983	(1.623.862.541.017)
05	**LINGKUNGAN HIDUP**	**10.338.336.216.000**	**9.346.033.220.189**	**19.664.077.878**	**9.326.369.142.311**	**(1.011.967.073.689)**
05.01	MANAJEMEN LIMBAH	2.543.064.506.000	2.394.657.990.104	2.130.837.285	2.392.527.152.819	(150.537.353.181)
05.03	PENANGGULANGAN POLUSI	135.449.000.000	121.869.675.630	81.428.719	121.788.246.911	(13.660.753.089)
05.04	KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	3.302.509.779.000	3.036.525.139.807	3.417.346.632	3.033.107.793.175	(269.401.985.825)
05.05	TATA RUANG DAN PERTANAHAN	3.465.534.597.000	3.042.883.312.759	7.483.866.685	3.035.399.446.074	(430.135.150.926)
05.90	LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA	891.778.334.000	750.097.101.889	6.550.598.557	743.546.503.332	(148.231.830.668)
06	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	**27.086.146.508.000**	**26.283.274.643.444**	**38.940.378.365**	**26.244.334.265.079**	**(841.812.242.921)**
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN	3.410.479.129.000	3.027.132.976.612	26.893.609.238	3.000.239.367.374	(410.239.761.626)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI SUBFUNGSI
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI	FUNGSI/SUBFUNGSI	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
06.02	PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERMUKIMAN	3.132.316.510.000	3.095.115.540.911	476.740.627	3.094.638.800.284	(37.677.709.716)
06.03	PENYEDIAAN AIR MINUM	4.929.314.660.000	4.859.761.682.477	2.245.017.566	4.857.516.664.911	(71.797.995.089)
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	15.614.036.209.000	15.301.264.443.444	9.325.010.934	15.291.939.432.510	(322.096.776.490)
07	**KESEHATAN**	**12.112.197.612.000**	**10.933.603.414.765**	**40.172.482.263**	**10.893.430.932.502**	**(1.218.766.679.498)**
07.01	OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	2.735.994.600.000	2.326.233.997.011	14.151.786.827	2.312.082.210.184	(423.912.389.816)
07.02	PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN	4.516.213.675.000	3.651.156.801.741	9.096.751.075	3.642.060.050.666	(874.153.624.334)
07.03	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	1.688.985.964.000	2.300.041.695.114	5.789.738.633	2.294.251.956.481	605.265.992.481
07.04	KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	2.522.866.646.000	2.121.561.629.244	3.444.436.730	2.118.117.192.514	(404.749.453.486)
07.05	LITBANG KESEHATAN	392.588.813.000	341.255.438.104	2.859.786.281	338.395.651.823	(54.193.161.177)
07.90	KESEHATAN LAINNYA	255.567.914.000	193.353.853.551	4.829.982.717	188.523.870.834	(67.044.043.166)
08	**PARIWISATA DAN BUDAYA**	**1.724.419.245.000**	**1.473.262.608.528**	**4.263.633.553**	**1.468.998.974.975**	**(255.420.270.025)**
08.01	PENGEMBANGAN PARIWISATA	481.615.170.000	419.607.215.426	181.040.411	419.426.175.015	(62.188.994.985)
08.03	PEMBINAAN PENERBITAN DAN PENYIARAN	9.606.100.000	8.565.520.498	-	8.565.520.498	(1.040.579.502)
08.04	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA	14.906.450.000	12.765.293.782	29.291.500	12.736.002.282	(2.170.447.718)
08.05	PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI	384.569.600.000	315.576.972.464	2.274.432.824	313.302.539.640	(71.267.060.360)
08.90	PARIWISATA LAINNYA	833.721.925.000	716.747.606.358	1.778.868.818	714.968.737.540	(118.753.187.460)
09	**AGAMA**	**3.679.820.420.000**	**4.023.835.194.874**	**21.922.283.382**	**4.001.912.911.492**	**322.092.491.492**
09.01	PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA	1.204.269.581.000	1.112.378.437.327	10.942.992.270	1.101.435.445.057	(102.834.135.943)
09.02	KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA	91.842.541.000	85.725.479.211	1.699.809.400	84.025.669.811	(7.816.871.189)

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI SUBFUNGSI
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI	FUNGSI/SUBFUNGSI	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
09.03	LITBANG AGAMA	1.902.013.896.000	2.327.143.854.263	7.850.623.252	2.319.293.231.011	417.279.335.011
09.90	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA	481.694.402.000	498.587.424.073	1.428.858.460	497.158.565.613	15.464.163.613
10	**PENDIDIKAN**	**129.224.906.014.000**	**123.036.395.934.915**	**339.428.829.322**	**122.696.967.105.593**	**(6.527.938.908.407)**
10.01	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	608.128.700.000	598.487.186.507	6.593.955.291	591.893.231.216	(16.235.468.784)
10.02	PENDIDIKAN DASAR	30.529.441.417.000	28.761.036.311.567	57.123.269.666	28.703.913.041.901	(1.825.528.375.099)
10.03	PENDIDIKAN MENENGAH	14.937.570.000.000	14.599.267.372.041	37.416.274.419	14.561.851.097.622	(375.718.902.378)
10.04	PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL	2.715.271.030.000	2.482.641.597.341	19.290.246.824	2.463.351.350.517	(251.919.679.483)
10.05	PENDIDIKAN KEDINASAN	728.392.102.000	675.379.475.381	438.190.005	674.941.285.376	(53.450.816.624)
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	42.817.053.562.000	41.187.007.064.450	59.875.503.510	41.127.331.560.940	(1.689.722.001.060)
10.07	PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN	5.316.344.126.000	6.290.659.118.869	124.574.468.820	6.166.084.650.049	849.740.524.049
10.08	PENDIDIKAN KEAGAMAAN	2.857.010.334.000	2.699.005.328.672	9.533.888.802	2.689.471.439.870	(167.538.894.130)
10.09	LITBANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.162.931.709.000	1.081.204.073.013	3.799.639.244	1.077.404.433.769	(85.527.275.231)
10.10	PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1.103.549.000.000	984.780.046.818	1.294.352.360	983.485.694.458	(120.063.305.542)
10.11	PENGEMBANGAN BUDAYA	1.141.193.857.000	1.050.991.573.215	2.713.772.317	1.048.277.800.898	(92.916.056.102)
10.90	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA	25.308.020.177.000	22.825.936.787.041	16.975.268.064	22.808.961.518.977	(2.699.058.658.023)
11	**PERLINDUNGAN SOSIAL**	**6.955.899.326.000**	**13.107.931.761.999**	**37.092.975.573**	**13.070.838.786.426**	**6.114.939.460.426**
11.01	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ORANG SAKIT DAN	265.393.828.000	268.567.078.953	990.427.321	267.576.651.632	22.182.823.632
11.02	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL LANSIA	120.374.656.000	119.950.491.485	598.238.844	119.352.251.641	(1.022.404.359)
11.04	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ANAK-ANAK DAN	438.983.124.000	443.284.021.382	1.843.790.804	441.440.230.758	2.457.106.758
11.05	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	177.945.592.000	172.846.056.198	190.633.476	172.655.422.722	(5.290.169.278)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI SUBFUNGSI
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI	FUNGSI/SUBFUNGSI	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
11.08	BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL	22.006.400.000	19.667.450.840	106.822.730	19.560.628.110	(2.445.771.890)
11.09	LITBANG PERLINDUNGAN SOSIAL	158.124.252.000	151.866.143.592	290.463.938	151.575.679.654	(6.548.572.346)
11.90	PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA	5.773.071.474.000	11.911.750.519.569	33.072.597.660	11.878.677.921.909	6.105.606.447.909
00.00	**Fungsi Subfungsi Tidak Ada**		**14.513.135.492**	**42.380.493.307**	**(27.867.357.815)**	**(27.867.357.815)**
JUMLAH		**1.280.368.574.301.000**	**1,205,563,926,530,378**	**1.986.759.307.517**	**1,203,577,167,222,861**	**(76.791.407.078.139)**

LAMPIRAN 3

Laporan Realisasi Dana Perimbangan TA 2014

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Wilayah	Dana Bagi Hasil				DAU	DAK	Total Dana Perimbangan
		Pajak	SDA	Cukai	Jumlah			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9 = 6 + 7 + 8
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	996.617.326.828	1.493.152.670.263	10.942.310.222	2.500.712.307.313	12.894.775.313.000	1.361.611.240.000	16.757.098.860.313
2	Provinsi Sumatera Utara	1.432.964.816.852	158.406.738.046	18.545.483.529	1.609.917.038.427	20.493.684.692.000	1.872.018.821.000	23.975.620.551.427
3	Provinsi Sumatera Barat	460.435.581.888	111.487.316.107	9.942.177.922	581.865.075.917	11.616.355.756.000	1.226.913.918.000	13.425.134.749.917
4	Provinsi Riau	2.882.660.787.246	13.557.541.544.534	-	16.440.202.331.780	7.086.364.618.000	280.012.481.000	23.806.579.430.780
5	Provinsi Kepulauan Riau	742.105.171.405	2.890.332.470.910	4.938.586.167	3.637.376.228.482	2.966.837.766.000	277.902.420.000	6.882.116.414.482
6	Provinsi Jambi	921.928.243.965	1.587.827.053.692	3.432.559.817	2.513.187.857.474	6.760.310.357.000	479.574.210.000	9.753.072.424.474
7	Provinsi Sumatera Selatan	2.452.270.983.747	6.954.060.457.767	3.658.677.755	9.409.990.119.269	10.217.273.982.000	950.002.388.000	20.577.266.489.269
8	Provinsi Bangka Belitung	242.772.651.135	518.416.026.358	-	761.188.677.493	3.740.385.859.000	347.464.658.000	4.849.039.194.493
9	Provinsi Bengkulu	209.917.164.583	229.112.315.976	-	439.029.480.559	5.575.161.518.000	619.278.298.000	6.633.469.296.559
10	Provinsi Lampung	559.592.298.417	504.920.409.215	13.993.504.197	1.078.506.211.829	10.653.937.487.000	1.002.634.710.000	12.735.078.408.829
11	Provinsi DKI Jakarta	9.452.747.398.866	312.478.953.549	-	9.765.226.352.415	85.985.282.000	-	9.851.211.634.415
12	Provinsi Jawa Barat	3.243.336.039.325	1.655.670.814.374	148.564.557.162	5.047.571.410.861	31.253.145.683.900	2.106.383.736.000	38.407.100.830.761
13	Provinsi Banten	1.174.550.928.958	21.453.728.341	-	1.196.004.657.299	7.482.851.591.000	504.069.561.000	9.182.925.809.299
14	Provinsi Jawa Tengah	1.667.649.949.951	83.927.707.231	512.701.405.492	2.264.279.062.674	31.956.566.768.000	2.180.910.935.000	36.401.756.765.674
15	Provinsi DI Yogyakarta	230.034.699.465	2.024.783.586	21.365.353.208	253.424.836.259	4.906.818.097.000	230.050.233.000	5.390.293.166.259
16	Provinsi Jawa Timur	2.586.002.258.945	1.877.461.791.293	1.194.686.779.479	5.658.150.829.717	35.525.315.109.000	2.364.541.562.000	43.548.007.500.717
17	Provinsi Kalimantan Barat	554.969.585.390	501.402.631.017	-	1.056.372.216.407	8.867.613.127.000	1.051.764.238.000	10.975.749.581.407
18	Provinsi Kalimantan Tengah	646.800.925.698	1.066.094.336.289	312.989.961	1.713.208.251.948	9.233.010.568.000	768.899.892.500	11.715.118.712.448
19	Provinsi Kalimantan Selatan	708.465.428.058	3.150.593.054.656	-	3.859.058.482.714	7.352.969.101.000	656.517.360.000	11.868.544.943.714
20	Provinsi Kalimantan Timur	2.611.925.544.744	15.456.361.951.656	-	18.068.287.496.400	4.409.093.033.000	319.747.233.000	22.797.127.762.400
21	Provinsi Kalimantan Utara	511.532.616.538	4.902.224.256.937	-	5.413.756.873.475	1.856.422.435.000	23.276.831.000	7.293.456.139.475

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Wilayah	Dana Bagi Hasil				DAU	DAK	Total Dana Perimbangan
		Pajak	SDA	Cukai	Jumlah			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9 = 6 + 7 + 8
22	Provinsi Sulawesi Utara	326.937.335.193	79.812.565.052	-	406.749.900.245	7.393.485.577.000	923.671.203.000	8.723.906.680.245
23	Provinsi Gorontalo	109.789.619.974	12.624.976.363	-	122.414.596.337	3.352.944.625.000	400.947.970.000	3.876.307.191.337
24	Provinsi Sulawesi Tengah	285.354.710.636	177.359.893.629	5.952.771.493	468.667.375.758	7.615.406.435.000	839.773.683.000	8.923.847.493.758
25	Provinsi Sulawesi Selatan	819.716.887.233	163.126.636.518	16.816.383.534	999.659.907.285	15.186.522.475.000	1.528.290.740.000	17.714.473.122.285
26	Provinsi Sulawesi Barat	138.400.305.479	15.566.577.777	-	153.966.883.256	3.298.848.324.000	408.394.220.000	3.861.209.427.256
27	Provinsi Sulawesi Tenggara	275.083.200.964	313.579.125.545	-	588.662.326.509	7.410.398.264.000	921.871.350.000	8.920.931.940.509
28	Provinsi Bali	405.619.908.099	3.448.641.690	9.176.987.088	418.245.536.877	6.034.331.526.000	407.323.904.000	6.859.900.966.877
29	Provinsi Nusa Tenggara Barat	277.863.725.773	140.716.519.405	241.110.386.895	659.690.632.073	7.252.369.864.000	763.729.750.000	8.675.790.246.073
30	Provinsi Nusa Tenggara Timur	331.739.783.761	23.131.601.387	5.557.481.005	360.428.866.153	11.126.394.610.000	1.596.525.052.000	13.083.348.528.153
31	Provinsi Maluku	300.397.640.377	78.136.626.860	-	378.534.267.237	6.309.571.890.000	817.942.268.000	7.506.048.425.237
32	Provinsi Maluku Utara	246.916.691.261	384.074.570.668	-	630.991.261.929	6.015.909.319.000	986.039.955.000	7.632.940.535.929
33	Provinsi Papua	1.026.115.336.391	1.450.603.369.205	-	2.476.718.705.596	18.671.671.881.100	2.853.271.284.000	24.001.661.870.696
34	Provinsi Papua Barat	882.726.638.192	2.124.185.559.612	-	3.006.912.197.804	6.616.592.718.000	823.114.630.000	10.446.619.545.804
35	Dana Cadangan			-	-	-		-
36	Kembali ke RKUN	-		-	-	-	-	-
37	Nilai belum teridentifikasi daerah penerima	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		**39.715.942.185.337**	**62.001.317.675.508**	**2.221.698.394.926**	**103.938.958.255.771**	**341.219.325.651.000**	**31.894.470.734.500**	**477.052.754.641.271**

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
1	**Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**	**245.112.712.200**	**76.676.705.529**	**146.848.431.194**	**223.525.136.723**
2	Kab. Aceh Barat	14.942.992.396	2.671.228.273	11.268.106.713	13.939.334.986
3	Kab. Aceh Besar	20.102.815.421	7.623.363.533	10.892.450.170	18.515.813.703
4	Kab. Aceh Selatan	18.103.248.443	3.914.503.779	12.891.810.507	16.806.314.286
5	Kab. Aceh Singkil	16.122.950.562	2.659.975.821	12.410.590.783	15.070.566.604
6	Kab. Aceh Tengah	16.935.202.207	4.374.088.709	11.405.172.098	15.779.260.807
7	Kab. Aceh Tenggara	19.027.855.747	1.910.079.020	15.013.905.626	16.923.984.646
8	Kab. Aceh Timur	65.780.143.155	2.732.153.921	57.576.524.531	60.308.678.452
9	Kab. Aceh Utara	307.456.183.252	14.882.094.034	259.948.352.371	274.830.446.405
10	Kab. Bireuen	27.085.973.587	6.277.206.387	18.768.860.039	25.046.066.426
11	Kab. Pidie	16.745.827.576	5.228.769.276	10.220.589.538	15.449.358.814
12	Kab. Simeulue	13.292.148.870	2.501.677.035	10.086.519.462	12.588.196.497
13	Kota Banda Aceh	34.581.020.993	23.172.347.322	8.443.598.703	31.615.946.025
14	Kota Sabang	19.085.811.070	3.824.572.355	13.404.623.337	17.229.195.692
15	Kota Langsa	18.511.883.223	6.755.072.959	10.557.562.543	17.312.635.502
16	Kota Lhokseumawe	58.483.168.166	5.786.007.600	46.714.410.203	52.500.417.803
17	Kab. Nagan Raya	18.135.024.151	2.106.198.106	14.844.884.043	16.951.082.149
18	Kab. Aceh Jaya	14.975.007.081	2.315.839.850	11.567.007.621	13.882.847.471
19	Kab. Pidie Jaya	12.734.632.768	2.869.804.380	8.976.290.186	11.846.094.566
20	Kab. Aceh Barat Daya	14.621.876.383	3.304.852.340	10.303.356.375	13.608.208.715
21	Kab. Gayo Lues	21.522.729.114	2.340.073.765	17.034.507.526	19.374.581.291
22	Kab. Aceh Tamiang	75.624.531.683	4.713.985.913	64.110.233.112	68.824.219.025
23	Kab. Bener Meriah	13.974.802.217	2.794.711.984	10.193.561.915	12.988.273.899
24	Kota Subulussalam	12.541.237.361	2.617.717.296	9.082.949.045	11.700.666.341
25	**Provinsi Sumatera Utara**	**398.429.872.921**	**238.173.257.821**	**141.006.280.910**	**379.179.538.731**
26	Kab. Asahan	55.330.621.506	10.512.820.893	42.863.465.292	53.376.286.185
27	Kab. Dairi	17.476.886.051	5.239.097.041	12.759.110.858	17.998.207.899
28	Kab. Deli Serdang	58.009.729.667	16.955.604.962	37.660.214.176	54.615.819.138
29	Kab. Karo	16.523.041.544	6.819.899.420	8.988.365.906	15.808.265.326
30	Kab. Labuhan Batu	41.352.554.365	8.491.576.119	30.747.112.774	39.238.688.893
31	Kab. Langkat	155.756.254.396	12.222.962.257	129.501.572.717	141.724.534.974
32	Kab. Mandailing Natal	52.119.890.519	5.770.475.188	40.186.911.599	45.957.386.787
33	Kab. Nias	9.967.478.220	3.884.887.986	5.537.579.501	9.422.467.487
34	Kab. Simalungun	57.741.654.361	13.809.672.632	41.331.304.596	55.140.977.228
35	Kab. Tapanuli Selatan	28.835.640.500	10.967.771.873	19.409.052.274	30.376.824.147
36	Kab. Tapanuli Tengah	19.985.657.966	5.517.326.716	13.279.626.081	18.796.952.797
37	Kab. Tapanuli Utara	19.479.135.396	5.468.457.132	12.655.575.898	18.124.033.030
38	Kab. Toba Samosir	15.717.032.705	6.331.927.444	8.456.674.865	14.788.602.309
39	Kota Binjai	26.679.273.307	7.324.984.375	17.708.053.053	25.033.037.428
40	Kota Medan	158.576.449.465	134.327.107.173	20.155.115.841	154.482.223.014
41	Kota Pematang Siantar	23.286.527.660	15.933.598.971	6.130.509.989	22.064.108.960
42	Kota Sibolga	15.968.030.402	6.705.619.752	8.337.507.023	15.043.126.775
43	Kota Tanjung Balai	12.441.072.743	4.630.802.311	7.106.739.834	11.737.542.145
44	Kab. Batu Bara	24.570.189.576	8.865.976.303	14.575.284.763	23.441.261.066
45	Kab. Labuhan Batu Utara	31.041.670.586	5.395.154.492	24.407.079.709	29.802.234.201
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	50.266.523.625	6.129.196.740	37.845.157.995	43.974.354.735
47	Kab. Padang Lawas Utara	16.857.283.402	4.589.771.993	20.603.449.322	25.193.221.315
48	Kab. Padang Lawas	24.129.669.577	4.707.565.782	23.759.075.679	28.466.641.461
49	Kab. Nias Utara	9.737.749.012	3.959.059.939	5.253.830.536	9.212.890.475
50	Kab. Nias Barat	8.381.758.997	3.790.101.151	4.171.214.693	7.961.315.844
51	Kota Tebing Tinggi	14.541.302.827	6.110.563.015	7.630.816.268	13.741.379.283
52	Kota Padang Sidempuan	19.277.549.025	7.821.389.148	10.439.457.941	18.260.847.089
53	Kab. Pakpak Bharat	15.509.406.760	3.735.347.135	10.814.001.653	14.549.348.788
54	Kab. Nias Selatan	16.720.190.783	4.040.628.263	11.746.190.822	15.786.819.085
55	Kab. Humbang Hasundutan	17.889.604.616	4.220.114.959	12.524.136.470	16.744.251.429
56	Kab. Serdang Bedagai	43.185.115.181	9.569.598.976	31.580.850.690	41.150.449.666
57	Kab. Samosir	12.714.897.102	4.046.432.504	7.920.781.436	11.967.213.940

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
58	Kota Gunungsitoli	10.324.103.070	5.343.489.265	4.460.475.957	9.803.965.222
59	**Provinsi Sumatera Barat**	**137.122.678.972**	**94.843.589.130**	**34.581.907.875**	**129.425.497.005**
60	Kab. Lima Puluh Kota	16.909.358.384	4.785.265.830	10.966.923.433	15.752.189.263
61	Kab. Agam	17.916.394.846	6.494.774.484	10.793.525.057	17.288.299.541
62	Kab. Kepulauan Mentawai	14.816.614.677	2.810.776.037	10.945.458.660	13.756.234.697
63	Kab. Padang Pariaman	13.282.979.130	4.078.425.765	8.331.874.743	12.410.300.508
64	Kab. Pasaman	15.326.243.841	4.407.599.294	9.911.983.731	14.319.583.025
65	Kab. Pesisir Selatan	22.452.372.958	5.190.000.484	15.845.208.003	21.035.208.487
66	Kab. Sijunjung	16.023.573.221	4.485.265.403	10.798.444.970	15.283.710.373
67	Kab. Solok	16.518.510.787	5.245.815.099	10.277.479.763	15.523.294.862
68	Kab. Tanah Datar	15.153.624.818	5.875.583.149	8.272.647.153	14.148.230.302
69	Kota Bukit Tinggi	13.833.002.324	8.025.784.893	5.065.023.072	13.090.807.965
70	Kota Padang Panjang	11.551.242.214	3.808.953.946	7.016.999.262	10.825.953.208
71	Kota Padang	65.835.325.909	51.265.234.799	10.557.102.216	61.822.337.015
72	Kota Payakumbuh	11.694.836.279	5.266.039.697	5.689.229.755	10.955.269.452
73	Kota Sawahlunto	11.984.907.232	4.198.377.224	7.581.621.418	11.779.998.642
74	Kota Solok	12.153.629.603	4.633.120.534	6.825.899.575	11.459.020.109
75	Kota Pariaman	15.383.895.175	6.042.959.878	8.331.860.775	14.374.820.653
76	Kab. Pasaman Barat	20.050.890.550	5.672.442.161	14.893.189.506	20.565.631.667
77	Kab. Dharmasraya	19.956.959.774	6.120.732.589	12.927.104.526	19.047.837.115
78	Kab. Solok Selatan	18.576.387.630	3.885.296.785	13.686.061.214	17.571.357.999
79	**Provinsi Riau**	**750.100.235.985**	**217.626.651.028**	**460.908.158.632**	**678.534.809.660**
80	Kab. Bengkalis	814.407.233.965	66.509.965.253	637.785.490.621	704.295.455.874
81	Kab. Indragiri Hilir	60.435.235.032	15.131.332.408	42.132.033.951	57.263.366.359
82	Kab. Indragiri Hulu	122.734.958.073	15.579.708.940	97.366.422.442	112.946.131.382
83	Kab. Kampar	232.303.533.360	16.446.601.018	192.981.281.623	209.427.882.641
84	Kab. Kuantan Singingi	40.451.791.966	12.126.753.696	25.923.103.113	38.049.856.809
85	Kab. Pelalawan	162.484.180.006	17.673.324.950	131.651.433.142	149.324.758.092
86	Kab. Rokan Hilir	267.307.200.542	14.201.699.094	228.090.486.672	242.292.185.766
87	Kab. Rokan Hulu	102.854.258.293	11.945.225.595	83.784.577.817	95.729.803.412
88	Kab. Siak	391.059.894.834	31.273.615.158	320.282.376.112	351.555.991.270
89	Kota Dumai	50.352.523.085	25.359.222.511	21.822.445.989	47.181.668.500
90	Kota Pekanbaru	126.132.002.599	89.812.353.576	28.272.089.673	118.084.443.249
91	Kab. Kepulauan Meranti	84.599.197.633	10.464.801.288	67.509.632.944	77.974.434.232
92	**Provinsi Kepulauan Riau**	**219.979.883.279**	**120.112.801.674**	**83.875.181.309**	**203.987.982.983**
93	Kab. Bintan	45.803.088.272	13.122.656.235	29.110.250.672	42.232.906.907
94	Kab. Natuna	177.778.187.208	10.308.618.600	152.619.467.887	162.928.086.487
95	Kab. Karimun	45.606.855.463	17.215.847.468	33.887.020.482	51.102.867.950
96	Kota Batam	146.176.685.353	98.949.392.503	34.819.278.211	133.768.670.714
97	Kab. Kepulauan Anambas	86.011.389.251	20.602.210.951	58.697.287.177	79.299.498.128
98	Kota Tanjung Pinang	39.243.879.321	14.785.156.418	21.425.116.417	36.210.272.835
99	Kab. Lingga	35.369.865.969	8.564.762.216	24.010.123.185	32.574.885.401
100	**Provinsi Jambi**	**220.204.216.287**	**45.888.408.259**	**156.994.485.083**	**202.882.893.342**
101	Kab. Batanghari	140.251.879.205	3.943.313.009	124.466.461.646	128.409.774.655
102	Kab. Bungo	43.912.385.541	6.101.293.538	34.846.689.612	40.947.983.150
103	Kab. Kerinci	14.673.839.412	3.631.567.938	10.062.571.494	13.694.139.432
104	Kab. Merangin	50.973.575.129	5.086.353.379	41.928.981.127	47.015.334.506
105	Kab. Muaro Jambi	106.062.894.064	4.504.149.925	92.053.529.407	96.557.679.332
106	Kab. Sarolangun	70.508.925.940	3.859.207.112	61.486.456.643	65.345.663.755
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	117.674.446.422	5.722.352.898	101.194.909.322	106.917.262.220
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	105.807.248.696	5.467.261.441	90.521.837.940	95.989.099.381
109	Kab. Tebo	65.834.549.155	3.724.158.417	56.964.228.171	60.688.386.588
110	Kota Jambi	58.840.640.990	23.960.365.714	30.467.159.973	54.427.525.687
111	Kota Sungai Penuh	9.656.794.577	3.458.277.159	5.594.224.758	9.052.501.917
112	**Provinsi Sumatera Selatan**	**598.398.810.581**	**147.158.852.410**	**403.799.646.808**	**550.958.499.218**
113	Kab. Lahat	119.727.609.415	5.307.101.782	104.257.375.746	109.564.477.528
114	Kab. Musi Banyuasin	623.942.471.737	18.032.077.683	546.332.289.682	564.364.367.365

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
115	Kab. Musi Rawas	128.737.631.026	6.897.290.581	111.642.333.463	118.539.624.044
116	Kab. Musi Rawas Utara	71.167.065.531	3.791.594.507	62.113.418.499	65.905.013.006
117	Kab. Muara Enim	415.737.528.388	21.901.010.166	359.229.363.516	381.130.373.682
118	Kab. Ogan Komering Ilir	58.430.849.833	8.531.302.376	46.651.539.979	55.182.842.355
119	Kab. Ogan Komering Ulu	77.339.531.403	7.441.887.486	63.159.826.137	70.601.713.623
120	Kota Palembang	102.675.699.303	83.185.711.924	14.468.675.329	97.654.387.253
121	Kota Pagar Alam	20.081.768.873	5.125.243.663	13.544.327.676	18.669.571.339
122	Kota Lubuk Linggau	28.368.792.300	8.938.066.601	16.794.484.247	25.732.550.848
123	Kota Prabumulih	69.518.400.158	12.478.033.300	50.432.467.621	62.910.500.921
124	Kab. Empat Lawang	23.957.707.634	9.165.336.639	13.014.435.914	22.179.772.553
125	Kab. Banyuasin	129.780.747.835	8.194.337.352	113.293.012.722	121.487.350.074
126	Kab. Ogan Ilir	69.797.186.259	6.966.088.248	56.807.848.724	63.773.936.972
127	Kab. OKU Timur	24.328.000.675	5.963.338.818	16.694.768.145	22.658.106.963
128	Kab. OKU Selatan	20.376.899.305	4.766.687.131	14.169.172.219	18.935.859.350
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	90.354.996.546	5.417.237.293	76.604.799.360	82.022.036.653
130	**Provinsi Bangka Belitung**	**59.850.425.393**	**22.272.445.255**	**32.566.801.074**	**54.839.246.329**
131	Kab. Bangka	34.402.825.669	4.727.716.987	25.733.647.129	30.461.364.116
132	Kab. Belitung	26.002.547.962	3.725.950.376	20.003.605.024	23.729.555.400
133	Kota Pangkal Pinang	23.329.943.741	11.145.587.450	11.055.968.021	22.201.555.471
134	Kab. Bangka Selatan	33.319.987.075	2.423.135.233	26.955.919.434	29.379.054.667
135	Kab. Bangka Tengah	24.554.563.804	3.696.119.256	18.623.296.331	22.319.415.587
136	Kab. Bangka Barat	38.612.992.710	5.241.580.854	28.722.265.898	33.963.846.752
137	Kab. Belitung Timur	27.719.737.931	3.276.643.811	22.601.969.002	25.878.612.813
138	**Provinsi Bengkulu**	**54.376.810.141**	**28.766.984.621**	**22.149.309.578**	**50.916.294.199**
139	Kab. Bengkulu Selatan	13.082.257.474	3.349.419.416	8.859.177.357	12.208.596.773
140	Kab. Bengkulu Utara	22.914.161.641	4.822.243.197	16.376.565.644	21.198.808.841
141	Kab. Rejang Lebong	14.104.438.295	3.738.306.253	9.418.075.497	13.156.381.750
142	Kota Bengkulu	25.896.688.951	15.939.152.943	8.414.950.341	24.354.103.284
143	Kab. Kaur	15.147.480.663	2.264.074.289	11.811.357.908	14.075.432.197
144	Kab. Seluma	16.286.208.293	2.811.175.350	12.374.153.710	15.185.329.060
145	Kab. Mukomuko	22.161.137.563	2.995.144.093	17.675.671.967	20.670.816.060
146	Kab. Lebong	15.258.481.678	2.183.144.862	12.000.883.910	14.184.028.772
147	Kab. Bengkulu Tengah	11.980.539.390	2.730.129.823	8.456.051.644	11.186.181.467
148	Kab. Kepahiang	13.742.846.141	2.366.964.130	10.414.228.050	12.781.192.180
149	**Provinsi Lampung**	**156.899.739.892**	**96.139.121.537**	**52.084.218.506**	**148.223.340.043**
150	Kab. Lampung Barat	19.099.098.987	4.739.463.874	12.422.421.888	17.161.885.762
151	Kab. Lampung Selatan	30.666.268.547	11.988.762.103	16.130.233.117	28.118.995.220
152	Kab. Lampung Tengah	50.041.900.663	14.100.596.447	33.158.338.210	47.258.934.657
153	Kab. Lampung Utara	26.650.200.258	8.046.113.846	17.072.807.621	25.118.921.467
154	Kab. Lampung Timur	70.514.555.217	8.784.707.585	55.214.556.548	63.999.264.133
155	Kab. Tanggamus	28.659.016.063	6.962.974.376	19.011.595.562	25.974.569.938
156	Kab. Tulang Bawang	38.137.621.024	9.931.391.864	26.001.295.892	35.932.687.756
157	Kab. Way Kanan	26.571.136.781	5.751.558.378	19.227.559.748	24.979.118.126
158	Kab. Pesawaran	16.280.104.015	6.092.339.627	9.019.148.458	15.111.488.085
159	Kab. Pesisir Barat	9.310.489.488	2.179.834.631	6.475.682.909	8.655.517.540
160	Kab. Pringsewu	14.024.133.555	6.195.475.290	10.904.873.786	17.100.349.076
161	Kab. Mesuji	16.751.794.757	3.754.790.509	11.271.233.535	15.026.024.044
162	Kab. Tulang Bawang Barat	14.780.040.962	4.116.656.855	9.788.974.600	13.905.631.455
163	Kota Bandar Lampung	57.354.539.561	43.795.013.500	10.655.700.758	54.450.714.258
164	Kota Metro	19.777.767.161	7.817.730.211	10.757.126.646	18.574.856.857
165	**Provinsi DKI Jakarta**	**10.038.290.006.210**	**9.306.614.599.890**	**146.132.798.976**	**9.452.747.398.866**
166	**Provinsi Jawa Barat**	**1.110.574.612.715**	**864.300.003.170**	**181.856.156.868**	**1.046.156.160.038**
167	Kab. Bandung	107.360.543.893	42.775.358.596	58.604.700.479	101.380.059.075
168	Kab. Bekasi	277.339.005.891	194.803.476.303	65.928.337.241	260.731.813.544
169	Kab. Bogor	166.882.812.690	95.691.190.854	61.336.151.620	157.027.342.474
170	Kab. Ciamis	51.525.359.837	25.070.354.472	22.129.908.556	47.200.263.028
171	Kab. Cianjur	53.535.976.453	25.776.885.989	24.856.535.526	50.633.421.515

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
172	Kab. Cirebon	77.429.225.244	31.046.079.605	39.315.761.275	70.361.840.880
173	Kab. Garut	81.882.751.738	33.701.822.145	44.345.897.736	78.047.719.881
174	Kab. Indramayu	152.270.448.345	33.370.482.338	105.833.688.506	139.204.170.844
175	Kab. Karawang	205.989.959.505	109.221.246.738	81.806.258.860	191.027.505.598
176	Kab. Kuningan	50.210.769.184	23.337.426.824	22.353.731.999	45.691.158.823
177	Kab. Majalengka	61.480.942.173	22.625.870.400	34.471.285.098	57.097.155.498
178	Kab. Pangandaran	22.539.992.955	13.500.412.103	7.463.263.933	20.963.676.036
179	Kab. Purwakarta	80.644.179.680	43.516.492.870	29.328.665.321	72.845.158.191
180	Kab. Subang	136.890.980.410	27.226.469.526	98.446.602.847	125.673.072.373
181	Kab. Sukabumi	70.584.432.254	27.826.389.111	38.687.265.759	66.513.654.870
182	Kab. Sumedang	43.706.193.296	27.641.109.267	13.836.951.116	41.478.060.383
183	Kab. Tasikmalaya	55.062.677.652	21.593.346.408	28.479.792.671	50.073.139.079
184	Kab. Bandung Barat	45.100.536.661	30.266.639.691	11.690.399.127	41.957.038.818
185	Kota Bandung	216.301.645.883	188.063.214.246	17.524.006.561	205.587.220.807
186	Kota Bekasi	102.103.620.495	79.727.323.702	16.171.997.756	95.899.321.458
187	Kota Bogor	56.561.126.114	44.382.078.948	9.540.824.173	53.922.903.121
188	Kota Cirebon	39.311.807.968	28.815.380.235	8.540.320.737	37.355.700.972
189	Kota Depok	68.690.449.670	52.649.129.929	12.734.453.201	65.383.583.130
190	Kota Sukabumi	30.945.884.253	22.897.070.193	6.269.529.195	29.166.599.388
191	Kota Cimahi	29.858.574.705	21.163.096.593	6.884.168.006	28.047.264.599
192	Kota Tasikmalaya	36.932.259.069	26.810.131.476	8.057.686.363	34.867.817.839
193	Kota Banjar	31.003.302.810	17.056.355.581	11.986.861.482	29.043.217.063
194	**Provinsi Banten**	**444.539.074.439**	**391.067.405.129**	**24.222.533.784**	**415.289.938.913**
195	Kab. Lebak	67.083.418.911	26.598.310.733	34.355.929.125	60.954.239.858
196	Kab. Pandeglang	57.839.877.838	28.003.086.966	25.679.686.794	53.682.773.760
197	Kab. Serang	81.585.822.033	51.132.334.536	23.474.652.621	74.606.987.157
198	Kab. Tangerang	153.274.615.856	123.861.361.489	18.464.808.239	142.326.169.728
199	Kota Cilegon	77.141.785.462	64.934.473.303	7.189.320.704	72.123.794.007
200	Kota Tangerang	203.368.968.131	177.681.980.172	13.228.473.984	190.910.454.156
201	Kota Serang	45.081.707.107	29.381.039.377	11.887.866.996	41.268.906.373
202	Kota Tangerang Selatan	137.138.318.816	87.631.515.329	35.756.149.677	123.387.665.006
203	**Provinsi Jawa Tengah**	**517.770.089.503**	**381.056.720.681**	**110.758.236.277**	**491.814.956.958**
204	Kab. Banjarnegara	24.393.052.279	10.572.441.909	12.358.110.960	22.930.552.869
205	Kab. Banyumas	48.121.280.828	24.771.203.024	21.297.086.382	46.068.289.406
206	Kab. Batang	25.752.991.770	9.422.408.315	15.806.317.471	25.228.725.786
207	Kab. Blora	75.388.906.922	11.994.164.247	56.131.965.545	68.126.129.792
208	Kab. Boyolali	25.595.361.865	12.010.654.437	11.842.027.826	23.852.682.263
209	Kab. Brebes	51.410.070.065	11.492.574.082	34.983.045.877	46.475.619.959
210	Kab. Cilacap	62.693.587.251	28.424.427.647	29.964.946.894	58.389.374.541
211	Kab. Demak	37.799.227.768	12.436.093.107	22.705.962.134	35.142.055.241
212	Kab. Grobogan	41.679.810.808	10.685.940.388	28.432.256.654	39.118.197.042
213	Kab. Jepara	34.274.046.979	14.651.515.953	19.456.819.884	34.108.335.837
214	Kab. Karanganyar	24.286.459.861	11.652.956.450	11.102.585.723	22.755.542.173
215	Kab. Kebumen	27.930.494.067	11.194.754.080	14.969.447.029	26.164.201.109
216	Kab. Kendal	41.353.653.512	11.342.458.376	27.434.144.056	38.776.602.432
217	Kab. Klaten	29.712.513.033	16.028.426.723	11.907.966.537	27.936.393.260
218	Kab. Kudus	70.157.659.378	47.156.359.353	18.552.654.693	65.709.014.046
219	Kab. Magelang	22.522.603.914	9.660.315.635	11.916.098.781	21.576.414.416
220	Kab. Pati	34.655.212.311	14.555.725.400	18.532.750.629	33.088.476.029
221	Kab. Pekalongan	23.620.525.175	9.255.734.794	13.773.974.567	23.029.709.361
222	Kab. Pemalang	28.924.370.005	11.235.838.036	16.304.131.183	27.539.969.219
223	Kab. Purbalingga	29.851.310.314	9.700.393.008	17.162.664.337	26.863.057.345
224	Kab. Purworejo	21.064.875.441	9.426.923.027	10.463.930.645	19.890.853.672
225	Kab. Rembang	28.070.683.227	10.380.652.487	15.816.722.508	26.197.374.995
226	Kab. Semarang	32.077.194.481	17.328.976.759	14.268.076.506	31.597.053.265
227	Kab. Sragen	31.185.261.007	9.579.441.922	18.455.470.674	28.034.912.596
228	Kab. Sukoharjo	26.510.842.577	14.739.818.175	10.160.671.911	24.900.490.086

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
229	Kab. Tegal	29.034.812.979	11.658.643.399	15.895.030.904	27.553.674.303
230	Kab. Temanggung	19.990.391.738	8.996.903.002	9.783.053.801	18.779.956.803
231	Kab. Wonogiri	23.587.696.259	9.378.983.428	12.699.565.167	22.078.548.595
232	Kab. Wonosobo	22.070.826.742	8.512.712.517	12.159.316.787	20.672.029.304
233	Kota Magelang	14.904.050.220	9.669.253.521	4.891.307.344	14.560.560.865
234	Kota Pekalongan	22.582.329.245	14.518.372.373	6.824.227.042	21.342.599.415
235	Kota Salatiga	22.254.925.344	10.492.955.654	9.699.224.919	20.192.180.573
236	Kota Semarang	139.786.544.513	113.141.562.378	18.569.293.208	131.710.855.586
237	Kota Surakarta	37.671.200.082	30.353.121.543	6.806.599.325	37.159.720.868
238	Kota Tegal	19.105.874.557	12.724.715.106	5.560.124.835	18.284.839.941
239	**Provinsi DI Yogyakarta**	**78.941.254.350**	**68.407.273.062**	**7.768.500.608**	**76.175.773.670**
240	Kab. Bantul	25.170.387.630	14.052.707.664	9.839.987.559	23.892.695.223
241	Kab. Gunung Kidul	31.025.358.695	11.697.547.959	16.461.061.629	28.158.609.588
242	Kab. Kulon Progo	19.611.924.694	11.270.965.723	7.364.761.621	18.635.727.344
243	Kab. Sleman	43.786.297.960	30.328.294.787	10.908.735.535	41.237.030.322
244	Kota Yogyakarta	42.411.150.805	35.658.032.383	6.276.830.935	41.934.863.318
245	**Provinsi Jawa Timur**	**812.454.774.657**	**570.243.202.183**	**191.619.670.481**	**761.862.872.664**
246	Kab. Bangkalan	56.410.305.470	11.351.245.569	41.031.899.114	52.383.144.683
247	Kab. Banyuwangi	49.898.444.423	18.457.846.158	29.510.497.550	47.968.343.708
248	Kab. Blitar	29.899.292.414	13.348.480.876	14.426.718.306	27.775.199.182
249	Kab. Bojonegoro	138.840.438.910	16.923.219.274	110.612.896.146	127.536.115.420
250	Kab. Bondowoso	31.292.010.467	11.465.321.658	16.922.326.160	28.387.647.818
251	Kab. Gresik	104.713.286.251	55.154.809.475	42.516.466.877	97.671.276.352
252	Kab. Jember	55.755.944.371	25.207.344.022	27.067.721.486	52.275.065.508
253	Kab. Jombang	40.080.360.944	14.357.335.803	23.256.242.438	37.613.578.241
254	Kab. Kediri	40.983.074.707	17.084.624.303	21.349.514.720	38.434.139.023
255	Kab. Lamongan	42.350.644.389	12.733.806.338	26.997.942.513	39.731.748.851
256	Kab. Lumajang	30.421.790.568	12.102.125.264	16.328.397.576	28.430.522.840
257	Kab. Madiun	25.257.932.239	11.597.475.727	12.172.198.525	23.769.674.252
258	Kab. Magetan	23.223.600.836	12.281.636.816	9.545.890.624	21.827.527.440
259	Kab. Malang	69.034.945.244	23.726.900.863	38.345.893.347	62.072.794.210
260	Kab. Mojokerto	43.660.642.920	15.027.721.697	25.874.386.306	40.902.108.003
261	Kab. Nganjuk	48.293.675.986	15.216.764.182	28.436.859.201	43.653.623.383
262	Kab. Ngawi	37.327.161.420	11.668.926.850	22.216.182.153	33.885.109.003
263	Kab. Pacitan	23.845.094.174	11.600.339.717	10.800.686.332	22.401.026.049
264	Kab. Pamekasan	37.779.184.769	12.378.366.469	22.716.619.701	35.094.986.170
265	Kab. Pasuruan	57.667.812.343	27.241.552.065	26.553.869.974	53.795.422.039
266	Kab. Ponorogo	32.608.634.197	14.101.187.593	16.484.467.139	30.585.654.732
267	Kab. Probolinggo	39.645.517.810	15.459.018.575	21.735.037.345	37.194.055.920
268	Kab. Sampang	42.320.864.141	9.616.667.584	29.560.638.463	39.177.306.047
269	Kab. Sidoarjo	118.827.554.964	69.443.270.797	41.340.011.096	110.783.281.893
270	Kab. Situbondo	28.969.815.361	11.922.721.747	15.625.264.784	27.547.986.531
271	Kab. Sumenep	98.088.409.830	13.963.483.220	77.313.593.763	91.277.076.983
272	Kab. Trenggalek	32.505.424.561	12.004.760.716	19.196.584.819	31.201.345.535
273	Kab. Tuban	68.053.838.194	21.243.153.945	42.017.640.779	63.260.794.724
274	Kab. Tulungagung	38.644.178.663	16.496.912.351	19.530.823.367	36.027.735.718
275	Kota Blitar	23.712.253.669	11.669.442.477	9.892.373.400	21.561.815.877
276	Kota Kediri	36.744.772.069	28.611.848.622	5.718.265.256	34.330.113.878
277	Kota Madiun	33.912.717.254	19.051.097.595	11.791.513.299	30.842.610.894
278	Kota Malang	52.971.149.571	41.271.693.020	8.586.953.165	49.858.646.185
279	Kota Mojokerto	18.695.572.962	10.917.485.019	6.748.601.598	17.666.086.617
280	Kota Pasuruan	22.649.472.124	14.286.179.034	6.901.602.591	21.187.781.625
281	Kota Probolinggo	24.225.806.266	11.606.676.392	11.012.519.586	22.619.195.978
282	Kota Surabaya	239.919.584.312	207.214.189.408	19.644.690.082	226.858.879.490
283	Kota Batu	17.665.453.631	8.483.550.669	8.066.414.810	16.549.965.479
284	**Provinsi Kalimantan Barat**	**139.147.201.439**	**66.403.462.146**	**62.177.776.218**	**128.581.238.364**
285	Kab. Bengkayang	29.533.129.954	3.938.573.183	22.884.550.019	26.823.123.202

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
286	Kab. Landak	30.832.923.460	4.196.592.344	24.186.273.184	28.382.865.528
287	Kab. Kapuas Hulu	33.168.489.179	5.040.517.640	26.980.815.514	32.021.333.154
288	Kab. Ketapang	73.101.208.368	8.884.347.256	57.374.138.451	66.258.485.707
289	Kab. Pontianak	19.263.510.878	4.297.251.950	12.822.262.196	17.119.514.146
290	Kab. Sambas	35.775.687.475	5.776.098.912	26.296.156.776	32.072.255.688
291	Kab. Sanggau	46.339.477.891	7.724.644.218	34.430.082.620	42.154.726.838
292	Kab. Sintang	33.897.247.654	6.370.038.295	26.461.404.149	32.831.442.444
293	Kota Pontianak	42.134.611.280	28.331.845.062	10.966.278.597	39.298.123.659
294	Kota Singkawang	20.168.726.613	4.854.628.064	13.057.326.321	17.911.954.385
295	Kab. Kayong Utara	22.176.042.794	2.766.159.287	17.149.641.749	19.915.801.036
296	Kab. Kubu Raya	28.585.606.253	11.286.102.324	15.162.162.290	26.448.264.614
297	Kab. Sekadau	22.160.382.257	4.198.494.548	16.371.556.728	20.570.051.276
298	Kab. Melawi	26.582.264.494	3.314.593.626	21.265.811.723	24.580.405.349
299	**Provinsi Kalimantan Tengah**	**153.434.266.180**	**60.208.376.082**	**84.541.162.274**	**144.749.538.356**
300	Kab. Barito Selatan	34.737.700.311	4.547.467.104	27.531.347.588	32.078.814.692
301	Kab. Barito Utara	53.970.418.592	5.320.317.622	43.447.280.744	48.767.598.366
302	Kab. Kapuas	28.469.524.469	4.207.246.590	31.969.394.458	36.176.641.048
303	Kab. Kotawaringin Barat	30.745.307.590	9.358.297.602	22.159.265.979	31.517.563.581
304	Kab. Kotawaringin Timur	63.885.362.635	14.192.537.281	46.762.384.382	60.954.921.663
305	Kota Palangkaraya	31.725.287.919	17.243.417.594	11.834.627.636	29.078.045.230
306	Kab. Barito Timur	39.473.829.298	5.424.597.249	31.025.114.647	36.449.711.896
307	Kab. Murung Raya	56.929.348.594	8.464.971.989	42.856.273.996	51.321.245.985
308	Kab. Pulang Pisau	18.111.654.370	2.964.193.810	14.004.296.839	16.968.490.649
309	Kab. Gunung Mas	28.137.440.097	3.410.610.183	24.489.586.894	27.900.197.077
310	Kab. Lamandau	32.421.594.289	3.270.369.824	26.489.369.789	29.759.739.613
311	Kab. Sukamara	24.785.777.604	2.735.977.084	21.553.897.073	24.289.874.157
312	Kab. Katingan	29.537.870.366	3.503.073.732	24.203.505.276	27.706.579.008
313	Kab. Seruyan	51.623.843.644	5.902.759.761	43.179.204.616	49.081.964.377
314	**Provinsi Kalimantan Selatan**	**182.873.281.229**	**97.123.728.860**	**74.071.703.007**	**171.195.431.867**
315	Kab. Banjar	54.660.030.620	9.531.087.356	39.481.278.168	49.012.365.524
316	Kab. Barito Kuala	37.481.954.112	5.515.409.926	27.915.791.995	33.431.201.921
317	Kab. Hulu Sungai Selatan	30.156.589.740	6.321.723.834	27.585.141.761	33.906.865.595
318	Kab. Hulu Sungai Tengah	21.099.904.530	6.756.655.443	12.952.533.119	19.709.188.562
319	Kab. Hulu Sungai Utara	29.274.318.435	5.847.237.287	20.712.880.696	26.560.117.983
320	Kab. Kotabaru	45.796.982.066	16.409.282.652	50.323.934.264	66.733.216.916
321	Kab. Tabalong	77.540.822.353	11.580.422.115	59.047.788.493	70.628.210.608
322	Kab. Tanah Laut	52.623.532.165	11.205.849.845	34.441.972.281	45.647.822.126
323	Kab. Tapin	46.740.059.588	7.153.530.496	34.752.331.564	41.905.862.060
324	Kota Banjarbaru	22.547.836.659	12.305.047.543	8.970.618.047	21.275.665.590
325	Kota Banjarmasin	48.920.616.930	36.816.859.063	9.233.154.479	46.050.013.542
326	Kab. Balangan	44.308.044.642	7.823.257.786	32.409.802.659	40.233.060.445
327	Kab. Tanah Bumbu	30.053.776.223	10.184.884.092	31.991.521.227	42.176.405.319
328	**Provinsi Kalimantan Timur**	**732.380.514.236**	**316.668.435.836**	**356.097.943.951**	**672.766.379.787**
329	Kab. Berau	67.739.489.051	22.431.346.151	40.319.405.029	62.750.751.180
330	Kab. Kutai Kartanegara	1.001.563.176.850	67.285.801.479	830.374.827.312	897.660.628.791
331	Kab. Kutai Barat	75.474.015.223	25.075.478.115	45.649.021.641	70.724.499.756
332	Kab. Kutai Timur	215.456.332.006	46.879.662.556	152.457.356.778	199.337.019.334
333	Kab. Mahakam Ulu	26.198.456.323	13.936.516.611	10.478.231.823	24.414.748.434
334	Kab. Pasir	106.616.521.998	26.719.096.433	72.086.410.439	98.805.506.872
335	Kota Balikpapan	184.634.351.998	140.217.597.180	32.090.547.209	172.308.144.389
336	Kota Bontang	190.199.415.584	62.236.052.750	110.015.562.392	172.251.615.142
337	Kota Samarinda	138.061.102.750	55.586.124.623	72.728.404.651	128.314.529.274
338	Kab. Penajam Paser Utara	122.226.913.047	17.173.982.733	95.417.739.052	112.591.721.785
339	**Provinsi Kalimantan Utara**	**114.176.825.644**	**18.010.782.013**	**86.837.328.234**	**104.848.110.247**
340	Kab. Bulungan	151.792.349.509	6.763.742.491	132.686.991.575	139.450.734.066
341	Kab. Malinau	55.224.400.193	4.233.316.859	45.809.356.467	50.042.673.326
342	Kab. Nunukan	108.412.413.344	4.321.162.043	93.922.628.248	98.243.790.291

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
343	Kab. Tana Tidung	28.590.749.141	3.005.826.098	23.356.561.477	26.362.387.575
344	Kota Tarakan	100.767.127.250	11.254.309.930	81.330.611.103	92.584.921.033
345	**Provinsi Sulawesi Utara**	**75.168.379.092**	**47.871.235.262**	**22.478.789.179**	**70.350.024.441**
346	Kab. Bolaang Mongondow	19.877.435.747	2.124.026.241	15.252.448.177	17.376.474.418
347	Kab. Minahasa	25.098.607.071	6.206.907.350	16.364.203.790	22.571.111.140
348	Kab. Sangihe	9.559.497.029	3.136.784.367	5.859.193.020	8.995.977.387
349	Kota Bitung	24.940.820.628	6.639.952.225	16.288.006.214	22.927.958.439
350	Kota Manado	40.829.083.874	23.483.075.213	13.696.502.105	37.179.577.318
351	Kab. Kepulauan Talaud	12.647.924.447	2.682.333.547	9.141.014.341	11.823.347.888
352	Kab. Minahasa Selatan	14.174.029.467	3.777.975.550	9.398.999.596	13.176.975.146
353	Kab. Minahasa Tenggara	16.734.609.902	2.679.645.153	12.270.770.621	14.950.415.774
354	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	9.538.528.766	2.122.940.851	6.763.981.200	8.886.922.051
355	Kota Kotamubagu	19.539.109.344	6.111.617.446	11.464.093.953	17.575.711.399
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur	15.509.510.921	2.328.441.821	11.290.750.371	13.619.192.192
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	14.023.116.212	1.814.916.839	10.551.535.513	12.366.452.352
358	Kota Tomohon	24.044.783.829	3.058.543.523	18.338.523.161	21.397.066.684
359	Kab. Minahasa Utara	19.508.274.470	8.752.659.175	10.303.851.974	19.056.511.149
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara	16.458.664.627	2.335.449.859	12.348.167.556	14.683.617.415
361	**Provinsi Gorontalo**	**25.033.093.278**	**14.035.240.566**	**9.123.646.000**	**23.158.886.566**
362	Kab. Boalemo	12.410.815.620	1.909.302.610	9.596.522.508	11.505.825.118
363	Kab. Gorontalo	17.275.559.071	3.785.052.779	11.523.443.453	15.308.496.232
364	Kota Gorontalo	16.117.825.393	9.247.990.726	5.777.778.307	15.025.769.033
365	Kab. Pohuwato	13.430.077.552	2.108.479.639	10.349.309.343	12.457.788.982
366	Kab. Gorontalo Utara	15.880.834.682	1.700.950.240	12.446.239.711	14.147.189.951
367	Kab. Bone Bolango	20.474.682.181	2.301.084.851	15.884.579.241	18.185.664.092
368	**Provinsi Sulawesi Tengah**	**66.155.888.157**	**31.083.098.140**	**31.195.683.467**	**62.278.781.607**
369	Kab. Banggai	39.821.365.768	9.439.796.989	26.221.936.834	35.661.733.823
370	Kab. Banggai Laut	5.789.257.497	1.312.374.657	4.088.281.766	5.400.656.423
371	Kab. Banggai Kepulauan	10.996.074.834	2.040.063.883	8.181.963.964	10.222.027.847
372	Kab. Buol	15.614.723.534	2.182.525.298	12.440.219.306	14.622.744.604
373	Kab. Toli-Toli	19.947.462.260	2.588.776.344	15.320.418.402	17.909.194.746
374	Kab. Donggala	19.247.421.349	2.319.076.669	15.602.675.108	17.921.751.777
375	Kab. Morowali	23.060.073.409	2.775.671.625	18.318.367.579	21.094.039.204
376	Kab. Morowali Utara	17.257.784.841	1.672.880.625	14.332.891.229	16.005.771.854
377	Kab. Poso	19.539.700.779	3.493.882.032	14.722.186.279	18.216.068.311
378	Kota Palu	20.978.754.279	13.499.525.414	6.622.377.524	20.121.902.938
379	Kab. Parigi Moutong	17.030.970.642	2.736.105.645	13.139.254.076	15.875.359.721
380	Kab. Sigi	16.922.470.172	1.948.994.928	13.191.242.377	15.140.237.305
381	Kab. Tojo Una Una	15.869.468.481	2.078.856.984	12.805.583.492	14.884.440.476
382	**Provinsi Sulawesi Selatan**	**230.984.260.166**	**144.455.014.617**	**72.361.270.383**	**216.816.285.000**
383	Kab. Bantaeng	20.649.613.818	3.742.791.261	14.970.866.853	18.713.658.114
384	Kab. Barru	16.232.748.596	4.481.215.590	10.716.838.680	15.198.054.270
385	Kab. Bone	46.473.063.025	8.274.429.070	34.412.174.020	42.686.603.090
386	Kab. Bulukumba	20.681.087.992	7.085.304.249	12.370.121.230	19.455.425.479
387	Kab. Enrekang	19.967.878.851	4.637.772.362	14.011.440.960	18.649.213.322
388	Kab. Gowa	18.751.832.964	4.214.741.813	13.339.410.948	17.554.152.761
389	Kab. Jeneponto	23.265.891.861	4.283.840.568	16.769.202.896	21.053.043.464
390	Kab. Luwu	15.646.281.091	4.299.305.414	10.236.295.679	14.535.601.093
391	Kab. Luwu Utara	22.594.496.146	5.043.332.002	15.884.027.467	20.927.359.469
392	Kab. Maros	20.054.964.370	6.973.211.499	11.483.192.658	18.456.404.157
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	28.927.405.243	10.769.329.633	16.498.561.895	27.267.891.528
394	Kab. Pinrang	17.878.251.225	5.524.493.650	11.261.008.274	16.785.501.924
395	Kab. Selayar	16.678.131.803	5.165.605.489	10.424.035.023	15.589.640.512
396	Kab. Sidenreng Rappang	22.308.423.820	5.420.429.363	15.429.140.372	20.849.569.735
397	Kab. Sinjai	15.394.563.373	4.324.573.874	10.055.431.507	14.380.005.381
398	Kab. Soppeng	16.671.928.410	4.963.505.710	10.556.548.107	15.520.053.817
399	Kab. Takalar	17.284.035.267	5.651.933.034	10.742.230.580	16.394.163.614

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
400	Kab. Tana Toraja	20.040.510.479	6.076.558.156	11.926.468.789	18.003.026.945
401	Kab. Wajo	74.294.659.770	7.027.127.312	61.650.561.479	68.677.688.791
402	Kota Pare-pare	20.343.736.895	6.737.031.455	11.852.942.172	18.589.973.627
403	Kab. Toraja Utara	11.437.623.800	3.438.923.191	7.232.874.163	10.671.797.354
404	Kota Makassar	90.179.229.821	71.680.216.509	13.917.621.476	85.597.837.985
405	Kota Palopo	15.863.962.353	7.209.874.581	7.513.553.871	14.723.428.452
406	Kab. Luwu Timur	56.708.947.549	22.863.906.254	29.756.601.095	52.620.507.349
407	**Provinsi Sulawesi Barat**	**31.051.432.939**	**8.554.835.162**	**20.194.562.953**	**28.749.398.115**
408	Kab. Majene	17.492.145.906	2.023.709.152	14.165.296.507	16.189.005.659
409	Kab. Mamuju	23.707.033.237	4.144.808.708	17.875.616.510	22.020.425.218
410	Kab. Mamuju Tengah	11.396.975.117	695.853.878	9.832.463.721	10.528.317.599
411	Kab. Polewali Mandar	17.498.006.744	3.497.631.271	12.709.625.000	16.207.256.271
412	Kab. Mamasa	14.184.959.523	1.100.243.679	12.036.127.452	13.136.371.131
413	Kab. Mamuju Utara	34.050.560.320	1.829.291.403	29.740.240.083	31.569.531.486
414	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	**67.339.215.799**	**30.933.517.128**	**31.543.825.964**	**62.477.343.092**
415	Kab. Buton	23.679.907.537	2.785.366.941	18.556.169.190	21.341.536.131
416	Kab. Konawe	12.027.008.014	2.994.320.021	8.170.939.213	11.165.259.234
417	Kab. Konawe Kepulauan	6.989.828.027	807.929.738	2.380.548.541	3.188.478.279
418	Kab. Kolaka	37.615.481.887	7.426.800.916	26.401.855.652	33.828.656.568
419	Kab. Kolaka Timur	3.549.905.344	815.681.742	5.797.914.398	6.613.596.140
420	Kab. Muna	12.770.129.570	3.096.378.853	8.820.695.272	11.917.074.125
421	Kota Kendari	25.057.411.256	14.768.557.029	8.906.152.258	23.674.709.287
422	Kota Bau-bau	14.997.184.885	3.524.460.133	10.457.159.073	13.981.619.206
423	Kab. Konawe Selatan	21.839.082.263	2.727.178.625	16.940.732.872	19.667.911.497
424	Kab. Bombana	16.359.199.590	2.132.516.196	13.144.744.682	15.277.260.878
425	Kab. Konawe Utara	18.656.279.452	1.548.675.777	16.022.843.894	17.571.519.671
426	Kab. Buton Utara	8.698.596.502	1.184.233.361	6.930.332.781	8.114.566.142
427	Kab. Wakatobi	12.533.064.520	1.728.231.981	9.926.857.275	11.655.089.256
428	Kab. Kolaka Utara	16.008.244.567	1.696.598.347	12.911.983.111	14.608.581.458
429	**Provinsi Bali**	**149.505.713.700**	**131.883.000.048**	**10.157.954.830**	**142.040.954.878**
430	Kab. Badung	59.273.015.131	49.623.409.348	5.966.034.572	55.589.443.920
431	Kab. Bangli	17.052.525.771	8.474.669.597	7.571.309.997	16.045.979.594
432	Kab. Buleleng	27.950.837.802	18.162.482.084	8.559.135.122	26.721.617.206
433	Kab. Gianyar	22.881.838.736	14.995.826.222	6.683.158.177	21.678.984.399
434	Kab. Jembrana	18.898.719.611	9.718.675.799	8.135.028.246	17.853.704.045
435	Kab. Karangasem	20.600.425.240	11.088.009.391	8.303.940.175	19.391.949.566
436	Kab. Klungkung	16.458.889.541	9.236.244.857	6.289.279.036	15.525.523.893
437	Kab. Tabanan	22.120.588.417	14.224.840.035	6.674.283.798	20.899.123.833
438	Kota Denpasar	73.096.334.443	62.624.068.168	7.248.558.597	69.872.626.765
439	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**83.676.611.361**	**59.138.891.000**	**19.543.195.399**	**78.682.086.399**
440	Kab. Bima	16.936.218.239	5.520.680.605	10.223.147.056	15.743.827.661
441	Kab. Dompu	14.927.243.990	4.650.327.763	9.261.428.862	13.911.756.625
442	Kab. Lombok Barat	16.403.545.666	6.606.377.052	8.660.229.485	15.266.606.537
443	Kab. Lombok Tengah	20.785.628.832	6.996.063.030	12.312.985.690	19.309.048.720
444	Kab. Lombok Timur	21.937.290.264	7.692.891.170	12.686.303.875	20.379.195.045
445	Kab. Sumbawa	22.236.651.545	5.281.876.023	15.470.389.796	20.752.265.819
446	Kota Mataram	28.025.680.713	18.637.259.344	7.636.264.652	26.273.523.996
447	Kab. Lombok Utara	14.810.960.082	3.023.642.433	10.182.384.312	13.206.026.745
448	Kota Bima	15.301.574.359	5.728.824.745	8.566.137.799	14.294.962.544
449	Kab. Sumbawa Barat	42.112.253.055	25.250.620.610	14.793.805.072	40.044.425.682
450	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	**71.543.609.060**	**36.897.899.344**	**29.906.695.168**	**66.804.594.512**
451	Kab. Alor	11.786.127.786	2.162.676.713	8.812.799.658	10.975.476.371
452	Kab. Belu	8.295.137.623	2.821.350.950	4.926.129.685	7.747.480.635
453	Kab. Ende	11.983.716.066	2.460.184.053	8.719.711.411	11.179.895.464
454	Kab. Flores Timur	18.345.812.967	2.473.806.128	14.000.701.898	16.474.508.026
455	Kab. Kupang	12.148.516.885	2.395.602.396	8.894.536.903	11.290.139.299
456	Kab. Lembata	16.025.340.782	1.751.071.524	12.471.798.555	14.222.870.079

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
457	Kab. Malaka	5.714.871.070	804.137.993	4.508.845.020	5.312.983.013
458	Kab. Manggarai	11.679.707.015	3.205.729.646	7.704.036.425	10.909.766.071
459	Kab. Ngada	14.031.089.833	1.626.289.082	10.768.598.763	12.394.887.845
460	Kab. Sikka	12.385.330.269	2.960.307.022	8.660.058.897	11.620.365.919
461	Kab. Sumba Barat	8.582.077.889	1.706.013.974	6.325.630.276	8.031.644.250
462	Kab. Sumba Timur	15.847.485.406	2.943.589.913	11.810.579.143	14.754.169.056
463	Kab. Timor Tengah Selatan	20.387.207.513	1.984.016.506	16.164.873.565	18.148.890.071
464	Kab. Timor Tengah Utara	19.297.253.306	2.236.131.425	14.888.372.893	17.124.504.318
465	Kota Kupang	24.310.524.506	16.157.925.462	6.540.274.147	22.698.199.609
466	Kab. Rote Ndao	15.461.452.291	1.453.749.169	12.361.787.079	13.815.536.248
467	Kab. Nagekeo	10.024.685.269	1.306.524.831	8.030.473.840	9.336.998.671
468	Kab. Sumba Tengah	9.684.313.187	1.223.293.279	7.799.445.179	9.022.738.458
469	Kab. Sumba Barat Daya	10.736.229.400	1.305.837.947	8.683.763.022	9.989.600.969
470	Kab. Manggarai Timur	9.935.505.542	1.161.188.024	8.072.381.198	9.233.569.222
471	Kab. Sabu Raijua	11.768.420.667	992.478.851	9.245.412.860	10.237.891.711
472	Kab. Manggarai Barat	11.183.033.538	1.610.078.894	8.802.995.050	10.413.073.944
473	**Provinsi Maluku**	**71.612.194.111**	**27.868.462.423**	**38.522.647.662**	**66.391.110.085**
474	Kab. Maluku Tenggara Barat	16.795.805.858	1.865.372.058	13.665.108.099	15.530.480.157
475	Kab. Maluku Tengah	28.628.966.423	3.457.440.970	23.044.375.958	26.501.816.928
476	Kab. Maluku Tenggara	17.725.860.653	3.042.463.238	13.389.908.277	16.432.371.515
477	Kab. Pulau Buru	19.656.894.425	2.053.582.619	15.540.811.967	17.594.394.586
478	Kota Ambon	39.312.768.771	19.921.967.052	15.914.820.002	35.836.787.054
479	Kab. Seram Bagian Barat	17.925.498.245	2.170.196.611	14.435.560.945	16.605.757.556
480	Kab. Seram Bagian Timur	57.783.943.914	1.525.733.732	51.482.145.388	53.007.879.120
481	Kab. Maluku Barat Daya	15.752.015.742	2.970.765.418	11.656.548.678	14.627.314.096
482	Kab. Buru Selatan	12.095.263.515	1.552.406.464	9.666.255.451	11.218.661.915
483	Kab. Kepulauan Aru	19.259.231.311	1.859.935.664	15.966.985.038	17.826.920.702
484	Kota Tual	9.479.095.879	1.382.829.791	7.441.316.872	8.824.146.663
485	**Provinsi Maluku Utara**	**51.601.573.080**	**22.984.112.180**	**24.999.360.459**	**47.983.472.639**
486	Kab. Halmahera Tengah	25.013.110.892	1.865.877.424	20.545.253.548	22.411.130.972
487	Kab. Halmahera Barat	18.192.348.075	2.203.393.732	14.603.560.348	16.806.954.080
488	Kota Ternate	25.456.839.014	7.526.834.557	16.190.545.018	23.717.379.575
489	Kab. Halmahera Timur	25.510.354.064	3.035.632.257	19.724.536.468	22.760.168.725
490	Kota Tidore Kepulauan	16.296.145.377	2.485.346.298	12.631.331.965	15.116.678.263
491	Kab. Kepulauan Sula	17.301.018.356	1.509.470.727	13.830.976.735	15.340.447.462
492	Kab. Pulau Morotai	14.833.295.005	1.346.702.808	11.792.919.630	13.139.622.438
493	Kab. Pulau Taliabu	6.657.199.819	1.245.307.259	4.930.281.693	6.175.588.952
494	Kab. Halmahera Selatan	21.972.900.376	1.754.118.869	19.826.133.514	21.580.252.383
495	Kab. Halmahera Utara	23.809.597.447	11.503.484.322	10.409.476.764	21.912.961.086
496	Kab. Yalimo	9.985.097.362	2.302.104.989	7.111.076.869	9.413.181.858
497	Kab. Lanny Jaya	11.230.443.766	2.432.049.174	8.126.803.654	10.558.852.828
498	**Provinsi Papua**	**260.780.399.096**	**134.741.655.365**	**115.573.747.850**	**250.315.403.215**
499	Kab. Biak Numfor	22.560.800.908	4.756.395.720	15.555.447.132	20.311.842.852
500	Kab. Jayapura	31.976.248.464	4.565.750.767	24.431.858.584	28.997.609.351
501	Kab. Jayawijaya	19.909.466.184	4.685.198.947	13.892.942.522	18.578.141.469
502	Kab. Merauke	48.073.270.234	9.410.960.306	33.974.640.931	43.385.601.237
503	Kab. Mimika	193.910.699.002	100.756.133.274	88.314.533.649	189.070.666.923
504	Kab. Nabire	26.805.270.412	4.009.836.190	20.120.031.991	24.129.868.181
505	Kab. Paniai	14.439.689.328	2.437.540.570	11.101.294.941	13.538.835.511
506	Kab. Puncak Jaya	24.432.120.136	2.667.769.789	19.258.624.117	21.926.393.906
507	Kab. Kepulauan Yapen	26.919.860.856	3.440.231.209	20.920.076.268	24.360.307.477
508	Kota Jayapura	45.999.759.003	24.995.285.284	16.575.743.900	41.571.029.184
509	Kab. Sarmi	22.031.425.552	2.667.995.560	18.092.980.046	20.760.975.606
510	Kab. Keerom	22.736.848.993	2.824.845.322	18.252.588.960	21.077.434.282
511	Kab. Yahukimo	24.824.314.697	2.280.080.321	20.664.908.670	22.944.988.991
512	Kab. Pegunungan Bintang	26.155.006.764	3.224.058.433	21.066.151.642	24.290.210.075
513	Kab. Tolikara	20.553.943.932	2.423.223.459	16.700.900.121	19.124.123.580

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2	3	4	5	4+5
514	Kab. Boven Digoel	31.088.539.212	3.213.866.266	26.787.550.913	30.001.417.179
515	Kab. Mappi	28.612.336.375	2.846.625.804	23.711.467.964	26.558.093.768
516	Kab. Asmat	26.159.637.669	3.399.664.199	20.913.297.987	24.312.962.186
517	Kab. Waropen	28.184.895.278	2.363.440.029	23.791.374.780	26.154.814.809
518	Kab. Mamberamo Raya	58.716.384.420	2.264.570.435	51.019.468.886	53.284.039.321
519	Kab. Mamberamo Tengah	8.758.745.580	2.129.098.194	6.154.497.530	8.283.595.724
520	Kab. Nduga	9.554.715.294	2.238.528.432	6.778.213.276	9.016.741.708
521	Kab. Dogiyai	13.555.982.455	2.362.494.438	10.343.823.428	12.706.317.866
522	Kab. Intan Jaya	13.972.394.396	2.423.754.643	10.709.372.088	13.133.126.731
523	Kab. Puncak	15.994.121.919	2.379.984.086	12.555.834.231	14.935.818.317
524	Kab. Deiyai	11.158.693.883	2.250.522.879	8.270.274.083	10.520.796.962
525	Kab. Supiori	13.684.722.906	2.365.863.353	10.458.316.627	12.824.179.980
526	**Provinsi Papua Barat**	**192.293.199.195**	**28.948.839.987**	**148.920.615.297**	**177.869.455.284**
527	Kab. Sorong	211.560.337.857	4.114.434.879	187.558.677.144	191.673.112.023
528	Kab. Manokwari	52.647.737.673	6.634.815.415	41.224.033.680	47.858.849.095
529	Kab. Manokwari Selatan	9.128.341.961	966.942.338	7.504.106.741	8.471.049.079
530	Kab. Fak Fak	46.419.521.900	2.962.052.318	39.933.384.631	42.895.436.949
531	Kota Sorong	39.147.315.292	9.354.947.705	26.251.430.716	35.606.378.421
532	Kab. Pegunungan Arfak	9.628.865.609	965.854.753	7.965.250.720	8.931.105.473
533	Kab. Sorong Selatan	41.164.502.008	1.998.032.918	36.011.214.668	38.009.247.586
534	Kab. Raja Ampat	53.772.073.045	2.024.960.236	46.858.355.199	48.883.315.435
535	Kab. Teluk Bintuni	212.440.857.764	11.753.428.781	184.719.697.894	196.473.126.675
536	Kab. Teluk Wondama	26.486.765.645	1.569.188.865	22.971.623.864	24.540.812.729
537	Kab. Tambrauw	17.803.577.946	1.264.608.888	15.239.711.643	16.504.320.531
538	Kab. Maybrat	19.451.316.250	1.085.060.620	16.933.247.225	18.018.307.845
539	Kab. Kaimana	29.091.600.615	1.826.552.471	25.165.568.596	26.992.121.067
540	**Sisa pagu yang tidak dialokasikan**	**243**	-		-
541	**Nilai belum teridentifikasi daerah penerima**				-
JUMLAH		**42.663.992.152.593**	**21.021.725.193.942**	**18.694.216.991.395**	**39.715.942.185.337**

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**	**1.056.698.167.937**	**477.939.645.839**	**573.094.945.516**	**5.590.251.137**	**23.348.640**	**49.977.099**	-	**1.056.698.168.231**
2	Kab. Aceh Barat	14.114.362.742	2.247.364.825	6.795.592.575	4.675.472.294	2.122.603	10.627.658	383.182.410	14.114.362.365
3	Kab. Aceh Besar	10.698.571.210	2.247.364.825	6.795.592.575	1.233.907.324	2.122.603	36.401.792	383.182.410	10.698.571.529
4	Kab. Aceh Selatan	10.626.857.885	2.247.364.825	6.795.592.575	1.103.953.527	2.122.603	94.641.565	383.182.410	10.626.857.505
5	Kab. Aceh Singkil	10.013.297.883	2.247.364.825	6.795.592.575	552.353.758	2.122.603	32.681.461	383.182.410	10.013.297.632
6	Kab. Aceh Tengah	12.280.267.678	2.247.364.825	6.795.592.575	2.837.011.971	2.122.603	14.993.500	383.182.410	12.280.267.884
7	Kab. Aceh Tenggara	10.092.520.257	2.247.364.825	6.795.592.575	659.713.961	2.122.603	4.543.371	383.182.410	10.092.519.745
8	Kab. Aceh Timur	9.850.444.740	2.248.161.534	6.795.592.575	348.879.332	2.122.603	72.506.054	383.182.410	9.850.444.508
9	Kab. Aceh Utara	182.855.518.673	32.644.889.361	149.503.029.656	294.831.401	2.122.603	27.463.171	383.182.410	182.855.518.602
10	Kab. Bireuen	9.822.317.566	2.247.364.825	6.795.592.575	387.164.201	2.122.603	6.890.678	383.182.410	9.822.317.292
11	Kab. Pidie	11.053.577.504	2.247.364.825	6.795.592.575	1.617.354.125	2.122.603	7.961.005	383.182.410	11.053.577.543
12	Kab. Simeulue	9.727.485.847	2.247.364.825	6.795.592.575	293.084.201	2.122.603	6.138.962	383.182.410	9.727.485.576
13	Kota Banda Aceh	9.725.890.257	2.247.364.825	6.795.592.575	293.084.201	2.122.603	4.543.371	383.182.410	9.725.889.985
14	Kota Sabang	9.770.464.934	2.247.364.825	6.795.592.575	293.084.201	46.697.280	4.543.371	383.182.410	9.770.464.662
15	Kota Langsa	9.846.787.082	2.247.364.825	6.795.592.575	293.084.201	2.122.603	125.440.196	383.182.410	9.846.786.810
16	Kota Lhokseumawe	9.725.890.257	2.247.364.825	6.795.592.575	293.084.201	2.122.603	4.543.371	383.182.410	9.725.889.985
17	Kab. Nagan Raya	12.349.812.533	2.247.364.825	6.795.592.575	2.780.576.387	2.122.603	140.973.712	383.182.410	12.349.812.512
18	Kab. Aceh Jaya	9.996.570.968	2.247.364.825	6.795.592.575	518.657.075	2.122.603	49.651.565	383.182.410	9.996.571.053
19	Kab. Pidie Jaya	9.750.934.257	2.247.364.825	6.795.592.575	318.128.297	2.122.603	4.543.371	383.182.410	9.750.934.081
20	Kab. Aceh Barat Daya	10.620.488.214	2.247.364.825	6.795.592.575	1.172.637.970	2.122.603	19.588.213	383.182.410	10.620.488.596
21	Kab. Gayo Lues	10.823.464.909	2.247.364.825	6.795.592.575	1.390.559.066	2.122.603	4.642.879	383.182.410	10.823.464.358
22	Kab. Aceh Tamiang	33.034.552.864	25.147.706.049	6.795.592.575	476.577.674	2.122.603	229.370.970	383.182.410	33.034.552.281
23	Kab. Bener Meriah	9.725.890.257	2.247.364.825	6.795.592.575	293.084.201	2.122.603	4.543.371	383.182.410	9.725.889.985
24	Kota Subulussalam	9.948.537.401	2.247.364.825	6.795.592.575	484.177.201	2.122.603	36.097.929	383.182.410	9.948.537.543
25	**Provinsi Sumatera Utara**	**23.310.178.413**	**3.555.030.374**	**2.925.185.955**	**6.710.503.154**	**406.726.498**	**9.712.732.152**	-	**23.310.178.131**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Kab. Asahan	1.727.765.352	222.190.399	182.824.246	267.735.748	25.420.406	646.411.732	383.182.410	1.727.764.941
27	Kab. Dairi	2.641.291.499	222.190.399	182.824.246	927.706.948	25.420.406	899.966.879	383.182.410	2.641.291.288
28	Kab. Deli Serdang	2.122.382.424	240.540.543	602.114.048	267.735.748	25.420.406	603.388.858	383.182.410	2.122.382.013
29	Kab. Karo	1.787.255.164	222.190.399	182.824.246	369.333.857	25.420.406	604.303.243	383.182.410	1.787.254.561
30	Kab. Labuhan Batu	1.719.263.663	222.190.399	182.824.246	267.735.748	25.420.406	637.910.043	383.182.410	1.719.263.252
31	Kab. Langkat	11.368.896.091	4.884.306.338	4.821.485.707	267.735.748	25.420.406	986.765.071	383.182.410	11.368.895.680
32	Kab. Mandailing Natal	7.513.366.782	222.190.399	182.824.246	3.440.324.608	813.452.992	2.471.392.186	383.182.410	7.513.366.841
33	Kab. Nias	1.684.742.478	222.190.399	182.824.246	267.735.748	25.420.406	603.388.858	383.182.410	1.684.742.067
34	Kab. Simalungun	13.688.538.597	222.190.399	182.824.246	267.735.748	25.420.406	12.607.184.975	383.182.410	13.688.538.184
35	Kab. Tapanuli Selatan	16.233.440.318	222.190.399	182.824.246	10.051.419.084	25.420.406	5.368.403.775	383.182.410	16.233.440.320
36	Kab. Tapanuli Tengah	2.319.603.706	222.190.399	182.824.246	902.596.616	25.420.406	603.388.858	383.182.410	2.319.602.935
37	Kab. Tapanuli Utara	4.662.263.635	222.190.399	182.824.246	1.965.028.556	25.420.406	1.883.616.944	383.182.410	4.662.262.961
38	Kab. Toba Samosir	2.117.161.980	222.190.399	182.824.246	417.699.268	25.420.406	885.844.361	383.182.410	2.117.161.090
39	Kota Binjai	3.057.657.905	985.510.423	792.419.649	267.735.748	25.420.406	603.388.858	383.182.410	3.057.657.494
40	Kota Medan	1.684.742.478	222.190.399	182.824.246	267.735.748	25.420.406	603.388.858	383.182.410	1.684.742.067
41	Kota Pematang Siantar	1.684.742.478	222.190.399	182.824.246	267.735.748	25.420.406	603.388.858	383.182.410	1.684.742.067
42	Kota Sibolga	1.684.742.478	222.190.399	182.824.246	267.735.748	25.420.406	603.388.858	383.182.410	1.684.742.067
43	Kota Tanjung Balai	1.684.742.478	222.190.399	182.824.246	267.735.748	25.420.406	603.388.858	383.182.410	1.684.742.067
44	Kab. Batu Bara	1.684.742.478	222.190.399	182.824.246	267.735.748	25.420.406	603.388.858	383.182.410	1.684.742.067
45	Kab. Labuhan Batu Utara	2.482.223.893	222.190.399	182.824.246	983.171.148	25.420.406	685.435.201	383.182.410	2.482.223.810
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	2.016.941.330	222.190.399	182.824.246	267.735.748	25.420.406	935.587.708	383.182.410	2.016.940.917
47	Kab. Padang Lawas Utara	1.689.899.963	227.347.884	182.824.246	267.735.748	25.420.406	603.388.858	383.182.410	1.689.899.552
48	Kab. Padang Lawas	8.127.667.962	2.387.342.553	182.824.246	267.735.748	25.420.406	4.881.162.187	383.182.410	8.127.667.550
49	Kab. Nias Utara	1.684.742.478	222.190.399	182.824.246	267.735.748	25.420.406	603.388.858	383.182.410	1.684.742.067
50	Kab. Nias Barat	1.684.742.478	222.190.399	182.824.246	267.735.748	25.420.406	603.388.858	383.182.410	1.684.742.067

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Kota Tebing Tinggi	1.684.742.478	222.190.399	182.824.246	267.735.748	25.420.406	603.388.858	383.182.410	1.684.742.067
52	Kota Padang Sidempuan	2.806.258.785	222.190.399	182.824.246	1.389.252.455	25.420.406	603.388.858	383.182.410	2.806.258.774
53	Kab. Pakpak Bharat	3.830.732.870	222.190.399	182.824.246	288.664.987	25.420.406	2.728.449.796	383.182.410	3.830.732.244
54	Kab. Nias Selatan	15.590.562.238	222.190.399	182.824.246	267.735.748	25.420.406	14.509.208.617	383.182.410	15.590.561.826
55	Kab. Humbang Hasundutan	4.190.855.297	222.190.399	182.824.246	267.735.748	25.420.406	3.109.501.679	383.182.410	4.190.854.888
56	Kab. Serdang Bedagai	1.684.742.478	222.190.399	182.824.246	267.735.748	25.420.406	603.388.858	383.182.410	1.684.742.067
57	Kab. Samosir	4.870.376.467	222.190.399	182.824.246	267.735.748	25.420.406	3.789.022.848	383.182.410	4.870.376.057
58	Kota Gunungsitoli	1.684.742.478	222.190.399	182.824.246	267.735.748	25.420.406	603.388.858	383.182.410	1.684.742.067
59	**Provinsi Sumatera Barat**	**16.385.839.873**	-	-	**13.691.997.623**	**209.328.000**	**2.484.513.752**	-	**16.385.839.375**
60	Kab. Lima Puluh Kota	2.292.358.206	-	-	1.605.631.015	23.258.666	280.286.389	383.182.410	2.292.358.480
61	Kab. Agam	2.168.795.843	-	-	1.443.092.615	23.258.666	319.262.645	383.182.410	2.168.796.336
62	Kab. Kepulauan Mentawai	10.872.269.002	-	-	1.432.499.207	23.258.666	9.033.328.807	383.182.410	10.872.269.090
63	Kab. Padang Pariaman	2.122.675.537	-	-	1.432.499.207	23.258.666	283.735.340	383.182.410	2.122.675.623
64	Kab. Pasaman	3.095.006.218	-	-	2.394.798.586	23.258.666	293.766.297	383.182.410	3.095.005.959
65	Kab. Pesisir Selatan	2.753.646.895	-	-	1.791.268.089	23.258.666	555.938.013	383.182.410	2.753.647.178
66	Kab. Sijunjung	13.271.378.187	-	-	5.810.443.910	23.258.666	7.054.492.943	383.182.410	13.271.377.929
67	Kab. Solok	4.659.711.977	-	-	3.952.551.229	23.258.666	300.719.512	383.182.410	4.659.711.817
68	Kab. Tanah Datar	2.157.312.605	-	-	1.453.815.979	23.258.666	297.055.789	383.182.410	2.157.312.844
69	Kota Bukit Tinggi	2.114.997.277	-	-	1.432.499.207	23.258.666	276.057.080	383.182.410	2.114.997.363
70	Kota Padang Panjang	2.114.997.277	-	-	1.432.499.207	23.258.666	276.057.080	383.182.410	2.114.997.363
71	Kota Padang	2.117.306.277	-	-	1.434.807.929	23.258.666	276.057.080	383.182.410	2.117.306.085
72	Kota Payakumbuh	2.114.997.277	-	-	1.432.499.207	23.258.666	276.057.080	383.182.410	2.114.997.363
73	Kota Sawahlunto	11.830.290.766	-	-	11.147.224.365	23.258.666	276.624.783	383.182.410	11.830.290.224
74	Kota Solok	2.114.997.277	-	-	1.432.499.207	23.258.666	276.057.080	383.182.410	2.114.997.363
75	Kota Pariaman	2.114.997.277	-	-	1.432.499.207	23.258.666	276.057.080	383.182.410	2.114.997.363

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	Kab. Pasaman Barat	3.115.096.884	-	-	1.734.578.490	23.258.666	974.077.358	383.182.410	3.115.096.924
77	Kab. Dharmasraya	10.957.777.470	-	-	8.997.367.738	23.258.666	1.553.969.224	383.182.410	10.957.778.038
78	Kab. Solok Selatan	13.112.863.529	-	-	2.858.164.550	418.656.000	9.452.860.430	383.182.410	13.112.863.390
79	**Provinsi Riau**	**2.698.594.352.756**	**2.659.665.459.524**	**2.869.662.676**	**13.964.001.005**	-	**22.095.229.620**	-	**2.698.594.352.825**
80	Kab. Bengkalis	2.636.766.125.862	2.611.552.315.810	521.757.031	2.242.506.350	-	22.066.364.347	383.182.410	2.636.766.125.948
81	Kab. Indragiri Hilir	526.114.673.535	483.575.538.457	521.757.031	6.984.542.513	-	34.649.653.004	383.182.410	526.114.673.415
82	Kab. Indragiri Hulu	520.650.993.747	493.250.604.640	521.757.031	19.180.561.571	-	7.314.887.966	383.182.410	520.650.993.618
83	Kab. Kampar	1.189.418.279.733	1.178.255.436.087	1.233.464.000	2.934.037.031	-	6.612.160.612	383.182.410	1.189.418.280.140
84	Kab. Kuantan Singingi	496.592.830.231	483.575.538.457	521.757.031	7.310.987.251	-	4.801.365.045	383.182.410	496.592.830.194
85	Kab. Pelalawan	520.194.518.246	488.058.617.533	4.051.810.899	2.277.933.847	-	25.422.973.642	383.182.410	520.194.518.331
86	Kab. Rokan Hilir	1.471.398.812.507	1.463.492.732.038	521.757.031	2.242.506.350	-	4.758.634.765	383.182.410	1.471.398.812.594
87	Kab. Rokan Hulu	510.985.135.725	503.066.821.508	521.757.031	2.346.448.440	-	4.666.926.903	383.182.410	510.985.136.292
88	Kab. Siak	1.455.668.341.703	1.442.627.165.591	521.757.031	2.242.491.631	-	9.893.745.125	383.182.410	1.455.668.341.788
89	Kota Dumai	497.441.677.738	483.575.538.457	521.757.031	2.242.506.350	-	10.718.693.575	383.182.410	497.441.677.823
90	Kota Pekanbaru	490.727.482.770	483.575.538.457	521.757.031	2.242.506.350	-	4.004.498.610	383.182.410	490.727.482.858
91	Kab. Kepulauan Meranti	542.988.319.036	524.055.994.041	1.422.980.000	3.480.067.350	-	13.646.094.907	383.182.410	542.988.318.708
92	**Provinsi Kepulauan Riau**	**719.802.916.342**	**219.737.164.663**	**456.333.425.488**	**43.653.639.261**	-	**78.687.018**	-	**719.802.916.430**
93	Kab. Bintan	231.311.190.393	72.722.373.999	136.717.096.958	21.462.308.767	-	26.229.006	383.182.410	231.311.191.140
94	Kab. Natuna	592.963.937.291	298.933.499.254	281.893.851.203	11.727.175.417	-	26.229.006	383.182.410	592.963.937.290
95	Kab. Karimun	241.113.857.772	72.722.373.999	136.717.096.958	31.129.151.568	-	162.052.356	383.182.410	241.113.857.291
96	Kota Batam	221.584.906.786	72.722.373.999	136.717.096.958	11.727.175.417	-	35.078.001	383.182.410	221.584.906.785
97	Kab. Kepulauan Anambas	421.554.146.870	194.528.363.830	214.889.196.206	11.727.175.417	-	26.229.006	383.182.410	421.554.146.869
98	Kota Tanjung Pinang	226.961.441.034	72.722.373.999	136.717.096.958	17.112.558.102	-	26.229.006	383.182.410	226.961.440.475
99	Kab. Lingga	235.040.074.573	72.722.373.999	136.717.096.958	25.062.124.583	-	155.296.680	383.182.410	235.040.074.630
100	**Provinsi Jambi**	**313.442.858.257**	**120.633.800.385**	**155.718.677.282**	**31.804.140.677**	-	**5.286.239.137**	-	**313.442.857.461**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	Kab. Batanghari	74.991.090.437	27.237.552.835	31.143.735.035	13.063.193.682	-	3.163.426.837	383.182.410	74.991.090.799
102	Kab. Bungo	87.181.698.474	24.126.760.070	31.143.735.035	26.907.483.995	-	4.620.537.568	383.182.410	87.181.699.078
103	Kab. Kerinci	62.398.818.461	24.126.760.070	31.143.735.035	5.699.104.215	-	1.046.036.645	383.182.410	62.398.818.375
104	Kab. Merangin	66.685.220.239	24.126.760.070	31.143.735.035	9.580.034.512	-	1.451.508.556	383.182.410	66.685.220.583
105	Kab. Muaro Jambi	84.463.432.449	40.451.064.551	31.991.606.539	8.173.073.945	-	3.464.505.812	383.182.410	84.463.433.257
106	Kab. Sarolangun	98.241.242.979	37.855.183.337	31.143.735.035	25.023.277.318	-	3.835.865.112	383.182.410	98.241.243.212
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	371.503.437.262	157.969.881.699	201.096.155.670	8.680.225.949	-	3.373.991.556	383.182.410	371.503.437.284
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	216.214.987.912	67.504.930.546	140.637.063.826	5.699.104.215	-	1.990.706.828	383.182.410	216.214.987.825
109	Kab. Tebo	81.139.902.279	24.126.760.070	31.143.735.035	13.223.993.966	-	12.262.230.568	383.182.410	81.139.902.049
110	Kota Jambi	69.165.677.645	30.882.786.120	31.143.735.035	5.699.104.215	-	1.056.869.777	383.182.410	69.165.677.557
111	Kota Sungai Penuh	62.398.686.298	24.126.760.070	31.143.735.035	5.699.104.215	-	1.045.904.482	383.182.410	62.398.686.212
112	**Provinsi Sumatera Selatan**	**1.385.670.591.526**	**295.516.185.340**	**862.069.556.773**	**219.557.640.701**	**228.873.024**	**8.298.335.121**	-	**1.385.670.590.959**
113	Kab. Lahat	339.677.065.203	48.383.843.513	144.873.968.631	144.169.122.718	137.895.996	1.729.052.700	383.182.410	339.677.065.968
114	Kab. Musi Banyuasin	1.854.650.494.982	332.226.768.561	1.403.111.427.750	103.345.023.784	32.696.146	15.551.396.772	383.182.410	1.854.650.495.423
115	Kab. Musi Rawas	312.211.592.977	60.263.191.111	222.656.523.878	25.770.652.925	24.185.746	3.305.447.428	191.591.205	312.211.592.293
116	Kab. Musi Rawas Utara	181.660.828.668	34.775.406.000	129.585.293.000	16.219.149.019	8.510.400	880.879.062	191.591.205	181.660.828.686
117	Kab. Muara Enim	441.511.007.205	118.479.987.069	144.649.032.724	176.186.197.831	269.706.927	1.734.491.529	191.591.205	441.511.007.285
118	Kab. Ogan Komering Ilir	204.721.446.843	42.216.597.761	123.152.794.253	34.385.281.802	32.696.146	4.550.894.663	383.182.410	204.721.447.035
119	Kab. Ogan Komering Ulu	240.860.929.518	65.243.419.802	131.455.293.140	42.603.942.665	32.696.146	1.142.395.649	383.182.410	240.860.929.812
120	Kota Palembang	196.805.368.829	42.216.597.761	123.152.794.253	29.877.702.968	32.696.146	1.142.395.649	383.182.410	196.805.369.187
121	Kota Pagar Alam	196.854.334.577	42.216.597.761	123.152.794.253	29.877.702.968	81.661.894	1.142.395.649	383.182.410	196.854.334.935
122	Kota Lubuk Linggau	196.805.368.829	42.216.597.761	123.152.794.253	29.877.702.968	32.696.146	1.142.395.649	383.182.410	196.805.369.187
123	Kota Prabumulih	216.863.742.120	57.381.862.490	127.782.236.688	30.139.895.177	32.696.146	1.143.869.655	383.182.410	216.863.742.566
124	Kab. Empat Lawang	198.034.025.829	42.216.597.761	123.152.794.253	31.106.359.544	32.696.146	1.142.395.649	383.182.410	198.034.025.763
125	Kab. Banyuasin	259.166.156.747	79.414.591.110	123.152.794.253	40.300.638.710	32.696.146	15.882.254.637	383.182.410	259.166.157.266

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126	Kab. Ogan Ilir	217.442.115.424	62.054.189.356	123.172.682.253	30.656.970.168	32.696.146	1.142.395.649	383.182.410	217.442.115.982
127	Kab. OKU Timur	202.540.507.331	42.216.597.761	123.152.794.253	35.607.317.414	32.696.146	1.147.919.357	383.182.410	202.540.507.341
128	Kab. OKU Selatan	197.972.194.678	42.216.597.761	123.152.794.253	31.019.191.416	32.696.146	1.167.733.010	383.182.410	197.972.194.996
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	110.612.683.361	28.325.298.000	35.769.419.000	45.446.219.724	33.873.520	846.281.634	191.591.205	110.612.683.083
130	**Provinsi Bangka Belitung**	**122.110.799.165**	**13.611.138.795**	-	**108.477.619.311**	-	**27.041.359**	-	**122.110.798.965**
131	Kab. Bangka	110.361.486.144	3.885.136.079	-	106.073.527.227	-	19.640.359	383.182.410	110.361.486.075
132	Kab. Belitung	44.818.371.519	3.885.136.079	-	40.516.391.417	-	33.661.544	383.182.410	44.818.371.450
133	Kota Pangkal Pinang	34.110.343.239	3.885.136.079	-	29.833.010.895	-	9.013.786	383.182.410	34.110.343.170
134	Kab. Bangka Selatan	47.568.641.815	3.885.136.079	-	43.291.309.471	-	9.013.786	383.182.410	47.568.641.746
135	Kab. Bangka Tengah	42.836.894.771	3.885.136.079	-	38.547.210.529	-	21.365.352	383.182.410	42.836.894.370
136	Kab. Bangka Barat	69.650.417.433	3.885.136.079	-	65.365.347.320	-	16.751.555	383.182.410	69.650.417.364
137	Kab. Belitung Timur	46.959.073.287	3.885.136.079	-	42.588.894.926	-	101.859.803	383.182.410	46.959.073.218
138	**Provinsi Bengkulu**	**44.907.411.767**	-	-	**44.821.605.903**	-	**85.805.415**	-	**44.907.411.318**
139	Kab. Bengkulu Selatan	10.295.034.289	-	-	9.788.092.040	-	123.759.174	383.182.410	10.295.033.624
140	Kab. Bengkulu Utara	52.627.010.583	-	-	51.656.185.567	-	587.641.776	383.182.410	52.627.009.753
141	Kab. Rejang Lebong	9.968.690.340	-	-	9.538.585.961	-	46.921.745	383.182.410	9.968.690.116
142	Kota Bengkulu	9.940.836.464	-	-	9.538.585.961	-	19.067.868	383.182.410	9.940.836.239
143	Kab. Kaur	11.489.554.560	-	-	11.051.256.398	-	55.115.998	383.182.410	11.489.554.806
144	Kab. Seluma	11.999.862.745	-	-	11.584.497.257	-	32.182.606	383.182.410	11.999.862.273
145	Kab. Mukomuko	10.504.478.408	-	-	10.058.142.761	-	63.152.814	383.182.410	10.504.477.985
146	Kab. Lebong	10.399.801.666	-	-	9.980.593.166	-	36.026.172	383.182.410	10.399.801.748
147	Kab. Bengkulu Tengah	47.038.801.933	-	-	46.611.028.786	-	44.590.679	383.182.410	47.038.801.875
148	Kab. Kepahiang	9.940.836.464	-	-	9.538.585.961	-	19.067.868	383.182.410	9.940.836.239
149	**Provinsi Lampung**	**140.709.618.779**	**130.164.212.615**	**6.352.621.800**	**1.576.741.300**	**2.145.936.581**	**470.106.217**	-	**140.709.618.513**
150	Kab. Lampung Barat	11.647.683.688	10.590.449.186	453.535.600	95.914.074	280.031.109	36.162.014	191.591.205	11.647.683.188

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151	Kab. Lampung Selatan	21.064.306.901	18.961.596.186	907.071.200	177.392.894	562.740.805	72.324.032	383.182.410	21.064.307.527
152	Kab. Lampung Tengah	20.948.549.489	18.961.596.186	907.071.200	294.231.661	330.144.088	72.324.032	383.182.410	20.948.549.577
153	Kab. Lampung Utara	20.870.344.489	18.961.596.186	907.071.200	216.026.444	330.144.088	72.324.032	383.182.410	20.870.344.360
154	Kab. Lampung Timur	84.631.520.059	82.787.332.756	907.071.200	151.465.927	330.144.088	72.324.032	383.182.410	84.631.520.413
155	Kab. Tanggamus	26.491.705.414	18.961.596.186	907.071.200	2.207.007.091	3.861.342.463	171.506.350	383.182.410	26.491.705.700
156	Kab. Tulang Bawang	21.373.932.489	18.961.596.186	907.071.200	719.614.855	330.144.088	72.324.032	383.182.410	21.373.932.771
157	Kab. Way Kanan	21.170.453.194	18.961.596.186	907.071.200	276.880.105	330.144.088	311.579.835	383.182.410	21.170.453.824
158	Kab. Pesawaran	20.957.157.601	18.961.596.186	907.071.200	302.840.514	330.144.088	72.324.032	383.182.410	20.957.158.430
159	Kab. Pesisir Barat	9.386.227.782	8.371.146.000	453.535.600	85.745.884	248.046.961	36.162.014	191.591.205	9.386.227.664
160	Kab. Pringsewu	20.833.427.142	18.961.596.186	907.071.200	179.109.102	330.144.088	72.324.032	383.182.410	20.833.427.018
161	Kab. Mesuji	22.417.488.091	18.961.596.186	907.071.200	1.134.538.183	330.144.088	700.956.634	383.182.410	22.417.488.701
162	Kab. Tulang Bawang Barat	20.805.783.489	18.961.596.186	907.071.200	151.465.927	330.144.088	72.324.032	383.182.410	20.805.783.843
163	Kota Bandar Lampung	20.806.423.489	18.961.596.186	907.071.200	152.105.927	330.144.088	72.324.032	383.182.410	20.806.423.843
164	Kota Metro	20.805.783.489	18.961.596.186	907.071.200	151.465.927	330.144.088	72.324.032	383.182.410	20.805.783.843
165	**Provinsi DKI Jakarta**	**312.478.953.549**	**290.515.003.518**	**19.662.295.800**	-	-	**2.559.665**	**2.299.094.566**	**312.478.953.549**
166	**Provinsi Jawa Barat**	**417.706.527.069**	**190.764.523.459**	**128.905.966.720**	**7.616.919.895**	**88.110.005.937**	**2.309.110.857**	-	**417.706.526.868**
167	Kab. Bandung	99.038.757.708	14.788.317.919	10.088.261.897	562.777.283	73.019.750.504	196.467.877	383.182.410	99.038.757.890
168	Kab. Bekasi	80.197.448.134	42.017.194.573	30.000.764.710	562.777.283	7.048.800.474	184.728.866	383.182.410	80.197.448.316
169	Kab. Bogor	95.153.427.491	14.788.317.919	10.088.261.897	11.782.458.526	57.865.726.160	245.480.561	383.182.410	95.153.427.473
170	Kab. Ciamis	19.208.540.194	8.222.185.919	5.508.179.897	506.432.691	3.535.171.352	1.244.978.721	191.591.205	19.208.539.785
171	Kab. Cianjur	35.660.946.434	14.788.317.919	10.088.261.897	2.136.558.454	7.048.800.474	1.215.825.079	383.182.410	35.660.946.233
172	Kab. Cirebon	33.059.049.353	14.788.317.919	10.088.261.897	562.777.283	7.048.800.474	187.709.553	383.182.410	33.059.049.536
173	Kab. Garut	47.826.259.348	14.788.317.919	10.088.261.897	1.226.105.200	21.139.017.640	201.374.464	383.182.410	47.826.259.530
174	Kab. Indramayu	92.978.376.488	52.213.601.692	32.351.574.380	562.777.283	7.048.800.474	418.440.433	383.182.410	92.978.376.672
175	Kab. Karawang	61.821.577.594	24.340.387.997	29.293.920.132	562.777.283	7.048.800.474	192.509.481	383.182.410	61.821.577.777

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
176	Kab. Kuningan	33.263.529.641	14.788.317.919	10.088.261.897	562.777.283	7.201.551.677	239.438.639	383.182.410	33.263.529.825
177	Kab. Majalengka	35.021.247.377	15.870.923.796	10.946.136.907	562.777.283	7.052.942.454	205.284.709	383.182.410	35.021.247.559
178	Kab. Pangandaran	15.798.867.385	6.566.132.000	4.580.083.000	304.680.592	3.513.629.122	642.751.057	191.591.205	15.798.866.976
179	Kab. Purwakarta	33.352.207.131	14.788.317.919	10.088.261.897	569.659.306	7.176.631.163	346.154.620	383.182.410	33.352.207.315
180	Kab. Subang	83.914.589.986	17.706.503.249	57.628.502.687	562.777.283	7.322.959.887	310.664.652	383.182.410	83.914.590.168
181	Kab. Sukabumi	71.463.354.896	14.788.317.919	10.088.261.897	1.291.990.001	44.296.799.216	614.803.637	383.182.410	71.463.355.080
182	Kab. Sumedang	33.701.792.739	14.788.317.919	10.088.261.897	562.777.283	7.371.535.871	507.717.542	383.182.410	33.701.792.922
183	Kab. Tasikmalaya	34.780.511.875	14.788.317.919	10.088.261.897	2.140.304.284	7.048.800.474	331.645.073	383.182.410	34.780.512.057
184	Kab. Bandung Barat	33.300.131.336	14.788.317.919	10.088.261.897	569.376.283	7.211.826.105	259.166.905	383.182.410	33.300.131.519
185	Kota Bandung	33.056.068.667	14.788.317.919	10.088.261.897	562.777.283	7.048.800.474	184.728.866	383.182.410	33.056.068.849
186	Kota Bekasi	33.056.068.667	14.788.317.919	10.088.261.897	562.777.283	7.048.800.474	184.728.866	383.182.410	33.056.068.849
187	Kota Bogor	33.056.068.667	14.788.317.919	10.088.261.897	562.777.283	7.048.800.474	184.728.866	383.182.410	33.056.068.849
188	Kota Cirebon	33.056.068.667	14.788.317.919	10.088.261.897	562.777.283	7.048.800.474	184.728.866	383.182.410	33.056.068.849
189	Kota Depok	33.056.068.667	14.788.317.919	10.088.261.897	562.777.283	7.048.800.474	184.728.866	383.182.410	33.056.068.849
190	Kota Sukabumi	33.056.068.667	14.788.317.919	10.088.261.897	562.777.283	7.048.800.474	184.728.866	383.182.410	33.056.068.849
191	Kota Cimahi	33.056.068.667	14.788.317.919	10.088.261.897	562.777.283	7.048.800.474	184.728.866	383.182.410	33.056.068.849
192	Kota Tasikmalaya	33.083.883.794	14.788.317.919	10.088.261.897	562.777.283	7.048.800.474	212.543.993	383.182.410	33.083.883.976
193	Kota Banjar	33.947.304.770	14.788.317.919	10.088.261.897	562.777.283	7.048.800.474	1.075.964.971	383.182.410	33.947.304.954
194	**Provinsi Banten**	**3.678.244.122**	-	-	**2.839.801.648**	**350.112.000**	**488.330.241**	-	**3.678.243.889**
195	Kab. Lebak	2.063.736.418	-	-	1.364.579.756	100.032.000	215.942.636	383.182.410	2.063.736.802
196	Kab. Pandeglang	7.130.918.380	-	-	5.444.545.980	402.948.902	900.240.775	383.182.410	7.130.918.067
197	Kab. Serang	1.679.714.024	-	-	759.701.591	397.307.097	139.522.925	383.182.410	1.679.714.023
198	Kab. Tangerang	1.382.438.927	-	-	759.701.591	100.032.000	139.522.925	383.182.410	1.382.438.926
199	Kota Cilegon	1.382.438.927	-	-	759.701.591	100.032.000	139.522.925	383.182.410	1.382.438.926
200	Kota Tangerang	1.382.438.927	-	-	759.701.591	100.032.000	139.522.925	383.182.410	1.382.438.926

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
201	Kota Serang	1.382.438.927	-	-	759.701.591	100.032.000	139.522.925	383.182.410	1.382.438.926
202	Kota Tangerang Selatan	1.371.359.857	-	-	748.622.521	100.032.000	139.522.925	383.182.410	1.371.359.856
203	**Provinsi Jawa Tengah**	**13.904.937.240**	**4.036.956.693**	**961.848.127**	**1.684.401.122**	**231.235.200**	**6.990.496.210**	-	**13.904.937.352**
204	Kab. Banjarnegara	1.388.911.820	237.468.039	56.578.713	91.481.558	13.602.070	606.599.136	383.182.410	1.388.911.926
205	Kab. Banyumas	1.890.143.500	237.468.039	56.578.713	497.601.259	121.799.961	593.513.020	383.182.410	1.890.143.402
206	Kab. Batang	2.121.058.078	237.468.039	56.578.713	91.481.558	13.602.070	1.338.745.394	383.182.410	2.121.058.184
207	Kab. Blora	14.148.095.234	8.073.915.390	109.842.820	91.481.558	13.602.070	5.476.071.090	383.182.410	14.148.095.338
208	Kab. Boyolali	1.502.094.240	237.468.039	56.578.713	91.481.558	13.602.070	719.781.554	383.182.410	1.502.094.344
209	Kab. Brebes	1.864.937.635	237.468.039	56.578.713	91.481.558	62.865.871	1.033.361.149	383.182.410	1.864.937.740
210	Kab. Cilacap	4.612.589.513	237.468.039	56.578.713	2.904.853.549	13.602.070	1.016.904.120	383.182.410	4.612.588.901
211	Kab. Demak	1.196.211.850	237.468.039	56.578.713	91.481.558	13.602.070	413.899.164	383.182.410	1.196.211.954
212	Kab. Grobogan	2.580.630.790	237.468.039	56.578.713	91.481.558	13.602.070	1.798.318.106	383.182.410	2.580.630.896
213	Kab. Jepara	1.413.140.239	237.468.039	56.578.713	132.033.954	13.602.070	590.275.146	383.182.410	1.413.140.332
214	Kab. Karanganyar	1.195.490.920	237.468.039	56.578.713	91.481.558	13.602.070	413.178.235	383.182.410	1.195.491.025
215	Kab. Kebumen	1.352.141.873	237.468.039	56.578.713	113.409.270	13.602.070	547.901.951	383.182.410	1.352.142.453
216	Kab. Kendal	2.116.452.750	237.468.039	56.578.713	91.481.558	33.621.780	1.314.120.354	383.182.410	2.116.452.854
217	Kab. Klaten	1.193.532.796	237.468.039	56.578.713	91.481.558	13.602.070	411.220.111	383.182.410	1.193.532.901
218	Kab. Kudus	1.201.431.345	237.468.039	56.578.713	91.481.558	13.602.070	419.118.656	383.182.410	1.201.431.449
219	Kab. Magelang	1.213.988.968	237.468.039	56.578.713	91.481.558	13.602.070	431.676.284	383.182.410	1.213.989.074
220	Kab. Pati	1.702.898.349	237.468.039	56.578.713	91.481.558	13.602.070	920.585.664	383.182.410	1.702.898.454
221	Kab. Pekalongan	1.270.247.986	237.468.039	56.578.713	91.481.558	13.602.070	487.935.301	383.182.410	1.270.248.091
222	Kab. Pemalang	2.035.729.981	237.468.039	56.578.713	91.481.558	36.320.443	1.230.698.924	383.182.410	2.035.730.087
223	Kab. Purbalingga	1.254.692.693	237.468.039	56.578.713	91.481.558	30.860.333	455.321.744	383.182.410	1.254.692.797
224	Kab. Purworejo	1.299.226.266	237.468.039	56.578.713	91.481.558	13.602.070	516.913.580	383.182.410	1.299.226.370
225	Kab. Rembang	2.694.871.358	237.468.039	56.578.713	91.481.558	13.602.070	1.912.558.672	383.182.410	2.694.871.462

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
226	Kab. Semarang	1.454.005.232	237.468.039	56.578.713	91.481.558	187.948.478	497.346.139	383.182.410	1.454.005.337
227	Kab. Sragen	1.196.650.847	237.468.039	56.578.713	91.481.558	13.602.070	414.338.163	383.182.410	1.196.650.953
228	Kab. Sukoharjo	1.193.518.342	237.468.039	56.578.713	91.481.558	13.602.070	411.205.657	383.182.410	1.193.518.447
229	Kab. Tegal	1.864.538.186	237.468.039	56.578.713	91.481.558	70.665.953	1.025.161.617	383.182.410	1.864.538.290
230	Kab. Temanggung	1.255.959.125	237.468.039	56.578.713	91.481.558	13.602.070	473.646.440	383.182.410	1.255.959.230
231	Kab. Wonogiri	1.484.586.503	237.468.039	56.578.713	333.432.595	13.602.070	460.322.921	383.182.410	1.484.586.748
232	Kab. Wonosobo	1.326.139.375	237.468.039	56.578.713	91.481.558	13.602.070	543.826.689	383.182.410	1.326.139.479
233	Kota Magelang	1.193.518.342	237.468.039	56.578.713	91.481.558	13.602.070	411.205.657	383.182.410	1.193.518.447
234	Kota Pekalongan	1.193.518.342	237.468.039	56.578.713	91.481.558	13.602.070	411.205.657	383.182.410	1.193.518.447
235	Kota Salatiga	1.193.518.342	237.468.039	56.578.713	91.481.558	13.602.070	411.205.657	383.182.410	1.193.518.447
236	Kota Semarang	3.031.059.020	237.468.039	1.870.433.149	91.481.558	13.602.070	434.891.900	383.182.410	3.031.059.126
237	Kota Surakarta	1.193.518.342	237.468.039	56.578.713	91.481.558	13.602.070	411.205.657	383.182.410	1.193.518.447
238	Kota Tegal	1.193.518.342	237.468.039	56.578.713	91.481.558	13.602.070	411.205.657	383.182.410	1.193.518.447
239	**Provinsi DI Yogyakarta**	**21.774.049**	-	-	**19.578.259**	-	**2.196.047**	-	**21.774.306**
240	Kab. Bantul	384.559.113	-	-	-	-	1.376.701	383.182.410	384.559.111
241	Kab. Gunung Kidul	387.150.562	-	-	-	-	3.968.150	383.182.410	387.150.560
242	Kab. Kulon Progo	462.738.703	-	-	78.313.042	-	1.243.291	383.182.410	462.738.743
243	Kab. Sleman	384.280.434	-	-	-	-	1.098.023	383.182.410	384.280.433
244	Kota Yogyakarta	384.280.434	-	-	-	-	1.098.023	383.182.410	384.280.433
245	**Provinsi Jawa Timur**	**393.837.376.458**	**338.622.551.364**	**47.880.613.522**	**1.037.209.819**	**317.520.000**	**5.979.481.498**	-	**393.837.376.203**
246	Kab. Bangkalan	32.237.754.861	26.685.105.300	4.753.069.022	42.227.010	17.163.243	357.008.043	383.182.410	32.237.755.028
247	Kab. Banyuwangi	24.606.605.242	18.283.783.314	2.374.891.304	442.760.238	289.108.810	2.832.878.666	383.182.410	24.606.604.742
248	Kab. Blitar	22.102.525.136	18.283.783.314	2.374.891.304	370.502.710	17.163.243	673.002.463	383.182.410	22.102.525.444
249	Kab. Bojonegoro	637.028.580.958	628.213.489.854	7.205.303.812	42.227.010	17.163.243	1.167.214.795	383.182.410	637.028.581.124
250	Kab. Bondowoso	21.659.230.007	18.283.783.314	2.374.891.304	42.227.010	152.358.103	422.788.033	383.182.410	21.659.230.174

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
251	Kab. Gresik	32.339.958.280	26.404.294.326	5.041.640.930	42.227.010	17.163.243	451.450.528	383.182.410	32.339.958.447
252	Kab. Jember	23.700.812.859	18.283.783.314	2.374.891.304	203.483.995	17.163.243	2.438.308.972	383.182.410	23.700.813.238
253	Kab. Jombang	21.737.139.832	18.283.783.314	2.374.891.304	39.225.466	17.163.243	638.894.263	383.182.410	21.737.140.000
254	Kab. Kediri	22.107.897.660	18.283.783.314	2.374.891.304	42.227.010	17.163.243	1.006.650.546	383.182.410	22.107.897.827
255	Kab. Lamongan	21.823.170.060	18.283.783.314	2.374.891.304	42.227.010	17.163.243	721.922.946	383.182.410	21.823.170.227
256	Kab. Lumajang	22.869.261.316	18.283.783.314	2.374.891.304	931.782.613	17.163.243	878.458.861	383.182.410	22.869.261.745
257	Kab. Madiun	23.072.436.314	18.283.783.314	2.374.891.304	42.227.010	87.387.859	1.900.964.583	383.182.410	23.072.436.480
258	Kab. Magetan	21.455.277.092	18.283.783.314	2.374.891.304	42.227.010	17.163.243	354.029.977	383.182.410	21.455.277.258
259	Kab. Malang	21.800.312.198	18.283.783.314	2.374.891.304	42.227.010	17.163.243	699.065.083	383.182.410	21.800.312.364
260	Kab. Mojokerto	21.517.489.749	18.283.783.314	2.374.891.304	41.987.393	17.163.243	416.482.251	383.182.410	21.517.489.915
261	Kab. Nganjuk	21.857.652.563	18.283.783.314	2.374.891.304	42.227.010	17.163.243	756.405.450	383.182.410	21.857.652.731
262	Kab. Ngawi	22.178.871.173	18.283.783.314	2.374.891.304	42.227.010	17.163.243	1.077.624.060	383.182.410	22.178.871.341
263	Kab. Pacitan	21.843.658.156	18.283.783.314	2.374.891.304	459.796.656	17.163.243	324.641.243	383.182.410	21.843.658.170
264	Kab. Pamekasan	21.425.183.292	18.283.783.314	2.374.891.304	42.227.010	17.163.243	323.936.178	383.182.410	21.425.183.459
265	Kab. Pasuruan	21.473.588.796	18.283.783.314	2.374.891.304	42.227.010	17.163.243	372.341.683	383.182.410	21.473.588.964
266	Kab. Ponorogo	21.775.186.244	18.283.783.314	2.374.891.304	42.356.664	155.382.129	535.590.589	383.182.410	21.775.186.410
267	Kab. Probolinggo	21.528.159.572	18.283.783.314	2.374.891.304	42.227.010	17.163.243	426.912.459	383.182.410	21.528.159.740
268	Kab. Sampang	21.424.462.327	18.283.783.314	2.374.891.304	42.227.010	17.163.243	323.215.213	383.182.410	21.424.462.494
269	Kab. Sidoarjo	22.433.003.427	18.300.737.314	3.366.478.404	42.227.010	17.163.243	323.215.213	383.182.410	22.433.003.594
270	Kab. Situbondo	21.532.993.337	18.283.783.314	2.374.891.304	42.227.010	19.456.069	429.453.396	383.182.410	21.532.993.503
271	Kab. Sumenep	22.253.963.001	18.509.102.407	2.856.166.134	42.227.010	17.163.243	446.121.963	383.182.410	22.253.963.167
272	Kab. Trenggalek	21.854.820.275	18.283.783.314	2.374.891.304	338.210.064	17.163.243	457.590.556	383.182.410	21.854.820.891
273	Kab. Tuban	37.535.433.319	33.006.987.391	2.374.891.304	42.227.010	17.163.243	1.710.982.129	383.182.410	37.535.433.487
274	Kab. Tulungagung	21.623.049.405	18.283.783.314	2.374.891.304	102.851.494	17.163.243	461.178.063	383.182.410	21.623.049.828
275	Kota Blitar	21.424.462.327	18.283.783.314	2.374.891.304	42.227.010	17.163.243	323.215.213	383.182.410	21.424.462.494

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
276	Kota Kediri	21.424.462.327	18.283.783.314	2.374.891.304	42.227.010	17.163.243	323.215.213	383.182.410	21.424.462.494
277	Kota Madiun	21.424.462.327	18.283.783.314	2.374.891.304	42.227.010	17.163.243	323.215.213	383.182.410	21.424.462.494
278	Kota Malang	21.424.462.327	18.283.783.314	2.374.891.304	42.227.010	17.163.243	323.215.213	383.182.410	21.424.462.494
279	Kota Mojokerto	21.424.279.786	18.283.783.314	2.374.891.304	42.044.469	17.163.243	323.215.213	383.182.410	21.424.279.953
280	Kota Pasuruan	21.424.462.327	18.283.783.314	2.374.891.304	42.227.010	17.163.243	323.215.213	383.182.410	21.424.462.494
281	Kota Probolinggo	21.424.462.327	18.283.783.314	2.374.891.304	42.227.010	17.163.243	323.215.213	383.182.410	21.424.462.494
282	Kota Surabaya	21.424.462.327	18.283.783.314	2.374.891.304	42.227.010	17.163.243	323.215.213	383.182.410	21.424.462.494
283	Kota Batu	21.430.415.721	18.283.783.314	2.374.891.304	42.227.010	17.163.243	329.168.606	383.182.410	21.430.415.887
284	**Provinsi Kalimantan Barat**	**51.290.078.758**	-	-	**36.832.155.764**	-	**14.457.923.652**	-	**51.290.079.416**
285	Kab. Bengkayang	63.457.282.434	-	-	4.719.503.331	-	58.354.596.267	383.182.410	63.457.282.008
286	Kab. Landak	61.208.616.243	-	-	8.079.605.833	-	52.745.828.263	383.182.410	61.208.616.506
287	Kab. Kapuas Hulu	65.058.771.422	-	-	9.505.661.440	-	55.169.927.757	383.182.410	65.058.771.607
288	Kab. Ketapang	86.495.683.232	-	-	50.653.876.629	-	35.458.624.603	383.182.410	86.495.683.642
289	Kab. Pontianak	11.932.387.276	-	-	4.477.708.490	-	7.071.496.423	383.182.410	11.932.387.323
290	Kab. Sambas	18.597.251.974	-	-	3.953.924.090	-	14.260.144.944	383.182.410	18.597.251.444
291	Kab. Sanggau	27.805.369.815	-	-	25.427.102.203	-	1.995.085.079	383.182.410	27.805.369.692
292	Kab. Sintang	10.949.240.656	-	-	6.846.895.849	-	3.719.162.021	383.182.410	10.949.240.280
293	Kota Pontianak	9.162.428.453	-	-	3.697.358.522	-	5.081.887.423	383.182.410	9.162.428.355
294	Kota Singkawang	42.480.752.747	-	-	3.698.170.543	-	38.399.399.694	383.182.410	42.480.752.647
295	Kab. Kayong Utara	9.090.900.519	-	-	6.220.580.305	-	2.487.137.052	383.182.410	9.090.899.767
296	Kab. Kubu Raya	9.333.787.518	-	-	4.675.540.090	-	4.275.064.487	383.182.410	9.333.786.987
297	Kab. Sekadau	11.612.881.488	-	-	3.954.824.229	-	7.274.874.464	383.182.410	11.612.881.103
298	Kab. Melawi	22.927.200.466	-	-	8.546.168.954	-	13.997.648.876	383.182.410	22.927.200.240
299	**Provinsi Kalimantan Tengah**	**172.723.133.799**	**73.055.500**	-	**170.654.992.965**	-	**1.995.085.079**	-	**172.723.133.544**
300	Kab. Barito Selatan	45.945.110.228	11.238.500	-	43.955.604.356	-	1.995.085.079	383.182.410	45.945.110.345

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
301	Kab. Barito Utara	82,512,107,212	14,259,000	-	80,119,580,831	-	1,995,085,079	383,182,410	82,512,107,320
302	Kab. Kapuas	101,536,453,417	11,238,500	-	72,224,203,522	-	28,917,828,718	383,182,410	101,536,453,150
303	Kab. Kotawaringin Barat	55,756,977,606	11,238,500	-	53,351,880,121	-	2,010,676,700	383,182,410	55,756,977,731
304	Kab. Kotawaringin Timur	61,222,813,762	11,238,500	-	43,674,142,796	-	17,154,250,604	383,182,410	61,222,814,310
305	Kota Palangkaraya	52,282,010,710	11,238,500	-	24,369,942,581	-	27,517,647,283	383,182,410	52,282,010,774
306	Kab. Barito Timur	63,975,559,256	146,111,700	-	58,833,594,397	-	4,612,670,806	383,182,410	63,975,559,313
307	Kab. Murung Raya	171,613,290,571	11,238,500	-	136,832,700,483	-	34,386,168,935	383,182,410	171,613,290,328
308	Kab. Pulang Pisau	46,759,031,245	11,238,500	-	23,561,507,511	-	22,803,102,662	383,182,410	46,759,031,083
309	Kab. Gunung Mas	41,269,686,345	11,238,500	-	30,928,507,691	-	9,946,757,586	383,182,410	41,269,686,187
310	Kab. Lamandau	41,726,548,429	11,238,500	-	27,037,226,261	-	14,294,901,182	383,182,410	41,726,548,353
311	Kab. Sukamara	28,197,223,614	11,238,500	-	24,176,171,347	-	3,626,631,204	383,182,410	28,197,223,461
312	Kab. Katingan	43,282,709,291	11,238,500	-	39,137,121,200	-	3,751,167,560	383,182,410	43,282,709,670
313	Kab. Seruyan	57,291,681,128	11,238,500	-	25,066,788,607	-	31,830,471,203	383,182,410	57,291,680,720
314	**Provinsi Kalimantan Selatan**	**598,929,612,942**	**13,441,230,596**	-	**581,882,508,806**	-	**3,605,873,709**	-	**598,929,612,911**
315	Kab. Banjar	202,977,917,819	2,240,205,264	-	168,721,175,784	-	31,633,354,215	383,182,410	202,977,917,673
316	Kab. Barito Kuala	116,791,821,392	2,240,205,264	-	95,832,740,021	-	18,335,693,910	383,182,410	116,791,821,605
317	Kab. Hulu Sungai Selatan	120,781,033,929	2,240,205,264	-	114,560,738,819	-	3,596,908,156	383,182,410	120,781,034,649
318	Kab. Hulu Sungai Tengah	145,965,984,086	2,240,205,264	-	95,906,158,558	-	47,436,438,278	383,182,410	145,965,984,510
319	Kab. Hulu Sungai Utara	155,401,226,616	2,240,205,264	-	95,832,740,021	-	56,945,099,137	383,182,410	155,401,226,832
320	Kab. Kotabaru	286,600,825,176	2,240,205,264	-	282,678,987,962	-	1,298,449,884	383,182,410	286,600,825,520
321	Kab. Tabalong	249,084,901,899	24,996,049,632	-	223,485,414,745	-	220,254,779	383,182,410	249,084,901,566
322	Kab. Tanah Laut	295,581,370,245	2,240,205,264	-	292,678,911,503	-	279,071,363	383,182,410	295,581,370,540
323	Kab. Tapin	241,437,052,655	2,240,205,264	-	238,618,125,030	-	195,540,313	383,182,410	241,437,053,017
324	Kota Banjarbaru	98,840,679,064	2,240,205,264	-	96,021,751,157	-	195,540,313	383,182,410	98,840,679,144
325	Kota Banjarmasin	98,651,667,792	2,240,205,264	-	95,832,740,021	-	195,540,313	383,182,410	98,651,668,008

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
326	Kab. Balangan	201,461,283,173	4,904,355,004	-	195,286,530,476	-	887,214,847	383,182,410	201,461,282,737
327	Kab. Tanah Bumbu	338,087,676,064	2,240,205,264	-	332,074,020,302	-	3,390,267,968	383,182,410	338,087,675,944
328	**Provinsi Kalimantan Timur**	**3,489,923,547,848**	**567,911,257,278**	**1,748,673,065,577**	**1,172,995,417,898**	-	**343,807,465**	-	**3,489,923,548,218**
329	Kab. Berau	1,010,166,685,160	110,467,092,705	341,131,448,761	557,989,420,722	-	195,540,313	383,182,410	1,010,166,684,911
330	Kab. Kutai Kartanegara	4,155,637,840,247	716,468,661,959	2,529,774,910,202	908,815,545,676	-	195,540,313	383,182,410	4,155,637,840,560
331	Kab. Kutai Barat	603,729,410,969	61,076,104,705	187,370,141,761	354,698,389,982	-	201,591,642	383,182,410	603,729,410,500
332	Kab. Kutai Timur	1,770,461,369,310	117,591,395,063	341,131,448,761	1,311,158,987,435	-	196,355,274	383,182,410	1,770,461,368,943
333	Kab. Mahakam Ulu	327,966,672,247	49,390,988,000	153,761,307,000	120,989,912,041	-	3,441,282,833	383,182,410	327,966,672,284
334	Kab. Pasir	973,626,750,650	110,467,092,705	341,131,448,761	478,981,434,628	-	42,663,592,585	383,182,410	973,626,751,089
335	Kota Balikpapan	753,628,742,751	110,467,092,705	341,131,448,761	232,184,431,987	-	69,462,586,887	383,182,410	753,628,742,750
336	Kota Bontang	723,961,448,977	125,105,845,881	347,426,589,783	232,198,830,659	-	19,038,591,464	191,591,205	723,961,448,992
337	Kota Samarinda	843,811,796,091	115,112,309,413	355,297,955,364	311,364,256,805	-	61,654,092,145	383,182,410	843,811,796,137
338	Kab. Penajam Paser Utara	803,447,686,803	134,116,379,743	370,952,997,606	243,185,651,943	-	55,001,066,775	191,591,205	803,447,687,272
339	**Provinsi Kalimantan Utara**	**1,112,688,606,532**	**175,524,506,000**	**546,394,506,000**	**358,611,411,010**	-	**32,158,183,532**	-	**1,112,688,606,542**
340	Kab. Bulungan	793,364,353,480	143,984,034,798	342,856,325,494	272,275,528,266	-	33,865,282,140	383,182,410	793,364,353,108
341	Kab. Malinau	744,830,929,810	110,467,092,705	341,131,448,761	285,766,275,976	-	7,082,930,180	383,182,410	744,830,930,032
342	Kab. Nunukan	822,798,640,249	118,415,579,944	341,552,282,761	355,407,655,697	-	7,039,938,976	383,182,410	822,798,639,788
343	Kab. Tana Tidung	705,766,473,694	110,764,720,809	341,131,448,761	246,447,170,432	-	7,039,951,133	383,182,410	705,766,473,545
344	Kota Tarakan	722,775,253,924	136,808,159,711	341,276,809,599	232,181,978,317	-	12,125,123,885	383,182,410	722,775,253,922
345	**Provinsi Sulawesi Utara**	**14,761,225,491**	-	-	**13,681,523,961**	**996,737,313**	**82,963,832**	-	**14,761,225,106**
346	Kab. Bolaang Mongondow	2,521,758,176	-	-	1,984,248,268	142,391,044	11,936,422	383,182,410	2,521,758,144
347	Kab. Minahasa	2,968,641,237	-	-	1,792,591,917	781,014,880	11,851,974	383,182,410	2,968,641,181
348	Kab. Sangihe	2,386,657,401	-	-	1,849,231,917	142,391,044	11,851,974	383,182,410	2,386,657,345
349	Kota Bitung	4,912,711,781	-	-	4,375,286,499	142,391,044	11,851,974	383,182,410	4,912,711,927
350	Kota Manado	2,335,240,027	-	-	1,795,037,997	145,167,670	11,851,974	383,182,410	2,335,240,051

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
351	Kab. Kepulauan Talaud	2,779,475,401	-	-	2,242,049,709	142,391,044	11,851,974	383,182,410	2,779,475,137
352	Kab. Minahasa Selatan	3,025,213,387	-	-	2,479,273,139	150,906,029	11,851,974	383,182,410	3,025,213,552
353	Kab. Minahasa Tenggara	2,677,162,178	-	-	2,128,259,888	153,867,762	11,851,974	383,182,410	2,677,162,034
354	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	2,330,017,401	-	-	1,792,591,917	142,391,044	11,851,974	383,182,410	2,330,017,345
355	Kota Kotamubagu	2,330,017,401	-	-	1,792,591,917	142,391,044	11,851,974	383,182,410	2,330,017,345
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur	5,809,025,653	-	-	5,267,497,283	142,391,044	15,954,816	383,182,410	5,809,025,553
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	6,339,043,412	-	-	5,793,566,797	142,391,044	19,902,983	383,182,410	6,339,043,234
358	Kota Tomohon	3,476,393,464	-	-	1,792,591,917	1,288,767,107	11,851,974	383,182,410	3,476,393,408
359	Kab. Minahasa Utara	18,282,664,219	-	-	17,701,923,163	185,706,400	11,851,974	383,182,410	18,282,663,947
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2,877,319,415	-	-	1,950,392,301	142,391,044	401,353,988	383,182,410	2,877,319,743
361	**Provinsi Gorontalo**	**1,106,059,329**	-	-	**969,156,895**	-	**136,902,274**	-	**1,106,059,169**
362	Kab. Boalemo	602,766,101	-	-	46,658,976	-	172,924,691	383,182,410	602,766,077
363	Kab. Gorontalo	1,379,918,392	-	-	867,722,682	-	129,013,295	383,182,410	1,379,918,387
364	Kota Gorontalo	437,943,319	-	-	-	-	54,760,909	383,182,410	437,943,319
365	Kab. Pohuwato	6,420,986,838	-	-	1,237,491,180	-	4,800,313,720	383,182,410	6,420,987,310
366	Kab. Gorontalo Utara	1,119,710,607	-	-	593,244,252	-	143,283,784	383,182,410	1,119,710,446
367	Kab. Bone Bolango	1,557,591,575	-	-	1,102,546,430	-	71,662,815	383,182,410	1,557,591,655
368	**Provinsi Sulawesi Tengah**	**32,895,468,760**	**2,218,108,281**	**3,448,073,300**	**25,748,880,461**	-	**1,480,407,087**	-	**32,895,469,109**
369	Kab. Banggai	18,458,388,746	443,621,130	6,896,145,900	8,211,481,774	-	2,523,957,930	383,182,410	18,458,389,144
370	Kab. Banggai Laut	2,226,245,493	179,416,300	344,807,400	1,390,896,192	-	119,534,587	191,591,205	2,226,245,684
371	Kab. Banggai Kepulauan	3,571,947,960	264,204,830	344,807,400	2,578,166,994	-	193,177,743	191,591,205	3,571,948,172
372	Kab. Buol	9,088,929,302	443,621,130	689,614,800	4,705,573,976	-	2,866,937,856	383,182,410	9,088,930,174
373	Kab. Toli-Toli	8,998,368,455	443,621,130	689,614,800	5,988,616,158	-	1,493,333,843	383,182,410	8,998,368,341
374	Kab. Donggala	7,876,275,842	443,621,130	689,614,800	5,448,128,357	-	911,729,556	383,182,410	7,876,276,255
375	Kab. Morowali	28,391,394,358	2,356,220,441	344,807,400	23,836,414,180	-	1,662,361,135	191,591,205	28,391,394,361

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
376	Kab. Morowali Utara	19.654.589.687	2.079.995.400	344.807.400	16.503.152.159	-	535.043.681	191.591.205	19.654.589.845
377	Kab. Poso	8.991.242.044	443.621.130	689.614.800	5.324.219.730	-	2.150.603.900	383.182.410	8.991.241.970
378	Kota Palu	6.478.381.659	443.621.130	689.614.800	4.535.399.383	-	426.564.517	383.182.410	6.478.382.240
379	Kab. Parigi Moutong	8.183.911.693	443.621.130	689.614.800	6.186.660.381	-	480.832.996	383.182.410	8.183.911.717
380	Kab. Sigi	6.514.554.336	443.621.130	689.614.800	4.665.157.013	-	332.979.359	383.182.410	6.514.554.712
381	Kab. Tojo Una Una	16.030.191.545	443.621.130	689.614.800	13.662.709.213	-	851.064.352	383.182.410	16.030.191.905
382	**Provinsi Sulawesi Selatan**	**30.681.745.517**	-	**11.858.554.140**	**18.777.311.182**	-	**45.880.248**	-	**30.681.745.570**
383	Kab. Bantaeng	2.860.547.813	-	1.031.178.316	1.442.197.261	-	3.989.586	383.182.410	2.860.547.573
384	Kab. Barru	2.994.930.655	-	1.031.178.316	1.576.543.820	-	4.026.317	383.182.410	2.994.930.863
385	Kab. Bone	3.497.632.924	-	1.031.178.316	2.078.536.812	-	4.734.949	383.182.410	3.497.632.487
386	Kab. Bulukumba	3.073.903.778	-	1.031.178.316	1.655.553.226	-	3.989.586	383.182.410	3.073.903.538
387	Kab. Enrekang	3.039.716.768	-	1.031.178.316	1.619.797.720	-	5.558.541	383.182.410	3.039.716.987
388	Kab. Gowa	2.860.547.813	-	1.031.178.316	1.442.197.261	-	3.989.586	383.182.410	2.860.547.573
389	Kab. Jeneponto	2.860.547.813	-	1.031.178.316	1.442.197.261	-	3.989.586	383.182.410	2.860.547.573
390	Kab. Luwu	3.934.959.333	-	1.031.178.316	2.515.820.712	-	4.777.895	383.182.410	3.934.959.333
391	Kab. Luwu Utara	5.061.677.476	-	1.031.178.316	3.636.443.917	-	10.872.249	383.182.410	5.061.676.892
392	Kab. Maros	2.947.670.813	-	1.031.178.316	1.529.320.045	-	3.989.586	383.182.410	2.947.670.357
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	2.880.669.417	-	1.031.178.316	1.461.723.335	-	4.585.556	383.182.410	2.880.669.617
394	Kab. Pinrang	2.860.686.154	-	1.031.178.316	1.442.197.261	-	4.127.927	383.182.410	2.860.685.914
395	Kab. Selayar	3.610.548.517	-	1.031.178.316	2.192.197.618	-	3.989.586	383.182.410	3.610.547.930
396	Kab. Sidenreng Rappang	3.111.660.030	-	1.031.178.316	1.692.544.141	-	4.754.803	383.182.410	3.111.659.670
397	Kab. Sinjai	3.251.690.715	-	1.031.178.316	1.833.076.141	-	4.253.488	383.182.410	3.251.690.355
398	Kab. Soppeng	2.862.850.494	-	1.031.178.316	1.444.078.861	-	4.410.267	383.182.410	2.862.849.854
399	Kab. Takalar	2.860.586.813	-	1.031.178.316	1.442.235.832	-	3.989.586	383.182.410	2.860.586.144
400	Kab. Tana Toraja	2.942.368.183	-	1.031.178.316	1.522.806.699	-	5.200.118	383.182.410	2.942.367.543

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401	Kab. Wajo	25.563.995.777	-	23.717.108.280	1.459.714.957	-	3.989.586	383.182.410	25.563.995.233
402	Kota Pare-pare	2.860.547.813	-	1.031.178.316	1.442.197.261	-	3.989.586	383.182.410	2.860.547.573
403	Kab. Toraja Utara	12.850.014.871	-	1.031.178.316	11.431.664.085	-	3.989.586	383.182.410	12.850.014.397
404	Kota Makassar	2.860.547.813	-	1.031.178.316	1.442.197.261	-	3.989.586	383.182.410	2.860.547.573
405	Kota Palopo	3.186.036.813	-	1.031.178.316	1.767.685.837	-	3.989.586	383.182.410	3.186.036.149
406	Kab. Luwu Timur	27.610.559.149	-	1.031.178.316	25.826.987.267	-	369.211.827	383.182.410	27.610.559.820
407	**Provinsi Sulawesi Barat**	**2.455.800.384**	-	-	**1.902.448.479**	-	**553.352.073**	-	**2.455.800.552**
408	Kab. Majene	965.728.003	-	-	434.753.267	-	147.793.294	383.182.410	965.728.971
409	Kab. Mamuju	5.006.759.068	-	-	3.486.580.530	-	1.328.586.521	191.591.205	5.006.758.256
410	Kab. Mamuju Tengah	2.863.699.397	-	-	1.947.770.430	-	724.337.190	191.591.205	2.863.698.825
411	Kab. Polewali Mandar	1.570.869.694	-	-	1.040.877.277	-	146.810.407	383.182.410	1.570.870.094
412	Kab. Mamasa	1.683.994.286	-	-	215.772.659	-	1.085.039.574	383.182.410	1.683.994.643
413	Kab. Mamuju Utara	1.019.726.116	-	-	489.733.619	-	146.810.407	383.182.410	1.019.726.436
414	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	**61.153.215.403**	-	-	**60.589.549.368**	-	**563.665.781**	-	**61.153.215.149**
415	Kab. Buton	16.765.722.651	-	-	16.236.943.403	-	145.596.343	383.182.410	16.765.722.156
416	Kab. Konawe	16.109.532.549	-	-	15.338.498.962	-	579.441.703	191.591.205	16.109.531.870
417	Kab. Konawe Kepulauan	2.259.901.993	-	-	1.958.706.641	-	109.604.785	191.591.205	2.259.902.631
418	Kab. Kolaka	32.319.087.765	-	-	31.713.770.972	-	413.726.006	191.591.205	32.319.088.183
419	Kab. Kolaka Timur	17.569.244.280	-	-	17.054.532.664	-	323.120.071	191.591.205	17.569.243.940
420	Kab. Muna	11.820.935.923	-	-	10.454.540.782	-	983.212.839	383.182.410	11.820.936.031
421	Kota Kendari	10.853.750.200	-	-	10.359.915.118	-	110.653.118	383.182.410	10.853.750.646
422	Kota Bau-bau	10.935.722.615	-	-	10.442.016.948	-	110.523.386	383.182.410	10.935.722.744
423	Kab. Konawe Selatan	30.363.678.297	-	-	29.747.806.642	-	232.688.574	383.182.410	30.363.677.626
424	Kab. Bombana	22.585.675.550	-	-	22.051.440.962	-	151.052.637	383.182.410	22.585.676.009
425	Kab. Konawe Utara	36.268.071.334	-	-	34.505.416.956	-	1.379.471.198	383.182.410	36.268.070.564

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
426	Kab. Buton Utara	11.651.534.645	-	-	10.655.468.852	-	612.883.684	383.182.410	11.651.534.946
427	Kab. Wakatobi	10.845.581.768	-	-	10.359.915.118	-	102.484.686	383.182.410	10.845.582.214
428	Kab. Kolaka Utara	22.077.470.902	-	-	21.542.160.661	-	152.127.765	383.182.410	22.077.470.836
429	**Provinsi Bali**	-	-	-	-	-	-	-	-
430	Kab. Badung	383.182.410	-	-	-	-	-	383.182.410	383.182.410
431	Kab. Bangli	383.182.410	-	-	-	-	-	383.182.410	383.182.410
432	Kab. Buleleng	383.182.410	-	-	-	-	-	383.182.410	383.182.410
433	Kab. Gianyar	383.182.410	-	-	-	-	-	383.182.410	383.182.410
434	Kab. Jembrana	383.182.410	-	-	-	-	-	383.182.410	383.182.410
435	Kab. Karangasem	383.182.410	-	-	-	-	-	383.182.410	383.182.410
436	Kab. Klungkung	383.182.410	-	-	-	-	-	383.182.410	383.182.410
437	Kab. Tabanan	383.182.410	-	-	-	-	-	383.182.410	383.182.410
438	Kota Denpasar	383.182.410	-	-	-	-	-	383.182.410	383.182.410
439	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**27.281.794.674**	-	-	**27.108.044.519**	**64.881.600**	**108.868.903**	-	**27.281.795.022**
440	Kab. Bima	7.300.345.503	-	-	6.878.552.616	14.418.133	24.193.088	383.182.410	7.300.346.247
441	Kab. Dompu	6.967.766.650	-	-	6.430.627.623	129.763.197	24.193.088	383.182.410	6.967.766.318
442	Kab. Lombok Barat	6.126.771.307	-	-	5.704.977.374	14.418.133	24.193.088	383.182.410	6.126.771.005
443	Kab. Lombok Tengah	5.958.125.193	-	-	5.529.058.675	14.418.133	31.465.650	383.182.410	5.958.124.868
444	Kab. Lombok Timur	5.953.632.416	-	-	5.531.838.275	14.418.133	24.193.088	383.182.410	5.953.631.906
445	Kab. Sumbawa	9.588.061.243	-	-	8.915.121.703	14.418.133	275.339.156	383.182.410	9.588.061.402
446	Kota Mataram	5.950.852.632	-	-	5.529.058.675	14.418.133	24.193.088	383.182.410	5.950.852.306
447	Kab. Lombok Utara	5.950.852.632	-	-	5.529.058.675	14.418.133	24.193.088	383.182.410	5.950.852.306
448	Kota Bima	5.950.852.632	-	-	5.529.058.675	14.418.133	24.193.088	383.182.410	5.950.852.306
449	Kab. Sumbawa Barat	53.687.465.808	-	-	52.654.625.765	14.418.133	435.039.411	383.182.410	53.687.465.719
450	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	**3.012.010.853**	-	-	**2.698.346.178**	**247.867.200**	**65.797.795**	-	**3.012.011.173**

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
451	Kab. Alor	739.244.817	-	-	255.537.972	24.786.720	75.737.547	383.182.410	739.244.649
452	Kab. Belu	1.136.194.762	-	-	927.513.351	12.393.360	4.696.938	191.591.205	1.136.194.854
453	Kab. Ende	1.276.217.009	-	-	555.292.230	296.553.600	41.188.809	383.182.410	1.276.217.049
454	Kab. Flores Timur	502.008.016	-	-	84.265.332	24.786.720	9.773.746	383.182.410	502.008.208
455	Kab. Kupang	1.086.810.903	-	-	670.596.125	24.786.720	8.245.648	383.182.410	1.086.810.903
456	Kab. Lembata	697.997.181	-	-	84.265.332	223.967.520	6.582.111	383.182.410	697.997.373
457	Kab. Malaka	954.142.738	-	-	748.273.302	12.393.360	1.885.173	191.591.205	954.143.040
458	Kab. Manggarai	801.544.827	-	-	386.993.893	24.786.720	6.582.111	383.182.410	801.545.134
459	Kab. Ngada	831.122.202	-	-	416.571.537	24.786.720	6.582.111	383.182.410	831.122.778
460	Kab. Sikka	529.263.608	-	-	84.265.332	24.786.720	37.029.337	383.182.410	529.263.799
461	Kab. Sumba Barat	759.888.381	-	-	345.337.332	24.786.720	6.582.111	383.182.410	759.888.573
462	Kab. Sumba Timur	964.249.381	-	-	549.697.908	24.786.720	6.582.111	383.182.410	964.249.149
463	Kab. Timor Tengah Selatan	1.633.177.814	-	-	1.218.625.738	24.786.720	6.582.111	383.182.410	1.633.176.979
464	Kab. Timor Tengah Utara	2.291.705.579	-	-	1.877.153.471	24.786.720	6.582.111	383.182.410	2.291.704.712
465	Kota Kupang	505.906.941	-	-	91.355.892	24.786.720	6.582.111	383.182.410	505.907.133
466	Kab. Rote Ndao	644.173.381	-	-	229.622.694	24.786.720	6.582.111	383.182.410	644.173.935
467	Kab. Nagekeo	1.154.973.170	-	-	740.431.574	24.786.720	6.572.783	383.182.410	1.154.973.487
468	Kab. Sumba Tengah	882.936.053	-	-	468.393.972	24.786.720	6.572.783	383.182.410	882.935.885
469	Kab. Sumba Barat Daya	934.774.053	-	-	520.232.052	24.786.720	6.572.783	383.182.410	934.773.965
470	Kab. Manggarai Timur	758.002.693	-	-	343.460.878	24.786.720	6.572.783	383.182.410	758.002.791
471	Kab. Sabu Raijua	536.439.053	-	-	121.897.332	24.786.720	6.572.783	383.182.410	536.439.245
472	Kab. Manggarai Barat	498.816.381	-	-	84.265.332	24.786.720	6.582.111	383.182.410	498.816.573
473	**Provinsi Maluku**	**9.242.341.849**	**434.363.880**	-	**1.882.987.805**	-	**6.924.990.213**	-	**9.242.341.898**
474	Kab. Maluku Tenggara Barat	4.448.469.868	86.872.356	-	13.948.148	-	3.964.466.953	383.182.410	4.448.469.867
475	Kab. Maluku Tengah	16.356.412.030	86.872.356	-	178.522.292	-	15.707.835.112	383.182.410	16.356.412.170

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
476	Kab. Maluku Tenggara	1.547.448.956	86.872.356	-	13.948.148	-	1.063.446.042	383.182.410	1.547.448.956
477	Kab. Pulau Buru	11.959.752.430	86.872.356	-	13.948.148	-	11.475.749.514	383.182.410	11.959.752.428
478	Kota Ambon	1.547.448.956	86.872.356	-	13.948.148	-	1.063.446.042	383.182.410	1.547.448.956
479	Kab. Seram Bagian Barat	1.884.794.442	86.872.356	-	113.620.039	-	1.301.119.635	383.182.410	1.884.794.440
480	Kab. Seram Bagian Timur	4.499.190.421	868.778.459	-	1.327.775.348	-	1.919.504.400	383.182.410	4.499.190.617
481	Kab. Maluku Barat Daya	6.417.100.928	86.872.356	-	4.883.600.032	-	1.063.446.042	383.182.410	6.417.100.840
482	Kab. Buru Selatan	13.955.244.004	86.872.356	-	1.016.876.598	-	12.468.312.591	383.182.410	13.955.243.955
483	Kab. Kepulauan Aru	4.730.973.780	86.872.356	-	13.948.148	-	4.246.970.863	383.182.410	4.730.973.777
484	Kota Tual	1.547.448.956	86.872.356	-	13.948.148	-	1.063.446.042	383.182.410	1.547.448.956
485	**Provinsi Maluku Utara**	**64.198.611.784**	-	-	**61.244.959.918**	**87.533.420**	**2.866.118.178**	-	**64.198.611.516**
486	Kab. Halmahera Tengah	35.005.640.463	-	-	31.593.812.497	21.883.355	3.006.762.185	383.182.410	35.005.640.447
487	Kab. Halmahera Barat	15.944.548.009	-	-	14.660.204.824	175.066.841	726.093.457	383.182.410	15.944.547.532
488	Kota Ternate	15.353.542.893	-	-	14.222.383.202	21.883.355	726.093.457	383.182.410	15.353.542.424
489	Kab. Halmahera Timur	71.626.048.152	-	-	66.255.115.114	21.883.355	4.965.666.788	383.182.410	71.626.047.667
490	Kota Tidore Kepulauan	17.245.147.361	-	-	14.636.043.554	21.883.355	2.204.037.924	383.182.410	17.245.147.243
491	Kab. Kepulauan Sula	17.353.160.848	-	-	12.620.492.342	16.179.755	4.524.897.648	191.591.205	17.353.160.950
492	Kab. Pulau Morotai	15.401.698.386	-	-	14.347.049.892	21.883.355	649.582.132	383.182.410	15.401.697.789
493	Kab. Pulau Taliabu	9.337.610.886	-	-	7.163.837.780	5.703.600	1.976.478.080	191.591.205	9.337.610.665
494	Kab. Halmahera Selatan	47.161.336.668	-	-	34.945.196.448	21.883.355	11.811.074.088	383.182.410	47.161.336.301
495	Kab. Halmahera Utara	36.185.970.957	-	-	34.805.882.007	21.883.355	975.022.746	383.182.410	36.185.970.518
496	Kab. Yalimo	19.630.628.409	-	-	17.538.141.595	-	1.709.304.803	383.182.410	19.630.628.808
497	Kab. Lanny Jaya	19.630.628.409	-	-	17.538.141.595	-	1.709.304.803	383.182.410	19.630.628.808
498	**Provinsi Papua**	**287.888.084.867**	-	-	**257.888.333.175**	-	**29.999.751.378**	-	**287.888.084.553**
499	Kab. Biak Numfor	19.637.142.693	-	-	17.538.141.595	-	1.715.819.087	383.182.410	19.637.143.092
500	Kab. Jayapura	21.484.351.236	-	-	17.630.973.595	-	3.470.195.628	383.182.410	21.484.351.633

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
501	Kab. Jayawijaya	19.751.615.409	-	-	17.659.128.475	-	1.709.304.803	383.182.410	19.751.615.688
502	Kab. Merauke	46.624.514.001	-	-	17.538.141.595	-	28.703.190.394	383.182.410	46.624.514.399
503	Kab. Mimika	516.837.843.727	-	-	495.344.281.898	-	21.110.379.223	383.182.410	516.837.843.531
504	Kab. Nabire	32.394.180.592	-	-	20.278.863.009	-	11.732.135.153	383.182.410	32.394.180.572
505	Kab. Paniai	24.523.190.409	-	-	22.430.703.259	-	1.709.304.803	383.182.410	24.523.190.472
506	Kab. Puncak Jaya	23.017.357.409	-	-	20.924.871.067	-	1.709.304.803	383.182.410	23.017.358.280
507	Kab. Kepulauan Yapen	19.630.628.409	-	-	17.538.141.595	-	1.709.304.803	383.182.410	19.630.628.808
508	Kota Jayapura	19.630.628.409	-	-	17.538.141.595	-	1.709.304.803	383.182.410	19.630.628.808
509	Kab. Sarmi	49.118.568.275	-	-	24.106.513.207	-	24.628.872.699	383.182.410	49.118.568.316
510	Kab. Keerom	27.211.947.260	-	-	18.641.370.715	-	8.187.394.653	383.182.410	27.211.947.778
511	Kab. Yahukimo	24.708.443.283	-	-	22.615.956.149	-	1.709.304.803	383.182.410	24.708.443.362
512	Kab. Pegunungan Bintang	22.505.281.433	-	-	20.412.794.179	-	1.709.304.803	383.182.410	22.505.281.392
513	Kab. Tolikara	20.991.872.409	-	-	18.899.385.115	-	1.709.304.803	383.182.410	20.991.872.328
514	Kab. Boven Digoel	36.212.345.184	-	-	18.216.270.235	-	17.612.892.574	383.182.410	36.212.345.219
515	Kab. Mappi	19.801.454.404	-	-	17.538.141.595	-	1.880.130.798	383.182.410	19.801.454.803
516	Kab. Asmat	22.952.960.372	-	-	17.538.141.595	-	5.031.636.764	383.182.410	22.952.960.769
517	Kab. Waropen	21.704.557.840	-	-	19.598.399.515	-	1.722.976.234	383.182.410	21.704.598.159
518	Kab. Mamberamo Raya	36.945.177.524	-	-	32.149.781.659	-	4.412.213.926	383.182.410	36.945.177.997
519	Kab. Mamberamo Tengah	19.630.628.409	-	-	17.538.141.595	-	1.709.304.803	383.182.410	19.630.628.808
520	Kab. Nduga	19.630.628.409	-	-	17.538.141.595	-	1.709.304.803	383.182.410	19.630.628.808
521	Kab. Dogiyai	19.630.628.409	-	-	17.538.141.595	-	1.709.304.803	383.182.410	19.630.628.808
522	Kab. Intan Jaya	19.630.628.409	-	-	17.538.141.595	-	1.709.304.803	383.182.410	19.630.628.808
523	Kab. Puncak	19.630.628.409	-	-	17.538.141.595	-	1.709.304.803	383.182.410	19.630.628.808
524	Kab. Deiyai	19.630.628.409	-	-	17.538.141.595	-	1.709.304.803	383.182.410	19.630.628.808
525	Kab. Supiori	19.247.445.999	-	-	17.538.141.595	-	1.709.304.803	-	19.247.446.398

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
526	**Provinsi Papua Barat**	**1.425.432.410.975**	**679.178.450.030**	**713.551.826.282**	**8.226.930.402**	-	**24.092.022.252**	**383.182.410**	**1.425.432.411.376**
527	Kab. Sorong	104.644.431.448	56.518.275.492	21.400.045.855	1.724.695.842	-	24.618.230.974	383.182.410	104.644.430.573
528	Kab. Manokwari	21.972.599.485	3.153.466.351	7.834.718.320	7.346.203.949	-	3.510.483.138	127.727.470	21.972.599.228
529	Kab. Manokwari Selatan	10.647.858.817	1.936.259.000	5.389.838.000	1.488.102.259	-	1.705.932.346	127.727.470	10.647.859.075
530	Kab. Fak Fak	41.998.640.338	7.025.984.351	18.614.395.320	3.194.702.428	-	12.780.375.628	383.182.410	41.998.640.137
531	Kota Sorong	30.607.342.550	7.025.984.351	18.614.395.320	173.392.806	-	4.410.387.261	383.182.410	30.607.342.148
532	Kab. Pegunungan Arfak	10.770.790.314	1.936.259.000	5.389.838.000	1.589.631.949	-	1.727.333.843	127.727.470	10.770.790.262
533	Kab. Sorong Selatan	32.780.810.573	7.025.984.351	18.614.395.320	737.505.894	-	6.019.742.283	383.182.410	32.780.810.258
534	Kab. Raja Ampat	35.186.179.399	6.796.945.427	18.614.395.320	3.138.311.238	-	6.253.344.657	383.182.410	35.186.179.052
535	Kab. Teluk Bintuni	246.121.050.306	23.335.832.522	183.358.303.668	5.569.217.405	-	33.474.513.482	383.182.410	246.121.049.487
536	Kab. Teluk Wondama	48.872.582.957	7.025.984.351	18.614.395.320	2.994.174.630	-	19.854.845.669	383.182.410	48.872.582.380
537	Kab. Tambrauw	34.130.636.135	7.025.984.351	18.614.395.320	1.190.051.390	-	6.917.021.847	383.182.410	34.130.635.318
538	Kab. Maybrat	33.459.895.877	7.025.984.351	18.614.395.320	823.459.800	-	6.612.873.586	383.182.410	33.459.895.467
539	Kab. Kaimana	47.560.335.461	7.025.984.351	18.614.395.320	2.946.626.598	-	18.590.146.172	383.182.410	47.560.334.851
540	**Dana cadangan**	-	-	-	-	-	-	-	-
541	**Nilai belum teridentifikasi daerah penerima**	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		**62.001.317.679.192**	**24.114.357.778.087**	**19.795.120.439.100**	**16.425.918.576.995**	**467.100.051.471**	**2.009.378.171.979**	**190.441.657.876**	**62.001.317.675.508**

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
1	**Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**	**3.443.846.450**	**3.443.846.450**
2	Kab. Aceh Barat	158.085.494	158.085.494
3	Kab. Aceh Besar	460.504.718	460.504.718
4	Kab. Aceh Selatan	158.085.494	128.170.115
5	Kab. Aceh Singkil	158.085.494	158.085.494
6	Kab. Aceh Tengah	573.620.634	573.620.634
7	Kab. Aceh Tenggara	158.085.494	68.339.360
8	Kab. Aceh Timur	158.085.494	128.170.115
9	Kab. Aceh Utara	158.085.494	158.085.494
10	Kab. Bireuen	158.085.494	158.085.494
11	Kab. Pidie	333.342.347	274.842.138
12	Kab. Simeulue	158.085.494	158.085.494
13	Kota Banda Aceh	158.085.494	128.170.115
14	Kota Sabang	158.085.494	128.170.115
15	Kota Langsa	158.085.494	158.085.494
16	Kota Lhokseumawe	158.085.494	128.170.115
17	Kab. Nagan Raya	158.085.494	128.170.115
18	Kab. Aceh Jaya	158.085.494	158.085.494
19	Kab. Pidie Jaya	299.164.832	247.500.126
20	Kab. Aceh Barat Daya	158.085.494	68.339.360
21	Kab. Gayo Lues	3.300.572.056	3.300.572.056
22	Kab. Aceh Tamiang	158.085.494	158.085.494
23	Kab. Bener Meriah	380.983.731	312.955.244
24	Kota Subulussalam	158.085.494	158.085.494
25	**Provinsi Sumatera Utara**	**5.915.727.921**	**5.915.727.921**
26	Kab. Asahan	188.456.500	188.456.500
27	Kab. Dairi	582.958.720	582.958.720
28	Kab. Deli Serdang	850.168.058	684.353.457
29	Kab. Karo	1.071.565.440	1.071.565.440
30	Kab. Labuhan Batu	186.692.966	186.692.966
31	Kab. Langkat	728.151.185	728.151.185
32	Kab. Mandailing Natal	201.333.346	201.333.346
33	Kab. Nias	184.701.618	184.701.618
34	Kab. Simalungun	402.099.187	402.099.187

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
35	Kab. Tapanuli Selatan	185.363.539	185.363.539
36	Kab. Tapanuli Tengah	185.802.054	150.693.873
37	Kab. Tapanuli Utara	513.667.259	513.667.259
38	Kab. Toba Samosir	185.100.000	185.100.000
39	Kota Binjai	185.781.551	10.240.654
40	Kota Medan	673.994.616	543.904.171
41	Kota Pematang Siantar	3.958.650.683	3.958.650.683
42	Kota Sibolga	184.453.522	184.453.522
43	Kota Tanjung Balai	184.938.624	184.938.624
44	Kab. Batu Bara	186.320.776	186.320.776
45	Kab. Labuhan Batu Utara	185.786.300	185.786.300
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	185.766.169	150.657.988
47	Kab. Padang Lawas Utara	184.951.174	184.951.174
48	Kab. Padang Lawas	185.066.557	79.742.018
49	Kab. Nias Utara	184.629.480	184.629.480
50	Kab. Nias Barat	184.301.967	184.301.967
51	Kota Tebing Tinggi	185.008.848	185.008.848
52	Kota Padang Sidempuan	185.134.840	79.810.301
53	Kab. Pakpak Bharat	184.404.326	149.296.145
54	Kab. Nias Selatan	185.851.752	80.527.213
55	Kab. Humbang Hasundutan	555.021.150	555.021.150
56	Kab. Serdang Bedagai	187.929.866	187.929.866
57	Kab. Samosir	184.639.577	79.315.038
58	Kota Gunungsitoli	184.673.497	9.132.600
59	**Provinsi Sumatera Barat**	**3.253.175.853**	**3.253.175.853**
60	Kab. Lima Puluh Kota	2.636.256.769	2.636.256.769
61	Kab. Agam	431.259.696	431.259.696
62	Kab. Kepulauan Mentawai	180.197.852	180.197.852
63	Kab. Padang Pariaman	180.197.852	180.197.852
64	Kab. Pasaman	426.390.913	184.896.513
65	Kab. Pesisir Selatan	180.197.852	180.197.852
66	Kab. Sijunjung	180.197.852	77.847.851
67	Kab. Solok	488.299.124	396.143.027
68	Kab. Tanah Datar	497.116.307	497.116.307

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
69	Kota Bukit Tinggi	180.197.852	77.847.851
70	Kota Padang Panjang	180.197.852	180.197.852
71	Kota Padang	180.197.852	180.197.852
72	Kota Payakumbuh	487.755.181	487.755.181
73	Kota Sawahlunto	461.291.440	200.250.355
74	Kota Solok	180.197.852	180.197.852
75	Kota Pariaman	180.197.852	77.847.851
76	Kab. Pasaman Barat	180.197.852	180.197.852
77	Kab. Dharmasraya	180.197.852	180.197.852
78	Kab. Solok Selatan	180.197.852	180.197.852
79	**Provinsi Riau**	**-**	**-**
80	Kab. Bengkalis	-	-
81	Kab. Indragiri Hilir	-	-
82	Kab. Indragiri Hulu	-	-
83	Kab. Kampar	-	-
84	Kab. Kuantan Singingi	-	-
85	Kab. Pelalawan	-	-
86	Kab. Rokan Hilir	-	-
87	Kab. Rokan Hulu	-	-
88	Kab. Siak	-	-
89	Kota Dumai	-	-
90	Kota Pekanbaru	-	-
91	Kab. Kepulauan Meranti	-	-
92	**Provinsi Kepulauan Riau**	**1.481.575.851**	**1.481.575.851**
93	Kab. Bintan	246.929.308	246.929.308
94	Kab. Natuna	246.929.308	246.929.308
95	Kab. Karimun	246.929.308	246.929.308
96	Kota Batam	1.975.434.468	1.975.434.468
97	Kab. Kepulauan Anambas	246.929.308	246.929.308
98	Kota Tanjung Pinang	246.929.308	246.929.308
99	Kab. Lingga	246.929.308	246.929.308
100	**Provinsi Jambi**	**1.898.813.495**	**820.905.263**
101	Kab. Batanghari	189.881.349	189.881.349
102	Kab. Bungo	189.881.349	82.090.525

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
103	Kab. Kerinci	1.966.747.763	1.600.678.149
104	Kab. Merangin	722.092.550	294.975.006
105	Kab. Muaro Jambi	189.881.349	82.090.525
106	Kab. Sarolangun	189.881.349	82.090.525
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	189.881.349	82.090.525
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	189.881.349	82.090.525
109	Kab. Tebo	189.881.349	10.229.977
110	Kota Jambi	189.881.349	10.229.977
111	Kota Sungai Penuh	222.673.713	95.207.471
112	**Provinsi Sumatera Selatan**	**1.806.892.571**	**776.179.466**
113	Kab. Lahat	219.847.041	105.746.295
114	Kab. Musi Banyuasin	128.639.767	5.935.826
115	Kab. Musi Rawas	89.289.161	39.277.160
116	Kab. Musi Rawas Utara	39.350.606	31.480.484
117	Kab. Muara Enim	92.171.245	40.429.993
118	Kab. Ogan Komering Ilir	128.639.767	5.935.826
119	Kab. Ogan Komering Ulu	128.639.767	55.017.402
120	Kota Palembang	128.639.767	55.017.402
121	Kota Pagar Alam	256.190.533	29.679.132
122	Kota Lubuk Linggau	206.136.622	100.262.128
123	Kota Prabumulih	128.639.767	55.017.402
124	Kab. Empat Lawang	128.639.767	55.017.402
125	Kab. Banyuasin	128.639.767	55.017.402
126	Kab. Ogan Ilir	128.639.767	55.017.402
127	Kab. OKU Timur	444.872.018	361.833.440
128	Kab. OKU Selatan	1.802.638.777	1.802.638.777
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	36.468.522	29.174.816
130	**Provinsi Bangka Belitung**	**-**	**-**
131	Kab. Bangka	-	-
132	Kab. Belitung	-	-
133	Kota Pangkal Pinang	-	-
134	Kab. Bangka Selatan	-	-
135	Kab. Bangka Tengah	-	-
136	Kab. Bangka Barat	-	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
137	Kab. Belitung Timur	-	-
138	**Provinsi Bengkulu**	**-**	**-**
139	Kab. Bengkulu Selatan	-	-
140	Kab. Bengkulu Utara	-	-
141	Kab. Rejang Lebong	-	-
142	Kota Bengkulu	-	-
143	Kab. Kaur	-	-
144	Kab. Seluma	-	-
145	Kab. Mukomuko	-	-
146	Kab. Lebong	-	-
147	Kab. Bengkulu Tengah	-	-
148	Kab. Kepahiang	-	-
149	**Provinsi Lampung**	**4.231.172.165**	**4.231.172.165**
150	Kab. Lampung Barat	496.267.033	496.267.033
151	Kab. Lampung Selatan	809.397.499	809.397.499
152	Kab. Lampung Tengah	850.201.474	850.201.474
153	Kab. Lampung Utara	1.006.381.883	1.006.381.883
154	Kab. Lampung Timur	2.540.772.168	2.540.772.168
155	Kab. Tanggamus	620.325.449	620.325.449
156	Kab. Tulang Bawang	305.865.372	305.865.372
157	Kab. Way Kanan	321.390.871	321.390.871
158	Kab. Pesawaran	609.934.685	499.531.666
159	Kab. Pesisir Barat	240.799.510	240.799.510
160	Kab. Pringsewu	706.222.315	706.222.315
161	Kab. Mesuji	305.824.941	305.824.941
162	Kab. Tulang Bawang Barat	304.248.132	304.248.132
163	Kota Bandar Lampung	315.366.654	315.366.654
164	Kota Metro	439.737.065	439.737.065
165	**Provinsi DKI Jakarta**	**-**	**-**
166	**Provinsi Jawa Barat**	**71.571.388.669**	**30.741.533.111**
167	Kab. Bandung	7.956.225.948	6.422.833.060
168	Kab. Bekasi	25.034.199.020	10.786.028.685
169	Kab. Bogor	2.870.386.708	2.870.386.708
170	Kab. Ciamis	2.357.348.871	2.357.348.871

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
171	Kab. Cianjur	3.051.489.751	3.051.489.751
172	Kab. Cirebon	4.128.918.618	206.860.130
173	Kab. Garut	18.018.392.447	18.018.392.447
174	Kab. Indramayu	2.800.667.579	1.167.473.356
175	Kab. Karawang	34.406.518.434	14.287.702.042
176	Kab. Kuningan	3.568.964.630	3.568.964.630
177	Kab. Majalengka	7.942.907.225	7.942.907.225
178	Kab. Pangandaran	690.109.511	690.109.511
179	Kab. Purwakarta	2.929.080.532	2.384.682.457
180	Kab. Subang	2.926.591.272	2.926.591.272
181	Kab. Sukabumi	3.185.509.295	2.593.134.391
182	Kab. Sumedang	13.067.743.571	13.067.743.571
183	Kab. Tasikmalaya	2.953.609.893	2.953.609.893
184	Kab. Bandung Barat	2.946.793.159	1.281.841.583
185	Kota Bandung	2.918.293.548	2.918.293.548
186	Kota Bekasi	2.882.125.473	2.882.125.473
187	Kota Bogor	2.870.386.708	2.870.386.708
188	Kota Cirebon	2.913.225.183	2.913.225.183
189	Kota Depok	2.917.341.767	1.284.147.544
190	Kota Sukabumi	2.905.717.522	2.361.296.543
191	Kota Cimahi	2.882.125.473	2.882.125.473
192	Kota Tasikmalaya	2.944.144.499	2.944.144.499
193	Kota Banjar	2.931.090.248	189.179.497
194	**Provinsi Banten**	-	-
195	Kab. Lebak	-	-
196	Kab. Pandeglang	-	-
197	Kab. Serang	-	-
198	Kab. Tangerang	-	-
199	Kota Cilegon	-	-
200	Kota Tangerang	-	-
201	Kota Serang	-	-
202	Kota Tangerang Selatan	-	-
203	**Provinsi Jawa Tengah**	**153.810.421.652**	**153.810.421.652**
204	Kab. Banjarnegara	4.452.559.296	4.452.559.296

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
205	Kab. Banyumas	4.429.040.629	4.429.040.629
206	Kab. Batang	4.883.692.247	4.883.692.247
207	Kab. Blora	7.568.226.517	7.568.226.517
208	Kab. Boyolali	10.768.855.272	10.768.855.272
209	Kab. Brebes	4.485.689.209	4.485.689.209
210	Kab. Cilacap	4.482.922.911	4.482.922.911
211	Kab. Demak	14.794.674.135	14.794.674.135
212	Kab. Grobogan	6.440.476.877	6.440.476.877
213	Kab. Jepara	7.693.703.857	7.693.703.857
214	Kab. Karanganyar	5.796.959.217	5.796.959.217
215	Kab. Kebumen	5.835.459.812	5.835.459.812
216	Kab. Kendal	23.470.750.890	23.470.750.890
217	Kab. Klaten	12.344.854.669	12.344.854.669
218	Kab. Kudus	108.206.945.495	108.206.945.495
219	Kab. Magelang	10.803.618.588	10.803.618.588
220	Kab. Pati	5.800.618.224	5.800.618.224
221	Kab. Pekalongan	4.412.463.815	4.412.463.815
222	Kab. Pemalang	4.848.754.912	4.848.754.912
223	Kab. Purbalingga	5.013.547.792	5.013.547.792
224	Kab. Purworejo	5.075.535.980	5.075.535.980
225	Kab. Rembang	5.721.226.204	5.721.226.204
226	Kab. Semarang	6.801.260.776	6.801.260.776
227	Kab. Sragen	5.080.191.127	5.080.191.127
228	Kab. Sukoharjo	5.486.201.583	5.486.201.583
229	Kab. Tegal	5.154.889.038	5.154.889.038
230	Kab. Temanggung	23.931.416.345	23.931.416.345
231	Kab. Wonogiri	5.140.315.031	5.140.315.031
232	Kab. Wonosobo	8.155.633.798	8.155.633.798
233	Kota Magelang	4.458.210.003	4.458.210.003
234	Kota Pekalongan	5.688.561.008	5.688.561.008
235	Kota Salatiga	5.243.970.795	5.243.970.795
236	Kota Semarang	6.441.892.797	6.441.892.797
237	Kota Surakarta	5.565.135.148	5.565.135.148
238	Kota Tegal	4.412.729.843	4.412.729.843

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
239	**Provinsi DI Yogyakarta**	**6.409.605.963**	**6.409.605.963**
240	Kab. Bantul	4.535.979.444	4.535.979.444
241	Kab. Gunung Kidul	1.879.123.070	1.879.123.070
242	Kab. Kulon Progo	2.695.618.305	2.695.618.305
243	Kab. Sleman	4.190.444.113	4.190.444.113
244	Kota Yogyakarta	1.654.582.313	1.654.582.313
245	**Provinsi Jawa Timur**	**361.337.581.633**	**361.337.581.633**
246	Kab. Bangkalan	10.144.178.508	10.144.178.508
247	Kab. Banyuwangi	12.597.232.375	12.597.232.375
248	Kab. Blitar	12.579.138.053	12.579.138.053
249	Kab. Bojonegoro	32.141.520.388	32.141.520.388
250	Kab. Bondowoso	18.472.619.469	18.472.619.469
251	Kab. Gresik	10.021.757.835	10.021.757.835
252	Kab. Jember	43.204.627.501	43.204.627.501
253	Kab. Jombang	17.738.527.881	17.738.527.881
254	Kab. Kediri	34.823.982.962	34.823.982.962
255	Kab. Lamongan	28.258.698.213	28.258.698.213
256	Kab. Lumajang	13.672.991.570	13.672.991.570
257	Kab. Madiun	10.890.183.526	10.890.183.526
258	Kab. Magetan	11.020.757.169	11.020.757.169
259	Kab. Malang	45.914.904.939	45.914.904.939
260	Kab. Mojokerto	11.432.549.932	11.432.549.932
261	Kab. Nganjuk	11.786.382.271	11.786.382.271
262	Kab. Ngawi	14.107.234.300	14.107.234.300
263	Kab. Pacitan	11.411.802.955	11.411.802.955
264	Kab. Pamekasan	38.366.770.492	38.366.770.492
265	Kab. Pasuruan	112.795.093.077	112.795.093.077
266	Kab. Ponorogo	10.919.492.138	10.919.492.138
267	Kab. Probolinggo	31.538.271.494	31.538.271.494
268	Kab. Sampang	14.430.325.277	14.430.325.277
269	Kab. Sidoarjo	11.837.408.401	11.837.408.401
270	Kab. Situbondo	21.053.561.792	21.053.561.792
271	Kab. Sumenep	26.042.268.150	26.042.268.150
272	Kab. Trenggalek	10.192.250.833	10.192.250.833

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
273	Kab. Tuban	13.307.842.030	13.307.842.030
274	Kab. Tulungagung	13.510.496.452	13.510.496.452
275	Kota Blitar	10.819.477.857	10.819.477.857
276	Kota Kediri	62.423.198.561	62.423.198.561
277	Kota Madiun	9.951.149.437	9.951.149.437
278	Kota Malang	28.784.206.347	28.784.206.347
279	Kota Mojokerto	10.328.028.689	556.202.739
280	Kota Pasuruan	9.978.903.258	9.978.903.258
281	Kota Probolinggo	9.978.901.227	9.978.901.227
282	Kota Surabaya	36.685.762.997	36.685.762.997
283	Kota Batu	9.958.525.440	9.958.525.440
284	**Provinsi Kalimantan Barat**	-	-
285	Kab. Bengkayang	-	-
286	Kab. Landak	-	-
287	Kab. Kapuas Hulu	-	-
288	Kab. Ketapang	-	-
289	Kab. Pontianak	-	-
290	Kab. Sambas	-	-
291	Kab. Sanggau	-	-
292	Kab. Sintang	-	-
293	Kota Pontianak	-	-
294	Kota Singkawang	-	-
295	Kab. Kayong Utara	-	-
296	Kab. Kubu Raya	-	-
297	Kab. Sekadau	-	-
298	Kab. Melawi	-	-
299	**Provinsi Kalimantan Tengah**	**93.896.990**	**93.896.990**
300	Kab. Barito Selatan	7.222.845	7.222.845
301	Kab. Barito Utara	7.222.845	7.222.845
302	Kab. Kapuas	7.222.845	7.222.845
303	Kab. Kotawaringin Barat	7.222.845	7.222.845
304	Kab. Kotawaringin Timur	7.222.845	7.222.845
305	Kota Palangkaraya	7.222.845	7.222.845
306	Kab. Barito Timur	7.222.845	7.222.845

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
307	Kab. Murung Raya	7.222.845	7.222.845
308	Kab. Pulang Pisau	125.195.986	125.195.986
309	Kab. Gunung Mas	7.222.845	7.222.845
310	Kab. Lamandau	7.222.845	7.222.845
311	Kab. Sukamara	7.222.845	7.222.845
312	Kab. Katingan	7.222.845	7.222.845
313	Kab. Seruyan	7.222.845	7.222.845
314	**Provinsi Kalimantan Selatan**	-	-
315	Kab. Banjar	-	-
316	Kab. Barito Kuala	-	-
317	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	-
318	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	-
319	Kab. Hulu Sungai Utara	-	-
320	Kab. Kotabaru	-	-
321	Kab. Tabalong	-	-
322	Kab. Tanah Laut	-	-
323	Kab. Tapin	-	-
324	Kota Banjarbaru	-	-
325	Kota Banjarmasin	-	-
326	Kab. Balangan	-	-
327	Kab. Tanah Bumbu	-	-
328	**Provinsi Kalimantan Timur**	-	-
329	Kab. Berau	-	-
330	Kab. Kutai Kartanegara	-	-
331	Kab. Kutai Barat	-	-
332	Kab. Kutai Timur	-	-
333	Kab. Mahakam Ulu	-	-
334	Kab. Pasir	-	-
335	Kota Balikpapan	-	-
336	Kota Bontang	-	-
337	Kota Samarinda	-	-
338	Kab. Penajam Paser Utara	-	-
339	**Provinsi Kalimantan Utara**	-	-
340	Kab. Bulungan	-	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
341	Kab. Malinau	-	-
342	Kab. Nunukan	-	-
343	Kab. Tana Tidung	-	-
344	Kota Tarakan	-	-
345	**Provinsi Sulawesi Utara**	-	-
346	Kab. Bolaang Mongondow	-	-
347	Kab. Minahasa	-	-
348	Kab. Sangihe	-	-
349	Kota Bitung	-	-
350	Kota Manado	-	-
351	Kab. Kepulauan Talaud	-	-
352	Kab. Minahasa Selatan	-	-
353	Kab. Minahasa Tenggara	-	-
354	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	-	-
355	Kota Kotamubagu	-	-
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	-
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	-
358	Kota Tomohon	-	-
359	Kab. Minahasa Utara	-	-
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	-
361	**Provinsi Gorontalo**	-	-
362	Kab. Boalemo	-	-
363	Kab. Gorontalo	-	-
364	Kota Gorontalo	-	-
365	Kab. Pohuwato	-	-
366	Kab. Gorontalo Utara	-	-
367	Kab. Bone Bolango	-	-
368	**Provinsi Sulawesi Tengah**	**1.785.831.457**	**1.785.831.457**
369	Kab. Banggai	180.368.069	180.368.069
370	Kab. Banggai Laut	94.293.894	94.293.894
371	Kab. Banggai Kepulauan	86.074.175	86.074.175
372	Kab. Buol	203.175.444	203.175.444
373	Kab. Toli-Toli	203.175.444	203.175.444
374	Kab. Donggala	180.368.069	180.368.069

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
375	Kab. Morowali	103.218.519	103.218.519
376	Kab. Morowali Utara	77.149.550	77.149.550
377	Kab. Poso	180.368.069	180.368.069
378	Kota Palu	2.317.644.596	2.317.644.596
379	Kab. Parigi Moutong	180.368.069	180.368.069
380	Kab. Sigi	180.368.069	180.368.069
381	Kab. Tojo Una Una	180.368.069	180.368.069
382	**Provinsi Sulawesi Selatan**	**5.044.915.069**	**5.044.915.069**
383	Kab. Bantaeng	226.849.472	226.849.472
384	Kab. Barru	229.021.850	229.021.850
385	Kab. Bone	1.162.841.975	1.162.841.975
386	Kab. Bulukumba	343.232.600	343.232.600
387	Kab. Enrekang	219.411.853	219.411.853
388	Kab. Gowa	218.878.078	218.878.078
389	Kab. Jeneponto	257.339.555	257.339.555
390	Kab. Luwu	221.336.932	221.336.932
391	Kab. Luwu Utara	218.878.078	218.878.078
392	Kab. Maros	218.878.078	218.878.078
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	223.543.200	223.543.200
394	Kab. Pinrang	218.878.078	218.878.078
395	Kab. Selayar	218.878.078	218.878.078
396	Kab. Sidenreng Rappang	218.878.078	218.878.078
397	Kab. Sinjai	1.533.431.388	1.533.431.388
398	Kab. Soppeng	4.201.610.163	4.201.610.163
399	Kab. Takalar	218.878.078	218.878.078
400	Kab. Tana Toraja	266.458.059	266.458.059
401	Kab. Wajo	255.191.663	255.191.663
402	Kota Pare-pare	218.878.078	218.878.078
403	Kab. Toraja Utara	223.540.897	223.540.897
404	Kota Makassar	218.878.078	218.878.078
405	Kota Palopo	218.878.078	218.878.078
406	Kab. Luwu Timur	218.878.078	218.878.078
407	**Provinsi Sulawesi Barat**	**-**	**-**
408	Kab. Majene	-	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
409	Kab. Mamuju	-	-
410	Kab. Mamuju Tengah	-	-
411	Kab. Polewali Mandar	-	-
412	Kab. Mamasa	-	-
413	Kab. Mamuju Utara	-	-
414	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	-	-
415	Kab. Buton	-	-
416	Kab. Konawe	-	-
417	Kab. Konawe Kepulauan	-	-
418	Kab. Kolaka	-	-
419	Kab. Kolaka Timur	-	-
420	Kab. Muna	-	-
421	Kota Kendari	-	-
422	Kota Bau-bau	-	-
423	Kab. Konawe Selatan	-	-
424	Kab. Bombana	-	-
425	Kab. Konawe Utara	-	-
426	Kab. Buton Utara	-	-
427	Kab. Wakatobi	-	-
428	Kab. Kolaka Utara	-	-
429	**Provinsi Bali**	**3.578.152.571**	**3.578.152.571**
430	Kab. Badung	443.963.452	443.963.452
431	Kab. Bangli	484.967.105	484.967.105
432	Kab. Buleleng	3.921.106.742	1.755.444.494
433	Kab. Gianyar	1.238.393.623	1.238.393.623
434	Kab. Jembrana	443.963.452	193.452.353
435	Kab. Karangasem	484.737.934	484.737.934
436	Kab. Klungkung	443.963.452	443.963.452
437	Kab. Tabanan	443.963.452	360.459.751
438	Kota Denpasar	443.963.452	193.452.353
439	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**72.333.116.069**	**72.333.116.069**
440	Kab. Bima	8.862.401.845	8.862.401.845
441	Kab. Dompu	4.861.376.738	4.861.376.738
442	Kab. Lombok Barat	12.718.166.870	12.718.166.870

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
443	Kab. Lombok Tengah	39.958.295.132	39.958.295.132
444	Kab. Lombok Timur	54.577.614.599	54.577.614.599
445	Kab. Sumbawa	8.610.249.836	8.610.249.836
446	Kota Mataram	29.235.265.311	29.235.265.311
447	Kab. Lombok Utara	4.425.042.878	4.425.042.878
448	Kota Bima	3.002.088.842	3.002.088.842
449	Kab. Sumbawa Barat	2.526.768.775	2.526.768.775
450	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	**3.426.207.681**	**3.426.207.681**
451	Kab. Alor	202.281.068	5.203.916
452	Kab. Belu	352.503.188	16.488.640
453	Kab. Ende	1.709.606.753	64.657.707
454	Kab. Flores Timur	294.435.486	236.413.205
455	Kab. Kupang	241.020.271	194.169.286
456	Kab. Lembata	607.774.165	246.156.662
457	Kab. Malaka	290.040.873	116.016.349
458	Kab. Manggarai	211.944.622	170.601.972
459	Kab. Ngada	188.864.674	78.140.321
460	Kab. Sikka	441.944.273	10.376.651
461	Kab. Sumba Barat	427.739.931	13.091.564
462	Kab. Sumba Timur	249.293.767	103.065.979
463	Kab. Timor Tengah Selatan	194.929.680	4.897.943
464	Kab. Timor Tengah Utara	171.094.179	4.324.087
465	Kota Kupang	171.094.179	4.324.087
466	Kab. Rote Ndao	171.094.179	4.324.087
467	Kab. Nagekeo	400.813.138	322.172.778
468	Kab. Sumba Tengah	171.094.179	4.324.087
469	Kab. Sumba Barat Daya	638.824.219	269.875.542
470	Kab. Manggarai Timur	318.046.911	129.813.216
471	Kab. Sabu Raijua	231.825.560	4.791.377
472	Kab. Manggarai Barat	308.219.283	128.043.868
473	**Provinsi Maluku**	**-**	**-**
474	Kab. Maluku Tenggara Barat	-	-
475	Kab. Maluku Tengah	-	-
476	Kab. Maluku Tenggara	-	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
477	Kab. Pulau Buru	-	-
478	Kota Ambon	-	-
479	Kab. Seram Bagian Barat	-	-
480	Kab. Seram Bagian Timur	-	-
481	Kab. Maluku Barat Daya	-	-
482	Kab. Buru Selatan	-	-
483	Kab. Kepulauan Aru	-	-
484	Kota Tual	-	-
485	**Provinsi Maluku Utara**	-	-
486	Kab. Halmahera Tengah	-	-
487	Kab. Halmahera Barat	-	-
488	Kota Ternate	-	-
489	Kab. Halmahera Timur	-	-
490	Kota Tidore Kepulauan	-	-
491	Kab. Kepulauan Sula	-	-
492	Kab. Pulau Morotai	-	-
493	Kab. Pulau Taliabu	-	-
494	Kab. Halmahera Selatan	-	-
495	Kab. Halmahera Utara	-	-
496	Kab. Yalimo	-	-
497	Kab. Lanny Jaya	-	-
498	**Provinsi Papua**	-	-
499	Kab. Biak Numfor	-	-
500	Kab. Jayapura	-	-
501	Kab. Jayawijaya	-	-
502	Kab. Merauke	-	-
503	Kab. Mimika	-	-
504	Kab. Nabire	-	-
505	Kab. Paniai	-	-
506	Kab. Puncak Jaya	-	-
507	Kab. Kepulauan Yapen	-	-
508	Kota Jayapura	-	-
509	Kab. Sarmi	-	-
510	Kab. Keerom	-	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
511	Kab. Yahukimo	-	-
512	Kab. Pegunungan Bintang	-	-
513	Kab. Tolikara	-	-
514	Kab. Boven Digoel	-	-
515	Kab. Mappi	-	-
516	Kab. Asmat	-	-
517	Kab. Waropen	-	-
518	Kab. Mamberamo Raya	-	-
519	Kab. Mamberamo Tengah	-	-
520	Kab. Nduga	-	-
521	Kab. Dogiyai	-	-
522	Kab. Intan Jaya	-	-
523	Kab. Puncak	-	-
524	Kab. Deiyai	-	-
525	Kab. Supiori	-	-
526	**Provinsi Papua Barat**	**-**	**-**
527	Kab. Sorong	-	-
528	Kab. Manokwari	-	-
529	Kab. Manokwari Selatan	-	-
530	Kab. Fak Fak	-	-
531	Kota Sorong	-	-
532	Kab. Pegunungan Arfak	-	-
533	Kab. Sorong Selatan	-	-
534	Kab. Raja Ampat	-	-
535	Kab. Teluk Bintuni	-	-
536	Kab. Teluk Wondama	-	-
537	Kab. Tambrauw	-	-
538	Kab. Maybrat	-	-
539	Kab. Kaimana	-	-
540	**Sisa pagu yang tidak dialokasikan**	**258**	**-**
JUMLAH		**2.338.074.406.987**	**2.221.698.394.926**

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	**Provinsi Aceh**	**1.201.612.787.000**	**1.201.612.787.000**	**72.953.790.000**	**72.953.790.000**
2	Kab. Aceh Barat	550.414.472.000	550.414.472.000	71.422.070.000	71.422.070.000
3	Kab. Aceh Besar	673.776.666.000	673.776.666.000	77.168.330.000	77.168.330.000
4	Kab. Aceh Selatan	582.668.161.000	582.668.161.000	63.233.840.000	63.233.840.000
5	Kab. Aceh Singkil	380.851.529.000	380.851.529.000	51.648.640.000	51.648.640.000
6	Kab. Aceh Tengah	564.691.527.000	564.691.527.000	48.446.100.000	48.446.100.000
7	Kab. Aceh Tenggara	520.394.600.000	520.394.600.000	46.192.990.000	46.192.990.000
8	Kab. Aceh Timur	703.898.153.000	703.898.153.000	91.686.320.000	91.686.320.000
9	Kab. Aceh Utara	755.061.139.000	755.061.139.000	70.250.520.000	70.250.520.000
10	Kab. Bireuen	770.780.301.000	770.780.301.000	61.083.950.000	61.083.950.000
11	Kab. Pidie	746.937.953.000	746.937.953.000	65.717.570.000	65.717.570.000
12	Kab. Simeulue	378.859.516.000	378.859.516.000	67.027.470.000	67.027.470.000
13	Kota Banda Aceh	610.554.730.000	610.554.730.000	38.833.120.000	38.833.120.000
14	Kota Sabang	324.038.882.000	324.038.882.000	31.401.610.000	31.401.610.000
15	Kota Langsa	419.767.005.000	419.767.005.000	32.355.330.000	32.355.330.000
16	Kota Lhokseumawe	469.956.588.000	469.956.588.000	33.752.780.000	33.752.780.000
17	Kab. Nagan Raya	500.941.291.000	500.941.291.000	74.559.290.000	74.559.290.000
18	Kab. Aceh Jaya	382.101.138.000	382.101.138.000	55.013.090.000	55.013.090.000
19	Kab. Pidie Jaya	391.789.535.000	391.789.535.000	55.700.990.000	55.700.990.000
20	Kab. Aceh Barat Daya	406.138.315.000	406.138.315.000	67.440.970.000	67.440.970.000
21	Kab. Gayo Lues	403.096.648.000	403.096.648.000	51.885.490.000	51.885.490.000
22	Kab. Aceh Tamiang	467.034.124.000	467.034.124.000	46.182.210.000	46.182.210.000
23	Kab. Bener Meriah	410.897.128.000	410.897.128.000	60.325.290.000	60.325.290.000
24	Kota Subulussalam	278.513.125.000	278.513.125.000	27.329.480.000	27.329.480.000
25	**Provinsi Sumatera Uta**	**1.349.132.276.000**	**1.349.132.276.000**	**79.637.850.000**	**59.728.388.000**
26	Kab. Asahan	795.350.930.000	795.350.930.000	67.954.340.000	67.954.340.000
27	Kab. Dairi	532.723.259.000	532.723.259.000	48.992.230.000	48.992.230.000
28	Kab. Deli Serdang	1.363.811.250.000	1.363.811.250.000	104.687.700.000	104.687.700.000
29	Kab. Karo	686.834.562.000	686.834.562.000	56.292.580.000	56.292.580.000
30	Kab. Labuhan Batu	561.476.208.000	561.476.208.000	40.224.710.000	40.224.710.000
31	Kab. Langkat	1.039.650.946.000	1.039.650.946.000	67.162.550.000	67.162.550.000
32	Kab. Mandailing Natal	692.133.576.000	692.133.576.000	59.875.530.000	59.875.530.000
33	Kab. Nias	347.698.829.000	347.698.829.000	72.092.260.000	72.092.260.000
34	Kab. Simalungun	1.077.985.764.000	1.077.985.764.000	78.063.890.000	78.063.890.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	573.244.182.000	573.244.182.000	63.547.730.000	63.547.730.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	541.491.907.000	541.491.907.000	75.689.840.000	75.689.840.000
37	Kab. Tapanuli Utara	596.841.256.000	596.841.256.000	48.316.860.000	48.316.860.000
38	Kab. Toba Samosir	495.377.257.000	495.377.257.000	67.784.130.000	67.784.130.000
39	Kota Binjai	526.069.678.000	526.069.678.000	31.534.230.000	31.534.230.000
40	Kota Medan	1.393.504.580.000	1.393.504.580.000	74.109.590.000	55.582.193.000
41	Kota Pematang Siantar	519.435.661.000	519.435.661.000	32.662.570.000	32.662.570.000
42	Kota Sibolga	371.812.825.000	371.812.825.000	33.880.280.000	33.880.280.000
43	Kota Tanjung Balai	387.259.055.000	387.259.055.000	34.027.320.000	25.520.490.000
44	Kab. Batu Bara	591.720.062.000	591.720.062.000	51.819.020.000	51.819.020.000
45	Kab. Labuhan Batu Utar	503.053.678.000	503.053.678.000	46.487.070.000	46.487.070.000
46	Kab. Labuhan Batu Selat	450.151.264.000	450.151.264.000	52.260.820.000	52.260.820.000

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
47	Kab. Padang Lawas Utar	418.726.923.000	418.726.923.000	36.461.510.000	36.461.510.000
48	Kab. Padang Lawas	408.043.834.000	408.043.834.000	34.723.910.000	34.723.910.000
49	Kab. Nias Utara	355.354.627.000	355.354.627.000	73.951.130.000	73.951.130.000
50	Kab. Nias Barat	279.674.672.000	279.674.672.000	49.384.690.000	49.384.690.000
51	Kota Tebing Tinggi	385.030.433.000	385.030.433.000	36.231.720.000	36.231.720.000
52	Kota Padang Sidempuan	470.353.368.000	470.353.368.000	38.329.260.000	38.329.260.000
53	Kab. Pakpak Bharat	313.591.345.000	313.591.345.000	62.184.950.000	62.184.950.000
54	Kab. Nias Selatan	455.533.985.000	455.533.985.000	95.135.190.000	95.135.190.000
55	Kab. Humbang Hasundut	487.059.684.000	487.059.684.000	56.959.620.000	56.959.620.000
56	Kab. Serdang Bedagai	698.412.747.000	698.412.747.000	69.564.970.000	69.564.970.000
57	Kab. Samosir	441.619.455.000	441.619.455.000	46.700.960.000	46.700.960.000
58	Kota Gunungsitoli	383.524.614.000	383.524.614.000	32.231.500.000	32.231.500.000
59	**Provinsi Sumatera Ba**	**1.129.886.306.000**	**1.129.886.306.000**	**54.108.200.000**	**54.108.200.000**
60	Kab. Lima Puluh Kota	700.183.206.000	700.183.206.000	59.929.540.000	59.929.540.000
61	Kab. Agam	739.359.873.000	739.359.873.000	73.233.820.000	73.233.820.000
62	Kab. Kepulauan Mentaw	531.389.939.000	531.389.939.000	103.381.020.000	77.535.765.000
63	Kab. Padang Pariaman	683.752.765.000	683.752.765.000	108.209.250.000	108.209.250.000
64	Kab. Pasaman	542.067.878.000	542.067.878.000	50.669.030.000	50.669.030.000
65	Kab. Pesisir Selatan	753.984.939.000	753.984.939.000	107.565.620.000	107.565.620.000
66	Kab. Sijunjung	498.591.200.000	498.591.200.000	73.027.260.000	73.027.260.000
67	Kab. Solok	651.730.691.000	651.730.691.000	90.839.880.000	90.839.880.000
68	Kab. Tanah Datar	650.563.368.000	650.563.368.000	60.905.780.000	60.905.780.000
69	Kota Bukit Tinggi	404.285.567.000	404.285.567.000	33.148.850.000	33.148.850.000
70	Kota Padang Panjang	341.743.153.000	341.743.153.000	31.839.720.000	23.879.790.000
71	Kota Padang	1.060.917.648.000	1.060.917.648.000	76.349.870.000	57.262.403.000
72	Kota Payakumbuh	412.929.814.000	412.929.814.000	32.503.170.000	32.503.170.000
73	Kota Sawahlunto	336.999.766.000	336.999.766.000	31.072.890.000	31.072.890.000
74	Kota Solok	354.372.862.000	354.372.862.000	32.287.100.000	32.287.100.000
75	Kota Pariaman	386.256.228.000	386.256.228.000	38.438.430.000	38.438.430.000
76	Kab. Pasaman Barat	580.406.954.000	580.406.954.000	78.952.230.000	78.952.230.000
77	Kab. Dharmasraya	450.393.254.000	450.393.254.000	70.880.630.000	70.880.630.000
78	Kab. Solok Selatan	406.540.345.000	406.540.345.000	72.464.280.000	72.464.280.000
79	**Provinsi Riau**	**820.984.584.000**	**820.984.584.000**	**43.737.510.000**	**43.737.510.000**
80	Kab. Bengkalis	85.777.928.000	85.777.928.000	35.738.130.000	26.803.598.000
81	Kab. Indragiri Hilir	847.860.750.000	847.860.750.000	66.555.430.000	49.916.573.000
82	Kab. Indragiri Hulu	631.168.431.000	631.168.431.000	11.923.740.000	11.923.740.000
83	Kab. Kampar	742.583.673.000	742.583.673.000	48.755.370.000	48.755.370.000
84	Kab. Kuantan Singingi	618.821.044.000	618.821.044.000	12.166.190.000	12.166.190.000
85	Kab. Pelalawan	536.384.455.000	536.384.455.000	13.974.540.000	13.974.540.000
86	Kab. Rokan Hilir	413.982.787.000	413.982.787.000	39.592.190.000	11.877.657.000
87	Kab. Rokan Hulu	571.522.210.000	571.522.210.000	10.582.320.000	10.582.320.000
88	Kab. Siak	276.181.935.000	276.181.935.000	14.097.620.000	14.097.620.000
89	Kota Dumai	359.840.493.000	359.840.493.000	-	-
90	Kota Pekanbaru	809.987.156.000	809.987.156.000	45.643.430.000	34.232.573.000
91	Kab. Kepulauan Meranti	371.269.172.000	371.269.172.000	1.944.790.000	1.944.790.000
92	**Provinsi Kepulauan Ri**	**698.009.318.000**	**698.009.318.000**	**41.678.090.000**	**41.678.090.000**

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
93	Kab. Bintan	304.974.241.000	304.974.241.000	17.294.000.000	17.294.000.000
94	Kab. Natuna	187.950.770.000	187.950.770.000	75.837.300.000	75.837.300.000
95	Kab. Karimun	324.170.518.000	324.170.518.000	9.306.480.000	9.306.480.000
96	Kota Batam	559.103.958.000	559.103.958.000	56.687.430.000	56.687.430.000
97	Kab. Kepulauan Anamba	215.651.064.000	215.651.064.000	61.703.520.000	61.703.520.000
98	Kota Tanjung Pinang	360.587.451.000	360.587.451.000	-	-
99	Kab. Lingga	316.390.446.000	316.390.446.000	15.395.600.000	15.395.600.000
100	**Provinsi Jambi**	**948.337.712.000**	**948.337.712.000**	**49.355.510.000**	**49.355.510.000**
101	Kab. Batanghari	527.233.482.000	527.233.482.000	28.209.030.000	28.209.030.000
102	Kab. Bungo	579.600.648.000	579.600.648.000	61.138.860.000	61.138.860.000
103	Kab. Kerinci	545.365.585.000	545.365.585.000	50.485.980.000	50.485.980.000
104	Kab. Merangin	633.657.922.000	633.657.922.000	49.331.620.000	49.331.620.000
105	Kab. Muaro Jambi	565.256.883.000	565.256.883.000	48.929.950.000	48.929.950.000
106	Kab. Sarolangun	521.591.109.000	521.591.109.000	47.315.940.000	47.315.940.000
107	Kab. Tanjung Jabung Ba	429.955.329.000	429.955.329.000	1.802.400.000	540.720.000
108	Kab. Tanjung Jabung Tir	455.996.416.000	455.996.416.000	16.298.880.000	16.298.880.000
109	Kab. Tebo	509.396.969.000	509.396.969.000	50.680.030.000	50.680.030.000
110	Kota Jambi	678.620.172.000	678.620.172.000	50.248.330.000	50.248.330.000
111	Kota Sungai Penuh	365.298.130.000	365.298.130.000	27.039.360.000	27.039.360.000
112	**Provinsi Sumatera Se**	**985.542.760.000**	**985.542.760.000**	**62.754.900.000**	**62.754.900.000**
113	Kab. Lahat	615.240.306.000	615.240.306.000	82.832.120.000	82.832.120.000
114	Kab. Musi Banyuasin	411.869.675.000	411.869.675.000	24.077.660.000	24.077.660.000
115	Kab. Musi Rawas	420.562.346.000	420.562.346.000	82.831.280.000	82.831.280.000
116	Kab. Musi Rawas Utara	284.408.593.000	284.408.593.000	-	-
117	Kab. Muara Enim	593.564.398.000	593.564.398.000	59.604.080.000	59.604.080.000
118	Kab. Ogan Komering Ilir	931.158.869.000	931.158.869.000	88.870.760.000	88.870.760.000
119	Kab. Ogan Komering Ulu	568.771.201.000	568.771.201.000	9.266.190.000	9.266.190.000
120	Kota Palembang	1.203.662.453.000	1.203.662.453.000	66.056.370.000	49.542.278.000
121	Kota Pagar Alam	354.727.429.000	354.727.429.000	36.716.820.000	36.716.820.000
122	Kota Lubuklinggau	414.757.867.000	414.757.867.000	44.038.200.000	44.038.200.000
123	Kota Prabumulih	383.313.715.000	383.313.715.000	32.536.350.000	32.536.350.000
124	Kab. Empat Lawang	360.871.981.000	360.871.981.000	62.878.670.000	62.878.670.000
125	Kab. Banyuasin	824.218.824.000	824.218.824.000	112.268.030.000	112.268.030.000
126	Kab. Ogan Ilir	561.376.933.000	561.376.933.000	74.131.060.000	74.131.060.000
127	Kab. Ogan Komering Ulu	680.713.525.000	680.713.525.000	67.063.390.000	67.063.390.000
128	Kab. Ogan Komering Ulu	512.126.270.000	512.126.270.000	60.590.600.000	60.590.600.000
129	Kab. Penukal Abab Lema	110.386.837.000	110.386.837.000	-	-
130	**Provinsi Bangka Belitu**	**806.820.146.000**	**806.820.146.000**	**43.372.460.000**	**43.372.460.000**
131	Kab. Bangka	492.721.831.000	492.721.831.000	48.389.000.000	48.389.000.000
132	Kab. Belitung	428.619.259.000	428.619.259.000	48.319.720.000	48.319.720.000
133	Kota Pangkal Pinang	414.685.923.000	414.685.923.000	40.868.600.000	30.651.450.000
134	Kab. Bangka Selatan	413.170.287.000	413.170.287.000	62.513.660.000	62.513.660.000
135	Kab. Bangka Tengah	377.712.293.000	377.712.293.000	41.380.760.000	41.380.760.000
136	Kab. Bangka Barat	413.680.194.000	413.680.194.000	41.455.370.000	31.091.528.000
137	Kab. Belitung Timur	392.975.926.000	392.975.926.000	41.746.080.000	41.746.080.000
138	**Provinsi Bengkulu**	**955.095.187.000**	**955.095.187.000**	**53.927.020.000**	**53.927.020.000**

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
139	Kab. Bengkulu Selatan	490.436.878.000	490.436.878.000	49.499.850.000	49.499.850.000
140	Kab. Bengkulu Utara	558.467.872.000	558.467.872.000	57.578.740.000	57.578.740.000
141	Kab. Rejang Lebong	541.451.989.000	541.451.989.000	47.344.430.000	47.344.430.000
142	Kota Bengkulu	602.742.391.000	602.742.391.000	51.533.280.000	38.649.960.000
143	Kab. Kaur	371.883.436.000	371.883.436.000	69.427.740.000	69.427.740.000
144	Kab. Seluma	444.698.984.000	444.698.984.000	70.105.040.000	65.858.208.000
145	Kab. Mukomuko	454.993.409.000	454.993.409.000	65.382.410.000	65.382.410.000
146	Kab. Lebong	373.700.225.000	373.700.225.000	60.010.640.000	60.010.640.000
147	Kab. Bengkulu Tengah	379.669.582.000	379.669.582.000	52.582.290.000	52.582.290.000
148	Kab. Kepahiang	402.021.565.000	402.021.565.000	59.017.010.000	59.017.010.000
149	**Provinsi Lampung**	**1.136.053.041.000**	**1.136.053.041.000**	**48.851.620.000**	**48.851.620.000**
150	Kab. Lampung Barat	388.754.357.000	388.754.357.000	82.070.780.000	82.070.780.000
151	Kab. Lampung Selatan	847.657.151.000	847.657.151.000	96.471.570.000	96.471.570.000
152	Kab. Lampung Tengah	1.177.513.282.000	1.177.513.282.000	83.469.500.000	83.469.500.000
153	Kab. Lampung Utara	838.661.589.000	838.661.589.000	89.315.410.000	89.315.410.000
154	Kab. Lampung Timur	940.041.243.000	940.041.243.000	66.462.790.000	66.462.790.000
155	Kab. Tanggamus	669.512.156.000	669.512.156.000	84.431.860.000	84.431.860.000
156	Kab. Tulang Bawang	533.313.684.000	533.313.684.000	59.728.060.000	59.728.060.000
157	Kab. Way Kanan	573.114.161.000	573.114.161.000	82.270.930.000	82.270.930.000
158	Kab. Pesawaran	625.845.694.000	625.845.694.000	78.453.260.000	78.453.260.000
159	Kab. Pesisir Barat	227.314.157.000	227.314.157.000	6.269.960.000	4.702.470.000
160	Kab. Pringsewu	547.622.366.000	547.622.366.000	47.232.130.000	47.232.130.000
161	Kab. Mesuji	387.694.110.000	387.694.110.000	51.809.920.000	51.809.920.000
162	Kab. Tulang Bawang Ba	424.389.404.000	424.389.404.000	50.444.530.000	50.444.530.000
163	Kota Bandar Lampung	921.826.931.000	921.826.931.000	42.841.640.000	42.841.640.000
164	Kota Metro	414.624.161.000	414.624.161.000	34.078.240.000	34.078.240.000
165	**Provinsi DKI Jakarta**	**85.985.282.000**	**85.985.282.000**	-	-
166	**Provinsi Jawa Barat**	**1.687.686.386.000**	**1.687.686.386.000**	**78.215.030.000**	**78.215.030.000**
167	Kab. Bandung	1.897.769.300.000	1.897.769.300.000	157.374.520.000	157.374.520.000
168	Kab. Bekasi	1.195.757.868.000	1.195.757.868.000	111.171.910.000	33.351.573.000
169	Kab. Bogor	2.055.944.991.900	2.055.944.991.900	189.997.540.000	189.997.540.000
170	Kab. Ciamis	1.068.289.296.000	1.068.289.296.000	133.308.200.000	133.308.200.000
171	Kab. Cianjur	1.407.469.628.000	1.407.469.628.000	98.793.880.000	98.793.880.000
172	Kab. Cirebon	1.406.862.523.000	1.406.862.523.000	101.527.360.000	76.145.520.000
173	Kab. Garut	1.702.452.909.000	1.702.452.909.000	146.584.640.000	146.584.640.000
174	Kab. Indramayu	1.267.337.159.000	1.267.337.159.000	102.472.650.000	102.472.650.000
175	Kab. Karawang	1.188.478.470.000	1.188.478.470.000	124.624.020.000	124.624.020.000
176	Kab. Kuningan	1.112.271.883.000	1.112.271.883.000	74.369.300.000	74.369.300.000
177	Kab. Majalengka	1.092.495.173.000	1.092.495.173.000	80.150.500.000	80.150.500.000
178	Kab. Pangandaran	363.882.472.000	363.882.472.000	5.166.470.000	5.166.470.000
179	Kab. Purwakarta	786.592.072.000	786.592.072.000	41.050.470.000	41.050.470.000
180	Kab. Subang	1.139.779.043.000	1.139.779.043.000	74.710.080.000	74.710.080.000
181	Kab. Sukabumi	1.458.379.433.000	1.458.379.433.000	160.891.960.000	160.891.960.000
182	Kab. Sumedang	1.104.417.363.000	1.104.417.363.000	91.292.060.000	91.292.060.000
183	Kab. Tasikmalaya	1.342.934.278.000	1.342.934.278.000	110.312.210.000	110.312.210.000
184	Kab. Bandung Barat	992.254.884.000	992.254.884.000	49.797.380.000	49.797.380.000

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
185	Kota Bandung	1.596.749.326.000	1.596.749.326.000	63.607.140.000	47.705.355.000
186	Kota Bekasi	1.133.417.253.000	1.133.417.253.000	71.420.080.000	21.426.024.000
187	Kota Bogor	732.337.058.000	732.337.058.000	33.477.500.000	33.477.500.000
188	Kota Cirebon	583.927.691.000	583.927.691.000	32.145.380.000	32.145.380.000
189	Kota Depok	838.572.784.000	838.572.784.000	44.913.130.000	33.684.848.000
190	Kota Sukabumi	484.938.664.000	484.938.664.000	27.957.170.000	20.967.878.000
191	Kota Cimahi	537.371.615.000	537.371.615.000	35.913.670.000	26.935.253.000
192	Kota Tasikmalaya	732.508.313.000	732.508.313.000	42.397.940.000	42.397.940.000
193	Kota Banjar	342.267.848.000	342.267.848.000	25.380.740.000	19.035.555.000
194	**Provinsi Banten**	**728.490.012.000**	**728.490.012.000**	**16.717.970.000**	**12.538.478.000**
195	Kab. Lebak	1.000.878.505.000	1.000.878.505.000	104.216.110.000	104.216.110.000
196	Kab. Pandeglang	1.077.077.628.000	1.077.077.628.000	128.026.450.000	128.026.450.000
197	Kab. Serang	950.704.648.000	950.704.648.000	83.752.840.000	83.752.840.000
198	Kab. Tangerang	1.213.857.913.000	1.213.857.913.000	103.912.330.000	103.912.330.000
199	Kota Cilegon	490.917.599.000	490.917.599.000	481.020.000	144.306.000
200	Kota Tangerang	890.213.131.000	890.213.131.000	38.067.490.000	11.420.247.000
201	Kota Serang	564.282.698.000	564.282.698.000	42.079.440.000	42.079.440.000
202	Kota Tangerang Selatan	566.429.457.000	566.429.457.000	23.972.480.000	17.979.360.000
203	**Provinsi Jawa Tengah**	**1.803.931.189.000**	**1.803.931.189.000**	**79.165.240.000**	**79.165.240.000**
204	Kab. Banjarnegara	826.044.419.000	826.044.419.000	61.066.040.000	61.066.040.000
205	Kab. Banyumas	1.224.710.992.000	1.224.710.992.000	82.519.140.000	82.519.140.000
206	Kab. Batang	682.182.894.000	682.182.894.000	52.176.600.000	52.176.600.000
207	Kab. Blora	823.874.089.000	823.874.089.000	61.140.660.000	61.140.660.000
208	Kab. Boyolali	943.220.456.000	943.220.456.000	81.095.720.000	81.095.720.000
209	Kab. Brebes	1.186.969.845.000	1.186.969.845.000	97.975.310.000	97.975.310.000
210	Kab. Cilacap	1.291.121.704.000	1.291.121.704.000	110.203.960.000	110.203.960.000
211	Kab. Demak	795.874.748.000	795.874.748.000	74.599.670.000	74.599.670.000
212	Kab. Grobogan	977.675.512.000	977.675.512.000	85.838.690.000	85.838.690.000
213	Kab. Jepara	887.768.694.000	887.768.694.000	81.294.110.000	81.294.110.000
214	Kab. Karanganyar	870.001.752.000	870.001.752.000	57.238.710.000	57.238.710.000
215	Kab. Kebumen	1.125.568.884.000	1.125.568.884.000	80.709.170.000	80.709.170.000
216	Kab. Kendal	852.170.849.000	852.170.849.000	63.848.820.000	47.886.615.000
217	Kab. Klaten	1.142.586.588.000	1.142.586.588.000	66.576.420.000	66.576.420.000
218	Kab. Kudus	795.851.851.000	795.851.851.000	55.188.900.000	41.391.675.000
219	Kab. Magelang	965.124.427.000	965.124.427.000	64.981.490.000	48.736.118.000
220	Kab. Pati	1.043.498.355.000	1.043.498.355.000	79.852.630.000	79.852.630.000
221	Kab. Pekalongan	831.579.000.000	831.579.000.000	60.380.950.000	60.380.950.000
222	Kab. Pemalang	1.016.813.333.000	1.016.813.333.000	72.024.740.000	54.018.555.000
223	Kab. Purbalingga	777.989.499.000	777.989.499.000	57.267.330.000	57.267.330.000
224	Kab. Purworejo	854.737.495.000	854.737.495.000	57.024.620.000	57.024.620.000
225	Kab. Rembang	700.774.721.000	700.774.721.000	61.608.000.000	46.206.000.000
226	Kab. Semarang	848.736.010.000	848.736.010.000	67.407.340.000	67.407.340.000
227	Kab. Sragen	946.826.641.000	946.826.641.000	76.469.300.000	76.469.300.000
228	Kab. Sukoharjo	826.891.481.000	826.891.481.000	56.904.480.000	56.904.480.000
229	Kab. Tegal	1.044.211.310.000	1.044.211.310.000	84.862.430.000	63.646.823.000
230	Kab. Temanggung	708.764.753.000	708.764.753.000	56.702.810.000	56.702.810.000

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
231	Kab. Wonogiri	1.001.378.439.000	1.001.378.439.000	59.392.120.000	59.392.120.000
232	Kab. Wonosobo	724.245.009.000	724.245.009.000	59.423.010.000	59.423.010.000
233	Kota Magelang	417.211.449.000	417.211.449.000	34.209.870.000	22.365.783.000
234	Kota Pekalongan	412.871.094.000	412.871.094.000	34.173.710.000	34.173.710.000
235	Kota Salatiga	399.083.343.000	399.083.343.000	32.057.050.000	24.042.788.000
236	Kota Semarang	1.104.739.473.000	1.104.739.473.000	38.982.620.000	29.236.965.000
237	Kota Surakarta	710.803.934.000	710.803.934.000	43.848.110.000	43.848.110.000
238	Kota Tegal	390.732.536.000	390.732.536.000	30.578.350.000	22.933.763.000
239	**Provinsi DI Yogyakart**	**899.923.550.000**	**899.923.550.000**	**37.131.610.000**	**37.131.610.000**
240	Kab. Bantul	949.252.188.000	949.252.188.000	60.914.370.000	60.914.370.000
241	Kab. Gunungkidul	847.388.294.000	847.388.294.000	61.562.860.000	46.172.145.000
242	Kab. Kulon Progo	639.409.211.000	639.409.211.000	47.077.300.000	47.077.300.000
243	Kab. Sleman	952.102.502.000	952.102.502.000	48.673.210.000	36.504.908.000
244	Kota Yogyakarta	618.742.352.000	618.742.352.000	2.249.900.000	2.249.900.000
245	**Provinsi Jawa Timur**	**1.866.548.185.000**	**1.866.548.185.000**	**101.875.970.000**	**101.875.970.000**
246	Kab. Bangkalan	854.873.885.000	854.873.885.000	98.985.480.000	98.985.480.000
247	Kab. Banyuwangi	1.254.496.229.000	1.254.496.229.000	64.053.640.000	48.040.230.000
248	Kab. Blitar	1.027.251.687.000	1.027.251.687.000	71.417.130.000	71.417.130.000
249	Kab. Bojonegoro	920.522.357.000	920.522.357.000	59.399.170.000	44.549.378.000
250	Kab. Bondowoso	826.284.368.000	826.284.368.000	91.063.070.000	91.063.070.000
251	Kab. Gresik	863.397.519.000	863.397.519.000	72.051.260.000	72.051.260.000
252	Kab. Jember	1.539.722.508.000	1.539.722.508.000	87.951.090.000	87.951.090.000
253	Kab. Jombang	1.007.166.193.000	1.007.166.193.000	47.292.080.000	47.292.080.000
254	Kab. Kediri	1.144.878.533.000	1.144.878.533.000	68.479.340.000	51.359.505.000
255	Kab. Lamongan	1.042.124.514.000	1.042.124.514.000	77.845.000.000	77.845.000.000
256	Kab. Lumajang	898.217.627.000	898.217.627.000	69.257.830.000	51.943.373.000
257	Kab. Madiun	808.842.790.000	808.842.790.000	62.841.120.000	62.841.120.000
258	Kab. Magetan	840.086.597.000	840.086.597.000	58.964.980.000	58.964.980.000
259	Kab. Malang	1.572.191.571.000	1.572.191.571.000	130.050.580.000	130.050.580.000
260	Kab. Mojokerto	899.109.179.000	899.109.179.000	55.556.660.000	55.556.660.000
261	Kab. Nganjuk	1.004.037.764.000	1.004.037.764.000	67.785.290.000	50.838.968.000
262	Kab. Ngawi	980.530.132.000	980.530.132.000	65.997.050.000	65.997.050.000
263	Kab. Pacitan	700.743.024.000	700.743.024.000	51.869.860.000	51.869.860.000
264	Kab. Pamekasan	788.617.777.000	788.617.777.000	101.518.990.000	101.518.990.000
265	Kab. Pasuruan	1.068.868.861.000	1.068.868.861.000	83.588.340.000	83.588.340.000
266	Kab. Ponorogo	970.788.118.000	970.788.118.000	65.691.470.000	65.691.470.000
267	Kab. Probolinggo	929.380.602.000	929.380.602.000	69.707.430.000	69.707.430.000
268	Kab. Sampang	753.954.218.000	753.954.218.000	91.197.080.000	91.197.080.000
269	Kab. Sidoarjo	1.199.036.154.000	1.199.036.154.000	78.469.810.000	58.852.358.000
270	Kab. Situbondo	766.542.999.000	766.542.999.000	92.072.040.000	92.072.040.000
271	Kab. Sumenep	984.839.445.000	984.839.445.000	63.570.200.000	63.570.200.000
272	Kab. Trenggalek	815.508.143.000	815.508.143.000	61.684.690.000	61.684.690.000
273	Kab. Tuban	926.685.197.000	926.685.197.000	48.566.930.000	48.566.930.000
274	Kab. Tulungagung	1.083.859.022.000	1.083.859.022.000	73.752.100.000	73.752.100.000
275	Kota Blitar	392.221.911.000	392.221.911.000	30.796.880.000	23.097.660.000
276	Kota Kediri	634.351.539.000	634.351.539.000	34.980.320.000	26.235.240.000

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
277	Kota Madiun	511.089.913.000	511.089.913.000	31.922.300.000	31.922.300.000
278	Kota Malang	808.447.825.000	808.447.825.000	31.304.060.000	31.304.060.000
279	Kota Mojokerto	380.779.789.000	380.779.789.000	24.742.070.000	18.556.553.000
280	Kota Pasuruan	391.843.124.000	391.843.124.000	28.041.850.000	28.041.850.000
281	Kota Probolinggo	454.208.196.000	454.208.196.000	32.644.610.000	24.483.458.000
282	Kota Surabaya	1.200.889.359.000	1.200.889.359.000	66.182.230.000	19.854.669.000
283	Kota Batu	412.378.255.000	412.378.255.000	30.351.360.000	30.351.360.000
284	**Provinsi Kalimantan U**	**20.567.986.000**	**20.567.986.000**	**8.221.270.000**	**8.221.270.000**
285	Kab. Bulungan	332.429.548.000	332.429.548.000	10.711.300.000	8.033.475.000
286	Kab. Malinau	653.156.829.000	653.156.829.000	68.797.530.000	68.797.530.000
287	Kab. Nunukan	311.776.974.000	311.776.974.000	94.983.590.000	91.938.820.000
288	Kab. Tana Tidung	204.415.427.000	204.415.427.000	-	-
289	Kota Tarakan	249.949.676.000	249.949.676.000	3.786.510.000	2.839.883.000
290	Provinsi Kalimantan Bara	1.290.222.856.000	1.290.222.856.000	63.189.480.000	63.189.480.000
291	Kab. Bengkayang	494.245.071.000	494.245.071.000	89.401.960.000	89.401.960.000
292	Kab. Landak	589.729.984.000	589.729.984.000	88.502.770.000	88.502.770.000
293	Kab. Kapuas Hulu	873.552.160.000	873.552.160.000	108.050.020.000	108.050.020.000
294	Kab. Ketapang	1.020.384.603.000	1.020.384.603.000	137.025.350.000	137.025.350.000
295	Kab. Pontianak	503.427.631.000	503.427.631.000	50.207.800.000	50.207.800.000
296	Kab. Sambas	763.059.843.000	763.059.843.000	109.085.470.000	109.085.470.000
297	Kab. Sanggau	740.610.477.000	740.610.477.000	96.794.610.000	96.794.610.000
298	Kab. Sintang	820.084.062.000	820.084.062.000	129.675.800.000	129.675.800.000
299	**Kota Pontianak**	**670.090.725.000**	**670.090.725.000**	**14.343.830.000**	**14.343.830.000**
300	Kota Singkawang	467.557.081.000	467.557.081.000	47.868.460.000	47.868.460.000
301	Kab. Kayong Utara	380.125.181.000	380.125.181.000	61.970.540.000	61.970.540.000
302	Kab. Kubu Raya	699.700.430.000	699.700.430.000	82.076.280.000	82.076.280.000
303	Kab. Sekadau	424.128.392.000	424.128.392.000	65.559.220.000	65.559.220.000
304	Kab. Melawi	557.198.047.000	557.198.047.000	113.250.540.000	113.250.540.000
305	Provinsi Kalimantan Ten	1.152.428.738.000	1.152.428.738.000	61.929.830.000	61.929.830.000
306	Kab. Barito Selatan	552.539.111.000	552.539.111.000	43.394.420.000	43.394.420.000
307	Kab. Barito Utara	514.638.471.000	514.638.471.000	40.857.210.000	40.857.210.000
308	Kab. Kapuas	798.733.269.000	798.733.269.000	62.028.230.000	62.028.230.000
309	Kab. Kotawaringin Barat	597.665.464.000	597.665.464.000	50.769.000.000	50.769.000.000
310	Kab. Kotawaringin Timu	778.842.792.000	778.842.792.000	35.696.100.000	35.696.100.000
311	Kota Palangkaraya	589.449.668.000	589.449.668.000	42.229.350.000	42.229.350.000
312	Kab. Barito Timur	464.678.658.000	464.678.658.000	45.411.740.000	45.411.740.000
313	Kab. Murung Raya	585.234.541.000	585.234.541.000	3.791.770.000	1.515.142.500
314	**Kab. Pulang Pisau**	**504.013.063.000**	**504.013.063.000**	**48.819.520.000**	**36.614.640.000**
315	Kab. Gunung Mas	515.337.253.000	515.337.253.000	53.054.850.000	53.054.850.000
316	Kab. Lamandau	424.351.636.000	424.351.636.000	39.994.220.000	39.994.220.000
317	Kab. Sukamara	409.309.371.000	409.309.371.000	46.363.570.000	46.363.570.000
318	Kab. Katingan	645.888.942.000	645.888.942.000	51.378.640.000	51.378.640.000
319	Kab. Seruyan	545.446.415.000	545.446.415.000	62.736.600.000	62.736.600.000
320	Provinsi Kalimantan Sela	701.725.536.000	701.725.536.000	54.189.940.000	54.189.940.000
321	Kab. Banjar	624.136.721.000	624.136.721.000	26.255.820.000	26.255.820.000
322	Kab. Barito Kuala	512.015.486.000	512.015.486.000	87.586.590.000	87.586.590.000

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
323	Kab. Hulu Sungai Selata	478.093.768.000	478.093.768.000	48.282.940.000	48.282.940.000
324	Kab. Hulu Sungai Tengal	485.521.139.000	485.521.139.000	48.035.890.000	48.035.890.000
325	Kab. Hulu Sungai Utara	451.127.460.000	451.127.460.000	73.762.790.000	73.762.790.000
326	Kab. Kotabaru	611.898.456.000	611.898.456.000	35.822.460.000	26.866.845.000
327	Kab. Tabalong	444.103.855.000	444.103.855.000	1.858.700.000	1.394.025.000
328	**Kab. Tanah Laut**	**463.309.949.000**	**463.309.949.000**	**23.710.400.000**	**17.782.800.000**
329	Kab. Tapin	416.564.087.000	416.564.087.000	39.546.660.000	39.546.660.000
330	Kota Banjarbaru	389.107.868.000	389.107.868.000	48.678.260.000	48.678.260.000
331	Kota Banjarmasin	678.176.089.000	678.176.089.000	19.966.860.000	19.966.860.000
332	Kab. Balangan	319.202.334.000	319.202.334.000	12.973.910.000	12.973.910.000
333	Kab. Tanah Bumbu	426.008.216.000	426.008.216.000	15.487.870.000	11.615.903.000
334	Provinsi Kalimantan Tim	57.312.515.000	57.312.515.000	1.383.900.000	1.037.925.000
335	Kab. Berau	498.008.861.000	498.008.861.000	7.762.700.000	7.762.700.000
336	Kab. Kutai Kartanegara	127.010.980.000	127.010.980.000	72.361.100.000	54.270.825.000
337	Kab. Kutai Barat	468.645.135.000	468.645.135.000	90.679.200.000	90.679.200.000
338	Kab. Kutai Timur	565.746.999.000	565.746.999.000	15.432.190.000	15.432.190.000
339	**Kab. Mahakam Ulu**	**141.922.703.000**	**141.922.703.000**	**5.250.580.000**	**1.575.174.000**
340	Kab. Paser	308.251.183.000	308.251.183.000	7.705.700.000	5.779.275.000
341	Kota Balikpapan	449.982.262.000	449.982.262.000	7.989.240.000	7.989.240.000
342	Kota Bontang	153.185.776.000	153.185.776.000	-	-
343	Kota Samarinda	614.366.913.000	614.366.913.000	20.903.180.000	6.270.954.000
344	Kab. Penajam Paser Uta	188.713.598.000	188.713.598.000	2.216.250.000	1.662.188.000
345	**Provinsi Sulawesi Uta**	**949.852.622.000**	**949.852.622.000**	**59.675.060.000**	**59.675.060.000**
346	Kab. Bolaang Mongondo	485.630.988.000	485.630.988.000	58.717.450.000	58.717.450.000
347	Kab. Minahasa	595.565.085.000	595.565.085.000	56.058.270.000	56.058.270.000
348	Kab. Kepulauan Sangihe	471.848.315.000	471.848.315.000	121.138.950.000	121.138.950.000
349	Kota Bitung	469.745.053.000	469.745.053.000	52.869.750.000	52.869.750.000
350	Kota Manado	729.213.779.000	729.213.779.000	49.614.960.000	49.614.960.000
351	Kab. Kepulauan Talaud	428.036.855.000	428.036.855.000	107.826.770.000	107.826.770.000
352	Kab. Minahasa Selatan	476.105.045.000	476.105.045.000	53.610.170.000	53.610.170.000
353	Kab. Minahasa Tenggara	400.661.737.000	400.661.737.000	49.912.030.000	49.912.030.000
354	Kab. Kepulauan Siau Tag	340.218.976.000	340.218.976.000	50.541.920.000	50.541.920.000
355	Kota Kotamobagu	340.081.903.000	340.081.903.000	37.428.140.000	37.428.140.000
356	Kab. Bolaang Mongondo	288.406.875.000	288.406.875.000	41.528.520.000	41.528.520.000
357	Kab. Bolaang Mongondo	289.221.846.000	289.221.846.000	45.716.370.000	45.716.370.000
358	Kota Tomohon	376.334.135.000	376.334.135.000	37.483.280.000	37.483.280.000
359	Kab. Minahasa Utara	425.937.354.000	425.937.354.000	67.797.590.000	67.797.590.000
360	Kab. Bolaang Mongondo	326.625.009.000	326.625.009.000	45.002.630.000	33.751.973.000
361	**Provinsi Gorontalo**	**734.279.438.000**	**734.279.438.000**	**42.374.060.000**	**42.374.060.000**
362	Kab. Boalemo	389.548.660.000	389.548.660.000	72.407.310.000	72.407.310.000
363	Kab. Gorontalo	601.207.484.000	601.207.484.000	63.955.900.000	63.955.900.000
364	Kota Gorontalo	456.331.470.000	456.331.470.000	39.692.200.000	29.769.150.000
365	Kab. Pohuwato	438.955.271.000	438.955.271.000	71.842.950.000	71.842.950.000
366	Kab. Gorontalo Utara	324.121.552.000	324.121.552.000	67.844.540.000	67.844.540.000
367	Kab. Bone Bolango	408.500.750.000	408.500.750.000	52.754.060.000	52.754.060.000
368	**Provinsi Sulawesi Ter**	**1.087.885.014.000**	**1.087.885.014.000**	**63.942.480.000**	**63.942.480.000**

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
369	Kab. Banggai	794.840.029.000	794.840.029.000	81.720.980.000	81.720.980.000
370	Kab. Banggai Laut	153.501.061.000	153.501.061.000	4.973.950.000	4.973.950.000
371	Kab. Banggai Kepulauan	347.051.160.000	347.051.160.000	62.678.360.000	62.678.360.000
372	Kab. Buol	455.657.415.000	455.657.415.000	56.586.430.000	53.873.975.000
373	Kab. Tolitoli	535.154.857.000	535.154.857.000	75.730.880.000	75.730.880.000
374	Kab. Donggala	573.670.222.000	573.670.222.000	66.606.620.000	63.351.428.000
375	Kab. Morowali	286.764.166.000	286.764.166.000	63.792.110.000	63.792.110.000
376	Kab. Morowali Utara	395.447.752.000	395.447.752.000	-	-
377	Kab. Poso	642.281.901.000	642.281.901.000	82.058.250.000	82.058.250.000
378	Kota Palu	637.378.278.000	637.378.278.000	61.697.380.000	61.697.380.000
379	Kab. Parigi Moutong	660.265.526.000	660.265.526.000	83.047.870.000	83.047.870.000
380	Kab. Sigi	563.092.455.000	563.092.455.000	67.149.570.000	67.149.570.000
381	Kab. Tojo Una Una	482.416.599.000	482.416.599.000	75.756.450.000	75.756.450.000
382	**Provinsi Sulawesi Sel**	**1.209.598.741.000**	**1.209.598.741.000**	**72.976.480.000**	**72.976.480.000**
383	Kab. Bantaeng	424.570.861.000	424.570.861.000	47.287.960.000	47.287.960.000
384	Kab. Barru	471.135.015.000	471.135.015.000	50.755.420.000	50.755.420.000
385	Kab. Bone	950.401.934.000	950.401.934.000	86.315.710.000	86.315.710.000
386	Kab. Bulukumba	653.897.726.000	653.897.726.000	75.444.820.000	75.444.820.000
387	Kab. Enrekang	484.907.285.000	484.907.285.000	50.131.700.000	50.131.700.000
388	Kab. Gowa	746.700.092.000	746.700.092.000	80.227.530.000	80.227.530.000
389	Kab. Jeneponto	542.150.883.000	542.150.883.000	72.023.040.000	72.023.040.000
390	Kab. Luwu	595.699.150.000	595.699.150.000	68.010.320.000	68.010.320.000
391	Kab. Luwu Utara	573.100.112.000	573.100.112.000	51.879.100.000	51.879.100.000
392	Kab. Maros	614.598.482.000	614.598.482.000	78.426.630.000	78.426.630.000
393	Kab. Pangkajene Kepula	623.418.990.000	623.418.990.000	72.547.490.000	72.547.490.000
394	Kab. Pinrang	629.285.550.000	629.285.550.000	56.046.540.000	56.046.540.000
395	Kab. Kepulauan Selayar	458.019.013.000	458.019.013.000	69.809.030.000	69.809.030.000
396	Kab. Sidenreng Rappang	533.655.220.000	533.655.220.000	51.755.940.000	51.755.940.000
397	Kab. Sinjai	521.628.340.000	521.628.340.000	55.315.050.000	55.315.050.000
398	Kab. Soppeng	569.126.996.000	569.126.996.000	43.719.300.000	43.719.300.000
399	Kab. Takalar	565.195.363.000	565.195.363.000	64.132.720.000	64.132.720.000
400	Kab. Tana Toraja	486.447.423.000	486.447.423.000	58.947.980.000	58.947.980.000
401	Kab. Wajo	631.247.160.000	631.247.160.000	63.351.730.000	63.351.730.000
402	Kota Parepare	426.405.955.000	426.405.955.000	32.485.350.000	32.485.350.000
403	Kab. Toraja Utara	448.417.228.000	448.417.228.000	86.030.180.000	86.030.180.000
404	Kota Makassar	1.114.853.212.000	1.114.853.212.000	64.792.920.000	48.594.690.000
405	Kota Palopo	449.242.430.000	449.242.430.000	36.481.000.000	36.481.000.000
406	Kab. Luwu Timur	462.819.314.000	462.819.314.000	55.595.030.000	55.595.030.000
407	**Provinsi Sulawesi Bar**	**776.214.122.000**	**776.214.122.000**	**50.585.710.000**	**50.585.710.000**
408	Kab. Majene	457.679.754.000	457.679.754.000	67.736.960.000	67.736.960.000
409	Kab. Mamuju	463.324.979.000	463.324.979.000	70.747.100.000	70.747.100.000
410	Kab. Mamuju Tengah	176.375.604.000	176.375.604.000	-	-
411	Kab. Polewali Mandar	603.283.761.000	603.283.761.000	80.353.530.000	80.353.530.000
412	Kab. Mamasa	438.577.823.000	438.577.823.000	75.826.260.000	75.826.260.000
413	Kab. Mamuju Utara	383.392.281.000	383.392.281.000	63.144.660.000	63.144.660.000
414	**Provinsi Sulawesi Ten**	**1.053.636.011.000**	**1.053.636.011.000**	**58.750.010.000**	**58.750.010.000**

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
415	Kab. Buton	601.624.424.000	601.624.424.000	83.915.420.000	83.915.420.000
416	Kab. Konawe	584.033.036.000	584.033.036.000	84.900.950.000	84.900.950.000
417	Kab. Konawe Kepulauan	97.698.630.000	97.698.630.000	-	-
418	Kab. Kolaka	454.342.506.000	454.342.506.000	68.059.090.000	68.059.090.000
419	Kab. Kolaka Timur	223.177.156.000	223.177.156.000	5.486.520.000	5.486.520.000
420	Kab. Muna	689.447.643.000	689.447.643.000	81.175.060.000	81.175.060.000
421	Kota Kendari	611.179.529.000	611.179.529.000	55.353.980.000	55.353.980.000
422	Kota Bau-bau	465.583.877.000	465.583.877.000	41.601.960.000	41.601.960.000
423	Kab. Konawe Selatan	581.807.666.000	581.807.666.000	105.956.750.000	105.956.750.000
424	Kab. Bombana	414.006.948.000	414.006.948.000	77.800.120.000	77.800.120.000
425	Kab. Konawe Utara	441.295.580.000	441.295.580.000	54.715.280.000	54.715.280.000
426	Kab. Buton Utara	366.551.466.000	366.551.466.000	64.860.930.000	64.860.930.000
427	Kab. Wakatobi	387.267.035.000	387.267.035.000	71.555.960.000	71.555.960.000
428	Kab. Kolaka Utara	438.746.757.000	438.746.757.000	67.739.320.000	67.739.320.000
429	**Provinsi Bali**	**832.297.473.000**	**832.297.473.000**	**41.600.750.000**	**41.600.750.000**
430	Kab. Badung	324.815.695.000	324.815.695.000	551.160.000	551.160.000
431	Kab. Bangli	486.381.005.000	486.381.005.000	43.195.920.000	43.195.920.000
432	Kab. Buleleng	854.532.248.000	854.532.248.000	64.898.210.000	64.898.210.000
433	Kab. Gianyar	626.674.608.000	626.674.608.000	44.882.840.000	44.882.840.000
434	Kab. Jembrana	484.825.804.000	484.825.804.000	43.546.330.000	43.546.330.000
435	Kab. Karangasem	614.793.461.000	614.793.461.000	60.473.980.000	60.473.980.000
436	Kab. Klungkung	474.427.796.000	474.427.796.000	42.267.390.000	42.267.390.000
437	Kab. Tabanan	719.621.530.000	719.621.530.000	58.514.490.000	58.514.490.000
438	Kota Denpasar	615.961.906.000	615.961.906.000	24.642.780.000	7.392.834.000
439	**Provinsi Nusa Tengga**	**980.390.340.000**	**980.390.340.000**	**54.663.430.000**	**54.663.430.000**
440	Kab. Bima	771.058.947.000	771.058.947.000	90.945.340.000	90.945.340.000
441	Kab. Dompu	521.667.743.000	521.667.743.000	66.001.320.000	66.001.320.000
442	Kab. Lombok Barat	685.318.844.000	685.318.844.000	70.713.050.000	70.713.050.000
443	Kab. Lombok Tengah	865.423.847.000	865.423.847.000	80.921.100.000	80.921.100.000
444	Kab. Lombok Timur	1.039.124.622.000	1.039.124.622.000	123.757.050.000	123.757.050.000
445	Kab. Sumbawa	724.963.659.000	724.963.659.000	81.244.790.000	81.244.790.000
446	Kota Mataram	564.661.391.000	564.661.391.000	52.222.910.000	52.222.910.000
447	Kab. Lombok Utara	339.993.327.000	339.993.327.000	53.168.730.000	53.168.730.000
448	Kota Bima	410.483.310.000	410.483.310.000	33.992.090.000	33.992.090.000
449	Kab. Sumbawa Barat	349.283.834.000	349.283.834.000	56.099.940.000	56.099.940.000
450	**Provinsi Nusa Tengga**	**1.131.687.590.000**	**1.131.687.590.000**	**74.235.910.000**	**74.235.910.000**
451	Kab. Alor	510.220.213.000	510.220.213.000	98.729.400.000	98.729.400.000
452	Kab. Belu	349.381.471.000	349.381.471.000	95.663.260.000	95.663.260.000
453	Kab. Ende	546.281.332.000	546.281.332.000	63.181.260.000	50.250.643.000
454	Kab. Flores Timur	531.905.134.000	531.905.134.000	74.595.630.000	74.595.630.000
455	Kab. Kupang	598.332.549.000	598.332.549.000	85.079.900.000	67.238.878.000
456	Kab. Lembata	388.625.200.000	388.625.200.000	64.233.750.000	64.233.750.000
457	Kab. Malaka	285.088.668.000	285.088.668.000	-	-
458	Kab. Manggarai	507.725.930.000	507.725.930.000	109.431.210.000	109.431.210.000
459	Kab. Ngada	410.643.171.000	410.643.171.000	64.062.580.000	64.062.580.000
460	Kab. Sikka	553.376.947.000	553.376.947.000	69.605.960.000	69.605.960.000

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
461	Kab. Sumba Barat	350.946.291.000	350.946.291.000	58.270.250.000	46.492.555.000
462	Kab. Sumba Timur	561.028.322.000	561.028.322.000	71.641.430.000	71.641.430.000
463	Kab. Timor Tengah Selat	658.897.183.000	658.897.183.000	94.698.240.000	74.892.905.000
464	Kab. Timor Tengah Utara	506.713.353.000	506.713.353.000	90.484.870.000	71.207.055.000
465	Kota Kupang	598.804.801.000	598.804.801.000	61.439.470.000	61.439.470.000
466	Kab. Rote Ndao	361.623.423.000	361.623.423.000	83.533.460.000	83.533.460.000
467	Kab. Nagekeo	381.411.361.000	381.411.361.000	68.783.710.000	68.783.710.000
468	Kab. Sumba Tengah	302.033.721.000	302.033.721.000	58.565.430.000	58.565.430.000
469	Kab. Sumba Barat Daya	413.582.665.000	413.582.665.000	71.930.780.000	53.948.086.000
470	Kab. Manggarai Timur	421.442.287.000	421.442.287.000	76.618.540.000	76.618.540.000
471	Kab. Sabu Raijua	314.254.688.000	314.254.688.000	69.320.400.000	69.320.400.000
472	Kab. Manggarai Barat	442.388.310.000	442.388.310.000	92.034.790.000	92.034.790.000
473	**Provinsi Maluku**	**1.019.704.312.000**	**1.019.704.312.000**	**70.134.160.000**	**70.134.160.000**
474	Kab. Maluku Tenggara B	487.859.601.000	487.859.601.000	104.052.840.000	104.052.840.000
475	Kab. Maluku Tengah	848.638.632.000	848.638.632.000	97.814.830.000	97.814.830.000
476	Kab. Maluku Tenggara	399.953.093.000	399.953.093.000	57.677.580.000	57.677.580.000
477	Kab. Buru	392.051.367.000	392.051.367.000	56.054.990.000	56.054.990.000
478	Kota Ambon	601.627.489.000	601.627.489.000	45.444.830.000	45.444.830.000
479	Kab. Seram Bagian Bara	495.911.700.000	495.911.700.000	63.231.640.000	63.231.640.000
480	Kab. Seram Bagian Timu	436.637.414.000	436.637.414.000	60.725.490.000	60.725.490.000
481	Kab. Maluku Barat Daya	483.431.553.000	483.431.553.000	107.623.610.000	80.717.708.000
482	Kab. Buru Selatan	362.524.010.000	362.524.010.000	81.930.230.000	81.930.230.000
483	Kab. Kepulauan Aru	469.996.166.000	469.996.166.000	62.511.030.000	62.511.030.000
484	Kota Tual	311.236.553.000	311.236.553.000	37.646.940.000	37.646.940.000
485	**Provinsi Maluku Utara**	**906.623.550.000**	**906.623.550.000**	**74.623.090.000**	**74.623.090.000**
486	Kab. Halmahera Tengah	392.180.412.000	392.180.412.000	62.551.620.000	62.551.620.000
487	Kab. Halmahera Barat	410.351.504.000	410.351.504.000	70.200.420.000	70.200.420.000
488	Kota Ternate	536.443.879.000	536.443.879.000	59.724.230.000	59.724.230.000
489	Kab. Halmahera Timur	372.886.814.000	372.886.814.000	74.307.650.000	74.307.650.000
490	Kota Tidore Kepulauan	497.417.022.000	497.417.022.000	49.139.160.000	49.139.160.000
491	Kab. Kepulauan Sula	339.809.267.000	339.809.267.000	75.736.610.000	75.736.610.000
492	Kab. Pulau Morotai	323.758.154.000	323.758.154.000	86.889.810.000	86.889.810.000
493	Kab. Pulau Taliabu	127.680.329.000	127.680.329.000	7.500.260.000	5.625.195.000
494	Kab. Halmahera Selatan	524.814.372.000	524.814.372.000	58.212.790.000	58.212.790.000
495	Kab. Halmahera Utara	422.491.517.000	422.491.517.000	73.264.460.000	73.264.460.000
496	Kab. Yalimo	567.217.623.000	567.217.623.000	137.804.390.000	137.804.390.000
497	Kab. Lanny Jaya	594.234.876.000	594.234.876.000	157.960.530.000	157.960.530.000
498	**Provinsi Papua**	**1.991.202.341.100**	**1.991.202.341.100**	**120.505.640.000**	**120.505.640.000**
499	Kab. Biak Numfor	525.097.245.000	525.097.245.000	65.693.550.000	65.693.550.000
500	Kab. Jayapura	597.199.562.000	597.199.562.000	65.499.130.000	65.499.130.000
501	Kab. Jayawijaya	608.581.629.000	608.581.629.000	123.815.830.000	123.815.830.000
502	Kab. Merauke	1.161.464.820.000	1.161.464.820.000	193.813.030.000	193.813.030.000
503	Kab. Mimika	582.498.865.000	582.498.865.000	81.391.560.000	81.391.560.000
504	Kab. Nabire	643.898.180.000	643.898.180.000	80.732.760.000	80.732.760.000
505	Kab. Paniai	508.843.453.000	508.843.453.000	111.210.740.000	111.210.740.000
506	Kab. Puncak Jaya	632.414.392.000	632.414.392.000	136.510.320.000	136.510.320.000

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
507	Kab. Kepulauan Yapen	469.840.515.000	469.840.515.000	78.926.350.000	78.926.350.000
508	Kota Jayapura	624.312.379.000	624.312.379.000	52.060.640.000	52.060.640.000
509	Kab. Sarmi	667.002.043.000	667.002.043.000	68.788.040.000	68.788.040.000
510	Kab. Keerom	500.546.216.000	500.546.216.000	100.103.300.000	100.103.300.000
511	Kab. Yahukimo	606.920.946.000	606.920.946.000	105.880.520.000	105.880.520.000
512	Kab. Pegunungan Bintan	784.449.474.000	784.449.474.000	161.288.440.000	161.288.440.000
513	Kab. Tolikara	661.680.651.000	661.680.651.000	158.630.000.000	158.630.000.000
514	Kab. Boven Digoel	740.002.449.000	740.002.449.000	78.651.610.000	75.559.855.000
515	Kab. Mappi	728.591.348.000	728.591.348.000	97.101.660.000	72.826.246.000
516	Kab. Asmat	822.115.038.000	822.115.038.000	90.908.630.000	90.908.630.000
517	Kab. Waropen	467.780.810.000	467.780.810.000	60.333.600.000	60.333.600.000
518	Kab. Mamberamo Raya	650.844.607.000	650.844.607.000	72.764.510.000	72.764.510.000
519	Kab. Mamberamo Tenga	554.042.420.000	554.042.420.000	128.559.490.000	128.559.490.000
520	Kab. Nduga	506.372.604.000	506.372.604.000	109.849.250.000	106.069.073.000
521	Kab. Dogiyai	462.108.590.000	462.108.590.000	85.330.020.000	85.330.020.000
522	Kab. Intan Jaya	636.141.574.000	636.141.574.000	128.554.650.000	128.554.650.000
523	Kab. Puncak	722.726.455.000	722.726.455.000	153.901.650.000	153.901.650.000
524	Kab. Deiyai	405.595.790.000	405.595.790.000	79.777.260.000	79.777.260.000
525	Kab. Supiori	409.397.485.000	409.397.485.000	93.836.450.000	93.836.450.000
526	**Provinsi Papua Barat**	**1.122.264.659.000**	**1.122.264.659.000**	**61.215.730.000**	**61.215.730.000**
527	Kab. Sorong	473.691.257.000	473.691.257.000	82.859.570.000	82.859.570.000
528	Kab. Manokwari	426.037.888.000	426.037.888.000	55.155.510.000	55.155.510.000
529	Kab. Manokwari Selatan	85.432.173.000	85.432.173.000	4.737.640.000	4.737.640.000
530	Kab. Fak fak	626.893.988.000	626.893.988.000	53.399.520.000	53.399.520.000
531	Kota Sorong	420.363.515.000	420.363.515.000	45.538.650.000	45.538.650.000
532	Kab. Pegunungan Arfak	91.403.520.000	91.403.520.000	8.467.420.000	8.467.420.000
533	Kab. Sorong Selatan	396.040.495.000	396.040.495.000	64.193.600.000	64.193.600.000
534	Kab. Raja Ampat	591.036.221.000	591.036.221.000	98.621.830.000	98.621.830.000
535	Kab. Teluk Bintuni	576.627.839.000	576.627.839.000	66.232.160.000	66.232.160.000
536	Kab. Teluk Wondama	373.039.643.000	373.039.643.000	63.431.870.000	63.431.870.000
537	Kab. Tambrauw	494.724.124.000	494.724.124.000	85.346.700.000	85.346.700.000
538	Kab. Maybrat	377.464.887.000	377.464.887.000	72.629.190.000	72.629.190.000
539	Kab. Kaimana	561.572.509.000	561.572.509.000	61.285.240.000	61.285.240.000
540	**Dana cadangan**	.	.	.	.
	JUMLAH	**341.219.325.651.000**	**341.219.325.651.000**	**33.000.000.000.000**	**31.894.470.734.500**

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS, DANA PENYESUAIAN DAN TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
1	**Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**	**7.287.731.554.000**	**6.824.386.514.000**	**462.732.260.000**	-	**7.287.118.774.000**
2	Kab. Aceh Barat	74.293.565.000	-	74.293.565.000	-	74.293.565.000
3	Kab. Aceh Besar	106.820.408.000	-	106.820.408.000	-	106.820.408.000
4	Kab. Aceh Selatan	79.902.481.000	-	79.902.481.000	-	79.902.481.000
5	Kab. Aceh Singkil	31.621.176.000	-	22.515.900.000	-	22.515.900.000
6	Kab. Aceh Tengah	64.491.572.000	-	64.491.572.000	-	64.491.572.000
7	Kab. Aceh Tenggara	44.539.215.000	-	44.539.215.000	-	44.539.215.000
8	Kab. Aceh Timur	73.765.660.000	-	73.765.660.000	-	73.765.660.000
9	Kab. Aceh Utara	133.473.876.000	-	133.473.876.000	-	133.473.876.000
10	Kab. Bireuen	131.502.795.000	-	131.502.795.000	-	131.502.795.000
11	Kab. Pidie	121.371.507.000	-	121.371.507.000	-	121.371.507.000
12	Kab. Simeulue	35.792.800.000	-	27.518.621.000	-	27.518.621.000
13	Kota Banda Aceh	139.212.961.000	-	139.212.961.000	-	139.212.961.000
14	Kota Sabang	23.676.254.000	-	18.301.535.000	-	18.301.535.000
15	Kota Langsa	70.820.311.000	-	70.820.311.000	-	70.820.311.000
16	Kota Lhokseumawe	68.148.971.000	-	68.148.971.000	-	68.148.971.000
17	Kab. Nagan Raya	52.857.657.000	-	52.857.657.000	-	52.857.657.000
18	Kab. Aceh Jaya	19.269.452.000	-	12.366.005.000	-	12.366.005.000
19	Kab. Pidie Jaya	69.659.426.000	-	69.659.426.000	-	69.659.426.000
20	Kab. Aceh Barat Daya	56.857.128.000	-	56.857.128.000	-	56.857.128.000
21	Kab. Gayo Lues	33.142.642.000	-	9.116.193.000	-	9.116.193.000
22	Kab. Aceh Tamiang	64.386.323.000	-	64.386.323.000	-	64.386.323.000
23	Kab. Bener Meriah	41.348.879.000	-	41.348.879.000	-	41.348.879.000
24	Kota Subulussalam	21.668.673.000	-	21.668.673.000	-	21.668.673.000
25	**Provinsi Sumatera Utara**	**1.540.881.190.000**	-	**1.543.832.432.000**	-	**1.543.832.432.000**
26	Kab. Asahan	153.249.599.000	-	153.249.599.000	-	153.249.599.000
27	Kab. Dairi	81.481.689.000	-	81.481.689.000	-	81.481.689.000
28	Kab. Deli Serdang	312.110.351.000	-	312.110.351.000	-	312.110.351.000
29	Kab. Karo	115.443.290.000	-	115.443.290.000	-	115.443.290.000
30	Kab. Labuhan Batu	80.195.091.000	-	80.195.091.000	-	80.195.091.000
31	Kab. Langkat	226.277.619.000	-	218.641.119.000	-	218.641.119.000
32	Kab. Mandailing Natal	101.470.443.000	-	101.470.443.000	-	101.470.443.000
33	Kab. Nias	9.970.611.000	-	9.970.611.000	-	9.970.611.000
34	Kab. Simalungun	220.763.020.000	-	220.763.020.000	-	220.763.020.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	54.780.600.000	-	54.780.600.000	-	54.780.600.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	77.014.597.000	-	77.014.597.000	-	77.014.597.000
37	Kab. Tapanuli Utara	106.872.852.000	-	106.872.852.000	-	106.872.852.000
38	Kab. Toba Samosir	119.457.304.000	-	88.766.326.000	-	88.766.326.000
39	Kota Binjai	104.611.932.000	-	104.611.932.000	-	104.611.932.000
40	Kota Medan	364.744.140.000	-	364.744.140.000	-	364.744.140.000
41	Kota Pematang Siantar	143.691.417.000	-	107.731.409.000	-	107.731.409.000
42	Kota Sibolga	52.497.401.000	-	39.612.759.000	-	39.612.759.000
43	Kota Tanjung Balai	46.952.240.000	-	35.822.109.000	-	35.822.109.000
44	Kab. Batu Bara	83.986.287.000	-	83.986.287.000	-	83.986.287.000
45	Kab. Labuhan Batu Utara	66.500.374.000	-	66.500.374.000	-	66.500.374.000
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	45.082.567.000	-	45.082.567.000	-	45.082.567.000
47	Kab. Padang Lawas Utara	35.930.122.000	-	35.930.122.000	-	35.930.122.000
48	Kab. Padang Lawas	39.905.770.000	-	39.905.770.000	-	39.905.770.000
49	Kab. Nias Utara	19.812.355.000	-	19.812.355.000	-	19.812.355.000
50	Kab. Nias Barat	24.510.766.000	-	18.380.764.000	-	18.380.764.000
51	Kota Tebing Tinggi	68.632.763.000	-	68.632.763.000	-	68.632.763.000
52	Kota Padang Sidempuan	79.274.796.000	-	79.274.796.000	-	79.274.796.000
53	Kab. Pakpak Bharat	54.887.010.000	-	40.893.606.000	-	40.893.606.000
54	Kab. Nias Selatan	55.723.510.000	-	17.091.955.000	-	17.091.955.000
55	Kab. Humbang Hasundutan	84.144.504.000	-	84.144.504.000	-	84.144.504.000
56	Kab. Serdang Bedagai	131.498.553.000	-	131.498.553.000	-	131.498.553.000
57	Kab. Samosir	52.651.457.000	-	52.651.457.000	-	52.651.457.000
58	Kota Gunungsitoli	47.378.349.000	-	47.378.349.000	-	47.378.349.000
59	**Provinsi Sumatera Barat**	**555.847.860.000**	-	**562.077.086.500**	-	**562.077.086.500**

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS, DANA PENYESUAIAN DAN TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
60	Kab. Lima Puluh Kota	136.840.861.000	-	136.840.861.000	-	136.840.861.000
61	Kab. Agam	170.904.503.000	-	170.904.503.000	-	170.904.503.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	3.856.074.000	-	3.856.074.000	-	3.856.074.000
63	Kab. Padang Pariaman	156.877.950.000	-	156.877.950.000	-	156.877.950.000
64	Kab. Pasaman	99.104.894.000	-	99.104.894.000	-	99.104.894.000
65	Kab. Pesisir Selatan	142.408.212.000	-	142.408.212.000	-	142.408.212.000
66	Kab. Sijunjung	64.507.055.000	-	64.507.055.000	-	64.507.055.000
67	Kab. Solok	134.533.707.000	-	134.533.707.000	-	134.533.707.000
68	Kab. Tanah Datar	139.345.968.000	-	139.345.968.000	-	139.345.968.000
69	Kota Bukit Tinggi	61.623.658.000	-	61.623.658.000	-	61.623.658.000
70	Kota Padang Panjang	30.186.585.000	-	30.186.585.000	-	30.186.585.000
71	Kota Padang	323.050.825.000	-	323.050.825.000	-	323.050.825.000
72	Kota Payakumbuh	60.016.744.000	-	60.016.744.000	-	60.016.744.000
73	Kota Sawahlunto	34.786.227.000	-	34.786.227.000	-	34.786.227.000
74	Kota Solok	42.774.893.000	-	42.774.893.000	-	42.774.893.000
75	Kota Pariaman	94.244.378.000	-	68.911.335.000	-	68.911.335.000
76	Kab. Pasaman Barat	93.613.965.000	-	93.613.965.000	-	93.613.965.000
77	Kab. Dharmasraya	53.281.259.000	-	53.281.259.000	-	53.281.259.000
78	Kab. Solok Selatan	51.631.743.000	-	51.631.743.000	-	51.631.743.000
79	**Provinsi Riau**	**648.436.030.000**	-	**655.513.513.000**	-	**655.513.513.000**
80	Kab. Bengkalis	100.996.073.000	-	100.996.073.000	-	100.996.073.000
81	Kab. Indragiri Hilir	88.926.443.000	-	88.926.443.000	-	88.926.443.000
82	Kab. Indragiri Hulu	121.400.553.000	-	121.400.553.000	-	121.400.553.000
83	Kab. Kampar	146.988.739.000	-	146.988.739.000	-	146.988.739.000
84	Kab. Kuantan Singingi	93.403.958.000	-	93.403.958.000	-	93.403.958.000
85	Kab. Pelalawan	53.620.082.000	-	53.620.082.000	-	53.620.082.000
86	Kab. Rokan Hilir	43.683.839.000	-	43.683.839.000	-	43.683.839.000
87	Kab. Rokan Hulu	75.502.300.000	-	71.180.613.000	-	71.180.613.000
88	Kab. Siak	90.994.892.000	-	90.994.892.000	-	90.994.892.000
89	Kota Dumai	69.830.199.000	-	69.830.199.000	-	69.830.199.000
90	Kota Pekanbaru	194.482.545.000	-	194.482.545.000	-	194.482.545.000
91	Kab. Kepulauan Meranti	40.043.489.000	-	40.043.489.000	-	40.043.489.000
92	**Provinsi Kepulauan Riau**	**177.719.360.000**	-	**184.017.160.000**	-	**184.017.160.000**
93	Kab. Bintan	51.033.390.000	-	51.033.390.000	-	51.033.390.000
94	Kab. Natuna	70.243.548.000	-	52.472.792.000	-	52.472.792.000
95	Kab. Karimun	85.611.381.000	-	68.918.059.000	-	68.918.059.000
96	Kota Batam	81.744.561.000	-	81.744.561.000	-	81.744.561.000
97	Kab. Kepulauan Anambas	8.909.846.000	-	6.419.880.000	-	6.419.880.000
98	Kota Tanjung Pinang	54.849.228.000	-	54.849.228.000	-	54.849.228.000
99	Kab. Lingga	34.012.160.000	-	25.765.493.000	-	25.765.493.000
100	**Provinsi Jambi**	**363.858.543.000**	-	**367.906.935.000**	-	**367.906.935.000**
101	Kab. Batanghari	72.651.943.000	-	72.651.943.000	-	72.651.943.000
102	Kab. Bungo	86.718.382.000	-	86.718.382.000	-	86.718.382.000
103	Kab. Kerinci	81.343.532.000	-	81.343.532.000	-	81.343.532.000
104	Kab. Merangin	108.765.948.000	-	108.765.948.000	-	108.765.948.000
105	Kab. Muaro Jambi	86.322.071.000	-	86.322.071.000	-	86.322.071.000
106	Kab. Sarolangun	58.813.772.000	-	58.813.772.000	-	58.813.772.000
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	65.528.700.000	-	65.528.700.000	-	65.528.700.000
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	64.947.022.000	-	64.947.022.000	-	64.947.022.000
109	Kab. Tebo	72.171.362.000	-	72.171.362.000	-	72.171.362.000
110	Kota Jambi	147.415.806.000	-	147.415.806.000	-	147.415.806.000
111	Kota Sungai Penuh	63.315.902.000	-	63.315.902.000	-	63.315.902.000
112	**Provinsi Sumatera Selatan**	**806.048.020.000**	-	**812.304.837.500**	-	**812.304.837.500**
113	Kab. Lahat	109.108.650.000	-	109.108.650.000	-	109.108.650.000
114	Kab. Musi Banyuasin	80.423.800.000	-	80.423.800.000	-	80.423.800.000
115	Kab. Musi Rawas	49.538.104.000	-	49.538.104.000	-	49.538.104.000
116	Kab. Musi Rawas Utara	13.759.972.000	-	13.759.972.000	-	13.759.972.000
117	Kab. Muara Enim	109.485.478.000	-	109.485.478.000	-	109.485.478.000
118	Kab. Ogan Komering Ilir	104.309.258.000	-	104.309.258.000	-	104.309.258.000

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS, DANA PENYESUAIAN DAN TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
119	Kab. Ogan Komering Ulu	62.613.966.000	-	62.613.966.000	-	62.613.966.000
120	Kota Palembang	426.003.126.000	-	426.003.126.000	-	426.003.126.000
121	Kota Pagar Alam	39.911.829.000	-	39.911.829.000	-	39.911.829.000
122	Kota Lubuk Linggau	58.220.033.000	-	58.220.033.000	-	58.220.033.000
123	Kota Prabumulih	40.895.377.000	-	40.895.377.000	-	40.895.377.000
124	Kab. Empat Lawang	44.962.403.000	-	33.166.599.000	-	33.166.599.000
125	Kab. Banyuasin	118.415.367.000	-	118.415.367.000	-	118.415.367.000
126	Kab. Ogan Ilir	76.181.134.000	-	76.181.134.000	-	76.181.134.000
127	Kab. OKU Timur	130.977.887.000	-	130.977.887.000	-	130.977.887.000
128	Kab. OKU Selatan	35.831.830.000	-	35.831.830.000	-	35.831.830.000
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	16.705.300.000	-	16.705.300.000	-	16.705.300.000
130	**Provinsi Bangka Belitung**	**131.299.480.000**	-	**131.800.417.500**	-	**131.800.417.500**
131	Kab. Bangka	63.476.174.000	-	63.476.174.000	-	63.476.174.000
132	Kab. Belitung	99.885.032.000	-	74.703.666.000	-	74.703.666.000
133	Kota Pangkal Pinang	73.142.789.000	-	55.096.212.000	-	55.096.212.000
134	Kab. Bangka Selatan	31.526.080.000	-	31.526.080.000	-	31.526.080.000
135	Kab. Bangka Tengah	106.643.359.000	-	85.811.665.000	-	85.811.665.000
136	Kab. Bangka Barat	49.873.629.000	-	37.517.801.000	-	37.517.801.000
137	Kab. Belitung Timur	42.955.980.000	-	42.955.980.000	-	42.955.980.000
138	**Provinsi Bengkulu**	**206.876.260.000**	-	**207.208.303.500**	-	**207.208.303.500**
139	Kab. Bengkulu Selatan	76.119.045.000	-	76.119.045.000	-	76.119.045.000
140	Kab. Bengkulu Utara	84.091.429.000	-	84.091.429.000	-	84.091.429.000
141	Kab. Rejang Lebong	104.979.311.000	-	104.979.311.000	-	104.979.311.000
142	Kota Bengkulu	163.431.417.000	-	123.462.043.000	-	123.462.043.000
143	Kab. Kaur	40.845.817.000	-	40.845.817.000	-	40.845.817.000
144	Kab. Seluma	51.856.906.000	-	51.856.906.000	-	51.856.906.000
145	Kab. Mukomuko	58.471.983.000	-	43.897.713.000	-	43.897.713.000
146	Kab. Lebong	49.215.371.000	-	36.744.353.000	-	36.744.353.000
147	Kab. Bengkulu Tengah	47.736.525.000	-	47.736.525.000	-	47.736.525.000
148	Kab. Kepahiang	46.956.072.000	-	46.956.072.000	-	46.956.072.000
149	**Provinsi Lampung**	**754.101.430.000**	-	**753.234.520.500**	-	**753.234.520.500**
150	Kab. Lampung Barat	59.268.207.000	-	59.268.207.000	-	59.268.207.000
151	Kab. Lampung Selatan	162.256.147.000	-	162.256.147.000	-	162.256.147.000
152	Kab. Lampung Tengah	275.050.935.000	-	275.050.935.000	-	275.050.935.000
153	Kab. Lampung Utara	184.599.124.000	-	184.599.124.000	-	184.599.124.000
154	Kab. Lampung Timur	247.313.235.000	-	247.313.235.000	-	247.313.235.000
155	Kab. Tanggamus	124.151.778.000	-	124.151.778.000	-	124.151.778.000
156	Kab. Tulang Bawang	58.044.530.000	-	58.044.530.000	-	58.044.530.000
157	Kab. Way Kanan	78.804.967.000	-	78.804.967.000	-	78.804.967.000
158	Kab. Pesawaran	97.229.480.000	-	97.229.480.000	-	97.229.480.000
159	Kab. Pesisir Barat	36.537.892.000	-	36.537.892.000	-	36.537.892.000
160	Kab. Pringsewu	150.266.995.000	-	150.266.995.000	-	150.266.995.000
161	Kab. Mesuji	35.921.797.000	-	27.006.316.000	-	27.006.316.000
162	Kab. Tulang Bawang Barat	62.026.620.000	-	62.026.620.000	-	62.026.620.000
163	Kota Bandar Lampung	276.444.057.000	-	276.444.057.000	-	276.444.057.000
164	Kota Metro	77.989.976.000	-	77.989.976.000	-	77.989.976.000
165	**Provinsi DKI Jakarta**	**2.514.790.970.000**	-	**2.507.585.740.500**	-	**2.507.585.740.500**
166	**Provinsi Jawa Barat**	**4.025.356.230.000**	-	**3.998.002.862.500**	-	**3.998.002.862.500**
167	Kab. Bandung	523.804.154.000	-	523.804.154.000	-	523.804.154.000
168	Kab. Bekasi	251.707.803.000	-	251.707.803.000	-	251.707.803.000
169	Kab. Bogor	469.126.565.000	-	469.126.565.000	-	469.126.565.000
170	Kab. Ciamis	305.058.338.000	-	305.058.338.000	-	305.058.338.000
171	Kab. Cianjur	354.291.523.000	-	354.291.523.000	-	354.291.523.000
172	Kab. Cirebon	376.928.700.000	-	376.928.700.000	-	376.928.700.000
173	Kab. Garut	496.329.783.000	-	496.329.783.000	-	496.329.783.000
174	Kab. Indramayu	294.517.869.000	-	294.517.869.000	-	294.517.869.000
175	Kab. Karawang	364.789.871.000	-	364.789.871.000	-	364.789.871.000
176	Kab. Kuningan	295.462.581.000	-	295.462.581.000	-	295.462.581.000
177	Kab. Majalengka	279.958.668.000	-	279.958.668.000	-	279.958.668.000

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS, DANA PENYESUAIAN DAN TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
178	Kab. Pangandaran	141.188.924.000	-	141.188.924.000	-	141.188.924.000
179	Kab. Purwakarta	192.934.091.000	-	192.934.091.000	-	192.934.091.000
180	Kab. Subang	313.429.566.000	-	313.429.566.000	-	313.429.566.000
181	Kab. Sukabumi	338.609.888.000	-	338.609.888.000	-	338.609.888.000
182	Kab. Sumedang	259.517.897.000	-	259.517.897.000	-	259.517.897.000
183	Kab. Tasikmalaya	411.137.653.000	-	411.137.653.000	-	411.137.653.000
184	Kab. Bandung Barat	270.366.511.000	-	270.366.511.000	-	270.366.511.000
185	Kota Bandung	503.186.210.000	-	503.186.210.000	-	503.186.210.000
186	Kota Bekasi	252.836.721.000	-	252.836.721.000	-	252.836.721.000
187	Kota Bogor	157.301.111.000	-	157.301.111.000	-	157.301.111.000
188	Kota Cirebon	152.509.657.000	-	115.461.722.000	-	115.461.722.000
189	Kota Depok	196.153.428.000	-	196.153.428.000	-	196.153.428.000
190	Kota Sukabumi	95.986.380.000	-	95.986.380.000	-	95.986.380.000
191	Kota Cimahi	141.501.002.000	-	141.501.002.000	-	141.501.002.000
192	Kota Tasikmalaya	223.454.243.000	-	223.454.243.000	-	223.454.243.000
193	Kota Banjar	78.141.464.000	-	58.137.475.000	-	58.137.475.000
194	**Provinsi Banten**	**1.009.433.920.000**	-	**1.006.191.900.000**	-	**1.006.191.900.000**
195	Kab. Lebak	217.357.669.000	-	217.357.669.000	-	217.357.669.000
196	Kab. Pandeglang	237.091.054.000	-	237.091.054.000	-	237.091.054.000
197	Kab. Serang	198.125.572.000	-	198.125.572.000	-	198.125.572.000
198	Kab. Tangerang	225.371.373.000	-	225.371.373.000	-	225.371.373.000
199	Kota Cilegon	143.249.999.000	-	107.047.516.000	-	107.047.516.000
200	Kota Tangerang	217.608.584.000	-	217.608.584.000	-	217.608.584.000
201	Kota Serang	132.989.772.000	-	132.989.772.000	-	132.989.772.000
202	Kota Tangerang Selatan	133.704.247.000	-	133.704.247.000	-	133.704.247.000
203	**Provinsi Jawa Tengah**	**2.680.986.970.000**	-	**2.676.315.138.500**	-	**2.676.315.138.500**
204	Kab. Banjarnegara	209.121.660.000	-	209.121.660.000	-	209.121.660.000
205	Kab. Banyumas	320.319.844.000	-	320.319.844.000	-	320.319.844.000
206	Kab. Batang	164.824.223.000	-	164.824.223.000	-	164.824.223.000
207	Kab. Blora	246.909.117.000	-	246.909.117.000	-	246.909.117.000
208	Kab. Boyolali	261.782.884.000	-	261.782.884.000	-	261.782.884.000
209	Kab. Brebes	223.335.448.000	-	223.335.448.000	-	223.335.448.000
210	Kab. Cilacap	315.332.567.000	-	315.332.567.000	-	315.332.567.000
211	Kab. Demak	197.229.201.000	-	197.229.201.000	-	197.229.201.000
212	Kab. Grobogan	221.326.331.000	-	221.326.331.000	-	221.326.331.000
213	Kab. Jepara	172.937.410.000	-	172.937.410.000	-	172.937.410.000
214	Kab. Karanganyar	273.624.235.000	-	273.624.235.000	-	273.624.235.000
215	Kab. Kebumen	291.252.654.000	-	291.252.654.000	-	291.252.654.000
216	Kab. Kendal	216.448.389.000	-	216.448.389.000	-	216.448.389.000
217	Kab. Klaten	307.400.751.000	-	307.400.751.000	-	307.400.751.000
218	Kab. Kudus	169.337.757.000	-	169.337.757.000	-	169.337.757.000
219	Kab. Magelang	226.290.121.000	-	226.290.121.000	-	226.290.121.000
220	Kab. Pati	276.109.361.000	-	276.109.361.000	-	276.109.361.000
221	Kab. Pekalongan	192.613.916.000	-	192.613.916.000	-	192.613.916.000
222	Kab. Pemalang	238.222.414.000	-	238.222.414.000	-	238.222.414.000
223	Kab. Purbalingga	173.720.857.000	-	173.720.857.000	-	173.720.857.000
224	Kab. Purworejo	208.929.741.000	-	208.929.741.000	-	208.929.741.000
225	Kab. Rembang	232.816.985.000	-	172.399.233.000	-	172.399.233.000
226	Kab. Semarang	175.713.810.000	-	175.713.810.000	-	175.713.810.000
227	Kab. Sragen	263.333.193.000	-	263.333.193.000	-	263.333.193.000
228	Kab. Sukoharjo	206.958.151.000	-	206.958.151.000	-	206.958.151.000
229	Kab. Tegal	237.902.077.000	-	237.902.077.000	-	237.902.077.000
230	Kab. Temanggung	218.129.520.000	-	163.166.074.000	-	163.166.074.000
231	Kab. Wonogiri	308.494.252.000	-	308.494.252.000	-	308.494.252.000
232	Kab. Wonosobo	169.467.713.000	-	169.467.713.000	-	169.467.713.000
233	Kota Magelang	74.974.179.000	-	74.974.179.000	-	74.974.179.000
234	Kota Pekalongan	91.911.244.000	-	67.070.237.000	-	67.070.237.000
235	Kota Salatiga	73.663.265.000	-	53.206.712.000	-	53.206.712.000
236	Kota Semarang	283.917.499.000	-	283.917.499.000	-	283.917.499.000

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS, DANA PENYESUAIAN DAN TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
237	Kota Surakarta	232.478.998.000	-	232.478.998.000	-	232.478.998.000
238	Kota Tegal	80.187.195.000	-	80.187.195.000	-	80.187.195.000
239	**Provinsi DI Yogyakarta**	**818.231.265.000**	-	**295.201.208.500**	**419.099.774.450**	**714.300.982.950**
240	Kab. Bantul	285.847.270.000	-	285.847.270.000	-	285.847.270.000
241	Kab. Gunung Kidul	198.417.239.000	-	198.417.239.000	-	198.417.239.000
242	Kab. Kulon Progo	172.929.797.000	-	172.929.797.000	-	172.929.797.000
243	Kab. Sleman	274.661.712.000	-	274.661.712.000	-	274.661.712.000
244	Kota Yogyakarta	217.566.892.000	-	217.566.892.000	-	217.566.892.000
245	**Provinsi Jawa Timur**	**2.806.696.616.000**	-	**2.810.620.554.500**	-	**2.810.620.554.500**
246	Kab. Bangkalan	242.042.833.000	-	242.042.833.000	-	242.042.833.000
247	Kab. Banyuwangi	305.278.674.000	-	305.278.674.000	-	305.278.674.000
248	Kab. Blitar	341.876.688.000	-	341.876.688.000	-	341.876.688.000
249	Kab. Bojonegoro	258.359.458.000	-	258.359.458.000	-	258.359.458.000
250	Kab. Bondowoso	189.174.294.000	-	189.174.294.000	-	189.174.294.000
251	Kab. Gresik	233.210.077.000	-	233.210.077.000	-	233.210.077.000
252	Kab. Jember	414.816.348.000	-	414.816.348.000	-	414.816.348.000
253	Kab. Jombang	283.632.541.000	-	283.632.541.000	-	283.632.541.000
254	Kab. Kediri	317.081.363.000	-	317.081.363.000	-	317.081.363.000
255	Kab. Lamongan	285.154.726.000	-	285.154.726.000	-	285.154.726.000
256	Kab. Lumajang	219.603.361.000	-	219.603.361.000	-	219.603.361.000
257	Kab. Madiun	206.078.519.000	-	206.078.519.000	-	206.078.519.000
258	Kab. Magetan	259.961.301.000	-	259.961.301.000	-	259.961.301.000
259	Kab. Malang	452.738.931.000	-	452.738.931.000	-	452.738.931.000
260	Kab. Mojokerto	236.923.694.000	-	236.923.694.000	-	236.923.694.000
261	Kab. Nganjuk	295.455.134.000	-	295.455.134.000	-	295.455.134.000
262	Kab. Ngawi	251.131.221.000	-	251.131.221.000	-	251.131.221.000
263	Kab. Pacitan	182.420.105.000	-	182.420.105.000	-	182.420.105.000
264	Kab. Pamekasan	180.547.989.000	-	180.547.989.000	-	180.547.989.000
265	Kab. Pasuruan	258.520.604.000	-	258.520.604.000	-	258.520.604.000
266	Kab. Ponorogo	254.715.661.000	-	254.715.661.000	-	254.715.661.000
267	Kab. Probolinggo	203.476.919.000	-	203.476.919.000	-	203.476.919.000
268	Kab. Sampang	126.379.803.000	-	126.379.803.000	-	126.379.803.000
269	Kab. Sidoarjo	354.710.934.000	-	354.710.934.000	-	354.710.934.000
270	Kab. Situbondo	152.170.179.000	-	152.170.179.000	-	152.170.179.000
271	Kab. Sumenep	175.934.850.000	-	173.451.225.000	-	173.451.225.000
272	Kab. Trenggalek	290.528.322.000	-	290.528.322.000	-	290.528.322.000
273	Kab. Tuban	288.298.642.000	-	288.298.642.000	-	288.298.642.000
274	Kab. Tulungagung	340.981.971.000	-	340.981.971.000	-	340.981.971.000
275	Kota Blitar	70.065.539.000	-	70.065.539.000	-	70.065.539.000
276	Kota Kediri	116.856.415.000	-	116.856.415.000	-	116.856.415.000
277	Kota Madiun	111.629.826.000	-	111.629.826.000	-	111.629.826.000
278	Kota Malang	217.906.979.000	-	217.906.979.000	-	217.906.979.000
279	Kota Mojokerto	72.405.672.000	-	72.405.672.000	-	72.405.672.000
280	Kota Pasuruan	57.020.407.000	-	57.020.407.000	-	57.020.407.000
281	Kota Probolinggo	108.409.235.000	-	108.409.235.000	-	108.409.235.000
282	Kota Surabaya	471.969.415.000	-	471.969.415.000	-	471.969.415.000
283	Kota Batu	56.316.711.000	-	56.316.711.000	-	56.316.711.000
284	**Provinsi Kalimantan Barat**	**555.572.600.000**	-	**569.088.964.000**	-	**569.088.964.000**
285	Kab. Bengkayang	40.096.503.000	-	40.096.503.000	-	40.096.503.000
286	Kab. Landak	65.306.372.000	-	65.306.372.000	-	65.306.372.000
287	Kab. Kapuas Hulu	53.570.402.000	-	53.570.402.000	-	53.570.402.000
288	Kab. Ketapang	65.047.390.000	-	65.047.390.000	-	65.047.390.000
289	Kab. Pontianak	94.772.013.000	-	94.772.013.000	-	94.772.013.000
290	Kab. Sambas	114.250.899.000	-	114.250.899.000	-	114.250.899.000
291	Kab. Sanggau	86.466.207.000	-	86.466.207.000	-	86.466.207.000
292	Kab. Sintang	71.178.119.000	-	71.178.119.000	-	71.178.119.000
293	Kota Pontianak	156.384.411.000	-	156.384.411.000	-	156.384.411.000
294	Kota Singkawang	61.552.484.000	-	61.552.484.000	-	61.552.484.000
295	Kab. Kayong Utara	14.391.100.000	-	14.391.100.000	-	14.391.100.000

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS, DANA PENYESUAIAN DAN TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
296	Kab. Kubu Raya	95.163.369.000	-	95.163.369.000	-	95.163.369.000
297	Kab. Sekadau	43.043.835.000	-	43.043.835.000	-	43.043.835.000
298	Kab. Melawi	18.038.537.000	-	18.038.537.000	-	18.038.537.000
299	**Provinsi Kalimantan Tengah**	**288.214.582.000**	-	**291.278.518.000**	-	**291.278.518.000**
300	Kab. Barito Selatan	47.553.932.000	-	47.553.932.000	-	47.553.932.000
301	Kab. Barito Utara	40.064.636.000	-	40.064.636.000	-	40.064.636.000
302	Kab. Kapuas	126.223.444.000	-	126.223.444.000	-	126.223.444.000
303	Kab. Kotawaringin Barat	52.629.271.000	-	52.629.271.000	-	52.629.271.000
304	Kab. Kotawaringin Timur	73.864.916.000	-	73.864.916.000	-	73.864.916.000
305	Kota Palangkaraya	105.485.808.000	-	105.485.808.000	-	105.485.808.000
306	Kab. Barito Timur	44.282.576.000	-	44.282.576.000	-	44.282.576.000
307	Kab. Murung Raya	24.385.307.000	-	24.385.307.000	-	24.385.307.000
308	Kab. Pulang Pisau	61.626.334.000	-	61.626.334.000	-	61.626.334.000
309	Kab. Gunung Mas	32.121.926.000	-	32.121.926.000	-	32.121.926.000
310	Kab. Lamandau	17.053.194.000	-	17.053.194.000	-	17.053.194.000
311	Kab. Sukamara	2.040.587.000	-	2.040.587.000	-	2.040.587.000
312	Kab. Katingan	32.970.761.000	-	32.970.761.000	-	32.970.761.000
313	Kab. Seruyan	13.697.299.000	-	13.697.299.000	-	13.697.299.000
314	**Provinsi Kalimantan Selatan**	**328.753.200.000**	-	**334.645.015.500**	-	**334.645.015.500**
315	Kab. Banjar	92.129.135.000	-	92.129.135.000	-	92.129.135.000
316	Kab. Barito Kuala	77.972.934.000	-	77.972.934.000	-	77.972.934.000
317	Kab. Hulu Sungai Selatan	71.453.941.000	-	71.453.941.000	-	71.453.941.000
318	Kab. Hulu Sungai Tengah	82.515.601.000	-	82.515.601.000	-	82.515.601.000
319	Kab. Hulu Sungai Utara	63.416.479.000	-	63.416.479.000	-	63.416.479.000
320	Kab. Kotabaru	41.708.387.000	-	41.708.387.000	-	41.708.387.000
321	Kab. Tabalong	70.785.456.000	-	70.785.456.000	-	70.785.456.000
322	Kab. Tanah Laut	84.665.541.000	-	84.665.541.000	-	84.665.541.000
323	Kab. Tapin	50.981.124.000	-	50.981.124.000	-	50.981.124.000
324	Kota Banjarbaru	75.057.680.000	-	74.218.618.000	-	74.218.618.000
325	Kota Banjarmasin	186.642.892.000	-	186.642.892.000	-	186.642.892.000
326	Kab. Balangan	26.665.414.000	-	26.665.414.000	-	26.665.414.000
327	Kab. Tanah Bumbu	51.587.265.000	-	51.587.265.000	-	51.587.265.000
328	**Provinsi Kalimantan Timur**	**351.631.430.000**	-	**354.667.880.500**	-	**354.667.880.500**
329	Kab. Berau	37.545.837.000	-	37.545.837.000	-	37.545.837.000
330	Kab. Kutai Kartanegara	164.600.227.000	-	164.600.227.000	-	164.600.227.000
331	Kab. Kutai Barat	51.126.724.000	-	37.919.073.000	-	37.919.073.000
332	Kab. Kutai Timur	43.173.974.000	-	43.173.974.000	-	43.173.974.000
333	Kab. Mahakam Ulu	15.417.528.000	-	72.893.280.000	-	72.893.280.000
334	Kab. Pasir	74.765.388.000	-	44.853.391.000	-	44.853.391.000
335	Kota Balikpapan	107.991.389.000	-	23.690.826.000	-	23.690.826.000
336	Kota Bontang	50.230.281.000	-	31.685.203.000	-	31.685.203.000
337	Kota Samarinda	183.622.628.000	-	10.405.943.000	-	10.405.943.000
338	Kab. Penajam Paser Utara	41.078.401.000	-	63.310.465.000	-	63.310.465.000
339	**Provinsi Kalimantan Utara**	**72.981.440.000**	-	**11.898.396.000**	-	**11.898.396.000**
340	Kab. Bulungan	44.853.391.000	-	74.765.388.000	-	74.765.388.000
341	Kab. Malinau	31.175.665.000	-	107.991.389.000	-	107.991.389.000
342	Kab. Nunukan	31.685.203.000	-	37.364.636.000	-	37.364.636.000
343	Kab. Tana Tidung	39.912.749.000	-	183.622.628.000	-	183.622.628.000
344	Kota Tarakan	83.660.925.000	-	40.920.526.000	-	40.920.526.000
345	**Provinsi Sulawesi Utara**	**288.989.235.000**	-	**289.179.538.000**	-	**289.179.538.000**
346	Kab. Bolaang Mongondow	59.218.044.000	-	59.218.044.000	-	59.218.044.000
347	Kab. Minahasa	143.259.257.000	-	143.259.257.000	-	143.259.257.000
348	Kab. Sangihe	58.910.968.000	-	58.910.968.000	-	58.910.968.000
349	Kota Bitung	77.056.417.000	-	77.056.417.000	-	77.056.417.000
350	Kota Manado	152.284.962.000	-	152.284.962.000	-	152.284.962.000
351	Kab. Kepulauan Talaud	65.556.446.000	-	49.250.689.000	-	49.250.689.000
352	Kab. Minahasa Selatan	95.658.825.000	-	95.658.825.000	-	95.658.825.000
353	Kab. Minahasa Tenggara	51.872.457.000	-	51.872.457.000	-	51.872.457.000
354	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	41.894.043.000	-	31.148.990.000	-	31.148.990.000

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS, DANA PENYESUAIAN DAN TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
355	Kota Kotamubagu	64.379.466.000	-	48.134.414.000	-	48.134.414.000
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur	15.706.361.000	-	11.415.081.000	-	11.415.081.000
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	13.103.887.000	-	13.103.887.000	-	13.103.887.000
358	Kota Tomohon	54.054.767.000	-	54.054.767.000	-	54.054.767.000
359	Kab. Minahasa Utara	51.228.737.000	-	51.228.737.000	-	51.228.737.000
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara	24.309.581.000	-	22.557.709.000	-	22.557.709.000
361	**Provinsi Gorontalo**	**126.846.030.000**	-	**126.526.746.000**	-	**126.526.746.000**
362	Kab. Boalemo	40.007.547.000	-	40.007.547.000	-	40.007.547.000
363	Kab. Gorontalo	101.286.068.000	-	101.286.068.000	-	101.286.068.000
364	Kota Gorontalo	92.990.636.000	-	92.990.636.000	-	92.990.636.000
365	Kab. Pohuwato	52.480.183.000	-	39.453.683.000	-	39.453.683.000
366	Kab. Gorontalo Utara	38.872.443.000	-	28.828.709.000	-	28.828.709.000
367	Kab. Bone Bolango	78.568.182.000	-	57.228.505.000	-	57.228.505.000
368	**Provinsi Sulawesi Tengah**	**362.531.194.000**	-	**362.887.121.500**	-	**362.887.121.500**
369	Kab. Banggai	125.438.499.000	-	125.438.499.000	-	125.438.499.000
370	Kab. Banggai Laut	20.064.852.000	-	15.299.889.000	-	15.299.889.000
371	Kab. Banggai Kepulauan	35.765.009.000	-	35.765.009.000	-	35.765.009.000
372	Kab. Buol	41.919.363.000	-	41.919.363.000	-	41.919.363.000
373	Kab. Toli-Toli	41.532.384.000	-	41.532.384.000	-	41.532.384.000
374	Kab. Donggala	102.838.777.000	-	102.838.777.000	-	102.838.777.000
375	Kab. Morowali	35.408.306.000	-	35.408.306.000	-	35.408.306.000
376	Kab. Morowali Utara	27.106.904.000	-	27.106.904.000	-	27.106.904.000
377	Kab. Poso	108.824.390.000	-	108.824.390.000	-	108.824.390.000
378	Kota Palu	163.424.895.000	-	163.424.895.000	-	163.424.895.000
379	Kab. Parigi Moutong	71.274.821.000	-	71.274.821.000	-	71.274.821.000
380	Kab. Sigi	65.360.668.000	-	65.360.668.000	-	65.360.668.000
381	Kab. Tojo Una Una	53.304.908.000	-	53.304.908.000	-	53.304.908.000
382	**Provinsi Sulawesi Selatan**	**942.021.116.000**	-	**938.446.552.000**	-	**938.446.552.000**
383	Kab. Bantaeng	52.973.326.000	-	52.973.326.000	-	52.973.326.000
384	Kab. Barru	68.550.417.000	-	68.550.417.000	-	68.550.417.000
385	Kab. Bone	217.183.981.000	-	217.183.981.000	-	217.183.981.000
386	Kab. Bulukumba	161.438.577.000	-	161.438.577.000	-	161.438.577.000
387	Kab. Enrekang	117.305.580.000	-	117.305.580.000	-	117.305.580.000
388	Kab. Gowa	151.693.373.000	-	151.693.373.000	-	151.693.373.000
389	Kab. Jeneponto	76.940.941.000	-	76.940.941.000	-	76.940.941.000
390	Kab. Luwu	79.894.311.000	-	79.894.311.000	-	79.894.311.000
391	Kab. Luwu Utara	71.005.797.000	-	71.005.797.000	-	71.005.797.000
392	Kab. Maros	106.766.878.000	-	106.766.878.000	-	106.766.878.000
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	119.568.900.000	-	119.568.900.000	-	119.568.900.000
394	Kab. Pinrang	139.776.821.000	-	139.776.821.000	-	139.776.821.000
395	Kab. Selayar	63.375.993.000	-	63.375.993.000	-	63.375.993.000
396	Kab. Sidenreng Rappang	95.364.599.000	-	95.364.599.000	-	95.364.599.000
397	Kab. Sinjai	101.036.151.000	-	101.036.151.000	-	101.036.151.000
398	Kab. Soppeng	106.392.484.000	-	106.392.484.000	-	106.392.484.000
399	Kab. Takalar	95.684.859.000	-	95.684.859.000	-	95.684.859.000
400	Kab. Tana Toraja	76.034.248.000	-	75.079.768.000	-	75.079.768.000
401	Kab. Wajo	154.867.765.000	-	154.867.765.000	-	154.867.765.000
402	Kota Pare-pare	104.121.991.000	-	78.343.835.000	-	78.343.835.000
403	Kab. Toraja Utara	91.735.899.000	-	91.735.899.000	-	91.735.899.000
404	Kota Makassar	319.102.653.000	-	319.102.653.000	-	319.102.653.000
405	Kota Palopo	72.797.661.000	-	72.797.661.000	-	72.797.661.000
406	Kab. Luwu Timur	88.266.058.000	-	70.491.963.000	-	70.491.963.000
407	**Provinsi Sulawesi Barat**	**159.012.347.000**	-	**159.174.535.000**	-	**159.174.535.000**
408	Kab. Majene	62.748.794.000	-	62.748.794.000	-	62.748.794.000
409	Kab. Mamuju	79.142.687.000	-	60.227.225.000	-	60.227.225.000
410	Kab. Mamuju Tengah	27.246.492.000	-	20.647.119.000	-	20.647.119.000
411	Kab. Polewali Mandar	120.969.226.000	-	120.969.226.000	-	120.969.226.000
412	Kab. Mamasa	65.007.553.000	-	48.500.583.000	-	48.500.583.000
413	Kab. Mamuju Utara	35.521.589.000	-	27.431.385.000	-	27.431.385.000

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS, DANA PENYESUAIAN DAN TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
414	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	**312.101.440.000**	-	**313.712.347.500**	-	**313.712.347.500**
415	Kab. Buton	115.499.482.000	-	115.499.482.000	-	115.499.482.000
416	Kab. Konawe	102.163.851.000	-	102.163.851.000	-	102.163.851.000
417	Kab. Konawe Kepulauan	15.227.604.000	-	11.698.203.000	-	11.698.203.000
418	Kab. Kolaka	88.629.697.000	-	88.629.697.000	-	88.629.697.000
419	Kab. Kolaka Timur	24.734.460.000	-	24.734.460.000	-	24.734.460.000
420	Kab. Muna	131.421.255.000	-	131.421.255.000	-	131.421.255.000
421	Kota Kendari	110.477.864.000	-	110.477.864.000	-	110.477.864.000
422	Kota Bau-bau	89.407.741.000	-	89.407.741.000	-	89.407.741.000
423	Kab. Konawe Selatan	62.868.119.000	-	62.868.119.000	-	62.868.119.000
424	Kab. Bombana	61.494.052.000	-	61.494.052.000	-	61.494.052.000
425	Kab. Konawe Utara	20.449.374.000	-	15.533.321.000	-	15.533.321.000
426	Kab. Buton Utara	24.429.371.000	-	18.566.585.000	-	18.566.585.000
427	Kab. Wakatobi	43.540.006.000	-	43.540.006.000	-	43.540.006.000
428	Kab. Kolaka Utara	38.468.601.000	-	27.679.292.000	-	27.679.292.000
429	**Provinsi Bali**	**382.315.460.000**	-	**381.170.510.000**	-	**381.170.510.000**
430	Kab. Badung	154.843.907.000	-	154.843.907.000	-	154.843.907.000
431	Kab. Bangli	71.999.013.000	-	71.999.013.000	-	71.999.013.000
432	Kab. Buleleng	218.781.224.000	-	218.781.224.000	-	218.781.224.000
433	Kab. Gianyar	177.774.328.000	-	177.774.328.000	-	177.774.328.000
434	Kab. Jembrana	96.236.554.000	-	70.899.963.000	-	70.899.963.000
435	Kab. Karangasem	142.071.021.000	-	142.071.021.000	-	142.071.021.000
436	Kab. Klungkung	89.963.515.000	-	89.963.515.000	-	89.963.515.000
437	Kab. Tabanan	159.747.176.000	-	159.747.176.000	-	159.747.176.000
438	Kota Denpasar	204.874.218.000	-	204.874.218.000	-	204.874.218.000
439	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**463.522.400.000**	-	**461.459.527.500**	-	**461.459.527.500**
440	Kab. Bima	136.006.833.000	-	136.006.833.000	-	136.006.833.000
441	Kab. Dompu	70.734.806.000	-	70.734.806.000	-	70.734.806.000
442	Kab. Lombok Barat	121.717.638.000	-	121.717.638.000	-	121.717.638.000
443	Kab. Lombok Tengah	203.845.275.000	-	203.845.275.000	-	203.845.275.000
444	Kab. Lombok Timur	220.158.096.000	-	220.158.096.000	-	220.158.096.000
445	Kab. Sumbawa	139.327.926.000	-	139.327.926.000	-	139.327.926.000
446	Kota Mataram	119.413.450.000	-	119.413.450.000	-	119.413.450.000
447	Kab. Lombok Utara	45.779.088.000	-	45.779.088.000	-	45.779.088.000
448	Kota Bima	78.094.218.000	-	78.094.218.000	-	78.094.218.000
449	Kab. Sumbawa Barat	35.729.973.000	-	35.729.973.000	-	35.729.973.000
450	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	**716.042.300.000**	-	**733.921.280.000**	-	**733.921.280.000**
451	Kab. Alor	51.719.155.000	-	51.719.155.000	-	51.719.155.000
452	Kab. Belu	48.007.662.000	-	48.007.662.000	-	48.007.662.000
453	Kab. Ende	87.034.114.000	-	87.034.114.000	-	87.034.114.000
454	Kab. Flores Timur	74.695.373.000	-	74.695.373.000	-	74.695.373.000
455	Kab. Kupang	80.092.945.000	-	80.092.945.000	-	80.092.945.000
456	Kab. Lembata	47.849.510.000	-	35.908.672.000	-	35.908.672.000
457	Kab. Malaka	52.037.952.000	-	52.037.952.000	-	52.037.952.000
458	Kab. Manggarai	59.596.795.000	-	59.596.795.000	-	59.596.795.000
459	Kab. Ngada	38.478.823.000	-	38.478.823.000	-	38.478.823.000
460	Kab. Sikka	82.690.946.000	-	82.690.946.000	-	82.690.946.000
461	Kab. Sumba Barat	42.168.217.000	-	32.505.044.000	-	32.505.044.000
462	Kab. Sumba Timur	56.166.993.000	-	56.166.993.000	-	56.166.993.000
463	Kab. Timor Tengah Selatan	87.474.732.000	-	87.474.732.000	-	87.474.732.000
464	Kab. Timor Tengah Utara	49.625.780.000	-	49.625.780.000	-	49.625.780.000
465	Kota Kupang	127.517.782.000	-	127.517.782.000	-	127.517.782.000
466	Kab. Rote Ndao	36.898.412.000	-	28.232.164.000	-	28.232.164.000
467	Kab. Nagekeo	48.208.847.000	-	36.684.498.000	-	36.684.498.000
468	Kab. Sumba Tengah	15.131.968.000	-	15.131.968.000	-	15.131.968.000
469	Kab. Sumba Barat Daya	39.342.698.000	-	29.988.601.000	-	29.988.601.000
470	Kab. Manggarai Timur	53.262.660.000	-	53.262.660.000	-	53.262.660.000
471	Kab. Sabu Raijua	15.202.947.000	-	15.202.947.000	-	15.202.947.000
472	Kab. Manggarai Barat	99.822.437.000	-	77.459.582.000	-	77.459.582.000

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS, DANA PENYESUAIAN DAN TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
473	**Provinsi Maluku**	**227.627.730.000**	-	**231.917.628.500**	-	**231.917.628.500**
474	Kab. Maluku Tenggara Barat	47.710.643.000	-	43.408.831.000	-	43.408.831.000
475	Kab. Maluku Tengah	79.394.982.000	-	79.394.982.000	-	79.394.982.000
476	Kab. Maluku Tenggara	34.597.859.000	-	34.597.859.000	-	34.597.859.000
477	Kab. Pulau Buru	29.387.738.000	-	29.387.738.000	-	29.387.738.000
478	Kota Ambon	134.394.671.000	-	134.394.671.000	-	134.394.671.000
479	Kab. Seram Bagian Barat	36.925.321.000	-	36.925.321.000	-	36.925.321.000
480	Kab. Seram Bagian Timur	23.364.900.000	-	23.364.900.000	-	23.364.900.000
481	Kab. Maluku Barat Daya	23.196.282.000	-	18.201.774.000	-	18.201.774.000
482	Kab. Buru Selatan	17.506.740.000	-	13.333.139.000	-	13.333.139.000
483	Kab. Kepulauan Aru	18.130.731.000	-	14.395.027.000	-	14.395.027.000
484	Kota Tual	28.772.378.000	-	21.688.333.000	-	21.688.333.000
485	**Provinsi Maluku Utara**	**155.094.470.000**	-	**164.339.021.000**	-	**164.339.021.000**
486	Kab. Halmahera Tengah	26.295.999.000	-	20.175.210.000	-	20.175.210.000
487	Kab. Halmahera Barat	46.571.911.000	-	46.571.911.000	-	46.571.911.000
488	Kota Ternate	86.085.688.000	-	64.309.914.000	-	64.309.914.000
489	Kab. Halmahera Timur	37.305.575.000	-	28.295.021.000	-	28.295.021.000
490	Kota Tidore Kepulauan	40.129.924.000	-	40.129.924.000	-	40.129.924.000
491	Kab. Kepulauan Sula	51.558.004.000	-	40.151.585.000	-	40.151.585.000
492	Kab. Pulau Morotai	14.285.250.000	-	11.298.669.000	-	11.298.669.000
493	Kab. Pulau Taliabu	20.073.840.000	-	15.308.130.000	-	15.308.130.000
494	Kab. Halmahera Selatan	38.698.538.000	-	38.698.538.000	-	38.698.538.000
495	Kab. Halmahera Utara	39.453.621.000	-	39.453.621.000	-	39.453.621.000
496	Kab. Yalimo	26.906.258.000	-	6.726.565.000	-	6.726.565.000
497	Kab. Lanny Jaya	72.537.676.000	-	18.997.294.000	-	18.997.294.000
498	**Provinsi Papua**	**7.122.110.960.000**	**6.777.070.560.000**	**343.560.080.000**	-	**7.120.630.640.000**
499	Kab. Biak Numfor	35.645.521.000	-	26.127.791.000	-	26.127.791.000
500	Kab. Jayapura	48.199.964.000	-	48.199.964.000	-	48.199.964.000
501	Kab. Jayawijaya	51.632.180.000	-	39.130.260.000	-	39.130.260.000
502	Kab. Merauke	54.734.113.000	-	54.734.113.000	-	54.734.113.000
503	Kab. Mimika	31.495.666.000	-	23.702.937.000	-	23.702.937.000
504	Kab. Nabire	49.253.145.000	-	38.467.465.000	-	38.467.465.000
505	Kab. Paniai	6.101.591.000	-	3.372.569.000	-	3.372.569.000
506	Kab. Puncak Jaya	17.375.368.000	-	5.132.467.000	-	5.132.467.000
507	Kab. Kepulauan Yapen	27.954.377.000	-	27.954.377.000	-	27.954.377.000
508	Kota Jayapura	114.583.443.000	-	87.168.945.000	-	87.168.945.000
509	Kab. Sarmi	12.042.862.000	-	9.294.084.000	-	9.294.084.000
510	Kab. Keerom	22.842.170.000	-	17.230.284.000	-	17.230.284.000
511	Kab. Yahukimo	15.297.862.000	-	5.378.653.000	-	5.378.653.000
512	Kab. Pegunungan Bintang	13.899.826.000	-	4.296.394.000	-	4.296.394.000
513	Kab. Tolikara	10.861.530.000	-	2.715.383.000	-	2.715.383.000
514	Kab. Boven Digoel	14.969.640.000	-	5.542.410.000	-	5.542.410.000
515	Kab. Mappi	47.452.431.000	-	12.165.780.000	-	12.165.780.000
516	Kab. Asmat	17.751.546.000	-	13.902.347.000	-	13.902.347.000
517	Kab. Waropen	25.615.730.000	-	7.724.120.000	-	7.724.120.000
518	Kab. Mamberamo Raya	13.625.788.000	-	10.673.841.000	-	10.673.841.000
519	Kab. Mamberamo Tengah	42.083.170.000	-	10.520.793.000	-	10.520.793.000
520	Kab. Nduga	15.244.160.000	-	5.113.790.000	-	5.113.790.000
521	Kab. Dogiyai	24.278.908.000	-	6.069.727.000	-	6.069.727.000
522	Kab. Intan Jaya	11.175.872.000	-	2.793.968.000	-	2.793.968.000
523	Kab. Puncak	16.076.032.000	-	4.019.008.000	-	4.019.008.000
524	Kab. Deiyai	16.327.718.000	-	4.998.242.000	-	4.998.242.000
525	Kab. Supiori	39.243.844.000	-	9.810.961.000	-	9.810.961.000
526	**Provinsi Papua Barat**	**2.671.632.634.000**	**2.547.315.954.000**	**125.403.301.000**	-	**2.672.719.255.000**
527	Kab. Sorong	63.223.349.000	-	47.653.537.000	-	47.653.537.000
528	Kab. Manokwari	41.097.046.000	-	41.097.046.000	-	41.097.046.000
529	Kab. Manokwari Selatan	10.061.540.000	-	7.795.155.000	-	7.795.155.000
530	Kab. Fak Fak	34.735.307.000	-	26.531.181.000	-	26.531.181.000
531	Kota Sorong	62.415.337.000	-	47.072.465.000	-	47.072.465.000

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.F

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS, DANA PENYESUAIAN DAN TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
532	Kab. Pegunungan Arfak	57.923.620.000	-	43.691.715.000	-	43.691.715.000
533	Kab. Sorong Selatan	43.194.286.000	-	12.129.337.000	-	12.129.337.000
534	Kab. Raja Ampat	16.444.968.000	-	5.369.232.000	-	5.369.232.000
535	Kab. Teluk Bintuni	25.198.495.000	-	19.375.247.000	-	19.375.247.000
536	Kab. Teluk Wondama	25.703.508.000	-	6.090.731.000	-	6.090.731.000
537	Kab. Tambrauw	6.136.497.000	-	1.751.265.000	-	1.751.265.000
538	Kab. Maybrat	22.839.683.000	-	17.385.775.000	-	17.385.775.000
539	Kab. Kaimana	78.334.754.000	-	58.912.512.000	-	58.912.512.000
540	**Pagu Dana Cadangan BOS**	**845.039.330.000**	-	-	-	-
541	**Sisa Pagu APBN yang tidak dialokasikan**	**5.340.105.208.000**	-	-	-	-
JUMLAH		**104.621.295.647.000**	**16.148.773.028.000**	**80.082.454.280.000**	**419.099.774.450**	**96.650.327.082.450**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN 4
Suspen Belanja Pemerintah Pusat
per 31 Desember 2014

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 4.A

SUSPEN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2014

KODE BA	URAIAN BA	TOTAL BELANJA		
		KL	SAKUN	SELISIH
000		(60.046.279)	-	(60.046.279)
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	639.326.150.154	639.388.900.154	(62.750.000)
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	2.306.379.310.448	2.306.379.310.448	-
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.299.260.515.698	2.297.967.688.486	1.292.827.212
005	MAHKAMAH AGUNG	6.970.452.403.475	6.968.152.081.925	2.300.321.550
006	KEJAKSAAN AGUNG	3.314.773.346.464	3.314.997.157.444	(223.810.980)
007	SEKRETARIAT NEGARA	2.000.764.980.673	1.999.607.413.035	1.157.567.638
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	12.807.428.802.506	12.804.347.030.609	3.081.771.897
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	5.344.245.396.317	5.339.825.449.890	4.419.946.427
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	86.264.548.038.773	86.104.051.692.002	160.496.346.771
013	KEMENTERIAN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA RI	7.115.350.841.614	7.110.923.237.617	4.427.603.997
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	18.078.018.585.075	18.056.543.327.238	21.475.257.837
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	12.704.973.171.540	12.692.848.584.917	12.124.586.623
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.301.292.222.133	2.301.465.332.905	(173.110.772)
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	7.361.456.950.384	7.354.675.411.918	6.781.538.466
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	28.707.569.109.475	28.706.424.525.220	1.144.584.255
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	76.666.142.835.040	76.595.292.185.216	70.850.649.824
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	47.148.240.555.862	47.126.791.357.303	21.449.198.559
025	KEMENTERIAN AGAMA	45.754.970.447.352	45.658.835.852.802	96.134.594.550
026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.682.044.772.726	3.680.707.937.776	1.336.834.950
027	KEMENTERIAN SOSIAL	13.243.005.587.507	13.214.185.680.438	28.819.907.069
029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	4.604.610.789.616	4.604.458.237.253	152.552.363
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.866.259.258.904	5.865.700.444.727	558.814.177
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	72.754.509.353.683	72.736.128.908.462	18.380.445.221
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	343.255.873.745	343.184.360.325	71.513.420
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	204.753.649.039	204.576.326.895	177.322.144
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	172.343.836.861	172.213.022.161	130.814.700
040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.276.026.293.280	1.275.471.879.475	554.413.805
041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	97.851.272.205	97.426.365.214	424.906.991
042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	455.213.654.512	455.215.484.582	(1.830.070)
043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	743.809.401.721	737.448.610.548	6.360.791.173
044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	1.248.898.605.593	1.248.897.322.793	1.282.800
047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	184.806.292.719	184.697.798.695	108.494.024
048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	116.005.557.334	115.982.544.082	23.013.252
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.830.381.700.937	1.830.337.245.427	44.455.510
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.178.889.792.130	1.176.738.823.665	2.150.968.465
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	38.138.024.692	38.129.924.692	8.100.000
054	BADAN PUSAT STATISTIK	3.005.820.817.936	3.005.698.285.281	122.532.655
055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	950.975.991.360	949.974.977.985	1.001.013.375
056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	3.807.821.105.512	3.802.527.524.245	5.293.581.267
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	333.085.120.512	332.377.847.061	707.273.451
059	KEMENTERIAN KOMINFO	2.131.031.295.647	2.124.692.071.577	6.339.224.070
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	43.716.664.342.599	43.709.430.151.620	7.234.190.979
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	879.511.073.405	879.335.989.726	175.083.679
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	276.534.335.246	276.534.335.246	-
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	523.548.794.906	523.386.693.167	162.101.739
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	706.469.112.281	703.033.466.430	3.435.645.851
067	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	2.059.678.857.231	2.059.678.857.231	-
068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.116.242.921.516	2.118.117.192.514	(1.874.270.998)
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	75.540.676.070	75.541.207.735	(531.665)
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.498.866.428.622	1.498.673.449.860	192.978.762
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	11.058.671.082.982	11.058.501.270.862	169.812.120
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	207.426.192.572	207.422.253.672	3.938.900
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	66.807.072.337	66.807.072.337	-
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	971.498.732.669	970.977.522.172	521.210.497
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	616.844.813.216	614.563.424.381	2.281.388.835
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	729.849.227.587	729.283.868.958	565.358.629
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	690.240.839.503	690.094.127.271	146.712.232

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 4.A

SUSPEN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2014

KODE BA	URAIAN BA	TOTAL BELANJA		
		KL	SAKUN	SELISIH
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	688.721.706.278	688.436.011.380	285.694.898
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	93.287.776.682	93.202.827.111	84.949.571
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	100.336.625.842	99.183.010.758	1.153.615.084
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	210.292.691.119	210.249.622.999	43.068.120
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	102.885.084.820	102.609.008.937	276.075.883
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	461.619.559.756	459.516.180.588	2.103.379.168
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.210.049.150.462	1.209.164.199.309	884.951.153
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1.780.206.278.718	1.778.927.382.624	1.278.896.094
091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	3.494.141.438.351	3.493.971.664.005	169.774.346
092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.548.194.967.212	1.547.732.401.891	462.565.321
093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	557.044.362.258	556.997.956.258	46.406.000
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	599.216.835.154	599.212.391.154	4.444.000
100	KOMISI YUDISIAL RI	75.777.455.703	75.668.152.184	109.303.519
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	2.665.647.674.426	2.665.992.665.872	(344.991.446)
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	350.759.603.544	350.759.167.494	436.050
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	288.083.293.898	288.083.293.898	-
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	137.403.839.440	137.403.839.440	-
107	BADAN SAR NASIONAL	1.920.658.702.629	1.919.005.470.122	1.653.232.507
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	80.169.053.881	80.163.741.880	5.312.001
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	251.859.219.708	251.773.473.508	85.746.200
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	58.390.323.922	58.390.323.922	-
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	127.788.725.739	127.770.313.040	18.412.699
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	1.059.222.158.052	1.059.222.158.052	-
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	246.336.442.521	246.254.595.666	81.846.855
114	SEKRETARIAT KABINET	149.166.468.378	149.166.468.378	-
115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	3.250.899.091.050	3.249.956.940.012	942.151.038
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	809.204.212.714	809.188.588.736	15.623.978
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	724.911.963.980	724.884.128.880	27.835.100
118	SABANG	297.707.497.624	297.650.178.753	57.318.871
999	BENDAHARA UMUM NEGARA	626.415.972.651.966	626.412.342.745.883	3.629.906.083
zzz		(651.932.489.723)	-	(651.932.489.723)
		49.147.045.262	-	49.147.045.262
	JUMLAH	**1.201.402.235.578.980**	**1.201.499.547.948.400**	**(97.312.369.421)**
999	BENDAHARA UMUM NEGARA (BELANJA TRANSFER KE DAERAH	**573.703.000.932.971**	**573.703.081.723.721**	**(80.790.750)**
		Total Suspen (Neto)		**(97.393.160.171)**

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 4.B

SUSPEN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2014

KODE BA	URAIAN BA	TOTAL PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		
		SAKUN	KL	SELISIH
000		583.025.747	-	583.025.747
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	16.114.522.182	8.291.223.737	7.823.298.445
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	18.843.668.277	19.411.405.961	(567.737.684)
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	23.594.678.166	24.503.525.195	(908.847.029)
005	MAHKAMAH AGUNG	162.500.953.146	63.222.843.555	99.278.109.591
006	KEJAKSAAN AGUNG	3.401.359.772.383	3.501.036.329.795	(99.676.557.412)
007	SEKRETARIAT NEGARA	334.602.114.612	362.311.783.551	(27.709.668.939)
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	246.880.819.713	264.819.387.968	(17.938.568.255)
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	412.785.818.619	567.039.214.808	(154.253.396.189)
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	279.349.332.857	284.273.234.233	(4.923.901.376)
013	KEMENTERIAN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA RI	4.019.252.031.840	4.020.824.128.960	(1.572.097.120)
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	1,150,853,236,320,015	1,150,653,575,394,554	199,660,925,461
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	379.531.373.977	369.064.053.816	10.467.320.161
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	215.917.564.424	221.784.837.062	(5.867.272.638)
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	37.018.839.174.093	37.218.108.853.029	(199.269.678.936)
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1.986.566.682.394	2.013.747.142.168	(27.180.459.774)
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	14.070.643.992.638	13.790.117.022.145	280.526.970.493
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	9.835.435.640.270	9.802.273.167.768	33.162.472.502
025	KEMENTERIAN AGAMA	1.598.042.003.821	1.564.528.706.794	33.513.297.027
026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.184.908.775.434	1.186.049.873.333	(1.141.097.899)
027	KEMENTERIAN SOSIAL	30.339.852.684	56.983.305.843	(26.643.453.159)
029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	4.704.462.587.955	4.749.007.742.756	(44.545.154.801)
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	303.577.021.794	301.918.433.207	1.658.588.587
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	1.154.066.435.464	1.143.914.887.561	10.151.547.903
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	1.227.790.060	1.236.525.160	(8.735.100)
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	770.458.308	985.678.525	(215.220.217)
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	433.151.741	493.788.123	(60.636.382)
040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	32.753.152.619	35.286.181.601	(2.533.028.982)
041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	3.593.335.313	3.744.669.136	(151.333.823)
042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	19.957.736.047	21.428.028.498	(1.470.292.451)
043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	4.759.250.844	10.137.981.561	(5.378.730.717)
044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	212.685.041.463	212.642.137.683	42.903.780
047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	819.975.100	1.031.260.380	(211.285.280)
048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	3.150.269.172	3.150.269.172	-
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.255.428.062	1.255.428.062	-
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	37.697.074.551	37.697.074.551	-
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	195.452.417	195.452.417	-
054	BADAN PUSAT STATISTIK	39.503.474.819	41.386.162.314	(1.882.687.495)
055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	1.733.464.880	3.009.571.707	(1.276.106.827)
056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.018.409.173.115	2.035.824.796.957	(17.415.623.842)
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	2.379.180.390	2.419.380.490	(40.200.100)
059	KEMENTERIAN KOMINFO	15.924.421.833.300	15.938.533.024.611	(14.111.191.311)
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	4.397.313.176.289	4.404.510.183.726	(7.197.007.437)
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	97.533.204.915	97.542.370.612	(9.165.697)
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	1.115.478.019	2.021.478.019	(906.000.000)
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	3.269.186.163	3.065.701.477	203.484.686
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	3.604.066.483	3.633.058.870	(28.992.387)
067	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	9.315.940.800	9.312.596.746	3.344.054
068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	4.894.006.584	7.244.944.352	(2.350.937.768)
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	1.146.072.001	1.146.603.666	(531.665)
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	12.854.254.976	54.347.128.351	(41.492.873.375)
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	29.659.273.816	19.152.298.610	10.506.975.206
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	1.241.733.341	1.241.733.341	-
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	264.254.257	264.314.857	(60.600)
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	56.641.492.412	63.425.278.645	(6.783.786.233)
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	18.221.892.246	20.771.870.850	(2.549.978.604)
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	124.638.903.837	120.450.381.565	4.188.522.272

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 4.B

SUSPEN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2014

KODE BA	URAIAN BA	TOTAL PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		
		SAKUN	KL	SELISIH
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	10.578.081.994	10.612.696.364	(34.614.370)
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	5.197.982.397	9.385.740.672	(4.187.758.275)
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	15.605.361.303	16.215.268.961	(609.907.658)
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	7.629.053.815	7.593.768.815	35.285.000
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	52.843.580.384	53.235.745.384	(392.165.000)
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	7.601.321.966	7.619.471.966	(18.150.000)
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	1.498.982.870	1.717.287.283	(218.304.413)
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	23.595.501.630	23.620.102.680	(24.601.050)
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	87.941.814.532	100.228.259.690	(12.286.445.158)
091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	217.009.099.393	217.504.763.249	(495.663.856)
092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	15.918.701.513	16.765.645.297	(846.943.784)
093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	109.565.495.476	110.048.517.476	(483.022.000)
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1.407.848.994	3.551.359.473	(2.143.510.479)
100	KOMISI YUDISIAL RI	138.635.463	195.308.428	(56.672.965)
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	27.446.445.026	26.978.558.944	467.886.082
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	3.839.796.803	3.822.572.179	17.224.624
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	112.777.796	303.207.859	(190.430.063)
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	278.671.626	278.671.626	-
107	BADAN SAR NASIONAL	6.094.113.610	9.004.464.027	(2.910.350.417)
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	9.661.851.785	9.661.851.785	-
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	9.237.749.715	1.149.330.715	8.088.419.000
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	5.008.198	5.008.198	-
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	1.430.253.971	1.352.714.961	77.539.010
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	983.745.558.395	983.745.558.395	-
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	324.635.550	154.714.300	169.921.250
114	SEKRETARIAT KABINET	160.894.794	160.866.496	28.298
115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	26.011.949.247	25.961.581.831	50.367.416
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	962.479.878	977.436.498	(14.956.620)
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1.364.541.727	1.346.268.207	18.273.520
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	7.889.088.950	7.831.770.079	57.318.871
	Total	**106.100.753.299.632**	**106.342.846.969.718**	**(242.093.670.086)**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN 5

Persetujuan *Multi Years Contract*

per 31 Desember 2014

PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (*MULTI YEARS CONTRACT*)
PER 31 DESEMBER 2014

NO	BA	Kementerian/Lembaga	Kebutuhan Alokasi Anggaran				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	005	Mahkamah Agung	65.109.079.000				
2	015	Kementerian Keuangan	939.189.603.000	357.840.145.000			
3	020	Kementerian ESDM	205.197.107.000				
4	022	Kementerian Perhubungan	1.900.184.873.000	927.000.000.000			
5	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	48.433.016.000				
6	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5.231.774.140.000	3.813.390.684.000	2.083.130.383.000	916.395.067.000	389.210.606.000
7	057	Perpustakaan Nasional	180.062.952.000	116.184.708.000			
8	080	Badan Tenaga Atom Nasional	2.838.650.000	46.414.320.000	35.972.030.000		
9	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	74.827.789.000				
10	107	Badan SAR Nasional	127.000.000.000	271.296.000.000			
Jumlah			**8.774.617.209.000**	**5.532.125.857.000**	**2.119.102.413.000**	**916.395.067.000**	**389.210.606.000**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN 6

Perbandingan Pagu APBN-P dan Pagu DIPA Tahun 2014

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 6

PERBANDINGAN PAGU APBN-P DAN DIPA
PER 31 DESEMBER 2014

Kode BA	Uraian BA	APBN-P	DIPA
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	713.067.253.000	713.067.253.000
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	2.888.150.184.000	2.888.150.184.000
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.594.951.954.000	2.596.280.038.000
005	MAHKAMAH AGUNG	7.159.890.584.000	7.170.524.560.000
006	KEJAKSAAN AGUNG	3.570.196.463.000	3.578.527.102.000
007	SEKRETARIAT NEGARA	2.005.516.178.000	2.350.385.456.000
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	13.797.035.451.000	14.069.195.129.000
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	4.885.814.964.000	5.731.138.190.000
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	83.300.296.840.000	92.232.409.523.000
013	KEMENTERIAN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA RI	7.607.497.385.000	7.688.882.496.500
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	18.204.775.833.000	18.789.673.912.000
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	13.613.045.916.000	14.238.721.451.000
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.629.287.422.000	2.656.458.774.000
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	14.341.466.972.000	14.343.317.708.000
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	36.003.165.332.000	37.256.074.433.300
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	76.557.904.902.000	84.625.984.868.000
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	47.476.473.683.000	50.355.789.266.000
025	KEMENTERIAN AGAMA	51.568.452.512.000	51.921.469.247.100
026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.961.928.611.000	4.148.801.776.000
027	KEMENTERIAN SOSIAL	6.684.272.663.000	13.478.384.374.000
029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	4.507.301.508.000	5.090.466.076.000
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.748.673.798.000	6.170.120.707.000
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	74.522.244.881.000	76.522.317.150.000
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	448.348.622.000	448.348.622.000
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	291.265.583.000	293.100.133.000
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	194.329.457.000	194.329.457.000
040	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1.507.692.753.000	1.507.692.753.000
041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	123.456.840.000	123.456.840.000
042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	555.028.797.000	555.028.797.000
043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	945.756.945.000	1.049.466.593.000
044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	1.420.448.122.000	1.420.448.122.000
047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	191.629.656.000	192.494.559.000
048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	146.153.116.000	146.153.116.000
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.830.146.365.000	1.863.002.914.000
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.521.421.505.000	1.521.421.505.000
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	27.456.304.000	38.659.320.000
054	BADAN PUSAT STATISTIK	3.251.034.005.000	3.282.369.310.000
055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	1.143.501.617.000	1.088.551.849.000
056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	4.418.398.040.000	4.466.943.960.000
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	422.439.149.000	445.064.993.000
059	KEMENTERIAN KOMINFO	3.558.018.452.000	3.662.955.330.000
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	43.603.877.580.000	44.044.351.593.000
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.008.841.514.000	1.012.909.036.000
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	290.329.102.000	290.329.102.000

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 6

PERBANDINGAN PAGU APBN-P DAN DIPA
PER 31 DESEMBER 2014

Kode BA	Uraian BA	APBN-P	DIPA
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	574.236.381.000	574.236.381.000
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	703.121.464.000	736.751.825.000
067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	2.445.935.657.000	2.445.935.657.000
068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.522.866.646.000	2.540.118.117.000
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	66.656.303.000	84.480.315.000
075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	1.432.871.062.000	1.600.225.467.000
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	13.880.947.578.000	13.880.947.578.000
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	208.183.647.000	208.183.647.000
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	59.115.283.000	70.146.651.000
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	993.005.089.000	1.075.812.716.000
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	667.285.816.000	667.824.587.000
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	768.191.792.000	785.486.625.000
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	690.157.599.000	736.715.193.000
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	729.651.464.000	729.651.464.000
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	84.560.083.000	96.592.520.000
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	90.511.416.000	107.424.631.000
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	221.700.397.000	222.099.168.000
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	117.043.549.000	117.043.549.000
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	502.261.594.000	502.261.594.000
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.264.272.374.000	1.274.152.733.000
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.355.162.864.000	2.355.162.864.000
091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	4.001.327.698.000	4.001.327.698.000
092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.761.855.098.000	1.761.855.098.000
093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	559.466.618.000	624.180.262.000
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	670.709.523.000	670.709.523.000
100	KOMISI YUDISIAL RI	77.720.059.000	77.720.059.000
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	2.304.367.639.000	2.815.783.414.000
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	375.047.635.000	411.868.115.000
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	735.646.022.000	735.646.022.000
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	145.745.938.000	145.745.938.000
107	BADAN SAR NASIONAL	1.902.680.618.000	1.992.617.295.000
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	84.035.163.000	84.035.163.000
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	331.992.446.000	331.992.446.000
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	62.005.395.000	62.005.395.000
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	168.918.882.000	168.918.882.000
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	1.066.911.135.000	1.319.322.054.000
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	263.563.629.000	263.563.629.000
114	SEKRETARIAT KABINET	170.999.229.000	170.999.229.000
115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	3.759.496.500.000	3.759.496.500.000
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	921.764.046.000	924.049.046.000
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	967.630.629.000	968.380.629.000
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	341.349.526.000	341.349.526.000
999.01	PENGELOLAAN UTANG	135.453.200.000.000	135.452.800.000.000
999.02	HIBAH	2.853.254.017.000	2.274.596.041.000

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 6

PERBANDINGAN PAGU APBN-P DAN DIPA
PER 31 DESEMBER 2014

Kode BA	Uraian BA	APBN-P	DIPA
999.05	TRANSFER DAERAH	596.504.184.406.000	585.844.005.536.772
999.07	BELANJA SUBSIDI	403.035.574.566.000	403.033.983.267.000
999.08	BELANJA LAINNYA	43.748.355.388.000	11.018.465.534.000
999.99	PNBP KHUSUS BUN	92.986.234.031.000	92.611.397.968.000

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN 7
Realisasi Penerbitan SABA
Tahun 2014

www.peraturan.go.id

REALISASI PENERBITAN SABA
BA 999.08 - PENGELOLA BELANJA LAINNYA, TAHUN ANGGARAN 2014
(rupiah)

No.	No. SABA & Tgl		U R A I A N	SATKER/ KODE SATKER		REALISASI SABA
PROGRAM PEMBIAYAAN LAIN LAIN					Rp	19.344.178.044.000
A. BELANJA PEGAWAI					Rp	6.308.925.601.000
1. GAJI DAN TUNJANGAN					Rp	-
Cadangan Anggaran Gaji untuk Tambahan Pegawai Baru					Rp	-
2. HONORARIUM, VAKASI DAN LAIN LAIN					Rp	6.308.925.601.000
Belanja TK dan Pegawai Transito					Rp	6.308.925.601.000
Cadangan Anggaran untuk Remunerasi Pejabat Negara					Rp	-
Cadangan Anggaran untuk Remunerasi K/L					Rp	5.906.690.284.000
1	SPP-015/AG/2014 Juli 2014	1	SABA untuk Tunjangan Kinerja Pegawai pada Badan Standarisasi Nasional Tahun 2014	613104 Sestama BSN	Rp	11.433.609.000
2	SPP-016/AG/2014 Juli 2014	1	SABA untuk Tunjangan Kinerja Pegawai pada BMKG Tahun 2014	436786 Sestama BMKGSN	Rp	157.741.785.000
3	SPP-017/AG/2014 Juli 2014	1	SABA untuk Tunjangan Kinerja Pegawai pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2014	660117 Biro Umum LAPAN	Rp	44.406.660.000
4	SPP-018/AG/2014 Juli 2014	1	SABA untuk Tunjangan Kinerja Pegawai pada Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2014	427975 Setjen Wantannas	Rp	10.703.016.000
5	SPP-019/AG/2014 Juli 2014	1	SABA untuk Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Kehutanan Tahun 2014	426839 Biro Keuangan Setjen Kemenhut	Rp	543.799.422.000
6	SPP-020/AG/2014 Juli 2014	1	SABA untuk Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2014	450938 Biro Keuangan Kemenakertrans	Rp	170.716.939.000
7	SPP-021/AG/2014 Juli 2014	1	SABA untuk Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014	403200 Sekjen Kementerian Dalam Negeri	Rp	177.780.942.000
8	SPP-022/AG/2014 Juli 2014	1	SABA untuk Tunjangan Kinerja Pegawai pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2014	613324 Sestama Bapeten	Rp	16.913.215.000
9	SPP-023/AG/2014 Juli 2014	1	SABA untuk Tunjangan Kinerja Pegawai pada BNP2TKI Tahun 2014	449896 Sestama BNP2TKI	Rp	36.820.480.000
10	SPP-024/AG/2014 Juli 2014	1	SABA untuk Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Sosial Tahun 2014	440125 Biro Keu. Sekjen Kemensos	Rp	138.516.525.000
11	SPP-026/AG/2014 Juli 2014	17	SABA untuk Tunjangan Kinerja Pegawai pada Badan SAR Nasional Tahun 2014	414370 Basarnas	Rp	89.936.677.000
12	SPP-027/AG/2014 Juli 2014	17	SABA untuk Tunjangan Kinerja Pegawai pada Badan Intelijen Negara Tahun 2014	017194 BIN	Rp	32.858.549.000
13	SPP-028/AG/2014 Juli 2014	17	SABA untuk Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kominfo Tahun 2014	864241 Sekjen Kominfo	Rp	103.456.709.000
14	SPP-029/AG/2014 Juli 2014	17	SABA untuk Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Perhubungan Tahun 2014	412831 Kanpus Sekjen Kemhub	Rp	894.344.808.000
15	SPP-030/AG/2014 Juli 2014	18	SABA untuk Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Negara Tahun 2014	622081 Biro Umum Setjen KKP	Rp	352.392.089.000
16	SPP-031/AG/2014 Juli 2014	18	SABA untuk Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Luar Negeri Tahun 2014	403247 Kanpus Sekjen Kemenlu	Rp	87.078.036.000
17	SPP-032/AG/2014 Juli 2014	22	SABA untuk Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014	137590 Sekjen Kemdikbud	Rp	1.786.557.687.000
18	SPP-033/AG/2014 Agustus 2014	12	SABA untuk Tunjangan Kinerja Pegawai pada Perpustakaan Nasional Tahun 2014	531535 Perpustakaan Nasional RI Jkt	Rp	22.825.844.000
19	SPP-034/AG/2014 Agustus 2014	12	SABA untuk Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2014	427698 Menteri Lingkungan Hidup	Rp	36.066.532.000
20	SPP-035/AG/2014 Agustus 2014	12	SABA untuk Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Kesehatan Tahun 2014	465930 Biro Umum Kemenkes	Rp	422.178.496.000
21	SPP-044/AG/2014 Oktober 2014	20	SABA untuk Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2014	898003 Biro Keuangan Kementrian PU	Rp	762.032.825.000
22	SPP-058/AG/2014 Desember 2014	19	SABA untuk kenaikan Tunjangan Kinerja Pegawai di Kejaksaan RI Tahun 2014	005016 Kejaksaan Agung RI	Rp	8.330.639.000
Cadangan Anggaran Pembayaran Unfunded Fiability-THT					Rp	-
Cadangan Anggaran Belanja Pegawai Transito					Rp	402.235.317.000
1	SPP-038/AG/2014 Agustus 2014	29	Tambahan Alokasi Belanja Pegawai PPATK TA 2014	453374 PPATK	Rp	11.031.368.000
2	SPP-039/AG/2014 Agustus 2014	29	Tambahan Alokasi Belanja Pegawai KPK TA 2014	626997 KPK	Rp	64.713.644.000
3	SPP-049/AG/2014 Nopember 2014	21	Saba Anggaran Belanja Tambahan Kementerian Keuangan TA 2014	4089294 Sekjen Kemenkeu	Rp	279.092.884.000
4	SPP-049/AG/2014 Nopember 2014	21	Saba Anggaran Belanja Tambahan Kementerian Keuangan TA 2014	119091 Kanpus DJP	Rp	25.302.286.000
5	SPP-050/AG/2014 Nopember 2014	21	Saba Anggaran Belanja Tambahan Kementerian Keuangan TA 2014	410840 Kanpus DJBC	Rp	19.452.200.000
6	SPP-051/AG/2014 Nopember 2014	21	Saba Anggaran Belanja Tambahan Kementerian Keuangan TA 2014	411868 BPPK	Rp	2.642.935.000
3. KONTRIBUSI SOSIAL					Rp	
					Rp	
					Rp	-

www.peraturan.go.id

No.	No. SABA & Tgl	U R A I A N	SATKER/ KODE SATKER	REALISASI SABA
B. BANTUAN SOSIAL				**Rp 1.211.415.775.000**
1. PENANGGULANGAN BENCANA				**Rp 1.211.415.775.000**
Penanggulangan Bencana				Rp 1.211.415.775.000
1	STAP-002/AG/2014 21 Januari 2014	Tambahan Dana Siap Pakai (On Call) Tahun 2014	648521 BNPB	Rp 200.000.000.000
2	STAP-004/AG/2014 6 Maret 2014	Dana Siap Pakai (On Call) Tahap II Tahun 2014	648521 BNPB	Rp 500.000.000.000
	Sub Jumlah yg telah digeser ke K/L dlm APBN-P TA 2014			**Rp 700.000.000.000**
3	STAP-045/AG/2014 31 Oktober 2014	SABA Dana Siap Pakai (On Call) Tahap III Tahun 2014	648521 BNPB	Rp 511.415.775.000
	Sub Jumlah yg masih membebani TA 2014			**Rp 511.415.775.000**
C. BELANJA LAIN-LAIN				**Rp 11.823.836.668.000**
1. Jasa Perbendaharaan				**Rp -**
				Rp -
2. Operasional Lembaga yang belum mempunyai BA				**Rp -**
3. Kontribusi ke Lembaga Internasional				**Rp -**
4. Cadangan				**Rp 2.004.684.029.000**
1	STAP-046/AG/2014 31 Oktober 2014	Cadangan Risiko Fiskal	440281 Dit. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Rp 1.426.538.953.000
2	STAP-054/AG/2014 5 Desember 2014	SABA Anggaran Belanja Tambahan Kementerian Pertanian TA 2014	633656 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Rp 578.145.076.000
5. Keperluan Mendesak				**Rp 1.433.494.390.000**
1	STAP-005/AG/2014 14 Maret 2014	SABA Kementerian Pertahanan untuk Pengamanan Pemilu Tahun 2014	579262 Mabes TNI	Rp 100.120.000.000
2	STAP-007/AG/2014 25 Maret 2014	SABA Dukungan Dana Kegiatan Operasi Pengamanan Daerah Rawan (Ops Pamrahwan), Pengamanan Perbatasan (Pamtas) dan Pengamanan Pulau Terluar Tahun 2014	579262 Mabes TNI	Rp 192.987.189.000
3	STAP-009/AG/2014 10 April 2014	SABA Gaji, Operasional dan Kegiatan Transisi Otorita Asahan TA 2014 (Kementerian Perindustrian)	247101 Setjen Kementerian Perindustrian	Rp 8.362.736.000
4	STAP-010/AG/2014 25 April 2014	SABA Mahkamah Konstitusi RI untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	653910 Mahkamah Konstitusi RI	Rp 13.542.501.000
5	STAP-011/AG/2014 25 April 2014	SABA Mahkamah Konstitusi RI untuk Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusi Warga Negara	653910 Mahkamah Konstitusi RI	Rp 1.000.000.000
	Sub Jumlah yg telah digeser ke K/L dlm APBN-P TA 2014			**Rp 316.012.426.000**
6	STAP-008/AG/2014 4 April 2014	Audit BPKP	450491 Kanpus BPKP	Rp 39.073.719.000
7	STAP-012/AG/2014 2 Mei 2014	SABA Anggaran Pelaksanaan Diklat Prajabatan Kementerian Keuangan TA 2014	675709 Pusdiklat Pengembangan SDM-BPPK	Rp 64.996.002.000
8	STAP-013/AG/2014 30 Juni 2014	SABA Penagihan/Collecting Fee dan Pengendalian, Percepatan Pengembalian Pinjaman Petani Proyek PIR/UPP Perkebunan TA 2014	238830 Ditjen Prkebunan	Rp 4.298.855.000
9	STAP-014/AG/2014 1 Juli 2014	SABA Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Terkait kasus Bank Century Tbk dan Gugatan Arbitrase di International Centre for Settlement of Investment Disputes terkait ugatan Churchill Mining dan Planet Mining Pty kepada Pemerintah RI	409257 Ditjen Administrasi Hukum Umum	Rp 64.447.214.000
10	STAP-025/AG/2014 7 Juli 2014	SABA Safeguarding pada Kementerian Sosial dalam rangka Pelaksanaan Subsidi Pangan tahun 2014	630859 Setditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Rp 55.033.638.000
11	STAP-037/AG/2014 29 Agustus 2014	Tambahan Anggaran Penggantian Akibat Selisih Kurs Belanja Pegawai Perwakilan RI TA 2013	403247 Kanpus Setjen Kemlu	Rp 12.645.020.000
12	STAP-040/AG/2014 22 September 2014	Pelaksanaan Pembayaran PPh Pasal 21 Home Staff pada Perwakilan RI di Luar Negeri TA 2014	403247 Kanpus Setjen Kemlu	Rp 224.846.009.000
13	STAP-041/AG/2014 7 Oktober 2014	SABA Kementerian Sekretariat Negara untuk Kegiatan Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih	403171 Pasukan Pengamanan Presiden	Rp 1.874.094.000
14	STAP-042/AG/2014 8 Oktober 2014	SABA Keperluan Tambahan anggaran iuran kontribusi Pemerintah RI pada organisasi " Internasional TA 2014	667808 Ditjen Multilateral	Rp 185.781.123.000
15	STAP-036/AG/2014 13 Agustus 2014	SABA Anggaran Kementerian LN untuk 6th Global Forum of United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) TA 2014	667812 Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik	Rp 19.962.969.000
16	STAP-043/AG/2014 16 Oktober 2014	SABA Keperluan Pengadaan Rumah kediaman bagi mantan Presiden dan/atau Wakil Presiden RI	403013 Sekretariat Negara	Rp 282.426.560.000
17	STAP-047/AG/2014 13 Nopember 2014	SABA untuk Seleksi Calon Pimpinan KPK Tahun 2014	404233 Setjen (pusat) kemnKum Ham	Rp 1.421.416.000
18	STAP-050/AG/2014 21 Nopember 2014	SABA untuk Aanggaran Belanja Tambahan Kementerian Keuangan TA 2014	410640 Kanpus DJBC	Rp 4.828.443.000
19	STAP-051/AG/2014 21 Nopember 2014	SABA untuk Aanggaran Belanja Tambahan Kementerian Keuangan TA 2014	670142 Pusdiklat Pajak BPPK	Rp 6.980.530.000
20	STAP-052/AG/2014 28 Nopember 2014	SABA untuk Anggaran Pemberian Premi Lingkup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	410640 Kanpus DJBC	Rp 88.091.026.000
21	STAP-053/AG/2014 1 Desember 2014	SABA untuk Operasional Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	622081 Biro Umum Setjen KKP	Rp 3.325.766.000
22	STAP-055/AG/2014 9 Desember 2014	SABA untuk Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Kontribusi Pemri pada Organisasi " Internasional TA 2014 Tahap Dua	667808 Ditjen Multilateral	Rp 57.448.680.000
		Sub Jumlah yg masih membebani TA 2014		Rp 1.117.481.964.000

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 7

No.	No. SABA & Tgl	U R A I A N	SATKER/ KODE SATKER	REALISASI SABA
6. Cadangan Selisih Kurs				Rp 257.559.489.000
1	STAP-056/AG/2014	SABA untuk ABT Belanja Mengikat Perwakilan RI Tahun Anggaran	403247	Rp 3.531.251.000
2	STAP-057/AG/2014	SABA untuk ABT Belanja Mengikat Perwakilan RI Tahun Anggaran	403247	Rp 254.028.238.000
7. Bantuan Operasional Layanan Pos Universal				Rp -
				Rp -
8. Tunggakan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Kemhan/TNI Tahun 2006-2012				Rp -
9. Cadangan Pengamana Pemilu Tahun 2014				Rp 1.000.000.000.000
1	STAP-001/AG/2014 20 Januari 2014	Cadangan Pengamanan Pemilu Tahun 2014 (POLRI)	642381 PUSKEU POLRI	Rp 1.000.000.000.000
	Sub Jumlah yg telah digeser ke K/L dlm APBN-P TA 2014			Rp 1.000.000.000.000
10. Cadangan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014				Rp 2.128.098.760.000
1	STAP-003/AG/2014 4 Maret 2014	Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Tahun 2014 untuk Bawaslu	500100 Bawaslu	Rp 757.559.400.000
2	STAP-006/AG/2014 14 Maret 2014	SABA Komisi Pemilihan Umum untuk Anggaran 2 (Dua) orang Satlinmas tiap TPS dan Tambahan Anggaran Pembuatan TPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2014	027050 Komisi Pemilihan Umum	Rp 1.370.539.360.000
	Sub Jumlah yg telah digeser ke K/L dlm APBN-P TA 2014			Rp 2.128.098.760.000
11. Cadangan BMP Kemhan/TNI Tahun 2014				Rp -
				Rp -
12. Cadangan Untuk Opearsional OJK Tahun 2014				Rp
				Rp -
13. Cadangan Perlindungan Sosial				Rp 5.000.000.000.000
1	STAP-045/AG/2014 31 Oktober 2014	SABA Kementerian Sosial untuk Pelaksanaan Program Keluarga Proiduktif	440281 Dit. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Rp 5.000.000.000.000
	Jumlah SP SABA yang telah digeser ke K/L dalam APBN-P 2014			Rp 4.144.111.186.000
	Jumlah SP SABA yg masih membebani APBN-P TA 2014			Rp 15.200.066.858.000
	J U M L A H			Rp 19.344.178.044.000

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN 8
Rekening Khusus
31 Desember 2014

www.peraturan.go.id

REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2014

No	Uraian		Jumlah
1	Reksus Dalam Valuta Rupiah	Rp	267.524.997.735
2	Reksus Dalam Valuta AUD	Rp	577.256.675.828
3	Reksus Dalam Valuta EUR	Rp	6.684.295.141
4	Reksus Dalam Valuta JPY	Rp	14.870.420.336
5	Reksus Dalam Valuta USD	Rp	1.230.892.409.515
6	Rekening Dana Talangan No. 500.000001980	Rp	0
7	Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus Dalam Rupiah No. 609.000000980	Rp	0
8	Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus Dalam Valuta USD No. 609.100411980	Rp	0
9	Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus Dalam Valuta Yen No. 609.002111980	Rp	0
10	Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus Dalam Valuta Euro No. 609.002991980		
11	Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus Dalam Valuta Asing Selain USD dan Yen USD No. 519.000120980	Rp	0
TOTAL		**Rp**	**2.097.228.798.555**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN 9
Saldo Rekening Pemerintah Lainnya
Di Bank Umum
31 Desember 2014

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED)

LAMPIRAN 9

REKENING PEMERINTAH LAINNYA DI BANK UMUM
PER 31 DESEMBER 2014

(Dalam Rupiah)

No.	Nama Rekening	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		01-Jan-14	Penerimaan	Pengeluaran	31-Des-14
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
1.	Penampungan Dana Cadangan Resiko KUT TP 1999/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rekening induk dana lingkungan bergulir	367.778,00	8.572.780.332,00	8.573.148.110,00	0,00
3.	Penampungan pengembalian pinjaman proyek pengembangan Akuntansi (P2A)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rekening Kredit Listrik Pedesaan (KLP)	0,00	30.105.984,00	29.955.984,00	150.000,00
5.	Proyek Redistribusi Ternak	0,00	117.060.000,00	117.060.000,00	0,00
6.	Proyek P3 Bali (proyek pemuliaan dan pengembangbiakan sapi bali)	0,00	30.091.810,75	30.091.810,75	0,00
7.	Cadangan Pembayaran fee konversi dan collecting fee proyek PIR/UPP (5%)	25.067.022,43	1.156.502.632,16	1.173.542.304,90	8.027.349,69
8.	Dirjen Perbendaharaan untuk menampung pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (92%)	461.233.212,78	19.204.514.215,30	19.518.044.193,79	147.703.234,29
9.	Pembiayaan percepatan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (3%)	39.546,00	794.110.642,90	789.333.779,09	4.816.409,81
10.	Penampungan *recovery* risiko KUT TP 1999/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Rekening penampungan pencairan dana surat utang pemerintah	0,00	200.710.341.369,52	200.710.341.369,52	0,00
12.	Penampungan pengembalian kredit gudang, lantai jemur dan kios KUD (GLK - KUD)	0,00	90.318.723,16	90.318.723,16	0,00
13.	Dirjen Perbendaharaan untuk menampung pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP/Perkebunan	0,00	3.303.519.520,77	3.303.519.520,77	0,00
14.	Cadangan pembayaran fee konversi dan *collecting fee proyek PIR/UPP*	0,00	153.181.248,95	153.181.248,95	0,00
15.	Dirjen perbendaharaan untuk penampungan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP/Perkebunan	0,00	1.935.207.961,97	1.935.207.961,97	0,00
16.	Cadangan pembayaran fee konversi dan collecting fee proyek PIR/UPP	0,00	105.174.345,73	105.174.345,73	0,00
17.	Penampungan nisbah bagi hasil dalam rangka KKPA bagi hasil bank muamalat	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**486.707.559,21**	**236.202.908.787,21**	**236.528.919.352,63**	**160.696.993,79**
			Nilai Pembulatan yang disajikan dalam CaLK		**160.696.994**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN 10
Saldo Kas Di KPPN
31 Desember 2014

www.peraturan.go.id

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

No	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	DJPB PUSAT		**289.289.084.548**	**1.767.280.142**
1	KHUSUS PENERIMAAN	901	24.556.388.237	1.767.280.142
2	RPKBUN - PUSAT	902	264.732.696.311	-
	I. NAD		**83.401.122.599**	**35.907.274.651**
3	BANDA ACEH	001	61.308.915.166	23.846.206.230
4	LANGSA	002	1.862.973.543	1.313.083.602
5	MEULABOH	003	1.232.616.647	1.007.628.966
6	TAPAK TUAN	074	7.311.064.295	7.012.355.859
7	LHOKSEUMAWE	089	4.804.984.909	1.564.742.796
8	KUTACANE	105	1.065.881.234	210.672.054
9	TAKENGON	122	5.814.686.805	952.585.144
	II. SUMATERA UTARA		**93.724.941.283**	**102.248.197.111**
10	MEDAN I	004	24.108.568.568	27.417.398.134
11	PEMATANG SIANTAR	005	3.242.004.413	2.211.933.537
12	PADANG SIDEMPUAN	006	8.150.373.683	18.470.355.237
13	GUNUNG SITOLI	007	7.181.455.004	9.562.488.144
14	RANTAU PRAPAT	075	4.882.799.379	7.177.962.619
15	TANJUNG BALAI	076	13.016.105.512	4.120.800.640
16	SIBOLGA	106	3.374.926.069	3.092.997.351
17	SIDIKALANG	119	11.455.738.451	10.350.231.935
18	MEDAN II	123	1.302.270.479	1.848.704.465
19	TEBING TINGGI	124	10.403.617.586	7.053.933.772
20	BALIGE	125	6.607.082.139	10.941.391.277
	III. SUMATERA BARAT		**41.524.958.627**	**33.384.010.429**
21	PADANG	010	17.028.899.492	15.968.996.000
22	BUKIT TINGGI	011	4.427.784.350	6.720.569.005
23	SIJUNJUNG	077	4.748.767.285	2.075.194.877
24	SOLOK	090	9.492.762.099	2.989.090.245
25	LUBUK SIKAPING	091	3.681.604.012	4.489.943.000
26	PAINAN	142	2.145.141.389	1.140.217.302
	IV. RIAU		**72.021.896.076**	**138.786.648.474**
27	PEKANBARU	008	36.419.452.736	92.068.755.025
28	RENGAT	092	9.251.747.737	12.189.255.820
29	DUMAI	120	26.350.695.603	34.528.637.629
	V. JAMBI		**42.060.910.016**	**18.335.186.366**
30	JAMBI	012	4.667.127.261	6.563.545.821
31	SUNGAI PENUH	013	446.274.036	1.479.299.534
32	MUARA BUNGO	078	8.981.487.154	3.596.444.704
33	KUALA TUNGKAL	143	26.586.903.667	5.466.177.705

www.peraturan.go.id

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

No	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	31 Desember 2014	31 Desember 2013
34	BANGKO	159	1.379.117.898	1.229.718.602
	VI. SUMATERA SELATAN		**78.469.421.784**	**66.782.177.770**
35	PALEMBANG	014	23.788.290.843	17.538.923.641
36	LUBUK LINGGAU	070	19.006.579.736	8.614.524.249
37	BATURAJA	109	10.204.139.072	5.015.795.397
38	LAHAT	144	18.268.993.587	24.136.548.857
39	SEKAYU	160	7.201.418.546	11.476.385.626
	VII. LAMPUNG		**29.388.877.181**	**38.392.991.772**
40	BANDAR LAMPUNG	017	25.392.176.274	27.288.677.079
41	KOTABUMI	116	2.381.161.196	7.256.228.457
42	METRO	126	1.535.109.983	3.446.077.142
43	LIWA	145	80.429.728	402.009.094
	VIII. BENGKULU		**27.253.555.001**	**17.769.809.041**
44	BENGKULU	016	17.666.369.887	9.893.728.919
45	MANNA	121	4.134.539.843	2.012.381.457
46	CURUP	146	3.687.530.172	3.355.741.123
47	MUKO MUKO	181	1.765.115.099	2.507.957.542
	IX. BANGKA BELITUNG		**12.739.474.819**	**17.741.372.393**
48	PANGKAL PINANG	015	9.052.372.758	15.864.501.244
49	TANJUNG PANDAN	107	3.687.102.061	1.876.871.149
	X. BANTEN		**44.353.980.904**	**74.158.946.543**
50	SERANG	020	19.512.490.498	40.195.561.934
51	TANGERANG	127	24.813.239.731	33.866.992.809
52	RANGKASBITUNG	161	28.250.675	96.391.800
	XI. DKI JAKARTA		**810.670.834.911**	**1.017.422.277.252**
53	JAKARTA I	018	128.895.699.383	154.241.104.191
54	JAKARTA II	019	47.855.689.164	260.614.285.055
55	JAKARTA III	088	297.879.490.329	465.850.388.056
56	JAKARTA IV	133	27.559.101.803	57.858.636.212
57	JAKARTA V	139	41.428.397.933	78.481.054.434
58	KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	140	3.731.759.224	376.809.304
59	JAKARTA VI	175	92.971.201.203	0
60	JAKARTA VII	182	170.349.495.872	0
	XII. JAWA BARAT		**253.869.492.110**	**206.433.539.412**
61	PURWAKARTA	021	5.707.314.299	11.734.169.858
62	BANDUNG I	022	21.973.389.806	27.920.083.676
63	BOGOR	023	43.568.795.954	30.442.744.915

www.peraturan.go.id

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

No	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	31 Desember 2014	31 Desember 2013
64	CIREBON	024	8.278.424.043	10.008.502.098
65	TASIKMALAYA	025	33.306.622.266	8.493.104.513
66	KARAWANG	086	8.327.327.681	9.832.300.728
67	SUMEDANG	087	13.433.983.830	2.748.802.758
68	BANDUNG II	095	61.056.967.294	45.283.030.656
69	GARUT	096	12.291.443.256	6.734.163.882
70	SUKABUMI	128	2.807.515.259	24.203.102.156
71	KUNINGAN	147	2.884.763.964	1.561.600.443
72	BEKASI	171	40.232.944.458	27.471.933.729
	XIII. JAWA TENGAH		**48.279.662.796**	**81.595.366.187**
73	SEMARANG I	026	7.699.946.262	16.059.805.880
74	PURWOREJO	027	451.919.951	1.973.485.457
75	SURAKARTA	028	6.628.144.431	7.719.040.405
76	PURWOKERTO	029	2.225.715.831	2.473.367.535
77	PEKALONGAN	072	1.154.377.831	3.486.929.539
78	PATI	097	78.070.257	4.230.998.692
79	MAGELANG	115	7.907.041.085	4.090.772.784
80	TEGAL	118	8.697.388.259	13.602.965.630
81	KUDUS	129	31.492.765	5.493.715.434
82	CILACAP	130	8.232.089	523.072.324
83	SEMARANG II	134	4.080.502.200	8.943.562.781
84	KLATEN	148	3.134.269.446	1.359.942.318
85	SRAGEN	162	408.913.347	2.743.718.369
86	PURWODADI	163	2.569.791.360	686.117.868
87	BANJARNEGARA	164	3.203.857.682	8.207.871.171
	XIV. DIY		**16.998.633.151**	**13.992.924.999**
88	YOGYAKARTA	030	16.380.680.233	13.786.044.256
89	WONOSARI	149	108.602.409	50.360.647
90	WATES	176	509.350.509	156.520.096
	XV. JAWA TIMUR		**121.596.654.756**	**129.535.758.009**
91	SURABAYA I	031	66.127.047.696	21.289.970.507
92	MALANG	032	29.753.595.082	22.712.581.255
93	MADIUN	033	5.477.107.631	3.465.658.659
94	KEDIRI	034	5.313.768.944	25.834.797.260
95	BONDOWOSO	035	301.412.578	3.513.795.986
96	PAMEKASAN	036	1.984.369.834	21.875.538.030
97	BOJONEGORO	073	973.476.187	2.963.583.165
98	MOJOKERTO	098	6.078.578.697	2.713.798.971
99	PACITAN	099	0	750.882.738
100	BANYUWANGI	100	2.319.646.033	2.765.389.829
101	JEMBER	131	1.129.600.696	148.570.546

www.peraturan.go.id

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

No	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	31 Desember 2014	31 Desember 2013
102	SURABAYA II	135	1.224.152.060	12.722.646.426
103	BLITAR	150	150.679.643	2.338.524.419
104	SIDOARJO	165	667.676.707	3.219.955.114
105	TUBAN	166	95.542.968	3.220.065.104
	XVI. KALIMANTAN BARAT		**11.431.998.563**	**27.223.416.097**
106	PONTIANAK	042	4.279.389.640	4.349.175.227
107	SINTANG	079	1.612.068.120	6.731.121.292
108	SINGKAWANG	093	3.024.057.988	9.905.912.007
109	KETAPANG	094	984.908.861	201.590.221
110	PUTUSSIBAU	117	20.584.835	256.136.931
111	SANGGAU	167	1.510.989.119	5.779.480.419
	XVII. KALIMANTAN TENGAH		**27.065.667.970**	**10.894.919.509**
112	PALANGKARAYA	043	17.757.789.289	3.706.288.271
113	SAMPIT	044	5.866.717.580	5.601.688.073
114	BUNTOK	080	3.231.819.699	200.305.199
115	PANGKALAN BUN	102	209.341.402	1.386.637.966
	XVIII. KALIMANTAN SELATAN		**39.873.639.558**	**34.364.628.835**
116	BANJARMASIN	045	5.481.568.375	21.455.312.824
117	KOTABARU	081	12.624.822.031	5.182.628.084
118	BARABAI	110	12.287.876.251	2.861.161.880
119	TANJUNG	151	9.281.804.139	3.148.472.679
120	PELAIHARI	168	197.568.762	1.717.053.368
	XIX. KALIMANTAN TIMUR		**214.193.779.612**	**245.931.900.921**
121	SAMARINDA	046	61.964.105.938	87.327.290.761
122	BALIKPAPAN	047	34.704.702.438	33.250.365.234
123	TARAKAN	048	90.030.009.884	91.137.091.056
124	NUNUKAN	152	10.609.375.378	29.796.677.125
125	TANJUNG REDEP	153	16.885.585.974	4.420.476.745
	XX. BALI		**20.066.731.056**	**6.530.935.116**
126	DENPASAR	037	14.537.987.800	5.323.569.656
127	SINGARAJA	132	30.814.304	1.101.472.492
128	AMLAPURA	154	5.497.928.952	105.892.968
	XXI. NTB		**15.998.906.751**	**13.422.597.846**
129	MATARAM	038	5.876.688.815	7.866.639.899
130	BIMA	071	2.012.848.073	897.112.182
131	SUMBAWA BESAR	101	3.221.640.358	4.235.747.086
132	SELONG	169	4.887.729.505	423.098.679

www.peraturan.go.id

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

No	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	XXII. NTT		**42.380.632.434**	**50.788.775.611**
133	KUPANG	039	15.074.480.732	26.400.072.679
134	ENDE	040	7.108.670.757	7.055.362.686
135	WAINGAPU	041	4.264.691.015	4.460.459.445
136	RUTENG	111	13.951.146.956	9.392.346.452
137	ATAMBUA	172	92.848.580	169.693.205
138	LARANTUKA	174	1.888.794.394	3.310.841.144
	XXIII. SULAWESI SELATAN		**50.463.724.342**	**33.343.446.517**
139	MAKASSAR I	054	35.160.040.226	14.980.031.363
140	WATAMPONE	055	563.786.931	2.019.386.040
141	BANTAENG	056	3.964.874.334	2.332.905.644
142	PARE-PARE	057	4.878.692.802	2.383.947.652
143	PALOPO	058	1.828.160.767	4.762.202.531
144	MAKASAR II	136	793.327.326	2.801.712.203
145	BENTENG	155	750.384.508	268.549.260
146	MAKALE	170	8.918.182	3.598.668.784
147	SINJAI	177	2.515.539.266	196.043.040
	XXIV. SULAWESI TENGAH		**25.408.615.664**	**10.856.750.599**
148	PALU	051	14.243.717.441	7.271.145.333
149	POSO	052	4.659.554.623	1.192.502.062
150	LUWUK	053	3.201.692.243	321.309.261
151	TOLI-TOLI	082	3.303.651.357	2.071.793.943
	XXV. SULAWESI TENGGARA		**44.963.221.605**	**32.639.641.074**
152	KENDARI	060	25.135.993.981	21.449.138.735
153	BAU-BAU	103	12.684.524.127	3.373.603.103
154	KOLAKA	156	5.834.958.713	6.662.814.755
155	RAHA	157	1.307.744.784	1.154.084.481
	XXVI. GORONTALO		**6.077.879.365**	**8.185.026.629**
156	GORONTALO	050	6.069.228.714	7.803.556.993
157	MARISA	180	8.650.651	381.469.636
	XXVII. SULAWESI UTARA		**93.013.112.407**	**38.300.996.248**
158	MANADO	049	65.468.971.496	14.593.268.607
159	TAHUNA	083	59.966.280	5.177.512.714
160	KOTAMOBAGU	158	18.391.384.069	9.921.676.245
161	BITUNG	179	9.092.790.562	8.608.538.682
	XXVIII. MALUKU UTARA		**24.168.564.968**	**20.725.472.301**
162	TERNATE	062	19.433.450.535	18.409.274.708
163	TOBELO	112	4.735.114.433	2.316.197.593

www.peraturan.go.id

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

No	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	XXIX. MALUKU		**13.526.816.737**	**7.511.544.756**
164	AMBON	061	10.653.085.899	6.823.304.244
165	TUAL	084	2.569.147.200	212.020.772
166	SAUMLAKI	104	162.328.949	180.718.165
167	MASOHI	173	142.254.689	295.501.575
	XXX. PAPUA		**54.104.439.010**	**94.009.919.645**
168	JAYAPURA	063	26.934.317.651	70.675.670.251
169	BIAK	064	3.027.105.761	2.058.826.653
170	MERAUKE	068	998.696.208	10.147.257.816
171	NABIRE	085	2.268.874.312	1.229.505.564
172	WAMENA	113	0	2.014.355.576
173	SERUI	138	14.393.454.521	3.540.514.637
174	T I M I K A	141	6.481.990.557	4.343.789.148
	XXXI. KEPRI		**50.256.994.031**	**6.919.815.663**
175	TANJUNG PINANG	009	47.054.791.637	2.146.208.268
176	B A T A M	137	3.202.202.394	4.773.607.395
	XXXII. SULAWESI BARAT		**10.440.416.502**	**16.340.820.083**
177	M A J E N E	059	1.468.073.241	659.091.984
178	MAMUJU	178	8.972.343.261	15.681.728.099
	XXXIII. PAPUA BARAT		**34.478.370.119**	**14.475.836.355**
179	MANOKWARI	065	11.722.311.233	9.971.413.501
180	S O R O N G	066	17.732.163.215	2.719.991.938
181	FAK-FAK	067	5.023.895.671	1.784.430.916
	JUMLAH KAS DI KPPN		**2.843.557.011.256**	**2.666.720.204.356**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN 11
Kas pada K/L dan BUN
per 31 Desember 2014

KAS PADA K/L DAN BUN
PER 31 Desember 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

Dalam Rupiah

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 DESEMBER 2014 *AUDITED*	31 DESEMBER 2013 *AUDITED*	31 DESEMBER 2014 *AUDITED*	31 DESEMBER 2013 *AUDITED*	31 DESEMBER 2014 *AUDITED*	31 DESEMBER 2013 *AUDITED*
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	1.542.464.984	5.791.912.330		0	645.484.284	7.868.226.000
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	0	0	149.107	731.064	383.219.069	47.918.295.055
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	23.184.516.607	34.371.562.641		0	6.389.229.629	4.656.860.249
4	005	MAHKAMAH AGUNG	150.990.724	279.659.504	23.392.788	22.746.290	201.984.160	666.451.680
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	1.160.398.454	534.784.562	9.339.315	0	44.845.288.481	37.648.474.983
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	8.953.484.143	6.180.946.238	8.453.874.976	19.869.553.657	7.536.952.120	13.344.317.491
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	4.834.057.421	1.642.461.467	2.254.375.476	127.061.633	13.441.971.877	34.166.442.342
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	159.601.809.003	98.782.590.698	19.588.607.037	26.193.063.995	126.273.723.177	79.629.943.370
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	3.613.904.820	316.390		301.097.741	44.502.176.339	1.414.464.297.940
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	1.703.482.240	2.137.424.659	13.621.541.819	5.739.408.169	9.381.840.079	10.309.750.010
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	3.856.875.301	3.185.018.342	1.001.923.467	8.612.212.342	354.587.995.165	64.892.258.341
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	4.624.554.003	19.749.314.360	665.336.267	579.397.354	18.050.188.828	23.345.001.689
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	363.691.428	3.130.717.786	53.245.308	64.877.267	12.738.617.307	262.168.632
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	144.518.382	116.734.824	2.424.613.648	31.470.000	2.867.784	72.897.628
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	628.188.760	1.167.058.545	14.426.548.539	10.121.153.259	2.694.204.039	424.615.684.680
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	51.065.502.260	29.140.655.081	62.660.264.778	126.561.575.731	3.966.622.707.061	1.835.281.476.457
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	2.877.171.077	3.186.710.112	793.911.133	2.356.175.466	377.506.513.375	834.856.880.212
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	4.303.320.797	2.185.098.030	8.779.981.129	776.513.091	81.195.567.274	599.807.218.464
19	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.526.272.244	3.245.614.540	834.354.954	565.824.099	565.225.653	12.237.384.000
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	302.187.442	436.229.599	2.016.000		142.649.719.443	219.115.957.248
21	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	2.201.039.698	3.432.973.234	3.704.808.528	58.113.288	52.246.306.515	122.145.354.137
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.428.454.077	1.785.266.786	31.314.982	43.029.266	11.745.030.201	81.885.986.643
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	584.183.433	1.871.243.030	40.621.000	0	57.337.633.335	355.427.694.961
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	0	702.499.396	0	0	2.600.466.755	94.230.890
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	0	0	0	0	721.582.832	536.647.728

www.peraturan.go.id

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 DESEMBER 2014 *AUDITED*	31 DESEMBER 2013 *AUDITED*	31 DESEMBER 2014 *AUDITED*	31 DESEMBER 2013 *AUDITED*	31 DESEMBER 2014 *AUDITED*	31 DESEMBER 2013 *AUDITED*
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	527.678.487	790.749.017	0	0	235.372.325	832.416.170
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	156.659.580	1.468.589.350	24.190.082	0	568.918.927	5.190.835
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	0	24.594.597	0	0	53.782.229	171.451.800
29	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	263.191.078	2.628.326.014	1.750.000	1.534	2.529.529.828	1.420.216.760
30	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	29.165.200	8.086.014	100.000	0	3.913.856.734	22.619.070.199
31	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	54.337.800	200.000.000		0	2.700.611.189	2.675.479.365
32	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		62.550.520		0	1.531.611.904	3.236.256.517
33	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI		140.681.800		0	59.001.088	2.927.500.302
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA		0		0	432.154.107	0
35	051	LEMBAGA SANDI NEGARA		0		0	488.889.853	97.902.355
36	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	3.112.250	23.374.000		0		500.000.000
37	054	BADAN PUSAT STATISTIK	330.241.878	3.460.062.404	12.525.368	79.981.150	785.299.847	5.430.297.754
38	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	22.328.943	1.860.199.276		0	19.889.937.038	6.632.266.552
39	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	186.942.109	625.663.524	539.197.396	474.056.350	333.683.744	478.397.184
40	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	1.082.500	32.321.331	30.507.900	36.953.653		0
41	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	210.202.080	23.138.717		0	7.873.606.703	51.652.981.383
42	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1.341.152.559	1.030.894.208	2.981.380.000	3.108.695.000	140.794.632.058	225.354.194.911
43	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	172.582.180	258.156.593	230.690.000	1.153.615.000	5.497.565.692	8.753.468.580
44	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL		0		0		0
45	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	5.969.871.674	928.478.128		0	301.468.650	541.000
46	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	416.204.913	552.730.216		7.402.054.135	2.330.901.256	0
47	067	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	453.987.400	23.650.000		0		0
48	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	563.831.666	11.483.264.463		6.253	3.745.740.846	2.969.737.920
49	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA		183.455.937		0	3.295.142.985	5.763.692.250
50	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	2.072.878	74.004.774	185.000	4.984.780	11.257.037	66.211.838.254
51	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	3.887.057.443	16.105.364.955		0	81.605.936	5.652.072.319
52	077	MAHKAMAH KONSTITUSI		0		0		0
53	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN		8.967.046		0		51.452.930
54	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	71.152.818	93.118.672	109.536.504	444.881.620	1.049.838.356	13.368.798.609

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 DESEMBER 2014 *AUDITED*	31 DESEMBER 2013 *AUDITED*	31 DESEMBER 2014 *AUDITED*	31 DESEMBER 2013 *AUDITED*	31 DESEMBER 2014 *AUDITED*	31 DESEMBER 2013 *AUDITED*
55	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL		3.180.000		50.000	344.015.589	16.000
56	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	147.352.722	431.094.397	1.586.969.120	7.067.354.006	280.968.099	689.655.314
57	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	94.072.431	181.271.587		0	246.976.457	87.021.468
58	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL		30.000	176.269.320	106.041.878	36.389.650	186.261.600
59	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL		0	1.137.355	33.221		4.925.028.000
60	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR		0		53.297.000	140.984.168	872.100
61	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	14.400.000	3.220.000	83.349.695	873.312.224	2.836.348.816	2.583.825.884
62	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA		118.300		0	1.631.649.400	1.534.414.400
63	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA		0		0	62.657.600	0
64	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	0	0		5.625.000	30.541.650	525.000
65	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	4.465.321.851	7.310.288.374	2.660.399.500	2.832.027.845	9.346.196.814	37.335.236.964
66	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT		0		0	1.922.208.076	47.854.248.061
67	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.070.501.610	5.189.949.029	1.253.950		3.303.107.932	763.393.596
68	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	484.968.500	582.997.500	9.366.450	75.000.000	621.875.600	612.817.808
69	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	3.701.128.507	2.680.535.817		0	5.957.127.936	3.342.773.684
70	100	KOMISI YUDISIAL		0		0	35.764.346	0
71	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA		44.007.890.000		0	21.609.214.426	20.956.484.625
72	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	143.069.200	894.251.522		17.162.204	24.169.637	1.184.711.713
73	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO		0		0		0
74	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH		0		0	21.401.374	189.385.267
75	107	BADAN SAR NASIONAL	295.376.191	7.363.713		0	1.153.241.111	0
76	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA		0		0		0
77	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	26.770.942	74.677.800		0		0
78	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	3.412.011	132.441.981		0	268.885.333	0
79	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN		22.372.000		0		0
80	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM		0		0	44.418.945.292	7.322.596.710
81	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME		41.690.650		0	1.484.466.963	0
82	114	SEKRETARIAT KABINET	73.154.980	129		0	2.640.452.950	3.423.463.348

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 DESEMBER 2014 *AUDITED*	31 DESEMBER 2013 *AUDITED*	31 DESEMBER 2014 *AUDITED*	31 DESEMBER 2013 *AUDITED*	31 DESEMBER 2014 *AUDITED*	31 DESEMBER 2013 *AUDITED*
83	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	4.971.256.036	14.095.670.219		0	2.643.568.976	86.908.221.476
84	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	199.469.481	5.200.500		0	26.612.494.419	16.885.866.841
85	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	31.559.274	5.110.000		0	54.850.932.968	55.618.800.895
86	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG		0		0	1.838.182.966	0
JUMLAH KAS PADA K/L			**311.035.736.470**	**340.816.567.230**	**147.819.027.491**	**225.839.936.566**	**5.717.733.671.662**	**6.944.460.747.533**
87	999.01	PENGELOLAAN UTANG	0	0	0	0	0	
88	999.03	INVESTASI PEMERINTAH	0	0	0	0	0	0
89	999.04	PENERUSAN PINJAMAN	0	0	0	0	0	
90	999.05	TRANSFER KE DAERAH	0	0	0	0	0	
91	999.07	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	291.632.067.969	44.390.196.217
92	999.08	BELANJA LAIN LAIN	5.839.237.806	2.075.253.730	0	0	184.606.106.204	374.370.559.588
93	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	0	0	0	0	0	
94	999.992	DIREKTORAT PKN (SAKUN)	0	0	0	0	0	
95	999.999	BADAN LAINNYA	0	0	0	0	0	
JUMLAH KAS PADA BUN			**5.839.237.806**	**2.075.253.730**	**0**	**0**	**476.238.174.173**	**418.760.755.805**
JUMLAH KAS PADA K/L DAN BUN			**316.874.974.276**	**342.891.820.960**	**147.819.027.491**	**225.839.936.566**	**6.193.971.845.835**	**7.363.221.503.338**

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) **LAMPIRAN 11.B**

PERBEDAAN SALDO KAS BLU
ANTARA K/L DAN BENDAHARA UMUM NEGARA
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)

ES1	SATKER		KAS BLU (BUN)	Kas BLU (K/L)			Perbedaan
	Kode	Nama		Kas setara Kas	Investasi	Total	
01	499672	PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELANGGANG OLAH RAGA BUNG KARNO (BLU)	241.373.986.941	246.101.736.941,00		246.101.736.941,00	(4.727.750.000,00)
01	499681	PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN (BLU)	490.565.246.765	490.565.246.765,00		490.565.246.765,00	-
01	449611	PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	3.177.860.305.746	3.177.860.305.746,00		3.177.860.305.746,00	-
01	691117	LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN	2.209.250.062.214	383.742.215,00	2.208.866.250.000,00	2.209.249.992.215,00	69.999,00
11	477198	SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA	48.472.125.473	48.472.125.473,00		48.472.125.473,00	-
06	411955	BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI	14.822.468.027	14.822.468.027,00		14.822.468.027,00	-
06	237551	Pusat Veteriner Farma Surabaya	7.011.287.431	7.011.287.431,00		7.011.287.431,00	-
01	247115	Akademi Kimia Analisis	5.966.636.153	5.967.076.153,00		5.967.076.153,00	(440.000,00)
07	539060	BARISTAND INDUSTRI LAMPUNG	686.772.172	686.772.172,00		686.772.172,00	-
07	247140	BALAI BESAR BAHAN DAN BARANG TEKNIK	19.362.362.896	19.602.722.896,00		19.602.722.896,00	(240.360.000,00)
07	247136	BALAI BESAR INDUSTRI AGRO	18.950.181.492	18.950.181.492,00		18.950.181.492,00	-
07	247161	BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI SEMARANG	4.292.135.725	4.292.135.725,00		4.292.135.725,00	-
11	412600	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI "LEMIGAS" JAKARTA	73.997.469.621	73.997.469.621,00		73.997.469.621,00	-
12	287494	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR	25.514.289.166	34.531.008.501,00		34.531.008.501,00	(9.016.719.335,00)
12	414298	POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN	6.655.687.187	6.655.687.187,00		6.655.687.187,00	-
12	414302	SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN	73.893.419.602	38.893.419.602,00	35.000.000.000,00	73.893.419.602,00	-
12	414324	BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN (BP3IP)	111.339.905.963	111.339.905.963,00		111.339.905.963,00	-
12	414330	POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG	27.058.702.939	27.058.702.939,00		27.058.702.939,00	-
12	526181	AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN SURABAYA	13.221.769.934	13.221.769.934,00		13.221.769.934,00	-
12	531954	POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA	41.260.249.808	16.260.249.808,00	25.000.000.000,00	41.260.249.808,00	-
04	415030	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	468.889.929.693	468.889.929.693,00		468.889.929.693,00	-
04	415092	UNIVERSITAS RIAU	12.507.933.937	9.307.232.906,00		9.307.232.906,00	3.200.601.031,00
04	415061	UNIVERSITAS ANDALAS	46.515.914.391	46.515.914.391,00		46.515.914.391,00	-
04	415112	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	176.617.583.203	21.006.666.957,00	161.357.068.714,00	182.363.735.671,00	(5.746.152.468,00)
04	415310	UNIVERSITAS BENGKULU	58.362.238.567	53.104.608.679,00		53.104.608.679,00	5.257.629.888,00
04	415128	UNIVERSITAS LAMPUNG	85.671.260.116	61.449.646.123,00	24.221.613.993,00	85.671.260.116,00	-
04	663101	UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	9.136.192.235	8.136.192.235,00	1.000.000.000,00	9.136.192.235,00	-
04	189747	UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA	77.332.996.477	56.027.937.145,00	21.305.059.332,00	77.332.996.477,00	-
04	189730	INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	503.688.266.111	90.436.761.243,00	484.792.466.824,00	575.229.227.067,00	(71.540.960.956,00)
04	189726	UNIVERSITAS PAJAJARAN	181.067.448.339	181.067.448.339,00		181.067.448.339,00	-
04	189772	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	287.657.993.318	270.544.891.703,00		270.544.891.703,00	17.113.101.615,00
04	189815	UNIVERSITAS DIPONEGORO	369.711.740.033	369.711.740.033,00	700.000.000,00	370.411.740.033,00	(700.000.000,00)
04	189822	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	117.559.113.964	117.377.572.964,00		117.377.572.964,00	181.541.000,00
04	189882	UNIVERSITAS SEBELAS MARET	87.070.359.991	87.070.359.991,00		87.070.359.991,00	-
04	189899	UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN	93.071.957.217	93.071.957.217,00		93.071.957.217,00	-
04	189946	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	39.802.077.826	39.802.077.826,00		39.802.077.826,00	-
04	189932	UNIVERSITAS GAJAH MADA	1.016.228.469.236	1.001.092.379.860,00	25.769.537.306,00	1.026.861.917.166,00	(11.623.447.930,00)
04	414958	UNIVERSITAS AIRLANGGA	204.186.248.078	262.108.756.522,00		262.108.756.522,00	(57.922.508.444,00)
04	414970	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	172.166.711.467	172.166.711.467,00		172.166.711.467,00	-
04	414964	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER	96.835.728.164	96.835.728.164,00		96.835.728.164,00	-
04	576811	POLITEKNIK NEGERI MALANG	32.542.934.790	32.542.934.790,00		32.542.934.790,00	-
04	414989	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	46.296.615.884	46.296.615.884,00		46.296.615.884,00	-
04	415009	UNIVERSITAS NEGERI MALANG	297.343.531.371	297.343.531.371,00		297.343.531.371,00	-
04	415253	UNIVERSITAS UDAYANA	41.542.412.864	41.262.100.896,00		41.262.100.896,00	280.311.959,00
04	415278	UNIVERSITAS MATARAM	65.402.898.374	65.402.898.374,00	13.500.000.000,00	78.902.898.374,00	(13.500.000.000,00)
04	415165	UNIVERSITAS MULAWARMAN	95.917.167.321	49.321.061.430,00		49.321.061.430,00	46.596.105.891,00
04	415196	UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	2.272.733.848	1.762.166.836,00	510.567.012,00	2.272.733.848,00	-
04	415200	UNIVERSITAS TADULAKO	42.343.389.807	42.343.389.807,00		42.343.389.807,00	-
04	415216	UNIVERSITAS HASANUDDIN	86.440.716.343	85.800.331.343,00		85.800.331.343,00	640.385.000,00
04	208962	UNIVERSITAS HALU OLEO	18.873.290.494	18.873.290.494,00		18.873.290.494,00	-
04	189658	UNIVERSITAS INDONESIA	1.812.748.236.361	1.791.282.539.723,00	8.907.102.849,00	1.800.189.642.572,00	12.558.593.789,00
04	189662	UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA	90.474.467.784	90.474.467.784,00		90.474.467.784,00	-
04	506378	UNIVERSITAS TERBUKA	1.405.555.359.767	266.555.359.767,00	1.139.000.000.000,00	1.405.555.359.767,00	-
04	532214	RUMAH SAKIT UMUM H. ADAM MALIK MEDAN	186.418.316.928	186.418.316.928,00		186.418.316.928,00	-
04	415618	RUMAH SAKIT UMUM DR M JAMIL PADANG	22.994.445.479	22.994.445.479,00		22.994.445.479,00	-
04	257847	RUMAH SAKIT STROKE NASIONAL BUKITTINGGI	12.817.129.828	12.817.129.828,00		12.817.129.828,00	-
04	415649	BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN PALEMBANG	1.902.434.960	1.902.434.960,00		1.902.434.960,00	-
04	415624	RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG	79.946.286.668	79.946.286.668,00		79.946.286.668,00	-
04	415630	RUMAH SAKIT KUSTA DR RIVAI ABDULLAH PALEMBANG	8.831.346.269	8.831.346.269,00		8.831.346.269,00	-
04	415491	RUMAH SAKIT MATA CICENDO BANDUNG	63.297.985.494	66.901.831.738,00		66.901.831.738,00	(3.603.846.244,00)
04	415486	RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU BANDUNG	20.179.347.029	6.675.500.785,00	10.000.000.000,00	16.675.500.785,00	3.603.846.244,00
04	415381	BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT BANDUNG	3.648.879.191	3.648.879.191,00		3.648.879.191,00	-
04	415479	RUMAH SAKIT UMUM DR HASAN SADIKIN BANDUNG	49.735.912.923	49.546.895.700,00		49.546.895.700,00	189.017.223,00
04	415511	RUMAH SAKIT PARU DR.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA	16.114.907.462	314.907.462,00	15.800.000.000,00	16.114.907.462,00	-
04	415505	RUMAH SAKIT DR. MARZUKI MAHDI BOGOR	51.342.644.669	45.589.903.107,00		45.589.903.107,00	5.752.641.562,00
04	415397	BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT SURAKARTA	3.953.390.093	3.953.390.093,00		3.953.390.093,00	-
04	415567	RS ORTHOPAEDI PROF. DR.R. SOEHARSO SURAKARTA	107.896.255.052	107.896.255.052,00		107.896.255.052,00	-
04	415582	RUMAH SAKIT UMUM DR SARDJITO YOGYAKARTA	128.423.722.665	128.423.722.665,00		128.423.722.665,00	-
04	415598	RUMAH SAKIT JIWA DR. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG	41.070.261.391	41.070.261.391,00		41.070.261.391,00	-
04	415661	RUMAH SAKIT UMUM SANGLAH DENPASAR	33.559.075.305	33.559.075.305,00		33.559.075.305,00	-
04	538815	RUMAH SAKIT UMUM MANADO	21.165.939.289	21.165.939.289,00		21.165.939.289,00	-
04	415542	RS JIWA PROF. DR. SOEROYO MAGELANG	27.239.930.430	27.239.930.430,00		27.239.930.430,00	-
04	415520	RUMAH SAKIT KUSTA SITANALA TANGERANG	21.088.398.669	21.088.398.669,00		21.088.398.669,00	-
04	415551	RS PARU DR. ARIO WIRAWAN SALATIGA	13.704.140.662	13.704.140.662,00		13.704.140.662,00	-
04	415536	RSU DR KARIADI SEMARANG	237.750.082.638	237.750.082.638,00		237.750.082.638,00	-
04	415602	BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA	3.835.653.735	3.835.653.735,00		3.835.653.735,00	-
04	538867	BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT SULAWESI SELATAN (UJUNG PANDANG)	5.735.247.929	5.735.247.929,00		5.735.247.929,00	-
04	258462	RUMAH SAKIT DR. TADJUDIN CHALID MAKASSAR	2.152.299.909	2.152.299.909,00		2.152.299.909,00	-
04	415655	BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR	2.315.983.461	2.315.983.461,00		2.315.983.461,00	-
04	548886	RUMAH SAKIT UMUM DR WAHIDIN SUDIRO-HUSODO MAKASSAR	152.680.945.356	152.680.945.356,00		152.680.945.356,00	-
04	415401	BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT SULAWESI SELATAN	632.225.809	632.225.809,00		632.225.809,00	-
04	415573	RSU PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO	118.334.005.809	3.434.005.809,00	114.900.000.000,00	118.334.005.809,00	-
04	520611	RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA	51.314.565.204	51.314.565.204,00		51.314.565.204,00	-
04	415432	RUMAH SAKIT FATMAWATI JAKARTA	126.143.820.187	126.143.820.187,00		126.143.820.187,00	-
04	415454	RUMAH SAKIT JIWA DR. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA	30.723.483.612	5.723.483.612,00	25.000.000.000,00	30.723.483.612,00	-
04	415423	RUMAH SAKIT UMUM DR CIPTO MANGUN KUSUMO JAKARTA	274.252.330.934	274.252.330.934,00		274.252.330.934,00	-
04	415670	RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA	2.770.071.615	2.770.071.615,00		2.770.071.615,00	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) **LAMPIRAN 11.B**

PERBEDAAN SALDO KAS BLU
ANTARA K/L DAN BENDAHARA UMUM NEGARA
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)

BAES1	SATKER		KAS BLU (BUN)	Kas BLU (K/L)			Perbedaan
	Kode	Nama		Kas setara Kas	Investasi	Total	
02404	520628	RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA	212.673.796.669	212.673.796.669,00		212.673.796.669,00	-
02404	415460	BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN JAKARTA	1.486.041.632	1.486.041.632,00		1.486.041.632,00	-
02404	415706	RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI PROF.DR.SULIANTI SAROSO JAKARTA	11.722.866.619	11.722.866.619,00		11.722.866.619,00	-
02404	415448	RUMAH SAKIT UMUM PERSAHABATAN	91.496.599.094	91.496.599.094,00		91.496.599.094,00	-
02404	548890	RUMAH SAKIT KANKER "DHARMAIS" JAKARTA	54.224.418.475	54.224.418.475,00		54.224.418.475,00	-
02412	632111	POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN	11.052.943.296	11.052.943.296,00		11.052.943.296,00	-
02412	632153	POLITEKNIK KESEHATAN BENGKULU	12.775.192.010	12.775.192.010,00		12.775.192.010,00	-
02412	632174	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGKARANG	16.704.462.160	16.704.462.160,00		16.704.462.160,00	-
02412	632221	POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG	21.022.176.436	6.022.176.436,00	15.000.000.000,00	21.022.176.436,00	-
02412	632259	POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA	25.417.478.159	25.417.478.159,00		25.417.478.159,00	-
02412	632263	POLITEKNIK KESEHATAN JOGYAKARTA	1.611.486.347	1.611.486.347,00		1.611.486.347,00	-
02412	637567	POLITEKNIK KESEHATAN MALANG	28.819.338.778	12.714.338.778,00	16.105.000.000,00	28.819.338.778,00	-
02412	632291	POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK	10.591.890.428	6.591.890.428,00	4.000.000.000,00	10.591.890.428,00	-
02412	632242	POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG	26.163.898.598	26.163.898.598,00		26.163.898.598,00	-
02412	637588	POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA	5.186.599.902	4.680.732.189,00	1.000.000.000,00	5.680.732.189,00	(494.132.287,00)
02412	632348	POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR	23.906.728.007	23.906.728.007,00		23.906.728.007,00	-
02412	632217	POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III	2.042.272.095	2.042.272.095,00		2.042.272.095,00	-
02412	632200	POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II	12.681.705.252	12.681.705.252,00		12.681.705.252,00	-
02504	423925	IAIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH	12.360.638.031	12.360.638.031,00		12.360.638.031,00	-
02504	424157	UIN SULTHAN SYARIF KASIM RIAU	37.647.299.713	37.647.299.713,00		37.647.299.713,00	-
02504	424109	IAIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMDI	1.275.406.636	1.303.124.047,00		1.303.124.047,00	(27.630.211,00)
02504	424208	IAIN RADEN FATAH PALEMBANG	17.259.081.492	10.848.949.356,00	7.000.000.000,00	17.848.949.356,00	(589.867.864,00)
02504	424260	IAIN RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG	25.352.259.866	6.466.259.866,00	18.886.000.000,00	25.352.259.866,00	-
02504	423548	IAIN SMH BANTEN	18.006.552.393	18.006.552.393,00		18.006.552.393,00	-
02504	423755	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	53.668.831.709	46.328.191.565,00		46.328.191.565,00	7.340.640.144,00
02504	423812	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	39.364.293.528	46.768.133.672,00		46.768.133.672,00	(7.403.840.144,00)
02504	307843	IAIN MATARAM	11.885.784.627	11.885.784.627,00		11.885.784.627,00	-
02504	423523	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG JATI BANDUNG	12.070.171.749	12.070.171.749,00		12.070.171.749,00	-
02504	424007	IAIN SUMATERA UTARA MEDAN	16.683.869.769	16.677.817.087,00		16.677.817.087,00	6.042.682,00
02504	423501	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	127.802.178.903	127.802.178.903,00		127.802.178.903,00	-
02504	423611	IAIN WALISONGO SEMARANG	13.725.811.298	13.725.811.298,00		13.725.811.298,00	-
02504	423770	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA	31.196.449.757	31.196.449.757,00		31.196.449.757,00	-
02504	307314	UIN ALAUDDIN MAKASSAR	34.101.518.765	29.101.518.765,00	5.000.000.000,00	34.101.518.765,00	-
02901	447862	BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN	416.422.254.165	416.422.254.165,00		416.422.254.165,00	-
03304	499682	BADAN LAYANAN UMUM (BLU) BIDANG PENDANAAN SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL (BPJT)	523.735.355.135	523.735.355.135,00		523.735.355.135,00	-
04201	668309	PUSAT PERAGAAN IPTEK	1.616.006.152	1.616.006.152,00		1.616.006.152,00	-
04401	446141	LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (LLP-KUKM)	40.521.233.122	40.521.233.122,00		40.521.233.122,00	-
04401	446135	LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (LPDB-KUMKM)	441.226.132.762	441.226.132.762,00		441.226.132.762,00	-
05903	668444	BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPPPTI)	6.818.200.201.308	6.818.200.201.308,00	-	6.818.200.201.308,00	-
06001	650840	RUMKIT BHAYANGKARA PALEMBANG	3.517.344.437	3.517.344.437,00		3.517.344.437,00	-
06001	642818	RUMKIT BHAYANGKARA BANDUNG	6.879.332.110	6.879.332.110,00		6.879.332.110,00	-
06001	651032	RUMKIT BHAYANGKARA SEMARANG	6.257.742.035	6.257.742.035,00		6.257.742.035,00	-
06001	644044	RUMKIT BHAYANGKARA KEDIRI	31.090.250.881	31.090.250.881,00		31.090.250.881,00	-
06001	651203	RUMKIT BHAYANGKARA DENPASAR	3.667.997.558	3.667.997.558,00		3.667.997.558,00	-
06001	648261	RS BHAYANGKARA POLPUS	109.367.324.248	109.367.324.248,00		109.367.324.248,00	-
06001	650456	RUMKIT BHAYANGKARA SETUKPA	3.112.841.886	3.112.841.886,00		3.112.841.886,00	-
06001	651135	RUMKIT BHAYANGKARA SURABAYA	12.300.400.358	12.300.400.358,00		12.300.400.358,00	-
06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASSAR	32.603.509.567	32.603.509.567,00		32.603.509.567,00	-
06001	650447	RUMKIT BHAYANGKARA PUSDIK GASUM	7.491.346.532	7.491.346.532,00		7.491.346.532,00	-
08101	667875	PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI (BPPT ENJINIRING)	23.702.095.491	23.702.095.491,00		23.702.095.491,00	-
08201	672817	PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA	2.908.011.995	2.908.011.995,00		2.908.011.995,00	-
09101	499686	BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN	591.281.608.800	591.513.720.889,00		591.513.720.889,00	(232.112.089,00)
11201	668717	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	677.047.491.944	961.569.706.117,00		961.569.706.117,00	15.477.778.827,00
		Jumlah	**27.650.268.834.909**	**23.336.819.639.007**	**4.382.620.665.030**	**27.719.440.304.037**	**-69.171.469.128**

PERBEDAAN SALDO KAS HIBAH LANGSUNG
ANTARA K/L DAN BENDAHARA UMUM NEGARA
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)

RINCIAN				PERBEDAAN
BA/KODE SATKER	NAMA K/L DAN SATKER	JUMLAH HIBAH MENURUT K/L	JUMLAH HIBAH MENURUT BUN	
010	**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**			
621892	DITJEN OTONOMI DAERAH		**(23.488.869)**	**23.488.869**
012	**KEMENTERIAN PERTAHANAN**			
562103	KEMENTERIAN PERTAHANAN		239.372	(239.372)
344859	LANUD ADI SOEMARMO		60.064.070	(60.064.070)
344589	PUSPENERBAL		4.942.525.200	(4.942.525.200)
579276	MABES TNI AD		26.695.200.000	(26.695.200.000)
			31.698.028.642	**(31.698.028.642)**
013	**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**			-
409263	DITJEN PAS	78.300.454	78.300.454	-
683368	LAPAS NARKOTIKA SAMARINDA	951.300.920	951.300.920	-
		1.029.601.374	**1.029.601.374**	-
015	**KEMENTERIAN KEUANGAN**			-
411880	BADAN KEBIJAKAN FISKAL		563.063.335	(563.063.335)

www.peraturan.go.id

PERBEDAAN SALDO KAS HIBAH LANGSUNG
ANTARA K/L DAN BENDAHARA UMUM NEGARA
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)

RINCIAN				PERBEDAAN
BA/KODE SATKER	NAMA K/L DAN SATKER	JUMLAH HIBAH MENURUT K/L	JUMLAH HIBAH MENURUT BUN	
977263	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG		(293.910.835)	293.910.835
		-	**269.152.500**	**(269.152.500)**
018	**KEMENTERIAN PERTANIAN**			-
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	1.277.263.429	437.956.388	839.307.041
412038	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA(Puslitbang Holtikultura)	318.462.628	558.299.440	(239.836.812)
237217	BALAI PENELITIAN TANAMAN SAYURAN, LEMBANG(Balitsa Lembang)	599.717.119	599.717.119	-
237259	BALAI BESAR PENELITIAN VETERINER, BOGOR(Bbalitvet)	664.194.311	643.825	663.550.486
411971	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN KANTOR PUSAT JAKARTA	0	225	(225)
648680	BALAI PENELITIAN TANAH, BOGOR(Balittanah,Bogor)	1.532.932	1.532.932	-
648694	BALAI PENELITIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI, BOGOR(Balitklimat Bogor)	195.946.629	88.500.654	107.445.975
633975	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN YOGYAKARTA(BPTP Jogyakarta)	200	200	-
237572	BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT MALANG(Balittas,Malang)	107.681.123	107.681.123	-
412050	BALAI PENELITIAN TANAMAN BUAH TROPIKA SOLOK(Balitbu Tropika Solok)	400	400	-
648720	LOKA PENELITIAN SAPI POTONG, GRATI JAWA TIMUR		341	(341)
648716	BALAI PENELITIAN TANAMAN JERUK DAN BUAH SUBTROPIKA MALANG		20.308.720	(20.308.720)
634040	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NUSA TENGGARA BARAT(BPTP NTB)	57.455.424	57.455.425	(1)
411993	BALAI PENELITIAN TANAMAN ANEKA KACANG DAN UMBI MALANG		95	

PERBEDAAN SALDO KAS HIBAH LANGSUNG
ANTARA K/L DAN BENDAHARA UMUM NEGARA
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)

RINCIAN				PERBEDAAN
BA/KODE SATKER	NAMA K/L DAN SATKER	JUMLAH HIBAH MENURUT K/L	JUMLAH HIBAH MENURUT BUN	
537628	BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN, SERPONG(BBP Mekanisme Pertanian)	625	0	625
		3.222.254.820	**1.872.096.887**	**1.350.158.028**
				-
				-
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			-
412565	DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN		261.870.773	(261.870.773)
579170	PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI		391.705.700	(391.705.700)
			653.576.473	**(653.576.473)**
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN			-
439460	Kenavigasian Pusat	**2.337.098.073**	**605.833.225**	**1.731.264.848**
				-
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			-
052262	POLITEKNIK NEGERI MADIUN	516.585.768	516.585.768	-
415159	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT	90.260.000	-	90.260.000
576846	POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK	2.264.681		2.264.681
576871	POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA	24.393.941.505	24.412.034.641	(18.093.136)
689906	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI	773.886.793	773.887.926	(1.133)

PERBEDAAN SALDO KAS HIBAH LANGSUNG
ANTARA K/L DAN BENDAHARA UMUM NEGARA
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)

RINCIAN				PERBEDAAN
BA/KODE SATKER	NAMA K/L DAN SATKER	JUMLAH HIBAH MENURUT K/L	JUMLAH HIBAH MENURUT BUN	
689948	POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN	6.856.464.654	6.674.444.641	182.020.013
		32.633.403.401	**32.376.952.976**	**256.450.425**
				-
024	KEMENTERIAN KESEHATAN			-
258530	PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEHATAN	8.765.793.747	21.914.409.187	(13.148.615.440)
648449	PUSAT PROMOSI KESEHATAN	883.624.643	827.404.643	56.220.000
465909	SET DITJEN BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	9.661.285.535	(2.198.419.901)	11.859.705.436
466034	DIREKTORAT BINA GIZI MASYARAKAT	706.264.770	-	706.264.770
465760	DIT BINA PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN SARANA KES	51.498.000	51.498.600	(600)
465833	DIREKTORAT PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG	80.996.867.263	278.874.468.641	(197.877.601.378)
465842	DIREKTORAT PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG	40.143.721.874	67.709.293.718	(27.565.571.844)
465858	DIREKTORAT SURVEILANS, IMUNISASI, KARANTINA, DAN KESEHATAN MATRA	197.401.534.847	197.384.787.105	16.747.742
465864	DIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN	892.265.118	892.265.118	-
465889	DIREKTORAT PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	256.929.019	256.582.564	346.455
465895	SET DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	3.005.133.425	3.009.106.433	(3.973.008)
466379	DIREKTORAT BINA KESEHATAN IBU DAN REPRODUKSI		608.947.806	(608.947.806)
466467	DIREKTORAT BINA KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA		2.210.000	(2.210.000)
416160	PUSAT BIOMEDIS DAN TEKNOLOGI DASAR KESEHATAN	3.716.412.320	3.317.727.393	398.684.927

www.peraturan.go.id

PERBEDAAN SALDO KAS HIBAH LANGSUNG
ANTARA K/L DAN BENDAHARA UMUM NEGARA
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)

RINCIAN				PERBEDAAN
BA/KODE SATKER	NAMA K/L DAN SATKER	JUMLAH HIBAH MENURUT K/L	JUMLAH HIBAH MENURUT BUN	
416191	PUSAT TEKNOLOGI TERAPAN KESEHATAN DAN EPIDEMIOLOGI KLINIK		400	(400)
465791	DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN RUJUKAN		(11.077.023)	11.077.023
416176	PUSAT TEKNOLOGI INTERVENSI KESEHATAN MASYARAKAT	2.571.295.502	28.317.870	2.542.977.632
416151	SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN		195.776.785	(195.776.785)
416202	PUS. HUMANIORA KEBIJAKAN KES & PEMBERDAYA MASY.SURABAYA	1.414.566.701	1.424.481.075	(9.914.374)
648428	PUSAT KERJASAMA LUAR NEGERI		2.670.000	(2.670.000)
		350.467.192.764	**574.290.450.414**	**(223.823.257.650)**
025	KEMENTERIAN AGAMA			-
598290	MTsN BENER KAB. PURWOREJO	-	-	-
307140	STAIN SAMARINDA		500	(500)
418402	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB MUSI BANYUASIN	-	-	-
418144	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB BENGKALIS	-	-	-
574722	MTsN 2 BALIKPAPAN TIMUR	4.865.463.161	4.205.817.000	659.646.161
299072	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB PASURUAN	-		-
		4.865.463.161	**4.205.817.500**	**659.645.661**
				-
027	KEMENTERIAN SOSIAL			-

PERBEDAAN SALDO KAS HIBAH LANGSUNG
ANTARA K/L DAN BENDAHARA UMUM NEGARA
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)

RINCIAN				PERBEDAAN
BA/KODE SATKER	NAMA K/L DAN SATKER	JUMLAH HIBAH MENURUT K/L	JUMLAH HIBAH MENURUT BUN	
440222	Direktorat Kesejahteraan Anak (Hibah Luar Negeri UNICEF)	853.744.773	853.744.773	-
440301	Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (Hibah Dalam Negeri	139.636.485.891	1.738.000.353	137.898.485.538
369059	Sekretariat Badiklit	60.064.070		60.064.070
		140.550.294.734	**2.591.745.126**	**137.958.549.608**
				-
029	KEMENTERIAN KEHUTANAN			-
427052	BALAI PENGELOLAAN DAS BARITO	3.692.632	3.692.632	-
427290	BALAI PENGELOLAAN DAS BENAIN NOELMINA	1.000.000	849.865	150.135
439542	DIREKTORAT BINA PERHUTANAN SOSIAL	1.193.494	1.304.628	(111.134)
439567	DIREKTORAT PERENCANAAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAS	185.413.920	1.863.153.966	(1.677.740.046)
500652	DIREKTORAT KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI	396.558.060	396.558.060	-
500963	PUSAT KERJASAMA LUAR NEGERI KEHUTANAN		71.664.124	(71.664.124)
427479	BALAI PENELITIAN KEHUTANAN MAKASSAR	94.381.942	97.043.131	(2.661.189)
466100	DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN		677	(677)
451635	PUSAT LITBANG PENINGKATAN PRODUKTIVITAS HUTAN	508.175.632	514.906.265	(6.730.633)
427485	BALAI BESAR PENELITIAN DIPTEROKARPA		-	
568352	BB PENELITIAN BIOTEKNOLOGI DAN PEMULIAAN TANAMAN HUTAN YOGYAKARTA	491.784.510	491.784.510	-
613001	PUSAT LITBANG KONSERVASI DAN REHABILITASI SDA	66.510.062	988.168.432	(921.658.370)

PERBEDAAN SALDO KAS HIBAH LANGSUNG
ANTARA K/L DAN BENDAHARA UMUM NEGARA
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)

RINCIAN				PERBEDAAN
BA/KODE SATKER	NAMA K/L DAN SATKER	JUMLAH HIBAH MENURUT K/L	JUMLAH HIBAH MENURUT BUN	
452372	SEKRETARIAT BADAN LITBANG		148.434	(148.434)
613015	PUSAT LITBANG KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN	41.757	2.309.450	(2.267.693)
451651	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN DI KADIPATEN		-	-
621665	PUSAT LITBANG PERUBAHAN IKLIM DAN KEBIJAKAN	2.729.210.163	1.471.851.666	1.257.358.497
		4.477.962.172	**5.903.435.840**	**(1.425.473.668)**
				-
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			-
567385	BBAP UJUNG BATEE	281.351.374	281.351.374	-
567762	BBL LOMBOK	548.616	548.616	-
634125	PUSAT PENELITIAN PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA IKAN	1.472.281.088	1.837.186.688	(364.905.600)
238094	BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR PAYAU (BPPBAP)	0	5.123.515	
634150	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA LAUT DAN PESISIR	618.239.284	356.231.997	262.007.287
634167	PUSAT PENGKAJIAN DAN PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KP	300	(1.012.801.000)	1.012.801.300
427721	BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENNGEMBANGAN BUDIDAYA LAUT, GONDOL	973.354.186	973.354.186	-
452910	BALAI BESAR PENELITIAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN (BBPSEKP)		232.950	(232.950)
567680	BALAI BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR		40.000	(40.000)
465173	DIREKTORAT PESISIR DAN LAUTAN		(221.717.910)	221.717.910
452935	BALAI PENELITIAN DAN OBSERVASI LAUT	341.273.965	244.202.012	97.071.953

www.peraturan.go.id

PERBEDAAN SALDO KAS HIBAH LANGSUNG
ANTARA K/L DAN BENDAHARA UMUM NEGARA
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)

RINCIAN				PERBEDAAN
BA/KODE SATKER	NAMA K/L DAN SATKER	JUMLAH HIBAH MENURUT K/L	JUMLAH HIBAH MENURUT BUN	
		3.687.048.813	**2.463.752.428**	**1.228.419.900**
042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI			-
427922	SEKRETARIAT KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	19.439.372	339.557.230	(320.117.858)
		19.439.372	**339.557.230**	**(320.117.858)**
043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP			
666735	DEPUTI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM	-	554.938.212	(554.938.212)
427938	Menteri Lingkungan Hidup	86.192.914	(470.302.673)	556.495.587
		86.192.914	**84.635.539**	**1.557.375**
047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			-
664958	Deputi Bidang Perlindungan Perempuan	**51.981.213**	**51.981.213**	-
				-
				-
054	BADAN PUSAT STATISTIK			-
018576	SEKRETARIAT UTAMA	155.154.867	653.658.826	(498.503.959)
018580	BADAN PUSAT STATISTIK D.K.I JAKARTA	-	(990.555.000)	990.555.000

PERBEDAAN SALDO KAS HIBAH LANGSUNG
ANTARA K/L DAN BENDAHARA UMUM NEGARA
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)

RINCIAN				PERBEDAAN
BA/KODE SATKER	NAMA K/L DAN SATKER	JUMLAH HIBAH MENURUT K/L	JUMLAH HIBAH MENURUT BUN	
		155.154.867	**(336.896.174)**	**492.051.041**
				-
055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS			-
017312	Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas	**11.363.639.127**	**24.686.027.196**	**(13.322.388.069)**
				-
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA			-
642093	Bidkeu Polda Metro Jaya	22.688.960.000	-	22.688.960.000
643234	Biro sarpras Polda Jateng	300		300
665932	Polres Pasuruan Kota	8.006.000	-	8.006.000
640935	Bidkeu Polda Riau	800.000.000	-	800.000.000
679482	Dit Reskrimsus Polda Sumsel	1.057.734.100	-	1.057.734.100
665285	Polres Prabumulih	20.000.000		20.000.000
645599	Biro Sarpras Polda Kalsel	-	-	-
646079	Biro Sarpras Polda Kaltim	433.020.300		433.020.300
646126	Polres Balikpapan	500.000.000		500.000.000
646130	Poltabes Samarinda	4.442.000	4.442.000	-
646346	Bidkeu Polda Sulsel	3.792.669	-	3.792.669
647711	Polres Merauke	232.263		232.263

PERBEDAAN SALDO KAS HIBAH LANGSUNG
ANTARA K/L DAN BENDAHARA UMUM NEGARA
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)

RINCIAN				PERBEDAAN
BA/KODE SATKER	NAMA K/L DAN SATKER	JUMLAH HIBAH MENURUT K/L	JUMLAH HIBAH MENURUT BUN	
647728	Polres Sorong Kota	229.907		229.907
665768	Polres Puncak Jaya	6.810.661		6.810.661
670095	Polres Teluk Bintuni	107.159.779	100.000.000	7.159.779
970170	Polres Wondama	594.335		594.335
648339	Lemdikpol Bidkeu II Mabes Polri	91.202.702.000	91.202.702.000	-
645138	Polres Kupang	-	-	-
648172	Ditpolair		800	(800)
643234	ROSARPRAS POLDA JATENG		300	(300)
642445	BARESKRIM POLRI		850	(850)
647025	POLRES TOLI-TOLI		-	-
644417	Polres Pamekasan		477.606.950	(477.606.950)
644438	Polres Sampang		364.498.000	(364.498.000)
		116.833.684.314	**92.149.250.900**	**24.684.433.414**
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN			
632420	Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional	4.939.275.806	4.924.793.569	14.482.237
445155	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN PRODUK TERAPETIK DAN NAPZA	-	211.300.237	(211.300.237)
		4.939.275.806	**5.136.093.806**	**(196.818.000)**

www.peraturan.go.id

PERBEDAAN SALDO KAS HIBAH LANGSUNG
ANTARA K/L DAN BENDAHARA UMUM NEGARA
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)

RINCIAN				PERBEDAAN
BA/KODE SATKER	NAMA K/L DAN SATKER	JUMLAH HIBAH MENURUT K/L	JUMLAH HIBAH MENURUT BUN	
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL			-
061331	BNN KAB GAYO LUES	-	-	-
025137	BNN KOTA BANDUNG	-	-	-
682651	BNNP KALIMANTAN TIMUR	1.394.093.832	1.375.562.332	18.531.500
682715	BNNP GORONTALO	6.129.700	6.129.700	-
		1.400.223.532	**1.381.692.032**	**18.531.500**
				-
068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL			
649526	DEPUTI BIDANG PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN		196.840.506	(196.840.506)
649505	DEPUTI KBKR	334.436.284	137.595.778	196.840.506
017393	BKKBN PROP JABAR	6.750.000	6.750.000	-
		341.186.284	**341.186.284**	-
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA			
650236	Komnas HAM		5.638.484.309	(5.638.484.309)
				-
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA			-
017106	Pusat Penelitian Oseanografi	-		-

PERBEDAAN SALDO KAS HIBAH LANGSUNG
ANTARA K/L DAN BENDAHARA UMUM NEGARA
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)

RINCIAN				PERBEDAAN
BA/KODE SATKER	NAMA K/L DAN SATKER	JUMLAH HIBAH MENURUT K/L	JUMLAH HIBAH MENURUT BUN	
017148	Pusat Penelitian Biologi	1.041	1.041	-
017152	Pusat Penelitian Geoteknologi	-	76.322.240	(76.322.240)
450134	Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik	399.553	399.553	-
450200	Pusat Penelitian Fisika	587.298.466	587.298.466	-
649092	UPT Loka Pengembangan Bio Industri Laut Mataram	22.597.500	22.597.500	-
		610.296.560	**686.618.800**	**(76.322.240)**
				-
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL			-
017279	Kantor Pusat	-		-
450216	PTKMR	678.026	678.026	(0)
450310	PTKRN	-	16.000	(16.000)
450253	PTBBN	160.673.160	160.925.639	(252.479)
450253	PTBBN	252.479	-	252.479
017283	PSTNT	24.561.988	24.561.987	1
450284	PTRR	-	-	-
535368	PKSEN	-		-
450262	PSTBM	60.225.695	60.225.695	-
		246.391.347	**246.407.347**	**(16.000)**

PERBEDAAN SALDO KAS HIBAH LANGSUNG
ANTARA K/L DAN BENDAHARA UMUM NEGARA
31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)

RINCIAN				PERBEDAAN
BA/KODE SATKER	NAMA K/L DAN SATKER	JUMLAH HIBAH MENURUT K/L	JUMLAH HIBAH MENURUT BUN	
				-
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI			-
450329	Sekretariat Utama - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknolog	52.560.983	51.448.119	1.112.864
450366	Balai Besar Teknologi Energi	107.399.898	458.630.338	(351.230.440)
		159.960.881	**510.078.457**	**(350.117.576)**
				-
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA			-
648521	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA		**833.464.646**	**(833.464.646)**
	Jumlah	**679.477.745.529**	**789.685.536.101**	**-110.202.666.962**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN 12
Uang Muka Belanja
Dan Belanja Dibayar Di Muka
Per 31 Desember 2014

BELANJA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA BELANJA
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(Dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA	
			31 DESEMBER 2014	31 DESEMBER 2013	31 DESEMBER 2014	31 DESEMBER 2013
			AUDITED	*AUDITED*	*AUDITED*	*AUDITED*
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	0	0	0	0
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	0	0	0	0
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	217.935.589	611.084.773	0	0
4	005	MAHKAMAH AGUNG	3.753.234.641	2.635.700.699	0	0
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	0	1.011.480	0	0
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	14.777.088.261	14.513.425.971	0	0
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	191.125.000	87.142.551.989	0	0
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	56.573.404.278	23.444.860.213	0	0
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	149.959.314.991	2.558.205.188.866	0	0
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	8.485.105.452	10.840.825.002	0	0
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	453.864.819.222	72.072.741.956	0	91.572.000
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	162.985.441	158.352.481	0	0
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	5.624.895	19.124.648	0	0
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	52.743.717.600	0	76.784.002.759	0
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1.433.039.639	219.863.167	4.545.398.220	22.216.828.700
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	12.065.019.270	44.697.153.507	111.001.753.633	110.320.585.748
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	14.438.124.752	14.034.904.313	0	276.703.125.544
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	79.075.000	11.791.600	125.698.016	3.258.709.273
19	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0	0	0	660.413.450
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	10.000.000	3.285.342.500	0	0
21	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	933.576.678	1.239.008.541	0	253.126.150

www.peraturan.go.id

BELANJA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA BELANJA
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(Dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA	
			31 DESEMBER 2014	31 DESEMBER 2013	31 DESEMBER 2014	31 DESEMBER 2013
			AUDITED	*AUDITED*	*AUDITED*	*AUDITED*
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	306.229.703	215.640.306	0	0
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	229.166.667	179.752.667	0	0
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	0	43.298.500	0	0
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	0	0	0	0
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	0	489.050.000	0	0
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	186.619.440	726.290.000	0	0
28	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	0	0	0	0
29	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	0	0	0	0
30	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0
31	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	187.625.000	0	0	0
32	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0	0	0	0
33	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	0	0	0	0
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	0	0	0	0
35	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	0	0	0	0
36	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	0	0	0	0
37	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.018.725.864	461.742.797	0	0
38	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	159.712.000	0	0	0
39	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	189.782.666	191.820.414	0	0
40	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	0	0	0	0
41	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	774.449.507.895	827.635.096.565	0	0
42	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	199.672.361	67.409.202.565	0	0

BELANJA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA BELANJA
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(Dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA	
			31 DESEMBER 2014	31 DESEMBER 2013	31 DESEMBER 2014	31 DESEMBER 2013
			AUDITED	*AUDITED*	*AUDITED*	*AUDITED*
43	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.614.031.300	1.533.210.237	0	0
44	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	2.532.632.299	4.497.564.225	0	0
45	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	227.191.023	0	0	0
46	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	128.499.333	6.069.292.489	0	0
47	067	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	1.331.065.829	3.050.269.157	0	0
48	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	16.999.998	28.199.999	0	0
49	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	0	0	0	0
50	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	0	0	0	0
51	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	2.515.788.267	536.477.658	0	0
52	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	0	0	0	0
53	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	0	0	0	0
54	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	183.750.000	151.223.500	0	1.794.833
55	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	4.500.000	7.500.000	0	0
56	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	0	0	0	0
57	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	14.478.395.210	14.326.686.389	0	0
58	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	0	0	0	0
59	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	0	0	0	0
60	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	0	0	0	0
61	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	0	0	0	0
62	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	0	0	0	0
63	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	112.200.000	108.658.000	0	0

BELANJA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA BELANJA
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(Dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA	
			31 DESEMBER 2014	31 DESEMBER 2013	31 DESEMBER 2014	31 DESEMBER 2013
			AUDITED	*AUDITED*	*AUDITED*	*AUDITED*
64	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	14.223.116.286	587.088.620	0	0
65	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	0	0	22.702.095.861	25.580.678.257
66	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	0	0	0	0
67	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	0	0	0	0
68	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	17.902.090.307	0	0	897.247.292
69	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	858.536.982	427.731.233	0	0
70	100	KOMISI YUDISIAL	562.100.085	0	0	0
71	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	0	243.746.800	0	0
72	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	24.749.000	66.666.667	0	0
73	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	0	0	0	0
74	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	3.224.175.410	24.969.096.723	0	0
75	107	BADAN SAR	0	0	0	0
76	108	KOMISI PERSAINGAN PENGAWASAN USAHA	0	0	0	0
77	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	1.240.432.050	1.494.498.000	0	0
78	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	1.635.097.720	3.492.197.548	0	0
79	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	0	0	0	920.070.512
80	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	237.311.374	267.656.763	0	0
81	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	0	0	0	0
82	114	SEKRETARIAT KABINET	0	0	0	0
83	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	110.000.000	0	0	0
84	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	0	570.625.000	3.219.063.791	54.964.058.288

www.peraturan.go.id

BELANJA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA BELANJA
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(Dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA	
			31 DESEMBER 2014	31 DESEMBER 2013	31 DESEMBER 2014	31 DESEMBER 2013
			AUDITED	*AUDITED*	*AUDITED*	*AUDITED*
85	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	1.415.363.528	160.236.238	66.872.077.231	914.341.392
86	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	0	0	0	
JUMLAH BELANJA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA BELANJA PADA K/L			**1.611.199.258.306**	**3.793.073.450.764**	**285.250.089.511**	**496.782.551.439**
87	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	286.143.650.295	368.333.614.418	3.912.527.872	0
88	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	185.640.560	0	0	0
JUMLAH BELANJA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA BELANJA PADA BUN			**286.329.490.855**	**368.333.614.418**	**3.912.527.872**	**0**
JUMLAH BELANJA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA BELANJA PADA K/L DAN BUN			**1.907.527.749.171**	**4.161.407.065.182**	**289.162.617.383**	**496.782.551.439**

LAMPIRAN 13

Piutang Pajak

per 31 Desember 2014

www.peraturan.go.id

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PAJAK BERDASARKAN JENIS PAJAK
PER 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

KODE AKUN	NAMA AKUN	NERACA PERCOBAAN TA 2014	LAPORAN PERKEMBANGAN PIUTANG PAJAK (LP3) MODUL ALPP	SELISIH
115121	Piutang PPh Pasal 21	1.262.751.459.769,00	1.262.751.459.771,00	2,00
115122	Piutang PPh Pasal 22	484.054.200.127,00	484.054.200.127,00	0,00
115124	Piutang PPh Pasal 23	1.853.477.515.538,00	1.853.477.515.540,00	2,00
115125	Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	1.801.582.088.599,00	1.801.582.088.600,00	1,00
115126	Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	23.120.464.180.370,00	23.120.464.180.369,00	(1,00)
115127	Piutang PPh Pasal 26	2.694.578.193.984,00	2.694.578.193.985,00	1,00
115128	Piutang PPh Final	1.240.386.830.335,00	1.240.386.830.336,00	1,00
115131	Piutang PPN Dalam Negeri	21.445.463.144.668,00	21.445.463.144.665,00	(3,00)
115141	Piutang PPnBM dalam Negeri	654.153.825.309,00	654.153.825.309,00	0,00
115153	Piutang PBB Perkebunan	639.432.586.408,00	639.432.586.410,00	2,00
115154	Piutang PBB Kehutanan	497.966.425.046,00	497.966.425.046,00	0,00
115155	Piutang PBB Pertambangan	9.004.253.586.793,00	9.004.253.586.792,00	(1,00)
115172	Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya	4.148.450,00	4.148.450,00	0,00
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh	3.052.148.695.534,00	3.052.148.695.535,00	1,00
JUMLAH PIUTANG PAJAK BRUTO		**67.750.716.880.930,00**	**67.750.716.880.935,00**	**5,00**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PAJAK BERDASARKAN JENIS PAJAK
PER 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

KODE AKUN	NAMA AKUN	NERACA PERCOBAAN TA 2014	LAPORAN PERKEMBANGAN PIUTANG PAJAK (LP3) MODUL ALPP	SELISIH
116112	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPh Non Migas	(22.536.531.985.106,00)	(22.536.531.985.083,00)	23,00
116113	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPN	(13.358.915.233.722,00)	(13.358.915.233.729,00)	(7,00)
116114	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPnBM	(324.953.115.966,00)	(324.953.115.966,00)	0,00
116115	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PBB dan BPHTE	(6.566.849.737.677,00)	(6.566.849.737.678,00)	(1,00)
116117	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Lainnya	(2.374.151.659.974,00)	(2.374.151.659.984,00)	(10,00)
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH		**(45.161.401.732.445,00)**	**(45.161.401.732.440,00)**	**5,00**
JUMLAH PIUTANG PAJAK NETO		**22.589.315.148.485,00**	**22.589.315.148.495,00**	**10,00**

Keterangan: Selisih antara Neraca Percobaan dengan LP3 karena pembulatan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PAJAK BERDASARKAN KANWIL DJP DAN JENIS PAJAK
PER 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

No	Kanwil DJP	PPh Pal 21	PPh Pal. 22	PPh Pal. 23	PPh Pal. 25 DP	PPh Pal. 25 Badan	PPh Pal 26	PPh Pal 4 Ayat (2)	PPN	PPn BM	Perkebunan	Kehutanan	Pertambangan	PTTL	Bunga Penagihan	Jumlah
1	ACEH	28.347.566.597	3.488.218.168	9.531.816.735	8.001.139.976	444.972.235.306	1.306.176.431	2.918.610.951	139.696.944.492	48.115.472	38.762.797.751	11.342.848.819	232.312.410.989	0	382.811.335	887.666.200.966
2	SUMUT I	37.608.873.618	11.385.676.599	13.905.829.668	82.938.081.985	281.497.769.671	5.218.823.660	32.518.070.893	891.753.812.660	2.962.763.671	86.695.784.134	0	182.181.880.128	3.823.950	28.387.326.875	1.581.717.865.793
3	SUMUT II	9.456.317.353	49.768.885	790.315.578	64.051.221.624	37.974.688.641	111.347.589	2.787.414.615	108.822.836.112	7.308.847	74.488.793.924	1.715.134.356	128.180.497.988	0	31.078.276.225	459.373.309.343
4	Aceh Dan Sumut PPN	89.112.849.185	32.631.911.055	87.434.814.671	29.497.882.918	386.964.312.418	27.013.483.978	85.678.796.883	722.389.872.752	12.796.182.243	46.566.623.886	47.464.874.961	674.781.487.318	0	28.256.655.570	2.290.568.957.882
5	SUMBAR DAN JAMBI	22.706.490.691	367.132.441	22.170.265.874	43.032.448.317	176.416.189.030	1.109.900.003	7.971.115.620	256.722.226.803	33.664.859	30.162.745.327	9.722.870.999	269.133.885.458	0	3.276.547.174	837.389.907.950
6	SUMSEL DAN BABEL	29.637.187.788	861.781.163	26.663.885.068	36.719.025.011	273.712.178.558	189.852.880	7.291.066.851	397.708.786.203	788.561	94.388.430.835	27.338.788.301	1.306.681.000.888	0	9.677.612.590	2.230.371.126.781
7	BENGKULU LAMPUNG	24.081.887.792	224.182.035	5.730.631.048	54.977.633.949	159.714.826.459	2.664.377.767	8.914.589.720	244.918.350.185	139.958	22.616.133.183	1.747.866.888	184.789.957.761	0	10.722.977.194	710.696.583.867
8	JKT PUSAT	137.428.788.668	2.823.661.599	98.654.986.638	99.699.267.388	3.384.787.716.500	389.500.313.442	80.038.515.906	1.683.953.661.583	318.067.488.633	0	0	13.118.007.388	325.080	627.160.437.561	6.819.458.610.954
9	JKT BARAT	22.032.089.960	2.569.459.274	23.249.543.396	70.984.305.253	599.892.436.745	2.900.291.005	35.286.450.909	733.906.601.534	2.472.429.409	0	0	15.062.540.208	0	44.871.088.139	1.460.854.432.864
10	JKT SELATAN	160.537.799.971	7.439.932.107	274.744.777.162	169.792.937.267	3.304.483.777.550	165.870.423.924	102.274.927.769	2.760.579.525.992	172.973.210.106	0	0	15.562.790.726	0	222.288.644.972	7.026.426.327.269
11	JKT TIMUR	46.924.023.205	302.111.486	23.059.402.590	56.764.271.410	717.898.615.602	8.197.053.791	17.131.590.253	909.681.872.220	774.252.090	0	0	15.566.426.793	0	67.023.531.446	1.863.323.150.885
12	JKT UTARA	25.646.182.899	392.857.730.418	32.682.336.915	169.974.326.666	653.245.737.666	2.081.378.139	35.999.119.864	1.907.951.296.060	11.411.235.826	0	0	33.202.918.710	0	26.664.586.359	3.291.018.668.613
13	JKT KHUSUS	79.663.596.567	1.948.293.110	422.594.947.351	11.666.288.338	4.897.927.396.033	1.780.065.270.699	150.897.302.918	1.643.242.696.030	68.906.637.807	0	0	1.956.570.430.561	0	1.350.729.623.921	12.174.200.465.334
14	BANTEN	95.396.263.276	4.934.978.868	18.794.028.417	22.045.596.403	199.608.987.200	1.298.193.603	30.476.498.799	516.260.727.955	5.502.860.045	3.827.696.751	1.709.004.457	46.109.691.507	0	26.541.918.615	979.656.013.856
15	JAWA BARAT I	48.756.148.472	167.852.118	36.079.408.837	179.741.760.672	395.817.648.141	23.135.599.696	103.628.645.471	1.024.433.950.157	2.140.953.632	53.628.551.597	35.905.254	101.289.499.110	0	11.895.711.739	1.990.702.244.895
16	JAWA BARAT II	75.160.219.407	269.563.847	30.261.301.330	52.299.603.416	302.220.596.608	38.790.879.693	95.428.972.639	1.045.808.783.483	259.623.345	23.446.424.091	166.789.283	293.879.938.303	0	78.083.726.767	1.996.070.622.211
17	JAWA TENGAH I	24.529.971.308	2.174.493.392	15.049.837.943	87.816.220.369	285.952.917.593	2.447.261.092	30.620.647.993	586.916.293.492	985.716.110	4.367.707.695	0	281.599.968.312	0	27.315.955.856	1.289.760.991.495
18	JAWA TENGAH II	13.476.881.402	488.518.658	7.566.918.868	61.486.886.784	167.257.772.241	263.212.722	12.599.415.375	344.603.196.360	1.280.358.826	1.288.087.849	0	87.781.177.977	0	30.407.101.116	726.424.530.639
19	DIY	7.806.908.447	0	3.102.757.532	17.374.251.727	67.130.226.207	518.328.244	17.956.830.251	171.660.059.344	178.109.092	0	0	28.185.907.036	0	7.023.048.861	312.536.426.752
20	JAWA TIMUR I	28.721.505.223	5.024.136.556	10.566.257.892	65.966.300.201	275.988.485.134	2.220.194.479	39.128.505.666	784.105.985.241	36.448.957.379	0	0	8.812.970.057	0	15.746.656.793	1.288.709.964.421
21	JAWA TIMUR II	15.636.421.144	1.063.372.253	8.287.044.630	38.641.642.155	133.450.356.825	2.438.414.101	38.116.431.766	426.332.707.783	2.835.000	849.077.936	119.229.348	247.579.060.960	0	97.200.797.669	1.009.607.361.570
22	JAWA TIMUR III	13.297.824.160	158.392.085	5.281.057.646	50.498.674.591	129.859.237.270	218.492.576	15.645.198.922	283.398.002.822	864.814.256	28.943.427.436	1.116.219.660	116.361.150.539	0	15.691.436.682	621.423.318.375
23	KALBAR	11.269.771.783	235.311.578	5.327.193.817	25.618.035.747	64.958.230.786	243.328.476	2.151.609.053	151.630.436.444	1.340.647	27.922.306.918	38.725.211.751	153.868.454.470	0	10.816.926.592	492.658.137.010
24	KALSELTENG	24.125.415.949	261.561.726	49.628.651.239	33.633.626.152	265.158.949.272	3.384.659.216	17.510.287.715	499.736.351.970	2.648.050	26.356.441.864	113.362.431.499	508.074.794.085	0	7.071.221.730	1.498.287.039.567
25	KALTIM	39.523.588.259	379.087.303	50.436.351.203	61.262.744.863	535.256.440.768	9.888.729.469	47.265.762.007	845.760.660.214	30.000	43.235.269.395	87.401.311.341	635.817.376.882	0	26.931.788.855	2.404.189.120.529
Jumlah Piutang Pajak		**1.262.751.469.771**	**484.054.200.127**	**1.853.477.515.540**	**1.801.582.088.600**	**23.120.464.180.369**	**2.694.578.193.985**	**1.240.386.830.336**	**21.445.463.144.665**	**654.153.825.309**	**639.432.586.410**	**497.966.425.046**	**9.004.253.586.792**	**4.148.450**	**3.052.148.695.535**	**67.750.716.880.935**

www.peraturan.go.id

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PAJAK BERDASARKAN KANWIL DJP DAN UMUR PAJAK
PER 31 DESEMBER 2014

No	Kanwil DJP	≤ 1 Thn	1 Thn < UT ≤ 2 Thn	2 Thn < UT ≤ 3 Thn	3 Thn < UT ≤ 4 Thn	4 Thn < UT ≤ 5 Thn	> 5 Thn	Jumlah
1	ACEH	93.029.090.312	56.996.779.143	16.015.063.705	33.315.458.457	122.429.562.846	185.880.306.523	507.666.260.986
2	SUMUT I	457.089.652.696	271.306.279.644	95.212.225.514	23.019.369.730	43.537.438.034	671.552.706.136	1.501.717.665.754
3	SUMUT II	149.168.846.457	28.292.537.786	21.296.299.102	40.220.080.262	45.050.807.749	175.344.738.388	459.373.309.743
4	RIAU DAN KEPRI	516.489.448.602	263.484.096.902	219.668.787.894	153.706.784.843	287.394.554.137	809.817.315.025	2.250.560.987.402
5	SUMBAR DAN JAMBI	141.063.129.003	149.262.788.742	45.929.548.903	31.969.921.524	82.545.808.181	381.537.871.598	832.309.067.950
6	SUMSEL DAN BABEL	442.758.451.867	206.376.180.732	233.308.165.742	152.898.154.449	202.126.300.652	990.903.873.139	2.230.371.126.701
7	BENGKULU-LAMPUNG	161.896.477.479	81.559.151.095	25.386.786.086	33.216.596.607	73.659.768.398	343.877.803.422	719.596.583.087
8	JKT PUSAT	1.022.985.813.938	1.361.096.504.964	447.510.375.019	170.339.577.418	265.252.456.389	3.552.265.882.727	6.819.450.610.454
9	JKT BARAT	385.587.925.697	145.963.735.229	74.734.011.583	55.575.848.641	57.349.909.679	741.643.002.054	1.460.854.432.884
10	JKT SELATAN	1.317.796.578.866	2.552.921.794.447	140.575.012.724	192.847.174.723	249.465.458.343	2.574.820.288.183	7.028.426.307.286
11	JKT TIMUR	441.657.691.556	413.182.976.916	75.998.666.896	62.549.810.998	102.894.690.476	767.039.314.043	1.863.323.150.885
12	JKT UTARA	293.694.878.588	167.483.637.235	188.975.932.330	156.447.856.132	42.816.093.561	2.441.600.460.569	3.291.018.858.413
13	JKT KHUSUS	2.161.890.980.785	2.656.806.560.004	1.745.187.103.703	455.688.473.897	360.165.946.183	4.794.485.400.762	12.174.204.465.334
14	BANTEN	406.705.401.829	110.314.506.715	67.938.381.035	76.627.065.824	39.893.721.316	278.076.937.138	979.556.013.856
15	JAWA BARAT I	594.458.207.126	300.036.365.328	84.992.617.270	75.109.606.707	174.948.924.132	721.156.524.332	1.950.702.244.895
16	JAWA BARAT II	681.478.435.462	237.726.864.300	120.033.547.223	67.709.217.604	193.685.242.838	695.437.314.783	1.996.070.622.211
17	JAWA TENGAH I	299.366.430.154	243.418.318.420	140.076.380.338	87.822.606.618	79.874.050.425	439.183.205.540	1.289.740.991.495
18	JAWA TENGAH II	155.713.076.879	157.289.405.783	79.136.961.553	40.936.950.038	46.464.984.723	248.883.151.663	728.424.530.639
19	DIY	123.557.413.623	38.587.997.604	23.732.562.802	24.466.092.311	17.859.647.606	84.332.724.806	312.536.428.752
20	JAWA TIMUR I	432.700.179.487	276.440.122.328	45.487.310.588	37.206.143.138	111.426.890.513	385.449.308.366	1.288.709.954.421
21	JAWA TIMUR II	336.667.567.015	96.267.000.812	31.596.827.499	42.866.065.770	113.840.963.667	388.368.956.807	1.009.607.381.570
22	JAWA TIMUR III	135.013.138.300	83.538.628.125	44.614.134.090	17.507.759.174	60.633.307.772	290.096.350.914	631.403.318.375
23	KALBAR	104.869.185.737	53.881.748.912	30.015.399.453	26.604.348.416	49.675.866.542	227.611.587.951	492.658.137.010
24	KALSELTENG	423.311.083.459	268.660.333.410	117.439.253.867	105.254.085.940	99.486.936.493	444.135.346.399	1.458.287.039.567

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PAJAK BERDASARKAN KANWIL DJP DAN UMUR PAJAK
PER 31 DESEMBER 2014

No	Kanwil DJP	≤ 1 Thn	1 Thn < UT ≤ 2 Thn	2 Thn < UT ≤ 3 Thn	3 Thn < UT ≤ 4 Thn	4 Thn < UT ≤ 5 Thn	> 5 Thn	Jumlah
25	KALTIM	484.429.589.324	277.628.575.718	100.699.328.899	120.573.962.232	453.414.585.914	967.543.078.443	2.404.189.120.529
26	SULTANBATARA	394.860.377.050	175.598.999.891	76.935.283.134	65.826.465.863	105.683.686.232	440.068.775.860	1.258.973.588.030
27	SULUTTENGGOMALUT	110.477.318.612	76.396.486.428	19.829.907.465	19.491.430.213	70.198.690.906	314.464.538.391	612.858.372.017
28	BALI	194.911.520.940	69 825 170 274	15.431 939 451	41.418.441.691	132 210 878 465	212 910 574 978	666.708.525 800
29	NUSRA	110.146.197.866	32 703 940 350	22.388 898 220	14.368.189.374	35 394 331 255	188 278 595 120	403.280.152 185
30	PAPUA DAN MALUKU	81 619 649 166	174 477 223 115	46 210 894 755	24 243 185 860	76 542 210 693	561 750 548 270	1 268 243 001 866
31	WAJIB PAJAK BESAR	2 033 178 835 579	2 472 075 787 877	1 479 314 208 360	249 998 678 453	57 157 572 233	1 350 825 737 159	7 918 854 330 704
Jumlah Piutang Pajak		**14.696.871.774.576**	**13.743.439.902.267**	**5.818.871.795.213**	**2.696.825.402.729**	**3.953.181.886.660**	**26.839.426.319.489**	**67.750.716.880.934**

Keterangan : Selisih antara Kanwil dengan rincian karena pembulatan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENYISIHAN PIUTANG PAJAK, PIUTANG PAJAK DALUARSA, USUL PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK, DAN PIUTANG PAJAK YANG DIHAPUSKAN
PER 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

JENIS PAJAK	PENYISIHAN PIUTANG PAJAK	PIUTANG PAJAK DALUARSA	USUL PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK	PIUTANG PAJAK DIHAPUSKAN
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	1.270.487.159.921	501.338.847.367	6.735.540.148	0
PPh Pasal 25/29 Badan	16.476.050.284.937	3.264.420.319.385	30.253.818.797	0
PPh Pasal 21	842.045.443.152	298.320.172.211	2.264.972.352	0
PPh Pasal 22	462.305.319.563	13.067.646.892	4.930.171	0
PPh Pasal 23	1.339.223.319.024	395.920.123.899	1.405.219.165	0
PPh Pasal 26	1.736.229.044.764	126.744.352.223	283.273.983	0
PPh Pasal 4 ayat(2)	410.191.413.723	65.530.578.408	330.723.711	0
PPN	13.358.915.233.729	2.979.783.162.404	99.985.480.581	0
PPnBM	324.953.115.966	38.491.435.063	48.896.940	0
Bunga Penagihan	2.374.147.511.534	278.701.166.523	899.349.729	0
Pajak Tidak Langsung Lainnya	4.148.450	4.048.450	0	0
PBB Sektor Pedesaan	0	0	32.395.842.872	0
PBB Sektor Perkotaan	0	0	16.058.766.358	0

www.peraturan.go.id

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENYISIHAN PIUTANG PAJAK, PIUTANG PAJAK DALUARSA, USUL PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK, DAN PIUTANG PAJAK YANG DIHAPUSKAN
PER 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

JENIS PAJAK	PENYISIHAN PIUTANG PAJAK	PIUTANG PAJAK DALUARSA	USUL PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK	PIUTANG PAJAK DIHAPUSKAN
PBB Sektor Perkebunan	262.687.444.870	35.440.868.818	0	0
PBB Sektor Perhutanan	272.340.741.147	93.962.700.279	0	0
PBB Sektor Pertambangan Non Migas	773.592.114.140	126.604.375.608	0	0
PBB Sektor Pertambangan Migas	5.258.229.437.520	341.917.693.572	125.402.942.059	0
JUMLAH	**45.161.401.732.439**	**8.560.247.491.102**	**316.069.756.866**	**0**

Keterangan: Selisih antara Neraca dengan rincian karena pembulatan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENYISIHAN PIUTANG PAJAK PER KUALITAS
PER 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

JENIS PAJAK	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	1.019.756.218	24.590.322.448	106.340.769.127	1.138.536.312.129
PPh Pasal 25/29 Badan	10.961.731.956	194.640.210.904	2.697.923.792.860	13.572.524.549.217
PPh Pasal 21	914.711.217	18.781.771.142	69.043.520.630	753.305.440.162
PPh Pasal 22	74.759.739	335.070.535	3.829.796.370	458.065.692.919
PPh Pasal 23	715.424.688	32.484.320.957	78.628.034.914	1.227.395.538.465
PPh Pasal 26	270.330.761	74.269.370.788	235.434.519.443	1.426.254.823.772
PPh Pasal 4 ayat(2)	1.798.748.571	40.230.547.303	109.770.920.441	258.391.197.407
PPN	13.765.810.140	418.205.759.766	1.567.220.724.826	11.359.722.938.997
PPnBM	123.235.522	11.356.457.489	202.448.723.082	111.024.699.873
Bunga Penagihan	587.061.256	33.834.117.807	256.421.543.194	2.083.304.789.278
Pajak Tidak Langsung Lainnya	0	0	0	4.148.450
PBB Sektor Perkebunan	1.102.475.943	12.955.936.479	40.749.000.650	207.880.031.799
PBB Sektor Perhutanan	479.092.105	10.452.278.932	36.215.844.693	225.193.525.418
PBB Sektor Pertambangan Non Migas	1.961.155.088	38.817.769.989	151.837.722.775	580.975.466.288

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENYISIHAN PIUTANG PAJAK PER KUALITAS
PER 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

JENIS PAJAK	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
PBB Sektor Pertambangan Migas	1.597.756.603	185.467.747.442	93.801.228.797	4.977.362.704.677
JUMLAH	**35.372.049.806**	**1.096.421.681.981**	**5.649.666.141.800**	**38.379.941.858.852**

Keterangan: Selisih antara Neraca dengan rincian karena pembulatan

www.peraturan.go.id

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR YANG DIAJUKAN SENGKETA PAJAK
PER 31 DESEMBER 2014

No	Kanwil DJP	NON KEBERATAN		KEBERATAN		BANDING		PENINJAUAN KEMBALI		JUMLAH	
		Rp	USD	Rp	USD	Rp	USD	Rp	USD	Rp	USD
1	ACEH	12.143.514.329		10.981.078.516		171.666.147.116		8.108.535.833		202.899.275.794	0
2	SUMUT I	55.255.574.918		195.604.821.165		259.021.836.699		45.159.415.274		554.941.648.056	0
3	SUMUT II	2.900.920.556		22.464.639.436		254.358.801.106		978.186.216		280.702.547.314	0
4	RIAU DAN KEPRI	82.607.126.742	1.860.799	249.412.725.079	5.606.371	948.119.466.975	4.363.447	89.366.093.719		1.369.505.412.515	11.830.617
5	SUMBAR DAN JAMBI	14.543.908.240		106.909.195.720		128.407.300.885		23.915.797.120		273.776.201.965	0
6	SUMSEL DAN BABEL	58.947.942.165		729.986.504.150		616.122.171.934		16.478.074.644		1.421.534.692.893	0
7	BENGKULU-LAMPUNG	15.004.941.874		37.283.289.044		50.335.335.826		5.169.219.568		107.792.786.312	0
8	JKT PUSAT	164.528.823.221		594.299.595.685		2.589.805.545.447		430.592.028.265		3.779.225.992.618	0
9	JKT BARAT	97.881.296.795		96.899.960.405		138.685.578.779	938.126	65.058.084.359		398.524.920.338	938.126
10	JKT SELATAN	350.766.179.796	166.528	994.466.285.041	74.277	3.092.776.763.848		443.277.209.730		4.881.286.438.415	240.805
11	JKT TIMUR	136.082.089.790	4.177.196	123.849.677.814		396.184.663.360		120.757.821.668		776.874.232.632	4.177.196
12	JKT UTARA	153.253.095.566		116.922.269.445		135.680.134.061		145.283.008.516		551.138.507.588	0
13	JKT KHUSUS	788.331.044.243	77.109.795	4.654.957.040.744	120.957.077	5.813.507.878.719	355.388.810	2.192.975.091.991	6.894.784	13.449.771.055.697	560.350.466
14	BANTEN	378.929.954.150	664.137	252.178.923.172		58.564.120.505	7.894.709	186.451.540.073		876.124.537.900	8.558.846
15	JAWA BARAT I	168.415.441.357		222.479.810.248		86.388.015.861		131.340.955.616	111.555	618.624.223.082	111.555
16	JAWA BARAT II	69.761.772.141		414.291.789.045	397.901	505.739.173.922		77.543.925.234	808.426	1.067.336.660.342	1.206.327
17	JAWA TENGAH I	257.757.558.575		244.194.233.638		70.321.298.427		46.214.282.472		618.487.373.112	0
18	JAWA TENGAH II	52.995.967.229		16.049.514.150		53.904.542.085		6.661.775.883		129.611.799.347	0
19	DIY	11.341.039.863		12.475.173.687		3.905.553.717		852.478.055		28.574.245.322	0
20	JAWA TIMUR I	154.364.253.463		519.041.628.248		92.586.837.578		37.236.335.324		803.229.054.613	0
21	JAWA TIMUR II	37.261.228.685		73.741.350.714		111.581.692.488		21.743.954.497		244.328.226.384	0
22	JAWA TIMUR III	22.729.880.161		34.927.083.628		47.366.471.956		4.514.305.212		109.537.740.957	0

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR YANG DIAJUKAN SENGKETA PAJAK
PER 31 DESEMBER 2014

No	Kanwil DJP	NON KEBERATAN		KEBERATAN		BANDING		PENINJAUAN KEMBALI		JUMLAH	
		Rp	USD	Rp	USD	Rp	USD	Rp	USD	Rp	USD
23	KALBAR	18.622.617.531		43.682.874.761		45.754.890.196		12.558.076.876		120.618.459.364	0
24	KALSELTENG	70.300.028.109		130.946.683.511		312.412.969.376	961.348	119.214.113.350		632.873.794.346	961.348
25	KALTIM	131.294.047.201		166.752.600.186		144.575.740.088		130.284.025.157		572.906.412.632	0
26	SULTANBATARA	187.861.405.545		315.568.064.492		124.279.544.451		44.418.929.699		672.117.944.187	0
27	SULUTTENGGOYALUT	70.827.335.987		73.410.343.806		27.884.951.686		7.824.364.722		107.843.396.831	0
28	BALI	34.568.422.178		63.781.074.287		39.101.639.667		11.280.153.164		188.731.329.297	0
29	NUSRA	24.307.335.608		20.423.478.375		39.123.084.752		7.501.070.751		105.355.299.783	0
30	PAPUA DAN MALUKU	14.349.758.061		12.935.765.386		349.439.377.347		29.717.873.207		406.802.174.001	0
31	WAJIB PAJAK BESAR	441.784.807.899	2.067.427	4.527.819.051.568	135.370.894	23.380.958.672.465	304.578.811	4.532.480.439.837	10.138.743	29.927.052.777.833	452.156.342
	JUMLAH	**4.020.113.419.519**	**86.045.882**	**15.122.655.928.746**	**262.406.580**	**37.132.590.201.322**	**674.126.251**	**8.982.767.206.126**	**17.952.915**	**65.258.126.755.713**	**1.040.530.628**
	JUMLAH KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR YANG DIAJUKAN SENGKETA PAJAK SETELAH KONVERSI										**78.202.327.771.641**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PAJAK YANG DILAKUKAN UPAYA HUKUM
PER 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

NO	JENIS PAJAK	PENGURANGAN/ PEMBETULAN	KEBERATAN	BANDING	PENINJAUAN KEMBALI	JUMLAH
1	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	60.987.975.673	37.378.453.039	27.708.171.262	24.163.607.507	150.238.207.481
2	PPh Pasal 25/29 Badan	659.404.083.187	691.447.247.765	771.076.798.303	119.744.594.151	2.241.672.723.405
3	PPh Pasal 21	24.115.272.110	1.935.532.752	3.038.805.739	4.257.861.389	33.347.471.990
4	PPh Pasal 22	3.880.148.394	392.889.539	440.147.393	82.192.379	4.795.377.705
5	PPh Pasal 23	43.785.872.229	21.715.241.549	8.573.007.238	2.820.099.879	76.894.220.895
6	PPh Pasal 26	7.532.248.712	11.564.590.942	353.867.901.723	22.912.629.847	395.877.371.224
7	PPh Final	102.780.314.658	55.035.578.740	10.016.120.890	29.220.109.491	197.052.123.779
8	PPN	865.032.324.426	249.572.709.728	342.133.569.466	198.834.179.646	1.655.572.783.266
9	PPnBM	53.617.545.663	57.615.759.357	280.316.857.924	4.614.181.455	396.164.344.399
10	Bunga Penagihan	144.495.511.856	0	2.051.551.273	0	146.547.063.129
11	Pajak Tidak Langsung Lainnya	0	0	0	0	0
12	PBB Sektor Perkebunan	13.222.817.222	7.943.054.167	888.788.188	0	22.054.659.577
13	PBB Sektor Perhutanan	273.743.072.121	19.345.435.256	1.494.341.886	0	294.582.849.263

www.peraturan.go.id

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PAJAK YANG DILAKUKAN UPAYA HUKUM
PER 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

NO	JENIS PAJAK	PENGURANGAN/ PEMBETULAN	KEBERATAN	BANDING	PENINJAUAN KEMBALI	JUMLAH
14	PBB Sektor Pertambangan Non Migas	62.043.045.524	45.977.529.667	210.405.083.553	0	318.425.658.744
15	PBB Sektor Pertambangan Migas	185.557.519.197	23.648.041.197	4.105.797.417	0	213.311.357.811
JUMLAH		**2.500.197.750.972**	**1.223.572.063.698**	**2.016.116.942.255**	**406.649.455.744**	**6.146.536.212.669**

LAMPIRAN 14

Piutang PNBP

per 31 Desember 2014

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 14

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2014 AUDITED			31 DESEMBER 2013 AUDITED		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	35.721.000	(178.605)	35.542.395	650.819	(3.254)	647.565
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	41.396.429	(206.982)	41.189.447			
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.347.199.266	(6.735.996)	1.340.463.270	6.131.262.182	(30.656.314)	6.100.605.868
4	005	MAHKAMAH AGUNG	92.463.708	(462.319)	92.001.389	151.378.337	(756.891)	150.621.446
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	14.634.625.373.508	(9.136.079.481.935)	5.498.545.891.573	13.201.201.066.267	(11.131.116.911.979)	2.070.084.154.288
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	0	0	0	665.218.971	(3.326.095)	661.892.876
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	17.040.314.450	(1.000.206.784)	16.040.107.666	25.281.841.510	(495.858.140)	24.785.983.370
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	52.028.280.204	(3.125.492.912)	48.902.787.292	55.180.849.338	0	55.180.849.338
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	26.201.056.637	(20.172.824.928)	6.028.231.709	97.199.395.637	(17.470.480.377)	79.728.915.460
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	367.961.511.066	(95.266.152.149)	272.695.358.917	185.252.175.906	(1.008.600.437)	184.243.575.469
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	121.212.244.215	(45.536.732.525)	75.675.511.690	67.006.879.145	(46.363.232.047)	20.643.647.098
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	1.827.083.860	(10.438.819)	1.816.645.041	1.208.660.837	(25.324.832)	1.183.335.805
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	46.017.627.992	(28.776.905.479)	17.240.722.513	31.454.850.231	(29.624.083.696)	1.830.766.535
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	23.127.439.438.762	(1.949.944.998.355)	21.177.494.440.407	11.631.556.074.257	(10.678.598.650.286)	952.957.423.971
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	134.172.732.011	(24.363.665.547)	109.809.066.464	167.358.155.328	(19.276.250.570)	148.081.904.758
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	76.719.994.363	(16.208.053.930)	60.511.940.433	71.283.499.448	(7.785.474.651)	63.498.024.797
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	50.736.168.823	(975.233.708)	49.760.935.115	45.313.629.168	(344.183.953)	44.969.445.215
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	44.578.978.332	(586.562.848)	43.992.415.484	9.760.197.621	(390.828.368)	9.369.369.253
19	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	12.123.185.714	(5.494.822.780)	6.628.362.934			0
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	12.040.000	(60.200)	11.979.800	18.420.000	(92.100)	18.327.900
21	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	2.524.851.229.057	(2.087.715.120.896)	437.136.108.161	2.375.093.339.524	(1.852.235.671.927)	522.857.667.597
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	31.330.601.480	(157.137.052)	31.173.554.420	31.491.140.915	(189.091.039)	31.301.257.270
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	58.331.089.259	(288.961.020)	58.042.128.239	5.080.519.248	(18.494.991)	5.062.024.257
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	0	0	0			0
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	154.234.324	(771.172)	153.463.152	189.010.212	(945.051)	188.065.161
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	50.141.128	(250.706)	49.890.422			0
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	7.937.571.966	(39.687.860)	7.897.884.106	1.209.951.250	(6.646.756)	1.203.304.494
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	4.600.035.063	(448.532.323)	4.151.502.740	906.748.000	(4.533.740)	902.214.260
29	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	1.265.002.720	(6.325.014)	1.258.677.706			0
30	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	1.904.464.167	(9.522.321)	1.894.941.846	620.606.676	(623.506)	619.983.170
31	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	15.792.703.300	(15.792.703.300)	0	28.710.623.100	(15.857.292.899)	12.853.330.201
32	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0	0	0			0
33	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	0	0	0			0
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	0	0	0			0
35	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	25.962.800.000	(129.814.000)	25.832.986.000			0
36	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	0	0	0	140.482.880	(702.414)	139.780.466
37	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.222.024.237	(6.110.121)	1.215.914.116	2.922.376.093	(14.611.880)	2.907.764.213
38	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	326.922.087	(1.634.610)	325.287.477			0
39	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	7.340.274.605	(1.211.305.076)	6.128.969.529	3.382.670.839	(973.220.823)	2.409.450.016
40	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	4.200.000	(21.000)	4.179.000	57.600.000	(288.000)	57.312.000
41	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.975.196.772.066	(2.217.629.510.445)	757.567.261.621	3.222.238.267.846	(1.441.394.019.885)	1.780.844.247.963
42	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	24.334.285.511	(175.955.959)	24.158.329.552	10.787.860.401	(244.926.704)	10.542.931.697
43	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	240.514.036	(1.202.571)	239.311.465	93.687.000	(468.435)	93.218.565
44	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	0	0	0	1.001.382.800		1.001.382.800
45	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	0	0	0			0
46	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	781.537.409	(70.204.279)	711.333.130	2.737.707.622	(245.852.914)	2.491.854.708
47	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	0	0	0			0
48	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	0	0	0			0
49	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	33.607.000	(168.035)	33.438.965	844.870.837	(4.224.354)	840.646.483
50	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	111.987.378.523	(559.936.892)	111.427.441.631	64.857.207.201	(235.066.078)	64.622.141.123
51	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	0	0	0	10.865.108	(3.325)	10.861.783
52	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0	0			0
53	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	138.213.790	(691.069)	137.522.721	18.597.863	(92.989)	18.504.874
54	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	3.818.547.613	(656.808.370)	3.161.739.243	2.494.456.207	(272.258.665)	2.222.197.542
55	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	23.518.494.552	(133.965.198)	23.384.529.354	268.291.166	(12.213.321)	256.077.845
56	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	28.965.046.850	(21.566.114.067)	7.398.932.783	51.249.240.425	(12.191.520.398)	39.057.720.027
57	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	0	0	0	60.442.178	(302.211)	60.139.967
58	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	328.966.725	(1.644.834)	327.321.891			0
59	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	6.500.000	(365.000)	6.135.000	14.320.000	(71.600)	14.248.400
60	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	506.784.215	(198.718.825)	308.065.390	350.703.000	(133.686.655)	217.016.345
61	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	109.768.181	(548.841)	109.219.340	1.080.000	(5.400)	1.074.600
62	087	ARSIP NASIONAL	0	0	0			0
63	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	343.485.935	(306.138.620)	37.347.315	339.444.740	(307.314.820)	32.129.920
64	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	5.363.125	(26.816)	5.336.309	7.605.000	(38.025)	7.566.975
65	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	355.854.995	(289.639.740)	66.215.255	708.818.565	(61.958.766)	646.859.797
66	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	151.416.839.083	(757.084.195)	150.659.754.888	54.827.192.569	(274.135.963)	54.553.056.606
67	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	0	0	0			0
68	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	480.593.644.944	(3.489.128.038)	477.104.516.906	501.567.745.604	(30.252.843.810)	471.314.901.794
69	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	0	0	0			0
70	100	KOMISI YUDISIAL	4.198.210.301	(4.198.210.301)	0	4.302.030.241		4.302.030.241
71	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	0	0	0	2.999.561.508	(2.400.838.768)	598.722.740
72	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	3.023.304.942	(2.429.164.728)	594.140.214			0
73	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	5.308.224.660	(1.482.869)	5.306.741.791	20.483.732.952	(591.399)	20.483.141.553
74	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	0	0	0			0
75	107	BADAN SAR NASIONAL	20.321.357.756	(19.427.932.090)	893.425.666	21.487.842.836	(9.582.200.000)	11.905.642.836
76	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	56.271.958.316	(43.912.718.751)	12.359.239.565	47.176.671.490	(44.837.671.490)	2.339.000.000
77	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	0	0	0			0
78	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	0	0	0			0
79	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	0	0	0	140.087.759	(700.439)	139.387.320

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 14

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2014 AUDITED			31 DESEMBER 2013 AUDITED		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
80	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	0	0	0			0
81	113	BADAN PENANGGULANGANAN TERORISME	0	0	0			0
82	114	SEKRETARIAT KABINET	0	0	0			0
83	115	BADAN PENGAWAS PEMILU RI	0	0	0			0
84	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	4.514.416.400	(27.004.806)	4.487.411.594	2.584.695.311	(12.923.476)	2.571.771.835
85	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	49.846.294.414	(22.693.374.291)	27.152.920.123	66.665.135.919	(18.898.148.481)	47.766.987.438
86	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	2.550.372.687	(12.793.692)	2.537.578.995	2.224.602.236		2.224.602.236
JUMLAH DARI SELURUH K/L			**45.344.001.937.762**	**(15.771.897.646.574)**	**29.572.104.291.188**	**32.128.373.428.125**	**(25.363.191.717.989)**	**6.765.181.710.136**
87	999.01	PENGELOLAAN UTANG	0	0	0	0		0
88	999.03	INVESTASI PEMERINTAH	144.649.068.259	(98.991.101.552)	45.657.966.707	145.676.487.897	(98.536.398.650)	47.142.089.247
89	999.04	PENERUSAN PINJAMAN	0	0	0	0		0
90	999.05	TRANSFER KE DAERAH	4.726.020.273.817	0	4.726.020.273.817	7.723.988.955.720		7.723.988.955.720
91	999.07	BELANJA SUBSIDI	1.292.143.202.492	(6.460.716.012)	1.285.682.486.480	1.144.616.528.092	(5.723.082.640)	1.138.893.445.452
92	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	136.519.526.122	(682.597.631)	135.836.928.491	99.210.000		99.210.000
93	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	89.672.644.831.569	(84.831.428.914.787)	4.841.215.916.782	106.567.477.002.516	(82.472.837.469.805)	24.094.639.532.711
94	999.992	DIREKTORAT PKN (SAKUN)	0	0	0	0		0
95	999.999	BADAN LAINNYA	0	0	0	0		0
JUMLAH DARI BUN			**95.971.976.902.260**	**(84.937.563.329.983)**	**11.034.413.572.277**	**115.561.860.184.226**	**(82.577.086.951.095)**	**33.004.763.233.130**
JUMLAH PIUTANG PNBP DARI K/L DAN BUN			**141.315.978.840.022**	**(100.709.460.976.557)**	**40.606.517.863.465**	**147.710.233.612.351**	**(107.940.288.669.084)**	**39.769.944.943.267**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN 15
Rincian Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi per 31 Desember 2014

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN PIUTANG EKS BANK DALAM LIKUIDASI
PER 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

No	ASAL BANK BDL	Jumlah Hak Tagih	Setoran Kas Ke Rekg. BUN. 502.000000									Total Pengembalian s.d. 31 Desember 2014	Saldo Hak Tagih Per 31 Desember 2014
		Total (Saldo Awal)	Pengembalian s.d Desember 2006	Pengembalian Tahun 2007	Pengembalian Tahun 2008	Pengembalian Tahun 2009*	Pengembalian Tahun 2010	Pengembalian Tahun 2011	Pengembalian Tahun 2012	Pengembalian Tahun 2013	Pengembalian Tahun 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12	14 = 3 - 13
	DDL eks Dana Talangan												
1	PT. Bank Arnico	210.080.726.975,73	8.532.857.340,07	9.502.388.722,00	357.663.052,78	1.803.203.328,00	6.540.713.343,00	12.619.591.820,00	1.845.743.933,00	7.391.557.180,00	22.651.813.642,00	71.751.818.312,85	138.328.910.662,88
2	PT. Bank Buna Internasional	251.055.006.000,00	163.555.006.000,00	17.318.686.847,82	2.680.263.086,82	2.048.428.835,82	2.886.154.673,00	3.958.030.506,82	10.688.406.037,00	6.880.428.980,45	3.175.857.083,05	232.981.853.625,82	18.093.354.174,18
3	PT. Bank Harapan Sentosa	3.866.182.312.952,07	595.728.056.400,00	41.314.533.280,56	5.204.191.984,81	5.100.999.512,85	8.779.000.328,44	3.405.995.872,14	19.670.458.995,75	5.571.888.991,80	3.943.603.724,14	678.723.808.982,00	3.187.458.505.969,98
4	PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal	201.802.188.835,20	25.038.188.607,19	8.315.060.527,00	385.357.788,00	190.370.780,00	0,00	0,00	1.380.331.695,00	0,00	0,00	33.378.309.808,19	168.423.857.328,11
5	PT. Bank Kosagraha Semesta Sejahtera	201.812.614.291,48	48.872.202.071,00	30.748.092.410,85	7.878.883.538,00	2.048.975.488,00	3.286.914.560,00	974.939.938,00	2.331.478.260,00	563.181.383,00	739.888.715,00	95.450.597.424,85	106.362.018.862,85
6	PT. Bank Mataram Dhanarta	338.769.200.986,09	31.186.000.000,00	4.018.000.000,00	3.193.944.737,00	0,00	0,00	0,00	885.884.200,00	1.376.574.591,00	0,00	40.440.183.537,00	298.323.028.329,09
7	PT. Bank Pacific	2.133.388.434.859,63	332.023.076.287,80	28.347.497.838,00	111.657.561.420,00	14.675.177.882,50	19.728.888.650,20	1.980.001.520,16	74.243.254.273,00	22.891.927.189,00	218.572.728,00	626.544.057.588,76	1.506.844.377.242,87
8	PT. Sejahtera Bank Umum	1.897.349.515.372,53	857.387.217.383,85	550.081.493,45	88.887.168.382,79	29.887.774.331,00	37.962.436.510,76	28.020.048.077,00	32.456.945.686,80	27.048.488.188,00	16.587.654.286,00	1.158.717.930.502,55	530.631.584.869,98
9	PT. South East Asia Bank	693.330.023.305,39	99.302.719.980,80	28.197.078.836,79	134.453.227,00	3.489.512.824,00	250.736.940,00	27.609.545.454,00	30.980.937.540,00	33.495.447,00	442.000.000,00	190.519.679.115,59	702.810.144.189,51
10	PT. Bank Dwipa Semesta	110.105.887.130,67	6.970.134.800,00	0,00	27.300.000.000,00	0,00	0,00	328.500.000,00	11.424.546,00	13.638.365,00	0,00	34.624.695.511,00	75.481.301.619,67
11	PT. Asrita Raya Bank	578.916.260.699,77	131.949.803.600,00	0,00	51.742.662.725,42	0,00	0,00	1.283.224.575,00	6.317.697.524,00	2.411.691.600,00	2.226.636.441,00	195.929.706.756,42	382.986.553.943,35
12	PT. Bank Pinaesaan	891.094.400.910,59	19.456.890.100,11	745.723.007,00	24.309.490.549,00	3.590.998.621,00	4.534.212.586,00	1.303.214.400,00	5.412.998.712,00	4.886.022.939,92	398.460.164,21	65.634.787.078,24	617.449.702.943,34
13	PT. Bank Jakarta	210.896.000.000,00	120.956.850.061,87	60.000.000.000,00	21.323.394.608,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	6.710.675.330,00	0,00	0,00	210.990.919.999,87	0,13
14	PT. Bank Industri	511.470.239.328,08	278.124.000.000,00	0,00	0,00	78.318.742.817,00	86.420.766,00	47.841.145,00	481.922.623,00	2.723.923.629,00	734.518.092,00	361.439.379.024,00	149.970.960.232,08
15	PT. Bank Umum Majapahit Jaya	8.554.769.042,27	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	6.054.769.042,27
	Total BDL Eks Dana Talangan	**11.868.938.781.558,30**	**2.730.845.774.151,38**	**228.053.353.976,53**	**323.144.463.070,41**	**140.764.168.750,84**	**84.175.867.811,50**	**83.718.041.051,22**	**252.873.341.829,85**	**81.395.784.730,17**	**50.899.270.875,40**	**3.975.669.866.247,10**	**7.913.268.515.311,18**

www.peraturan.go.id

No	ASAL BANK BDL	Jumlah Hak Tagih	Setoran Kas Ke Rekg. BUN. 502.000000									Total Pengembalian s.d. 31 Desember 2014	Saldo Hak Tagih Per 31 Desember 2014
		Total (Saldo Awal)	Pengembalian s.d Desember 2006	Pengembalian Tahun 2007	Pengembalian Tahun 2008	Pengembalian Tahun 2009	Pengembalian Tahun 2010	Pengembalian Tahun 2011	Pengembalian Tahun 2012	Pengembalian Tahun 2013	Pengembalian Tahun 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12	14 = 3 - 13
	BDL eks Dana Penjaminan												
1	PT Bank Asiatic	880.579.224.442,82	5.000.000.000,00	18.500.000.000,00	5.000.000.000,00	31.500.000.000,00	-	-	8.000.000.000,00	-	-	68.000.000.000,00	812.579.224.442,82
2	PT Bank Dagang Bali	1.331.516.911.477,24				269.906.630.005,00	123.389.852.865,00				23.155.952.603,00	416.452.235.473,00	915.064.675.986,24
3	PT Bank Global Internasional	801.224.270.296,61				62.280.000.000,00		100.000.000.000,00			64.000.000.000,00	226.280.000.000,00	577.974.270.296,61
4	PT Bank Ratu	71.817.986.352,00		10.000.000.000,00	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00					30.000.000.000,00	41.817.986.352,00
5	PT Bank Prasidha Utama	227.134.550.144,00	4.000.000.000,00			16.497.034.464,52			401.880.081,00			20.898.914.545,52	206.235.644.598,48
	Total BDL Eks Dana Penjaminan	**3.321.282.950.812,58**	**9.000.000.000,00**	**28.500.000.000,00**	**15.000.000.000,00**	**380.183.664.469,52**	**133.389.852.865,00**	**100.000.000.000,00**	**8.401.880.081,00**	**0,00**	**87.155.952.603,00**	**761.611.150.024,52**	**2.559.671.800.788,06**

LAMPIRAN 16

Aset Kredit Eks BPPN

per 31 Desember 2014

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 16.A

RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN

Uraian	Debitur ATK di PUPN	Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)	Dikelola Kantor Pusat (debitur ATK)	Grand Total
JUMLAH	13.879.953.816.627,20	23.762.400.137.355,20	29.005.767.989.694,50	**66.648.121.943.676,80**

1. Aset Kredit Yang Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN *

a Asset Transfer Kit (ATK)

Mata Uang	Saldo Per 31 Desember 2014 (audited)	Nilai Konversi Per 31 Desember 2014
Dollar Amerika	476.094.680,31	5.922.617.823.056,40
Rupiah	5.646.477.718.694,43	5.646.477.718.694,43
Yen Jepang	5.615.941.858,85	585.455.199.654,88
Euro	12.826.978,45	194.114.128.168,03

b Non Asset Transfer Kit (Non ATK) telah PB/PJPN

Mata Uang	Saldo Per 31 Desember 2014 (audited)	Nilai Konversi Per 31 Desember 2014
Dollar Amerika	25.461.665,40	316.743.117.576,00
Rupiah	1.214.545.829.477,43	1.214.545.829.477,43
Yen Jepang	0,00	0,00

**Aset kredit Non ATK telah memperhatikan tahap pengurusan yang telah PB/PJPN*

a+b Total

Mata Uang	Saldo Per 31 Desember 2014 (audited)	Nilai Konversi Per 31 Desember 2014	Saldo Per 31 Desember 2013 (audited)	Nilai Konversi Per 31 Desember 2013
Dollar Amerika	501.556.345,71	6.239.360.940.632,40	481.935.785,43	5.874.315.288.627,24
Rupiah	6.861.023.548.171,86	6.861.023.548.171,86	6.404.475.885.201,56	6.404.475.885.201,56
Yen Jepang	5.615.941.858,85	585.455.199.654,88	5.615.941.858,85	652.397.226.612,37
Euro	12.826.978,45	194.114.128.168,03	0,00	0,00
Jumlah		**13.879.953.816.627,20**		**12.931.188.400.441,20**

2. Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham

Nama Obligor	Bank Asal	Saldo Per 31 Desember 2014 (audited)	Mutasi Tahun 2014	Saldo Per 31 Desember 2013 (audited)
Agus Anwar	Bank Pelita Istismarat	577.812.000.000,00		577.812.000.000,00
Atang Latief	Bank Indonesia Raya	155.727.000.000,00		155.727.000.000,00
Baringin Marulam Hasiholan Panggabean & Joseph Januardy	Bank Namura	170.144.000.000,00		170.144.000.000,00
David Nusa Wijaya/Tarunojoyo Nusa	Bank Servitia	4.308.730.000.000,00		4.308.730.000.000,00
Dewanto Kurniawan	Bank Deka	-	(65.674.593.762,00)	65.674.593.075,00
Fadel Muhammad	Bank Intan	136.430.000.000,00		136.430.000.000,00
Hengky Wijaya	Bank Tata Internasional	596.794.000.000,00		596.794.000.000,00
I.M. Sudiarta/IGD Darmaw	Bank Aken	509.986.363.636,00		509.986.363.636,00
Kaharudin Ongko	Bank Umum Nasional	7.851.750.426.289,18	(18.667.332.274,00)	7.870.417.758.563,18
Lidia Muchtar	Bank Tamara	188.483.118.182,00		188.483.118.182,00
Marimutu Sinivasan	Bank Putra Multikarsa	790.557.000.000,00		790.557.000.000,00
Samadikun Hartono	Bank Modern	2.526.360.229.248,00	(1.831.750.000,00)	2.528.191.979.248,00
Santoso Sumali	Bank Metropolitan	70.460.000.000,00		70.460.000.000,00
Santoso Sumali	Bank Bahari	406.415.000.000,00		406.415.000.000,00

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 16.A

RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN

Trijono Gondokusumo	Bank Putera Surya Perkasa	5.048.095.000.000,00		5.048.095.000.000,00
Ulung Bursa	Bank Lautan Berlian	424.656.000.000,00		424.656.000.000,00
Jumlah		**23.762.400.137.355,20**	**(86.173.676.036,00)**	**23.846.733.283.504,50**

Catatan:
*) Saldo PKPS Bank Deka per 31 Desember 2013 terdapat koreksi yang semula sebesar Rp63.834.063.875,36 menjadi sebesar Rp65.674.593.075 ha

3. **Dikelola Kantor Pusat (Debitur ATK)**

Mata Uang	Saldo Per 31 Desember 2014 (audited)	Nilai Konversi per 31 Desember 2014	Saldo Per 31 Desember 2013 (audited)	Nilai Konversi per 31 Desember 2013
Rupiah	13.340.336.023.951,00	13.340.336.023.951,00	13.350.383.864.509,50	13.350.383.864.509,50
Dollar Amerika	1.041.403.707,00	12.955.062.115.080,00	1.048.022.609,17	12.774.347.583.173,10
Yen Jepang	998.413.744,00	104.083.434.715,51	998.413.744,22	115.984.526.569,54
Deutschmark		-		-
Euro	436.387,00	6.603.962.295,49	13.263.365,67	223.108.909.815,97
Dollar Australia	1.332.783,00	13.618.683.234,09	1.332.783,73	14.494.902.701,01
Poundsterling	266.124,00	5.154.912.362,16	266.124,00	5.348.195.562,12
Jumlah		**26.424.859.131.638,20**		**26.483.667.982.331,30**

b) ATK Lainnya

	Mata Uang	Nilai 31 Desember 2014	Nilai Konversi
Koreksi ATK yang tercatat non ATK	Rupiah	271.003.330.923,94	271.003.330.923,94
Koreksi ATK sesuai LHP BPK TA 2012	Rupiah	1.980.529.395.026,31	1.980.529.395.026,31
	Dollar Amerika	26.403.988,65	328.465.618.806,00
Eraska Tristi	Rupiah	893.182.300,00	893.182.300,00
PT Teratai Mahkota	Rupiah	17.331.000,00	17.331.000,00
Total			**2.580.908.858.056,25**

Catatan

	Kurs Tengah BI	Per 31 Desember 2014	Per 31 Desember 2013
1	**Dollar Amerika**	12.440,00	12.189,00
2	**Yen Jepang**	104,25	116,17
3	**Deutschmark**	7.737,52	8.600,67
4	**Euro**	15.133,27	16.821,44
5	**Dollar Australia**	10.218,23	10.875,66
6	**Poundsterling**	19.370,34	20.096,63

www.peraturan.go.id

ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA

	Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN	Dikelola Kantor Pusat	Grand Total Per 31 Desember 2014 (unaudited)
TOTAL	3.804.922.813.944,03	4.196.644.145.016,69	**8.001.566.958.960,72**

1. Debitur Yang Telah Diserahkan Pengurusan Piutang Negaranya kepada PUPN

Mata Uang	Saldo Per 31 Desember 2014 (unaudited)	Nilai Konversi 31 Desember 2014	Saldo Per 31 Desember 2013 (audited)	Nilai Konversi 31 Desember 2013
Dollar Amerika	106.885.727,14	1.329.658.445.670,99	106.903.814,07	1.303.050.589.699,23
Dollar Singapore	79.397,45	748.091.507,62	79.397,45	764.437.854,63
Rupiah	2.453.925.596.550,43	2.453.925.596.550,43	2.467.568.128.777,47	2.467.568.128.777,47
Yen Jepang	141.216.722,50	14.721.673.860,56	141.216.722,50	16.404.977.192,76
Deutchmark	758.512,78	5.869.006.354,43	758.512,78	24.880.590.575,11
Jumlah		**3.804.922.813.944,03**		**3.812.668.724.099,19**

2. Debitur Dikelola Kantor Pusat DJKN c.q. Direktorat PKNSI

Nama Debitur	Bank Asal	Saldo 31 Desember 2014 (unaudited)	Saldo 31 Desember 2013 (audited)
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	1.299.150.000,00	1.299.150.000,00
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	108.990.024,00	108.990.024,00
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	34.584.020.409,75	34.584.020.409,75
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	69.168.040.819,50	69.168.040.819,50
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	62.099.370.000,00	62.099.370.000,00
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	30.938.810.688,84	30.938.810.688,84
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	112.771.449.858,24	112.771.449.858,24

ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA

Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	425.983.823.548,50	425.983.823.548,50
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	8.693.911.800,00	8.693.911.800,00
Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT	Fasilitas Restructuring	91.489.249.097,01	91.489.249.097,01
Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT	Fasilitas Restructuring	1.212.685.353.877,93	1.212.685.353.877,93
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	26.981.928.647,65	26.981.928.647,65
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	615.025.707.374,47	615.025.707.374,47
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00
Jumlah		**2.738.829.806.145,89**	**2.738.829.806.145,89**

Group Texmaco (dalam perkara)

No.	Debitur	Mata Uang	Nilai Aset per 31 Desember 2014 (unaudited)	Nilai Konversi per 31 Desember 2014	Nilai Aset Per 31 Desember 2013 (audited)	Nilai konversi per 31 Desember 2013
1	Jaya Perkasa Engineering, PT	Rupiah	151.367.074.750,00	151.367.074.750,00	151.367.074.750,00	151.367.074.750,00
		Dollar Amerika	38.822.432,00	482.951.054.080,00	38.822.432,00	473.206.623.648,00
2	Polysindo Eka Perkasa, PT	Rupiah	459.555.536,00	459.555.536,00	459.555.536,00	459.555.536,00
		Dollar Amerika	960.092,00	11.943.544.480,00	960.092,00	11.702.561.388,00
3	Texmaco Jaya, PT	Rupiah	365.572.613,00	365.572.613,00	365.572.613,00	365.572.613,00
		Dollar Amerika	2.435,00	30.291.400,00	2.435,00	29.680.215,00
4	Wastra Indah, PT	Rupiah	10.493.948,00	10.493.948,00	10.493.948,00	10.493.948,00
5	PT Bina Prima Perdana	Rupiah	470.399.713.486,00	470.399.713.486,00	470.399.713.486,00	470.399.713.486,00
		Dollar Amerika	25.540.008,00	317.717.699.520,00	25.540.008,00	311.307.157.512,00
Grand Total				**1.435.244.999.813,00**		**1.418.848.433.096,00**

ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA

5 Debitur eks kelolaan PT PPA sesuai LHP BPK tahun anggaran 2013

No	Nama debitur	Mata uang	Nilai aset per 31 Desember 2014
1	PT Citra Makmur Asia	Rupiah	24.561.586.875,00
2	Abdul Hadi	Rupiah	4.911.933,42
3	Faridah	Rupiah	2.528.941,32
4	Haryanto	Rupiah	59.266,60
5	Zainal Abidin	Rupiah	252.041,46
	Total		**24.569.339.057,80**

Catatan

	Kurs Tengah BI	Per 31 Desember 2014	Per 31 Desember 2013
1	Dollar Amerika	12.440,00	12.189,00
2	Yen Jepang	104,25	116,17
3	Deutschmark	7.737,52	8.600,67
4	Euro	15.133,27	16.821,44
5	Dollar Australia	10.218,23	10.875,66
6	Poundsterling	19.370,34	20.096,63
7	Dollar Singapura	9.422,11	9.627,99

www.peraturan.go.id

PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

No	Uraian	Formula Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			Keterangan
			Saldo 31 Desember 2014	Nilai Agunan/Pengurang	Jumlah Penyisihan	
1	**Aset kredit eks BPPN**					
	a. **Selain Tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham**	Saldo piutang 31 Desember 2014 - (Saldo piutang 31 Desember 2014 x Recovery Rate)	42.885.721.806.321,70		42.386.034.342.035,30	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 151/KMK.6/2014
	b. **Tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham**	100% x (Saldo piutang 31 Desember 2014 - nilai agunan)	23.762.400.137.355,20	787.331.089.292,50	22.975.069.048.062,70	
2	**Aset kredit eks kelolaan PT PPA**	Saldo piutang 31 Desember 2014 - (Saldo piutang 31 Desember 2014 x Recovery Rate)	8.001.566.958.960,72		7.921.887.739.531,59	
3	**Aset kredit yang diserahkelolakan kepada PT PPA**	Saldo piutang 31 Desember 2014 - (Saldo piutang 31 Desember 2014 x Recovery Rate)	1.033.589.285.309,58		1.024.626.165.837,16	
4	**Piutang eks BDL**	100% x (Saldo piutang 31 Desember 2014 - nilai agunan)	10.472.940.716.099,20	138.831.677.805,00	10.334.109.038.294,20	Peraturan Menteri Keuangan
5	**Piutang pada PT PPA**	5‰ x (saldo piutang 31 Desember 2014)	51.798.368.304,00	51.539.376.462,48	258.991.841,52	No.69/PMK.06/2014
Jumlah			**86.208.017.272.350,40**	**977.702.143.559,98**	**84.641.885.325.602,40**	

LAMPIRAN 17
Bagian Lancar TP/TGR
31 Desember 2014

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) **LAMPIRAN 17**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN LANCAR TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalan Rupiah)

No	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2014 AUDITED			31 DESEMBER 2013 AUDITED		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	35.750.000	(178.750)	35.571.250	39.000.000	(195.000)	38.805.000
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	250.000.000	(1.250.000)	248.750.000	517.472.222	(2.587.361)	514.884.861
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	52.046.296	(2.829.630)	49.216.666	53.046.296	(2.834.630)	50.211.666
4	005	MAHKAMAH AGUNG	1.234.810.034	(870.111.699)	364.698.335	1.243.658.356	(987.358.646)	256.299.710
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	1.205.195.000	(6.025.975)	1.199.169.025	2.400.000	(12.000)	2.388.000
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	39.000.000	(195.000)	38.805.000	13.855.000	(69.275)	13.785.725
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	18.543.979.574	(92.719.898)	18.451.259.676	18.278.573.422	(91.392.867)	18.187.180.555
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	34.999.067.716	(34.585.797.466)	413.270.250	35.145.475.971	(34.643.510.915)	501.965.056
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	2.976.000	(14.880)	2.961.120	3.730.080	(18.650)	3.711.430
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	291.674.346	(1.458.371)	290.215.975	386.254.414	(6.054.272)	380.200.142
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	10.478.832.434	(9.865.895.245)	612.937.189	10.574.192.619	(9.568.068.047)	1.006.124.572
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	11.383.953.464	(7.568.906.018)	3.815.047.446	5.639.410.900	(693.164.878)	4.946.246.022
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	11.999.803	(59.999)	11.939.804	0	0	0
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	24.225.000	(121.125)	24.103.875	35.650.000	(178.250)	35.471.750
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	11.608.705.570	(11.606.013.528)	2.692.042	25.703.566.497	(128.517.833)	25.575.048.664
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	154.197.110	(771.118)	153.425.992	144.628.360	(723.142)	143.905.218
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	92.276.000	(467.380)	91.808.620	48.300.000	(247.500)	48.052.500
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	0	0	0	0	0	0
19	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.777.743.654	(8.888.719)	1.768.854.935	11.387.759.750	(1.121.047.578)	10.266.712.172
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	1.750.000	(8.750)	1.741.250	7.262.000	(36.310)	7.225.690
21	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	9.420.464.810	(9.239.968.109)	180.496.701	9.432.750.807	(9.248.181.144)	184.569.663
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	27.465.095	(137.325)	27.327.770	0	0	0
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	424.040.061	(147.000.296)	277.039.765	152.102.083	(760.510)	151.341.573
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	12.000.000	(60.000)	11.940.000	7.251.576	(36.258)	7.215.318
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	0	0	0	0	0	0
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	0	0	0	0	0	0
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0	0	0	0	0	0
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	3.500.004	(17.500)	3.482.504	3.500.004	(17.500)	3.482.504
29	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	0	0	0	0	0	0
30	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0	0	0	0
31	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	23.705.855	(14.485.411)	9.220.444	36.154.239	(12.821.525)	23.332.714
32	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0	0	0	20.000.000	(20.000.000)	0
33	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	0	0	0	0	0	0
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	0	0	0	0	0	0
35	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	0	0	0	0	0	0
36	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	0	0	0	0	0	0
37	054	BADAN PUSAT STATISTIK	20.336.435.065	(16.555.216.889)	3.781.218.176	16.426.934.596	(16.187.145.329)	239.789.267
38	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	96.436.500	(482.183)	95.954.317	0	0	0
39	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	66.000.000	(330.000)	65.670.000	74.400.000	(372.000)	74.028.000
40	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	0	0	0	0	0	0
41	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	25.424.873	(127.124)	25.297.749	443.075.102	(2.215.376)	440.859.726
42	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1.511.173.151	(7.555.866)	1.503.617.285	1.760.733.628	(8.803.668)	1.751.929.960
43	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	0	0	0	0	0	0
44	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	0	0	0	0	0	0
45	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	0	0	0	29.410.828	(1.276.683)	28.134.145
46	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	49.999.011	(1.941.147)	48.057.864	0	0	0
47	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	0	0	0	0	0	0
48	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	61.050.802	(2.805.481)	58.245.321	353.064.478	(1.765.323)	351.299.155
49	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	0	0	0	0	0	0
50	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	1.500.000	(7.500)	1.492.500	0	0	0
51	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	517.865.607	(3.123.460)	514.742.147	71.956.477	(503.585)	71.452.892
52	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	64.684.493	(25.026.727)	39.657.766	37.060.296	(185.301)	36.874.995
53	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	0	0	0	0	0	0
54	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	56.601.770.006	(56.203.070.006)	398.700.000	846.276.253	(7.140.756)	839.135.497
55	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	91.634.537	(34.919.537)	56.715.000	627.769.460	(3.138.847)	624.630.613
56	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	0	0	0	18.700.000	(93.500)	18.606.500
57	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	37.200.000	(3.720.000)	33.480.000	3.248.000	(16.240)	3.231.760
58	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	11.004.000	(55.020)	10.948.980	1.527.484.590	(7.637.423)	1.519.847.167
59	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	0	0	0	394.826.000	(1.974.130)	392.851.870
60	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	18.000.000	(90.000)	17.910.000	6.000.000	(30.000)	5.970.000
61	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	41.400.000	(207.000)	41.193.000	41.400.000	(207.000)	41.193.000
62	087	ARSIP NASIONAL	0	0	0	1.976.188	(9.881)	1.966.307
63	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	0	0	0	0	0	0
64	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	0	0	0	297.819.800	(1.489.099)	296.330.701
65	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	340.130.256	(330.578.256)	9.552.000	427.071.208	(333.761.103)	93.310.105
66	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	0	0	0	0	0	0
67	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	0	0	0	0	0	0
68	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	73.683.805	(368.419)	73.315.386	0	0	0
69	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	0	0	0	6.225.861	(31.129)	6.194.732
70	100	KOMISI YUDISIAL	0	0	0	0	0	0

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 17

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN LANCAR TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalan Rupiah)

No	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2014 AUDITED			31 DESEMBER 2013 AUDITED		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
71	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	6.066.640	(30.332)	6.036.308	8.500.000	(42.500)	8.457.500
72	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	31.800.000	(159.000)	31.641.000	11.626.600	(58.133)	11.568.467
73	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	0	0	0	0	0	0
74	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	0	0	0	0	0	0
75	107	BADAN SAR NASIONAL	9.768.000	(48.840)	9.719.160	0	0	0
76	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	473.550.899	(171.855.965)	301.694.934	177.522.930	(165.072.930)	12.450.000
77	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	0	0	0	0	0	0
78	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	0	0	0	0	0	0
79	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	0	0	0	0	0	0
80	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	0	0	0	0	0	0
81	113	BADAN PENANGGULANGAN TERORISME	0	0	0	0	0	0
82	114	SEKRETARIAT KABINET	0	0	0	0	0	0
83	115	BADAN PENGAWAS PEMILU RI	0	0	0	0	0	0
84	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	0	0	0	14.065.000	(70.325)	13.994.675
85	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	0	0	0	0	0	0
86	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	0	0	0	0	0	0
		JUMLAH BAGIAN LANCAR TP/TGR DARI K/L	**182.565.935.471**	**(147.355.100.944)**	**35.210.834.527**	**142.483.141.891**	**(73.250.874.352)**	**69.232.267.539**
87	999.01	PENGELOLAAN UTANG	0	0	0	0	0	0
88	999.03	INVESTASI PEMERINTAH	0	0	0	0	0	0
89	999.04	PENERUSAN PINJAMAN	0	0	0	0	0	0
90	999.05	TRANSFER KE DAERAH	0	0	0	0	0	0
91	999.07	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0
92	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0
93	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	0	0	0	0	0	0
94	999.992	DIREKTORAT PKN (SAKUN)	0	0	0	0	0	0
95	999.999	BADAN LAINNYA	0	0	0	0	0	0
		JUMLAH BAGIAN LANCAR TP/TGR DARI BUN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		JUMLAH BAGIAN LANCAR TP/TGR DARI K/L DAN BUN	**182.565.935.471**	**(147.355.100.944)**	**35.210.834.527**	**142.483.141.891**	**(73.250.874.352)**	**69.232.267.539**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN 18
Persediaan
per 31 Desember 2014

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 18

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2014 *AUDITED*	31 DESEMBER 2013 *AUDITED*
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	7.477.311.053	1.849.704.103
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	15.481.505.141	17.309.111.644
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	16.030.405.208	19.150.915.144
4	005	MAHKAMAH AGUNG	9.629.909.266	9.497.572.576
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	159.755.584.958	144.586.201.387
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	255.384.000.530	213.437.412.312
7	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	1.541.954.817	1.147.008.817
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	460.529.171.447	398.277.629.566
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	46.325.175.117	46.785.908.919
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	46.389.306.258.957	44.795.552.443.588
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	382.021.882.417	426.696.399.246
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	301.456.140.740	282.569.446.845
13	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN	1.281.018.764	1.206.628.616
14	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	1.358.149.475.874	1.512.893.144.452
15	018	BLU KEMENTERIAN PERTANIAN	34.941.102.320	32.289.170.851
16	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	11.258.086.340	20.402.006.545
17	019	BLU KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	0	2.970.488.338
18	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	289.379.986.206	1.231.516.194.138
19	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	4.179.931.197.304	264.005.547.156
20	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	4.051.904.599	2.931.815.998
21	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	236.912.705.219	239.651.661.055
22	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	272.198.127.188	205.520.281.436
23	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	1.021.654.569.937	884.762.608.877
24	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	618.604.502.621	467.370.571.744
25	025	KEMENTERIAN AGAMA	59.664.688.425	65.972.592.018
26	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	9.435.782.343	8.411.534.879
27	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	114.624.224.098	75.616.035.975
28	027	KEMENTERIAN SOSIAL	271.285.733.683	313.879.721.108
29	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	88.417.513.334	94.971.603.310
30	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	172.151.736.850	439.780.151.946
31	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	534.844.970.397	485.483.279.585
32	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KE	244.197.832	164.817.852
33	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	988.071.168	868.405.239
34	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	521.860.289	1.255.031.262
35	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	66.347.176.487	125.514.311.471
36	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	1.257.190.732	1.602.538.489
37	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	6.514.206.800	20.475.249.889
38	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	27.027.370.377	34.117.226.773
39	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	1.579.695.165	301.287.033
40	044	BLU KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	1.225.976.015	1.442.227.575
41	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.004.014.588	1.573.109.228
42	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	981.106.506	1.079.068.742
43	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	2.733.509.024	2.689.082.917
44	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	3.876.575.968	3.982.636.307
45	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	35.982.100	10.600.900
46	054	BADAN PUSAT STATISTIK	20.192.113.805	18.195.228.568
47	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	2.141.564.526	2.931.245.793
48	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	57.653.470.357	56.008.738.902

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 18

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2014 *AUDITED*	31 DESEMBER 2013 *AUDITED*
49	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	1.805.023.161	2.664.585.510
50	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	246.883.314.010	65.307.775.451
51	059	BLU KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.130.047.500	11.169.097.500
52	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	2.919.334.738.880	2.104.874.712.112
53	060	BLU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	30.451.784.451	-
54	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	128.975.984.428	124.387.132.591
55	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	215.243.968	36.329.936
56	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	8.699.713.877	12.624.997.621
57	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	19.141.508.294	23.452.140.836
58	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	517.663.904.806	262.268.700
59	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	483.034.071.547	534.233.212.363
60	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	292.905.593	184.318.108
61	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	22.807.481.020	31.525.309.405
62	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	385.139.523.401	483.295.950.395
63	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	1.103.853.306	1.600.552.858
64	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	1.018.163.928	1.367.883.281
65	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	7.201.367.466	9.055.107.211
66	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	50.433.333.760	57.070.939.693
67	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	10.288.251.924	10.827.308.661
68	081	BLU BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	3.531.120	2.780.250
69	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	43.701.664.122	45.320.864.533
70	082	BLU LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	434.990.039	115.001.076
71	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	129.260.410.097	84.774.203.857
72	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	223.175.640	220.628.744
73	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	1.081.121.507	869.421.320
74	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	2.389.779.732	2.340.555.985
75	087	ARSIP NASIONAL	460.858.056	288.606.170
76	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	12.982.767.602	13.502.824.570
77	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	7.345.210.452	7.185.610.369
78	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	8.259.474.482	13.396.063.435
79	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	2.904.366.696.255	2.439.007.375.933
80	091	BLU KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	6.086.600	6.087.250
81	093	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	55.642.675.796	173.037.327.947
82	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	27.787.711.285	29.716.663.603
83	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	2.061.211.534	3.190.047.187
84	100	KOMISI YUDISIAL	449.248.534	547.186.590
85	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	211.470.141.710	308.474.413.427
86	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	61.682.883.531	51.531.847.528
87	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	404.631.429	274.385.186
88	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	1.319.212.570	1.533.027.369
89	107	BADAN SAR NASIONAL	36.946.088.259	30.852.497.323
90	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	542.679.021	828.308.728
91	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	91.177.200.116	71.154.439
92	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	38.134.250	132.580.525
93	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	1.801.853.557	1.910.919.579
94	112	BLU BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	8.334.078.393	11.056.561.897
95	113	BADAN PENANGGULANGAN TERORISME	13.974.730	12.291.053

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 18

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2014 *AUDITED*	31 DESEMBER 2013 *AUDITED*
96	114	SEKRETARIAT KABINET	1.918.105.698	1.773.758.802
97	115	BADAN PENGAWAS PEMILU RI	499.448.867	133.954.620
98	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	7.143.561.402	7.002.557.226
99	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	7.579.442.737	10.971.302.106
100	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	85.142.025	3.321.624.103
JUMLAH PERSEDIAAN DARI K/L			**65.991.084.113.360**	**59.696.047.654.076**

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 18

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2014 *AUDITED*	31 DESEMBER 2013 *AUDITED*
101	999.01	PEMBAYARAN CICILAN POKOK UTANG	0	0
102	999.03	INVESTASI PEMERINTAH	0	0
103	999.04	RDI + DIT. SMI	0	0
104	999.05	DJPK	0	0
105	999.07	BELANJA SUBSIDI	0	0
106	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	1.609.269.559.327	3.509.204.311.133
107	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	0	0
108	999.992	DIREKTORAT PKN (SAKUN)	0	0
109	999.999	BADAN LAINNYA	0	0
JUMLAH PERSEDIAAN DARI BUN			**1.609.269.559.327**	**3.509.204.311.133**
JUMLAH PERSEDIAAN DARI K/L DAN BUN			**67.600.353.672.687**	**63.205.251.965.209**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN 19

Ikhtisar Laporan Keuangan BUMN

per 31 Desember 2014

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 19.A

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 (AUDITED)

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	OPINI	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
1	PT Perusahaan Pengelola Aset	Unaudited		39.678,00													
2	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Audited	WTP	1.556.744						1.687....							
3	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Audited	WTP														
4	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Audited	WTP														
5	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Audited	WTP														
6	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Audited	WTP	16.619													
7	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Audited	WTP														
8	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Audited	WTP														
9	PT Pelindo Multi Terminal	Audited	WTP														
10	PT Pelindo Solusi Logistik	Audited	WTP														
11	PT Pelindo Solusi Logistik 1	Audited	WTP														
12	PT Pelindo Solusi Logistik 2	Audited	WTP														
13	PT Pelindo Solusi Logistik 3	Audited	WTP														
14	PT Pelindo Solusi Logistik 4	Audited	WTP														
15	PT Pelindo Terminal Petikemas	Audited	WTP														
16	PT Pelindo Terminal Petikemas	Audited	WTP														
17	PT Pelindo Terminal Petikemas	Audited	WTP														
18	PT Pelindo Terminal Petikemas	Audited	WTP														
19	PT Pelindo Terminal Petikemas	Audited	WTP														
20	PT Pelindo Terminal Petikemas	Audited	WTP														
21	PT Pelindo Terminal Petikemas	Audited	WTP														
22	PT Pelindo Terminal Petikemas	Audited	WTP														
23	PT Pelindo Terminal Petikemas	Audited	WTP														
24	PT Pelindo Terminal Petikemas	Audited	WTP														
25	PT Pelindo Terminal Petikemas	Audited	WTP														
26	PT Pelindo Terminal Petikemas	Audited	WTP														
27	PT Pelindo Terminal Petikemas	Audited	WTP														

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 19.A

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 (AUDITED)

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	OPINI	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
1	PT Perusahaan Pengelola Aset	Unaudited															
2	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Audited	WTP														
3	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Audited	WTP														
4	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Audited	WTP														
5	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Audited	WTP														
6	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Audited	WTP														
7	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Audited	WTP														
8	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Audited	WTP														
9	PT Pelindo Multi Terminal	Audited	WTP														
10	PT Pelindo Solusi Logistik	Audited	WTP														
11	PT Pelindo Solusi Logistik 1	Audited	WTP														
12	PT Pelindo Solusi Logistik 2	Audited	WTP														
13	PT Pelindo Solusi Logistik 3	Audited	WTP														
14	PT Pelindo Solusi Logistik 4	Audited	WTP														
15	PT Pelindo Terminal Petikemas	Audited	WTP														
16	PT Pelindo Terminal Petikemas	Audited	WTP														
17	PT Pelindo Terminal Petikemas	Audited	WTP														
18	PT Pelindo Terminal Petikemas	Audited	WTP														
19	PT Pelindo Terminal Petikemas	Audited	WTP														
20	PT Pelindo Terminal Petikemas	Audited	WTP														
21	PT Pelindo Terminal Petikemas	Audited	WTP														
22	PT Pelindo Terminal Petikemas	Audited	WTP														
23	PT Pelindo Terminal Petikemas	Audited	WTP														
24	PT Pelindo Terminal Petikemas	Audited	WTP														
25	PT Pelindo Terminal Petikemas	Audited	WTP														
26	PT Pelindo Terminal Petikemas	Audited	WTP														
27	PT Pelindo Terminal Petikemas	Audited	WTP														

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 19.A

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 (AUDITED)

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	OPINI	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
[illegible]																	
[illegible]																	
[illegible]																	

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED)

LAMPIRAN 19.B

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2014 (AUDITED)

(dalam/dalam rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	Opini	KESEHATAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DAITRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGA N NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
1	PT Perkebunan Nusantara III	Unaudited 2014		Sehat AA	16.101.526	51.346.962	67.448.488	20.123.549	25.936.676	46.060.225	13.626.564	0	0	-8.278	6.726.934	20.347.220	1.550.115	21.897.335	100%	20.347.220
2	Perum Perhutani	Audited 2014	wtp 4 feb 2015	Sehat AAA	2.683.077	1.456.427	4.139.504	1.017.744	432.469	1.450.212	1.882.440	10.092	-	1.224.762	(427.370)	2.689.932	(640)	2.689.292	100%	2.689.932
3	PT Rajawali Nusantara Indonesia	Audited 2014	wtp 20 feb 2015	Kurang Sehat BBB	3.396.689	3.734.746	7.131.435	2.827.583	5.955.038	8.782.625	352.425	-	-	897.938	(201.732)	948.631	277.756	1.226.387	100%	948.631
4	PT Perikanan Nusantara	Audited 2014	wtp 20 feb 2014	Sehat A	43.397	291.344	334.741	10.342	136.617	146.959	121.140	-	-	-	66.642	187.782	-	187.782	100%	187.782
5	Perum Perikanan Indonesia	Audited 2014	wtp 6 feb 2015	Sehat AA	74.395	55.932	130.327	20.186	33.714	53.900	24.436	16.936	-	-	34.993	76.427	-	76.427	100%	76.427
6	Perum Bulog	Audited 2014	wtp 13 feb 2015	Kurang Sehat BBB	15.260.831	5.205.094	20.465.725	15.989.031	43.855	16.032.886	6.847.136	-	675.251	-	(3.099.152)	4.423.236	9.603	4.432.839	100%	4.423.236
7	PT Sang Hyang Seri	Unaudited 2014			419.232	179.622	598.754	9.26.264	795.939	1.722.203	134.000	-	-	140.697	(1.397.540)	(1.123.449)	-	(1.123.449)	100%	(1.123.449)
8	PT Pertani	Unaudited 2014			344.203	421.564	765.767	332.517	722.419	1.054.936	51.315	35.952	0	0	-376.482	(289.193)	0	(289.193)	100%	(289.193)
9	PT Pupuk Indonesia	Audited 2014	wtp 27 mar 2015	Sehat AA	44.929.159	31.458.163	75.967.312	24.790.979	22.666.049	47.455.728	12.099.968	-	-	65.181	15.326.179	20.290.268	221.316	29.511.584	100%	20.290.268
10	Perum Jasa Tirta I	Audited 2014	wtp 6 feb 2015	Sehat AA	255.645	143.060	398.704	40.223	9.235	49.458	31.781	-	-	-	317.545	349.246	-	349.246	100%	349.246
11	Perum Jasa Tirta II	Audited 2014	wtp 26 feb 2015	Sehat AA	359.145	401.436	759.582	99.141	64.114	162.255	164.546	-	-	346.279	86.962	597.789	(462)	597.326	100%	597.789
12	PT Antam Tbk	Audited 2014	wtp 3 maret 2015	Tidak Ada Data	6.343.110	15.701.052	22.044.202	3.862.917	6.251.724	10.114.641	953.846	29.818	-	65.102	10.890.770	11.929.536	28	11.929.564	65%	7.754.106
13	PT Timah Tbk	Audited 2014	wtp 23 feb 2015	Sehat A	6.552.176	3.200.301	9.752.477	3.512.730	631.505	4.144.235	372.380	66	-	48.997	5.186.704	5.608.144	98	5.608.242	65%	3.645.294
14	PT Bukit Asam Tbk	Audited 2014	wtp 23 feb 2015	Sehat AA	7.416.895	7.306.218	14.812.023	3.674.129	2.567.052	6.141.181	1.152.086	(1.868.927)	-	65.079	9.205.393	8.553.611	117.231	8.670.842	69%	5.893.866
15	PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM)*	Audited 2014	wtp 24 feb 2015	Tidak Ada Data	8.941.613	4.619.770	13.561.383	1.112.019	213.340	1.325.359	381.198	-	-	11.069.724	785.303	12.236.025	-	12.236.025	100%	12.236.025
16	PT Pertamina	Audited 2014	wtp 13 feb 2015	Sehat AA	253.489.272	372.580.053	626.079.325	166.970.690	234.741.288	401.711.868	83.080.697	47.160	12.453	4.375.241	134.317.330	221.842.881	2.524.586	224.367.467	100%	221.842.881
17	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Audited 2014	wtp 27 feb 2015	Sehat AAA	23.140.643	54.172.232	77.320.775	13.567.272	26.892.914	40.460.187	2.424.153	1.953.121	-	1.218.981	28.828.484	34.424.736	2.435.852	36.860.588	57%	19.611.772
18	PT Energy Management Indonesia	Unaudited 2014			13.732	141.957	55.725	44.650	2.291	46.900	9.100	6.455	-	3.379	(10.106)	8.029	0	8.029	100%	8.029
19	PT Industri Nuklir Indonesia	Unaudited 2014		Kurang Sehat B	18.155	9.478	27.633	25.160	3.616	28.784	4.456	-	-	-	(5.607)	(1.151)	-	(1.151)	100%	(1.151)
20	PT Semen Indonesia Tbk	Audited 2014	wtp 13 feb 2015	Tidak Ada Data	11.640.645	22.666.121	34.314.666	5.273.265	4.038.946	9.312.214	693.162	1.468.298	-	380.470	21.630.157	24.042.098	960.414	25.002.452	51%	12.263.643
21	PT Semen Baturaja	Audited 2014	wtp 13 feb 2015	Sehat AA	2.235.749	680.692	2.926.361	1.757.452	29.365	209.114	983.768	1.034.032	-	-	699.447	2.717.247	-	2.717.247	76%	2.071.629
22	PT Semen Kupang	Audited 2014	wtp 20 feb 2015	Tidak Ada Data	17.442	596.826	614.268	20.717	604.937	625.654	133.713	-	-	5.305	(150.405)	(11.386)	-	(11.386)	61%	(7.000)
23	PT Djasamarga Indonesia	Audited 2014	wtp 2 mar 2015	Sehat A	6.905.992	2.711.753	9.617.713	3.801.157	2.123.417	6.024.574	6.388.123	-	-	13.196.927	(16.911.911)	3.693.139	-	3.693.139	100%	3.693.139
24	PT PAL Indonesia	Audited 2014	wtp 2 maret 2015	Kurang Sehat BB	2.600.283	1.670.336	4.560.541	1.042.265	3.116.197	5.050.403	2.350.561	12.455	-	27.855	(2.915.790)	(409.022)	(40)	(409.062)	100%	(409.022)
25	PT Pindad	Audited 2014	wtp 16 feb 2015	Sehat A	2.473.201	398.390	2.871.591	1.765.476	295.814	2.061.290	667.542	-	-	90.341	52.416	810.298	3	810.301	100%	810.298
26	PT Dahana	Audited 2014	wtp 18 feb 2015	Sehat AA	630.435	508.927	1.139.362	526.977	59.603	584.980	250.000	6.398	-	40.141	234.822	501.361	23.021	524.382	100%	501.361
27	PT Krakatau Steel Tbk	Audited 2014	wtp 25 feb 2015	Kurang Sehat BBB	13.169.270	19.155.112	32.324.382	17.581.390	3.648.154	21.229.544	7.887.500	1.446.312	-	(723.274)	2.321.299	10.931.837	163.001	11.094.838	80%	8.745.469
28	PT INKA	Audited 2014	wtp 20 feb 2015	Sehat A	1.010.404	535.654	1.546.058	1.134.086	163.414	1.297.499	251.843	-	-	295.351	(305.616)	241.578	6.961	248.559	100%	241.578
29	PT Barata Indonesia	Audited 2014	wtp 25 feb 2015	Kurang Sehat BB	597.879	257.127	855.000	626.896	160.849	787.705	1.20.203	15.000	-	129.370	(206.278)	67.296	-	67.296	100%	67.296
30	PT Bisma Bisma Indra	Audited 2014	wtp 25 feb 2015	Sehat BB	209.437	95.887	304.324	317.027	19.339	336.366	295.113	0	-	55.399	(282.481)	(31.969)	(74)	(32.042)	100%	(31.969)
31	PT Dok dan Kodja Bahari	Audited 2014	wtp 27 feb 2015	Kurang Sehat B	706.130	621.144	1.327.275	3.159.910	196.689	3.356.600	76.600	66	-	-	(2.106.009)	(2.029.325)	-	(2.029.325)	99.41%	(2.017.324)
32	PT Dok dan Perkapalan Surabaya	Audited 2014	wtp 23 mar 2015	Sehat AAA	147.133	173.272	320.406	446.195	279.927	726.082	405.536	422	-	34.393	(495.813)	(410.483)	4.857	(405.677)	100%	(410.483)
33	PT Industri Kapal Indonesia	Audited 2014	wtp 23 feb 2015	Sehat AA	113.871	383.139	497.010	77.052	257.755	334.808	256.694	-	-	336	(94.829)	162.202	-	162.202	100%	162.202
34	PT Industri Sandang Nusantara	Audited 2014	wtp 27 feb 2015	Kurang Sehat B	19.315	602.624	621.939	386.465	30.694	417.160	190.870	-	-	394.193	(388.304)	204.879	-	204.879	100%	204.879
35	PT Garam	Unaudited 2014			207.790	377.374	585.124	144.248	3.640	148.084	400.000	-100.000	0	-9.222	21.133	311.911	0	311.911	100%	311.911
36	PT Primissima	Audited 2014	wtp 3 feb 2015	Sehat AAA	50.286	43.407	93.693	92.850	5.787	98.436	13.000	121	-	38.281	(56.145)	(4.743)	-	(4.743)	53%	(2.504)
37	PT Iglas	Audited 2014	wtp 13 mar 2015	Tidak Sehat CCC	56.425	201.017	257.442	653.249	133.494	786.744	47.697	94.583	-	-	(670.891)	(529.302)	-	(529.302)	64%	(337.800)

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED)

LAMPIRAN 19.B

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2014 (AUDITED)

(dalam/dalam rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	Opini	KESEHATAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DAITRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGA N NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
38	PT Industri Soda Indonesia (dalam Likuidasi)																			
39	Perum Peruri	Audited 2014	wtp 18 feb 2015	Sehat AA	1.492.994	1.763.571	3.256.565	730.479	802.615	1.523.094	363.573	(64.059)	-		1.424.586	1.724.100	9.370	1.733.471	100%	1.724.100
40	PT Balai Pustaka	Audited 2014	wtp 30 mar 2015	Kurang Sehat BBB	96.352	15.039	111.401	140.916	3.081	143.997	14.400	-	-	15.598	(62.695)	(32.696)	-	(32.696)	100%	(32.696)
41	Perum PNRI	Unaudited 2014			260.265	89.548	349.823	159.068	27.238	186.306	43.749	0	497	-317	119.586	162.515	0	162.515	100%	162.515
42	PT Kertas Leces	Unaudited 2014			53.983	1.112.461	1.166.444	970.660	1.013.705	1.984.371	415.673	1.976	0	507.117	-1.742.068	(817.892)	0	(817.892)	100%	(817.892)
43	PT Kertas Kraft Aceh	Unaudited 2014			179.083	474.787	653.870	1.168.079	141.812	1.309.690	798.984	0	0	0	-1.454.814	(655.830)	0	(655.830)	97%	(633.955)
44	PT Kertas Gowa (proses likuidasi sejak 1996)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
45	PT Indofarma Tbk	Audited 2014	wtp 20 feb 2015	Tidak Ada Data	782.880	465.456	1.248.343	600.566	55.814	656.380	309.927	75.100	-	203.344	3.587	591.958	5	591.963	81%	477.473
46	PT Kimia Farma Tbk	Audited 2014	wtp 20 feb 2015	Sehat AA	2.040.431	927.754	2.968.185	854.812	302.229	1.157.041	595.490	53.664	-	-	1.180.149	1.789.213	21.931	1.811.144	90%	1.610.828
47	PT Bio Farma	Audited 2014	wtp 27 feb 2015	Sehat AA	1.824.839	1.219.141	3.043.780	339.660	87.586	427.254	1.250.000	0	-	377	1.366.149	2.616.526	-	2.616.526	100%	2.616.526
48	PT Telkom Tbk	Audited 2014	wtp 27 feb 2015	Tidak Ada Data	33.762.690	107.133.000	140.895.000	31.786.000	22.984.000	54.770.000	5.040.000	2.899.000	-	(3.455.000)	63.323.000	67.807.000	18.318.000	86.125.000	53%	35.639.359
49	PT INTI	Audited 2014	wtp 17 feb 2015	Kurang Sehat BBB	1.520.342	184.527	1.704.870	1.460.139	68.406	1.528.545	350.000	-	-	80.444	(266.960)	172.535	3.790	176.325	100%	172.535
50	PT LEN Industri	Audited 2014	wtp 25 feb 2015	Sehat AA	2.009.193	256.435	2.265.631	1.793.357	90.755	1.884.062	175.600	0	-	84.165	117.492	376.658	4.911	381.569	100%	376.658
51	Perum LKBN Antara	Audited 2014	wtp 23 feb 2015	Sehat AA	72.930	46.101	119.030	45.881	13.490	59.371	9.116	25.928	-	-	24.654	59.698	(31)	59.668	100%	59.698
52	Perum Produksi Film Negara	Audited 2014	wtp 11 maret 2015	Tidak Ada Data	604	28.743	29.346	11.246	-	11.246	40.000	-	14.904	1.879	(39.684)	18.096	-	18.096	100%	18.096
53	PT Perusahaan Listrik Negara	Audited 2014	wtp 27 feb 2015	Sehat AAA	85.423.738	518.235.453	603.659.191	87.568.277	351.429.689	438.997.965	46.197.380	-	49.889.062	2.607.831	65.922.812	164.617.086	54.141	164.671.226	100%	164.617.086
54	PT Pelabuhan Indonesia I	Audited 2014	wtp 26 jan 2015	Sehat AA	1.478.388	3.377.360	4.855.668	727.173	947.069	1.674.232	1.700.000	-	538.813	-	942.455	3.181.268	167	3.181.435	100%	3.181.268
55	PT Pelabuhan Indonesia II	Audited 2014	wtp 27 feb 2015	Tidak Ada Data	4.779.855	16.903.133	21.682.988	3.081.803	8.713.799	11.795.602	1.444.629	(290.713)	-	265.635	8.351.622	9.770.514	116.824	9.887.338	100%	9.770.514
56	PT Pelabuhan Indonesia III	Audited 2014	wtp 30 jan 2015	Sehat AA	6.495.478	10.125.597	16.621.075	2.188.024	7.257.364	9.425.388	1.018.953	22.500	-	-	5.129.684	6.171.137	1.024.550	7.195.687	100%	6.171.137
57	PT Pelabuhan Indonesia IV	Audited 2014	wtp 23 feb 2015	Sehat AA	974.611	3.142.031	4.116.642	593.668	562.919	1.156.587	912.132	199.962	(4.838)	1.837.071	2.944.517	15.537	2.960.055	100%	2.944.517
58	PT Angkasa Pura I	Audited 2014	wtp 25 feb 2015	Sehat AA	2.636.161	13.154.165	15.830.626	2.841.769	2.569.283	5.430.051	3.489.245	2.926.186	255.097	184.087	3.545.735	10.399.319	1.456	10.400.775	100%	10.399.319
59	PT Angkasa Pura II	Audited 2014	wtp 30 jan 2015	Sehat AAA	2.030.420	13.269.418	15.307.838	1.386.169	726.723	2.111.892	5.000.000	81.100	2.500.420	(119.192)	5.733.617	13.195.946	1	13.195.946	100%	13.195.946
60	PT Kereta Api Indonesia	Audited 2014	wtp 17 feb 2015	Sehat AA	3.806.315	11.890.493	15.696.808	5.243.164	4.736.096	9.969.220	3.296.547	-	-	968	2.332.036	5.629.551	98.036	5.727.588	100%	5.629.551
61	Perum PPD	Audited 2014	wtp 16 feb 2015	Kurang Sehat BBB	30.051	27.739	57.800	84.285	135.190	219.475	231.769	168.121	-	-9.792	(649.315)	(161.675)	-	(161.675)	100%	(161.675)
62	Perum DAMRI	Audited 2014	wtp 12 feb 2015	Sehat AA	147.290	1.044.218	1.191.508	227.105	382.304	609.413	19.760	289.051	56.830	2.288	214.245	582.095	-	582.095	100%	582.095
63	PT Merpati Nusantara Airlines	Audited 2013			219.580	2.367.572	2.586.080	5.196.046	2.710.415	7.906.460	1.764.596	-	-	2	(7.283.938)	(5.319.380)	-	(5.319.380)	97%	(5.159.389)
64	PT Garuda Indonesia, Tbk	Audited 2014	wtp 18 mar 2015	Tidak Ada Data	10.082.839	28.491.345	38.574.151	15.180.965	12.001.342	27.170.247	11.973.607	(387.646)	-	2.916.656	(3.157.645)	11.244.996	158.908	11.403.904	51%	5.816.000
65	PT PELNI	Audited 2014	wtp 27 feb 2015	Sehat A	1.339.481	3.991.729	5.331.210	862.624	366.612	1.229.236	6.566.092	144	-	55.930	(2.519.534)	4.101.232	741	4.101.974	100%	4.101.232
66	PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan	Audited 2014	wtp 17 feb 2015	Sehat A	955.659	2.448.426	3.404.083	259.975	189.041	449.017	1.989.250	7.741	230.290	583.896	169.890	2.958.067	-	2.958.067	100%	2.958.067
67	PT Djakarta Lloyd	Unaudited 2014			76.963	747.869	824.952	243.063	638.368	781.461	189.645	0	667.188	437.090	(1.242.236)	43.492	0	43.492	100%	43.492
68	PT Amarta Karya	Audited 2014	wtp 23 apr 2015	Sehat AA	441.934	19.600	461.533	360.451	50.870	411.321	11.250	886	-	2.145	35.932	50.212	-	50.212	100%	50.212
69	PT Adhi Karya Tbk	Audited 2014	wtp 20 feb 2015	Sehat A	9.494.299	974.683	10.468.982	7.069.704	1.637.635	8.707.338	180.132	50.004	-	4.869	1.509.579	1.744.584	6.959	1.751.543	51%	889.736
70	PT Istaka Karya	Unaudited 2014			102.048	140.267	242.912	188.267	1.924	190.191	50.000	746.836	0	0	-744.117	52.721	0	52.721	100%	52.721
71	PT Pembangunan Perumahan Tbk	Audited 2014	wtp 20 feb 2015	Tidak Ada Data	13.545.180	1.066.684	14.611.865	9.830.497	2.383.098	12.221.595	464.244	462.018	-	-	1.442.999	2.389.221	1.050	2.390.270	51%	1.218.903
72	PT Hutama Karya	Audited 2014	wtp 27 feb 2015	Sehat AA	5.343.025	650.099	5.993.123	3.676.882	1.326.160	5.002.239	500.000	-	-	-	489.942	989.942	941	990.884	100%	989.942
73	PT Wijaya Karya Tbk	Audited 2014	wtp 23 feb 2015	Sehat AAA	9.514.447	6.400.715	15.915.162	6.478.042	2.460.361	10.938.403	614.923	705.987	-	1.150.776	1.518.306	3.989.690	989.168	4.978.858	65%	2.595.228
74	Perum Perumnas	Audited 2014	wtp 24 feb 2015	Sehat AAA	3.294.846	335.390	3.630.036	1.826.184	637.506	2.663.690	475.969	-	-	341.030	134.627	951.636	14.711	966.346	100%	951.636
75	PT Brantas Abipraya	Audited 2014	wtp 13 mar 2015	Sehat AA	1.253.490	382.665	1.636.121	971.689	289.724	1.261.413	161.556	-	-	101.584	109.301	372.440	2.268	374.708	100%	372.440

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED)

LAMPIRAN 19.B

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2014 (AUDITED)

(dalam/dalam rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	Opini	KESEHATAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DAITRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGA N NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
76	PT Waskita Karya, Tbk	Audited 2014	wtp 7 feb 2015	Sehat AA	10.524.189	2.017.873	12.542.041	7.726.154	1.966.058	9.693.211	972.750	880.789	-	35.407	954.024	2.842.970	5.860	2.848.830	67%	1.914.172
77	PT Bina Karya	Audited 2014	wtp 17 Mar 2015	Sehat A	40.429	25.692	66.121	28.189	14.887	43.095	2.725	-	-	-	20.330	23.066	-	23.066	100%	23.066
78	PT Indah Karya	Audited 2014	wtp 31 Mar 2015	Sehat A	31.451	12.143	43.594	26.676	7.751	34.447	7.000	-	-	2.126	23	9.147	-	9.147	100%	9.147
79	PT Yodya Karya	Audited 2014	wtp 9 maret 2015	Sehat A	126.945	5.316	132.260	78.534	4.543	83.078	8.693	-	-	30.453	10.729	49.183	-	49.183	100%	49.183
80	PT Indra Karya	Audited 2014	wtp 18 mar 2015	Kurang Sehat BB	40.580	15.639	64.199	46.463	14.495	60.948	2.000	-	-	575	677	3.251	-	3.251	100%	3.251
81	PT Virama Karya	Audited 2014	wtp 25 feb 2015	Sehat AAA	104.202	9.114	113.417	52.840	21.766	74.613	10.000	-	-	9.126	19.679	38.804	-	38.804	100%	38.804
82	PT Kawasan Berikat Nusantara	Audited 2014	wtp 31 Mar 2015	Sehat AA	536.451	1.235.550	1.772.001	459.161	165.412	624.573	363.945	111.968	-	254	671.262	1.147.428	-	1.147.428	73%	839.344
83	PT Kawasan Industri Makassar	Audited 2014	wtp 24 feb 2015	Kurang Sehat BBB	60.924	57.576	108.493	10.946	2.496	13.443	40.000	-	-	49.396	5.666	95.056	-	95.056	60%	57.033
84	PT Kawasan Industri Medan	Audited 2014	wtp 12 mar 2015	Sehat AA	210.284	103.172	313.376	47.319	326	47.719	150.000	-	-	-	115.657	265.657	-	265.657	60%	159.394
85	PT Kawasan Industri Wijayakusuma	Audited 2014	wtp 10 feb 2015	Sehat AA	72.213	75.922	148.135	20.031	14.767	34.798	25.863	-	-	46.713	40.761	113.336	-	113.336	51%	57.904
86	PT PDP Belawan	Audited 2014	wtp 11 feb 2015	Kurang Sehat BBB	40.204	46.378	86.582	13.045	29.418	42.463	19.000	-	-	29.893	(4.773)	44.120	-	44.120	100%	44.120
87	PT Varuna Tirta Prakasya	Audited 2014	wtp 6 mar 2015	Kurang Sehat BBB	122.694	25.646	147.740	101.411	36.808	138.219	11.000	-	-	3.149	(4.628)	9.521	-	9.521	100%	9.521
88	PT Bhanda Ghara Reksa	Audited 2014	wtp 27 feb 2015	Sehat AAA	301.464	168.819	470.283	106.092	42.835	148.927	140.000	-	-	127.878	53.479	321.356	-	321.356	100%	321.356
89	PT Bank Mandiri Tbk	Audited 2014	wtp 2 feb 2015	Sangat Sehat	445.926.689	409.112.984	855.039.673	76.873.233	673.321.878	750.195.111	11.666.667	17.316.192	-	(367.723)	74.042.745	102.657.881	2.186.681	104.844.562	60%	61.594.729
90	PT Bank BRI Tbk	Audited 2014	wtp 16 jan 2015	Sangat Sehat			801.965.021			764.217.692	6.167.291	2.773.699	-	(142.430)	28.761.689	37.560.417	177.012	97.737.429	57%	55.365.539
91	PT Bank BNI Tbk	Audited 2014	wtp 22 jan 2015	Sehat	-	-	416.573.708	-	-	366.562.400	9.054.897	14.568.468	-	370.339	35.078.169	59.071.773	1.949.535	61.021.308	60%	35.443.064
92	PT Bank BTN Tbk	Audited 2014	wtp 23 feb 2015	Tidak Ada Data			144.575.961			132.369.555	5.283.848	2.028.136	-	(80.930)	4.974.952	12.206.406		12.206.406	60%	7.339.712
93	PT JAMSARAYA	Audited 2014	wtp 9 feb 2015	Sehat AA			28.753.870			18.372.099	235.000	-	-	1.484.662	661.669	2.381.330	442	2.381.772	100%	2.381.330
94	PT ASABRI	Audited 2014	wtp 30 jan 2015	Sehat AA	2.931.537	9.054.651	11.986.188	274.904	10.241.244	10.516.149	200.000	-	-	1.022.811	247.228	1.470.039	-	1.470.039	100%	1.470.039
95	PT TASPEN	Audited 2014	wtp 11 feb 2015	Sehat AA	-	-	161.329.660	-	-	147.206.190	100.000	-	-	(769.695)	14.777.987	14.118.392	4.968	14.123.360	100%	14.118.392
96	PT JASINDO	Audited 2014	wtp 19 Mar 2015	Sehat AA			11.296.059			9.360.893	425.000	-	-	1.194.402	409.737	2.029.139	6.029	2.035.170	100%	2.029.139
97	PT RUI	Audited 2014	wtp 9 feb 2015	Tidak Sehat CCC	-	-	3.433.846	-	-	3.069.644	40.000	-	-	54.729	269.465	364.194	8	364.202	100%	364.194
98	PT Jasa Raharja	Audited 2014	wtp 26 jan 2015	Sehat AA			10.883.948			3.139.908	2.500.000	-	-	(189.362)	5.313.727	7.705.366	38.674	7.744.039	100%	7.705.366
99	PT ASEI-RI)	Audited 2014	wtp 10 mar 2015	Kurang Sehat BBB	-	-	2.766.072	-	-	2.045.605	300.000	-	-	8.695	427.962	720.267	-	720.267	100%	720.267
100	PT ASKRINDO	Audited 2014	wtp 14 jan 2015	Sehat AA			10.408.295			3.828.431	400.000	5.211.000	-		968.864	6.577.864	-	6.577.864	100%	6.577.864
101	Perum JAMKRINDO	Audited 2014	wtp 3 feb 2015	Sehat AA			10.020.645			1.603.393	6.630.733	-	-	1.114.387	664.139	8.417.239	13	8.417.252	100%	8.417.239
102	PT PPA	Audited 2014	wtp 18 feb 2015	Sehat AA	3.090.786	2.126.485	5.217.271	1.971.067	483.263	2.454.329	1.996.689	(305.768)	-	229.759	839.940	2.759.619	3.302	2.762.921	100%	2.759.619
103	PT Danareksa	Audited 2014	wtp 25 feb 2015	Sehat AAA			3.455.958			2.721.363	701.480	85.927	-	(15.095)	(37.831)	734.482	114	734.596	100%	734.482
104	PT Permodalan Nasional Madani	Audited 2014	wtp 23 feb 2015	Tidak Ada Data			5.273.112			4.683.178	300.000	-	-	272	362.395	662.358	7.576	669.934	100%	662.358
105	PT Pegadaian	Audited 2014	wtp 25 feb 2015	Sehat AA	30.320.787	5.024.221	35.344.989	18.099.261	6.036.699	24.135.150	251.252	-	-	3.824.719	7.132.887	11.208.838	-	11.208.838	100%	11.208.838
106	PT PANN	Unaudited 2014			-	-	3.429.974	-	-	6.597.445	45.997	192.068	-	86.890	(3.492.386)	(3.167.470)	-	(3.167.470)	93%	(2.945.746)
107	PT Bahana PUI	Audited 2014	wtp 29

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 19.B

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2014 (AUDITED)

(dalam/ulisan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	Opini	KESEHATAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
114	PT TWC PIBR	Audited 2014	wtp 12 feb 2015	Sehat AAA	139.691	159.824	299.425	54.271	19.739	73.010	100.000		-	106	125.310	225.416	-	225.416	100%	225.416
115	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dh PT	Audited 2014	wtp 13 feb 2015	Sehat A	392.142	736.345	1.128.487	39.947	92.697	131.635	410.000	297.888	-	1.743	288.337	997.888	(1.035)	996.853	100%	997.888
116	PT Berdikari	Audited 2014	wtp 31 mar 2015	Kurang Sehat BB	483.580	150.803	634.390	437.496	70.251	507.746	75.000	-	-	77.377	(25.716)	126.661	(17)	126.644	100%	126.661
117	PT Jasa Marga Tbk	Audited 2014	wtp 29 jan 2015	Sehat AA	3.641.372	28.216.576	31.857.948	4.312.917	16.120.036	20.432.952	3.400.000	2.453.690	-	2.614	4.009.692	9.866.196	1.558.800	11.424.996	70%	8.906.337
118	PT Pos Indonesia	Audited 2014	wtp 23 feb 2015		3.653.956	1.366.847	5.019.803	3.384.622	559.121	3.943.743	455.023	-	-	-	651.936	1.106.959	(30.900)	1.076.060	100%	1.106.959
119	PT Kliring Berjangka Indonesia	Audited 2014	wtp 27 feb 2015	Tidak Sehat CCC	806.379	28.058	834.437	561.033	6.567	567.570	102.000	-	-	(1.126)	164.899	265.772	1.095	266.867	100%	265.772
120	PT Survai Utara Perkasa	Audited 2014	wtp 25 feb 2015		7.398	46.201	53.599	94.870	25.636	120.505	13.000	-	-	-	(79.996)	(66.996)	-	(66.996)	100%	(66.996)
121	Perum LPPNPI	Audited 2014	wtp 18 feb 2015	Sehat AA	2.087.331	989.385	3.076.716	636.864	17.113	653.977	97.953	605.314	975.506		743.966	2.422.739		2.422.739	100%	2.422.739
	TOTAL						4.579.887.270			3.488.812.284						1.055.931.819		1.091.458.941		861.720.046

LAMPIRAN 20

Daftar BPYBDS

per 31 Desember 2014

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 20

BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA (BPYBDS)
PER 31 DESEMBER 2014 (AUDITED)

(dalam rupiah)

No.	BUMN	STATUS DATA	31 DESEMBER 2013	MUTASI	31 DESEMBER 2014
1	PT GDE		2.006.135.598.753,75	0	2.006.135.598.753,75
2	PT ASDP		481.891.840.059	-251.601.845.909	230.289.994.150,00
3	PT PELINDO I		538.812.899.239,00	0	538.812.899.239,00
4	PT DJAKARTA LLOYD		667.188.771.346,05	0	667.188.771.346,05
5	PT ANGKASA PURA I		2.978.613.945.862	-2.723.517.239.739	255.096.706.122,60
6	PT PLN		40.166.761.933.551,00	9.722.299.917.225	49.889.061.850.776,00
7	PT KAI		0,00	0	0,00
8	PT PERTAMINA		12.452.878.178,53	0	12.452.878.178,53
9	PERUM BULOG		675.250.887.482,00	0	675.250.887.482,00
10	PERUM PFN		14.903.777.061,00	0	14.903.777.061,00
11	PERUM DAMRI		59.718.900.000	-2.888.749.995	56.830.150.005,00
12	PT PELINDO IV		199.952.304.000,00	0	199.952.304.000,00
13	PERUM NAVIGASI		0	975.506.099.662	975.506.099.662,00
14	PT ANGKASA PURA II		2.332.609.302.906	167.810.770.651	2.500.420.073.557,41
	JUMLAH		**50.134.293.038.439**	**7.887.608.951.895**	**58.021.901.990.333**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN 21
PMN pada Perusahaan Negara/Lembaga di Bawah Kemenkeu per 31 Desember 2014

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) — LAMPIRAN 21.A

PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DIBAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 (AUDITED)

(dalam jutaan rupiah)

NO	PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA	SUMBER	STATUS	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF
				1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8=(6-7)	9	10=(8-9)	11	12=(10-11)
1	LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA	Audited 2014		3.960.484	2.082.396	1.878.088	194.476	579.220	1.493.344	-	1.493.344	311.054	1.182.290	11.184	1.193.474
						-					-		-		-
2	PT. SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL	Audited 2014		671.976	47.805	624.170	3.110	-	627.280	405.253	222.027	48.728	173.299		173.299
						-					-		-		-
3	PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR	Audited 2014		597.750	313.795	283.954	32.947	431	316.470	-	316.470	71.805	244.664	(4.939)	239.726
						-					-		-		-
4	PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA	Audited 2014		529.992	106.172	423.820	-	-	423.820	-	423.820	77.776	346.043	(42.469)	303.574
						-			-		-		-		-
5	PT GEO DIPA ENERGI	Audited 2014		122.456	169.844	(47.387)	74.096	19.690	7.019	17.904	(10.885)	6.657	(17.543)	-	(17.543)
						-					-		-		-

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) — LAMPIRAN 21.B

PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DIBAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
NERACA PER 31 DESEMBER 2014 (AUDITED)

(dalam jutaan rupiah)

NO	PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA	SUMBER	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	ASET LAIN	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
			1	2	3	4=(1+2+3)	5	6	7=(5+6)	8	9	10	11	12	13=8+9+10+11+12	14	15=13+14	16	17=12*16
1	LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA	Audited 2014				60.499.364			50.052.169	7.873.950	-	-	(29.460)	8.102.249	10.447.745		10.447.745	100,00%	10.447.745
2	PT. SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL	Audited 2014	-	-	-	9.533.867	-	-	5.569.625	2.000.000	1.000.000	-	-	964.241	3.964.241	-	3.964.241	100,00%	3.964.241
3	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR	Audited 2014	-	-	-	9.169.684	-	-	4.384.069	4.000.000	-	-	32.825	752.790	4.785.615		4.785.615	100,00%	4.785.615
4	PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA	Audited 2014	-	-	-	5.521.811	-	-	70.246	4.500.000		-	(57.989)	1.009.554	5.451.565	-	5.451.565	100,00%	5.451.565
5	PT GEO DIPA ENERGI	Audited 2014	121.998	2.983.786	-	3.105.784	279.263	1.073.092	1.352.355	662.001	-	2.006.136	-	(914.708)	1.753.429		1.753.429	66,67%	1.837.656
						87.831.080									26.402.595				26.486.822

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN 22
PMN pada Non BUMN
per 31 Desember 2014

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 22.A

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 (AUDITED)

(dalam jutaan rupiah)

NO	PERUSAHAAN MINORITAS	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
				1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	9 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12=10+11	13	14
1	PT Asean Bintulu Fertilizer	Audited 2014		2.473.750	1.943.775	529.975	125.533	0	655.508	0	655.508	134.491	521.017	0	521.017		
2	PT Bank Bukopin	Audited 2014		8.038.260	7.094.521	943.739	27.382	0	971.121	0	971.121	244.313	726.808	15.675	742.483	724.447	740.122
3	PT Freeport Indonesia	SMT I / 2014		11.717.010	12.281.998	(564.988)	-510.438	9.343	(1.084.770)	0	(1.084.770)	0	(1.084.770)	-	(1.084.770)	699.855	699.855
4	PT Indosat	Audited 2014		24.085.101	23.412.169	672.932	142.803	345.100	470.635	2.406.536	(1.935.901)	-77.879	(1.858.022)	(3.871)	(1.861.893)	(1.987.170)	(1.991.041)
5	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Unaudit 2014	Sehat AA	84.709	56.568	28.141	46.026	0	74.167	0	74.167	0	74.167	-	74.167	102.987	102.987
6	PT Socfindo	Audited 2014	Tidak Ada Data	2.565.995	1.476.015	1.089.980	66.428	2.592	1.153.816	0	1.153.816	283.861	869.955	-	869.955		
7	PT Nindya Karya	Audited 2014	Sehat A	1.919.467	1.792.848	126.619	65.152	93.814	97.956	0	97.956	55.372	42.584	17.534	60.118	83.394	74.541
8	PT PANN Pembiayaan Maritim	Unaudit 2014	Sehat A	308.820	78.026	230.794	237.047	163.841	304.000	0	304.000	0	304.000	50.156	354.156	304.000	50.156
9	PT Perkebunan Nusantara I (Persero)	Audited 2014	Tidak Ada Data	965.417	758.670	206.747	213.941	-7.094	427.682	0	427.682	8.431	419.251	-	419.251	77.360	77.360
10	PT Perkebunan Nusantara II (Persero)	Audited 2014	Tidak Ada Data	1.869.760	16.012.260	(14.143.500)	1.947.280	728.060	(12.924.280)	0	(12.924.280)	1.240.830	(14.165.110)	17.533	(14.147.577)	41.928	59.461
11	PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)	Audited 2014	Tidak Ada Data	6.322.615	3.702.623	2.619.992	1.294.335	1.325.657	2.588.670	0	2.588.670	274.544	2.314.126	-	2.314.126	50.602	50.602
12	PT Perkebunan Nusantara V (Persero)	Audited 2014	Tidak Ada Data	5.537.242	4.621.394	915.848	507.109	408.739	1.014.218	0	1.014.218	94.567	919.651	-	919.651	8.729	8.729
13	PT Perkebunan Nusantara VI (Persero)	Unaudited 2014	Tidak Ada Data	2.362.272	2.196.499	165.773	165.969	36.426	295.316	0	295.316	0	295.316	-	295.316	(445.632)	(445.632)
14	PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	Audited 2014	Tidak Ada Data	4.518.243	3.541.513	976.730	575.613	401.117	1.151.226	0	1.151.226	0	1.151.226	-	1.151.226	89.402	265.418
15	PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)	Unaudited 2014		1.803.187	1.781.498	21.689	12.757	0	34.446	0	34.446	0	34.446	-	34.446	228.614	228.614
16	PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)	Unaudited 2014		1.245.638	1.481.570	(235.932)	-205.209	76.463	(517.604)	0	(517.604)	0	(517.604)	-	(517.604)	94.135	94.135
17	PT Perkebunan Nusantara X (Persero)	Audited 2014		1.891.934	1.750.972	140.962	1.214	0	142.175	98.213	43.962	16.674	27.288	-	27.288	23.126	23.126
18	PT Perkebunan Nusantara XI (Persero)	Unaudited 2014		1.546.017	1.631.056	(85.039)	-87.928	104.604	(277.571)	0	(277.571)	0	(277.571)	-	(277.571)	16.938	14.170
19	PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)	Unaudited 2014		1.156.035	994.335	161.700	74.869	0	236.569	0	236.569	1.027	235.542	-	235.542	(259.009)	(259.009)
20	PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero)	Audited 2014	Tidak Ada Data	3.066.488	2.825.517	240.971	190.710	50.261	381.420	0	381.420	56.229	325.191	3.982	329.173	22.485	22.485

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 22.A

NO	PERUSAHAAN MINORITAS	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
				1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	9 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12=10+11	13	14
21	PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero)	Unaudited 2014		547.347	673.750	(126.403)	-138.667	75.908	(340.978)	0	(340.978)	0	(340.978)	-	(340.978)	(155.870)	(155.870)
22	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	Audited 2012		473.830	290.100	183.730	106.370		290.100	0	290.100	0	290.100	1.027	291.127	50.108	50.108
23	PT Rekayasa Industri	Unaudit 2014		10.944.900	10.483.562	461.338	399.469	24.173	836.634	0	836.634	-8.853	845.487	-	845.487	170.849	170.849
24	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Audited 2014	Sehat AA	321.731	214.221	107.510	21.416	6.814	122.112	0	122.112	18.573	103.538	-	103.538	103.543	103.543
	TOTAL			95.764.768	101.095.462	(5.330.694)	5.279.081	3.845.819	(3.897.432)	2.504.749	(6.402.181)	2.342.180	(8.744.361)	102.035	(8.642.326)	44.822	(15.290)

www.peraturan.go.id

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
NERACA PER 31 DESEMBER 2014 (AUDITED)

(dalam jutaan rupiah)

NO	PERUSAHAAN MINORITAS	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
				1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13	15	16=12x15
1	PT Asean Bintulu Fertilizer	Audited 2014		4.148.656	3.094.985	7.243.641	537.719	427.303	965.022	1.068.578	0	0	0	5.210.042	6.278.619		6.278.619	13%	138.915
2	PT Bank Bukopin	Audited 2014		0	0	79.051.268	0	0	72.229.788	1.119.908	1.724.069	0	(27.046)	3.984.722	6.801.653	19.827	6.821.480	11%	150.786
3	PT Freeport Indonesia	SMT I/2014		21.483.234	72.498.807	93.982.031	6.652.362	28.551.096	35.203.458	273.648	2.895.092	197.832	0	55.362.001	58.726.573		58.726.573	9%	21.309
4	PT Indosat	Audited 2014		8.591.684	44.663.157	53.254.841	21.147.649	17.911.028	39.058.677	543.393	1.546.587	0	395.023	11.024.419	13.509.422	686.542	14.195.964	14%	77.662
5	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Unaudited 2014	Sehat AA	244.934	127.169	372.103	67.129	2.146	69.275	80.000	0	0	0	222.828	302.828	0	302.828	50%	151.414
6	PT Socfindo	Audited 2014	Tidak Ada Data	465.679	1.353.766	1.819.445	424.679	351.277	775.957	42.250	3.671			997.567	1.043.488		1.043.488	10%	4.225
7	PT Nindya Karya	Audited 2014	Sehat A	1.846.058	660.135	2.506.191	1.589.722	358.963	1.948.684	559.497	0	0	156.342	-208.468	507.371	50.136	557.507	1%	59.500
8	PT PANN Pembiayaan Maritim	Unaudited 2014	Sehat A	2.938.303	222	2.938.525	2.166.786	1.457	2.168.243	100.001	578.412	0	01	91.868	770.282	0	770.282	0%	1.000
9	PT Perkebunan Nusantara I (Persero)	audited 2014	Tidak Ada Data	98.621	1.353.520	1.450.141	630.110	583.768	1.213.878	135.951	0	0	6.971	93.098	236.020	243	236.263	10%	13.595
10	PT Perkebunan Nusantara II (Persero)	audited 2014	Tidak Ada Data	540.359	2.485.912	3.026.262	1.751.734	1.443.307	3.195.031	327.606	0	0	-633.257	135.479	(170.172)	1.403	(168.769)	10%	32.761
11	PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)	audited 2014	Tidak Ada Data	2.235.059	8.669.949	10.905.008	1.986.077	3.663.883	5.649.960	2.942.116	0	0	1.315.760	752.686	5.010.562	244.486	5.255.048	10%	294.212
12	PT Perkebunan Nusantara V (Persero)	audited 2014	Tidak Ada Data	761.061	4.700.913	5.461.974	1.262.990	2.104.321	3.367.311	1.313.322	0	0	781.341	0	2.094.663	0	2.094.663	10%	131.332
13	PT Perkebunan Nusantara VI (Persero)	Unaudited 2014	Tidak Ada Data	425.767	2.320.021	2.745.788	487.255	1.209.090	1.696.345	653.293	0	0	375.427	0	1.028.720	20.723	1.049.443	10%	65.329
14	PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	audited 2014	Tidak Ada Data	2.772.608	6.487.666	9.260.274	2.670.994	4.946.863	7.617.857	1.226.223	8.889	0	404.260	0	1.639.372	3.045	1.642.417	10%	122.622
15	PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)	Unaudited 2014		615.130	3.054.723	3.669.853	650.684	1.742.375	2.393.059	1.235.832	0	0	0	12.718	1.248.550	871	1.249.421	10%	89.753
16	PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)	Unaudited 2014		703.912	1.705.415	2.409.327	1.598.787	309.444	1.898.231	599.875	0	0	0	-88.719	511.096	0	511.096	10%	59.962
17	PT Perkebunan Nusantara X (Persero)	Audited 2014		1.661.051	2.557.198	4.438.249	1.161.656	1.773.942	2.955.797	670.596	0	0	25.927	561.186	1.457.710	24.742	1.482.451	10%	87.060
18	PT Perkebunan Nusantara XI (Persero)	Unaudited 2014		1.282.291	1.278.717	2.561.008	1.685.866	312.501	1.998.367	518.481	0	0	0	44.045	562.526	115	562.641	10%	51.848
19	PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)	Unaudited 2014		546.595	2.447.649	2.994.244	1.569.753	1.658.094	3.227.847	327.606	0	0	135.479	-698.093	(235.008)	1.404	(233.604)	10%	57.298
20	PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero)	audited 2014	Tidak Ada Data	925.422	4.405.973	5.331.409	1.922.292	2.034.995	3.957.182	1.029.738	0	0	11.569	243.721	1.285.028	89.190	1.374.218	10%	102.974
21	PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero)	Unaudited 2014		375.640	520.180	896.020	1.532.418	235.374	1.767.792	235.000	0	0	30.591	-1.137.362	(871.771)	0	(871.771)	10%	23.500
22	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	Audited 2012		367.460	270.760	638.220	135.380	87.030	222.410	222.410	0	0	-19.340	212.740	415.810	0	415.810	5%	14.664
23	PT Rekayasa Industri	Unaudited 2014		6.758.638	236.810	6.995.448	6.117.366	23.724	6.141.090	450.000	0	0	-195	373.358	823.163	31.195	854.358	5%	22.366
24	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Audited 2014	Sehat AA	279.253	212.729	491.983	46.121	33.789	79.910	200.000	0	0	438	211.614	412.053	020	412.073	50%	206.036
	TOTAL					304.393.248			199.801.371						103.390.958		104.564.500		1.990.123

LAMPIRAN 23

PMN pada Organisasi/LK Internasional per 31 Desember 2014

LAPORAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL
PER 31 DESEMBER 2014

NO	Institusi	Penyertaan Modal Pemerintah				Surat hutang	Hutang ke BI
				USD	IDR	IDR	IDR
	A. PMN pada Lembaga Keuangan Internasional						
1	Asian Development Bank (ADB)	SDR	289.100.000,00	418.849.533,02	5.210.466.190.726,50		1.706.429.944,40
2	International Monetary Fund	SDR	2.079.900.000,00	3.012.500.260,56	37.475.503.614.589,90	33.553.945.227.089,10	2.764.360.843.169,32
	World Bank Group						
3	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	USD	152.971.513,35	152.971.513,35	1.992.965.826.674,00	-	58.535.680.910,12
4	International Development Association (IDA)	USD	15.631.705,00	15.631.705,00	194.466.410.260,00	5.173.139.667,81	1.853.442.612,00
5	International Finance Corporation (IFC)	USD	31.602.000,00	31.602.000,00	393.126.880.000,00		
6	Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	USD	3.797.820,00	3.797.820,00	47.244.880.800,00	14.119.623.920,00	
7	Bank Pembangunan Islam (IDB)	ID	124.260.000,00	100.028.512,53	2.239.554.895.882,65		
8	International Islamic Trade finance Corporation (ITFC)	USD	2.060.000,00	2.060.000,00	25.626.400.000,00		
9	The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)	ID	125.140,32	181.303,92	2.255.420.821,67		
10	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	USD	57.959.000,00	57.959.000,00	721.009.980.000,00		
11	Common Fund for Commodities (CFC)	USD	1.352.638,21	1.352.638,21	16.826.819.270,79	3.381.534.932,14	
12	The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)	USD	7.124.939,00	7.124.939,00	88.634.241.160,00		
13	Credit Guarantee and Investment Facility	USD	12.600.000,00	12.600.000,00	156.744.000.000,00		
	Jumlah	**USD**		**3.896.659.255,59**	**48.474.441.139.524,40**	**33.676.619.525.619,00**	**2.826.956.396.635,84**

Catatan:

1. Kurs Special Drawing Right (SDR) IMF adalah kurs official IMF per 31 Desember 2014, SDR1 = USD 1,448805026
2. Kurs USD adalah kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2014, yaitu USD 1 = Rp 12.440
3. Kurs Euro adalah kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2014, yaitu, EUR1 = USD 15.133,27
4. Kurs Islamic Dinar (ID) sama dengan kurs Special Drawing Right (SDR) IMF pada tanggal 31 Desember 2014
5. Kurs franc Perancis ke Euro adalah tetap sebesar EUR 1 = 6,55957
6. Kurs Euro ke USD adalah kurs IMF per 31 Desember 2014, EUR1 = USD 1,3783
7. Hutang ke BI adalah dana talangan BI kepada Pemerintah ketika BI masih menjadi bagian dari Pemerintah (sebelum berlakukan UU tentang independensi BI tahun 2009). Kemenkeu dan BI sedang membahas proses penyelesaiannya.

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN 24
Ikhtisar Laporan Keuangan LPS
per 31 Desember 2014

www.peraturan.go.id

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
LAPORAN SURPLUS DEFISIT
PERIODE 01 JANUARI 2014 S.D. 31 DESEMBER 2014 (AUDITED)

(dalam ribuan)

URAIAN	01 Jan 14 - 31 Des 14	01 Jan 13 - 31 Des 13
PENDAPATAN OPERASI		
Pendapatan Premi Penjaminan	7.831.254.393	7.006.457.211
Pendapatan Hasil Invetasi	2.826.117.745	2.033.765.289
Pendapatan Kontribusi Kepesertaan	102.978	45.000
Pendapatan Denda	73.339	132.342
Pendapatan Pengembalian Klaim	163.922.435	9.182.507
TOTAL PENDAPATAN OPERASI	**10.821.470.890**	**9.049.582.349**
BIAYA OPERASI		
Biaya Klaim Penjaminan	54.500.462	40.982.843
- Cadangan Klaim Penjaminan Direalisasi	(54.500.462)	(40.982.843)
Biaya terkait Dengan Resolusi Bank	3.595.876.686	9.409.550
Biaya Kenaikan (Penurunan) Cad. Klaim	(3.011.452.105)	189.268.009
Biaya Investasi	480.396.051	356.189.536
Biaya Umum dan Administrasi	318.248.491	276.363.896
TOTAL BIAYA OPERASI	**1.383.072.123**	**831.230.991**
SURPLUS DEFISIT DARI OPERASI	**9.438.398.767**	**8.218.351.358**
Pendapatan dan Biaya Lain-Lain		
Pendapatan Lain-Lain	86.801.243	68.533.402
Biaya Lain-Lain	(17.402.542)	(13.713.210)
Total Pendapatan dan Biaya Lain-Lain	**69.398.701**	**54.820.192**
Pos-Pos Luar Biasa	-	-
SURPLUS (DEFISIT) BERSIH SEBELUM PAJAK	**9.507.797.468**	**8.273.171.550**
Pajak Penghasilan Badan		
Biaya PPh Badan Kini	-	(53.495.898)
Biaya PPh Badan Tangguhan	(452.035)	2.440.831
Total Pajak Penghasilan Badan	(452.035)	(51.055.067)
SURPLUS (DEFISIT) BERSIH SETELAH PAJAK	**9.508.249.503**	**8.222.116.483**
ALOKASI SURPLUS DEFISIT		
Cadangan Tujuan (20%)	1.901.649.901	1.644.423.297
Cadangan Penjaminan (80%)	7.606.599.602	6.577.693.186

www.peraturan.go.id

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NERACA
POSISI PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013 (AUDITED)

dalam ribuan

URAIAN	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
ASET				
Kas dan Setara Kas		3.221.497.052		533.963.473
Investasi Dalam Surat Berharga		45.507.848.286		33.943.324.464
Surat Berharga diterbitkan Bank Indonesia (SBI)	-		-	
- Diskonto SBI	-		-	
Total SBI	-		-	
Surat Berharga diterbitkan Pemerintah (SBN)	45.088.121.000		33.211.113.000	
- Premium SBN	1.139.376.189		1.221.673.770	
- Diskonto SBN	(719.648.903)		(489.462.306)	
Total SBN	45.507.848.286		33.943.324.464	
Piutang Premi Penjaminan		439.372		479.782
Piutang Investasi		714.456.057		504.336.077
Piutang Bank Dalam Likuidasi		-		-
Piutang Bank Dalam Likuidasi	-		-	
Penyisihan Piutang BDL	-		-	
Piutang Lain-lain		1.820.248		2.669.711
Piutang Lain-lain	12.418.145		13.076.247	
Penyisihan Piutang Lain-lain	(11.222.419)		(10.406.536)	
Penyertaan Modal Sementara		1.195.726		8.011.841.000
Aset Tetap dan Tidak Berwujud		116.188.840		115.541.497
Harga Perolehan	172.804.339		157.336.166	
Akumulasi Penyusutan	(56.615.499)		(41.794.669)	
Aset Lain-lain		223.315.384		173.156.435
TOTAL ASET		**49.784.940.717**		**43.285.312.439**
KEWAJIBAN				
Hutang Klaim Penjaminan		9.194.188		28.548.209
Cadangan Klaim Penjaminan		8.266.919.899		11.332.872.466
Cadangan Manfaat Karyawan		28.199.468		26.391.329
Hutang Pajak		181.298.846		148.932.633
Hutang Lain-lain		78.371.448		35.858.437
TOTAL KEWAJIBAN		**8.563.983.849**		**11.572.603.074**
EKUITAS				
Modal Awal Pemerintah		4.000.000.000		4.000.000.000
Cadangan Tujuan		7.444.191.374		5.542.541.473
Cadangan Penjaminan		29.776.765.494		22.170.165.892
TOTAL EKUITAS		**41.220.956.868**		**31.712.707.365**
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**49.784.940.717**		**43.285.310.439**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN 25
Aset Tetap K/L
per 31 Desember 2014

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 25.A

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TANAH PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2014 *AUDITED*	31 DESEMBER 2013 *AUDITED*
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	110.719.212.605	110.719.212.605
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	188.409.157.000	188.409.157.000
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.623.299.801.062	1.587.450.938.448
4	005	MAHKAMAH AGUNG	4.477.869.454.880	4.390.511.580.342
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	3.440.952.484.088	3.268.411.741.320
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	14.079.732.455.510	14.079.228.576.510
7	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	73.002.130.086.213	72.951.949.833.609
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.268.979.273.155	2.255.323.523.625
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	10.352.695.391.155	10.361.862.953.692
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	255.747.629.379.819	253.048.782.872.896
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	12.420.787.491.368	12.362.113.598.258
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	18.434.708.716.907	18.305.298.530.619
13	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN	521.249.931.524	545.355.589.927
14	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	10.539.883.601.097	10.484.012.519.457
15	018	BLU KEMENTERIAN PERTANIAN	647.327.099.926	647.183.099.926
16	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.240.180.243.236	2.067.385.745.501
17	019	BLU KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	115.629.079.088	117.727.799.088
18	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.278.611.645.096	3.041.833.333.179
19	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	59.568.342.874.967	57.388.535.368.980
20	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1.243.957.952.520	1.265.874.384.051
21	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	12.033.208.034.564	11.439.857.625.528
22	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	41.561.871.728.598	41.429.680.879.874
23	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	2.934.329.080.740	2.840.173.288.344
24	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	10.650.217.138.296	10.692.949.700.550
25	025	KEMENTERIAN AGAMA	11.911.986.673.758	7.004.905.467.277
26	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	3.567.133.729.390	3.534.246.260.451
27	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.912.737.612.732	1.914.680.892.884
28	027	KEMENTERIAN SOSIAL	3.432.624.103.077	3.433.039.145.077
29	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	2.219.569.806.892	2.192.995.774.148
30	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.985.050.049.430	1.938.565.593.249
31	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	278.480.885.585.939	400.979.919.447.531
32	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	4.894.335.600	4.894.335.600
33	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.445.595.374.507	1.540.657.874.507
34	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	273.198.404.650	273.198.404.650
35	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	1.980.636.227.808	1.980.636.227.808
36	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	44.244.940.145	40.772.187.225
37	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	876.321.187.609	876.321.187.609
38	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	294.120.000	294.120.000
39	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.327.041.918.205	1.201.075.586.605
40	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	371.620.903.397	128.885.359.447
41	054	BADAN PUSAT STATISTIK	702.174.732.305	621.671.343.680
42	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	179.478.885.500	179.478.885.500
43	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.843.418.260.604	1.802.440.519.432
44	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	317.661.875.000	317.661.875.000
45	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	919.267.508.290	927.861.745.290
46	059	BLU KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.066.049.000	0
47	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	43.362.465.218.231	43.255.245.848.633
48	060	BLU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	98.513.607.068	98.513.607.068
49	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	507.544.928.480	520.567.813.882
50	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	101.438.100.000	101.438.100.000
51	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	333.830.014.000	333.830.014.000
52	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	56.342.425.325	50.236.401.000
53	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	368.748.205.366	368.802.024.366
54	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	832.486.734.862	825.460.316.462

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 25.A

(dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2014	31 DESEMBER 2013
55	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	114.772.877.923	103.026.665.805
56	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	89.075.216.326	89.075.216.326
57	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	80.978.000.000	67.881.000.000
58	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	6.021.830.134.979	6.015.687.608.539
59	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	1.789.741.372.708	1.789.648.034.766
60	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	754.059.605.083	735.224.629.500
61	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	275.246.835.716	275.246.835.716
62	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	27.226.540.000	27.226.540.000
63	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	20.666.122.750	20.666.122.750
64	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	511.094.866.313	511.094.866.313
65	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	215.554.860.396	215.554.860.396
66	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	407.745.766.569	407.745.766.569
67	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.039.340.183.858	1.052.626.177.318
68	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	633.535.700.530	634.471.700.530
69	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	323.999.844.320	323.999.844.320
70	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	128.412.767.500	128.390.705.000
71	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	6.931.777.290	6.925.422.490
72	100	KOMISI YUDISIAL	47.188.389.400	47.188.389.400
73	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	81.156.505.100	75.865.180.100
74	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	23.520.842.987	23.520.842.986
75	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	3.189.308.580.818	3.061.691.048.603
76	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	116.490.960.000	116.490.960.000
77	107	BADAN SAR NASIONAL	231.629.813.882	199.769.718.582
78	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	109.887.525.845	1.233.535.000
79	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	7.315.400.000	0
80	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	20.242.895.439.313	6.259.141.197.032
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	2.979.358.222.033	2.981.129.125.733
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	3.097.592.140.100	3.099.287.494.100
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	555.081.094.854	542.329.877.054
JUMLAH TANAH PADA K/L			**944.073.630.217.177**	**1.040.131.067.576.640**
84	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	1.603.636.775.779	951.820.775.779
JUMLAH TANAH PADA BUN			**1.603.636.775.779**	**951.820.775.779**
JUMLAH TANAH PADA K/L DAN BUN			**945.677.266.992.956**	**1.041.082.888.352.419**
ELIMINASI KARENA DUPLIKASI PENCATATAN				(63.590.100.000)
JUMLAH TANAH PADA K/L DAN BUN NETO			**945.677.266.992.956**	**1.041.019.298.252.419**

www.peraturan.go.id

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2014 *(AUDITED)*			31 DESEMBER 2013 *(AUDITED)*		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	112.643.243.196	(88.983.222.480)	23.660.020.716	103.066.723.010	(81.082.288.365)	21.984.434.645
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	673.011.636.179	(540.507.096.435)	132.504.549.744	634.196.973.114	(476.259.993.161)	157.936.979.953
3	006	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.381.978.601.359	(942.046.819.734)	439.931.781.625	1.254.760.905.909	(744.613.658.586)	510.137.247.323
4	005	MAHKAMAH AGUNG	1.961.167.998.297	(1.560.974.217.470)	400.292.891.827	1.932.818.423.927	(1.375.900.047.896)	556.918.375.731
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	1.728.377.586.844	(1.320.358.019.398)	398.019.547.446	1.716.725.831.515	(1.198.725.594.711)	517.000.236.804
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	1.897.823.721.788	(1.269.662.283.770)	628.160.438.018	1.859.486.173.720	(1.183.338.261.992)	676.146.911.728
7	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	99.079.306.491	(72.836.388.887)	26.242.937.604	89.169.336.777	(64.525.974.030)	24.643.362.747
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.610.518.710.203	(1.863.547.273.722)	756.971.436.481	2.466.817.116.534	(1.428.162.043.242)	1.038.655.073.292
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	1.371.180.061.931	(968.825.101.607)	402.354.960.324	1.258.544.124.912	(888.463.662.321)	370.080.472.591
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	124.974.529.034.354	(67.416.531.066.042)	57.557.997.968.312	96.990.530.655.779	(53.965.432.523.936)	42.025.098.131.843
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	3.173.792.360.813	(2.161.203.660.518)	1.012.588.700.295	3.026.289.712.192	(1.846.949.675.041)	1.179.440.037.151
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	9.633.706.737.750	(7.468.440.030.177)	2.075.266.707.573	9.281.994.108.662	(6.753.559.938.824)	2.528.434.169.828
13	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN	61.852.509.710	(41.068.826.072)	20.683.682.638	58.757.128.310	(34.163.902.944)	24.593.225.366
14	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	4.488.074.529.057	(2.949.973.788.752)	1.538.100.760.305	4.298.958.679.643	(2.536.894.754.751)	1.762.063.924.892
15	018	BLU KEMENTERIAN PERTANIAN	63.858.094.045	(40.576.339.391)	23.281.744.664	59.419.811.500	(34.371.529.790)	25.048.281.710
16	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.747.819.254.939	(1.596.778.416.181)	1.151.040.838.758	2.506.124.596.380	(1.300.287.231.684)	1.205.837.364.696
17	019	BLU KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	253.955.182.390	(164.428.181.261)	89.527.001.129	230.347.496.912	(143.697.348.822)	86.650.148.090
18	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.995.778.720.323	(2.459.737.659.663)	1.536.041.060.660	3.511.015.317.557	(2.075.500.532.277)	1.435.514.785.280
19	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	27.605.435.103.897	(13.010.059.238.510)	14.595.375.865.387	22.863.639.549.608	(10.191.639.718.979)	12.671.999.830.629
20	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1.264.828.991.225	(36.987.570.052)	1.227.841.421.173	1.064.403.552.977	(36.987.570.052)	1.027.415.982.925
21	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	11.717.470.344.392	(6.733.407.335.009)	4.984.067.999.388	10.376.284.815.670	(5.958.982.797.767)	1.517.332.318.703
22	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	12.491.399.500.493	(7.766.805.808.769)	4.724.593.691.724	11.313.920.001.908	(2.856.415.422.716)	8.457.504.579.092
23	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	15.521.899.489.444	(7.576.123.115.105)	7.945.776.354.339	13.758.762.620.889	(5.421.428.115.667)	8.337.334.505.222
24	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	8.194.951.899.862	(5.664.798.083.013)	2.530.153.826.839	7.370.638.441.881	(4.466.361.304.157)	2.904.277.137.524
25	025	KEMENTERIAN AGAMA	3.943.894.559.057	(2.723.524.920.525)	1.220.369.638.532	3.558.518.881.749	(2.979.403.511.466)	679.115.370.283
26	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	1.409.012.506.521	(1.062.266.042.075)	346.746.464.446	1.329.928.392.972	(344.414.753.510)	985.513.639.462
27	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.040.489.834.807	(1.225.796.382.790)	814.693.442.017	2.013.109.132.391	(1.032.682.675.684)	980.426.456.707
28	026	BLU KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0	0	0	0	0	0
29	027	KEMENTERIAN SOSIAL	1.098.894.312.889	(783.009.354.950)	315.884.957.939	1.073.931.332.944	(699.160.468.947)	374.770.864.097
30	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	2.265.311.853.761	(1.492.187.679.397)	773.124.174.364	2.218.153.129.819	(1.303.948.325.739)	914.204.804.080

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2014 *(AUDITED)*			31 DESEMBER 2013 *(AUDITED)*		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
31	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.603.858.284.335	(2.270.222.189.059)	1.333.636.095.276	3.519.665.589.862	(1.979.796.261.061)	1.539.769.328.801
32	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	7.591.103.938.282	(4.100.912.931.405)	3.490.191.006.877	7.046.953.212.077	(3.499.139.520.148)	3.547.813.691.929
33	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	722.693.708.225	(337.904.889.531)	384.788.838.694	693.142.136.958	(284.850.280.935)	408.291.856.023
34	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	52.783.167.148	(41.470.861.925)	11.312.305.223	52.430.818.240	(36.651.152.508)	15.779.665.732
35	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	58.936.648.317	(36.447.615.459)	22.489.032.858	54.643.262.715	(30.259.788.488)	24.383.474.227
36	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	318.084.049.006	(211.705.478.070)	106.378.570.936	296.568.270.341	(177.089.364.442)	119.478.905.899
37	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	117.147.734.193	(78.893.540.965)	38.254.193.228	98.896.726.947	(67.377.333.909)	18.557.397.038
38	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	581.698.132.921	(393.893.370.213)	187.804.762.608	580.433.517.308	(345.052.103.848)	235.381.413.460
39	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	284.557.584.713	(222.348.019.750)	62.209.564.963	264.031.090.632	(204.004.706.624)	60.026.382.008
40	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	220.116.724.008	(140.457.094.673)	79.659.629.335	226.382.629.507	(184.878.251.768)	41.494.377.739
41	044	BLU KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	146.104.427.073	(99.742.078.114)	46.362.348.959	119.005.057.149	(9.077.391.147)	109.927.666.002
42	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	47.077.232.800	(29.087.671.025)	17.989.561.775	29.719.888.380	(26.219.474.623)	3.500.413.757
43	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI	68.523.073.176	(48.705.791.734)	19.817.281.442	64.537.961.056	(43.329.947.725)	21.208.013.331
44	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	2.719.117.329.078	(1.934.729.313.413)	784.388.015.665	2.356.439.639.594	(1.659.287.444.496)	697.152.195.099
45	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	7.441.173.818.938	(5.138.219.564.329)	2.302.954.254.609	7.006.112.927.595	(4.336.160.785.801)	2.669.952.141.794
46	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	20.614.513.674	(17.016.341.178)	3.598.172.496	21.228.635.060	(16.072.045.999)	5.156.589.061
47	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.221.011.548.690	(791.577.074.434)	429.434.476.256	1.076.388.459.597	(653.773.324.061)	421.615.135.536
48	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	165.190.478.934	(107.946.710.264)	57.243.768.670	140.799.307.128	(87.969.914.506)	52.829.392.622

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2014 *(AUDITED)*			31 DESEMBER 2013 *(AUDITED)*		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
49	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.545.202.354.756	(1.025.420.789.305)	519.781.565.451	1.433.435.058.905	(861.511.899.595)	571.923.159.310
50	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	191.146.290.689	(185.001.868.366)	26.144.422.323	176.723.482.595	(150.309.470.557)	26.414.012.038
51	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.432.511.464.101	(973.064.867.293)	459.446.596.808	1.404.277.507.973	(897.253.695.543)	507.017.812.430
52	059	BLU KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.243.341.665	0	11.243.341.665	11.291.489.965	(7.373.997.458)	3.917.491.207
53	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	31.414.297.425.254	(19.868.555.106.425)	11.745.742.318.829	28.800.164.695.201	(16.565.319.381.282)	12.234.835.313.919
54	060	BLU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	310.973.475.990	(234.940.986.973)	76.032.609.017	284.516.047.899	(71.601.574.679)	212.914.473.020
55	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.396.743.476.406	(769.881.731.579)	626.867.744.827	1.366.133.716.611	(634.739.871.532)	730.893.596.879
56	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	164.896.020.585	(121.708.906.490)	43.177.114.095	147.014.589.544	(94.312.734.634)	52.701.834.910
57	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	189.578.875.621	(147.380.315.610)	42.198.560.011	200.883.888.648	(143.109.248.285)	57.774.639.361
58	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	688.397.549.818	(404.004.386.896)	284.393.162.922	657.925.175.161	(318.465.742.428)	339.459.432.733
59	067	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	52.198.726.297	(37.325.148.430)	14.871.577.867	47.678.004.343	(33.970.284.783)	13.707.719.560
60	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	326.102.804.773	(246.003.406.610)	80.099.398.163	353.804.920.192	(241.067.885.096)	112.737.035.096
61	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	19.807.696.838	(14.527.909.946)	5.279.786.892	17.984.403.400	(12.737.766.826)	5.246.636.574
62	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	2.606.598.381.930	(1.489.600.747.471)	1.106.797.634.459	2.308.461.292.015	(1.225.820.499.238)	1.082.640.792.777
63	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	606.343.890.471	(421.721.485.954)	184.622.394.517	566.512.934.002	(341.101.483.978)	225.411.450.024
64	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	203.228.343.484	(174.589.150.783)	28.639.192.701	196.695.836.788	(160.521.638.101)	35.174.198.687
65	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	65.004.604.281	(49.991.381.092)	15.013.223.189	58.868.754.828	(42.695.895.976)	16.172.858.852
66	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.058.261.222.405	(712.788.785.302)	345.472.437.103	962.732.605.277	(636.718.029.352)	326.014.575.925
67	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	686.356.937.288	(342.557.528.032)	243.799.409.256	543.229.493.612	(292.755.161.509)	250.474.332.103
68	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	1.906.427.381.402	(1.048.088.923.678)	858.338.457.724	1.826.026.715.334	(946.576.680.274)	879.450.035.060
69	081	BLU BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	7.104.807.574	(3.230.737.356)	3.874.076.218	6.603.701.076	(2.253.687.801)	4.349.613.255
70	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	775.288.769.083	(392.352.766.260)	382.936.002.823	702.699.169.751	(310.913.174.699)	391.786.995.052
71	082	BLU LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	2.355.485.911	(781.540.879)	1.573.945.032	2.233.288.103	(781.540.879)	1.451.747.224
72	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	368.694.410.343	(270.152.250.830)	98.542.159.513	328.765.688.150	(242.323.163.787)	86.442.522.363
73	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	31.747.931.413	(21.136.029.040)	10.611.903.373	28.595.186.873	(18.428.015.242)	10.167.151.631
74	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	87.380.233.735	(52.331.712.326)	35.028.521.409	86.099.602.526	(41.673.881.551)	44.425.720.975
75	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	142.030.427.201	(115.683.096.866)	26.347.330.535	128.516.194.389	(104.440.959.822)	24.075.234.567
76	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	163.329.168.856	(135.541.812.792)	27.787.356.064	171.558.428.270	(134.099.705.257)	37.458.723.013
77	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	351.622.345.574	(284.657.129.646)	86.965.215.928	327.506.656.991	(231.966.164.182)	95.540.492.809
78	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	285.881.148.667	(224.563.932.781)	41.317.215.886	257.391.236.017	(215.895.098.703)	41.496.137.314

www.peraturan.go.id

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2014 *(AUDITED)*			31 DESEMBER 2013 *(AUDITED)*		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
79	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	725.855.796.497	(567.690.495.995)	157.965.299.502	720.473.649.562	(630.528.537.482)	189.945.112.080
80	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	50.215.528.730	(36.057.727.926)	14.157.800.804	47.818.712.890	(28.524.435.226)	19.294.277.665
81	091	BLU KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	4.631.573.500	(2.532.665.974)	2.098.907.526	3.780.925.700	(1.852.500.376)	1.928.425.324
82	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	294.479.304.275	(290.407.677.154)	103.981.627.121	380.374.744.072	(235.962.046.138)	144.412.698.934
83	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	237.737.713.814	(189.023.860.833)	48.713.852.981	224.881.536.890	(166.771.191.109)	58.110.396.781
84	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	109.043.930.038	(86.124.909.451)	22.919.020.585	98.315.193.061	(74.755.998.366)	23.559.294.695
85	100	KOMISI YUDISIAL	37.293.888.820	(30.471.744.001)	6.822.144.819	35.897.228.395	(26.554.422.865)	9.342.805.530
86	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	736.814.815.816	(237.102.921.563)	499.711.894.253	377.858.464.591	(144.390.669.823)	233.467.794.768
87	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	116.066.652.195	(75.965.604.991)	40.101.047.204	103.442.854.677	(57.493.890.538)	45.948.964.139
88	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	107.735.322.193	(55.103.105.896)	52.632.216.297	95.048.111.943	(43.650.837.719)	51.397.274.224
89	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	44.730.908.426	(35.757.613.161)	8.973.295.265	43.142.401.261	(30.247.167.355)	12.895.233.906
90	107	BADAN SAR NASIONAL	4.079.471.416.401	(1.542.658.030.224)	2.536.813.386.177	3.094.029.751.481	(1.001.116.147.800)	2.092.913.603.681
91	108	KOMISI PERSAINGAN PENGAWASAN USAHA	24.536.645.401	(18.120.181.686)	6.416.463.715	24.255.526.071	(17.083.434.795)	7.172.091.276
92	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	20.099.925.944	(8.908.112.641)	10.191.813.303	17.949.611.944	(6.549.519.365)	11.400.092.479
93	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	23.648.749.921	(13.204.885.140)	10.443.864.781	22.223.172.340	(8.983.212.714)	13.239.959.626
94	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	64.472.702.273	(28.739.704.351)	35.732.997.922	58.130.003.888	(17.694.708.198)	40.435.295.690
95	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	695.873.026.280	(524.473.785.835)	171.399.240.445	642.660.110.270	(511.874.912.829)	130.785.197.441
96	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	47.273.183.642	(16.338.860.891)	30.934.332.751	38.904.978.042	(9.653.472.155)	29.251.505.887
97	114	SEKRETARIAT KABINET	49.701.927.963	(36.410.827.222)	13.291.100.741	49.750.576.594	(30.539.558.448)	19.211.018.146

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2014 *(AUDITED)*			31 DESEMBER 2013 *(AUDITED)*		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
98	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	108.655.283.717	(35.411.193.693)	73.244.090.024	82.149.860.444	(15.677.296.193)	66.472.564.251
99	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	1.160.567.945.295	(900.554.672.399)	260.013.272.896	1.167.913.044.549	(866.250.281.254)	301.662.763.295
100	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	1.217.297.194.012	(949.420.789.560)	267.876.404.452	1.099.102.336.344	(882.804.301.783)	216.298.034.561
101	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	44.450.682.524	(26.374.075.704)	18.076.606.820	40.663.373.024	(22.087.416.706)	18.575.956.319
JUMLAH PERALATAN DAN MESIN PADA K/L			**331.124.404.219.404**	**(192.238.197.802.032)**	**138.886.207.217.372**	**282.726.407.833.664**	**(157.590.445.032.847)**	**125.135.962.800.817**
102	999 01	RFI AMLIA LAIN-LAIN	360.088.134.196	(73.288.251.487)	286.719.882.709	214.002.736.972	(21.540.186.282)	192.462.550.690
JUMLAH PERALATAN DAN MESIN PADA BUN			**360.088.134.196**	**(73.288.251.487)**	**286.719.882.709**	**214.002.736.972**	**(21.540.186.282)**	**192.462.550.690**
JUMLAH PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN			**331.484.492.353.588**	**(192.311.486.253.519)**	**139.172.927.100.071**	**282.940.410.570.636**	**(157.611.985.219.128)**	**125.328.425.351.507**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2014 *(AUDITED)*			31 DESEMBER 2013 *(AUDITED)*		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	202.244.507.729	(28.923.928.884)	173.320.578.845	201.338.478.094	(64.873.151.762)	136.465.326.332
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	823.049.480.845	(82.043.893.269)	741.005.587.576	811.031.260.536	(294.321.689.597)	516.709.571.939
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.982.440.347.363	(162.435.054.309)	1.830.005.293.054	1.832.893.279.400	(241.649.312.884)	1.591.213.966.516
4	005	MAHKAMAH AGUNG	5.344.444.355.911	(1.051.932.069.384)	4.292.512.286.427	4.884.699.970.713	(1.311.497.656.174)	3.573.111.320.539
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	3.490.954.381.937	(551.792.207.530)	2.939.162.174.407	3.236.377.402.433	(820.247.495.330)	2.416.129.907.103
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	2.148.481.992.064	(566.513.013.417)	1.581.948.978.647	1.640.078.734.489	(788.699.187.225)	851.379.547.264
7	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	1.232.891.398.366	(608.999.319.350)	623.892.079.016	1.229.408.893.413	(723.331.822.698)	506.077.070.715
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3.089.700.890.187	(391.323.534.597)	2.698.377.355.590	2.552.309.423.938	(471.967.071.375)	2.080.342.352.563
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	5.687.230.048.151	(3.119.660.154.640)	2.547.569.894.511	5.571.939.223.198	(3.805.272.537.239)	1.766.666.685.959
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	29.480.453.440.181	(11.354.217.759.548)	18.126.235.680.633	26.876.214.065.464	(12.217.492.278.864)	14.658.721.785.600
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	7.668.099.240.360	(1.269.863.317.439)	6.398.235.922.921	6.428.886.350.375	(1.952.548.474.012)	4.475.337.876.363
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	12.484.451.358.659	(2.216.719.391.252)	10.267.731.967.407	12.220.156.775.183	(3.108.901.324.659)	9.111.255.450.524
13	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN	196.129.056.618	(23.530.799.072)	172.598.257.546	216.874.887.239	(48.113.450.893)	168.761.436.346
14	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	3.754.403.184.774	(776.009.972.369)	2.978.393.198.405	3.493.404.156.327	(917.954.174.941)	2.575.449.981.386
15	018	BLU KEMENTERIAN PERTANIAN	40.837.563.126	(21.062.838.908)	19.774.924.218	38.173.828.528	(20.080.037.828)	18.093.790.699
16	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.067.505.003.064	(218.528.268.040)	848.976.735.024	1.006.461.977.147	(316.095.930.500)	690.366.046.647
17	019	BLU KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	100.197.470.297	(15.559.143.032)	84.638.327.265	98.923.034.446	(24.539.916.834)	64.383.117.612
18	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.799.356.122.779	(298.704.800.710)	1.500.651.322.069	1.675.956.612.173	(457.247.269.054)	1.218.709.343.119
19	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	12.223.456.204.550	(1.558.514.485.313)	10.664.941.719.237	9.578.087.072.196	(1.873.310.435.878)	7.705.776.636.318
20	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1.149.325.073.010	(2.590.856.910)	1.146.734.216.100	1.221.062.700.116	(5.974.891.407)	1.215.087.808.709
21	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	12.827.221.547.904	(1.891.914.906.333)	10.935.306.641.571	11.360.758.910.051	(4.645.179.687.278)	6.715.579.222.773
22	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	17.707.526.101.131	(2.250.921.528.683)	15.456.604.572.448	15.669.007.769.264	(1.488.591.791.033)	14.180.415.978.231
23	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	4.429.222.736.863	(425.371.232.723)	4.003.851.504.140	4.199.037.545.782	(714.120.052.868)	3.484.917.492.914
24	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	6.005.752.623.408	(994.260.823.322)	5.011.491.800.086	5.642.034.060.629	(1.495.881.446.051)	4.146.152.614.578
25	025	KEMENTERIAN AGAMA	14.661.086.032.077	(2.450.521.227.214)	12.210.564.804.863	13.933.300.913.388	(3.434.398.020.286)	10.498.901.893.092
26	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	3.139.788.988.268	(344.070.296.611)	2.795.728.701.657	2.807.938.284.036	(251.626.045.786)	2.556.312.238.250
27	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.304.884.198.373	(302.757.655.825)	2.002.126.542.548	2.257.204.933.919	(414.312.049.387)	1.842.892.884.532
28	027	KEMENTERIAN SOSIAL	795.170.002.148	(178.647.097.949)	616.522.904.199	766.442.053.751	(247.375.216.128)	519.066.837.625
29	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	1.786.948.639.697	(243.189.161.145)	1.543.760.478.552	1.664.826.597.711	(373.211.824.198)	1.291.714.773.513

www.peraturan.go.id

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2014 *(AUDITED)*			31 DESEMBER 2013 *(AUDITED)*		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
30	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.028.632.614.120	(347.511.790.984)	2.681.120.823.136	2.931.144.823.109	(411.140.602.034)	2.520.004.221.075
31	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	9.319.173.070.639	(778.804.640.164)	8.540.368.430.475	8.293.829.841.325	(992.827.433.102)	7.210.002.408.223
32	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	47.322.728.305	(3.069.305.416)	44.253.422.889	42.213.514.105	(2.129.382.654)	40.084.151.451
33	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	19.733.715.055	(2.368.045.811)	17.365.669.244	19.733.715.055	(1.973.371.508)	17.760.343.549
34	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	160.236.683.504	(4.806.903.482)	155.429.780.022	159.963.610.730	(1.009.582.147)	158.954.034.583
35	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	720.260.776.292	(69.681.616.215)	650.579.160.077	675.706.655.556	(143.313.074.581)	532.393.580.975
36	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	176.211.946.063	(24.479.488.721)	151.732.457.342	174.601.658.470	(22.630.188.627)	151.971.469.843
37	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	338.071.936.136	(42.969.621.799)	295.102.314.337	326.766.774.323	(120.186.543.868)	206.580.230.455
38	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	57.344.292.385	(9.825.235.442)	47.419.056.943	55.586.878.128	(15.068.441.795)	40.518.436.333
39	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	392.486.548.619	(41.569.620.344)	350.927.928.275	379.218.856.507	(121.563.502.483)	257.655.454.044
40	044	BLU KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	687.500.694.256	(68.542.132.273)	598.958.561.983	535.771.869.784	0	535.771.869.784
41	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	118.729.623.419	(1.214.945.178)	117.514.678.241	240.425.660	(84.148.980)	156.276.680
42	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI	25.252.524.203	(2.355.698.330)	22.896.825.873	24.669.613.408	(3.579.628.900)	21.089.984.508
43	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	444.362.307.806	(51.795.290.345)	392.567.017.561	326.272.346.383	(98.598.640.047)	227.673.706.336
44	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	115.863.770.066	(17.821.762.810)	97.842.007.256	112.583.363.628	(32.021.572.804)	80.561.790.824
45	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.495.568.681.161	(182.831.396.347)	1.312.737.284.814	1.385.544.442.988	(297.778.904.778)	1.087.765.538.220
46	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	115.566.225.942	(15.018.832.047)	100.547.593.895	104.920.815.861	(40.295.271.461)	64.625.544.400
47	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.121.399.865.091	(226.356.605.204)	895.043.259.887	988.838.228.069	(294.127.037.657)	674.711.190.412
48	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	184.934.711.656	(28.820.716.206)	156.113.995.450	202.833.332.406	(66.476.060.132)	136.357.272.274
49	058	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	595.582.227.306	(88.305.381.212)	507.276.846.094	581.444.521.135	(176.010.082.882)	405.434.438.253
50	059	BLU KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	23.841.758.502	0	23.841.758.502	23.841.758.502	(953.670.340)	22.888.088.162
51	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	13.666.596.083.946	(3.012.576.920.761)	10.654.019.163.185	13.080.697.903.724	(4.261.765.784.370)	8.818.932.109.354
52	060	BLU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	120.150.936.830	(25.556.311.008)	94.594.625.822	94.733.126.419	(28.778.541.993)	65.954.584.426
53	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	476.641.526.829	(74.823.790.538)	401.817.736.291	486.743.763.434	(86.134.940.775)	390.608.822.659
54	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	151.971.969.269	(7.485.152.264)	144.486.817.005	116.402.853.453	(4.866.911.150)	111.535.942.303
55	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	245.451.127.231	(31.763.003.986)	213.688.123.245	245.451.127.231	(57.426.391.958)	188.024.735.273
56	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	768.682.931.930	(58.450.396.935)	710.232.534.995	648.451.175.165	(43.418.123.443)	605.032.051.722
57	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	274.532.374.276	(88.252.988.339)	186.279.385.937	255.705.328.222	(120.754.199.342)	134.951.128.880
58	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	13.058.303.193	(259.453.441)	12.798.849.752	13.700.501.450	(293.153.476)	13.407.347.974

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2014 *(AUDITED)*			31 DESEMBER 2013 *(AUDITED)*		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
59	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	955.774.505.330	(127.553.649.921)	828.220.855.409	887.569.035.176	(182.140.435.952)	705.428.599.224
60	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	429.333.832.271	(25.639.676.188)	393.703.206.083	419.992.101.444	(35.396.400.400)	384.465.701.044
61	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	233.246.339.727	(25.327.689.382)	207.918.650.345	229.234.913.483	(24.688.758.928)	204.546.154.555
62	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	78.199.654.457	(9.612.561.947)	68.587.092.510	77.750.726.417	(8.635.241.417)	69.115.485.000
63	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	874.393.229.551	(93.054.088.849)	781.339.160.702	812.582.072.444	(142.483.390.519)	670.078.681.925
64	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	516.716.707.118	(176.540.923.261)	340.175.783.857	476.180.820.141	(211.528.234.346)	264.652.585.795
65	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	721.552.653.970	(129.287.693.585)	592.264.960.385	709.867.389.267	(126.847.536.014)	583.119.853.253
66	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	208.161.942.268	(38.226.205.010)	167.935.737.258	193.424.947.239	(73.046.762.366)	120.378.184.873
67	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	80.347.715.386	(14.681.240.536)	65.666.474.850	78.742.710.826	(34.969.375.467)	43.773.335.359
68	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	19.550.991.370	(3.401.571.292)	16.149.420.078	19.550.991.370	(3.010.807.377)	16.540.183.993
69	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	440.190.118.077	(58.497.786.971)	381.692.331.106	399.579.291.654	(81.362.330.216)	318.216.961.438
70	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	193.952.010.548	(31.108.715.273)	162.843.295.275	188.514.743.536	(62.691.405.548)	125.823.337.988
71	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	591.306.880.086	(81.201.953.883)	530.104.926.203	565.012.907.152	(126.653.612.809)	438.359.294.343
72	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	714.621.243.595	(105.245.699.094)	609.375.544.501	678.585.050.381	(207.398.767.054)	471.186.283.327
73	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	3.108.732.611.878	(212.626.201.014)	2.896.106.410.864	3.146.298.348.525	(191.536.169.522)	2.954.783.179.003
74	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	4.681.096.324.576	(285.868.160.849)	4.395.228.163.927	4.266.767.100.006	(207.297.586.310)	4.059.469.513.698
75	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	307.823.893.429	(39.442.623.260)	268.381.269.169	288.326.151.422	(33.691.837.879)	254.634.313.543
76	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	129.000.060	(8.580.005)	120.420.055	129.000.060	(6.000.003)	123.000.057
77	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	20.122.870.354	(201.228.704)	19.921.641.650	99.693.000	(5.981.580)	93.711.420
78	100	KOMISI YUDISIAL	70.841.354.266	(7.759.240.319)	63.082.113.947	70.623.104.266	(6.344.089.723)	64.279.014.543
79	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	438.939.441.375	(5.568.445.490)	433.370.995.885	120.650.875.622	(1.206.508.756)	119.444.366.866
80	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	53.356.203.110	(4.531.522.739)	48.824.680.371	50.418.164.020	(3.537.991.975)	46.880.172.045
81	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	909.558.100	(61.654.501)	847.903.599	1.095.905.100	(63.463.109)	1.032.441.991
82	107	BADAN SAR NASIONAL	548.499.366.800	(41.195.009.534)	508.274.357.266	442.009.886.324	(38.203.562.534)	403.806.323.790
83	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	9.092.960.775	(760.468.641)	8.332.492.134	8.598.833.775	(458.226.741)	8.140.607.034
84	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	118.554.989	(99.660.288)	18.894.701			0
85	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	43.388.734.188	(2.133.106.768)	41.235.627.420	37.021.835.924	(1.268.357.568)	35.752.478.356
86	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	847.404.115.608	(115.115.940.880)	732.288.174.728	848.304.579.359	(248.426.492.286)	599.878.087.073
87	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	106.231.483.734	(3.073.382.861)	103.158.101.073	100.507.448.736	(1.007.189.586)	99.500.259.150

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2014 *(AUDITED)*			31 DESEMBER 2013 *(AUDITED)*		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
88	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	445.989.537.954	(148.864.104.113)	297.125.433.741	411.265.921.754	(192.636.084.663)	218.629.837.091
89	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	415.686.460.826	(127.032.209.265)	288.654.251.561	404.896.149.107	(214.860.309.272)	190.035.839.835
90	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	1.371.785.629.984	(21.987.852.661)	1.349.797.777.323	72.509.996.606	(5.829.591.612)	66.680.404.994
		JUMLAH GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN	**210.934.630.857.630**	**(40.633.664.150.064)**	**170.300.966.707.566**	**191.283.482.816.413**	**(52.463.955.914.974)**	**138.819.526.901.439**
		ELIMINASI ICAPERA/OTORISASI PENCATATAN	0	0	0	(5.311.446.117)	0	0
		JUMLAH GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN NETO	**210.934.630.857.630**	**(40.633.664.150.064)**	**170.300.966.707.566**	**191.278.171.370.296**	**(52.463.955.914.974)**	**138.819.526.901.439**

www.peraturan.go.id

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2014 *(AUDITED)*			31 DESEMBER 2013 *(AUDITED)*		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	13.646.277.700	(2.086.366.343)	11.559.911.357	13.561.081.600	(3.339.409.234)	10.221.672.366
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	74.281.263.174	(24.501.014.561)	49.780.248.613	67.937.884.595	(23.244.012.478)	44.693.872.117
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	285.956.522.472	(132.463.315.803)	153.493.206.669	276.068.520.755	(97.649.180.141)	178.437.340.614
4	005	MAHKAMAH AGUNG	207.547.496.922	(61.631.578.276)	145.915.918.646	206.271.705.824	(49.435.830.410)	156.835.875.414
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	55.368.880.972	(23.712.653.694)	31.656.227.278	52.746.531.594	(20.634.155.481)	31.915.376.113
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	138.626.567.659	(77.324.569.653)	61.301.998.006	116.073.917.111	(271.797.935.800)	(155.724.018.689)
7	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	478.009.194.821	(237.602.763.919)	240.406.430.902	469.981.034.821	(57.342.711.212)	412.638.323.609
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	250.668.792.418	(65.166.492.663)	185.502.299.755	192.759.444.189	(40.769.683.776)	151.989.760.413
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	46.071.208.740	(41.016.566.668)	5.054.642.072	45.345.904.293	(4.891.217.770.831)	(4.845.871.866.538)
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	6.766.525.999.108	(5.324.211.536.615)	1.442.314.462.493	6.012.302.136.154	(63.772.394.301)	5.948.529.741.853
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	208.917.855.381	(70.743.723.412)	138.174.131.969	187.832.116.877	(130.091.739.716)	57.740.377.161
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	383.589.173.191	(113.012.504.560)	270.576.668.631	376.594.636.513	(165.844.942.845)	210.749.693.668
13	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN	20.729.280.564	(10.151.909.741)	10.577.370.823	19.157.870.618	(9.052.630.558)	10.105.240.060
14	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	443.955.018.637	(169.280.754.047)	274.694.264.590	465.461.076.093	(303.864.797.338)	161.596.278.755
15	018	BLU KEMENTERIAN PERTANIAN	11.615.022.490	(8.509.617.028)	3.105.405.462	11.100.798.830	(31.669.867.349.846)	(31.658.766.551.016)
16	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	51.641.621.122	(10.535.924.770)	41.105.696.352	48.749.460.682	(634.775.997.972)	(586.026.537.290)
17	019	BLU KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	823.122.541	(223.110.746)	600.011.795	640.415.541	(211.948.381.726)	(211.307.966.185)
18	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.918.092.289.332	(379.158.853.578)	2.538.933.435.754	2.361.987.592.279	(129.710.131.608)	2.232.277.460.671
19	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	76.225.506.282.684	(34.489.552.325.406)	41.735.953.957.278	63.703.842.252.840	(453.300.231.931)	63.250.542.020.909
20	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	86.471.531.291	(70.930.137)	86.400.601.154	52.724.893.361	(26.551.702.852)	26.173.190.509
21	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	609.409.850.843	(252.431.927.789)	356.977.923.054	588.999.387.880	(70.787.550.393)	498.211.837.487

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2014 *(AUDITED)*			31 DESEMBER 2013 *(AUDITED)*		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
22	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	858.149.005.641	(452.715.275.877)	405.433.729.764	801.146.331.893	(812.770.332.739)	(11.624.000.846)
23	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	167.553.585.199	(34.956.733.148)	132.596.852.051	139.107.342.768	(130.881.333.292.433)	(130.742.225.949.665)
24	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	389.470.244.893	(177.091.119.613)	212.379.125.280	339.626.428.097	(2.856.932.932)	336.769.495.165
25	025	KEMENTERIAN AGAMA	272.471.057.289	(83.221.924.537)	189.249.132.752	254.087.358.192	-	254.087.358.192
26	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	162.071.909.996	(70.201.976.245)	91.869.933.751	144.155.117.030	(15.123.075)	144.139.993.955
27	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.083.877.051.218	(562.449.920.681)	1.521.427.130.537	1.715.207.396.855	(16.903.310.289)	1.698.304.086.366
28	027	KEMENTERIAN SOSIAL	61.439.616.333	(27.504.747.106)	33.934.869.227	59.017.414.604	(546.836.736)	58.470.577.868
29	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	192.976.159.780	(79.566.728.293)	113.409.431.487	188.911.164.283	(14.019.126.986)	174.892.037.297
30	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.148.635.459.433	(895.544.474.148)	1.253.090.985.285	2.074.345.634.297	(757.981.988)	2.073.587.652.309
31	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	369.351.525.506.003	(131.707.517.080.826)	237.644.008.425.177	331.979.913.789.707	(8.011.628.046)	331.971.902.161.661
32	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	38.371.235.860	(3.759.036.293)	34.612.199.567	30.063.444.660	(143.456.650)	29.919.988.010
33	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	144.386.000	(18.732.725)	125.653.275	144.386.000	(380.207.454)	(235.821.454)
34	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	42.698.988.827	(19.405.010.037)	23.293.978.790	39.810.361.627	(38.853.036.184)	957.325.443
35	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	3.201.056.420	(635.053.370)	2.566.003.050	3.201.056.420	(10.023.331.245)	(6.822.274.825)
36	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	35.191.113.336	(13.333.229.954)	21.857.883.382	33.327.401.786	-	33.327.401.786
37	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	2.291.250.920	(842.952.078)	1.448.298.842	2.291.250.920	(9.200.289.217)	(6.909.038.297)
38	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	31.485.867.318	(6.545.944.730)	24.939.922.588	44.826.764.134	(1.510.104.819)	43.316.659.315
39	044	BLU KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	17.337.773.979	(4.957.070.565)	12.380.703.414	268.308.500	(4.226.923.020)	(3.958.614.520)
40	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	556.667.125	(147.828.638)	408.838.487	255.108.000	(6.321.875)	248.786.125

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2014 *(AUDITED)*			31 DESEMBER 2013 *(AUDITED)*		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
41	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI	1.395.216.550	(424.937.736)	970.278.814	1.395.216.550	(7.762.529.288)	(6.367.312.738)
42	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	144.480.571.850	(40.041.481.500)	104.439.090.350	123.811.988.233	(312.517.524.014)	(188.705.535.781)
43	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	35.880.627.826	(7.639.048.627)	28.241.579.199	35.880.627.826	(3.026.461.088)	32.854.166.738
44	054	BADAN PUSAT STATISTIK	19.526.925.682	(10.310.184.269)	9.216.741.423	19.232.499.391	(774.976.280)	18.457.523.111
45	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	6.256.553.570	(1.974.189.275)	4.282.364.295	5.684.654.080	(1.094.027.867)	4.590.626.213
46	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	11.031.324.249	(4.968.257.228)	6.063.067.021	9.112.741.069	(7.236.364.025)	1.876.377.044
47	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	630.646.000	(28.706.725)	601.939.275	630.646.000	-	630.646.000
48	058	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	29.788.948.329	(8.916.221.953)	20.872.724.376	28.432.188.719	(5.986.970.559)	22.445.218.160
49	059	BLU KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.169.593.700	0	1.169.593.700	1.169.593.700	-	1.169.593.700
50	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	713.118.227.078	(332.406.536.550)	380.711.690.528	690.315.237.530	(73.893.496.397)	616.421.741.133
51	060	BLU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	16.188.759.495	(5.867.194.744)	10.321.564.751	15.361.424.495	(390.019.141)	14.971.405.354
52	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	22.771.610.646	(3.926.356.565)	18.845.254.081	21.261.814.149	(18.221.595.342)	3.040.218.807
53	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	1.410.226.609	(889.530.477)	520.696.132	1.369.996.087	(81.396.930)	1.288.599.157
54	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	4.863.164.183	(1.097.995.149)	3.765.169.034	4.863.164.183	(64.549.278.900)	(59.686.114.717)
55	068	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	38.661.164.125	(8.391.016.254)	30.270.147.871	38.582.919.525	(34.098.548.799)	4.484.370.726
56	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	22.383.169.932	(7.704.856.219)	14.678.313.713	22.224.046.832	(16.718.608.873)	5.505.437.959
57	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	245.300.607.235	(84.372.949.422)	160.927.657.813	236.453.444.939	(17.576.051.075)	218.877.393.864
58	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.627.465.185	(505.636.997)	1.121.828.188	1.463.549.885	(2.054.254.884)	(590.704.999)

www.peraturan.go.id

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2014 *(AUDITED)*			31 DESEMBER 2013 *(AUDITED)*		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
59	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	44.607.776.966	(19.230.181.359)	25.377.595.607	44.607.776.966	-	44.607.776.966
60	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	542.646.198	(135.661.550)	406.984.648	542.646.198	(1.106.846.614)	(564.200.416)
61	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	190.790.046.565	(69.011.457.189)	121.778.589.376	181.623.004.708	(2.725.468.911)	178.897.535.797
62	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	47.014.938.483	(33.130.916.226)	13.884.022.257	41.401.520.690	(4.348.745.367)	37.052.775.323
63	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	86.909.087.569	(16.881.642.552)	70.027.445.017	85.333.172.769	(8.204.010.692)	77.129.162.077
64	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	40.640.386.532	(18.732.478.918)	21.907.907.614	39.550.825.032	(5.676.685.446)	33.872.139.586
65	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	3.548.374.375	(1.870.542.892)	1.677.831.483	3.443.374.375	(18.490.382.804)	(15.047.008.429)
66	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	2.272.411.872	(1.236.249.515)	1.036.162.357	2.272.411.872	(18.112.500)	2.254.299.372
67	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	5.492.174.627	(1.334.620.237)	4.157.554.390	13.295.627.871	(6.220.110.923)	7.075.516.948
68	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	11.182.670.697	(4.004.903.107)	7.177.767.590	16.240.117.839	(14.630.625.707)	1.609.492.132
69	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	18.968.218.870	(9.163.112.285)	9.805.106.585	18.692.047.270	-	18.692.047.270
70	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	15.053.018.438	(6.140.895.387)	8.912.123.051	10.715.903.069	(3.083.924.792)	7.631.978.277
71	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	26.395.033.044	(20.692.129.353)	5.702.903.691	26.248.898.044	-	26.248.898.044
72	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	80.500.000	(22.137.500)	58.362.500	80.500.000	(1.790.273.609)	(1.709.773.609)
73	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	10.124.259.936	(7.160.047.938)	2.964.211.998	9.582.525.136	(112.258.578.708)	(102.676.053.572)
74	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	98.080.554.350	(17.870.474.976)	78.210.079.374	82.688.038.322	-	82.688.038.322
75	100	KOMISI YUDISIAL	3.530.800.628	(3.431.521.523)	99.279.105	3.530.800.628	(5.655.433.130)	(2.124.632.502)
76	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	6.255.016.749	(2.336.440.593)	3.918.576.156	5.997.633.604	-	5.997.633.604
77	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	926.482.396.386	(148.334.580.581)	778.147.815.805	903.701.519.497	(3.257.266.295)	900.444.253.202
78	107	BADAN SAR NASIONAL	31.267.115.105	(7.709.877.755)	23.557.237.350	29.021.082.705	-	29.021.082.705
79	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	41.788.548.687	(6.015.182.700)	35.773.365.987	40.483.998.687	(21.416.182.817)	19.067.813.870

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2014 *(AUDITED)*			31 DESEMBER 2013 *(AUDITED)*		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
80	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	121.121.309.483	(32.391.900.251)	88.729.409.232	116.011.296.583	(4.091.203.444.719)	(3.975.192.148.136)
81	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	7.413.376.023.606	(3.132.208.824.523)	4.281.167.199.083	6.822.650.239.108	(1.627.262.399)	6.821.022.976.709
82	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	37.941.030.875	(4.795.035.934)	33.145.994.941	37.941.030.875	-	37.941.030.875
83	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	650.080.700	(101.932.399)	548.148.301	27.854.500	(2.413.050)	25.441.450
84	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	34.394.857.552	(15.630.368.885)	18.764.250.637	33.054.241.052	(15.767.596.927)	17.286.644.931
85	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVR	13.694.469.293	(10.625.520.616)	9.656.367.477	16.205.696.563	(12.361.794.963)	6.856.364.710
86	119	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	469.793.261.821	(62.378.929.595)	407.344.452.226	282.617.702.147	(55.965.753.564)	196.651.948.483
		JUMLAH JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L	**476.101.203.084.283**	**(179.837.796.082.502)**	**296.353.407.001.781**	**423.107.534.152.356**	**(176.076.542.783.170)**	**247.119.991.369.186**
87	999.08	BELANJA LAIN LAIN	62.454.581.894	(7.424.545.233)	55.030.036.661	35.032.074.880	(2.550.212.394)	32.481.862.486
		JUMLAH JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA BUN	**62.454.581.894**	**(7.424.545.233)**	**55.030.036.661**	**35.032.074.880**	**(2.550.212.394)**	**32.481.862.486**
		JUMLAH JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN	**476.253.657.666.167**	**(179.845.220.627.735)**	**296.408.437.038.452**	**423.232.566.227.236**	**(176.081.093.005.564)**	**247.151.473.221.672**

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 25.E

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2014 (AUDITED)			31 DESEMBER 2013 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	59.623.343.823	(99.799.649)	56.981.449.257	56.933.815.023	(18.957.383)	56.914.857.640
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	18.712.008.408	0	370.986.108.442	370.981.600.642	0	370.981.600.642
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	60.641.702.070	(260.233.843)	66.801.044.968	56.379.616.223	(217.023.968)	56.162.591.255
4	005	MAHKAMAH AGUNG	67.762.093.406	(510.736.405)	66.864.204.968	66.301.176.922	(448.666.069)	65.852.609.863
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	12.027.870.934	(276.287.738)	11.464.698.404	11.471.276.364	(244.722.363)	11.226.662.991
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	1.281.778.063.166	(4.248.749.874)	1.314.984.901.681	1.261.942.173.242	(4.771.088.799)	1.257.171.084.443
7	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	8.892.698.732	(61.112.700)	8.806.198.532	8.063.698.732	(6.443.986.224)	1.619.713.508
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	197.332.954.802	(3.942.670.241)	177.383.891.324	190.143.691.546	(2.173.678.654)	187.970.012.992
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	89.711.917.802	(4.977.257.990)	84.464.344.179	89.575.316.723	(4.925.391.533)	84.649.925.190
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	1.293.963.974.633	(46.348.454.501)	690.775.220.137	857.409.802.265	(29.830.990.399)	827.578.811.866
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	78.095.645.123	(5.642.621.555)	65.878.061.894	77.596.821.685	(7.424.820.963)	70.172.000.722
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	60.406.676.173	(265.808.863)	27.024.936.582	28.063.860.892	(301.126.830)	27.762.724.062
13	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN	11.842.985.407	(13.750.000)	13.844.501.266	13.801.033.266	0	13.801.033.266
14	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	317.945.669.502	(520.425.106)	288.261.106.626	291.079.233.976	(454.029.837)	290.625.204.139
15	018	BLU KEMENTERIAN PERTANIAN	477.404.376	0	477.404.376	482.221.631	0	482.221.631
16	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	24.698.981.646	(936.795.776)	20.489.664.642	22.999.124.941	(900.629.526)	22.098.495.416
17	019	BLU KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	3.611.601.392	(26.782.138)	3.363.429.186	3.363.429.186	(24.926.763)	3.328.602.423
18	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	421.806.764.264	(945.316.760)	437.842.628.388	438.602.421.932	(1.033.571.100)	437.468.850.832
19	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	2.923.998.614.036	(11.680.256.662)	2.102.146.164.869	2.094.146.850.907	(10.278.265.914)	2.083.868.584.993
20	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	21.288.182.180	(23.502.680)	17.376.738.802	17.400.241.482	(23.502.680)	17.376.738.802
21	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	888.573.311.565	(20.689.926.890)	439.496.047.142	502.693.267.709	(59.935.367.052)	442.757.900.656
22	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	701.576.982.774	(18.387.577.872)	633.291.603.699	628.623.497.452	(3.798.969.899)	626.824.527.553
23	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	136.521.670.220	(705.266.600)	129.468.920.533	134.107.341.864	(677.736.736)	133.429.605.118
24	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	77.917.443.568	(1.772.270.146)	0	76.982.382.199	(1.358.112.577)	74.624.269.622
25	026	KEMENTERIAN AGAMA	887.872.606.807	(42.215.190.396)	860.898.071.238	884.219.041.637	(37.186.964.706)	847.033.076.932
26	026	BLU KEMENTERIAN AGAMA	136.618.436.211	(1.334.798.876)	89.190.932.357	103.653.959.541	(497.003.160)	103.056.956.381
27	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	268.468.783.741	(1.109.602.508)	205.812.896.222	216.216.407.409	(455.796.798)	215.760.610.611
28	027	KEMENTERIAN SOSIAL	32.191.360.976	(2.078.720.894)	35.047.816.863	37.182.855.116	(2.003.743.664)	35.179.111.451
29	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	66.968.154.544	(661.467.676)	61.477.043.971	66.299.027.898	(633.692.862)	64.665.335.036
30	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	94.314.461.057	(4.372.913.991)	121.442.326.790	124.333.720.879	(3.803.763.957)	120.529.956.922
31	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	36.920.836.642.647	(563.100.214.667)	27.163.861.033.645	27.776.039.426.280	(274.004.315.365)	27.501.035.109.915
32	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMA	23.333.649.730	(3.000.000)	23.312.681.730	23.315.681.730	(3.000.000)	23.312.681.730
33	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	63.071.925	0	63.071.925	63.071.925	0	63.071.925
34	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.838.985.695	0	19.246.852.901	19.246.852.901	0	19.246.852.901
35	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	59.134.795.197	(596.507.425)	59.679.122.847	60.860.184.685	(407.115.550)	60.453.069.135
36	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	1.003.005.931	0	938.105.931	938.105.931	0	938.105.931
37	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	26.266.318.727	(110.261.340)	25.761.609.487	25.666.692.427	(110.261.340)	25.555.431.087
38	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	24.891.833.763	(40.000.000)	29.327.816.611	29.762.940.970	(320.634.286)	29.442.306.684
39	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	6.994.021.996	0	285.440.930	13.943.365.930	0	13.943.365.930
40	044	BLU KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	3.064.851.090	0	3.060.107.090	2.675.107.090	0	2.675.107.090
41	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	393.313.914	(4.600.000)	620.865.414	625.365.414	(4.600.000)	620.865.414
42	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI	1.705.089.287	0	7.340.175.552	7.340.175.552	0	7.340.175.552
43	060	BADAN INTELIJEN NEGARA	2.361.633.145	(39.760.000)	2.174.768.145	2.214.618.145	(39.760.000)	2.174.768.145
44	061	LEMBAGA SANDI NEGARA	5.789.328.786	(32.284.649)	5.268.491.651	5.297.864.300	(31.265.114)	5.266.599.186
45	062	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	568.097.704	0	0	568.097.704	0	568.097.704
46	064	BADAN PUSAT STATISTIK	35.463.437.946	(9.460.000)	32.971.094.163	31.713.515.941	(9.460.000)	31.704.055.941
47	065	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	3.395.606.160	0	3.024.386.883	3.024.386.883	0	3.024.386.883
48	066	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	927.035.111.730	(1.527.467.915)	798.125.018.460	790.479.838.655	(124.765.500)	790.355.083.155
49	067	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	109.683.110.765	(15.900.000)	104.797.299.758	103.982.062.608	(13.912.500)	103.968.150.108
50	069	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	36.162.888.243	(426.774.121)	37.314.737.668	37.848.773.770	(381.733.387)	37.467.040.383
51	069	BLU KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100.217.850	0	100.217.850	100.217.850		100.217.850
52	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	46.360.175.395	(16.614.355.274)	33.891.916.698	51.960.706.255	(16.176.348.840)	35.784.357.415
53	060	BLU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	277.079.432	0	243.129.431	262.979.432	0	262.979.432
54	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	11.477.492.957	(13.760.000)	9.882.637.874	11.214.339.873	(13.760.000)	11.200.689.873
55	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	3.799.626.608	(199.979.626)	2.068.196.761	2.161.941.248	(93.744.487)	2.068.196.761
56	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	1.029.594.329	(444.600.150)	621.712.929	1.029.594.329	(358.776.400)	670.818.929
57	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	7.285.801.166	(1.324.023.210)	5.397.283.880	6.612.455.856	(1.297.908.930)	5.314.547.926
58	067	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	19.900.387.000	0	764.260.000	764.260.000	0	764.260.000
59	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.854.024.301	(29.111.250)	4.211.800.192	4.263.911.292	(47.098.750)	4.216.812.542
60	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	9.476.361.444	0	9.403.780.620	9.403.780.620	0	9.403.780.620
61	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	10.324.490.706	(658.621.700)	8.265.794.763	9.559.461.707	(609.121.700)	8.950.340.007
62	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.144.269.551	(18.031.250)	402.112.370	1.187.433.901	(116.863.808)	1.070.680.093
63	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	21.368.796.488	0	20.918.324.461	20.918.324.461	0	20.918.324.461
64	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	246.874.097	(22.552.500)	224.321.597	232.283.807	(22.552.500)	209.731.307
65	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	370.895.725.763	(38.018.500)	43.701.071.604	48.168.574.178	(81.197.475)	48.087.376.703
66	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	9.747.992.160	(21.846.200)	9.690.196.800	8.362.063.000	(12.873.100)	8.349.179.900
67	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	53.153.090.197	(744.174.720)	50.224.192.696	50.899.467.145	(395.872.110)	50.503.595.035
68	081	BLU BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	1.611.350	0	1.611.350	1.611.350	0	1.611.350
69	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	26.229.186.179	(5.000.000)	23.076.614.062	23.345.895.070	(5.000.000)	23.340.895.070
70	082	BLU LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	1.046.600	0	1.046.600	1.046.600	0	1.046.600
71	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	11.889.134.876	(36.400.000)	11.728.917.696	11.765.317.696	(36.400.000)	11.728.917.696
72	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	1.793.323.011	0	1.683.694.001	1.683.694.001	0	1.683.694.001
73	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	824.007.897	(3.000.000)	922.898.747	1.100.160.255	(3.000.000)	1.097.160.255
74	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	3.979.818.552	(44.708.460)	3.612.316.552	3.720.653.932	(44.583.460)	3.676.070.482
75	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	11.468.093.385	(42.434.438)	7.889.374.065	7.924.247.888	(27.313.663)	7.896.934.225
76	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	1.083.666.529	(29.800.000)	1.006.313.604	1.006.113.604	(29.800.000)	976.313.604
77	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2.410.925.945	(322.300.005)	2.063.787.315	2.348.414.495	(298.846.518)	2.049.567.977
78	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	26.685.579.268	(526.360.506)	14.828.015.587	15.310.569.767	(514.384.266)	14.796.175.511
79	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	71.908.927.336	0	23.188.726.540	23.188.726.540	0	23.188.726.540
80	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	3.715.760.605	0	2.680.057.605	2.680.057.605	0	2.680.057.605
81	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	61.465.461.806	0	60.759.013.195	60.559.530.114	0	60.559.530.114

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 25.E

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2014 (AUDITED)			31 DESEMBER 2013 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
82	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	37.249.706.721	0	36.863.018.375	36.849.829.375	0	36.849.829.375
83	100	KOMISI YUDISIAL	741.191.281	0	741.191.281	741.191.281	0	741.191.281
84	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	4.962.607.560	0	4.794.692.760	4.794.692.760	0	4.794.692.760
85	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	13.464.657.839	0	10.728.167.923	10.511.376.663	0	10.511.376.663
86	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	442.262.602.666	0	424.107.480.607	415.171.434.466	0	415.171.434.466
87	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	7.092.039.675	(12.806.260)	7.060.440.675	7.068.978.175	(4.268.760)	7.064.709.426
88	107	BADAN SAR NASIONAL	8.410.232.895	0	6.144.769.895	6.136.729.895	0	6.136.729.895
89	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	1.705.165.695	(3.523.438)	1.638.115.998	1.865.512.429	(2.114.063)	1.863.398.366
90	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	9.435.269.760	(724.325.000)	8.271.156.760	8.995.481.760	(724.325.000)	8.271.156.760
91	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	1.130.024.470	0	1.037.727.925	1.037.727.925	0	1.037.727.925
92	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	21.184.964.144	(5.257.750.060)	15.927.009.954	19.263.968.793	(1.691.008.820)	17.662.959.973
93	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	14.873.468.309	(95.638.750)	14.338.607.309	14.373.306.309	(34.699.000)	14.338.607.309
94	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	39.981.670	0	39.981.670	39.981.670	0	39.981.670
95	114	SEKRETARIAT KABINET	621.262.646	0	598.662.646	598.662.646	0	598.662.646
96	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	10.192.892.820	0	5.202.429.926	4.863.179.426	0	4.863.179.426
97	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	16.960.975.544	(6.028.235.279)	7.974.548.784	14.748.023.606	(6.096.365.380)	8.651.658.226
98	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	2.564.627.191	(1.230.201.627)	1.242.614.679	2.447.385.181	(1.190.283.377)	1.257.101.804
99	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	10.940.426.600	0	10.940.426.600	10.940.426.600	0	10.940.426.600
JUMLAH ASET TETAP LAINNYA PADA K/L			**49.803.187.324.454**	**(774.488.766.397)**	**37.600.239.074.600**	**38.585.499.284.602**	**(485.244.511.723)**	**38.100.254.772.879**
100	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	53.318.056.622	0	53.318.056.622	22.330.581.800	(64.917.923)	22.265.663.877
JUMLAH ASET TETAP LAINNYA PADA BUN			**53.318.056.622**	**0**	**53.318.056.622**	**22.330.581.800**	**(64.917.923)**	**22.265.663.877**
JUMLAH ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN			**49.856.505.381.076**	**(774.488.766.397)**	**37.653.557.131.222**	**38.607.829.866.402**	**(485.309.429.646)**	**38.122.520.436.756**

www.peraturan.go.id

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)	31 DESEMBER 2013 (*AUDITED*)
1	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	329.911.400	4.360.968.400
2	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	8.996.220.885	51.445.951.151
3	005	MAHKAMAH AGUNG	830.740.162.866	573.769.368.646
4	006	KEJAKSAAN AGUNG	45.017.671.130	109.312.995.360
5	007	SEKRETARIAT NEGARA	828.044.530.631	654.166.375.234
6	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	17.363.161.530	43.738.576.277
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	289.587.309.032	824.353.851.131
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	7.738.461.384	7.738.461.384
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	34.783.847.899.625	27.134.953.190.740
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	376.887.800.936	513.912.932.922
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	1.071.518.685.012	457.589.043.017
12	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN	587.515.000	0
13	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	94.225.109.158	115.445.115.271
14	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	28.364.810.058	19.726.146.000
15	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.329.656.301.774	11.151.435.690.890
16	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	22.470.367.806.404	28.032.064.309.662
17	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	31.124.163.396	12.505.118.867
18	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.377.984.061.504	2.182.625.738.623
19	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.653.350.855.267	4.577.382.848.300
20	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	1.589.288.499.077	1.676.184.755.988
21	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	1.147.019.703.764	1.046.116.382.651
22	025	KEMENTERIAN AGAMA	817.950.299.672	565.327.053.297
23	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	578.616.573.814	724.403.890.023
24	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	84.065.730.349	189.160.467.945
25	027	KEMENTERIAN SOSIAL	5.087.668.500	939.701.738
26	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	56.226.901.318	53.803.018.094
27	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.088.190.417.055	366.159.232.103

www.peraturan.go.id

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)	31 DESEMBER 2013 (*AUDITED*)
28	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	33.543.670.139.268	32.932.366.109.466
29	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	722.709.700	10.660.099.950
30	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	47.684.415.636	36.423.023.654
31	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	0	6.105.435.500
32	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	47.021.166.840	0
33	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	1.207.700.000	1.207.700.000
34	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	5.126.144.126	47.130.397.700
35	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0	57.450.779.353
36	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI	0	0
37	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	0	0
38	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	48.223.159.200	0
39	054	BADAN PUSAT STATISTIK	49.521.563.301	26.369.134.394
40	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	453.167.000	196.490.800
41	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	84.225.374.709	30.599.208.039
42	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	72.195.685.100	6.833.632.600
43	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.926.317.558	129.214.126.765
44	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	785.270.238.015	1.430.922.516.271
45	060	BLU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1.149.202.925	11.841.225.500

www.peraturan.go.id

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)	31 DESEMBER 2013 (*AUDITED*)
46	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	16.514.351.868	8.954.243.610
47	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	20.559.163.098	41.657.569.915
48	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	0	0
49	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	46.009.000	113.001.786.426
50	067	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	0	18.616.214.000
51	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	5.178.827.082	11.967.763.000
52	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	312.288.709.134	229.014.853.791
53	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	6.980.223.754	15.484.807.854
54	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	41.957.300	41.957.300
55	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	120.335.938.567	117.597.564.270
56	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	6.113.145.205	36.857.625.510
57	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	6.110.426.900	21.082.692.693
58	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	85.053.012.196	4.665.146.506
59	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	317.694.210.727	106.100.000
60	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	0	0
61	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	2.596.788.000	2.596.788.000
62	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	0	35.914.316.264
63	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	0	6.843.767.057
64	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	16.869.758.480	10.128.387.850

www.peraturan.go.id

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)	31 DESEMBER 2013 (*AUDITED*)
65	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	65.126.618.092	53.529.288.335
66	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	651.975.394.363	43.883.648.890
67	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	541.133.005.008	541.133.005.008
68	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	126.238.958.673	33.747.108.771
69	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	5.176.288.432	4.776.470.776
70	100	KOMISI YUDISIAL	29.000.000	29.000.000
71	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	0	76.899.401.025
72	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	2.352.784.000	2.352.784.000
73	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	74.591.228.562	78.498.094.472
74	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	128.325.365.975	38.867.475.831
75	107	BADAN SAR NASIONAL	48.500.000	17.961.035.000
76	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	13.662.950.583	13.569.237.083
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	12.352.890.058	14.980.165.810
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS &	8.358.941.226	477.975.109.090
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	47.500.000	0
80	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	1.229.698.500	10.969.342.400
81	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	214.854.550	0
82	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	58.499.324.151	1.350.691.861.264
JUMLAH KDP PADA K/L			**113.911.321.037.403**	**119.250.335.675.507**

www.peraturan.go.id

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)	31 DESEMBER 2013 (*AUDITED*)
81	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	35.393.462.087	168.704.470.004
JUMLAH KDP PADA BUN			**35.393.462.087**	**168.704.470.004**
JUMLAH KDP PADA K/L DAN BUN			**113.946.714.499.490**	**119.419.040.145.511**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN 26
Tagihan TP/TGR
per 31 Desember 2014

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 26

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2014 *(AUDITED)*			31 DESEMBER 2013 *(AUDITED)*		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	0	0	0	35.750.000	(178.750)	35.571.250
2	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.316.696.744	(2.316.696.744)	0	2.270.337.544	(2.270.337.544)	0
3	005	MAHKAMAH AGUNG	575.846.267	(2.879.231)	572.967.036	433.688.156	(17.453.718)	416.234.438
4	006	KEJAKSAAN AGUNG	109.788.627	(37.850.127)	71.938.500	112.188.627	(37.862.127)	74.326.500
5	007	SEKRETARIAT NEGARA	4.013.400	(20.067)	3.993.333	0	0	0
6	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	832.025.840	(6.073.190)	825.952.650	1.073.420.040	(5.436.279)	1.067.983.761
7	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	4.189.609.557	(4.164.860.922)	24.748.635	4.246.530.192	(3.833.143.152)	413.387.040
8	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	916.690.572	(86.600.487)	830.090.085	1.065.108.739	(89.696.707)	975.412.032
9	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	2.458.861.483	(213.641.201)	2.245.220.282	2.238.991.601	(14.288.710)	2.224.702.791
10	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	4.970.000	(24.850)	4.945.150	2.964.538.169	(2.551.694.748)	412.843.421
11	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	0	0	0	0	0	0
12	019	BLU KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	24.000.000	(120.000)	23.880.000	0	0	
13	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	44.777.500	(37.800.063)	6.977.437	54.340.000	(37.847.875)	16.492.125
14	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	328.355.976	(328.355.976)	0	412.578.733	(16.085.073)	396.493.660
15	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	0	0	24.443.750	(122.219)	24.321.531
16	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5.785.437.078	(120.147.911)	5.665.289.167	5.822.878.422	(120.185.118)	5.702.693.304
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	580.264.790	(67.172.101)	513.092.689	564.330.625	(67.092.430)	497.238.195
18	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	236.734.500	(1.183.673)	235.550.827	7.775.000	(38.875)	7.736.125
19	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0	0	0	2.718.135.714	(210.249.290)	2.507.886.424
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	93.258.320	(93.258.320)	0	94.358.320	(93.263.820)	1.094.500
21	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	18.552.600	(92.763)	18.459.837	27.965.000	(139.825)	27.825.175
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	30.104.918	(157.811)	29.947.107	0	0	0
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	610.983.244	(174.865.120)	436.118.124	1.014.140.231	(321.554.002)	692.586.229
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	18.896.574	(94.483)	18.802.091	29.644.998	(148.225)	29.496.773
25	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	358.225.805	(169.015.610)	189.210.195	180.364.805	(168.126.305)	12.238.500
26	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	33.964.410	(169.822)	33.794.588	45.480.335	(227.402)	45.252.933
27	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	1.352.727.269	(1.352.727.269)	0	1.363.636.361	(1.363.636.361)	0
28	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	4.460.478	(22.302)	4.438.176	0	0	0
29	044	BLU KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	116.210.500	(581.053)	115.629.447	23.460.378	(117.302)	23.343.076
30	054	BADAN PUSAT STATISTIK	74.796.915	(6.497.092)	68.299.823	38.430.590	(3.477.005)	34.953.585
31	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	107.250.000	(536.250)	106.713.750	0	0	0
32	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.853.147.788	(2.041.355.864)	811.791.924	3.016.299.748	(2.076.650.145)	939.649.603
33	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.750.712.558	(382.897.401)	1.367.815.157	1.329.990.183	(346.718.259)	983.271.924
34	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	216.339.030	(205.594.507)	10.744.523	251.794.030	(205.771.782)	46.022.248
35	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	26.955.517	(894.778)	26.060.739	33.572.200	(326.245)	33.245.955
36	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	244.078.956	(2.235.168)	241.843.788	0	0	0
37	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	92.683.322	(3.390.250)	89.293.072	144.473.523	(289.565)	144.183.958
38	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	5.545.072	(2.772.536)	2.772.536	48.049.269	(240.247)	47.809.022
39	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	0	0	0	60.379.494.321	(59.684.253.419)	695.240.902
40	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	24.333.560.954	(21.075.857.825)	3.257.703.129	23.382.872.541	(21.140.027.111)	2.242.845.430
41	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	79.447.859.672	(79.447.859.672)	0	80.474.493.676	(80.474.493.676)	0
42	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	2.896.717.061	(1.984.022.716)	912.694.345	1.975.914.447	(1.694.249.069)	281.665.378
43	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	10.203.918.440	(10.147.052.966)	56.865.474	10.489.226.067	(10.421.411.613)	67.814.454
44	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	147.036.256	(735.181)	146.301.075	22.676.256	(113.381)	22.562.875
45	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	0	0	0	41.400.000	(207.000)	41.193.000
46	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	29.773.865.318	(29.773.865.318)	0	30.666.908.630	(30.666.908.630)	0
47	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	444.184.250	(2.220.921)	441.963.329	460.984.250	(2.304.921)	458.679.329
48	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	2.400.000	(12.000)	2.388.000	0	0	0
49	104	BNP2TKI	127.200.000	(636.000)	126.564.000	0	0	0
50	107	BADAN SAR	5.193.000	(25.965)	5.167.035	0	0	0
51	109	KOMISI PERSAINGAN PENGAWASAN USAHA	61.102.058	(5.633.292)	55.468.766	6.445.462	(6.445.462)	0
52	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	359.620.150	0	359.620.150	361.320.150	0	361.320.150
JUMLAH TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI				**(154.258.506.798)**	**19.961.115.971**	**239.948.430.983**	**(217.942.813.387)**	**22.005.617.596**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN 27
Aset Tak Berwujud
per 31 Desember 2014

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 27

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER2014 (*AUDITED*)			31 DESEMBER 2013 (*AUDITED*)		
			ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	JUMLAH	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	JUMLAH
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	1.197.444.540	0	1.197.444.540	988.499.540	0	988.499.540
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	29.215.639.010	0	29.215.639.010	27.953.090.474	0	27.953.090.474
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	102.622.959.523	0	102.622.959.523	90.965.279.408	0	90.965.279.408
4	005	MAHKAMAH AGUNG	26.616.952.681	0	26.616.952.681	24.199.349.226	0	24.199.349.226
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	3.496.589.903	0	3.496.589.903	3.496.589.903	0	3.496.589.903
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	14.142.951.346	0	14.142.951.346	12.759.890.598	0	12.759.890.598
7	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	643.652.000	0	643.652.000	600.312.000	0	600.312.000
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	729.698.031.385	0	729.698.031.385	736.983.395.672	0	736.983.395.672
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	29.705.738.736	0	29.705.738.736	14.851.369.282	0	14.851.369.282
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	906.076.285.266	0	906.076.285.266	653.836.669.020	0	653.836.669.020
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	379.150.705.996	0	379.150.705.996	333.848.538.055	0	333.848.538.055
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	599.419.969.311	0	599.419.969.311	580.754.434.414	0	580.754.434.414
13	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN	3.226.805.040	0	3.226.805.040	3.177.745.040	0	3.177.745.040
14	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	69.672.843.643	0	69.672.843.643	66.334.123.856	0	66.334.123.856
15	018	BLU KEMENTERIAN PERTANIAN	149.250.000	0	149.250.000	149.250.000	0	149.250.000
16	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	30.031.767.899	0	30.031.767.899	29.171.123.047	0	29.171.123.047
17	019	BLU KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	505.825.000	0	505.825.000	412.105.000	0	412.105.000
18	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.770.186.305.559	0	1.770.186.305.559	1.748.063.883.559	0	1.748.063.883.559
19	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	2.585.368.604.95E	15.907.607.700	2.601.276.112.656	2.130.288.135.264	16.045.930.645	2.146.334.065.909
20	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	95.984.909.238	0	95.984.909.238	76.395.841.868	0	76.395.841.868
21	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	447.383.256.882	0	447.383.256.882	420.955.179.489	0	420.955.179.489
22	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	236.494.062.657	0	236.494.062.657	204.525.641.293	0	204.525.641.293
23	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	94.534.476.643	0	94.534.476.643	79.882.134.668	0	79.882.134.668
24	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	49.800.679.014	0	49.800.679.014	42.411.353.924	0	42.411.353.924
25	025	KEMENTERIAN AGAMA	79.768.834.512	0	79.768.834.512	74.539.181.070	0	74.539.181.070
26	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	28.795.789.31E	0	28.795.789.316	21.854.422.732	0	21.854.422.732
27	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	51.963.724.259	0	51.963.724.259	48.132.726.926	0	48.132.726.926
28	027	KEMENTERIAN SOSIAL	48.681.999.306	0	48.681.999.306	47.714.157.806	0	47.714.157.806
29	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	81.557.611.504	0	81.557.611.504	77.224.162.861	0	77.224.162.861
30	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	51.950.041.106	0	51.950.041.106	47.570.707.616	0	47.570.707.616
31	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	5.110.211.396.59E	23.937.005.500	5.134.148.402.101	4.941.193.108.154	1.043.392.500	4.942.236.500.654
32	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	47.963.518.559	0	47.963.518.559	43.446.575.134	0	43.446.575.134
33	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	858.000.000	0	858.000.000	517.810.000	0	517.810.000
34	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.326.863.920	0	2.326.863.920	2.326.863.920	0	2.326.863.920
35	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	29.798.438.791	0	29.798.438.791	25.966.956.791	0	25.966.956.791
36	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	15.245.401.33E	0	15.245.401.336	14.023.859.524	0	14.023.859.524
37	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	45.075.262.79E	0	45.075.262.796	43.854.828.646	0	43.854.828.646
38	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	30.254.292.543	0	30.254.292.543	22.801.257.099	0	22.801.257.099
39	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	15.082.339.16E	0	15.082.339.165	18.489.303.462	0	18.489.303.462
40	044	BLU KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	14.771.953.954	0	14.771.953.954	16.405.871.430	0	16.405.871.430
41	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	3.581.798.500	0	3.581.798.500	3.359.045.500	0	3.359.045.500
42	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI	3.904.198.670	0	3.904.198.670	3.425.238.320	0	3.425.238.320
43	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	441.406.567.188	0	441.406.567.188	441.189.209.188	0	441.189.209.188
44	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	331.817.647.129	0	331.817.647.129	134.768.120.799	0	134.768.120.799
45	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	4.260.146.044	0	4.260.146.044	4.220.146.044	0	4.220.146.044
46	054	BADAN PUSAT STATISTIK	514.074.088.651	0	514.074.088.651	441.265.030.532	0	441.265.030.532
47	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	20.551.202.849	0	20.551.202.849	19.912.235.037	0	19.912.235.037
48	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	125.682.390.455	0	125.682.390.455	119.856.307.804	0	119.856.307.804
49	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	82.073.123.239	0	82.073.123.239	77.410.216.499	0	77.410.216.499
50	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	280.695.214.181	0	280.695.214.181	232.192.723.569	0	232.192.723.569
51	059	BLU KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.461.943.300	0	5.461.943.300	5.461.943.300	0	5.461.943.300
52	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	411.278.163.171	0	411.278.163.171	400.604.904.112	0	400.604.904.112
53	060	BLU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	712.970.515	0	712.970.515	4.138.003.623	0	4.138.003.623
54	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	63.425.145.519	0	63.425.145.519	58.174.737.879	0	58.174.737.879
55	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	155.922.912.20E	749.999.975	156.672.912.181	149.671.659.546	2.003.599.250	151.675.258.796
56	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	98.369.889.770	0	98.369.889.770	94.627.521.270	0	94.627.521.270
57	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	65.935.220.77E	620.181.072	66.555.401.850	65.457.417.778	620.181.072	66.077.598.850
58	067	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000	0	14.000.000
59	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	26.941.175.520	0	26.941.175.520	26.226.808.520	0	26.226.808.520
60	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	2.025.954.589	0	2.025.954.589	1.748.204.589	0	1.748.204.589
61	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	148.213.906.853	0	148.213.906.853	139.293.315.153	0	139.293.315.153
62	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	2.865.565.166	0	2.865.565.166	2.238.654.166	0	2.238.654.166
63	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	11.685.470.779	0	11.685.470.779	11.301.960.459	0	11.301.960.459
64	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	14.029.326.521	0	14.029.326.521	12.179.544.902	0	12.179.544.902
65	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	34.635.341.445	0	34.635.341.445	25.114.798.584	0	25.114.798.584

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 27

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER2014 (*AUDITED*)			31 DESEMBER 2013 (*AUDITED*)		
			ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	JUMLAH	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	JUMLAH
66	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	189.848.347.154	0	189.848.347.154	196.568.317.189	0	196.568.317.189
67	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOG	86.115.821.609	0	86.115.821.609	84.038.864.209	0	84.038.864.209
68	081	BLU BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	34.727.000	0	34.727.000	34.727.000	0	34.727.000
69	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	55.475.114.093	84.980.513.700	140.455.627.793	33.894.596.887	0	33.894.596.887
70	082	BLU LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	4.361.000	0	4.361.000	4.361.000	0	4.361.000
71	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	1.307.259.309.802	40.979.314.176	1.348.238.623.978	705.844.892.383	443.887.407.132	1.149.732.299.515
72	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	2.102.377.250	0	2.102.377.250	1.738.718.750	0	1.738.718.750
73	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	1.522.086.904	0	1.522.086.904	1.470.386.876	0	1.470.386.876
74	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	4.855.994.100	0	4.855.994.100	3.768.229.100	0	3.768.229.100
75	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	8.170.142.625	0	8.170.142.625	14.565.599.145	0	14.565.599.145
76	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	150.207.722.319	0	150.207.722.319	148.865.894.061	0	148.865.894.061
77	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	10.881.355.470	0	10.881.355.470	10.659.761.595	0	10.659.761.595
78	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	134.018.009.005	0	134.018.009.005	128.700.991.539	0	128.700.991.539
79	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	56.109.487.803	0	56.109.487.803	56.109.487.803	0	56.109.487.803
80	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	23.761.708.900	0	23.761.708.900	23.712.208.900	0	23.712.208.900
81	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	33.045.612.876	0	33.045.612.876	28.775.595.567	0	28.775.595.567
82	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	5.763.226.732	0	5.763.226.732	5.614.616.732	0	5.614.616.732
83	100	KOMISI YUDISIAL	2.330.034.798	0	2.330.034.798	1.838.089.798	0	1.838.089.798
84	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	33.400.500.484	0	33.400.500.484	28.902.576.584	0	28.902.576.584
85	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	8.764.591.770	0	8.764.591.770	8.685.337.920	0	8.685.337.920
86	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	549.989.747	0	549.989.747	549.989.747	0	549.989.747
87	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	16.326.202.309	0	16.326.202.309	11.755.967.809	0	11.755.967.809
88	107	BADAN SAR NASIONAL	76.161.459.746	0	76.161.459.746	49.718.523.796	0	49.718.523.796
89	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	6.878.242.861	0	6.878.242.861	6.566.995.261	0	6.566.995.261
90	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	67.112.560.685	668.575.820	67.781.136.505	56.313.187.005	668.575.820	56.981.762.825
91	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	201.834.234	0	201.834.234	78.480.000	0	78.480.000
92	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	121.072.524.296	0	121.072.524.296	107.258.711.036	0	107.258.711.036
93	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	34.722.864.683	0	34.722.864.683	26.557.799.924	0	26.557.799.924
94	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	811.263.900	0	811.263.900	668.703.900	0	668.703.900
95	114	SEKRETARIAT KABINET	6.925.396.446	0	6.925.396.446	6.824.438.946	0	6.824.438.946
96	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	10.692.338.851	0	10.692.338.851	2.554.622.411	0	2.554.622.411
97	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	1.402.146.618	0	1.402.146.618	1.337.411.618	0	1.337.411.618
98	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	3.006.722.086	0	3.006.722.086	2.502.313.211	0	2.502.313.211
99	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	260.850.000	0	260.850.000	260.850.000	0	260.850.000
JUMLAH ASET TAK BERWUJUD PADA K/L			**19.168.989.465.087**	**167.843.097.946**	**19.336.832.563.033**	**16.959.724.722.646**	**464.269.086.419**	**17.423.993.809.065**
100	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	81.527.065.112	0	81.527.065.112	23.514.123.117	1.225.529.800	24.739.652.917
JUMLAH ASET TAK BERWUJUD PADA BUN			**81.527.065.112**	**0**	**81.527.065.112**	**23.514.123.117**	**1.225.529.800**	**24.739.652.917**
JUMLAH ASET TAK BERWUJUD PADA K/L DAN BUN			**19.250.516.530.199**	**167.843.097.946**	**19.418.359.628.145**	**16.983.238.845.763**	**465.494.616.219**	**17.448.733.461.982**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN 28

Aset KKKS

per 31 Desember 2014

Laporan Barang Milik Negara KKKS
Harta Benda Inventaris
Per 31 Desember 2014
(dalam US Dollar)

No	Kode		KKKS	Blok	LAMPIRAN B			Per 31 Desember 2014		
					Saldo BMN 2013	Akumulasi Penyusutan 2013	Nilai Buku 2013	Saldo BMN 2014	Akumulasi Penyusutan 2014	Nilai Buku 2014
KKKS EKSPLOITASI										
1	A	1	SANTOS (NW NATUNA)	NORTH WEST NATUNA				442.520.253,45	106.703.974,75	335.716.418,74
2	A	2	BOB PERTAMINA – BUMI SIAK PUSAKA	CPP BLOCK, ONS, CENTRAL SUMATERA	328.052.500,00	88.988.843,75	279.363.656,25	456.520.635,11	97.706.886,36	358.813.748,75
3	A	3	BP BERAU LTD.	BERAU, OFF IRIAN JAYA	176.325.068,10	41.945.960,40	134.179.107,70	2.392.453.134,76	1.171.958.672,22	1.220.582.509,55
4	A	4	BP MATTAN (ELANG BARU)	MATTAN BLOCK, ONS JAVA						
5	A	5	BP WIRAGAG LTD.	WIRAGAG BLOCK, ONS IRIAN JAYA						
6	A	6	CANADA PETROLEUM SERVICES CANADA INC	BANGKANAI BLOCK, ONS OFF EAST JAVA	56.900.000,00	3.536.875,00	53.053.125,00	61.382.619,45	11.508.341,15	49.874.278,30
7	A	7	CHEVRON INDONESIA COMPANY	EAST KALIMANTAN, ONS, OFF						
8	A	8	CHEVRON INDONESIA COMPANY (CANAL)	CANAL						
9	A	9	CHEVRON INDONESIA COMPANY (RAPAK)	RAPAK						
10	A	10	CHEVRON MAKASSAR LTD.	OFF MAKASSAR STRAIT						
11	A	11	CITIC SERAM ENERGY LIMITED	SERAM NON BULA						
12	A	12	CNOOC SES LTD.	SOUTHEAST SUMATERA, OFF						
13	A	13	CONOCOPHILLIPS (GRISSIK) LTD.	CORRIDOR BLOCK, ONS, SOUTH						
14	A	14	CONOCOPHILLIPS (SOUTH JAMBI) LTD.	SOUTH JAMBI "B" BLOCK, ONS, JAMBI						
15	A	15	CONOCOPHILLIPS (NUNUKAN) LTD.	SOUTH NATUNA SEA BLOCK "B", OFF	489.852.000,00	118.736.730,00	371.115.270,00	438.202.152,82	143.190.790,17	295.011.362,65
16	A	16	EMP (BENTU) LTD.	BENTU SEGAT BLOCK, ONS, RIAU	2.783.720,93	173.982,56	2.609.738,37	2.969.905,31	556.563,55	2.404.841,81
17	A	17	EMP (KORINCI BARU) LTD.	KORINCI BARU BLOCK, ONS, RIAU						
18	A	18	EMP MALACCA STRAIT S.A.	MALACCA STRAIT BLOCK, OFF	103.988.269,00	21.449.362,94	82.538.906,06	104.163.216,54	34.508.112,09	69.655.104,45
19	A	19	ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG) PTY. LTD.	SENGKANG, ONS, SOUTH SULAWESI	304.417.000,00	49.134.937,50	255.282.062,50	1.439.209.869,55	366.060.448,23	1.073.149.421,32
20	A	20	ENI KRUENG MANE	OFF, NORTH ACEH						
21	A	21	ENI MUARA BAKAU B.V.	MUARA BAKAU	16.725.000,00	3.534.375,00	13.190.625,00	13.610.949,73	5.615.775,55	7.995.174,28
22	A	22	EXXONMOBIL OIL IND. INC.	"B" BLOCK, ONS, NORTH SUMATERA	229.679.220,00	36.657.705,00	193.021.515,00	241.673.782,83	66.783.865,87	174.889.916,96
23	A	23	SAKA INDONESIA PANGKAH, LTD (Hess)	PANGKAH BLOCK, OFF N.E. JAVA SEA	7.911.000,00	2.089.125,00	4.951.875,00	6.562.452,24	2.742.182,37	3.820.269,87
24	A	24	HUSKY CNOOC MADURA LTD.	MADURA STRAIT	1.827.025.383,87	247.394.172,23	1.579.681.211,64	3.171.851.552,24	637.540.861,82	2.534.111.690,42
25	A	25	INDONESIA PETROLEUM LTD.	ATTAKA BLOCK, OFF, EAST KAL						
26	A	26	INPEX MASELA, LTD.	MASELA BLOCK						
27	A	27	JOB PERTAMINA EMP GEBANG	GEBANG BLOCK, ONS OFF NORTH SUM						
28	A	28	JOB PERTAMINA GOLDEN SPIKE II	RAJASPENDOPO BLOCK, ONS, SOUTH						
29	A	29	JOB PERTAMINA MEDCO ESP SEMENGGARIS	SEMENGGARIS BLOK				328.139.783,34	82.034.695,84	246.104.087,51
30	A	30	JOB PERTAMINA PETROCHINA EAST JAVA	TUBAN BLOCK, ONS, JAWA TIMUR	246.807.050,00	58.014.387,50	188.967.662,50	331.181.893,10	86.437.953,76	244.690.939,34
31	A	31	JOB PERTAMINA PETROCHINA SALAWATI	KEPALA BURUNG BLOCK	17.515.000,00	3.825.625,00	13.689.375,00	12.223.065,14	5.022.347,25	7.200.718,09
32	A	32	JOB PERTAMINA TALISMAN (OK) LTD.	OGAN KOMERING, ONS, SUMSEL	11.659.989,40	3.994.668,38	7.665.320,82	11.988.679,82	5.795.295,27	6.193.384,55
33	A	33	JOB PERTAMINA TALISMAN JAMBI MERANG	JAMBI MERANG BLOCK, ONS, JAMBI	184.179.457,00	46.616.421,38	137.563.035,63	257.035.404,14	85.201.942,52	171.833.461,62
34	A	34	JOB PERTAMINA-MEDCO TOMORI SULAWESI	SENORO-TOLI, ONS OFF	7.200.000,00	825.000,00	1.375.000,00			
35	A	35	KALREZ PETROLEUM (SERAM) LIMITED	BULA, ONS, SERAM	307.661.537,26	120.938.743,54	387.062.793,72	476.314.872,15	161.906.574,58	314.408.297,56
36	A	36	KANGAN ENERGY INDONESIA LIMITED	KANGEAN BLOCK, ONS, OFF, E.JAVA	22.297.500,00	7.799.062,50	14.498.437,50	22.964.028,47	10.934.314,78	12.029.713,69
37	A	37	LARINTO BRANTAS INC.	BRANTAS BLOCK, ONS, OFF, EAST JAVA	28.647.116,00	8.230.166,50	20.416.949,50	29.631.988,26	11.681.488,78	17.950.499,48
38	A	38	MANHATTAN KALIMANTAN	TARAKAN	28.647.116,00					
39	A	39	MOBIL CEPU LTD.	CEPU BLOCK, JAVA	216.119.000,00	33.218.000,00	182.901.000,00	245.983.704,29	63.630.031,51	182.353.672,66
40	A	40	MOBIL EXPLORATION IND.	NORTH SUMATERA, OFF						
41	A	41	MONTDOR OIL TUNGKAL LIMITED	TUNGKAL, ONS, JAMBI						
42	A	42	MUBADALA PETROLEUM (SERUI)	SERUI	96.768.270,00	24.983.067,50	71.785.202,50	123.307.988,66	39.488.262,78	83.819.725,88
43	A	43	PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LTD.	NORTHWEST JAVA SEA, OFF						
44	A	44	PERUSDA "BENUO TAKA"	WALAHI – EAST KALIMANTAN	11.795.000,00	2.467.500,00	9.327.500,00	12.909.456,67	4.233.175,14	8.676.281,53

www.peraturan.go.id

Laporan Barang Milik Negara KKKS
Harta Benda Inventaris
Per 31 Desember 2014
(dalam US Dollar)

No	Kode		KKKS	Blok	LAMPIRAN 6			Per 31 Desember 2014		
					Saldo BMN 2013	Akumulasi Penyusutan 2013	Nilai Buku 2013	Saldo BMN 2014	Akumulasi Penyusutan 2014	Nilai Buku 2014
45	A	45	PETROCHINA INTERNATIONAL (PERMAJI) LTD	SALAWATI BASIN	15.800.000,00	2.221.975,00	13.578.125,00	15.951.533,41	3.150.302,26	12.801.231,15
46	A	46	PETROCHINA INTERNATIONAL BANGKO LTD	BANGKO, ONS, SOUTH SUMATERA	-	-	-	-	-	-
47	A	47	PETROCHINA INTL JABUNG LTD	JABUNG BLOCK, ONS, JAMBI	1.719.055.952,46	443.395.497,98	1.275.660.454,48	2.364.521.132,50	764.144.714,86	1.600.376.417,64
48	A	48	PETRONAS CARIGALI (PB) SND LTD	LB TAPIANG	-	-	-	-	-	-
49	A	49	PETRONAS CARIGALI (Muriah) Ltd	MURIAH	-	-	-	-	-	-
50	A	50	PETROSELAT LTD	SELAT PANJANG, ONS, RIAU	24.900.000,00	7.571.875,00	16.728.125,00	55.377.752,66	13.236.560,39	42.141.192,27
51	A	51	PREMIER OIL NATUNA SEA B.V.	Natuna Sea Block "A", Offs	14.899.627,50	2.937.430,16	11.962.197,34	68.847.364,07	11.330.117,19	57.517.246,88
52	A	52	PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA (Rokan)	ROKAN	-	-	-	-	-	-
53	A	53	PT. PHE SNB	SNB	-	-	-	-	-	-
54	A	54	PT EMP TONGA	TONGA FIELD	47.450.240,00	10.225.060,00	37.225.180,00	47.350.925,47	16.118.845,38	31.232.080,09
55	A	55	PT MANDIRI PANCA USAHA	SEMBLANG	-	-	-	-	-	-
56	A	56	PT. MEDCO E&P BENGARA	BENGARA I	-	-	-	-	-	-
57	A	57	PT. Medco E&P Lematang	LEMATANG	178.976.100,00	44.038.837,50	134.937.262,50	186.136.468,66	59.790.354,40	126.346.094,26
58	A	58	PT MEDCO E&P RIMAU	RIMAU	370.645.984,00	103.981.385,50	266.664.598,50	384.560.319,97	129.417.147,69	255.143.172,47
59	A	59	PT MEDCO E&P INDONESIA	SOUTH SUMATERA	403.791.800,00	95.367.600,00	308.429.200,00	408.819.360,91	159.272.292,89	249.546.068,01
60	A	60	PT. MEDCO E&P TARAKAN	TARAKAN	406.945.000,00	75.195.937,50	331.749.062,50	3.773.129.168,19	1.206.892.053,48	2.566.237.114,71
61	A	61	PT MEDCO E&P MALAKA	AREA "A", NORTH SUMATERA	30.936.300,00	8.930.837,50	22.005.625,00	29.393.721,95	12.187.946,13	17.205.875,76
62	A	62	PT PERTAMINA EP	PERTAMINA EP	450.244.050,00	116.205.934,38	334.038.115,63	5.311.047.543,99	1.393.110.600,62	3.917.936.943,36
63	A	63	PT PHE WMO	WEST MADURA, OFF, EAST JAVA	366.451.419,97	108.030.249,69	258.421.170,28	374.466.998,77	150.697.105,50	223.769.893,27
64	A	64	PT SELE RAYA MERANGIN DUA	MERANGIN II BLOCK, OFF, SOUTH SUM	-	-	-	70.254.716,75	34.849.129,49	35.405.587,26
65	A	65	PT. SELE RAYA BELIDA	BELIDA	70.250.000,00	26.063.500,00	44.186.500,00	-	-	-
66	A	66	PT SPR LANGGAK	LANGGAK, RIAU	95.359.000,00	23.897.000,00	71.462.000,00	97.973.035,22	36.773.463,96	61.199.571,26
67	A	67	PT SUMATERA PERSADA ENERGI	WEST KAMPAR	-	-	-	-	-	-
68	A	68	PT TIARA PETROLEUM	WEST AIR KOMERING	-	-	-	-	-	-
69	A	69	PT. TROPIK ENERGI PANDAN	PANDAN	-	-	-	-	-	-
70	A	70	PT. ODIRA ENERGI	KARANG AGUNG	-	-	-	-	-	-
71	A	71	SALAMANDER ENERGY	BANGGANAI BLOK	-	-	-	325.793.072,71	98.919.229,37	226.873.843,34
72	A	72	SANTOS (MADURA OFFSHORE) PTY. LTD.	MADURA OFF BLOCK, SE MADURA	-	-	-	-	-	-
73	A	73	SANTOS (SAMPANG) PTY LTD	SAMPANG, ONS, OFF	-	-	-	-	-	-
74	A	74	STAR ENERGY (KAKAP) LTD	KAKAP BLOCK	297.036.941,79	22.836.972,36	274.199.969,43	769.414.056,68	143.113.878,65	626.300.178,03
75	A	75	TATELY N.V.	PALMERAH BLOK	173.441.573,81	97.173.579,69	170.707.995,31	115.301.588,85	43.693.997,04	71.607.951,81
76	A	76	TOTAL E&P INDONESIE (Mahakam)	MAHAKAM	849.801.836,16	231.633.791,33	617.427.041,81	1.026.371.850,10	356.765.487,57	669.653.362,53
77	A	77	TOTAL E&P Tengah	TENGAH	-	-	-	-	-	-
78	A	78	TRIANGLE PASE INC	PASE BLOCK, ONS, ACEH	34.768.425,00	11.724.253,13	23.044.171,88	34.705.990,54	16.012.562,81	18.693.427,73

Laporan Barang Milik Negara KKKS
Harta Benda Inventaris
Per 31 Desember 2014
(dalam US Dollar)

No	Kode		KKKS	Blok	LAMPIRAN 6			Per 31 Desember 2014		
					Saldo BMN 2013	Akumulasi Penyusutan 2013	Nilai Buku 2013	Saldo BMN 2014	Akumulasi Penyusutan 2014	Nilai Buku 2014
79	A	79	VICO, OBM	OMB SANGA SANGA	-	-	-	-	-	-
80	A	80	VIRGINIA INDONESIA COMPANY (VICO), LLC	SANGA-SANGA BLOCK, ONS, EAST KAL	1.378.183.800,00	286.190.256,25	1.091.993.543,75	1.645.796.034,10	496.721.884,17	1.149.074.149,93
81	A	81	PT MEDCO E&P INDONESIA	KAMPAR	-	-	-	-	-	-
82	A	82	LNG TANGGUH	TANGGUH	-	-	-	-	-	-
				SUB TOTAL KKKS EKSPLOITASI	11.987.713.944,82	2.556.912.440,26	9.402.154.388,17	27.727.871.294,90	8.339.467.826,48	19.388.113.458,46

No	Kode		KKKS	Blok	Per 31 Desember 2013			Per 31 Desember 2014		
					Saldo BMN 2013	Akumulasi Penyusutan 2013	Nilai Buku 2013	Saldo BMN 2014	Akumulasi Penyusutan 2014	Nilai Buku 2014
KKKS EKSPLOITASI										
[illegible]			[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-

Laporan Barang Milik Negara KKKS
Harta Benda Inventaris
Per 31 Desember 2014
(dalam US Dollar)

No	Kode	KKKS	Blok	LAMPIRAN 6			Per 31 Desember 2014		
				Saldo BMN 2013	Akumulasi Penyusutan 2013	Nilai Buku 2013	Saldo BMN 2014	Akumulasi Penyusutan 2014	Nilai Buku 2014
160	B	89	NHD RESOURCES LIMITED	ADZ		-	-		-
161	B	90	NHD PESOURCES (CENDRAWASIH BAY III) LTD	CENDRAWASIH BAY III		-	-		-
162	B	91	NHD RESOURCES (CENDRAWASIH BAY IV) LTD	CENDRAWASIH BAY IV		-	-		-
163	B	92	NHD PESOURCES (HALMAHERA-KOFAU) LTD	HALMAHERA-KOFAU		-	-		-
164	B	93	NHD RESOURCES (KOFAU) LTD	KOFAU		-	-		-
165	B	94	NHD PESOURCES (NORTH MAKASAR STRAIT PSC) LTD	NORTH MAKASAR STRAIT		-	-		-
166	B	95	NHD RESOURCES (OBI) LTD	OBI		-	-		-
167	B	97	NHD PESOURCES (SE GANAL I) LTD	SOUTH EAST GANAL I		-	-		-
168	B	98	NHD RESOURCES (SOUTH EAST SERAM) LTD	SOUTH EAST SERAM		-	-		-
169	B	99	NHD PESOURCES (WEST PAPUA IV) LTD	WEST PAPUA IV		-	-		-
170	B	101	NORTH SOKANG ENERGY LTD	NORTH SOKANG BLOCK		-	-		-
171	B	102	ORCHARD ENERGY WEST BELIDA LTD	WEST BELIDA		-	-		-
172	B	103	PACIFIC OIL & GAS (KISARAN) LTD	KISARAN		-	-		-
173	B	104	PAN ORIENT ENERGY (CITARUM) LTD	CITARUM - WEST JAVA		-	57.806.136,00	14.451.534,00	43.354.602,00
174	B	105	PAN ORIENT ENERGY EAST JABUNG PTE. LTD.	EAST JABUNG		-	-		-
175	B	106	PASIR PETROLEUM RESOURCES LTD	PASIR		-	-		-
176	B	107	PETROJAYA NORTH KANGEAN INC	NORTH KANGEAN		-	-		-
177	B	108	PETRONAS CARIGALI (WEST GLAGAH KAMBUNA) LTD	WEST GLAGAH KAMBUNA		-	276.399.989,99	69.072.497,45	207.217.492,26
178	B	109	PHE METAN TANJUNG II, PT	GMB TANJUNG II		-	216.299.302,78	20.862.179,86	195.437.122,92
179	B	110	PHE METANA SUBAN II, PT	GMB SUBAN II		-	-		-
180	B	111	PHE METANA SUMATERA 1, PT	GMB MUARA ENIM I, SOUTH SUMATERA		-	-		-
181	B	112	PHE METANA SUMATERA 3, PT	GMB AIR BENAKAT I		-	-		-
182	B	113	PHE METANA SUMATERA 4, PT	GMB MUARA ENIM III		-	-		-
183	B	114	PHE METANA SUMATERA 6, PT	GMB AIR BENAKAT II		-	-		-
184	B	115	PHE METANA SUMATERA 7, PT	GMB AIR BENAKAT III		-	8.507.400,06	785.873,67	7.721.526,39
185	B	116	PHE MNK SUMBAGUT	MNK SUMBAGUT		-	11.224.080,00	1.403.010,00	9.821.070,00
186	B	117	PHE NUNUKAN COMPANY	NUNUKAN		-	-		-
187	B	118	PHE RANDUGUNTING	RANDUGUNTING		-	-		-
188	B	119	PRABU ENERGY PTY LTD	RANAU		-	-		-
189	B	120	PREMIER OIL TUNA B.V.	TUNA / LAUT NATUNA		-	-		-
190	B	121	PT ANUGRAH PERSADA ENERGI	GMB AIR KOMERING		-	-		-
191	B	122	PT ANUGRAH TRIMATA KALTIM ENERGI	NORTH EAST TANJUNG BLOCK, ONS		-	-		-
192	B	123	PT BANGKANAI CBM PERSADA	GMB BANGKANAI I		-	-		-
193	B	124	PT Barabarinaka Citra Lestari (anak perusahaan PT Tanori	BENGARA II		-	-		-
194	B	125	PT BELAWA ENERGI UTAMA	GMB BELAWA		-	-		-
195	B	126	PT BIMA SAKTI ENERGI INDONESIA	BIMA SAKTI		-	-		-
196	B	127	PT BIMA MANDIRI ENERGI	GMB KUALA KAPUAS II		-	-		-
197	B	128	PT BINTANG BERLIAN AIR SUGIHAN	AIR SUGIHAN, ONS. SOUTH SUMATERA		-	-		-
198	B	129	PT BINTANG BERLIAN SANGGAU	SANGGAU, ONS		-	-		-
199	B	130	PT BORNEO METANA ENERGI	GMB BANGKANAI II		-	-		-
200	B	131	PT EKUATOR ENERGI KUNINGAN	KUNINGAN		-	-		-
201	B	132	PT EQUATOR ENERGY SOKANG	EAST SOKANG		-	-		-
202	B	133	PT INNOVARE GAS	EAST BONTANG		-	-		-
203	B	134	PT MANDIRA MAHESA ENERGI	KAHAYAN, ONS.S OFF		-	-		-
204	B	135	PT MR ENERGY	WEST TANJUNG		-	-		-

Laporan Barang Milik Negara KKKS
Harta Benda Inventaris
Per 31 Desember 2014
(dalam US Dollar)

No	Kode	KKKS	Blok	LAMPIRAN 6			Per 31 Desember 2014		
				Saldo BMN 2013	Akumulasi Penyusutan 2013	Nilai Buku 2013	Saldo BMN 2014	Akumulasi Penyusutan 2014	Nilai Buku 2014
205	B	136	PT PERTAMINA HULU ENERGI OFFSHORE NORTH EAST JAVA	CENTRAL MAHAKAM, ONS.S OFF EAST		-	-		-
206	B	137	PT PERTAMINA EP CEPU ADI	ALAS DARA & KEMUNING		-	-		-
207	B	138	PT SAKA SOUTH SESULU	SOUTH SESULU BLOCK		-	-		-
208	B	139	PT SANGA SANGA ENERGI PRIMA	GMB WEST SANGA SANGA I		-	-		-
209	B	140	PT ANUGRAH METANA ENERGI	GMB BEGALA		-	-		-
210	B	141	PT ANUGRAH MUTIARA SENTOSA	SOUTH BATUPAJA		-	-		-
211	B	142	PT AGRA ASAM METHANE GAS	GMB TANJAM LAUT		-	-		-
212	B	143	PT BANGKANAI ENERGI RESOURCES	GMB BANGKANAI III		-	-		-
213	B	144	PT BANGKANAI JAYA PERKASA	GMB BANGKANAI IV		-	-		-
214	B	145	PT BARITO BASIN GAS	GMB BANJAR II		-	-		-
215	B	146	PT EASCO EAST SENANJANG	EAST SENANJANG OFF		-	-		-
216	B	147	PT EAST OGAN METHANE	GMB OGAN KOMERING II		-	-		-
217	B	148	PT ENERGY MINERAL LANGGENG	SOUTH EAST MADURA		-	-		-
218	B	149	PT GAS METAN ABADI	GMB KUTAI BARAT		-	-		-
219	B	150	PT GEO BUKIT BATU	BUKIT BATU		-	-		-
220	B	151	PT HARPINDO MITRA KHARISMA	LAMPUNG III		-	-		-
221	B	152	PT HEXINDO GEMILANG JAYA	LEMANG		-	-		-
222	B	153	PT INDOBARAMBAI GAS METHAN	GMB BANJAR I		-	-		-
223	B	154	PT INTI GAS ENERGI	GMB SUUNJUNG		-	-		-
224	B	155	PT KALIMANTAN KUTAI ENERGY	WEST BANGATTA, KALTIM		-	-		-
225	B	156	PT KALISAT ENERGY NUSANTARA	LONG HUBUNG LONG BAGUN		-	-		-
226	B	157	PT KAPUAS CBM INDONESIA	GMB KAPUAS II		-	-		-
227	B	158	PT KUTAI ETAM PETROLEUM	SEINAN SEKA, SEMPAH DASH		-	-		-
228	B	159	PT MEDCO CBM LEMATANG	GMB LEMATANG		-	-		-
229	B	160	PT MENTARI PAMBUANG INTERNASIONAL	KUALA PAMBUANG		-	-		-
230	B	161	PT MR LIRIK II	LIRIK II RIAU		-	-		-
231	B	162	PT NORTHERN YAMANO TECHNOLOGI OIL	EAST PAMA		-	-		-
232	B	163	PT OGAN INTERIOR GAS	GMB OGAN KOMERING		-	-		-
233	B	164	PT PANDAWA PRIMA LESTARI	WAIN		-	-		-
234	B	165	PT PERTAMINA HULU ENERGI METANA SUBAN I DAN	GMB SUBAN I		-	216.844.344,00	28.483.514,56	188.360.829,44
235	B	166	PT. BUTANO BINTECH	BUTON I		-	-		-
236	B	167	PT. RADIANT BUKIT BARISAN E&P	SOUTH WEST BUKIT BARISAN		-	5.214.240,00	1.629.450,00	3.584.790,00
237	B	168	PT. SATUI BASIN GAS	GMB KOTABU		-	-		-
238	B	169	PT. SELE RAYA ENERGI	BLORA		-	-		-
239	B	170	PT. SIGMA ENERGY BUMI	GMB PULANG PISAU		-	-		-
240	B	171	PT. SUMA SARANA	SEMAI III		-	-		-
241	B	172	PT. TRANSASIA CBM	GMB KAPUAS I		-	-		-
242	B	173	PT. TRISAKTI GAS METHAN	GMB TAPIN		-	-		-
243	B	174	PTTEP MALUNDA LTD	MALUNDA	3.853.900,00	1.445.212,50	2.408.687,50	22.306.101,29	3.992.606,46	18.313.494,83
244	B	175	PTTEP SOUTH MANDAR LTD	SOUTH MANDAR	4.851.380,00	1.819.267,50	3.032.112,50	4.720.305,09	2.065.133,44	2.655.171,56
245	B	176	PUSI PETROLEUM RESOURCES LTD	PUSI		-	-		-
246	B	177	RANHILL JAMBI INC. PTE. LTD.	BATU GAJAH		-	-		-
247	B	178	RENCO ELENG ENERGY PTE. LTD.	SOUTH BLOCK A		-	6.423.603,00	1.605.900,75	4.817.702,25
248	B	179	REPSOL EXPLORATION CENDRAWASIH II B.V.	CENDRAWASIH BAY II		-	-		-
249	B	180	SALAMANDER ENERGY (BONTANG) PTE. LTD.	BONTANG		-	-		-

Laporan Barang Milik Negara KKKS
Harta Benda Inventaris
Per 31 Desember 2014
(dalam US Dollar)

No	Kode	KKKS	Blok	LAMPIRAN 6			Per 31 Desember 2014		
				Saldo BMN 2013	Akumulasi Penyusutan 2013	Nilai Buku 2013	Saldo BMN 2014	Akumulasi Penyusutan 2014	Nilai Buku 2014
250	B	182	SALAMANDER ENERGY (NORTH EAST BANGKANAI)	NORTH EAST BANGKANAI BLOCK, ONS		-	-		-
251	B	183	SALAMANDER ENERGY (WEST BANGKANAI) LIMITED	WEST BANGKANAI BLOCK, ONS		-	-		-
252	B	184	SALAMANDER ENERGY LTD	SOUTH EAST SANGATTA		-	-		-
253	B	185	SANGATTA WEST CBM	GMB SANGATTA I		-	-		-
254	B	186	SARMI PAPUA AQUA OIL LTD	NORTH SENTANI PAPUA		-	-		-
255	B	187	SC HINTAP MAROUSA, PT	MAROUSA		-	-		-
256	B	188	SEMBILANG CBM BV - TOTAL E&P KUTAI TIMUR	SAMBILUTAI TIMUR		-	-		-
257	B	189	SEPUYAY OFF SHORE EXPLORATION LTD	SEPUYAY		-	-		-
258	B	190	SEKALAN UNITED CORPORATION	EAST SIMENGGARIS		-	-		-
259	B	191	SPC EAP UPSTREAM PTE LTD	MAHAKAM HILIR		-	-		-
260	B	192	SPE PETROLEUM LTD	MADURA		-	-		-
261	B	193	STAR ENERGY (SEKAYU) LTD	SEKAYU		-	-		-
262	B	194	STAR ENERGY SENTOSA (SEBATIK) LTD	SEBATIK - EAST KAL		-	-		-
263	B	195	STATOILINDONESIA HARMAHERA II AS	HALMAHERA II		-	-		-
264	B	196	TALISMAN ANDAMAN B.V.	ANDAMAN II		-	-		-
265	B	197	TALISMAN SOUTH SAGERI B.V.	SOUTH SAGERI BLOCK		-	-		-
266	B	198	TECHWIN ENERGY NORTHEAST MADURA LTD	NORTHEAST MADURA		-	-		-
267	B	199	TECHWIN ENERGY SOUTH BETUNG	SOUTH BETUNG		-	-		-
268	B	200	TERRA GLOBAL VESTA BATUBARA, PT	NORTH BATURAJA		-	-		-
269	B	201	TEXCAL MAHATO EP LTD	MAHATO		-	-		-
270	B	202	THREE GOLDEN ENERGY WEST TUNGKAL	WEST TUNGKAL		-	-		-
271	B	203	TITAN RESOURCES (NATUNA) INDONESIA LTD	NORTH EAST NATUNA		-	-		-
272	B	204	TOTAL E&P INDONESIA MENTAWAI B.V.	BENGKULU-MENTAWAI		-	-		-
273	B	205	TOTAL E&P INDONESIA TELEN B.V.	TELEN		-	-		-
274	B	206	TOTAL E&P INDONESIA WEST PAPUA	SOUTHWEST BIRDS HEAD, WEST		-	-		-
275	B	207	TOTAL E&P SOUTH EAST MAHAKAM	SOUTH EAST MAHAKAM, OFF		-	-		-
276	B	208	TRANSASIA ENERGY RESOURCES / EXXONMOBIL	GMB BARITO		-	-		-
277	B	209	TRISULA CBM ENERGY, PT	GMB MUARA ENIM		-	-		-
278	B	209	VIS MULTI ARTHA, PT	GMB SANGATTA II		-	-		-
279	B	210	ZARATEX N.V.	LHOKSUMAWE		-	-		-

No	Kode	KKKS	Blok	Per 31 Desember 2013			Per 31 Desember 2014		
				Saldo BMN 2013	Akumulasi Penyusutan 2013	Nilai Buku 2013	Saldo BMN 2014	Akumulasi Penyusutan 2014	Nilai Buku 2014
KKKS PHASE 1 TERMINASI									

www.peraturan.go.id

Laporan Barang Milik Negara KKKS
Harta Benda Inventaris
Per 31 Desember 2014
(dalam US Dollar)

No	Kode	KKKS	Blok	LAMPIRAN 6			Per 31 Desember 2014		
				Saldo BMN 2013	Akumulasi Penyusutan 2013	Nilai Buku 2013	Saldo BMN 2014	Akumulasi Penyusutan 2014	Nilai Buku 2014
284	B	82	LUNDIN MALAKAI B.V.	MALAKAI-2		-	-		-
287	B	83	MUBADALA PETROLEUM (JEERAPU)	I-JERAPU		-	-		-
288	B	84	MURPH - SEMAI IV, LTD	SEMAI IV		-	-		-
289	B	85	MURPHY SEMAI OIL CO., LTD	SEMAI II		-	-		-
290	B	86	NIKO RESOURCES (CAYMAN) LTD	SUMBA STRAIT I		-	-		-
291	B	108	NIKO RESOURCES (WEST SAGERI) LIMITED	WEST SAGERI		-	-		-
292	B	109	SEQUOIA OFFSHORE EXPLORATION LTD	SEQUOIA-2		-	-		-
293	C	1	AED ROMBEBAI BV	ROMBEBAI		-	-		-
294	C	2	ALTAR SOCIDAD DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS, SA	BARITO OFF		-	-		-
295	C	3	AWE (TITAN) NZ LTD	TITAN		-	-		-
296	C	5	CHEVRON EAST AMBALAT LTD	EAST AMBALAT		-	-		-
297	C	6	CHEVRON WEST PAPUA I, LIMITED	WEST PAPUA I		-	-		-
298	C	7	CHEVRON WEST PAPUA III LTD	WEST PAPUA III		-	-		-
299	C	8	CONOCOPHILLIPS (AMBORP V) LTD	AMBORP V		-	-		-
300	C	9	CONOCOPHILLIPS (ARAFURA SEA) LTD	ARAFURA SEA		-	-		-
301	C	10	CONOCOPHILLIPS KUMA LTD	KUMA		-	-		-
302	C	11	ECOSSE (BENGKULU ENDEAVOR ENERGY) BENGKULU	BENGKULU		-	-		-
303	C	12	ENI BULUNGAN LTD	BULUNGAN		-	-		-
304	C	13	EXXONMOBIL E&P (GUNTING)	GUNTING		-	-		-
305	C	14	EXXONMOBIL E&P (MANDAR) LTD	MANDAR OFF		-	-		-
306	C	15	EXXONMOBIL E&P INDONESIA SURUMANA	SURUMANA		-	-		-
307	C	16	HARVEST BUDONG-BUDONG BV	BUDONG-BUDONG		-	-		-
308	C	17	HUSKY OIL NORTH SUMBAWA LTD	NORTH SUMBAWA II	7.975.900,00	2.990.962,50	4.984.937,50	8.132.154,74	4.066.077,37	4.066.077,37
309	C	18	MEDCO E&P MERANGIN, PT	MERANGIN I			-	-		-
310	C	19	MITRA ENERGI BUTON PTE. LTD	BUTON OFF LAUT JAWA			-	-		-
311	C	20	MURPHY OVERSEAS VENTURES INC	SOUTH BARITO			-	-		-
312	C	21	PHE METAN TANJUNG IV, PT	OMB TANJUNG IV			-	-		-
313	C	22	PT. BIRUANCE ENERGY	SULA I			-	-		-
314	C	23	RANHILL PAMA TAUK ENERGY PTE. LTD.	SOUTH OFF			-	-		-
315	C	24	SOUTH MADURA EXPLORATION COMPANY PTE. LTD.	SOUTH MADURA - EAST JAVA			-	-		-
316	C	25	STATOIL INDONESIA KARAMA AS	KARAMA OFF	24.989.880,00	7.769.930,11	17.219.670,89	20.991.068,22	8.496.956,62	12.494.790,60
[illegible]			[illegible]	[illegible]						
[illegible]			[illegible]	[illegible]						
			SUB TOTAL KKKS PROSES	32.965.660,69	10.760.892,61	22.204.607,59	29.123.222,96	12.562.034,00	16.560.868,27

No	Kode	KKKS	Blok	Per 31 Desember 2013			Per 31 Desember 2014		
				Saldo BMN 2013	Akumulasi Penyusutan 2013	Nilai Buku 2013	Nilai Perolehan		
KKKS TERMINASI									
[illegible]			[illegible]	[illegible]					
[illegible]			[illegible]	[illegible]					
[illegible]			[illegible]	[illegible]					
[illegible]			[illegible]	[illegible]					
[illegible]			[illegible]	[illegible]					

Laporan Barang Milik Negara KKKS
Harta Benda Inventaris
Per 31 Desember 2014
(dalam US Dollar)

No	Kode	KKKS	Blok	LAMPIRAN 6			Per 31 Desember 2014		
				Saldo BMN 2013	Akumulasi Penyusutan 2013	Nilai Buku 2013	Saldo BMN 2014	Akumulasi Penyusutan 2014	Nilai Buku 2014
324	D	5	ARCO ASAHAN	ASAHAN (T)		-	-		-
325	D	6	BP INDONESIA	BABO (T)		-	-		-
326	D	7	BP INDONESIA	EAST ARGUNI (T)		-	-		-
327	D	8	BP INDONESIA	WEST ARGUNI (T)		-	-		-
328	D	9	CNOOC SALAWATI LTD.	SOUTH EAST SALAWATI (T)		-	-		-
329	D	10	ECOSSE - IPAN PETROLEUM LTD	MANOKWARI		-	-		-
330	D	11	ESSO NATUNA	NATUNA D-ALPHA (T)		-	-		-
331	D	12	HALMAHERA PETROLEUM	HALMAHERA OFF		-	-		-
332	D	13	PHSA OIL EAST BAWEAN LTD	EAST BAWEAN II (T)		-	-		-
333	D	14	INDONESIA PAPUA PETROLEUM	ASMAT (T)		-	-		-
334	D	15	INSANI BINA PERKASA, PT	ALAS JATI		-	-		-
335	D	16	JAPEX (BUTON) LTD	BUTON		-	-		-
336	D	17	JOBP - CONOCOPHILLIPS	SAKAKEMANG (T)		-	-		-
337	D	18	JOBP - GOLDEN SPIKE	PASIRMAN (T)		-	-		-
338	D	19	JOBP - MEDCO MADURA	MADURA ISLAND (T)		-	-		-
339	D	20	KNOC	WOKAM (T)		-	-		-
340	D	21	KNOC NEMONIE	NORTH EAST MADURA I (T)		-	-		-
341	D	22	KNOC NEMTWO	NORTH EAST MADURA II (T)		-	-		-
342	D	23	LUNDIN RANGKAS B.V.	RANGKAS		-	-		-
343	D	24	MARATHON INTERNATIONAL PETROLEUM INDONESIA	PASANGKAYU		-	-		-
344	D	25	NATIONS PETROLEUM (YAPEN) B.V.	YAPEN (T)		-	-		-
345	D	26	OPNA INTERNATIONAL	REMBANG OFF		-	-		-
346	D	27	PEARL OIL (KARAMA) LTD.	KARAMA		-	-		-
347	D	28	PERMINTRACER LTD.	NORTH TANJUNG (T)		-	-		-
348	D	29	PETRONAS CARIGALI KARAPAN LTD	KARAPAN (T)		-	-		-
349	D	30	PETRONAS CARIGALI LAMPUNG II LTD	LAMPUNG II		-	-		-
350	D	31	PETRONAS CARIGALI NORTH EAST MADURA IV LTD.	NORTH EAST MADURA IV (T)		-	-		-
351	D	32	PETRONAS CARIGALI TANJUNG JABUNG LTD.	TANJUNG JABUNG (T)		-	-		-
352	D	33	PT. SIGMA ENERGI PETROGAS	ENERYANG		-	-		-
353	D	34	SANTOS	NORTH BALI - 1 (T)		-	-		-
354	D	35	SANTOS	DONGGALA		-	-		-
[illegible]			[illegible]	[illegible]					
[illegible]			[illegible]	[illegible]					
[illegible]			[illegible]	[illegible]					
			SUB TOTAL KKKS TERMINASI			-	-		-
			TOTAL	2.042.703.735,15	8.572.554.512,38	9.445.957.796,15	29.227.062.516,57	8.859.787.127,82	20.347.293.420,95

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 28.B

REKAPITULASI *SUBSEQUENT EXPENDITURE* ASET KKKS (US$)
PER 31 DESEMBER 2014

KKKS EKSPLOITASI						
No			KKKS	Blok	*SUBSEQUENT EXPENDITURE*	
					Item	Jumlah
1	A	1	SANTOS (NW.NATUNA)	NORTH WEST NATUNA	-	-
2	A	2	BOB PERTAMINA – BUMI SIAK PUSAKO	CPP BLOCK, ONS. CENTRAL SUMATERA	-	-
3	A	3	BP BERAU LTD.	BERAU, OFF. IRIAN JAYA	3	10.352,40
4	A	4	BP MUTURI HOLDINGS BV.	MUTURI BLOCK, IRIAN JAYA		
5	A	5	BP WIRIAGAR LTD.	WIRIAGAR BLOCK, ONS. IRIAN JAYA		
6	A	6	CAMAR RESOURCES CANADA INC.	BAWEAN BLOCK, ONS. OFF. EAST JAVA SEA	-	-
7	A	7	CHEVRON INDONESIA COMPANY	EAST KALIMANTAN, ONS. OFF.	47	14.249.426,41
8	A	8	CHEVRON INDONESIA COMPANY (RAPAK)	RAPAK	-	-
9	A	9	CHEVRON INDONESIA COMPANY (GANAL)	GANAL	-	-
10	A	10	CHEVRON MAKASSAR LTD.	OFF. MAKASSAR STRAIT	-	-
11	A	11	CITIC SERAM ENERGY LIMITED	SERAM NON BULA	-	-
12	A	12	CNOOC SES LTD.	SOUTHEAST SUMATERA, OFF.	1	3.173.653,73
13	A	13	CONOCOPHILLIPS (GRISSIK) LTD.	CORRIDOR BLOCK, ONS. SOUTH SUMATERA	-	-
14	A	14	CONOCOPHILLIPS (SOUTH JAMBI) LTD.	SOUTH JAMBI 'B' BLOCK, ONS. JAMBI	-	-
15	A	15	CONOCOPHILLIPS IND.INC.LTD.	SOUTH NATUNA SEA BLOCK "B"., OFF.	-	-
16	A	16	EMP (BENTU) LTD.	BENTU SEGAT BLOCK, ONS. RIAU	1	298.379,07
17	A	17	EMP (KORINCI BARU) LTD.	KORINCI BARU BLOCK, ONS. RIAU	-	-
18	A	18	EMP MALACCA STRAIT S.A	MALACCA STRAIT BLOCK, OFF.	-	-
19	A	19	ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG) PTY. LTD.	SENGKANG, ONS. SOUTH SULAWESI	-	-
20	A	20	ENI KRUENG MANE	OFF. NORTH ACEH	-	-
21	A	21	ENI MUARA BAKAU B.V.	MUARA BAKAU	-	-
22	A	22	EXXONMOBIL OIL IND. INC.	"B" BLOCK, ONS. NORTH SUMATERA	2	1.137.710,40
23	A	23	SAKA INDONESIA PANGKAH. LTD (Hess)	PANGKAH BLOCK, OFF. N.E. JAVA SEA	-	-
24	A	24	HUSKY CNOOC MADURA LTD.	MADURA STRAIT	-	-
25	A	25	INDONESIA PETROLEUM LTD.	ATTAKA BLOCK, OFF. EAST KAL.	-	-
26	A	26	INPEX MASELA, LTD.	MASELA BLOK	-	-
27	A	27	JOB PERTAMINA EMP GEBANG	GEBANG BLOCK, ONS.OFF NORTH SUM.	-	-
28	A	28	JOB PERTAMINA GOLDEN SPIKE IL	RAJA&PENDOPO BLOCK, ONS. SOUTH SUM.	-	-
29	A	29	JOB PERTAMINA MEDCO E&P SIMENGGARIS	SIMENGGARIS BLOK	-	-
30	A	30	JOB PERTAMINA PETROCHINA EAST JAVA	TUBAN BLOCK, ONS. JAWA TIMUR	-	-
31	A	31	JOB PERTAMINA PETROCHINA SALAWATI	KEPALA BURUNG BLOCK	-	-
32	A	32	JOB PERTAMINA TALISMAN (OK) LTD.	OGAN KOMERING, ONS. SUMSEL	-	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 28.B

REKAPITULASI *SUBSEQUENT EXPENDITURE* ASET KKKS (US$)
PER 31 DESEMBER 2014

KKKS EKSPLOITASI						
No			KKKS	Blok	*SUBSEQUENT EXPENDITURE*	
					Item	Jumlah
33	A	33	JOB PERTAMINA TALISMAN JAMBI MERANG	JAMBI MERANG BLOCK, ONS. JAMBI	-	-
34	A	34	JOB PERTAMINA–MEDCO TOMORI SULAWESI	SENORO-TOILI, ONS.OFF.	-	-
35	A	35	KALREZ PETROLEUM (SERAM) LIMITED	BULA, ONS. SERAM	5	193.892,33
36	A	36	KANGEAN ENERGY INDONESIA LIMITED	KANGEAN BLOCK, ONS. OFF. E JAVA SEA	-	-
37	A	37	LAPINDO BRANTAS INC.	BRANTAS BLOCK, ONS. OFF. EAST JAVA.	-	-
38	A	38	MANHATTAN KALIMANTAN	TARAKAN	-	-
39	A	39	MOBIL CEPU LTD.	CEPU BLOCK, JAVA	160	11.150.846,39
40	A	40	MOBIL EXPLORATION IND.	NORTH SUMATERA, OFF.	-	-
41	A	41	MONTD'OR OIL TUNGKAL LIMITED	TUNGKAL, ONS. JAMBI	-	-
42	A	42	MUBADALA PETROLEUM (SEBUKU)	SEBUKU	-	-
43	A	43	PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LTD	NORTHWEST JAVA SEA, OFF.	37	6.153.356,51
44	A	44	PERUSDA "BENUO TAKA"	WAILAWI – EAST KALIMANTAN	-	-
45	A	45	PETROCHINA INTERNATIONAL (BERMUDA) LTD.	SALAWATI BASIN	22	2.292.309,70
46	A	46	PETROCHINA INTERNATIONAL BANGKO LTD.	BANGKO, ONS. SOUTH SUMATERA	-	-
47	A	47	PETROCHINA INT'L JABUNG LTD.	JABUNG BLOCK, ONS. JAMBI.	13	2.942.742,86
48	A	48	PETRONAS CARIGALI (Ketapang) Ltd.	KETAPANG	-	-
49	A	49	PETRONAS CARIGALI (Muriah) Ltd.	MURIAH	-	-
50	A	50	PETROSELAT, LTD.	SELAT PANJANG, ONS. RIAU.	-	-
51	A	51	PREMIER OIL NATUNA SEA BV.	NATUNA SEA BLOCK "A", OFF.	-	-
52	A	52	PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA (Rokan)	ROKAN	-	-
53	A	53	PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA/PHE (Siak)	SIAK	-	-
54	A	54	PT EMP TONGA	TONGA FIELD	-	-
55	A	55	PT MANDIRI PANCA USAHA	SEMBILANG	-	-
56	A	56	PT. MEDCO E&P BENGARA	BENGARA I	-	-
57	A	57	PT. Medco E&P Lematang	LEMATANG	-	-
58	A	58	PT MEDCO E&P RIMAU	RIMAU	-	-
59	A	59	PT MEDCO E&P INDONESIA	SOUTH SUMATERA	-	-
60	A	60	PT. MEDCO E&P TARAKAN	TARAKAN	-	-
61	A	61	PT MEDCO E&P MALAKA	AREA "A", NORTH SUMATERA	-	-
62	A	62	PT PERTAMINA EP	INDONESIA	30	2.393.336,46
63	A	63	PT PHE WMO	WEST MADURA, OFF. EAST JAVA.	4	55.230,40
64	A	64	PT SELE RAYA MERANGIN DUA	MERANGIN II BLOCK, OFF. SOUTH SUM.	-	-
65	A	65	PT. SELE RAYA BELIDA	BELIDA	-	-
66	A	66	PT SPR LANGGAK	LANGGAK, RIAU	-	-
67	A	67	PT SUMATERA PERSADA ENERGI	WEST KAMPAR	-	-
68	A	68	PT TIARA PETROLEUM	WEST AIR KOMERING	-	-
69	A	69	PT. TROPIK ENERGI PANDAN	PANDAN	-	-
70	A	70	PT. ODIRA ENERGI	KARANG AGUNG	-	-
71	A	71	SALAMANDER ENERGY	BANGKANAI BLOK	-	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 28.B

REKAPITULASI *SUBSEQUENT EXPENDITURE* ASET KKKS (US$)
PER 31 DESEMBER 2014

KKKS EKSPLOITASI						
No			KKKS	Blok	*SUBSEQUENT EXPENDITURE*	
					Item	Jumlah
72	A	72	SANTOS (MADURA OFFSHORE) PTY. LTD.	MADURA OFF.BLOCK, SE.MADURA	-	-
73	A	73	SANTOS (SAMPANG) PTY LTD	SAMPANG , ONS. OFF.	-	-
74	A	74	STAR ENERGY (KAKAP) LTD.	KAKAP BLOCK	-	-
75	A	75	TATELY N.V	PALMERAH BLOK	-	-
76	A	76	TOTAL E&P INDONESIE (Mahakam)	MAHAKAM	-	-
77	A	77	TOTAL E&P Tengah	TENGAH	-	-
78	A	78	TRIANGLE PASE INC.	PASE BLOCK, ONS. ACEH	-	-
79	A	79	VICO, CBM	GMB SANGA SANGA	-	-
80	A	80	VIRGINIA INDONESIA COMPANY (VICO), LLC.	SANGA-SANGA BLOCK, ONS. EAST KAL.	-	-
81	A	81	PT MEDCO E&P INDONESIA (KAMPAR)	KAMPAR	-	-
82	A	82	BP TANGGUH LNG	TANGGUH	-	-
SUB TOTAL KKKS EKSPLOITASI					**325**	**44.051.236,66**

KKKS EKSPLORASI						
No			KKKS	BLOK	*SUBSEQUENT EXPENDITURE*	
					Item	Jumlah
83	B	1	ADITYA NUGRAHA PRATAMA ENERGY LAMPUNG, PT	OFFSHORE LAMPUNG I	-	-
84	B	2	AMSTELCO KARAPAN PTE LTD.	KARAPAN	-	-
85	B	3	ARTHA WIDYA PERSADA, PT	GMB TABULAKO	-	-
86	B	4	AWE (NORTH MADURA) NZ LTD.	NORTH MADURA	-	-
87	B	5	AWE (TERUMBU) NZ LTD.	TERUMBU	-	-
88	B	6	BLACK GOLD CENDRAWASIH LLC	CENDRAWASIH	-	-
89	B	10	BLACK PLATINUM INVESTMENTS LTD.	SOKANG BLOCK	-	-
90	B	11	BP EXPLORATION INDONESIA LIMITED	WEST ARU I	-	-
91	B	12	BP EXPLORATION INDONESIA LIMITED	WEST ARU II	-	-
92	B	13	BP KAPUAS III LTD. / PT. GAS METHAN UTAMA	GMB KAPUAS III	-	-
93	B	14	BP NORTH ARAFURA LTD.	NORTH ARAFURA	-	-
94	B	15	BUKIT ENERGY BOHOROK PTE.LTD.	BOHOROK	-	-
95	B	17	BUMI PERDANA ENERGY LTD.	GMB BATANG ASIN	-	-
96	B	18	BUNGA MAS INTERNATIONAL COMPANY	BUNGA MAS SOUTH SUMATERA	-	-
97	B	19	CAELUS ENERGY (SOUTH BENGARA II) PTY LTD.	SOUTH BENGARA II	-	-
98	B	20	CAELUS ENERGY MANGKALIHAT PTE. LTD.	MANGKALIHAT, OFF.	-	-
99	B	21	CAHAYA BATU RAJA, PT	AIR KOMERING	-	-
100	B	22	CAKRA NUSA DARMA (SAKAKEMANG) LTD.	SAKAKEMANG	-	-
101	B	23	CBM ASIA BESAR LTD.	GMB BENTIAN BESAR	-	-
102	B	24	CBM ASIA HULU LTD.	GMB INDRAGIRI HULU	-	-
103	B	25	CBM ASIA KUALA KAPUAS LTD.	GMB KUALA KAPUAS I	-	-
104	B	26	CHALLEDON SERVICES LTD	MENDUWAI BLOCK, ONS.	-	-
105	B	28	CNOOC BATANGHARI LTD.	BATANGHARI	-	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 28.B

REKAPITULASI *SUBSEQUENT EXPENDITURE* ASET KKKS (US$)
PER 31 DESEMBER 2014

KKKS EKSPLOITASI						
No			KKKS	Blok	*SUBSEQUENT EXPENDITURE*	
					Item	Jumlah
106	B	29	CONOCOPHILLIPS PETCON BORNEO LIMITED	PALANGKARAYA	-	-
107	B	30	CONOCOPHILLIPS WARIM LTD.	WARIM	-	-
108	B	31	CONRAD INDOREACH EXPLORATION LTD.	PARI	-	-
109	B	32	CONRAD PETROLEUM (V) LTD	NORTH X-RAY BLOCK, OFF.	-	-
110	B	33	CONRAD PETROLEUM /WEST NATUNA EXPLRORATION	DUYUNG	-	-
111	B	34	COOPER ENERGY MERANGIN III LIMITED	MERANGIN III BLOCK	-	-
112	B	35	COOPER ENERGY SUMBAGSEL LTD.	SUMBAGSEL	-	-
113	B	36	DART ENERGY (MUARALIM) PTE LTD.	GMB MURALIM	-	-
114	B	37	DART ENERGY INTERNATIONAL PTE LTD	GMB BONTANG BENGALON	-	-
115	B	38	DART ENERGY TANJUNG ENIM PTE LTD.	GMB TANJUNG ENIM	-	-
116	B	39	DEEP INDUSTRIES LTD.	GMB MELAK MENDUNG III	-	-
117	B	40	ENI AMBALAT LTD.	AMBALAT	-	-
118	B	41	ENI ARGUNI I LTD.	ARGUNI I	-	-
119	B	42	ENI BUKAT LTD.	BUKAT	-	-
120	B	43	ENI EAST SEPINGGAN LTD.	EAST SEPINGGAN	-	-
121	B	44	ENI NORTH GANAL LTD.	NORTH GANAL	-	-
122	B	45	ENI WEST TIMOR LTD.	WEST TIMOR	-	-
123	B	46	EPHINDO KUTAI NORTH INC. DAN PT. RESOURCES ALAM ENERGI	GMB KUTAI II, EAST KALIMANTAN	-	-
124	B	47	EPHINDO MEGA METHANA INC	GMB MELAK MENDUNG I	-	-
125	B	48	EPHINDO SEKAYU 2 INC	GMB SEKAYU II	-	-
126	B	49	EURORICH GROUP LTD	KALYANI	-	-
127	B	50	GENTING OIL KASURI PTE. LTD.	KASURI	-	-
128	B	51	GERALDO ENERGY, PT	BELAYAN	-	-
129	B	52	GOLDEN CODE COMMERCIAL LTD.	NORTHEAST MADURA VI	-	-
130	B	53	GREENSTAR ASSETS LTD.	EAST KANGEAN	-	-
131	B	55	HESS (INDONESIA - V) LIMITED	TIMOR SEA I	-	-
132	B	56	HESS (INDONESIA-SEMAI V) LTD.	SEMAI V	-	-
133	B	57	HUSKY AUNGERAH LTD.	ANUGERAH	-	-
134	B	58	INDO CBM SUMBAGSEL 2 PTE. LTD.	GMB MUARA ENIM II, SOUTH SUMATERA	-	-
135	B	59	INDON CBM LTD.	GMB RENGAT	-	-
136	B	60	INDRILLCO SOUTH LIRIK LTD.	SOUTH LIRIK	-	-
137	B	61	INPEX BABAR SELARU LTD.	BABAR SELARU	-	-
138	B	62	KE BABAI TANJUNG LIMITED	BABAI TANJUNG	-	-
139	B	63	Kons. Bukit Energy Palmerah Baru Pte. Ltd., New Zealand Oil & gas Palmerah Baru Pty Ltd., PT Surya Selaras Sejahtera.	PALMERAH BARU	-	-
140	B	64	KRISENERGY (EAST MURIAH) LTD.	EAST MURIAH	-	-
141	B	65	KRISENERGY (EAST SERUWAY) B.V.	EAST SERUWAY	-	-
142	B	66	KRISENERGY (SAKTI) B.V	SAKTI BLOCK	-	-
143	B	67	KRISENERGY (SATRIA) LTD.	BULU	-	-
144	B	68	KRISENERGY (TANJUNG ARU) B.V.	TANJUNG ARU	-	-
145	B	69	KRISENERGY (UDAN EMAS) B.V.	UDAN EMAS	-	-
146	B	70	KRISENERGY KUTAI B.V	KUTAI	-	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 28.B

REKAPITULASI *SUBSEQUENT EXPENDITURE* ASET KKKS (US$)
PER 31 DESEMBER 2014

KKKS EKSPLOITASI						
No			KKKS	Blok	*SUBSEQUENT EXPENDITURE*	
					Item	Jumlah
147	B	73	LUNDIN GURITA B.V	GURITA	-	-
148	B	74	LUNDIN SAREBA B.V.	CENDRAWASIH VII	-	-
149	B	75	LUNDIN SOUTH SOKANG B.V.	SOUTH SOKANG	-	-
150	B	76	M3ENERGY GAMMA SDN BHD	UJUNG KULON	-	-
151	B	77	MARATHON INDONESIA (KUMAWA) LTD./BLACK GOLD	KUMAWA LTD.	-	-
152	B	78	MEDCO CBM SEKAYU, PT	GMB SEKAYU	-	-
153	B	79	MITRA ENERGI (INDONESIA SIBARU) LTD.	SIBARU	-	-
154	B	80	MITRA ENERGY (INDONESIA BONE) LTD.	BONE BLOCK	-	-
155	B	81	MONT D'OR SALAWATI LTD.	WEST SALAWATI	-	-
156	B	82	MP INDONESIA (WEST SEBUKU) LIMITED	WEST SEBUKU BLOCK, OFF.	-	-
157	B	86	MURPHY WOKAM OIL CO.	WOKAM II	-	-
158	B	87	NEWTON ENERGY CAPITAL LTD.	GMB KUTAI I	-	-
159	B	88	NIKO BLACK GOLD EAST BULA LLC	EAST BULA	-	-
160	B	89	NIKO RESOURCES (ARU) LTD.	ARU	-	-
161	B	90	NIKO RESOURCES (CENDRAWASIH BAY III) LTD.	CENDRAWASIH BAY III	-	-
162	B	91	NIKO RESOURCES (CENDRAWASIH BAY IV) LTD.	CENDRAWASIH BAY IV	-	-
163	B	92	NIKO RESOURCES (HALMAHERA-KOFIAU) LTD.	HALMAHERA-KOFIAU	-	-
164	B	93	NIKO RESOURCES (KOFIAU) LTD.	KOFIAU	-	-
165	B	94	NIKO RESOURCES (NORTH MAKASAR STRAIT PSC) LTD.	NORTH MAKASAR STRAIT	-	-
166	B	95	NIKO RESOURCES (OBI)) LTD.	OBI	-	-
167	B	97	NIKO RESOURCES (SE GANAL I) LTD.	SOUTH EAST GANAL I	-	-
168	B	98	NIKO RESOURCES (SOUTH EAST SERAM) LTD	SOUTH EAST SERAM	-	-
169	B	99	NIKO RESOURCES (WEST PAPUA IV) LTD.	WEST PAPUA IV	-	-
170	B	101	NORTH SOKANG ENERGY LTD.	NORTH SOKANG BLOCK	-	-
171	B	102	ORCHARD ENERGY WEST BELIDA LTD.	WEST BELIDA	-	-
172	B	103	PACIFIC OIL & GAS (KISARAN) LTD.	KISARAN	-	-
173	B	104	PAN ORIENT ENERGY (CITARUM) LTD.	CITARUM - WEST JAVA	-	-
174	B	105	PAN ORIENT ENERGY EAST JABUNG PTE. LTD.	EAST JABUNG	-	-
175	B	106	PASIR PETROLEUM RESOURCES LTD.	PASIR	-	-
176	B	107	PETROJAVA NORTH KANGEAN INC	NORTH KANGEAN	-	-
177	B	108	PETRONAS CARIGALI (WEST GLAGAH KAMBUNA) LTD.	WEST GLAGAH KAMBUNA	-	-
178	B	109	PHE METAN TANJUNG II, PT	GMB TANJUNG II	-	-
179	B	110	PHE METANA SUBAN II, PT	GMB SUBAN II	-	-
180	B	111	PHE METANA SUMATERA 1, PT	GMB MUARA ENIM I, SOUTH SUMATERA	-	-
181	B	112	PHE METANA SUMATERA 3, PT	GMB AIR BENAKAT I	-	-
182	B	113	PHE METANA SUMATERA 4, PT	GMB MUARA ENIM III	-	-
183	B	114	PHE METANA SUMATERA 6, PT	GMB AIR BENAKAT II	-	-
184	B	115	PHE METANA SUMATERA 7, PT	GMB AIR BENAKAT III	-	-
185	B	116	PHE MNK SUMBAGUT	MNK SUMABGUT	-	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 28.B

REKAPITULASI *SUBSEQUENT EXPENDITURE* ASET KKKS (US$)
PER 31 DESEMBER 2014

KKKS EKSPLOITASI						
No			KKKS	Blok	*SUBSEQUENT EXPENDITURE*	
					Item	Jumlah
186	B	117	PHE NUNUKAN COMPANY	NUNUKAN	-	-
187	B	118	PHE RANDUGUNTING	RANDUGUNTING	-	-
188	B	119	PRABU ENERGY PTY LTD	RANAU	-	-
189	B	120	PREMIER OIL TUNA B.V.	TUNA, LAUT NATUNA	-	-
190	B	121	PT ANUGRAH PERSADA ENERGI	GMB AIR KOMERING	-	-
191	B	122	PT ANUGRAH TRIMATA KALTIM ENERGI	NORTH EAST TANJUNG BLOCK, ONS.	-	-
192	B	123	PT BANGKANAI CBM PERSADA	GMB BANGKANAI I	-	-
193	B	124	PT Baradinamika Citra Lestari (anak perusahaan PT Tansri Madjid)	BENGARA II	-	-
194	B	125	PT BELAWA ENERGI UTAMA	GMB BELAWA	-	-
195	B	126	PT BIMA SAKTI ENERGI INDONESIA	BIMA SAKTI	-	-
196	B	127	PT BINA MANDIRI ENERGI	GMB KUALA KAPUAS II	-	-
197	B	128	PT BINTANG BERLIAN AIR SUGIHAN	AIR SUGIHAN, ONS. SOUTH SUMATERA	-	-
198	B	129	PT BINTANG BERLIAN SANGGAU	SANGGAU, ONS.	-	-
199	B	130	PT BORNEO METANA ENERGI	GMB BANGKANAI II	-	-
200	B	131	PT EKUATOR ENERGI KUNINGAN	KUNINGAN	-	-
201	B	132	PT EQUATOR ENERGY SOKANG	EAST SOKANG	-	-
202	B	133	PT INNOVARE GAS	EAST BONTANG	-	-
203	B	134	PT MANDIRA MAHESA ENERGI	KAHAYAN, ONS & OFF	-	-
204	B	135	PT MRI ENERGY	WEST TANJUNG	-	-
205	B	136	PT PERCIE MAHAKAM PETROLEUM	CENTRAL MAHAKAM ONS & OFF EAST KAL	-	-
206	B	137	PT PERTAMINA EP CEPU ADK	ALAS DARA & KEMUNING	-	-
207	B	138	PT SAKA SOUTH SESULU	SOUTH SESULU BLOCK	-	-
208	B	139	PT SANGA SANGA ENERGI PRIMA	GMB WEST SANGA SANGA I	-	-
209	B	140	PT. ANDALAS METANA ENERGI	GMB BELIDA	-	-
210	B	141	PT. ANUGRAH MUTIARA SENTOSA	SOUTH BATURAJA	-	-
211	B	142	PT. ASAM ASAM METHAN GAS	GMB TANAH LAUT	-	-
212	B	143	PT. BANGKANAI ENERGI RESOURCES	GMB BANGKANAI III	-	-
213	B	144	PT. BANGKANAI JAYA PERKASA	GMB BANGKANAI IV	-	-
214	B	145	PT. BARITO BASIN GAS	GMB BANJAR II	-	-
215	B	146	PT. EASCO EAST SEPANJANG	EAST SEPANJANG OFF.	-	-
216	B	147	PT. EAST OGAN METHANE	GMB OGAN KOMERING II	-	-
217	B	148	PT. ENERGY MINERAL LANGGENG	SOUTH EAST MADURA	-	-
218	B	149	PT. GAS METAN ABADI	GMB KUTAI BARAT	-	-
219	B	150	PT. GEO BUKIT BATU	BUKIT BATU	-	-
220	B	151	PT. HARPINDO MITRA KHARISMA	LAMPUNG III	-	-
221	B	152	PT. HEXINDO GEMILANG JAYA	LEMANG	-	-
222	B	153	PT. INDOBARAMBAI GAS METHAN	GMB BANJAR I	-	-
223	B	154	PT. INTI GAS ENERGI	GMB SIJUNJUNG	-	-
224	B	155	PT. KALIMANTAN KUTAI ENERGY	WEST SANGATTA, KALTIM	-	-
225	B	156	PT. KALISAT ENERGY NUSANTARA	LONG HUBUNG LONG BAGUN	-	-
226	B	157	PT. KAPUAS CBM INDONESIA	GMB KAPUAS II	-	-
227	B	158	PT. KUTAI ETAM PETROLEUM	SEINANGKA, SENIPAH ONSH.	-	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 28.B

REKAPITULASI *SUBSEQUENT EXPENDITURE* ASET KKKS (US$)
PER 31 DESEMBER 2014

KKKS EKSPLOITASI						
No			KKKS	Blok	*SUBSEQUENT EXPENDITURE*	
					Item	Jumlah
228	B	159	PT. MEDCO CBM LEMATANG	GMB LEMATANG	-	-
229	B	160	PT. MENTARI PAMBUANG INTERNASIONAL	KUALA PAMBUANG	-	-
230	B	161	PT. MRI LIRIK II	LIRIK II, RIAU.	-	-
231	B	162	PT. NORTHENRN YAMANO TECHNOLOGI OIL RESOURCES EAST PAMAI	EAST PAMAI	-	-
232	B	163	PT. OGAN INTERIOR GAS	GMB OGAN KOMERING	-	-
233	B	164	PT. PANDAWA PRIMA LESTARI	WAIN	-	-
234	B	165	PT. PERTAMINA HULU ENERGI METANA SUBAN I DAN PT. SUBAN ENERGI	GMB SUBAN I	-	-
235	B	166	PT. PUTINDO BINTECH	BUTON I	-	-
236	B	167	PT. RADIANT BUKIT BARISAN E&P	SOUTH WEST BUKIT BARISAN	-	-
237	B	168	PT. SATUI BASIN GAS	GMB KOTABU	-	-
238	B	169	PT. SELE RAYA ENERGI	BLORA	-	-
239	B	170	PT. SIGMA ENERGY BUMI	GMB PULANG PISAU	-	-
240	B	171	PT. SUMA SARANA	SEMAI III	-	-
241	B	172	PT. TRANSASIA CBM	GMB KAPUAS I	-	-
242	B	173	PT. TRISAKTI GAS METHAN	GMB TAPIN	-	-
243	B	174	PTTEP MALUNDA LTD.	MALUNDA	-	-
244	B	175	PTTEP SOUTH MANDAR LTD.	SOUTH MANDAR	-	-
245	B	176	PURI PETROLEUM RESOURCES LTD.	PURI	-	-
246	B	177	RANHILL JAMBI INC. PTE. LTD.	BATU GAJAH	-	-
247	B	178	RENCO ELENG ENERGY PTE. LTD.	SOUTH BLOCK A	-	-
248	B	179	REPSOL EXPLORATION CENDRAWASIH II B.V	CENDRAWASIH BAY II	-	-
249	B	180	SALAMANDER ENERGY (BONTANG) PTE. LTD.	BONTANG	-	-
250	B	181	SALAMANDER ENERGY (NORTH EAST BANGKANAI) LIMITED	NORTH EAST BANGKANAI BLOCK, ONS.	-	-
251	B	182	SALAMANDER ENERGY (WEST BANGKANAI) LIMITED	WEST BANGKANAI BLOCK, ONS.	-	-
252	B	183	SALAMANDER ENERGY LTD.	SOUTH EAST SANGATTA	-	-
253	B	184	SANGATTA WEST CBM	GMB SANGATTA I	-	-
254	B	185	SARMI PAPUA ASIA OIL LTD.	NORTHERN PAPUA	-	-
255	B	186	SCHINTAR MARQUISA, PT	MARQUISA	-	-
256	B	187	SENYIUR CBM INC; TOTAL E&P KUTAI TIMUR	GMB KUTAI TIMUR	-	-
257	B	189	SONLAW UNITED CORPORATION	EAST SIMENGGARIS	-	-
258	B	190	SPC E&P UPSTREAM PTE LTD.	MAHAKAM HILIR	-	-
259	B	191	SPE PETROLEUM LTD.	MADURA	-	-
260	B	192	STAR ENERGY (SEKAYU) LTD.	SEKAYU	-	-
261	B	193	STAR ENERGY SENTOSA (SEBATIK) LTD.	SEBATIK - EAST KAL.	-	-
262	B	194	STATOILINDONESIA HARMAHERA II AS	HALMAHERA II	-	-
263	B	195	TALISMAN ANDAMAN B.V	ANDAMAN III	-	-
264	B	196	TALISMAN SOUTH SAGERI B.V.	SOUTH SAGERI BLOCK	-	-
265	B	197	TECHWIN ENERGY NORTHEAST MADURA LTD	NORTHEAST MADURA	-	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 28.B

REKAPITULASI *SUBSEQUENT EXPENDITURE* ASET KKKS (US$)
PER 31 DESEMBER 2014

KKKS EKSPLOITASI						
No			KKKS	Blok	*SUBSEQUENT EXPENDITURE*	
					Item	Jumlah
266	B	198	TECHWIN ENERGY SOUTH BETUNG	SOUTH BETUNG	-	-
267	B	199	TERRA GLOBAL VESTA BATUBARA, PT	NORTH BATURAJA	-	-
268	B	200	TEXCAL MAHATO EP LTD.	MAHATO	-	-
269	B	201	THREE GOLDEN ENERGY WEST TUNGKAL	WEST TUNGKAL	-	-
270	B	202	TITAN RESOURCES (NATUNA) INDONESIA LTD.	NORTH EAST NATUNA	-	-
271	B	203	TOTAL E&P INDONESIA MENTAWAI B.V	BENGKULU I-MENTAWAI	-	-
272	B	204	TOTAL E&P INDONESIA TELEN B.V	TELEN	-	-
273	B	205	TOTAL E&P INDONESIA WEST PAPUA	SOUTHWEST BIRD'S HEAD, WEST PAPUA	-	-
274	B	206	TOTAL E&P SOUTH EAST MAHAKAM	SOUTH EAST MAHAKAM, OFF.	-	-
275	B	207	TRANSASIA ENERGY RESOURCES / EXXONMOBIL BARITO CBM Q3	GMB BARITO	-	-
276	B	208	TRISULA CBM ENERGY, PT	GMB MUARA ENIM	-	-
277	B	209	VISI MULTI ARTHA, PT	GMB SANGATTA II	-	-
278	B	210	ZARATEX N.V	LHOKSEUMAWE	-	-
SUB TOTAL KKKS EKSPLORASI					-	-
TOTAL					325,00	44.051.236,66

PROSES TERMINASI						
					Item	Jumlah
279	B	7	BLACK GOLD INDONESIA LLC	SERAM	-	-
280	B	8	BLACK GOLD SOUTH MATINDOK LLC	SOUTH MATINDOK	-	-
281	B	9	BLACK GOLD VENTURES LLC	BONE BAY	-	-
282	B	16	BUMI HASTA MUKTI	MANDALA	-	-
283	B	27	CJSC SINTEZMORNEFTEGAZ /EAST BAWEAN LTD.	EAST BAWEAN I	-	-
284	B	54	GUJARAT S. P. CORP. LTD.	SOUTH EAST TUNGKAL	-	-
285	B	71	LUNDIN BARONANG B.V	BARONANG	-	-
286	B	72	LUNDIN CAKALANG B.V.	CAKALANG	-	-
287	B	83	MUBADALA PETROLEUM (KERAPU)	KERAPU	-	-
288	B	84	MURPHY SEMAI IV LTD	SEMAI IV	-	-
289	B	85	MURPHY SEMAI OIL CO. LTD.	SEMAI II	-	-
290	B	96	NIKO RESOURCES (OVERSEAS XXVI) LTD.	SUNDA STRAIT I	-	-
291	B	100	NIKO RESOURCES (WEST SAGERI) LIMITED	WEST SAGERI	-	-
292	B	188	SERUWAY OFFSHORE EXPLORATION LTD.	SERUWAY	-	-
293	C	2	ALTAR SOCIDADE DE INVESMEN TO IMOBILLIARIO, SA	BARITO OFF.	-	-
294	C	3	AWE (TITAN) NZ LTD.	TITAN	-	-
295	C	4	AWE ANAMBAS PTE LTD.	ANAMBAS	-	-
296	C	5	CHEVRON EAST AMBALAT LTD.	EAST AMBALAT	-	-
297	C	6	CHEVRON WEST PAPUA I LIMIITED	WEST PAPUA I	-	-

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 28.B

REKAPITULASI *SUBSEQUENT EXPENDITURE* ASET KKKS (US$)
PER 31 DESEMBER 2014

KKKS EKSPLOITASI						
No			KKKS	Blok	*SUBSEQUENT EXPENDITURE*	
					Item	Jumlah
298	C	7	CHEVRON WEST PAPUA III LTD.	WEST PAPUA III	-	-
299	C	8	CONOCOPHILLIPS (AMBORIP VI) LTD.	AMBORIP VI	-	-
300	C	9	CONOCOPHILLIPS (ARAFURA SEA) LTD.	ARAFURA SEA	-	-
301	C	10	CONOCOPHILLIPS KUMA LTD.	KUMA	-	-
302	C	11	ECOSSE BENGKULU/ ENDEAVOR ENERGY(BENGKULU) PTY. LTD.	BENGKULU	-	-
303	C	12	ENI BULUNGAN LTD.	BULUNGAN	-	-
304	C	13	EXXONMOBIL E&P (GUNTING)	GUNTING	-	-
305	C	14	EXXONMOBIL E&P (MANDAR)LTD.	MANDAR, OFF	-	-
306	C	15	EXXONMOBIL E&P INDONESIA SURUMANA	SURUMANA	-	-
307	C	16	HARVEST BUDONG-BUDONG NV	BUDONG-BUDONG	-	-
308	C	17	HUSKY OIL NORTH SUMBAWA LTD.	NORTH SUMBAWA II	-	-
309	C	18	MEDCO E&P MERANGIN, PT	MERANGIN I	-	-
310	C	19	MITRA ENERGI BILITON PTE. LTD.	BILITON OFF.LAUT JAWA	-	-
311	C	20	MURPHY OVERSEAS VENTURES INC	SOUTH BARITO	-	-
312	C	21	PHE METAN TANJUNG IV, PT	GMB TANJUNG IV	-	-
313	C	22	PT. BRILIANCE ENERGY	SULA I	-	-
314	C	23	RANHILL PAMAI TALUK ENERGY PTE. LTD.	SOUTH CPP	-	-
315	C	24	SOUTH MADURA EXPLORATION COMPANY PTE. LTD.	SOUTH MADURA - EAST JAVA	-	-
316	C	25	STATOIL INDONESIA KARAMA AS	KARAMA, OFF.	-	-
317	C	26	TALISMAN ENERGY INC	SAGERI	-	-
318	C	27	TALISMAN SADANG B.V.	SADANG BLOCK	-	-
TOTAL KKKS DALAM PROSES TERMINASI					-	-

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN 29
Aset Eks BPPN
per 31 Desember 2014

ASET INVENTARIS EKS BPPN

PER 31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2014 (audited)		Mutasi Tahun 2014		Saldo 31 Desember 2013 (audited)		Keterangan
		Jumlah	Nilai Wajar	Jumlah	Nilai Wajar	Jumlah	Nilai Wajar	
1	Aset Inventaris	36.811	11.903.097.376,00	(167)	(1.962.566.246,00)	36.978	13.865.663.622,00	Terdapat koreksi pencatatan

Keterangan

Uraian	Jumlah	Nilai
Saldo 31 Desember 2013 (pelaporan di Ner	36.978	13.865.663.622,00
Saldo 31 Desember 2013 (nilai pembukuan	36.811	11.903.097.376,00
Koreksi pencatatan	**(167)**	**(1.962.566.246,00)**

www.peraturan.go.id

RINCIAN ASET PROPERTI EKS BPPN
31 DESEMBER 2014

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Aset	Saldo Per 31 Desember 2013 (audited)		Koreksi Tambah		Koreksi Kurang		Saldo Per 31 Desember 2014 (audited)	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	BJDA (Verifikasi 2009)	75	419.376.318.000,00	-	-	-	-	75	419.376.318.000,00
2	Settlement (Verifikasi 2009)	1	15.756.569.000,00	-	-	-	-	1	15.756.569.000,00
3	BJDA (Verifikasi 2011)	269	259.327.861.539,00	-	-	-	-	269	259.327.861.539,00
4	Temuan BPK	364	761.570.849.869,15	-	-	-	-	364	761.570.849.869,15
5	Griya Potensa	2	295.000.000,00	-	-	-	-	2	295.000.000,00
6	Apartemen Paladian	0	0,00	-	-	-	-	0	0,00
7	Sinar Bonana	42	139.208.400.000,00	-	-	-	-	42	139.208.400.000,00
8	Covernote	98	157.799.804.037,00	-	-	-	-	98	157.799.804.037,00
Total		**851**	**1.753.334.802.445,15**					**851**	**1.753.334.802.445,15**

ASET REKENING NOSTRO EKS BPPN
PER 31 DESEMBER 2014

No	Status Bank	Nama Bank	Jumlah Accou	Per 31 Desember 2013 Nilai (Rp)	Per 31 Desember 2013 Total (Rp)	Mutasi Tahun 2014 (Rp)	Per 31 Desember 2014 Nilai (Rp)	Per 31 Desember 2014 Total (Rp)	Neraca	CaLK
1	Bank Dalam Negeri	Bank CIC, Jakarta	1	56.629.035,03	15.760.604.070,11	(54.594.286,49)	2.044.748,60	15.706.019.763,62		2.044.748,60
		BCA Solo	1	1.776.080,31		-	1.776.080,31			1.776.080,31
		BRI Cut Mutiah	1	83.311.326,35		-	83.311.326,35			83.311.326,35
		Citibank	1	8.776.916.074,45		-	8.776.916.074,45			8.776.916.074,45
		BPR Tri Sejahtera Makmur	1	97.686.237,35		-	97.686.237,35			97.686.237,35
		Bank Ganesha, Jkt	1	706.423.119,47		-	706.423.119,47			706.423.119,47
		Bank Ganesha, Jkt	1	6.037.466.194,69		-	6.037.466.194,69		5.841.796.415,00	195.669.779,69
2	Tidak Diketahui		1	2.358.921.197,78	2.358.921.197,78	-	2.358.921.197,78	2.358.921.197,78		2.358.921.197,78
3	Telah Dilikuidasi	Bank Aspac	1	287.761,43	1.181.507.589,77	-	287.761,43	1.181.507.589,77		287.761,43
		Bank Astria (dalam likuid	1	6.601.373,85		-	6.601.373,85			6.601.373,85
		Bank Central Dagang	1	625.069,88		-	625.069,88			625.069,88
		Bank Central Dagang	1	2.934.930,16		-	2.934.930,16			2.934.930,16
		Bank Modern	1	6.207.877,25		-	6.207.877,25			6.207.877,25
		Bank Umum Majapahit	1	122.086.331,08		-	122.086.331,08			122.086.331,08
		Bank Umum Servitia	1	4.997.891,05		-	4.997.891,05			4.997.891,05
		BUMI Finance, Hongkong	1	1.020.060.447,69		-	1.020.060.447,69			1.020.060.447,69
		Bank Pelita	1	6.017.122,84		-	6.017.122,84			6.017.122,84
		Bank Bahari	1	11.738.032,84		-	11.738.032,84			11.738.032,84
4	Bank Indonesia (BI)	Bank Indonesia	1	8.840.515.509,00	415.574.040.840,33	-	8.840.515.509,00	415.574.040.840,33		8.840.515.509,00
		TRR - Bank Indonesia	1	406.733.525.331,33		-	406.733.525.331,33			406.733.525.331,33
5	Bank Indover (Anak Perusahaan B	Bank Indover	28	5.143.857.846,60	5.143.857.846,60	-	5.143.857.846,60	5.143.857.846,60		5.143.857.846,60
6	Bank Luar Negeri	-	44	28.649.547.877,84	28.649.547.877,84	-	28.649.547.877,84	28.649.547.877,84		28.649.547.877,84
TOTAL NOSTRO (BPK RI)			**90**		**468.675.479.432,43**		-	**468.820.895.145,84**	**5.841.796.415,00**	**462.778.098.730,84**
Uraian		**Nilai**		**Nilai Rupiah**						
Rekening Bank BIRA di ClearStream Ba		USD 256.436,50		3.214.974.940,00	3.214.974.940,00	-	3.214.974.940,00	3.214.974.940,00	3.214.974.940,00	
Rekening Bank TATA di Bank Indonesia				1.187.712.120,85	1.187.712.120,85	-	1.187.712.120,85	1.187.712.120,85		1.187.712.120,85
Masih dalam Penelusuran				5.543.633.506,72	5.543.633.506,72		5.543.633.506,72	5.543.633.506,72		5.543.633.506,72
TOTAL NOSTRO					**478.622.000.000,00**		-	**478.567.415.713,51**	**9.056.771.355,00**	**469.510.644.358,51**

* Pengkonversian nilai rekening Bank BIRA di ClearStream Banking SA menggunakan kurs tengah BI per tanggal 31 Desember 2014 yaitu Rp12.440/USD

SURAT BERHARGA EKS BPPN
PER 31 DESEMBER 2014

No.	Nama Aset	Bentuk Surat Berharga	Nominal	Mata Uang	Jumlah Lembar	Nilai Pasar Per Lembar	Nilai Pasar	Tanggal Nilai Pasar	Nilai Konversi Rupiah Per 31 Des 2014	Nilai Buku Aset	Keterangan	Kustodian
a.	***Corporate Bonds***											
1	Dpi International Finance Co	Sriptless	0,01	USD	1.000.000	-	-		-	835.000,00	Telah Dihapuskan oleh Citibank Hongkong	HONGKONG
2	Bank Dagang Nasional Indonesia	Sriptless	101,38	USD	4.500.000	1,02	4.584.685,50	31 Desember 2014	57.033.467.620,00	38.262.123.925,00	BBO (Telah Lavadas)	BRUSSEL
3	TPE International Finance Co. Bv	Sriptless	1,00	USD	25.000.000	0,01	250.000,00	31 Desember 2014	3.110.000.000,00	3.914.062.500,00	Emiten Tidak Diketahui	BRUSSEL
4	Ciputra Surya	Coupon	38.750.000,00	IDR	-	1,00	38.750.000,00	27 Juni 2008	38.750.000,00	38.750.000,00	Emiten Akhf	JAKARTA
5	Jakarta International Hotel	Coupon	800.000.000,00	IDR	-	1,00	800.000.000,00	27 Juni 2008	800.000.000,00	800.000.000,00	Emiten Tidak Diketahui	JAKARTA
6	Mulia Glass	Coupon	38.125.000,00	IDR	-	1,00	38.125.000,00	27 Juni 2008	38.125.000,00	38.125.000,00	Emiten Tidak Diketahui	JAKARTA
7	Mulia Keramik	Coupon	38.125.000,00	IDR	-	1,00	38.125.000,00	27 Juni 2008	38.125.000,00	38.125.000,00	Emiten Tidak Diketahui	JAKARTA
8	Polysindo Eka Perkasa	Sriptless	2,50	USD	3.000.000	0,02	63.000,00	31 Desember 2014	783.720.000,00	626.060.000,00	Emiten Akhf	BRUSSEL
9	Tpe International Finance Co. Bv	Sriptless	1,00	USD	2.000.000	0,01	20.000,00	31 Desember 2014	248.800.000,00	313.125.000,00	Emiten Tidak Diketahui	BRUSSEL
10	Bank Papan	Principal dan Coupon	100,00	IDR	500.000.000	1,00	500.000.000,00	31 Desember 2014	500.000.000,00	500.000.000,00	BBO (Telah Lavadas)	JAKARTA
11	Polysindo Eka Perkasa	Sriptless	2,50	USD	4.000.000	0,02	84.000,00	31 Desember 2014	1.044.960.000,00	701.400.000,00	Emiten Akhf	EUROCLEAR
12	Polysindo Eka Perkasa	Sriptless	98,25	USD	182.000	0,88	160.547,48	31 Desember 2014	1.997.259.851,20	1.340.571.459,00	Emiten Akhf	EUROCLEAR
	Total								**65.633.178.271,20**	**46.493.167.883,00**		
b.	***Medium Term Notes***											
1	Polysindo Eka Perkasa Medium Term N	Sriptless	93,92	USD	182.000	0,94	170.907,49	31 Desember 2014	2.126.462.375,60	1.427.538.042,00	Emiten Akhf	EUROCLEAR
2	Polysindo Eka Perkasa Medium Term N	Sriptless	90,00	USD	20.000.000	0,90	18.000.000,00	31 Desember 2014	223.920.000.000,00	150.000.000,00	Emiten Akhf	HONGKONG
3	Polysindo Eka Perkasa Medium Term N	Sriptless	90,00	USD	960.560	0,90	864.504,00	31 Desember 2014	10.754.429.760,00	7.218.936.400,00	Emiten Akhf	HONGKONG
4	Polysindo Eka Perkasa Medium Term N	Sriptless	90,00	USD	965.840	0,90	869.256,00	31 Desember 2014	10.813.544.640,00	7.258.297.800,00	Emiten Akhf	HONGKONG
5	Hutama Karya	Principal	100,00	USD	1.000.000	1,00	1.000.000,00	01 Oktober 2004	12.440.000.000,00	8.350.000.000,00	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
6	Hutama Karya	Principal	100,00	USD	1.000.000	1,00	1.000.000,00	01 Oktober 2004	12.440.000.000,00	8.350.000.000,00	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
7	Hutama Karya	Principal	100,00	USD	1.000.000	1,00	1.000.000,00	01 Oktober 2004	12.440.000.000,00	8.350.000.000,00	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
8	Hutama Karya	Principal	100,00	USD	5.000.000	1,00	5.000.000,00	01 Oktober 2004	62.200.000.000,00	41.750.000.000,00	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
	Total								**347.134.436.776,80**	**233.004.224.042,00**		
c.	***Non-Convertible Debentures***											
1	Polysindo Eka Perkasa	Principal	100,00	IDR	5.000.000.000	1,00	5.000.000.000,00	31 Desember 2014	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	Emiten Akhf	JAKARTA
	Total								**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**		
	Total (a+b+c)								**417.767.615.048,00**	**284.497.391.925,00**		

*Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Desember 2014

Catatan

Kurs Tengah BI	**Per 31 Desember 2014**
1 Dollar Amerika	12.440,00

www.peraturan.go.id

ASET 9 MILIK EKS BPPN
31 DESEMBER 2014

No.	Nama Debitur	Jumlah Lembar	Nominal	Harga per Lbr (Rp) (Nilai Nom. Rp 1 Juta/Lbr)	Tanggal Harga Perkiraan	Harga Per Lbr (Rp) (Nilai Nom. Rp 1 Juta/Lbr)	Dasar Penilaian	Instansi yang melakukan Penilaian	Instansi yang melakukan Penjualan	Nomor Surat Perintah	Cara Penjualan/Penilaian
1	PT Agro Usaha Investama Tbk	337.187.500	100	3.937.500.000,00	29 Februari 2016	3.937.500,00	@ 100				Resolusi Aset
2	PT Agro Usaha Investama Tbk	317.812.500	100	3.712.500.000,00	29 Februari 2016	3.712.500,00	@ 100				Resolusi Aset
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29 Februari 2016	[illegible]	Tidak Dapat Dapat Penilaian				
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29 Februari 2016	[illegible]	[illegible]				
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29 Februari 2016	[illegible]	[illegible]				
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29 Februari 2016	[illegible]	[illegible]				
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29 Februari 2016	[illegible]	[illegible]				
8	PT Cemindo Tbk	1.139.414.375	100	11.394.143.750,00	28 Desember 2012	11.394.143.750,00	@ 100				
9	PT Cemindo Tbk	1.139.414.375	100	11.394.143.750,00	28 Desember 2012	11.394.143.750,00	@ 100				
10	PT Cemindo Tbk	1.139.414.375	100	11.394.143.750,00	28 Desember 2012	11.394.143.750,00	@ 100				
11	PT Cemindo Tbk	1.139.414.375	100	11.394.143.750,00	28 Desember 2012	11.394.143.750,00	@ 100				
12	PT Cemindo Tbk	1.139.414.375	100	11.394.143.750,00	28 Desember 2012	11.394.143.750,00	@ 100				
13	PT Cemindo Tbk	1.139.414.375	100	11.394.143.750,00	28 Desember 2012	11.394.143.750,00	@ 100				
14	PT Cemindo Tbk	1.139.414.375	100	11.394.143.750,00	28 Desember 2012	11.394.143.750,00	@ 100				
15	PT Cemindo Tbk	1.139.414.375	100	11.394.143.750,00	28 Desember 2012	11.394.143.750,00	@ 100				
16	PT Cemindo Tbk	1.139.414.375	100	11.394.143.750,00	28 Desember 2012	11.394.143.750,00	@ 100				
17	PT Cemindo Tbk	1.139.414.375	100	11.394.143.750,00	28 Desember 2012	11.394.143.750,00	@ 100				
18	PT Cemindo Tbk	1.139.414.375	100	11.394.143.750,00	28 Desember 2012	11.394.143.750,00	@ 100				
19	PT Cemindo Tbk	1.139.414.375	100	11.394.143.750,00	28 Desember 2012	11.394.143.750,00	@ 100				
20	PT Cemindo Tbk	1.139.414.375	100	11.394.143.750,00	28 Desember 2012	11.394.143.750,00	@ 100				
21	PT Cemindo Tbk	1.139.414.375	100	11.394.143.750,00	28 Desember 2012	11.394.143.750,00	@ 100				
22	PT Cemindo Tbk	1.139.414.375	100	11.394.143.750,00	28 Desember 2012	11.394.143.750,00	@ 100				
23	PT Cemindo Tbk	1.139.414.375	100	11.394.143.750,00	28 Desember 2012	11.394.143.750,00	@ 100				
24	PT Cemindo Tbk	1.139.414.375	100	11.394.143.750,00	28 Desember 2012	11.394.143.750,00	@ 100				

Berdasarkan Monthly Report Oktober per tanggal 31 Desember 2014

Surat Nomor 0 [illegible] tanggal 15 Januari 2014	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan aset Indonesia Kabi Bentuk sesuai Hukum yang Berlaku		
Surat Nomor 0 [illegible] tanggal 15 Januari 2014	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan aset Indonesia Kabi Bentuk sesuai Hukum yang Berlaku		

LAMPIRAN 30
Aset Lain-Lain
per 31 Desember 2014

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 30

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)			31 DESEMBER 2013 (AUDITED)
			BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH	BRUTO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	2.209.200	(1.195.176)	1.014.024	2.209.200
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	14.621.364.208	(2.704.095.153)	11.917.269.055	15.228.714.853
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	12.759.055.169	(10.113.261.623)	2.645.793.546	15.338.874.674
4	005	MAHKAMAH AGUNG	67.933.687.884	(51.325.387.994)	16.608.299.890	41.126.463.784
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	32.477.394.432	(26.206.657.911)	6.270.736.521	19.551.118.151
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	212.643.165.206	(61.352.943.376)	151.290.221.830	241.317.195.616
7	007	BLU SEKRETARIAT NEGARA	74.027.053.215	(7.972.826.290)	66.054.226.925	72.723.315.760
8	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	560.910.143.561	(123.825.455.384)	437.084.688.177	441.332.676.618
9	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	104.431.808.443	(51.421.121.005)	53.010.687.438	97.135.505.015
10	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	3.237.469.119.118	(2.288.508.181.353)	948.960.937.765	2.820.584.318.295
11	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	154.252.218.180	(126.403.833.251)	27.848.384.929	84.276.630.562
12	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	580.408.069.489	(450.484.609.126)	129.923.460.363	467.500.264.865
13	015	BLU KEMENTERIAN KEUANGAN	2.868.917.870	(1.502.132.503)	1.366.785.367	2.559.644.240
14	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	203.356.359.138	(141.943.476.690)	61.412.882.448	180.626.064.463
15	018	BLU KEMENTERIAN PERTANIAN	466.053.137	(394.437.353)	71.615.784	562.587.647
16	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	14.766.795.706	(12.743.932.362)	2.022.863.344	5.589.449.504
17	019	BLU KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.471.199.872	(2.065.956.018)	405.243.854	759.873.853
18	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.338.114.859.370	(521.784.269.749)	816.330.589.621	1.340.159.086.004
19	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1.551.567.664.917	(125.344.216.978)	1.426.223.447.939	2.000.823.341.710
20	022	BLU KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	6.418.949.000	0	6.418.949.000	3.143.062.801
21	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	14.119.191.080.101	(524.102.550.799)	13.595.088.529.302	14.003.335.863.051
22	023	BLU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	120.292.837.965	0	120.292.837.965	100.607.671.120
23	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	2.999.859.771.920	(1.999.081.116.430)	1.000.778.655.490	2.514.979.295.795
24	024	BLU KEMENTERIAN KESEHATAN	108.236.429.080	(3.447.263.355)	104.789.165.725	77.814.274.970
25	025	KEMENTERIAN AGAMA	117.097.834.877	(88.709.499.011)	28.388.335.866	64.367.249.603
26	025	BLU KEMENTERIAN AGAMA	14.151.872.055	0	14.151.872.055	15.564.290.323
27	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	462.965.913.942	(139.139.215.109)	323.826.698.833	295.651.222.071
28	027	KEMENTERIAN SOSIAL	18.807.126.363	(17.244.230.487)	1.562.895.876	15.199.260.895
29	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	167.595.320.610	(102.308.287.251)	65.287.033.359	63.355.151.573
30	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	178.521.351.583	(151.233.957.555)	27.287.394.028	123.876.306.353
31	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	717.506.051.742	(226.077.383.895)	491.428.667.847	901.194.840.686
32	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	360.143.826	(360.143.826)	0	2.230.755.000
33	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	0	0	0	1.345.801.570
34	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	71.875.000	(71.875.000)	0	193.627.750
35	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	45.708.204.463	(41.773.996.184)	3.934.208.279	43.617.576.757
36	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	0	0	0	1.842.411.785
37	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	34.148.946.610	(22.624.374.673)	11.524.571.937	33.661.210.070
38	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	8.798.620.570	(8.374.355.048)	424.265.522	12.876.731.996
39	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	53.708.844.390	(844.594.406)	52.864.249.984	55.486.434.048
40	044	BLU KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	8.522.184.200	(312.963.265)	8.209.220.935	25.909.000
41	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0	0	0	1.382.915.737
42	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI	342.095.275	(339.218.533)	2.876.742	903.738.680
43	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	0	0	0	5.338.264.326
44	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	3.960.586.396	(3.522.093.422)	438.492.974	78.627.892.000
45	054	BADAN PUSAT STATISTIK	59.377.185.535	(49.602.722.552)	9.774.462.983	26.689.214.280
46	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	62.361.552.929	(891.360.349)	61.470.192.580	61.697.684.029
47	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	52.302.390.033	(48.523.481.833)	3.778.908.200	52.357.384.787
48	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	110.418.550.796	(1.322.671.081)	109.095.879.715	117.697.969.796
49	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	88.547.629.245	(99.492.261.814)	(10.944.632.569)	293.145.769.129
50	059	BLU KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.097.349.000	0	13.097.349.000	12.937.849.000
51	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	460.176.216.759	(404.204.976.455)	55.971.240.304	327.778.053.293
52	060	BLU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	6.643.387.215	(6.550.813.426)	92.573.789	6.984.033.215
53	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	20.209.881.250	(16.582.140.954)	3.627.740.296	11.936.346.714
54	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	2.097.447.587	(1.637.826.765)	459.620.822	941.030.000

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 30

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2014 (*AUDITED*)			31 DESEMBER 2013 (AUDITED)
			BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH	BRUTO
55	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	0	0	0	76.615.089
56	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	46.284.577.007	(44.633.130.394)	1.651.446.613	44.330.461.139
57	067	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	406.290.025.616	(1.983.105.614)	404.306.920.002	18.575.893.216
58	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	11.010.664.965	(9.338.312.274)	1.672.352.691	6.354.214.272
59	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	128.280.250	(127.131.750)	1.148.500	128.280.250
60	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	30.645.318.616	(28.484.878.243)	2.160.440.373	32.140.615.493
61	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	36.915.034.272	(33.742.408.998)	3.172.625.274	30.257.621.624
62	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	3.603.375.357	(3.596.049.101)	7.326.256	2.157.558.867
63	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	0	0	0	127.142.620
64	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	3.659.783.107	(3.104.102.381)	555.680.726	4.826.133.058
65	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	3.327.427.550	(3.299.944.190)	27.483.360	3.607.820.106
66	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	86.762.287.809	(28.502.817.466)	58.259.470.343	84.349.141.368
67	081	BLU BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	0	0	0	7.259.368.324
68	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	10.315.284.029	(9.823.890.622)	491.393.407	15.692.402.961
69	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	496.125.000	(496.125.000)	0	0
70	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	337.502.399	(273.471.548)	64.030.851	337.502.399
71	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	1.137.553.858	(1.137.553.858)	0	472.749.438
72	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	2.984.376.377	(2.913.209.751)	71.166.626	2.926.534.965
73	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	3.685.883.450	0	3.685.883.450	287.444.199
74	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	5.828.964.273	(5.767.364.719)	61.599.554	3.069.116.780
75	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	8.797.190.541	(1.554.414.109)	7.242.776.432	2.741.610.085
76	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	346.403.065.984	(71.817.310.751)	274.585.755.233	100.240.988.745
77	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	55.216.254.544	(19.558.676.326)	35.657.578.218	100.208.050.965
78	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	319.549.040.079	(69.070.988.792)	250.478.051.287	155.779.804.699
79	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	778.659.027	(754.501.894)	24.157.133	604.024.396
80	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	60.242.325	(58.405.668)	1.836.657	24.903.450
81	100	KOMISI YUDISIAL	0	0	0	0
82	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.555.292.568.522	(660.641.587.170)	894.650.981.352	1.155.407.470.502
83	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	5.264.095.630	(4.575.118.129)	688.977.501	5.094.913.930
84	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	1.023.537.634	(575.327.527)	448.210.107	722.070.884
85	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	248.448.931	(239.140.831)	9.308.100	0
86	107	BADAN SAR NASIONAL	62.894.310.144	(11.215.716.759)	51.678.593.385	79.916.956.540
87	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	0	0	0	0
88	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	0	0	0	0
89	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	579.829.504	(285.132.104)	294.697.400	579.829.504
90	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	59.044.000	(23.915.001)	35.128.999	
91	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	29.017.453.681	(21.993.982.738)	7.023.470.943	0
92	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	0	0	0	0
93	114	SEKRETARIAT KABINET	1.027.331.231	(1.014.552.129)	12.779.102	0
94	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	30.395.000	(9.240.110)	21.154.890	0
95	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	51.180.187.760	(49.181.938.240)	1.998.249.520	45.392.139.987
96	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	338.615.120.056	(212.705.064.016)	125.910.056.040	107.112.144.102
97	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	3.547.589.396	(225.965.293)	3.321.624.103	1.110.076.293
JUMLAH ASET LAIN-LAIN PADA K/L			**31.660.041.596.556**	**(9.267.197.836.469)**	**22.392.843.760.087**	**29.188.116.027.267**
98	999.03	INVESTASI PEMERINTAH	13.234.602.981	0	13.234.602.981	13.234.602.981
99	999.04	PENERUSAN PINJAMAN	23.451.899.643.724	(23.343.114.539.625)	108.785.104.099	21.720.308.915.133
100	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	77.635.810.481.383	0	77.635.810.481.383	47.686.685.456.304
JUMLAH ASET LAIN-LAIN PADA BUN			**101.100.944.728.088**	**(23.343.114.539.625)**	**77.757.830.188.463**	**69.420.278.974.418**
JUMLAH ASET LAIN-LAIN PADA K/L DAN BUN			**132.760.986.324.644**	**(32.610.312.376.094)**	**100.150.673.948.550**	**98.608.345.001.685**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN 31
Aset PT PPA
per 31 Desember 2014

ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2014

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2014 (Unaudited)		Mutasi TA 2014		Saldo 31 Desember 2013 (Audited)	
		Unit	Nilai Wajar	Unit	Nilai	Unit	Nilai Buku
1	Aset Tetap (AT)	623	2.266.569.641.927	(1)	(826.200.000,00)	624	2.267.395.841.927
2	BJDA Sempurna (BS)	1.113	1.708.669.653.019	(49)	(71.825.346.000,00)	1.162	1.780.494.999.019
3	BJDA Tidak Sempurna (BT)	323	865.910.243.344			323	865.910.243.344
4	BD (dokumen berupa covernote)	37	123.953.401.452			37	123.953.401.452
Total		**2.096**	**4.965.102.939.742**	**(50)**	**(72.651.546.000)**	**2146**	**5.037.754.485.742**

www.peraturan.go.id

SURAT BERHARGA EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2014

No.	Nama Aset	Jenis Surat Berharga	Nilai Aset Per 31 Desember 2014 (audited)	Nilai Aset Per 31 Desember 2013 (audited)
1.	Dharmala Intiutama	Obligasi	2.793.450.000,00	2.793.450.000,00
2.	Ometraco Multi Artha	Obligasi	6.499.457.694,00	6.499.457.694,00
3.	Ongko Intl Fin	Obligasi	4.317.150.000,00	4.317.150.000,00
4.	Ongko Intl Fin CO BV	Obligasi	215.857.500,00	215.857.500,00
5.	Pacific Intl CP	Obligasi	507.900.000,00	507.900.000,00
6.	Pacific Intl CP	Obligasi	507.900.000,00	507.900.000,00
7.	Indonesia Bermuda	Reksadana	1.805.657.589,00	1.805.657.589,00
8.	Mulia Keramik I/97 – Mulia Ind Wrt SRA-SL	Warrants	4.934.713,00	4.934.713,00
9.	Mulia Keramik I/97 – Mulia Ind Wrt SRA-SL	Warrants	4.934.713,00	4.934.713,00
Total			**16.657.242.209,00**	**16.657.242.209,00**

Saham Eks Kelolaan PT PPA
31 DESEMBER 2014

No.	Nama Emiten	Core Business	Bank Asal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Des 2014 (audited)	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Permintaan Informasi kepada Dirjen AHU, Kemenkumham
1	PT Asuransi Jiwa Intan Life	-	Intan		n/a	223.500,00	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Penjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Melalui surat Nomor S-1125IM.NS/2014 tanggal 28 Mei 2014 Direktorat PKNS telah meminta informasi kepada Dirjen AHU namun belum mendapat tanggapan.
2	PT Bunas Multifinance	-	BUN	750.000	15,00%	75.000.000,00	Dicabut ijin usahanya tahun 2005, berdasarkan surat Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK	Sesuai Lampiran A Penjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004		
3	PT Danareksa Prutama	-	BDNI	380	14,29%	141.550.000,00	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Penjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Melalui surat Nomor S-1125IM.NS/2014 tanggal 28 Mei 2014 Direktorat PKNS telah meminta informasi kepada Dirjen AHU namun belum mendapat tanggapan.
4	PT Panca Indonesia Ltd	-	BDNI	1.500	15,00%	28.310.000,00	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Penjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Melalui surat Nomor S-1125IM.NS/2014 tanggal 28 Mei 2014 Direktorat PKNS telah meminta informasi kepada Dirjen AHU namun belum mendapat tanggapan.
5	PT Pama Ventura Indonesia	-	BDNI	200	20,00%	234.871,00	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Penjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Melalui surat Nomor S-1125IM.NS/2014 tanggal 28 Mei 2014 Direktorat PKNS telah meminta informasi kepada Dirjen AHU namun belum mendapat tanggapan.
6	PT Servitia Finance	-	BUS	24.750	99,00%	1.500.000.000,00	Dicabut ijin usahanya tahun 2005, berdasarkan surat Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK Nomor S-4852/BL1/2012 tanggal 27 Juli 2012	Sesuai Lampiran A Penjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	
7	PT Aplikanusa Lintasarta	-	19 Bank	400	n/a	125.015.662,00	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran Surat Menteri Keuangan No. S-98/MK.6/2008 tanggal 28 April 2008	-	Melalui surat Nomor S-1125IM.NS/2014 tanggal 28 Mei 2014 Direktorat PKNS telah meminta informasi kepada Dirjen AHU namun belum mendapat tanggapan.
8	PT Bhakti Sarana Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI	450	5,43%	385.154.000,00	Tidak Diketahui	Sesuai KMK No. 153/KMK.06/2007	-	Melalui surat Nomor S-1125IM.NS/2014 tanggal 28 Mei 2014 Direktorat PKNS telah meminta informasi kepada Dirjen AHU namun belum mendapat tanggapan.
9	PT Dho Securities Indonesia	-	BDNI	310	16,00%		Telah Likuidasi Tahun 2012	-	-	
10	PT Sarana Jambi Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI	200.933	2,30%	280.502.468,00	Aktif	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur Utama PT Sarana Jambi Ventura Nomor 020/DIRSJV/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014	Jalan Kapten Pattimura No. 119 Jambi - 36129, Phone : (0741) 668886, 668886, Fax : (0741) 668 390	
11	PT Sarana Kalbar Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI-BNN	498.260	3,67%	498.260.000,00	Aktif	Nilai Nominal saham berdasarkan surat Direktur Utama PT Sarana Kalbar Ventura Nomor 375/SKV/07/2014 tanggal 10 Juli 2014	Jalan M Sohor No. 9 AB, Pontianak 78121, Phone : (0561) 736613, Fax (0561) 746 883	
12	PT Sarana Kaltel Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI	193.069	1,94%	347.326.734,00	Aktif	Nilai Buku saham berdasarkan surat Direktur Utama PT Sarana Kaltel Ventura Nomor 233/SKV/07/VII/2014 tanggal 8 Juli 2014	Jalan Pramuka No.4, Banjarmasin. Phone (0511) 327 3208, 327 3209, Fax (0511) 325 4252	

Saham Eks Kelolaan PT PPA
31 DESEMBER 2014

No.	Nama Emiten	Core Business	Bank Asal	Jumlah Lembar	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Des 2014 (audited)	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Permintaan Informasi kepada Dirjen AHU, Kemenkumham
13	PT Sarana Maluku Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	63.105	1,41%	31.286.000,00	Aktif	Sesuai KMK No. 153/KMK.06/2007	-	
14	PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia	-	20 Bank	1.412	21,07%	36.983.207.924,00	Aktif	Nilai Buku saham berdasarkan surat Direktur Utama PT SPBI Nomor 057/Dir/SPBI/07/2014 tanggal 7 Juli 2014	Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan, Jakarta Selatan, 12920Phone : (021)521 0715, 521 0732, 521 0799, Fax : (021)521	
15	PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri	Jasa Asuransi	BUN HASAN	4.500	1,23%	4.500.000.000,00	Aktif	Nilai Buku (Ekuitas) per 31 Desember 2013 (audited)	Wisma Tugu Rades Saleh Lt.1,2,4& 5, Jalan Rades Saleh No.44, Jakarta 1033, Phone : (021) 31901740, Fax (021) 31907168	
16	PT Asuransi Permi Mandiri	Jasa Asuransi	BUN HASAN	1.800.000	25,71%	335.020.000,00	Dicabut ijin usahanya tahun 2011, berdasarkan surat Keputusan Ketua Bapepam-LK atas nama Menteri	Sesuai Rekat KMK No. 156/KMK.09/2007	-	
17	BDNI Reksadana (PT Reksadana Perdana)	-	BDNI	60.000.000	13,30%	6.000.000.000,00	Aktif	Sesuai Lampiran Surat Menteri Keuangan No. S-98/MK.6/2008 tanggal 6 Desember 2004	Investasi, Wisma Sudirman Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220, Phone : (021) 5700 238, ext : 138	
18	PT Sarana Sulut Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	61.553	1,44%	61.553.000,00	Aktif	Nilai Nominal saham berdasarkan surat Direktur PT Sarana Sulut Ventura Nomor 01/SSV/RUPS/III/2014 tanggal 17 Maret 2014	Kompleks Pasar Segar Blok RC 17 Paal Dua Jalan Yos Sudarso Manado	
19	PT Sarana Sumbar Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	881.465	3,94%	1.473.995.615,00	Aktif	Nilai Buku saham berdasarkan surat PT Sarana Sumbar Ventura nomor 23/SSBV/DIR/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014	Jalan Khatib Sulaiman No 9 Kav. 5 sd 7 Padang - Sumatera Barat.	
20	PT Sarana Papua Ventura (d.h PT Sarana Irian Ventura)	Jasa Modal Ventura	BNN	82.471	1,41%	82.471.000,00	Aktif	Nilai Nominal saham berdasarkan surat Direktur Utama PT Sarana Papua Ventura Nomor 21/ADM/SPUVN/2014 tanggal 14 Juli 2014	Jalan Santonse, Tasangkopura No. 20, 99223 Jayapura, Papua	
21	PT SMBC Indonesia Finance	-	BDNI	3.750.000	15,00%	3.750.000.000,00	Dicabut ijin usahanya tahun 2010, berdasarkan surat Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK	Sesuai Lampiran Surat Menteri Keuangan No. S-171/MK.6/2007 tanggal 29 Juni 2007	-	
22	PT Bina Prima Perdana				100,00%		merealisasikan dan aset saham yang diserahkelolakan kepada PT. PPA	Masih dalam perkara		
	Total					**58.499.080.706,00**				

Untuk saham yang status emitennya belum diketahui, melalui surat Nomor S-1233/KN.6/2014 tanggal 28 Mei 2014 Direktorat PKNS telah meminta informasi kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham atas status emiten tersebut.
Melalui surat S-1/KN.5/2015 tanggal 2 Januari 2015, dalam rangka penyusunan LKTK Tahun 2014, Direktorat PKNS meminta nilai saham kepada para emiten per 31 Desember 20

www.peraturan.go.id

ASET SAHAM YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA PT PPA
31 DESEMBER 2014

No	Emiten	Persentase Kepemilikan	Jumlah Lembar	Nilai Per 31 Desember 2014 (unaudited)	Nilai Per 31 Desember 2013 (audited)	Keterangan
1	PT Bank Panin	0,0054%			-	Telah Dijual
2	PT Bank Permata	0,22%			-	Telah Dijual
3	PT Sejahtera Eka Graha	96,53%	278.000	22.470.000.000,00	22.470.000.000	Aktif
4	PT Tugu Reasuransi Indonesia	25,04%			-	Telah Dijual
5	PT Asia Natural Resources	0,97%	22.006.500	1.210.357.500,00	1.210.357.500	Aktif
6	PT Jemblo Cable Company	0,43%	654.500	431.315.500,00	431.315.500	Aktif

ASET SAHAM YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA PT PPA
31 DESEMBER 2014

No	Emiten	Persentase Kepemilikan	Jumlah Lembar	Nilai Per 31 Desember 2014 (unaudited)	Nilai Per 31 Desember 2013 (audited)	Keterangan
7	PT Bina Prima Perdana	100,00%			-	Dikembalikan oleh PT PPA ke Menteri Keuangan karena terkait perkara
8	PT Tuban Petrochemical Industries	100,00%	-	8.750.000,00	8.750.000	Aktif
Jumlah				**24.120.423.000**	**24.120.423.000**	

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN 32
Utang Kepada Pihak Ketiga & Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2014

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 32

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	
			31 DESEMBER 2014 (AUDITED)	31 DESEMBER 2013 (AUDITED)	31 DESEMBER 2014 (AUDITED)	31 DESEMBER 2013 (AUDITED)	31 DESEMBER 2014 (AUDITED)	31 DESEMBER 2013 (AUDITED)
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	300.809.723	105.070.150	0	25.515.000	0	0
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	389.478.231	36.271.895.529	1.724.473.314	930.999.168	0	0
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	49.243.939.185	38.221.722.471	1.330.883.422	290.270.212	94.761.400	0
4	005	MAHKAMAH AGUNG	12.553.380.806	12.988.801.114	401.011.673	468.382.966	4.604.284	0
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	145.349.751.113	52.252.185.216	966.808	103.246.394	0	0
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	61.853.325.209	78.374.884.895	8.538.776.748	1.113.315.648	536.780.767	0
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	12.987.266.880	33.716.859.581	912.466.151	953.225.856	9.393.696	0
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	27.489.852.934	28.588.414.737	0	0	534.829.561	0
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	7.280.060.285.542	10.877.779.430.111	1.268.045.191	0	22.806.909.345	70.718.467.432
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	103.449.706.730	53.078.687.737	84.198.652.897	63.865.505.500	5.929.682	0
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	527.315.436.845	72.908.198.523	4.323.531.275	31.151.192.877	914.456.926	0
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	17.058.948.275	17.508.121.641	587.802.399	280.216.722	283.383.719	86.330.500
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	13.146.100.057	5.616.798.897	4.644.518.670	2.301.751.756	799.220.776	0
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.986.310.279	1.389.263.340	785.655.367	350.259.116	2.864.400	0
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	27.238.042.421	427.063.813.222	26.631.603.521	22.241.989.715	20.113.382	0
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.961.036.693.875	1.884.315.468.239	539.811.818.493	636.112.629.193	26.362.170.728	43.968.789.966
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	915.722.500.194	4.451.060.960.415	76.708.065.869	56.280.204.888	307.621.197	18.333.957
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	2.243.981.191.207	3.610.743.607.023	12.074.330.292	10.859.197.990	230.608.938	260.008.009
19	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.901.979.377	1.227.305.437	318.242.868	487.387.135	0	0
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	832.864.499	9.215.171.063	0	0	887.500	0
21	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	48.383.486.737	87.559.297.906	0	0	128.942.080	0
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	30.103.115.957	81.959.123.499	391.226.455	319.144.315	0	0
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	60.208.779.300	356.692.821.371	2.554.870.500	410.733.917	0	0
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	3.013.055.424	61.013.918	50.833.333	70.833.333	0	0
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	288.963.894	123.895.338	0	0	0	0
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	9.108.239.341	8.857.849.339	0	0	213.322.325	0
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	13.082.481.209	12.673.706.153	3.540.600.000	443.250.000	0	0
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	0	171.451.800	120.988.333	2.138.458.893	0	0
29	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	4.464.990.328	2.029.302.948	1.607.571.410	262.878.585	0	0
30	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	3.751.291.930	21.026.734.835	0	6.000.000	0	0
31	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	2.715.477.009	2.693.252.298	8.932.320.662	9.258.873.219	0	0
32	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.163.363.060	1.240.900.878	0	0	91.985.222	0
33	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI	142.316.000	91.186.848	0	0	0	0
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	432.154.107	0	0		0	0
35	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	555.369.496	0	0	0	0	0
36	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	0	0	0	0	0	0
37	054	BADAN PUSAT STATISTIK	50.035.815.915	4.681.671.962	99.514.499	43.733.333	187.291	0
38	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	16.254.000	7.394.960.781	0	0	0	0
39	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	13.371.099.475	2.857.861.735	5.743.246.070	4.088.741.150	20.349.884	0
40	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	47.105.596	42.775.800	7.500.000	25.500.000	0	0
41	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.286.582.903.529	62.258.200.224	8.409.946.313.230	7.429.642.965.800	0	0
42	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	249.853.834.532	166.861.043.184	40.110.698.706	128.270.765.624	169.375.265	0
43	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2.634.504.997	8.681.122.450	45.732.695.000	38.101.690.000	37.578.306	0
44	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	0	0	0	0	0	0
45	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	784.448.069	374.898.593	1.034.582.013	232.311.688	0	0
46	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.815.810.186	538.065.660	0	0	120.000	0
47	067	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	2.975.069.160	3.165.155.360	0	0	0	0
48	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	3.945.079.543	738.923.724	221.057.333	423.040.333	14.134.945	0
49	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	327.682.368	441.299.617	0	0	0	0
50	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	1.416.948.647	67.289.194.425	0	0	0	0
51	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	3.535.130.751	702.985.554	0	0	28.548.247	0
52	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	539.948.647	436.243.587	0	0	0	0
53	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	0	0	12.033.167	3.118.862	0	0
54	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	2.962.702.438	13.616.742.972	5.505.716	54.283.937	14.704.839	0
55	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	3.012.050.621	2.834.302.668	145.007.500	167.428.584	0	0
56	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	5.876.987.323	4.512.661.448	0	0	100.993.468	0
57	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	932.929.874	779.231.555	3.967.792	3.967.792	231.050	0
58	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	838.933.660	0	0	0	0	0
59	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	111.749.449	4.938.545.859	92.500.000	61.009.714	0	0
60	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	854.359.937	245.587.136	0	0	0	0
61	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	3.416.719.257	2.624.822.408	640.499.056	602.150.000	173.393.021	0
62	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	2.210.106.093	2.023.912.700	0	0	0	0
63	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	1.454.208.762	1.083.875.398	182.273.000	21.139.334	0	0
64	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.565.557.593	2.152.129.176	466.209.684	159.400.976	0	0
65	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	8.728.960.712	25.847.671.544	348.778.993	207.709.951	76.352.000	0
66	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	0	0	0	0	0	0
67	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	6.869.299.911	1.051.845.000	16.000.000	35.200.000	0	0
68	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	6.968.014.776	5.535.057.237	0	0	0	0
69	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	4.300.290.103	414.088.383	0	0	164.438.550	0
70	100	KOMISI YUDISIAL	5.850.454	16.161.480	10.512.664	72.900.667	0	0
71	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	339.525.075	1.638.806.099	0	0	0	0
72	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	316.864.628	414.078.288	227.660.567	203.816.495	23.988.698	0
73	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	40.444.664	31.723.728	0	0	0	0

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 32

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	
			31 DESEMBER 2014 (AUDITED)	31 DESEMBER 2013 (AUDITED)	31 DESEMBER 2014 (AUDITED)	31 DESEMBER 2013 (AUDITED)	31 DESEMBER 2014 (AUDITED)	31 DESEMBER 2013 (AUDITED)
74	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	3.414.512	396.000.000	0	0	0	0
75	107	BADAN SAR NASIONAL	606.692.053	502.119.504	153.469.667	261.319.667	0	0
76	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	239.593.231	23.121.289	0	0	0	0
77	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	536.159.000	0	0	0	0	0
78	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	0	121.100.000	0	0	3.855.000	0
79	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	45.188.064	0	0	0	0	0
80	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	84.120.641.282	487.231.350.813	481.203.134.415	0	177.679.893	0
81	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	430.571.864		0	0	1.059.650.193	0
82	114	SEKRETARIAT KABINET	2.849.298.845	3.266.883.940	0	0	0	0
83	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	988.478.246	66.799.851.017	0	0	87.474.542	0
84	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	136.557.732	110.642.930	6.442.040.255	0	0	0
85	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	149.469.060.620	66.463.957.603	8.160.018.845	10.939.344.577	7.757.019.881	57.466.599.004
86	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	8.243.113.263	11.122.157.614	0	0	0	0
JUMLAH UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA			**17.498.669.889.631**	**23.299.768.926.917**	**9.782.484.473.823**	**8.454.347.000.882**	**63.258.861.001**	**172.508.528.868**
87	999.05	TRANSFER KE DAERAH	15.756.430.496.044	24.619.657.177.709	0	0	0	0
88	999.07	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0
89	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	18.854.413.733	49.746.677.557	0	0	9.211.274.747	0
90	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	3.672.784.006.081	6.290.662.724.766	0	0	3.398.253.461.638	245.587.348.560
91	999.99 2	DIREKTORAT PKN (SAKUN)	1.033.459.801.253	1.120.325.736.883	0	0	0	0
JUMLAH UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA			**20.481.528.717.111**	**32.080.392.316.915**	**0**	**0**	**3.407.464.736.385**	**245.587.348.560**
JUMLAH UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA			**37.980.198.606.742**	**55.380.161.243.832**	**9.782.484.473.823**	**8.454.347.000.882**	**3.470.723.597.386**	**418.095.877.428**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN 33
Utang Bunga - SBN
per 31 Desember 2014

www.peraturan.go.id

Utang Bunga/Imbalan (*Accrued Interest/Return*) - Surat Berharga Negara

Per 31 Desember 2014

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle	Rate (%)	Accrued Interest
FIXED RATE BOND			**891.865.633.000.000**		**19.945.309.628.657**
1	FR0027	15/06/2015	17.278.032.000.000	9,50000%	76.662.627.984
2	FR0028	15/07/2017	13.550.744.000.000	10,00000%	625.990.169.824
3	FR0030	15/05/2016	10.159.000.000.000	10,75000%	141.789.163.000
4	FR0031	15/11/2020	17.890.000.000.000	11,00000%	255.504.980.000
5	FR0032	15/07/2018	938.492.000.000	15,00000%	65.030.926.156
6	FR0034	15/06/2021	16.286.400.000.000	12,80000%	97.360.099.200
7	FR0035	15/06/2022	11.023.750.000.000	12,90000%	66.418.093.750
8	FR0036	15/09/2019	9.899.500.000.000	11,50000%	339.641.945.500
9	FR0037	15/09/2026	2.450.000.000.000	12,00000%	87.712.450.000
10	FR0038	15/08/2018	2.560.862.000.000	11,60000%	112.204.168.530
11	FR0039	15/08/2023	4.175.000.000.000	11,75000%	185.294.850.000
12	FR0040	15/09/2025	26.002.090.000.000	11,00000%	853.336.589.620
13	FR0042	15/07/2027	14.774.100.000.000	10,25000%	699.568.409.100
14	FR0043	15/07/2022	14.417.000.000.000	10,25000%	682.659.367.000
15	FR0044	15/09/2024	18.014.000.000.000	10,00000%	537.429.676.000
16	FR0045	15/05/2037	6.400.000.000.000	9,75000%	81.017.600.000
17	FR0046	15/07/2023	16.855.000.000.000	9,50000%	739.698.530.000
18	FR0047	15/02/2028	20.385.000.000.000	10,00000%	769.982.220.000
19	FR0048	15/09/2018	5.237.570.000.000	9,00000%	140.633.992.070
20	FR0050	15/07/2038	15.661.000.000.000	10,50000%	759.636.805.000
21	FR0052	15/08/2030	23.500.000.000.000	10,50000%	932.010.000.000
22	FR0053	15/07/2021	19.083.793.000.000	8,25000%	727.302.435.023
23	FR0054	15/07/2031	27.096.000.000.000	9,50000%	1.189.135.056.000
24	FR0055	15/09/2016	13.984.300.000.000	7,37500%	307.696.552.900
25	FR0056	15/09/2026	17.164.000.000.000	8,37500%	428.859.704.000
26	FR0057	15/05/2041	13.550.000.000.000	9,50000%	167.125.700.000
27	FR0058	15/06/2032	42.798.000.000.000	8,25000%	164.900.694.000
28	FR0059	15/05/2027	26.630.000.000.000	7,00000%	242.013.440.000
29	FR0060	15/04/2017	10.068.000.000.000	6,25000%	134.840.724.000
30	FR0061	15/05/2022	29.700.000.000.000	7,00000%	269.913.600.000
31	FR0062	15/04/2042	12.000.000.000.000	6,37500%	163.932.000.000
32	FR0063	15/05/2023	33.516.000.000.000	5,62500%	244.767.348.000
33	FR0064	15/05/2028	29.895.000.000.000	6,12500%	237.725.040.000
34	FR0065	15/05/2033	47.850.000.000.000	6,62500%	411.605.700.000
35	FR0066	15/05/2018	18.709.000.000.000	5,25000%	127.520.544.000
36	FR0067	15/02/2044	11.250.000.000.000	8,75000%	371.812.500.000
37	FR0068	15/03/2034	65.594.000.000.000	8,37500%	1.638.931.684.000
38	FR0069	15/04/2019	48.496.000.000.000	7,87500%	818.370.000.000
39	FR0070	15/03/2024	89.532.000.000.000	8,37500%	2.237.046.552.000
40	FR0071	15/03/2029	67.492.000.000.000	9,00000%	1.812.227.692.000

www.peraturan.go.id

Utang Bunga/Imbalan (*Accrued Interest/Return*) - Surat Berharga Negara

Per 31 Desember 2014

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle	Rate (%)	Accrued Interest
ORI			**54.097.910.000.000**		**197.084.588.580**
1	ORI009	15/10/2015	12.676.745.000.000	6,25000%	36.204.783.720
2	ORI010	15/10/2016	20.205.255.000.000	8,50000%	78.477.210.420
3	ORI011	15/10/2017	21.215.910.000.000	8,50000%	82.402.594.440
VALAS DOMESTIK			**6.717.600.000.000**		**30.497.904.000**
1	USDFR	15/05/2017	6.717.600.000.000	3,50000%	30.497.904.000
VARIABLE RATE BOND			**113.343.707.000.000**		**800.743.183.012**
1	VR0020	25/04/2015	9.164.007.000.000	5,62200%	95.195.704.716
2	VR0021	25/11/2015	7.436.328.000.000	5,79700%	43.338.919.584
3	VR0022	25/03/2016	9.016.749.000.000	5,95100%	10.432.378.593
4	VR0023	25/10/2016	8.652.056.000.000	5,62200%	89.877.557.728
5	VR0024	25/02/2017	9.909.300.000.000	5,79700%	57.751.400.400
6	VR0025	25/09/2017	3.209.300.000.000	5,95100%	3.713.160.100
7	VR0026	25/01/2018	5.442.142.000.000	5,62200%	56.532.971.096
8	VR0027	25/07/2018	5.442.142.000.000	5,62200%	56.532.971.096
9	VR0028	25/08/2018	7.033.994.000.000	5,79700%	40.994.117.032
10	VR0029	25/08/2019	12.212.320.000.000	5,79700%	71.173.400.960
11	VR0030	25/12/2019	10.503.015.000.000	5,95100%	12.151.988.355
12	VR0031	25/07/2020	25.322.354.000.000	5,62200%	263.048.613.352
SBR			**2.390.885.000.000**		**6.940.739.155**
1	SBR001	20/05/2016	2.390.885.000.000	9,00000%	6.940.739.155
SU DAN SRBI			**229.053.931.322.211**		**78.686.980.949**
1	SU002	01/04/2025	16.444.954.173.856	0,10000%	4.145.029.545
2	SU004	01/12/2025	44.796.189.405.980	0,10000%	3.804.607.867
3	SU007	01/08/2025	42.812.142.487.308	0,10000%	18.766.966.570
4	SRBI01	01/08/2043	125.000.645.255.067	0,10000%	51.970.376.967
SBSN			**133.165.725.000.000**		**1.610.124.698.685**
1	IFR001	15/08/2015	2.714.700.000.000	11,80000%	120.996.893.700
2	IFR002	15/08/2018	1.985.000.000.000	11,95000%	89.596.945.000
3	IFR003	15/09/2015	2.632.000.000.000	9,25000%	72.635.304.000
4	IFR005	15/01/2017	1.171.000.000.000	9,00000%	48.685.496.000
5	IFR006	15/03/2030	2.175.000.000.000	10,25000%	66.511.500.000
6	IFR007	15/01/2025	1.547.000.000.000	10,25000%	73.251.997.000
7	IFR008	15/03/2020	252.000.000.000	8,80000%	6.616.008.000

www.peraturan.go.id

Utang Bunga/Imbalan (*Accrued Interest/Return*) - Surat Berharga Negara

Per 31 Desember 2014

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle	Rate (%)	Accrued Interest
8	IFR010	15/02/2036	4.110.000.000.000	10,00000%	155.242.920.000
9	PBS001	15/02/2018	6.725.000.000.000	4,45000%	113.033.800.000
10	PBS002	15/01/2022	1.218.000.000.000	5,45000%	30.665.586.000
11	PBS003	15/01/2027	3.786.000.000.000	6,00000%	104.936.562.000
12	PBS004	15/02/2037	10.149.000.000.000	6,10000%	233.843.109.000
13	PBS005	15/04/2043	9.934.000.000.000	6,75000%	143.685.376.000
14	PBS006	15/09/2020	2.664.000.000.000	8,25000%	65.569.032.000
15	PBS007	15/09/2040	1.000.000.000.000	9,00000%	26.851.000.000
16	SR-004	21/09/2015	13.613.805.000.000	6,25000%	25.158.311.640
17	SR-005	27/02/2016	14.968.875.000.000	6,00000%	12.064.913.250
18	SR-006	05/03/2017	19.323.345.000.000	8,75000%	122.722.564.095
19	SDHI2015A	28/06/2015	1.000.000.000.000	5,21000%	560.000.000
20	SDHI2016A	27/04/2016	1.000.000.000.000	5,03000%	676.000.000
21	SDHI2017A	21/03/2017	2.000.000.000.000	5,16000%	3.052.000.000
22	SDHI2018A	30/05/2018	2.500.000.000.000	6,06000%	815.000.000
23	SDHI2019A	21/03/2019	3.000.000.000.000	5,46000%	4.845.000.000
24	SDHI2019B	11/02/2019	2.000.000.000.000	8,05000%	9.088.000.000
25	SDHI2020A	27/04/2020	1.500.000.000.000	5,79000%	1.167.000.000
26	SDHI2020B	28/06/2020	1.000.000.000.000	6,20000%	667.000.000
27	SDHI2020C	03/07/2020	3.000.000.000.000	8,30000%	19.410.000.000
28	SDHI2021A	11/04/2021	2.000.000.000.000	8,00000%	9.032.000.000
29	SDHI2021B	17/10/2021	3.000.000.000.000	7,16000%	8.661.000.000
30	SDHI2022A	21/03/2022	3.342.000.000.000	5,91000%	5.841.816.000
31	SDHI2022B	11/02/2022	2.000.000.000.000	8,75000%	9.880.000.000
32	SDHI2024A	11/02/2024	2.000.000.000.000	9,04000%	10.206.000.000
33	SDHI2029A	25/03/2029	1.000.000.000.000	8,43000%	1.586.000.000
34	SDHI2029B	13/08/2029	2.855.000.000.000	8,62000%	12.570.565.000
INTERNATIONAL BOND			**449.898.020.000.000**		**8.599.074.795.862**
1	RI0015	20/04/2015	12.440.000.000.000	7,25000%	177.874.722.208
2	RI0016	15/01/2016	11.196.000.000.000	7,50000%	387.195.000.000
3	RI0017	09/03/2017	12.440.000.000.000	6,87500%	266.077.777.792
4	RI0018	17/01/2018	23.636.000.000.000	6,87500%	740.266.388.834
5	RI00190304	04/03/2019	24.880.000.000.000	11,62500%	939.997.500.000
6	RI0035	12/10/2035	19.904.000.000.000	8,50000%	371.264.888.958
7	RI0037	17/02/2037	18.660.000.000.000	6,62500%	460.150.416.625
8	RI0038	17/01/2038	24.880.000.000.000	7,75000%	878.402.222.333
9	RI0124	15/01/2024	24.880.000.000.000	5,87500%	674.006.111.166
10	RI0142	17/01/2042	27.990.000.000.000	5,25000%	669.427.500.000
11	RI0144	15/01/2044	24.880.000.000.000	6,75000%	774.390.000.000
12	RI0320	13/03/2020	24.880.000.000.000	5,87500%	438.510.000.000
13	RI0422	25/04/2022	24.880.000.000.000	3,75000%	171.050.000.000
14	RI0423	15/04/2023	18.660.000.000.000	3,37500%	132.952.500.000

www.peraturan.go.id

Utang Bunga/Imbalan (*Accrued Interest/Return*) - Surat Berharga Negara

Per 31 Desember 2014

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle	Rate (%)	Accrued Interest
15	RI0443	15/04/2043	18.660.000.000.000	4,62500%	182.194.166.625
16	RI0521	05/05/2021	31.100.000.000.000	4,87500%	235.841.666.625
17	RI1023	17/10/2023	12.440.000.000.000	5,37500%	137.444.722.208
18	RIEUR0721	08/07/2021	15.133.270.000.000	2,87500%	210.984.736.154
19	RIJPY0719	29/07/2019	3.648.750.000.000	2,73000%	42.057.924.965
20	RIJPY1120	12/11/2020	6.255.000.000.000	1,60000%	13.622.000.035
21	RIJPY1122	22/11/2022	6.255.000.000.000	1,13000%	7.657.162.500
22	SNI-18	21/11/2018	12.440.000.000.000	4,00000%	55.288.888.834
23	SNI19	15/03/2019	18.660.000.000.000	6,12500%	336.527.916.625
24	SNI22	21/11/2022	12.440.000.000.000	3,30000%	45.613.333.375
25	SNI24	10/09/2024	18.660.000.000.000	4,35000%	250.277.250.000
TOTAL			**1.880.533.411.322.210**	-	**31.268.462.518.900**

* Kurs Tengah BI JPY pada tanggal pelaporan (31 Desember 2014) adalah Rp104,25
* Kurs Tengah BI USD pada tanggal pelaporan (31 Desember 2014) adalah Rp12.440
* Kurs Tengah BI EUR pada tanggal pelaporan (31 Desember 2014) adalah Rp15.133,27

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN 34
Bagian Lancar
Utang Jangka Panjang - SBN
per 31 Desember 2014

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 34.A

Bagian Lancar Surat Berharga Negara
Per 31 Desember 2014

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate (%)	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	BookValue
FIXED RATE BOND			**17.278.032.000.000**		**12.775.407.000**	**17.290.807.407.000**
1	FR0027	15-Jun-15	17.278.032.000.000	9,50000%	12.775.407.000	17.290.807.407.000
ORI			**12.676.745.000.000**		**-**	**12.676.745.000.000**
1	ORI009	15-Oct-15	12.676.745.000.000	6,25000%	-	12.676.745.000.000
SURAT UTANG PEMERINTAH			**6.411.706.589.052**		**-**	**6.411.706.589.052**
1	SU002	1-Apr-15	460.394.698.697	0,10000%	-	460.394.698.697
2	SU002	1-Oct-15	483.414.433.632	0,10000%	-	483.414.433.632
3	SU004	1-Jun-15	1.163.379.820.262	0,10000%	-	1.163.379.820.262
4	SU004	1-Dec-15	1.221.548.811.275	0,10000%	-	1.221.548.811.275
5	SU007	30-Jan-15	1.111.863.112.784	0,10000%	-	1.111.863.112.784
6	SU007	31-Jul-15	1.167.445.768.423	0,10000%	-	1.167.445.768.423
7	SRBI-01	1-Feb-15	392.034.119.014	0,10000%	-	392.034.119.014
8	SRBI-01	1-Aug-15	411.635.824.986	0,10000%	-	411.635.824.986
VARIABLE RATE BOND			**16.600.335.000.000**		**-**	**16.600.335.000.000**
1	VR0020	25-Apr-15	9.164.007.000.000	13,12000%	-	9.164.007.000.000
2	VR0021	25-Nov-15	7.436.328.000.000	14,83000%	-	7.436.328.000.000
SBSN			**19.960.505.000.000**	**0**	**8.201.908.000**	**19.968.706.908.000**
1	IFR001	15-Aug-15	2.714.700.000.000	11,80000%	-	2.714.700.000.000
2	IFR003	15-Sep-15	2.632.000.000.000	9,25000%	8.201.908.000	2.640.201.908.000
3	SR-004	21-Sep-15	13.613.805.000.000	6,25000%	-	13.613.805.000.000
4	SDHI2015A	28-Jun-15	1.000.000.000.000	5,21000%	-	1.000.000.000.000
TOTAL SBN JANGKA PENDEK			**72.927.323.589.052**		**20.977.315.000**	**72.948.300.904.052**

www.peraturan.go.id

Bagian Lancar Surat Berharga Negara Dalam Valas
Per 31 Desember 2014

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Issued Principle Outstanding		Rate (%)	Accrued Indexation	Indexed Principle Outstanding	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	BookValue
			Valas	Rupiah					
SUN VALAS (USD)			**Rp1.000.000.000**	**Rp9.613.000.000.000**		**(Rp2.827.000.000.000)**	**Rp12.440.000.000.000**	**-Rp2.349.714.000**	**Rp12.437.650.286.000**
1	RI0015	20-Apr-15	$1.000.000.000	Rp9.613.000.000.000	7,25000%	-Rp2.827.000.000.000	Rp12.440.000.000.000	(2.349.714.000)	12.437.650.286.000
TOTAL			**Rp1.000.000.000**	**Rp9.613.000.000.000**		**-Rp2.827.000.000.000**	**Rp12.440.000.000.000**	**-Rp2.349.714.000**	**Rp12.437.650.286.000**

* Kurs Tengah BI JPY pada tanggal pelaporan (31 Desember 2014) adalah Rp104,25
* Kurs Tengah BI USD pada tanggal pelaporan (31 Desember 2014) adalah Rp12.440
* Kurs Tengah BI EUR pada tanggal pelaporan (31 Desember 2014) adalah Rp15.133,27

LAMPIRAN 35
SBN Jangka Pendek
per 31 Desember 2014

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 35

Surat Berharga Negara Jangka Pendek
Per 31 Desember 2014

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate (%)	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	BookValue
SPN			**39.950.000.000.000**		**(977.920.814.000)**	**38.972.079.186.000**
1	SPN03150103	3-Jan-15	1.000.000.000.000	-	(512.797.000)	999.487.203.000
2	SPN12150108	8-Jan-15	5.000.000.000.000	-	(7.179.027.000)	4.992.820.973.000
3	SPN12150206	6-Feb-15	6.450.000.000.000	-	(40.186.567.000)	6.409.813.433.000
4	SPN12150305	5-Mar-15	3.600.000.000.000	-	(37.644.650.000)	3.562.355.350.000
5	SPN12150403	3-Apr-15	1.450.000.000.000	-	(22.043.253.000)	1.427.956.747.000
6	SPN12150501	1-May-15	1.850.000.000.000	-	(37.521.716.000)	1.812.478.284.000
7	SPN12150611	11-Jun-15	2.800.000.000.000		(76.622.192.000)	2.723.377.808.000
8	SPN12150710	10-Jul-15	4.800.000.000.000	-	(158.574.820.000)	4.641.425.180.000
9	SPN12150806	6-Aug-15	4.000.000.000.000		(154.875.950.000)	3.845.124.050.000
10	SPN12150903	3-Sep-15	2.000.000.000.000		(87.396.391.000)	1.912.603.609.000
11	SPN12151001	1-Oct-15	5.000.000.000.000		(247.199.953.000)	4.752.800.047.000
12	SPN12151105	5-Nov-15	2.000.000.000.000		(108.163.498.000)	1.891.836.502.000
SPN SYARIAH			**10.735.000.000.000**		**(123.685.412.000)**	**10.611.314.588.000**
1	SPN-S 02012015	2-Jan-15	875.000.000.000	-	(287.938.000)	874.712.062.000
2	SPN-S 10032015	10-Mar-15	4.550.000.000.000	-	(56.523.828.000)	4.493.476.172.000
3	SPN-S 13022015	13-Feb-15	2.780.000.000.000	-	(22.283.268.000)	2.757.716.732.000
4	SPN-S 08042015	8-Apr-15	2.530.000.000.000	-	(44.590.378.000)	2.485.409.622.000
TOTAL SBN JANGKA PENDEK			**50.685.000.000.000**		**(1.101.606.226.000)**	**49.583.393.774.000**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN 36
SBN Jangka Panjang
31 Desember 2014

www.peraturan.go.id

Surat Berharga Negara Jangka Panjang Rupiah
Per 31 Desember 2014

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate (%)	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	BookValue
A. SUN JANGKA PANJANG						
FIXED RATE BOND			**874.587.601.000.000**		**2.736.764.734.000**	**877.324.365.734.000**
1	FR0028	15-Jul-17	13.550.744.000.000	10,00000%	127.960.875.000	13.678.704.875.000
2	FR0030	15-Mei-16	10.159.000.000.000	10,75000%	(50.898.655.000)	10.108.101.345.000
3	FR0031	15-Nop-20	17.890.000.000.000	11,00000%	(254.814.186.000)	17.635.185.814.000
4	FR0032	15-Jul-18	938.492.000.000	15,00000%	(13.493.425.000)	924.998.575.000
5	FR0034	15-Jun-21	16.286.400.000.000	12,80000%	135.477.937.000	16.421.877.937.000
6	FR0035	15-Jun-22	11.023.750.000.000	12,90000%	(15.878.337.000)	11.007.871.663.000
7	FR0036	15-Sep-19	9.899.500.000.000	11,50000%	3.431.820.000	9.902.931.820.000
8	FR0037	15-Sep-26	2.450.000.000.000	12,00000%	(92.277.695.000)	2.357.722.305.000
9	FR0038	15-Agust-18	2.560.862.000.000	11,60000%	(8.288.049.000)	2.552.573.951.000
10	FR0039	15-Agust-23	4.175.000.000.000	11,75000%	(30.696.765.000)	4.144.303.235.000
11	FR0040	15-Sep-25	26.002.090.000.000	11,00000%	954.009.260.000	26.956.099.260.000
12	FR0042	15-Jul-27	14.774.100.000.000	10,25000%	(87.192.645.000)	14.686.907.355.000
13	FR0043	15-Jul-22	14.417.000.000.000	10,25000%	(73.030.165.000)	14.343.969.835.000
14	FR0044	15-Sep-24	18.014.000.000.000	10,00000%	(1.030.571.635.000)	16.983.428.365.000
15	FR0045	15-Mei-37	6.400.000.000.000	9,75000%	(21.452.197.000)	6.378.547.803.000
16	FR0046	15-Jul-23	16.855.000.000.000	9,50000%	(1.501.228.939.000)	15.353.771.061.000
17	FR0047	15-Feb-28	20.385.000.000.000	10,00000%	(1.180.368.029.000)	19.204.631.971.000
18	FR0048	15-Sep-18	5.237.570.000.000	9,00000%	(142.443.461.000)	5.095.126.539.000
19	FR0050	15-Jul-38	15.661.000.000.000	10,50000%	(394.666.246.000)	15.266.333.754.000
20	FR0052	15-Agust-30	23.500.000.000.000	10,50000%	(249.699.298.000)	23.250.300.702.000
21	FR0053	15-Jul-21	19.083.793.000.000	8,25000%	460.946.002.000	19.544.739.002.000
22	FR0054	15-Jul-31	27.096.000.000.000	9,50000%	14.467.731.000	27.110.467.731.000
23	FR0055	15-Sep-16	13.984.300.000.000	7,37500%	(11.320.465.000)	13.972.979.535.000
24	FR0056	15-Sep-26	17.164.000.000.000	8,37500%	(293.663.834.000)	16.870.336.166.000
25	FR0057	15-Mei-41	13.550.000.000.000	9,50000%	545.759.637.000	14.095.759.637.000
26	FR0058	15-Jun-32	42.798.000.000.000	8,25000%	5.077.495.774.000	47.875.495.774.000
27	FR0059	15-Mei-27	26.630.000.000.000	7,00000%	865.857.612.000	27.495.857.612.000
28	FR0060	15-Apr-17	10.068.000.000.000	6,25000%	153.634.602.000	10.221.634.602.000
29	FR0061	15-Mei-22	29.700.000.000.000	7,00000%	1.399.064.097.000	31.099.064.097.000
30	FR0062	15-Apr-42	12.000.000.000.000	6,37500%	(20.283.153.000)	11.979.716.847.000
31	FR0063	15-Mei-23	33.516.000.000.000	5,62500%	(825.125.300.000)	32.690.874.700.000
32	FR0064	15-Mei-28	29.895.000.000.000	6,12500%	(407.500.797.000)	29.487.499.203.000
33	FR0065	15-Mei-33	47.850.000.000.000	6,62500%	154.190.298.000	48.004.190.298.000
34	FR0066	15-Mei-18	18.709.000.000.000	5,25000%	55.988.358.000	18.764.988.358.000
35	FR0067	15-Feb-44	11.250.000.000.000	8,75000%	(200.697.225.000)	11.049.302.775.000
36	FR0068	15-Mar-34	65.594.000.000.000	8,37500%	(2.606.013.058.000)	62.987.986.942.000
37	FR0069	15-Apr-19	48.496.000.000.000	7,87500%	176.259.267.000	48.672.259.267.000
38	FR0070	15-Mar-24	89.532.000.000.000	8,37500%	488.462.206.000	90.020.462.206.000
39	FR0071	15-Mar-29	67.492.000.000.000	9,00000%	1.635.362.817.000	69.127.362.817.000
ORI			**41.421.165.000.000**		**-**	**41.421.165.000.000**
1	ORI010	15-Okt-16	20.205.255.000.000	8,50000%	-	20.205.255.000.000
2	ORI011	15-Okt-17	21.215.910.000.000	8,50000%	-	21.215.910.000.000

www.peraturan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 36.A

Surat Berharga Negara Jangka Panjang Rupiah
Per 31 Desember 2014

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate (%)	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	BookValue
VARIABLE RATE BOND			**96.743.372.000.000**		**-**	**96.743.372.000.000**
1	VR0022	25/03/2016	9.016.749.000.000	14,11000%	-	9.016.749.000.000
2	VR0023	25/10/2016	8.652.056.000.000	13,12000%	-	8.652.056.000.000
3	VR0024	25/02/2017	9.909.300.000.000	14,93000%	-	9.909.300.000.000
4	VR0025	25/09/2017	3.209.300.000.000	14,11000%	-	3.209.300.000.000
5	VR0026	25/01/2018	5.442.142.000.000	13,12000%	-	5.442.142.000.000
6	VR0027	25/07/2018	5.442.142.000.000	13,12000%	-	5.442.142.000.000
7	VR0028	25/08/2018	7.033.994.000.000	14,93000%	-	7.033.994.000.000
8	VR0029	25/08/2019	12.212.320.000.000	14,93000%	-	12.212.320.000.000
9	VR0030	25/12/2019	10.503.015.000.000	14,11000%	-	10.503.015.000.000
10	VR0031	25/07/2020	25.322.354.000.000	13,12000%	-	25.322.354.000.000
SBR			**2.390.885.000.000**		**-**	**2.390.885.000.000**
1	SBR001	20/05/2016	2.390.885.000.000	8,75000%	-	2.390.885.000.000
SURAT UTANG PEMERINTAH			**222.642.224.733.159**		**-**	**222.642.224.733.159**
1	SU002	01/04/2025	15.501.145.041.527	0,10000%	-	15.501.145.041.527
2	SU004	01/12/2025	42.411.260.774.443	0,10000%	-	42.411.260.774.443
3	SU007	01/08/2025	40.532.843.606.101	0,10000%	-	40.532.843.606.101
4	SRBI01	01/08/2043	124.196.975.311.088	0,10000%	-	124.196.975.311.088
Total SUN Jangka Panjang (a)			**1.237.785.247.733.160**	**-**	**2.736.764.734.000**	**1.240.522.012.467.160**
B. SBSN JANGKA PANJANG						
SBSN			**113.205.220.000.000**		**(2.567.889.999.000)**	**110.637.330.001.000**
1	IFR002	15/08/2018	1.985.000.000.000	11,95000%	-	1.985.000.000.000
2	IFR005	15/01/2017	1.171.000.000.000	9,00000%	15.274.132.000	1.186.274.132.000
3	IFR006	15/03/2030	2.175.000.000.000	10,25000%	12.503.016.000	2.187.503.016.000
4	IFR007	15/01/2025	1.547.000.000.000	10,25000%	3.376.331.000	1.550.376.331.000
5	IFR008	15/03/2020	252.000.000.000	8,80000%	(170.390.000)	251.829.610.000
6	IFR010	15/02/2036	4.110.000.000.000	10,00000%	310.369.735.000	4.420.369.735.000
9	PBS001	15/02/2018	6.725.000.000.000	4,45000%	(204.348.972.000)	6.520.651.028.000
10	PBS002	15/01/2022	1.218.000.000.000	5,45000%	(29.591.364.000)	1.188.408.636.000
11	PBS003	15/01/2027	3.786.000.000.000	6,00000%	(255.278.008.000)	3.530.721.992.000
12	PBS004	15/02/2037	10.149.000.000.000	6,10000%	(564.146.854.000)	9.584.853.146.000
13	PBS005	15/04/2043	9.934.000.000.000	6,75000%	(1.846.127.681.000)	8.087.872.319.000
14	PBS006	15/09/2020	2.664.000.000.000	8,25000%	122.280.000	2.664.122.280.000
15	PBS007	15/09/2040	1.000.000.000.000	9,00000%	(9.872.224.000)	990.127.776.000
16	SR-005	27/02/2016	14.968.875.000.000	6,00000%	-	14.968.875.000.000
17	SR-006	05/03/2016	19.323.345.000.000	8,75000%	-	19.323.345.000.000
18	SDHI2016A	27/04/2016	1.000.000.000.000	5,03000%	-	1.000.000.000.000
19	SDHI2017A	21/03/2017	2.000.000.000.000	5,16000%	-	2.000.000.000.000
20	SDHI2018A	30/05/2018	2.500.000.000.000	6,06000%	-	2.500.000.000.000
21	SDHI2019A	21/03/2019	3.000.000.000.000	5,46000%	-	3.000.000.000.000
22	SDHI2019B	11/02/2019	2.000.000.000.000	8,05000%	-	2.000.000.000.000

www.peraturan.go.id

Surat Berharga Negara Jangka Panjang Rupiah
Per 31 Desember 2014

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate (%)	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	BookValue
23	SDHI2020A	27/04/2020	1.500.000.000.000	5,79000%	-	1.500.000.000.000
24	SDHI2020B	28/06/2020	1.000.000.000.000	6,20000%	-	1.000.000.000.000
25	SDHI2020C	03/01/2020	3.000.000.000.000	8,30000%	-	3.000.000.000.000
26	SDHI2021A	11/04/2021	2.000.000.000.000	8,00000%	-	2.000.000.000.000
27	SDHI2021B	17/10/2021	3.000.000.000.000	7,16000%	-	3.000.000.000.000
28	SDHI2022A	21/03/2022	3.342.000.000.000	5,91000%	-	3.342.000.000.000
29	SDHI2022B	11/02/2022	2.000.000.000.000	8,75000%	-	2.000.000.000.000
30	SDHI2024A	11/02/2024	2.000.000.000.000	9,04000%	-	2.000.000.000.000
31	SDHI2029A	25/03/2029	1.000.000.000.000	8,43000%	-	1.000.000.000.000
32	SDHI2029B	13/09/2029	2.855.000.000.000	8,63000%	-	2.855.000.000.000
Total SBSN Jangka Panjang (b)			**113.205.220.000.000**		**(2.567.889.999.000)**	**110.637.330.001.000**
TOTAL SBN Jangka Panjang (a+b)			**1.350.990.467.733.160**		**168.874.735.000**	**1.351.159.342.468.160**

www.peraturan.go.id

Surat Berharga Negara Jangka Panjang Valas
Per 31 Desember 2014

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Issued Principle Outstanding		Rate (%)	Accrued	Indexed Principle Outstanding	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	BookValue
			Valas	Rupiah					
VALAS (EUR)			€ 1.000.000.000	Rp15.759.767.246.866		Rp626.497.246.866	Rp15.133.270.000.000	(Rp93.340.056.000)	Rp15.039.929.944.000
1	RIEUR0721	8-Jul-21	€ 1.000.000.000	Rp15.759.767.246.866	7,50000%	Rp626.497.246.866	Rp15.133.270.000.000	(93.340.056.000)	15.039.929.944.000
VALAS (USD)			$ 28.190.000.000	Rp281.008.841.326.746		(Rp69.674.758.673.254)	Rp350.683.600.000.000	-Rp1.197.031.363.000	Rp349.486.568.637.000
1	RI0016	15-Jan-16	$900.000.000	Rp9.099.000.000.000	7,50000%	-Rp2.097.000.000.000	Rp11.196.000.000.000	(7.061.676.000)	11.188.938.324.000
2	RI0017	9-Mar-17	$1.000.000.000	Rp9.370.000.000.000	6,87500%	-Rp3.070.000.000.000	Rp12.440.000.000.000	(16.382.894.000)	12.423.617.106.000
3	RI0018	17-Jan-18	$1.900.000.000	Rp17.804.549.364.750	6,87500%	-Rp5.831.450.635.250	Rp23.636.000.000.000	(88.054.484.000)	23.547.945.516.000
4	RI 190304	4-Mar-19	$2.000.000.000	Rp24.050.000.000.000	11,62500%	-Rp830.000.000.000	Rp24.880.000.000.000	(72.662.083.000)	24.807.337.917.000
5	RI0035	12-Oct-35	$1.600.000.000	Rp15.436.000.000.000	8,50000%	-Rp4.468.000.000.000	Rp19.904.000.000.000	790.381.729.000	20.694.381.729.000
6	RI0037	17-Feb-37	$1.500.000.000	Rp13.575.648.587.500	6,62500%	-Rp5.084.351.412.500	Rp18.660.000.000.000	(160.632.716.000)	18.499.367.284.000
7	RI0038	17-Jan-38	$2.000.000.000	Rp18.729.115.845.000	7,75000%	-Rp6.150.884.155.000	Rp24.880.000.000.000	(323.175.899.000)	24.556.824.101.000
8	RI124	15-Jan-24	$2.000.000.000	Rp24.233.465.720.443	5,87500%	-Rp646.534.279.557	Rp24.880.000.000.000	(122.080.745.000)	24.757.919.255.000
9	RI0142	17-Jan-42	$2.250.000.000	Rp20.626.661.099.520	5,25000%	-Rp7.363.338.900.480	Rp27.990.000.000.000	(75.176.848.000)	27.914.823.152.000
10	RI0144	15-Jan-44	$2.000.000.000	Rp24.232.900.739.557	6,75000%	-Rp647.099.260.443	Rp24.880.000.000.000	(296.021.786.000)	24.583.978.214.000
11	RI0320	13-Mar-20	$2.000.000.000	Rp18.550.000.000.000	5,87500%	-Rp6.330.000.000.000	Rp24.880.000.000.000	(90.870.173.000)	24.789.129.827.000
12	RI0422	25-Apr-22	$2.000.000.000	Rp18.380.000.000.000	3,75000%	-Rp6.500.000.000.000	Rp24.880.000.000.000	(110.858.090.000)	24.769.141.910.000
13	RI0423	15-Apr-23	$1.500.000.000	Rp14.584.181.704.913	3,37500%	-Rp4.075.818.295.087	Rp18.660.000.000.000	(126.397.599.000)	18.533.602.401.000
14	RI0443	15-Apr-43	$1.500.000.000	Rp14.584.181.704.913	4,62500%	-Rp4.075.818.295.087	Rp18.660.000.000.000	(273.035.806.000)	18.386.964.194.000
15	RI0521	5-May-21	$2.500.000.000	Rp21.441.986.560.150	4,87500%	-Rp9.658.013.439.850	Rp31.100.000.000.000	(237.158.492.000)	30.862.841.508.000
16	RI1023	17-Oct-23	$1.000.000.000	Rp10.059.000.000.000	5,37500%	-Rp2.381.000.000.000	Rp12.440.000.000.000	(52.455.460.000)	12.387.544.540.000
17	USDFR	15-May-17	$540.000.000	Rp6.252.150.000.000	3,50000%	-Rp465.450.000.000	Rp6.717.600.000.000	64.611.659.000	6.782.211.659.000
VALAS (JPY)			JPY 155.000.000.000	Rp17.198.408.000.000		Rp1.039.658.000.000	16.158.750.000.000	Rp0	16.158.750.000.000
1	RIJPY0719	29-Jul-19	JPY 35.000.000.000	3.695.300.000.000	2,73000%	Rp46.550.000.000	Rp3.648.750.000.000	-	3.648.750.000.000
2	RIJPY1120	12-Nov-20	JPY 60.000.000.000	6.490.800.000.000	1,60000%	Rp235.800.000.000	Rp6.255.000.000.000	-	6.255.000.000.000
3	RIJPY1122	22-Nov-22	JPY 60.000.000.000	7.012.308.000.000	1,13000%	Rp757.308.000.000	Rp6.255.000.000.000	-	6.255.000.000.000

lah SUN Valas				Rp313.967.016.573.612		(Rp68.008.603.426.388)	Rp381.975.620.000.000	-1.290.371.419.000	Rp380.685.248.581.000
N VALAS (USD)			Rp5.500.000.000	Rp53.658.382.142.000		-Rp8.541.617.858.000	Rp62.200.000.000.000	Rp0	Rp62.200.000.000.000
1	SNI18	21-Nov-18	$1.500.000.000	Rp9.035.050.295.000	4,00000%	-Rp3.404.949.705.000	Rp12.440.000.000.000	-	12.440.000.000.000
2	SNI19	15-Mar-19	$1.000.000.000	Rp17.237.922.715.000	6,12500%	-Rp1.422.077.285.000	Rp18.660.000.000.000	-	18.660.000.000.000
3	SNI22	21-Nov-22	$1.500.000.000	Rp9.639.006.152.000	3,30000%	-Rp2.800.993.848.000	Rp12.440.000.000.000	-	12.440.000.000.000
4	SNI24	10-Oct-24	$1.500.000.000	Rp17.746.402.980.000	4,35000%	-Rp813.597.020.000	Rp18.660.000.000.000	-	18.660.000.000.000
lah SBSN Valas				53.658.382.142.000		(8.541.617.858.000)	Rp62.200.000.000.000	-	62.200.000.000.000
TOTAL			-	367.625.398.715.612		(76.550.221.284.388)	444.175.620.000.000	(1.290.371.419.000)	442.885.248.581.000

* Kurs Tengah BI JPY pada tanggal pelaporan (31 Desember 2014) adalal Rp104,25
* Kurs Tengah BI USD pada tanggal pelaporan (31 Desember 2014) adalal Rp12.440
* Kurs Tengah BI EUR pada tanggal pelaporan (31 Desember 2014) adalal Rp15.133,27

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN 37

Ikhtisar Laporan Keuangan BLU

31 Desember 2014

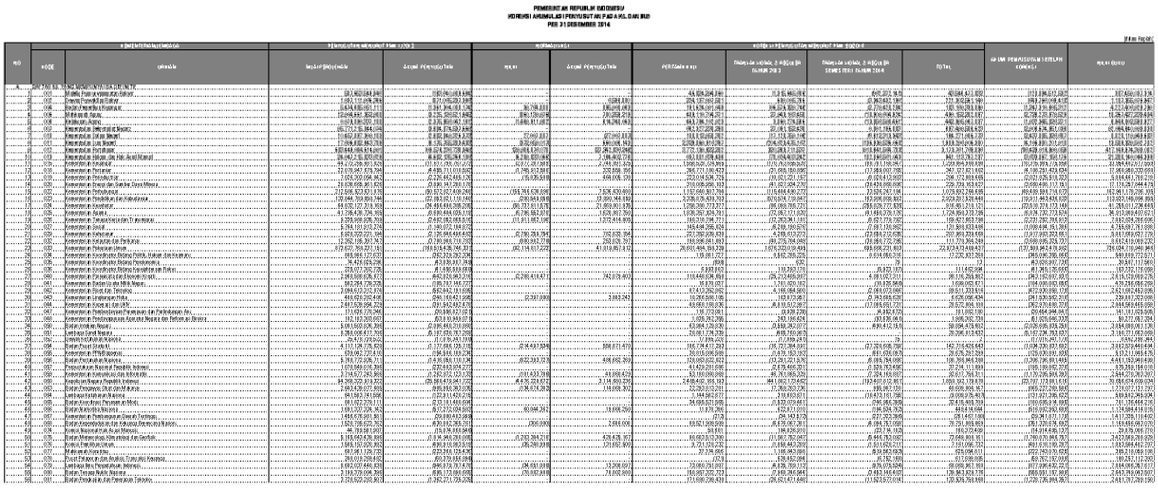

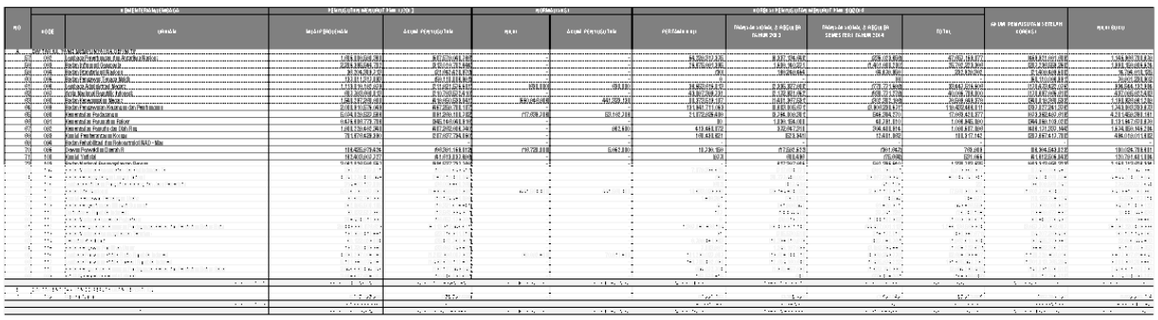

LAMPIRAN 38
Kebijakan Koreksi Atas Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2014

www.peraturan.go.id

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2014

No	JENIS LAYANAN	KEMENTERIAN/LEMBAGA/SATKER BLU	ASET						KEWAJIBAN			EKUITAS	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
			Aset Lancar	Investasi Jangka Panjang	Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Aset Tetap	Aset Lainnya	JUMLAH ASET	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	JUMLAH KEWAJIBAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6-7)	(9)	(10=4+5+8+9)	(11)	(12)	(13=11+12)	(14)	(15=13+14)
1														
		KEMENTERIAN KESEHATAN (024)	**3.999.079.277.094**	-	**28.527.702.819.290**	**7.129.171.029.339**	**19.402.531.779.951**	**178.249.318.815**	**23.479.860.373.960**	**912.398.780.980**	**889.911.051**	**913.288.692.031**	**22.566.604.094.030**	**23.479.860.373.960**
	1	RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta	420.151.888.595	-	2.752.720.440.064	758.515.624.239	1.994.214.815.825	1.306.952.321	2.415.673.656.731	217.388.237.522	-	217.388.237.522	2.198.285.419.209	2.415.673.656.731
	2	RSUP Fatmawati, Jakarta	167.592.170.117	-	1.946.720.784.159	215.676.083.940	1.631.045.700.219	7.129.898.188	1.805.767.768.525	57.097.641.213	-	57.097.641.213	1.748.670.127.292	1.805.767.768.505
	3	RSUP Persahabatan, Jakarta	155.952.016.641	-	1.076.473.621.863	159.428.794.635	916.052.827.047	0	1.074.004.853.688	71.469.819.287	-	71.469.819.287	1.002.535.034.401	1.074.004.853.688
	4	RSUP H Adam Malik, Medan	278.751.362.671	-	1.285.668.204.014	511.076.227.958	774.589.976.056	75.087.892.552	1.128.429.141.279	62.784.132.276	889.911.051	63.694.043.327	1.064.735.097.952	1.128.429.141.279
	5	RSUP Dr. Hasan Sadikin, Bandung	201.902.979.919	-	1.245.617.586.054	397.142.581.403	848.475.004.651	190.094.000	1.050.567.998.570	30.933.709.549	-	30.933.709.549	1.019.634.188.021	1.050.567.898.570
	6	RSUP Dr. Kariadi, Semarang	373.188.545.697	-	1.573.804.180.920	394.186.624.437	1.179.417.556.483	146.315.140	1.552.754.027.318	4.710.540.575	-	4.710.540.575	1.548.043.486.743	1.552.754.027.318
	7	RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta	244.656.192.411	-	907.139.374.975	454.836.702.175	452.332.672.202	3.587.483.646	700.815.348.261	32.277.945.631	-	32.277.945.631	668.537.402.630	700.815.348.261
	8	RSUP Sanglah, Denpasar	101.297.219.690	-	624.226.139.220	239.296.282.745	327.391.822.685	1.814.940.168	429.096.931.191	80.388.020.249	-	80.388.020.249	362.869.941.552	429.096.961.191
	9	RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar	213.612.829.198	-	770.136.468.467	292.877.725.894	477.258.740.572	46.288.585.355	737.160.155.125	56.505.796.320	-	56.505.796.320	680.654.358.806	737.160.155.126
	10	RSUP Dr. M.Djamil, Padang	83.795.268.225	-	746.171.041.972	298.615.480.875	447.555.561.097	4.453.869.228	535.804.798.551	63.393.882.970	-	63.393.882.970	472.410.915.581	535.804.798.551
	11	RSUP Dr. Mohammad Hoesin, Palembang	96.935.228.972	-	1.265.249.089.882	294.308.992.398	970.940.097.526	50.262.678	1.067.965.599.168	48.960.154.052	-	48.960.154.052	1.018.965.445.116	1.067.965.599.168
	12	RSUP Prof.Dr.R.D. Kandou, Manado	82.596.318.392	-	799.731.118.368	179.700.549.600	617.030.568.768	1.126.453.186	700.751.340.316	73.806.040.819	-	73.806.040.819	626.945.298.497	700.751.340.316
	13	RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro, Klaten	147.336.332.025	-	323.888.870.778	135.754.470.671	187.934.400.107	311.293.694	335.582.025.796	1.342.558.672	-	1.342.558.672	334.239.467.064	335.582.025.736
	14	RSUD Haryoto Kota	83.529.039.021	-	1.369.905.006.802	217.126.556.203	1.172.868.450.601	3.220.070.503	1.259.617.560.122	22.527.329.681	-	22.527.329.681	1.237.390.230.461	1.259.917.560.122
	15	RSJPD Harapan Kita	253.617.311.615	-	970.243.702.708	580.104.097.284	12.260.286.618	845.961.675.518	18.649.883.714	-	18.649.883.714	827.311.791.804	845.961.675.518	
	16	RS Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga	21.280.368.786	-	148.714.637.359	51.317.413.041	97.397.224.318	1.541.294.787	120.198.887.891	62.235.787	-	62.235.787	120.136.652.104	120.198.887.891
	17	RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu	26.391.995.362	-	255.059.164.809	39.979.075.993	215.089.088.915	29.086.487	243.509.182.764	869.003.788	-	869.003.788	242.640.179.056	243.509.182.764
	18	RS Paru Dr.M.Goenawan P. Cisarua	27.951.587.185	-	122.678.379.683	49.980.181.823	72.718.198.052	340.275.856	101.010.061.093	299.749.532	-	299.749.532	100.710.311.561	101.010.061.093
	19	RSJ DR Radjiman Wr. Lawang	46.332.663.815	-	215.762.357.016	95.377.473.436	120.404.883.517	129.521.104	166.866.068.236	898.028.237	-	898.028.237	165.968.039.999	166.866.068.236
	20	RSJ Dr. Soeharto Heerdjan	40.496.659.272	-	405.860.003.449	43.178.597.580	362.713.365.855	753.800.500	403.963.825.627	10.376.852	-	10.376.852	403.953.448.775	403.963.825.627
	21	RSJ Prof.Dr.Soerojo Magelang	44.114.740.958	-	703.280.777.748	55.086.076.315	648.214.689.433	622.985.584	692.952.425.955	167.330.963	-	167.330.963	692.785.095.112	692.952.425.955
	22	RS Kusta Dr.Tadjuddin Chalid Makassar	3.808.554.003	-	149.976.113.189	41.225.800.587	108.750.512.602	377.648.000	113.066.715.605	833.247.088	-	833.247.088	112.233.468.507	113.066.715.605
	23	RSPI Prof. Dr. Sulianto Saroso	26.329.624.453	-	238.946.277.636	122.690.000.017	116.456.277.619	428.723.296	142.214.625.368	1.916.288.273	-	1.916.288.273	140.298.356.883	142.214.625.156
	24	RS Mata Cicendo Bandung	93.341.104.750	-	261.839.590.794	106.196.175.833	155.645.415.701	0	248.986.520.451	3.489.413.321	-	3.489.413.321	245.487.107.130	248.986.520.451
	25	RS Stroke Nasional Bukittinggi	21.342.883.188	-	165.362.697.021	59.879.120.196	105.484.565.837	1.030.557.041	128.857.997.064	1.850.765.923	-	1.850.765.923	127.007.231.121	128.857.997.044
	26	RS Kusta Dr. Sitanala	31.429.434.942	-	451.594.387.786	51.605.513.932	399.988.883.864	213.122.889	431.631.441.575	57.056.961	-	57.056.961	431.574.384.614	431.631.441.575
	27	RS Ortopedi Prof. Dr. R.Soeharso	133.787.737.383	-	431.807.957.869	131.700.833.836	301.169.936.365	470.881.791.888	777.890.467	-	777.890.467	470.103.901.398	470.881.791.865	
	28	RS Kusta Dr. Sitanala	156.585.802.588	-	1.243.697.185.435	273.526.519.908	970.170.665.527	28.600.024	1.126.785.068.115	44.295.199.915	-	44.295.199.915	1.082.503.868.200	1.126.785.068.115
	29	RS Kusta Raw Abdullah Palembang	18.640.556.542	-	64.435.243.540	24.347.432.005	40.087.811.543	3.450.000	58.731.818.085	8.637.882	-	8.637.882	58.723.180.223	58.731.818.085
	30	RS Ketergantungan Obat Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31	RS Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi, Bogor	53.543.875.782	-	540.586.263.777	69.895.002.204	470.691.261.573	149.292.093	524.384.429.428	393.331.962	-	393.331.962	523.991.097.466	524.384.429.428
	32	Poltekkes Kesehatan Makassar	24.519.780.886	-	273.276.344.802	79.746.724.898	193.529.619.904	706.537.000	218.755.937.790	2.002.217.826	-	2.002.217.826	216.744.719.964	218.746.937.790
	33	Poltekkes Kesehatan Tanjung Karang	17.648.778.939	-	105.942.593.565	35.114.057.708	70.828.535.847	2.134.241.745	90.611.556.531	1.581.821.533	-	1.581.821.533	89.029.934.998	90.611.756.531
	34	Poltekkes Kesehatan Bandung	22.137.660.996	-	377.287.690.178	77.321.695.985	299.965.994.213	626.398.052	322.729.653.261	2.934.789.203	-	2.934.789.203	319.795.194.058	322.729.983.261
	35	Poltekkes Kesehatan Malang	29.342.500.322	-	99.486.818.427	41.802.895.775	57.683.922.652	472.195.360	87.498.618.334	2.815.509.085	-	2.815.509.085	84.683.109.249	87.498.618.334
	36	Poltekkes Kesehatan Jakarta III	4.019.309.754	-	269.945.625.929	89.606.349.910	179.239.276.018	857.916.240	184.116.502.012	1.565.521.020	-	1.565.521.020	182.550.980.992	184.116.502.012
	37	Poltekkes Kesehatan Jakarta II	14.637.253.823	-	116.435.409.201	56.178.670.889	60.256.737.352	649.401.380	74.944.392.655	2.425.447.500	-	2.425.447.500	72.518.945.155	74.944.392.655
	38	Poltekkes Kesehatan Yogyakarta	2.151.987.732	-	162.716.642.003	50.540.903.235	112.175.738.768	1.057.468.700	115.385.135.200	1.690.405.500	-	1.690.405.500	113.694.729.700	115.385.135.200
	39	Poltekkes Kesehatan Surakarta	25.445.756.118	-	277.413.627.503	49.116.691.282	228.309.946.221	2.417.619.010	256.272.321.472	2.260.195.650	-	2.260.195.650	254.012.125.822	256.272.321.472
	40	Poltekkes Kesehatan Medan	11.322.695.994	-	134.597.121.302	49.056.989.515	85.540.131.787	1.335.204.000	98.197.942.751	1.564.782.399	-	1.564.782.399	96.633.160.352	98.197.942.751
	41	Poltekkes Kesehatan Surabaya	8.328.100.485	-	519.400.504.378	59.178.247.349	460.222.257.029	1.291.212.977	469.841.570.491	2.248.990.275	-	2.248.990.275	467.592.580.216	469.841.570.491
	42	Poltekkes Kesehatan Bengkulu	13.619.594.187	-	121.160.053.717	38.409.758.896	82.750.294.723	818.155.525	97.188.094.435	1.031.058.202	-	1.031.058.202	96.157.035.233	97.188.094.435

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2014

No	JENIS LAYANAN	KEMENTERIAN/LEMBAGA/SATKER BLU	ASET						KEWAJIBAN			EKUITAS	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
			Aset Lancar	Investasi Jangka Panjang	Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Aset Tetap	Aset Lainnya	JUMLAH ASET	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	JUMLAH KEWAJIBAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6-7)	(9)	(10=4+5+8+9)	(11)	(12)	(13=11+12)	(14)	(15=13+14)
	43	Poltekkes Kesehatan Semarang	27.832.948.030	-	438.024.020.144	159.952.279.317	278.071.741.827	2.398.433.408	308.303.123.265	3.416.402.563	-	3.416.402.563	304.886.720.702	308.303.123.265
	44	Poltekkes Kesehatan Pontianak	10.598.829.128	-	109.953.046.853	24.011.801.569	85.981.245.284	482.413.500	97.062.487.912	2.069.244.252	-	2.069.244.252	96.993.243.660	97.062.487.912
	45	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang	2.391.434.372	-	28.859.280.189	14.280.533.906	14.568.756.283	-	16.960.190.655	-	-	-	16.960.190.655	16.960.190.655
	46	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta	1.952.701.907	-	37.894.214.686	15.922.445.356	21.971.769.330	786.946.300	23.711.117.537	55.348.116	-	55.348.116	23.655.769.421	23.711.117.537
	47	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar	3.358.447.110	-	39.941.818.630	15.101.668.294	24.840.152.366	-	28.198.599.476	365.694.493	-	365.694.493	27.832.904.983	28.198.599.476
	48	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya	6.205.703.923	-	34.000.745.694	19.381.101.436	14.619.644.560	187.969.806	21.082.468.389	1.328.400	-	1.328.400	21.081.140.989	21.082.468.389
	49	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta	5.961.560.325	-	85.393.171.273	14.168.786.516	71.224.372.757	3.031.976	56.189.865.056	216.294.525	-	216.294.525	57.973.600.533	56.189.895.058
	50	Balai Besar Kesehatan Mata Masy Makassar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung	6.300.619.468	-	57.883.557.932	11.948.352.155	45.935.205.777	472.908.336	52.708.733.581	180.930.257	-	180.930.257	52.527.803.324	52.708.733.581
	52	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar	2.274.872.214	-	60.211.934.708	13.897.707.526	54.314.227.182	562.299.397	59.251.077.979	91.078.486	-	91.078.486	59.242.799.593	59.251.877.979
		KEMENTERIAN KEUANGAN (019)	**94.339.889.901**	-	**799.139.991.991**	**89.040.838.148**	**730.097.753.909**	**3.837.832.332**	**788.072.476.338**	**1.909.440.866**	-	**1.909.440.866**	**786.597.014.470**	**788.072.455.336**
	1	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta	94.339.889.901	-	795.139.991.991	89.040.838.148	730.097.753.909	3.837.832.332	788.072.476.338	1.909.440.866	-	1.909.440.866	786.597.014.470	788.072.455.336
		KEMENTERIAN PERTANIAN (019)	**61.309.533.084**	**706.118.099.983**	**70.843.032.870**	**893.979.098.293**	**977.890.837**	**759.481.990.014**	**890.089.207**	-	**890.089.207**	**759.481.990.014**		
	1	Pusat Veterinaria Farma Surabaya	1.803.928.727.700	-	50.083.870.574	633.324.941.777	503.395.637	844.812.235.114	502.022.594	-	502.022.594	844.812.235.114		
	2	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Malang	50.326.605.394	-	20.759.276.612	60.250.124.516	74.625.096	110.985.354.900	358.662.613	-	358.662.613	110.291.292.287	110.985.354.900	
		KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (019)	**56.813.959.858**	**475.369.188.998**	**181.083.006.928**	**296.302.182.082**	**367.897.103**	**348.489.128.071**	**2.889.392.078**	-	**2.889.392.078**	**348.829.736.993**	**348.689.128.071**	
	1	Sekolah Kimia Analis (AKA), Bogor	8.059.670.889	-	70.966.228.934	23.127.992.576	47.838.236.358	150.608.799	56.048.516.044	26.315.544	-	26.315.544	56.022.201.500	56.048.516.544
	2	Balai Besar Industri Agro	13.944.360.555	-	124.903.888.554	43.123.944.514	81.959.942.040	-	101.884.302.595	1.361.268.364	-	1.361.268.364	100.443.034.231	101.804.302.595
	3	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Bandung	20.428.105.562	-	206.827.918.725	85.872.120.142	120.955.798.583	195.703.385	141.579.606.530	897.600.923	-	897.600.923	140.682.007.607	141.579.608.530
	4	Balai Riset dan Standardisasi Bandar Lampung	1.227.486.327	-	23.909.305.981	11.700.972.719	12.208.233.262	825.000	13.436.344.639	395.135.726	-	395.135.726	13.039.208.901	13.434.344.639
	5	Balai Besar Tekstil Pengolahan dan Pemasaran Industri Semarang	5.154.336.474	-	48.577.945.764	17.235.875.475	31.441.970.289	36.050.000	36.632.356.763	189.071.509	-	189.071.509	36.443.285.254	36.632.356.763
		KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL (023)	**9.818.913.011.843**	**181.727.797.083**	**72.087.241.866.031**	**11.738.202.209.098**	**60.352.039.811.779**	**1.114.287.899.309**	**71.948.949.079.990**	**1.929.190.337.802**	**128.893.226.111**	**1.858.043.962.913**	**69.888.801.917.077**	**71.946.845.879.990**
	1	Universitas Diponegoro Semarang	463.598.218.597	-	2.283.371.185.660	514.679.805.422	2.466.441.287.246	2.638.181.960	2.912.585.687.803	130.520.143.559	-	130.520.143.559	2.782.065.544.052	2.912.585.687.811
	2	Universitas Padjadjaran Bandung	250.926.760.497	-	2.770.110.485.359	432.893.067.187	2.337.217.428.172	5.898.373.965	2.594.073.596.634	65.506.744.610	-	65.506.744.610	2.528.566.852.024	2.594.073.596.634
	3	Universitas Negeri Malang	303.806.685.842	-	997.374.557.860	234.536.339.918	762.840.217.723	631.196.648	1.067.278.101.213	92.096.991.738	-	92.096.991.738	975.183.109.473	1.067.278.101.213
	4	Universitas Hasanuddin, Makassar	144.343.167.891	-	3.791.795.485.463	359.545.312.670	3.432.649.482.793	48.149.284.243	3.625.141.934.927	54.561.899.837	4.482.769.488	59.044.669.327	3.617.417.294.590	3.676.561.944.907
	5	Universitas Brawijaya Malang	100.675.624.621	-	4.194.200.294.126	426.786.176.946	3.767.414.117.179	6.957.671.655	3.875.047.613.454	49.278.493.574	-	49.278.493.574	3.825.769.129.880	3.875.047.613.454
	6	Universitas Negeri Semarang	138.826.928.770	-	1.293.032.661.444	170.684.304.446	1.122.368.356.998	3.192.103.414	1.264.387.388.182	567.614.487	-	567.614.487	1.263.819.773.695	1.264.387.388.182
	7	Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya	119.689.987.699	-	7.688.367.699.985	984.648.777.761	6.703.707.908.744	7.034.585.614	7.915.132.979.042	71.170.769.418	-	71.170.769.418	7.843.962.209.624	7.915.132.979.042
	8	Universitas Negeri Surabaya	179.700.207.537	-	2.236.464.130.465	279.481.734.113	1.957.002.396.352	4.906.184.581	2.141.608.788.470	19.365.155.480	-	19.365.155.480	2.122.243.632.990	2.141.608.788.470
	9	Universitas Malawarman Samarinda	110.653.054.746	-	955.770.541.591	240.274.237.036	715.496.304.555	34.366.677.339	860.516.036.640	32.770.052.698	-	32.770.052.698	827.745.983.942	860.516.036.640
	10	Universitas Sebelas Maret Surakarta	137.179.513.990	-	2.769.940.915.023	319.632.273.626	2.469.308.641.397	1.312.800.703	2.597.760.956.087	32.444.813.942	-	32.444.813.942	2.565.316.242.145	2.597.760.956.087
	11	Universitas Lampung	95.520.410.898	-	959.086.648.720	230.986.380.885	728.100.658.637	1.848.943.650	825.480.013.186	12.771.341.110	-	12.771.341.110	812.708.672.076	825.480.013.186
	12	Universitas Negeri Yogyakarta	88.514.021.294	-	2.140.015.354.205	172.165.532.889	1.967.849.821.316	1.053.561.200	2.056.417.423.800	52.498.053.756	-	52.498.053.756	2.005.719.370.044	2.058.217.423.800
	13	Universitas Negeri Gorontalo	4.940.189.969	-	723.617.834.109	168.975.743.150	554.082.089.856	18.855.037.200	577.857.317.025	1.568.170.176	-	1.568.170.176	575.489.147.729	577.057.317.905
	14	Universitas Indonesia	2.035.200.389.895	9.992.057.916	8.013.116.108.446	878.240.609.150	7.134.875.499.296	4041220112A	9.220.483.148.233	125.477.540.635	69.958.655.139	195.436.195.767	9.025.046.952.466	9.220.483.148.233
	15	Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	1.266.632.655.394	70.973.627.721	7.992.526.052.639	867.948.106.773	7.125.479.945.865	12.099.093.144	8.474.984.309.914	104.423.765.806	-	104.423.765.806	8.370.160.543.108	8.474.984.309.914
	16	Universitas Sumatera Utara	572.221.482.615	-	3.254.983.250.404	388.790.105.343	2.866.193.145.061	1.748.622.159	3.442.169.449.835	53.676.341.467	-	53.676.341.467	3.388.494.108.368	3.442.169.449.835
	17	Universitas Airlangga Surabaya	278.262.010.360	10.820.989.218	1.498.495.216.388	301.810.705.293	1.196.684.511.096	230.500.000.000	1.704.267.520.674	58.235.343.688	-	58.235.343.688	1.646.032.176.986	1.704.267.520.674
	18	Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	107.563.966.508	0	2.052.610.494.605	234.436.947.881	1.818.173.506.801	7.192.965.293	1.952.929.440.671	26.729.982.134	-	26.729.982.134	1.926.199.458.407	1.952.929.440.671
	19	Universitas Halu Oleo Kendari	21.762.842.815	-	1.121.747.491.570	253.511.280.160	868.236.201.410	270.873.385	892.784.017.620	1.889.494.899	-	1.889.494.899	890.894.522.721	892.784.017.620
	20	Universitas Riau	34.728.047.673	0	1.026.942.726.301	195.812.041.640	830.230.893.661	1.394.445.900	866.353.187.234	30.504.588.072	-	30.504.588.072	835.839.599.162	866.353.187.234
	21	Universitas Terbuka	1.491.260.880.561	0	1.363.172.617.726	413.288.425.684	949.883.191.241	6.085.489.213	2.447.229.371.014	22.838.519.153	-	22.838.519.153	2.424.390.851.861	2.447.229.371.014
	22	Universitas Udayana Denpasar	75.582.481.573	0	2.426.257.563.483	347.282.070.992	2.080.995.492.561	7.663.091.592	2.164.241.065.693	14.678.171.819	-	14.678.171.819	2.149.562.893.874	2.164.241.065.693

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2014

No	JENIS LAYANAN	KEMENTERIAN/LEMBAGA/SATKER BLU	ASET						KEWAJIBAN			EKUITAS	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
			Aset Lancar	Investasi Jangka Panjang	Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Aset Tetap	Aset Lainnya	JUMLAH ASET	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	JUMLAH KEWAJIBAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6-7)	(9)	(10=4+5+8+9)	(11)	(12)	(13=11+12)	(14)	(15=13+14)
	23	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	10.530.980.794	-	224.205.854.969	72.686.429.370	151.519.425.479	1.303.419.781	163.353.826.014	164.500.000	-	164.500.000	163.189.326.014	163.353.826.014
	24	Politeknik Negeri Bandung	37.979.015.596	-	787.605.270.240	144.536.269.843	643.070.000.643	1.401.994.132	682.470.899.371	11.997.600.000	-	11.997.600.000	670.573.199.371	682.470.899.377
	25	Politeknik Negeri Sriwijaya Palu	61.689.455.033	-	1.139.963.330.403	266.635.900.188	872.327.422.269	14.910.297.800	948.127.175.042	25.710.827.666	-	25.710.827.666	922.416.347.343	948.127.175.042
	26	Universitas Mataram	99.982.592.447	-	971.308.511.210	179.017.603.908	792.290.907.302	6.931.333.016	899.184.832.765	37.891.648.536	-	37.891.648.536	881.293.184.229	899.184.832.765
	27	Institut Teknologi Bandung	792.287.740.599	62.529.298.146	1.579.394.480.023	625.012.218.139	754.382.261.884	25.907.186.573	1.635.116.427.192	168.256.240.296	15.294.541.214	183.550.781.510	1.451.571.145.682	1.635.116.427.192
	28	Institut Pertanian Bogor	326.188.375.180	-	1.353.766.283.492	989.692.017.798	365.693.465.694	44.983.729.989	736.866.569.866	103.473.782.194	29.893.745.622	133.354.509.816	603.482.061.050	736.836.569.866
	29	Universitas Bengkulu	64.882.717.563	0	298.608.507.111	0	298.608.507.111	6.860.946.094	370.352.170.768	2.696.128.193	-	2.696.128.193	367.657.042.575	370.353.170.768
	30	Universitas Sriwijaya	212.282.709.502	0,00	2.865.426.167.098	454.435.951.501	2.410.990.215.597	5.449.096.415	2.634.962.017.818	38.489.027.246,00	-	38.489.027.246,00	2.596.692.990.572	2.634.962.017.818
	31	Universitas Negeri Jakarta	116.613.944.243	-	2.201.970.416.255	237.157.380.952	1.964.813.035.303	17.881.801.185	2.099.108.680.731	58.161.061.673	-	58.161.061.673	2.040.967.619.058	2.099.108.680.731
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2014

No	JENIS LAYANAN	KEMENTERIAN/LEMBAGA/SATKER BLU	ASET							KEWAJIBAN			EKUITAS	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
			Aset Lancar	Investasi Jangka Panjang	Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Aset Tetap	Aset Lainnya	JUMLAH ASET	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	JUMLAH KEWAJIBAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6-7)	(9)	(10=4+5+8+9)	(11)	(12)	(13=11+12)	(14)	(15=13+14)
	7	RS Bhayangkara Bandung	19.997.564.733	-	70.808.938.073	28.341.495.427	42.567.442.646	-	62.565.007.379	6.816.792.307	-	6.816.792.307	55.748.215.072	62.565.007.379
	8	RS Bhayangkara Kandangan STUKPA Sukahumi	5.897.557.809	-	15.673.707.025	7.870.475.969	7.803.231.976	25.318.750	14.713.108.534	519.398.143	-	519.398.143	14.193.722.391	14.713.108.534
	9	RS Bhayangkara Tk.III. Tingkir Pelda Bali	6.955.533.471	-	24.203.746.114	8.833.631.733	15.373.114.381	-	22.328.647.852	149.158.506	-	149.158.506	22.179.489.346	22.328.647.852
	10	RS Bhayangkara Tk.IV. Purwa	10.111.389.306	-	9.892.462.620	3.965.173.915	6.245.288.605	2.970.000	16.359.043.911	756.934.922	-	756.934.922	15.602.108.989	16.359.043.911
	LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL (OD2)		**3.484.526.372**	**-**	**2.358.531.411**	**1.467.307.816**	**809.223.597**	**312.408**	**4.294.062.375**	**23.181.161**	**-**	**23.181.161**	**4.270.881.214**	**4.294.062.375**
	1	Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (PATEKGAN)	3.484.526.372	-	2.358.531.411	1.467.307.816	809.223.597	312.408	4.294.062.375	23.181.161	-	23.181.161	4.270.881.214	4.294.062.375
	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		**314.272.187.833**	**-**	**3.798.631.283.439**	**989.038.585.028**	**2.827.394.870.411**	**78.697.681.057**	**3.320.344.332.101**	**28.086.759.702**	**-**	**28.086.759.702**	**3.292.287.572.399**	**3.320.344.332.101**
	1	Balai Besar Pendidikan Pengawasan & Peningkatan Ilmu	111.692.231.382	-	198.500.662.855	57.350.418.045	139.750.644.810	9.413.857.229	260.856.783.202	8.406.898.817	-	8.406.898.817	251.849.884.385	260.856.783.202
	2	Poltekmil Pelayaran Surabaya	41.887.082.837	-	644.791.041.172	204.458.505.527	440.332.534.645	2.195.346.404	484.414.963.886	3.671.462.494	-	3.671.462.494	480.743.481.392	484.414.943.886
	3	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)	24.750.850.812	-	9.139.930.930.960	1.390.222.220.680	7.749.708.710.280	42.028.960.352	9.817.488.221.801	2.418.954.219	-	2.418.954.219	9.814.069.267.582	9.817.488.221.801
	4	Poltekmil Ilmu Pelayaran Makassar	35.693.300.537	-	551.944.678.183	75.031.196.996	476.013.482.087	17.547.389.379	529.254.171.003	10.147.221.271	-	10.147.221.271	519.106.949.732	529.254.171.003
	5	Poltekmil Ilmu Pelayaran Semarang	28.480.895.298	-	645.646.677.226	183.296.691.587	462.351.985.639	4.405.083.572	515.250.964.497	1.299.620.401	-	1.299.620.401	513.951.344.096	515.251.964.497
	6	Sekolah Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya	14.298.822.743	-	552.364.319.172	130.442.390.452	421.921.958.720	280.860.000	436.360.941.463	1.053.521.590	-	1.053.521.590	435.315.319.963	436.368.841.463
	7	Poltekmil Keselamatan Transportasi Jalan	7.945.016.055	-	226.944.765.085	48.136.176.321	178.808.588.764	1.827.811.559	188.581.436.369	139.078.000	-	139.078.000	188.962.358.369	188.181.436.369
	KEMENTERIAN ESDM		**92.503.810.878**	**-**	**2.085.410.846.823**	**620.475.427.493**	**1.464.935.219.130**	**9.560.856.499**	**1.567.997.886.508**	**-**	**-**	**-**	**1.567.997.886.508**	**1.567.997.886.508**
	1	Pusdiklat Teknologi Minyak & Gas Bumi "LEMIGAS"	92.503.810.878	-	2.085.410.846.823	620.475.427.493	1.464.935.219.130	9.560.856.499	1.567.997.886.508	-	-	-	1.567.997.886.508	1.567.997.886.508
	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT (DB1)		**597.080.799.003**	**15.131.912.033.010**	**4.632.274.000**	**2.537.065.101**	**2.095.208.899**	**44.135.732.291**	**15.770.223.793.203**	**2.883.221.730**	**-**	**2.883.221.730**	**15.767.340.571.473**	**15.770.223.793.203**
	1	Balai Pembiayaan Perumahan Jakarta	597.080.799.003	15.131.912.033.010	4.632.274.000	2.537.065.101	2.095.208.899	44.135.732.291	15.770.223.793.203	2.883.221.730	-	2.883.221.730	15.767.340.571.473	15.770.223.793.203
	TOTAL PER DEPARTEMEN													
		KEMENTERIAN KEUANGAN (015)	**56.336.869.501**	**-**	**785.139.991.851**	**85.040.838.148**	**730.097.753.505**	**3.837.832.332**	**788.072.455.338**	**1.505.440.868**	**-**	**1.505.440.868**	**788.567.014.470**	**788.072.455.338**
		KEMENTERIAN PERTANIAN (018)	**81.308.533.084**	**-**	**764.118.099.993**	**70.943.032.870**	**693.175.068.293**	**577.890.037**	**755.061.590.014**	**890.099.207**	**-**	**890.099.207**	**754.801.596.807**	**755.691.590.014**
		KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (019)	**56.813.859.858**	**-**	**479.365.186.953**	**101.083.004.878**	**298.302.182.075**	**367.897.193**	**360.489.738.977**	**2.886.762.079**	**-**	**2.886.762.079**	**357.602.976.898**	**360.489.738.977**
		KEMENTERIAN KESEHATAN (024)	**3.899.079.277.084**	**-**	**28.927.702.818.290**	**7.126.171.039.339**	**19.802.531.779.951**	**178.248.318.815**	**23.879.860.375.860**	**812.365.760.500**	**809.911.051**	**813.205.879.831**	**22.666.654.496.031**	**23.479.860.375.860**
		KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL (023)	**9.818.910.011.843**	**181.727.797.083**	**72.087.241.868.031**	**11.739.202.260.086**	**60.357.039.811.779**	**1.114.267.859.308**	**71.940.945.079.990**	**1.829.190.337.602**	**129.853.229.111**	**1.959.043.562.913**	**69.988.901.517.077**	**71.948.045.079.990**
		KEMENTERIAN AGAMA (025)	**586.223.825.361**	**1.605.698.724**	**9.732.821.636.632**	**1.525.241.877.789**	**8.207.579.864.843**	**32.231.087.146**	**8.739.250.576.087**	**93.611.979.508**	**2.299.864.834**	**93.207.793.340**	**8.695.992.795.742**	**8.739.250.576.082**
		KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (026)												
		KEMENTERIAN NEGARA RISTEK (027)	**1.943.150.084**	**-**	**16.175.897.037**	**8.342.811.602**	**5.833.039.435**	**89.217.500**	**7.865.407.021**	**381.167.713**	**-**	**381.167.713**	**7.484.239.308**	**7.865.407.021**
		KEMENTERIAN KEPERAGI DAN UKM (004)	**66.143.809.854**	**-**	**810.089.808.369**	**160.892.218.320**	**648.077.590.029**	**13.868.306.741**	**707.109.706.624**	**11.412.480.578**	**-**	**11.412.480.578**	**695.693.208.046**	**707.109.708.624**
		HEROLISTAN REPUBLIK INDONESIA (060)	**109.068.107.007**	**-**	**648.563.087.188**	**245.165.768.688**	**393.397.358.860**	**806.644.506**	**693.286.109.001**	**23.706.814.826**	**-**	**23.706.814.826**	**669.579.376**	**693.286.109.001**
		BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (061)	**30.201.404.863**	**-**	**7.109.424.324**	**3.230.732.268**	**3.878.692.056**	**-**	**34.077.181.431**	**11.840.648.829**	**-**	**11.840.648.829**	**22.237.506.602**	**34.077.181.431**
		LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL (OD2)	**3.484.526.372**	**-**	**2.358.531.411**	**1.467.307.816**	**809.223.597**	**312.408**	**4.294.062.375**	**23.181.161**	**-**	**23.181.161**	**4.270.881.214**	**4.294.062.375**
		KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	**592.080.799.003**	**15.131.912.033.010**	**4.632.274.000**	**2.537.065.101**	**2.095.208.899**	**44.135.732.291**	**15.770.223.793.203**	**2.883.221.730**	**-**	**2.883.221.730**	**15.767.340.571.473**	**15.770.223.793.203**
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENYEDIAAN BARANG DAN JASA	**15.974.388.937.227**	**15.295.108.928.787**	**117.950.813.893.298**	**22.833.669.570.118**	**95.017.344.393.178**	**1.427.488.304.018**	**127.699.329.813.220**	**2.979.834.982.477**	**132.039.000.998**	**2.707.873.983.473**	**124.991.457.828.747**	**127.699.329.813.219**
2														
		SEKRETARIAT NEGARA (007)	**973.318.522.312**	**6.637.194.500**	**74.911.249.356.947**	**929.389.648.803**	**73.981.878.708.044**	**733.741.813**	**74.962.868.566.769**	**79.521.822.486**	**-**	**79.521.822.486**	**74.783.046.744.283**	**74.862.868.566.769**
	1	Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta	258.181.223.743	6.637.194.500	59.230.451.466.802	693.788.590.471	49.536.662.877.531	22.522.500	49.799.503.918.274	17.124.741.936	-	17.124.741.936	49.782.379.176.338	49.799.503.918.274
	2	Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK), Jakarta	617.137.298.569	-	24.680.797.889.965	235.581.058.332	24.445.216.830.913	710.819.413	25.063.064.748.495	62.397.080.550	-	62.397.080.550	25.000.667.667.945	25.063.064.748.495
	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan		**1.339.187.890.004**	**0**	**28.238.030.984.980**	**3.750.888.881.027**	**25.479.183.693.933**	**141.346.112.909**	**26.959.897.896.846**	**574.892.206.478**	**388.169.422.324**	**964.120.630.802**	**25.995.577.066.044**	**26.959.897.896.846**
	1	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan	1.339.187.890.004	-	28.238.030.984.980	3.750.888.881.027	25.479.183.693.933	141.346.112.909	26.959.897.896.846	574.892.206.478	388.169.422.324	964.120.630.802	25.995.577.066.044	26.959.897.896.846
	Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas		**8.958.813.070**	**-**	**2.939.598.338.934**	**108.970.628.139**	**2.828.629.712.795**	**967.991.500**	**2.839.532.317.365**	**2.493.911.936**	**-**	**2.493.911.936**	**2.837.038.405.429**	**2.839.532.317.365**
	1	Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	8.958.813.070	-	2.939.598.338.934	109.970.628.139	2.828.629.712.795	967.991.500	2.839.532.317.365	2.493.911.936	-	2.493.911.936	2.837.038.405.429	2.839.532.317.365
	TOTAL PER DEPARTEMEN													
		SEKRETARIAT NEGARA (007)	**973.318.522.312**	**6.637.194.500**	**74.911.249.356.947**	**929.389.648.803**	**73.981.878.708.044**	**733.741.813**	**74.862.568.566.769**	**79.521.822.486**	**-**	**79.521.822.486**	**74.783.046.744.283**	**74.862.568.566.769**

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2014

No	JENIS LAYANAN	KEMENTERIAN/LEMBAGA/SATKER BLU	ASET							KEWAJIBAN			EKUITAS	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
			Aset Lancar	Investasi Jangka Panjang	Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Aset Tetap	Aset Lainnya	JUMLAH ASET	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	JUMLAH KEWAJIBAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6-7)	(9)	(10=4+5+8+9)	(11)	(12)	(13=11+12)	(14)	(15=13+14)
	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan		**1.339.187.890.004**	**-**	**28.238.030.984.980**	**3.750.888.881.027**	**25.479.183.693.933**	**141.346.112.909**	**26.959.897.896.846**	**574.892.206.478**	**388.169.422.324**	**964.120.630.802**	**25.995.577.066.044**	**26.959.897.896.846**
	Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan		**8.958.813.070**	**-**	**2.939.598.338.934**	**108.970.628.139**	**2.828.629.712.795**	**967.991.500**	**2.839.532.317.365**	**2.493.911.936**	**-**	**2.493.911.936**	**2.837.038.405.429**	**2.839.532.317.365**
	TOTAL JENIS PELAYANAN PENGELOLAAN WILAYAH / KAWASAN		**2.221.465.025.388**	**6.637.194.500**	**108.808.878.280.741**	**4.798.207.169.969**	**101.890.669.114.772**	**143.027.248.322**	**104.261.798.580.950**	**659.867.842.800**	**388.169.422.324**	**1.048.138.365.224**	**103.215.692.215.756**	**104.261.798.580.980**
3	Pengelolaan Dana Khusus	**KEMENTERIAN KEUANGAN (015)**	**15.782.604.264.198**	**8.174.256.200.870**	**19.879.043.285**	**8.740.446.553**	**10.138.596.712**	**15.618.443.737.324**	**39.585.442.798.804**	**377.307.801**	**-**	**377.307.801**	**39.585.065.491.003**	**39.585.442.798.804**
	1	Pusat Investasi Pemerintah	13.345.998.082.601	8.174.256.200.870	13.191.296.552	7.688.849.689	5.504.354.853	743.737.324	21.526.472.375.448	56.980.219	-	56.980.219	21.526.415.395.229	21.526.472.375.448
	2	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	2.436.636.181.597	-	6.687.838.713	2.053.596.864	4.634.241.850	15.617.709.000.000	18.058.970.423.450	320.327.582	-	320.327.582	18.058.650.095.774	18.058.970.423.456
	KEMENTERIAN KEUNGTANAN (026)		**2.431.028.518.327**	**-**	**4.157.014.210**	**1.888.513.285**	**2.170.500.945**	**169.442.800**	**2.433.398.481.939**	**2.432.959**	**-**	**2.432.959**	**2.433.394.028.978**	**2.433.398.461.939**
	1	Pusat Pembiayaan Pembangunan Nasional	2.431.028.518.327	-	4.157.014.210	1.986.513.285	2.170.500.945	169.442.800	2.433.398.481.939	2.432.959	-	2.432.959	2.433.394.028.978	2.433.398.461.939
	KEMENTERIAN PENJAGAAN UMUM (033)		**593.842.123.294**	**-**	**5.092.402.833**	**3.002.011.572**	**2.090.391.261**	**7.050.539.513.835**	**7.643.472.088.190**	**-**	**-**	**-**	**7.643.472.088.190**	**7.643.472.088.190**
	1	Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	593.842.123.294	-	5.092.402.833	3.002.011.572	2.090.391.261	7.050.539.513.835	7.643.472.088.190	-	-	-	7.643.472.088.190	7.643.472.088.190
	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (038)		**6.826.218.714.443**	**774.534.054.157**	**56.307.596.763**	**30.888.052.689**	**23.419.962.074**	**656.624.375**	**7.724.827.335.069**	**289.407.489.850**	**-**	**289.407.489.850**	**7.435.419.845.219**	**7.724.827.335.069**
	1	BPSTI	6.826.218.714.443	774.534.054.157	56.307.596.763	30.888.052.689	23.419.962.074	656.624.375	7.724.827.335.069	289.407.489.850	-	289.407.489.850	7.435.419.845.219	7.724.827.335.069
	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)		**444.764.859.910**	**-**	**21.881.869.469**	**12.178.117.308**	**9.703.752.193**	**3.870.401.854.187**	**4.324.850.466.250**	**-**	**-**	**-**	**4.324.850.466.250**	**4.324.850.466.250**
	1	Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)	444.764.859.910	-	21.881.869.469	12.178.117.308	9.703.752.193	3.870.401.854.187	4.324.850.466.250	-	-	-	4.324.850.466.250	4.324.850.466.250
	TOTAL PER DEPARTEMEN													
		KEMENTERIAN KEUANGAN (015)	**15.782.604.264.198**	**8.174.256.200.870**	**19.879.043.285**	**8.740.446.553**	**10.138.596.712**	**15.618.443.737.324**	**39.585.442.798.804**	**377.307.801**	**-**	**377.307.801**	**39.585.065.491.003**	**39.585.442.798.804**
		KEMENTERIAN KEHUTANAN (029)	**2.431.028.518.327**	**-**	**4.157.014.210**	**1.888.513.285**	**2.170.500.945**	**169.442.800**	**2.433.398.481.939**	**2.432.959**	**0**	**2.432.959**	**2.433.394.028.978**	**2.433.398.461.939**
		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM (033)	**593.842.123.294**	**-**	**5.092.402.833**	**3.002.011.572**	**2.090.391.261**	**7.050.539.513.835**	**7.643.472.088.150**	**-**	**-**	**-**	**7.643.472.088.150**	**7.643.472.088.150**
		KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)	**444.764.859.910**	**-**	**21.881.869.469**	**12.178.117.308**	**9.703.752.193**	**3.870.401.854.187**	**4.324.850.466.250**	**-**	**-**	**-**	**4.324.850.466.250**	**4.324.850.466.250**
		KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA(038)	**6.826.218.714.443**	**774.534.054.157**	**56.307.596.763**	**30.888.052.689**	**23.419.962.074**	**656.624.375**	**7.724.827.335.069**	**289.407.489.850**	**-**	**289.407.489.850**	**7.435.419.845.219**	**7.724.827.335.069**
	TOTAL JENIS PELAYANAN PENGELOLAAN DANA KHUSUS		**28.176.434.403.132**	**8.948.790.254.027**	**108.418.324.930**	**57.795.141.385**	**47.823.183.545**	**28.840.241.232.184**	**81.812.089.150.288**	**289.787.230.810**	**-**	**289.787.230.810**	**81.522.301.919.478**	**81.812.089.150.288**
	TOTAL SELURUH JENIS PELAYANAN		**46.371.288.967.749**	**24.250.932.978.136**	**224.468.108.488.987**	**27.689.671.927.472**	**196.959.036.561.089**	**28.299.799.897.924**	**293.733.216.946.488**	**3.922.990.159.187**	**921.207.423.320**	**4.063.787.979.507**	**289.669.419.964.981**	**293.733.216.946.487**
	TOTAL SATKER		**161**											

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN AKTIVITAS
PER 31 DESEMBER TAHUN 2014
(BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN)

No	JENIS LAYANAN	KEMENTERIAN/LEMBAGA/SATKER BLU	PENDAPATAN					BIAYA	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS KEUNTUNGAN/KERUGI	Keuntungan/Kerugian	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS-POS LUAR BIASA	Pos-pos Luar Biasa	SURPLUS/DEFISIT BRUTO	SETOR KE KAS NEGARA	SURPLUS/DEFISIT BERSIH
			Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan	Hibah	Pendapatan APBN	Pendapatan Usaha Lainnya	JUMLAH PENDAPATAN								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=4+5+6+7)	(9)	(10=8-9)	(11)	(12=10+11)	(13)	(14=12+13)	(15)	(16=14-15)
1	Penyediaan Barang		8.471.680.333.867	35.192.054.231	3.347.685.117.715	371.912.854.685	12.226.140.360.498	11.232.829.914.578	993.810.435.951	(26.108.862.146)	967.401.573.714	354.906.377	967.756.480.091	24.140.251.482	943.616.228.609
	1	RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo , Jakarta	1.030.623.509.926	13.835.526.369	290.198.997.622	27.972.177.139	1.362.630.209.034	1.352.167.039.224	10.363.166.810		10.363.166.810		10.363.166.810		10.363.166.810
	2	RSUP Fatmawati, Jakarta	521.712.364.720	1.115.626.600	176.625.242.497	12.026.584.315	711.279.818.132	625.714.878.296	87.563.621.836		87.563.621.836		87.563.621.836		87.563.621.836
	3	RSUP Persahabatan, Jakarta	304.769.861.005	1.139.646.000	136.220.772.982	38.671.878.882	480.802.058.869	442.336.188.080	38.465.870.789	(206.282.177)	38.257.628.412		38.257.628.412		38.257.628.412
	4	RSUP H. Adam Malik, Medan	502.419.604.025	-	120.595.514.366	10.826.884.806	633.841.003.197	595.113.801.415	22.272.436.224	(41.053.468.496)	(63.325.967.719)		(63.325.967.719)		(63.325.967.719)
	5	RSUP Dr Hasan Sadikin, Bandung	603.376.542.967	160.949.356.791	23.152.422.093	786.976.301.838	772.215.364.845	14.761.066.985			14.761.066.985		14.761.066.985		14.761.066.985
	6	RSUP Dr Kariadi, Semarang	712.579.159.200	1.371.071.075.334	26.202.438.092	875.882.672.626	710.813.831.411	165.068.841.216	(23.708.952)	165.045.132.264			165.045.132.264		165.045.132.264
	7	RSUP Dr Sardjito, Yogyakarta	503.915.669.764	3.479.082.366	169.962.120.777	15.995.398.726	693.354.271.615	600.489.513.686	92.864.758.029		92.864.758.029		92.864.758.029		92.864.758.029
	8	RSUP Sanglah, Denpasar	424.444.978.721	2.524.438.000	142.529.172.987	12.987.388.968	582.395.978.192	540.849.306.008	41.546.752.184		41.546.752.184		41.546.752.184		41.546.752.184
	9	RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo, Makassar	662.006.930.433	5.107.491.929	129.066.401.664	8.694.063.722	804.874.887.747	624.672.676.961	180.782.191.776	2.540.316.960	183.322.508.736		183.322.508.736		183.322.508.736
	10	RSUP Dr M.Djamil, Padang	227.944.306.370	2.474.477.166	108.226.176.887	6.804.060.009	345.468.819.433	372.698.383.784	(17.230.364.351)		(17.230.364.351)		(17.230.364.351)		(17.230.364.351)
	11	RSUP Dr Mohammad Hoesin, Palembang	488.614.911.664	-	108.643.194.923	2.446.662.778	597.601.769.365	598.631.698.008	(1.029.928.643)	38.531.574	(991.397.069)		(991.397.069)		(991.397.069)
	12	RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou, Manado	200.600.672.694	101.897.019.485	28.647.431.850	334.545.094.169	371.972.334.439	(37.427.240.269)	3.414.646.812	(34.012.593.457)			(34.012.593.457)		(34.012.593.457)
	13	RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro, Klaten	102.710.197.976	1.015.626.682	62.969.718.987	52.290.985.780	218.986.289.126	166.603.466.790	52.491.822.336	1.898.957.931	54.390.680.267		54.390.680.267		54.390.680.267
	14	RSAD Harapan Kita	193.551.218.924	125.218.750.952	20.316.913.469	338.085.883.045	336.610.964.952	30.475.018.293			30.475.018.293		30.475.018.293		30.475.018.293
	15	RSUPD Harapan Kita	599.472.039.638	113.998.106.748	14.600.172.692	727.811.816.606	852.136.790.398	75.621.526.638			75.621.526.638		75.621.526.638		75.621.526.638
	16	RS Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga	37.676.330.520	29.120.414.478	360.356.776	67.137.112.174	69.771.780.305	7.365.331.959	(20.366.309)	7.344.975.160			7.344.975.160		7.344.975.160
	17	RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu	39.956.260.076	26.693.876.074	469.326.486	61.229.961.633	47.711.076.319	13.511.382.315		13.511.382.315			13.511.382.315		13.511.382.315
	18	RS Paru Dr.M.Goenawan P. Cisarua	68.018.664.994	29.332.649.110	867.692.298	86.219.336.238	73.547.403.186	12.671.302.052	(395.426.689)	12.275.875.363			12.275.875.363		12.275.875.363
	19	RSJPDR Radjiman W. Lawang	44.464.037.226	1.159.950.000	55.660.105.297	1.588.237.587	102.912.331.110	99.020.237.630	3.892.093.480		3.892.093.480		3.892.093.480		3.892.093.480
	20	RSJD Dr Soeharto Herdjan	31.802.246.188	43.296.281.716	2.304.976.841	77.363.483.726	66.269.804.879	11.093.676.847	4.111.166.276	15.174.845.123			15.174.845.123		15.174.845.123
	21	RSJ Prof.Dr.Soerojo Magelang	79.008.825.082	376.000.000	55.352.242.632	981.084.619	135.693.152.333	106.931.767.275	28.761.385.058	51.141.862	28.812.526.720		28.812.526.720		28.812.526.720
	22	RS Kusta Dr.Tadjuddin Chalid Makassar	12.079.704.015	54.007.190.039	82.070.211	40.760.972.006	49.035.016.967	(3.055.044.091)		(3.055.044.091)			(3.055.044.091)		(3.055.044.091)
	23	RSPI Prof. Dr. Sulianto Saroso	37.091.329.936	57.869.536.529	5.146.599.019	100.107.466.383	96.315.577.231	1.791.878.182		1.791.878.182			1.791.878.182		1.791.878.182
	24	RS Mata Cicendo Bandung	116.699.927.983	58.016.676.522	2.469.862.695	77.610.681.098	132.020.969.373	76.621.526.638		76.621.526.638			76.621.526.638		76.621.526.638
	25	RS Stroke Nasional Bukittinggi	44.203.561.661	31.436.459.922	230.263.794	76.870.315.266	77.226.210.755	(1.357.895.487)	(389.467)	(1.358.259.954)			(1.358.259.954)		(1.358.259.954)
	26	RS Kusta Dr. Sitanala, Tangerang	36.248.698.669	41.693.336.015	1.365.681.843	80.101.098.762	66.860.167.669	14.250.931.093		14.250.931.093			14.250.931.093		14.250.931.093
	27	RS Orsiped Prof. Dr. R Soeharso	121.594.762.161	46.628.985.131	33.668.667.786	200.602.625.068	170.087.992.991	30.715.062.077		30.715.062.077			30.715.062.077		30.715.062.077
	28	RS Kanker Dharnais	678.735.266.217	121.180.953.005	631.076.397	596.547.286.686	536.267.196.226	68.300.120.468		68.300.120.468			68.300.120.468		68.300.120.468
	29	RS Kusta Dr Reva Abdullah Palembang	16.515.782.600	28.019.787.950	1.018.782.896	44.584.333.668	35.677.466.892	8.906.867.774	3.778.467.825	12.685.335.599	3.603.499	12.688.939.097	79.603.888	12.609.435.209	
	30	RS Ketergantungan Obat Jakarta													
	31	RS Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi, Bogor	90.222.748.229	58.705.190.477	4.695.349.384	153.624.288.060	138.591.330.918	15.032.967.142		15.032.967.142			15.032.967.142		15.032.967.142
	32	Politeknik Kesehatan Makassar	16.976.139.666	41.164.740.409	681.990.707	58.812.870.788	62.951.837.039	(4.148.966.254)	36.866.314	(4.112.099.940)			(4.112.099.940)		(4.112.099.940)
	33	Politeknik Kesehatan Tanjung Karang	15.114.440.000	30.737.600.445	2.966.039.940	48.668.349.386	44.039.039.440	4.699.209.945		4.699.209.945		260.268.614	4.438.961.431		4.438.961.431
	34	Politeknik Kesehatan Bandung	16.927.141.667	46.122.741.616	1.185.449.972	64.135.332.255	59.892.126.277	4.393.205.978		4.393.205.978			4.393.205.978		4.393.205.978
	35	Politeknik Kesehatan Malang	24.716.628.000	29.090.341.543	980.336.388	53.787.205.924	49.718.869.876	4.068.822.046		4.068.822.046			4.068.822.046		4.068.822.046
	36	Politeknik Kesehatan Jakarta III	17.738.172.521	23.885.434.733	106.491.882	41.710.099.136	49.717.399.492	(8.007.300.358)		(8.007.300.358)			(8.007.300.358)		(8.007.300.358)

www.peraturan.go.id

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN AKTIVITAS
PER 31 DESEMBER TAHUN 2014
(BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN)

No	JENIS LAYANAN	KEMENTERIAN/ESELON I/SATKER BLU	PENDAPATAN					BIAYA	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS KEUNTUNGAN/KERUGI	Keuntungan/Kerugian	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS-POS LUAR BIASA	Pos-pos Luar Biasa	SURPLUS/DEFISIT BRUTO	SETOR KE KAS NEGARA	SURPLUS/DEFISIT BERSIH
			Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan	Hibah	Pendapatan APBN	Pendapatan Usaha Lainnya	JUMLAH PENDAPATAN								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=4+5+6+7)	(9)	(10=4-9)	(11)	(12=10+11)	(13)	(14=12+13)	(15)	(16=14-15)
	37	Politeknik Kesehatan Jakarta II	14.505.748.619	100.000.000	30.029.739.396	397.724.029	44.933.212.044	49.898.048.074	(4.964.836.030)		(4.964.836.030)		(4.964.836.030)	16.662.374	(4.981.498.404)
	38	Politeknik Kesehatan Yogyakarta	13.402.590.469	-	29.086.215.967	244.702.776	42.713.509.181	48.126.316.236	(5.413.807.076)		(5.413.807.076)	361.302.879	(5.052.504.196)		(5.052.504.196)
	39	Politeknik Kesehatan Surakarta	19.556.866.130	-	21.550.081.135	1.060.864.153	42.067.811.429	43.805.938.615	(1.738.063.438)	(227.956.452)	(1.738.063.438)		(1.738.063.438)		(1.738.063.438)
	40	Politeknik Kesehatan Medan	18.893.927.600	-	37.293.652.941	1.068.264.994	57.181.725.346	51.691.266.226	5.530.459.119		5.530.459.119		5.530.459.119		5.530.459.119
	41	Politeknik Kesehatan Surabaya	24.529.385.524	-	47.954.035.752	52.118.017	72.535.539.293	75.493.090.658	(2.957.521.365)		(2.957.521.365)		(2.957.521.365)		(2.957.521.365)
	42	Politeknik Kesehatan Bengkulu	12.515.461.532	435.600.000	15.473.512.469	1.062.766.032	29.026.592.053	30.494.911.522	(676.319.469)		(676.319.469)		(676.319.469)		(676.319.469)
	43	Politeknik Kesehatan Semarang	38.907.362.015	-	51.352.131.889	2.379.382.696	92.638.876.600	83.054.666.069	9.584.221.531		9.584.221.531	23.793.835.906	(14.209.605.375)		(14.209.605.375)
	44	Politeknik Kesehatan Pontianak	19.399.371.506	73.500.000	21.987.639.297	429.682.568	41.890.093.359	37.224.762.749	4.665.330.610		4.665.330.610		4.665.330.610		4.665.330.610
	45	Balai Besar Laboratorium Kesehatan	6.687.207.987	-	16.264.316.921	35.954.545	22.987.479.453	19.453.078.826	3.534.400.614	(693.230.649)	3.534.171.387		3.534.171.387		3.534.171.387
	46	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta	3.466.660.807	-	23.695.153.515	40.489.051	27.341.303.373	19.922.901.970	7.438.501.403	-	7.438.501.403	-	7.438.501.403	-	7.438.501.403
	47	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar	3.499.034.990	-	13.396.879.297	98.032.501	16.993.946.788	14.415.454.203	2.578.492.585	-	2.578.492.585	-	2.578.492.585	-	2.578.492.585
	48	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya	7.210.305.794	-	14.418.341.119	-	21.628.646.913	20.958.606.926	670.139.987	-	670.139.987	-	670.139.987	-	670.139.987
	49	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat	5.594.785.291	-	24.449.860.124	470.623.104	30.515.268.519	17.378.092.193	13.137.176.326	126.498	13.137.291.824	-	13.137.291.824	-	13.137.291.824
	50	Balai Besar Kesehatan Mata Masy Makassar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat	5.932.335.995	-	13.307.520.291	65.556.696	19.305.412.982	20.714.866.913	(1.409.453.871)	605.602.192	(803.851.679)		(803.851.679)		(803.851.679)
	52	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat	3.656.897.080	-	20.698.971.112	221.434.958	24.577.303.150	21.985.396.690	2.592.060.460	-	2.592.060.460	-	2.592.060.460	-	2.592.060.460
		KEMENTERIAN KEUANGAN (015)	27.385.018.970	-	84.252.159.537	910.936.098	112.548.113.598	114.305.341.080	(1.757.227.482)	-	(1.757.227.482)	-	(1.757.227.482)	5.498.243.688	(7.255.471.070)
	1	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)	27.385.018.970	-	84.252.159.537	910.936.098	112.548.113.598	114.305.341.080	(1.757.227.482)	-	(1.757.227.482)	-	(1.757.227.482)	5.498.243.688	(7.255.471.070)
		KEMENTERIAN PERTANIAN (018)	25.399.366.876	10.199.000	40.864.193.477	449.429.264	66.923.218.617	50.960.726.290	15.962.492.333	602.213.893	16.564.697.226	-	16.564.697.226	-	16.564.697.226
	1	Pusat Veterinaria Farma Surabaya	9.661.802.876	-	20.729.050.399	236.089.492	30.626.942.767	29.457.328.990	2.169.613.777	-	2.169.613.777	-	2.169.613.777	-	2.169.613.777
	2	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	15.737.564.000	10.199.000	20.235.143.078	213.339.772	36.196.275.850	22.503.406.296	13.692.869.554	602.213.893	14.295.083.449	-	14.295.083.449	-	14.295.083.449
		KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (019)	73.274.394.119	-	71.821.859.088	1.141.606.095	146.238.059.302	124.626.896.962	21.611.162.340	(84.943.600)	21.526.418.740	-	21.526.418.740	59.963.680	21.466.455.140
	1	Balai Riset dan Standardisasi Aceh (BARISTA) Bogor	8.053.668.384	-	13.773.623.676	153.153.907	21.980.445.967	20.856.318.459	1.124.127.508	-	1.124.127.508	-	1.124.127.508	-	1.124.127.508
	2	Balai Besar Industri Agro	23.007.731.700	-	10.000.000.962	552.440.371	42.541.111.061	30.745.053.371	3.796.057.690	-	3.796.057.690	-	3.796.057.690	-	3.796.057.690
	3	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Bandung	27.959.171.819	-	17.987.800.950	144.159.695	45.701.151.623	29.641.995.758	16.059.155.865	-	16.059.155.865	-	16.059.155.865	-	16.059.155.865
	4	Balai Riset dan Standardisasi Bandar Lampung	3.211.375.520	-	6.316.792.769	9.546.594.356	11.105.594.725	(1.559.000.370)	2.000.000	-	(1.559.000.370)	2.000.000	(1.561.000.370)	-	(1.561.000.370)
	5	Balai Besar Tek Pencegahan & Pencemaran	11.432.276.878	-	14.882.837.331	173.651.102	26.488.765.311	26.076.715.136	1.391.992.155	(84.943.600)	1.307.048.555	-	1.307.048.555	57.963.680	1.249.084.955
		KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL (023)	9.166.555.794.391	221.294.065.743	9.994.726.582.103	3.225.635.298.134	22.598.173.720.371	18.988.316.897.147	3.609.856.823.224	116.192.200.943	3.726.049.024.167	7.037.111.305	3.733.086.355.472	-	3.733.086.355.472
	1	Universitas Diponegoro Semarang	316.246.753.522	3.942.755.660	335.933.672.039	46.979.264.056	703.102.436.116	636.606.631.796	66.495.763.372	-	66.495.763.372	-	66.495.763.372	-	66.495.763.372
	2	Universitas Padjadjaran Bandung	464.351.363.179	1.831.024.620	511.126.539.140	32.696.447.031	1.010.005.373.970	832.558.356.703	177.447.017.267	-	177.447.017.267	-	177.447.017.267	-	177.447.017.267
	3	Universitas Negeri Malang	157.592.757.902	-	264.810.598.697	1.170.504.304.276	592.907.661.077	494.073.561.486	98.834.099.592	-	98.834.099.592	-	98.834.099.592	-	98.834.099.592
	4	Universitas Hasanuddin Makassar	256.075.430.662	7.801.017.433	473.775.553.704	210.104.859.699	946.756.861.498	867.027.339.933	79.729.521.565	-	79.729.521.565	-	79.729.521.565	-	79.729.521.565
	5	Universitas Brawijaya Malang	686.912.164.833	-	406.796.642.701	143.374.604.904	1.146.023.622.438	897.434.206.114	247.589.326.324	115.901.457.106	363.490.783.430	-	363.490.783.430	-	363.490.783.430
	6	Universitas Negeri Semarang	166.136.299.206	949.800.000	318.209.946.867	10.019.541.534	495.315.587.609	363.867.068.810	130.648.518.799	7.037.111.305	137.685.630.104	-	137.685.630.104	-	137.685.630.104
	7	Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya	198.944.629.415	-	351.959.432.780	126.531.726.130	677.435.788.325	575.844.072.277	97.360.716.048	-	97.360.716.048	-	97.360.716.048	-	97.360.716.048
	8	Universitas Negeri Surabaya	190.592.767.600	-	240.026.253.271	37.984.066.998	468.565.087.769	326.193.376.010	160.371.722.759	-	160.371.722.759	-	160.371.722.759	-	160.371.722.759
	9	Universitas Muhammadiyah Semarinda	121.705.697.000	1.182.500.000	178.986.395.546	34.249.237.636	336.123.784.154	336.432.993.986	(329.079.812)	-	(329.079.812)	-	(329.079.812)	-	(329.079.812)
	10	Universitas Sebelas Maret Surakarta	326.482.464.098	2.045.475.000	542.073.024.923	68.954.617.619	939.555.581.640	826.491.973.458	101.064.608.182	-	101.064.608.182	-	101.064.608.182	-	101.064.608.182

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN AKTIVITAS
PER 31 DESEMBER TAHUN 2014
(BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN)

No	JENIS LAYANAN	KEMENTERIAN/ESELON I/SATKER BLU	PENDAPATAN					BIAYA	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS KEUNTUNGAN/KERUGI	Keuntungan/Kerugian	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS-POS LUAR BIASA	Pos-pos Luar Biasa	SURPLUS/DEFISIT BRUTO	SETOR KE KAS NEGARA	SURPLUS/DEFISIT BERSIH
			Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan	Hibah	Pendapatan APBN	Pendapatan Usaha Lainnya	JUMLAH PENDAPATAN								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=4+5+6+7)	(9)	(10=4-9)	(11)	(12=10+11)	(13)	(14=12+13)	(15)	(16=14-15)
	11	Universitas Lampung	147.174.323.193	-	259.197.573.025	20.905.631.729	427.277.397.937	313.195.932.429	114.081.695.508	-	114.081.695.508	-	114.081.695.508	-	114.081.695.508
	12	Universitas Negeri Yogyakarta	146.471.128.359	1.126.100.000	243.331.375.660	16.527.542.013	406.456.146.032	378.653.852.749	27.804.293.283	-	27.804.293.283	-	27.804.293.283	-	27.804.293.283
	13	Universitas Negeri Gorontalo	66.861.371.097	698.739.696	184.869.077.480	175.740.837	251.604.929.110	189.176.678.379	62.428.250.731	-	62.428.250.731	-	62.428.250.731	-	62.428.250.731
	14	Universitas Indonesia	1.117.146.238.269	110.761.424.347	522.013.549.295	76.766.810.790	1.826.688.020.701	1.549.213.982.238	257.464.038.463	-	257.464.038.463	-	257.464.038.463	-	257.464.038.463
	15	Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	762.540.774.686	3.735.066.306	672.254.264.894	426.874.945.145	1.865.405.036.736	1.579.044.426.405	286.360.612.330	-	286.360.612.330	-	286.360.612.330	-	286.360.612.330
	16	Universitas Sumatera Utara	363.343.492.018	704.627.250	331.949.000.051	63.310.186.002	759.307.305.321	633.694.057.887	125.613.237.434	-	125.613.237.434	-	125.613.237.434	-	125.613.237.434
	17	Universitas Airlangga Surabaya	311.787.136.329	21.526.267.689	380.679.488.606	177.624.420.086	891.616.312.712	806.000.515.299	85.615.797.413	-	85.615.797.413	-	85.615.797.413	-	85.615.797.413
	18	Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	113.427.921.440	-	266.189.090.676	11.271.97 3.918	419.961.926.034	355.024.297.729	64.943.631.304	-	64.943.631.304	-	64.943.631.304	-	64.943.631.304
	19	Universitas Halooleo	112.723.31 3.932	-	252.134.821.408	-	364.857.935.340	301.157.780.626	3.690.154.714	-	3.690.154.714	0	3.690.154.714	0	3.690.154.714
	20	Universitas Riau	164.927.689.087	-	209.940.475.805	10.065.393.242	386.923.558.146	366.910.118.469	19.913.439.856	-	19.913.439.856	-	19.913.439.856	-	19.913.439.856
	21	Universitas Terbuka	889.199.925.965	7.081.668.000	216.241.530.151	97.719.669.214	1.210.921.683.330	690.191.992.378	320.140.000.944	-	320.140.000.944	-	320.140.000.944	-	320.140.000.944
	22	Universitas Udayana	167.703.660.719	-	331.607.367.584	3.404.229.663	502.945.257.966	490.828.363.115	12.117.044.751	-	12.117.044.751	-	12.117.044.751	-	12.117.044.751
	23	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	74.870.186.031	-	79.254.820.259	1.979.196.822	156.904.210.912	132.253.057.283	23.651.153.629	-	23.651.153.629	-	23.651.153.629	-	23.651.153.629
	24	Politeknik Negeri Malang	43.515.143.600	-	154.338.652.511	4.137.827.167	201.991.623.178	125.401.541.898	76.590.081.282	-	76.590.081.282	-	76.590.081.282	-	76.590.081.282
	25	Universitas Tadulako Palu	111.595.958.176	15.349.708.191	280.393.198.528	11.888.814.959	419.218.057.854	310.839.336.943	108.378.960.910	-	108.378.960.910	-	108.378.960.910	-	108.378.960.910
	26	Universitas Mataram	97.163.765.717	-	234.629.894.221	-	331.793.659.938	231.317.009.208	100.476.616.730	-	100.476.616.730	-	100.476.616.730	-	100.476.616.730
	27	Institut Teknologi Bandung	341.321.551.542	13.397.232.366	603.152.222.529	479.595.595.697	1.437.466.572.092	1.453.364.395.673	(15.897.823.581)	-	(15.897.823.581)	-	(15.897.823.581)	-	(15.897.823.581)
	28	Institut Pertanian Bogor	298.159.529.617	5.997.887.600	-	199.456.660.268	498.614.077.485	445.902.410.173	43.711.667.192	-	43.711.667.192	-	43.711.667.192	-	43.711.667.192
	29	Universitas Bengkulu	72.059.966.377	312.074.500	147.315.079.965	4.674.976.190	224.362.097.032	202.513.418.793	21.848.678.239	-	21.848.678.239	-	21.848.678.239	-	21.848.678.239
	30	Universitas Sriwijaya	346.286.661.366	19.838.866.315	270.769.471.727	61.166.712.267	697.101.801.675	533.905.852.043	53.195.769.632	-	53.195.769.632	-	53.195.769.622	-	53.195.769.622
	31	Universitas Negeri Jakarta	191.816.633.680	8.000.000	167.496.095.964	4.660.350.163	363.980.705.829	356.971.219.615	(52.170.512.886)	-	(52.170.512.886)	-	(52.170.512.886)	-	(52.170.512.886)
	32	Universitas Andalas	169.172.693.769	3.040.921.000	306.024.799.253	3.633.188.951	481.871.602.683	481.020.781.025	30.850.781.657	290.743.837	31.141.525.394	-	31.141.525.394	-	31.141.525.394
	33	Universitas Pendidikan Indonesia	346.658.181.514	-	249.090.099.932	687.576.235.809	1.283.324.464.256	635.507.123.322	647.817.340.933	-	647.817.340.933	-	647.817.340.933	-	647.817.340.933
		KEMENTERIAN AGAMA (025)	607.901.312.287	29.007.263.021	1.900.693.904.910	41.705.282.224	2.579.307.555.077	2.300.522.434.226	271.525.229.441	9.054.220.708	280.579.450.149	19.350.166	280.560.100.149	9.663	280.560.090.486
	1	UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta	44.773.61 2.072	12.866.500	147.436.659.522	13.625.436.035	205.848.573.129	175.981.814.786	29.866.958.343	-	29.866.958.343	-	29.866.958.343	-	29.866.958.343
	2	UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	132.086.181.840	-	274.740.345.297	11.162.466.641	417.988.993.778	391.738.193.270	26.250.810.408	-	26.250.810.408	-	26.250.810.408	-	26.250.810.408
	3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	46.936.183.000	-	97.366.637.045	1.795.147.516	146.097.967.561	119.677.966.952	25.321.100.709	-	25.321.100.709	-	25.321.100.709	-	25.321.100.709
	4	UIN Sunan Gunung Djati, Bandung	47.133.239.466	13.476.428.419	190.271.298.911	1.929.726.762	252.360.692.558	239.323.456.767	13.087.235.791	-	13.087.235.791	-	13.087.235.791	-	13.087.235.791
	5	UIN Alauddin, Makassar	54.387.512.500	-	183.314.731.724	4.285.201.974	241.987.446.198	206.184.081.713	35.823.404.485	-	35.823.404.485	-	35.823.404.485	-	35.823.404.485
	6	IAIN Sultanta Utara	26.059.475.382	7.000.000.000	109.947.731.826	91.2 77.935	143.629.896.943	139.61 0.326.020	4.019.569.923	9.054.220.708	13.073.790.631	-	13.073.790.631	-	13.073.790.631
	7	IAIN Walisongo Semarang	23.324.929.300	9.317.968.102	134.019.541.725	2.671.976.760	169.333.995.887	152.289.268.464	7.044.637.423	-	7.044.637.423	-	7.044.637.423	-	7.044.637.423
	8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	70.576.748.401	-	152.230.514.601	14.181.635	222.823.424.637	210.851.529.652	11.971.894.985	-	11.971.894.985	-	11.971.894.985	-	11.971.894.985
	9	IAIN Sulthan Thaha Saifudin, Jambi	14.946.324.000	-	83.501.626.273	159.514.436	98.647.464.698	92.867.977.803	5.779.486.897	-	5.779.486.897	-	5.779.486.897	-	5.779.486.897
	10	IAIN Sunan Ampel	32.555.019.000	-	218.376.776.861	2.495.090.998	253.426.886.922	173.817.769.690	79.609.225.232	-	79.609.225.232	-	79.609.225.232	-	79.609.225.232
	11	IAIN Sulten Maulana Hasanuddin Banten	7.999.940.000	-	18.979.295.799	182.883.633	27.062.819.432	21.540.429.815	5.521.589.616	-	5.521.589.616	19.350.166	5.502.239.450	-	5.502.239.450
	12	IAIN Raden Intan Lampung	26.117.767.000	-	84.498.752.316	1.685.696.669	111.302.183.985	90.531.893.756	17.764.360.229	-	17.764.360.229	-	17.764.360.229	-	17.764.360.229
	13	IAIN Raden Fatah Palembang	26.509.157.000	-	119.242.042.969	364.685.525	139.104.980.302	132.984.571.699	6.200.268.603	-	6.200.268.603	-	6.200.268.603	-	6.200.268.603
	14	IAIN Manado	13.980.914.000	-	63.638.894.612	393.605.194	97.993.313.706	95.882.136.900	2.211.176.806	-	2.211.176.806	-	2.211.176.806	-	2.211.176.806

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN AKTIVITAS
PER 31 DESEMBER TAHUN 2014
(BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN)

No	JENIS LAYANAN	KEMENTERIAN/ESELON I/SATKER BLU	PENDAPATAN					BIAYA	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS KEUNTUNGAN/KERUGI	Keuntungan/Kerugian	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS-POS LUAR BIASA	Pos-pos Luar Biasa	SURPLUS/DEFISIT BRUTO	SETOR KE KAS NEGARA	SURPLUS/DEFISIT BERSIH
			Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan	Hibah	Pendapatan APBN	Pendapatan Usaha Lainnya	JUMLAH PENDAPATAN								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=4+5+6+7)	(9)	(10=4-9)	(11)	(12=10+11)	(13)	(14=12+13)	(15)	(16=14-15)
	15	IAIN Ar Raniry Banda Aceh	9.671.649.166	-	36.642.095.748	447.283.947	46.760.999.861	44.635.451.050	1.125.548.811	-	1.125.548.811	-	1.125.548.811	-	1.125.548.811
		KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN													
	1	Balai Besar Pengembangan Latihan Dalam													
	2	Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar													
	3	Balai Besar Latihan Kerja Industri, Serang													
		KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN													
	1	BPPTEK	4.881.032.000	-	7.133.691.120	183.823.027	12.198.146.147	11.342.803.392	855.342.755	91.9.236.123	1.374.577.878	-	1.374.577.878	-	1.374.577.878
		KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (B44)													
	1	Lembaga Layanan Pembiayaan KUKM Jakarta	34.935.822.119	-	22.857.686.251	2.724.796.873	60.518.285.233	108.596.915.291	(48.078.630.058)		(48.078.630.058)		(48.078.630.058)		(48.078.630.058)
		BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN													
	1	BPPT Enjinring	40.536.61 2.293	-	2.694.676.007	1.141.067.629	44.512.354.929	43.805.273.169	707.081.760	-	707.081.760	-	707.081.760	-	707.081.760
		KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (060)	545.186.192.310	185.450.000	129.693.934.565	79.270.697.915	752.316.094.790	556.403.923.277	195.912.171.513	(199.823.644)	195.712.347.869	15.049.015.706	211.761.363.575	(433.647.622)	212.195.011.197
	1	RS. Bhayangkara R. Said Sukanto Jakarta	253.159.437.063	-	52.422.258.469	6.226.685.670	309.807.381.162	223.767.466.269	86.039.914.893	(199.823.644)	85.840.091.249	15.049.015.706	100.889.076.955	(433.647.622)	101.322.725.577
	2	RS. Bhayangkara Tk III Kediri	101.477.057.131	-	10.950.162.307	1.347.189.457	113.774.388.895	78.814.292.217	34.960.096.678	-	34.960.096.678	-	34.960.096.678	-	34.960.096.678
	3	RS Bhayangkara Tk.III H.S. Samosir,	8.497.129.929	-	12.913.298.060	26.780.813.700	47.041.200.689	38.915.478.944	8.125.721.665	-	8.125.721.665	-	8.125.721.665	-	8.125.721.665
	4	RS Bhayangkara Tk.III Mappa Oudang,	97.614.405.982	-	14.201.544.902	3.990.457.640	115.806.408.524	84.740.879.498	31.065.529.026	-	31.065.529.026	-	31.065.529.026	-	31.065.529.026
	5	RS Bhayangkara, Semarang	4.610.300.665	-	8.737.099.104	9.006.107.398	22.353.477.143	18.606.101.669	3.747.375.474	-	3.747.375.474	-	3.747.375.474	-	3.747.375.474
	6	RS Bhayangkara Tk.III, Palembang	13.132.169.688	-	5.995.514.139	18.645.378.761	37.523.062.578	31.295.342.070	6.227.720.508	-	6.227.720.508	-	6.227.720.508	-	6.227.720.508
	7	RS Bhayangkara Bandung	26.699.916.666	-	13.196.923.903	973.202.446	40.869.043.015	38.131.836.930	4.717.206.085	-	4.717.206.085	-	4.717.206.085	-	4.717.206.085
	8	RS Bhayangkara Lembaga STUKPA	2.706.131.034	-	5.726.818.035	11.968.748.690	20.401.697.759	16.201.804.188	4.209.011.866	-	4.209.011.866	-	4.209.011.866	-	4.209.011.866
	9	RS Bhayangkara Tk.III, Tnjata Pelda Bali	10.761.872.079	-	-	10.761.872.079	-	10.761.872.079	-	-	10.761.872.079	-	10.761.872.079	-	10.761.872.079
	10	RS Bhayangkara Tk.III, Parepo	26.548.648.907	185.450.000	4.803.295.626	472.083.998	31.989.478.531	24.931.732.602	7.057.735.929	-	7.057.735.929	-	7.057.735.929	-	7.057.735.929
		LEMBAGA PEMERIKSAAN ANTARIKSA	7.251.149.000	-	1.586.619.411	361.700.271	9.579.469.282	8.954.441.291	625.027.991	-	625.027.991	-	625.027.991	-	625.027.991
	1	Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara	7.251.149.000	-	1.586.619.411	741.700.271	9.579.469.282	8.954.441.291	625.027.991	-	625.027.991	-	625.027.991	-	625.027.991
		KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	338.868.949.179	-	526.018.748.398	15.282.803.885	879.150.501.462	729.187.013.893	149.971.394.439	(236.726.839)	149.734.667.600	1.806.096.800	147.928.570.800	-	147.928.570.800
	1	Balai Besar Pendidikan Penyegaran &	97.539.917.704	-	19.966.639.472	2.085.362.446	119.575.919.622	96.097.356.696	34.478.562.927	-	34.478.562.927	-	34.478.562.927	-	34.478.562.927
	2	Politeknik Pelayaran Surabaya	40.179.528.000	-	69.821.936.542	5.603.334.982	115.604.859.524	76.808.024.405	(61.301.165.882)	-	(61.301.165.882)	-	(61.301.165.882)	-	(61.301.165.882)
	3	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)	92.827.183.500	-	98.489.213.316	3.964.772.374	195.280.169.190	166.252.675.890	29.027.493.299	(19.026.577)	24.988.464.727	-	24.988.464.727	-	24.988.464.727
	4	Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar	45.956.422.500	-	148.125.702.949	1.926.482.051	196.008.607.400	84.514.686.056	111.493.921.344	(217.697.067)	111.276.204.277	-	111.276.204.277	11.298.000	111.264.918.277
	5	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	37.076.668.000	-	66.356.998.923	680.083.638	104.113.750.561	89.416.672.053	14.697.078.508	-	14.697.078.508	-	14.708.816.688	-	14.708.816.688
	6	Akademi Teknik dan Keselamatan	15.399.876.166	-	66.629.459.737	691.088.941	82.719.423.743	69.272.687.364	(6.553.263.621)	-	(6.553.263.621)	-	(6.553.263.621)	-	(6.553.263.621)
	7	Badan Diklat Transportasi Darat (BPPTD)	8.883.765.000	-	69.660.760.449	520.918.594	88.065.482.043	36.828.038.429	32.237.433.574	-	32.237.433.574	1.794.812.800	30.442.621.074	-	30.442.621.074
		KEMENTERIAN ESDM	66.930.925.369	-	174.237.942.368	82.983.226	242.251.850.963	202.758.049.522	37.493.801.433	86.410.106.298	123.903.909.731	-	123.903.909.731	-	123.903.909.731
	1	Pusdiklat Teknologi Minyak & Gas Bumi	66.930.925.369	-	174.237.942.368	82.983.226	240.251.850.963	202.758.049.522	37.493.801.433	86.410.106.298	123.903.909.731	-	123.903.909.731	-	123.903.909.731
		KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT (091)	59.395.013.075	-	93.801.126.504	153.166.139.579	306.362.279.158	191.249.768.159	61.916.391.421	-	61.916.391.421	-	61.916.391.421	-	61.916.391.421
	1	Pusat Pendayagunaan Perumahan Jakarta	59.395.013.075	-	93.801.126.504	153.166.139.579	306.362.279.158	191.249.768.159	61.916.391.421	-	61.916.391.421	-	61.916.391.421	-	61.916.391.421
		TOTAL PER DEPARTEMEN													
		KEMENTERIAN KEUANGAN (015)	27.385.018.970	-	84.252.159.537	910.936.098	112.548.113.598	114.305.341.080	(1.757.227.482)	-	(1.757.227.482)	-	(1.757.227.482)	5.498.243.688	(7.255.471.070)

www.peraturan.go.id

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN AKTIVITAS
PER 31 DESEMBER TAHUN 2014
(BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN)

No	JENIS LAYANAN	KEMENTERIAN/ESELON I/SATKER BLU	PENDAPATAN					BIAYA	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS KEUNTUNGAN/KERUGI	Keuntungan/Kerugian	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS-POS LUAR BIASA	Pos-pos Luar Biasa	SURPLUS/DEFISIT BRUTO	SETOR KE KAS NEGARA	SURPLUS/DEFISIT BERSIH
			Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan	Hibah	Pendapatan APBN	Pendapatan Usaha Lainnya	JUMLAH PENDAPATAN								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=4+5+6+7)	(9)	(10=8-9)	(11)	(12=10+11)	(13)	(14=12+13)	(15)	(16=14-15)
		KEMENTERIAN PERTANIAN (018)	25.399.396.678	10.199.000	40.964.193.477	449.429.264	66.823.218.617	50.960.795.296	15.862.483.333	802.213.893	16.464.697.226	-	16.464.697.226	-	16.464.697.226
		KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (019)	73.276.394.119		71.821.888.098	1.141.806.085	146.238.088.302	124.628.896.983	21.609.362.320	(84.943.800)	21.524.418.720	-	21.524.418.720	759.983.580	20.764.435.140
		KEMENTERIAN KESEHATAN (024)	8.671.680.323.857	35.192.064.236	3.347.686.117.715	371.812.868.686	12.226.140.350.436	11.232.629.914.578	993.510.435.861	(26.108.862.149)	967.401.573.714	364.906.377	967.766.480.091	24.160.251.892	943.616.228.659
		KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	9.166.595.794.391	221.294.065.763	9.994.729.582.103	3.225.605.288.134	22.598.173.730.371	18.998.316.697.147	3.609.857.043.224	116.192.200.943	3.726.049.244.167	7.037.111.305	3.733.086.355.472	-	3.733.086.355.472
		KEMENTERIAN AGAMA (025)	567.953.215.267	29.807.263.021	1.932.603.904.918	41.735.282.531	2.572.097.665.677	2.300.522.434.236	271.575.231.441	(26.108.862.149)	280.829.452.149	19.350.158	280.810.101.983	-	280.810.101.983
		KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		KEMENTERIAN NEGARA RISTEK (042)	4.881.032.000	-	7.133.591.120	183.523.027	12.198.146.147	11.342.803.392	855.342.755	919.236.123	1.374.577.878	-	1.374.577.878	-	1.374.577.878
		KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (060)	518.637.643.403	-	123.880.549.939	77.798.523.947	720.326.717.289	530.472.190.775	189.854.526.514	(199.623.544)	189.654.901.970	15.049.016.706	204.703.61 7.676	(433.647.522)	205.137.265.198
		BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN	40.536.617.292	-	2.934.675.007	1.141.967.629	44.613.259.929	43.806.273.169	807.086.760	-	707.086.760	-	707.086.760	-	707.086.760
		LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA	7.251.149.693	-	1.585.619.411	741.700.271	9.578.469.282	8.954.441.291	625.027.991	-	625.027.991	-	625.027.991	-	625.027.991
		KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	336.856.949.179	-	529.019.749.298	15.282.893.855	879.158.398.332	729.187.013.893	149.971.384.439	(236.726.839)	149.734.658.600	-	149.734.658.600	1.806.098.500	147.928.560.300
		KEMENTERIAN ESDM	66.930.925.369	-	174.237.942.368	82.983.226	240.251.850.956	202.758.049.522	37.493.801.433	(66.410.106.298)	123.903.909.731	-	123.903.909.731	-	123.903.909.731
		KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	59.395.013.075	-	-	93.801.126.604	153.196.139.679	101.969.748.158	51.226.391.421	-	51.226.391.421	-	51.226.391.421	-	51.226.391.421
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENYEDIAAN	19.364.705.268.269	286.293.681.995	18.309.767.940.981	3.930.687.321.252	39.781.214.112.617	34.439.533.226.508	5.341.680.794.010	161.394.641.182	5.628.228.408.046	22.480.383.954	5.650.650.091.269	31.070.909.629	5.619.579.181.640
2	Pengelolaan Wilayah/Kawasan	**SEKRETARIAT NEGARA (007)**													
		1 Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno	183.293.621.919			36.917.460.585	220.111.082.504	105.044.224.869	115.066.857.635	0	115.066.857.635		115.066.857.635	29.395.737.095	85.721.120.540
		2 Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran	88.089.719.099		-	37.618.874.058	125.707.593.097	145.158.533.203	(19.450.940.106)	0	(19.450.940.106)		(19.450.940.106)	23.751.555.412	(43.202.495.518)
		Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan	416.091.297.204	-	258.819.895.501	156.065.783.977	830.976.897.682	995.711.759.546	(164.734.861.864)	(20.728.937.546)	(185.463.799.410)	-	(185.463.799.410)	-	(185.463.799.410)
		1 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan	416.091.297.204	-	258.819.895.501	156.065.783.977	830.976.897.682	995.711.759.546	(164.734.861.864)	(20.728.937.546)	(185.463.799.410)	-	(185.463.799.410)	-	(185.463.799.410)
		Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan	**820.934.887**	**-**	**297.714.921.594**	**20.428.456**	**298.556.284.937**	**42.777.096.647**	**255.779.188.290**	**-**	**255.779.188.290**	**-**	**255.779.188.290**	**-**	**255.779.188.290**
		1 Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan	820.934.887	-	297.714.921.594	20.428.456	298.556.284.937	42.777.096.647	255.779.188.290	-	255.779.188.290	-	255.779.188.290	-	255.779.188.290
		TOTAL PER DEPARTEMEN													
		1 SEKRETARIAT NEGARA (007)	271.382.940.958	-	-	74.466.334.643	345.818.675.601	250.202.768.072	95.615.917.529	-	95.615.917.529	-	95.615.917.529	53.097.293.507	42.518.624.022
		Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan	416.091.297.204	-	258.819.895.501	156.065.783.977	830.976.897.682	995.711.759.546	(164.734.861.864)	(20.728.937.546)	(185.463.799.410)	-	(185.463.799.410)	-	(185.463.799.410)
		Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan	820.934.887	-	297.714.921.594	20.428.456	298.556.284.937	42.777.096.647	255.779.188.290	-	255.779.188.290	-	255.779.188.290	611.558.376.580	255.779.188.290
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENGELOLAAN	**688.264.573.049**	**-**	**556.534.778.095**	**230.552.597.076**	**1.475.351.858.220**	**1.288.691.614.265**	**273.035.372.136**	**(20.728.937.546)**	**165.931.306.409**	**255.779.188.290**	**165.931.306.409**	**564.655.670.087**	**112.924.012.902**
3	Pengelolaan Dana Khusus	**KEMENTERIAN KEUANGAN (015)**	2.191.531.391.788	-	5.205.011.914	961.884.103	2.197.688.087.805	61.756.004.779	1.579.932.083.026	(2.181.657.835)	1.577.750.425.191	6.482.250.000	1.571.298.175.191	-	1.571.298.175.191
		1 Pusat Investasi Pemerintah	677.652.688.115	-	5.205.011.914	-	682.857.710.030	28.164.334.823	654.693.375.207	-	654.693.375.207	-	654.693.375.207	-	654.693.375.207
		2 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	1.713.978.693.672	-	-	961.884.103	1.714.830.377.775	589.691.999.950	1.125.238.707.825	(2.181.657.835)	1.123.057.049.990	6.482.250.000	1.116.604.799.990	-	1.116.604.799.990
		KEMENTERIAN KEHUTANAN (029)	3.920.387	-	1.505.213.926	221.417.097.027	222.926.231.340	28.164.334.823	194.761.896.517	-	194.761.896.517	-	194.761.896.517	-	194.761.896.517
		1 Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	3.920.387	-	1.505.213.926	221.417.097.027	222.926.231.340	28.164.334.823	194.761.896.517	-	194.761.896.517	-	194.761.896.517	-	194.761.896.517
		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM (033)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1 Biteng Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur	375.995.463.398	-	-	307.370.374.781	683.365.838.179	126.761.231.931	556.604.606.228	-	556.604.606.228	-	556.604.606.228	-	556.604.606.228
		KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1 (8231)	1.926.838.450.138	-	1.822.000.966	382.168.917.930	2.310.829.369.034	719.897.630.962	1.590.931.958.072	-	1.590.931.958.072	-	1.590.931.958.072	-	1.590.931.958.072
		KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)													
		1 Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)	117.235.492.988	-	6.660.196.662	35.872.017.827	159.907.707.477	142.804.102.918	17.103.604.559	-	17.103.604.559	-	17.103.604.559	-	17.103.604.559

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN AKTIVITAS
PER 31 DESEMBER TAHUN 2014
(BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN)

No	JENIS LAYANAN	KEMENTERIAN/ESELON I/SATKER BLU	PENDAPATAN					BIAYA	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS KEUNTUNGAN/KERUGI	Keuntungan/Kerugian	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS-POS LUAR BIASA	Pos-pos Luar Biasa	SURPLUS/DEFISIT BRUTO	SETOR KE KAS NEGARA	SURPLUS/DEFISIT BERSIH
			Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan	Hibah	Pendapatan APBN	Pendapatan Usaha Lainnya	JUMLAH PENDAPATAN								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=4+5+6+7)	(9)	(10=8-9)	(11)	(12=10+11)	(13)	(14=12+13)	(15)	(16=14-15)
		TOTAL PER DEPARTEMEN													
		KEMENTERIAN KEUANGAN (015)	2.191.531.391.788	-	5.205.011.914	961.884.103	2.197.688.087.805	61.756.004.779	1.579.932.083.026	(2.181.657.835)	1.577.750.425.191	6.482.250.000	1.571.298.175.191	-	1.571.298.175.191
		KEMENTERIAN KEHUTANAN (029)	3.920.387	0	1.505.213.926	221.417.097.027	222.926.231.340	28.164.334.823	194.761.896.517	-	194.761.896.517	-	194.761.896.517	-	194.761.896.517
		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM (033)	375.995.463.398	-	-	307.370.374.781	683.365.838.179	126.761.231.931	556.604.606.228	-	556.604.606.228	-	556.604.606.228	-	556.604.606.228
		KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	117.235.492.988	-	6.660.196.662	35.872.017.827	159.907.707.477	142.804.102.918	17.103.604.559	-	17.103.604.559	-	17.103.604.559	-	17.103.604.559
		KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN	1.926.838.450.138	0	1.822.000.966	382.168.917.930	2.310.829.369.034	719.897.630.962	1.590.931.958.072	-	1.590.931.958.072	-	1.590.931.958.072	-	1.590.931.958.072
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENGELOLAAN	4.611.604.718.699	-	15.332.443.468	947.780.091.648	5.574.717.253.806	1.635.383.306.403	3.939.334.046.402	(2.181.657.835)	3.937.152.390.567	6.482.250.000	3.930.700.140.567	-	3.930.700.140.567
		TOTAL SELURUH JENIS PELAYANAN	**24.664.574.560.037**	286.293.681.995	18.881.626.187.634	5.009.019.919.976	**48.831.263.224.642**	37.363.608.148.176	9.664.060.204.548	126.473.946.801	9.831.312.105.023	284.691.821.944	9.647.286.538.364	695.726.579.716	8.963.113.336.109

TOTAL SATKER 141

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN 39
Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Non Struktural dan Yayasan 31 Desember 2014

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
LEMBAGA NON STRUKTURAL
APBN / NON APBN DAN TOTAL ASET
PER 31 DESEMBER 2014
(dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	TOTAL ASET BERSIH	NON APBN	KETERANGAN	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)	11.000.000	-	9.695.546	-	-	9.695.546	1.304.454	-	-	TA 2014	Bagian satker	007
2	Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)	4.000.000	-	-	-	4.000.000	4.000.000	-	38.059.696	97.194.063	TA 2014	APBN/Non APBN	025
3	Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA)	262.448.511	16.359.890	123.943.021	26.964.480	-	167.267.391	95.181.120	496.507.100	-	TA 2014	Satker	034
4	Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	132.700	-	107.316	-	-	107.316	25.384	-	-	TA 2014	Bagian satker	018
5	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL)	3.518.865	-	3.518.865	-	-	3.518.865	0	-	-	TA 2014	Bagian satker	050
6	Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN)	3.058.499	175.600	1.879.896	-	-	2.055.496	3.003	-	-	TA 2014	Bagian satker	055
7	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	25.701.157	4.552.148	18.093.217	549.842	-	23.195.206	2.505.951	489.859	-	TA 2014	Satker	026
8	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI)	15.000.000	5.763.337	8.061.559	-	1.175.104	15.000.000	0	113.957.312	-	TA 2014	Bagian satker	025
9	Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infratruktur Selat Sunda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA 2014	Belum Aktif	033
10	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)	61.762.800	979.604	58.349.533	984.018	-	60.313.155	1.449.645	19.178.690	-	TA 2014	Satker	033
11	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	366.820.000	22.473.230	111.791.305	6.717.179	-	140.981.714	225.838.286	714.869.324	-	TA 2014	Satker	020
12	Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)	-	-	-	-	-	-	-	2.609.392.586	183.433.754	TA 2014	Bukan Satker	025
13	Badan Pengelola KAPET Bandar Aceh Darussalam - Pembinaan Manajemen Pen	2.028.424	-	1.577.743	-	-	1.577.743	450.681	-	-	TA 2014	Bagian satker	033
14	Badan Pengelola KAPET Batui (Palapas) - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.911.016	-	1.463.448	-	-	1.463.448	447.568	-	-	TA 2014	Bagian satker	033
15	Badan Pengelola KAPET Batulicin - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.883.203	-	1.860.941	-	-	1.860.941	22.262	-	-	TA 2014	Bagian satker	033
16	Badan Pengelola KAPET Biak - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	2.209.891	-	754.022	-	-	754.022	1.455.869	-	-	TA 2014	Bagian satker	033
17	Badan Pengelola KAPET Bima - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.376.041	-	1.181.680	-	-	1.181.680	194.361	-	-	TA 2014	Bagian satker	033
18	Badan Pengelola KAPET Bukan (Bangsawantera) - Pembinaan Manajemen Penge	1.815.280	-	1.746.076	-	-	1.746.076	69.204	-	250.000	TA 2014	Bagian satker	033
19	Badan Pengelola KAPET DAS KAKAB - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.853.344	-	1.652.803	-	-	1.652.803	200.541	-	100.000	TA 2014	Bagian satker	033
20	Badan Pengelola KAPET Khatulistiwa - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.019.127	-	960.567	-	-	960.567	58.560	461.860	1.500.000	TA 2014	Bagian satker	033
21	Badan Pengelola KAPET Manado Bitung - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	2.274.903	-	2.034.531	-	-	2.034.531	240.372	-	600.000	TA 2014	Bagian Satker	033
22	Badan Pengelola KAPET Moby - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.583.649	-	1.438.086	-	-	1.438.086	145.563	-	-	TA 2014	Bagian satker	033
23	Badan Pengelola KAPET Parepare - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	2.051.800	-	1.980.849	-	-	1.980.849	70.951	-	-	TA 2014	Bagian satker	033
24	Badan Pengelola KAPET Sasamba - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	2.258.566	-	2.245.797	-	-	2.245.797	12.769	-	-	TA 2014	Bagian satker	033
25	Badan Pengelola KAPET Seram - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.845.292	-	1.832.119	-	-	1.832.119	13.173	-	-	TA 2014	Bagian satker	033
26	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	9.510.920	4.372.280	4.622.125	92.000	-	9.086.405	424.515	973.366	-	TA 2014	Satker	090
27	Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)	900.000	-	884.693	-	-	884.693	15.307	-	-	TA 2014	Bagian satker	088
28	Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA 2014	Tidak aktif	040
29	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS (BAPERTARUM-PNS)	-	-	-	-	-	-	-	5.685.437.415	867.147.492	TA 2014	Bukan Satker	091
30	Badan Promosi Pariwisata Indonesia	27.033.876	-	12.652.063	-	-	12.652.063	14.381.815	-	-	TA 2014	Bagian satker	040
31	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	4.000.000	-	4.000.000	-	-	4.000.000	-	1.362.878	-	TA 2014	Bukan Satker	025
32	Dewan Energi Nasional (DEN)	76.682.668	5.815.153	46.287.381	4.448.478	-	56.551.012	20.131.656	10.142.092	-	TA 2014	Satker	020
33	Dewan Gula Indonesia (DGI)	1.258.900	-	1.040.495	-	-	1.040.495	218.405	-	-	TA 2014	Bagian satker	018
34	Dewan Jaminan Sosial Nasional	15.667.611	-	13.679.726	484.605	-	14.164.331	1.503.280	884.338.626	-	TA 2014	Satker	036
35	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan K	54.000.000	-	-	-	38.007.710	38.007.710	15.992.290	62.049.812	-	TA 2014	Satker	999
36	Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN)	15.000.000	-	14.207.986	386.935	-	14.594.921	405.079	726.827	-	TA 2014	Satker	032
37	Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	6.678.784	-	5.594.869	-	-	5.594.869	1.083.915	-	-	TA 2014	Bagian satker	018
38	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)	35.000.000	-	32.793.634	-	-	32.793.634	2.206.366	-	-	TA 2014	Bagian satker	044
39	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	10.700.000	436.656	8.943.134	140.400	-	9.520.189	1.179.811	1.084.186	-	TA 2014	Satker	035

www.peraturan.go.id

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
LEMBAGA NON STRUKTURAL
APBN / NON APBN DAN TOTAL ASET
PER 31 DESEMBER 2014
(dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	TOTAL ASET BERSIH	NON APBN	KETERANGAN	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI)	35.000.000	-	51.382.109	3.283.308	-	54.665.417	(19.665.417)	13.980.121	-	TA 2014	Satker	043
41	Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional (DEPANRI/LAPAN)	479.608	-	458.329	-	-	458.329	21.279	-	-	TA 2014	Bagian satker	082
42	Dewan Pengurahan Nasional (DEPENAS)	1.008.475	-	870.795	-	-	870.795	137.680	-	-	TA 2014	Bagian satker	026
43	Dewan Pers	18.960.000	2.186.345	12.864.345	9.027	-	15.059.718	3.900.282	1.837.327	-	TA 2014	Satker	059
44	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)	1.065.949	-	953.030	-	-	953.030	112.919	-	-	TA 2014	Bagian satker	010
45	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	86.137.418	2.025.040	26.711.072	700.880	-	20.436.600	6.701.018	3.218.066	-	TA 2014	Satker	007
46	Dewan Riset Nasional (DRN)	3.689.000	-	3.436.081	-	-	3.436.081	252.919	-	-	TA 2014	Bagian satker	042
47	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	10.595.000	212.886	8.424.788	511.753	-	9.149.427	1.445.573	904.098	-	TA 2014	Satker	033
48	Dewan Teknologi Informasi Komunikasi Nasional (DETIKNAS)	1.470.400	-	1.382.099	-	-	1.382.099	88.301	-	-	TA 2014	Bagian satker	055
49	Komisi Banding Merek	261.480	-	187.020	-	-	187.020	74.460	-	-	TA 2014	Bagian satker	013
50	Komisi Banding Paten	134.570	-	120.889	-	-	120.889	13.681	-	-	TA 2014	Bagian satker	013
51	Komisi Hukum Nasional (KHN)	11.519.614	817.000	9.827.229	123.970	-	10.768.199	751.415	1.430.098	-	TA 2014	Satker	007
52	Komisi Informasi Pusat (KIP)	14.366.700	3.577.758	8.070.296	190.275	-	11.838.329	2.528.371	2.567.417	-	TA 2014	Satker	059
53	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG)	1.534.230	-	1.049.050	-	-	1.049.050	485.180	-	-	TA 2014	Bagian satker	043
54	Komisi Kejaksaan Republik Indonesia	12.027.368	2.375.707	3.749.076	4.806.835	-	10.931.618	1.095.750	4.806.835	-	TA 2014	Bagian satker	034
55	Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)	19.631.419	2.418.190	14.577.537	468.200	-	17.463.927	2.167.492	-	-	TA 2014	Bagian satker	034
56	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	8.307.130	3.167.400	3.192.258	523.582	-	6.883.240	1.423.890	-	12.564.689	TA 2014	Bagian satker	074
57	Komisi Nasional Lanjut Usia (KOMNAS LANSIA)	3.265.790	789.000	2.293.445	-	-	3.082.445	183.345	-	-	TA 2014	Bagian satker	027
58	Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis	4.029.795	-	3.842.170	-	-	3.842.170	187.625	-	-	TA 2014	Bagian satker	036
59	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN)	11.165.000	-	-	-	9.227.775	9.227.775	1.937.225	-	52.903.030	TA 2014	Bagian satker	036
60	Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Smt 1 2014	Bagian satker	025
61	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	60.600.000	5.234.126	22.061.522	350.662	-	27.646.310	32.953.690	4.947.476	-	TA 2014	Satker	059
62	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	7.600.000	1.426.500	5.475.166	528.711	-	7.430.377	169.623	1.626.961	-	TA 2014	Satker	047
63	Komite Akreditasi Nasional (KAN)	8.901.614	-	8.439.270	-	-	8.439.270	462.344	-	-	TA 2014	Bagian satker	084
64	Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Buruk untuk Anak (	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA 2014	Tidak aktif	026
65	Komite Ekonomi Nasional (KEN)	4.497.492	-	2.810.954	-	-	2.810.954	1.686.538	-	-	TA 2014	Bagian satker	035
66	Komite Inovasi Nasional (KIN)	3.529.350	-	3.481.230	24.000	-	3.505.230	23.120	-	-	TA 2014	Bagian satker	042
67	Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)	7.235.455	1.934.800	660.451	-	2.965.883	5.561.134	1.674.321	-	-	TA 2014	Bagian satker	012
68	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI)	31.221.040	-	-	-	-	-	31.221.040	-	-	TA 2014	Bagian satker	035
69	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Peri	168.280	-	154.838	-	-	154.838	13.442	-	-	TA 2014	Bagian satker	078
70	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	39.522.435	-	26.785.480	5.623.486	-	32.408.966	7.113.469	30.775.244	-	TA 2014	Satker	022
71	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	22.500.000	-	22.500.000	-	-	22.500.000	-	-	-	TA 2014	Bagian satker	092
72	Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA 2014	Bagian satker	048
73	Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia	30.877.800	-	22.111.853	-	-	22.111.853	8.765.947	-	-	TA 2014	Bagian satker	035
74	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA 2014	Bagian satker	041
75	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)	2.949.443	-	2.747.839	-	-	2.747.839	201.604	415.844	-	TA 2014	Satker	015
76	Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)	250.000	-	179.308	-	-	179.308	70.692	-	-	TA 2014	Bagian satker	084
77	Konsil Kedokteran Indonesia (kki)	28.536.603	-	22.922.907	1.239.754	-	24.162.661	4.373.942	66.674.451	-	TA 2014	Satker	024
78	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	1.320.073	-	1.278.013	-	-	1.278.013	42.060	-	-	TA 2014	Bagian satker	088

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
LEMBAGA NON STRUKTURAL
APBN / NON APBN DAN TOTAL ASET
PER 31 DESEMBER 2014
(dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	TOTAL ASET BERSIH	NON APBN	KETERANGAN	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS TN)	1.656.960	-	1.205.129	-	-	1.205.129	451.832	-	-	TA 2014	Bagian satker	026
80	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	62.583.949	1.698.201	50.832.996	3.539.998	-	56.071.194	6.512.755	60.762.150	-	TA 2014	Satker	007
81	Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)	715.155	-	595.850	-	-	595.850	119.305	-	-	TA 2014	Bagian satker	026
82	Lembaga Sensor Film (LSF)	39.759.314	4.924.210	15.212.542	10.799.244	-	30.935.996	8.823.318	24.766.997	-	TA 2014	Satker	023
83	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA 2014	Tidak Aktif	024
84	Otorita Asahan	8.362.736	-	-	-	6.481.449	6.481.449	1.081.287	1.216.472.016	10.310.070	TA 2014	APBN/Non APBN	019
85	Sekretariat Pengadilan Pajak	51.283.202	25.581.755	11.938.006	10.736.752	-	48.256.514	3.026.688	16.611.913	-	TA 2014	Satker	015
86	SKK MIGAS	-	-	-	-	-	-	-	(459.059.214)	1.837.717.179	TA 2014	Bukan Satker	
87	Staf Khusus Presiden	25.760.501	-	20.770.452	-	-	20.770.452	4.990.049	-	-	TA 2014	Bagian satker	114
88	Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-	67.508.276	15.291.964	25.801.797	689.873	10.984.570	52.768.203	14.740.073	51.815.240	-	TA 2014	2 Satker	007
89	Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat	87.149.157	26.907.969	43.694.613	-	-	70.602.582	16.546.575	2.533.536	-	TA 2014	Satker	007
90	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)								1.822.989.980	2.051.426.713	TA 2014	Bukan Satker	
	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	2.408.282.840				2.128.207.226	2.128.207.226	280.075.614	459.077.168	-	TA 2014	Satker	999
	JUMLAH	**4.230.405.439**	**162.396.656**	**964.926.868**	**85.016.747**	**2.200.999.716**	**3.413.339.978**	**817.065.461**	**13.968.186.251**	**5.115.146.999**			

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN YAYASAN MILIK NEGARA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT BERSIH
PER 31 DESEMBER 2014
(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Badan Hukum Milik Negara	Pendapatan Operasional	Pendapatan Non Operasional	Total Pendapatan	Beban Operasional	Beban Non Operasional	Total Beban	Surplus (Defisit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(5)-(8)
1	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan	87.942.149	6.590.286	94.532.435	86.714.284	6.674.927	93.389.210	1.143.225
2	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	4.681.186	628.680	5.309.866	5.360.806	704.196	6.065.002	(755.136)
	TOTAL	92.623.335	7.218.965	99.842.301	92.075.090	7.379.123	99.454.212	388.088

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN 40
Rekapitulasi Hasil Penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina
31 Desember 2014

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/CINA
per 31 DESEMBER2014

Tim Asistensi Daerah (TAD)	BMN	BMD	BMN Sebagian*	BMD Sebagian**	BMN dan BMD Sebagian***	BMD Sebagian dan BMN Sebagian****	Dilepaskan Kepada Pihak Ketiga	Jumlah
I	0	3	0	0	0	0	0	3
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	2	0	0	0	0	0	2
IV	0	6	0	0	0	0	0	6
V	0	0	0	0	0	1	0	1
VI	0	0	0	2	0	0	0	2
VII	0	1	0	0	0	0	0	1
VIII	1	5	0	1	0	0	0	7
IX	0	4	1	0	0	0	0	5

www.peraturan.go.id

Tim Asistensi Daerah (TAD)	BMN	BMD	BMN Sebagian*	BMD Sebagian**	BMN dan BMD Sebagian***	BMD Sebagian dan BMN Sebagian****	Dilepaskan Kepada Pihak Ketiga	Jumlah
X	0	5	0	0	0	0	1	6
XI	0	4	0	2	0	0	0	6
XII	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV	1	0	0	0	0	0	0	1
XV	0	1	0	0	0	0	0	1
XVI	0	1	2	2	0	0	0	5
XVII	1	4	0	0	0	0	0	5
∑	**3**	**36**	**3**	**7**	**0**	**1**	**1**	**51**

Keterangan:

* dan **: Barang Milik Negara Sebagian dan/atau Barang Milik Daerah Sebagian adalah pemantapan status hukum ABMA/C menjadi BMN dan/atau BMD secara sebagian, dimana penyelesaiannya hanya sebagian dari luas tanah yang tercantum pada Lampiran PMK 188/PMK.06/2008 dan untuk sisanya akan diselesaikan kemudian setelah diusulkan penyelesaiannya kembali oleh Tim Asistensi Daerah. Sehingga pada akhirnya untuk 1 ABMA/C dapat diterbitkan 2 atau lebih Keputusan Menteri Keuangan.

***: BMN dan BMD Sebagian adalah pemantapan status hukum ABMA/C dengan cara dimantapkan status hukumnya menjadi BMN Sebagian dan BMD dan/atau BMN dan BMD Sebagian. Sehingga pada akhirnya untuk 1 ABMA/C dapat diterbitkan 2 Keputusan Menteri Keuangan.

****: BMD Sebagian dan BMN Sebagian adalah pemantapan status hukum ABMA/C dengan cara dimantapkan status hukumnya menjadi BMD Sebagian dan BMN Sebagian. Sehingga pada akhirnya untuk 1 ABMA/C dapat diterbitkan 2 atau lebih Keputusan Menteri Keuangan.

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/CINA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

Tim Asistensi Daerah (TAD)	menjadi BMN	menjadi BMD	BMN Sebagian	BMD Sebagian	BMN dan BMD Sebagian	BMD Sebagian dan BMN Sebagian	Dilepaskan kepada Pihak Ketiga	Dikeluarkan dari Lampiran PMK 188	Juml	Temuan Baru ABMA/C
I	0	6	0	0	1	0	0	0	7	0
II	9	20	1	0	0	0	0	0	30	0
III	4	9	0	2	0	0	0	0	15	0
IV	1	13	0	0	0	0	2	0	16	0
V	4	3	0	0	0	1	0	0	8	0
VI	0	1	0	3	0	0	0	0	4	0
VII	3	5	0	1	0	0	0	0	9	3
VIII	6	29	0	1	0	0	0	0	36	0
IX	3	21	1	0	2	0	1	0	28	1
X	10	33	0	2	1	0	2	0	48	1
XI	0	25	0	7	0	0	0	0	32	0
XII	5	2	0	0	0	0	0	0	7	0
XIII	0	3	0	0	0	0	0	2	5	0
XIV	7	4	0	0	0	0	0	0	11	0
XV	0	14	0	1	0	0	0	0	15	0

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/CINA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

Tim Asistensi Daerah (TAD)	menjadi BMN	menjadi BMD	BMN Sebagian	BMD Sebagian	BMN dan BMD Sebagian	BMD Sebagian dan BMN Sebagian	Dilepaskan kepada Pihak Ketiga	Dikeluarkan dari Lampiran PMK 188	Juml	Temuan Baru ABMA/C
XVI	1	6	2	2	0	0	0	0	11	0
XVII	3	6	0	0	0	0	0	0	9	0
∑	**56**	**200**	**4**	**19**	**4**	**1**	**5**	**2**	**291**	**5**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN 41
Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan BPK atas LKPP Tahun 2013

MONITORING RENCANA TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2013

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Temuan Sistem Pengendalian Intern						
1.	Sistem Pengendalian Penerimaan dan Pengeluaran Negara Belum Memadai yang Diantaranya Berdampak pada Validitas Penerimaan Perpajakan, PNBP dan Belanja Bagi Hasilnya, Kas di Bendahara Pengeluaran,serta Masih Terdapat Suspen Belanja Negara **(Temuan Tahun**	a. Memperbaik peraturan dan Sistem Informasi Penerimaan dan Pengeluaran Negara untuk menjamin validitas pertanggungjawaban LKPP dan LKKL khususnya terkait pencatatan dan rekonsiliasi SAI-SAU Belanja, PNBP, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Pembiayaan;	1. DJPB 2. DJBC	Pemerintah c.q. Menteri Keuangan akan: 1. Meningkatkan kualitas rekonsiliasi mulai tingkat satker sampai dengan K/L dengan Ditjen Perbendaharaan, melalui: a). Mengikutsertakan file data GL SAI hasil rekonsilasi antara satker dengan KPPN pada saat file kiriman KPPN ke Kantor Pusat DJPB sehingga Dit. APK dapat memonitor proses rekonsiliasi di tingkat satker dan KPPN. b). Memberikan kesempatan kepada K/L untuk dapat melakukan rekonsiliasi setiap saat secara mandiri (e-rekon) dengan Dit.APK dengan memberikan fasilitas rekonsiliasi mandiri tanpa K/L mengunduh data SAU, namun hanya sebagai monitoring	1. Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dalam rangka mengimplementasikan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2) dan melaksanakan tata cara penyetoran penerimaan Negara dengan menggunakan *billing system*. 2. Melalui sistem MPN G2 ini diharapkan akan menjadi lebih valid dan akuntabel. 3. Penyebab suspen dalam LKBUN 2013 telah dapat diidentifikasi. Namun demikian, hingga dilakukan lagi pembandingan ulang atas data SAI dan SAU. 4. Beberapa langkah mitigasi lainnya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan untuk memperkecil selisih dalam rekonsiliasi	Masih dalam proses

www.peraturan.go.id

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2013)			rekonsiliasi c) Akan disusun Peraturan Dirjen Perbendaharaan yang mengakomodasi langkah-langkah sebagaimana butir a dan b di atas	pencatatan antara lain: a) Melakukan koreksi di tingkat Pusat agar data yang salah dapat segera diperbaiki/disesuaikan b) Membuat Aplikasi koreksi (target selesai per 31 Desember 2014) c) Melakukan Reklasifikasi pengembalian belanja yang tidak diakui K/L menjadi PNBP BUN.	
		b. segera menyelesaikan PNBP SDA yang masih belum dibagihasilkan; dan		Mengatur mekanisme untuk menyelesaikan PNBP SDA yang masih belum dibagihasilkan sehingga dapat segera dibagi hasilkan.	Pemerintah telah membuat Mekanisme untuk penyelesaian PNBP yang belum dibagihasilkan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.07/2014 tentang Alokasi Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sampai Dengan Tahun Anggaran 2013. Sebelumnya Pemerintah juga telah menerbitkan PMK Nomor 47/PMK.07/2014, 86/PMK.07/2014, 88/PMK.07/2014, dan 89/PMK.07/2014 untuk pembayaran alokasi dana bagi hasil PNBP SDA.	**selesai**

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		c. berkoordinasi dengan kementerian teknis yang terkait dengan PNBP SDA untuk mengatur mekanisme pengelolaan PNBP SDA agar dapat menjamin validitas nilai PNBP SDA yang disajikan oleh kementerian teknis dan BUN.		Menerapkan aplikasi SIMPONI dalam penyetoran PNBP SDA sehingga tidak terjadi perbedaan data setoran PNBP SDA antara kementerian teknis dengan BUN.	Menteri Keuangan telah berkoordinasi dengan Kementerian terkait dan menerapkan Aplikasi SIMPONI untuk menjamin validitas nilai PNBP SDA yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Penerapan SIMPONI adalah termasuk bagian yang diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik. Dengan SIMPONI diharapkan validitas nilai PNBP SDA dapat lebih terjamin.	**Selesai**
2.	Penggunaan Tarif Pajak Dalam Perhitungan PPh Migas dan Perhitungan Bagi Hasil Migas Tidak Konsisten Sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara Minimal Sebesar USD145,713,443.44 ekuivalen Rp1,78	Menteri ESDM agar berkoordinasi dengan Kepala SKK Migas untuk melakukan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty* untuk memberikan kepastian bagian negara dari pelaksanaan PSC.	1. DJP 2. SKK Migas 3. Kem. ESDM	1. Menteri Keuangan telah menyampaikan surat kepada Menteri ESDM nomor SR-775/MK.01/2013 tanggal 31 Desember 2013, yang pada intinya merekomendasikan untuk segera dilakukan renegosiasi Kontrak Bagi Hasil/PSC. 2. Kementerian ESDM akan berkoordinasi dengan SKK Migas untuk membahas amandemen PSC sesuai dengan rekomendasi BPK. KKKS yang menggunakan *Tax treaty*	Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan SKK Migas telah melakukan koordinasi melalui forum rapat ataupun media surat menyurat untuk menyelesaikan permasalahan amandemen PSC. Permasalahan Amandemen PSC saat ini masih dalam proses perkara di Pengadilan Pajak. KKKS bersedia melakukan amandemen PSC berdasarkan hasil keputusan pengadilan pajak tersebut. Beberapa berntuk koordinasi yang dilakukan antara lain: 1. SKK Migas telah mengirim surat	Masih dalam proses

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Impor. **(Temuan Tahun 2013)**			sisb untuk melakukan renegosiasi amandemen PSC	kepada ESDM nomor SRT-0547/SKK00000/2014/S4 tanggal 13 Agustus 2014 yang meminta arahan dan pengkoordinasian dari Menteri ESDM terkait amandemen PSC terhadap KKKS yang menerapkan *tax treaty*. 2. Telah diadakan rapat tanggal 6 Agustus 2014 di Direktorat Jenderal Migas yang menyatakan bahwa mengingat penggunaan *tax treaty* merupakan perkara yang dilangani oleh Pengadilan Pajak, maka pelaksanaan amandemen KKS sesuai rekomendasi BPK disinkronkan dengan putusan pengadilan pajak. 3. SKK Migas bersama dengan KKKS telah menyelenggara kan Forum Pajak tanggal 15-16 Oktober 2014 yang antara lain menghasilkan rumusan langkah–langkah penyelesaian isu *tax treaty* melalui: a) penyamaan persepsi dengan *stakeholder* terkait atas substansi P3B dalam hubungannya dengan	

www.peraturan.go.id

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					b) Permintaan kepada DJP untuk tidak menerbitkan SKP baru dan melanjutkan Mutual Agreement Prosedur (MAP) jika DJP menganggap bahwa ini adalah masalah kontraktual maka sebagai konsekuensinya SKP harus dibatalkan.	
3.	Ketidakjelasan Basis Regulasi Terkait Metode Perhitungan *Witholding Tax* atas Empat Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan Mengakibatkan Ketidakpastian Potensi Penerimaan Negara **(Temuan Tahun 2013)**	Menteri Keuangan agar menetapkan secara jelas mengenai basis regulasi terkait metode perhitungan *witholding tax* atas WP Kontrak Karya sebelum Tahun 2013 dan menyelaraskan ketentuan antara Kontrak Karya dengan UU dan aturan pelaksanaannya.	1. DJP 2. BKF	Menteri Keuangan akan memberikan penegasan mengenai metode perhitungan *witholding tax* atas penghasilan pihak lain yang terikat dengan Wajib Pajak Kontrak Karya/Kontrak Pengusahaan Pertambangan sebelum tahun 2013 (sebelum berlakunya PMK 39/PMK.01/2013).	Penerapan *witholding tax* terhadap Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Karya masih dalam tahap kajian di BKF.	Masih dalam proses

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	Terdapat Keterlambatan Pemindahbukuan ke Rekening KUN Atas Penerimaan Negara dari Pembayaran PPh Migas, Bonus Produksi, dan Transfer Material yang Disetor Melalui Rekening Migas Sebesar USD2,367,744,259.75 ekuivalen Rp28,86 Triliun **(Temuan Tahun 2013)**	Menteri Keuangan agar memperbaiki prosedur pembayaran PPh Migas, Bonus Produksi dan Transfer Material agar dapat diakui langsung sebagai pendapatan negara dan ditatausahakan secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	1. DJA 2. DJP	1. Pemerintah c.q. DJA akan menyelesaikan revisi PMK Nomor 113/PMK.02/2009 jo PMK Nomor 138/PMK.02/2013 tentang Perubahan atas PMK Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi. Dalam revisi PMK tersebut antara lain akan diatur bahwa PPh migas, bonus, dan transfer material tidak lagi menjadi bagian penerimaan dalam Rekening Migas. 2. Pemerintah c.q. DJA dan DJP akan melakukan revisi PMK Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tatacara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Perhitungan PPh untuk Keperluan Pembayaran PPh Migas berupa Volume Migas. Revisi PMK 79 Tahun 2012 tersebut yang antara lain mengatur pembayaran PPh migas melalui Rekening KUN.	Pemerintah dh. Menteri Keuangan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:. 1. Merevisi PMK 79/PMK.02/2012 yang saat ini sedang dalam proses penetapan 2. Selain itu, Menteri Keuangan akan segera menyusun revisi PMK Nomor 138/PMK.02/2013 tentang Perubahan atas PMK nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi. Materi PMK akan diselaraskan dengan materi revisi PMK 79 Tahun 2012 yang saat ini dalam proses penetapan.	Masih dalam proses
5.	PPh DTP SBN sebesar Rp3,11	Pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar:	1. DJPU 2. DJP	1). DJPU c.q. Direktorat Surat Utang Negara (SUN) telah menyampaikan	1. Dengan mempertimbangkan *cost and benefit*, rekomendasi BPK agar Pemerintah dhi. Menteri Keuangan	**selesai**

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Triliun Dihitung Berdasarkan Dokumen Sumber yang Kurang Memadai **(Temuan Tahun 2013)**	a. memerintahkan Dirjen Pengelolaan Utang untuk melakukan monitoring atas transaksi SBN Valas Internasional dan		surat kepada Direktur Potensi, Kepatuhan Dan Penerimaan Pajak melalui surat Direktur SUN, nomor S-257/PU.3/2014 tanggal 23 Juni 2014 perihal Tanggapan atas Temuan dan Rekomendasi BPK Terhadap Pelaksanaan PPh DTP SBN Valas Internasional. 2). Berdasarkan surat tersebut disampaikan bahwa rekomendasi BPK untuk melakukan monitoring atas transaksi SBN Valas tidak bisa untuk dilakukan Hal ini disebabkan adanya pertimbangan sebagai berikut: a). Sebagaimana yang berlaku umum (*best practice*) di pasar internasional, SBN valas ditatausahakan oleh Bank of New York Mellon (Amerika Serikal) bukan institusi dalam negeri (Bank Indonesia) sebagaimana yang berlaku pada penerbitan	melakukan monitoring atas transaksi SBN Valas internasional, sangat sulit atau tidak mungkin untuk dilaksanakan 2. Monitoring atas transaksi SBN valas sulit dilakukan karena: a. Untuk mengetahui *bona fodder* ataupun *beneficial owner* SBN valas pada satu titik waktu sulit dilakukan mengingat SBN valas aktif diperdagangkan di pasar sekunder internasional dan terdapat restriksi (aturan Global Clearing System) yang tidak memungkinkan penata usaha SBN valas untuk men-*disclose* detail investor SBN valas. b. Langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk mengidentifikasi investor SBN valas adalah dengan menggunakan jasa surveyor (perlu biaya sendiri), namun hasilnya tidak mungkin 100% benar. c. Survey hanya dilakukan di satu titik waktu tertentu sedangkan SBN valas internasional aktif diperdagangkan di pasar sekunder; d. Tidak ada kewajiban bagi investor	

www.peraturan.go.id

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				SBN Rupiah. Bank of New York Mellon pada dasarnya tidak memiliki informasi detil investor yang memegang SBN valas dimaksud. b). Untuk memonetisasi kepemilikan investor atas SBN valas Indonesia pada titik tertentu sulit dilakukan karena SBN valas aktif diperdagangkan di pasar sekunder internasional sehingga perpindahan kepemilikan alas SBN tersebut terjadi dengan cepat. Selain itu, nature pasar global memiliki banyak restriksi serta aturan *global clearing system* yang tidak memungkinkan bagi penata usaha SBN Valas untuk men-disclose detil investor SBN valas; c). Dalam mekanisme pembayaran bunga dan pokok atas SBN valas, belum bisa diketahui	untuk menyajikan portofolio investasinya tidak mengungkap kepemilikannya atas SBN valas. Kesimpulannya rekomendasi ini tidak dapat atau sangat sulit dimonetisasi karena biasanya biaya yang harus dikeluarkan yang tidak sebanding dengan manfaat yang akan diperoleh pemerintah.	

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				secara pasti siapa *beneficial owner* dari SBN valas tersebut. Hal ini dikarenakan *Fiscal Agent* selaku agen pembayar kupon dan pokok SBN valas pada dasarnya tidak memiliki informasi detil investor, mereka hanya membayarkan full amount kepada DTC (*Depository Trust and Clearing Corporation*) dan DIG akan membayarkan kepada *participant-nya full amount*. Di bawah participant DTC masih terdapat beberapa layer lagi hingga sampai kepada *beneficial owner* dari SBN valas; d). *Position report* yang diterbitkan oleh DTC (diperlukan biaya untuk memperoleh report tersebut) hanya memuat informasi mengenai kustodian yang digunakan oleh investor, namun tidak memuat detil investor. Langkah yang dapat dilakukan		

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				oleh pemerintah untuk mengidentifikasi investor SBN valas adalah dengan menggunakan jasa surveyor (diperlukan biaya tersendiri). Namun demikian pada prinsipnya hasil identifikasi ini tidak dapat menyajikan infomasi secara akurat (100% benar) karena hanya dilakukan pada satu titik waktu saja. Selain itu, tidak terdapat aturan/kewajiban bagi investor di pasar internasional untuk menyajikan portofolio investasinya, memberikan keleluasaan bagi investor untuk memilih mengungkapkan atau tidak di saat dilakukannya survey dimaksud; e). Dalam menghitung rencana penerimaan PPh DTP dan beban subsidi PPh DTP alas SBN Valas Internasional, Pemerintah menggunakan pendekatan tarif		

www.peraturan.go.id

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				pajak maksimal (20%) dikalikan dengan proyeksi biaya bunga SBN Valas yang akan dibayar tahun depan. Adapun untuk realisasi penerimaan PPh DTP dan beban subsidi PPh DTP, Pemerintah menggunakan pendekatan tarif pajak maksimal (20%) dikali dengan realisasi biaya bunga SBN Valas. f). Adapun terkait dengan realisasi beban subsidi PPh DTP sebesar Rp3.601.373.287.002 yang melampaui pagu DIPA tahun anggaran 2013 sebesar Rp3.114.900.000.000 sebagaimana tercantum dalam LHP BPK, hal ini diakibatkan oleh realisasi nilai tukar USD/IDR sepanjang tahun 2013 rata-rata sebesar Rp10.401/USD melampaui asumsi yang ditetapkan dalam APBN 2013 (Rp9.000/USD) maupun APBN-P		

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				TA 2013 (Rp9.600/USD)		
		b. memerintahkan kepada Dirjen Pajak untuk meningkatkan koordinasi dengan Dirjen Pengelolaan Utang terkait dengan perhitungan PPh DTP Pasal 26 atas SBN Valas Internasional	DJP	DJP akan berkoordinasi dengan DJPU dan BKF terkait penerapan tarif tunggal 20% untuk perhitungan PPh DTP Pasal 26 atas SBN Valas internasional	DJP dan DJPU telah berkoordinasi dengan kesimpulan bahwa dengan mempertimbangkan *cost and benefit*, maka rekomendasi BPK agar Pemerintah dhi. Menkeu melakukan monitoring atas transaksi SBN Valas Internasional, sulit untuk dilakukan. Monitoring atas transaksi SBN valas sulit dilakukan karena alasan sebagaimana di atas.	**selesai**
6.	Pengelolaan PBB Migas Belum Didukung dengan Data yang Valid Sehingga Penetapan Nilai PNBP SDA Migas dan PBB Migas Tidak Akurat **(Temuan Tahun 2013)**	a. Menteri Keuangan melakukan penyempurnaan atas PMK Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan PBB sektor pertambangan minyak bumi, panas bumi dan gas bumi, dalam hal: 1) Verifikasi atas SPOP oleh DJA dan SKK Migas untuk menjamin akurasi	1. DJP 2. SKK Migas	Menteri Keuangan akan melakukan penyempurnaan PMK Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi;	Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 26/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas PMK Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi.	**selesai**

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		perhitungan SPPT dan 2) Validasi keberadaan dan status KKKS oleh SKK Migas dan penyampaian data hasil validasi kepada DJP.				
		b. Menteri Keuangan dhi. Dirjen Pajak segera memastikan akurasi dan menetapkan SPPT yang telah diverifikasi ulang oleh SKK Migas serta mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan dalam penatausahaan PBB Migas;	DJP	Menteri Keuangan dhi. Dirjen Pajak akan: 1). Menagihkan kembali SPPT yang tidak mengalami perubahan dan SPPT hasil pembetulan ke DJA.; 2). Melakukan koreksi piutang PBB Migas atas SPPT pembetulan dan SPPT yang dibatalkan; 3). menyelesaikan proses pembetulan atau pembatalan SPPT yang belum tuntas terhadap SPOP yang telah diklarifikasi oleh KKKS. 4). Terkait pengembangan sistem informasi penatausahaan PBB Migas, DJP: a. Akan mengadakan rapat internal secara berkala membahas	Terkait rekomendasi huruf b: 1. Dari 58 SPPT PBB Migas tahun 2013 yang diverifikasi, terdapat penambahan 3 SPPT yang dibatalkan, sehingga posisi terakhir sebagai berikut: • 22 SPPT dilakukan proses pembatalan; • 6 SPPT dilakukan proses pembetulan; • 17 SPPT tidak mengalami perubahan ketetapan; dan • 13 SPPT yang masih dalam proses pembetulan atau pembatalan.	Masih dalam proses.

www.peraturan.go.id

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				penyusunan URS (*User Requirement Specification*); b. menyusun draft Kak URS dan meminta persetujuan pihak terkait; c. membuat sistem aplikasi PBB Migas berdasarkan URS d. melakukan uji coba penggunaan aplikasi PBB Migas; e. menerapkan aplikasi PBB Migas yang direncanakan mulai berlaku paling cepat tahun pajak 2016.	2. Terhadap 6 SPPT Pembetulan dan 17 SPPT yang tidak mengalami perubahan dengan total ketetapan Rp955.080.410.492,00 yang telah diajukan pengembalian kembali ke DJA, telah dibayar sebesar Rp323.149.032.492,00, sesuai surat Dirjen Anggaran nomor S-1649/AG/2014 tanggal 4 September 2014 dan surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-5918/PB/2014 tanggal 15 September 2014. 3. Terkait pengembangan sistem informasi penatausahaan PBB Migas: a) Pengembangan sistem informasi penatausahaan PBB Migas yang sesuai dengan PMK Nomor 15/PMK.03/2012 telah dilakukan pada tahun 2013 dan telah selesai dilakukan pada triwulan IV tahun 2013; b) Namun demikian, sistem informasi tersebut tidak dapat diimplementasikan dikarenakan pada saat akan dilaksanakan	

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					kegiatan implementasi, PMK nomor 15/PMK.03/2012 telah diganti oleh PMK nomor 78/PMK.03/2013; c) Adapun pengembangan sistem informasi penatausahaan PBB migas yang sesuai dengan PMK nomor 78/PMK.03/2013 akan dikembangkan sebagai bagian dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak modul PBB (SIDJP Modul PBB); d) Saat ini (tahun 2014), pengembangan SIDJP Modul PBB baru mencakup dua sektor, yaitu sektor pertambangan minerba dan perkebunan; e) Tahap analisis dan perancangan SIDJP Modul PBB sektor Pertambangan Migas baru akan dimulai pada awal tahun 2015; f) Tahap analisis dan perancangan SIDJP Modul PBB akan menghasilkan dokumen *User Requirements Specification* (URS) dan *System Requirement*	

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Specification (SRS); 1. Proses konfirmasi alamat KKKS Eksplorasi telah dilakukan secara optimal dan melalui koordinasi dengan Divisi PRKREL SKK Migas. Namun demikian SKK Migas hanya pada kapasitas membantu proses konfirmasi. Pengawasan KKKS sebagai Wajib Pajak selanjutnya akan dilakukan oleh Ditjen Pajak Kemenkeu;	
		c. Kepada SKK Migas segera memastikan status dan keberadaan KKKS yang tidak menyampaikan SPOPP; dan	SKK Migas	SKK Migas akan melakukan validasi keberadaan 20 KKKS yang tidak menyampaikan SPOP PBB Migas (untuk ketiganya akan dilaporkan kepada KESDM dan Kemenkeu).	2. SKK Migas akan secara kontinyu membantu proses validasi keberadaan KKKS yang tidak menyampaikan SPOP PBB Migas berdasarkan permintaan dari Kementerian Keuangan atau Kementerian ESDM.	**Masih dalam proses**
		d. Menyempurnakan metode perhitungan nilai bumi dan NJOP *offshore* dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan azas keadilan.	DJP	Pemerintah akan melakukan penyempurnaan metode perhitungan nilai bumi dan NJOP *offshore* dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan azas keadilan dalam produk hukum.	Terkait rekomendasi huruf d, Pemerintah telah melakukan kajian mengenai metode penentuan nilai untuk areal *offshore* yang digunakan untuk perhitungan PBB Migas Tahun 2015.	**Masih dalam proses**

www.peraturan.go.id

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	Pemerintah Tidak Dapat Segera Menerima Hasil Penjualan Minyak dan Gas Bagian Negara Sebesar USD296,397,672.91 dan Rp5,12 Triliun, dan Tidak Dapat Mengukur Secara Andal Posisi Utang Fee Penjualan Kepada PT Pertamina (Persero) **(Temuan Tahun 2013)**	Menteri Keuangan, bersama Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas sesuai tugas dan fungsinya agar a. Menetapkan payung hukum yang diperlukan dalam upaya pengamanan penerimaan negara dari hasil penjualan migas bagian Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang didalamnya termasuk antara lain mekanisme offseting hasil penjualan migas dengan DMO Fee KKKS;	1. DJA 2. SKK Migas	Terkait rekomendasi tersebut a Pemerintah c.q. DJA telah mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait (Kementerian ESDM, Sekjen Kementerian Keuangan, dan SKK Migas) pada tanggal 18 Agustus dan 18 September 2014 dengan simpulan rapat sebagai berikut: a. Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Pasal 31 ayat (5) UU Migas tersebut di atas adalah PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas, karena didalam Konsideran Menimbang PP No.35/2004 dimaksud mengacu a.l. pada Pasal 31 ayat (5) UU Migas yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai penetapan besarnya bagian negara, pungutan negara, dan bonus serta tata cara penyetorannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. b. Namun demikian, meskipun didalam PP No. 35/2004 telah mengatur kegiatan usaha hulu migas, dalam Pasal 54 PP No. 35/2004 dimaksud	1. Pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan SKK Migas) saat ini sedang menyelesaikan penyusunan RPP mengenai penetapan besaran bagian negara, pungutan negara, dan bonus, serta tata cara penyetorannya yang merupakan amanat PP 35 Tahun 2004. PP 35 Tahun 2004 merupakan pelaksanaan dari amanat UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 2. Pada tanggal 22 Desember 2014 telah diadakan rapat pembahasan program penyusunan PP dan Perpres di bawah Badan Pembinaan Hukum Nasional. Telah disepakati bahwa inisiator penyusunan RPP dimaksud adalah Kementerian Keuangan. RPP tersebut akan dimuat dalam daftar peraturan prioritas yang akan disusun Pemerintah tertuang dalam Rancangan Perpres mengenai Prolegnas Prioritas Tahun 2015. 3. Terkait dengan ketentuan mengenai mekanisme *offset* hasil penjualan migas dan DMO fee dapat dijelaskan	Masih dalam proses

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				menyebutkan kembali bahwa ketentuan mengenai penetapan besarnya bagian negara pungutan negara, dan bonus serta tata cara penyetorannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah tersendiri. Terkait dengan ketentuan mengenai mekanisme *offset* hasil penjualan migas dan DMO fee dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Telah terbit PMK 139 Tahun 2013 yang merupakan pengganti PMK 56 Tahun 2005 yang mengatur tata cara pembayaran DMO Fee, *under* dan *over lifting* dari kegiatan usaha hulu migas. PMK tersebut mengatur ketentuan mengenai mekanisme *offsetting* DMO *fee* maupun *underlifting* kontraktor dengan kewajiban *over lifting* kontraktor yang melibatkan pemerintah dengan pihak ketiga (KKKS Migas). b. Sedang disusun revisi PMK 64 Tahun 2005 yang mengatur ketentuan mengenai tata cara pembayaran	sebagai berikut: a. Telah terbit PMK 139 Tahun 2013 yang merupakan pengganti PMK 56 Tahun 2005 yang mengatur tata cara pembayaran DMO. b. Fee *under* dan *over lifting* dari kegiatan usaha hulu migas. PMK tersebut mengatur ketentuan mengenai mekanisme *offsetting* DMO *fee* maupun *underlifting* kontraktor dengan kewajiban *over lifting* kontraktor yang melibatkan pemerintah dengan pihak ketiga (KKKS Migas). c. Akan disusun RPP mengatur mengenai penetapan besaran bagian negara, pungutan negara dan bonus2 serta tata cara penyetorannya (Sudah diajukan dalam PROLEGNAS PP 2015). Selain itu, BPK dalam rekomendasinya meminta agar pemerintah menetapkan payung hukum yang diperlukan dalam upaya pengamanan penerimaan	

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				reimbursement PPN dan PPnBM dari kegiatan usaha hulu migas RPMK tersebut saat ini dalam proses penetapan Menteri Keuangan. Di dalam RPMK tersebut dimuat ketentuan mengenai *offsetting/reimbursement* PPN dengan kewajiban KKKS Migas kepada Pemerintah.	negara dan hasil penjualan migas bagian Negara termasuk didalamnya adalah mekanisme implementasinya. Untuk hal ini telah ditetapkan PMK-218/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (Reimbursement) PPN atau PPN dan PPnBM atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Kontraktor Usaha Hulu Migas. Adapun untuk implementasi PMK-218/PMK.02/2014 tersebut pemantauannya dilakukan oleh pada pihak-pihak terkait.	
		b. Mengatur dan menetapkan sistem dan prosedur pembayaran hasil penjualan migas bagian negara beserta standar dokumen, kodefikasi jenis pembayaran, dan mekanisme pemberian sanksi terhadap	DJA	Pemerintah c.q. DJA telah melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan dokumen standar dan kodifikasi jenis pembayaran bersama-sama dengan instansi terkait (Bank Indonesia, dan SKK Migas) yaitu pada tanggal 4 Juni, 19 Juni, dan 14 Agustus 2014 yang antara lain disepakati bahwa kodifikasi jenis pembayaran akan memuat angka-angka	Pemerintah telah menindaklanjuti temuan ini, dengan rincian sebagai berikut: Sistem dan prosedur pembayaran hasil penjualan migas pada dasarnya telah diatur dalam PMK 139 Tahun 2013 yang merupakan pengganti PMK 56 Tahun 2005 yang mengatur tata cara pembayaran DMO Fee, *under* dan *over lifting* dari kegiatan usaha hulu migas. PMK tersebut mengatur ketentuan mengenai mekanisme	**Masih dalam proses**

www.peraturan.go.id

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		KKKS/Penjual Migas bagian negara yang tidak tertib menyetorkan hasil penjualan migas bagian negara dalam rangka meminimalkan pengawasan tertib administrasi, dan pengamanan penerimaan negara dari hasil penjualan migas bagian negara;		yang merepresentasikan informasi mengenai nama KKKS, nama buyer, jenis pengiriman (domestik atau ekspor), periode lifting (minyak atau gas), dan jenis pembayaran (pajak atau PNBP). Selanjutnya SKK Migas akan menerbitkan surat edaran kepada KKKS migas yang mewajibkan KKKS migas untuk menggunakan kode-kode tertentu untuk setiap penyetoran ke rekening migas. Penerapan kodifikasi ini menurut rencana akan efektif dilaksanakan pada tahun 2015.	*offsetting* DMO fee maupun *underlifting* kontraktor dengan kewajiban *over lifting* kontraktor yang melibatkan pemerintah dengan pihak ketiga (KKKS Migas). Disamping itu, Pemerintah telah menerbitkan PMK nomor 216/PMK.02/2014 yang menggantikan PMK 64 Tahun 2005 yang mengatur ketentuan mengenai tata cara pembayaran *reimbursement* PPN dan PPnBM dari kegiatan usaha hulu migas. Di dalam PMK tersebut dimuat ketentuan mengenai *offsetting reimbursement* PPN dengan kewajiban KKKS Migas kepada Pemerintah. Menteri Keuangan dan SKK Migas telah selesai menyusun kodefikasi untuk keperluan pembayaran penerimaan migas ke Rekening Migas yang diharapkan dapat diterapkan sejak awal tahun 2015. Sedangkan mekanisme pemberian sanksi telah diatur sedemikian rupa, dimana terhadap KKKS/Penjual Migas yang tidak tertib menyetorkan hasil penjualan migas akan dilakukan perhitungan/kompensasi	

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					dengan kewajiban negara kepada KKKS atau Penjual Migas tersebut.	
		c. Membuat SAA atas penjualan migas bagian negara yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dan melakukan pengawasan atas implementasi dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam SAA dimaksud;	SKK Migas	Draft SAA sudah 90% namun terkendala permintaan waiver Pertamina terhadap beberapa pasal. Kepala SKK Migas sudah mengirimkan surat no SRT – 0878 / SKKC0000/2014/S2 Perihal penyelesaian perjanjian penunjukan SAA antara SKK Migas dan PT. Pertamina, untuk mendapatkan arahan terkait permintaan PT. Pertamina untuk mendapatkan pengecualian (waiver) terhadap pasal pembayaran paling lambat 30 hari, denda 2% per bulan dan kewajiban menyediakan SBLC terkait penugasan PSO-nya. Sampai saat ini belum ada jawaban dari Kemenkeu sehingga SAA tersebut belum dapat ditandatangani.	SAA antara SKK Migas dan PT Pertamina telah selesai disusun dan ditelaahkan oleh kedua belah Pihak.	**Selesai**
		d. Mengupayakan hasil penjualan migas bagian Negara yang belum dibayarkan ke Negara, segera diterima Kas Negara; dan	SKK Migas	SKK Migas akan mengupayakan hasil penjualan migas bagian Negara yang belum dibayarkan ke Negara agar segera diterima Kas Negara: Terkait temuan dispute GHV PLN	Atas hasil penjualan migas Bagian negara, telah seluruhnya dibayarkan/diselesaikan.	**Masih dalam proses**

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Bontang dari kekurangan pembayaran dari PT Media Karya Sentosa sebesar US$24,688.77, dapat dinformasikan bahwa telah dilakukan pembayaran pada tanggal 8 Sep 2014 antara SKK Migas, PLN, TEP dan Pertagas, dimana disepakati TEPI akan mengirimkan revisi invoice kepada SKK Migas. Namun demikian, hingga saat ini, TEPI belum mengirmkan revisi inoice tersebut sehingga SKK Migas belum dapat koreksi A0. SKK Migas telah melakukan upaya penagihan melalui penerbitan reminder pada tanggal 8 Agustus 2014 melalui Surat SKK Migas No. SRT1434/SKKC2000/2014/S4 dan tanggal 25 Agustus 2014 melalui surat SKK Migas No. SRT-596/SKC2000/2014/S4.		
		e. Menyelesaikan permasalahan dengan Trafigura dalam rangka meminimalkan kerugian	SKK Migas	Trafigura telah membayar tagihan Kondensat Senipah sebesar US$ 23,684,472 (yang tidak *dispute*) tanggal 28 Agustus 2014, sehingga masih	1. Trafigura telah membayar tagihan Kondensat Senipah sebesar US$ 23,684,472 (yang tidak *dispute*) tanggal 28 Agustus 2014, sehingga	Masih dalam proses

www.peraturan.go.id

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		yang dapat terjadi akibat klaim yang diajukan oleh Trafigura dan mengkaji kemungkinan pengenaan sanksi denda keterlambatan pembayaran oleh Trafigura sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam SAA.		terdapat kekurangan pembayaran sebesar US$ 1.569,000. Terhadap nilai tersebut akan dilakukan pembahasan dengan Trafigura pada Nov 2014. Sebagai tambahan informasi, SKK Migas telah melakukan pembahasan internal tanggal 24 Okt 2014 terkait dengan pengumpulan data/informasi atas dokumen lifting dan dasar perhitungan atas nilai yang belum dibayarkan tersebut, sebagai langkah awal sebelum pembahasan dengan Trafigura. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan teknis dengan fungsi internal terkait dengan klaim-klaim (Demmurage, Deadfreight dan Hedging cargo ke Buyer) yang diajukan oleh Trafigura yang direncanakan pada minggu 1 November 2014.	masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar US$ 1.569.000. Terhadap nilai tersebut akan dilakukan pembahasan kembali dengan Trafigura 2. **Apabila bukti setoran atas pembayaran yang dilakukan oleh PT Travigura telah didapatkan, maka rekomendasi BPK dapat dinyatakan selesai.** 3. SKK Migas juga telah melakukan pembahasan internal terkait dengan pengumpulan data dan informasi atas dokumen lifting dan dasar pehitungan atas nilai yang belum dibayarkan tersebut, sebagai langkah awal sebelum pembahasan dengan Trafigura. 4. Selanjutnya dilakukan pembahasan teknis dengan fungsi internal terkait dengan klaim-klaim (Demmurage, Deadfreiht dan Hedging cargo ke Buyer) yang diajukan oleh Trafigura	

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	Kebijakan Mengenai Metode Akuntansi dan Teknis Penghitungan Pengakuan PNBP SDA Migas dan Pencadangan Saldo Kas di Rekening Migas Belum Ditetapkan **(Temuan Tahun 2013)**	Pemerintah dhi. Menteri Keuangan agar: a. **Mengatur dan menetapkan secara formal kebijakan dan tata cara penghitungan PNBP SDA Migas dan pencadangan saldo kas di rekening migas agar lebih transparan, akuntabel, dan konsisten; dan**	DJA	**Pemerintah c.q. DJA akan menyusun PMK yang akan mengatur mengenai kebijakan dan tata cara penghitungan PNBP SDA Migas.**	Pemerintah sedang menyusun RPMK yang mengatur mengenai kebijakan dan tata cara penghitungan PNBP SDA Migas. Hal ini sejalan juga dengan rekomendasi yang terkait dengan pengelolaan piutang *over lifting* migas. Saat ini RPMK ditaksud dalam proses penetapan.	Masih dalam proses
		b. Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi yang dapat mendukung penatausahaan transaksi yang terkait dengan kegiatan hulu migas.	1. DJA 2. SKK Migas	Telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara DJA dan SKK Migas dalam rangka pembangunan sistem informasi migas terintegrasi pada tanggal 13 Juni 2014.	1. SKK Migas telah menunjuk PT LAPI-ITB sebagai konsultan penyedia jasa pembangunan sistem informasi migas terintegrasi. Sistem ini akan mengintegrasikan data dan informasi kegiatan usaha hulu migas yang ada di SKK Migas, DJA, DJP, DJBC, dan DJKN. 2. Saat ini, Konsultan LAPI ITB telah menyelesaikan model konseptual data sistem interkoneksi pada awal Januari 2015.	Masih dalam proses

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					3. Untuk tahap selanjutnya, dilaksanakan *revisioning* dengan output akhir berupa *prototype* sistem untuk monitoring dan realisasi penerimaan migas yang akan diseosikan.	
9.	Pencapaian Hibah Langsung pada 19 KL Sebesar Rp2,69 Triliun Diantaranya Berupa Belanja Hibah dari Pemda kepada KPU dan Bawaslu Selaku Instansi Pemerintah Pusat Masing-masing Sebesar Rp2,28 Triliun dan Rp177,04 Miliar, Belum Dilaporkan Secara Akuntabel **(Temuan Tahun 2013)**	Pemerintah c.q. Menteri Keuangan agar: a. Mereviu kembali pelaksanaan aturan pelaporan hibah langsung dikaitkan dengan pelaksanaannya dan menerapkan aturan sanksi yang jelas dan tegas terhadap KL yang tidak melaporkan hibah langsung yang diterimanya; dan	DJPU	1). Pemerintah akan melakukan revisi PMK 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah, yang didalamnya terdapat aturan mengenai sanksi kepada K/L yang tidak tertib dalam melaporkan hibah langsung yang diterimanya Menteri Keuangan, K/L tersebut dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan menerima hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 2). Sanksi sebagaimana dimaksud dapat dicabut apabila K/L telah melakukan perbaikan pengelolaan hibah yang dibuktikan dengan telah diselesaikannya rekomendasi BPK sebagaimana tertuang dalam LHP pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.	Kementerian Keuangan dh Dirjen Pengelolaan Utang sedang menyusun PMK tentang pengelolaan hibah yang salah satu pasalnya mengatur mengenai pemberian sanksi kepada KL yang tidak melaporkan hibahnya.	Masih dalam proses.

www.peraturan.go.id

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		b. Bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri memperbaiki peraturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan atas dana penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam mendanai tugas dan kewajiban KPU dan Bawaslu.	1. Kem. Dagri 2. DJPK	1) Menteri Keuangan akan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri yang ditugaskan pada: 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pada Pasal 114 ayat (5) dengan tegas mengatur bahwa pendanaan Pilkada dan Wakil Kepala Daerah wajib dianggarkan dalam APBD; 2) Permendagri 32 Tahun 2011 Pasal 4 menyatakan Pemda dapat memberikan hibah sesuai kemampuan daerah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. Dengan ketentuan tersebut, karena Pilkada merupakan prioritas/kewajiban Pemda untuk melaksanakan sehingga seharusnya biaya Pilkada masuk dalam belanja urusan wajib bukan belanja hibah. 2). Menyelaraskan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang terkait pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan dana penyelenggaraan Pilkada sebagai	Peraturan mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan atas dana penyelenggaraan Pilkada dalam mendanai kewajiban KPU dan Bawaslu telah sesuai dengan diakomodasikannya UU No. 1 Tahun 2015 yang menetapkan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam Perppu No. 1 tahun 2014 jo. UU No. 1 Tahun 2015 ini ditetapkan bahwa penyelenggaran Pilkada dibebankan pada APBN. Dalam hal ini, mulai diterbitkannya Perppu tersebut, maka penerimaan dari APBD untuk penyelenggaraan Pilkada dapat diakui sebagai hibah bagi Pemerintah Pusat.	**Masih dalam proses**

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				belanja operasional Pemda bukan sebagai belanja hibah.		
10.	Pengelolaan Belanja Pensiun Belum Didukung Mekanisme Pengawasan dan Rekonsiliasi Belanja/ Pengembalian Belanja dan Utang/Piutang Pemerintah dengan PT Taspen dan PT Asabri. **(Temuan Tahun 2013)**	Pemerintah c.q. Menteri Keuangan agar memperbaiki peraturan dan SOP pengelolaan pengendalian, dan pertanggungjawaban Belanja Pensiun yang meliputi penyempurnaan mekanisme pelaporan, rekonsiliasi hak dan kewajiban antara Pemerintah dengan PT Taspen dan PT Asabri, serta penertiban pelaporan pertanggungjawaban.	1. DJPB 2. DJA	Pemerintah akan menindaklanjutinya dengan: 1. Melakukan penyesuaian peraturan antara lain Peraturan Menteri Keuangan dan Perdirjen Perbendaharaan untuk mengakomodir peningkatan intensitas pengendalian intern belanja pensiun. PMK tersebut akan mengatur antara lain: - Pengaturan rekonsiliasi baik terkait dengan realisasi belanja pensiun, pengembalian belanja pensiun, maupun utang piutang belanja pensiun. - Pengaturan mekanisme pelaporan belanja pensiun oleh PT Taspen dan Asabri serta mitra kerja pembayaran. - Kewajiban PT Taspen dan PT Asabri untuk menyampaikan laporan keuangan kepada KPA termasuk pengelolaan iuran belanja pensiun.	1. Untuk mengakomodasi peningkatan pengawasan dan pengendalian internal terkait pengelolaan belanja pensiun, Kementerian Keuangan sedang melakukan proses revisi terhadap PMK No.257/PMK.02/2010 dan PMK No.24/PMK.02/2013. 2. Revisi kedua PMK tersebut dituangkan dalam RPMK tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT. Taspen (Persero) dan PT. Asabri (Persero). 3. Rekomendasi BPK menyarankan agar dilakukan hak dan kewajiban antara Pemerintah dengan PT Taspen dan PT Asabri. Rekonsiliasi untuk semester I 2014 telah dilakukan sehingga rekomendasi BPK dapat dianggap telah dilakukan. Adapun rekonsiliasi untuk semester II tahun 2014 juga telah dilaksanakan. Atas hal tersebut Tim	**Masih dalam proses**

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				2. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan SOP baru untuk mendukung sistem monitoring dan pengendalian belanja pensiun 3. Melakukan rekonsiliasi tidak hanya menyangkut realisasi belanja pensiun, namun juga akan dilakukan rekonsiliasi terkait dengan utang, piutang dan pengembalian belanja. 4. Melakukan penyempurnaan terkait dengan mekanisme pelaporan belanja pensiun yang dilakukan oleh PT Taspen dan PT Asabri dan mitra bayar. 5. Pada penyusunan laporan keuangan akhir tahun, terlebih dulu akan dilakukan pencocokan data dengan Laporan Keuangan PT Taspen dan PT Asabri.	Kerja Belanja Pensiun agar menyampaikan BA Rekonsiliasi Semester I dan I Tahun 2014 serta dokumen pendukungnya. 4. Telah disusun SOP yang mendukung sistem monitoring dan pengendalian belanja pensiun sebagaimana yang direkomendasikan yang terbit pada tahun 2014 (copy SOP terlampir). 5. Pada penyusunan laporan keuangan tahun 2014 telah dilakukan pencocokan data dengan laporan keuangan PT. Taspen dan PT Asabri, sehingga data yang tersaji dalam LK Transaksi Khusus telah sesuai). 6. Rekomendasi BPK untuk melakukan pengembangan sistem aplikasi pembayaran pensiun yang terhubung secara on-line dengan sistem yang dimiliki oleh PT Taspen dan PT Asabri. Aplikasi tersebut sedang dalam proses pengembangan. Tim Kerja Belanja Pensiun agar menyampaikan design aplikasi dimaksud.	
11.	Belanja Bantuan	Presiden agar	1. DJA	1) Menteri Keuangan sebagai pemegang	Menteri Keuangan selaku wakil	**selesai**

www.peraturan.go.id

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sosial Sebesar Rp3,35 Miliar Seharusnya Dianggarkan dalam Belanja Barang Selain Pemerintah Pusat/Daerah dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Masih Mengendap di Rekening Penampungan KL dan Rekening Pihak Ketiga Sebesar Rp682,89 Miliar, Tidak *Sesuai* Sasaran Sebesar Rp1,79 Miliar dan Sebesar Rp2,19 Triliun Tidak Didukung dengan Sistem Pengendalian yang	memerintahkan: a. Para Menteri/Kepala Lembaga menetapkan Kas/Kasi anggaran dalam DIPA sesuai dengan ketentuan;	2. DJPB	kebijakan fiskal akan menyampaikan surat kepada Pimpinan K/L agar menyusun RKA-KL/DIPA sesuai Kas/Kasi anggaran yang ditetapkan termasuk peningkatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial. 2) Pemerintah juga akan terus melakukan sosialisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Bantuan Sosial, serta meningkatkan kualitas pembahasan anggaran terkait dengan alokasi Bantuan Sosial	Pemerintah telah menyampaikan Surat no.S-798/MK.05/2014 tgl 2 Desember 2014 kepada Menteri/Pimpinan K/L agar menyusun RKA-KL/DIPA sesuai Kas/Kasi anggaran yang ditetapkan termasuk peningkatan peran APIP dalam melakukan pengawasan dan pelaksanaan Belanja Bansos.	
		b. Para Menteri/Kepala Lembaga memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan dana Bansos;	DJA	1) Mengirim surat kepada K/L agar menindaklanjuti setiap pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan belanja bansos sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2) Meminta K/L agar melakukan monitoring atas rekening Bank Penyalur dalam pengelolaan belanja	Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah telah menyampaikan Surat no.S-798/MK.05/2014 tgl 2 Desember 2014 kepada Menteri/Pimpinan K/L agar menindaklanjuti setiap pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan belanja bansos sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.	**selesai**

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Memadai. **(Temuan Tahun 2013)**			bansos dan memenuhi ketentuan batas waktu yang ditetapkan untuk memutuskan dana bansos dalam rekening Bank Penyalur		
		c. Para Menteri/Kepala Lembaga memperbaiki rencana kerja dan anggaran untuk meminimalisasi penumpukan pencairan Belanja Bansos pada akhir tahun;	DJA	Mengundang K/L pada evaluasi pelaksanaan anggaran semester I tahun 2014 untuk : 1) Mengidentifikasi kendala pengelolaan dana bansos TA 2014 2) Melakukan evaluasi terhadap proses bisnis pengelolaan dana bansos yang berpotensi menyebabkan penumpukan pencairan belanja pada akhir tahun. 3) Mendiskusikan solusi teknis terkait kendala pelaksanaan pengelolaan dana bansos	Menteri Keuangan selaku BUN telah menerbitkan PMK Nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas. PMK ini bertujuan untuk memperbaiki pola penyerapan anggaran sehingga meminimalisir penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun anggaran.	**selesai**
		d. Menteri Keuangan membuat aturan yang lebih tegas tentang kriteria-kriteria penggunaan Belanja Bansos, mekanisme pertanggungjawaban,	1. DJPB 2. DJA	Menteri Keuangan bersama pihak terkait sedang mengkaji kriteria Belanja Bansos. Hasil kajian tersebut menjadi bahan untuk melakukan revisi ketentuan terkait dengan Bansos yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.05/ 2013 tentang Belanja Bantuan Sosial pada	1. Saat ini sedang disusun draft Revisi PMK Nomor 81/PMK.05/2014 tentang Belanja Bansos pada K/L. Substansi revisi diantaranya memperbaiki definisi Belanja Bansos. Selain itu, revisi dilakukan untuk memperbaiki mekanisme dan meningkatkan	Masih dalam proses.

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		dan berlakukan sisa dana Belanja Bansos pada akhir tahun.		Kementerian Negara/Lembaga	akuntabilitas penggunaan bansos. 2. Sementara itu pada pasal 11 PMK Nomor 81/PMK.05/2014, sisa dana Bansos yang tidak tersalurkan dalam waktu 30 hari atau sampai akhir tahun anggaran harus disetor ke kas negara sehingga substansi pengaturan tersebut telah mengakomodasi rekomendasi BPK.	
12.	Pengendalian atas Pengelolaan Belanja Subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu dan LPG Tabung 3 Kilogram Kurang Memadai Sehingga Ketepatan Waktu, Jumlah dan Sasaran Pembayaran Subsidi Tersebut Diragukan. **(Temuan Tahun 2013)**	Pemerintah agar: a. Menyusun ketentuan dan SOP Link yang mengatur mekanisme tata kerja dan koordinasi antara KPA subsidi JBT dan LPG 3 Kg dengan instansi teknis pendukungnya, yang antara lain mengatur: 1) Tata kerja dan koordinasi antara KPA dan instansi teknis pendukungnya; 2) Kewajiban instansi	DJA	DJA akan menyusun ketentuan dan SOP Link yang mengatur mekanisme tata kerja dan koordinasi antara KPA subsidi JBT dan LPG 3 kg dengan instansi teknis pendukungnya terkait: 1) Tata kerja dan koordinasi antara KPA dan instansi teknis pendukungnya; 2) Kewajiban instansi teknis untuk melaksanakan tugasnya tepat waktu dalam penetapan harga patokan; 3) Kewajiban instansi teknis untuk melakukan verifikasi bulanan sampai pada titik serah kepada konsumen pengguna sesuai ketentuan dan melaporkan kepada KPA secara	Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 02/PMK.02/2015 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 217/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Bahan Bakar Minyak Tertentu; dan PMK No. 03/PMK.02/2015 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 218/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban LPG Tabung 3 Kg; yang telah memasukkan rekomendasi	**selesai**

www.peraturan.go.id

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		teknis untuk melaksanakan tugasnya tepat waktu dalam perhitungan harga patokan; 3) Kewajiban instansi teknis untuk melakukan verifikasi bulanan sampai pada titik serah kepada konsumen pengguna sesuai ketentuan dan melaporkan kepada KPA secara bulanan agar dapat digunakan oleh KPA dalam melakukan verifikasi tagihan bulanan; 4) Kewajiban instansi teknis untuk membina Badan Usaha agar melakukan pelaporan dan penagihan atas pendistribusian JBT dan LPG 3 Kg kepada KPA dengan dasar		bulanan agar dapat digunakan oleh KPA dalam melakukan verifikasi tagihan bulanan; 4) Kewajiban instansi teknis untuk membina Badan Usaha agar melakukan pelaporan dan penagihan atas pendistribusian JBT dan LPG 3 kg kepada KPA dengan dasar volume pendistribusian kepada konsumen pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) Mekanisme pelaporan dari instansi teknis kepada KPA dalam hal verifikasi penyaluran bulanan maupun pengawasan penyediaan dan pendistribusian JBT dan LPG 3 kg bersubsidi sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.	BPK	

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		volume pendistribusian kepada konsumen pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 5) Mekanisme pelaporan dari instansi teknis kepada KPA dalam hal verifikasi penyaluran bulanan maupun pengawasan penyediaan dan pendistribusian JBT dan LPG 3 Kg bersubsidi sebagai bahan penyusunan laporan kinerja;				
		b. Sebelum SOP link dibuat, instansi teknis tetap melakukan verifikasi penyaluran bulanan JBT dan LPG tabung 3 Kg sampai pada titik serah kepada	DJA	Sebelum SOP *link* dibuat, instansi teknis tetap melakukan verifikasi penyaluran bulanan JBT dan LPG tabung 3 kg sampai pada titik serah kepada konsumen pengguna sesuai ketentuan dan melaporkan kepada KPA secara bulanan agar dapat digunakan oleh KPA	Instansi teknis telah menyampaikan hasil verifikasi penyaluran JBT dan LPG Tabung 3 Kg kepada KPA sebagai bahan atau dasar bagi KPA melakukan tagihan bulanan.	**selesai**

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		konsumen pengguna sesuai ketentuan dan melaporkan kepada KPA secara bulanan agar dapat digunakan oleh KPA dalam melakukan verifikasi tagihan bulanan;		dalam melakukan verifikasi tagihan bulanan.		
		c. Menyusun tata cara perhitungan dan melakukan pembayaran atas tambahan biaya distribusi dan margin atas JBT dari hasil kilang dalam negeri setelah tata cara penghitungan volumenya ditetapkan.	DJA	Menyusun tata cara perhitungan dan melakukan pembayaran atas tambahan biaya distribusi dan margin atas JBT dari hasil kilang dalam negeri setelah tata cara penghitungan volumenya ditetapkan.	a) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 02/PMK.02/2015 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 217/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Bahan Bakar Minyak Tertentu; b) PMK No. 03/PMK.02/2015 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 218/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggung jawaban LPG Tabung 3 Kg, yang telah memasukkan rekomendasi BPK.	selesai
13.	Pengendalian atas Pengelolaan Belanja	Menteri Keuangan agar: a. Berkoordinasi dengan	DJA	Berkoordinasi dengan Menteri/ Pimpinan Lembaga teknis, menyusun mekanisme	Kementerian keuangan telah berkoordinasi melalui surat-menyurat ataupun forum	**Masih dalam proses**

www.peraturan.go.id

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Subsidi Non Energi Kurang Dihitung Sehingga Subsidi Sebesar Rp296,15 Miliar Dibayarkan Kelebihan Sasarannya, Sebesar Rp704,78 Miliar Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya dan Terdapat Penyaluran Barang atau Jasa Bersubsidi oleh Badan Usaha Operator yang Nilainya Melampaui Pagu Anggaran sebesar Rp8,61 Triliun. **(Temuan Tahun**	Menteri/Pimpinan Lembaga teknis, menyusun mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran pencairan oleh Bank Pelaksana untuk memastikan bahwa pemberian subsidi bunga kredit program telah tepat sasaran;		pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran pendanaan oleh Bank Pelaksana untuk memastikan bahwa pemberian subsidi bunga kredit program telah tepat sasaran	rapat dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka menyusun mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran pencairan oleh Bank Pelaksana untuk memastikan bahwa pemberian subsidi bunga kredit program telah tepat sasaran dengan kondisi terkini sebagai berikut a) Kementerian Keuangan telah berkoordinasi dengan K/L teknis yang bertugas menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kredit program agar ketepatan sasaran dapat diyakini. b) Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Efektifitas dan Efisiensi Penyaluran Kredit Program Subsidi Bunga tanggal 4 September 2014 dengan peserta: BPKP, Kemenko Bidang Perekonomian, OJK, Kemenkeu (Biro Hukum, Itjen, DJA, BKF), Kemendag, Kementan, KKP, dan Perbankan (BRI, Mandiri, BNI, dan BPD Jatim). Hasil rapat: <u>Penyelesaian Jangka Pendek</u>	

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2013)				1) Koordinasi antar K/L terkait tentang mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran pencairan oleh Bank Pelaksana dan <u>lead</u> <u>mengatasi dari bagian mekanisme ketepatan sasaran</u>. 2) Kementerian teknis menyampaikan informasi kepada Kementerian Keuangan bahwa sudah ada pengendalian intern untuk memastikan ketepatan sasaran. c) Jangka Panjang 1) Menyusun sistem informasi kredit program yang terintegrasi, sehingga diharapkan dapat menghasilkan informasi tentang tepat pelaku, tepat jumlah, tepat cara, dan tepat guna; 2) Kementerian teknis bekerja sama dengan pemda dalam rangka menyiapkan database calon pelaku usaha yang akan dibiayai	

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		b. Menetapkan mekanisme dan SOP atas pengurangan alokasi plafon pendanaan pada Bank Pelaksana yang tidak memenuhi ketentuan penyaluran pendanaan dan pemindahan alokasi tersebut;		Melakukan kajian yang memadai tentang mekanisme pengurangan plafon pendanaan dan ketentuan batas minimal penyaluran kredit program pada bank pelaksana; Hasil kajian akan digunakan untuk menentukan ditetapkan atau tidaknya mekanisme tersebut.	mela 3 kredit program. Pemerintah telah melakukan Rapat Koordinasi Evaluasi Efektifitas dan Efisiensi Penyaluran Kredit Program Subsidi Bunga tanggal 4 September 2014 dengan peserta BPKP Kemenko Bidang Perekonomian, OJK, Kemenkeu (Biro Hukum, Itjen, DJA, BKF), Kemendag, Kementan, KKP, dan Perbankan (BRI, Mandiri, BNI, dan BPD Jatim), yang menghasilkan keputusan: 1. Mekanisme penambahan dan pengurangan plafon pendanaan pada Bank Pelaksana dilakukan dengan: a) Evaluasi secara rutin setiap periode tertentu berdasarkan masukan dari kementerian teknis yang membidangi komoditas usaha sebagai dasar pertimbangan dalam pengurangan atau penambahan plafon; b) Mempertimbangkan kemampuan APBN, potensi komoditas masing-masing daerah,dan siklus usaha;	**Masih dalam proses**

www.peraturan.go.id

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					c) Pemberian penghargaan atas prestasi Bank Pelaksana dalam penyaluran kredit program. 2. Penambahan dan pengurangan plafon pendanaan dilakukan sebagai cara pemerintah untuk mengendalikan kredit program oleh perbankan; 3. Berdasarkan ketentuan BI tentang kewajiban menyalurkan kredit kepada UMKM sebesar 20% dari total kredit perbankan, maka perbankan wajib memprioritaskan realisasi plafon komitmen pada kredit program. Untuk hal ini Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan BI/ OJK; 4. Melalui surat Nomor S-3921/MK.5/2014 tanggal 20 Juni 2014, Dirjen Perbendaharaan a.n. Menteri Keuangan melakukan realokasi plafon KKP-E berupa persetujuan atas permohonan penambahan plafon Bank Pelaksana sebagai reward serta pengurangan plafon sebagai punishment atas penyaluran KKP-E yang telah dilakukan dengan rincian	

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					sebagai berikut: a) Penambahan plafon ... Bank pelaksana b) Pengurangan plafon ... Bank Pelaksana 5. Menindaklanjuti surat tersebut, telah dilakukan amandemen PKP antara pemerintah dengan Bank-Bank Pelaksana terkait tentang perubahan plafon KKP-E dimaksud. 6. Kriteria/aturan dalam penetapan realokasi plafon KKP-E adalah sebagai berikut: a. Batas minimal rata-rata outstanding penyaluran kredit adalah sebesar 70% dari plafon pendanaan; b. Apabila rata-rata outstanding penyaluran kredit tidak mencapai sebesar 70% maka dilakukan pengurangan plafon dengan acuan sebagai berikut: • Jika 50% ≤x<70%, maka y-10%	

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					• Jika 30% ≤x<50% maka y-20% • Jika x<30%, maka y-30% b. Secangkan persetujuan atas pengajuan penambahan plafon Bank pelaksana sebagai reward atas prestasi penyaluran dengan acuan sebagai berikut: • Jika x ≥90%, maka y+30% • Jika 80% ≤x<90%, maka y+20% • Jika 70% ≤ x<80%, maka y+10% • Dimana x= rata-rata outstanding penyaluran, y= plafon pendanaan bank. 7. Kriteria dan aturan di atas telah diberlakukan terhadap permintaan penambahan plafon dari bank pelaksana. Sebagai contoh permintaan penambahan plafon KKP-E dari Bank BNI dan BPD NTB ditolak karena realisasi outstanding penyaluran masih rendah.	
		c. Menetapkan ketentuan		Melakukan kajian yang memadai tentang	Pemerintah telah melakukan Rapat	**Masih dalam**

www.peraturan.go.id

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		mengenai batas minimal penyaluran pendanaan KPEN-RP KUPS dan S-SRG oleh Bank Pelaksana dan mengambil tindakan tegas kepada Bank Pelaksana yang tidak memenuhi ketentuan batas minimal penyaluran;		mekanisme pengurangan plafon pendanaan dan ketentuan batas minimal penyaluran kredit program pada bank pelaksana; Hasil kajian akan digunakan untuk menentukan diterapkan atau tidaknya mekanisme tersebut.	Koordinasi Evaluasi Efektifitas dan Efisiensi Penyaluran Kredit Program Subsidi Bunga tanggal 4 September 2014 dengan peserta BPKP Kemenko Bidang Perekonomian, DJA Kemenkeu (Biro Hukum, Ken, DJA, BKF) Kemendag, Kemenlan, KKP, dan Perbankan (BRI, Mandiri, BNI, dan BPD Jatim), yang menghasilkan keputusan: 1) Melakukan kajian yang memadai terkait manfaat pengenaan batas minimal pendanaan oleh Bank Pelaksana untuk mengantisipasi ketidaksediaan Bank Pelaksana sebagai penyalur kredit; 2) Inventarisasi permasalahan rendahnya penyaluran kredit bank pelaksana dan saran penyelesaiannya oleh K/L untuk selanjutnya disampaikan kepada Kemenkeu; 3) *Reward* dan *punishment* perlu diberlakukan dalam penyaluran kredit program untuk mendorong peningkatan penyaluran kredit program. *Reward* dan *punishment* akan diterapkan pada semua komoditas kredit program.	proses

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Bentuk dan mekanisme reward dan punishment akan dibahas lebih lanjut; 4) Terkait pengaturan batas minimal realisasi penyaluran komitmen (outstanding) kredit program perbankan, OJK menyatakan bahwa hal ini tidak perlu diterapkan karena pada prinsipnya pemberian kredit ditentukan antara lain oleh profil risiko masing-masing bank.	
		d. Berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan untuk menyelaraskan pengertian-pengertian yang dipakai dalam perhitungan PSO angkutan kereta api kelas ekonomi yaitu antara pasal 2 dengan pasal 26 Perpres Nomor 53 Tahun 2012, antara pasal 26 Perpres Nomor 53 Tahun 2012 dengan pasal 12 PMK Nomor 172 Tahun 2013 dan pasal 13 Permenhub Nomor 14		Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal, akan melakukan koordinasi dengan Menteri Perhubungan untuk: 1. Menyelaraskan pengertian-pengertian yang dipakai dalam perhitungan PSO angkutan kereta api kelas ekonomi yaitu antara pasal 2 dengan pasal 26 Perpres Nomor 53 Tahun 2012, antara pasal 26 Perpres Nomor 53 Tahun 2012 dengan pasal 12 PMK Nomor 172 Tahun 2013 dan pasal 13 Permenhub Nomor 14 Tahun 2012; dan 2. Menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penetapan	1. Melalui surat Nomor UM.208/B.164/DJKA/8/14 tanggal 27 Agustus 2014 hal Penyampaian Tanggapan LHP BPK dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BA 999.07 dan BA 999.08 TA 2013 serta Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK dalam LHP Laporan Keuangan BA 999.07 dan BA 999.08 Tahun 2007 s.d. 2012, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menyampaikan tindak lanjut atas temuan sebagai berikut: a. Dalam Pasal 26 Perpres Nomor 53	Masih dalam proses.

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Tahun 2012		PNBP atas *Track Access Charge*	Tahun 2012 audit dilakukan atas jumlah biaya penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik dan dalam PMK Nomor 143 Tahun 2012, PMK Nomor 172 Tahun 2013 audit dilakukan atas jumlah dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik. Berdasarkan hasil audit BPK Tahun 2012, hal tersebut telah disampaikan dalam rapat revisi PMK Nomor 142 Tahun 2012 menjadi PMK Nomor 172 Tahun 2013. b. Dalam hal penyusunan revisi PP Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP, dalam rangka penetapan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian sebagai PNBP Kementerian Perhubungan disampaikan sebagai berikut: – Sesuai hasil pembahasan di Direktorat Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 9 Juni 2014, RPP tentang Jenis	

www.peraturan.go.id

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					dan Tarif atas Jenis PNBP sebagai revisi PP Nomor 6 Tahun 2006 masih perlu dilakukan harmonisasi dan pencalaman kembali terhadap PNBP biaya penggunaan prasarana perkeretaapian masih memerlukan dokumen pendukung disamping untuk jenis PNBP Perkeretaapian lainnya yang baru diusulkan. – Pembahasan akan dilakukan kembali apabila telah didukung dokumen yang lebih lengkap dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan.	
		e. Berkoordinasi dengan Menteri Terkait untuk segera menetapkan PP yang mengatur mengenai penetapan PNBP atas Track Access Charge;	1. DJA 2. Kemhub	Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal, akan melakukan koordinasi dengan Menteri Perhubungan untuk: 1. Menyelaraskan pengertian-pengertian yang dipakai dalam perhitungan PSO angkutan kereta api kelas ekonomi yaitu antara pasal 2 dengan pasal 26 Perpres Nomor 53 Tahun 2012, antara pasal 26 Perpres Nomor 53 Tahun	Kementerian keuangan telah berkoordinasi melalui surat-menyurat ataupun forum rapat dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka <u>menetapkan PP yang mengatur mengenai penetapan PNBP atas Track Access Charge</u>, **dengan tindak lanjut terkini sebagai berikut:** 1. Telah diterbitkan PP Nomor 11 Tahun	**Masih dalam proses**

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				2012 dengan pasal 12 PMK Nomor 172 Tahun 2013 dan pasal 13 Permenhub Nomor 14 Tahun 2012 dan 2. Menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penetapan PNBP atas *Track Access Charge*.	2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan tanggal 24 Februari 2015 dan diundangkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41 tanggal 24 Februari 2015. 2. Pemerintah berencana melaksanakan Rakornis antara Ditjen Perkeretaapian dengan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian PT. KAI (Persero), membahas tata cara pembayaran Pungutan PNBP atas *Track Access Charge*.	
		f. Melakukan pembinaan kepada KPA yang ditugaskan untuk mengelola belanja subsidi non energi untuk mengacu pada batas anggaran yang ditetapkan dalam DIPA belanja subsidi;	DJA	Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran akan melakukan pembinaan dengan menyampaikan surat kepada seluruh KPA yang ditugaskan mengelola belanja subsidi non energi agar memperhatikan batas anggaran yang ditetapkan dalam DIPA belanja subsidi.	Menteri Keuangan telah mengirim surat Nomor S-1861/AG/2014 tanggal 8 Oktober 2014 hal Permintaan Laporan Keuangan Belanja Subsidi (BA 999.07) dan Belanja Lain-lain (BA 999.08) Triwulan III TA 2014, kepada KPA dan/ atau Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Dana Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain, sebagai wujud pembinaan kepada KPA, dimana PA dapat mengetahui atas besaran penyerapan belanja subsidi sampai	**Masih dalam proses**

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					dengan Triwulan III TA 2014. Atas dasar tersebut, PA mengingatkan KPA jika penyerapannya telah mendekati batas pagu anggaran.	
		g. Mengaskan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan belanja subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan	1. DJA	Saat ini sedang disusun revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.02/2012 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Penetapan Alokasi, dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara, diantaranya mengatur fungsi pengawasan yang harus dilakukan oleh APIP dalam rangka pengelolaan belanja subsidi.	Pemerintah dh. Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebagai revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.02/2012, yang di dalamnya diatur mengenai mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan belanja termasuk belanja subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	**Masih dalam proses**
		h. Menyempurnakan mekanisme penganggaran dan membuat peraturan untuk mengendalikan belanja subsidi non energi yang nilai barang atau jasanya berpotensi melebihi pagu anggaran	DJA	Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal akan melakukan kajian dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk menyempurnakan mekanisme penganggaran dan membuat peraturan untuk mengendalikan belanja subsidi non energi yang nilai barang atau jasanya berpotensi melebihi pagu anggaran sebagai dampak berubahnya asumsi	Pemerintah dh. Menteri Keuangan sedang melakukan kajian terkait rekomendasi BPK untuk menyempurnakan mekanisme penganggaran dan membuat peraturan untuk mengendalikan belanja subsidi non energi yang nilai barang atau jasanya berpotensi melebihi pagu anggaran sebagai dampak berubahnya asumsi yang	Masih dalam proses.

www.peraturan.go.id

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		sebagai dampak berubahnya asumsi yang digunakan dalam penetapan anggaran		yang digunakan dalam penetapan anggaran	digunakan dalam penetapan anggaran	
		Menteri Perhubungan agar:	1. DJA 2. Kemhub	Merealisasikan anggaran perawatan dan pengoperasian prasarana dalam suatu ikatan kontrak atau surat perjanjian dengan badan usaha pemenang lelang atau badan usaha yang ditunjuk untuk pekerjaan perawatan dan pengoperasian prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Pemerintah telah merealisasikan anggaran perawatan dan pengoperasian prasarana dalam suatu ikatan kontrak atau surat perjanjian dengan badan usaha pemenang lelang atau badan usaha yang ditunjuk untuk pekerjaan perawatan dan pengoperasian prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pada Perpres Nomor 53 Tahun 2012 telah dijelaskan bahwa perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian dilakukan oleh Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian. Dalam hal belum terbentuknya Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian maka Pemerintah dapat menugaskan BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.	**Masih dalam proses**
i. Merealisasikan anggaran perawatan dan pengoperasian prasarana dalam suatu ikatan kontrak atau surat perjanjian dengan badan usaha pemenang lelang atau badan usaha yang ditunjuk untuk pekerjaan perawatan dan pengoperasian prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;						

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					2. Pada ketentuan peralihan Perpres Nomor 53 Tahun 2012 juga disampaikan bahwa PT KAI (Persero) sebagai Pelaksana Penyelenggara Perkeretaapian Umum Milik Negara saat ini tetap melaksanakan tugas perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian umum hingga terbentuknya Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian. 3. Berdasarkan rapat koordinasi antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan tanggal 8 April 2014, Anggaran untuk IMO akan segera dapat digunakan/dicairkan seiring dengan telah terbitnya PP Nomor 11 Tahun 2015.	
j. Segera menetapkan basis biaya yang digunakan dalam formula perhitungan tarif oleh PT KAI; dan	1. DJA 2. Kemhub	Telah menetapkan basis biaya yang digunakan dalam formula perhitungan tarif oleh PT KAI dengan Permenhub No 62 Tahun 2013 tanggal 16 Juni 2013 Tentang Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.	Pemerintah telah menetapkan Basis biaya yang digunakan dalam formula perhitungan tariff oleh PT. KAI, dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Pemerintah telah menerbitkan Permenhub Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan dan	**Masih dalam proses**

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api yang mengatur komponen biaya untuk menghitung tarif angkutan penumpang. 2. Dalam Permenhub Nomor 96 Tahun 2013 tentang Komponen Biaya yang Dapat Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan PSO. Basis biaya perhitungan tarif tidak ditetapkan dalam kedua peraturan tersebut mengingat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, perhitungan tarif dilakukan oleh penyelengaraan sarana perkeretaapian. 3. Terkait dengan tolok ukur perhitungan tarif oleh PT KAI (Persero) berdasarkan RKAP yang telah disetujui Menteri BUMN, dimana dasar RKAP dapat menggunakan program sebelumnya ataupun realisasi. 4. Pemerintah telah menerbitkan Permenhub Nomor PM 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang	

www.peraturan.go.id

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Dengan Kerela Ab yang mengatur komponen biaya untuk menghitung tarif angkutan penumpang sebagai revisi Permenhub Nomor PM 28 Tahun 2012	
		c. Bersama serta dengan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait melakukan pengawasan kepada PT Pelni (Persero) agar dalam melaksanakan PSO dapat menyesuaikan *voyage* yang ada dalam kontrak dengan perencanaan pengoperasian kapal yang akurat dimana port stay dan keberadaan kapal wajib dioperasikan pada saat peak season (liburan hari raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru) diatur sesuai dengan jumlah *voyage* yang ada dalam perjanjian.	1. Kemhub 2. DJKA	Melakukan pengawasan kepada PT Pelni (Persero) agar dalam melaksanakan PSO dapat menyesuaikan *voyage* yang ada dalam kontrak dengan perencanaan pengoperasian kapal yang akurat di mana *port stay* dan keberadaan kapal wajib dioperasikan pada saat *peak season* (liburan hari raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru) diatur sesuai dengan jumlah *voyage* yang ada dalam perjanjian.	Pemerintah melakukan pengawasan kepada PT Pelni (Persero) sehingga pelaksanaan PSO dapat disesuaikan dengan *voyage* yang ada dalam kontrak dengan perencanaan pengoperasian kapal yang akurat dimana *port stay* dan keberadaan kapal wajib dioperasikan pada saat *peak season* (liburan hari raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru) yang diatur sesuai dengan jumlah *voyage* yang ada dalam perjanjian.	**Masih dalam proses**

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.	Perencanaan Pengelolaan dan Penyaluran Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru Belum Memadai Sehingga Terdapat Kurang dan Lebih Salur DP TPG Tahun 2010-2013 Masing-Masing Sebesar Rp4,31 Triliun dan Rp6,07 Triliun. **(Temuan Tahun 2013)**	Memerintahkan dhi. Menteri Keuangan agar memerbaiki mekanisme perencanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban DP TPG termasuk bentuk koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka meningkatkan keakuratan penetapan dan penyaluran DP TPG serta memastikan jumlah kurang dan lebih salur DP TPG di masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.	DJPK	Pemerintah telah menerbitkan ketentuan yang mengatur tentang koordinasi dalam rangka meningkatkan keakuratan penetapan dan penyaluran DP TPG serta memastikan jumlah kurang dan lebih salur DP TPG di masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota dalam PMK mengenai pengganggaran alokasi transfer ke daerah dengan menerbitkan PMK No 61/PMK.07/2014 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2014 pada tanggal 8 April 2014.	**Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam temuan ini, dengan penjelasan sebagai berikut:** 1. Telah dilaksanakan ketentuan PMK No 61/PMK.07/2014 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2014 sehingga permasalahan atas perencanaan, pengelolaan dan penyaluran Dana Penyesuaian TPG dapat terselesaikan secara memadai. 2. Sesuai dengan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi BPK, saat ini hal tersebut telah diatur dalam Pasal 48 PMK 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.	**selesai**
15.	Menteri Keuangan	a. Segera	DJPB	Menteri Keuangan akan melakukan	Pemerintah dhi. Menteri Keuangan telah	**selesai**

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Selaku BUN Belum Sepenuhnya Mengatausahakan dan Merekam Rekening KPPN, Rekening Bendahara, dan Rekening Lainnya yang Dikelola oleh Kementerian dan Lembaga. **(Temuan Tahun 2013)**	menyempurnakan peraturan terkait pengelolaan rekening pada KL sehingga terdapat mekanisme yang jelas untuk menjamin validitas jumlah dan saldo rekening pemerintah		penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian/Lembaga/Kantor Sekre	menerbitkan PMK nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Kementerian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja.	
		b. Segera membuat MoU dengan Bank Umum dalam rangka penertiban pengelolaan rekening;	DJPB	Akan segera dibuat MoU dengan Bank Umum dalam rangka penertiban pengelolaan rekening;	Telah disusun draf Perjanjian Kerja sama dengan bank umum/kantor pos terkait pengelolaan rekening Pemerintah, saat ini dalam tahap legal drafting.	Masih dalam proses.
		c. Melaksanakan rekonsiliasi terkait rekening dan saldonya secara rutin antara Direktorat PKN, KL dan Bank Umum; dan	DJPB	melaksanakan rekonsiliasi terkait rekening dan saldonya secara rutin antara Direktorat PKN, KL dan Bank Umum; dan	1. Setelah terbit PMK nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, dan sesuai dengan surat Direktur PKN nomor 596/PB/2015 tanggl 23 Januari 2015 hal Penyampaian dan implementasi ketentuan Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja, saat ini sedang dalam tahap penamaan ulang seluruh rekening Kementerian /lembaga yang sudah	Masih dalam proses.

www.peraturan.go.id

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					dijinkan; 2. Rekonsiliasi akan dilakukan setelah proses penarikan uang rekening disesaikan	
		d. Menyelenggarakan database rekening BUN dan rekening KL secara akurat dan mutakhir.	DJPB	menyelenggarakan database rekening BUN dan rekening KL secara akurat dan mutakhir.	Telah disiapkan desain penggabungan database rekening Bendahara Instansi dengan rekening lainnya milik K/L dan akan dioperasionalisasi sesuai PMK nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Kementerian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja	**Masih dalam proses**
16.	Pengelolaan Penerimaan Negara yang Berasal Dari Over Lifting Minyak dan Gas Bumi Belum Memadai Sehingga Piutang Pemerintah Dari Hasil Over Lifting Minyak dan Gas Bumi Senilai USD312,855,778.60 Ekuivalen Rp3,81	Menteri Keuangan bersama Kepala SKK Migas agar: a. Mengatur dan menetapkan sistem dan prosedur pembahasan tagihan *over lifting* antara KKKS dan SKK Migas, sistem dan prosedur pembayaran tagihan *over lifting* migas, dan mekanisme pemberian sanksi terhadap KKKS yang	DJA	1) Pengaturan dan Penetapan sistem dan prosedur pembahasan tagihan *over lifting* antara KKKS dan SKK Migas dengan merujuk pada PTK No.051/2012 perihal PTK Penangguhan Biaya Operasi, SKK Migas dan KKKS masih terus melakukan kajian terkait dengan implementasi PTK 051. 2) Pengaturan dan Penetapan sistem dan prosedur pembayaran tagihan *over lifting* migas merujuk pada PMK	Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi ini dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Telah dilakukan Pengaturan dan Penetapan sistem dan prosedur pembahasan tagihan *over lifting* antata KKKS dan SKK Migas dengan merujuk pada PTK No.051/2012 perihal PTK Penangguhan Biaya Operasi, selain itu SKK Migas terus melakukan kajian terkait dengan implementasi PTK 051. 2. Pengaturan dan Penetapan sistem dan prosedur pembayaran tagihan	**selesai.**

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Tahun Belum Menggambarkan Nilai yang Sebenarnya. **(Temuan Tahun 2013)**	tidak tertib dalam melakukan pembayaran tagihan *over lifting*.		No. 136/PMK.02/2013 perihal Tata Cara Pembayaran DMO Fee *over lifting* Kontraktor dan/atau *under lifting* Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 3) Terkait rekomendasi mekanisme pemberian sanksi terhadap KKKS yang tidak tertib dalam melakukan pembayaran tagihan *over lifting*, merujuk pada ketentuan dalam PSC, tidak diatur masalah pemberian sanksi atas keterlambatan pembayaran kewajiban Pemerintah dan KKKS khususnya *over/under lifting*	over lifting migas merujuk pada PMK No.136/2013 perihal Tata Cara Pembayaran DMO Fee *Over Lifting* Kontraktor dan/atau *Under Lifting* Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 3. Pengenaan sanksi atas over lifting migas tidak dikenal dalam PSC. Over lifting menurut PMK 139 dapat diselesaikan dengan cara mekanisme offset dengan kewajiban pemerintah (DMO Fee dan under lifting) Cttn: Rekomendasi ini tidak relevan atau tidak dapat ditindaklanjuti pemerintah	
		b. Menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan piutang yang timbul dari kegiatan hulu migas, dan	DJA	1. Telah diterbitkan PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara PMK tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan piutang migas mengingat piutang migas	RPMK yang mengatur kebijakan akuntansi terkait proses bisnis kegiatan usaha hulu migas, yang di dalamnya antara lain mengatur kebijakan akuntansi piutang overlifting, masih dalam proses penetapan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan untuk penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tak tertagih mengacu pada PMK nomor 69/PMK.06/2014	**Masih dalam proses**

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				merupakan bagian dari piutang BUN 2. Sistem dan prosedur pengelolaan piutang migas khususnya yang berasal dari overlifting yang antara lain mengatur mengenai batas waktu pembahasan dan pembayaran lebih terkait dengan tugas dan fungsi SKK Migas. Untuk itu, sistem dan prosedur tersebut perlu disusun oleh SKK Migas. 3. Apabila terdapat persoalan mengenai piutang yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas, maka akan diselesaikan dengan ketentuan perundangan mengenai piutang negara yang telah ada, seperti PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. PMK tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam		

www.peraturan.go.id

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				pengelolaan piutang migas mengingat piutang migas merupakan bagian dari piutang BUN		
		c. Menetapkan kebijakan akuntansi piutang *over lifting* yang sesuai dengan proses bisnis kegiatan hulu migas	DJA	1. Kementerian Keuangan c.q DJA akan menyusun kebijakan akuntansi yang terkait proses bisnis kegiatan usaha hulu migas, yang di dalamnya antara lain mengatur kebijakan akuntansi piutang *overlifting*. 2. Langkah-langkah penyusunan RPMK terkait kebijakan akuntansi migas. a) Inventansasi permasalahan b) Menyusun ruang lingkup RPMK; c) Menyusun konsep awal RPMK; d) Mengadakan pembahasan RPMK dengan instansi terkait; e) Finalisasi RPMK; f) Penetapan PMK oleh Menteri Keuangan.	Pemerintah saat ini sedang menyusun RPMK yang mengatur kebijakan akuntansi terkait proses bisnis kegiatan usaha hulu migas, dimana terdapat beberapa hal yang mengatur kebijakan akuntansi piutang *overlifting*. RPMK dimaksud saat ini dalam proses penyelesaian.	Masih dalam proses
17.	Pemerintah Belum Melakukan Upaya	Menteri Keuangan agar	DJP	DJP akan melakukan penelaahan lebih lanjut pada Laporan Hasil Pemeriksaan	DJP masih melakukan penelitian atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak dengan	Masih dalam proses

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	untuk Penyelesaian Transaksi atas Klausul *Termination Agreement* Proyek Asahan Terkait Dana Retensi Sebesar USD10,000,000.00 dan Jaminan *Good and Sound Condition* PLTA Senilai USD100,000,000.00 **(Temuan Tahun 2013)**	meminta a. DJP melakukan pemeriksaan pajak perseroan pada PT Inalum dengan menggunakan Laporan Hasil Audit BPKP sebagai salah satu bahan pemeriksaan pajak;		Pajak apakah sudah memperhitungkan Laporan Hasil Audit BPKP sebagai salah satu bahan pemeriksaan pajak. Apabila dari hasil penelaahan tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan ulang akan diterbitkan usulan pemeriksaan ulang.	memperhitungkan Laporan Hasil Audit BPKP sebagai salah satu bahan pemeriksaan pajak. Apabila dari hasil penelaahan tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan ulang akan diterbitkan usulan pemeriksaan ulang	
		b. PT Inalum untuk segera menunjuk pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengecekan kondisi PLTA; dan	DJKN	PT Inalum telah menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengecekan kondisi PLTA. Pengecekan akan dimulai awal Agustus dan akan selesai akhir September 2014.	PT Inalum telah menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengecekan kondisi PLTA. Pengecekan dimulai awal Agustus 2014 dan selesai akhir September 2014. Kementerian BUMN melalui surat nomor S-760/MBU/D2/11/2014 tanggal 25 November 2014 menyampaikan hasil audit Nippon Kei kepada DJKN yang secara umum dilaporkan bahwa kondisi PLTA dalam keadaan baik dan layak untuk digunakan.	**selesai**
		c. Mengajukan klaim kepada NAA bila dari hasil pengecekan PLTA	DJKN	Pemerintah akan mengajukan klaim pada NAA, apabila hasil pengecekan PLTA yang telah dilakukan diketahui ada	1. Surat PT Inalum nomor 124/L-Dirut/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 dan surat Menteri BUMN nomor S-	**selesai**

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		diketahui tercapat kerusakan yang ditakibatkan oleh operasional sebelum tanggal pengambilalihan oleh Pemerintah.		kerusakan yang ditakibatkan oleh operasional sebelum tanggal pengambilalihan	553/MBU/D2/12/2014 tanggal 22 Desember 2014 menjelaskan bahwa. a. Has assesmen Nippon Kei menyimpulkan bahwa kondisi PLTA dalam kondisi baik. b. Berdasarkan hasil assesmen dan penjelasan tambahan dari NEWJEC Inc. disimpulkan bahwa penyebab utama apabila terjadi kerusakan bukan merupakan kesalahan pabrikan dan prosedur pemeliharaan, namun lebih disebabkan faktor usia. Disamping itu, disampaikan pula bahwa kondisi PLTA beroperasi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja.	
18.	Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap pada 42 KL Senilai Rp11,01 Triliun Diantaranya Berupa Aset Tetap yang Belum	Menteri Keuangan agar: a. mengefektifkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN sesuai dengan PMK Nomor 244/PMK.06/2012	DJKN	1. DJKN akan berkoordinasi dengan KL terkait agar KL melakukan penelusuran dokumen sumber atas BMN yang belum tercatat dan melakukan verifikasi atas dokumen tersebut; 2. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan	Pemerintah telah secara optimal melakukan pengawasan dan pengendalian BMN sesuai dengan PMK Nomor 244/PMK.06/2012 untuk penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN, baik melalui surat menyurat atau pun melalui forum rapat,	**Masih dalam proses**

www.peraturan.go.id

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Didukung Dokumen Kepemilikan Senilai Rp6,56 Triliun pada 11 KL Masih Belum Dilaksanakan Secara Memadai. **(Temuan Tahun 2013)**	untuk penggunaan pemanfaatan, pemindahtangan penatausahaan pemeliharaan dan pengamanan BMN;		Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN, KL melaksanakan pembukuan atas dokumen sumber dalam rangka menghasilkan data transaksi BMN dan Laporan BMN	dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. S-1148/KN/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang memberikan petunjuk berupa langkah-langkah yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan temuan BPK terkait aset tetap pada LKPP Tahun 2013. 2. Dalam rangka verifikasi dan monitoring tindak lanjut temuan BPK atas LKPP 2013 yang terkait aset tetap, telah dilakukan pembahasan antara KL dengan DJKN pada tanggal 21 s.d. 23 Juli 2014. 3. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan K/L terkait pada tanggal 25 September 2013 untuk membahas rincian temuan aset tetap dan progress tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL;	
		b. memetakan seluruh Aset Tetap yang belum dilakukan IP dan menyelesaikan IP atas		1. Melakukan koordinasi dengan KL yang menjadi temuan BPK RI untuk memastikan nama satker dan BMN	Terkait BMN yang belum di-IP, telah dikoordinasikan dan dinilai secara kontinyu oleh DJKN.	**Masih dalam proses**

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Aset Tetap tersebut		yang menjadi temuan 2. Akan dilakukan pemetangan perencanaan pelaksanaan IP meliputi pengumpulan data awal persiapan modul penilaian, dan koordinasi pelaksanaan (tenaga pendamping dan pembiayaan). 3. Akan dilakukan pelaksanaan survei lapangan. 4. Akan dilakukan penandatanganan BA-IP. 5. Akan dilakukan Updating SIMAK dan BAR.		
		c. menyelesaikan proses rekonsiliasi pencatatan hasil IP;		Melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, untuk menyamakan data dan persepsi terkait temuan BPK berupa Aset tetap belum di IP pada masing-masing KL	Terkait BMN yang belum di-IP telah dikoordinasikan dan dinilai secara kontinyu oleh DJKN.	**Masih dalam proses selesai**
		d. melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga;		Berkoordinasi dengan KL terkait agar melakukan upaya untuk dapat menguasai barang tersebut melalui pendekatan persuasif atau upaya hukum dengan mengacu pada PMK No. 96/PMK.06/2007 dan KMK No. 403/KMK.06/2013,	Temuan atas aset tetap senilai Rp1,91 triliun yang dikuasai/digunakan oleh pihak lain tidak sesuai dengan pengelolaan BMN telah selesai ditindaklanjuti senilai Rp1,69 triliun (88%);	Masih dalam proses

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		dan e. melakukan program percepatan sertifikasi tanah milik Negara/Pemerintah.		kemudian melakukan pengamanan atas barang tersebut setelah berhasil menguasai aset BMN. Berkoordinasi terus menerus dengan BPN, BAPPENAS dan DJA untuk mendorong percepatan sertipikasi atas BMN berupa tanah.	Kementerian Keuangan secara kontinyu berkoordinasi dengan BPN, BAPPENAS dan DJA untuk mendorong percepatan sertipikasi atas BMN berupa tanah. Tindak lanjut terkini adalah telah diterbitkan Surat Edaran Dirjen Kekayaan Negara No. SE-3/KN/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pelaksanaan Identifikasi dan Pendataan serta Percepatan Pensertipikatan BMN berupa Tanah pada Kementerian/ Lembaga.	**Masih dalam proses**
19.	Penerapan Penyusutan Belum Didukung dengan Metode Perhitungan Penyusutan yang Tepat atas Aset Tetap Hasil Invetarisasi Penilaian, Kebijakan Akuntansi Terkait	Pemerintah agar : a. melakukan perbaikan perhitungan dan penyajian akumulasi penyusutan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	DJKN	1. Melakukan perbaikan perhitungan dan penyajian akumulasi penyusutan dengan menyesuaikan aplikasi SIMAK BMN sesuai PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas PMK No. 1/PMK.6/2013 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, dan KMK No. 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas KMK No. 94/KM.6/2013 tentang Modul	Dampak dari perubahan kebijakan penyusutan tersebut telah diungkapkan secara memadai dalam LKPP Tahun 2013 (*Audited*). Selanjutnya, koreksi nilai penyusutan akan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat satuan kerja pada pelaporan tahun 2014.	**selesai**

www.peraturan.go.id

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Penghapusbukuan Barang Hilang dan Rusak Tidak Sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2006 dan Buletin Teknis tentang Aset Tetap, dan Sistem Informasi Tidak Dapat Sepenuhnya Menyajikan Nilai Akumulasi Penyusutan yang Akurat. **(Temuan Tahun 2013)**			Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. 2. Saat ini SIMAK BMN masih dalam proses penyesuaian 3. Selanjutnya, koreksi nilai penyusutan akan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat satuan kerja pada pelaporan keuangan dan pelaporan BMN tahun anggaran 2014.		
		b. menyelaraskan perlakuan akuntansi terkait penghapus-bukuan barang hilang dan rusak dengan PP Nomor 6 Tahun 2006 dan Buletin Teknis terkait;	DJKN	1. Perlakuan akuntansi atas penghapusan BMN yang hilang/rusak berat sebagaimana diatur dalam PMK No. 1/PMK.06/2013 telah sesuai dengan PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D. 2. Terkait dengan pelaporan barang hilang/rusak berat dalam Laporan BMN, DJKN sedang menyempurnakan PMK No. 1/PMK.06/2013, yang antara lain mengatur bahwa barang yang hilang/rusak berat dikeluarkan dari	Perlakuan akuntansi atas barang rusak berat dan barang hilang yang diatur dalam PMK No. 1/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan PMK Nomor 247/PMK.06/2014 telah sesuai dengan PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D dan Buletin Teknis Aset Tetap Akrual.	**Selesai.**

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				neraca namun telah diungkap dalam Laporan BMN dalam bentuk daftar barang hilang dan daftar barang rusak berat		
		c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas BMN yang masuk daftar Normalisasi Barang Miliki Negara, Daftar Barang Rusak Berat, dan Daftar Barang Hilang; dan	DJKN	1. DJKN telah mengundang seluruh K/L pada tanggal 21-23 Oktober 2014 dalam rangka pembahasan temuan terkait dengan BMN dan monitoring tindak lanjutnya, termasuk temuan BMN yang masuk daftar Normalisasi. 2. Selanjutnya, DJKN akan menyampaikan surat kepada seluruh KL agar KL melakukan pengawasan dan pengendalian atas BMN yang masuk daftar Normalisasi, Daftar Barang Rusak Berat, dan Daftar Barang Hilang	Pemerintah secara kontinyu melakukan pengawasan dan pengendalian atas BMN yang masuk daftar Normalisasi Barang Miliki Negara, Daftar Barang Rusak Berat, dan Daftar Barang Hilang, dengan tindak lanjut terkini sebagai berikut: Dalam rangka penyusunan LBMN tahun 2014, telah disampaikan Surat Dirjen Kekayaan Negara Nomor S-1924/KN/2014 tanggal 31 Desember 2014 kepada seluruh K/L, mengenai langkah-langkah penyusunan LBP, termasuk langkah-langkah penyelesaian normalisasi aset. Selain itu, dalam SIMAK BMN Versi 14.2.1a juga telah dilakukan perbaikan atas proses normalisasi data aset.	**Masih dalam proses**
		d. melakukan evaluasi dan perbaikan atas nilai buku BMN yang bersaldo tidak wajar pada seluruh	DJKN	DJKN telah berkoordinasi dengan DJPB dalam rangka penyesuaian aplikasi SIMAK BMN terkait dengan normalisasi nilai aset yang bersaldo tidak wajar. Saat	Pemerintah telah melakukan evaluasi dan perbaikan atas nilai buku BMN yang bersaldo tidak wajar dengan tindak lanjut terkini sebagaiaman surat Dirjen KN No. S-1924/KN/2014 di atas, dan dituangkan	**Masih dalam proses**

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		LKKL		ini SIMAK BMN masih dalam proses penyesuaian	dalam Aplikasi SIMAK BMN Versi 14.2.1a yang telah mengakomodasi perubahan kebijakan penyusutan serta telah diselesaikan dan telah dapat mulai digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2014.	
20.	Kementerian Keuangan belum menyelesaikan Penelusuran atas Aset Kredit Eks BPPN sebanyak 7.591 Senilai Rp3,06 Triliun dan Aset Properti Sebanyak 627 sebesar Rp400,289 Miliar **(Temuan Tahun 2013)**	Menteri Keuangan menelusuri kembali aset properti berdasarkan daftar nominatif, aset kredit yang masih aktif menurut SAPB dan mencari dokumen aset kredit, melakukan koordinasi dengan PT PPA untuk menelusuri keberadaan debitur aset kredit yang telah diserahkelolaan kepada PT PPA dan Bank Indonesia untuk data debitur yang tidak lengkap, dan menindaklanjuti hasil penelusuran sesuai ketentuan yang berlaku.	DJKN	Telah dilakukan penelusuran dokumen pendukung selisih data aset properti eks BPPN senilai Rp285.229.419.009,00 dari total 626 unit senilai RP400.289.684.383,89 yang harus ditelusuri sesuai rekomendasi BPK RI dengan rincian : 1. Telah diperoleh dokumen pendukung atas 126 unit aset dengan klarifikasi terjaual di BPPN dan PT PPA (Persero) senilai Rp50.167.787.853 2. Telah ditemukan 8 unit aset pada Modul Kekayaan Negara dan daftar aset eks PT PPA (persero) senilai Rp59.069.114.858 3. Telah diperoleh dokumen pendukung atas 87 unit aset dengan klasifikasi	1. DJKN dengan Surat nomor S-1503/KN/2014 tanggal 3 Oktober 2014 telah menyampaikan kepada Auditama II BPK RI penyelesaian atas penelusuran aset kredit eks BPPN terhadap debitur yang tercatat aktif di SAPB sesuai rekomendasi BPK RI dalam LKPP Tahun 2013 yaitu LHP atas Sistem Pengendalian Intern nomor 69b/LHP/XV/05/2014 tanggal 28 Mei 2014. 2. Seluruh aset kredit Eks BPPN telah berhasil ditelusuri per Bulan Februari Tahun 2015, sehingga nilai yang harus ditindaklanjuti adalah Rp0,-. 3. Pemerintah telah secara optimal melakukan penelusuran atas dokumen sumber Aset properti Eks BPPN, dengan kondisi terakhir masih terdapat	**selesai**

www.peraturan.go.id

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				aset jaminan bank Dalam Likuidasi dan PKPS senilai Rp94.046.671.431 4. Telah diperoleh dokumen pendukung atas 20 unit aset dengan klasifikasi aset sewa yang digunakan bank senilai Rp 5.090.703.763 5. Telah diperoleh dokumen pendukung atas 52 unit aset dengan klasifikasi lain-lain (penetapan penggunaan, HTBI) senilai Rp76.861.121.105 Terhadap sisa data yang masih harus ditelusuri beberapa hal yang telah dilakukan : 1. Pemeriksaan fisik atas 334 unit aset properti sesuai Daftar Nominatif senilai Rp115.060.265.375 yang dilaksanakan oleh KPKNL dan Kanwil DJKN setempat. 2. Koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional baik Kantor Pusat BPN	333 unit aset properti Eks BPPN senilai Rp114.97 Miliar yang telah diperoleh dokumen pendukungnya. Upaya yang dilakukan pemerintah telah optima dan diungkapkan secara memadai dalam LKPP. Proses selanjutnya akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.	

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				maupun Kantor Pertanahan setempat. Telah dilakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dan PT PPA (Persero) dan berhasil diperoleh konfirmasi terhadap 7.691 *account* senilai Rp3.055.088.456.942,65 dari rekomendasi BPK terkait penelusuran dokumen pendukung aset kredit berstatus Aktif di SAPB, dengan rincian : 1. Diperoleh klarikiasi dan konfirmasi atas 18 *account* berstatus Aktif pada SAPB senilai Rp825.446.246.484,00. 2. Diperoleh klarifikasi dan konfirmasi dari PT PPA (Persero) atas 669 *account* berstatus Aktif yang ada pada SAPB senilai Rp.25.433.627.185 yang diindikasikan sebagai petambak plasma yang sudah terjual dalam penjualan paket grup Dipasena 3. Telah diperoleh konfirmasi atas penelaahan data SID dari Bank Indonesia terhadap 7.676 debitur		

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				berdasarkan nomor *customer* atau 8.776 fasilitas kredit berstatus Aktif pada SAPB 4. Penyelesaian penelusuran aset kredit dimaksud telah dilaporkan dengan surat nomor S-1503/KN/2014 tanggal 3 Oktober 2014 kepada Auditor Utama Keuangan Negara II BPK RI Terkait dengan aset Kredit eks BPPN: 1. Sesuai surat Bank Indonesia No. 16/57/DPKL/Rahasia tanggal 13 Juni 2014 telah menyampaikan daftar debitur sesuai pencarian pada SID. 2. Selanjutnya sesuai hasil penelitian diketahui aset kredit sebesar Rp2.1 Triliun, tidak tercatat dalam daftar Sistem Informasi Debitur (SID) tersebut. 3. Untuk sisa penelusuran aset kredit sebesar Rp900 Miliar, akan dilakukan penelusuran kembali terhadap dokumen-dokumen yang ada. 4. Masih menunggu konfirmasi dari pihak		

www.peraturan.go.id

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				terkait		
21.	SPI Pencatatan dan Pelaporan Aset KKKS Belum Memadai, dan Masih Terdapat Aset LNG Tangguh Senilai USD2,907,388,443.00 dan Aset pada Tujuh Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Senilai USD3,050,445,559.16 dan Rp15,75 Miliar yang Belum Dilaporkan dalam LKPP Tahun 2013. **(Temuan Tahun**	Pemerintah dr. Menteri Keuangan agar memerintahkan peraturan terkait sistem akuntansi dan pelaporan aset PKP2B, Melakukan inventarisasi dan penilaian aset pada tujuh PKP2B dan inventarisasi pada aset LNG Tangguh, menyempurnakan SOP/ ketentuan yang mengatur mekanisme rekonsiliasi pencatatan aset, integrasi sistem pencatatan, dan pelaporan transaksi aset kepada pengelola barang.	DJKN	1. Revisi PMK 67/PMK.06/2012 telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan PMK 167/PMK.06/2014. Selanjutnya untuk Peraturan terkait sistem akuntansi dan pelaporan BMN PKP2B dalam proses finalisasi di Dit. APK Ditjen Perbendaharaan 2. Telah terbit PMK Nomor 196/PMK.05/2014 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. 3. IP BMN PKP2B merupakan program Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM yang dimulai sejak tahun 2013. Untuk IP BMN pada 7 PKP2B dimulai di awal Semester II tahun 2014. 4. Saat ini, dari 7 (tujuh) PKP2B, dua PKP2B, yaitu PT. Arutmin Indonesia dan PT. Kideco Jaya Agung telah dilakukan IP. Selanjutnya untuk 5	1. Peraturan terkait sistem akuntansi dan pelaporan aset PKP2B telah ditetapkan Menteri Keuangan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 196/PMK.05/2014 tanggal 6 October 2014 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/ Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). 2. IP 7 (tujuh) PKP2B telah dilaksanakan pada tahun 2014 Pelaksanaan IP sampai akhir tahun 2014 sbb : a) PT. Arutmin Indonesia tgl 9-18 Juni 2014 dan tgl 8-12 Desember 2014 b) PT. Kideco Jaya Agung tgl 23 Juni-3 Juli 2014 dan 15-19 Sep 2014 c) PT. Kaltim Prima Coal tgl 26 Agt-4 Sep 2014 dan 24 Nov-3 Des 2014 d) PT. Adaro Indonesia tgl 30 Sep-3 Okt 2014	Masih dalam proses

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2013)			(lima) PKP2B akan dilakukan mulai bulan Agustus 2014 5. Inventarisasi BMN berupa LNG Tangguh akan dilakukan setelah SKK Migas melaporkan BMN tersebut sesuai dengan mekanisme pelaporan di Sistem Akuntansi Transaksi Khusus. Sesuai dengan korespondensi dengan SKK Migas dan rapat pembahasan dengan stakeholders terkait, Aset LNG Tangguh dari expenditure USD 2 M akan dilaporkan SKK Migas pada triwulan 4 tahun 20014 dan sisanya selambatnya pada triwulan 4 tahun 2016, sehingga diharapkan dapat dilaporakan dalam Neraca LKPP 2014. 6. Penyempurnaan SOP/Ketentuan yang mengatur mekanisme rekonsiliasi pencatatan aset, integrasi sistem pencatatan dan pelaporan transaksi aset kepada pengelola barang, telah disusun dalam RPMK tentang Pengelolaan BMN yang berasal dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama	e) PT. Tanito Harum tgl 13-21 Oct 2014 dan tg 15-19 Desember 2014 f) PT. Multi Harapan Utama tg 20-26 Oct 2014 g) PT. Berau Coal tg 10-16 Nov 2014 3. Pada beberapa PKP2B (PT KPC, PT Arutmin, PT MHU dan PT Berau Coal) masih terdapat sejumlah aset yang belum ditemukan/teridentifikasi oleh user sehingga akan dilakukan IP lanjutan untuk penyelesaian. Atas hasil IP aset PKP2B yang telah dilakukan akan dilaporkan dalam LKBUN/LKPP tahun 2014. 4. Inventarisasi terhadap nilai USD 2,8M telah dilakukan pada tanggal 4-28 Nov 2014 oleh KKKS, SKK Migas, DJKN dan PPBMN KESDM. Hasil IP Aset LNG Tangguh akan dilaporkan dalam LKBUN tahun 2014. 5. Selanjutnya terhadap AFE senilai US0.1M diharapkan dapat diselesaikan verifikasi dan inventarisasinya pada Semester II tahun 2016.	

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi. Saat ini RPMK dimaksud dalam proses pembahasan dengan stakeholders	6. Terkait Penyempurnaan SOP RPMK final pengganti PMK 135/PMK.06/2009 jo. 185/PMK.06/2010 saat ini telah berada di Biro Hukum Setjen Kemenkeu	
22.	Piutang Kepada PT Pupuk Iskandar Muda Sebesar USD19,508,903.00 Ekuivalen Rp237,79 Miliar dan Kepada PT Pertamina (Persero) c.q. Pertamina EP Sebesar Rp3,03 Triliun Penyelesaiannya Berlarut-Larut Serta Penyelesaian Piutang Kepada PT *Trans Pacific Petrochemical* Indotama (TPPI) Sebesar	Pemerintah cq. Menteri Keuangan agar: a. segera menyelesaikan permasalahan utang piutang antara Pemerintah dan PT PIM sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;	1. DJA 2. SKK Migas	Pemerintah cq. Kementerian Keuangan akan menginisiasi langkah koordinatif dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan solusi penyelesaian piutang Pemerintah pada PT PIM yang memenuhi prinsip good governance dan akuntabel. Untuk itu, akan dilaksanakan rapat yang melibatkan instansi terkait (Kementerian Perekonomian, Kementerian BUMN, SKK Migas, dan PT PIM).	1. Pemerintah cq. Kementerian Keuangan saat ini sedang mempertimbangkan satu dari dua usulan PT PIM yang disampaikan melalui surat Nomor 327/KU0201/3000 tanggal 31 Desember 2014 perihal Usulan Penyelesaian Hutang Perusahaan kepada Pemerintah (SKK Migas) kepada Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas, yaitu: a) Penyelesaian hutang PT PIM dapat dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah melalui PT PIM yang bersifat *non cash*; atau b) Penyelesaian melalui pembayaran cicilan selama 5 tahun terhitung dari 2017 s.d. 2021. 2. Menindaklanjuti surat Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas tersebut, telah diadakan rapat pada	Masih dalam proses.

www.peraturan.go.id

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	USD141.392.143,58 Ekuivalen Rp1.72 Triliun Tidak Sesuai dengan Skema yang Direncanakan **(Temuan Tahun 2013)**				tanggal 16 Januari 2015 antara DJA dengan SKK Migas. Di dalam rapat tersebut disepakati bahwa akan diadakan rapat lanjutan dengan mengundang Direktorat Sistem Manajemen Investasi DJPB guna melakukan koordinasi dan kajian penggunaan model kesehatan perusahaan yang akan diterapkan untuk melakukan *assessment* kondisi kesehatan PT PIM.	
		b. menetapkan status rekening sementara Penerimaan Negara termasuk saldo dananya;	DJA	1. DJA akan mengajukan penetapan status rekening sementara penerimaan negara termasuk saldo dananya ke DJPB 2. Rekening pada SKK Migas yang digunakan untuk menampung dana atas penyelesaian piutang PIM akan ditutup setelah seluruh hak negara atas piutang PIM disetorkan sepenuhnya ke rekening tersebut. Hal ini sesuai dengan surat DJPB berkaitan dengan permasalahan rekening Pemerintah yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.	1. DJA akan mengajukan penetapan status rekening sementara penerimaan negara termasuk saldo dananya ke DJPB. 2. Rekening pada SKK Migas yang digunakan untuk menampung dana atas penyelesaian piutang PIM akan ditutup setelah seluruh hak negara atas piutang PIM disetorkan sepenuhnya ke rekening tersebut. Hal ini sesuai dengan surat DJPB berkaitan dengan permasalahan rekening Pemerintah yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.	Masih dalam proses.

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		c. segera melakukan upaya yang diperlukan untuk menjamin tertagihnya piutang negara kepada PT Pertamina (Persero)	DJKN	Pemerintah akan menagih pembayaran atas piutang sewa kepada PT Pertamina. Langkah yang dilakukan adalah: 1. DJKN akan kembali menyampaikan surat kepada PT Pertamina (Persero) guna menagihkan pemoayaran dan/atau pelunasan atas Hutang Lancar dari sewa BMN eks Pertamina oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP untuk nilai sewa sementara sebagaimana terhutang per 31 Desember 2013. 2. DJKN akan mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan pihak terkait (PT Pertamina, PEP, SKKMIGAS, KESDM, DJA, DJPB, Inspektorat IV) guna menindaklanjuti rapat tanggal Mei 2014, untuk membahas permasalahan mekanisme *cost recovery* atas pembebanan sewa BMN. 3. DJKN akan berkoordinasi lebih lanjut dengan PT Pertamina dan PEP guna menyusun Daftar Aset yang masih digunakan sebagai objek sewa	Pemerintah dan PT Pertamina telah menyepakati mekanisme penyelesaian tagihan negara kepada PT Pertamina yang menjamin tertagihnya piutang negara ini. Hal ini diduklikasi dengan telah dilaksanakannya pembayaran secara bertahap oleh PT. Pertamina kepada Rekening Kas Negara.	**Masih dalam proses**

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				definitif. 4. DJKN akan melakukan pembahasan dan finalisasi draft Perjanjian Sewa dengan pihak PT Pertamina dan PEP dengan melibatkan Biro Hukum dan Dit Hukum & Humas 5. Penandatanganan Perjanjian Sewa antara DJKN dengan pihak PT Pertamina dan/atau PEP.		
		d. menetapkan langkah-langkah penyelesaian piutang PT TPPI yang lebih efektif untuk menghindari terjadinya kerugian Negara.	DJA DJKN SKK Migas	1. Pemerintah c.q. DJA akan menginisiasi langkah koordinatif solusi penyelesaian piutang Pemerintah pada PT TPPI yang memenuhi prinsip *good governance* dan akuntabel. Sebagai langkah awal, akan dilaksanakan rapat yang melibatkan instansi terkait (DJKN, SKK Migas, PT Perusahaan Pengelolaan Aset, Pertamina). 2. DJA telah menyampaikan surat Nomor S-1341/AG/2014 tanggal 22 Juli 2014 kepada SKK Migas yang pada prinsipnya meminta agar SKK Migas memberikan progress terkini atas penyelesaian piutang SDA Migas dari	1. Telah dilakukan rapat koordinasi antara DJA, DJKN, dan SKK Migas pada tanggal 3 Juni 2014. Di dalam rapat tersebut Kementerian Keuangan meminta SKK Migas agar mencari alternatif solusi penyelesaian piutang PT TPPI dengan cara: a. *Out of court* settlement dengan kembali membahas mekanisme penyelesaian bersama PT PPA dan PT Pertamina b. Alternatif penyelesaian selain itu antara lain penagihan piutang negara melalui Panitia Urusan Piutang Negara.	Masih dalam proses

www.peraturan.go.id

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				TPPI sesuai dengan kesepakatan rapat tanggal 3 Juni 2014	2. Pada akhir tahun 2013 hingga kwartal pertama tahun 2014, TPPI mengirimkan beberapa surat kepada SKK Migas yang pada intinya menyampaikan dokumen usulan TPPI. Kemudian SKK Migas mengirimkan surat No. 0482 /SKKD30C0I20? 4rSC kepada PT. TPPI tanggal 1 Maret 2014 tentang Tanggapan SKK Migas terhadap Surat-surat PT TPPI (dokumen terlampir). Subscription Agreement Beserta Dokumen - Dokumen Terkait Usulan TPPI 3. Pada tanggal 28 Nopember 2014, TPPI mengirimkan surat No TPPI/SKKMIGAS/XI/20 14/L-146 tanggal 28 Nopember 2014 perihal Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian PT TPPI. Dan pada tanggal 16 Januari 2015 SKK Migas mengirirnkan surat kepada PT. TPPI tentang Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian PT TPPI yang pada intinya SKK Migas meminta agar PT TPPI menyampaikan salinan: a) Konsep final *Subscription Agreement*;	

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					b) Seluruh *Bonds Documents* c) Anggaran Dasar terakhir PT Trans Pacific Petrochemical Indotama beserta pengesahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia d) Seluruh sertifikat fiducia, sertifikat hak tanggungan dan akta gadai sebagaimana disebutkan dalam surat PT TPPI tersebut diatas.	
23.	Terdapat Selisih Catatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dengan Fisiknya dan Perbedaan Saldo Fisik SAL yang Dikelola KL antara Catatan BUN dan Catatan KL. **(Temuan Tahun 2013)**	Menteri Keuangan agar: a. menyusun mekanisme yang dapat menjamin validitas catatan dan fisik SAL melalui rekonsiliasi secara berjenjang dari tingkat KPPN, Kanwil DJPB, dan Pusat secara berkala dan segera menindaklanjuti selisih hasil rekonsiliasi tersebut; dan	DJPB	Monitoring dan Evaluasi secara berjenjang dari tingkat KPPN, Kanwil dan Kantor Pusat DJPB sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup BUN dan Kementerian/Lembaga.	Pemerintah telah secara memadai menindaklanjuti rekomendasi untuk menyusun mekanisme yang dapat menjamin validitas catatan dan fisik SAL. Saat ini Pemerintah telah dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan memetakan hal – hal yang menjadi penyesuaian sehingga dapat diselesaikannya penjelasan selisih antara catatan dan fisik SAL. Metode perhitungan (Formula) ini disamping menyelesaikan perhitungan catatan dan fisik SAL tahun 2014 juga telah dapat menjelaskan perbedaan catatan dan fisik SAL mulai LKPP tahun 2011.	**Masih dalam proses**

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		b. mengatur dan menerapkan sanksi kepada satker BLU yang tidak mematuhi kewajiban dalam pengesahan pertanggungjawaban pendapatan, belanja, dan Kas pada BLU.		Pemerintah akan terus melakukan pembinaan pengelolaan keuangan terhadap Satker BLU sehingga kewajiban satker BLU termasuk melakukan pengesahan terhadap pencapaian dan belanja satker BLU dilakukan sesuai ketentuan	1. Pemerintah melalui Dirjen Perbendaharaan cq Direktur PPK BLU telah menerapkan sanksi kepada Satker BLU yang tidak mematuhi kewajiban dalam pengesahan pertanggungjawaban pendapatan, belanja dan Kas pada BLU dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai pada unsur penilaian kinerja BLU yang diatur dalam PMK tentang Penilaian Kinerja Satker PK-BLU. 2. Kepada satker BLU yang tidak mematuhi kewajiban dalam pengesahan pertanggungjawaban pendapatan, belanja dan Kas pada BLU dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai pada unsur penilaian kinerja BLU yang diatur dalam PMK tentang Penilaian Kinerja Satker PK-BLU. 3. Telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47 /PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Badan Layanan Umum Serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Badan Layanan Umum	**Masih dalam proses**

www.peraturan.go.id

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan						
24.	DJP belum menagih sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran sebesar Rp482,29 Miliar. **(Temuan Tahun 2013)**	a. Melakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada AR dan pelaksana seksi penagihan, kepala seksi penagihan terkait, serta kepala kantor terkait.	DJP	Pemerintah akan melakukan pembinaan melalui instruksi Dirjen Pajak kepada AR dan pelaksana seksi penagihan, kepala seksi penagihan terkait, serta kepala kantor terkait.	Telah dilakukan pembinaan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui surat nomor S-217/PJ/2014 tanggal 4 Agustus 2014 hal Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Perwujudan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.	**Masih dalam proses**
		b. Meningkatkan pengawasan secara berjenjang terkait dengan kegiatan penerbitan STP atas keterlambatan pembayaran masa dan bunga penagihan; dan	DJP	1) DJP telah mengembangkan SI DJP untuk pengawasan keterlambatan pembayaran masa dan ALPP Modul Penagihan untuk memberikan data potensi penerbitan STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP melalui menu monitoring di ALPP Modul Penagihan agar dapat dilakukan penelitian oleh KPP untuk penerbitan STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP. 2) Terkait DJP belum menerbitkan STP Bunga Penagihan atas	Peningkatan pengawasan secara berjenjang telah dimasukkan sebagai bagian dari instruksi Dirjen Pajak dalam surat nomor S-217/PJ/2014 tanggal 4 Agustus 2014 hal Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Perwujudan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan	**Masih dalam proses**

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				SKPKB/SKPKBT yang dibayar melewati tenggat jatuh tempo Dirjen Pajak melalui Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-192/PJ.04/2014 tanggal 13 Februari 2014 Perihal Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh BPK RI atas Kegiatan Penagihan Pajak Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 Khusus Penerbitan STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) UU KUP telah menginstruksi kepada seluruh Kepala Kanwil DJP dan Kepala KPP untuk menerbitan STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP dengan skala prioritas.		
		c. Menginstruksikan kepada Kepala KPP terkait, untuk segera menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran setoran masa dan bunga penagihan sebesar	DJP	Dirjen Pajak telah menginstruksikan kepada Kepala KPP terkait melalui Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-192/PJ.04/2014 tanggal 13 Februari 2014 Perihal Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh BPK RI atas Kegiatan Penagihan Pajak Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 Khusus	1. Dirjen Pajak telah menginstruksikan kepada Kepala KPP terkait melalui Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-192/PJ.04/2014 tanggal 13 Februari 2014 Perihal Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh BPK RI atas Kegiatan Penagihan Pajak Tahun 2012 dan Semester I	**Masih dalam proses**

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Rp482.291.378.765.		Penerbitan STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) UU KUP untuk menerbitkan STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP dengan skala prioritas	Tahun 2013 Khusus Penerbitan STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) UU KUP untuk menerbitkan STP Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP dengan skala prioritas 2. Terkait setoran masa yang tidak diperoleh data detail dari BPK tidak dapat ditindaklanjuti. 3. Untuk STP bunga penagihan sudah disampaikan bukti STP kepada BPK.	
25.	Penetapan dan penagihan pajak tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan piutang pajak daluwarsa sebesar Rp800,88 Miliar. **(Temuan Tahun 2013)**	a. Menerbitkan instruksi terkait dengan kegiatan pemeriksaan pajak dengan memperhatikan waktu daluwarsa penetapan pajak	DJP	Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Instruksi Pemeriksaan dengan memperhatikan waktu daluarsa penetapan pajak. Penerbitan Instruksi dan/atau Persetujuan Usulan Pemeriksaan akan diterbitkan dengan mengacu kepada Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-15/PJ/2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2014 dimana telah di uraikan secara detail dalam Surat Edaran tersebut Strategi Pemeriksaan terkait dengan Pemeriksaan yang akan daluarsa penetapan tahun	Telah diterbitkan Instruksi Dirjen Pajak nomor INS-04/PJ/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Penyelesaian Penugasan Pemeriksaan Terkait Daluarsa Penetapan dan INS-05/PJ/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Penyelesaian Penugasan Pemeriksaan dan Yang Telah Melewati Jangka Waktu Pemeriksaan. Kegiatan Penyelesaian agar memperhatikan daluarsa penetapan pajak juga telah termasuk dalam huruf E angka 2 huruf c Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-15/PJ/2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Rencana dan Strategi Pemeriksaan tahun	**Masih dalam proses**

www.peraturan.go.id

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				2014 dan 2015 serta penyelesaian pemeriksaan yang harus memperhatikan daluarsa penetapan tahun 2014 dan 2015.	2014	
		b. Memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa pajak, petugas penagihan, kepala seksi penagihan, Kepala KPP terkait, Direktur Keberatan dan Banding, Direktur Peraturan Perpajakan I, dan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; dan	DJP	Pemerintah akan melakukan pembinaan melalui instruksi Dirjen Pajak kepada pemeriksa pajak, petugas penagihan, kepala seksi penagihan, Kepala KPP terkait, Direktur Keberatan dan Banding, Direktur Peraturan Perpajakan I, dan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.	Telah dilakukan pembinaan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui surat nomor S-217/PJ/2014 tanggal 4 Agustus 2014 hal Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Perwujudan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.	**Masih dalam proses**
		c. Meningkatkan pengawasan secara berjenjang terkait dengan kegiatan pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak secara aktif.	DJP	Peningkatan pengawasan secara berjenjang akan dimasukkan sebagai bagian dari instruksi Dirjen Pajak dalam rangka pembinaan kepada petugas maupun pemeriksa pajak terkait kegiatan pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak secara aktif.	1. Peningkatan pengawasan secara berjenjang telah dimasukkan sebagai bagian dari instruksi Dirjen Pajak dalam surat nomor S-217/PJ/2014 tanggal 4 Agustus 2014 hal Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Perwujudan Nilai-Nilai	**Masih dalam proses**

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Kementerian Keuangan. 2. Selain Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan tindak lanjut melalui Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-10[illegible]/PJ.04/2014 tentang Permintaan Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun Anggaran 2013 Khusus Piutang Pajak Terkait Kegiatan Penagihan Pajak Tidak Sesuai dengan Ketentuan Perpajakan yang Berlaku Mengakibatkan Piutang Pajak Daluwarsa Tanpa Tindakan Penagihan.	
26.	DJP kurang menetapkan nilai pajak terutang kepada WP sebesar Rp338,02 Miliar **(Temuan Tahun 2013)**	a. Memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa pajak, peneliti keberatan, supervisor, kepala kantor terkait, dan pejabat terkait kegiatan pemeriksaan;	DJP	Pemerintah akan melakukan pembinaan melalui instruksi Dirjen Pajak kepada pemeriksa pajak, penelaah keberatan, kepala kantor atau pejabat terkait.	Telah dilakukan pembinaan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui surat nomor S-217/PJ/2014 tanggal 4 Agustus 2014 hal Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Perwujudan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.	**Masih dalam proses**
		b. Melakukan upaya-upaya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memulihkan kekurangan	DJP	Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp338.023.823.352 tersebut. Dalam hal diketahui terdapat novum dan	Dari penelitian yang telah dilakukan: a. terdapat 10 temuan dengan nilai Rp79.891.218.177,00 yang sudah daluarsa penetapan,	**Masih dalam proses**

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		penerimaan pajak sebesar Rp338.023.832.352, dan		tahun pajak novum tersebut belum daluarsa penetapan, maka akan diusulkan pemeriksaan yang setelah terlebih dahulu Wajib Pajak diimbau untuk melakukan pengungkapan sendiri melalui keterangan tertulis adanya novum tersebut sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) UU KUP.	b. 30 temuan senilai Rp138.605.891.485,00 telah tercapai novum c. 4 temuan senilai Rp31.049.758.776,00 sudah dilakukan penghitungan oleh pemeriksa dan telah mengakibatkan potensi pajak yang hilang d. 2 temuan senilai Rp146.505.693,00 telah dilakukan penerbitan STP dan pembetulan SKPKB oleh KPP terkait, e. 3 temuan senilai Rp88.330.458.218,00 terkait dengan pengurangan sanksi dan penelitian keberatan yang tindak lanjutnya dilakukan oleh Kanwil DJP WP Besar.	
		c. Meningkatkan pengawasan secara berjenjang terkait dengan kegiatan pemeriksaan, penelitian keberatan, dan penelitian atas permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi sesuai Pasal	DJP	Peningkatan pengawasan secara berjenjang akan dimasukkan sebagai bagian dari instruksi Dirjen Pajak dalam rangka pembinaan kepada pemeriksa pajak, penelaah keberatan dan kepala kantor terkait.	Telah dilakukan pembinaan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui surat nomor S-217/PJ/2014 tanggal 4 Agustus 2014 hal Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Perwujudan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.	**Masih dalam proses**

www.peraturan.go.id

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27.	PNBP pada 30 KL Sebesar Rp384.98 Miliar dan USD1,000,000.00 terlambat/belum disetor, kurang/tidak dipungut, berindikasi setoran fiktif, dan digunakan langsung di luar mekanisme APBN. **(Temuan Tahun 2013)**	36 UU KUP a. memperbaiki peraturan PNBP terkait mekanisme penyetoran PNBP ke Kas negara;	DJA	Pemerintah telah menerbitkan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan; - PMK Nomor: 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Elektronik; - Peraturan Dirjen Anggaran Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik.	Pemerintah telah memperbaiki ketentuan terkait penyetoran PNBP antara lain melalui pencabutan: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan; b. PMK Nomor: 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik; serta c. Peraturan Dirjen Anggaran Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik.	**selesai**
		b. mempercepat proses penyelesaian revisi DIPA PNBP;		Pengaturan tentang penyelesaian Revisi DIPA PNBP telah dimuat dalam PMK Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran yang antara lain telah mengatur bahwa perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP sebagai akibat: - Kelebihan realisasi atas target yang	Pengaturan tentang penyelesaian Revisi DIPA PNBP telah disempurnakan dalam PMK 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2012 yang antara lain: 1. Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP yang bersifat menambah pagu PNBP sebagai akibat:	**selesai**

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				direncanakan dalam APBN atau APBNP. Adanya PNBP yang berasal dari kontrak/kerjasama/nota kesepahaman atau dokumen yang dipersamakan Adanya satker PNBP baru. - Diterbitkannya KMK tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP. - Adanya pencabutan status pengelolaan keuangan BLU pada satker.	- Kelebihan realisasi atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan kembali) yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan Adanya PNBP yang berasal dari kontrak/ kerjasama/nota kesepahaman - Adanya Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP baru - Adanya satker PNBP baru - Peningkatan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan KMK mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP - Adanya penetapan status pengelolaan keuangan BLU pada suatu satker 2. Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP yang bersifat mengurangi pagu PNBP sebagai	

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					akibat Perubahan atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan kembali) yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan - Penurunan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan KMK mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP - Pencabutan status pengelolaan keuangan BLU pada satker.	
		c. mengatur sanksi yang tegas atas keterlambatan penyetoran dan penggunaan langsung;		Pengaturan sanksi yang tegas atas keterlambatan penyetoran dan penggunaan langsung PNBP akan diatur dalam Revisi Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 Tentang PNBP.	Pengaturan sanksi yang tegas atas keterlambatan penyetoran dan penggunaan langsung PNBP akan diatur dalam Revisi Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 Tentang PNBP	Masih dalam proses
		d. mengajukan revisi UU PNBP kepada DPR terutama yang menyangkut kewenangan penetapan jenis dan penyesuaian tarif PNBP yang		a. Revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP, antara lain telah mengatur: - Perubahan penetapan tarif: "Dalam hal tarif sering mengalami perubahan, tarif atas rincian jenis PNBP yang telah ditetapkan	Revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP, antara lain telah mengatur: - Perubahan penetapan tarif: "Dalam hal tarif sering mengalami perubahan, tarif atas rincian jenis PNBP yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah dapat	Masih dalam proses

www.peraturan.go.id

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		memberikan sanksinya;		Peraturan Pemerintah dapat diubah dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga terkait dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum".	diubah dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga terkait dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum". Sanksi terkait penyetoran PNBP	
				- Sanksi terkait penyetoran PNBP.		
		e. melakukan pendataan dan monitoring atas potensi PNBP di seluruh KL; dan		Melakukan pendataan dan memproses Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian/Lembaga, serta melakukan monitoring realisasi PNBP dengan menggunakan aplikasi SIMPONI sesuai dengan Peraturan Dirjen Anggaran Nomor: 1 Tahun 2014	Pemerintah telah melakukan: 1. Pendataan dan memproses Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian/Lembaga, serta melakukan monitoring realisasi PNBP dengan menggunakan aplikasi SIMPONI sesuai dengan Peraturan Dirjen Anggaran Nomor: 1 Tahun 2014. 2. Revisi PP tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada KL, dengan progres sebagai berikut: a) Telah ditetapkan – Kem. Kesehatan (PP No.21	**Masih dalam proses**

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Tahun 2013); Kem. Dalam Negeri (PP No. 64 Tahun 2013); Kem. Pertahanan (PP No. 57 Tahun 2015 dan PP No. 17 Tahun 2014 – Kem. Perhubungan (PP No. 74 Tahun 2013) – Kem. Hukum dan HAM (PP No. 45 Tahun 2014) – Kem. Kehutanan (PP No. 12 Tahun 2014 dan PP No. 33 Tahun 2014) b) Dalam proses penetapan oleh Presiden – Kem. Hukum dan HAM c) Dalam proses penuangan dalam naskah asli di Sekretariat Negara – Kementerian Perhubungan – Kementerian Pariwisata d) Dalam proses harmonisasi di Kem. Hukum dan HAM – Kementerian Kelautan dan	

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Perikanan e) Dalam proses pembahasan Kem. Luar Negeri Kem. Pertanian Kem. Perdagangan – Kem. ESDM – Kem. Pendidikan dan Kebudayaan (telah selesai diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, akan tetapi dikembalikan ke Kementerian Keuangan dikarenakan adanya perubahan Kementerian/ Lembaga di kabinet baru)	
		f. segera menyelesaikan pembangunan dan implementasi sistem informasi PNBP.		Pembangunan dan implementasi sistem informasi PNBP telah selesai dilaksanakan melalui SIMPONI.	Pembangunan dan implementasi sistem informasi PNBP telah selesai dilaksanakan melalui SIMPONI sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik.	**selesai**
28.	Terdapat penggunaan langsung atas	a. Memerintahkan Menteri Keuangan menyusun peraturan yang tegas	DJA	1. Akan menetapkan ketentuan yang mengatur penggunaan PNBP Jasinonsi untuk LPP RRI	Menteri Keuangan: 1. Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jenis	Masih dalam proses.

www.peraturan.go.id

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Penerimaan Jasa Iron pada LPP RRI sebesar Rp27,28 Miliar dan LPP TVRI Sebesar Rp 62,66 Miliar serta PNBP atas Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/TAC pada PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Sebesar Rp1,71 Triliun belum didukung Peraturan Pemerintah. **(Temuan Tahun 2013)**	atas penggunaan langsung PNBP Jasinonsi		2 Akan menerbitkan ketentuan yang mengatur penggunaan PNBP Jasinonsi untuk LPP TVR 3 Akan melakukan sosialiasi ketentuan mengenai penggunaan PNBP Jasinonsi untuk LPP RRI dan TVR	Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 2 akan menetapkan ketentuan yang mengatur penggunaan PNBP Jasinonsi untuk LPP TVRI; 3. akan melakukan sosialiasi ketentuan mengenai penggunaan PNBP Jasinonsi untuk LPP RRI dan TVRI. 4. telah melakukan sosialisasi pengelolaan PNBP bagi RRI tanggal 22 Mei 2014. 5. Telah melakukan koordinasi penyusunan RPP jenis dan tarif PNBP pada TVRI pada tanggal 19 Juni 2014. Saat ini, draft RPP masih dalam pembahasan internal TVRI.	
		b. Memerintahkan setiap Kepala Satker LPP RRI dan LPP TVRI untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian PNBP Jasinonsi	1. LPP RRI 2. LPP TVRI	Menteri Keuangan c.q. DJA akan memerintahkan agar setiap Kepala Satker LPP RRI dan LPP TVRI meningkatkan pengawasan dan pengendalian PNBP Jasinonsi.	1. Dalam rapat koordinasi yang dilakukan pada tanggal 4 September 2014, TVRI menyatakan akan segera membuat surat perintah kepada seluruh Kepala Satker LPP TVRI untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian PNBP Jasinonsi. 2 TVR dan RR akan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk segera menerbitkan aturan hukum pengelolaan penerimaan Jasa ons.	Masih dalam proses.
		c. Melakukan evaluasi dan kajian alternatif pengelolaan keuangan LPP TVRI dan LPP RRI menggunakan pola Badan Layanan Umum tanpa merubah status kelembagaan LPP dan tanpa mengganggu independensi LPP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan	1. LPP RRI 2. LPP TVRI	Telah disampaikan surat Direktur PNBP a.n. Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-856/AG/2014 pada tanggal 14 Mei 2014 hal Permintaan Penyampaian RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada LPP TVRI sebagai tindak lanjut dari surat Menteri Keuangan Nomor: S-221/MK.02/2013 tanggal 19 Maret 2013 hal Penjelasan Penggunaan Dana Non-APBN TVRI untuk menyampaikan Jenis dan Tarif atas PNBP yang Berlaku pada TVRI.	1. Telah disampaikan surat Direktur PNBP a.n. Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-856/AG/2014 pada tanggal 14 Mei 2014 hal Permintaan Penyampaian RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada LPP TVRI sebagai tindak lanjut dari surat Menteri Keuangan Nomor: S-221/MK.02/2013 tanggal 19 Maret 2013 hal Penjelasan Penggunaan Dana Non-APBN TVRI untuk menyampaikan Jenis dan Tarif atas PNBP yang Berlaku pada TVRI. 2. Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;	Masih dalam proses.
		d. Menetapkan tarif PNBP TAC dan tidak menerapkan pola sesuai IMO TAC sebelum tarif PNBP disarkan	DJA Kemhub	1. Revisi PP No 6 Tahun 2009 dalam rangka penetapan tarif PNBP Track Access Charge (TAC) telah selesai proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya, revisi PP No 6 Tahun 2009 akan disampaikan ke Presiden untuk mendapatkan penetapan. 2. Alokasi IMO dimasukkan dalam output cadangan sehingga tidak dapat dicairkan sebelum ditetapkannya revisi PP No. 6 Tahun 2009.	1. Revisi PP No 6 Tahun 2009 dalam rangka penetapan tarif PNBP Track Access Charge (TAC) dalam proses penetapan oleh Presiden 2 Alokasi IMO dimasukkan dalam output cadangan sehingga tidak dapat dicairkan sebelum ditetapkannya revisi PP No. 6 Tahun 2009.	Masih dalam proses
29.	Penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal di 38 KL sebesar Rp310,78 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan serta Penggunaan Belanja pada 55 KL Sebesar Rp750,58 Miliar Tidak Sesuai	Memerintahkan para Menteri/Kepala Lembaga agar: a. menginventarisasi dan mencatat seluruh Aset Tetap yang diperoleh dari belanja selain Belanja Modal;	DJA K/L	Kementerian Lembaga akan melakukan inventarisasi dan pencatatan seluruh Aset Tetap yang diperoleh dari belanja selain Belanja Modal. Beberapa K/L yang telah melakukan pencatatan aset tetap dimaksud melalui koreksi atas LKKL Tahun 2013.	Inventarisasi dan pencatatan seluruh aset tetap yang diperoleh selain dari Belanja Modal telah dilakukan dan dimasukan dalam SIMAK DMN. Proses memasukan dalam SIMAK BMN ditargetkan terselesaikan pada dalam tahun 2014	**Masih dalam proses**
		b. melakukan pengenaan	K/L	Pemerintah akan mengirimkan surat kepada K/L agar mengambil tindakan	1. K/L telah memberikan teguran dan sanksi terhadap Pejabat/Pegawai yang	**Masih dalam proses**

www.peraturan.go.id

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Ketentuan. **(Temuan Tahun 2013)**	dan penagihan denda atas kerugian negara kepada pihak yang bertanggung jawab dan memberikan sanksi dan melakukan upaya hukum terkait indikasi tindakan melawan hukum dan merugikan Negara;		secara tegas terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan atas pelaksanaan belanja 1) Mengenakan hukuman disiplin secara tegas kepada para pejabat/pegawai yang melakukan atau terbukti dalam pelanggaran ketentuan, 2) Mengupayakan pengembalian kerugian negara secara maksimal dengan cara pengenaan TGR kepada pelaku penyimpangan atau pelanggaran; 3) Melakukan upaya hukum sesuai dengan pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi untuk menimbulkan efek jera. 4) Mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan *governance* dalam pengelolaan keuangan negara dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.	melakukan pelanggaran. Selain itu pengembalian kepada negara juga tetap dilaksanakan oleh K/L dengan melakukan setoran kepada kas negara sebesar kerugian negara/perekonomian yang harus disetorkan 2. Terhadap kekurangan pengembalian yang masih terjadi tetap akan diproses selambat-lambatnya akhir Desember 2014.	
		c. mengoptimalkan verifikasi dalam	1. DJA	1) Pemerintah akan mengoptimalkan verifikasi dalam penyusunan anggaran	PMK Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan	**Diusulkan selesai.**

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		penyusunan anggaran K/L dan pencapaian jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibayai dan melaksanakan sosialisasi PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN serta ketentuan pelaksanaannya; dan	2. DJPB 3. K/l	KL dan pencapaian jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibayai 2) Melaksanakan sosialisasi PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN serta ketentuan pelaksanaannya.	RKA-K/L telah mengakomodasi rekomendasi BPK dimaksud. Penyusunan RKA-K/L melalui 3 tahapan verifikasi yakni Biro Keuangan, APIP dan DJA. Dengan demikian mekanisme tersebut lebih menjamin jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibayai dengan APBN.	
		d. meningkatkan peran APIP dalam mereviu Rencana Kerja dan Anggaran KL.	K/L	Pemerintah akan meningkatkan peran APIP dalam mereviu Rencana Kerja dan Anggaran KL. (Telah diterbitkan PMK No. 194/PMK.02/2013 Tgl 17 Desember 2013 perubahan atas PMK No. 94)	Peran APIP dalam reviu RKA-K/L telah ditingkatkan dalam PMK Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L.	**Masih dalam proses**
30.	Pengeluaran Pemerintah untuk membiayai kegiatan SKK Migas tidak dilakukan melalui mekanisme APBN serta pertanggung	Pemerintah agar: a. Mempercepat penyusunan/ perubahan peraturan perundangan yang mengatur mengenai status kelembagaan SKK Migas;	1. Kem. ESDM 2. SKK Migas 3. DJA	Pemerintah akan berupaya mempercepat proses revisi UU Migas. Revisi dimaksud bergantung pada kecepatan penyiapan konsep/draft revisi UU Migas oleh DPR-RI. Di dalam revisi UU Migas tersebut antara lain memuat ketentuan mengenai pengelolaan keuangan SKK Migas termasuk penetapan status pengelolaan	1. Pemerintah akan berupaya mempercepat proses revisi UU Migas. Revisi dimaksud bergantung pada kecepatan penyiapan konsep/draft revisi UU Migas oleh DPR-RI. Di dalam revisi UU Migas tersebut antara lain memuat ketentuan mengenai pengelolaan keuangan SKK Migas	Masih dalam proses.

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	jawaban kedangan dari operasional SKK Migas belum diperoleh dalam LKPP **(Temuan Tahun 2013)**			aset SKK Migas. Biaya operasional SKK Migas untuk tahun 2015 telah dialokasikan di dalam RAPBN 2015. Sampai dengan diterbitkannya UU Migas yang baru, biaya operasional SKK Migas akan didanai dari APBN.	termasuk penatausahaan status pengelolaan aset SKK Migas 2. Biaya operasional SKK Migas untuk tahun 2015 telah dialokasikan di dalam RAPBN 2015. Sampai dengan diterbitkannya UU Migas yang baru, biaya operasional SKK Migas akan didanai dari APBN.	
		b. menetapkan pola pengelolaan keuangan SKK Migas sesuai mekanisme APBN; dan	1. Kem. ESDM 2. SKK Migas 3. DJA	Status pengelolaan keuangan SKK Migas akan ditetapkan di dalam UU Migas yang baru. Saat ini, revisi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sedang disusun oleh DPR karena revisi UU Migas tersebut merupakan hak inisiatif DPR. Target waktu penyelesaian revisi UU Migas tersebut tidak dapat dipastikan mengingat hal tersebut tergantung percepatan penyusunan revisi UU Migas oleh DPR.	Pemerintah telah mengalokasikan biaya operasional SKK Migas dalam RAPBN tahun 2015 melalui surat DJA yanga antara lain ditujukan kepada Kepala SKK Migas dengan nomor surat S-1470/AG/2014 tanggal 13 Agustus 2014 perihal pemberitahuan Pagu Anggaran BUN 999.08 untuk Anggaran Operasional Kegiatan OJK dan SKK Migas TA 2015. Anggaran biaya operasional SKK Migas tersebut telah memperoleh persetujuan dari Komisi VII DPR.	**selesai.**
		c. menetapkan ketentuan mengenai mekanisme pelaporan keuangan SKK Migas dan operasional kegiatan hulu migas ke	1. Kem. ESDM 2. SKK Migas	Pemerintah akan mengkaji dan menetapkan ketentuan mengenai mekanisme pelaporan keuangan SKK Migas dan operasional kegiatan hulu migas ke dalam LKPP sehingga menjadi	1. Pelaporan keuangan dan operasional kegiatan hulu migas telah dimasukkan sebagai bagian dari LKPP Tahun 2013 dan 2014. 2. Khusus pelaporan keuangan SKK	**selesai.**

www.peraturan.go.id

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		dalam LKPP sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel.	3. DJA	lebih transparan dan akuntabe	Migas Tahun 2014 tetap seperti yang berlaku selama ini dengan mengikuti standar dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh SKK Migas. Sedangkan untuk tahun 2015 biaya operasional yang bersumber dari APBN melalui BA 999.08 akan diposkan juga melalui BA 999.08.	
31.	Pemeriksaan ulang atas PT B.1.1 tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga DJP tidak dapat menagih SKPKB sebesar Rp554,52 Miliar dan tidak dapat mengeksekusi barang sitaan sebesar Rp259,06 Miliar. **(Temuan Tahun 2013)**	Menteri Keuangan agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pemeriksa dan pejabat lainnya yang terkait.	DJP	Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan pembinaan melalui instruksi Dirjen Pajak kepada pemeriksa dan pejabat terkait lainnya.	Telah dilakukan pembinaan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui surat nomor S-217/PJ/2014 tanggal 4 Agustus 2014 hal Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Perwujudan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.	**Masih dalam proses**

NO	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	PIC	RENCANA TINDAK PEMERINTAH	UPDATE PROGRES TINDAK LANJUT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32.	Akses Laba BUMN untuk Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dikelola secara ekstrakomptabel mengurangi hak negara atas kekayaan BUMN minimal sebesar Rp9,13 triliun dan berpotensi terjadi penyalahgunaan dana PKBL. **(Temuan Tahun 2013)**	Pemerintah agar menelaah ketentuan mengenai status dan pengelolaan dana PKBL dengan memperhatikan UU Keuangan Negara, UU BUMN, dan Standar Akuntansi yang berlaku; serta melakukan langkah-langkah perbaikan atas pelaksanaan PKBL untuk menjamin keberlanjutan program tersebut dan tidak merugikan keuangan negara.	Kem. BUMN	1) Telah menerbitkan Peraturan Menteri BUMN yang mengatur pengalihan pengelolaan PKBL ke masing-masing BUMN, sehingga Kementerian BUMN tidak terlibat lagi dalam pengelolaan PKBL 2) Melakukan pengkajian mengenai status kepemilikan PKBL, untuk memastikan PKBL merupakan bagian dari keuangan negara atau tidak. 3) Mengalihkan pengelolaan PKBL dan mengembalikan sisa dana yang masih ada kepada masing-masing BUMN.	Pemerintah saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri BUMN tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang di dalamnya juga mengatur tentang pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. RPermen tersebut saat ini dalam proses fina sasi.	Masih dalam proses

Total Rekomendasi Tahun 2013: 96 Rekomendasi

- **Diusulkan selesai : 63 Rekomendasi**
- **Masih dalam proses : 33 Rekomendasi**

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN 42
LPJ Pengelolaan SBN
Tahun Anggaran 2014

www.peraturan.go.id

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN
SURAT BERHARGA NEGARA TAHUN 2014

PENDAHULUAN

Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara ini disusun dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara pasal 16 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara pasal 27. Di samping itu laporan ini juga disusun agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengetahui secara jelas dan transparan informasi terkait dengan pengelolaan Surat Berharga Negara tahun 2014. Seluruh angka dan data yang digunakan dalam laporan ini meliputi realisasi selama satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2014 dan berakhir 31 Desember 2014 , kecuali secara jelas dinyatakan lain.

Dalam peta kebijakan fiskal, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) termasuk dalam sumber pembiayaan dan pengelolaan portofolio utang negara. Pemerintah pusat berwenang menerbitkan Surat Berharga Negara setelah mendapat persetujuan DPR yang disahkan dalam kerangka APBN.

Tujuan penerbitan Surat Berharga Negara sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara adalah untuk:

a. Membiayai defisit APBN;
b. Menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran (*cash-mismatch*);
c. Mengelola portofolio utang Negara.

Adapun manfaat penerbitan SBN adalah sebagai berikut:

a. Sebagai Instrumen Fiskal
   Penerbitan SBN diharapkan dapat menggali potensi sumber pembiayaan APBN yang lebih besar dari investor pasar modal.
b. Sebagai Instrumen Investasi
   SBN menyediakan alternatif investasi yang relatif bebas risiko gagal bayar dan memberikan peluang bagi investor dan pelaku pasar untuk melakukan diversifikasi portofolionya guna memperkecil risiko investasi.
c. Sebagai Instrumen Pasar Keuangan
   Surat Berharga Negara dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan dan dapat dijadikan acuan (*benchmark*) bagi penentuan nilai instrumen pasar keuangan lainnya.

Surat Berharga Negara (SBN) terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pengertian Surat Utang Negara (SUN) menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, adalah

www.peraturan.go.id

surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

Sedangkan pengertian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Secara umum, SUN dapat dibagi dalam dua jenis yaitu Surat Perbendaharaan Negara (*Treasury Bills*) dan Obligasi Negara (*Treasury Bonds*). Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Sedangkan Obligasi Negara (ON) adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon dan/atau pembayaran bunga secara diskonto.

Menurut denominasi mata uangnya, ON yang telah diterbitkan Pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu ON berdenominasi Rupiah dan ON berdenominasi valuta asing. Menurut jenis tingkat bunganya, ON dapat dikelompokkan ke dalam ON dengan tingkat bunga tetap (*fixed rate*) dan ON dengan tingkat bunga mengambang (*floating rate*).

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2002, SUN diterbitkan dalam bentuk warkat maupun tanpa warkat (*scriptless*). SUN dengan warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas unjuk. Sertifikat atas nama adalah sertifikat yang nama pemiliknya tercantum di lembar sertifikat tersebut, sedangkan sertifikat atas unjuk adalah sertifikat yang tidak mencantumkan nama dan pelaku pasar untuk melakukan diversifikasi pemilik sehingga setiap orang yang menguasainya portofolionya guna memperkecil risiko investasi, adalah pemilik yang sah. Surat Utang Negara tanpa warkat (*scriptless*) adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronis (*book entry system*). Dalam hal SUN tanpa warkat maka bukti kepemilikan yang otentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronis. Cara pencatatan secara elektronis dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan ***(registry)*** dan penyelesaian transaksi perdagangan SUN di pasar sekunder dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (SUN) menyatakan bahwa SUN dapat diterbitkan dalam bentuk yang dapat diperdagangkan (*tradable*) atau bentuk yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). Surat Utang Negara yang dapat diperdagangkan pertama kali diperdagangkan oleh Pemerintah di pasar primer / pasar perdana. Perdagangan SUN selanjutnya ada di pasar sekunder baik di dalam maupun di luar negeri. Perdagangan dapat dilakukan melalui bursa dan atau di luar bursa (***over the counter/*** OTC). SUN yang tidak diperdagangkan adalah SUN yang tidak diperjualbelikan di Pasar Sekunder dan biasanya diterbitkan secara khusus untuk pemodal institusi tertentu, baik domestik maupun asing, yang berminat untuk memiliki SUN sesuai dengan kebutuhan spesifik dari portofolio investasinya.

www.peraturan.go.id

SBSN adalah SBN yang berbasis syariah. Pemerintah mulai menerbitkannya pada tahun 2008 dengan denominasi rupiah yakni setelah disahkannya UU No 19 Tahun 2008 tentang SBSN. Berdasarkan metode penerbitan, SBSN tidak berbeda dengan SBN konvensional yaitu SUN. Yang membedakannya dengan SUN adalah SBSN bukan surat pernyataan utang sehingga dalam penerbitannya dibutuhkan *underlying transaction* dan *underlying asset* sebagai obyek transaksi. Adapun tujuan penerbitan SBSN adalah untuk membiayai APBN termasuk membiayai proyek-proyek pembangunan pemerintah seperti proyek infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat.

Penerbitan SBSN dilakukan melalui SPV (*Special Purpose Vehicle*) sebagai penerbit. Yang bertindak sebagai SPV adalah Perusahaan Penerbit SBSN (PP SBSN), yang berbadan hukum. PP SBSN didirikan berdasarkan Undang-Undang SBSN untuk penerbitan SBSN. Ketentuan pendirian dan pengelolaan PP SBSN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN.

Adapun struktur Surat Berharga Negara secara umum pada tahun 2014 dapat digambarkan pada gambar 1.

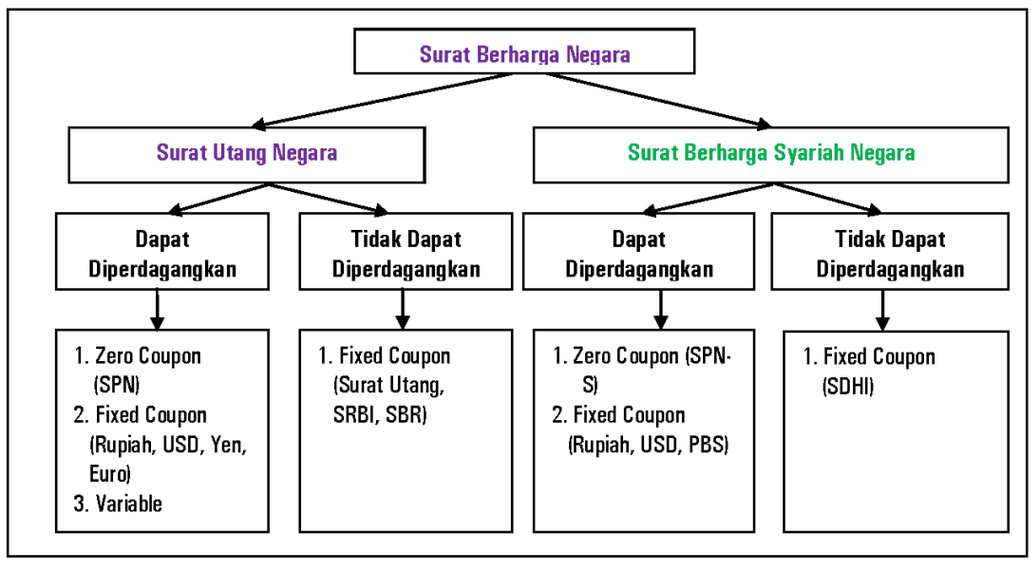

Gambar 1. Struktur Surat Berharga Negara

STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUN 2014

Kebijakan umum yang digunakan dalam penyusunan strategi pembiayaan tahunan adalah sebagai berikut:

1. Mengutamakan penerbitan SBN domestik yang dapat mendukung market development dan pengelolaan risiko portofolio utang;
2. Penerbitan SBN valas sebagai komplementer;
3. Penentuan instrumen memperhatikan kebutuhan pasar SBN dan dalam rangka memperluas basis investor;
4. Penerbitan SBN Ritel dalam rangka pendalaman pasar *(market deepening)* dan meningkatkan keikutsertaan masyarakat *(financial inclusion)*;

www.peraturan.go.id

5. Melakukan pengelolaan portofolio SBN secara aktif dan meningkatkan likuiditas pasar SBN antara lain melalui *buyback* dan *debt switch*, termasuk *liability management* untuk SBN valas;
6. Memperluas cakupan *Bond Stabilization Framework* (BSF) dan menyempurnakan indikator *Crisis Management Protocol* (CMP) pasar SBN dalam rangka mendukung stabilitas pasar SBN;
7. Mempertahankan kebijakan *negative net-flow* bagi pinjaman luar negeri
8. Memperkuat fungsi Investor Relation Unit, antara lain melalui diseminasi informasi secara proaktif, respon yang cepat dan efektif, dan komunikasi yang efektif dengan investor dan stakeholder lainnya.
9. Pengadaan pinjaman/kredit luar negeri dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan prioritas dengan berfokus kepada sektor pembangunan infrastruktur yang dapat memberikan Value Added bagi kepentingan nasional.
10. Mengefektifkan disbursement pinjaman yang telah aktif sesuai jadual dan melakukan pemilihan/pengadaan pemberi pinjaman dengan tingkat biaya dan risiko yang terkendali.
11. Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi pinjaman luar negeri untuk memberikan *early warning* terhadap upaya peningkatan efektivitas dan kinerja penyerapan pinjaman.

KEBUTUHAN PEMBIAYAAN

Kebutuhan APBN atas pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) ditetapkan dalam dua pos yaitu pos Bunga Utang SBN dan Kewajiban Biaya Lain (SUN dan SBSN) serta Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri yang menjadi fungsi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Utang (999.01)

A. Bunga Utang Surat Berharga Negara

Berdasarkan APBN-P TA 2014 , total pagu Bunga dan Biaya Utang SBN ditetapkan sebesar Rp304.322.742.165.000,- sementara realisasi pembayaran bunga dan biaya SBN adalah sebesar Rp293.097.191.852.645,-, atau sebesar 96.31%.

B. Surat Berharga Negara Neto

Pengertian Surat Berharga Neto berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2014 adalah selisih antara jumlah penerbitan dan pembayaran pokok jatuh tempo dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (sukuk).

Mengingat target pembiayaan SBN dalam APBN ditetapkan dalam bentuk penerbitan SBN Neto, maka Pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menentukan jumlah penerbitan SBN dan jumlah pembelian kembali. Untuk tahun 2014, sesuai dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, target SBN neto adalah sebesar Rp264.983.707.000.000,-. Realisasi SBN neto tahun 2014 adalah sebesar Rp.264.628.918.472.574,-. Adapun rincian SBN neto disajikan pada tabel 1.

Realisasi SBN neto tahun 2014 memperhitungkan penerimaan dan pembayaran bunga utang diterima di muka sebesar -Rp.349.195.330.800,- dengan rincian penerimaan sebesar Rp.5.023.398.294.500,- dan pembayaran sebesar

www.peraturan.go.id

Rp.5.372.593.625.300,-. Perhitungan ini sebagai konsekuensi dari kode akun penerimaan dan pembayaran bunga utang diterima di muka yang dikelompokkan dalam kelompok akun pembiayaan (kelompok akun 71 dan 72).

Penerbitan SBN tahun 2014 terdiri atas penerbitan SBN domestik maupun valas, baik SUN maupun SBSN. Penerbitan SBN tahun 2014 adalah sebesar Rp.434.073.126.686.866,- dengan rincian penerbitan SBN domestik sebesar Rp.348.115.140.000.000,- dan penerbitan SBN valas adalah sebesar USD5.850.000.000,- dan EUR1.000.000.000,- atau setara dengan Rp.85.957.986.686.866,-.

Pelunasan SBN tahun 2014 adalah sebesar Rp.169.095.012.883.492 dengan rincian pelunasan SBN domestik Rp.135.166.812.883.492,- dan pelunasan SBN valas sebesar USD2.950.000.000,- atau setara dengan Rp.33.928.200.000.000,-.

www.peraturan.go.id

Tabel.1. SBN Neto tahun 2014

NO	AKUN	URAIAN	JUMLAH
			TOTAL
Penerimaan			
1	711411	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara	60,900,000,000,000
2	711421	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri	229,420,795,000,000
3	711422	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri	4,804,417,699,000
4	711441	Penerimaan Penerbitan/Penjulan SBSN - Jangka Panjang	41,181,713,565,568
5	711442	Penerimaan Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang	173,506,611,000
6	711451	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SPN Syariah	16,170,000,000,000
7	711461	Penerimaan SBSN dalam rangka pembiayaan proyek melalui SBSN PBS	442,631,434,432
8	711611	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara - Valas	68,211,583,706,866
9	711612	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara - Valas	45,473,984,500
10	711641	Penerimaan Penerbitan SBSN-Valas	17,746,402,980,000
11	711642	Penerimaan Imbalan Dibayar di muka SBSN-Valas	-
Total Penerimaan			**439,096,524,981,366**
Pengeluaran			
1	721311	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara	55,000,000,000,000
2	721321	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri	40,271,434,883,492
3	721322	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri melalui Pembelian Kembali	7,294,968,000,000
4	721324	Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri	5,151,535,004,000
5	721341	Pengeluaran pelunasan SBSN-jk Panjang	18,532,410,000,000
6	721343	Pembayaran Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang	172,435,299,000
7	721351	Pengeluaran Pelunasan SPN-S	14,068,000,000,000
8	721511	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Valas	26,394,700,000,000
9	721512	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Valas melalui Pembelian Kembali	0
10	721513	Pembayaran utang bunga Obligasi Valas	48,623,322,300
11	721541	Pengeluaran pelunasan SBSN valas Jangka panjang	7,533,500,000,000
Total Pengeluaran			**174,467,606,508,792**
SBN Neto			**264,628,918,472,574**
Target SBN Neto APBNP			**264,983,707,000,000**
Persentase Realisasi terhadap Target SBN Neto			99.87%

PENGELOLAAN PORTOFOLIO SUN TAHUN 2014

Target pembiayaan APBN-Perubahan tahun 2014 dari SBN Neto ditetapkan sebesar Rp264.983.707.000.000,-. Jumlah nominal tersebut merupakan target neto, yaitu jumlah penerbitan SUN setelah dikurangi dengan jumlah SUN yang jatuh tempo maupun dibeli kembali oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo *(buyback).*

www.peraturan.go.id

A. Penerbitan dan Pelunasan Obligasi Negara dalam Rupiah

Obligasi Negara (ON) dalam denominasi Rupiah yang diterbitkan pada tahun 2014 dilelang sebanyak 28 kali, yang dilakukan sejak bulan Januari sampai Desember 2014 .

Penerbitan ON dalam denominasi Rupiah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain: (i) struktur jatuh tempo utang yang sudah ada, (ii) pengembangan pasar sekunder SUN, dan (iii) *cost of borrowing*.

Penerbitan ON secara reguler dilakukan dengan cara lelang di pasar perdana. Pada setiap penerbitan di tahun 2014, jumlah penawaran yang dimenangkan lebih rendah dari jumlah penawaran yang masuk dengan *bid to cover ratio* berkisar dari 1 sampai 11.15 kali. Total nilai net nominal ON dalam denominasi Rupiah yang diterbitkan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 223.476.795.000.000,-, dengan rincian:

a. ON dengan tingkat bunga tetap (*Fixed Rate*) adalah sebesar Rp.199.870.000.000.000,- ;

b. ON ritel yang terdiri dari penerbitan Obligasi Negara Ritel Indonesia (ORI) dan *Saving Bonds Ritel* (SBR) dengan tingkat bunga tetap *(Fixed Rate)* adalah sebesar Rp.23.606.795.000.000,-,

Penjualan ON Ritel yang dilakukan sebanyak dua kali penerbitan, yaitu seri ORI 011 dan SBR001, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memperluas basis investor SUN dan diterbitkan dengan metode *bookbuilding* melalui Agen Penjual yang diseleksi oleh Panitia Seleksi. *Bookbuilding* adalah salah satu metode penerbitan surat berharga, yaitu investor akan menyampaikan penawaran pembelian atas suatu surat berharga, biasanya berupa jumlah dan harga (*yield*) penawaran pembelian, dan dicatat dalam *book order* oleh *investment bank* yang bertindak sebagai *bookrunner*.

Pelunasan ON Rupiah yang jatuh tempo pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.40.271.434.883.492 yang terdiri dari:

a. ON bunga tetap (Fixed Rate) sebesar Rp.14.044.602.000.000,-

b. ON Ritel yang terdiri dari pelunasan ORI seri ORI008 sebesar Rp.11.000.000.000.000,-;

c. Surat Utang seri Su dan SRBI sebesar Rp.5.815.606.883.492,-;

d. ON bunga variable (variable rate) sebesar Rp.9.411.226.000.000,-.

B. Penerbitan dan Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

SPN adalah Surat Utang Negara yang jangka waktu jatuh temponya sampai dengan 12 bulan. Pada tahun 2014 , Pemerintah menerbitkan 40 seri SPN, dengan total penerbitan SPN mencapai Rp.60.900.000.000.000,- dengan rincian sebagaimana dalam tabel 2.

www.peraturan.go.id

Tabel 2. Seri SPN yang diterbitkan tahun 2014

No.	Seri	Tgl Penerbitan	Jatuh Tempo	Kupon	Face Value
1	SPNNT20140303	2-Jan-14	3-Mar-14	-	12,400,000,000,000
2	SPN03140408	9-Jan-14	8-Apr-14	-	1,000,000,000,000
3	SPN12150108	9-Jan-14	8-Jan-15	-	2,000,000,000,000
4	SPN12150108	23-Jan-14	8-Jan-15	-	2,000,000,000,000
5	SPN03140506	7-Feb-14	6-May-14	-	1,000,000,000,000
6	SPN12150206	7-Feb-14	6-Feb-15	-	2,000,000,000,000
7	SPN12150206	20-Feb-14	6-Feb-15	-	2,000,000,000,000
8	SPN03140605	6-Mar-14	5-Jun-14	-	1,000,000,000,000
9	SPN12150305	6-Mar-14	5-Mar-15	-	2,000,000,000,000
10	SPN12150108	20-Mar-14	8-Jan-15	-	1,000,000,000,000
11	SPN12150305	20-Mar-14	5-Mar-15	-	250,000,000,000
12	SPN03140703	4-Apr-14	3-Jul-14	-	1,000,000,000,000
13	SPN12150403	4-Apr-14	3-Apr-15	-	500,000,000,000
14	SPN12150206	17-Apr-14	6-Feb-15	-	450,000,000,000
15	SPN12150403	17-Apr-14	3-Apr-15	-	550,000,000,000
16	SPN12140731	2-May-14	31-Jul-14	-	550,000,000,000
17	SPN12150501	2-May-14	1-May-15	-	500,000,000,000
18	SPN12150206	14-May-14	6-Feb-15	-	1,000,000,000,000
19	SPN12150501	14-May-14	1-May-15	-	1,000,000,000,000
20	SPN12150305	30-May-14	5-Mar-15	-	1,350,000,000,000
21	SPN12140911	12-Jun-14	11-Sep-14	-	1,000,000,000,000
22	SPN12150611	12-Jun-14	11-Jun-15	-	2,000,000,000,000
23	SPN12150403	26-Jun-14	3-Apr-15	-	400,000,000,000
24	SPN12141009	11-Jul-14	9-Oct-14	-	1,000,000,000,000
25	SPN12150710	11-Jul-14	10-Jul-15	-	2,000,000,000,000
26	SPN12150501	24-Jul-14	1-May-15	-	350,000,000,000
27	SPN12150710	24-Jul-14	10-Jul-15	-	800,000,000,000
28	SPN12141107	7-Aug-14	7-Nov-14	-	1,000,000,000,000
29	SPN12150806	7-Aug-14	6-Aug-15	-	1,000,000,000,000

www.peraturan.go.id

No.	Seri	Tgl Penerbitan	Jatuh Tempo	Kupon	Face Value
30	SPN12150611	21-Aug-14	11-Jun-15	-	800,000,000,000
31	SPN12150806	21-Aug-14	6-Aug-15	-	2,000,000,000,000
32	SPN03141203	4-Sep-14	3-Dec-14	-	1,000,000,000,000
33	SPN12150903	4-Sep-14	3-Sep-15	-	2,000,000,000,000
34	SPN12150710	18-Sep-14	10-Jul-15	-	2,000,000,000,000
35	SPN03150103	2-Oct-14	10-Jul-15	-	1,000,000,000,000
36	SPN12151001	2-Oct-14	3-Sep-15	-	3,000,000,000,000
37	SPN12150806	16-Oct-14	6-Aug-15	-	1,000,000,000,000
38	SPN12151001	16-Oct-14	1-Oct-15	-	2,000,000,000,000
39	SPN12150206	6-Nov-14	6-Feb-15	-	1,000,000,000,000
40	SPN12151105	6-Nov-14	5-Nov-15	-	2,000,000,000,000
	Jumlah				**60,900,000,000,000**

SPN yang merupakan utang jangka pendek diterbitkan tanpa kupon. Pada saat penerbitan akan terdapat diskonto, yaitu selisih nilai penjualan dengan nilai nominal, yang akan diamortisasi sampai dengan jatuh tempo seri SPN tersebut.

Pelunasan SPN selama tahun 2014 adalah sebesar Rp.55.000.000.000.000,- dengan rincian sebagaimana disajkan dalam tabel 3.

Tabel 3. Daftar Pelunasan SPN Tahun 2014

NO.	Seri	Tgl Valuta	Jumlah Per Seri
1	SPN03140109	08/01/2014	1,000,000,000,000
2	SPN12140116	15/01/2014	2,000,000,000,000
3	SPN03140207	07/02/2014	1,000,000,000,000
4	SPN12140217	14/02/2014	2,000,000,000,000
5	SPNNT20140303	28/02/2014	12,400,000,000,000
6	SPN12140314	13/03/2014	2,000,000,000,000
7	SPN03140408	07/04/2014	1,000,000,000,000
8	SPN12140410	08/04/2014	2,000,000,000,000
9	SPN03140506	05/05/2014	1,000,000,000,000
10	SPN12140507	06/05/2014	2,350,000,000,000
11	SPN12140604	03/06/2014	650,000,000,000
12	SPN03140605	03/06/2014	1,000,000,000,000
13	SPN03140703	02/07/2014	1,000,000,000,000

www.peraturan.go.id

14	SPN12140703	02/07/2014	9,350,000,000,000
15	SPN12140731	25/07/2014	5,100,000,000,000
16	SPN12140911	10/09/2014	5,000,000,000,000
17	SPN12141009	08/10/2014	3,000,000,000,000
18	SPN12141107	06/11/2014	2,150,000,000,000
19	SPN03141203	02/12/2014	1,000,000,000,000
Jumlah			**55,000,000,000,000**

C. Penerbitan dan Pelunasan SUN dalam Valuta Asing

Total penerbitan SUN Valas dalam tahun 2014 adalah sebesar US$ 4.350.000.000 dan EUR1.000.000.000.,- atau setara dengan Rp.68.211.583.706.866,-, yang terdiri atas:

a. *International Bonds* sebesar US$ 4.000.000.000,- dan EUR1.000.000.000,- atau setara dengan Rp.64.226.133.706.866,-;

b. SUN domestik valas sebesar US$ 350.000.000,- atau setara dengan Rp.48.466.366.460.000,-.

Pada tahun 2014 dilaksanakan 4 kali penerbitan *International Bonds* yaitu pada bulan Januari 2014 yaitu seri RI0124 dengan tingkat yield 5.875% dan RI0144 dengan tingkat yield 6.750%. Pada bulan Maret 2014 dilakukan penerbitan kembali SUN valas doestik seri USDFR001.

Pada bulan Juli 2014, Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan transaksi penjualan Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi Euro seri RIEUR0721. Penjualan Surat Utang Negara dalam denominasi Euro ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia di pasar keuangan internasional. Penerbitan ini dilaksanakan sebagai bagian dari strategi diversifikasi sumber-sumber pembiayaan dan perluasan basis investor global. Hasil dari penerbitan ini digunakan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan APBN-P tahun 2014. Data penerbitan SUN dalam valuta asing pada tahun 2014, disajikan dalam tabel.4.

Tabel.4 Realisasi Penerbitan SUN Valas s.d. 31 Desember 2014

No.	Seri	Tgl Penerbitan	Jatuh tempo	Kupon	Face Value	
					Valas	Rupiah
1	RI0124	15-Jan-14	15-Jan-24	5.875%	$ 2,000,000,000.00	24,233,465,720,443
2	RI0144	15-Jan-14	15-Jan-44	6.750%	$ 2,000,000,000.00	24,232,900,739,557
3	USDFR0001	13-Mar-14	15-May-17	3.500%	$ 350,000,000.00	3,985,450,000,000
4	RIEU0721	8-Jul-14	8-Jul-21	2.875%	€ 1,000,000,000.00	15,759,767,246,866
JUMLAH						**68,211,583,706,866**

www.peraturan.go.id

Pada tahun 2014 terdapat dua seri *International Bonds* yang jatuh tempo yaitu seri RI0014 sebesar USD 1.300.000.000,- dan RI00140504 sebesar USD 1.000.000.000,- atau setara dengan Rp.26.394.700.000.000,-.

D. Pelaksanaan *Debt Switching/Buyback*

Dalam rangka mengurangi risiko pelunasan pokok SUN, Pemerintah berupaya untuk menata ulang struktur jatuh tempo SUN melalui *debt switching*, yaitu dengan membeli seri-seri ON jangka pendek dan menengah serta menukarkannya dengan Obligasi Negara yang mempunyai jatuh tempo jangka menengah dan panjang. Kondisi ini juga memberikan keleluasaan bagi Pemerintah untuk menerbitkan instrumen SUN jangka pendek, baik berupa Obligasi Negara Ritel maupun Surat Perbendaharaan Negara.

Total pelaksanaan *debt switching* pada tahun 2014 adalah sebanyak 4 kali dengan jumlah nominal SUN yang ditukar sebesar Rp.1.976.000.000.000 sebagaimana disajikan dalam tabel 5.

Tabel 5. Realisasi pelaksanaan *Debtswitching* tahun 2014

No.	Tanggal Debtswitch	Penawaran	Dimenangkan
1	27-Mar-14	4,886,000,000,000	3,420,000,000,000
2	19-Jun-14	1,484,000,000,000	1,252,000,000,000
3	11-Sep-14	2,675,000,000,000	307,000,000,000
4	11-Dec-14	1,546,000,000,000	965,000,000,000
TOTAL 2014		**10,591,000,000,000**	**5,944,000,000,000**

Rincian pelaksanaan *debt switching* pada tahun 2014 disajikan dalam tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 6. Rincian realisasi pelaksanaan *Debtswitching* tahun 2014 (dalam juta rupiah)

Tanggal	Dari				Menjadi			
	Seri	Jatuh Tempo	Kupon	Nominal	Seri	Jatuh Tempo	Kupon	Nominal
27-Mar-14	FR0051	15-05-2014	11.25000%	215,000	FR0069	15-04-2019	7.87500%	1,241,000
	FR0026	15-10-2014	11.00000%	256,000	FR0070	15-03-2024	8.37500%	1,284,000
	FR0027	15-06-2015	9.50000%	451,000	FR0071	15-03-2029	9.00000%	136,000
	FR0030	15-05-2016	10.75000%	192,000	FR0068	15-03-2034	8.37500%	759,000
	FR0055	15-09-2016	7.37500%	207,000				
	FR0060	15-04-2017	6.25000%					

www.peraturan.go.id

Tanggal	Dari				Menjadi			
	Seri	Jatuh Tempo	Kupon	Nominal	Seri	Jatuh Tempo	Kupon	Nominal
				1,159,000				
	FR0028	15-07-2017	10.00000%	131,000				
	FR0066	15-05-2018	5.25000%	46,000				
	FR0032	15-07-2018	15.00000%	40,000				
	FR0038	15-08-2018	11.60000%	96,000				
	FR0048	15-09-2018	9.00000%	186,000				
	FR0036	15-09-2019	11.50000%	441,000				
				3,420,000				**3,420,000**
19-Jun-14	FR0026	15-10-2014	11.00000%	394,000	FR0069	15-04-2019	7.87500%	66,000
	FR0027	15-06-2015	9.50000%	385,000	FR0070	15-03-2024	8.37500%	350,000
	FR0030	15-05-2016	10.75000%	34,000	FR0071	15-03-2029	9.00000%	653,000
	FR0055	15-09-2016	7.37500%	16,000	FR0068	15-03-2034	8.37500%	183,000
	FR0060	15-04-2017	6.25000%	21,000				
	FR0028	15-07-2017	10.00000%	-				
	FR0066	15-05-2018	5.25000%	-				
	FR0038	15-08-2018	11.60000%	37,000				
	FR0036	15-09-2019	11.50000%	365,000				
				1,252,000				**1,252,000**
11-Sep-14	FR0026	15-10-2014	11.00000%	19,000	FR0069	15-04-2019	7.87500%	37,000
	FR0027	15-06-2015	9.50000%	100,000	FR0070	15-03-2024	8.37500%	160,000
	FR0030	15-05-2016	10.75000%	5,000	FR0071	15-03-2029	9.00000%	101,000
	FR0055	15-09-2016	7.37500%	-	FR0068	15-03-2034	8.37500%	9,000

www.peraturan.go.id

Tanggal	Dari				Menjadi			
	Seri	Jatuh Tempo	Kupon	Nominal	Seri	Jatuh Tempo	Kupon	Nominal
	FR0060	15-04-2017	6.25000%	-				
	FR0028	15-07-2017	10.00000%	173,000				
	FR0066	15-05-2018	5.25000%	1,000				
	FR0038	15-08-2018	11.60000%	3,000				
	FR0048	15-09-2018	9.00000%	6,000				
	FR0036	15-09-2019	11.50000%	-				
				307,000				**307,000**
11-Dec-14	FR0027	15-06-2015	9.50000%	424,000	FR0069	15-04-2019	7.87500%	2,000
	FR0030	15-05-2016	10.75000%	41,000	FR0070	15-03-2024	8.37500%	418,000
	FR0055	15-09-2016	7.37500%	22,000	FR0071	15-03-2029	9.00000%	2,000
	FR0060	15-04-2017	6.25000%	7,000	FR0068	15-03-2034	8.37500%	543,000
	FR0028	15-07-2017	10.00000%	109,000				
	FR0066	15-05-2018	5.25000%	285,000				
	FR0032	15-07-2018	15.00000%	-				
	FR0038	15-08-2018	11.60000%	8,000				
	FR0048	15-09-2018	9.00000%	39,000				
	FR0036	15-09-2019	11.50000%	30,000				
				965,000				**965,000**
TOTAL 2014				**5,944,000**				**5,944,000**

Di samping *debtswitch*, Pemerintah juga melakukan kegiatan *cash buyback* yang merupakan salah satu strategi pengelolaan portofolio SUN dengan cara melaksanakan pembelian ON yang belum jatuh tempo di pasar sekunder. ON yang telah dibeli tersebut kemudian dinyatakan lunas atau jatuh tempo, sehingga mengurangi total *outstanding* SUN.

www.peraturan.go.id

Pada tahun 2014 telah dilakukan transaksi langsung (*direct payment*) *cash buyback* SUN melalui *dealing room* DJPU sebanyak 5 kali dengan jumlah yang telah dibeli pemerintah sebanyak Rp.1.551.385.000.000,-. Rincian pelaksanaan *Buyback* disajikan pada tabel 7.

Tabel 7. Transaksi *Buyback* tahun 2014

No.	Date	Series	Jatuh Tempo	Volume	Nominal
1	20-Mar-13	FR0028	15-Jul-17	37,572	37,572,000,000
	Sub total			**37,572**	**37,572,000,000**
2	28-May-13	FR0032	15-Jul-18	5,508	5,508,000,000
		FR0038	15-Aug-18	11,895	11,895,000,000
	Sub total			**17,403**	**17,403,000,000**
3	10-Jun-13	FR0040	15-Sep-25	471,910	471,910,000,000
		FR0050	15-Jul-38	25,000	25,000,000,000
	Sub total			**496,910**	**496,910,000,000**
4	13-Jun-13	FR0048	15-Sep-18	144,500	144,500,000,000
		FR0028	15-Jul-17	50,000	50,000,000,000
		FR0060	15-Apr-17	160,000	160,000,000,000
		FR0055	15-Sep-16	145,000	145,000,000,000
	Sub total			**499,500**	**499,500,000,000**
5	20-Jun-13	FR0048	15-Sep-18	22,900	22,900,000,000
		FR0028	15-Jul-17	4,400	4,400,000,000
		FR0060	15-Apr-17	185,000	185,000,000,000
		FR0055	15-Sep-16	287,700	287,700,000,000
	Sub total			**500,000**	**500,000,000,000**
TOTAL 2013				1,551,385	**1,551,385,000,000**

PENGELOLAAN PORTOFOLIO SBSN TAHUN 2014

Dalam rangka perluasan basis investor, diversifikasi sumber pembiayaan, dan pengembangan pasar keuangan dalam negeri, Pemerintah telah menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah *sukuk*. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya *aqad* atau perjanjian antara para pihak berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

www.peraturan.go.id

Untuk keperluan penerbitan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, perlu adanya pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat yang diperlukan. Hal tersebut, juga dengan mempertimbangkan adanya kendala-kendala yang dihadapi dari sisi legal dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan basis hukum yang ada di Indonesia pada saat ini. Oleh karena itu, Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi landasan legal pengelolaan SBSN. Secara garis besar UU tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:

a. Transparansi pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara dalam kerangka kebijakan fiskal dan kebijakan pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara dengan mengatur lebih lanjut tujuan penerbitannya dan jenis-jenis akad atau perjanjian yang digunakan.
b. Kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara, baik dilakukan secara langsung oleh Pemerintah yang didelegasikan kepada Menteri, ataupun dilaksanakan melalui Perusahaan Penerbit.
c. Kewenangan Pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (*underlying asset*).
d. Kewenangan Wali Amanat untuk bertindak mewakili kepentingan Pemegang Surat Berharga Syariah Negara;
e. Kewenangan Pemerintah untuk membayar semua kewajiban yang timbul dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit, secara penuh dan tepat waktu sampai berakhirnya kewajiban tersebut.
f. Landasan hukum bagi pengaturan lebih lanjut atas tata cara dan mekanisme penerbitan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana maupun perdagangan Surat Berharga Syariah Negara di pasar sekunder agar pemodal memperoleh kepastian untuk memiliki dan memperdagangkan Surat Berharga Syariah Negara secara mudah dan aman.

Sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2008, tujuan penerbitan SBSN adalah untuk membiayai APBN termasuk membiayai proyek. Pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan SBSN pada Agustus 2008 melalui metode *bookbuilding* di pasar perdana dalam negeri.

SBSN berbasis proyek selain sebagai instrumen pembiayaan APBN juga sekaligus berfungsi mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri. Manfaat dari penerbitan SBSN berbasis proyek antara lain adalah untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan, mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur, mendukung pengembangan pasar keuangan, khususnya pasar keuangan syariah, mendorong peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri serta meningkatkan transparansi pelaksanaan kegiatan oleh K/L karena perkembangan pelaksanaan proyek akan dipantau oleh investor dan publik. Penerbitan SBSN seri PBS tersebut dilakukan dengan mekanisme sistem lelang yang ada di Bank Indonesia.

www.peraturan.go.id

Total jumlah penerbitan SBSN yang telah diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2014 adalah sebesar Rp.73.554.112.246.866,- yang terdiri dari 4 jenis instrumen yakni SR, PBS, SPN-S dan SNI, dengan rincian sebagaimana tersaji pada tabel.8.

Tabel 8. Daftar Penerbitan SBSN tahun 2014

Seri	Tanggal Penerbitan Pertama	Jatuh Tempo	Kupon	Jumlah	Metode Penerbitan
SPN-S				**16,170,000,000,000**	
SPN-S29072014	30-Jan-14	29-Jul-14		1,000,000,000,000	Lelang
SPN-S12082014	13-Feb-14	12-Aug-14		2,000,000,000,000	Lelang
SPN-S12092014	13-Mar-14	12-Sep-14		700,000,000,000	Lelang
SPN-S09102014	11-Apr-14	9-Oct-14		930,000,000,000	Lelang
SPN-S07112014	8-May-14	7-Nov-14		280,000,000,000	Lelang
SPN-S04122014	5-Jun-14	4-Dec-14		525,000,000,000	Lelang
SPN-S02012015	1-Jul-14	2-Jan-15		875,000,000,000	Lelang
SPN-S13022015	14-Aug-14	13-Feb-15		2,780,000,000,000	Lelang
SPN-S10032015	11-Sep-14	10-Mar-15		4,550,000,000,000	Lelang
SPN-S08042015	9-Oct-14	8-Apr-15		2,530,000,000,000	Lelang dan private placement
Sukuk Ritel				**19,323,345,000,000**	
SR-006	5-Mar-14	8-Apr-15	8.75%	19,323,345,000,000	Bookbuilding
PBS				**9,446,000,000,000**	Lelang
PBS003	2-Feb-12	15-Jan-27	6.00%	854,000,000,000	Lelang
PBS005	3-May-13	15-Apr-43	6.75%	5,255,000,000,000	Lelang
PBS006	19-Sep-13	15-Sep-20	8.25%	2,337,000,000,000	Lelang
PBS007	29-Sep-14	15-Sep-40	9.00%	1,000,000,000,000	Private Placement
PBS				**12,855,000,000,000**	Lelang
SDHI 2020C	3-Jan-14	3-Jan-20	8.30%	3,000,000,000,000	Private Placement
SDHI 2019B	11-Feb-14	11-Feb-19	8.05%	2,000,000,000,000	Private Placement
SDHI 2022B	11-Feb-14	11-Feb-22	8.75%	2,000,000,000,000	Private Placement
SDHI 2024A	11-Feb-14	11-Feb-24	9.04%	2,000,000,000,000	Private Placement
SDHI2029A	25-Mar-14	25-Mar-29	8.43%	1,000,000,000,000	Private Placement
SDHI 2029B	13-Aug-14	13-Aug-29	8.62%	2,855,000,000,000	Private Placement
Sukuk Valas				**$ 1,500,000,000**	
SNI-24	10-Sep-14	15-Mar-19	4.35%	$ 1,500,000,000	Bookbuilding
Jumlah				**73,554,112,246,866**	

Sedangkan pelunasan SBSN pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.40.133.190.000.000,- yang terdiri atas:

a. Pelunasan SBSN dalam mata uang rupiah sebesar Rp.32.600.410.000.000,-

www.peraturan.go.id

b. Pelunasan SBSN valas sebesar USD 650.000.000,- atau setara dengan Rp.7.533.500.000.000,-.

STRUKTUR PORTOFOLIO SURAT BERHARGA NEGARA TAHUN 2014

A. Surat Berharga Negara Berdenominasi Rupiah

Surat Berharga Negara berdenominasi Rupiah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Obligasi berbunga tetap (*fixed rate bonds* – FR)

Obligasi jenis ini memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon obligasi berbunga tetap seri FR (*Fixed Rate*) dibayarkan setiap enam bulan sekali (*semi-annually*). Obligasi jenis FR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. Berdasarkan posisi akhir tahun 2014, terdapat 40 seri FR dengan tingkat kupon berkisar antara 5,25 % sampai dengan 15,00 % dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2044. Adapun data *outstanding* ON seri *Fixed Rate* pada 31 Desember 2014 disajikan dalam tabel 9.

Tabel.9 Outstanding SBN seri *Fixed Rate* (FR) per 31 Desember 2014

No.	Seri	Maturity Date	Principle	Rate (%)
1	FR0027	6/15/2015	17,278,032,000,000	9.50000%
2	FR0028	7/15/2017	13,550,744,000,000	10.00000%
3	FR0030	5/15/2016	10,159,000,000,000	10.75000%
4	FR0031	11/15/2020	17,890,000,000,000	11.00000%
5	FR0032	7/15/2018	938,492,000,000	15.00000%
6	FR0034	6/15/2021	16,286,400,000,000	12.80000%
7	FR0035	6/15/2022	11,023,750,000,000	12.90000%
8	FR0036	9/15/2019	9,899,500,000,000	11.50000%
9	FR0037	9/15/2026	2,450,000,000,000	12.00000%
10	FR0038	8/15/2018	2,560,862,000,000	11.60000%
11	FR0039	8/15/2023	4,175,000,000,000	11.75000%
12	FR0040	9/15/2025	26,002,090,000,000	11.00000%
13	FR0042	7/15/2027	14,774,100,000,000	10.25000%
14	FR0043	7/15/2022	14,417,000,000,000	10.25000%
15	FR0044	9/15/2024	18,014,000,000,000	10.00000%
16	FR0045	5/15/2037	6,400,000,000,000	9.75000%
17	FR0046	7/15/2023	16,855,000,000,000	9.50000%
18	FR0047	2/15/2028	20,385,000,000,000	10.00000%
19	FR0048	9/15/2018	5,237,570,000,000	9.00000%

www.peraturan.go.id

No.	Seri	Maturity Date	Principle	Rate (%)
20	FR0050	7/15/2038	15,661,000,000,000	10.50000%
21	FR0052	8/15/2030	23,500,000,000,000	10.50000%
22	FR0053	7/15/2021	19,083,793,000,000	8.25000%
23	FR0054	7/15/2031	27,096,000,000,000	9.50000%
24	FR0055	9/15/2016	13,984,300,000,000	7.37500%
25	FR0056	9/15/2026	17,164,000,000,000	8.37500%
26	FR0057	5/15/2041	13,550,000,000,000	9.50000%
27	FR0058	6/15/2032	42,798,000,000,000	8.25000%
28	FR0059	5/15/2027	26,630,000,000,000	7.00000%
29	FR0060	4/15/2017	10,068,000,000,000	6.25000%
30	FR0061	5/15/2022	29,700,000,000,000	7.00000%
31	FR0062	4/15/2042	12,000,000,000,000	6.37500%
32	FR0063	5/15/2023	33,516,000,000,000	5.62500%
33	FR0064	5/15/2028	29,895,000,000,000	6.12500%
34	FR0065	5/15/2033	47,850,000,000,000	6.62500%
35	FR0066	5/15/2018	18,709,000,000,000	5.25000%
36	FR0067	2/15/2044	11,250,000,000,000	8.75000%
37	FR0068	3/15/2034	65,594,000,000,000	8.37500%
38	FR0069	4/15/2019	48,496,000,000,000	7.87500%
39	FR0070	3/15/2024	89,532,000,000,000	8.37500%
40	FR0071	3/15/2029	67,492,000,000,000	9.00000%
Jumlah			**891,865,633,000,000**	

Adapun struktur jatuh tempo ON Rupiah seri FR disajikan dalam grafik 1.

Grafik.1 Struktur Jatuh Tempo ON Rupiah seri FR

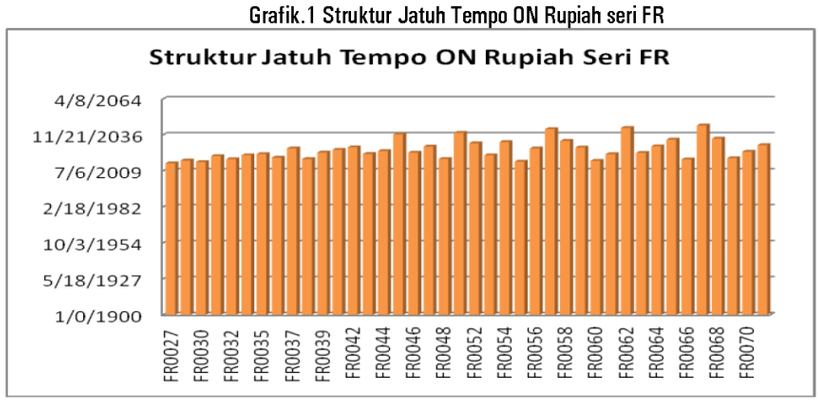

www.peraturan.go.id

b. Obligasi Negara Ritel (ORI)

ORI adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Penerbitan ORI merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan Strategi Pengelolaan Utang Negara tahun 2010 – 2014 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 380/KMK.08/2010. Di dalam dokumen strategi dimaksud ditetapkan bahwa pengembangan pasar sekunder SUN dilakukan antara lain dengan melakukan diversifikasi instrumen SUN melalui SUN Ritel yang mana hal ini sejalan pula dengan upaya memperluas basis investor.

Selain itu, penerbitan ORI juga dimaksudkan dalam rangka memberikan alternatif investasi yang cukup menguntungkan dan aman bagi investor individu, serta memberikan unsur pendidikan bagi investor individu untuk berinvestasi pada instrumen pasar modal seperti ORI. Selama ini investor individu umumnya menyimpan dananya pada instrumen investasi berupa tabungan atau deposito yang merupakan instrumen pasar uang. Kehadiran ORI dapat menjadi alternatif lahan investasi yang menjanjikan seperti instrumen investasi lainnya yang sudah ada seperti saham, reksadana dan deposito.

Tahun 2014 pemerintah menerbitkan satu seri ORI baru yaitu ORI011 dengan tingkat kupon 8.50% dan mampu menghimpun dana investor sebesar Rp.21.215.910.000.000,- sehingga posisi *outstanding* pada akhir 2014 menunjukkan ada tiga seri ORI dengan jatuh tempo berkisar antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Rincian outstanding ORI disajikan dalam tabel 10.

Tabel 10. Data *Outstanding* ORI per 31 Desember 2014

No	Seri	Tgl Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Principle	Rate
1	ORI009	10/10/2012	15/10/2015	12,676,745,000,000	6.25000%
2	ORI010	10/8/2013	15/10/2016	20,205,255,000,000	8.50000%
3	ORI011	10/22/2014	15/10/2017	21,215,910,000,000	8.50000%
Jumlah				**54,097,910,000,000**	

Adapun struktur jatuh tempo ORI disajikan dalam grafik 2.

www.peraturan.go.id

Grafik 2. Struktur jatuh tempo ORI

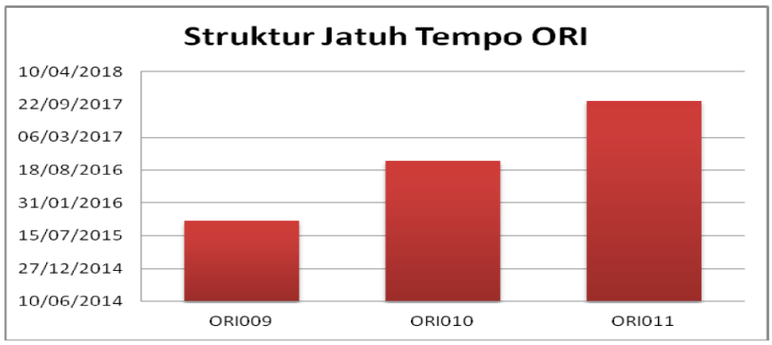

c. Obligasi berbunga mengambang *(Variable Rate Bonds – VR)*

Obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan tingkat bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia). Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan. Obligasi jenis VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Sampai akhir tahun 2014 , terdapat 12 seri VR dengan *outstanding* sebesar Rp.113.343.707.000.000,-.

Tabel 11. Data Outstanding SBN seri *Variable Rate* (VR) per 31 Desember 2014

NO	Seri	Jatuh Tempo	Outstanding	Rate (%)
1	VR0020	25/04/2015	9,164,007,000,000	5.62200%
2	VR0021	25/11/2015	7,436,328,000,000	5.79700%
3	VR0022	25/03/2016	9,016,749,000,000	5.95100%
4	VR0023	25/10/2016	8,652,056,000,000	5.62200%
5	VR0024	25/02/2017	9,909,300,000,000	5.79700%
6	VR0025	25/09/2017	3,209,300,000,000	5.95100%
7	VR0026	25/01/2018	5,442,142,000,000	5.62200%
8	VR0027	25/07/2018	5,442,142,000,000	5.62200%
9	VR0028	25/08/2018	7,033,994,000,000	5.79700%
10	VR0029	25/08/2019	12,212,320,000,000	5.79700%
11	VR0030	25/12/2019	10,503,015,000,000	5.95100%
12	VR0031	25/07/2020	25,322,354,000,000	5.62200%
Jumlah			**113,343,707,000,000**	

Adapun struktur jatuh tempo ON seri VR disajikan dalam Grafik 3.

www.peraturan.go.id

Grafik 3. Struktur jatuh tempo ON seri VR

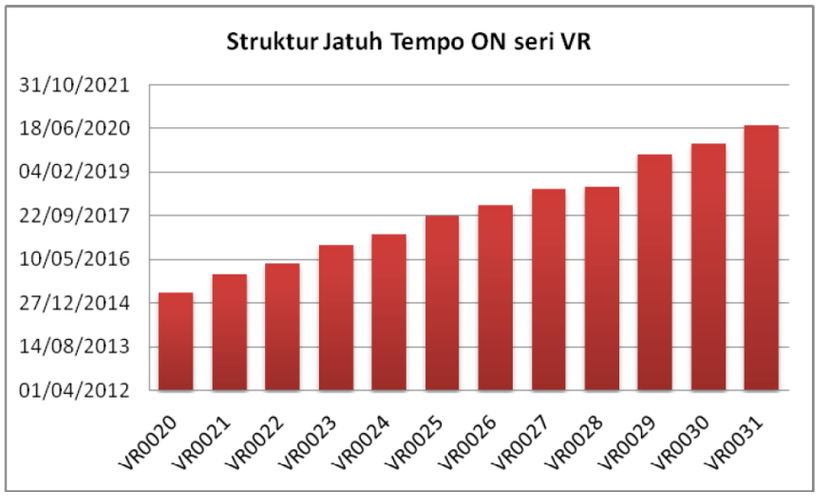

d. Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

SPN merupakan instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto SPN dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. Sampai akhir tahun 2014, terdapat 12 seri SPN yang beredar dengan *outstanding* sebesar Rp.39.950.000.000.000,-. Rincian SPN disajikan dalam tabel 12.

Tabel 12: Data *Outstanding* SPN per 31 Desember 2014

NO	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Outstanding
1	SPN03150103	3-Jan-15	1,000,000,000,000
2	SPN12150108	8-Jan-15	5,000,000,000,000
3	SPN12150206	6-Feb-15	6,450,000,000,000
4	SPN12150305	5-Mar-15	3,600,000,000,000
5	SPN12150403	3-Apr-15	1,450,000,000,000
6	SPN12150501	1-May-15	1,850,000,000,000
7	SPN12150611	11-Jun-15	2,800,000,000,000
8	SPN12150710	10-Jul-15	4,800,000,000,000
9	SPN12150806	6-Aug-15	4,000,000,000,000
10	SPN12150903	3-Sep-15	2,000,000,000,000
11	SPN12151001	1-Oct-15	5,000,000,000,000
12	SPN12151105	5-Nov-15	2,000,000,000,000
Jumlah			**39,950,000,000,000**

Adapun struktur jatuh tempo SPN disajikan dalam Grafik 4.

www.peraturan.go.id

Grafik 4. Struktur Jatuh Tempo SPN per 31 Desember 2014

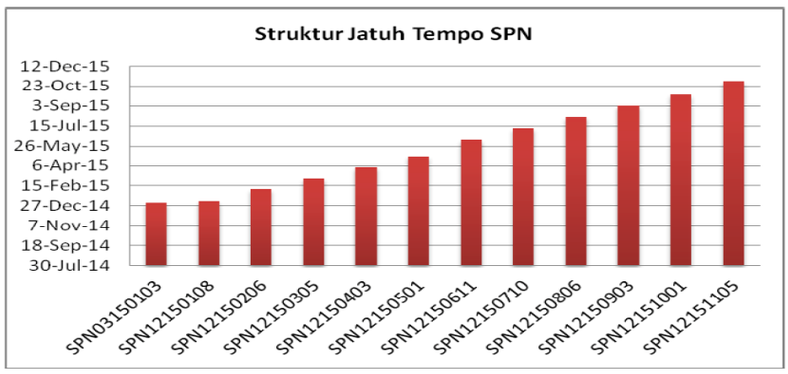

e. Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada BI

Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia terdiri dari empat seri yaitu SU002, SU004, SU007, dan *Special Rate Bank Indonesia* (SRBI01). Kupon SUP dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. Pembayaran cicilan pokok dilakukan bersamaan dengan pembayaran bunga. Data outstanding SUP disajikan pada tabel 13.

Tabel 13. Data *Outstanding* Surat Utang Pemerintah per 31 Desember 2014

NO	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Outstanding
1	SU002	1-Apr-25	16,444,954,173,856
2	SU004	1-Dec-25	44,796,189,405,980
3	SU007	1-Aug-25	42,812,142,487,308
4	SRBI01	1-Aug-43	125,000,645,255,067
Jumlah			**229,053,931,322,211**

Adapun struktur jatuh tempo ON seri VR disajikan dalam Grafik 5.

www.peraturan.go.id

Grafik 5. Struktur Jatuh Tempo Surat Utang Pemerintah

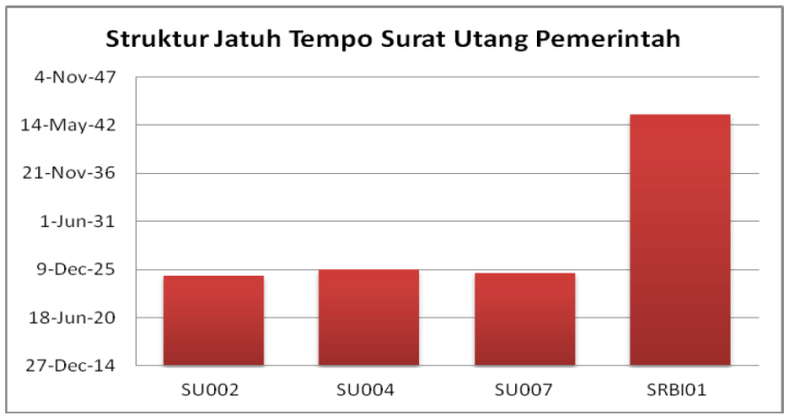

f. Saving Bonds Ritel (SBR)

Pada tahun 2014, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan obligasi ritel yang disebut dengan Saving Bonds Ritel (SBR) seri SBR001. SBR diterbitkan dengan tingkat kupon mengambang, yang disesuaikan setiap tiga bulan dengan tingkat kupon minimal sebesar 8.75%. SBR merupakan wujud untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang belum pulih pasca krisis 2008.

Tujuan penerbitan SBR001 adalah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN 2014 dan mengembangkan pasar Surat Utang Negara domestik melalui diversifikasi instrumen sumber pembiayaan dan perluasan basis investor. Investor individu Warga Negara Indonesia merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang sangat potensial untuk dikelola guna mengurangi peran utang luar negeri secara bertahap dalam pembiayaan APBN.

Outstanding SBR per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp.2.390.885.000.000,- yang akan jatuh tempo pada 20 Mei 2016.

g. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kupon Tetap (IFR)

Obligasi jenis ini adalah obligasi berbasis Syariah yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon obligasi berbunga tetap seri FR *(Fixed Rate)* dibayarkan setiap enam bulan sekali *(semi-annually)*. SBSN jenis IFR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Pada akhir tahun 2014, terdapat 8 seri SBSN jenis IFR yang masih beredar dengan masa jatuh tempo antara tahun 2015 sampai dengan 2036 dengan tingkat imbalan antara 8,80% sampai dengan 11,95% yang disajikan dalam tabel 14.

www.peraturan.go.id

Tabel 14. Data *Outstanding* SBSN seri IFR per 31 Desember 2014

NO	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Outstanding	Rate (%)
1	IFR001	15/08/2015	2,714,700,000,000	11.80000%
2	IFR002	15/08/2018	1,985,000,000,000	11.95000%
3	IFR003	15/09/2015	2,632,000,000,000	9.25000%
4	IFR005	15/01/2017	1,171,000,000,000	9.00000%
5	IFR006	15/03/2030	2,175,000,000,000	10.25000%
6	IFR007	15/01/2025	1,547,000,000,000	10.25000%
7	IFR008	15/03/2020	252,000,000,000	8.80000%
8	IFR010	15/02/2036	4,110,000,000,000	10.00000%
			16,586,700,000,000	

Adapun struktur jatuh tempo ON seri VR disajikan dalam Grafik 6.

Grafik 6. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri IFR per 31 Desember 2014

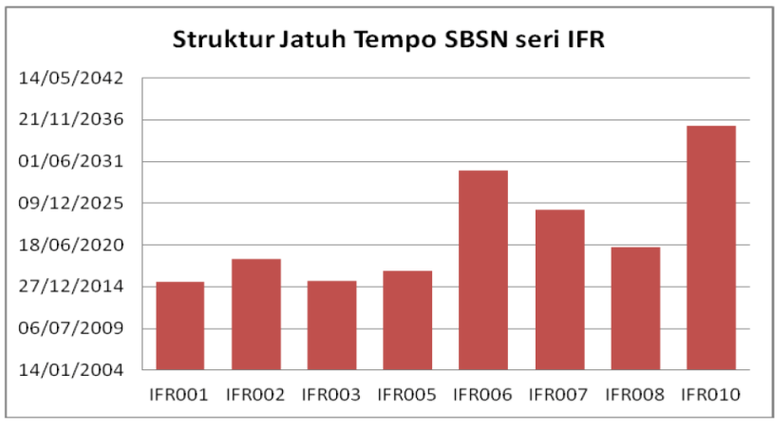

h. ***Project Based Sukuk (PBS)***

Project Based Sukuk merupakan SBSN yang mengunakan proyek-proyek yang dibiayai APBN sebagai *underlying asset*.

Pada akhir tahun 2014 terdapat 7 seri PBS yang beredar sebagaimana disajikan dalam tabel 15.

Tabel 15. Data *Outstanding* SBSN seri PBS per 31 Desember 2014

NO	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Outstanding	Rate (%)
1	PBS001	15/02/2018	6,725,000,000,000	4.45000%
2	PBS002	15/01/2022	1,218,000,000,000	5.45000%
3	PBS003	15/01/2027	3,786,000,000,000	6.00000%

www.peraturan.go.id

4	PBS004	15/02/2037	10,149,000,000,000	6.10000%
5	PBS005	15/04/2043	9,934,000,000,000	6.75000%
6	PBS006	15/09/2020	2,664,000,000,000	8.25000%
7	PBS007	15/09/2040	1,000,000,000,000	9.00000%
Jumlah			**35,476,000,000,000**	

Adapun struktur jatuh tempo SBSN seri PBS disajikan dalam Grafik 7.

Grafik 7. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri PBS per 31 Desember 2014

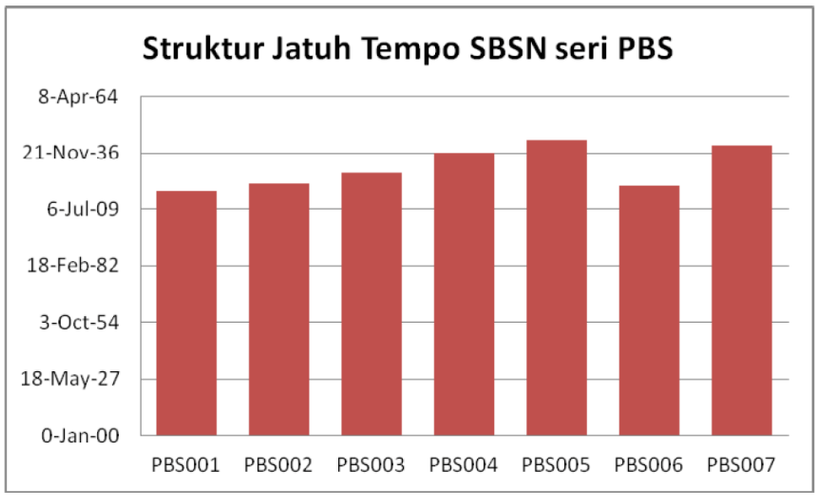

i. Sukuk Ritel (SR)

Sukuk Ritel (SR) adalah Sukuk Negara berbasis syariah yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. SR memiliki tingkat imbal hasil yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Imbal hasil SR dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). SR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Penerbitan SR dimaksudkan untuk memperluas pembiayaan sumber APBN, diversifikasi investor dan instrumen, memberikan alternatif instrumen ritel berbasis syariah, dan memberikan kesempatan kepada investor kecil untuk berinvestasi dalam instrumen pasar modal yang aman dan menguntungkan. Selain itu, keberadaan SR dapat menjadi alternatif lahan investasi yang menjanjikan seperti instrumen investasi lainnya yang sudah ada seperti saham, reksadana dan deposito.

www.peraturan.go.id

Tahun 2014, pemerintah menerbitkan satu seri SR yaitu SR00 dengan tingkat imbal hasil 8.75% dan mampu menghimpun dana investor sebesar Rp.19.323.345.000.000,- sehingga posisi *outstanding* pada akhir 2014 menunjukkan ada 3 seri SR dengan jatuh tempo berkisar antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yang disajikan pada tabel 16.

Tabel 16. Data *Outstanding* SBSN seri SR per 31 Desember 2014

NO	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Outstanding	Rate (%)
1	SR-004	21/09/2015	13,613,805,000,000	6.25000%
2	SR-005	27/02/2016	14,968,875,000,000	6.00000%
3	SR-006	05/03/2017	19,323,345,000,000	8.75000%
Jumlah			**47,906,025,000,000**	

Adapun struktur jatuh tempo SBSN seri SR disajikan dalam grafik 8

Grafik 8. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SR per 31 Desember 2014

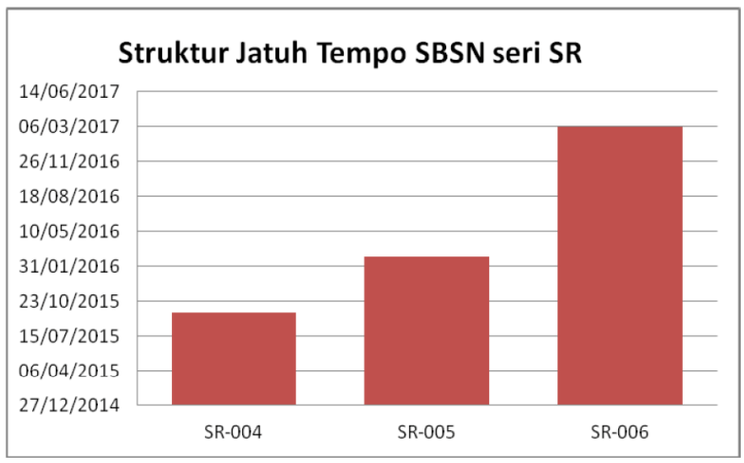

j. Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S)

SPN-S merupakan instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto. SPN-S dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. Pada akhir tahun 2014, terdapat 4 seri SPN-S yang beredar dengan *outstanding* sebesar Rp.10.735.000.000.000,- yang akan jatuh tempo pada tahun 2015. Rincian outstanding SPN-S disajikan pada tabel 17.

www.peraturan.go.id

Tabel 17. Data *Outstanding* SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2014

NO	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Outstanding
1	SPN-S 02012015	02/01/2015	875,000,000,000
2	SPN-S 10032015	10/03/2015	4,550,000,000,000
3	SPN-S 13022015	13/02/2015	2,780,000,000,000
4	SPN-S 08042015	08/04/2015	2,530,000,000,000
Jumlah			**10,735,000,000,000**

Grafik 9. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2014

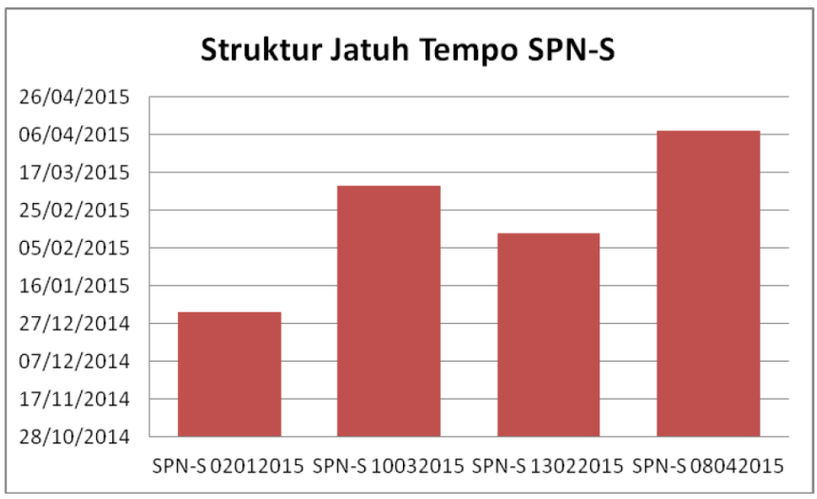

k. Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)

SDHI merupakan intrumen pembiayaan syariah melalui penempatan dana haji pada SBSN itu dengan metode *private placement*, yang merupakan penerbitan surat berharga tanpa melalui penawaran perdana dan tidak dapat diperjualbelikan.

Pada 31 Desember 2014, terdapat 16 seri SDHI yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, dengan total nilai outstanding sebesar Rp. 33.197.000.000.000,-. Rincian SDHI disajikan pada tabel 18.

www.peraturan.go.id

Tabel 18. Data *Outstanding* SBSN seri SDHI per 31 Desember 2014

NO	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Outstanding	Rate (%)
1	SDHI2015A	28/06/2015	1,000,000,000,000	5.21000%
2	SDHI2016A	27/04/2016	1,000,000,000,000	5.03000%
3	SDHI2017A	21/03/2017	2,000,000,000,000	5.16000%
4	SDHI2018A	30/05/2018	2,500,000,000,000	6.06000%
5	SDHI2019A	21/03/2019	3,000,000,000,000	5.46000%
6	SDHI2019B	11/02/2019	2,000,000,000,000	8.05000%
7	SDHI2020A	27/04/2020	1,500,000,000,000	5.79000%
8	SDHI2020B	28/06/2020	1,000,000,000,000	6.20000%
9	SDHI2020C	03/07/2020	3,000,000,000,000	8.30000%
10	SDHI2021A	11/04/2021	2,000,000,000,000	8.00000%
11	SDHI2021B	17/10/2021	3,000,000,000,000	7.16000%
12	SDHI2022A	21/03/2022	3,342,000,000,000	5.91000%
13	SDHI2022B	11/02/2022	2,000,000,000,000	8.75000%
14	SDHI2024A	11/02/2024	2,000,000,000,000	9.04000%
15	SDHI2029A	25/03/2029	1,000,000,000,000	8.43000%
16	SDHI2029B	13/08/2029	2,855,000,000,000	8.62000%
Jumlah			**33,197,000,000,000**	

Grafik 10. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SDHI per 31 Desember 2014

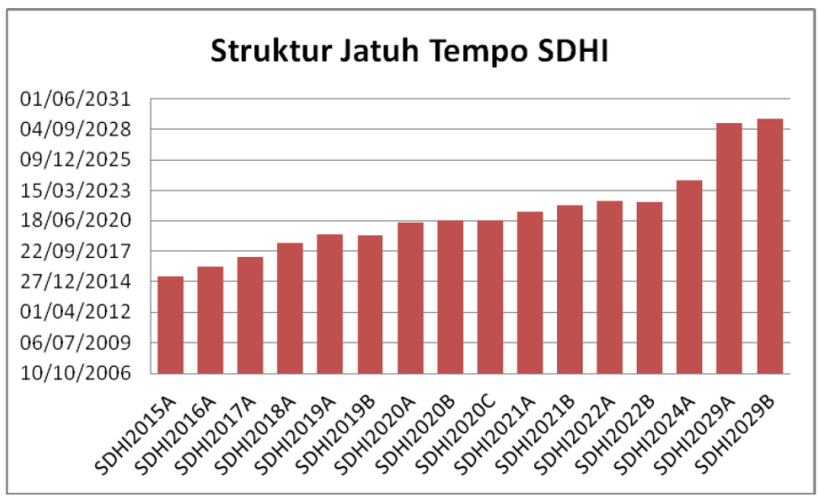

www.peraturan.go.id

B. Surat Berharga Negara Berdenominasi Valuta Asing (Valas)

Surat Berharga Negara (SBN) saat ini telah menjadi sumber utama dalam pemenuhan target pembiayaan dalam APBN karena mempunyai pengaruh yang signifikan. Dalam rangka pemenuhan target tersebut pemerintah semaksimal mungkin berusaha terus menggali potensi sumber pembiayaan dari dalam negeri, yaitu dengan menerbitkan SBN berdenominasi Rupiah di pasar domestik. Namun, dengan berbagai pertimbangan seperti daya serap pasar obligasi dalam negeri yang masih terbatas dan kebutuhan untuk pemenuhan *benchmark* atas obligasi Indonesia dalam denominasi USD, maka Pemerintah melakukan penerbitan obligasi negara dalam valuta asing di pasar internasional dengan mengacu pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

Per 31 Desember 2014 , terdapat 22 seri SUN valas dengan 18 seri memiliki denominasi USD (termasuk SUN domestik yang berdenominasi valas),1 seri berdenominasi Euro dan 3 seri dengan denominasi JP¥. Selain itu terdapat 4 seri SBSN valas berdenominasi USD. Data outstanding SBN valas disajikan dalam tabel 19.

Tabel 19. Struktur *Outstanding* SBN Valas per 31 Desember 2014

NO	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Outstanding		Rate (%)
			Valas	Rupiah	
1	RI0015	20/04/2015	1,000,000,000	12,440,000,000,000	7.25000%
2	RI0016	15/01/2016	900,000,000	11,196,000,000,000	7.50000%
3	RI0017	09/03/2017	1,000,000,000	12,440,000,000,000	6.87500%
4	RI0018	17/01/2018	1,900,000,000	23,636,000,000,000	6.87500%
5	RI00190304	04/03/2019	2,000,000,000	24,880,000,000,000	11.62500%
6	RI0035	12/10/2035	1,600,000,000	19,904,000,000,000	8.50000%
7	RI0037	17/02/2037	1,500,000,000	18,660,000,000,000	6.62500%
8	RI0038	17/01/2038	2,000,000,000	24,880,000,000,000	7.75000%
9	RI0124	15/01/2024	2,000,000,000	24,880,000,000,000	5.87500%
10	RI0142	17/01/2042	2,250,000,000	27,990,000,000,000	5.25000%
11	RI0144	15/01/2044	2,000,000,000	24,880,000,000,000	6.75000%
12	RI0320	13/03/2020	2,000,000,000	24,880,000,000,000	5.87500%
13	RI0422	25/04/2022	2,000,000,000	24,880,000,000,000	3.75000%
14	RI0423	15/04/2023	1,500,000,000	18,660,000,000,000	3.37500%
15	RI0443	15/04/2043	1,500,000,000	18,660,000,000,000	4.62500%
16	RI0521	05/05/2021	2,500,000,000	31,100,000,000,000	4.87500%
17	RI1023	17/10/2023	1,000,000,000	12,440,000,000,000	5.37500%
18	USDFR	15/05/2017	540,000,000	6,717,600,000,000	3.50000%
19	RIEUR0721	08/07/2021	1,000,000,000	15,133,270,000,000	2.87500%
20	RIJPY0719	29/07/2019	35,000,000,000	3,648,750,000,000	2.73000%
21	RIJPY1120	12/11/2020	60,000,000,000	6,255,000,000,000	1.60000%

www.peraturan.go.id

NO	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Outstanding		Rate (%)
			Valas	Rupiah	
22	RIJPY1122	22/11/2022	60,000,000,000	6,255,000,000,000	1.13000%
23	SNI-18	21/11/2018	1,500,000,000	12,440,000,000,000	4.00000%
24	SNI19	15/03/2019	1,000,000,000	18,660,000,000,000	6.12500%
25	SNI22	21/11/2022	1,500,000,000	12,440,000,000,000	3.30000%
26	SNI24	10/09/2024	1,500,000,000	18,660,000,000,000	4.35000%
Jumlah				456,615,620,000,000	

Grafik 11. Struktur Jatuh Tempo SBN Valas per 31 Desember 2014

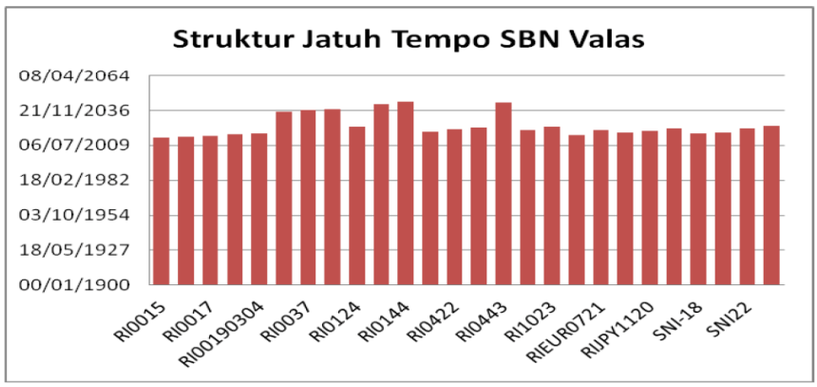

Secara umum, struktur outstanding SBN pada akhir tahun 2014, dapat digambarkan pada grafik 12.

Grafik 12. Data Outstanding SBN per 31 Desember 2014

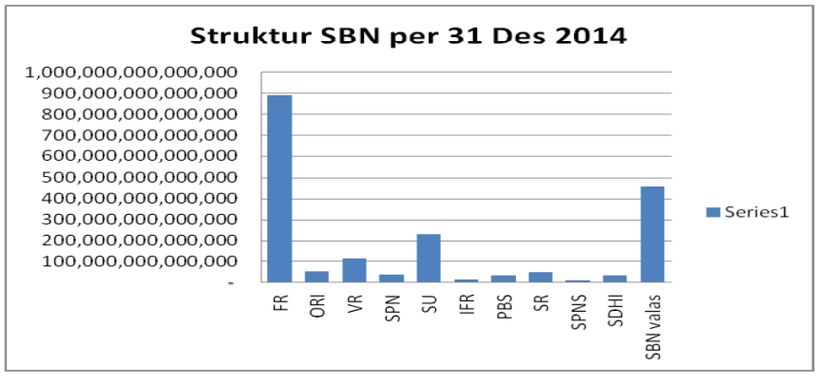

www.peraturan.go.id

MUTASI SURAT BERHARGA NEGARA SELAMA TAHUN 2014

Surat Berharga Negara dapat berubah saldonya akibat adanya penerbitan baru, pelunasan, pembelian kembali atau oleh sebab lainnya. Adapun ringkasan perubahan posisi SBN tahun 2014 adalah sebagaimana disajikan pada tabel 20.

Tabel 20. Mutasi SBN Tahun 2014

Mata Uang	Saldo Awal 2014 (Original Currency)	Mutasi Tahun 2014		Saldo Akhir 2014 (Original Currency)	Saldo Akhir 2014 (Rupiah)	Unamortisasi Premium/Discount	Saldo Akhir (Neraca)
		Penerimaan	Pembayaran				
a	b	c	d	e (b+c-d)	f	g	h (f+g)
IDR	1,261,654,464,205,700	348,115,140,000,000	135,166,812,883,492	1,474,602,791,322,210	1,474,602,791,322,210	(911,754,176,000)	1,473,691,037,146,210
USD	$ 31,290,000,000	$ 5,850,000,000	$ 2,950,000,000	$ 34,190,000,000	425,323,600,000,000	(1,199,381,077,000)	424,124,218,923,000
JPY	$ 155,000,000,000	$ -	$ -	$ 155,000,000,000	16,158,750,000,000	-	16,158,750,000,000
EUR	$ -	$ 1,000,000,000	$ -	$ 1,000,000,000	15,133,270,000,000	(93,340,056,000)	15,039,929,944,000
				Jumlah	**1,931,218,411,322,210**	**(2,204,475,309,000)**	**1,929,013,936,013,210**

Kurs tengah BI tgl 31 Desember 2013 USD = 12.189, JPY = 116.17
Kurs Tengah BI tgl 31 Desember 2014 USD = 12.440, JPY = 104.25, EUR = 15133.27

www.peraturan.go.id

VII. Penutup

Demikianlah laporan pertanggungjawaban pengelolaan SBN ini dibuat dalam rangka pemenuhan amanat sebagaimana dituangkan pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, dan dilampirkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Besar harapan Pemerintah agar masyarakat juga dapat mengetahui secara jelas dan transparan informasi terkait dengan pengelolaan Surat Utang Negara, sesuai komitmen Pemerintah untuk mengelola sektor keuangan yang transparan, profesional dan bertanggung jawab.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

www.peraturan.go.id

TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5741 KEUANGAN NEGARA. Pertanggungjawaban. Pelaksanaan. APBN. 2014. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 219).

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2014

I. UMUM

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014, Pemerintah menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Tahun Anggaran 2014, berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri atas: *(i)* Laporan Realisasi APBN, *(ii)* Neraca, *(iii)* Laporan Arus Kas, dan *(iv)* Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi APBN Tahun Anggaran 2014, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2014. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan

www.peraturan.go.id

informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama tahun anggaran 2014, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2014. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Disamping itu, dalam LKPP Tahun 2014 ini juga dilampirkan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara Badan Layanan Umum (BLU), Badan Lainnya, dan dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja secara akrual.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, LKPP diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemeriksaan BPK dimaksud adalah dalam rangka pemberian pendapat/opini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Untuk memenuhi amanat UndangUndang tersebut, Pemerintah telah menyampaikan LKPP Tahun 2014 kepada

BPK untuk diaudit, melalui surat Menteri Keuangan Nomor S205/MK.05/2015 tanggal 20 Maret 2015. Penyampaian LKPP dengan status belum diperiksa (unaudited) oleh Menteri Keuangan kepada BPK adalah sesuai dengan Surat Presiden kepada Ketua BPK Nomor R-14/Pres/02/2015 tanggal 12 Februari 2015 hal Penunjukan Menteri Keuangan untuk Mewakili Presiden dalam Penyampaian LKPP kepada BPK.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas LKPP kepada DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta kepada Presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima LKPP dari Pemerintah. Selanjutnya, BPK telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2014 kepada Ketua DPR melalui surat Ketua BPK 76/S/I-IV/05/2015 tanggal 26 Mei 2015, kepada Ketua DPD melalui surat Ketua BPK

www.peraturan.go.id

Nomor 77/S/I-IV/05/2015 tanggal 26 Mei 2015, dan kepada Presiden melalui surat Ketua BPK Nomor 79/S/I-IV/05/2015 tanggal 26 Mei 2015.

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, hasil pemeriksaan keuangan BPK digunakan oleh Pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR dalam bentuk suatu Rancangan Undang-Undang untuk mendapatkan persetujuan. Dengan demikian, LKPP Tahun 2014 yang disampaikan Pemerintah kepada DPR adalah LKPP yang telah disesuaikan, dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan BPK.

Dengan memperhatikan pendapat BPK terhadap LKPP Tahun 2014, maka angka-angka yang disajikan dalam LKPP Tahun 2014 sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemerintah. Artinya, Pemerintah tetap bertanggung jawab apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran hukum dan/atau penyajian informasi yang menyesatkan dalam LKPP Tahun 2014.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat disajikan sebagai perbandingan dalam laporan keuangan periode pelaporan berikutnya.

Pasal 3

Ayat (1)

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk Pendapatan Perpajakan Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp5.786.609.097.171 (lima triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar enam ratus sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) DTP sebesar

www.peraturan.go.id

Rp5.655.296.592.171 (lima triliun enam ratus lima puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) dan Bea Masuk DTP sebesar Rp131.312.505.000 (seratus tiga puluh satu miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus lima ribu rupiah).

Ayat (2)

Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk Belanja Subsidi atas PPh DTP sebesar Rp 5.655.236.443.811 (lima triliun enam ratus lima puluh lima miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sebelas rupiah) dan Bea Masuk DTP sebesar Rp131.312.505.000 (seratus tiga puluh satu miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus lima ribu rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud asas neto pada ayat ini adalah penerimaan minyak bumi dan gas alam diakui sebagai pendapatan negara setelah memperhitungkan kewajiban-kewajiban kontraktual pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja sama, antara lain pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), *underlifting*, pajak daerah, dan *fee* kegiatan hulu minyak bumi dan gas alam.

www.peraturan.go.id

Pasal 4

Ayat (1)

Aset yang disajikan pada Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan Aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat yang mempunyai nilai dan telah diperiksa oleh BPK.

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan utang pemerintah yang timbul dari kejadian masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Inventarisasi dan Penilaian (IP) sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk IP yang dilakukan atas aset KKKS dan aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Legalitas yang dimaksud pada ayat ini termasuk kegiatan sertifikasi tanah Pemerintah Pusat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, BLU, dan Badan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal ini memuat informasi tentang aktiva/aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih dari Perusahaan Negara, BLU, dan Badan Lainnya. Badan Lainnya yang dimaksud pada pasal ini adalah unit organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau mendukung Kementerian

www.peraturan.go.id

Negara/Lembaga yang secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara struktural kepada Menteri/Pimpinan Lembaga tertentu, seperti Dewan Energi Nasional, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Permasalahan yang terdapat pada LKPP Tahun 2014 adalah:

A. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

1. Inkonsistensi perlakuan pengenaan PPN atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III;
2. Permasalahan perhitungan PPh DTP Obligasi Internasional dalam Valuta Asing;
3. Inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam perhitungan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) dan Perhitungan Bagi Hasil Migas;
4. Sistem pengendalian belanja akhir tahun tidak dapat berjalan secara efektif;
5. Penyaluran barang/jasa bersubsidi oleh Badan Usaha Operator melampaui pagu anggaran;
6. Transaksi belanja negara yang menggunakan Letter of Credit (L/C) belum diatur, sehingga hak dan kewajiban atas saldo dana terkait belanja tersebut belum jelas;
7. Mekanisme pelaporan pada Pemerintah Pusat atas Dana Kegiatan Pasca Operasi dan Pemulihan Lingkungan atau Abandonment & Site Restoration (ASR) belum diatur dan Sistem Pengendalian Intern pengelolaan dana tersebut belum memadai;
8. Pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak tidak sesuai ketentuan mengakibatkan potensi pajak tidak dapat ditetapkan, ketetapan pajak daluwarsa, dan piutang pajak daluwarsa tanpa tindakan penagihan aktif;
9. Penatausahaan, pencatatan, dan pelaporan persediaan pada Kementerian Negara/Lembaga belum memadai;

www.peraturan.go.id

10. Penambahan penyertaan modal negara dari konversi dividen saham pada PT Krakatau Steel belum mendapat persetujuan DPR dan pengakuan kewajiban diestimasi atas imbalan pasca kerja pada SKK Migas tidak disetujui;
11. Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap pada Kementerian Negara/Lembaga kurang memadai dan terdapat kelemahan pengendalian atas proses normalisasi data Barang Milik Negara (BMN);
12. Proses penyelesaian Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berlarut-larut;
13. Pencatatan dan pelaporan aset KKKS belum memadai sehingga mutasi aset tidak dapat diyakini kewajarannya, belum dilakukannya IP atas aset tanah KKKS, serta pengelolaan data Subsequent Expenditures belum memadai;
14. Kementerian Keuangan belum melakukan pengurusan dan menyelesaikan penelusuran atas Aset Eks BPPN yang masih tercatat secara ekstrakomptabel berupa Aset Kredit dan Aset Properti;
15. Pemerintah belum menerapkan amortisasi atas Aset Tak Berwujud dan penatausahaannya pada Kementerian Negara/Lembaga tidak memadai;
16. Pencatatan dan pelaporan Utang kepada Pihak Ketiga pada Kementerian Negara/Lembaga belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya serta penyajian dan pengungkapan kewajiban atas tuntutan hukum kepada Pemerintah belum didukung data yang andal;
17. Kewajiban kepada PT Pertamina (Persero) atas fee penjualan migas bagian negara belum dapat diukur dengan andal;
18. Terdapat nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNPB SDA) Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012 yang belum dialokasikan untuk dibagihasilkan;
19. Pencatatan dan penyajian Catatan dan Fisik SAL tidak akurat karena adanya permasalahan transaksi dan/atau saldo terkait SAL;

www.peraturan.go.id

20. Masih terdapat kekurangan dalam Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Kementerian Negara/Lembaga, proses penyusunan informasi akrual pada Suplemen Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) kurang memadai, dan belum ada kebijakan akuntansi akrual untuk pengelolaan PNBP Migas;
21. Pemerintah tidak mengungkapkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan APBN-P dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dalam LKPP Tahun 2014 secara memadai;

B. Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terlalu besar memberikan pengembalian kelebihan pembayaran (restitusi) pajak kepada Wajib Pajak (WP);
2. DJP tidak/kurang menetapkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan Sektor Mineral dan Batubara;
3. Terdapat PNBP pada Kementerian Negara /Lembaga yang terlambat/belum disetor, kurang/tidak dipungut, digunakan langsung di luar mekanisme APBN, serta belum dikelola dengan tertib;
4. Kementerian Negara/Lembaga belum tertib melaksanakan rekonsiliasi Penerimaan Hibah tahun 2014 dan terdapat Kementerian Negara/Lembaga yang belum melaporkan realisasi Pendapatan Hibah secara akuntabel;
5. Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal pada Kementerian Negara/Lembaga tidak sesuai dengan ketentuan;
6. Kesalahan klasifikasi pada Belanja Bantuan Sosial, realisasi Belanja Bantuan Sosial masih mengendap di rekening Pihak Ketiga serta penyaluran dan pertanggungjawaban realisasi Belanja Bantuan Sosial tidak sesuai ketentuan;
7. DJP kurang menetapkan nilai pajak terutang kepada WP;

www.peraturan.go.id

8. DJP belum menagih sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
9. Skema pengelolaan Iuran Dana Pensiun (IDP) pada PT Taspen (Persero) tidak dijalankan sesuai ketentuan dan berpotensi membebani nilai dana titipan IDP di masa yang akan datang serta terdapat ketidakjelasan ketentuan yang mengatur tentang status IDP yang dikelola PT Asabri (Persero) dan mekanisme pengelolaannya.

Penyebab utama opini WDP atas LKPP sebagaimana dimaksud dalam

10. Pasal ini adalah:

1. Terdapat pencatatan mutasi Aset KKKS yang tidak dapat dijelaskan antara lain karena pencatatan dan pelaporan Aset KKKS yang belum didukung oleh sistem pengendalian yang memadai yang dapat menjamin keakuratan dan kelengkapan transaksi;
2. Terdapat permasalahan Utang kepada Pihak Ketiga yang tidak dapat ditelusuri dan tidak didukung dokumen yang memadai;
3. Terdapat beberapa permasalahan pada transaksi dan/atau saldo yang membentuk SAL sehingga penyajian catatan dan fisik SAL tersebut dinilai tidak akurat;
4. Terdapat permasalahan penyajian dan pengungkapan kewajiban atas tuntutan hukum kepada Pemerintah yang belum didukung data yang andal.

LKPP Tahun 2014 disusun berdasarkan gabungan seluruh Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2014 yang telah diaudit dan diberi opini oleh BPK. Khusus untuk Laporan Keuangan BPK Tahun 2014, Laporan Keuangan dimaksud diaudit dan diberi opini oleh Kantor Akuntan Publik. Dari jumlah LKKL tersebut, 62 (enam puluh dua) LKKL mendapat opini *"Wajar T*anpa Pengecualian (WTP)", 17 (tujuh belas) LKKL mendapat opini "Wajar Dengan Pengecualian (WDP)", 7 (tujuh) LKKL

www.peraturan.go.id

mendapat opini "Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)", dan LKBUN mendapat opini WDP. Rincian opini LKKL dan LKBUN Tahun 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

No	Kementerian Negara/Lembaga	Opini Tahun 2014	Opini Tahun 2013
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP
2.	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP
3.	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP
4.	Mahkamah Agung	WTP	WTP
5.	Kejaksaan Agung	WTP	WTP
6.	Sekretariat Negara	WTP	WTP
7.	Kementerian Dalam Negeri	WTP	WDP
8.	Kementerian Luar Negeri	WTP	WTP
9.	Kementerian Pertahanan	WTP	WTP
10.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	WTP	WTP
11.	Kementerian Keuangan	WTP	WTP
12.	Kementerian Pertanian	WTP	WTP
13.	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP
14.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WDP	WTP
15.	Kementerian Perhubungan	WTP	WTP
16.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WTP	WTP
17.	Kementerian Kesehatan	WTP	WTP
18.	Kementerian Agama	WTP	WTP
19.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	TMP	WDP
20.	Kementerian Sosial	WDP	WTP
21.	Kementerian Kehutanan	WTP	WTP
22.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP	WTP
23.	Kementerian Pekerjaan Umum	WTP	WTP

www.peraturan.go.id

24.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	WTP	WTP
25.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP
26.	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	WTP	WTP
27.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	TMP	TMP
28.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP
29.	Kementerian Riset dan Teknologi	WTP	WDP
30.	Kementerian Lingkungan Hidup	WTP	WTP
31.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WTP	WDP
32.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP
33.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP
34.	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP
35.	Lembaga Sandi Negara	WDP	WTP
36.	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP
37.	Badan Pusat Statistik	WTP	WTP
38.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP
39.	Badan Pertanahan Nasional	WTP	WTP
40.	Perpustakaan Nasional	WDP	WDP
41.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TMP	WDP
42.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	WTP	WTP
43.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	WTP	WDP
44.	Lembaga Ketahanan Nasional	WDP	WTP

www.peraturan.go.id

45.	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP
46.	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP
47.	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	WDP	WTP
48.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WDP	WTP
49.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	WTP
50.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	WDP	WTP
51.	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WDP
52.	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP
53.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP
54.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WTP	WTP
55.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP
56.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WDP	WTP
57.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WDP	WDP
58.	Badan Informasi Geospasial	TMP	TMP
59.	Badan Standardisasi Nasional	WTP	WTP
60.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP
61.	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP
62.	Arsip Nasional Republik Indonesia	WDP	WTP
63.	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP
64.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP
65.	Kementerian Perdagangan	WTP	WTP
66.	Kementerian Perumahan Rakyat	WTP	WTP
67.	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	WDP	WDP
68.	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP
69.	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP
70.	Komisi Yudisial	WTP	WTP

www.peraturan.go.id

71.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WTP	WTP
72.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WDP
73.	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WTP	WTP
74.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WTP	WDP
75.	Badan SAR Nasional	WTP	WTP
76.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WTP
77.	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	WDP	WDP
78.	Ombudsman RI	TMP	WTP
79.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	WTP	WDP
80.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	WDP	TMP
81.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	WTP	WTP
82.	Sekretariat Kabinet	WTP	WTP
83.	Badan Pengawas Pemilihan Umum	WDP	WDP
84.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	TMP	WDP
85.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	TMP	WDP
86.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang	WDP	WDP
87.	Bendahara Umum Negara	WDP	WDP

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

www.peraturan.go.id

Ayat (2)

Dalam rangka perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara, Pemerintah akan melakukan beberapa hal yaitu:

a. meningkatkan kualitas laporan keuangan terutama terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yang masih mendapat opini audit “Wajar Dengan Pengecualian” atau “Tidak Menyatakan Pendapat”.
b. menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam laporan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2014 yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) temuan Sistem Pengendalian Intern dan 9 (sembilan) temuan terkait kepatuhan terhadap perundang-undangan yang belum diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
c. melakukan monitoring penyerapan anggaran secara maksimal dengan tetap berpedoman kepada prinsip efisien, ekonomis, dan efektif dalam pencapaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat sehingga sasaran-sasaran pembangunan tercapai.
d. melanjutkan program pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pegawai di kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah.
e. melaksanakan akuntansi berbasis akrual dan melaksanakan pembinaan secara intensif pada seluruh instansi Pemerintah Pusat.
f. menerapkan dan menyusun statistik keuangan pemerintah (Government Finance Statistics) yang mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah sehingga dapat menyajikan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, serta analisis perbandingan antar negara.

www.peraturan.go.id

g. menyebarluaskan informasi LKPP kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan peningkatan penggunaan informasi LKPP.

h. mengambil langkah-langkah yang terstruktur dalam rangka penyajian informasi Sumber Daya Alam (SDA).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

www.peraturan.go.id